Bapperida
Kabupaten Kepulauan Mentawai

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Kepulauan Mentawai

TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, perlu disusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang adil dan merata serta mengutamakan kesejahteraan rakyat;

b. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pembangunan dan pelayan publik perlu adanya sinkronisasi tugas fungsi setiap perangkat daerah dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah setelah rencana pembangunan jangka menengah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Mentawai sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Kepulauan Mentawai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
    c. bab III memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
    d. bab IV memuat program, kegiatan sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
    e. bab V memuat penutup.
(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
    a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan tercantum dalam Lampiran I;
    b. Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran II;
    c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam Lampiran III;
    d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan tercantum dalam Lampiran IV;
    e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tercantum dalam Lampiran V;
    f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran VI;
    g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam Lampiran VII;

h. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tercantum dalam Lampiran VIII;
i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran IX;
j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercantum dalam X;
k. Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran XI;
l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tercantum dalam Lampiran XII;
m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam Lampiran XIII;
n. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tercantum dalam Lampiran XIV;
o. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tercantum dalam Lampiran XV;
p. Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran XVI;
q. Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran XVII;
r. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah tercantum Lampiran XVIII;
s. Badan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran XIX;
t. Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran XX;
u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum dalam Lampiran XXI;
v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran XXII;
w. Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran XXIII;
x. Kecamatan Siberut Utara tercantum dalam Lampiran XXIV;
y. Kecamatan Siberut Tengah tercantum dalam Lampiran XXV;
z. Kecamatan Siberut Barat tercantum dalam Lampiran XXVI;
aa. Kecamatan Siberut Barat Daya tercantum dalam Lampiran XXVII;
bb. Kecamatan Siberut Selatan tercantum dalam Lampiran XXVIII;
cc. Kecamatan Sipora Utara tercantum dalam Lampiran XXIX;
dd. Kecamatan Sipora Selatan tercantum dalam Lampiran XXX;
ee. Kecamatan Pagai Utara tercantum dalam Lampiran XXXI;
ff. Kecamatan Pagai Selatan tercantum dalam Lampiran XXXII; dan
gg. Kecamatan Sikakap tercantum dalam Lampiran XXXIII;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan dalam hal:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra kurang dari 2 (dua) tahun.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 19 Desember 2025

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

Diundangkan di Tua Pejat
pada tanggal 19 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2025 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar isi i
Daftar Tabel ii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 26
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 27
3.3 Strategi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 32
3.4 Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 33

BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan 35
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 50

BAB V PENUTUP 54

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Jabatan..... 14
Tabel 2. 2.Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Status Kepegawaian 15
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beradsarkan kualifikasi pendidikan 16
Tabel 2.4 Kondisi Aktual Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....16
Tabel 2. 5 Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai 2020-2024 17
Tabel 2. 6 Capaian Rapor Pendidikan Tahun 2020-2024 19
Tabel 2. 7 Capaian Indikator SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Rapor Pendidikan 19
Tabel 2. 8 Capaian Kinerja Pendanaan 20
Tabel 2. 9 Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayan 24
Tabel 3. 1 Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029.....26
Tabel 3. 2 Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 28
Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .30
Tabel 3. 4 Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029.....32
Tabel 3. 5 Penahapan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....33
Tabel 3. 6 Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 33
Tabel 4. 1 Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan 37
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama 2025-2030..... 50
Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kunci 2025-2030 52

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan tujuan bernegara “untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” merupakan amanat cita-cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai abadi serta berkeadilan sosial. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan oleh karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban menjamin setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh layanan Pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender.

Dalam kerangka pemerintahan daerah, pembangunan sumber daya manusia melalui upaya pendidikan dan pengarusutamaan kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pembangunan pendidikan nasional dan pengarusutamaan kebudayaan di daerah merupakan pelayanan wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagai upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah untuk dapat menjamin kepastian setiap warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai memperoleh Pendidikan yang berkualitas, tersedia merata dengan biaya terjangkau, sesuai dengan kebutuhan serta berdaya saing untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Oleh karena itu, Pembangunan Pendidikan dan kebudayaan di daerah membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun Pembangunan Pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah membagi urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, demikian pula kebudayaan sebagai urusan pemerintahan wajib yang mendukung pelayanan dasar. Untuk itu, penyelenggaraan urusan Pendidikan dan kebudayaan di Daerah harus dapat dilaksanakan sebagai bagian dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta Masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam rangka melaksanakan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah, menuangkan kebijakan program dan kegiatan yang terencana, terarah, dan terintegrasi dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam skala nasional dalam sebuah perencanaan strategis dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Surat Edaran Bupati No. 110.3.4.2-176 Tahun 2025 dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Penjabaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 yakni mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan yang inklusif, responsif dan berkualitas sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian Visi Misi RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawau 2025-2045 yakni Terwujudnya Kepulauan Mentawai yang Maju Berkelanjutan dan Bermartabat menjadi arah dan pedoman pembangunan menuju Mentawai Emas 2045. Tentunya ini juga merupakan sinergitas dari RPJMN 2025-2029 dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kerangka acuan untuk merencanakan, mengembangkan, dan meningkatkan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam upaya mewujudkan tercapainya peningkatan kapasitas SDM Kabupaten Kepulauan Mentawai guna mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan serta berdaya saing. Merujuk pada konsepsi Kecakapan Abad 21 yang dirujuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merumuskan kristalisasi nilai-nilai utama pendidikan, peningkatan kapasitas SDM diarahkan untuk mengembangkan karakter (watak), kompetensi (kebisaan), dan literasi (kemelekan). Dengan peningkatan karakter, diharapkan SDM memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada lingkungan yang dinamis. Dengan peningkatan kompetensi, diharapkan SDM memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Dengan peningkatan literasi diharapkan SDM memiliki kemampuan menerapkan kecakapan dasar dalam kehidupannya. Tercapainya peningkatan kapasitas SDM akan membawa pengaruh yang signifikan pada keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di berbagai bidang, sehingga pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dapat diraih secara berkualitas dan terjaga keberlanjutannya.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 dalam tahapan penyusunannya didasari atas analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhatikan kekuatan dan potensi sumber daya, kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tangangan yang dihadapu. Isu Strategis dan paradigma pembangunan yang memiliki keterkaitan kuat dengan permasalahan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan bahan kajian dalam perumusan kebijakan, strategi sampai dengan program dan kegiatan. Tujuannya adalah agar rencana strategis yang dibangun mampu menggambarkan berbagai upaya dalam mengatasi, maupun menuntaskan permasalahan pendidikan dan kebudayaan. Permasalahan pendidikan dan kebudayaan serta kondisi aktual yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini dirumuskan dalam isu-isu strategis dan disusun berdasarkan skala prioritas. Penjabaran tujuan Pembangunan Pemerintah Daerah dirumuskan dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Jangka Menengah. Sedangkan langkah-langka konkret dalam kontribusinya mewujudkan cita-cita nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

1. Undang Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
6. Undang Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);
7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757 dan ditetapkan pada 5 Januari 2022);
8. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023, dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 677);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan RENSTRA Tahun 2025-2029 antara Lain:

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050- 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
b. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Mengatur Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 ini adalah tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai didalamnya dilengkapi dengan rencana pembangunan tahunan dengan memuat perkiraan target-target pencapaian kinerja tahunan.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah:

1. Mendiskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus memformulasikan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD 2025-2029 Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Menyediakan sebuah dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan arah kebijakan strategis pembangunan jangka menengah maupun pembangunan jangka panjang daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Menjamin konsistensi perencanaan tahunan (Renja) dengan rencana strategis lima tahunan (Renstra), sehingga program dan kegiatan yang disusun setiap tahun memiliki dasar yang jelas, terukur, dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian umum yang menjelaskan dasar dan alasan disusunnya Renstra. Substansi yang dimuat meliputi latar belakang yang menggambarkan kondisi objektif penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, dasar hukum yang menjadi pijakan yuridis penyusunan, maksud dan tujuan yang ingin dicapai, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran susunan isi dokumen secara keseluruhan. Dengan adanya bab ini, pembaca memperoleh pemahaman awal mengenai konteks penyusunan Renstra.

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bab ini menyajikan kondisi faktual penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Uraian meliputi gambaran pelayanan yang telah dan sedang berjalan, capaian kinerja, serta tantangan yang dihadapi. Selain itu, dibahas pula permasalahan utama yang ditemukan serta isu-isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan selama periode perencanaan 2025-2029. Bab ini dimaksudkan untuk menjadi dasar analisis dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran yang lebih terukur, serta strategi yang ditempuh untuk mewujudkannya. Arah kebijakan juga dijelaskan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menetapkan program dan kegiatan, sehingga konsisten dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Dengan demikian, bab ini berfungsi sebagai jembatan antara analisis permasalahan dengan rencana program dan kegiatan.

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029;

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029;

3.3 Strategi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029;

3.4 Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjabarkan rencana operasional yang akan dilaksanakan selama periode Renstra. Uraian meliputi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lengkap dengan indikator kinerja serta target tahunan. Penyajian bab ini memberikan kejelasan mengenai langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Dengan adanya bab ini, dokumen Renstra dapat menjadi pedoman implementasi pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan secara terukur dan akuntabel.

4.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Menjelaskan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Merupakan Hasil cascading dari Tujuan Sasaran *outcome* dan *output* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjelaskan Target Kinerja Pencapaian Tujuan Sasaran Renstra OPD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan layanan pendidikan dan kebudayaan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.

b. Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai fungsi :

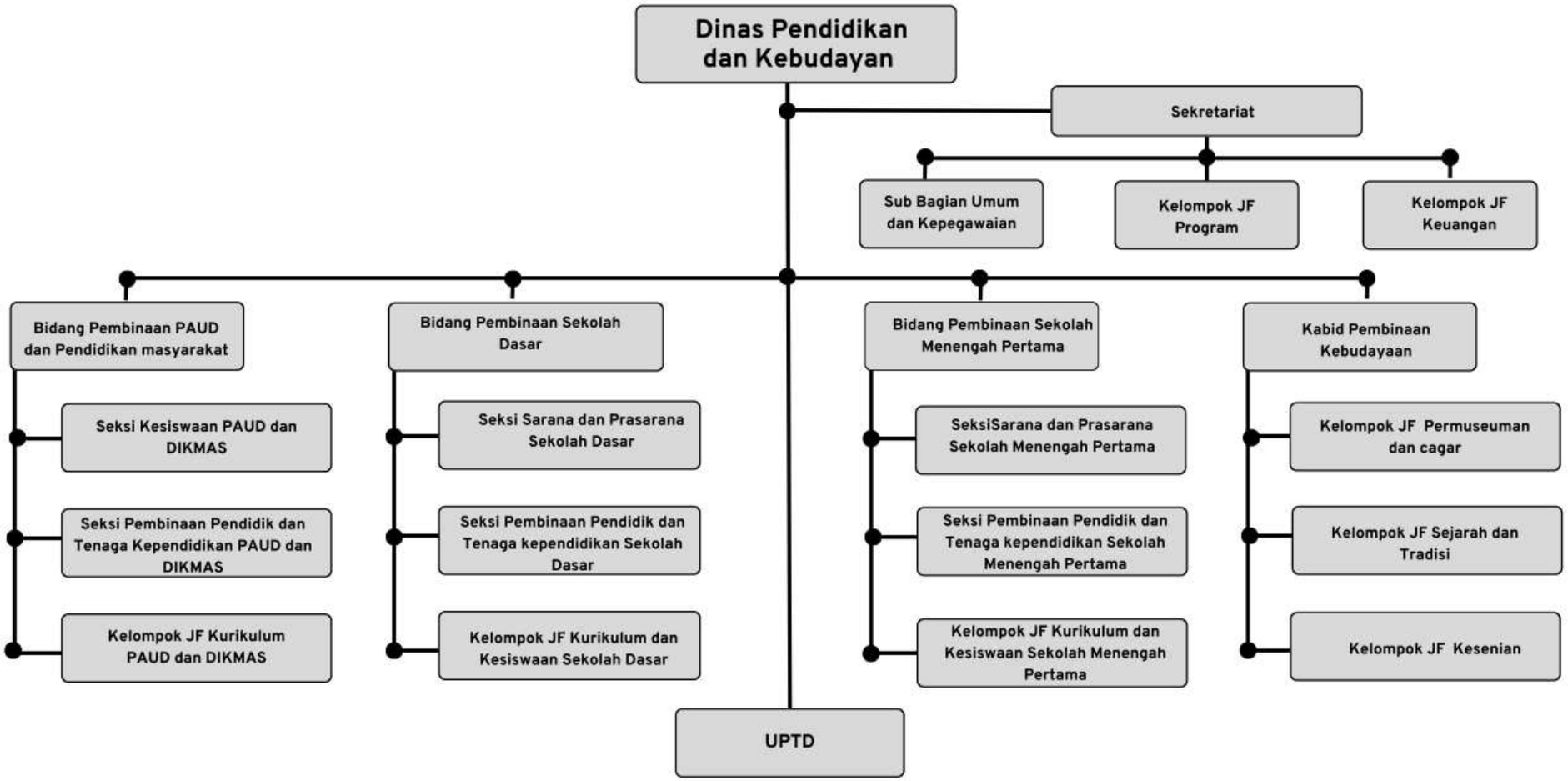
1 perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2 pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
3 pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
4 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
   a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan;
   c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program.
3. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
   a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan PendidikanMasyarakat;
   b) Seksi Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan
   c) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
   a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar;
   b) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar; dan
   c) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
   a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
   b) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
   c) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
6. Bidang Kebudayaan 3 (tiga) Seksi terdiri dari :
   a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Permuseuman dan Cagar Budaya;
   b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sejarah dan Tradisi;
   c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kesenian.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



A. Kepala Dinas
   1. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah .
   2. Untuk melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada angka (1) diatas, Dinas menyelenggarakan fungsi:
      a. perumusan kebijakan Daerah urusan pendidikan dan kebudayaan;
      b. pelaksanaan kebijakan urusan pendidikan dan kebudayaan;
      c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pendidikan dan kebudayaan;
      d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pendidikan dan kebudayaan; dan
      e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris
   1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas;
   2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatas, sekretariat menyelenggarakan fungsi:
      a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
      b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Dinas;
      c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas;
      d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
      e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas; dan
      f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
      1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
         a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas;
         b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
         c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
         d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup Dinas;
         e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas;
         f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
         g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Sub Substansi Keuangan mempunyai tugas:
   a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
   b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas; dan

   melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Program mempunyai tugas:
   a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup Dinas;
   b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Dinas;
   c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
1. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, peserta didik dan pembangunan karakter.
2. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini, di bidang pendidikan masyarakat, dan di bidang kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
   b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan di bidang kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat;
   c. Penyapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan di bidang kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

   1) Seksi Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas:
      a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
      b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
      c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

2) Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas:
   a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
   b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
   c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas:
   a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
   b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
   c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

D. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
1. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sekolah dasar.
2. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Dasar, di bidang pembindaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Dasar;
   b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Dasar, di bidang pembindaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Dasar;
   c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Dasar, di bidang pembindaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Dasar; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas:
   a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
   b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Dasar; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

2) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas:
a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang seksi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang seksi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang seksi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar mempunyai tugas:
a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Dasar;
b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan kesiswaan Sekolah Dasar;
c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kurikulum dan kesiswaan SD; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

E. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

1. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pembinaan sekolah menengah pertama.
2. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana sekolah menengah pertama, di bidang pembindaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan bidang kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana sekolah menengah pertama, di bidang pembindaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan bidang kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama;
c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana sekolah menengah pertama, di bidang pembindaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar dan bidang kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:
a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sarana dan prasarana sekolah menengah pertama; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

2) Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:
a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:
a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama;
b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama;
c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kurikulum dan kesiswaan sekolah menengah pertama;dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

F. Bidang Kebudayaan

1. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan.
2. Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang permuseuman dan cagar budaya, bidang sejarah, dan tradisi dan di bidang kesenian;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang permuseuman dan cagar budaya, bidang sejarah, dan tradisi dan di bidang kesenian;
c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang permuseuman dan cagar budaya, bidang sejarah, dan tradisi dan di bidang kesenian; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Permuseuman dan Cagar Budaya mempunyai tugas:
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang permuseuman dan cagar budaya;
b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang permuseuman dan cagar budaya;
c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang permuseuman dan cagar budaya; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas:
   a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sejarah dan tradisi;
   b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah dan tradisi;
   c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sejarah dan tradisi; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesenian mempunyai tugas:
   a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesenian;
   b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian;
   c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kesenian; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a. Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 sebanyak 3.182 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Seksi	6
5	Kepala subbagian	1
6	Kelompok Jabatan Fungsional	8
7	Staff Dinas/UPT (ASN dan Non ASN)	83
8	Kepala SD (Negeri dan Swasta)	136
9	Kepala SMP (Negeri dan Swasta)	35
10	Pengawas SD	10
11	Pengawas SMP	2
12	Guru TK/PAUD	267
13	Guru SD (Negeri dan Swasta)	1.724
14	Tenaga Kependidikan SD (ASN dan Non ASN)	21
15	Guru SMP (Negeri dan Swasta)	572
16	Tenaga Kependidikan SMP (ASN dan Non ASN)	17
17	Guru PKBM	295
JUMLAH		3182

Data diolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per Juli 2025

Data jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Status Kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	URAIAN	PNS	PPPK	NON ASN	SWASTA
1	Kantor Dinas Pendidikan	44	-	59	-
2	Kepala Sekolah SD	127	-	0	9
3	Kepala Sekolah SMP	28	-	-	7
4	Pengawas SD	10	-	-	-
5	Pengawas SMP	2	-	-	-
6	Guru TK/Paud	-	-	-	267
7	Guru SD	685	417	540	82
8	Guru SMP	182	197	134	59
9	Tenaga Kependidikan SD	3	-	15	3
10	TenagaKe pendidikan SMP	7	-	9	1
11	Guru PKBM	-	-	-	295
JUMLAH		1088	614	757	723
TOTAL JUMLAH		3182			

Data diolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perJuli 2025

Dari tabel 2.2 diatas, jumlah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan status kepegawaian terdiri dari 1.088 pegawai PNS, 614 pegawai PPPK Guru, 757 Pegawai Non ASN (Guru dan Tenaga Administrasi di kantor dinas pendidikan dan di TU sekolah), serta 723 pegawai swasta yang berada pada sekolah swasta.

Data jumlah Guru/Pendidik/Tenaga Administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada jenjang PAUD, TK, SD, SMP dan PKBM berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	URAIAN	SMA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3
1	Kantor Dinas	25	-	1	5	65	7	-
2	Pengawas SD	-	-	-	-	10	-	-
3	Pengawas SMP	-	-	-	-	1	1	-
4	Guru TK dan PAUD	203	-	8	-	56		-
5	Kepala Sekolah SD	5	-	7	-	124	-	-
6	Kepala Sekolah SMP	-	-	-	-	35	-	-
7	Guru Jenjang SD	473	-	-	46	1202	3	-
8	Guru Jenjang SMP		0	0	7	562	3	-
9	Tendik Jenjang SD	15	-	-	3	3	-	-
10	Tendik Jenjang SMP	8	-	-	-	9	-	-
11	Guru PKBM	95	-	-	-	200	-	-
JUMLAH		824	0	16	61	2267	14	0
JUMLAH TOTAL		3182						

Data diolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per Juli 2025

b. Sarana dan Prasarana

Kondisi aktual sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.4
Kondisi Aktual Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Perangkat Daerah

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI		KET
			BAIK	RUSAK BERAT	
1	Sepeda Motor	43	32	11	
2	Mobil	3	3	-	
3	Laptop	70	55	15	
4	P.C Unit	19	15	4	
5	Printer	34	27	7	
6	Layar /Projector	2	2	-	
7	LCD Projector/Infocus	3	3	-	
8	Meja	69	67	2	
9	Kursi	138	126	12	
10	Kursi Tamu/Sova	2	2	-	
11	AC	24	20	4	
12	AC Standing	1	-	1	
13	Lemari	25	24	1	
14	Scaner	1	1	-	
15	Mesin Boat/Speed Boat	4	-	4	

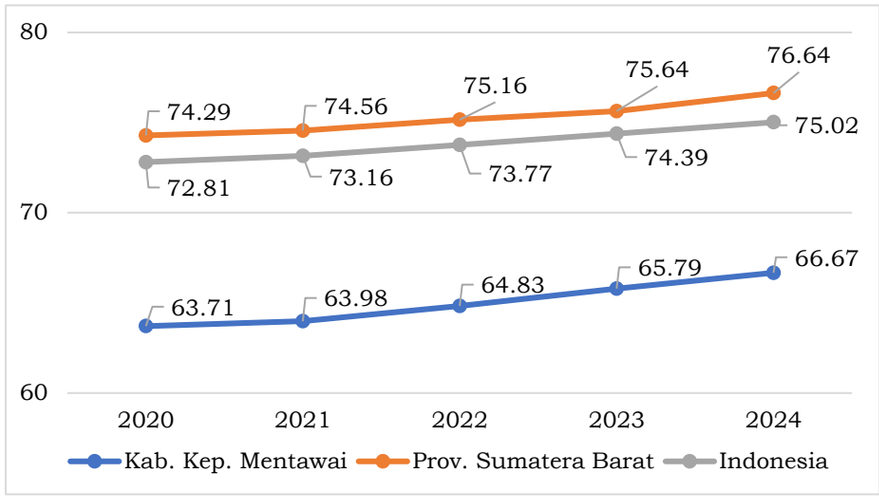
Data diolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perJuli 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai menempati posisi yang strategis bagi pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berupaya membuat program dan kegiatan yang mampu mendukung dan berkontribusi dalam mencapai tujuan utama pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Selama 5 (lima) tahun sebelumnya telah dilakukan beberapa inisiasi dan trobosan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Ada beberapa keberhasilan yang telah dicapai, namun tentu saja masih ada kelemahan atau hasil yang kurang memuaskan.

Hasil pembangunan pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak tahun 2020-2024 tergambar pada beberapa indikator agregat. Selama kurun waktu tersebut, pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan skala prioritas yang diakselerasikan melalui berbagai kebijakan, strategi dan program. Hasil-hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang dicapai merupakan landasan yang berkelanjutan bagi pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada tahun berikutnya sekaligus sebagai peluang untuk pengembangan layanan pendidikan dan pengarusutamaan kebudayaan. Sedangkan kekurangan maupun hasil yang belum dicapai menjadi tantangan yang harus diselesaikan pada periode perencanaan yang akan datang. Tantangan dan peluang tersebut yang dipengaruhi oleh kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi kunci keberhasilan pembangunan pendidikan yang akan datang.

Grafik 2.2
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pembangunan pendidikan merupakan pembangunan manusia seutuhnya, untuk melihat upaya kinerja pembangunan manusia yang lebih luas perlu memperhatikan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup intelektual dan standar hidup layak. Untuk mengukur kinerja pembangunan pendidikan tersebut, digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran per kapita. Berikut tampilan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kepulauan Mentawai menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Grafik 2.2 menunjukkan IPM Kabupaten Kepulauan Mentawa tahun 2020 sebesar 63,71 mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 63,98 dan di tahun 2024 menjadi sebesar 66,67. Tren peningkatan ini cukup signifikan jika dilihat dari tahun 2021-2020 dengan kenaikan 0,27 poin sedangkan tahun 2022-2021 kenaikan 0,85 poin dan tahun 2023-2022 dengan kenaikan 0,96 poin tahun 2024-2023 dengan kenaikan sebesar 0,88 poin. Peningkatan ini menjadi hal yang baik dalam upaya menghadirkan kesejahteraan yang sebenarnya kepada masyarakat.

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Capaian kinerja pelayanan pendidikan dan kebudayaan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda peningkatan pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan beserta peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,82	12,89	12,89	12,9	12,91
2.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,09	7,2	7,48	7,76	8,03
3.	Angka melek huruf	Persen	97,75	98,46	98,76	99,66	99,33
4.	Rapor Pendidikan	Nilai	-	1,65	48,51	52,19	56,04
5.	APK PAUD	Persen	46,2	33,57	36,68	53,68	53,14
6.	APK SD	Persen	112,33	110,24	106,29	107,95	104,59
7.	APK SMP	Persen	119,41	90,9	89,16	104,31	86,41

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
8.	APM SD /MI/ paket A	Persen	90,45	89,66	87,77	88,74,	88,19
9.	APM SMP SMP /MTS/ Paket B	Persen	76,97	62,9	60,92	60,77	59,07
10.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	-	-	-	3,02	3,94
11.	Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	Persen	100	100	100	100	100
2.	persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1	Persen	-	82,38	59	69,51	76,61
13.	Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan	Persen	90	90	90	89,94	89,09
14.	Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi	Persen	24,50	26	26,63	27,92	52,53
15.	Persentase PKBM Terakreditasi B	Persen	15,38	23,08	23,08	21,43	28,57
16.	Persentase TK Terakreditasi B	Persen	7,61	7,61	10,34	10,89	18,82
17.	Persentase SD Terakreditasi B	Persen	52,24	55,22	54,48	54,07	51,11
18.	Persentase SMP Terakreditasi B	Persen	46,88	46,88	41,18	40	42,86
19.	Indeks pemajuan kebudayaan	Persen	-	-	-	-	NA
20.	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang lestari	Persen	-	-	-	80,95	44,44

Sumber : Olahan Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Hal ini juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Atas dasar peraturan tersebut, pendidikan juga wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal yang disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang mengatur tentang Jenis dan penerima Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, pencapaian SPM Pendidikan dan pelaporan serta evaluasi.

Berdasarkan regulasi yang ada, indikator SPM Pendidikan digunakan pemerintah daerah sebagai referensi perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan kualitas pendidikan. Untuk memenuhi SPM Pendidikan, dibutuhkan kolaborasi pemangku kepentingan di daerah dalam melakukan Perencanaan Berbasis Data (PBD) dengan Rapor Pendidikan.

Rapor Pendidikan adalah laporan yang menampilkan kondisi dan capaian pendidikan di berbagai level, mulai dari satuan pendidikan, daerah (Kab/Kota, Provinsi), hingga nasional. Laporan ini berisi indikator-indikator terpilih dari Profil Pendidikan, yang merefleksikan prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Rapor Pendidikan dirancang untuk menjadi alat ukur dan evaluasi sistem pendidikan, serta sebagai acuan bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk melakukan refleksi diri dan peningkatan kualitas pendidikan.

Capaian standar pelayanan minimal yang mencakup pelayanan dasar pada Rapor Pendidikan tahun 2020-2024 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Capaian Rapor Pendidikan Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Nilai Rapor Pendidikan	Kategori Capaian
1	2020	-	
2	2021	47,66	Belum tuntas
3	2022	48,51	Belum tuntas
4	2023	52,19	Belum tuntas
5	2024	56,04	Belum tuntas

sumber: data rapor pendidikan

Capaian Rapor Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 berada pada angka 56,04. Jika dilihat pada tabel 2.6 Rapor Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai berada dalam kategori belum tuntas atau <60. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih memerlukan peningkatan yang signifikan, baik dari aspek mutu pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, kompetensi pendidik, maupun pengelolaan satuan pendidikan. Capaian ini menjadi dasar penting bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperkuat strategi pembangunan pendidikan yang lebih terarah dan berkelanjutan, guna mencapai target capaian rapor pendidikan yang optimal di tahun-tahun mendatang. Capaian Rapor Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat diterjemahkan dalam beberapa indikator utama dalam rentang waktu 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2021-2024 pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Capaian Indikator SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Jenjang	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	%	PAUD	66.58	53.93	63.84	64,26
2	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	PAUD	32.26	26.67	27.47	28,03
3	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	PAUD	14.29	15.33	13.48	18,08
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	%	SD/ SMP	98.82	98.87	98.67	98,65
5	Skor Kemampuan Literasi	%	SD	44.82	45.5	46,9	47,28
6	Skor Kemampuan Literasi	%	SMP	42,12	39,73	45,64	40,28
7	Skor Kemampuan Numerasi	%	SD	29,08	35,52	34,74	48,39
8	Skor Kemampuan Numerasi	%	SMP	29,4	26,69	40,96	36,77
9	Iklim Keamanan	%	SD	65.94	65.24	65.57	68,23
10	Iklim Keamanan	%	SMP	65.23	63.71	64.79	62,28
11	Iklim Kebinekaan	%	SD	57.81	66.25	68.3	67,45
12	Iklim Kebinekaan	%	SMP	57.65	63.94	69.51	66,96
13	Iklim Inklusivitas	%	SD	52.06	54.25	50.23	54,39
14	Iklim Inklusivitas	%	SMP	53.5	54.8	53.37	53,11

Sumber : Olahan Rapor Pendidikan Kab. Kepulauan Mentawai 2021-2024

Berdasarkan laporan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan mentawai 5 (lima) tahun terakhir. Diperoleh informasi bahwa kinerja institusi termasuk dalam kondisi di atas rata-rata. Hal ini setidaknya tercermin dari kombinasi antara realisasi fisik keterlaksanaan masing-masing program dan kegiatan dengan realisasi anggaran, yang seluruhnya berada di atas atau sama dengan rata-rata.

Kondisi ini juga didukung oleh hasil analisis data dan informasi tentang sasaran program dan kegiatan dalam rencana kerja masing-masing untuk 5 (lima) tahun. Secara umum program dan kegiatan tersebut terlaksana sesuai target.

Berikut tabel anggaran dan realisasi pendanaan program dan kegiatan yang di rincikan secara spesifik selama masa periode 2020-2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Pendanaan

NO	URAIAN	JUMLAH PAGU (APBD-P)	REALISASI KEUANGAN	%
1.	Capaian Kinerja TA. 2020	169.999.864.026	162.239.644.432	95,44
2.	Capaian Kinerja TA. 2021	176.534.959.736	171.356.914.333	97,07
3.	Capaian Kinerja TA. 2022	185.238.104.126	165.465.404.053	89,33
4.	Capaian Kinerja TA. 2023	249.606.264.050	226.067.733.274	90,57
5	Capaian Kinerja TA. 2024	236.559.357.686	210.993.294.791	89,19

Sumber : Olahan Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pendidikan dan kebudayaan mencakup seluruh individu, kelompok masyarakat, dan lembaga yang berinteraksi dengan sistem pendidikan dan kebudayaan. Ini termasuk siswa, guru, orang tua, komunitas lokal, lembaga pendidikan, lembaga kebudayaan, serta pemerintah. Tujuan utama layanan ini adalah untuk mengembangkan potensi individu, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pemajuan kebudayaan. Secara umum, kelompok sasaran layanan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Peserta Didik:
   - Anak usia dini pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ditujukan untuk anak-anak usia dini (0-6 tahun) untuk mengembangkan kemampuan dasar mereka.
   - Murid sekolah reguler pada jenjang SD dan SMP yang merupakan sasaran utama layanan pendidikan formal.
   - Pendidikan non-formal dan pendidikan masyarakat ditujukan untuk orang dewasa dan remaja yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.
   - Anak-anak dari kelompok rentan, seperti anak berkebutuhan khusus (ABK), anak dari keluarga kurang mampu, anak korban kekerasan, serta anak putus sekolah, yang memerlukan pendekatan layanan pendidikan yang adil, adaptif, dan berbasis inklusi sosial.
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

   Layanan pendidikan juga ditujukan untuk guru, dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka.
3. Pelaku Seni dan Budaya:

   Kelompok sasaran layanan kebudayaan adalah semua orang yang terlibat dalam kebudayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
   - Masyarakat secara umum menjadi sasaran utama layanan kebudayaan, karena kebudayaan adalah milik bersama dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Layanan kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kontribusi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.
   - Komunitas adat memegang peranan penting dalam pelestarian kebudayaan lokal. Layanan kebudayaan dirancang untuk mendukung dan memperkuat peran komunitas adat dalam menjaga warisan

budaya mereka, termasuk ritual, tradisi, pengetahuan tradisional, dan seni.

- Individu juga menjadi sasaran layanan kebudayaan, terutama dalam konteks pendidikan dan pengembangan potensi kreatif. Layanan kebudayaan dapat membantu individu meningkatkan pemahaman, apresiasi, dan keterampilan dalam bidang kebudayaan.
- Lembaga pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi, memainkan peran krusial dalam membentuk generasi penerus yang memiliki kesadaran akan pentingnya kebudayaan. Layanan kebudayaan dapat mendukung kurikulum pendidikan yang memasukkan unsur-unsur kebudayaan, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong kreativitas dan partisipasi dalam bidang kebudayaan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak dapat bekerja secara mandiri. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi elemen penting dalam menciptakan pelayanan pendidikan yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Keterlibatan mitra strategis, baik dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat, memperkuat pelaksanaan program dan kebijakan pendidikan di daerah.

Selama ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan layanan pendidikan. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain:

1. Dinas Kesehatan, dalam pelaksanaan program UKS, pemberian makanan tambahan bagi siswa, skrining kesehatan peserta didik, serta promosi kesehatan di lingkungan sekolah.
2. Dinas Sosial, dalam penanganan siswa dari keluarga tidak mampu, program perlindungan anak, dan integrasi data bantuan pendidikan.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam mendukung akurasi data peserta didik melalui dokumen kependudukan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB), dalam penguatan lembaga PAUD desa dan pelaksanaan program PAUD Holistik-Integratif.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam pengembangan sistem informasi pendidikan dan layanan berbasis digital.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam sinkronisasi program prioritas pendidikan dengan rencana pembangunan daerah.
7. Inspektorat dan BKPSDM, dalam pembinaan kinerja dan integritas tenaga pendidik serta pengelolaan sumber daya manusia pendidikan.
8. Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum, seperti Polres dan Polsek, dalam program Sekolah Ramah Anak, pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan, serta perlindungan terhadap peserta didik.
9. Pemerintah Desa dan Kecamatan, sebagai mitra koordinatif dalam pelaksanaan program PAUD, penguatan peran komite sekolah, fasilitasi pendidikan masyarakat, serta penanganan kasus putus sekolah di tingkat lokal.
10. Lembaga Pendidikan dan Kesehatan, termasuk, PKBM, puskesmas, dan pihak perguruan tinggi, yang terlibat dalam pelaksanaan program

peningkatan mutu pendidikan, pelatihan guru, serta pembinaan pendidikan nonformal dan inklusif.

11. Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial, seperti PKK, Karang Taruna, Komite Sekolah, Forum Anak, serta organisasi profesi guru (PGRI dan sejenisnya), yang berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis partisipasi dan budaya lokal.
12. Masyarakat adat, komunitas pengrajin, seniman, Sanggar Seni, untuk berkolaborasi untuk melestarikan dan memajukan Budaya Mentawai.

Kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan mitra-mitra tersebut terus diperkuat dalam kerangka tata kelola pendidikan yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Ke depan, sinergi ini akan dikembangkan melalui forum koordinasi lintas sektor, kemitraan berbasis regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan yang lebih inklusif dan berdaya saing di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan satu satunya kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang terletak di wilayah terluar bagian barat sumatera dan dihubungkan oleh laut dari daratan sumatera. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki karakteristik wilayah yang beragam terdiri dari wilayah dataran berbukit dan memiliki 4 pulau besar (Pulau Pagai Uatara, Pulau Pagai Selatan, Pulau Sipora dan Pulau Siberut) dan 103 pulau kecil lainnya. Hal ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai berpotensi dalam mengolah sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang lebih optimal. Wilayah geografis ini bukan semata-mata menjadi kendala, namun harus diposisikan sebagai anugerah sekaligus menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk berupaya dan berkomitmen agar pembangunan pendidikan tersebut dapat diakses merata dan berkeadilan di seluruh pelosok Dusun, Desa dan Kecamatan. Selain itu, peluang dengan adanya kawasan pariwisata, kelautan, dan pertanian yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan tantangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dapat menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkompetensi dan dibutuhkan dalam menunjang dan mendukung pelaksanaan kegiatan strategis tersebut.

Angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2024 sebesar 8,03 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berusia sampai 15 tahun hanya mencapai sekolah pada jenjang SMP kelas 8. Sehingga pendidikan kesetaraan masih menjadi prioritas untuk ditingkatkan sebagai upaya pemerataan akses layanan pendidikan di seluruh pelosok desa maupun kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemantapan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan terjamin menjadi program yang berkelanjutan untuk peningkatan keterlayanan masyarakat terhadap akses pendidikan. Peningkatan angka partisipasi murni dengan menekankan layanan pendidikan sesuai dengan usia penduduk dan jenjang pendidikan menjadi perhatian agar tidak terjadi ketimpangan daya serap penduduk terhadap mutu pendidikan. Selain itu, upaya peningkatan sarana prasarana pendudukan di seluruh jenjang pendidikan masih menjadi prioritas pembangunan pendidikan, termasuk menuntaskan rehabilitasi sekolah rusak berat dan rusak sedang, pemenuhan standar sarana prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan serta upaya pemenuhan standar nasional pendidikan.

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang menjadi tujuan tombak pelayanan pendidikan. Jumlah pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D4 jenjang pendidikan anak usia dini sebesar 18,08% sedangkan jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) 76,61%. Masih banyaknya jumlah pendidik yang belum berkualifikasi S1/D4 ini antara lain lebih banyak pada jenjang pendidikan anak usia dini. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengoptimalkan peningkatan kompetensi dan kualifikasi bagi pendidik maupun tenaga kependidikan, yakni dengan membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh pendidik yang berkualifikasi S1/D4 PAUD untuk memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Beberapa identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai baik secara internal maupun eksternal yaitu:

1. Belum semua penduduk usia 5 sampai 6 tahun memperoleh akses pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Sebagaimana ditunjukkan dengan capaian Angka Partisipasi Kasar Anak usia dini pada tahun 2024 yaitu 28,12%. Demikian pula penduduk usia tersebut belum mendapatkan akses pendidikan anak usia dini yang dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah jenjang PAUD sebesar 64,25%, sehingga masyarakat perlu didorong melalui upaya penyadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini selain daripada penyediaan akses layanan pendidikan anak usia dini oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
2. Masih terdapat sarana prasarana yang belum lengkap pada setiap jenjang yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masih banyak sarana prasarana yang tidak layak atau kondisi rusak berat/ringan yang perlu di rehab atau di revitalisasi;
3. Rendahnya sekolah terakreditasi B disetiap jenjang layanan pendidikan. Akreditasi minimal B jenjang PAUD 18,82%, Jenjang SD 51,11%, jenjang SMP 42,86% dan Sekolah Non Formal (PKBM) 28,57%. Hal ini mengakibatkan rendahnya capaian SPM Pendidikan melalui Rapor Pendidikan;
4. Masih banyaknya Pendidik yang belum berkualifikasi S1/D4 yaitu jenjang PAUD 18,08, Jenjang Pendidikan Dasar 76,61%;
5. Masih terdapat siswa dengan Nilai Literasi dan Numerasi dibawah 50% Jenjang SD dan SMP. Hal ini dapat dilihat pada Capaian SPM Pendidikan melalui Rapor Pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya;
6. Pendistribusian guru disetiap sekolah kurang optimal yang mengakibatkan Guru Sertifikasi tidak kebagian jam mengajar sehingga tidak menerima hak tunjangan sertifikasi;
7. Masih terdapat jabatan kepala sekolah yang berstatus Plt (Pelaksana Tugas) atau Plh (Pelaksana Harian) pada Jenjang SD dan SMP;
8. Masih ada siswa putus sekolah pada Jenjang SD dan SMP;
9. Masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan dan Lab komputer;
10. Jumlah anak yang tidak sekolah berdasarkan data Capil Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2024 pada usia 7-15 Tahun sebanyak 8468 orang sehingga anak tidak sekolah perlu ditarik kembali melalui pendidikan nonformal (PKBM);
11. Peran dan fungsi komite sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan belum optimal;
12. Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memiliki Museum Daerah sehingga benda-benda budaya yang dimiliki belum dapat disimpan terpusat dan terawat dengan baik;

13. Belum adanya regulasi Peraturan Daerah yang mengatur terkait dengan pengembangan Kebudayaan Daerah;
14. Masih diperlukan penggalian, penelitian potensi kebudayaan (baik ujud benda dan tak benda) dan kesenian daerah yang berkembang di tengah masyarakat;
15. Perlunya pelestarian Seni Tradisional Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Nilai-Nilai Budaya Daerah ke Satuan Pendidikan, termasuk pembinaan seni budaya dan pengadaan alat-alat seni budaya sebagai bahan belajar peserta didik;
16. Pelestarian Budaya Daerah yang sudah ada perlu ditingkatkan;
17. Pembinaan Kelompok Masyarakat Seni Budaya perlu ditingkatkan.

2.2.2 Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis

Isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai berfokus pada upaya peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan sarana prasarana. Ketimpangan akses pendidikan antar pulau, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta rendahnya kompetensi guru dan capaian literasi-numerasi siswa menjadi perhatian utama. Selain itu, penguatan karakter dan pelestarian budaya lokal Mentawai melalui pengembangan kurikulum muatan lokal menjadi bagian penting dalam menjaga identitas daerah di tengah arus globalisasi. Transformasi digital pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola dan pembiayaan pendidikan juga menjadi kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perumusan isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Dukungan masyarakat terhadap pendidikan	Masih ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah	Kesetaraan akses pendidikan	Kesenjangan pendidikan antarnegara	Pemerataan akses pendidikan nasional	Rendahnya partisipasi siswa di wilayah terpencil khususnya jenjang PAUD	Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan
Infrastruktur pendidikan di pusat kabupaten cukup memadai	Sekolah di daerah pedalaman kekurangan ruang kelas dan fasilitas	Pengelolaan tata ruang dan pembangunan berkelanjutan	Ketimpangan infrastruktur global	Pemerataan infrastruktur pendidikan nasional	Ketimpangan fasilitas antar kecamatan	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah tertinggal
Potensi SDM muda yang besar di Mentawai	Kualitas tenaga pendidik belum merata antar wilayah	Pengembangan SDM berkelanjutan	Persaingan global dalam mutu tenaga kerja	Program peningkatan kompetensi guru nasional	Kesenjangan kualitas guru antar pulau	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik
Adanya guru ASN dan	Distribusi guru belum sesuai	Pemerataan tenaga kerja	Mobilitas tenaga	Reformasi manajemen	Kekurangan guru di	Pemerataan tenaga

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
PPPK di berbagai kecamatan	kebutuhan di setiap pulau	dan efisiensi sumber daya	kerja global	ASN pendidikan	pulau kecil	pendidik sesuai kebutuhan wilayah
Jaringan internet mulai tersedia di beberapa sekolah	Akses internet terbatas di sekolah pedalaman	Transformasi digital dan literasi teknologi	Revolusi industri 4.0	Program digitalisasi sekolah oleh Kemendikbud	Terbatasnya akses jaringan di pedalaman	Transformasi digital pendidikan dan penguatan data Dapodik
Alam yang kaya untuk edukasi lingkungan	Minimnya pendidikan lingkungan hidup di sekolah	Konservasi dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan	Perubahan iklim global	Program sekolah hijau (Adiwiyata)	Rendahnya kesadaran lingkungan di sekolah	Penguatan pendidikan lingkungan dan konservasi di sekolah
Nilai gotong royong dan solidaritas masyarakat tinggi	Partisipasi masyarakat dalam mendukung sekolah masih rendah	Pemberdayaan sosial dan kolaborasi masyarakat	Keadilan sosial dan partisipasi global	Kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan SDM	Kurangnya peran masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan	Penguatan peran masyarakat dan komite sekolah dalam mendukung pendidikan
Kekayaan budaya dan bahasa daerah Mentawai	Muatan lokal belum optimal diintegrasikan dalam kurikulum sekolah	Pelestarian budaya dan keberlanjutan sosial	Globalisasi dan homogenisasi budaya	Penguatan karakter bangsa dan pendidikan berbasis budaya	Rendahnya pelestarian budaya lokal di sekolah	Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis budaya Mentawai
Kekayaan seni dan tradisi lokal Mentawai	Minimnya kegiatan ekstrakurikuler berbasis seni budaya	Pengelolaan warisan budaya berkelanjutan	Hilangnya identitas budaya akibat modernisasi	Revitalisasi pendidikan seni budaya nasional	Kurangnya kegiatan pelestarian budaya di sekolah	Revitalisasi pendidikan seni dan budaya Mentawai berbasis kearifan lokal

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra bidang pendidikan dalam kerangka Misi 1 RPJMD: Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas adalah menjamin pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini sesuai dengan norma NSPK yang menekankan wajib belajar 12 tahun dan prinsip nondiskriminasi. Dengan memperluas layanan pendidikan hingga ke pulau-pulau terluar dan wilayah pedalaman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen menciptakan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Selanjutnya, tujuan pendidikan diarahkan pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kebutuhan masyarakat kepulauan. Melalui peningkatan kompetensi pendidik, pemenuhan sarana-prasarana, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta penguatan literasi dan numerasi, diharapkan generasi muda Mentawai dapat berkembang secara responsif terhadap dinamika global maupun kebutuhan lokal. Tujuan ini sekaligus menegaskan pentingnya pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan peserta didik.

Di sisi lain, bidang kebudayaan dalam kerangka Misi 4 RPJMD: Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi diarahkan pada pelestarian dan pengembangan budaya Mentawai. Sejalan dengan norma dan standar NSPK kebudayaan, tujuan ini mencakup inventarisasi, revitalisasi, dan pemanfaatan aset budaya lokal seperti bahasa daerah, seni tradisi, dan ritual adat. Upaya tersebut penting tidak hanya untuk menjaga identitas kultural masyarakat Mentawai, tetapi juga untuk memperkuat kohesi sosial di tengah arus globalisasi. Tujuan lainnya di bidang kebudayaan adalah integrasi nilai dan kearifan lokal dalam pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat. Melalui kurikulum muatan lokal, festival budaya, serta pelibatan komunitas adat, diharapkan budaya Mentawai tetap hidup, diteruskan oleh generasi muda, dan menjadi fondasi ketahanan sosial. Hal ini sejalan dengan prosedur dan kriteria NSPK kebudayaan yang menekankan keterlibatan masyarakat serta keberlanjutan pengelolaan budaya. Adapun target indikator kinerja tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan	Target Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya pendidikan yang berkualitas bagi semua dan Terwujudnya pelestarian budaya	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	8,09	8.22	8,48	8,67	8,85	9,03
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,92	12,93	12,93	12,94	12,95	12,96
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	64	65	66	67	68	100

Secara keseluruhan, tujuan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025–2029 adalah mewujudkan masyarakat Mentawai yang cerdas, berkarakter, dan berbudaya, sesuai dengan arah misi pembangunan daerah. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta kebudayaan yang lestari dan adaptif, percepatan transformasi sosial dan ketahanan budaya dapat dicapai. Tujuan ini sekaligus menjadi landasan strategis dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mentawai yang berkeadilan, responsif, serta berkelanjutan.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan pada tabel 3.2 diatas, maka sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 sebagai realisasi tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan;
   Hal ini menjadi fondasi dalam mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang inklusif dan berkualitas. Pemerataan akses diarahkan pada pemenuhan layanan pendidikan hingga ke pulau-pulau terluar dan daerah terpencil, sehingga setiap anak Mentawai memperoleh hak yang sama untuk bersekolah. Perluasan akses didorong dengan pembangunan sarana prasarana pendidikan, penyediaan layanan pendidikan nonformal, serta program afirmasi bagi peserta didik kurang mampu yang dapat diwujudnyatakan dengan memberikan bantuan perlengkapan sekolah. Sementara itu, peningkatan mutu diwujudkan melalui penguatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, serta pemenuhan standar nasional pendidikan.
2. Meningkatnya pengelolaan, pelindungan, pemajuan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan berbasis kearifak lokal;
   Sasaran kedua adalah meningkatnya pengelolaan, pelindungan, pemajuan, pemanfaatan, dan pengembangan kebudayaan berbasis kearifan lokal. Kebudayaan Mentawai, yang kaya akan bahasa, seni, dan tradisi, merupakan identitas yang harus dijaga sekaligus aset strategis untuk memperkuat ketahanan sosial dan membangun karakter generasi muda. Melalui inventarisasi, revitalisasi, dan pengintegrasian kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan, kebudayaan tidak hanya dilestarikan tetapi juga dikembangkan agar relevan dengan kebutuhan zaman. Pemanfaatan budaya sebagai sumber pembelajaran, media ekspresi, dan daya tarik pariwisata juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi budaya yang berkelanjutan.
   Sasaran ini juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap warisan budaya Mentawai agar tidak punah atau tergerus arus globalisasi. Upaya perlindungan dilakukan dengan melibatkan komunitas adat, tokoh masyarakat, dan generasi muda dalam setiap program kebudayaan. Dengan demikian, kebijakan yang dijalankan tidak hanya top-down, tetapi juga berbasis partisipasi masyarakat. Melalui pengelolaan dan pemajuan budaya, diharapkan terbentuk ketahanan sosial yang kuat, terciptanya ruang ekspresi budaya yang inklusif, serta meningkatnya kebanggaan masyarakat Mentawai terhadap identitas kultural mereka.
3. Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah.
   Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah dalam mengelola urusan pendidikan dan kebudayaan. Hal ini menjadi penting karena keberhasilan program pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas birokrasi dan tata kelola organisasi. Peningkatan kualitas kinerja dilakukan melalui penguatan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbasis data; pengembangan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pendidikan; serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Dengan manajemen kinerja yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mampu memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Adapun target indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
- Wajib belajar 10 tahun sebagai hak setiap warga negara TK-SMP. - Pendidikan dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif. - Standar Nasional Pendidikan - Standar kualifikasi dan kompetensi guru (minimal S1/D4 dan bersertifikat pendidik) - Rasio guru dan murid yang ideal (1 guru : 20–30 siswa). - Minimal sarana belajar (ruang kelas, perpustakaan, laboratorium) sesuai jumlah siswa. - Sekolah terpenuhi akses internet untuk pelaksanaan ANBK. - Rasio guru dan murid yang ideal - Minimal sarana belajar (ruang kelas, perpustakaan, laboratorium) sesuai jumlah siswa - Sekolah terpenuhi akses internet untuk pelaksanaan ANBK.	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas bagi semua dan Terwujudnya pelestarian budaya	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Angka Melek Huruf	99,38 %	99,43 %	99,48 %	99,53 %	99,58 %	99,63 %
			Rapor Pendidikan	60	62,5	65	67,5	70	72,5
			Persentase PKBM Terakreditasi B	30%	32%	34%	36%	38%	40%
			Persentase TK Terakreditasi B	30%	32,5%	35%	37,5%	40%	42,5
			Persentase SD Terakreditasi B	53%	55%	57%	59%	61%	63%
			Persentase SMP Terakreditasi B	44%	46%	48%	50%	52%	54%
			APK PAUD (5-6)	55%	57%	59%	61%	63%	65%
			APK SD/MI/Paket A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			APK SMP/MTS/ Paket B	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			APM SD /MI/ paket A	89%	90%	91%	92%	93%	94%
			APM SMP /MTS/ Paket B	62%	64%	66%	68%	70%	72%
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4,2%	4,3%	4,4%	4,5	4,6	4,7
			Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	50%	53%	56%	59%	62%	65%
			Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	43%	46%	49%	52%	55%	58%
			Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1 Jenjang PAUD	20%	25%	43%	48%	53%	58%

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1 Jenjang Pendidikan Dasar	78%	80%	82%	84%	86%	88%
			Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan	89,5%	90%	90,5%	91%	91,5	92%
			Persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi	55%	57%	59%	61%	63%	65%
		Meningkatkan upaya pengelolaan, pelindungan, pemajuan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan berbasis kearifak lokal	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	62%	64%	65%	66%	68%	100%
			Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)	50%	50%	52%	54%	58%	60%
			Jumlah sanggar yang dibina	5	5	5	5	6	6
		Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai LAKIP	A	A	A	A	A	A
			Jumlah inovasi	2	2	2	2	2	2

Indikator Sasaran strategis pada tabel 3.2 di atas merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih luas sehingga target tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat tercapai dalam 5 tahun ke depan.

Disamping itu, target sasaran strategis dalam memenuhi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan diturunkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan sangat diperlukan sebagai Pelayanan Dasar dan meningkatkan Mutu Pelayanan Dasar, dalam pencapaian dan pemenuhan SPM Pendidikan melalui Rapor Pendidikan yang disediakan oleh Kemendikdasmen.

Rapor Pendidikan membantu satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menyusun rencana tindak lanjut yang tepat. Dengan adanya informasi yang komprehensif dan terstruktur, Rapor Pendidikan diharapkan dapat mendorong perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun				
					2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya pendidikan yang berkualitas bagi semua dan Terwujudnya pelestarian budaya		Rata-Rata lama sekolah (tahun)	tahun	8,09	8.22	8,48	8,67	8,85	9,03
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	tahun	12,92	12,93	12,93	12,94	12,95	12,96
		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	persen	64	65	66	67	68	100
	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Angka Melek Huruf	persen	99,38	99,43	99,48	99,53	99,58	99,63
		Rapor Pendidikan	nilai	60	62,5	65	67,5	70	72,5
		Persentase PKBM Terakreditasi B	persen	30	32	34	36	38	40
		Persentase TK Terakreditasi B	persen	30	32,5	35	37,5	40	42,5
		Persentase SD Terakreditasi B	persen	53	55	57	59	61	63
		Persentase SMP Terakreditasi B	persen	44	46	48	50	52	54
		APK PAUD (5-6)	persen	55	57	59	61	63	65
		APK SD/MI/Paket A	persen	100	100	100	100	100	100
		APK SMP/MTS/ Paket B	persen	100	100	100	100%	100	100
		APM SD /MI/ paket A	persen	89	90	91	92	93%	94
		APM SMP /MTS/ Paket B	persen	62	64	66	68	70%	72
		Pesentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional-sekolah dasar	persen	L=45 N=12	L=48,9 N=13, 94	L=52, 8 N=15, 88	L=56, 7 N=17 ,82	L=60, 6 N=19, 76	L=62, 72 N=21, 36
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi pada asesmen tingkat nasional-SMP	persen	L=47 N=40	L=47,4 7 N= 40,4	L= 47,9 N= 40,92	L= 48,35 N= 41,38	L= 48,8 N= 1,84	L= 49,25 N= 42,3

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun				
					2026	2027	2028	2029	2030
		Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	persen	100	100	100	100	100	100
		Persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1 Jenjang Pendidikan Dasar	persen	78	80	82	84	86	88
		Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan	persen	89,5	90	90,5	91	91,5	92
	Meningkatkan upaya pengelolaan, pelindungan, pemajuan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan berbasis kearifak lokal	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	persen	62	64	65	66	68	100
		Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)	persen	50	50	52	54	58	60
		Jumlah sanggar yang dibina	sanggar	5	5	5	5	6	6
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100
		Nilai LAKIP	Nilai	A	A	A	A	A	A
		Jumlah Inovasi	Jumlah	2	2	2	2	2	2

3.3. Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029

Strategi jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan bagaimana cara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rumusan strategi dalam kurun waktu 5 tahun rencana adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI		
Visi RPJMD KAB. KEPULAUAN MENTAWAI		
KEPULAUAN MENTAWAI MAJU, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA		
MISI 1	Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif dan Berkualitas	
Tujuan	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing	
MISI 4	Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	
Tujuan	Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Berbasis Sosial Budaya dan Lingkungan	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya pendidikan yang berkualitas bagi semua dan Terwujudnya pelestarian budaya	Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan pendidikan	Menyediakan akses pendidikan yang layak dan berkualitas untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Non Formal, Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama secara proporsional
		Menyediakan sarana, prasarana dan utilitas pendidikan yang layak dan berkualitas untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), PendidikanNon Formal, Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
		Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan berkarakter dalam mengembangkan proses pembelajaran yang responsif dan partisipasif
	Meningkatnya pengelolaan, pelindungan, pemajuan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan berbasis kearifak lokal	Meningkatkan pengelolaan. Pemajuan dan pengembangan budaya Daerah
		Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan kesenian daerah sebagai sarana edukasi daya saing daerah
		Melestarikan warisan budaya melalui pencatatan dan pelindungan cagar budaya serta pengembangan museum daerah sebagai sarana edukasi dan rekreasi
		Meningkatkan kecintaan kebudayaan kepada generasi muda
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan program, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta dukungan operasional tugas pegawai.

Penahapan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2026–2030 disusun secara bertahap untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran secara sistematis.

Tabel 3.5
Penahapan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Pendidikan: Pemetaan kondisi sekolah, kebutuhan sarpras, distribusi guru, serta data kultural. Kebudayaan: Inventarisasi aset budaya Mentawai, penyusunan program perlindungan. Kinerja PD: Penguatan perencanaan berbasis data.	Pendidikan: Peningkatan sarana prasarana sekolah dasar dan menengah, program afirmasi siswa miskin, peningkatan kompetensi dasar guru. Kebudayaan: Revitalisasi bahasa daerah & seni tradisi, pelaksanaan festival budaya lokal. Kinerja PD: Implementasi sistem monitoring & evaluasi berbasis digital.	Pendidikan: Perluasan akses internet sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan literasi & numerasi melalui gerakan literasi sekolah. Kebudayaan: Integrasi muatan lokal budaya dalam kurikulum, pembinaan komunitas seni. Kinerja PD: Penguatan tata kelola SDM aparatur melalui pelatihan manajerial.	Pendidikan: Konsolidasi mutu pendidikan sesuai SNP, penguatan pendidikan karakter, pemanfaatan teknologi secara merata. Kebudayaan: Pemajuan budaya sebagai daya tarik wisata edukatif, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Kinerja PD: Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.	Pendidikan: Pencapaian wajib belajar 10 tahun dengan APK tinggi, pemerataan mutu pendidikan di semua kecamatan. Kebudayaan: Terwujudnya ketahanan sosial dan pelestarian budaya Mentawai, pengakuan nasional atas warisan budaya Mentawai. Kinerja PD: Terbangunnya perangkat daerah yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan.

3.4. Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran konkrit strategi pembangunan yang merupakan bagian dari upaya merealisasikan sasaran dan tujuan strategis jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029.

Tabel 3.6
Arah Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Disdikbud	Ket
1	Peningkatan jumlah penduduk bersekolah	Penyediaan sarana dan Prasarana Sekolah	Menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang bermutu dan rehabilitasi kondisi rusak sedang/berat berskala prioritas	
2	Peningkatan mutu layanan pendidikan	Pendidikan Wajib Belajar 10 Tahun (1 tahun TK).	Penuntasan wajib belajar 10 tahun	
3		1 Kecamatan 2 Doktor.	Melakukan upaya penuntasan wajib belajar 10 tahun (1 tahun TK)	
4		1 Keluarga Miskin 1 Sarjana.	Melakukan upaya penuntasan wajib belajar 10 tahun (1 tahun TK)	
5		Beasiswa Berprestasi dan Miskin.	Bantuan langsung ke peserta didik seperti, bantuan baju seragam, buku dan keperluan lainnya yang menunjang siswa melaksanakan PBM	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Disdikbud	Ket
6		Pendidikan Komunitas (Kesetaraan).	Melakukan peningkatan kualitas pendidikan kesetaraan sebagai alternatif pendidik untuk mengurangi angka tidak sekolah dan meningkatkan rata-rata lama sekolah	
7		Pendidikan Layanan Khusus/ Sekolah Rakyat		
8		Pendidikan Berasrama untuk membangun Pendidikan Karakter.	Pembangun asrama dengan manajeman yang propesional, dimana disediakan pengawas bagi anak, serta penyedian sarana asrama yang memenuhi standar minimal	
9		Sekolah Unggul untuk setiap jenjang pendidikan.	Sekolah Unggul 1 Kecamatan 1 sekolah setiap jenjang (SD dan SMP)	
10		Beasiswa Bagi Tenaga Pendidik (kejenjang S1)	Program Beasiswa S1 bagi Guru PAUD	
11	Meningkatnya pengelolaan, pelindungan, pemajuan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan berbasis kearifan lokal	1. Pengakuan dan Pelestarian Sosial dan Budaya	1. Penguatan peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. 2. Pemetaan dan Pemahaman Budaya Lokal. 3. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). 4. Penguatan Identitas Budaya. 5. Penyusunan data dan dokumentasi kekayaan budaya daerah.	
12	Meningkatnya pengelolaan, pelindungan, pemajuan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan berbasis kearifak lokal	2. Internalisasi niliai-nilai luhur budaya pada generasi muda.	1. Penguatan Identitas Budaya. 2. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Budaya. 3. Peningkatan kualitas, kurikulum pendidikan muatan lokal yang berbasis budaya.	
		3. Pembinaan pelaku dan insan Budaya Daerah.	Pengembangan Kesenian dan Kreativitas.	
		4. Pelestarian dan Perlindungan Warisan Budaya.	1. Penguatan peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. 2. Pemanfaatan Potensi Budaya untuk Pembangunan Ekonomi. Pengarusutamaan Kebudayaan dalam Pembangunan. 3. Penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah secara berkelanjutan. 4. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kerajinan tangan tradisional.	

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini akan disajikan uraian mengenai hubungan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan dalam rangka mencapai tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Rencana Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029, meliputi urusan wajib pendidikan, urusan kebudayaan dan urusan penunjang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, pada bab ini menjelaskan tentang pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan pada tahun 2030 dibandingkan dengan pencapaian target indikator pada awal periode tahun 2024, serta target indikator untuk setiap tahunnya.

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Proses penyusunan program dan kegiatan merupakan operasionalisasi teknis kebijakan dan strategi yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pemilihan program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan dasar di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Program merupakan intrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh lembaga pendidikan menuju perencanaan pembangunan. Adapun program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan atau dalam periode Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pengembangan Kurikulum;
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
5. Program Pengembangan Kebudayaan;
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai bagian dari pencapaian sasaran. Sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan maka program dan kegiatan yang akan dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
   a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
   b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
   c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
2. Program Pengembangan Kurikulum;
   a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;
   b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
    a. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
    b. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
5. Program Pengembangan Kebudayaan;
    a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
    b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
    c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
    d. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
    a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
7. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
    a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
    b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
8. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
    a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sub kegiatan adalah aktivitas atau layanan yang merupakan bagian dari suatu kegiatan. Sub kegiatan lebih spesifik daripada kegiatan dan merupakan implementasi konkret dari kegiatan tersebut. Sub kegiatan menggambarkan aktivitas atau layanan yang dilakukan untuk mencapai sasaran kegiatan.

Secara keseluruhan, perumusan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif ini dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dengan indikator yang jelas dan target yang realistis, serta dukungan pendanaan yang memadai, maka pelaksanaan program dan kegiatan akan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan, melestarikan budaya Mentawai, dan memperkuat tata kelola kelembagaan.

Sub kegiatan terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja yang diperlukan untuk mencapai keluaran yang diharapkan dalam kegiatan tersebut. Dengan kata lain, sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari kegiatan utama, memberikan detail tentang aktivitas dan belanja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Tabel 4.1
Program Kegiatan Sub kegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2030

Bidang Urusan/ Program/*Outcome* /Kegiatan/ Sub kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun *(dalam juta rupiah)*										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan,dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	153.893	100%	150.353	100%	153.488	100%	155.692	100%	157.293	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	153.830	100%	148.585	100%	151.498	100%	153.863	100%	155.223	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.800	1.850	153.830	1.850	148.385	1.900	151.248	1.900	153.563	1.950	154.873	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang menerima Honorarium	-	-	-	70	200	75	250	75	300	75	350	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	-	100%	250	100%	300	100%	350	100%	400	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11	-	-	11	250	11	300	11	350	11	400	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	-	-	100%	828	100%	930	100%	1.005	100%	1.115	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13	-	-	11	450	11	500	11	550	11	600	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	-	-	12	60	12	70	12	80	12	85	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	-	-	30	18	32	20	35	25	35	30	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18	-	-	32	300	34	340	35	350	35	400	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	63	100%	90	100%	100	100%	102	100%	105	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12	12	63	12	90	12	100	12	102	12	105	

Bidang Urusan/ Program/*Outcome* /Kegiatan/ Sub kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun *(dalam juta rupiah)*										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Daya Air dan Listrik yang Disediakan												
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara	100%	-	-	100%	600	100%	660	100%	372	100%	450	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	-	-	2	100	2	120	2	122	2	150	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	15	100	15	120	15	125	15	150	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	10	150	10	150	10	125	10	150	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	-	-	1	250	1	270					
URUSAN BIDANG PENDIDIKAN													
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				46.563		45.823		46.779		47.450		47.938	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase Anak Usia 6-12 Tahun yang Berpartisipasi dalamPendidikan Dasar (APS)	100%	100%	46.563	100%	45.823	100%	46.777	100%	47.450	100%	47.938	
	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	67,20%	70%	3.104	72,90 %	3.054	75,80 %	3.118	78,70 %	3.163	81,60 %	3.195	
	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	98,80%	98,90 %	3.104	98,90 %	3.054	99%	3.118	99,10 %	3.163	99,20 %	3.195	

Bidang Urusan/ Program/*Outcome* /Kegiatan/ Sub kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun *(dalam juta rupiah)*										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	30,20%	33,90 %	3.104	37,60 %	3.054	41,30 %	3.118	45%	3.163	48,70 %	3.195	
	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	48,80	51,30	3.104	53,80	3.054	56,30	3.118	58,80	3.163	61,30	3.195	
	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	54,10	55,20	3.104	56,30	3.054	57,40	3.118	58,50	3.163	59,60	3.195	
	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	47,70	50,60	3.104	53,50	3.054	56,40	3.118	59,30	3.163	62,20	3.195	
	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	52,30	53,80	3.104	55,30	3.054	56,80	3.118	58,30	3.163	59,80	3.195	
	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	33,60%	44,50 %	3.104	59,10 %	3.054	77,30 %	3.118	99,20 %	3.163	100%	3.195	
	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	69,10	70	3.104	70,90	3.054	71,80	3.118	72,70	3.163	73,60	3.195	
	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	63,80	65,30	3.104	66,80	3.054	68,30	3.118	69,80	3.163	71,30	3.195	
	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	68,50	69,50	3.104	70,50	3.054	71,50	3.118	72,50	3.163	73,50	3.195	
	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	68	69	3.104	70	3.054	71	3.118.609.208	72	3.163.377.595	73	3.195.919.847	
	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	56,90	59,40	3.104	61,90	3.054	64,40	3.118	66,90	3.163	69,40	3.195	
	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	55,50	57,90	3.104	60,30	3.054	62,70	3.118	65,10	3.163	67,50	3.195	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya layanan pendidikan dasar	100%	100%	27.463	100%	25.143	100%	27.557	100%	24.810	100%	27.530	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	1	1.400	-	-	1	1.200	-	-	-	-	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang dibangun pada sekolah dasar	5	2	523	1	300	2	600	-	-	2	700	

Bidang Urusan/ Program/*Outcome* /Kegiatan/ Sub kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun *(dalam juta rupiah)*										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	12	1	440	1	440	1	500	1	550	1	600	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2	2	700	1	300	2	547	-	-	2	850	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2	10	550	3	200	11	550	12	600	12	650	
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5	2	850	2	823	2	850	2	850	3	900	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2	500	2	500	2	600	-	-	2	700	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1	250	1	250	1	300	2	400	2	500	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5	10	500	10	500	3	150	10	650	10	700	
Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0	150	500	150	500	150	550	150	400	200	800	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	200	50	500	50	500	50	600	50	600			
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah yang mengikuti pengembangan karir	200	150	800	150	800	150	850	150	600	200	1.000	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	134	136	300	136	280	136	350	136	350	136	400	

Bidang Urusan/ Program/*Outcome* /Kegiatan/ Sub kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun *(dalam juta rupiah)*										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	134	136	250	136	250	136	260	136	260	136	400	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		136	400	136	400	136	450	136	450	136	500	
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5	2	800	2	800	2	850	2	850	2	900	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		12	250	12	250	12	300	12	300	12	350	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1	250	1	250	1	300	1	300	1	350	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi		1	250	1	250	1	300	1	300	1	350	
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		1	250	1	250	1	300	1	300	1	350	
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		4	800	4	800	2	400	2	400	2	450	
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	134	136	250	136	250	136	300	136	300	136	330	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3	5	800	5	800	5	850	5	850	5	900	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	13.000	14.200	15.100	14.250	15.200	14.300	15.300	14.500	15.200	14.000	14.500	

Bidang Urusan/ Program/*Outcome* /Kegiatan/ Sub kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun *(dalam juta rupiah)*										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		5	250	5	250	5	300	5	300	5	350	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya layanan pendidikan dasar	100%	100%	14.600	100%	16.050	100%	15.070	100%	17.340	100%	15.028	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	-	-	1	900	-	-	1	1.000			
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5	1	250	2	500	2	600	2	720	2	650	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	2	600	2	650	2	700	2	700	-	-	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3	1	250	1	250	1	300	1	300	1	318	
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	1	300	1	350	-	-	1	400	1	450	
Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	-	1	600	1	600	1	650	1	650	1	700	
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	-	1	600	1	600	1	650	1	650	-	-	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2	5	400	5	400	5	450	5	450	5	450	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	2	600	2	600	2	650	2	650	2	700	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1	300	1	300	1	350	1	350	1	370	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	10	250	10	250	3	200	10	300	10	320	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6.000	5.114	7.000	5.200	7.100	5.300	7.200	5.400	7.500	5.200	7.000	

Bidang Urusan/ Program/*Outcome* /Kegiatan/ Sub kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun *(dalam juta rupiah)*										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	-	1	200	1	200	1	250	1	250	1	300	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	100	300	100	300	100	350	100	350	100	370	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	92	50	300	50	300	50	350	50	350	50	400	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	250	700	250	800	200	500	200	500	200	500	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan pengelolaan Dapodik dan Aneka Tunjangan	34	35	300	35	300	35	320	35	320	35	350	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	-	34	250	34	250	34	300	34	300	34	350	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	35	500	35	500	35	200	35	550	35	600	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34	12	250	12	250	12	300	12	300	12	350	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang	-	2	200	2	200	2	250	2	250	2	300	

Bidang Urusan/ Program/*Outcome* /Kegiatan/ Sub kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun *(dalam juta rupiah)*										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	dilaksanakan												
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Dididik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	-	35	250	35	250	35	300	35	300	35	350	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya layanan pendidikan anak usia dini (PAUD)	100%	100%	3.000	100%	3.280	100%	2.450	100%	3.600	100%	3.250	
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	-	1	400	1	500	-	-	1	500	1	500	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3	1	500	1	600	-	-	1	650	-	-	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	-	114	250	114	250	114	300	114	300	114	350	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	100	100	500	100	550	100	600	100	600	100	650	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100	100	350	100	380	150	400	150	400	150	450	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50	116	200	116	200	116	250	116	250	116	300	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	90	114	300	114	300	114	350	114	350	114	400	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan,	20	12	250	12	300	12	330	12	330	12	350	

Bidang Urusan/ Program/*Outcome* /Kegiatan/ Sub kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun *(dalam juta rupiah)*										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Layanan di Bidang Pendidikan	Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan												
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	300	250	300	200	300	220	300	220	300	250	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya layanan pendidikan non formal	100%	100%	1.500	100%	1.350	100%	1.700	100%	1.700	100%	2.130	
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	1.500	100	1.600	200	1.620	300	1.700	300	1.750	400	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	-	13	250	13	250	13	300	13	300	13	350	
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	200	300	100	150	100	150	100	150	100	150	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	55	50	250	60	300	60	350	60	350	60	400	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	13	300	13	150	13	150	13	150	13	150	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	13	13	200	13	200	13	250	13	250	13	400	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	12	100	12	100	12	200	12	200	12	280	

Bidang Urusan/ Program/*Outcome* /Kegiatan/ Sub kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun *(dalam juta rupiah)*										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				121		118		120		122		123	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase SatuanPendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	80%	82%	121	83%	118	85%	120	86%	122	90%	123	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Terbentuknya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100%		-	-	-	100%	120	-	-	100%	123	
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1	-	-	-	-	1	120	-	-	1	123	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kurikulum Muatan Lokal Pendiidkan Dasar yang di tetapkan		100%	121	100%	118	-	-	100%	122	-	-	
Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	0	1	121	1	118	-	-	1	122	-	-	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				137		166		170		172		174	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	0,5	0,4	68	0,35	83	0,3	85	0,25	86	0,2	87	
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	30%	35%	34	38%	41	40%	42	45%	43	50%	43	
	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	19,40%	20,40 %	34	21,40 %	41	22,40 %	42	23,40 %	43	24,40 %	43	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal yang berkualitas		100%	103	100%	166	100%	170	100%	172	100%	174	

Bidang Urusan/ Program/*Outcome* /Kegiatan/ Sub kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun *(dalam juta rupiah)*										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	150	103	170	166	180	170	170	172	170	174	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				91		99		102		103		104	
Meningkatnya Kualitas Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan lzin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	60%	62%	91	65%	99	70%	102	75%	103	80%	104	
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	100%	45	100%	45	100%	45	100%	45	100%	45	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyaraka	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	4	45	4	45	4	45	4	45	4	45	
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	100%	46	100%	54	100%	57	100%	58	100%	59	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	20	46	20	54	20	57	20	58	20	59	
URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN													
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				401	65%	392	68%	400	70%	406	75%	410	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan	20%	30%	401	35%	392	40%	400	45%	406	50%	410	

Bidang Urusan/ Program/*Outcome* /Kegiatan/ Sub kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun *(dalam juta rupiah)*										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengembangan Kebudayaa	Kebudayaan												
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	250	100%	250	100%	300	100%	250	100%	300	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3	3	250	3	250	3	300	3	250	3	300	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lestarinya Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	149	100%	142	100%	100	100%	156	100%	110	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Tersedianya Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3	4	149	4	142	4	100	4	156	4	110	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				381		372		380		385		389	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	20%	30%	381	35%	372	40%	380	45%	385	50%	389	
	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi di bidang kebudayaan	3,66%	8,26%	127	12,84 %	124	17,43 %	126	22,02 %	128	26,61 %	129	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dibina	100%	100%	381	100%	372	100%	380	100%	385	100%	389	
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah pendidik dan pelatihan sumber daya manusia yang ditingkatkan	45	40	381	40	372	50	380	50	385	50	389	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				457		416		425		431		435	

Bidang Urusan/ Program/*Outcome* /Kegiatan/ Sub kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	*Baseline* 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun *(dalam juta rupiah)*										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	75%	78%	228	80%	208	82%	212	85%	215	90%	217	
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	80%	82%	228	84%	208	85%	212	88%	215	90%	217	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan	100%	100%	457	100%	416	100%	425	100%	431	100%	435	
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		5	180	5	190	5	190	5	200	5	200	
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		5	277	5	226	5	235	5	231	5	235	
Total Pagu Indikatif				215.908		219.338		225.960		227.309		232.820	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bidang pendidikan, target kinerja diarahkan untuk memastikan setiap anak memperoleh hak yang sama dalam pendidikan dasar. Upaya peningkatan mutu pendidikan juga dilaksanakan melalui persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal dan persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan atau diperbarui. Targetnya adalah seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Kepulauan Mentawai mampu mengintegrasikan kearifan lokal dalam kurikulum pembelajaran pada tahun 2030, sehingga peserta didik dapat mengenal, memahami, dan melestarikan budaya daerahnya. Sementara itu, penerbitan dan pembaruan izin satuan pendidikan ditargetkan mencapai 80% agar semua lembaga pendidikan memiliki legalitas yang jelas dan dapat memberikan layanan secara akuntabel.

Pada bidang kebudayaan, target kinerja dititikberatkan pada penguatan identitas daerah dan pelestarian budaya lokal. IKK yang digunakan meliputi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan, persentase warisan budaya yang dilestarikan, serta persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat hingga minimal 50% pada tahun 2030, terlestarikannya lebih dari 90% warisan budaya lokal, serta adanya peningkatan signifikan jumlah cagar budaya dan warisan budaya takbenda Mentawai yang diakui secara resmi. Hal ini menjadi wujud perlindungan dan pemajuan kebudayaan sebagai bagian dari identitas nasional dan modal pembangunan daerah.

Selain itu, pengembangan seni tradisional diarahkan melalui indikator persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan, dengan target meningkatnya kelompok seni budaya yang aktif serta berkembangnya kreativitas masyarakat dalam memadukan tradisi dengan inovasi modern. Secara detail target IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam di bawah ini :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama, 2025-2030

Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
Rata-Rata lama sekolah (tahun)	tahun	8,09	8.22	8,48	8,67	8,85	9,03
Harapan Lama Sekolah (tahun)	tahun	12,92	12,93	12,93	12,94	12,95	12,96
Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	persen	64	65	66	67	68	100
Angka Melek Huruf	persen	99,38	99,43	99,48	99,53	99,58	99,63
Rapor Pendidikan	nilai	60	62,5	65	67,5	70	72,5
Persentase PKBM Terakreditasi B	persen	30	32	34	36	38	40
Persentase TK Terakreditasi B	persen	30	32,5	35	37,5	40	42,5
Persentase SD Terakreditasi B	persen	53	55	57	59	61	63
Persentase SMP Terakreditasi B	persen	44	46	48	50	52	54
APK PAUD (5-6)	persen	55	57	59	61	63	65
APK SD/MI/Paket A	persen	100	100	100	100	100	100
APK SMP/MTS/ Paket B	persen	100	100	100	100%	100	100
APM SD /MI/ paket A	persen	89	90	91	92	93%	94

Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
APM SMP /MTS/ Paket B	persen	62	64	66	68	70%	72
Pesentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional-sekolah dasar	persen	L=45 N=12	L=48,9 N=13,94	L=52,8 N=15,88	L=56,7 N=17,82	L=60,6 N=19,76	L=62,72 N=21,36
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi pada asesmen tingkat nasional-SMP	persen	L=47 N=40	L=47,47 N= 40,4	L= 47,9 N= 40,92	L= 48,35 N= 41,38	L= 48,8 N= 1,84	L= 49,25 N= 42,3
Persentase sekolah yang memakai muatan lokal sebagai bahan ajar	persen	100	100	100	100	100	100
Persentase tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S.1 Jenjang Pendidikan Dasar	persen	78	80	82	84	86	88
Persentase guru dengan sebaran sesuai kebutuhan	persen	89,5	90	90,5	91	91,5	92
Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	persen	62	64	65	66	68	100
Presentase budaya Benda dan Non Benda yang ditetapkan (regulasi daerah)	persen	50	50	52	54	58	60
Jumlah sanggar yang dibina	sanggar	5	5	5	5	6	6
Persentase Capaian Kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100
Nilai LAKIP	Nilai	A	A	A	A	A	A
Jumlah Inovasi	Jumlah	2	2	2	2	2	2

Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), capaian yang dikejar adalah meningkatnya persentase anak usia 6–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) hingga mencapai 100% pada tahun disetiap tahunnya, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menuntaskan wajib belajar. Selain itu, pemerataan kualitas pembelajaran juga menjadi perhatian dengan mengukur indeks pemerataan guru serta persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik. Target yang ingin dicapai adalah meningkatnya distribusi guru secara proporsional di seluruh wilayah serta bertambahnya jumlah guru bersertifikat minimal 50% di akhir periode Renstra, sehingga kualitas layanan pendidikan lebih merata dan berstandar.

Pada aspek tata kelola kelembagaan, kinerja perangkat daerah diukur melalui persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah. Targetnya adalah tercapainya 100% kepatuhan pada akhir periode Renstra, sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dapat berjalan transparan, akuntabel, dan terukur. Dengan demikian, keseluruhan target IKK ini menjadi instrumen penting dalam memastikan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan

Mentawai mampu berkontribusi nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci, 2025-2030

Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Anak Usia 6-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	persen	100	100	100	100	100	100
Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	persen	67,2	70	72,9	75,8	78,7	81,6
Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	persen	98,8	98,9	98,9	99	99,1	99,2
Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	persen	30,2	33,9	37,6	41,3	45	48,7
Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	48,8	51,3	53,8	56,3	58,8	61,3
Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	54,1	55,2	56,3	57,4	58,5	59,6
Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	47,7	50,6	53,5	56,4	59,3	62,2
Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	52,3	53,8	55,3	56,8	58,3	59,8
Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	persen	33,6	44,5	59,1	77,3	99,2	100
Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	persen	19,4	20,4	21,4	22,4	23,4	24,4
Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	69,1	70	70,9	71,8	72,7	73,6
Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	63,8	65,3	66,8	68,3	69,8	71,3
Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	68,5	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5
Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	68	69	70	71	72	73
Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	56,9	59,4	61,9	64,4	66,9	69,4
Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	55,5	57,9	60,3	62,7	65,1	67,5
Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	persen	80	82	83	85	86	90
Indeks Pemerataan Guru	Nilai indeks	0,5	0,4	0,35	0,3	0,25	0,2
Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	persen	30	35	38	40	45	50
Persentase Usulan lzin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	persen	60	62	65	70	75	80
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	persen	20	30	35	40	45	50
Persentase Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	persen	75	78	80	82	85	90
Persentase Jumlah Cagar	persen	80	82	84	85	88	90

Indikator *Outcome*	Satuan	*Baseline* 2025	Target Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan							
Persentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan	persen	100	100	100	100	100	100%
Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	persen	20	30	35	40	45	50
Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan	persen	3,66	8,26	12,84	17,43	22,02	26,61

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025- 2029 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh inas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta kerangka pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus sebagai rambu- rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkup internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, program, kegiatan maupun subkegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

Dalam melaksanakan pembangunan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan sejumlah kaidah pelaksanaan yang menjadi pedoman utama agar setiap program dan kegiatan berjalan secara terarah, akuntabel, dan berorientasi hasil. Kaidah-kaidah ini dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses pembangunan pendidikan tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029, tetapi juga mampu menjawab tantangan strategis dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

1. Transparansi dan Akuntabilitas
   Seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program pendidikan dilaksanakan secara terbuka, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui sistem pelaporan dan evaluasi yang terukur.
2. Partisipatif
   Penyelenggaraan program pendidikan dan kebudayaan dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pendidik, orang tua, peserta didik, masyarakat, pelaku seni dan budaya serta mitra

strategis lainnya, untuk memastikan kebijakan dan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

3. Efisiensi dan Efektivitas
   Penggunaan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana pendidikan dioptimalkan agar menghasilkan dampak yang maksimal terhadap peningkatan mutu pendidikan, akses layanan, dan pemerataan hasil belajar.
4. Keadilan Sosial
   Pembangunan pendidikan dilaksanakan secara inklusif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan kelompok rentan seperti anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah terpencil.
5. Berkelanjutan
   Seluruh program dan kegiatan dirancang dengan pendekatan jangka panjang yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan belajar, pengembangan SDM pendidikan, serta daya dukung sistem pendidikan dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi.

Dengan berpegang pada kaidah-kaidah tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu, adil, dan berkelanjutan demi menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing.

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian krusial dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029. Keduanya berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan. Beberapa mekanisme pengendalian dan evaluasi yang diterapkan antara lain:

1. Monitoring Berkala
   Dilaksanakan secara rutin oleh jajaran Dinas Pendidikan bersama tim teknis, untuk menilai kemajuan pelaksanaan program baik dari sisi fisik, keuangan, maupun ketercapaian sasaran di lapangan. Monitoring ini menjadi dasar pengambilan keputusan cepat dan tepat jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan.
2. Evaluasi Kinerja Tahunan
   Dilakukan setiap akhir tahun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja utama dan kunci, mengevaluasi efektivitas strategi, serta menyusun rekomendasi perbaikan program/kegiatan pada tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Pelibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
   Melalui forum-forum seperti musyawarah pendidikan, pengaduan publik, maupun survei kepuasan layanan, masyarakat dilibatkan untuk memberikan umpan balik atas implementasi kebijakan pendidikan, sehingga mendorong transparansi dan partisipasi aktif.
4. Audit Internal dan Eksternal
   Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah maupun lembaga pemeriksa lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas anggaran, serta pencegahan penyimpangan yang dapat merugikan mutu layanan pendidikan.

Manajemen Risiko Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan untuk memastikan sasaran pembangunan pendidikan dan pelestarian kebudayaan tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki tantangan geografis dan risiko bencana tinggi, pendekatan manajemen risiko menjadi kunci agar

pelayanan pendidikan dan kebudayaan tetap berjalan meski menghadapi keterbatasan akses, distribusi sumber daya, maupun kondisi darurat.

Risiko strategis yang dihadapi mencakup akses pendidikan antar-pulau, kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu, keterlambatan penyaluran dana pendidikan, hingga keterbatasan infrastruktur teknologi informasi untuk ujian berbasis komputer. Selain itu, aspek kebudayaan juga berisiko mengalami erosi nilai dan bahasa lokal jika tidak ditangani melalui program pelestarian yang terstruktur. Risiko-risiko ini dianalisis berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampaknya sehingga dapat diprioritaskan sesuai urgensi.

Proses manajemen risiko dilakukan melalui identifikasi, analisis, evaluasi, serta perlakuan risiko. Setiap unit kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai berperan sebagai pemilik risiko (*risk owner*) yang wajib menjaga dan mengendalikan risiko dalam lingkup tugasnya. Hasil pengelolaan risiko kemudian dilaporkan secara berkala melalui sistem monitoring yang terintegrasi dengan perencanaan kinerja (SAKIP) dan pengendalian intern (SPIP). Dalam penanganannya, terdapat beberapa strategi utama, misalnya redistribusi guru untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik, penyediaan solusi teknologi alternatif seperti jaringan satelit untuk mendukung ANBK, hingga program transportasi aman bagi siswa dan guru.

Akhirnya, manajemen risiko ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga instrumen untuk menjaga kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan. Dengan adanya kebijakan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat lebih adaptif, tangguh, dan proaktif dalam menghadapi tantangan, sehingga tujuan peningkatan mutu pendidikan dan pelestarian kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat tercapai secara berkelanjutan

Tata Kelola Satu Data Indonesia di tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan upaya memastikan seluruh data pendidikan dan kebudayaan dikelola secara terpadu, valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini sejalan dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap instansi daerah wajib menyediakan data sesuai standar, meta data, dan interoperabilitas yang ditetapkan. Hal ini juga tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan satu data Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai berkomitmen dalam penerapan prinsip satu data dan langkah-langkah pelaksanaan satu data Indonesia khususnya dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, data yang dihasilkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak hanya menjadi dasar perencanaan internal, tetapi juga terintegrasi dengan sistem nasional.

Pada level teknis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai bertanggung jawab sebagai produsen data sektor pendidikan dan kebudayaan, yang mencakup data sekolah, siswa, guru, sarana-prasarana, serta data pelestarian budaya lokal. Data tersebut harus melalui mekanisme verifikasi dan validasi sebelum disampaikan ke wali data daerah untuk kemudian dikonsolidasikan dengan data sektoral lainnya. Dalam hal ini, operator sekolah, UPTD, dan bidang-bidang teknis berperan aktif memastikan kelengkapan dan akurasi penginputan ke dalam sistem Dapodik dan aplikasi kebudayaan.

Tata kelola Satu Data juga menuntut adanya meta data standar agar setiap dataset memiliki definisi, metode pengumpulan, serta periode yang

jelas, sehingga memudahkan sinkronisasi dan pemanfaatan lintas instansi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu membangun mekanisme koordinasi internal, pelatihan operator, serta pengawasan berkala agar kualitas data tetap terjaga. Selain itu, penerapan teknologi informasi seperti *dashboard* pendidikan dan budaya berbasis daring dapat memperkuat transparansi dan memudahkan monitoring oleh pimpinan maupun pemangku kepentingan.

Melalui implementasi tata kelola ini, data pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat digunakan secara lebih efektif untuk perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Selain itu, integrasi dengan Satu Data Indonesia memperkuat akuntabilitas, mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta melestarikan warisan budaya dengan dokumentasi digital yang lebih terjamin keberlanjutannya. Dengan demikian, tata kelola data bukan hanya soal administrasi, melainkan fondasi pengambilan keputusan strategis di sektor pendidikan dan kebudayaan.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i
Daftar Tabel..... ii
Daftar Gambar..... iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 5
1.3 Maksud dan Tujuan..... 7
1.4 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 10
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah..... 11
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 20
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan..... 25
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 25
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan..... 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 29
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 30
3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 33
3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 34

BAB IV PROGRAM. KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Uraian Program, Kegitan, Sub Kegiatan..... 35
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 57

BAB V PENUTUP..... 60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan 17
Tabel 2.2 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan 18
Tabel 2.3 Tabel Fasilitas Kesehatan Tahun 2025 19
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2024 251
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024 19
Tabel 2.6 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Pelayanan Dinas Kesehatan 195
Tabel 2.7 Isu Strategis Dinas Kesehatan 197
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 ... 29
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Mentawai 2025-2029 190
Tabel 3.3 Strategi Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 32
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Dinas Kesehatan 32
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan 33
Tabel 4.1 Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 35
Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan 44
Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 55
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 57
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Alur Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025.....3
Gambar 1.2 Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan Tahun 2025.....6
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan.....11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (*top-down*); dan (5) bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan Pembangunan harus linier antara pusat hingga daerah sehingga mensyaratkan adanya koordinasi, integrasi, sinergi, sinkronisasi yang baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Pada hakekatnya pembangunan kesehatan merupakan komponen utama dalam pembangunan kualitas hidup manusia, seiring dengan pembangunan dibidang pendidikan dan perekonomian yang tingkat keberhasilannya diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Dalam mewujudkan pembangunan kesehatan, menuntut kemampuan organisasi untuk melakukan perubahan, perbaikan, penyesuaian dalam pengendalian lingkungan organisasinya sehingga mampu meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang berorientasi kepada proses dari hasil yang ingin dituju. Dengan demikian diperlukan adanya perencanaan program-program strategis yang baik dan terukur.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 28H ayat (1)bahwa: ”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, dan ayat (3) yang disebutkan: ”setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, maka sesuai amanat Undang-undang tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah pembangunan yang seyogyanya dilaksanakan secara dinamis, sistematis dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang sehingga terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai bertujuan Untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yang ditandai dengan penduduknya berperilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan yang sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan pembangunan kesehatan baik oleh pemerintah, masyarakat dan swasta.

Upaya pembangunan tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEK serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektor. Pembangunan Kesehatan bersinergi dengan isu-isu strategis pembangunan nasional jangka panjang dan menengah serta pembangunan jangka panjang bidang kesehatan yang dilaksanakan melalui beberapa pentahapan. Pembangunan Kesehatan diarahkan pada perwujudan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

yang berkualitas. Pada tahap ini diupayakan agar kesejahteraan masyarakat terus membaik, meningkat sebanding dengan negara-negara berpenghasilan menengah.

Kualitas sumber daya manusia yang terus membaik ditandai antara lain oleh meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang yang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menetapkan Cita-cita Pembangunan menjadikan "Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera"

Sejak diterapkannya otonomi daerah dan yang terakhir sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa banyak perubahan sistem dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan di tingkat kabupaten. Desentralisasi merubah system yang semula sentralistik, sehingga dengan desentralisasi diharapkan akan membawa perubahan peran pemerintah dalam system pelayanan kesehatan.

Pembangunan bidang kesehatan dapat berjalan efektif dan efisien jika ada suatu manajemen yang baik. Perencanaan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang disusun untuk jangka waktu tertentu. Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan. Penyusunan Renstra Kesehatan disusun berpedoman pada RPJMD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi acuan dalam penilaian kinerja pelayanan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, tahapan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan diawali dengan:

1. Persiapan Penyusunan Renstra, antara lain :
   a. Pembentukan SK Tim penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.
   b. Orientasi mengenal RENSTRA.
   c. Penyusunan Agenda Tim Penyusunan RENSTRA.
   d. Penyiapan Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan system informasi Pemrintah daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah antara lain:
   a. Analisis gambaran pelayanan.
   b. Analisis permasalahan.
   c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya.
   d. Analisis isu strategis.
   e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdarkan sasaran indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.
   f. Perumusan Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.
   g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.

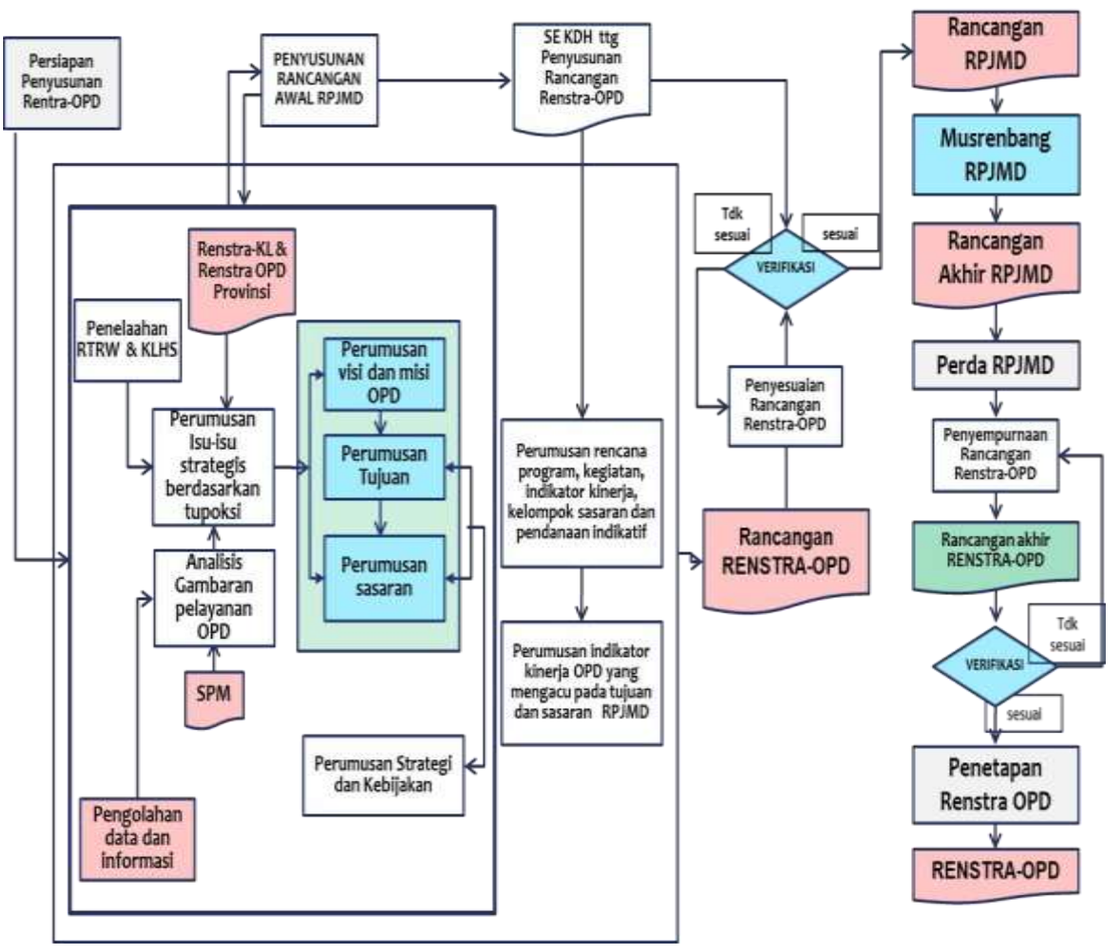
3. Rancangan RENSTRA antara lain:
   a. Penyempurnaan rancangan awal Renstra perangkat daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah.

b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat daerah/ lintas perangkat daerah.
c. Hasil Kesepakatan Forum perangkat daerah dituangkan dalam Berita Acara.
d. Rancangan Renstra perangkat daerah disempurnakan berdasarkan berita acara.

4. Rancangan Akhir RENSTRA antara lain:
   a. Penyempurnaan rancangan akhir Renstra perangkat daerah berdasarkan surat Peraturan Daerah tentang RPJMD.
   b. Perumusan rancangan akhir Renstra perangkat daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

5. Penetapan RENSTRA antara lain:
   a. Rancangan Akhir Renstra perangkat daerah disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk diverivikasi.
   b. Rancangan Akhir Renstra perangkat daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Gambar 1.1
Diagram Alur Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025



c. Rancangan akhir Renstra perangkat daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh perangkat daerah kepada

kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk dilakukan proses penetapan Renstra perangkat daerah.

d. Penetapan Renstra Perangkat darah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Dokumen Renstra Dinas Kesehatan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dokumen Renstra Dinas Kesehatan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025- 2045 dan mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029. Selain dokumen-dokumen perencanaan tersebut, perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain:

1. agenda Pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs); dan
2. kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Daerah.

A. Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 juga memperhatikan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Renstra Dinas Kesehatan dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. Penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 Kesehatan adalah dengan memprioritaskan kegiatan sesuai dengan visi Presiden yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

B. Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan Renstra Kementerian Kesehatan

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 terkait juga dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran teknis bidang kesehatan atas RPJMN dengan visi “Masyarakat yang sehat dan produktif guna mewujudkan Indonesia Emas 2045” dengan Misi :

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup.
2. Membudayakan gaya hidup sehat.
3. Memenuhi Layanan Kesehatan yang Baik, Adil, dan Terjangkau.
4. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif.
5. Menguatkan tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan Nasional yang Berkecukupan, Adil dan Berkelanjutan
6. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju
7. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien

C. Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Selain mengacu pada dokumen RPJMN, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai juga berkaitan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan Visi “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan” dengan Misi :

1. Mewujudkan pendidikan merata
2. Kesehatan berkualitas, menjadi lumbung pangan nasional
3. Ekonomi berkelanjutan, menjadikan nagari atau desa sebagai basis kemajuan

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berada pada Misi Pertama yaitu, "Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas" dengan tujuan "Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing". Untuk itu diperlukan perbaikan menyeluruh terhadap akses dan kualitas layanan Kesehatan, yang difokuskan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan yang merata dan terjangkau serta percepatan penurunan stunting dan angka kematian ibu. Program, sasaran dan kegiatan yang ada di Provinsi Sumatera Barat harus saling berhubungan sehingga tujuan pembangunan kesehatan yang ada di tingkat Provinsi dapat tercapai.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan manusia di Sumatera Barat sebagai fondasi utama dalam memperkuat daya saing daerah. Pembangunan manusia tidak hanya menyangkut peningkatan akses kesehatan, tetapi juga mencakup kualitas layanan, pemerataan kesempatan, serta keberlanjutan dalam mendukung produktivitas masyarakat

Rencana strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis. Rencana Strategis mempunyai fungsi, yaitu: menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan, menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi antar program dan kegiatan maupun antara Departemen Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara transparan, efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan. Proses penyusunan renstra dilaksanakan secara berjangka, meliputi:

1. RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
2. RKPD untuk jangka waktu satu tahun.
3. Renstra Perangkat Daerah.
4. Renja Perangkat Daerah.

Berikut adalah gambar keterkaitan antara dokumen renstrad engan dokumen perencanaan lainnya



Gambar 1.2 Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan Tahun 2025

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Dinas Kesehatan mengacu pada perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan Provinsi Sumatera Barat serta RPJMD Tahun 2025-2029. Dengan demikian landasan Renstra adalah sama dengan landasan pembangunan nasional maupun pembangunan Daerah. Secara spesifik landasan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-UndangNomor29 Tahun 2004 tentangPraktikKedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-UndangNomor 36Tahun2009 tentangKesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-UndangNomor44 Tahun 2009 tentangRumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
10. Undang-undangNomor 59 Tahun 2024 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan KLHS;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Daftar Program dan Kegiatan dalam urusan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara perubahan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan RENSTRA Tahun 2025-2029 yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 dimaksudkan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan system Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalisnya.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029 adalah untuk:

a. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029 kedalam rencana instansional;
b. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bidang Kesehatan tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif Dinas Kesehatan;
c. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
d. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi;
e. Memberikan arahan terhadap kebijakan keuangan Dinas Kesehatan dan sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merumuskan latar belakang Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis serta dasar hukum yang relevan dan signifikan dan menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan. Bab ini terdiri atas:

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Bab ini berisi penyajian data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan disertai evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir, serta mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Kesehatan dan mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat memengaruhi Dinas Kesehatan baik secara langsung atau pun tidak langsung. Bab ini terdiri atas:

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan
2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
2.1.4 Kelompok sasaran layanan
2.2 Permasalah dan Isu Strategis Dinas Kesehatan
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan
2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya dan mengacu pada Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang dijabarkan secara operasional dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun

ke depan disertai dengan indikator kinerja dan targetnya yang didukung dengan program prioritas pembangunan daerah, Bab ini terdiri atas:
3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029
3.3 Strategi Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN
Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub kegiatan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya, dan menjelaskan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci beserta Target dan Pagu Indikatif untuk pencapaian 5 (lima) tahun ke depan, Bab ini terdiri atas:
4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP
Bab ini menjelaskan kesesuaian antara target kinerja Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Dinas Kesehatan sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan mempunyai membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang kesehatan. Yakni ;

a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan.
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Koordinator Perencanaan.

c. Bidang KesehatanMasyarakat,membawahi:
    1. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
    2. Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
    3. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olah raga.

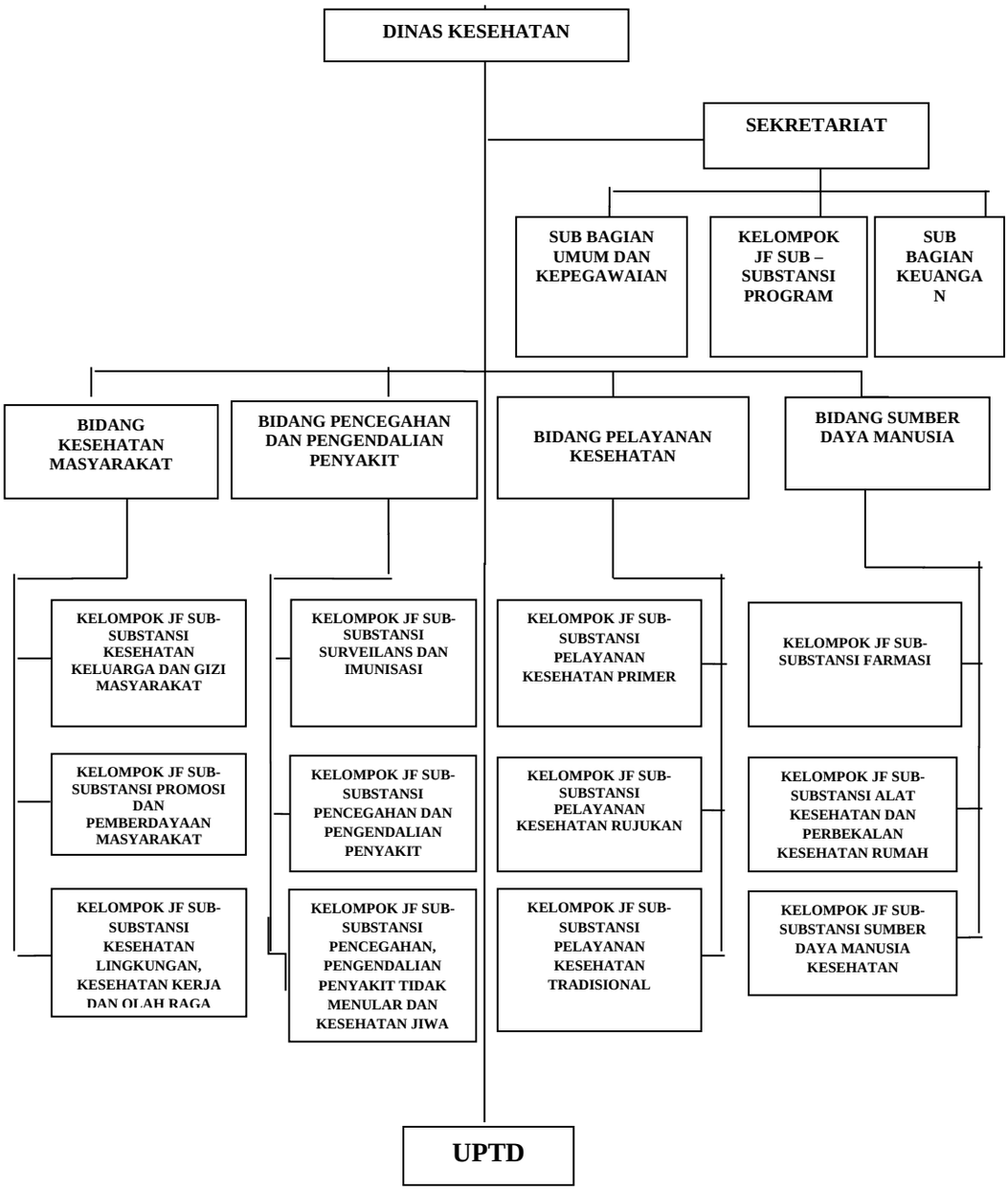
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi:
    1. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi;
    2. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
    3. Sub Koordinator Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi:
    1. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer;
    2. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
    3. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi:
    1. Sub Koordinator Kefarmasian;
    2. Sub Koordinator Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); dan
    3. Sub Koordinator Sumber daya Manusia Kesehatan.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
   1. RSUD Tuapejat, RSU Siberut
   2. Puskesmas; dan
   3. Instalasi Farmasi Kabupaten

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN TAHUN 2025



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

2.1.1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan melaksanakan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kesehatan.

1. Kepala Dinas

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggararakan urusan pemerintah dibidang Kesehatan. Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan daerah urusan kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan kesehatan;
c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan;
d. pelaksanaan administrasi urusan kesehatan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas, dan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkup Dinas. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkungan Dinas;
c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang - undangan lingkup Dinas;
d. Pengelolaan Barang Milik Daerah lingkup Dinas; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas;

a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas;
b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Dinas;
c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup Dinas;
e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana Lingkup Dinas;
f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup dinas; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan

a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

melalui Sekretaris. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan diBidang Kesehatan Masyarakat. Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga;
c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, mempunyai tugas:
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
   b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
   c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas:
   a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
   b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
   c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub- Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga, mempunyai tugas:
   a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
   b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
   c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
9. Bidang Pencegahandan PengendalianPenyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang surveilans dan imunisasi, di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang surveilans dan imunisasi, di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang surveilans dan imunisasi, di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Surveilans dan Imunisasi, mempunyai tugas:
    a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang surveilans dan imunisasi;
    b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans dan imunisasi;
    c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang surveilans dan imunisasi; dan
    d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
11. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai tugas:
    a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
    b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
    c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
    d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
12. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, mempunyai tugas:
    a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
    b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
    c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
    d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
13. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan dan rujukan,dan pelayanan kesehatan tradisional;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan dan rujukan, dan pelayanan kesehatan tradisional;
c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan dan rujukan, dan pelayanan kesehatan tradisional; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

14. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas:
    a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan rujukan;
    b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan rujukan;
    c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan rujukan; dan
    d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

15. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas:
    a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan Kesehatan primer;
    b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan primer;
    c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer; dan
    d. melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

16. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas:
    a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan tradisional;
    b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan tradisional;
    c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan tradisional; dan
    d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

17. Bidang Sumber Daya Kesehatan

    Bidang SumberDaya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelakasanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya kesehatan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan;
c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan sumber daya manusia kesehatan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

18. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kefarmasian mempunyai tugas:
    a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kefarmasian;
    b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian;
    c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kefarmasian; dan
    d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

19. KelompokJabatanFungsional Sub-Substansi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, mempunyaitugas:
    a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
    b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
    c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
    d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

20. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas:
    a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan;
    b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan;
    c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan; dan
    d. melaksanakan tugaslain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dinas secara professional sesuai dengan kebutuhan.Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di

lingkungan dinas. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, danbeban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

Dalam Menjalankan Tugas dan fungsi seperti yang telah disebutkan diatas, Dinas Kesehatan Memiliki sumber daya yang mendukung penyekenggaraan kegiatannya. Sumber daya tersebut yaitu sumber daya manusia, aset/modal, serta sarana prasarana lain.

2.1.2.1 Sarana dan Prasarana

Tabel 2.1
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan

NO	NAMA BARANG	VOLUME	KONDISI BARANG
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Tua Pejat-Km 4	1 Unit	baik
2	Posyandu	283 unit	baik
3	Puskesmas	15 Unit	baik
4	Sepeda Motor	54 unit	baik
5	rak Kayu	17 unit	baik
6	Loudspeker	23 Set	baik
7	Handycam	17 Unit	baik
8	Sound System	3 Unit	baik
9	Alat rumah tangga Lain	23 Set	baik
10	Laptop	58 Unit	baik
11	Bangunan gedung kantor permanen	298 Unit	baik
12	Mobil roda 4	25 Unit	baik
13	Lemari besi	3 Unit	baik
14	Filling Besi /Metal	3 Unit	baik
16	Lemari kaca	15 Unit	baik
17	Lemari Kayu	53 Unit	baik
18	Meja Komputer	235 Unit	baik
19	Kursi Lipat	20 Unit	baik
20	Meja Kerja Pejabat Lain Lain	23 Unit	baik
21	Printer	80 Unit	baik
23	Meja biro	155 Unit	baik
24	Ac Split	76 Unit	baik
25	PC Unit	75 Unit	baik
26	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit	baik
27	Lemari Arsip untuk arsip dinamis	68 Unit	baik
28	Bingkai Plastik	21 Unit	baik
29	Instalasi Pusat pengatur listrik lain lain	23 Unit	baik
30	Papan Visual	16 Unit	baik
31	Kursi rapat	340 Unit	baik
32	Sofa	17 Unit	baik
33	Unit Power Suplly	15 Unit	baik
37	Televisi	16 Unit	baik
39	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	baik
40	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	27 Unit	baik
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	baik

NO	NAMA BARANG	VOLUME	KONDISI BARANG
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	27 Unit	baik
44	Mesin Ketik Manual standar (14-16)	20 Unit	rusak
48	Meja Rapat	70 Unit	baik
49	Kursi Rapat	238 Unit	baik
50	Camera + Attachment	1 Unit	baik
53	Scanner	20 Unit	baik
54	Gerobak Dorong	17 Unit	baik
55	Kursi Besi/Metal	116 Unit	baik
56	Meja Biro	155 Unit	baik

Sumber Data: Dinas Kesehatan Tahun 2025

2.1.2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (Pegawai) di lingkungan Dinas Kesehatan terbagi menjadi (dua), yaitu Pegawai Negri Sipil (PNS) dan PPPK yaitu Pegawai PNS dan Dengan Perjanjian Kinerja (PNS dan PPPK). Berikut ini merupakan jumlah sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Berdasarkan Golongan, Tingkat Pendidikan dan Rasio.

Tabel 2.2
Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah Pegawai Dinkes dan UPT						
		PNS			PPPK			Total (PNS+PPPK/ NON ASN)
		Jumlah(Org)			Jumlah(Org)			Jumlah
		L	P	Total	L	P	Total	Total
1	S2 Kesehatan	1	2	3	0	0	0	3
2	S2 Umum	3	6	9	0	0	0	9
3	Dokter Spesialis	3	1	4	0	0	0	4
4	Dokter Umum	7	6	13	2	3	5	18
5	Dokter Gigi	1	5	6	3	2	5	11
6	Kesehatan Masyarakat	6	11	17	6	8	14	31
7	NS (Ners)	6	17	23	4	18	22	45
8	S1 Keperawatan	1	2	3	1	0	1	4
9	Perawat/ D III	28	92	120	39	107	146	266
10	SPK	0	0	0			0	0
11	SPRG	0	0	0	0	0	0	0
12	D III Gigi/ AKG	4	2	6	0	0	0	6
13	S.SiT/ DIV Kebidanan	0	12	12	0	0	0	12
14	Bidan/ D III	0	73	73		8	8	81
15	D I Bidan	0	0	0	0	0	0	0
16	S1 Gizi	4	9	13	0	1	1	14
17	D III Gizi/ AMG	0	3	3	0	0	0	3
18	S1 Apoteker	1	5	6	0	0	0	6
19	D III Farmasi	10	15	25			0	25

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah Pegawai Dinkes dan UPT						
		PNS			PPPK			Total (PNS+PPPK/ NON ASN)
		Jumlah(Org)			Jumlah(Org)			Jumlah
		L	P	Total	L	P	Total	Total
20	SMF	0	0	0			0	0
21	D III Kesling	0	1	1			0	1
22	SPPH	0	0	0			0	0
23	D IV Analis	0	0	0			0	0
24	D III Labor	0	1	1			0	7
25	SMAK (Analis	0	0	0			0	0
26	D III Fisioterapi	0	0	0		1	1	0
27	D III Rekam Medis	3	3	6			0	6
28	D III Teknis Medis	0	0	0				0
29	D III Radiografer	0	0	0	4			0
30	Teknisi Gigi	0	0	0	1			0

Sumber Data: Dinas Kesehatan Tahun 2025

2.1.2.3 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang tugas dsan fungsi palayanan Dinas Kesehatan, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung seluruh pelayanan di Dinas Kesehatan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga sebagai input atau (capital) dalam proses pelayanan Dinas Kesehatan untuk mencapai tujuan organisasi.

Peningkatan sarana dan prasaranapelayanan kesehatan terus diupayakan untuk meningkatkan akses, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.3
Tabel Fasilitas Kesehatan Tahun 2025

No	SARANA KESEHATAN	JUMLAH	STATUS FASILITAS		Ket
			Rawatan	Non Rawatan	
1	Puskesmas	15 Unit	12 unit	3 unit	
2	Pustu	39 Unit	-	-	
3	Poskesdes	90 Unit	-	-	
4	Polindes	40 Unit	-	-	
5	Puskesmas Keliling	9 Unit	-	-	
6	Promkes Roda 4	1 Unit	-	-	
7	Posyandu	277 Unit	-	-	
8	Rumah Sakit	2 unit	-	-	
9	Apotek	1 Unit	-	-	
10	Toko Obat	10 Unit	-	-	

Sumber Data: Dinas Kesehatan Tahun 2025

Sarana kesehatan yang dimiliki sampai saat ini mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Kondisi sampai dengan tahun 2025 menunjukkan bahwa beroperasional sebanyak 15 unit Puskesmas (12unit Puskesmas rawatan, 3 unit Puskesmas non rawatan), Puskesmas pembantu sebanyak 39 unit, Pos Kesehatan Desa 90 unit, Polindes 40unit, dan Posyandu 277 unit. Untuk sarana pelayanan kesehatan rujukan saat ini telah ada1 Unit

Rumah Sakit UmumDaerah dengan Type D.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Dinas Kesehatan pada kurun waktu 5 tahun yang (2020-2024). Dapat dilihat dalam table 2.4 tergambar target Renstra, Capaian dan Rasio capaian kinerja atas target setiap tahun yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Kesehatan tahun 2020-2024.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi (Per 1000 KH)	Per1000 KH	23	100	26	24	24	24	23	25	25	23	23	27	28	96	94	0	114	123
2	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	Per100 RB KH	250	100	397	325	306	306	250	250	191	207	207	303	277	48	64	68	99	111
3	Prevalensi gizikurang pada balita (%)	/1000 KH	12	100	5	5	4	8	12	<5	4	8	2	10	16	79	180	48	139	129
4	Prevalensi Stunting	%	14	100	24	21	18	16	14	19	19	20	17	17	16	80	93	90	108	114
5	Bayi Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (%)	%	100	100	95	95	95	95	100	100	52	64	86	60	63	55	67	91	63	63
6	Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin	%	90	100	100	100	100	95	90	100	44	64	83	1	90	44	64	83	1	100
7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) (Case Notification Rate CNR)	%	90	100	90	90	90	90	90	90	34	29	55	67	64	37	32	62	74	71
8	Persentase Ketersediaan obat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	90	85	100	100	85	90	85	100	100	85
9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Rasio dokter	/100.000 Penduduk	43	100	43	43	43	43	43	43	42	40	41	40	42	96	91	93	91	98

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Pada Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
11	Rasio tenaga Paramedis	/100.000 Pddk	435	100	435	435	435	435	435	435	289	303	454	573	611	66	70	104	132	140
12	Rasio Puskesmas	/30.000 Pddk	1	100	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	Cakupan pembantu Puskesmas	/1000 Penduduk	96	100	96	96	96	96	96	96	87	87	87	87	87	91	91	91	91	91
14	Cakupan penemuan penderita TBC BTA (+) (Case Detection Rate/CDR)	%	90	100	90	87	87	90	90	95	34	29	55	67	64	37	33	64	74	71

Sumber Data: Dinas Kesehatan Tahun 2025

1. Angka Kematian Bayi (AKB), pada Tahun 2024 Capaian (AKB sebesar 28/1.000 KH) dari Target IKK tahun 2024 sebesar 23/1.000 KH.
2. Angka Kematian Ibu (AKI), pada Tahun 2024 Capaian (AKI sebesar 277/100.000 KH) dari Target IKK tahun 2024 sebesar 250/100.000 KH.
3. Prevalensi gizi kurang pada balita (%), pada tahun 2024 capaian (Prevalensi gizi kurang sebesar 16/1.000 KH) dari Target IKK tahun 2024 sebesar 12 /1.000 KH.
4. Prevalensi Stunting, pada tahun 2024 capaian (Prevalensi Stunting sebesar 16%) dari Target IKK tahun 2024 sebesar 14%.
5. Bayi Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (%), pada tahun 2024 capaian Imunisasi Dasar Lengkap sebesar 63% dari Target IKK tahun 2024 sebesar 100%.
6. Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin, pada tahun 2024 capaian Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin sebesar 90% dari Target IKK tahun 2024 sebesar 90%.
7. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) (Case Notification Rate CNR), pada tahun 2024 capaian sebesar 64% dari target IKK tahun 2024 sebesar 90%
8. Persentase Ketersediaan obat, pada tahun 2024 capaian sebesar 85% dari target IKK tahun 2024 sebesar 100%.
9. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, pada tahun 2024 capaian sebesar 100% dari target IKK tahun 2024 sebesar 100%.
10. Rasio dokter, pada tahun 2024 capaian sebesar 42/100.000 penduduk dari target IKK tahun 2024 sebesar 43/100.000 penduduk.
11. Rasio tenaga Paramedis, pada tahun 2024 capaian sebesar 611/100.000 penduduk dari target IKK tahun 2024 sebesar 435/100.000 penduduk.
12. Rasio Puskesmas, pada tahun 2024 capaian sebesar 5/30.000 penduduk dari target IKK tahun 2024 sebesar 1/30.000 penduduk.
13. Cakupan pembantu Puskesmas, pada tahun 2024 capaian sebesar 87/1.000 penduduk dari IKK target tahun 2024 sebesar 96/1.000 penduduk.
14. Cakupan penemuan penderita TBC BTA (+) (Case Detection Rate/CDR), pada tahun 2024 capaian sebesar 64% dari target IKK tahun 2024 sebesar 90%.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Kesehatan Tahun 2020-2024

No	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN SPM TAHUN 2020	CAPAIAN SPM TAHUN 2021	CAPAIAN SPM TAHUN 2022	CAPAIAN SPM TAHUN 2023	CAPAIAN SPM TAHUN 2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	50,97	66,50	72,06	96,29	52,46
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	61,76	55,14	80,19	100	64,90
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	65,33	59,07	98,62	98,89	65,59

No	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN SPM TAHUN 2020	CAPAIAN SPM TAHUN 2021	CAPAIAN SPM TAHUN 2022	CAPAIAN SPM TAHUN 2023	CAPAIAN SPM TAHUN 2024
4	Pelayanan Kesehatan Balita	27,24	58,01	55,84	97,66	73,75
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	8,79	84,61	95,55	79,13	92,49
6	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36,04	38,91	88,12	94,42	39,16
7	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	30,04	18,52	35,67	76,78	87,78
8	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	96,98	95,92	64,86
9	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12,74	17,74	29,21	99,00	86,67
10	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	31,71	32,71	67,72	76,35	68,70
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15,54	48,83	45,74	92,53	65,91
12	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)	14,36	10,88	99,17	90,80	100

Sumber Data: Dinas Kesehatan Tahun 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kesehatan

Kelompok Sasaran Kesehatan adalah: Individu, Keluarga, Kelompok Usia (Bayi Baru Lahir, Balita, Anak Prasekolah, Remaja Putri/Calon Pengantin, Ibu Hamil dan Ibu Menyususi, Lanjut Usia), Penderita penyakit tertentu, Kelompok di lingkungan institusi seperti Sekolah, Asrama dan pesantren yang menjadi target atau penerima manfaat langsung dari upaya kesehatan, dengan fokus pada pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, dan perubahan perilaku hidup sehat. Kelompok ini dapat dibagi menjadi Sasaran Primer (penerima langsung) dan Sasaran Sekunder (Tokoh Masyarakat, Stake Holder, Kader membantu menyebar Informasi Kesehatan). Kelompok sasaran yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan adalah seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan antara lain :

1. Semua golongan umur penduduk di wilayah Daerah.
2. klinik/balai pengobatan.
3. apotek dan toko obat.
4. tempat tempat umum dan tempat pengelolaan makanan.

5. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu dan Posbindu; dan
6. depot air minum.

2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Kesehatan

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari kondisi yang ada, maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Identifikasi Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas Pelayanan Dinas Kesehatan

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi	Penyebab langsung : - Perdarahan - Hipertensi Penyebab tidak langsung : Komplikasi, penyakit penyerta pada kehamilan, persalinan dan nifas	• Kompetensi tenaga kesehatan yang masih rendah • Belum Meratanya Distribusi Tenaga Kesehatan • Akses pelayanan kesehatan karena faktor geografis yang sulit • Kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang belum memadai
2	Masih tingginya prevalensi Balita Gizi Kurang dan Stunting	- Aksesibilitas pangan - Pola asuh - Air minum, sanitasi, pelayanan kesehatan	• Masalah kemiskinan, menyebabkan kurangnya kemampuan untuk mengakses pangan yang baik • Perilaku/ asuhan ibu dan anak yang tidak baik • Kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan mulai dari ibu hamil hingga anak usia kurang dari 2 tahun • Penyakit penyerta
3	Status Penyakit dan Penyehatan lingkungan	Meningkatnya angka kesakitan,kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular	• Masih rendahnya Pemeriksaa Deteksi Dini pada penyakit menular seperti :TBC, Malaria, ISPA, Diare, Hepatitis B&C, Filariasis, HIV, Sifilis • Rendahnya Pemahaman dan / pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular dan Penyakit Tidak Menular • Masalah kesehatan lingkungan dimana masih banyak rumah tangga yang belum akses jamban dan air bersih sehingga masalah penyakit infeksi sering terjadi seperti diare, TBC dan kecacingan
4	Peningkatan Akses terhadap pelayanan Keseahtan Dasar dan Rujukan yang berkualitas	Fasilitas kesehatan dasar dan rujukan belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan	• Jumlah dan Jenis tenaga kesehatan di FKTP masih ada yang belum memenuhi standar • Jenis dan jumlah Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan belum memenuhi standar.
5	Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Belum Terpenuhinya Sarana dan Prasarana serta Alat kesehatan	• Jenis dan jumlah Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan belum memenuhi standar.
6	Pemenuhan Sumber	Jumlah dan	• Perencanaan kebutuhan SDM

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	daya Manusia Keseahtan yang memiliki kompetensi	ketesediaan Sumber Daya Kesehatan belum memadai	Kesehatan termasuk di dalamnya tenaga kesehatan belum dilaksanakan secara optimal • Masih kurangnya pembinaan terhadap mutu/kualitas tenaga kesehatan • Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan
7	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat masih rendah	• Masih kurangnya Tenaga Promosi Kesehatan • Kurangnya media promosi kesehatan
8	Peningkatan manajemen, Penelitian, Pengembangan dan Sistem Informasi	Manajemen dan Sistem Informasi Kesehatan masih lemah	• Kurangnya tenaga yang berkompeten • Akses dan Jarak yang sangat jauh

Sumber Data: Dinas Kesehatan Tahun 2025

Isu-isu strategis merupakan gambaran permasalahan-permasalahan yang dikedepankan untuk diatasi dan berdampak luas. Suatu kondisi atau situasi yang menjadi isu strategis apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau menghilangkan peluang besar untuk meningkatnya pelayanan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Sebuah isu strategis dapat dilihat dari:

1. apakah isu tersebut sedang menjadi perhatian;
2. apakah isu tersebut mendesak;
3. apakah isu tersebut sesuai dengan kebutuhan publik;
4. apakah isu tersebut membantu kebutuhan publik;
5. apakah isu tersebut sesuai dengan visi dan misi;
6. Apakah isu tersebut melibatkan stakeholder luas; dan
7. apakah isu strategis tersebut aman dari dampak dari luar.

Tabel 2.7
Isu Strategis Dinas Kesehatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM)	Belum Optimalnya Upaya Pengelolaan Usaha Kesehatan Masyarakat	Masalah Penyakit tidak Menular (penyakit jantung, diabetes, hipertensi dan stroke), kesehatan ibu dan anak (termasuk stunting dan angka kematian tinggi), penyakit menular (Tuberculosis/TB, HIV, dan infeksi lainnya)	Dampak Perubahan Iklim dan polusi terhadap kesehatan, peningkatan resiko penyakit menular, ancaman bahan kimia berbahaya, serta krisis keanekaragaman hayati yang mempengaruhi ketahanan pangan dan kesehatan global	Dampak Perubahan Iklim, bencana alam, polusi udara dan air, secara langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat dengan meningkatkan resiko penyakit pernafasan dan infeksi, keracunan serta gangguan akibat bencana alam	Sanitasi dan Kebersihan, Penyakit Menular dan Zoonosis, Keterbatasan Sumber Daya, Akses dan Keterjangkauan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Percepatan Penurunan Stunting, Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), dan Bayi (AKB), Peningkatan Kualitas Layanan Primer dan Lanjutan, Penguatan Sistem Informasi dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular, serta Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Sumber Data: Dinas Kesehatan Tahun 2025

Isu-isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI Tahun 2025-2029 terkait dengan pembangunan kesehatan di Daerah yaitu:

1. pembangunan kesehatan telah menunjukkan perbaikan pada berbagai indicator dampak kesehatan seperti Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Umur Harapan Hidup (UHH), serta Prevalensi Gizi Kurang, namun fakta juga menunjukkan bahwa pencapaian tersebut masih menyisakan disparitas derajat kesehatan yang tidak kunjung selesai pada berbagai kelompok penduduk. Disparitas dimaksud mencakup masih jauh berada dibawah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
2. Angka Kematian Ibu (AKI) sudah mengalami penurunan. Demikian juga halnya dengan Angka Kematian Bayi (AKB) dari target IKK tahun 2024.
3. Masih terbatasnya jangkauan rumah tangga terhadap asupan gizi kurang.
4. Terkait akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat yang melakukan pengobatan ke Puskesmas, dari disetiap dusun, desa dan kecamatan serta jaminnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat tidak mampu sebagai penerima bantuan iuran (PBI) dari BPJS kesehatan.
5. Akreditasi madya di puskesmas perlu ditingkatkan agar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit lebih baik.
6. Penyakit menular terutama TBC, dan malaria masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol dan perlu upaya keras untuk dapat mencapai target MDG's. Selain itu, terdapat beberapa penyakit seperti penyakit filariasis yang masih endemik. HIV/AIDS juga mulai berkembang. Disamping itu, terjadi peningkatan penyakit tidak menular yang berkontribusi besar terhadap kesakitan dan kematian (diabetes, jantung, hipertensi, stroke) terutama pada penduduk perkotaan.
7. Masih tingginya penyakit berbasis lingkungan (diare, DBD, malaria, ISPA dan dampak bencana lainnya) akibat masih rendahnya kualitas lingkungan (kualitas air bersih dan sanitasi dasar) dan pengembangan Desa Sehat perlu dipacu dengan komitmen Kepala Desa setempat.
8. Belum optimalnya system rujukan pelayanan kesehatan.
9. Tenaga strategis bidang kesehatan baik dari segi kualitas, kuantitas, jenis profesi dan distribusinya belum merata sehingga menimbulkan dampak terhadap akses pelayanan kesehatan masyarakat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu pada isu isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 telah menetapkan Visi dan Misi di dalam RPJMD sebagai berikut:

Visi	“Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera”
Misi 1	Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas
Misi 2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Ekonomi Daerah
Misi 3	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan
Misi 4	Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi
Misi 5	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana
Misi 6	Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia
Misi 7	Mewujudkan Masyarakat yang Aman Harmonis dan Berkeadilan
Misi 8	Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Tepercaya

Berdasarkan ke delapan misi tersebut diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan misi ke - 1 yaitu Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas. Kemudian Dinas Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menetapkan tujuan berdasarkan misi yang diampu yaitu *"Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif"*.

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan 5 tahun sebagai penjabaran secara teknis, yaitu *Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif.* Dapat kita lihat pada table 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

TUJUAN		SASARAN	
1	Terwujudnya Birokrasi Kelas Dunia	1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel
2	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing	1.2	Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat

Sumber Data: RPJMD Kab. Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tentunya harus selaras dan mendukung visi misi kepala daerah selama 5 tahun rencana pembangunan. Sesuai dengan isu strategis yang menjadi pokok perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan, tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi		Usia Harapan Hidup (UHH)	71,33 Tahun	71,46 tahun	71,59 tahun	71,72 tahun	71,85 tahun	71,98 tahun
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (per 100 rb kelahiran hidup)	208	208	208	208	208	200
			Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	15	13.8	13.1	12.5	11.9	11.9
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan gratis	100	100	100	100	100	100
			Angka Kematian Balita (per 1000 kelahiran hidup)	15	13.8	13.1	12.5	11.9	11.9
			Prevalensi gizi kurang	31.9	30.65	29.4	28.15	26.9	26.6
			Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	80	85	90	93	95	95
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage)*	56	62	68	74	80	86
			Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	84	84	84	85	85	85
			MALARIA	<1 /00	<1 /00	<1 /00	<1 /00	<1 /00	<1 /00
			SDMK	/100.000 Pddk	/100.000 Pddk	/100.000 Pddk	/100.000 Pddk	/100.000 Pddk	/100.000 Pddk

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			SARPRAS	38%	41%	46%	52%	57%	63%
			YANCIL	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional	98,5	98.5	98,5	98,5	100	100
			Prevalensi Stunting	31,9	30,65	29,4	28,15	26,9	26,6
			Tingkat Morbiditas	13,5	13,0	12,8	12,4	12,00	11,5
		Meningkatnya kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip	83,65	83,80	83,84	84,00	84,15	84,30
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	2	2	2	2	2	2
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Dinas Kesehatan Tahun 2025

3.3 Strategi Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Strategi yang ditempuh dalam memenuhi tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Kesehatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah:

Tabel 3.3
Strategi Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

VISI	:	"Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera"		
Misi 1	:	Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas		
Tujuan	Sasaran	Stategi	Arah Kebijakan	
Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Strategi dalam Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat memiliki 5 pilar di dalam transformasi Kesehatan, antara lain. 1. Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan. 2. Meningkatkan Mutu Pendidikan Kesehatan dan Kesadaran Masyarakat. 3. Promosi Periaku Hidup Bersih dan Sehat 4. Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular. 5. Kebijakan Pembagunan Kesehatan yang Inklusif dan Berkelanjutan	1 2	Kemampuan pemerintah untuk cepat dan efektif merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat. dengan mendengarkan dan memperhatikan masalah yang ada. Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*)
	Meningkatnya Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatkan Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2. meningkatkan akses kesehatan masyarakat agar semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. 3. Memberikan Promosi kesehatan terhadap masyarakat	1 2	Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehata. Mendorong masyarakat berprilaku hidup bersih dan sehat

Sumber Data: Dinas Kesehatan Tahun 2025

Tahapan peningkatan layanan kesehatan dilaksanakan agar menjadi focus Kepada Kesehatan mengarah pada prioritas setiap tahunnya. Prioritas Kesehatan merupakan tema atau agenda pemerintah daerah tahunan capaian antara menuju tujuan sasaran 5 (lima) tahunan dalam Renstra melalui sebagimana terlihat dalam Tabel 3.4.

Tabel. 3.4
Penahapan Renstra Dinas Kesehatan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan pondasi perencanaan peningkatan derajat kesehatan yang sinergis dan selaras	Percepatan implementasi perencanaan peningkatan derajat kesehatan yang terintegrasi dan berdampak	Pemantapan Implementasi perencanaan peningkatan derajat kesehatan melalui inovasi dan disertai evaluasi tengah	Pemerataan hasil dan dampak peningkatan derajat kesehatan	Penyelesaian target Peningkatan derajat kesehatan dan keberlanjutan program kesehatan

		periode		

Sumber Data: Dinas Kesehatan Tahun 2025

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepala daerah yang menjabat, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi (tusi) Dinas Kesehatan. Renstra Dinas Kesehatan menjadi panduan bagi Dinas Kesehatan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Secara umum, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, arah kebijakan dalam Renstra Dinas Kesehatan sebagimana terlihat dalam Tabel 3.5.

Tabel. 3.5
Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan

NO	OPERSIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat	1. Peningkatan komunikasi 2. perubahan perilaku dan 3. pemberdayaan masyarakat 4. Terhadap stunting. 5. Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat dan penguatan akses pangan. 6. Melaksanakan Pemenuhan SPM Kesehatan. 7. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, alkes pada setiap layanan kesehatan. □ 8. Penataan dan distibusi tenaga kesehatan. 9. Peningkatan kompetensitenaga kesehatan. □ 10. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan pada daerah terpencil. 11. Penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) yang inklusif. □ 12. Beasiswa pendidikan bagi tenaga kesehatan (dokter) ke tingkatan lebih tinggi (spesialis). 13. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. 14. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI dan AKB. 15. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi. 16. Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC, stunting, penyakit tidak menular, penyakit menular.	1. Kemampuan pemerintah untuk cepat dan efektif merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat. dengan mendengarkan dan memperhatikan masalah yang ada. 2. Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) 3. Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehata. 4. Mendorong masyarakat berprilaku hidup bersih dan sehat	

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGARAAN DINAS KESEHATAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas berdasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Kesehatan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menegah perangkat daerah, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan yang dijabarkan dalam matrik berikut.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya Birokrasi yang Prima	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel	Meningkatnya kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	persentase Peningkatan Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Meningkatnya tata pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Meningkatnya tata	Persentase Monitoring,	Jumlah Dokumen	Monitoring, Evaluasi, dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pengelolaan administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penilaian Kinerja Pegawai	
				Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
				Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yangDisediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Meningkatnya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah	
			Meningkatnya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
					Meningkatnya Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Persentase Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang	Pengembangan Rumah Sakit	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		
				Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yg dibangun	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Persentase Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yg dibangun	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Persentase Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
				Persentase Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
				Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
					Meningkatnya Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya		Jumlah Dokumen	Operasional Pelayanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Operasional Pelayanan Puskesmas	Puskesmas	
				Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
				Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
				Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
				Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
				Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Produktif	Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
				Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatanpada Usia Lanjut	Jumlah orang yg dapat Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
				Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang yang dapat Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
				Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
				Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
				Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
				Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
				Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
				Persentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan	persentase pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
				Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
				Persentase Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan sesuai standar	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
				Persentase Pengelolaan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
				Persentase Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Persentase Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan Malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
						PROGRAM PENINGKATAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Meningkatnya Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Terlaksananya sediaan Farmasi, alat kesehatan pengendalian, pengawasan produk makan minum	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
					Pengendalian dan Pengawasan serta	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.	
				Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatnya persentase Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	

Sumber Data: Dinas Kesehatan Tahun 2025

Guna Memastikan pencapaian sasaran strategis maupun program, kegiatan, dan sub kegiatan didalamnya, maka disampaikan pula rencana pendanannya serta program prioritas sebagai indikasi pendanaan Dinas Kesehatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Rencana Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME	BASE LINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan Tugas Perangkat Daerah	100%	100%	73,326,044,141	100	82,600,648,555	100	89,957,713,410	100	98,262,740,751	100	98,262,740,751	Dinas Kesehatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	-	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	Dinas Kesehatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen		100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	Dinas Kesehatan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan LAKIP, SAKIP, Profil, Laporan Tahunan dan Penetapan Kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen		100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	Dinas Kesehatan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Layanan	2 Layanan	73,182,044,141	100	80,650,248,555	100	88,700,273,410	100	97,555,300,751	100	97,555,300,751	Dinas Kesehatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesejahteraan ASN	885 Orang	885 Orang	73,182,044,141	100	80,500,248,555	100	88,550,273,410	100	97,405,300,751	100	97,405,300,751	Dinas Kesehatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kesejahteraan ASN	1 org				150,000,000	47 org	150,000,000	47 org	150,000,000	47 org	150,000,000	Dinas Kesehatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	-	100	450,000,000	100	450,000,000	100	450,000,000	100	450,000,000	Dinas Kesehatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	0	0		1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	Dinas Kesehatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaa Peralatan	0	0		1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME	BASE LINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	dan Perlengkapan Kantor												
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0		1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	Dinas Kesehatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 paket	1 paket		1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	Dinas Kesehatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	0		1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	1 paket	30,000,000	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD	0	0		40 kali	300,000,000	40 kali	300,000,000	40 kali	300,000,000	40 kali	300,000,000	Dinas Kesehatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	-	100	1,250,000,000	100	350,000,000	100	-	100	-	Dinas Kesehatan
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0		1 unit	300,000,000	1 unit						
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	0	0		1 unit	800,000,000	1 unit	-	100	-	100	-	Dinas Kesehatan
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	0	0		1 paket	150,000,000	1 paket	150,000,000				-	Dinas Kesehatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0				1 paket	200,000,000				-	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	64,000,000	100	70,400,000	100	77,440,000	100	77,440,000	100	77,440,000	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Rekening air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	64,000,000	12 bulan	70,400,000	12 bulan	77,440,000	12 bulan	77,440,000	12 bulan	77,440,000	Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10 bulan	10 bulan		100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100	100	80,000,000	100	80,000,000	100	280,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME	BASE LINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	3 Unit	3 Unit	80,000,000	3 Unit	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Terpelihara Dan Di rehab					-	1 paket	200,000,000				-	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)	300 / 100rb KH	250 / 100rb KH	3.268.727.161	200 / 100rb KH	3.570.665.257	200 / 100rb KH	3.645.127.645	150 / 100rb KH	3.697.454.332	100 / 100rb KH	3.735.490.730	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	26,30%	23%	3.268.727.161	22%	3.570.665.257	20%	3.645.127.645	18%	3.697.454.332	14%	3.735.490.730	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	45%	60%	3.268.727.161	70%	3.570.665.257	80%	3.645.127.645	90%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	60%	65%	3.268.727.161	70%	3.570.665.257	80%	3.645.127.645	90%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	65%	70%	3.268.727.161	75%	3.570.665.257	80%	3.645.127.645	90%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	70%	80%	3.268.727.161	85%	3.570.665.257	90%	3.645.127.645	95%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	90%	95%	3.268.727.161	100%	3.570.665.257	100%	3.645.127.645	100%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	65%	70%	3.268.727.161	75%	3.570.665.257	80%	3.645.127.645	90%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	Dinas Kesehatan
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92%	95%	3.268.727.161	100%	3.570.665.257	100%	3.645.127.645	100%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai	60%	65%	3.268.727.161	70%	3.570.665.257	80%	3.645.127.645	90%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME	BASE LINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
	standar												
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	50%	60%	3.268.727.161	70%	3.570.665.257	80%	3.645.127.645	90%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	40%	50%	3.268.727.161	60%	3.570.665.257	70%	3.645.127.645	80%	3.697.454.332	90%	3.735.490.730	Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	90%	92%	3.268.727.161	95%	3.570.665.257	100%	3.645.127.645	100%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai standar	62%	70%	3.268.727.161	80%	3.570.665.257	90%	3.645.127.645	100%	3.697.454.332	100%	3.735.490.730	Dinas Kesehatan
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8 Jenis	8 Jenis	9,719,293,893	100	25,693,518,482	100	223,692,870,331	100	24,092,870,331	100	24,092,870,331	Dinas Kesehatan
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi rasio tempat tidur					-	I paket	200,000,000,000		-		-	Dinas Kesehatan
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pembangunan Puskesmas				I paket	4,000,000,000	I paket		I paket	4,000,000,000	I paket	4,000,000,000	Dinas Kesehatan
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya				3 unit	2,400,000,000	1 UNIT	6,000,000,000	3 unit	2,400,000,000	3 unit	2,400,000,000	Dinas Kesehatan
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				3 unit	1,000,000,000	3 unit	1,000,000,000	3 unit	1,000,000,000	3 unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang ditingkatkan Fungsinya				1 unit	2,000,000,000	1 unit	2,000,000,000	1 unit	2,000,000,000	1 unit	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan Lainnya yang dikembangkan			300,000,000	3 unit	1,000,000,000	3 unit	1,000,000,000	3 unit	1,000,000,000	3 unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang layak				1 Unit	3,000,000,000	1 Unit	500,000,000	1 Unit	500,000,000	1 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase Puskesmas yang layak pakai		2 unit	1,000,000,000	2 unit	1,000,000,000	2 unit	1,000,000,000	2 unit	1,000,000,000	2 unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Persentase Rumah Dinas Tenaga				1 unit	282,295,200	1 unit	310,524,720	1 unit	310,524,720	1 unit	310,524,720	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME	BASE LINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
Tenaga Kesehatan	Kesehatan yang layak pakai												
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Fasilitas Kesehatan Lainnya layak pakai :	5 unit	6 unit	1,800,000,000	6 unit	1,980,000,000	6 unit	2,178,000,000	6 unit	2,178,000,000	6 unit	2,178,000,000	Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan Alat Kesehatan yang tersedia				1 paket	1,500,000,000	1 paket	1,500,000,000	1 paket	1,500,000,000	1 paket	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan Alat Kesehatan yang layak pakai		1 paket	500,000,000	1 paket	800,000,000	1 paket	800,000,000	1 paket	800,000,000	1 paket	800,000,000	Dinas Kesehatan
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Yang ditingkatkan Fungsiny	100	100	2,100,000,000	100	2,310,000,000	100	2,541,000,000	100	2,541,000,000	100	2,541,000,000	Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	tersedianya obat dan vaksin di pelayanan kesehatan	100%	100%	3,484,164,893	100%	3,832,581,382	100%	4,215,839,521	100%	4,215,839,521	100%	4,215,839,521	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesma	15 Puskesmas	15 Puskesmas	20,000,000	15 Puskesmas	22,000,000	15 Puskesmas	24,200,000	15 Puskesmas	24,200,000	15 Puskesmas	24,200,000	Dinas Kesehatan
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan		3 kali	50,000,000	3 kali	55,000,000	3 kali	60,500,000	3 kali	60,500,000	3 kali	60,500,000	Dinas Kesehatan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jenis Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan yang tersedia		100%	465,129,000	100%	511,641,900	100%	562,806,090	100%	562,806,090	100%	562,806,090	Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	100	27,425,057,132	100	30,251,446,575	100	33,281,591,233	100	33,341,591,233	100	33,281,591,233	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100	100	359,888,000	100	395,876,800	100	435,464,480	100	435,464,480	100	435,464,480	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan	Persentase Ibu Bersalin	100	100	391,595,000	100	430,754,500	100	473,829,950	100	473,829,950	100	473,829,950	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME	BASE LINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
Kesehatan Ibu Bersalin	yang mendapatkan Pelayanan Persalinan												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	100	140,540,000	100	154,594,000	100	170,053,400	100	170,053,400	100	170,053,400	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	100	100,000,000	100	110,000,000	100	121,000,000	100	121,000,000	100	121,000,000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar/ Sekolah yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	60,500,000	100	60,500,000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	60,500,000	100	60,500,000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	254,672,000	100	280,139,200	100	308,153,120	100	308,153,120	100	308,153,120	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	60,500,000	100	60,500,000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	60,500,000	100	60,500,000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	60,500,000	100	60,500,000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100,000,000	100	110,000,000	100	121,000,000	100	121,000,000	100	121,000,000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang Tdengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	60,500,000	100	60,500,000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya penanganan dan penanggulangan penyakit yang berpotensi KLB	100	100	100,599,900	100	110,659,890	100	121,725,879	100	121,725,879	100	121,725,879	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan	Terlaksananya			75,000,000	100	82,500,000	100	90,750,000	100	90,750,000	100	90,750,000	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME	BASE LINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	penanganan dan penanggulangan penyakit akibat bencana dan/atau berpotensi bencana												
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Penanganan dan Penanggulangan Gizi masyarakat	100	100	300,000,000	100	330,000,000	100	363,000,000	100	363,000,000	100	363,000,000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Upaya Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			44,100,000	100	48,510,000	100	53,361,000	100	53,361,000	100	53,361,000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Desa Sehat			20,000,000	10 Desa	50,000,000	10 Desa	50,000,000	13 Desa	80,000,000	10 Desa	50,000,000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Desa Sehat			20,105,700	10 Desa	50,000,000	10 Desa	50,000,000	13 Desa	80,000,000	10 Desa	50,000,000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			20,000,000	100	22,000,000	100	24,200,000	100	24,200,000	100	24,200,000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksannaya pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	100	105,040,000	100	115,544,000	100	127,098,400	100	127,098,400	100	127,098,400	Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya upaya deteksi dini, penanganan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	100	100	407,310,000	100	448,041,000	100	492,845,100	100	492,845,100	100	492,845,100	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	100	6,398,600,000	100	7,038,460,000	100	7,742,306,000	100	7,742,306,000	100	7,742,306,000	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Terlaksananya penyelenggaraan Kabupaten/kota Sehat		5 desa	20,000,000	8 desa	50,000,000	10 desa	70,000,000	10 desa	70,000,000	10 desa	70,000,000	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 bulan	12 bulan	300,000,000	12 bulan	330,000,000	12 bulan	363,000,000	12 bulan	363,000,000	12 bulan	363,000,000	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya biaya Operasional IFK Tersedianya Obat dan BMHP	12 bulan	12 bulan	196,718,600	12 bulan	216,390,460	12 bulan	238,029,506	12 bulan	238,029,506	12 bulan	238,029,506	Dinas Kesehatan
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) (Case Notification Rate CNR)	90%	90%	150,000,000	100%	165,000,000	100%	181,500,000	100%	181,500,000	100%	181,500,000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan pelayanan	Jumlah orang dengan	100%	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	121,000,000	100%	121,000,000	100%	121,000,000	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME	BASE LINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar												
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Eliminasi Malaria	<1/00	<1/00	100,000,000	<1/00	110,000,000	<1/00	121,000,000	<1/00	121,000,000	<1/00	121,000,000	Dinas Kesehatan
Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Terlaksananya Fasilitasi Layanan Rujukan dan Rujukan Balik masyarakat miskin	12 bulan	12 bulan	350,000,000	12 bulan	385,000,000	12 bulan	423,500,000	12 bulan	423,500,000	12 bulan	423,500,000	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Mapaddegat	Visite Rate	2.6	2.6	1,802,552,732	2,8	1,982,808,005	2,9	2,181,088,806	2,9	2,181,088,806	3	2,181,088,806	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sioban	Visite Rate	2.6	2.6	1,500,482,500	2,8	1,650,530,750	2,9	1,815,583,825	2,9	1,815,583,825	3	1,815,583,825	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Bosua	Visite Rate	2.6	2.6	892,095,500	2,8	981,305,050	2,9	1,079,435,555	2,9	1,079,435,555	3	1,079,435,555	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Siberut	Visite Rate	2.6	2.6	1,560,360,100	2,8	1,716,396,110	2,9	1,888,035,721	2,9	1,888,035,721	3	1,888,035,721	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Peipei	Visite Rate	2.6	2.6	1,116,484,000	2,8	1,228,132,400	2,9	1,350,945,640	2,9	1,350,945,640	3	1,350,945,640	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Saibi Samukop	Visite Rate	2.6	2.6	1,136,610,250	2,8	1,250,271,275	2,9	1,375,298,403	2,9	1,375,298,403	3	1,375,298,403	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Muara Sikabaluan	Visite Rate	2.6	2.6	1,374,906,000	2,8	1,512,396,600	2,9	1,663,636,260	2,9	1,663,636,260	3	1,663,636,260	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Betaet	Visite Rate	2.6	2.6	789,740,000	2,8	868,714,000	2,9	955,585,400	2,9	955,585,400	3	955,585,400	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sikakap	Visite Rate	2.6	2.6	1,612,700,000	2,8	1,773,970,000	2,9	1,951,367,000	2,9	1,951,367,000	3	1,951,367,000	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Malakopa	Visite Rate	2.6	2.6	965,237,000	2,8	1,061,760,700	2,9	1,167,936,770	2,9	1,167,936,770	3	1,167,936,770	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Bulasat	Visite Rate	2.6	2.6	887,889,850	2,8	976,678,835	2,9	1,074,346,719	2,9	1,074,346,719	3	1,074,346,719	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Simatalu	Visite Rate	2.6	2.6	656,650,800	2,8	722,315,880	2,9	794,547,468	2,9	794,547,468	3	794,547,468	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sigapokna	Visite Rate	2.6	2.6	953,691,200	2,8	1,049,060,320	2,9	1,153,966,352	2,9	1,153,966,352	3	1,153,966,352	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Saumanganya	Visite Rate	2.6	2.6	1,172,800,000	2,8	1,290,080,000	2,9	1,419,088,000	2,9	1,419,088,000	3	1,419,088,000	Dinas Kesehatan
Operasional Pelayanan Puskesmas Sarereiket	Visite Rate	2.6	2.6	648,688,000	2,8	713,556,800	2,9	784,912,480	2,9	784,912,480	3	784,912,480	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jenis Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi kesehatan				1 paket	150,000,000	1 paket	150,000,000	1 paket	150,000,000	1 paket	150,000,000	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME	BASE LINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	85%	88%	704.857.688	90%	688.641.195	91%	703.002.068	93%	713.093.832	95%	720.429.560	Dinas KesehatanBidang Kesehatan
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				-	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	Dinas Kesehatan
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah perizinan Praktek tenaga kesehatan dan sarana kesehatan yang diterbitkan				1 kali	30,000,000	1 kali	30,000,000	1 kali	30,000,000	1 kali	30,000,000	Dinas Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ratio Tenaga Kesehatan	100	100	797,147,000	100	876,861,700	100	964,547,870	100	964,547,870	100	964,547,870	Dinas Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100	797,147,000	100	876,861,700	100	964,547,870	100	964,547,870	100	964,547,870	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	90%	92%	1.372.865.408	93%	2.082.888.067	94%	2.126.324.460	96%	2.156.848.361	98%	2.179.036.259	Dinas Kesehatan
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pengawasan, Pengendalian dan Fasilitasi Perizinan Apotik, Toko Obat, Alat Kesehatan, Usaha Mikro Obat Tradisional,	100	100	63,790,000	100	70,169,000	100	77,185,900	100	77,185,900	100	77,185,900	Dinas Kesehatan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	100	63,790,000	100	70,169,000	100	77,185,900	100	77,185,900	100	77,185,900	Dinas Kesehatan
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang	Persentase Industri Rumah Tangga yang memeiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	100	100	108,764,000	100	119,640,400	100	131,604,440	100	131,604,440	100	131,604,440	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME	BASE LINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga													
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga yang memeiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	100	100	108,764,000	100	119,640,400	100	131,604,440	100	131,604,440	100	131,604,440	Dinas Kesehatan
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	100	100	185,388,000	100	200,926,800	100	218,019,480	100	218,019,480	100	218,019,480	Dinas Kesehatan
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	100	100	155,388,000	100	170,926,800	100	188,019,480	100	188,019,480	100	188,019,480	Dinas Kesehatan
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	100	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	Dinas Kesehatan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi	100	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	Dinas Kesehatan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang layak dikonsumsi	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	60,500,000	100	60,500,000	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME	BASE LINE 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang layak dikonsumsi	100	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	60,500,000	100	60,500,000	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	85%	88%	593.317.370	90%	541.550.897	91%	552.844.360	93%	560.780.574	95%	566.549.427	Dinas Kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Sehat			-		50,000,000		50,000,000		80,000,000		50,000,000	Dinas Kesehatan
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa Sehat				10 Desa	50,000,000	10 Desa	50,000,000	13 Desa	80,000,000	10 Desa	50,000,000	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Sehat			50,000,000		80,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	Dinas Kesehatan
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Desa Sehat	2 Desa	6 Desa	50,000,000	8 Desa	80,000,000	9 Desa	100,000,000	9 Desa	100,000,000	9 Desa	100,000,000	Dinas Kesehatan

Sumber Data: Dinas Kesehatan Tahun 2025

Tabel 4.3
Daftar Sub kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Angka Kematian Bayi (Per1000 KH. 2. Angka Kematian Ibu Melahirkan (100 rb KH) 3. Prevalensi Gizi Kurang pada Balita. 4. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan persalinan di sarana/ pusat kesehatan. 5. Cakupan Desa UCI 6. Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk. 7. Persentase Masyarakat miskin yang memanfaatkan jaminan kesehatan daerah. 8. Persentase Masyarakat Miskin yang Memanfaatkan Jaminan Kesehatan Daerah. 9. Akreditasi Rumah Sakit	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIPAS	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Rata-rata lama pasien dirawat	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Desa dengan PHBS	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber Data: Dinas Kesehatan Tahun 2025

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan sebagai ukuran capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan karena menjadi indikator keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah, yang digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan rencana dimasa depan. Penilain tersebut sebagai akuntabilitas kinerja dan informai tentang pencapain kinerja penyelenggaran bidang urusan pemerintahan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja Indikator kinerja atau indicator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah kepada masyarakat. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	71,33	71,46	71,59	71,72	71,85	71,98	
2	Angka Kematian Ibu (per 100 rb kelahiran hidup)	per 100 rb kelahiran hidup	208	208	208	208	208	200	
3	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	per 100 rb kelahiran hidup	15	13.8	13.1	12.5	11.9	11.9	
4	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan gratis	persen	100	100	100	100	100	100	
5	Angka Kematian Balita (per 1000 kelahiran hidup)	per 1000 kelahiran hidup	15	13.8	13.1	12.5	11.9	11.9	
6	Prevalensi gizi kurang	persen	31.9	30.65	29.4	28.15	26.9	26.6	
7	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	persen	80	85	90	93	95	95	
8	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage)*	persen	56	62	68	74	80	86	
9	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	persen	84	84	84	85	85	85	
10	MALARIA	<1 /00	<1 /00	<1 /00	<1 /00	<1 /00	<1 /00	<1 /00	
11	SDMK	/100.000 Pddk	/100.000 Pddk	/100.000 Pddk	/100.000 Pddk	/100.000 Pddk	/100.000 Pddk	/100.000 Pddk	
12	SARPRAS	persen	38%	41%	46%	52%	57%	63%	
13	YANCIL	kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	
14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	persen	100	100	100	100	100	100	
15	Proporsi penduduk	persen	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dengan aktifitas fisik cukup								
16	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	persen	98,5	98.5	98,5	98,5	100	100	
17	Prevalensi Stunting		31,9	30,65	29,4	28,15	26,9	26,6	
18	Tingkat Morbiditas		13,5	13,0	12,8	12,4	12,00	11,5	
19	Nilai Lakip	skor	83,65	83,80	83,84	84,00	84,15	84,30	
20	Jumlah Inovasi yang diterapkan	unit	2	2	2	2	2	2	
21	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber Data: Dinas Kesehatan Tahun 2025

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	/ 100rb KH	300 / 100rb KH	250 / 100rb KH	200 / 100rb KH	200 / 100rb KH	150 / 100rb KH	100 / 100rb KH	
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	26,3	23	22	20	18	14	
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	45	60	70	80	90	100	
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persen	60	65	70	80	90	100	
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	65	70	75	80	90	100	
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	70	80	85	90	95	100	
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	90	95	100	100	100	100	
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Persen	65	70	75	80	90	100	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	92	95	100	100	100	100	
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persen	60	65	70	80	90	100	
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Persen	50	60	70	80	90	100	
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Persen	40	50	60	70	80	90	
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	Persen	90	92	95	100	100	100	
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Persen	62	70	80	90	100	100	

	sesuai standar								
15	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	85	88	90	91	93	95	
16	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	90	92	93%	94	96	98	
17	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	85	88	90%	91	93	95	

Sumber Data: Dinas Kesehatan Tahun 2025

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berisi Tujuan, Kebijakan, Strategi, arah Sasaran beserta Indikator Kinerja yang diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai selama kurun waktu 5 tahun. Keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai tergantung pada faktor-faktor kunci keberhasilan dan dukungan partisipasi masyarakat, sektor swasta dan lembaga pemerintah lain dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam bidang kesehatan.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel ii
Daftar Gambar iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 28

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 57
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 57
3.3 Strategi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 101
3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 104

BAB IV PROGRAM. KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program, Kegitan, Sub Kegiatan 109
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 147

BAB V PENUTUP 153

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah SDM ASN menurut Status Kepegawaian 15
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana 15
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPR.. 17
Tabel 2.4 Layanan Air Bersih Tahun 2021 18
Tabel 2.5 Layanan Air Bersih Tahun 2022 19
Tabel 2.6 Layanan Air Bersih Tahun 2023 20
Tabel 2.7 Layanan Air Bersih Tahun 2024 21
Tabel 2.8 Layanan Sanitasi Tahun 2021 23
Tabel 2.9 Layanan Sanitasi Tahun 2022 24
Tabel 2.10 Layanan Sanitasi Tahun 2023 25
Tabel 2.11 Layanan Sanitasi Tahun 2024 26
Tabel 2.12 Identifikasi Permasalahan pada Bidang Kerja 29
Tabel 2.13 Pengenbangan Pelayanan Tantangan dan Peluang..... 31
Tabel 2.14 Isu Strategis Dinas PUPR 34
Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PUPR 61
Tabel 3.2 Strategi Dinas PUPR.....101
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas PUPR.....103
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas PUPR Tahun 2025-2029 106
Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.....110
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan 127
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 142
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama 148
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci 149

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 14

BAB I
PENDHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Renstra ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai wilayah kepulauan memiliki karakteristik geografis yang kompleks dan rentan terhadap bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Dalam konteks ini, peran Dinas PUPR sangat strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, memperkuat konektivitas antarwilayah, menjamin penyediaan layanan dasar, dan meningkatkan kualitas tata ruang yang adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang diawali dengan:

1. Persiapan Penyusunan Renstra, antara lain :
   a. Pembentukan SK Tim penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.
   b. Orintasi mengenal RENSTRA.
   c. Penyusunan Agenda Tim Penyusunan RENSTRA.
   d. Penyiapan Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah antara lain:
   a. Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang
   b. Perumusan masalah dan isu strategis
   c. Perumusan tujuan dan sasaran.
   d. Perumusan strategi dan arah kebijakan.
   e. Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang
3. Rancangan RENSTRA antara lain:
   a. Penyususnan Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempunaan Ranwal Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang
   b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat daerah/ lintas perangkat daerah.
   c. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPRD, Tokoh Masyarakat, Akademisi, Asosiasi Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perwakilan /Kelompok Perempuan, Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak dan Pemangku Kepentingan terkait.
   d. Hasil Kesepakatan Forum perangkat daerah dituangkan dalam Berita Acara.
   e. Rancangan Renstra perangkat daerah disempurnakan berdasarkan berita acara.
4. Rancangan Akhir RENSTRA antara lain:
   a. Perumusan rancangan akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029

b. Perumusan Rancangan Akhir Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/subkegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tantang RPJMD.

5. Penetapan RENSTRA antara lain:
   a. Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala perangakat daerah kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang untuk dilakukan proses penetapan Restra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang.
   b. Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
   c. Penetapan Perkada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

Renstra Perangkat Daerahtidak dapat disusun secara terpisah, melainkan harus selaras dengan sistem perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, khususnya RPJMD, RKPD, dan Renja OPD, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan Renstra dengan RPJMD
   Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, arah kebijakan, strategi, program, dan sasaran kinerja dalam Renstra PUPR harus selaras dengan RPJMD Tahun 2025–2029. Renstra menjadi instrumen penting untuk memastikan kontribusi perangkat daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah.
2. Hubungan Renstra dengan RKPD
   Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun. RKPD disusun berdasarkan RPJMD dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Dalam konteks ini, Renstra PUPR memberikan kerangka strategis jangka menengah yang kemudian dijabarkan setiap tahun dalam RKPD melalui prioritas tahunan. Dengan kata lain, Renstra berfungsi sebagai pedoman strategis lima tahunan, sementara RKPD menjadi penjabaran tahunan yang dinamis sesuai perkembangan dan kebutuhan.
3. Hubungan Renstra dengan Renja OPD
   Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang menjadi penjabaran langsung dari Renstra. Renja memuat rencana program, kegiatan, indikator, serta target kinerja tahunan yang sesuai dengan arah pembangunan dalam RKPD. Hubungan ini menunjukkan kesinambungan antara dokumen jangka menengah (Renstra) dengan dokumen tahunan (Renja), sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terarah, terukur, dan sesuai prioritas yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Renstra Dinas PUPR memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah serta berfungsi sebagai dokumen penghubung antara kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan rencana tahunan (RKPD dan Renja OPD). Sinergi ini menjamin agar setiap program dan kegiatan Dinas PUPR dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta pembangunan daerah secara berkelanjutan serta wujud akuntabilitas perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, sebagaimana diamanatkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

1.2 Dasar Hukum Peyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang.
3. Pedoman dalam fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai penjabaran operasional visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah menyangkut fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang.

1.4. Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merumuskan latar belakang Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis serta dasar hukum yang relevan dan signifikan dan menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang. Bab ini terdiri atas:

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PANATAAN RUANG

Bab ini berisi penyajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang disertai evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir, serta mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang dan mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat memengaruhi perangkat daerah baik secara langsung atau pun tidak langsung. Bab ini terdiri atas:

2.1 Gambaran Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang yang penentuannya

didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya dan mengacu pada Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang dijabarkan secara operasional dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan disertai dengan indikator kinerja dan targetnya yang didukung dengan program prioritas pembangunan daerah, Bab ini terdiri atas:

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun 2025-2029
3.3 Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Subkegiatan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya, dan menjelaskan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci berserta Target dan Pagu Indikatif untuk pencapaian 5 (lima) tahun kedepan, Bab ini terdiri atas:

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesesuaian antara target kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang selaku organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dibidang keciptakaryaan dan jasa konstruksi, bina marga, pengelolaan sumberdaya air serta penataan ruang diselenggarakan pada terhadap bidang layanan infrastruktur dasar. Pelayanan tersebut diantaranya pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/reskonstruksi jalan dan jembatan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih, perencanaan dan pengelolaan teknis air limbah domestik SPALD, pembangunan penyediaan air baku, kanal banjir, pengamanan pantai, rehabilitasi sea wall, pembangunan/pemeliharaan jaringan irigasi, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, penataan bangunan gedung

Pada bidang pengendalian dan pemanfaatan ruang, yang diprioritaskan menjadi kewenangan adalah, program penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi penyusunan regulasi Peraturan Daerah rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan penyusunan dokumen RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Sehingga pelayanan sebagaimana yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lebih terarah untuk fokus kepada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kepuluan Mentawai dalam 5 tahun kedepan merupakan hasil analisis Gambaran umum daerah kabupaten kepulauan Mentawai yang mencakup aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum. Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tergambar dalam tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana bidang pekerjaan umum dan penatan ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Mentawai. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

1. Kepala Dinas
   A. Tugas :
      Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.
   B. Fungsi :
      1) Perumusan kebijakan Daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
      2) Pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
      3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
      4) Pelaksanaan administrasi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
      5) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
      6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
2. Sekretariat
   A. Tugas :
      Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi kan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

B. Fungsi :
   1) Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan Dinas;
   2) Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, hukum, kelembagaan, tata laksana, keuangan, kerumahtanggan, aset, kerjasama, hubungan masyarakat, sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
   3) Pengoordinasian penyusunan Renstra, rencana kerja, rencana kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia pegawai aparatur sipil negara, rencana kebutuhan asset, rencana pemanfaatan asset, rencana anggaran kas, rencana kerja program tahunan, rencana pengendalian risiko dan dokumen perencanaan lainnya di lingkungan Dinas;
   4) Pengoordinasian rencana pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi Renstra, laporan evaluasi rencana kerja, dokumen manajemen risiko, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan realisasi fisik dan keuangan, laporan pemanfaatan asset, laporan pengelolaan piutang/utang, laporan pengelolaan keuangan bulanan, semester dan tahunan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dan laporan lainnya di lingkungan Dinas;
   5) Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah, survei kepuasan masyarakat, penilaian dan evaluasi capaian reformasi birokrasi, penilaian dan evaluasi manajemen risiko, serta penilaian dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
   6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

      a. Kepala Sub Bagian dan Kepegawaian
         (1) Tugas :
         Membantu Sekretaris dalam urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.
         (2) Fungsi :
            (a) Penyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
            (b) Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
            (c) Penyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
            (d) Penyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
            (e) Penyiapkan bahan pengelolaan urusan kerumahtanggaan;
            (f) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan aset Daerah di lingkungan Dinas;
            (g) Penyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
            (h) Penyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
            (i) Penyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
            (j) Penyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

(k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

(1) Tugas :

Membantu Sekretaris dalam penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanan urusan keuangan, evaluasi dan pelaporan Dinas.

(2) Fungsi :

(a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di lingkungan Dinas;
(b) Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
(c) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas
(d) Penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
(e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Bina Marga

A. Tugas:

Membantu Kepala Dinas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga.

B. Fungsi :

1) Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan dan konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
2) Pelaksanaan perencanaan Teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian;
3) Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan penerangan jalan umum;
4) Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

A. Tugas:

Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air

B. Fungsi:

1) Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, irigasi, pantai dan rawa;
2) Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, irigasi, pantai dan rawa;
3) Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, irigasi, pantai dan rawa:
4) Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, irigasi, pantai dan rawa;
5) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi

A. Tugas:

Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya dan bina konstruksi.

B. Fungsi:

1) Penyelenggaraan infrastruktur di Permukiman di Kawasan strategis;

2) Penyelenggaran bangunan Gedung untuk kepentingan strategis;
3) Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
4) Penyelenggaran penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah;
5) Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air minum;
6) Pengelolaan dan pengembangan sistem persampahan;
7) Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
8) Melakukan kegiatan pendataan proyek di Daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha;
9) Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
10) Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
11) Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
12) Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
13) Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
14) Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
15) Melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah Daerah; dan
16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

A. Tugas :

Membantu Kepala Dinas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang dan pertanahan

B. Fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
2) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
3) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
4) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
5) Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
6) Pelaksanaan fungsi bidang pertanahan; dan
7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. Seksi Pertanahan

(1) Tugas :

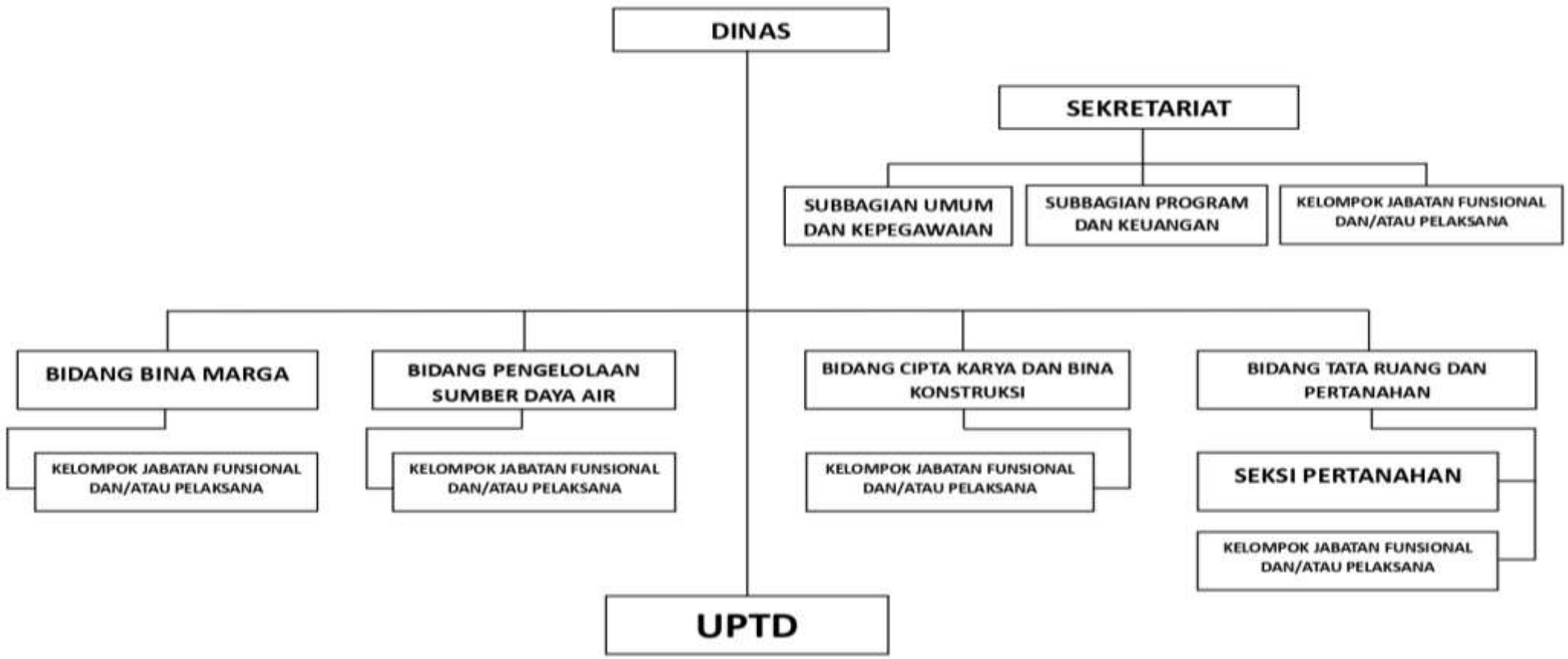
Membantu kepala bidang tata ruang dan pertanahan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertanahan

(2) Fungsi:

(a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
(b) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
(c) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
(d) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
(e) Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
(f) Pelaksanaan fungsi bidang pertanahan; dan
(g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimp

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Gambar : 2.1
Struktur Organisasi



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2025

2.1.2 Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di dukung dengan Sumber Daya Manusia dan Aset dan Modal.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang handal sangat penting untuk pelaksanaan pekerjaan umum dan penataan ruang yang baik. SDM yang berkualitas dapat membantu memastikan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Tabel. 2.1

Jumlah SDM Aparatur Sipil Negara Menurut Status Kepegawaian

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	GOLONGAN				ESELON				STAF
			I	II	III	IV	II	III	IV	JAFUNG	
1	PNS	58	1	18	25	2	1	4	5	8	12
2	PPPK	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas PUPR Oktober Tahun 2025

2.1.2.2 Sumber Daya Aset dan Modal

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung sarana dan prasarana yang tersedia dan secara ringkas diperlihatkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana DPUPR

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (Unit)	KONDISI
A	Peralatan dan Mesin		
1	Kendaraan Alat berat	12	Baik
2	Kendaraan Roda 6	2	Baik
3	Kendaraan Roda 4	6	Baik
4	Kendaraan Roda 2	15	Baik
5	GPS	5	Baik
6	Filling Besi	8	Baik
7	Papan Nama Instansi	2	Baik
8	Kursi Besi/Metal	36	Baik
9	Bangku Tunggu Kayu	2	Baik
10	Meja Biro	30	Baik
11	Kursi sofa	2	Baik
12	AC	15	Baik
13	Televisi	3	Baik
14	Wifi Indihome	1	Baik
15	phone	2	Baik
16	Camera Film	1	Baik
17	Dispenser	8	Baik
18	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	Baik
19	Alat Pembantu pemadan kebakaran	4	Baik
20	PC Unit	8	Baik
21	Note Book	12	Baik
22	Printer	15	Baik
B	Gedung dan Bangunan		
	Bangunan Gedung Kantor	3	Unit

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020-2024

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode tahun 2020-2024 dapat dilihat dari capaian indikator kinerj, yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2020-2024.

Tabel : 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Jalan Mantap	10 %	11 %	12 %	14 %	15 %	9,5	12,4	13,57	14,70	15,76	95	112	113	105	105
2	Cakupan Jaringan Irigasi	23 Ha	25 Ha	28 Ha	30 Ha	30 Ha	21	25	25	25	25	91,30	100	89,28	83,33	83,33
3	Persentase berkurangnya wilayah rawan abrasi, longsor,erosi	7,3 %	7,5 %	7,8 %	8 %	8 %	7,15	7,23	7,23	7,34	7,46	99	96,4	92,69	90,37	93,25
4	Ketaatan terhadap RTRW	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Rasio Kepatuhan IMB	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	18	20	25	28	30	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
6	Persentase Rumah Tangga dengan akses air bersih layak	45 %	61 %	64 %	65 %	67 %	35,83	55,46	60,21	61,83	63,16%	79,6	90,9	94,1	95,1	0,9
7	Persentase Kawasan Pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas persampahan	50 %	51 %	52 %	55 %	55 %	0,22	27,78	0,28	0,39	0,39	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7
8	Persentase lingkungan perumahan yang dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah	62,7 %	73,3 %	73 %	75 %	75 %	61,73	71,05	69,09	72,28	69,30	98,5	96,9	94,6	96,4	90
9	Persentase Berkurangnya titik genangan Air	70 %	71 %	73 %	75 %	75 %	62,48	62,48	62,48	62,48	65,7	89,25	88	85,54	83,30	87,6

2.1.3.1 Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang PUPR

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyediaan infrastruktur dasar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berkewajiban memenuhi amanat peraturan perundang-undangan terkait penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Pada bidang PUPR, SPM difokuskan pada penyediaan layanan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap air minum yang layak dan pengelolaan air limbah domestik. Kedua aspek tersebut merupakan prasyarat penting dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pengurangan kesenjangan pelayanan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama pada tujuan ke-6 tentang *air bersih dan sanitasi layak*.

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat dua program utama yang menjadi instrumen pencapaian SPM di bidang PUPR, yaitu:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Program ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan akses air minum yang layak. Arah pelaksanaannya difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana air minum berbasis masyarakat, pembangunan serta rehabilitasi jaringan SPAM, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan. Capaian program ini menunjukkan tren positif, ditandai dengan:

a. Meningkatnya persentase penduduk yang terlayani air minum layak, baik melalui jaringan perpipaan maupun non-perpipaan.
b. Bertambahnya cakupan wilayah pelayanan SPAM, khususnya di kawasan perkotaan dan sebagian wilayah perdesaan.
c. Meningkatnya kualitas layanan melalui rehabilitasi instalasi pengolahan air dan perbaikan jaringan distribusi.

Capain Layanan Air Bersih dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.4
Layanan Air Bersih Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih (Jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih (KK)	Jumlah Penduduk yang belum terlayani air bersih (Jiwa)	Jumlah Penduduk yang belum terlayani air bersih (KK)	Persentase terlayani (%)
1	Siberut Barat Daya	7.058	1.765	5.611	1.403	1.447	362	78,74
2	Siberut Tengah	7.089	1.772	5.824	1.456	1.265	316	82,16
3	Siberut Barat	7.803	1.951	2.692	673	5.111	1.278	34,50
4	Siberut Utara	8.337	2.084	2.630	658	5.707	1.427	31,55
5	Sipora Utara	11.968	2.992	8.776	2.194	3.192	798	73,33
6	Sipora Selatan	9.812	2.453	6.496	1.624	3.316	829	66,20
7	Pagai Utara	6.031	1.508	1.846	462	4.185	1.046	30,61
8	Pagai Selatan	9.373	2.343	4.187	1.047	5.186	1.297	44,67
9	Sikakap	10.219	2.555	3.943	986	6.276	1.569	38,58
10	Siberut Selatan	9.937	2.484	7.644	1.911	2.293	573	76,92
Jumlah		87.627	21.907	49.649	12.412	37.978	9.495	56,66

Sumber : Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi Tahun 2021

Tabel. 2.5

Layanan Air Bersih Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih (Jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih (KK)	Jumlah Penduduk yang belum terlayani air bersih (Jiwa)	Jumlah Penduduk yang belum terlayani air bersih (KK)	Persentase terlayani (%)
1	Siberut Barat Daya	7.126	1.782	5.795	1.449	1.331	333	81,32
2	Siberut Tengah	7.160	1.790	5.824	1.456	1.336	334	81,34
3	Siberut Barat	7.875	1.969	3.034	759	4.841	1.210	38,53
4	Siberut Utara	8.351	2.088	3.075	769	5.276	1.319	36,82
5	Sipora Utara	12.228	3.057	11.450	2.863	778	195	93,64
6	Sipora Selatan	9.903	2.476	6.652	1.663	3.251	813	67,17
7	Pagai Utara	6.086	1.522	2.130	533	3.956	989	35,00
8	Pagai Selatan	9.385	2.346	4.311	1.078	5.074	1.269	45,94
9	Sikakap	10.235	2.559	4.433	1.108	5.802	1.451	43,31
10	Siberut Selatan	10.039	2.510	7.644	1.911	2.395	599	76,14
JUMLAH		88.388	22.097	54.348	13.587	34.040	8.510	61,49

Sumber : Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi Tahun 2022

Tabel 2.6
Layanan Air Bersih Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih (Jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih (KK)	Jumlah Penduduk yang Belum Terlayani Air Bersih (Jiwa)	Jumlah Penduduk yang Belum Terlayani Air Bersih (KK)	Persentase Terlayani (%)
1	SIBERUT BARAT DAYA	7.126	1.782	5.795	1.449	1.331	333	81,32
2	SIBERUT TENGAH	7.160	1.790	5.824	1.456	1.336	334	81,34
3	SIBERUT BARAT	7.875	1.969	3.034	759	4.841	1.210	38,53
4	SIBERUT UTARA	8.351	2.088	3.075	769	5.276	1.319	36,82
5	SIPORA UTARA	12.228	3.057	11.450	2.863	778	195	93,64
6	SIPORA SELATAN	9.903	2.476	8.446	2.112	1.457	364	85,29
7	PAGAI UTARA	6.086	1.522	2.554	639	3.532	883	41,97
8	PAGAI SELATAN	9.385	2.346	4.311	1.078	5.074	1.269	45,94
9	SIKAKAP	10.235	2.559	4.433	1.108	5.802	1.451	43,31
10	SIBERUT SELATAN	10.039	2.510	7.844	1.961	2.195	549	78,14
JUMLAH		88.388	22.097	56.766	14.192	39.144	7.906	64,22

Sumber : Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi Tahun 2023

Tabel. 2.7
Layanan Air Bersih Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Terlayani Air Bersih	Jumlah Rumah Tangga yang Belum Terlayani Air Bersih	Persentase Terlayani (%)
1	Siberut Utara	2.129	769	1.360	36,12
2	Siberut Selatan	2.606	1.961	645	75,26
3	Siberut Barat	2.038	759	1.280	37,21
4	Siberut Tengah	1.856	1.496	360	80,60
5	Siberut Barat Daya	1.846	1.496	350	81,06
6	Sipora Utara	3.244	2.863	381	88,27
7	Sipora Selatan	2.564	2.140	424	83,48
8	Pagai Utara	1.575	639	936	40,58
9	Sikakap	2.610	1.108	1.502	42,47
10	Pagai Selatan	2.391	1.205	1.186	50,41

Sumber : Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi Tahun 2024

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan pelayanan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan kapasitas produksi air baku di beberapa wilayah, serta keterbatasan anggaran dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
   Program ini ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengelolaan air limbah domestik. Fokus kegiatan meliputi pembangunan sarana sanitasi skala komunal maupun individual, rehabilitasi jaringan pengelolaan limbah, serta kampanye perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.
   Capaian yang telah dihasilkan antara lain:
   a. Meningkatnya akses rumah tangga terhadap sarana sanitasi layak, baik melalui sistem pengolahan terpusat maupun on-site (septic tank individu/komunal).
   b. Berkurangnya tingkat pencemaran lingkungan, khususnya pada sumber air dan kawasan padat penduduk yang sebelumnya tidak memiliki sarana pengelolaan limbah memadai.
   c. Terbangunnya kesadaran masyarakat dalam mendukung perilaku hidup bersih, termasuk dalam pengelolaan air limbah rumah tangga.

   Namun, tantangan yang masih dihadapi meliputi keterbatasan cakupan layanan di wilayah terpencil, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam penggunaan sarana sanitasi, serta kebutuhan pendanaan yang cukup besar untuk membangun sistem air limbah perkotaan yang terintegrasi.
   Capaian Layanan Sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Layanan Sanitasi Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk Terlayani Sanitasi (Jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani Sanitasi (KK)	Jumlah Penduduk yang Belum Terlayani Sanitasi (Jiwa)	Jumlah Penduduk yang Belum Terlayani Sanitasi (KK)	Persentase Terlayani (%)
1	SIBERUT BARAT DAYA	7.058	1.765	2.713	678	4.345	1.086	38,44
2	SIBERUT TENGAH	7.089	1.772	1.360	340	5.729	1.432	19,18
3	SIBERUT BARAT	7.803	1.951	2.259	565	5.544	1.386	28,95
4	SIBERUT UTARA	8.337	2.084	2.090	523	6.247	1.562	25,07
5	SIPORA UTARA	11.968	2.992	2.335	584	9.633	2.408	19,51
6	SIPORA SELATAN	9.812	2.453	5.829	1.457	3.983	996	59,41
7	PAGAI UTARA	6.031	1.508	2.045	511	3.986	997	33,91
8	PAGAI SELATAN	9.373	2.343	3.923	981	5.450	1.363	41,85
9	SIKAKAP	10.219	2.555	470	118	9.749	2.437	4,60
10	SIBERUT SELATAN	9.933	2.483	6.095	1.524	3.838	960	61,36
JUMLAH		87.623	21.906	29.119	7.280	58.504	14.626	33,23

Sumber : Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi Tahun 2021

Tabel 2.9
Layanan Sanitasi Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk Terlayani Sanitasi (Jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani Sanitasi (KK)	Jumlah Penduduk yang Belum Terlayani Sanitasi (Jiwa)	Jumlah Penduduk yang Belum Terlayani Sanitasi (KK)	Persentase Terlayani (%)
1	SIBERUT BARAT DAYA	7.058	1.765	2.713	678	4.345	1.086	38,44
2	SIBERUT TENGAH	7.089	1.772	1.360	340	5.729	1.432	19,18
3	SIBERUT BARAT	7.803	1.951	2.659	665	5.144	1.286	34,08
4	SIBERUT UTARA	8.337	2.084	2.090	523	6.247	1.562	25,07
5	SIPORA UTARA	11.968	2.992	2.335	584	9.633	2.408	19,51
6	SIPORA SELATAN	9.812	2.453	5.829	1.457	3.983	996	59,41
7	PAGAI UTARA	6.031	1.508	2.045	511	3.986	997	33,91
8	PAGAI SELATAN	9.373	2.343	3.923	981	5.450	1.363	41,85
9	SIKAKAP	10.219	2.555	470	118	9.749	2.437	4,60
10	SIBERUT SELATAN	9.933	2.483	6.095,00	1.524	3.838	960	61,36
JUMLAH		87.623	21.906	29.519	7.380	58.104	14.526	33,69

Sumber : Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi Tahun 2022

Tabel 2.10
Layanan Sanitasi Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk Terlayani Sanitasi (Jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani Sanitasi (KK)	Jumlah Penduduk yang Belum Terlayani Sanitasi (Jiwa)	Jumlah Penduduk yang Belum Terlayani Sanitasi (KK)	Persentase Terlayani (%)
1	SIBERUT BARAT DAYA	7.126	1.782	2.713	678	4.413	1.103	38,07
2	SIBERUT TENGAH	7.160	1.790	1.360	340	5.800	1.450	18,99
3	SIBERUT BARAT	7.875	1.969	2.659	665	5.216	1.304	33,77
4	SIBERUT UTARA	8.351	2.088	3.626	907	4.725	1.181	43,42
5	SIPORA UTARA	12.228	3.057	2.335	584	9.893	2.473	19,10
6	SIPORA SELATAN	9.903	2.476	6.029	1.507	3.874	969	60,88
7	PAGAI UTARA	6.086	1.522	2.845	711	3.241	810	46,75
8	PAGAI SELATAN	9.385	2.346	4.323	1.081	5.062	1.266	46,06
9	SIKAKAP	10.235	2.559	470	118	9.765	2.441	4,59
10	SIBERUT SELATAN	10.039	2.510	7.195	1.799	2.844	711	71,67
JUMLAH		88.388	22.097	33.555	8.389	54.833	13.708	37,96

Sumber : Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi Tahun 2023

Tabel 2.11
Layanan Sanitasi Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (KK)	Jumlah Penduduk Terlayani Sanitasi (Jiwa)	Jumlah Penduduk Terlayani Sanitasi (KK)	Jumlah Penduduk yang Belum Terlayani Sanitasi (Jiwa)	Persentase Terlayani (%)
1	SIBERUT BARAT DAYA	7.755	2.103	4.392	3.363	841	52,21
2	SIBERUT TENGAH	7.774	2.044	3.544	4.230	1.058	43,35
3	SIBERUT BARAT	8.453	2.143	6.948	1.505	376	81,05
4	SIBERUT UTARA	9.266	2.694	4.496	4.770	1.193	41,72
5	SIPORA UTARA	13.761	3.960	9.464	4.297	1.074	59,75
6	SIPORA SELATAN	10.667	3.255	8.308	2.359	590	63,81
7	PAGAI UTARA	6.537	1.896	5.664	873	218	74,68
8	PAGAI SELATAN	10.458	3.035	7.712	2.746	687	63,53
9	SIKAKAP	10.999	3.284	6.220	4.779	1.195	47,35
10	SIBERUT SELATAN	10.900	2.963	6.260	4.640	1.160	52,82
JUMLAH		96.570	27.377	63.008	33.562	8.391	57,54

Sumber : Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi Tahun 2024

2.1.3.2 Inovasi Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus berupaya menghadirkan berbagai terobosan. Upaya inovatif ini merupakan implementasi dari amanat peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis inovasi, teknologi, serta partisipasi masyarakat.

Inovasi pelayanan di lingkungan Dinas PUPR bukan hanya dimaksudkan untuk mempercepat proses administrasi atau meningkatkan efektivitas kerja internal, tetapi juga diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi, di mana perangkat daerah dituntut untuk lebih adaptif, transparan, dan mampu menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses, akuntabel, serta tepat sasaran.

Berangkat dari semangat tersebut, Dinas PUPR Kabupaten/Kota telah mengembangkan beberapa inovasi pelayanan yang menjadi wujud komitmen dalam mendukung pelayanan publik di bidang pekerjaan umum. Dua di antaranya adalah:

1. *SIPICAT (Sistem Penanganan Infrastruktur Cepat dan Tanggap).*
   SIPICAT merupakan sistem layanan cepat tanggap yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menerima laporan kerusakan infrastruktur, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan tersebut dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Adapun prosedur pelaksanaan diantaranya :
   a. Pelaporan Kerusakan: Masyarakat melaporkan kerusakan infrastruktur melalui aplikasi SIPICAT dengan mengunggah foto, lokasi, dan deskripsi kerusakan. Durasi: Maksimal 10 menit setelah laporan diterima sistem.
   b. Verifikasi Laporan: Petugas verifikasi memeriksa kelengkapan data dan keaslian laporan. Durasi: Maksimal 1 jam setelah laporan masuk.
   c. Penugasan Tim: Kepala bidang terkait menugaskan tim teknis untuk melakukan pengecekan lapangan. Durasi: Maksimal 2 jam setelah verifikasi.
   d. Pengecekan Lapangan: Tim teknis melakukan survey lapangan untuk memastikan kondisi kerusakan. Durasi: Maksimal 1 x 24 jam setelah penugasan.
   e. Tindak Lanjut Perbaikan: Pelaksanaan perbaikan infrastruktur oleh tim teknis sesuai SOP teknis bidang terkait. Durasi: Disesuaikan dengan tingkat kerusakan (minor: maksimal 3 hari kerja, mayor: maksimal 7 hari kerja).
   f. Pelaporan Hasil: Tim teknis melaporkan hasil perbaikan dan mengunggah dokumentasi ke sistem SIPICAT. Durasi: Maksimal 1 jam setelah perbaikan selesai.
2. *SIKEREI PAM (Sistem Kearifan Lokal Elektronik Untuk Pembayaran Air Minum).*
   SIKEREI PAM merupakan Sistem Pembayaran Tagihan Air PAM Berbasis Online dengan Aplikasi Ollin Bank Nagari guna meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pembayaran tagihan air bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, perangkat daerah perlu menetapkan dengan jelas kelompok sasaran yang akan menerima manfaat layanan. Kelompok sasaran layanan merupakan bagian penting dalam penyusunan RENSTRA, karena menjadi dasar dalam merancang program dan kegiatan agar lebih tepat guna, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Secara prinsip, kelompok sasaran layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ditetapkan berdasarkan fungsi dan kewenangan yang

melekat, serta memperhatikan kebutuhan strategis masyarakat. Adapun kelompok sasaran dimaksud antara lain:

1. Masyarakat Umum
   Merupakan penerima manfaat utama dari seluruh program dan kegiatan pembangunan infrastruktur. Kelompok ini meliputi seluruh penduduk di wilayah kabupaten/kota yang menikmati hasil pembangunan berupa peningkatan aksesibilitas, kualitas lingkungan permukiman, ketersediaan air minum dan sanitasi, serta infrastruktur penunjang lainnya.
2. Kelompok Rentan dan Marginal
   Yaitu masyarakat miskin, masyarakat di wilayah terpencil, kepulauan, perdesaan, maupun kelompok dengan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar. Kehadiran infrastruktur yang layak diharapkan mampu menurunkan kesenjangan, mengurangi kerentanan sosial-ekonomi, serta mendorong peningkatan kesejahteraan kelompok ini.
3. Pelaku Ekonomi, Dunia Usaha, dan Investor
   Ketersediaan infrastruktur memadai, terutama jalan, jembatan, jaringan air, dan sarana penunjang kawasan strategis, akan mendukung iklim usaha yang kondusif. Dengan demikian, pelaku usaha dan investor termasuk kelompok sasaran layanan yang penting, karena keberadaan mereka turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.
4. Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor
   Kelompok ini mencakup perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat. Dukungan PUPR dalam menyediakan prasarana fisik menjadi dasar sinergi pembangunan lintas sektor, sehingga capaian pembangunan dapat lebih optimal.
5. Generasi Mendatang
   Pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga bagi keberlanjutan manfaat di masa depan. Oleh karena itu, generasi mendatang termasuk kelompok sasaran layanan, terutama dalam konteks pembangunan berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan mendukung ketahanan wilayah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan pelayanan dibidang pelayanan infrastruktur dasar seperti : seperti jalan, jembatan, air bersih, penyediaan air baku, irigasi, sanitasi persampahan, penataan perizinan bangunan gedung atau persetujuan bangunan gedung dan pengendalian pemanfaatan ruang

Pelayanan sebagaimana yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan untuk fokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat.

2.2.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expection” antara kinerja pembangunan yang telah dicapai dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang. Dengan kondisi rill saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul karena kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan ini adalah agar permasalhan pembang8unan daerah untuk mengidentifikasi berbagai factor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pemetaan permasalahan disetiap bidang kerja yang ada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepuluan Mentawai. Berikut identifikasi permasalahan disetiap bidang kerja :

Tabel. 2.12
Identifikasi Permasalahan Pada Bidang Kerja

Identifikasi Permasalahan Bidang	Permasalahan	Solusi
Jalan	Belum terfokusnya pembangunan jalan dikarenakan panjang jalan kabupaten yang sangat panjang dikarenakan kondisi wilayahnya berupa kepulauan	Di tetapkan rencana kerja yang efektif agar penanganan jalan lebih terfokus.
Air minum	kualitas air yang buruk, ketersediaan yang terbatas, dan kontaminasi yang dapat menyebabkan penyakit.	Peningkatan ketersediaan air melalui pembangunan infrastruktur, pengelolaan air yang berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim
Sanitasi	Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, yang tidak memiliki akses ke toilet atau fasilitas sanitasi yang memada	Membangun Infrastruktur sanitasi yang memadai , seperti sistim pembuangan liombah, fasilitas cuci tangan, toilet umu dan meningkatkan akses fasilitas sanitasi yang memadai terutama di daerah terpencil dan tertinggal
Gedung (PBG)	Adanya kompleksitas birokrasi, kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum dari pemilik bangunan, serta kurangnya tenaga ahli dan transparansi dalam proses layanan.	Untuk melegalkan untuk memastikan pembangunan gedung sesuai standar teknis dan peraturan yang berlaku, menggantikan Izin Mendirikan Bangunan IMB). Implementasi PBG bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, mengurangi birokrasi, dan memastikan kualitas bangunan yang telah di periksa dan diteliti oleh tenaga ahli.
Persampahan	isu kompleks yang sering muncul di masyarakat meliputi berbagai aspek, mulai dari jumlah sampah yang terus meningkat, kurangnya pengelolaan sampah yang	Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik, seperti

Identifikasi Permasalahan Bidang	Permasalahan	Solusi
	baik, hingga dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.	membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan melakukan daur ulang.
Drainase	Kapasitas drainase yang tidak memadai, hingga timbul masalah sosia seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluranl	Melaksanakan Pembersihan saluran, perbaikan sistim drainase yang rusak serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan yang telah dibangunnya sistim drainasse yg baik
Jasa Konstruksi	Adanya keterlambatan, pembengkakan anggaran, masalah kualitas, bahaya keselamatan, konflik dalam tim, dan juga masalah hukum terkait kontrak.	Melaksanakan pelatihan dan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan, hingga penggunaan teknologi dan manajemen risiko yang efektif.
Perencanaan dan pemanfaatan ruang	Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 masih berproses sehingga berdampak pada pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang belum optimal dan Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai yang diamanatkan dalam Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 3 Tahun 2015. Saat ini hanya terdapat 1 (satu) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) yakni RDTR Kawasan Perkotaan Tuapejat dan 1 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun Materi Teknisnya dan berproses untuk menjadi Peraturan Daerah.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah yang belum memiliki RDTR untuk mengendalikan pemanfaatan ruang secara terperinci, memberikan acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang, dan menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan implementasi pembangunan di lapangan.

Tabel. 2.13
Pengembangan Pelayanan Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan	Tantangan	Peluang
Kemantapan Jalan	Keterbatasan anggaran yang tersedia menyebabkan perkerasan yang baik untuk jalan belum dapat dilakukan sehingga penanganan dilakukan sebatas perkerasan jalan dengan lapis permukaan LC atau beton mutu rendah dan pemeliharaan jalan	Perlu melakukan dan menetapkan SPEK yang tepat untuk, jalan lalu lintas rendah dengan biaya yang hemat sehingga, dapat tercapai kemantapan jalan
Air minum	Dalam Proses pembangunan SPAM jaringan perpipaan meliputi aspek regulasi, finansial, teknis, dan sosial. Regulasi yang belum mendukung, keterbatasan anggaran, dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi hambatan utama. Selain itu, aspek sosial seperti kesadaran masyarakat, partisipasi, dan kerjasama juga sangat penting dalam pembangunan suatu SPAM di daerah yg blm memiliki Air bersih yang layak.	Dalam prose pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan sangat besar, terutama di daerah-daerah dengan akses air bersih yang terbatas. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pembangunan ekonomi, dan menciptakan peluang usaha baru bagi daerah yang telah di bangun SPAM.
Sanitasi	Belum adanya ketersediaan infrastruktur, keterbatasan sumber daya, perilaku masyarakat, dan faktor geografis. Infrastruktur sanitasi yang kurang memadai, terutama di daerah pedesaan, menjadi hambatan utama. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia juga seringkali menghambat program sanitasi. Selain itu, perilaku masyarakat yang belum baik dalam hal kebersihan dan pengelolaan limbah juga menjadi tantangan besar dalam penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat	Penyediaan sanitasi memiliki banyak peluang, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, swasta, dalam membangun sanitasi bersama masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Gedung (PBG)	Dalam pengurusan PBG proses yang rumit dan biokrasi, waktu yang lama, keterlibatan banyak pihak yang harus di koordinasikan	Dalam pengurusan PBG menawarkan fleksibilitas lebih besar, memungkinkan pembangunan dapat

Pengembangan Pelayanan	Tantangan	Peluang
		berlangsung selama memenuhi standar teknis yang ditetapkan, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan efisien.
Persampahan	Pertumbuhan jumlah penduduk sehingga melonjaknya peningkatan volume sampah, dan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah seperti TPA yang memadai, serta minimnya kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah.	Dalam penyediaan layanan persampahan dapat menjadi peluang baik untuk masyarakat seperti daur ulang sampah menjadi produk baru, pengembangan teknologi ramah lingkungan, hingga dapat wadah sosialisasi kemasyarakat supaya sadar dalam menjada lingkungan.
Drainase	Menurunnya/kurangnya ruang terbuka hijau, perubahan iklim, pendanaan dan pemeliharaan, serta melonjaknya jumlah penduduk yang pesat. Adanya pendangkalan dan penyumbatan saluran drainase akibat sampah dan sedimentasi, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.	Meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih sehingga dapat mengurangi resiko banjir serta dapat meningkatkan keselamatan serta kesehatan masyarakat
Perencanaan dan pemanfaatan ruang	Kondisi wilayah kabupaten kepulauan Mentawai dengan 82% merupakan Kawasan hutan, menyebabkan sulitnya memenuhi kebutuhan ruang yang mendasar bagi pembangunan infrastruktur fasilitas umum, fasilitas social, dan lahan usaha.	Mengajukan pelepasan kawasan hutan melalui beberapa mekanisme yang mungkin dilakukan diantaranya melalui skema TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) , skema PPTKH (Pola Penyelesaian Tanah dalam Kawasan Hutan)

Sumber : Dinas PUPR-2024

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan dan isu – isu strategis merupakan tahapan yang krusial. Penyusunan Renstra yang dibuat lima tahun mendatang diharapkan dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu – isu strategis yang menjadi fokus kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lima tahun mendatang.

Tabel 2.14
ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
Kemantapan Jalan	Belum terfokusnya pembangunan jalan dikarenakan panjang jalan kabupaten yang sangat panjang dikarenakan kondisi wilayah kepulauannya. Keterbatasan ketersediaan anggaran.		Ketimpangan infrastruktur antar wilayah menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama aksesibilitas wilayah tertinggal dan terpencil.	Pemerataan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas RPJMN untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.	Aksesibilitas antar pulau dan dalam pulau masih rendah akibat terbatasnya jalan darat yang layak, terutama pada musim hujan. Infrastruktur jalan belum mendukung distribusi logistik dan mobilitas masyarakat secara optimal.	Masih terbatasnya jaringan jalan yang layak untuk mendukung konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Air minum	Dalam Proses pembangunan SPAM jaringan perpipaan meliputi aspek regulasi, finansial, teknis, dan sosial. Regulasi yang belum mendukung, keterbatasan anggaran, dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi hambatan utama. Selain itu, aspek sosial seperti kesadaran masyarakat, partisipasi, dan kerjasama juga sangat penting dalam pembangunan suatu SPAM	Belum terpenuhinya kebutuhan A ir bersih dan sanitasi layak.	Krisis air bersih menjadi tantangan besar secara global akibat perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk.	Target 100% akses air minum aman dan layak pada tahun 2030 sesuai RPJMN dan Tujuan SDGs.	Cakupan layanan air minum perpipaan sangat rendah dan masyarakat masih mengandalkan sumber air permukaan yang tidak higienis.	Masih rendahnya akses masyarakat terhadap air minum layak di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
	di daerah yg blm memiliki Air bersih yang layak. kualitas air yang buruk, ketersediaan yang terbatas, dan kontaminasi yang dapat menyebabkan penyakit.					
Sanitasi	Belum adanya ketersediaan infrastruktur, keterbatasan sumber daya, perilaku masyarakat, dan faktor geografis. Infrastruktur sanitasi yang kurang memadai, terutama di daerah pedesaan, menjadi hambatan utama. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia juga seringkali menghambat program sanitasi. Selain itu, perilaku masyarakat yang belum baik dalam hal kebersihan dan pengelolaan limbah juga menjadi tantangan besar dalam penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, yang tidak memiliki akses ke toilet	Belum terpenuhinya kebutuhan A ir bersih dan sanitasi layak.	Akses sanitasi layak merupakan bagian dari hak dasar manusia dan prioritas dalam SDGs.	Pemerintah menargetkan akses sanitasi aman bagi seluruh penduduk pada tahun 2030.	Sanitasi lingkungan di Kepulauan Mentawai belum memadai, masih banyak masyarakat menggunakan jamban tidak sehat dan membuang limbah langsung ke sungai atau laut.	Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman, yang berdampak pada kesehatan lingkungan.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
	atau fasilitas sanitasi yang memadaI. Membangun Infrastruktur sanitasi yang memadai , seperti sistim pembuangan liombah, fasilitas cuci tangan, toilet umu dan meningkatkan akses fasilitas sanitasi yang memadai terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Penyediaan sanitasi memiliki banyak peluang, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, swasta, dalam membangun sanitasi bersama masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.					
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) pengelolaannya masih terpusat, sementara pemilik bangunan tersebar di empat pulau besar dengan jarak yang cukup jauh. Kemudian SIMBG		Isu global terkait bangunan gedung mencakup pemanasan global, penggunaan energi yang berlebihan, dan dampak terhadap lingkungan. Bangunan bertanggung jawab	PBG dalam aplikasi SIMBG mengalami pemutakhiran untuk meningkatkan keamanan data, kemudahan pengguna, dan keberlanjutan	Aspek pelayanan PBG dan SLF di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih terkendala jarak dan biaya layanan serta kemampuan pemilik bangunan	Masih rendahnya persentase bangunan gedung yang memenuhi standar teknis. Dan rendahnya jumlah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
	adalah aplikasi dengan teknologi digital yang membutuhkan keahlian dan ketersediaan jaringan internet. Rendahnya kesadaran dan ketaatan pemilik bangunan dalam mengurus perizinan PBG dan SLF.		atas lebih dari 35% emisi karbon global dan mengkonsumsi sebagian besar sumber daya alam. Untuk mengatasi masalah ini, konsep bangunan hijau (green building) semakin penting dan banyak diterapkan.	sistem. Perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah diluncurkan, dan SIMBG digunakan untuk memproses PBG. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) juga diatur melalui SIMBG. Beberapa wilayah mengeluhkan kendala dalam pembayaran retribusi PBG karena pemutakhiran SIMBG. Peningkatan kualitas pelayanan PBG melalui SIMBG dapat berdampak pada kepuasan pemohon. Masih ada tantangan seperti	dalam menggunakan aplikasi SIMBG – PBG dan SLF. Terhadap jarak jaungkauan layanan PBG-SLF dipengaruhi atas sebaran bangunan pada empat pulau di Kepulauan Mentawai. Meski pelayanan PBG-SLF telah dalam aplikasi SIMBG, namun kemampuan pemilik bangunan dalam pengimputan data serta pemenuhan persyaratan yang harus di-imputkan masih sangat rendah.	persentase kawasan dengan PSU fungsional yang memenuhi standar teknis.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
				pemahaman standar teknis yang berbeda-beda dan belum semua provinsi melaksanakan arsitek berlisensi. Sosialisasi tentang SIMBG dan PBG dilakukan melalui berbagai media. SIMBG terus dikembangkan dengan fitur-fitur baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Kementerian Pekerjaan Umum telah menginstruksikan pemangkasan waktu pemrosesan PBG menjadi 10 hari kerja. Penerapan SIMBG sebagai bagian dari e-government dalam penyelenggaraan bangunan gedung		

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
				bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.		
Persampahan	Pertumbuhan jumlah penduduk sehingga melonjaknya peningkatan volume sampah, dan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah seperti TPA yang memadai, serta minimnya kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Isu kompleks yang sering muncul di masyarakat meliputi berbagai aspek, mulai dari jumlah sampah yang terus meningkat, kurangnya pengelolaan sampah yang baik, hingga dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dalam penyediaan layanan persampahan dapat menjadi peluang baik untuk masyarakat seperti daur ulang sampah menjadi produk baru, pengembangan teknologi	Belum Optimalnya pengelolaan Sampah	Sampah plastik laut menjadi ancaman besar bagi ekosistem, khususnya di daerah kepulauan.	Indonesia menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah 70% pada tahun 2025.	lum optimalnya sistem pengelolaan sampah dari sumber hingga ke tempat pemrosesan akhir. Kurangnya fasilitas TPA/TPS yang memenuhi standar.	Masih rendahnya kapasitas dan sistem pengelolaan sampah terpadu yang ramah lingkungan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
	ramah lingkungan, hingga dapat wadah sosialisasi kemasyarakat supaya sadar dalam menjada lingkungan. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan melakukan daur ulang.					
Drainase	Menurunnya/kurangnya ruang terbuka hijau, perubahan iklim, pendanaan dan pemeliharaan, serta melonjaknya jumlah penduduk yang pesat. Adanya pendangkalan dan penyumbatan saluran drainase akibat sampah dan sedimentasi, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kapasitas drainase yang tidak memadai, hingga timbul masalah sosia	Belum Optimalnya pengelolaan Sampah	Isu global terkait drainase meliputi peningkatan populasi, perubahan iklim, pengelolaan sampah yang buruk, dan kurangnya koordinasi infrastruktur. Hal ini menyebabkan banjir, genangan air, penurunan kualitas air, dan kerusakan ekosistem.	Isu nasional terkait drainase terutama fokus pada pemeliharaan dan perbaikan sistem drainase perkotaan, yang seringkali menyebabkan banjir akibat curah hujan tinggi dan aliran air yang tidak lancar. Beberapa isu utama meliputi: Kondisi Drainase yang Buruk; banyak saluran drainase	Melaksanakan Pembersihan saluran, perbaikan sistim drainase yang rusak serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan yang telah dibangunnya sistim drainasse yg baik	Isu strategis yang terkait dengan drainase di daerah Mentawai meliputi rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya drainase. Kurang memadainya drainase yang ada dalam mengantisipasi banjir. Banyaknya

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
	seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran,			yang tersumbat oleh sampah, lumpur, dan endapan, sehingga tidak mampu menampung volume air yang besar. Sistem Drainase yang Tidak Terpisah: Beberapa sistem drainase belum terpisah dari air limbah rumah tangga, sehingga meningkatkan potensi pencemaran dan risiko kesehatan. Perencanaan dan Pengelolaan Drainase yang Kurang Terpadu: Kurangnya perencanaan dan pengelolaan drainase yang terpadu menyebabkan genangan air dan banjir di beberapa wilayah.		saluran drainase yang belum terintegrasi dengan sungai, danau atau laut. Menurunnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat serta meningkatnya penyakit dari akibat keterbatasan sistem drainase yang ada.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
				Pendangkalan Sungai dan Drainase: Pendangkalan sungai dan drainase juga menjadi penyebab utama banjir, karena mengurangi kapasitas tampung air. Pengambilan Air Tanah yang Berlebihan : Pengambilan air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah dan meningkatkan risiko banjir. Kualitas Jalan yang Terganggu : Sistem drainase yang buruk dapat menyebabkan kerusakan jalan akibat akumulasi air di bawah permukaan jalan. Risiko Kesehatan:		

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
				Saluran drainase yang terbuka dan kotor seringkali digunakan untuk pembuangan air limbah, yang berpotensi menyebabkan penyakit.		
Jasa Konstruksi	Warga yang menjadi Tenaga Kerja Konstruksi sangat sedikit yang memiliki sertifikat kompetensi. Mayoritas tenaga kerja konstruksi di Mentawai belum memiliki sertifikat kompetensi kerja (SKK) umumnya pada tingkatan teknisi, operator hingga tingkat terendah sesuai regulasi UU Jasa Konstruksi. Sertifikasi menjadi syarat penting untuk terlibat dalam proyek pemerintah, tetapi akses ke proses pelatihan dan uji kompetensi sangat terbatas di wilayah ini. Rendahnya pelayanan pemerintah		Kesenjangan Keterampilan (Skills Gap). Pada banyak negara, industri konstruksi menghadapi kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan dan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Teknologi baru seperti BIM (Building Information Modeling), prefabrikasi, dan otomasi menuntut keterampilan teknis yang lebih tinggi, sementara sebagian besar pekerja masih menggunakan metode konvensional.	Rendahnya Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Dari total ±8 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia, baru sekitar 15–20% yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan proyek dengan kualifikasi tenaga kerja,	Minimnya Tenaga Kerja Bersertifikat Sebagian besar tenaga kerja konstruksi di Mentawai belum memiliki sertifikat kompetensi kerja (SKK). Proyek konstruksi pemerintah mensyaratkan tenaga kerja bersertifikat, tetapi akses untuk mendapatkannya di Mentawai sangat terbatas. Tidak Tersedianya Lembaga Sertifikasi dan Pelatihan Lokal Belum tersedia	Kesenjangan Kompetensi SDM Konstruksi Lokal dengan Kebutuhan Proyek Infrastruktur Permasalahan: Mayoritas tenaga kerja konstruksi lokal belum memiliki keterampilan teknis dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur. Dampak Strategis:

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
	dalam kegiatan fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja disebabkan keterbatasan anggaran kegiatan fasilitasi assesmen SKK tersebut.		Kurangnya Tenaga Kerja Muda dan Terampil Dunia konstruksi menghadapi krisis regenerasi tenaga kerja, di mana pekerja senior pensiun tetapi jumlah tenaga kerja muda yang berminat rendah. Pekerjaan konstruksi dianggap berat dan kurang menarik oleh generasi muda, terutama karena kurangnya jaminan sosial, keamanan kerja, dan pelatihan yang terstruktur. Digitalisasi dan Transformasi Industri Konstruksi Munculnya konstruksi berbasis teknologi (smart construction) mendorong perlunya keterampilan baru: penggunaan drone, digital mapping, alat berat otomatis, dan analitik data.	terutama untuk proyek-proyek strategis nasional. Penyebaran Tenaga Kerja yang Tidak Merata Konsentrasi tenaga kerja bersertifikat lebih banyak di kota besar dan Jawa, sementara di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seperti Mentawai, jumlahnya sangat minim. Hal ini mengakibatkan proyek-proyek di daerah terpencil bergantung pada tenaga kerja dari luar daerah, yang meningkatkan biaya dan memperlambat pekerjaan. Lemahnya Akses terhadap Pelatihan dan Sertifikasi	Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di wilayah Mentawai yang khusus membina tenaga kerja konstruksi. Pelatihan dan uji kompetensi hanya bisa dilakukan dengan mendatangkan tim dari luar (Padang atau nasional), yang memerlukan biaya besar. Kurangnya Fasilitator dan Asesor Kompetensi di Daerah Jumlah asesor dan instruktur bersertifikat sangat minim di Mentawai, menyebabkan pelatihan tidak bisa dilakukan secara mandiri atau rutin. Ketergantungan pada fasilitator luar daerah	Ketergantungan pada tenaga kerja luar daerah. Minimnya transfer ilmu dan alih teknologi. Kualitas pekerjaan konstruksi tidak seragam. Belum terbangunnya sistem pembinaan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang difasilitasi daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai. Permasalahan: Tidak tersedia sistem pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan tenaga kerja

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
			Negara-negara maju menuntut reskilling dan upskilling tenaga kerja konstruksi agar tidak tertinggal oleh teknologi. Mobilitas Tenaga Kerja Lintas Negara Banyak negara mengalami ketergantungan pada tenaga kerja migran untuk proyek konstruksi, yang menimbulkan tantangan terkait standarisasi kompetensi, bahasa, dan keselamatan kerja. Standar sertifikasi internasional seperti yang diatur oleh International Labour Organization (ILO) menjadi acuan penting. Isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di tingkat global, keselamatan kerja masih menjadi isu	Kegiatan pelatihan dan sertifikasi masih terpusat dan tidak merata, sehingga sulit dijangkau oleh tenaga kerja di daerah. Kurangnya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di tingkat kabupaten/kota membuat pembinaan tidak berjalan optimal. Kurangnya Sinergi antar Lembaga Pembinaan tenaga kerja konstruksi melibatkan banyak pihak (Kementerian PUPR, BNSP, LPJK, Disnaker, asosiasi, dunia usaha), tetapi koordinasi antar lembaga belum maksimal. Akibatnya, banyak program pelatihan	memperlambat proses peningkatan kapasitas lokal. Rendahnya Kesadaran Tenaga Kerja akan Pentingnya Sertifikasi Banyak tenaga kerja lokal masih mengandalkan pengalaman lapangan tanpa menyadari pentingnya sertifikasi untuk peningkatan karier dan penghasilan. Minimnya sosialisasi dan pendampingan turut memperkuat anggapan bahwa sertifikasi tidak mendesak. Ketergantungan pada Tenaga Kerja Luar Daerah Proyek konstruksi di Mentawai, khususnya yang bernilai besar,	konstruksi yang berkelanjutan dan berbasis lokal. Dampak Strategis: Akses tenaga kerja terhadap pengembangan diri sangat terbatas. Rendahnya daya saing tenaga kerja lokal dalam menghadapi pasar terbuka. Terhambatnya implementasi Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja. Rendahnya Peran Pemerintah Daerah dalam Penguatan Ekosistem Jasa Konstruksi Permasalahan:

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
			besar di sektor konstruksi, yang merupakan salah satu sektor dengan tingkat kecelakaan kerja tertinggi. Kompetensi tenaga kerja dalam aspek K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) menjadi syarat utama dalam proyek global dan internasional. Ketidaksetaraan Akses terhadap Pelatihan dan Sertifikasi Di negara berkembang dan daerah terpencil (termasuk kawasan kepulauan seperti Mentawai), akses terhadap pelatihan formal dan sertifikasi kompetensi sangat terbatas. Hal ini menyebabkan tenaga kerja di negara berkembang sulit bersaing dalam proyek internasional atau terlibat dalam rantai pasok global.	tumpang tindih atau tidak tepat sasaran. Ketidaksesuaian Kurikulum Pendidikan dengan Dunia Kerja Kurikulum vokasi dan pelatihan kerja belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan industri konstruksi modern, seperti teknologi digital, konstruksi modular, dan green building. Lulusan SMK konstruksi atau pelatihan kerja sering belum siap langsung bekerja di lapangan. Rendahnya Daya Tarik Profesi Konstruksi bagi Generasi Muda Sektor konstruksi dipersepsikan sebagai pekerjaan kasar, berat, dan berisiko, sehingga	masih banyak menggunakan tenaga kerja dari Padang atau daerah lain di Sumatera Barat. Ini membuat tenaga kerja lokal hanya mengisi posisi rendah seperti buruh kasar, dan sulit berkembang karena tidak ada alih teknologi atau pendampingan kompetensi. Keterbatasan Akses dan Biaya Pelatihan Biaya untuk mengikuti pelatihan dan uji kompetensi (termasuk transportasi ke kota lain) menjadi beban berat bagi masyarakat lokal. Tidak ada subsidi daerah yang cukup untuk mendorong percepatan sertifikasi tenaga kerja.	Belum optimalnya kolaborasi antara Dinas PUPR, Disnaker, asosiasi jasa konstruksi, dunia pendidikan, dan pelaku usaha lokal. Dampak Strategis: Program pembinaan tenaga kerja terfragmentasi dan tidak berdampak jangka panjang. Potensi ekonomi lokal dari sektor konstruksi tidak tergarap maksimal. Terbatasnya Infrastruktur Pelatihan dan Sertifikasi di Daerah Kepulauan Permasalahan:

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
			Adaptasi terhadap Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan Proyek konstruksi global kini mengedepankan konsep green building dan konstruksi berkelanjutan. Kompetensi tenaga kerja harus mencakup pengetahuan tentang efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan material ramah lingkungan.	generasi muda kurang tertarik untuk menekuninya secara profesional. Hal ini mengancam keberlanjutan kompetensi dan regenerasi tenaga kerja sektor ini. Kualitas SDM Konstruksi Belum Siap Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Mayoritas tenaga kerja belum memiliki keterampilan digital yang mendukung penerapan teknologi seperti: BIM (Building Information Modeling) GIS dan pemetaan digital Alat berat otomatis dan IoT dalam konstruksi Transformasi digital belum dibarengi	Belum Terintegrasinya Program Pembinaan oleh Dinas Terkait Program dari Dinas PUPR, Disnaker, atau Dinas Pendidikan dan Mitra LPJK belum terkoordinasi secara sistematis. Tidak ada roadmap pembinaan SDM konstruksi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah.	Tidak adanya LPK dan LSP permanen di Mentawai serta kendala geografis menyebabkan pelatihan dan sertifikasi sulit dilaksanakan secara mandiri. Dampak Strategis: Proses peningkatan kompetensi tenaga kerja tidak bisa dilakukan secara efisien dan berkelanjutan. Keterbatasan akses melanggengkan kesenjangan keterampilan. Rendahnya Regenerasi Tenaga Kerja Konstruksi Muda Permasalahan: Tenaga kerja muda cenderung

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
				dengan kesiapan SDM.		tidak tertarik pada sektor konstruksi karena minimnya jaminan sosial, pelatihan, dan prospek karier. Dampak Strategis: Ancaman stagnasi SDM sektor konstruksi lokal. Hilangnya potensi peningkatan ekonomi masyarakat usia produktif.
Air Baku		Belum terpenuhinya kebutuhan Air bersih dan sanitasi layak.	Perubahan iklim menyebabkan berkurangnya ketersediaan sumber air baku secara kuantitas dan kualitas.	Penurunan debit sumber air dan pencemaran menjadi tantangan nasional dalam pengelolaan air baku.	Sumber air baku di Mentawai sangat bergantung pada sungai kecil dan mata air yang sensitif terhadap musim kemarau.	Terbatasnya sumber air baku yang berkelanjutan dan kualitasnya yang belum terjaga secara optimal.
Irigasi	Keterbatasan Infrastruktur Irigasi. Krisis air yang berdampak kepada irigasi. Keterbatasan sumber daya manusia trampil dalam		Krisis Air dan Ketergantungan pada Irigasi ; 70% penggunaan air tawar global digunakan	Sekitar 50% jaringan irigasi di Indonesia dalam kondisi rusak ringan hingga berat	Sebagian besar pertanian di Mentawai masih bergantung pada irigasi non-teknis	Ketahanan pangan lokal sangat tergantung pada pertanian lahan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
	pengelolaan irigasi. Keterbatasan anggaran yang infrastruktur pendukung sistim irigasi.		untuk irigasi pertanian. Negara-negara dengan iklim kering (seperti India, Mesir, Pakistan, dan negara-negara di Afrika Sub-Sahara) sangat bergantung pada sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tantangan: penurunan debit sungai, penyusutan danau (seperti Laut Aral), dan menurunnya permukaan air tanah karena over-eksploitasi untuk irigasi. Efisiensi Irigasi yang Rendah ; Banyak sistem irigasi di dunia masih menggunakan metode tradisional seperti irigasi permukaan yang boros air. Rata-rata efisiensi global irigasi hanya sekitar 30–40%. Solusi: transisi ke	(*data Kementerian PUPR*). Penyebab: sedimentasi, longsor, kurangnya perawatan, dan vandalisme. Dampak: penurunan produktivitas lahan pertanian dan ketergantungan pada hujan. Banyak sistem irigasi tidak dirawat dengan baik setelah dibangun. Kurangnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani dalam tanggung jawab pemeliharaan (terutama pasca otonomi daerah). Irigasi wewenang daerah seringkali tidak didukung dana operasional yang memadai. Ketidakseimbangan distribusi air di berbagai wilayah.	(tadah hujan atau saluran alami). Jaringan irigasi teknis sangat terbatas dan belum menjangkau semua sentra pertanian seperti di Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Akibatnya, petani kesulitan mengatur jadwal tanam dan hasil panen tidak optimal. Beberapa proyek irigasi yang dibangun tidak berfungsi maksimal karena: Pendangkalan saluran, Tidak ada pemeliharaan rutin, Atau desain teknis yang tidak sesuai dengan kontur tanah dan curah hujan ekstrem di wilayah pesisir. Irigasi pada beberapa saluran di Sipora sempat	basah (padi), tetapi akses ke air irigasi sangat minim akibat keterbatasan infrastruktur dan medan kepulauan. Lokasi proyek irigasi sangat sulit dijangkau (terutama di Siberut dan Pagai), yang menyebabkan tingginya biaya dan kompleksitas teknis dalam pembangunan dan pemeliharaan. Perubahan iklim meningkatkan ketidakpastian curah hujan, memperbesar risiko gagal panen dan krisis pangan lokal. Tanpa organisasi pengelola air, irigasi tidak bisa

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
			irigasi tetes dan sprinkler, namun mahal dan membutuhkan dukungan teknologi. Dampak Perubahan Iklim ; Perubahan pola curah hujan dan meningkatnya suhu mempengaruhi ketersediaan air untuk irigasi. Musim tanam bergeser, memperpendek periode irigasi yang efektif. Kebutuhan air untuk tanaman meningkat karena suhu lebih tinggi sehingga memperbesar tekanan pada sumber daya air.	Konflik penggunaan air antara pertanian, rumah tangga, dan industri mulai meningkat di kawasan perkotaan dan industri.	dilaporkan rusak dan perlu rehabilitasi. Petani di Mentawai belum memiliki organisasi pengelola air (P3A) yang kuat. Ini menyebabkan tidak adanya pengaturan distribusi air secara kolektif dan kurangnya partisipasi dalam pemeliharaan saluran. Musim tanam di Mentawai sangat bergantung pada musim hujan. Perubahan iklim menyebabkan pergeseran pola hujan, sehingga periode tanam tidak menentu dan menyebabkan gagal panen di beberapa wilayah. Kekeringan musiman juga memperburuk masalah irigasi di lahan tadah hujan. Medan bergunung,	dipelihara atau dioperasikan secara berkelanjutan. Perencanaan berbasis data sangat penting untuk menentukan prioritas investasi dan pengelolaan air yang efisien. Wilayah ini punya potensi pertanian lokal dan kedaulatan pangan daerah yang belum tergarap optimal.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
					akses sulit, dan wilayah terpencar antarpulau membuat pembangunan jaringan irigasi teknis mahal dan rumit. Banyak desa pertanian hanya bisa dijangkau lewat laut atau jalan darat yang belum layak, sehingga transportasi material pembangunan saluran irigasi menjadi mahal. Capaian pelayanan irigasi sangat kecil sehingga itu artinya, lebih dari separuh lahan pertanian di Mentawai belum mendapatkan layanan irigasi yang layak.	
Penanganan Abrasi	Abrasi Pantai di Mentawai Penyebab: Gelombang laut	• Tingginya potensi	Abrasi (Pengikisan Pantai)	Abrasi Pantai Isu Nasional : Lebih	Abrasi di Mentawai Kondisi : Abrasi	Abrasi Pantai Isu Strategis :

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
	yang kuat dari Samudera Hindia, terutama saat musim barat. Kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Penggundulan vegetasi pantai (misalnya mangrove dan pohon kelapa). Aktivitas pembangunan pesisir seperti pemukiman atau infrastruktur wisata. Dampak: Pengikisan garis pantai dan hilangnya daratan. Kerusakan pemukiman dan fasilitas umum di dekat pantai. Mengancam kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada laut.	Bencana • Kerusakan Wilayah Pesisir dan Pantai	Isu Global: Kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global menyebabkan abrasi di wilayah pesisir seluruh dunia. Perusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang memperparah abrasi karena hilangnya pelindung alami dari gelombang. Dampak Global: Kehilangan wilayah daratan di negara-negara kepulauan (seperti Maladewa, Kiribati). Ancaman terhadap pemukiman padat penduduk di daerah pantai. Migrasi penduduk pesisir (*climate refugees*).	dari 40% garis pantai Indonesia terancam abrasi, terutama di pantai utara Jawa, pesisir Kalimantan, dan Sumatera. Kerusakan mangrove dan reklamasi pantai mempercepat proses abrasi. Dampak : Kehilangan wilayah daratan dan ancaman terhadap ribuan pemukiman pesisir. Merusak infrastruktur penting seperti jalan pantai, pelabuhan, dan tambak. Mendorong migrasi penduduk dan konflik lahan.	terjadi di banyak wilayah pesisir, terutama di pulau-pulau kecil seperti Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Diperparah oleh hilangnya vegetasi pantai, seperti pohon kelapa dan mangrove, akibat pemukiman dan aktivitas manusia. Gelombang laut dari Samudera Hindia sangat kuat, terutama saat musim barat. Dampak : Pengikisan pantai yang mengancam permukiman, fasilitas umum, dan lahan produktif. Hilangnya tanah daratan secara bertahap di beberapa desa pesisir. Merusak ekosistem pantai yang penting bagi nelayan lokal.	Kerusakan garis pantai akibat abrasi mengancam pemukiman, infrastruktur, dan ekonomi pesisir (perikanan, pariwisata). Kurangnya perlindungan alami (mangrove, vegetasi pantai) membuat wilayah pesisir sangat rentan terhadap gelombang laut. Strategi Penanganan: Rehabilitasi dan konservasi mangrove serta tanaman pelindung pantai. Pembangunan struktur penahan abrasi (misalnya: tanggul lunak, sabuk pantai

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
						berbasis vegetasi). Zonasi wilayah pesisir untuk mencegah pembangunan di area sangat rawan abrasi.
Penanganan Erosi	Tingginya curah hujan sepanjang tahun di Mentawai. Kondisi ini diperparah dengan sisklus iklim yang ekstrim terjadi di Mentawai. Pembukaan lahan untuk pertanian atau perkebunan tanpa konservasi tanah. Kontur tanah yang curam di wilayah perbukitan. Dampak: Penurunan kesuburan tanah. Menyebabkan sedimentasi di sungai dan laut, memperparah banjir dan abrasi. Bisa memicu longsor di daerah rawan.	• Tingginya potensi Bencana • Kerusakan Wilayah Pesisir dan Pantai	Isu Global: Erosi menyebabkan degradasi lahan, berkurangnya kesuburan tanah, dan menurunnya hasil pertanian. Pertanian intensif, penggundulan hutan, dan pembangunan mempercepat proses erosi. Dampak Global: Sekitar 24 miliar ton tanah subur hilang tiap tahun (FAO). Menurunnya ketahanan pangan global. Memicu konflik atas lahan subur di beberapa wilayah dunia.	Isu Nasional: Sekitar 24 juta hektare lahan mengalami erosi sedang hingga berat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Aktivitas pertanian di lereng tanpa terasering, perambahan hutan, dan perkebunan besar menjadi faktor utama. Dampak Nasional: Penurunan produktivitas lahan pertanian. Pendangkalan sungai dan waduk yang memperburuk risiko banjir. Menurunnya	Isu Regional : kondisi Mentawai : Terjadi di daerah perbukitan dan lahan miring yang dibuka untuk pertanian berpindah atau ladang. Curah hujan yang tinggi sepanjang tahun mempercepat erosi lapisan atas tanah. Minimnya teknik konservasi tanah menyebabkan laju erosi tak terkendali. Dampak : Penurunan kesuburan lahan pertanian lokal. Sedimentasi pada sungai dan saluran	Isu Strategis : Praktik pertanian tradisional yang tidak memperhatikan konservasi tanah menyebabkan degradasi lahan. Erosi memperparah pendangkalan sungai dan kerusakan ekosistem air tawar. Strategi Penanganan: Penerapan teknik konservasi tanah dan air (terasering, penanaman tanaman penutup tanah).

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
				kualitas air dan ekosistem.	air, yang memperparah banjir. Mengancam keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pedesaan.	Edukasi masyarakat tani tentang praktik ramah lingkungan. Rehabilitasi daerah tangkapan air (DTA) dan penguatan kelembagaan lokal dalam pengelolaan lahan.
Penanganan Longsor	Permasalahan longsor akibat adanya : Tanah jenuh air akibat hujan deras terus-menerus. Lereng yang curam dan tidak ditanami vegetasi penahan. Gempa bumi, yang umum terjadi di zona seismik aktif seperti Mentawai. Dampak : Menimbulkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Mengisolasi desa-desa terpencil karena akses jalan tertimbun.	• Tingginya potensi Bencana • Kerusakan Wilayah Pesisir dan Pantai	Isu Global: Perubahan iklim menyebabkan curah hujan ekstrem lebih sering, meningkatkan risiko longsor. Deforestasi dan penggalian lereng gunung (misalnya untuk pertambangan) mempercepat kerawanan longsor. Dampak Global : Ratusan ribu orang terdampak tiap tahun, khususnya di negara-negara berkembang. Kerusakan	Isu Nasional: Indonesia menempati salah satu posisi tertinggi di dunia dalam kejadian tanah longsor. Wilayah rawan longsor: Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua. Dampak Nasional: Ratusan korban jiwa setiap tahun. Mengganggu	Longsor di Mentawai Terjadi akibat : Tanah longsor sering terjadi di wilayah dengan topografi curam, terutama saat musim hujan. Gempa bumi juga sering memicu longsor karena Mentawai berada di zona subduksi aktif (lempeng Indo-Australia dan Eurasia). Perbukitan yang	Isu Strategis: Tingginya risiko longsor di lereng curam terutama pada musim hujan dan pasca-gempa. Infrastruktur jalan desa sering rusak atau terputus akibat longsor, menghambat konektivitas antarwilayah. Strategi Penanganan: Pemetaan daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
			infrastruktur dan korban jiwa di daerah pegunungan tropis (Asia Selatan, Amerika Selatan, Indonesia). Mengganggu jalur transportasi dan konektivitas antar wilayah.	jaringan transportasi antar daerah. Menyebabkan kerugian sosial-ekonomi dan mengisolasi wilayah.	telah kehilangan penutup vegetasi semakin rentan. Dampak : Menutup akses jalan dan mengisolasi desa-desa terpencil. Menimbulkan korban jiwa dan kerusakan rumah penduduk. Mengganggu kegiatan ekonomi dan distribusi logistik.	rawan longsor dan penyusunan rencana tata ruang berbasis mitigasi bencana. Reboisasi dan pelarangan pembukaan lahan di zona risiko tinggi. Pembangunan sistem peringatan dini dan pelatihan evakuasi berbasis komunitas.
Penanganan Banjir	Intensitas hujan tinggi dan sistem drainase yang tidak memadai. Pendangkalan sungai akibat erosi dan sedimentasi. Penggundulan hutan yang mengurangi daya serap air tanah. Dampak : Merendam rumah dan lahan pertanian. Meningkatkan risiko penyakit menular. Mengganggu transportasi	• Tingginya potensi Bencana • Kerusakan Wilayah Pesisir dan Pantai	Isu Global: Peningkatan suhu global mengubah pola curah hujan, sehingga hujan deras menjadi lebih sering dan ekstrem. Urbanisasi tanpa perencanaan menyebabkan berkurangnya lahan resapan air. Dampak Global : Banjir adalah bencana paling sering terjadi di	Isu Nasional: Banjir menjadi bencana hidrometeorologi paling sering terjadi di Indonesia. Faktor utama: curah hujan tinggi, kerusakan hutan, buruknya sistem drainase, dan pembangunan tak terkontrol. Dampak Nasional : Banjir besar di	Banjir di Mentawai Banjir sering terjadi di wilayah dataran rendah dan sepanjang aliran sungai. Terjadi akibat curah hujan tinggi, pendangkalan sungai, dan sistem drainase yang sederhana atau rusak. Beberapa kawasan juga rawan banjir	Isu Strategis: Banjir sering merendam permukiman dan lahan pertanian karena sistem drainase yang tidak memadai dan pendangkalan sungai. Tidak adanya pengelolaan terpadu DAS (Daerah Aliran

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
	dan kegiatan ekonomi masyarakat.		dunia (UNDRR). Kerugian ekonomi miliaran dolar setiap tahun. Ancaman besar bagi kota-kota dataran rendah seperti Jakarta, Sumatera Barat Bangkok, Dhaka, dan New Orleans.	kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Medan menyebabkan kerugian triliunan rupiah. Menurunnya kualitas hidup masyarakat di wilayah padat penduduk dan permukiman kumuh. Meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan kerawanan pangan.	rob akibat gelombang pasang. Dampak : Merendam rumah, sekolah, dan fasilitas umum. Mengganggu aktivitas pertanian dan akses transportasi. Meningkatkan risiko penyakit menular di permukiman padat.	Sungai) menyebabkan banjir tahunan sulit dikendalikan. Strategi Penanganan: Normalisasi sungai dan pembangunan drainase ramah lingkungan. Pengelolaan DAS secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat adat. Penyusunan rencana kontinjensi banjir di wilayah padat penduduk dan sekolah
Pemanfaatan Ruang	Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dalam pelayanan pemanfaatan ruang dapat meliputi beberapa hal, antara lain kurangnya sumber daya manusia yang	Peningkatan Alih Fungsi Lahan	Penataan ruang harus mempertimbangkan daya tahan terhadap perubahan iklim, seperti pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap banjir dan pembangunan	Percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang untuk mengarahkan pemanfaatan ruang secara optimal, optimalisasi peran	Kondisi wilayah kabupaten kepulauan Mentawai dengan 82% merupakan Kawasan hutan, menyebabkan sulitnya memenuhi	Minimnya produk hukum terkait pengendalian pemanfaatan ruang yang diperuntukkan sebagai alat

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU				
		ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU GLOBAL	ISU NASIONAL	ISU DAERAH	ISU STRATEGIS
	kompeten, keterbatasan anggaran, infrastruktur yang kurang memadai, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rencana tata ruang.		kawasan yang mempertimbangkan risiko kenaikan permukaan air laut	masyarakat, dan Penataan ruang harus mampu meminimalkan dampak negatif pembangunan, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan dan keberlanjutan.	kebutuhan ruang yang mendasar bagi pembangunan infrastruktur fasilitas umum, fasilitas social, dan lahan usaha. Dengan sempitnya ruang Kelola publik menyebabkan tumpang tindih pemanfaatan pada rencana pola ruang wilayah sehingga dibutuhkan peraturan/ ketentuan terkait pengendalian pemanfaatan ruang berupa produk hukum terkait rencana tata ruang.	penertiban ruang.

Sumber : Dinas PUPR-2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam RPJMD terdapat 8 (delapan) misi yang menjadi penjabaran daripada visi Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera. Dari 8 (delapan) misi tersebut, terdapat 2 misi yang menjadi bagian dari pada tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Misi 2 : Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah
   Pada misi ini terdapat program prioritas yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan infrastruktur kewilayahan yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan
   Pada misi ini terdapat program prioritas yaitu Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan bangunan dan Lingkungannya, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dan Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Maka beranjak dari Visi dan Misi tersebut, Tujuan daripada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 adalah Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas dan Terciptanya Keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mencapai tujuan Renstra, ditetapkan sasaran yang akan diwujudkan sebagai berikut:

a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi.
   Sasaran di sektor konstruksi diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja konstruksi yang kompeten serta mendorong partisipasi aktif pelaku lokal dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah. Melalui pendekatan ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada hasil fisik, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal.
   Upaya pencapaian sasaran ini dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai standar nasional, penguatan lembaga pelatihan kerja, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan industri jasa konstruksi. Selain itu, peningkatan partisipasi pelaku lokal juga difasilitasi melalui pemberdayaan kontraktor lokal, penyediaan akses terhadap proyek pemerintah, serta penerapan regulasi yang mendorong penggunaan tenaga kerja dan material lokal.
   Dengan strategi tersebut, diharapkan tercipta ekosistem sektor konstruksi yang produktif dan berkelanjutan, yang tidak hanya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan jalan kabupaten secara merata, berkeadilan dan inklusif.
   Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, mengatasi keterisolasian, serta mendukung pemerataan pembangunan. Mengingat karakteristik wilayah Mentawai sebagai daerah kepulauan, pengembangan infrastruktur transportasi menjadi prioritas strategis dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar kecamatan, pusat pelayanan, serta kawasan strategis lainnya.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya ketahanan infrastruktur sumber daya air dan kawasan permukiman dalam mendukung pengurangan risiko banjir, abrasi dan banjir rob serta pemenuhan kebutuhan layanan air bagi masyarakat.

   Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana alam serta melindungi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan fungsi ruang. Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai wilayah kepulauan dengan garis pantai yang panjang serta kondisi topografi yang bervariasi memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana hidrometeorologis.

   Peningkatan kapasitas proteksi dilakukan melalui pembangunan dan penguatan infrastruktur pengendali bencana seperti sabuk pantai, tanggul, bangunan pengendali sedimen, serta sistem peringatan dini. Selain itu, upaya konservasi lahan dan vegetasi penyangga, serta penataan ruang berbasis mitigasi risiko bencana menjadi bagian integral dalam strategi pengurangan risiko.

   Dengan sistem proteksi yang memadai dan adaptif, diharapkan dapat menurunkan tingkat kerugian akibat bencana, menjaga keberlanjutan pemanfaatan ruang, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang tangguh bencana dan berkelanjutan.

   Untuk menjamin ketersediaan air baku yang memadai, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum yang layak dan aman. Peningkatan penyediaan air baku menjadi penting mengingat pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, serta perkembangan wilayah yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan air minum.

   Dalam konteks pembangunan daerah, pemenuhan air baku untuk air minum bukan hanya sebatas menambah volume pasokan, tetapi juga mencakup upaya menjaga keberlanjutan sumber daya air melalui pengelolaan yang terpadu. Hal ini melibatkan pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pengambilan air baku, pemeliharaan kualitas sumber air, serta sinergi dengan pihak penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM).

   Dengan tercapainya sasaran ini, diharapkan:
   - Akses masyarakat terhadap air minum meningkat, baik dari sisi jangkauan maupun keterjangkauan.
   - Kualitas hidup masyarakat membaik, karena terpenuhinya kebutuhan dasar berupa air bersih.
   - Terdukungnya pencapaian target layanan dasar nasional, khususnya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang air minum.
   - Mengurangi risiko krisis air akibat keterbatasan pasokan atau pencemaran sumber air baku.

   Selain itu, untuk mendukung produktivitas sektor pertanian, ketahanan pangan, serta pelestarian lingkungan secara berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, pengelolaan sumber daya air yang optimal menjadi tantangan tersendiri mengingat kondisi geografis, curah hujan tinggi, serta terbatasnya daerah irigasi teknis yang tersedia.

   Peningkatan cakupan layanan irigasi dilakukan melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi, terutama pada lahan pertanian potensial. Sementara itu, upaya konservasi sumber daya air diarahkan pada pengendalian daerah tangkapan air, pelindungan mata air, dan penerapan teknologi tepat guna untuk efisiensi pemanfaatan air.

   Dengan pengelolaan irigasi dan konservasi yang terintegrasi, diharapkan peningkatan produksi pertanian dapat tercapai secara berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem dan ketersediaan air bagi berbagai kebutuhan masyarakat.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya cakupan layanan air minum yang didukung oleh suplai air baku yang andal.

   Sasaran ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan air minum yang aman, layak, dan berkelanjutan. Ketersediaan suplai air baku

yang andal menjadi prasyarat utama dalam penyediaan layanan air minum yang berkualitas, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya air dan tantangan geografis seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Peningkatan cakupan dilakukan melalui pembangunan dan optimalisasi sistem penyediaan air minum (SPAM), baik skala kecil maupun menengah, termasuk pemanfaatan sumber air permukaan, air tanah, dan air hujan yang dikelola secara terpadu. Upaya ini juga mencakup penguatan kelembagaan pengelola air minum serta peningkatan kapasitas teknis dan operasional guna menjamin keberlanjutan layanan.
Dengan terjaminnya suplai air baku dan bertambahnya jangkauan layanan, diharapkan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat, penurunan risiko penyakit berbasis air, serta percepatan pencapaian target akses air minum layak sesuai standar pelayanan minimum dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

e. Sasaran 5 : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan sanitasi layak (persampahan, Limbah domestik dan drainase).
Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, layak, dan berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur dan layanan dasar di sektor sanitasi, termasuk sistem pengelolaan air limbah domestik, persampahan, serta pengendalian genangan melalui drainase yang memadai.
Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Mentawai, peningkatan layanan tersebut menjadi prioritas strategis mengingat tantangan geografis, pertumbuhan permukiman, serta potensi risiko kesehatan dan bencana lingkungan. Upaya yang dilakukan meliputi pembangunan sarana sanitasi komunal dan individual, peningkatan kapasitas pengangkutan dan pengolahan sampah, serta rehabilitasi dan pembangunan sistem drainase di wilayah permukiman padat dan pusat kegiatan.
Melalui pendekatan berbasis kawasan dan partisipasi masyarakat, sasaran ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengurangi pencemaran lingkungan, serta memperkuat ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim dan bencana hidrometeorologis.

f. Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas penyelenggaran bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan kawasan strategis.
Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan lingkungan binaan yang aman, tertib, layak huni, dan berkelanjutan. Peningkatan kepatuhan ini mencakup penerapan regulasi teknis bangunan gedung, pelaksanaan pengawasan konstruksi, serta penataan kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang dan kaidah pembangunan berwawasan lingkungan.
Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, penguatan aspek perizinan, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap pembangunan gedung serta permukiman menjadi krusial, mengingat kondisi geografis dan potensi bencana yang memerlukan standar bangunan yang adaptif dan aman. Selain itu, penataan kawasan permukiman diarahkan untuk mencegah tumbuhnya kawasan kumuh dan meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar secara merata.
Melalui peningkatan kepatuhan ini, diharapkan kualitas pembangunan fisik di daerah dapat terjaga, risiko kerusakan akibat bencana dapat diminimalkan, serta tercipta lingkungan permukiman yang layak, tertata, dan berdaya dukung tinggi terhadap perkembangan wilayah

g. Sasaran 7 : Meningkatnya kesesuaian lokasi dan kegiatan investasi dengan rencana tata ruang melalui pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib, terencana, dan berkelanjutan dengan memastikan kegiatan investasi berjalan sesuai rencana tata ruang, sehingga mendukung iklim investasi yang aman,

berkeadilan, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Peningkatan dilakukan melalui penguatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya peningkatan tersebut diawali dengan penyelarasan perizinan investasi agar seluruh rencana kegiatan usaha mengacu pada RTRW/RDTR yang berlaku, sehingga setiap lokasi dan jenis kegiatan investasi telah melalui kajian kesesuaian tata ruang sejak tahap perencanaan.

Selanjutnya, peningkatan dilakukan melalui pengawasan pemanfaatan ruang secara rutin dan terpadu, baik melalui monitoring lapangan maupun pemanfaatan sistem informasi geospasial. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kegiatan investasi yang berjalan tetap sesuai dengan izin dan peruntukan ruang yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang.

Selain itu, peningkatan juga didukung dengan penegakan aturan dan pemberian sanksi yang tegas namun proporsional terhadap pelanggaran tata ruang, disertai pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta kepastian hukum, tertib tata ruang, dan iklim investasi yang sehat serta berkelanjutan

Dengan demikian dapat diharapkan terciptanya kepastian hukum dan kejelasan bagi pelaku usaha dalam berinvestasi, karena lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan telah selaras dengan rencana tata ruang. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor serta memperkuat iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing

h. Sasaran 8 : Meningkatnya Lahan yang Telah Ditetapkan untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum dan Siap Dimanfaatkan.

   Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan lahan yang memiliki kepastian hukum, sesuai dengan rencana tata ruang, dan siap digunakan guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

   Hal ini dapat dilakukan melalui inventarisasi dan pemetaan lahan potensial, penetapan lokasi pembangunan, penguatan kepastian hukum atas status lahan, serta pelaksanaan pengadaan dan pembebasan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses ini didukung oleh koordinasi lintas perangkat daerah, penyediaan dokumen teknis dan administratif yang lengkap, serta pengendalian dan pengawasan secara berkala agar lahan yang telah ditetapkan benar-benar siap dimanfaatkan.

   Dengan demikian tersedianya lahan yang siap bangun dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, meminimalkan hambatan dan konflik pertanahan, serta meningkatkan efektivitas pembangunan daerah. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan serta pelayanan publik yang lebih optimal.

i. Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas kinerja Perangkat Daerah

   Sasaran ini diarahkan mewujudkan tata kelola orgainsasi Dinas PUPR yang akuntabel dan berbasis pelayanan publik.

Dibawah ini dapat dilihat perumusan tujuan, sasaran, indikator serta target Renstra dalam kurun waktu 5 (lima) tahun :

Tabel 3.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan inklusif	1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas dan terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah		Indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI)	Indeks	60	65	70	75	80	85
			Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	25	25	25	25	25	25
		1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	34,78	43,48	52,17	60,87	69,57	69,57

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		2 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan jalan kabupaten secara merata, berkeadilan, dan inklusif	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur jalan antar pusat kegiatan	Indeks	65	70	75	81	85	85
Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif		3 Meningkatnya ketahanan infrastruktur sumber daya air dan kawasan permukiman dalam mendukung pengurangan risiko banjir, abrasi dan banjir rob serta pemenuhan kebutuhan layanan air bagi masyarakat.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Sumber daya air	Indeks	65	67	70	72	75	80
		4 Meningkatnya cakupan layanan air minum yang didukung oleh suplai air baku yang andal.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur air minum	Indeks	65	70	75	81	85	85

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Investasi, Ketahanan Pangan, Stabilitasi Ekonomi dan Nilai Tambah/Hilirisasi		5 Meningkatnya kesesuaian lokasi dan kegiatan investasi dengan rencana tata ruang melalui pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	Persentase realisasi investasi yang sesuai dengan peruntukan tata ruang	Persen	75	75	75	75	75	75
Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana utilitas kawasan		6 Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan sanitasi layak (persampahan, Limbah domestik dan drainase)	Persentase Rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman (Persampahan, Air Limbah dan Drainase)	Persen	20	21	25	30	40	45
		7 Meningkatnya kualitas penyelenggaran bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan kawasan strategis.	Persentase bangunan gedung dan kawasan strategis yang memenuhi standar teknis dan tata ruang	Persen	22.5	27.5	32.5	37.5	42.5	42.5

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		8 Meningkatnya Lahan yang Telah Ditetapkan untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum dan Siap Dimanfaatkan	Persentase lahan siap bangun	Persen	50	50	50	50	50	50
Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dantepercaya		9 Meningkatnya kualitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	Nilai	B	B	BB	BB	A	A
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	Inovasi	2	2	2	2	2	2
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	80	85	88	90	92	95

Sumber : Dinas PUPR - 2025

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui beberapa strategi. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus Pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Berikut strategi yang dilakukan untuk mencapai setiap sasaran yang telah dirumuskan :

Table 3.2
Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas dan terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	1. Penguatan Kelembagaan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi 2. Pemanfaatan Proyek Infrastruktur sebagai Sarana Penyerapan Tenaga Kerja Lokal 3. Peningkatan Inklusivitas dan Akses Kelompok Rentan 4. Pembangunan Sistem Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Daerah 5. Monitoring dan Evaluasi Serapan Tenaga Kerja Konstruksi
		2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan jalan kabupaten secara merata, berkeadilan, dan inklusif	1. Pemetaan dan Penetapan Kawasan Strategis dan PusatKegiatan 2. Perencanaan Jaringan Jalan Berbasis Tata Ruang dan Konektivitas 3. Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Jalan. 4. Pemanfaatan Pola Kerja Sama dan Pendanaan Alternatif. 5. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Antarsektor. 6. Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi. 7. Integrasi Transportasi Multimoda. 8. Pembangunan Jalan Berbasis Padat Karya
		3	Meningkatnya ketahanan infrastruktur sumber daya air dan kawasan permukiman dalam mendukung pengurangan risiko banjir, abrasi dan banjir rob serta pemenuhan kebutuhan layanan air bagi masyarakat.	1. Identifikasi dan Pemetaan Risiko Bencana Wilayah 2. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Bencana Alam. 3. Penguatan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan 4. Pengembangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Air Baku 5. Konservasi dan Perlindungan Daerah Tangkapan Air 6. Peningkatan Efisiensi dan Diversifikasi Sumber Air 7. Penguatan Kelembagaan dan Kerja Sama Antar-Pemangku Kepentingan 8. Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi Air Baku 9. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 10. Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya Air 11. Peningkatan Efisiensi dan Teknologi Irigasi 12. Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Petani 13. Pemanfaatan Data dan Perencanaan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				Berbasis Spasial 14. Integrasi Program Irigasi dan Ketahanan Pangan
		4	Meningkatnya cakupan layanan air minum yang didukung oleh suplai air baku yang andal.	1. Identifikasi dan Pemanfaatan Sumber Air Baku Potensial 2. Pembangunan dan Optimalisasi Infrastruktur Air Baku 3. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 4. Pembangunan dan Penguatan Jaringan Distribusi Air Minum 5. Peningkatan Aksesibilitas Layanan dan Inklusivitas 6. Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Operasional 7. Penerapan Kebijakan dan Insentif Daerah 8. Integrasi dengan Dokumen Perencanaan dan Tata Ruang
		5	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan sanitasi layak (persampahan, Limbah domestik dan drainase)	1. Penguatan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Wilayah 2. Peningkatan Akses dan Layanan Sanitasi Layak 3. Pengembangan Infrastruktur Drainase untuk Mengurangi Genangan 4. Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Permukiman 5. Integrasi dengan Dokumen Perencanaan dan Tata Ruang
		6	Meningkatnya kualitas penyelenggaran bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan kawasan strategis.	1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Standar Teknis 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM 3. Digitalisasi Perizinan dan Pengawasan 4. Peningkatan Kualitas Penataan Kawasan Permukiman 5. Integrasi Tata Ruang dan Sistem Penataan Bangunan
		7	Meningkatnya kesesuaian lokasi dan kegiatan investasi dengan rencana tata ruang melalui pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	1. Penyusunan dan Pembaruan Dokumen Tata Ruang Berbasis Risiko 2. Penguatan Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3. Integrasi Mitigasi Risiko Bencana ke dalam Rencana Tata Ruang
		8	Meningkatnya Lahan yang Telah Ditetapkan untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum dan Siap Dimanfaatkan	1. Peningkatan perencanaan dan penetapan lokasi 2. Penguatan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan 3. Percepatan proses pengadaan tanah 4. Penyediaan data dan informasi pertanahan yang akurat 5. Pengelolaan dan pengamanan aset lahan 6. Sosialisasi dan komunikasi publik yang efektif
		9	Meningkatnya kualitas kinerja Perangkat Daerah	1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 2. Penerapan Manajemen Risiko

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
				Terintegrasi 3. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 4. Peningkatan Kualitas Indikator Kinerja 5. Digitalisasi Tata Kelola dan Pelaporan 6. Peningkatan Kapasitas SDM 7. Penguatan Budaya Kinerja dan Integritas 8. Evaluasi Kinerja Berkala dan Tindak Lanjut

Pentahapan kebijakan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Fokus kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5
Tahap Konsolidasi dan Penataan Awal	Tahap Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Dasar	Tahap Integrasi Kawasan dan Pemantapan Tata Ruang	Tahap Penguatan Ketangguhan dan Inovasi Infrastruktur	Tahap Evaluasi, Exit Strategy, dan Penguatan Keberlanjutan

Sumber: Dinas PUPR -2025

1. Tahap I 2025 memiliki focus Penataan kelembagaan, dokumen teknis, dan proyek prioritas dasar di kawasan strategis. Adapun prioritas utama pada tahap I ini adalah sebagai berikut :
   - Penyusunan dan pembaruan dokumen teknis infrastruktur (Masterplan Jalan, RISPAM, Rencana Proteksi Abrasi/Longsor)
   - Digitalisasi proses perizinan PBG dan sistem pengawasan bangunan
   - Identifikasi dan delineasi kawasan permukiman prioritas, kumuh, dan rawan bencana
   - Pelaksanaan proyek quick-win: jalan lingkungan, sumur bor, dan drainase RT/RW di Tuapejat dan pusat kecamatan
   - Penyusunan SOP dan sistem pengawasan penyelenggaraan bangunan Gedung
   - Penguatan kapasitas SDM teknis PUPR dan UPT di kecamatan
2. Tahap II 2026 memiliki focus Perluasan cakupan pelayanan dasar dan peningkatan aksesibilitas antar wilayah. Adapun prioritas utama pada tahap II ini adalah sebagai berikut :
   - Pembangunan jalan penghubung antar kecamatan
   - Peningkatan kualitas air minum dan sanitasi di kawasan padat dan pesisir
   - Penataan kawasan permukiman pesisir dan penanganan awal abrasi di Tuapejat dan Bosua
   - Optimalisasi layanan perizinan bangunan berbasis OSS-RBA dan digitalisasi PBG/SLF
   - Pelibatan kelompok masyarakat dalam padat karya infrastruktur dan pelatihan tenaga kerja konstruksi

3. Tahap III 2027 memilki focus Penguatan konektivitas fungsional dan penerapan tata ruang dalam pengendalian Pembangunan. Adapun prioritas utama pada tahap III ini adalah sebagai berikut :
   - Pembangunan dan peningkatan jalan menuju kawasan pariwisata dan Pelabuhan
   - Penguatan jaringan drainase perkotaan dan jalan lingkungan
   - Penataan kawasan permukiman strategis sesuai RDTR
   - Penerapan sistem informasi pengendalian bangunan dan ruang berbasis spasial
   - Pelaksanaan pengawasan teknis bangunan secara berkala (sampling, audit lapangan)
4. Tahap IV 2028 memiliki focus Ketangguhan terhadap bencana, pemanfaatan teknologi hijau, dan penguatan daya dukung lingkungan.
   Adapun prioritas utama dari tahap IV ini adalah sebagai berikut :
   - Proteksi wilayah pesisir dan sempadan sungai melalui talud, vegetasi pelindung, dan bio engineering
   - Rehabilitasi dan peningkatan jalan strategis yang rusak berat
   - Penerapan konsep bangunan hijau dan kawasan permukiman berketahanan iklim
   - Penyusunan rencana induk drainase dan pengelolaan air permukaan terintegrasi.
5. Tahap V 2029 memilki focus Evaluasi RPJMD, konsolidasi kelembagaan, dan persiapan dokumen jangka panjang. Adapun prioritas utama dari tahap V ini adalah sebagai berikut :
   - Evaluasi capaian Renstra & RPJMD (indikator infrastruktur, PBG, ketangguhan wilayah)
   - Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Panjang 2030–2045
   - Penguatan sistem pengawasan bangunan dan ruang secara digital dan partisipatif
   - Integrasi dan pemanfaatan SIG dan dashboard kinerja infrastruktur
   - Penataan ulang manajemen aset infrastruktur dan penguatan sistem pemeliharaan berbasis kebutuhan

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Renstra Perangkat DaerahTahun 2025-2029 bertujuan mewujudkan infrastruktur dan tata ruang yang mendukung transformasi ekonomi berkeadilan, berkelanjutan, dan adaptif terhadap bencana.

Kebijakan fokus pada pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, serta pengelolaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sinergi antar sektor, peningkatan kapasitas, dan inovasi teknologi menjadi kunci pelaksanaan demi mendukung pembangunan wilayah yang tangguh dan inklusif.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dirumuskan arah kebijakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan setiap tahunnya. Berikut arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 – 2029 :

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Dinas PUPR Tahun 2025 – 2029

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket
1	2	3	4	5
1.	Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan inklusif	a. Peningkatan konektivitas antarwilayah dan akses ke pusat pertumbuhan b. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	• Peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten • Peningkatan dan pemeliharaan jembatan kabupaten • Pembangunan jalan penghubung antar kecamatan dan akses kawasan strategis • Pembangunan jembatan penghubung pulau dan desa	BIDANG BINA MARGA
2.	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana utilitas kawasan	a. Tertib penyelenggaraan bangunan b. Digitalisasi layanan perizinan Gedung c. Mitigasi risiko bangunan	• Layanan PBG terintegrasi OSS • Pengawasan bangunan tahunan • Penataan gedung kawasan strategis dan pesisir	BIDANG CIPTA KARYA DAN BINA KONSTRUKSI
3.	Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif	a. Akses air minum aman dan berkelanjutan b. Layanan air bersih bagi wilayah sulit air	• Penyusunan dan implementasi RISPAM • Pembangunan SPAM desa dan Kawasan • Pembinaan kelembagaan pengelola SPAM kawasan dan desa • Peningkatan dan Perluasan SPAM • Peningkatan layanan UPT PAM	
4.	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana utilitas kawasan	a. Akses sanitasi layak b. Kawasan permukiman sehat dan bebas BABS	• IPAL komunal & sanitasi individual • Penanganan kawasan kumuh • Integrasi STBM dan pembangunan fisik	
5.	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana utilitas kawasan	a. Pengurangan timbulan dan peningkatan pengelolaan sampah b. Penguatan partisipasi	• Pembangunan TPST/TPS3R pada setiap kecamatan dan TPS dipermukiman padat • Edukasi dan kemitraan desa-sekolah	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket
		masyarakat	• Pengurangan sampah plastik	
6.	Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana utilitas kawasan	a. Pengendalian banjir/genangan b. Tata kelola drainase berkelanjutan	• Penyusunan RISD Tuapejat & kecamatan induk • Rehabilitasi saluran rawan banjir • Drainase ramah lingkungan	
7.	Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan inklusif	a. Meningkatkan kesempatan kerja inklusif dan berkualitas b. Peningkatan daya saing SDM lokal	• Program pelatihan dan sertifikasi tukang lokal • Pekerjaan padat karya untuk infrastruktur dasar • Sistem manajemen mutu proyek daerah	
8.	Meningkatnya Investasi, Ketahanan Pangan, Stabilitasi Ekonomi dan Nilai Tambah/Hilirisasi	a. Pengendalian tata ruang yang berkelanjutan b. Dukungan investasi & perlindungan kawasan lindung	• Penetapan Perda revisi RTRW • Penyusunan dan penetapan RDTR pada Kawasan strategis • Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan ruang melalui FPR, SPPR, KKPR, PPNS bidang tata ruang dan TURBINLAK • Pemutakhiran data geospasial berbasis SIG	BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN
9.	Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif	a. Peningkatan ketahanan wilayah terhadap bencana alam dan perubahan iklim. b. Peningkatan akses dan kualitas air baku, irigasi, dan sistem drainase. c. Penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.	• Penguatan sistem informasi hidrologi dan pemetaan kawasan rawan bencana (banjir/longsor). • Peningkatan kapasitas infrastruktur pengendali banjir dan erosi. • Rehabilitasi dan revitalisasi jaringan irigasi, drainase, dan embung. • Pembangunan sarana konservasi air dan perlindungan mata air di daerah rawan kekeringan. • Integrasi program pengelolaan SDA dengan sistem peringatan dini dan mitigasi bencana.	BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket
		d. Pengembangan kawasan strategis yang tangguh terhadap bencana. e. Perlindungan lingkungan hidup dan konservasi DAS.	• Penguatan kolaborasi antarinstansi dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berbasis DAS.	

Sumber : Dinas PUPR, RPJMD dan Permen PUPR

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam bab sebelumnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menetapkan sejumlah program, kegiatan, dan subkegiatan yang terintegrasi untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang secara efektif dan efisien.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang dirancang untuk mencapai outcome pembangunan infrastruktur dasar dan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan. Kegiatan dan subkegiatan yang diturunkan dari program tersebut ditujukan untuk menghasilkan output nyata. Perencanaan program dan kegiatan disusun berdasarkan hasil evaluasi periode sebelumnya, analisis isu strategis, serta kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Pelaksanaannya mengacu pada pendekatan berbasis kinerja, dengan menetapkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan secara terukur dan realistis, baik dari sisi teknis, kualitas layanan, maupun dampaknya terhadap masyarakat.

Seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan dengan memperhatikan kesinambungan antar dokumen perencanaan seperti RPJMD serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pembangunan infrastruktur nasional. Penjabaran subkegiatan disusun secara operasional dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran serta pengendalian kinerja.

Dengan pendekatan ini, diharapkan kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam mendukung konektivitas antarwilayah, mitigasi bencana, dan pengembangan wilayah pesisir dan kepulauan.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan inklusif					Persentase kawasan/wilayah pertumbuhan yang terhubung		
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur yang berkualitas dan terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah				Indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI)		
					Indeks tertib adminstrasi pertanahan		
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi			Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi		Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
					Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis		
					Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
				Terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi sesuai standar pelatihan dan kebutuhan kompetensi jasa konstruksi.	Jumlah paket/kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				Terlaksananya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Jumlah kegiatan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang dilaksanakan	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan jalan kabupaten secara merata, berkeadilan, dan inklusif			Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur jalan antar pusat kegiatan		
			Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman		Tingkat kemantapan jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terselenggaranya penyelenggaraan jalan kabupaten beserta bangunan pelengkapnya, termasuk jembatan, sesuai standar teknis, keselamatan, dan fungsi layanan transportasi	Panjang jalan Kabupaten/Kota yang ditangani sesuai standar	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	Pembangunan Jalan	
					Panjang Jalan yang direkonstruksi	Rekonstruksi Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jalan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Panjang Jalan/Jembatan KewenanganKabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	
					Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jembatan	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jembatan	
					Panjang jembatan yang dibangun	Pembangunan Jembatan	
Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif					Kapasitas Air Baku (M3/detik)		
					Akses rumah tangga perkotaan terhadap sumber air siap minum pperpipaan (%)		
		Meningkatnya ketahanan infrastruktur sumber daya air dan kawasan permukiman dalam mendukung pengurangan risiko banjir, abrasi dan banjir rob serta pemenuhan			Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Sumber daya air		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
		kebutuhan layanan air bagi masyarakat.					
			Meningkatnya perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob		
					Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas		
					Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terselenggaranya pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai sesuai standar teknis dan fungsi perlindungan.	Jumlah paket pengelolaan sumber daya air dan pengaman pantai yang dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan fisik, hingga pengawasan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Unit AirBaku	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Normalisasi/Restorasi Sungai	
					Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	Peningkatan Kanal Banjir	
					Panjang Breakwater yang Dibangun	Pembangunan Breakwater	
					Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
					Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Pembangunan Unit Air Baku	
					Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	Pembangunan Kanal Banjir	
					Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Pembangunan Tanggul Sungai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	
				Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi primer dan sekunder yang dikelola dan dikembangkan sesuai standar	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Bendung Irigasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Jumlah Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang diperkuat	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Irigasi dan Rawa tersusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
		Meningkatnya cakupan layanan air minum yang didukung oleh suplai air baku yang andal.			Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur air minum		
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum		Cakupan layanan air bersih	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/ kota		
				Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan SPAM	Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
Meningkatnya Investasi, Ketahanan Pangan, Stabilitasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi					Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB		
		Meningkatnya kesesuaian lokasi dan kegiatan investasi dengan rencana tata ruang melalui pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang			Persentase realisasi investasi yang sesuai dengan peruntukan tata ruang		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang.		Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
					Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah		
				Ditetapkannya RTRW dan RDTR sebagai pedoman pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen RTRW dan RDTR yang ditetapkan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
				Terlaksananya koordinasi dan singkronisasi perencanaan tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang telah di koordinasikan dan di singkronkan	Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	
				Terlaksananya koordinasi dan singkronisasi pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
				Terlaksananya koordinasi dan singkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan tata ruang yang disusun	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	
					Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	
					Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
					Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan PemanfaatanRuangdan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Penilaian Perwujudan RTR	
					Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	
				Terlaksananya pengawasan penataan ruang	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang yang disusun	Pengawasan Penataan Ruang	
					Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	
					Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	
					Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	
Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana utilitas kawasan					Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau		
					RT dengan Akses Sanitasi Layak		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					RumahTangga dengan Akses Sanitasi Aman		
		Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan sanitasi layak (persampahan, Limbah domestik dan drainase)			Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Sanitasi layak (Persampahan, Air Limbah dan Drainase		
			Meningkatnya layanan persampahan		Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
				Terlaksananya pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi/sistem persampahan yang dikelola dan dikembangkan sesuai standar	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah		Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
					Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman		
				Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelayanan air limbah domestik yang ditangani	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domesti (SPALD)	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase		Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			perkotaan				
				Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota	Panjang sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan sesuai standar	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Pembangunan Sistim Drainase Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaran bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan kawasan strategis.			Persentase bangunan gedung dan kawasan strategis yang memenuhi standar teknis dan tata ruang		
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung		Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Persentase kepatuhan PBG dan SLF Kabupaten/ Kota		
				Terlaksananya penyelenggaraan bangunan gedung melalui pelayanan perizinan dan sertifikasi bangunan gedung di wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan, pembangunan, perizinan dan sertifikasi bangunan gedung yang diterbitkan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat laik fungsi bangunan Gedung	
					Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan PenerbitanPersetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata		Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Teselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah	Persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang ditata, direvitalisasi, dan/atau memiliki pedoman penataan sesuai standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pembinaan dan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	
		Meningkatnya Lahan yang Telah Ditetapkan untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum dan Siap Dimanfaatkan			Persentase lahan siap bangun		
			Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum		Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran		
					Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran		
					Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran		
					jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi		
					Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas		
					Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah		
					Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/ Kota		
					Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB		
				terlaksananya koordinasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Jumlah dokumen hasilpelaksanaan koordinasi pengadaan tanah	Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	Jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan	Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota	
					Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel					Survei penilaian integritas (SPI)KP		
					Indeks Persepsi Anti Korupsi		
					Indeks Reformasi Hukum		
		Meningkatnya kualitas kinerja perangkat			Nilai LAKIP		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
		daerah.					
					Jumlah Inovasi yang diterapkan		
					Persentase capaian kinerja perangkat daerah		
			Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah		Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan Tugas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	
				Terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dikoordinasikan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya pengadministrasian keuangan daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya pengadministrasian barang milik daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik derah yang disusun dan dikoordinasikan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang siap digunakan untuk mendukung operasional dan pelayanan perkantoran	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah paket mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang pelayanan umum perkantoran	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang operasional dan pelayanan perkantoran	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharan/Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber : Dinas PUPR, RPJMD – 2025-2029

Guna Memastikan pencapaian sasaran strategis maupun program, kegiatan, dan sub kegiatan didalamnya, maka disampaikan pula rencana pendanaannya serta program prioritas sebagai indikasi pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana terlampir pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 rencana ini bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				5,824,891,714		5,690,879,817		5,809,557,003		5,892,954,596		5,953,576,512	
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan Tugas	100%	100 %	5,824,891,714	100 %	5,690,879,817	100 %	5,809,557,003	100 %	5,892,954,596	100 %	5,953,576,512	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dikoordinasikan	7 dok	5 dok	27,065,500	5 dok	27,065,500	7 dok	78,418,775	7 dok	84,839,714	7 dok	89,081,699	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 dok	5 dok	27,065,500	5 dok	27,065,500	5 dok	28,418,775	5 dok	29,839,714	5 dok	31,331,699	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 dok	0 dok		0 dok	-	2 dok	50,000,000	2 dok	55,000,000	2 dok	57,750,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	1 jenis	1 jenis	5,162,981,414	1 jenis	4,933,969,517	1 jenis	4,809,995,938	1 jenis	4,805,061,965	1 jenis	4,873,368,041	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 org	61 org	5,162,981,414	63 org	4,933,969,517	63 org	4,809,995,938	63 org	4,805,061,965	63 org	4,873,368,041	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik derah yang disusun dan dikoordinasikan	5 dok	5 dok	-	5 dok	-	5 dok	35,000,000	5 dok	38,500,000	5 dok	40,425,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 dok	0 Lap		0 Lap	-	1 Lap	35,000,000	1 Lap	38,500,000	1 Lap	40,425,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	5 jenis	5 jenis	265,136,800	5 jenis	270,136,800	5 jenis	288,360,640	5 jenis	312,493,102	5 jenis	327,617,757	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 pkt	1 pkt	3,300,000	1 pkt	3,300,000	1 pkt	3,432,000	1 pkt	3,775,200	1 pkt	3,963,960	
Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 pkt	0 pkt		1 pkt	5,000,000	1 pkt	10,000,000	1 pkt	10,000,000	1 pkt	10,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 pkt	6 pkt	70,544,800	6 pkt	70,544,800	0 pkt	74,072,040	6 pkt	77,775,642	6 pkt	81,664,424	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 pkt	3 pkt	12,000,000	3 pkt	12,000,000	2 pkt	12,600,000	3 pkt	13,860,000	3 pkt	14,553,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	0 pkt	1 pkt	15,000,000	1 pkt	15,000,000	1 pkt	15,750,000	1 pkt	17,325,000	1 pkt	18,191,250	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 lap	25 Lap	164,292,000	25 Lap	164,292,000	30 Lap	172,506,600	33 Lap	189,757,260	35 Lap	199,245,123	
Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang siap digunakan untuk mendukung operasional dan pelayanan perkantoran	0 unit	0 unit	-	0 unit	-	13 unit	100,000,000	13 unit	100,000,000	10 unit	25,000,000	
Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit	0 unit	0	0 unit		3 unit	75,000,000	3 unit	75,000,000	0 unit	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Unit	0 unit	0	0 unit		10 unit	25,000,000	10 unit	25,000,000	10 unit	25,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	0 jenis	3 jenis	151,765,000	3 jenis	151,765,000	3 jenis	166,941,500	3 jenis	183,635,650	3 jenis	192,817,433	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 lap	4 Lap	101,275,000	3 Lap	101,275,000	3 Lap	111,402,500	3 Lap	122,542,750	3 Lap	128,669,888	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 lap	12 Lap	50,490,000	12 Lap	50,490,000	12 Lap	55,539,000	12 Lap	61,092,900	12 Lap	64,147,545	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	0 Unit	61 unit	217,943,000	69 unit	307,943,000	74 unit	330,840,150	74 unit	368,424,165	74 unit	405,266,582	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	26 unit	134,993,000	26 unit	134,993,000	28 unit	141,742,650	28 unit	155,916,915	28 unit	171,508,607	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 unit	50,000,000	7 unit	50,000,000	7 unit	55,000,000	7 unit	65,000,000	7 unit	71,500,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	35 unit	32,950,000	35 unit	22,950,000	37 unit	24,097,500	37 unit	26,507,250	37 unit	29,157,975	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharan/ Direhabilitasi	0 Unit	0 unit		1 unit	100,000,000	2 unit	110,000,000	2 unit	121,000,000	2 unit	133,100,000	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				7,321,948,841		9,164,707,494		9,355,827,624		9,490,132,785		9,587,759,541	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Meningkatnya perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	45%	48 %	2,440,649,614	50 %	3,054,902,498	55 %	3,118,609,208	60 %	3,163,377,595	65 %	3,195,919,847	
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	42%	45.00 %	2,440,649,614	48.00 %	3,054,902,498	50.00 %	3,118,609,208	55.00 %	3,163,377,595	60.00 %	3,195,919,847	
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	55%	58.00 %	1,341,000,000	60.00 %	1,854,902,498	62.00 %	1,818,609,208	65.00 %	1,763,377,595	70.00 %	1,695,919,847	
	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	52.53%	54.21 %	1,100,000,000	55.66 %	1,200,000,000	55.66 %	1,300,000,000	55.66 %	1,400,000,000	55.66 %	1,500,000,000	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket pengelolaan sumber daya air dan pengaman pantai yang dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan fisik, hingga pengawasan	42 paket	3 pkt	4,880,948,841	20.56 paket	6,109,804,996	2 pkt	6,855,827,624	2 pkt	8,090,132,785	2 pkt	7,787,759,541	
Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	0 KM		0 KM		0 KM		0 KM	245,827,624	0 KM		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0 KM	0 KM		0 KM		0 KM		1.00 KM	1,500,000,000	1 KM	1,500,000,000	
Peningkatan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	0 KM	0.5 KM	2,157,272,227	0 KM		0 KM		0 KM		0 KM		
Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	0 KM	0 KM		0.3 KM	1,404,902,498	0.3 KM	1,500,000,000	0.00 KM		0 KM		
Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	0 KM	0 KM		0,2 KM	1,650,000,000	0 KM		0.00 KM		0 KM		
Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit	0 Unit		0 Unit		1 Unit	3,500,000,000	1 Unit	3,500,000,000	1 Unit	3,427,759,541	
Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	1,8 KM	0 KM		KM		0 KM		0.5 KM	2,544,305,161	0.5 KM	2,560,000,000	
Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0 KM	0 KM		0 KM		0.4 KM	1,155,827,624	0 KM		0 KM		
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	5 KM	0.2 KM	2,440,649,614	0.3 KM	3,054,902,498	0 KM		0 KM		0 KM		
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	28 Dok	0 dok		*0* dok		*3* dok	400,000,000	2 dok	300,000,000	*0* dok		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	12 Dok	2 dok	283,027,000	0 dok		2 dok	300,000,000	*0* dok		2 dok	300,000,000	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi primer dan sekunder yang dikelola dan dikembangkan sesuai standar	28 Ha	129 Ha	2,441,000,000	109 Ha	3,054,902,498	21.82 Ha	2,500,000,000	17.00 Ha	1,400,000,000	37.00 Ha	1,800,000,000	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	16 KM	0.4 KM	1,341,000,000	0.6 KM	1,854,902,498	0 KM		0 KM		0 KM		
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 Bendung	0 bdg		0 bdg	-	1 bdg	800,000,000	0 bdg		0 bdg		
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	13 KM	3.8 KM	1,100,000,000	4 KM	1,100,000,000	4.2 KM	1,200,000,000	4.2 KM	1,300,000,000	4.2 KM	1,300,000,000	
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang diperkuat	1 Lbg	*0* Lbg		*1* Lbg	100,000,000	*1* Lbg	100,000,000	*1* Lbg	100,000,000	1 Lbg	100,000,000	
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk konstruksi Irigasi dan Rawa	22 Dok	*0* dok		0 dok		3 dok	400,000,000	*0* dok		3 dok	400,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
	tersusun												
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				4,576,218,026		8,331,552,266		8,505,297,839		8,627,393,442		8,716,145,037	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air bersih	63.16%	65.00 %	2,476,218,026	66 %	4,931,552,266	68 %	5,005,297,839	70 %	4,427,393,442	75 %	4,216,145,037	
	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/ kota	4.26%	3.79 %	2,100,000,000	4,29 %	3,400,000,000	4,80 %	3,500,000,000	5,28 %	4,200,000,000	5,27 %	4,500,000,000	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan	7 unit	7 unit	4,576,218,026	8 unit	8,331,552,266	8 unit	8,505,297,839	8 unit	8,627,393,442	8 unit	8,716,145,037	
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	144 Unit	0 Unit		150 Unit	400,000,000	0 Unit		0 Unit		100 Unit	375,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	3 Dok	1 dok	46,000,000	2 dok	300,000,000	0 dok		1 dok	475,000,000	0 dok	-	
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0 L/dtk	0 L/dtk		0 L/dtk		6 L/dtk	6,255,297,839	5 L/dtk	5,152,393,442	3 L/dtk	3,200,000,000	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	7 Unit	7 unit	1,600,000,000	8 unit	2,100,000,000	8 unit	2,100,000,000	8 unit	2,200,000,000	8 unit	2,200,000,000	
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	0 Unit	0 unit		2 unit	600,000,000	0 unit		2 unit	650,000,000			
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	378 SR	400 SR	2,930,218,026	1000 SR	5,131,552,266	0 SR		0 SR		600 SR	2,941,145,037	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	3 lbg	0 Lbg		4 Lbg	200,000,000	3 Lbg	150,000,000	3 Lbg	150,000,000	0 Lbg		
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				457,621,803		893,414,443		912,045,641		925,138,276		934,655,345	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
REGIONAL													
Meningkatnya layanan persampahan	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST	0%	5 %	457,621,803	15 %	893,414,443	20 %	912,045,641	25 %	925,138,276	30 %	934,655,345	
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi/sistem persampahan yang dikelola dan dikembangkan sesuai standar	0	1 lok	457,621,803	33.3 %	893,414,443	41.7 %	912,045,641	50.0 %	925,138,276	78.6 %	934,655,345	
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS yang dibangun	Ton/Hr	0 Ton/Hr		0.5 Ton/Hr	543,414,443	1 Ton/Hr	912,045,641	0.5 Ton/Hr	525,138,276	1 Ton/Hr	934,655,345	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	3 Dok	3 dok	457,621,803	3 dok	350,000,000	0 dok		3 dok	400,000,000	0 dok		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				457,621,803		2,301,615,280		2,349,612,994		2,383,342,256		2,407,860,139	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	69.30%	70 %	207,621,803	72.00 %	1,451,615,280	73.00 %	1,249,612,994	75.00 %	1,183,342,256	78.87 %	1,207,860,139	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	0.33%	2.91 %	250,000,000	3.20 %	850,000,000	3.52 %	1,100,000,000	3.87 %	1,200,000,000	3.56 %	1,200,000,000	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelayanan air limbah domestik yang ditangani	2 lokasi	2 lok	457,621,803	2 lok	2,301,615,280	3 lok	2,349,612,994	1 lok	2,383,342,256	1 lok	2,407,860,139	
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	0 M^3/Hr	0 M3/hr		0 M3/hr		0 M3/hr		40 M3/hr	881,726,976	40 M3/hr	2,407,860,139	
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	328 RT	65 RT	457,621,803	200 RT	1,501,615,280	250 RT	1,849,612,994	200 RT	1,501,615,280	0 RT		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domesti (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dok	0 dok		2 dok	800,000,000	2 dok	500,000,000					
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				366,097,442		1,414,605,261		1,444,105,334		1,464,835,815		1,479,904,852	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	20.30%	35.00 %	366,097,442	30.00 %	1,414,605,261	35.00 %	1,444,105,334	40.00 %	1,464,835,815	50.00 %	1,479,904,852	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan sesuai standar	360 m'	140 m'	366,097,442	200 m'	1,414,605,261	500 m'	1,444,105,334	500 m'	1,464,835,815	500 m'	1,479,904,852	
Pembangunan Sistim Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	360 m'	140 m'	366,097,442	200 m'	1,014,605,261	200 m'	1,194,105,334	250 m'	1,279,835,815	250 m'	1,294,904,852	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dok	0 dok		3 dok	400,000,000	2 dok	250,000,000	1 dok	185,000,000	1 dok	185,000,000	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				915,243,605		3,640,889,107		3,716,815,938		3,770,171,727		3,808,956,183	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	30.30%	32 %	869,481,425	35 %	3,432,600,300	38 %	3,504,183,492	40 %	3,554,486,891	45 %	3,591,052,557	
	Persentase kepatuhan PBG dan SLF Kabupaten/ Kota	46.87%	50 %	45,762,180	55 %	208,288,807	55 %	212,632,446	55 %	215,684,836	60 %	217,903,626	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat laik fungsi bangunan Gedung	Jumlah dokumen kebijakan, pembangunan, perizinan dan sertifikasi bangunan gedung yang diterbitkan	33 dok	20 dok	915,243,605	20 dok	3,640,889,107	20 dok	3,716,815,938	20 dok	3,770,171,727	20 dok	3,808,956,183	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	0 dok	0 dok		1 dok	50,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	700,000,000	1 dok	500,000,000	
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 dok	5 dok	869,481,425	1 dok	3,340,889,107	1 dok	3,366,815,938	1 dok	2,820,171,727	1 dok	3,008,956,183	
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	15 dok	15 dok	45,762,180	25 dok	250,000,000	25 dok	250,000,000	25 dok	250,000,000	30 dok	300,000,000	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				91,524,361		416,577,613		425,264,892		431,369,672		435,807,252	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	65.00%	68 %	91,524,361	70 %	416,577,613	72 %	425,264,892	75 %	431,369,672	80 %	435,807,252	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang ditata, direvitalisasi, dan/atau memiliki pedoman penataan sesuai standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku	0%	3.23 %	91,524,361	30 %	416,577,613	100 %	425,264,892	100 %	431,369,672	100 %	435,807,252	
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0 Dok	0 dok		1 dok	324,577,613	1 dok	325,264,892	1 dok	331,369,672	1 dok	335,807,252	
Pembinaan dan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	0 Dok	0 dok	91,524,361	1 dok	92,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				73,219,488,412		77,316,805,031		78,929,163,950		80,062,211,143		80,885,825,946	
Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan	20,52%	20.93 %	73,219,488,412	21.25 %	77,316,805,031	21.57 %	78,929,163,950	21.85 %	80,062,211,143	22.18 %	80,885,825,946	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan Kabupaten/Kota yang ditangani sesuai standar	km	144 km	73,219,488,412	5.49 km	77,316,805,031	0.32 km	78,929,163,950	0.28 km	80,062,211,143	0.33 km	80,885,825,946	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	15 Dok	6 dok	2,182,835,801	15 dok	7,032,563,491	15.00 dok	7,746,819,840	15 dok	8,521,501,824	15 dok	8,521,501,824	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	463.08 Km	1103.99 Km	700,000,000	1104 Km	841,236,000	1104 Km	925,359,600	1104 Km	1,017,895,560	1104 Km	1,068,790,338	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	60.5 Km	128.30 km	3,305,640,159	60.50 km	1,456,536,000	60.50 km	1,602,189,600	60.50 km	1,762,408,560	60.50 km	1,850,528,988	
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	6.14 Km	11.56 Km	19,759,689,317	11.14 Km	19,044,227,470	15.99 Km	27,329,948,122	12.78 Km	21,834,518,881	10.15 Km	17,345,819,825	
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkonstruksi	0.235 Km	4.56 Km	45,000,000,000	3.54 Km	35,000,000,000	3.47 Km	34,275,690,410	3.10 Km	30,665,773,413	3.60 Km	35,606,368,465	
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	-	0 Km		2 Km	2,526,848,000	2 Km	2,779,532,800	2 Km	3,057,486,080	2 Km	3,210,360,384	
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	-	0 Km		2 Km	2,972,385,070	2 Km	3,269,623,577	2 Km	3,596,585,935	2 Km	3,776,415,231	
Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	-	0 m'		0 m'		33.33 m'	1,000,000,000	0 m'		0 m'	-	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	-	0 jbtn		8 jbtn	1,000,000,000	0 jbtn		3 jbtn	600,000,000	3 jbtn	500,000,000	
Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	273 m'	38 m'	2,271,323,135	60 m'	7,443,009,000	0 m'		60 m'	9,006,040,890	60 m'	9,006,040,890	
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				91,524,361		333,262,091		340,211,914		345,095,738		348,645,801	
Meningkatnya kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	10%	12 %	30,000,000	15 %	100,000,000	18 %	110,000,000	25 %	150,000,000	30 %	140,000,000	
	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	10%	20 %	40,000,000	30 %	150,000,000	40 %	140,000,000	60 %	120,000,000	80 %	120,000,000	
	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	3%	4 %	22,000,000	5 %	83,262,091	10 %	90,211,914	15 %	75,095,738	20 %	88,645,801	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah paket/kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi yang diselenggarakan	8 %.	2.00 %	69,524,361	3 %	250,000,000	3 %	250,000,000	7 %	270,000,000	5 %	260,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	0 org	25 org	39,524,361	50 org	50,000,000	50 org	50,000,000	50 org	70,000,000	50 org	60,000,000	
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	0 org	25 org	30,000,000	50 org	200,000,000	50 org	200,000,000	50 org	200,000,000	50 org	200,000,000	
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang dilaksanakan	0 keg	1 keg	22,000,000	1 keg	83,262,091	1 keg	90,211,914	1 keg	75,095,738	1 keg	88,645,801	
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	0 pkt	20 pkt	22,000,000	60 pkt	83,262,091	65 pkt	90,211,914	50 pkt	75,095,738	65 pkt	88,645,801	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				640,670,524		1,215,209,540		1,240,551,430		1,258,359,844		1,271,304,826	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang.	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	40%	42 %	320,335,262	35 %	607,604,770	50 %	620,275,715	55 %	629,179,922	60 %	635,652,413	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	20 hari	20 hari	320,335,262	20 hari	607,604,770	20 hari	620,275,715	20 hari	629,179,922	20 hari	635,652,413	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan RDTR yang ditetapkan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan	7.14 %.	7.14 %	320,335,262	14.29 %	275,000,000	21.43 %	50,000,000	28.57 %	375,000,000	35.71 %	100,000,000	
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	0 Dok	0 dok		1 dok	75,000,000	dok		1 dok	75,000,000	0 dok		
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	0 Dok	1 dok		0 dok		0 dok		1 dok	200,000,000	0 dok		
Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	0 Pub	Pub		Pub		0 Pub		1 Pub	50,000,000	1 Pub	50,000,000	
Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	0 Dok	0 dok		1 dok	150,000,000	0 dok		0 dok		dok		
Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	0 Dok	0 dok	320,335,262	0 dok		0 dok		0 dok		0 dok		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1 Lap	0 lap		1 lap	50,000,000	1 lap	50,000,000	1 lap	50,000,000	1 lap	50,000,000	
Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan tata ruang yang telah di koordinasikan dan di singkronkan	100%	100 %	-	100 %	50,000,000	100 %	930,000,000	100 %	30,000,000	100 %	50,000,000	
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dok	0 dok		0 dok		1 dok	900,000,000	0 dok		0 dok		
Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	0 org	0 org		2 org	50,000,000	2 org	30,000,000	2 org	30,000,000	2 org	50,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	100 %.	100 %	320,335,262	100 %	225,000,000	100 %	25,000,000	100 %	200,000,000	100 %	271,304,826	
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	10 lyn	20 Lyn	320,335,262	30 Lyn	50,000,000	35 Lyn	25,000,000	40 Lyn	50,000,000	45 Lyn	50,000,000	
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	0 Dok	0 dok		1 dok	125,000,000	0 dok		1 dok	150,000,000	1 dok	171,304,826	
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	0 SI	0 SI		1 SI	50,000,000	0 SI		0 SI		1 SI	50,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0 %.	0 dok	-	14.29 dok	325,000,000	71.43 dok	210,551,430	85.71 dok	303,359,844	85.71 dok	600,000,000	
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	0 Kasus	0 Kasus		2 Kasus	50,000,000	2 Kasus	50,000,000	2 Kasus	50,000,000	2 Kasus	50,000,000	
Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	0 Kasus	0 Kasus		2 Kasus	50,000,000	2 Kasus	25,000,000	2 Kasus	50,000,000	2 Kasus	50,000,000	
Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	0 Kasus	0 Kasus		2 Kasus	50,000,000	2 Kasus	25,000,000	2 Kasus	50,000,000	2 Kasus	50,000,000	
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan PemanfaatanRuangdan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	0 Dok	1 dok		1 dok	150,000,000	1 dok	50,000,000	1 dok	50,000,000	1 dok	150,000,000	
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 lap	0 Lap		1 Lap	25,000,000	0 Lap	-	1 Lap	50,000,000	1 Lap	50,000,000	
Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	0 Dok	0 dok		0 dok		1 dok	60,551,430	0 dok		1 dok	200,000,000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	0 BA	0 BA		0 BA		0 BA		1 BA	53,359,844	2 BA	50,000,000	
Pengawasan Penataan Ruang	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang yang disusun	0 %.	33 %	-	100 %	340,209,540	100 %	25,000,000	%	350,000,000	100 %	250,000,000	
Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	0 Dok	0 dok		1 dok	50,000,000	0 dok	-	1 dok	50,000,000	1 dok	50,000,000	
Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1 Dok	0 dok		1 dok	50,000,000	1 dok	25,000,000	1 dok	50,000,000	1 dok	50,000,000	
Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	0 Dok	0 dok		1 dok	240,209,540	0 dok		1 dok	250,000,000	1 dok	150,000,000	
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				1,830,487,210		4,165,776,130		4,252,648,920		4,313,696,720		4,358,072,520	
Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	3%	10.00 %	183,048,721	15 %	416,577,613	20 %	425,264,892	25 %	431,369,672	30 %	435,807,252	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	1%	100 %	183,048,721	2 %	416,577,613	3 %	425,264,892	5 %	431,369,672	10 %	435,807,252	
	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	1%	100 %	183,048,721	2 %	416,577,613	3 %	425,264,892	5 %	431,369,672	10 %	435,807,252	
	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	1%	100 %	183,048,721	2 %	416,577,613	3 %	425,264,892	5 %	431,369,672	10 %	435,807,252	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	1%	1.00 %	183,048,721	2 %	416,577,613	3 %	425,264,892	5 %	431,369,672	10 %	435,807,252	
	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	5%	30.00 %	183,048,721	40 %	416,577,613	50 %	425,264,892	60 %	431,369,672	70 %	435,807,252	
	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	1%	2.33 %	183,048,721	11.63 %	416,577,613	23.26 %	425,264,892	34.88 %	431,369,672	46.51 %	435,807,252	
	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	36.85%	38.69 %	183,048,721	40.63 %	416,577,613	42.66 %	425,264,892	44.79 %	431,369,672	47.03 %	435,807,252	
	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1%	1.00 %	183,048,721	2 %	416,577,613	3 %	425,264,892	4 %	431,369,672	4 %	435,807,252	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	1%	100 %	183,048,721	2 %	416,577,613	3 %	425,264,892	5 %	431,369,672	10 %	435,807,252	
Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasilpelaksanaan koordinasi pengadaan tanah	1 dok	1 dok	1,800,487,210	4 dok	4,135,776,130	4 dok	4,222,648,920	4 dok	4,283,696,720	4 dok	4,328,072,520	
Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	1 dok	3 dok	1,800,487,210	3 dok	4,135,776,130	3 dok	4,222,648,920	3 dok	4,283,696,720	3 dok	4,328,072,520	
Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah lokasi pengadaan tanah yang ditetapkan	1 lokasi	1 lokasi	30,000,000	2 lokasi	30,000,000	1 lokasi	30,000,000	1 lokasi	30,000,000	1 lokasi	30,000,000	
Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	0 dok	1 dok	30,000,000	1 dok	30,000,000	1 dok	30,000,000	1 dok	30,000,000	1 dok	30,000,000	
				95,793,338,102		114,885,294,073		117,281,103,479		118,964,702,014		120,188,513,954	

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
		Subkeg 1.1 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
		Subkeg 1.2 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
		Subkeg 1.1 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
		Subkeg 1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
		Subkeg 1.2 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
		Subkeg 1.3 Pemeliharaan Rutin Jalan
		Subkeg 1.4 Pembangunan Jalan
		Subkeg 1.5 Rekonstruksi Jalan
		Subkeg 1.6 Pemeliharaan Berkala Jalan
		Subkeg 1.7 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
		Subkeg 1.8 Pemeliharaan Berkala Jembatan
		Subkeg 1.9 Pemeliharaan Rutin Jembatan
		Subkeg 1.10 Pembangunan Jembatan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Subkeg 1.1 Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
		Subkeg 1.2 Normalisasi/Restorasi Sungai
		Subkeg 1.3 Peningkatan Kanal Banjir
		Subkeg 1.4 Pembangunan Breakwater
		Subkeg 1.5 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
		Subkeg 1.6 Pembangunan Unit Air Baku
		Subkeg 1.7 Pembangunan Kanal Banjir
		Subkeg 1.8 Pembangunan Tanggul Sungai
		Subkeg 1.9 Pembangunan Seawall dan

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	
			Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
		Subkeg 1.10	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
		Subkeg 1.11	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Subkeg 2.1	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
		Subkeg 2.2	Rehabilitasi Bendung Irigasi
		Subkeg 2.3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
		Subkeg 2.4	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Subkeg 2.5	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
		Subkeg 1.1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
		Subkeg 1.2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Subkeg 1.3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Subkeg 1.4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Subkeg 1.5	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Subkeg 1.6	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Subkeg 1.7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
		Subkeg 1.1 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
		Subkeg 1.2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
		Subkeg 1.3 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
		Subkeg 1.4 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota
		Subkeg 1.5 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
		Subkeg 1.6 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
		Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Subkeg 2.1 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
		Subkeg 2.2 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Subkeg 3.1 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
		Subkeg 3.2 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
		Subkeg 3.3 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
		Subkeg 4.1 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
		Subkeg 4.2 Pelaksanaan Audit Tata Ruang
		Subkeg 4.3 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
		Subkeg 4.4 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan PemanfaatanRuangdan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
		Subkeg 4.5 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
		Subkeg 4.6 Penilaian Perwujudan RTR
		Subkeg 4.7 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal
		Pengawasan Penataan Ruang
		Subkeg 5.1 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	
			Manfaat
		Subkeg 5.2	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
		Subkeg 5.3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya layanan persampahan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
		Subkeg 1.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
		Subkeg 1.2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Subkeg 1.1	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
		Subkeg 1.2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
		Subkeg 1.3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domesti (SPALD)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Subkeg 1.1	Pembangunan Sistim Drainase Lingkungan
		Subkeg 1.2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat laik fungsi bangunan Gedung	
		Subkeg 1.1	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
		Subkeg 1.2	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		Subkeg 1.3	Penyelenggaraan PenerbitanPersetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
		Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
		Subkeg 1.1 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
		Subkeg 1.2 Pembinaan dan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota
		Subkeg 1.1 Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota
		Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota
		Subkeg 1.1 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota

Sumber : Dinas PUPR, RPJMD - 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan sebagai ukuran capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan karena menjadi indikator keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah, yang digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan rencana di masa depan. Penilaian tersebut sebagai akuntabilitas kinerja dan informasi tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah kepada masyarakat. Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Ini dapat dilihat pada tabel 4.4 dan tabel 4.5

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks kepuasan layanan infrastruktur (IKLI)	Indeks	60	65	70	75	80	85	Tujuan
2	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	25	25	25	25	25	25	Tujuan
3	Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen	34,78	43,48	52,17	60,87	69,57	69,57	sasaran 1
4	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur jalan antar pusat kegiatan	Indeks	65	70	75	81	85	85	sasaran 2
5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Sumber daya air	Indeks	65	67	70	72	75	80	sasaran 3
6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur air minum	Indeks	65	70	75	81	85	85	sasaran 4
7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur Sanitasi layak (Persampahan, Air Limbah dan Drainase)	Persen	65	70	75	81	85	85	sasaran 5
8	Persentase bangunan gedung dan kawasan strategis yang memenuhi standar teknis dan tata ruang	Persen	22.5	27.5	32.5	37.5	42.5	42.5	sasaran 6
9	Persentase realisasi investasi yang sesuai dengan peruntukan tata ruang	Persen	75	75	75	75	75	75	sasaran 7
10	Persentase lahan siap bangun	Persen	50	50	50	50	50	50	sasaran 8
11	Nilai LAKIP	Nilai	B	B	BB	BB	A	A	sasaran 9
12	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Inovasi	2	2	2	2	2	2	sasaran 9
13	Persentase Capaian Kinerja Perangkat	Persen	80	85	88	90	92	95	sasaran 9

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Daerah								

Sumber : Dinas PUPR - 2025

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	persen	10.00	15.00	18.00	25.00	30.00	30.00
2	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	persen	10.00	20.00	30.00	40.00	60.00	80.00
3	Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	persen	3.00	4.00	5.00	10.00	15.00	20.00
4	Tingkat kemantapan jalan	persen	20.52	20.93	21.25	21.57	21.85	22.18
5	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	persen	45.00	48	50.00	55.00	60.00	65.00
6	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	persen	42.00	45.00	48.00	50.00	55.00	60.00
7	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	persen	55.00	58.00	60.00	62.00	65.00	70.00
8	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	persen	52.53	54.21	55.66	55.66	55.66	55.66
9	Cakupan layanan air bersih	persen	63.16	65.00	66	68	70	75
10	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/ kota	persen	4.26	3.79	4,29	4,80	5,28	5,27
11	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	persen	40	42	35	50	55	60
12	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	hari	20	20	20	20	20	20
13	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST	persen	0.00	5.00	15.00	20.00	25.00	30.00
14	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan	persen	69.30	70.00	72.00	73.00	75.00	78.87

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman							
15	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	persen	0.33	2.91	3.20	3.52	3.87	3.56
16	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	persen	20.30	35.00	30.00	35.00	40.00	50.00
17	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	persen	30.30	32.00	35.00	38.00	40.00	45.00
18	Persentase kepatuhan PBG dan SLF Kabupaten/ Kota	persen	46.87	50.00	55.00	55.00	55.00	60.00
19	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	persen	65.00	68.00	70.00	72.00	75.00	80.00
20	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	persen	0.03	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
21	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	persen	1.00	1.00	2.00	3.00	5.00	10.00
22	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	persen	1.00	1.00	2.00	3.00	5.00	10.00
23	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	persen	1.00	1.00	2.00	3.00	5.00	10.00
24	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	persen	1.00	1.00	2.00	3.00	5.00	10.00
25	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	persen	5.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
26	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan	persen	1.00	2.33	11.63	23.26	34.88	46.51

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	lengkap secara berkualitas							
27	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	persen	36.85	38.69	40.63	42.66	44.79	47.03
28	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/ Kota	persen	0.01	1.00	2.00	3.00	4.00	4.00
29	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	persen	1.00	1.00	2.00	3.00	5.00	10.00
30	Persentase kepatuhan Penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	persen	100.00	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PUPR-2025

BAB V
PENUTUP

Dokumen Renstra Perangkat Daerah periode 2025–2029 merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Agar pelaksanaan Renstra berjalan secara efektif, konsisten, dan terukur, maka pada Bab Penutup ini disampaikan pengaturan mengenai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra, manajemen risiko strategis.

5.1. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa program, kegiatan, dan penggunaan anggaran telah berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian dilaksanakan melalui pemantauan capaian indikator kinerja secara berkala, penyesuaian strategi apabila terdapat perubahan lingkungan kebijakan, serta pelaporan kinerja melalui mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan pada setiap akhir tahun dan pada akhir periode Renstra guna menilai efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja, penetapan rekomendasi kebijakan, serta penyusunan dokumen perencanaan periode selanjutnya. Dengan demikian, Pengendalian dan Evaluasi menjadi instrumen penting dalam menjamin akuntabilitas, konsistensi, dan keberlanjutan kebijakan pembangunan daerah.

5.2. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka memastikan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mentawai menerapkan Manajemen Risiko Strategis secara sistematis. Risiko-risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola melalui langkah mitigasi yang terarah.

Pengelolaan risiko mencakup:

- Penetapan risiko prioritas berdasarkan skala dampak dan kemungkinan terjadinya
- Penyusunan langkah mitigasi dan rencana kontinjensi,
- Pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas penanganan risiko.

Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, Perangkat Daerah diharapkan mampu meningkatkan ketahanan organisasi, meminimalkan potensi kegagalan program, dan memastikan pencapaian kinerja strategis sesuai dokumen Renstra.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel ii
Daftar Gambar iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan 6
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan 22

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan tahun 2025-2029 29
3.2 Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan tahun 2025-2029 29
3.3 Strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan tahun 2025-2029 31
3.4 Arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra tahun 2025-2029.. 34

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan 37
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 115

BAB V PENUTUP..... 121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Nominatif Pegawai Aparatur Sipil Negara dan PPPK Paruh Waktu Berdasarkan Golongan, Ruang dan Jenis kelamin	14
Tabel 2.2	Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Tabel 2.3	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025	15
Tabel 2.4	Tabel Rekap SPM Perumahan Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	16
Tabel 2.5	Urusan dan Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan.....	18
Tabel 2.6	Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Berdasarkan Indikator Kinerja Utrama (IKU)	18
Tabel 2.7	Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	19
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	22
Tabel 2.9	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas.....	26
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	30
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	31
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	34
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan.....	39
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	59
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Dalam Mendukung Program Prioritas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	149
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan (IKU).....	158
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	159

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh dinas untuk mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang akan diukur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal, hingga penyusunan rancangan akhir.

Adapun Fungsi Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan adalah:

a. sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dinas;
b. sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program;
c. sebagai alat ukur kinerja dinas; dan
d. sebagai sarana komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan dan Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pehubungan Republik Indonesia memiliki keterkaitan yang erat karena ketiganya merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pehubungan merupakan dokumen perencanaan yang dibuat oleh Kementerian yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan, di sisi lain, merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dibuat berdasarkan RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan harus selaras dengan Renstra Provinsi dan RPJMD. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah, harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra dan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan memiliki keterkaitan yang erat, dimana Renja menjadi penjabaran dari Renstra. Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan menetapkan arah dan tujuan jangka panjang, sedangkan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan menjabarkan kegiatan konkret untuk mencapai tujuan tersebut dalam periode satu tahun.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas. Sementara itu Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan merupakan penjabaran rinci dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga

memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan relevan dengan tujuan jangka panjang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lebmaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 7, tambahan lembaran Negara RI nomor 5188).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 93);
17. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8);
18. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 112);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 269);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 973).
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 225);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025-2029 adalah:

a. merupakan upaya dalam mewujudkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029;
b. merupakan kerangka acuan dalam menetapkan program dan kegiatan pembangunan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang kebersihan dan pertamanan, bidang lingkungan hidup, dan bidang perhubungan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.
c. sebagai acuan dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
d. merupakan upaya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025-2029 adalah:

a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan yang layak, kawasan pemukiman yang nyaman, lingkungan hidup yang sehat dan sistem perhubungan yang efisien;
b. mengidentifikasi prioritas dan fokus kegiatan untuk melindungi lingkungan hidup dan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas transportasi;
c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya dan pelaksanaan program Pembangunan;
d. mencapai tujuan Pembangunan yang telah diteapkan oleh pemerintah daerah dan nasional

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra. Bab ini terdiri dari:

1.1 Latar belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN.

Pada Bab ini menyajikan analisis komprehensif mengenai kapasitas, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Gambaran pelayanan serta permasalahan dan isu strategis, sturktur utamanya meliputi:

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
2.2 Permasalahan dan isu strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Pada Bab ini menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029). Bab ini terdiri atas:

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2025-2029;
3.2 Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2025-2029
3.3 Strategi Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025-2029;
3.4 Arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIGANG URUSAN

Pada Bab memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan kenerja penyelenggaraan urusan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Bab ini terdiri atas:

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP
Dalam bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Penjabaran tugas, fungsi dan susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan memuat penjelasan umum tentang susunan organisasi, serta uraian tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Uraian tentang susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dam kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan Daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, lingkungan hidup dan perhubungan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, lingkungan hidup dan perhubungan;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, lingkungan hidup dan perhubungan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Perhubungan terdiri dari:

1. Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

   Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

   a. pengoordinasian penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
   b. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, hukum, kelembagaan, tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, hubungan masyarakat,

sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia pegawai aparatur sipil negara, rencana kebutuhan asset, rencana pemanfaatan asset, rencana anggaran kas, rencana program kerja tahunan, rencana pengendalian resiko, dan dokumen perencanaan lainnya di lingkungan Dinas;
d. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi rencana strategis, laporan evaluasi rencana kerja, dokumen manajemen risiko, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan realisasi fisik dan keuangan, laporan pemanfaatan aset, laporan pengelolaan piutang/utang, laporan keuangan bulanan, semester, dan tahunan atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, dan laporan lainnya di lingkungan Dinas;
e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah, survei kepuasan masyarakat, penilaian dan evaluasi capaian reformasi birokrasi, penilaian dan evaluasi manajemen risiko, serta penilaian dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Program dan Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protocol serta ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
c. penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
d. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
e. penyiapan bahan pengelolaan urusan kerumahtanggaan;
f. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan aset Daerah di lingkungan Dinas;
g. penyiapan bahan kerja sama dan kehumasan;
h. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
i. penyiapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
j. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan

rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, evaluasi dan pelaporan Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di lingkungan Dinas;
b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
d. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan aset Daerah di lingkungan Dinas;
e. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
b. pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
c. pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
d. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
e. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan dokumen lingkungan hidup, penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan penyusunan instrumen

pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
d. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
e. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan dan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
f. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan materi, metode, sarana prasarana serta peningkatan kapasitas instruktur pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup serta pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pengendalian pencemaran;
b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengurangan sampah, penanganan sampah, kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah, pengembangan investasi usaha pengelolaan sampah, pemantauan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan, penyimpanan sementara, penimbunan, dan/atau penguburan limbah bahan berbahaya beracun, dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Daerah;
c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penentuan baku mutu lingkungan, penanggulangan pencemaran, pemulihan pencemaran, penentuan baku mutu sumber pencemar, dan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
d. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak kerusakan dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada

masyarakat, penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, dan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;

e. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, dan pencadangan sumber daya alam;
f. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
g. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi keanekaragaman hayati dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Perhubungan

Bidang Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang lalu lintas dan angkutan serta prasarana dan keselamatan;
b. perumusan kebijaan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan serta prasarana dan keselamatan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan serta prasarana dan keselamatan;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang lalu lintas dan angkutan serta prasarana dan keselamatan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan serta prasarana dan keselamatan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perhubungan membawahi:

a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; dan
b. Seksi Prasarana dan Keselamatan.

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Daerah, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah, penyediaan perlengkapan jalan di jalan Daerah dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah;

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam Daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam Daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah, penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah, penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah, penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah, penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha, dan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan, dan pengembangan transportasi.

Untuk melaksanakan tugas, seksi prasarana dan keselamatan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal penumpang tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan untuk pelabuhan sungai dan danau, pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuh, penerbitan izin pengoperasian

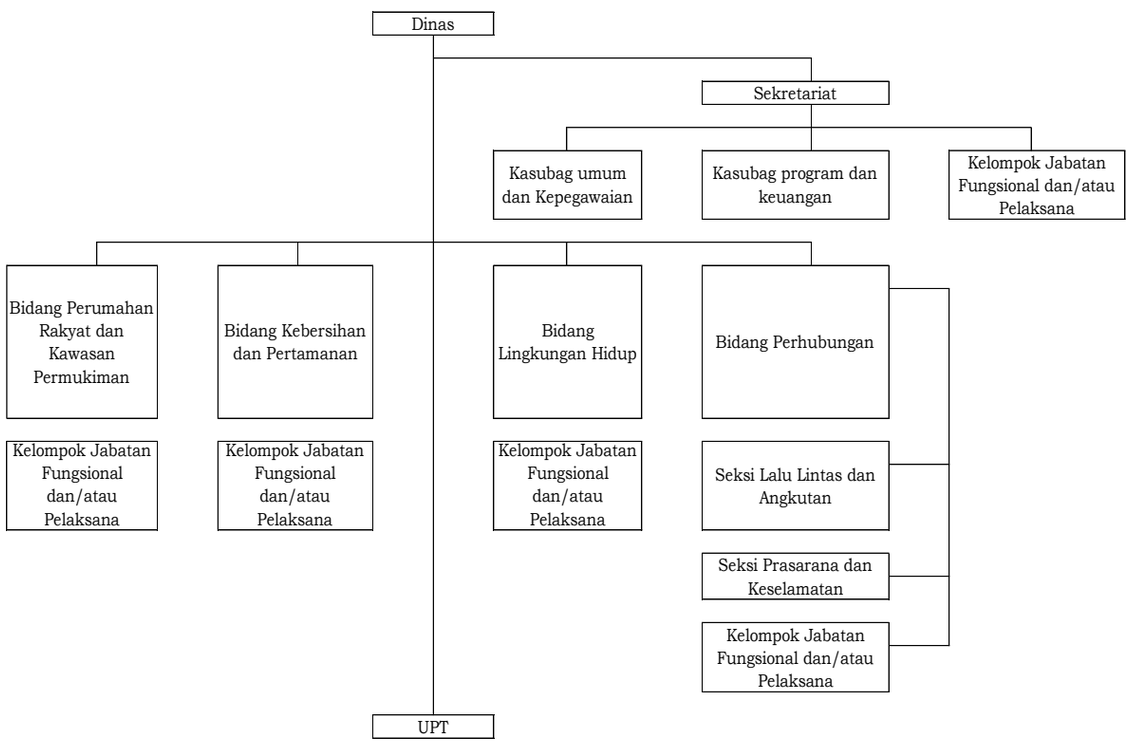
pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam Daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal, dan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;

b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN



Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang kompleks, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan (PKPLHP) didukung oleh sumber daya aparatur dengan struktur organisasi yang jelas. Secara total, Dinas PKPLHP memiliki 256 (dua ratus lima puluh enam) orang SDM yang terdiri dari pejabat structural, fungsional, dan staf pelaksana.

- Kepala Dinas: Dinas dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas yang merupakan pejabat eselon II.b.
- Sekretaris: Unsur pembantu pimpinan yang bertugas mengelola urusan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan yang merupakan pejabat eselon III.a
- Kepala Bidang: Unsur pelaksana teknis untuk menjalankan urusan teknis yang terdiri dari 4 (empat) bidang merupakan pejabat eselon III.b
- Subbagian: Unsur pendukung administrasi yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian yang merupakan pejabat eselon IV.a
- Jabatan Fungsional: Terdapat 6 (enam) orang tenaga ahli dengan keahlian khusus yang merupakan Pejabat Fungsional (eselon IV.a).
- Jabatan Pelaksana (staf): Sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) orang merupakan jabatan staf yang terdiri dari PNS, PPPK, PPPK-PW yang melaksanakan program kerja mulai dari administrasi perkantoran, petugas lapangan hingga tenaga teknis pendukung baik di sekretariat dan masing-masing bidang.

Detail SDM keseluruhan berjumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) orang terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) orang PNS, 42 (empat puluh dua) orang PPPK dan 131 (seratus tiga puluh satu) PPPK Paruh Waktu.
Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 185 (seratus delapan puluh lima) orang laki-laki dan 71 (tujuh puluh satu) orang perempuan.
Berdasarkan golongan ruang Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: 11 (sebelas) orang golongan ruang IV (8 orang IV.a dan 3 orang IV.b), 45 (empat puluh lima) orang golongan ruang III (15 orang III.a, 11 orang III.b, 10 orang III.c, dan 9 orang III.d), 22 (dua puluh dua) orang golongan ruang II (1 orang II.a, 5 orang II.b, 8 orang II.c dan 8 orang II.d), 5 orang golongan ruang I (1 orang I.a, 1 orang I.c dan 3 orang I.d)
PPPK Penuh Waktu berjumlah 83 (delapan puluh tiga) orang terdiri dari : 7 orang golongan IX, 3 orang golongan VII, 21 orang golongan V, dan 11 orang golongan III.
PPPK Paruh Waktu berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) orang terdiri dari: 21 orang Strata-1, 14 orang Diploma, 96 orang dibawah dan/ Sekolah Menengah Atas.
Dengan komposisi tersebut, Dinas PKPLHP berupaya untuk menjangkau seluruh aspek pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.

Tabel 2.1
Daftar Nominatif Pegawai Aparatur Sipil Negara dan PPPK Paruh Waktu Berdasarkan Golongan, Ruang dan Jenis kelamin

Gol/ Ruang	Sekretariat		Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman		Bidang kebersihan dan pertamanan		Bidang lingkungan hidup		Bidang perhubungan		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a									1		1		1
I/b													
I/c													
I/d									3		3		3
II/a									1		1		1
II/b	1								4		5		5
II/c	2								5	1	7	1	8
II/d					1				6		7	4	11
III/a	2	1	4					1	8	2	14	4	18
III/b	1	1	2	1					5	2	8	4	13
III/c	1	1					1	1	2	1	4	3	7
III/d		1	2	2	1		1	1	3		7	4	11
IV/a		1			1		2	1	2		4	2	6
IV/b	2						1		1		4		4
IV/c	1										1		1
IV/d													
PPPK		4	1	2	2	1	1	3	25	4	29	14	43
PW	9	15	1	4	13	1	1	3	67	22	91	45	136
Jumlah	19	24	10	9	18	2	7	10	133	32	185	71	256

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kondisi Februari 2026)

Tabel 2.2
Daftar Nominatif Pegawai ASN dan PPPK Paruh Waktu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gol/ Ruang	Sekretariat		Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman		Bidang kebersihan dan pertamanan		Bidang Lingkungan Hidup		Bidang Perhubungan		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI									1		1		1
SMP/MTS									13	1	13	1	14
SMA/MA	8	10	1	4	16	2	2	4	83	20	110	40	150
D1													
D2													
D3	4	3	4	1					14	3	22	7	29
D4													
S1	7	8	4	4	1		4	4	20	8	36	24	60
S2		3	1	-	1		1	2	2		5	5	10
Jumlah	19	24	10	9	18	2	7	10	133	32	185	71	256

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kondisi Februari 2026)

Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung seluruh pelayanan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga sebagai input atau (*capital*) dalam proses pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan untuk mencapai tujuan organisasi

Tabel 2.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan
Kab. Kep. Mentawai Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang
1	Kendaraan Dinas Roda 2	14 unit	Baik
2	Laptop	6 unit	Baik
3	Note Book	2 unit	Baik
4	Alat Kantor Lainnya/CCTV	1 unit	Baik
5	Global Positioning System	4 unit	Baik
6	Mesin Ketik Manual Standar	1 unit	Baik
7	Overhead Projector	2 unit	Baik
8	Radio	5 unit	Baik
9	Camera Video	2 unit	Baik
10	AC/Split	3 unit	Baik
11	Kursi Besi/Metal	45 unit	Baik
12	Handycam	2 unit	Baik
13	Mini Komputer	5 unit	Baik
14	PC Unit	14 unit	Baik
15	Router	6 unit	Baik
16	Notebook	4 unit	Baik
17	Printer	28 unit	Baik
18	Lemari Kayu	14 unit	Baik
19	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	2 unit	Baik
20	Meja Kerja Kayu	9 unit	Baik
21	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1 unit	Baik
22	Meja Kerja Pegawai Eselon IV	8 unit	Baik
23	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11 unit	Baik
24	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1 unit	Baik
25	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	1 unit	Baik
26	Kursi Kerja Pajabat Eselon III	2 unit	Baik
27	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20 unit	Baik
28	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	15 unit	Baik
29	Drone	2 unit	Baik
30	Alat Studio Video Lainnya	4 unit	Baik
31	Alat Pengukur Waktu	4 unit	Baik
32	Kursi Tamu	2 unit	Baik
33	Lemari Es	2 unit	Baik
34	Kompor Gas	1 unit	Baik
35	Tabung Gas	1 unit	Baik
36	Dispenser	6 unit	Baik
37	Soundsystem	1 unit	Baik
38	Televisi	2 unit	Rusak
39	Kursi Staf (Futura)	67 unit	Baik
40	Printer, Scancopy	3 unit	Baik
41	Printer Scancopy, Fax, Injeksi	3 unit	Baik

Tabel 2.4
Rekap SPM Perumahan Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun	Lokasi	Target	Realisasi	Jumlah	%
1.	Penyediaan & Rehabilitas Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	2025	Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana di Dusun Monga Desa Mara Kecamatan Sipora Selatan	10	10	100	100
			Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana di Desa Saureinu Kecamatan Sipora Selatan	15	15		
			Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana di Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara	5	5		
			Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Desa Matobe Kecamatan Sipora Selatan	10	10		
			Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai di Desa Beriulou Kecamatan Sipora Selatan	20	20		
			Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Dusun Labuan Bajau Desa Sigapokna Kecamatan Siberut Barat	20	20		
			Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di	20	20		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun	Lokasi	Target	Realisasi	Jumlah	%
			Desa Sirilogui Kecamatan Siberut Utara				
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	2025	Pembangunan Baru Rumah Korban Bencana di Dusun Pasibbuat Desa Taikako Kecamatan Sikakap	10	10	10	100

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Adalah memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkualitas kepada masyarakat seperti penyediaan dan rehabilitas rumah yang layak huni bagi korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, pengelolaan sampah dengan baik dan edukasi masyarakat untuk memilah sampah dari rumah, sehingga dapat mengurangi residu yang dibuang ketempat pembuangan akhir, serta pelayanan lalu lintas jalan dan pengelolaan transportasi.

Tabel 2.5
Urusan dan Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
Persentase kawasan permukiman yang tertata	18%	12%	10%	85,12	95,75
Persentase lingkungan permukiman kumuh	62%	45%	40%	95,55	98,24
Persentase kawasan permukiman dengan prasarana dan sarana utilitas (PSU) kawasan permukiman	62%	36%	50%	94,30	96,43
Urusan Lingkungan Hidup					
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,93	82,24	83,08	83,17	80,01
Penetapan hak MHA	11	2	0	0	0
Persentase penanganan sampah	6,84	7,38	14,35	26,47	13,052
Penanganan kasus lingkungan hidup	100	100	100	100	100
Ketaatan penanggungjawab	50	53,4	33,33	77,77	71,43

usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota					
Urusan Bidang Perhubungan					
Persentase wilayah yang terlayani	70	75	80	85	85
Berkurangnya kasus kecelakaan transportasi	25	20	15	10	10
Indeks kepuasan masyarakat	70	75	80	85	85

Tabel 2.6
Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
Persentase ketersediaan rumah layak huni	36%	25%	15%	90,09	95,95
Persentase terpenuhinya air bersih/air minum penduduk sebanyak 60L/Jiwa/hari	50%	-	-	-	-
Persentase cakupan kawasan permukiman yang dilengkapi dengan PSU	35%	20%	-	-	-
Persentase Kawasan perkotaan yang memenuhi RTH minimal 30%	-	-	-	-	-
Persentase penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	-	16%	-	-	-
Rata-rata permukiman yang memiliki PSU (Jalan lingkungan dan drainase)	-	-	10%	-	-
Nilai LAKIP	-	-	58,90	66,05	70,20
Jumlah inovasi yang diterapkan	-	-	1	1	1
Persentase capaian kinerja perangkat daerah	83,74%	93,17%	93,61	90,09%	95,95%
Urusan Lingkungan Hidup					
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,93	82,24	83,08	83,17	80,01
Indeks Kualitas Air	65,00	65,00	60,00	63,33	60,00
Indeks Kualitas Udara	70,00	70,00	92,67	59,43	93,24
Masyarakat Hukum Adat Yang dilestarikan	11	2	0	0	0
Nilai LAKIP	74,42	69,88	70,10	75,15	75,65
Jumlah inovasi yang diterapkan	0	0	0	3	1
Persentase capaian kinerja perangkat daerah	79,72	89,45	89,87	91,18	80,13
Urusan Bidang Perhubungan					
Cakupan pusat kegiatan wilayah yang terhubung	70%	75%	80%	80%	82%
Menurunnya Tingkat Kecelakaan transportasi	25%	20%	15%	15%	10%
Persentase wilayah yang terlayani angkutan laut	70%	80%	80%	85%	80%

BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase wilayah yang terlayani angkutan darat			48%	53,49%	53,49%
Nilai LAKIP			C	B	B
Jumlah Inovasi yang di terapkan					1
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah			80	80	83

Tabel 2.7
Hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
Persentase pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	100%	-	-	-	-
Persentase pembangunan sarana dan prasarana sanitasi	100%	-	-	-	-
Persentase kasawan permukiman yang terhubung	100%	-	-	-	-
Persentase jumlah kawasan yang dilengkapi PSU	-	76%	100%	-	-
Jumlah rumah layak huni	36%	69unit	178unit	-	-
Pendataan identifikasi perumahan	0	59KK	1000KK	-	-
Persentase berkurangnya kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha	-	16%	25%	-	-
Persentase kawasan permukiman yang tertata	-	-	-	85,12	95,75
Persentase lingkungan permukiman kumuh	-	-	-	95,55	98,24
Persentase kawasan permukiman dengan prasarana dan sarana ulititas (PSU) kawasan permukiman	-	-	-	94,30	96,43
Urusan Lingkungan Hidup					
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	81,93	82,24	83,08	83,17	80,01
Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	6,84	7,38	14,35	26,47	13,052
Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	50	53,4	33,33	77,77	71,43
Persentase MHA yang ditingkatkan Kapasitasnya	11	2	0	0	0
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	0	0	0	0	0
Urusan Bidang Perhubungan					
Cakupan pusat kegiatan wilayah yang terhubung	70%	75%	80%	80%	82%
Menurunnya Tingkat	25%	20%	15%	15%	10%

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kecelakaan transportasi					
Persentase wilayah yang terlayani angkutan laut	70%	80%	80%	85%	80%
Persentase wilayah yang terlayani angkutan darat			48%	53,49%	53,49%
Nilai LAKIP			C	B	B
Jumlah Inovasi yang di terapkan					1
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah			80	80	83

2.1.4 Kelompok sasaran layanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan adalah sebagai berikut:

a. masyarakat yang membutuhkan perumahan
   Ini termasuk masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah, keluarga muda, dan kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan akses terhadap perumahan layak.

b. masyarakat yang membutuhkan kawasan permukiman yang layak
   Ini meliputi masyarakat yang tinggal di wilayah yang tidak terencana dengan baik, seperti pemukiman kumuh atau kawasan yang rawan bencana.

c. masyarakat yang terlibat dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
   Ini termasuk pengembang perumahan, kontraktor, dan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan fisik.

d. Pemerintah daerah dan instansi terkait:
   Ini termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dinas teknis terkait, dan instansi lain yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

e. masyarakat sipil dan Lembaga Swadaya Masyarakat:
   Ini termasuk organisasi masyarakat sipil yang berkontribusi dalam pemantauan, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat terkait perumahan dan kawasan permukiman.

   Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan memprioritaskan kelompok sasaran ini dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Dians juga menetapkan indikator kinerja yang relevan untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan dalam melayani kelompok sasaran tersebut.

   Selain itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan juga memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang berkelanjutan, inklusif, dan partisipatif. sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat yang menjadi sasaran.

f. dunia usaha

usaha diwajibkan untuk mematuhi peraturan lingkungan dan seringkali menjadi target program pembinaan terkait pengelolaan limbah dan praktik ramah lingkungan.

g. lembaga pendidikan
Siswa, guru, dan staf di sekolah menjadi kelompok penting karena edukasi lingkungan sejak dini sangat krusial untuk membangun kesadaran generasi muda terhadap pentingnya kebersihan dan lingkungan.

h. komunitas/kelompok peduli lingkungan
Ini mencakup berbagai komunitas, organisasi non-pemerintah (LSM), atau kelompok pemerhati lingkungan yang memiliki program dan tujuan sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga kebersihan dan lingkungan hidup.

i. masyarakat umum
Ini adalah kelompok sasaran utama yang mencakup seluruh pengguna layanan transportasi yakni penumpang, pengemudi, penyandang disabilitas.

j. pengusaha transportasi
Pihak yang memiliki dan mengoperasikan berbagai moda transportasi yakni pengusaha angkutan umum dan pengusaha angkutan barang.

k. badan pemerintah dan lembaga terkait
Pihak yang berkepentingan dalam pengaturan dan pengelolaan sistem transportasi yaitu pelaksana teknis atau UPT dan Pemerintah Daerah.

l. pengelola infrastruktur
Pihak yang bertanggungjawab atas Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi yakni: unit pengelola jalan.

2.2 Permasalahan dan isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

Permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Adalah sebagai berikut:

a. masih tingginya angka prevelansi stunting, yaitu dengan tingkat prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Sumatera Barat (stunting Kab. Kepulauan Mentawai=33,7%, Provinsi Sumatera Barat=23,6%). Hal yang menjadi perhatian adalah kesehatan ibu hamil, kesehatan lingkungan, pola hidup bersih dan sehat, serta integrasi pengentasan stunting lintas sektor (intervensi sensitive dan spesifik);
b. masih rendahnya kepedulian dan kepatuhan dalam pendirian infrastruktur atau bangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang dan kajian/analisi dampak lingkungan;
c. rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, seperti membuang sampah sembarangan, serta kendala pengelolaan sampah seperti keterbatasan infrastruktur (Bank Sampah, TPS 3R), kurangnya sumber daya manusia; dan
d. terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana transportasi.

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kawasan pemukiman	Belum Optimalnya Penanganan PSU di Kawasan Permukiman	Perumahan Masyarakat yang berada di Taman Nasional dan Kawasan Hutan
2.	Masih rendahnya Desa dengan kategori Desa Mandiri	Belum optimalnya pengentasan kawasan kumuh	Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang ditempati oleh Masyarakat
		Ketersediaan Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan masih rendah	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas PSU yang tersedia
3.	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, seperti membuang sampah sembarangan, serta kendala pengelolaan sampah seperti keterbatasan infrastruktur (Bank Sampah, TPS 3R), kurangnya sumber daya manusia	Ketidak pedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah, penyebaran sampah liar, kurangnya fasilitas kebersihan yang memadai, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak buruk sampah bagi lingkungan dan kesehatan	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membuang sampah, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah, lemahnya penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggar, serta anggaran dan pengawasan yang tidak efektif
4.	Rendah pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan	Masih rendahnya pemanfataan izin lingkungan dalam pembangunan	Masih rendahnya kepatuhan dalam pengurusan izin lingkungan
			Belum adanya sanksi yang tegas bagi yang tidak mengurus izin lingkungan
			Belum tersedianya sumber daya manusia dalam menguji kualitas air, udara, tanah dan lahan
			Masih terbatasnya peralatan dan perlengkapan pengujian lingkungan
5.	Masih rendahnya tatanan kehidupan sosial, budaya Masyarakat	Masih rendahnya dukungan layanan publik dan dasar di kawasan UMA dan masyarakat adat	Jarak MHA dan UMA yang berjauhan sehingga memerlukan anggaran yang besar
6.	Belum adanya Investasi, sektor ekonomi dan Hilirisasi masih skala rumah tangga	Infrastruktur Investasi masih terbatas dan tidak memadai	Konektivitas daerah masih rendah baik darat, laut dan udara
7.	Konektivitas wilayah masih Rendah	Infrastruktur yang tersedia belum merata dan belum memadai	Moda transportasi yang belum melayani seluruh wilayah (desa)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
8.	Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana trasnportasi	Kurangnya moda transportasi	Kurangnya perawatan moda transportasi

2.2.2 Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Isu Strategis adalah kondisi yang harus jadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan Daerah karena berdampak signifikan, seperti penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan Pemerintahan Daerah.

a. Isu Global

Isu global yang menjadi perhatian daerah adalah penuntasan pencapaian Sustainable Development Goal's (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan komitmen baru oleh berbagai negara dengan menargetkan 3 tujuan mulia yang dicapai ditahun 2030 yakni mengakhiri kemiskinan, mengatasi dan menekan kesenjangan, serta mengatasi perubahan iklim.

TPB/SDG's bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak meninggalkan satu orangpun (*No-one Left Behind*) merupakan Prinsip utama SDG's. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDG's harus bisa menjawab dua hal yakni, keadilan prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan keadilan subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

TPB/SDG's merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. tanpa kemiskinan;
2. tanpa kelaparan;
3. kehidupan sehat dan sejahtera;
4. pendidikan berkualitas;
5. kesetaraan gender;
6. air bersih dan sanitasi layak;
7. energi bersih dan terjangkau;
8. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. industri, inovasi dan infrastruktur;
10. berkurangnya kesenjangan;
11. kota dan permukiman yang berkelanjutan;
12. konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
13. penanganan perubahan iklim;
14. ekosistem lautan;
15. ekosistem daratan;
16. perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan
17. kemitraan untuk mencapai tujuan.

Adapun Isu global yang berkaitan dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan meliputi penyediaan perumahan yang layak dan pengelolaan kawasan pemukiman akibat pengaruh geografis, perubahan iklim dan ketimpangan sosial, polusi dan pencemaran, serta kehilangan keanekaragaman hayati dan kurangnya kemitraan untuk mencapai tujuan.

b. Isu Nasional

Industri 5.0 merupakan konsep yang menekankan kolaborasi antara manusia dan teknologi, dengan fokus pada kemanusiaan, keberlanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan. Konsep ini memadukan teknologi canggih seperti *Artificial Intelligence* (AI), *Internet of Things* (IoT), dan robot dengan nilai-nilai kemanusiaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas hidup.

Industri 5.0 juga mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, pemerataan ekonomi melalui trasnportasi, pemanfaatan teknologi dan inovasi digital, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi. dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta kekurangan hunian (*backlog*), mahalnya harga tanah dan rumah, kesulitan pengadaan lahan dan perizinan, masalah pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta tata Kelola yang belum optimal dan peran masyarakat yang perlu ditingkatkan, mengurangi Kawasan kumuh dan meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

c. Isu Regional

Isu regional adalah masalah yang bersifat lokal dan terbatas pada wilayah tertentu, yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Kesenjangan pasokan dan permintaan, tantangan pembiayaan kerterbatasan lahan, serta masalah tata kelola dan regulasi, mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), keterbatasan akses infrastruktur, perusakan lingkungan dan konflik sosial, ketimpangan, keterbatasan layanan transportasi laut/darat yang menghubungkan antar pulau, konektifitas antar wilayah, pengembangan transportasi yang aman, efisien dan terjangkau.

d. Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan adalah pembangunan dan rehabilitasi rumah yang layak huni, yang memiliki prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang memadai serta pengelolaan persampahan dan transportasi. Sebagai daerah kepulauan, tantangan aksesibilitas di Daerah salah satunya yaitu ketersediaan sarana pelabuhan penyeberangan pada setiap pelabuhan penyeberangan terkhusus transportasi laut.

Daerah terdiri dari beberapa pulau yang terpisah oleh laut dengan populasi sekitar 97.837 jiwa. Sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan, dengan tingkat urbanisasi yang rendah dan sebagian besar masih mengandalkan sumber daya alam lokal, tetapi meningkatnya aktivitas pariwisata dan penetrasi produk-produk modern telah meningkatkan volume sampah, terutama sampah plastik. Dampak yang terjadi dari rendahnya pengelolaan sampah di Daerah antara lain banyaknya sampah, terutama plastik, berakhir di laut dan pantai, menyebabkan pencemaran

yang berdampak pada kehidupan laut. Ini merusak ekosistem pesisir dan mengancam kelangsungan hidup spesies laut di Daerah.

Pembuangan sampah secara sembarangan, terutama sampah organik dan berbahaya, dapat mencemari tanah dan sumber air, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan masyarakat setempat. Pemandangan sampah yang menumpuk di tempat-tempat wisata dapat merusak citra Daerah sebagai destinasi wisata alam yang bersih dan asri, yang pada akhirnya bisa mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sarang bagi penyakit, seperti diare, demam berdarah, dan infeksi kulit. Pembakaran sampah terbuka yang sering dilakukan juga dapat menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan. Lingkungan yang tercemar oleh sampah dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat lokal, dengan dampak pada estetika lingkungan, kebersihan dan kenyamanan. Pengelolaan sampah memiliki dua komponen utama, yaitu Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.

Pengurangan sampah merupakan upaya atau tindakan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, baik oleh individu, kelompok, maupun organisasi, melalui perubahan perilaku dan penerapan strategi pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Pengurangan sampah bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam.

Tabel 2.9
Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
10 kota / desa mandiri (Sikakap,Tuapejat, Bosua, Muara Siberut, Bulasat, Sikabaluan, Silabu, Sioban, Simalegi, Pasakiat Taileleu)	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kawasan pemukiman	Belum Optimalnya Penanganan PSU di Kawasan Permukiman	Pengelolaan Kawasan pemukiman akibat pengaruh geografis	mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta kekurangan hunian (backlog), mahalnya harga tanah dan rumah, kesulitan	Kesenjangan pasokan dan permintaan, tantangan pembiayaan kerterbatasan lahan, serta masalah tata Kelola dan regulasi, mengurangi Kawasan kumuh dan meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi tantangan dalam penyediaan lahan, pembiayaan, perizinan, tingginya harga rumah dan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
				pengadaan lahan dan perizinan, masalah pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta tata Kelola yang belum optimal dan peran masyarakat yang perlu ditingkatkan, mengurangi Kawasan kumuh dan meningkatkan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)		bahan bangunan serta kebutuhan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penanganan Kawasan kumuh dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang tertata, sehat, dan ramah lingkungan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
	Rendah pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan		perubahan iklim danketimpangan sosial, polusi dan pencemaran, serta kehilangan keanekaragaman hayati	penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,	perusakan lingkungan	Pengelolaan persampahan
	Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana transportasi		ketimpangan sosial	peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, pemerataan ekonomi melalui trasnportasi	keterbatasan layanan transportasi laut/darat yang menghubungkan antar pulau, konektifitas antar wilayah, pengembangan transportasi yang aman, efisien dan terjangkau	pelabuhan penyeberangan terkhusus transportasi laut tersedianya sarana pelabuhan penyeberangan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah sebagai dokumen perencanaan yang memandu pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan serta menjabarkan RPJMD dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih spesifik. Untuk itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan mencapai sasaran visi serta misi Pembangunan daerah. Dimana visi pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah "Kepulauan Mentawai Maju berdaya Saing dan Sejahtera" yang dijabarkan melalui 8 Misi sebagai berikut:

1. mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang inklusif, responsif, dan berkualitas;
2. mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah;
3. mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayah yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
4. mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi
5. mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana;
6. mewujudkan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelas dunia
7. mewujudkan masyarakat yang aman harmonis dan berkeadilan; dan
8. penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan tepercaya.

Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Adalah 'mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayah yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana dan penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan terpercaya.

Tujuan yang ingin dicapai Adalah Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman bagi Masyarakat, Melindungi dan melestarikan lingkungan hidup, Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas Masyarakat, Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perumahan, permukiman, lingkungan hidup, dan transportasi.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025-2029

Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan tahun 2025-2029 adalah meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan mengatasi berbagai tantangan seperti integrasi antara program.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Dan Perhubungan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya kawasan permukiman, lingkungan hidup, dan layanan transportasi yang berkualitas		Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan dilengkapi PSU	42,13	44,23	46,90	49,57	52,24	54,04	42,13
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,1	80,34	80,64	80,94	81,05	81,16	
			Rasio Konektivitas	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
		Meningkatnya kawasan permukiman yang dilengkapi PSU	Persentase kawasan permukiman telah dilengkapi dengan PSU	44,76	46,94	50,28	53,62	56,96	58,57	
		Meningkatnya rumah yang layak huni	Persentase rumah layak huni	39,51	41,51	43,51	45,51	47,51	49,51	
		Meningkatnya pemanfaatan ruang yang mengkedepankan kualitas lingkungan	Persentase kepatuhan dalam pengurusan ijin lingkungan	66,66	67	70	75	80	90	....
		Menignkatnya pengelolaan sampah	Persentase sampah yang dikelola	16,79	20,8	24,79	28,37	32,32	32,36	
		Meningkatnya MHA dan UMA yang mendapat pembinaan	Persentase Masyarakat Hukum Adat yang Dilestarikan	25	50	75	50	50	66,67	
		Meningkatnya keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna angkutan	menurunnya tingkat kecelakaan transportasi	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	
		Menignkatnya konektivitas antar wilayah	Cakupan layanan transportasi	85	85	85	85	85	85	
			Cakupan pusat kegiatan wilayah yang terhubung	82	82	82	82	82	82	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip	B	B	B	B	B	B	
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	2	2	2	2	2	2	
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan tahun 2025-2029 adalah:

a. meningkatkan akses hunian layak
   Pemerintah menargetkan peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sebesar 74% pada tahun 2029. Untuk mencapai target ini, strategi yang dapat dilakukan adalah:
   1. meningkatkan ketersediaan perumahan layak dan terjangkau melalui program pembangunan perumahan publik vertikal yang terpadu; dan
   2. mengintegrasikan program perumahan dengan infrastruktur dasar dan akses transportasi umum untuk mencegah munculnya kawasan permukiman kumuh baru

b. penanganan permukiman kumuh
   Strategi untuk menangani permukiman kumuh adalah Melibatkan berbagai instansi pelaksana, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

c. pengelolaan lingkungan hidup
   Strategi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah:
   1. mengimplementasikan program pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan berkelanjutan; dan
   2. mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan

d. peningkatan aksesibilitas dan kualitas transportasi
   Strategi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas transportasi adalah:
   1. mengembangkan infrastruktur transportasi yang memadai dan terintegrasi;
   2. meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi umum melalui peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Melakukan pemetaan, antara lain: 1. Identifikasi lokasi terdampak bencana 2. Identifikasi rumah tidak layak huni 3. Penyiapan lahan bebas bencana	1. Pembangunan rumah tidak layak huni yang berdampak bencana yang berkelanjutan 2. Perbaikan RTLH yang berkelanjutan 3. Tersedianya fasilitas umum	1. Pembangunan rumah tidak layak huni yang berdampak bencana yang berkelanjutan 2. Perbaikan RTLH yang berkelanjutan 3. Tersedianya fasilitas umum (sesuai pendataan)	1. Pembangunan rumah tidak layak huni yang berdampak bencana yang berkelanjutan 2. Perbaikan RTLH yang berkelanjutan 3. Tersedianya fasilitas umum	1. Terlaksananya Kasiba dan Lasiba
Peningkatan Kualitas Pelayanan	Meningkatkan cakupan pelayanan	Pengembangan Taman dan Ruang	Meningkatkan kualitas taman dan ruang	

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Kebersihan: Meningkatkan frekuensi pengumpulan sampah menjadi 3 kali seminggu	kebersihan menjadi 90%	Terbuka Hijau: Meningkatkan luas taman dan ruang terbuka hijau menjadi 20% dari luas wilayah	terbuka hijau melalui penambahan fasilitas dan perawatan	
Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca: Mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 10%	Peningkatan Kualitas Air: Meningkatkan kualitas air sungai dan danau melalui program pengelolaan limbah	Mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 20%	Meningkatkan kualitas air tanah melalui program konservasi air tanah	
Penguatan dibidang Infrastruk untuk peningkatan produktifitas menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Penguatan dibidang sumber daya ekonomi untuk peningkatan produktifitas menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Akselarasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan transformasi ekonomi daerah	Penguatan fondasi Transformasi untuk pembangunan berkelanjutan dan berdaya saing	Transformasi Pembangunan untuk pemangunan inklusif dan berkelanjutan

Identifikasi lokasi terdampak bencana

Pemetaan lokasi terdampak bencana memiliki banyak manfaat antara lain: mengidentifikasi daerah rentan terhadap bencana, merencanakan tindakan preventif, mengurangi kerugian yang ditimbulkan, dan mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam menghadapi bencana.

Setelah pemetaan risiko bencana dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan preventif yang diperlukan. Tindakan ini dapat berupa pembangunan infrastruktur yang lebih baik, sosialisasi kepada masyarakat, atau pembentukan tim tanggap bencana.

Pemetaan risiko bencana perlu dilakukan secara berkala karena risiko bencana dapat berubah seiring waktu. Selain itu, pemetaan risiko bencana juga perlu dilakukan setelah terjadi bencana untuk mengidentifikasi kerusakan yang terjadi dan memperbaikinya.

Jika data yang digunakan tidak akurat, pemetaan risiko bencana tidak akan memberikan hasil yang baik, Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pemetaan risiko bencana adalah data yang akurat dan terbaru.

Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemetaan risiko bencana. Masyarakat dapat membantu mengumpulkan data mengenai

kondisi desa, memberikan informasi mengenai daerah yang rentan, serta ikut serta dalam pelaksanaan tindakan preventif yang diperlukan.

Identifikasi rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). RTLH juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web"). Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan disebutkan bahwa RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.

RTLH merupakan rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembangunan atau perbaikan RTLH dalam pelaksanaannya berkelanjutan sampai beberapa tahap sebab dalam pelaksanaan pembangunan tersebut tidak akan tuntas dalam satu tahap dan disesuaikan juga dengan anggaran yang tersedia sehingga diharapkan dalam 5 (lima) tahun pembangunan dan perbaikan RTLH tersebut sudah tuntas.

3.4 Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra 2025 – 2029

Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025 – 2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan Operasional Norma Standar Prosedur dan Kriteria sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra 2025 - 2029	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan	1. Penyediaan Infrastruktur sarana dan prasarana untuk layanan sosial ekonomi masyarakat. 2. Pembangunan kawasan berupa hunian, fasilitas layanan dasar (air bersih, listrik, sanitasi dan pengelolaan limbah). 3. Pengelolaan sampah ramah lingkungan dan bernilai ekonomis (circular economy) 4. Penyediaan infrastruktur kawasan dengan kerjasama badan usaha. 5. Pengentasan 10 kawasan kumuh.	• 10 kota/ desa mandiri (Sikakap, Tuapejat, Bosua, Muara Siberut, Bulasat, Sikabaluan, Silabu, Sioban, Simalegi, Pasakiat Taileleu) • Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakt berpenghasilan rendah (MBR) dan korban bencana • Mengarahkan Pembangunan perumahan dengan prinsip ramah lingkungan dan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai • Target penyelesaian masalah sampah hingga 100% pada tahun 2029, dengan focus khusus pada pengakhiran polusi plastic • Penguatan regulasi dan pemantauan kualitas udara, air, serta pengelolaan limbah (B3 maupun non -B3) • Penguatan ekosistem kritis melalui kolaborasi multipihak untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim • Peningkatan integritas transpotasi public dan pengembangan infrastruktur yang mendukung mobilitas efisiensi antarwilayah	

Pengentasan 10 kawasan kumuh Desa Sikakap, Tuapejat, Bosua, Muara Siberut, Bulasat, Muara Sikabaluan, Silabu, Sioban, Simalegi, dan Pasakiat

Taileleu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2-37 Tahun 2023 dan indikator teknis seperti tingginya jumlah RTLH, buruknya sanitasi, keterbatasan akses air bersih, serta kondisi drainase yang rawan banjir. Pemilihan desa-desa ini juga mempertimbangkan kerentanan terhadap bencana dan tata ruang permukiman yang tidak teratur. Untuk menuntaskan kekumuhan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Mentawai menerapkan strategi terpadu berupa rehabilitasi dan pembangunan rumah layak huni melalui program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) yang dilakukan setiap tahunnya, baik melalui pendanaan daerah yang bersumber dari APBD maupun dari pendanaan luar daerah seperti dana APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber pendanaan lainnya yang sah menurut undang-undang.

Peningkatan infrastruktur dasar seperti drainase dan air bersih, serta pendampingan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor dengan TNI melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pendekatan ini ditujukan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas permukiman, tetapi juga untuk mendorong kemandirian dan keberlanjutan pembangunan desa secara menyeluruh.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DPRKPLHP) menetapkan arah kebijakan yang terstruktur. Arah kebijakan ini difokuskan pada penguatan koordinasi internal, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengembangan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi. Berikut adalah penjelasan rincinya:

1. Penguatan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

Langkah pertama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif adalah dengan memastikan adanya koordinasi yang kuat dalam perencanaan dan evaluasi. Strategi ini diwujudkan melalui:

-Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan: Melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat terhadap setiap tahapan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

-Peningkatan Efektivitas Pengambilan Kebijakan: Setiap kebijakan yang diambil harus didasarkan pada kajian yang mendalam. Oleh karena itu, DPRKPLHP akan fokus pada penyusunan kajian regulasi kebijakan pembangunan agar setiap keputusan yang dihasilkan tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat.

2. Optimalisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa yang efisien dan transparan merupakan fondasi utama kelancaran operasional dinas. Untuk itu, strategi yang dijalankan meliputi:

-Identifikasi Kebutuhan: Melakukan pendataan dan analisis kebutuhan barang dan jasa secara periodik.

-Perencanaan Terstruktur: Menyusun periodesasi pengadaan barang/jasa serta mengkaji dokumen rencana umum pengadaan agar proses pengadaan lebih terarah.

-Peningkatan Kapasitas Aparatur: Mengadakan bimbingan teknis (bimtek) dan forum komunikasi (forkom) pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mengelola pengadaan.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan kepala daerah, DPRKPLHP berkomitmen untuk meningkatkan dukungan sarana dan prasarana secara bertahap dan berkelanjutan. Strateginya adalah:

-Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana: Melakukan penambahan dan perbaikan fasilitas berdasarkan skala prioritas. Upaya ini harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM pengelola agar fasilitas yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Daerah

Sebagai leading sector di bidang perhubungan, DPRKPLHP memiliki visi untuk menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi dan saling mendukung. Hal ini bertujuan untuk membuka isolasi wilayah, memperlancar distribusi barang, dan meningkatkan mobilitas orang. Arah kebijakan ini mencakup beberapa aspek berikut:

A. Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas

Fokus utama adalah membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi yang mampu menghubungkan antar wilayah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan konektivitas antar wilayah yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, barang, jasa, dan orang secara lancar. Kebijakan ini dilakukan melalui integrasi kebijakan dengan optimalisasi peran berbagai pihak terkait.

B. Optimalisasi Pelayanan Angkutan (Penumpang dan Barang)

Untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat terlayani, kebijakan yang diambil meliputi:

1. Optimalisasi pelayanan penumpang dan barang di wilayah darat.

2. Pengembangan pelayanan angkutan di wilayah kepulauan/pulau-pulau.

3. Pengembangan konsep angkutan pedesaan yang menjamin akses ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan terisolasi.

C. Pengembangan Transportasi Penyeberangan

Mengingat karakteristik wilayah kepulauan, transportasi penyeberangan menjadi prioritas. Langkah-langkahnya adalah:

1. Menjadikan angkutan penyeberangan sebagai sarana transportasi lintas dalam kabupaten untuk penumpang dan barang.

2. Meningkatkan kualitas moda angkutan kapal penyeberangan yang disesuaikan dengan daya angkut dan daya muat.

3. Mengembangkan pelabuhan dan dermaga penyeberangan yang menghubungkan pulau-pulau kecil serta daerah produksi dengan simpul transportasi utama.

4. Memastikan keterpaduan layanan penyeberangan dengan moda transportasi lain (jalan raya dan terminal).

D. Peningkatan Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi

Keselamatan adalah tujuan utama penyelenggaraan lalu lintas. Strategi yang dijalankan adalah:

1. Menjadikan keselamatan jalan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan lalu lintas.

2. Mengoptimalkan pelayanan lalu lintas darat dan laut melalui penyediaan sistem informasi, petunjuk arah, dan rambu-rambu yang memadai.

3. Memastikan pengguna jalan mendapatkan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan dalam perjalanan.

E. Pengembangan SDM, Data, dan Fasilitas Pendukung

Untuk mendukung seluruh program di atas, DPRKPLHP juga akan fokus pada aspek internal, yaitu:

1. Melakukan analisis kebutuhan SDM aparatur serta jenis pelatihan teknis, fungsional, dan struktural yang diperlukan.

2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi sektor Perhubungan.

3. Membangun dan meningkatkan kualitas fasilitas gedung kantor serta sarana prasarana pendukung lainnya, termasuk pembangunan terminal barang dan penumpang yang terintegrasi dengan simpul transportasi lain serta meningkatkan daya tampung kendaraan di setiap terminal.

Dengan arah kebijakan yang komprehensif ini, DPRKPLHP berkomitmen untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Proses penyusunan program dan kegiatan merupakan operasionalisasi teknis kebijakan dan strategi yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pemilihan program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan sebagai pelaksana, koordinator, dan komando dalam urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, urusan Lingkungan Hidup dan urusan Perhubungan di Daerah.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pelaksanaan dan pengendalian program urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, urusan Lingkungan Hidup dan urusan Perhubungan yang dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dalam Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Program merupakan perwujudan dari berbagai strategi dan langkah operasional dalam rangka pencapaian setiap tujuan. Adapun program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan atau dalam periode Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
	Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan	Meningkatnya kawasan permukiman yang dilengkapi PSU			Persentase lingkungan permukiman kumuh	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Terlaksananya pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/ Kota	
						Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
						Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
						Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi	
						Program Kabupaten/Kota Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
			Terlaksananya sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
						Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	
						Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
						Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	
						Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
			Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
						Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
						Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
						Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Koa	
			Terlaksananya pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Program Kabupaten/Kota	
						Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
						Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
						Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	
						Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
			Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen yang diterbitkan		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	
						Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	
						Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	
					Persentase lingkungan permukiman kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Terlaksananya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman	Luas kawasan permukiman yang tertata		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
						Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	
						Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
						Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
						Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
						Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
			Terlaksananya Kegiatan peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Luas kawasan kumuh yang ditingkatkan		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
						Penyusunan Rencana Tapak (*Site Plan*) dan *Detail Engineering Design* (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
						Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	
						Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	
					Persentase Kawasan permukiman dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					kawasan permukiman		
			Master Plan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
			Terlaksananya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman	Luas kawasan permukiman yang ditata		Penataan Kawasan Permukiman	
			Terlaksananya peningkatan kawasan permukiman	Pemekaran Wilayah Hijau		Pengembangan Kawasan Permukiman Baru	
			Terlaksananya pembangunan jalan	Akses Jalan Mantap		Pembangunan Jalan Lingkungan	
			Terlaksananya pembangunan drainase	Bebas Genangan Air		Pembangunan Drainase	
			Tersedianya penerangan jalan	Permukiman yang dialiri listrik		Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Kawasan Permukiman	
	Terwujudnya	Meningkatnya	Menurunnya	Jumlah laporan	Indeks Kualitas	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
	ekosistem alam yang Berkualitas dan Resiliensi Terhadap Bencana	pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan	pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Lingkungan Hidup	DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Terwujudnya konektifitas wilayah yang merata					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
						Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencmaran Lingkungnan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air Udara dan Laut	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, dan Adaptasi Perubahan Iklim	
						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Meningkatkan Ketaatan Pemrakarsa Usaha / Kegiatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
					Terhadap Kewajibannya dalam Melakukan Pengelolaan Lingkungan		
						Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat	Memperkuat Tatanan Kehidupan Sosial, Budaya Masyarakat	Terlaksananya Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terwujudnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Masyarakat HukumAdat yang Dilestarikan	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
						Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisioanal, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
						Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisioanl dan Hak MHA terkait dengan PPLH	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	
						Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	
	Terwujudnya ekosistem alam yang Berkualitas dan Resiliensi Terhadap Bencana	Meningkatnya pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas Lingkungan	Meningkatnya tata kelola persampahan		Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
						Pengelolaan Sampah	
						Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	
						Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
						Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	
						Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota	
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
						Swasta	
						Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	
					Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
						Penyelenggalaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/kota	
						Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
						Penyelenggaraan Penyuluhan Kampanye Lingkungan Hidup	
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat komunitas/kelompok masyarakat	
		Mempercepat serta memberikan pelayanan transportasi laut kepada	Hasil dari operasi pelayaran yang optimal serta rute pelayanan yang lebih baik akan mengurangi	Jumlah prasarana, dokumen yang selesai dibangun	Konektifitas laut	PROGRAM PELAYARAN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
		Masyarakat	kecelakaan laut				
						Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah	
						Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan	
	Meningkatnya penyelenggaraan transportasi					Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	
						Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pebuhan Pengumpan Lokal	

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Urusan Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman													
Program pengembangan perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	40%	45%	1.144.054.506	48%	1.666.310.453	50%	1.701.059.568	55%	1.725.478.688	60%	1.743.229.007	
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program pemerintah daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	0%	10%	1.144.054.506	15%	1.666.310.453	20%	1.701.059.568	25%	1.725.478.688	30%	1.743.229.007	
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belum Tertangani	Sebelumnya yang Belum Tertangani												
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota												
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terverifikasi		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		10	Rp 50,000,000	10	Rp 50,000,000	10	Rp 50,000,000	10	Rp 50,000,000	10	Rp 50,000,000	
Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	
Rembug Warga untuk Menentukan Calon	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug		2	Rp 100,000,	2	Rp 100,000,	2	Rp 100,000,	2	Rp 100,000,	2	Rp 100,000,	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			000		000		000		000		000	
Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		100	Rp 100,000,000	100	Rp 100,000,000	100	Rp 100,000,000	100	Rp 100,000,000	100	Rp 100,000,000	
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan		10	Rp 50,000,000	10	Rp 50,000,000	10	Rp 50,000,000	10	Rp 50,000,000	10	Rp 50,000,000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Perumahan												
Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan		100	Rp 100,000,000	100	Rp 100,000,000	100	Rp 100,000,000	100	Rp 100,000,000	100	Rp 100,000,000	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota													
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		120	Rp 2,400,000,000	120	Rp 2,400,000,000	120	Rp 2,400,000,000	120	Rp 2,400,000,000	120	Rp 2,400,000,000	
Pembangunan Rumah bagi	Jumlah Rumah bagi Korban		100	Rp 4,500,00	100	Rp 4,500,00	100	Rp 4,500,00	100	Rp 4,500,00	100	Rp 4,500,00	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Korban Bencana	Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah		100	Rp 4,500,000,000	100	Rp 4,500,000,000	100	Rp 4,500,000,000	100	Rp 4,500,000,000	100	Rp 4,500,000,000	
Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah												
Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		100	Rp 4,500,000,000	100	Rp 4,500,000,000	100	Rp 4,500,000,000	100	Rp 4,500,000,000	100	Rp 4,500,000,000	
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena		100	Rp 4,500,000,000	100	Rp 4,500,000,000	100	Rp 4,500,000,000	100	Rp 4,500,000,000	100	Rp 4,500,000,000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Relokasi Program Kabupaten/Kota												
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		100	Rp 4,500,000,000	100	Rp 4,500,000,000	100	Rp 4,500,000,000	100	Rp 4,500,000,000	100	Rp 4,500,000,000	
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota													
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan		100	Rp 100,000,000	100	Rp 100,000,000	100	Rp 100,000,000	100	Rp 100,000,000	100	Rp 100,000,000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Penyediaan Rumah												
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Penyediaan Rumah												
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus													
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Dibangun												
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah		0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan													
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Elektronik												
Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Umum/Rumah Susun Umum	Umum/Rumah Susun Umum												
Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara		1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	
Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung													

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
(SKGB)													
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN													
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman													
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik												
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													
Penyusunan/Review/Legalisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang		2	Rp 400,000,	2	Rp 400,000,	2	Rp 400,000,	2	Rp 400,000,	2	Rp 400,000,	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kebijakan Bidang PKP	PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi			000		000		000		000		000	
Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha		250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
(Sepuluh) Ha													
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina		10	Rp 50,000,000	10	Rp 50,000,000	10	Rp 50,000,000	10	Rp 50,000,000	10	Rp 50,000,000	
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh		250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kumuh	Permukiman Kumuh												
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah		50	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang		200	Rp 4,000,00	200	Rp 4,000,00	200	Rp 4,000,00	200	Rp 4,000,00	200	Rp 4,000,00	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Diperbaiki			0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH													
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota													
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman		200	Rp 4,000,000,000	200	Rp 4,000,000,000	200	Rp 4,000,000,000	200	Rp 4,000,000,000	200	Rp 4,000,000,000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki												
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh		50	Rp 2,250,000,000	50	Rp 2,250,000,000	50	Rp 2,250,000,000	50	Rp 2,250,000,000	50	Rp 2,250,000,000	
Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk		250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh												
Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman		250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kumuh												
Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	250	Rp 200,000,000	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan													
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)													
Perencanaan Penyediaan	Jumlah Dokumen Perencanaan		2	Rp 100,000,	2	Rp 100,000,	2	Rp 100,000,	2	Rp 100,000,	2	Rp 100,000,	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PSU Perumahan	Penyediaan PSU Perumahan			000		000		000		000		000	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		15	Rp 2,000,000,000	15	Rp 2,000,000,000	15	Rp 2,500,000,000	15	Rp 3,000,000,000	15	Rp 3,000,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	
Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar,		100	Rp 150,000,000	100	Rp 150,000,000	100	Rp 150,000,000	100	Rp 150,000,000	100	Rp 150,000,000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
terima PSU	prosedur, dan kriteria serah terima PSU												
Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan		15	Rp 2,000,000,000	15	Rp 2,000,000,000	15	Rp 2,000,000,000	15	Rp 2,000,000,000	15	Rp 2,000,000,000	
Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		15	Rp 2,000,000,000	15	Rp 2,000,000,000	15	Rp 2,000,000,000	15	Rp 2,000,000,000	15	Rp 2,000,000,000	
Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan		2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	2	Rp 100,000,000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang		1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	1	Rp 200,000,000	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan													
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Jumlah Rumah Penerima Manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik		100	Rp 300,000,000	100	Rp 300,000,000	100	Rp 300,000,000	100	Rp 300,000,000	100	Rp 300,000,000	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan													
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Jumlah Rumah Penerima Manfaat Dari Penyediaan Jaringan Tenaga		100	Rp 300,000,000	100	Rp 300,000,000	100	Rp 300,000,000	100	Rp 300,000,000	100	Rp 300,000,000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Listrik												
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas													

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil													
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	1	Rp 100,000,000	
Urusan Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup													
Program Perencanaan Lingkungan Hidup						50.000.000		30.000.000		25.000.000		50.000.000	
Meningkatnya	Persentase	0	0		25%		25%		25%		25%		

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti												
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen RPPLH,				1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/Kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	0			1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	50.000.000	Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan				30.000.000		65.000.000		70.000.000		100.000.000		150.000.000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
lingkungan hidup													
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	56,09	56,09		56,09		56,09		56,09		56,09		
	Indeks Kualitas Udara	93,45	93,45		93,45		93,45		93,45		93,45		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Mengendalikan pencemaran udara, air, dan tanah melalui pengelolaan yang efektif dan efisien			30.000.000		65.000.000		70.000.000		100.000.000		150.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	jumlah Dokumen uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, air, udara, dan laut	0	1 dokumen		1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	50.000.000	Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	0	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	50.000.000	Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 kali (6 titik Lokasi pengambilan sampil)	10.000.000	2 kali (6 titik Lokasi pengambilan sampil)	20.000.000	2 kali (6 titik Lokasi pengambilan sampil)	30.000.000	2 kali (6 titik Lokasi pengambilan sampil)	50.000.000	Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan				8.000.000		20.000.000		30.000.000		40.000.000		50.000.000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
lingkungan hidup(PPLH)													
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH												
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	50%	30%	8.000.000	30%	20.000.000	40%	30.000.000	45%	40.000.000	50%	50.000.000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	16 Badan Usaha	16 Badan Usaha	8.000.000	16 Badan Usaha	20.000.000	16 Badan Usaha	30.000.000	16 Badan Usaha	40.000.000	16 Badan Usaha	50.000.000	Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Program pengakuan keberadaan Masyarakat hukum adat (MHA), kearifan local dan hak MHA yang terkait dengan PPLH				30.003.000		20.000.000		40.000.000		60.000.000		90.000.000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan local, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	4%	10%		15%		20%		25%		30%		
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	5 MHA	5 MHA	30.003.000	6 MHA	10.000.000	6 MHA	20.000.000	6 MHA	30.000.000	6 MHA	40.000.000	Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal,	Persentase MHA yang memiliki pengetahuan dan	4%	10%		15%	10.000.000	20%	20.000.000	25%	30.000.000	30%	50.000.000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	pemahaman yang meningkat tentang PPLH												
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	50.000.000	Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Urusan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran													
Program pengelolaan						390.000.000		450.000.000		620.000.000		440.000.000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
persampahan													
Meningkatgnya tata Kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Samapah	0	40		45		50		60		65		
Pengelolaan Sampah				496.321.200		370.000.000		420.000.000		580.000.000		390.000.000	
Penigkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 kelompok	0	0	10 Kecamatan	30.000.000	10 Kecamatan	40.000.000	10 Kecamatan	50.000.000	10 Kecamatan	60.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran
Penyediaan Sarana dan Prasara pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana PenangananSampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan,	4 unit	16 unit	20.004.000	2 unit	100.000.000	2 unit	110.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	210.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir												Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran
Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	0			2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	40.000.000	2 dokumen	50.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	9,843 Ton	9.843 Ton	476.317.200	9.843 Ton	200.000.000	9.843 Ton	210.000.000	9.843 Ton	250.000.000	9.843 Ton	200.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
													Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	0	0	0	9,843 Ton	20.000.000	9,843 Ton	30.000.000	9,843 Ton	40.000.000	9,843 Ton	50.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan	Persentase penurunan jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik oleh pihak	50%	0	0	25%	20.000.000	25%	30.000.000	25%	40.000.000	25%	50.000.000	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
oleh Pihak Swasta	swasta												
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	0	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	50.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Konektivitas Darat	0,20	0,21	3.660.974.421	0,22	499.893.136	0,25	510.317.870	0,30	517.643.607	0,40	522.968.702	Bidang perhubungan
	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/ Kota	25,00%	25,50%	366.097.442	26,00%	49.989.314	30,00%	51.031.787	32,00%	51.764.361	40,00%	52.296.870	

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Konektivitas Kabupaten/ Kota	11,63%	23,26%	2.928.779.536	34,88%	399.914.509	46,51%	408.254.296	58,14%	414.114.885	69,77%	418.374.962	
	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	10%	15%	366097442	30%	49989314	50%	51031787	70%	51764361	95%	52296870	
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Adanya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen,											Bidang perhubungan
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	'- Adanya Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	2 Laporan		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Bidang perhubungan

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kabupaten/Kota												
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	800 Unit											Bidang perhubungan
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	'- Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	800 LPJU		5200000000		5200000000		5200000000		5200000000		5200000000	Bidang perhubungan
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	'- Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	500 Unit		850000000		850000000		850000000		850000000		850000000	Bidang perhubungan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	'- Terwujudnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	250 PJU		350000000		350000000		350000000		350000000		350000000	Bidang perhubungan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan	'- Terwujudnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan	500 Unit		150000000		150000000		150000000		150000000		150000000	Bidang perhubungan
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal	'- Meningkatnya Kapasitas SDM Pengelola Terminal	25 Orang						150000000		150000000		150000000	Bidang perhubu

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tipe C	- Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tipe C												ngan
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													Bidang perhubungan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	'- Tersedianya sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	10 unit		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	Bidang perhubungan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	'- Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Jumlah Sumber Daya manusia Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang	20 Orang		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Bidang perhubungan

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	ditingkatkan kapasitasnya												
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	'- Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor - Jumlah Kendaraan Wajib Uji Kendaraan Bermotor yang terdaftar	100 Unit		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Bidang perhubungan
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	'- Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Bidang perhubungan
Identifikasi dan	'- Terlaksananya	1		250.00		250.00		250.00		250.00		250.00	Bidang

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000	perhubungan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	'- Terpeliharanya sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	2 Unit		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Bidang perhubungan
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	'- Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Jumlah Laporan Koordianasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala	1 Laporan		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000	Bidang perhubungan

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kendaraan Bermotor												
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	'- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Bidang perhubungan
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten Kota													Bidang perhubungan
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	'- Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Andalalin	1 Dokume		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Bidang perhubungan

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	- Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan	n											
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													Bidang perhubungan
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	'- Tersedianya Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Unit						1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Bidang perhubungan

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	yang tersedia												
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan													Bidang perhubungan
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	Bidang perhubungan
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/KotaJar	'- Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu)	1 Dokumen		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Bidang perhubungan

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
ingan Trayek	Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah													Bidang perhubungan
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan	1 Dokumen						169.449.500		120.000.000		150.000.000	Bidang perhubungan

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Kabupaten/Kota												
'- Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan '- Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan. - Kewenangan Kabupaten/Kota	'- Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji CobaPelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan. - Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota. - Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen						59.725.000		120.000.000		150.000.000	Bidang perhubungan
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah													Bidang perhubungan

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kabupaten/Kota													
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen								50.000.000		150.000.000	Bidang perhubungan
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Bidang perhubungan

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	'- Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota - Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Bidang perhubungan
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1													Bidang perhubungan

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	'- Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. - Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	Bidang perhubungan
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1	'- Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan	3 Dokumen								150.000.000			Bidang perhubungan

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
													Bidang perhubungan
													Bidang perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	0,12 %	0,12%	5.491.461.631	0,16%	8.331.552.266	0,23 %	8.505.297.839	0,28 %	8.627.393.442	0,37 %	8.716.145.037	Bidang perhubungan
Penetapan Rencana Induk dan Daerah	Adanya Rencana Induk dan Daerah	1 Dok											Bidang perhubu

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	umen, 2 Laporan, 3 Laporan											ngan
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	'- Adanya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen											Bidang perhubungan
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan	'- Adanya Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan	2 Laporan		100000000		100000000		100000000		100000000		100000000	Bidang perhubungan

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengumpan Lokal													
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	'- Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan	3 Laporan		100000000		100000000		100000000		100000000		100000000	Bidang perhubungan
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	2 Dokumen, 2 Pela											Bidang perhubungan

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengumpan Lokal	Pelabuhan Pengumpan Lokal	buhan dan 2 laporan											
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	'- Terpenuhinya Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	3 Dokumen		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Bidang perhubungan
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	'- Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	5 Pelabuhan		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000	Bidang perhubungan
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	'- Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau - Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang	8 Pelabuhan		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	Bidang perhubungan

Bidang urusan/program	Indikator outcome	Baseline 2024	Target dan pagu indikatif tahun										Pd penanggungjawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Beroperasi dan Terpelihara												
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	'- Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	4 Laporan		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	Bidang perhubungan
Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	'- Terpeliharanya Dermaga Sungai dan Danau - Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang dipelihara	8 Pelabuhan		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000	Bidang perhubungan

Tabel 4.3
Daftar Sub kegiatan dalam mendukung program prioritas Perangkat Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	PROGRAM PENGEMBANGA1N PERUMAHAN	Bertambahnya Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Ter Rehabilitasi	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Bertambahnya Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Jumlah Orang/Sukarelawan yang mengikuti Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya Pendistribusian Serahterima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendistribusian Serahterima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Bertambahnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya Kawasan Permukiman yang tertata	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya Kawasan Permukiman yang tertata	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	PROGRAM PENINGKATAN	Meningkatnya permukiman yang didukung oleh PSU	Urusan Penyelenggaraan PSU perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di	Bidang Perumahan dan Kawasan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
	PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	Permukiman
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus perusakan lingkungan hidup yang tertangani	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Bidang Lingkungan Hidup
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Rekomendasi Izin Lingkungan yang tindak lanjuti	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh PemerintahDaerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah kabupaten terkelola	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Bidang Kebersihan dan Pertamanan
				Penanganan sampah melalui pengangkutan	Bidang Kebersihan dan Pertamanan
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Bidang Perhubungan
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Bidang Perhubungan
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk	Bidang Perhubungan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
				Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Bidang Perhubungan
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Bidang Perhubungan
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Bidang Perhubungan
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan	Bidang Perhubungan
				Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Tipe C	Bidang Perhubungan
				Pembangunan Gedung Terminal Tipe C	Bidang Perhubungan
				Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe C	Bidang Perhubungan
			Penyediaan Angkutan Untuk Jasa Angkutan Orangdan/Atau Barang Antar Kota dalam satu Kabupaten / Kota	Penyediaan Angkutan Untuk Jasa Angkutan Orangdan/Atau Barang Antar Kota dalam satu Kabupaten / Kota	Bidang Perhubungan
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal	Bidang Perhubungan
				Penyediaan Angkutan Untuk Jasa Angkutan Orangdan/Atau Barang Antar Kota dalam satu Kabupaten / Kota	Bidang Perhubungan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bidang Perhubungan
				Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan	Bidang Perhubungan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
				Bermotor	
				Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Bidang Perhubungan
				Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bidang Perhubungan
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bidang Perhubungan
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Bidang Perhubungan
				Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Bidang Perhubungan
				Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Bidang Perhubungan
				Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Bidang Perhubungan
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Bidang Perhubungan
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan, Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Kendaraan Bermotor Kabuapten/Kota	Bidang Perhubungan
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perhubungan
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lint-Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerahas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Perhubungan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
				dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Perhubungan
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembanguan dan Pengoperasian Pelabuahn Sungai dan Danau	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Periizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Bidang Perhubungan
			Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Keterdiaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan /Atau dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Bidang Perhubungan
			Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Perhubungan
8	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bidang Perhubungan
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bidang Perhubungan
				Pembangunan Pelabuhan	Bidang Perhubungan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
				Pengumpan Lokal	
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bidang Perhubungan
				Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Bidang Perhubungan
				Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pebuhan Pengumpan Lokal	Bidang Perhubungan

4.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan dapat diukur dan dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai tujuan pembangunan Daerah.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD (IKU) Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Rakyat

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan dilengkapi PSU	42,13	44,23	46,90	49,57	52,24	54,04	42,13
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,1	80,34	80,64	80,94	81,05	81,16	
3.	Rasio Konektivitas	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
4.	Persentase kawasan permukiman telah dilengkapi dengan PSU	44,76	46,94	50,28	53,62	56,96	58,57	
5.	Persentase rumah layak huni	39,51	41,51	43,51	45,51	47,51	49,51	
6.	Persentase kepatuhan dalam pengurusan ijin lingkungan	66,66	67	70	75	80	90	....
7.	Persentase sampah yang dikelola	16,79	20,8	24,79	28,37	32,32	32,36	
8.	Persentase Masyarakat Hukum Adat yang Dilestarikan	25	50	75	50	50	66,67	
9.	menurunnya tingkat kecelakaan transportasi	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	
10.	Cakupan layanan transportasi	85	85	85	85	85	85	
11.	Cakupan pusat kegiatan wilayah yang terhubung	82	82	82	82	82	82	
12.	Nilai Lakip	B	B	B	B	B	B	
13.	Jumlah Inovasi yang diterapkan	2	2	2	2	2	2	
14.	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Rakyat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	40	45	48	50	55	60	
2	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program pemerintah daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	0	10	15	20	25	30	
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Persen	5	5,5	10	12	25	30	
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Persen	1,25	1,50	2	2,50	3	5	
5	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum)	Persen	25	30	32	35	45	50	
6	Konektivitas Darat	Nilai	0,20	0,21	0,22	0,25	0,30	0,40	
7	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	Persen	25,00	25,50	26,00	30,00	32,00	40,00	
8	Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	11,63	23,26	34,88	46,51	58,14	69,77	
9	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Indeks	10%	15%	30%	50%	70%	95%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
10	Konektivitas Laut	Nilai	0,12	0,12	0,16	0,23	0,28	0,37	
11	Persentasi Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang di Tindaklanjuti	Persen	60	65	70	75	80	90	1
12	Indeks Kualitas Air	Indeks	62	65	68	70	72	75	2
13	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,24	94	94,2	94,5	94,8	95	3
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Indeks	80,1	80,34	80,64	80,94	81,05	81,16	4
15	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	66,66	67,00	70,00	75,00	80,00	90,00	5
16	Persentase MHA yang ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	4	10	15	20	25	30	6
17	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	0	40	45	50	60	65	7

BAB V
PENUTUP

Pembangunan akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan sepanjang dilandasi oleh perencanaan yang berkualitas, dan mampu mencapai visi dan misi sejalan dengan RPJMD Tahun 2025 -2029, selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi dokumen Renstra oleh masing-masing Perangkat Daerah, sehingga lebih operasional dan dapat untuk dilaksanakan.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

Keberhasilan pelaksanaan Pembangunan di Daerah tidak terlepas dari peran aktif masyarakat serta kerjasama antar instansi terkait dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

Rencana Strategis ini juga dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

1. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

   Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:
   1. monitoring, melalui pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan;
   2. evaluasi, melalui penilaian terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui ketercapaian tujuan dan sasaran;
   3. analisis, melalui analisis terhadap hasil evaluasi untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pelaksanaan Renstra; dan
   4. pelaporan, melalui laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk disampaikan kepada *stakeholders*.

   Tujuan pengendalian dan evaluasi adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan Renstra berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan.

   Indikator evaluasi yang dipakai:
   1. ketercapaian tujuan dan sasaran Renstra;
   2. kualitas pelayanan kepada masyarakat;

3. efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya; dan
4. kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Frekuensi Evaluasi, terdiri atas:
1. evaluasi tahunan, yang dilakukan setiap tahun untuk memantau kemajuan pelaksanaan Renstra;
2. evaluasi awal yang dilakukan pada pertengahan periode Renstra untuk memantau kemajuan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan; dan
3. evaluasi akhir yang dilakukan pada akhir periode Renstra untuk menilai ketercapaian tujuan dan sasaran.

2. Manajemen Resiko Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Manajemen Resiko Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan adalah proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra dan kegiatan operasional dinas.

Tujuan manajemen resiko:
1. mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra dan kegiatan operasional dinas;
2. menganalisis dan mengevaluasi risiko untuk menentukan tingkat kemungkinan dan dampaknya;
3. mengembangkan strategi pengendalian risiko untuk mengurangi atau menghilangkan dampak risiko; dan
4. memantau dan mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko.

Jenis risiko:
1. risiko keuangan (misalnya, keterlambatan pembayaran, kekurangan dana);
2. risiko operasional (misalnya, kegagalan infrastruktur, gangguan layanan);
3. risiko lingkungan (misalnya, polusi, bencana alam); dan
4. risiko sosial (misalnya, konflik masyarakat, keamanan).

Langkah-Langkah Manajemen Resiko:
1. identifikasi risiko, yakni mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra dan kegiatan operasional dinas;
2. analisis risiko, yakni menganalisis risiko untuk menentukan tingkat kemungkinan dan dampaknya;
3. evaluasi risiko, yakni mengevaluasi risiko untuk menentukan prioritas pengendalian;
4. pengendalian risiko, yakni mengembangkan strategi pengendalian risiko untuk mengurangi atau menghilangkan dampak risiko; dan
5. pemantauan dan evaluasi, yakni memantau dan mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko.

Dengan melakukan manajemen resiko, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampaknya jika risiko tersebut terjadi.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.1 Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran..... 11
2.2 Permasalahan dan Isu Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran..... 21
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029 26
3.2 Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029 26
3.3 Strategi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029 28
3.4 Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029 30
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan 33
4.2 Penyelenggaraan Bidang Urusan 54
BAB V PENUTUP 56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jumlah Pegawai	16
Tabel 2.2	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan	16
Tabel 2.3	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan	16
Tabel 2.4	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Diklat Struktural	17
Tabel 2.5	Aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	18
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020-2024	19
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan	21
Tabel 2.8	Isu strategi Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	23
Tabel 3.1	Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029	27
Tabel 3.2	Strategi Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029	28
Tabel 3.3	Strategi Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029	28
Tabel 3.4	Pentahapan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2030	30
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029.....	30
Tabel 4.1	Program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	33
Tabel 4.2	Kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	37
Tabel 4.3	Uraian Sub Kegiatan Kinerja,Indikator,Target,dan Pagu Indikatif	44
Tabel 4.4	Sub kegiatan dalam mendukung Program Prioritas pembangunan daerah	53
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	54
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja dan Pamadam Kebakaran	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai 15

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program Rensta..... 35

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan penjabaran dari RPJMD untuk periode 5 tahun yaitu 2025-2029. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program tujuan, sasaran, kebijakan, program Kepala Daerah terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, program lintas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, program kegiatan, rencana kerja dalam rangka deregulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam menyusun Renstra disamping mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa:

1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyusun Renstra dengan berpedoman pada RPJMD.
2) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk capaian sasaran pembangunan nasional.
4) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta berpedoman kepada RPJMD.

Renstra tahun 2025-2029 disusun untuk menjamin kesinambungan pembangunan Daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelyanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik

pada aspek pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam waktu 5 (lima) tahun.

Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan yang disusun oleh setiap Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu dalam penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Provinsi untuk menyelaraskan program pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Pelaksanaan Renstra setiap tahunnya akan di jabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat program dan kegiatan tahunan yang ada di Renstra PD. Sehingga Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebagaimana menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM)

Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Sedangkan Pemadam Kebakaran pada Pasal 7 dijelaskan bahwa Damkar bertugas salah satunya adalah melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam dacrah kabupaten/kota.

Prinsip otonomi daerah sendiri saat ini adalah prinsip pembangunan seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang telah ditetapkan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian peranan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat penting sebagai Aparat Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah karena daerah dituntut untuk meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan suatu lembaga yang harus ada dan mandiri serta dibutuhkan dalam tatanan Pemerintahan Daerah. Dimana kewenangan Satpol PP dan Damkar diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 136 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kepulauan Mentawai,bahwa fungsi satpol pp dan damkar adalah sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan daerah urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyrakat;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan ketentran dan keretiban umum serta perlindungan masyarakat;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan keretiban umum serta perlindungan masyarakat;
d. Pelaksanaan administrasi urusan ketentraman dan keretiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu dokumen Renstra juga menjadi pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4).

29. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, peraturan/regulasi yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang menggambarkan visi, misi, strategis, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dibidang pelayanan kepada

masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen Renstra tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah serta indikator Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Untuk menentukan sasaran, strategi, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas dalam jangka menengah.
3. Untuk dasar penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akun-tabel.

Adapun tujuan penyusunan Renstra tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Periode 2025-2029.
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan.
3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029.
4. Menetapkan indikator kinerja sasaran dan tujuan daerah, serta indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah periode 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra. Bab ini terdiri atas:

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMDAM KEBAKARAN

Bab ini menggambarkan tentang gambaran umum tentang aspek dan pelayanan, permasalahan yang dihadapi dan isu strategis dalam menjalankan pelayanan dan pelaksanaan tugas urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Bab ini terdiri atas:

2.1 Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Bab ini terdiri atas:

3.1 Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Pada Bab memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan kenerja penyelenggaraan urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Bab ini terdiri atas:

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Pada Bab Penutup, disajikan upaya pengendalian dan evaluasi implementasi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

2.1 Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP adalah aparat pemerintah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 136 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dipimpin oleh pejabat eselon II b (Kepala Satuan) dengan susunan organisasi adalah sebagai berikut Satuan

a. Sekretariat membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
b. Bidang Operasional dan Intelejen membawahi

1. Seksi Operasional; dan
2. Seksi Inteligen

c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah membawahi :

1. Seksi Penegakan
2. Seksi Tindak Internal

d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran membawahi:

1. Seksi Perlindungan Masyarakat
2. Seksi Pemadam Kebakaran

Secara rinci Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2018 antara lain :

Satuan

Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. adalah sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan Daerah urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
b. pelaksanaan kebijakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
d. Pelaksanaan administrasi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan adminitrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkup satuan

Beberapa Fungsi Sekretariat adalah:

a. Koordinasi penyusunan rencana program,anggaran,evaluasi dan pelaporan satuan;

b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputih kepegawaian,ketatausahaan,keuangan,kerumah tanggan,kerja sama,hubungan masyarakat,kearsipan, dan dokumentasi lingkup satuan;
c. Penataan organisasi dan tata laksana lingkup satuan;
d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan lingkup satuan;
e. Pengelolaan barang milik daerah lingkup satuan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas sebagai berikut:

a) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Satuan;
b) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satuan;
c) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup Satuan;
d) melaksanakan penyia[an bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup Satuan;
e) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Satuan;
f) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Satuan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas sebagai berikut:

a) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup Satuan;
b) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Satuan;
c) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Satuan;
d) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keunagan lingkup Satuan;

e) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik Daerah lingkup Satuan; dan

f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Operasional dan intelejen

Bidang ini mempunyai tugas Membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Ketenteramandan Ketertiban Umum. Beberapa fungsinya adalah:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Operasional dan intelejen;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Operasional dan intelejen;
c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang Operasional dan intelejen;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan bidang penegakan hukum daerah. Beberapa fungsinya sebagai berikut:

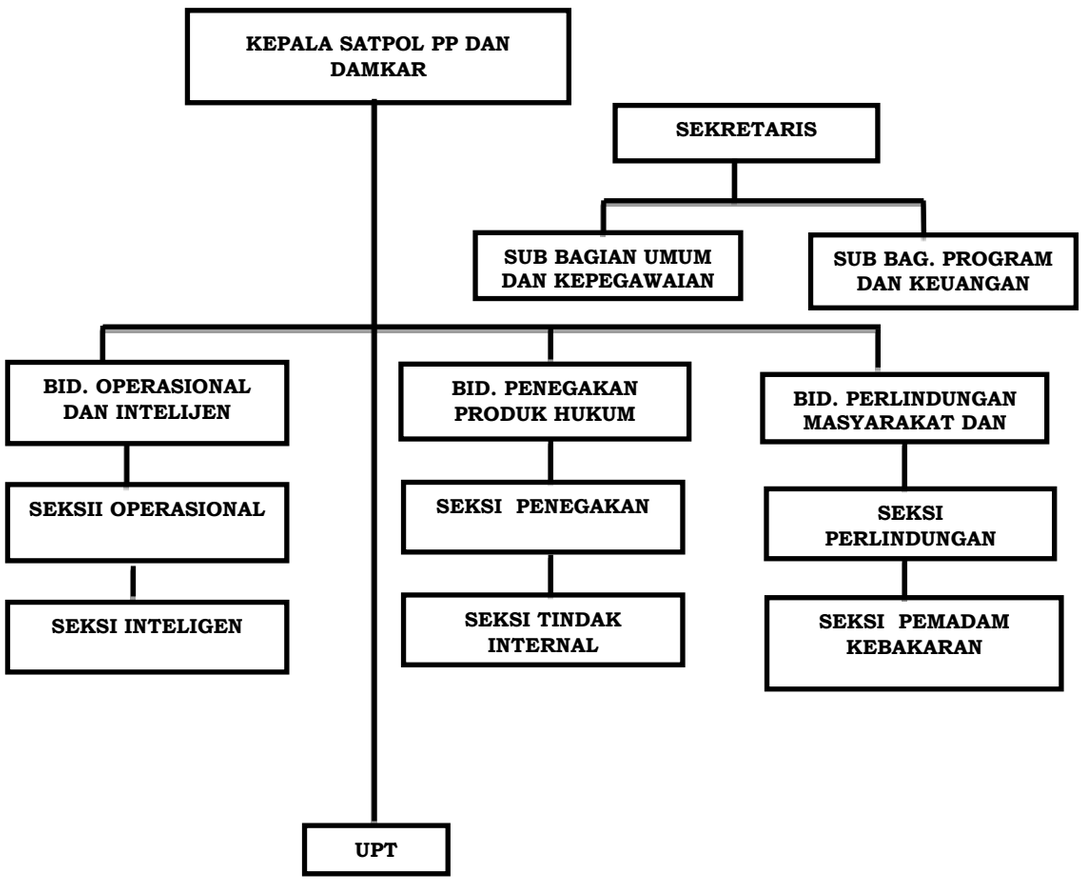
e. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
f. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,pelaksanaan kebijakan,serta evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. Bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran Mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1
Stuktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai



2.1.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai didukung oleh Sumber Daya Aparatur sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jumlah Pegawai

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
Aparatur Sipil Negara				
1.	Kepala Dinas	1		38
2.	Sekretaris	1		
3.	Kepala Bidang OPS		1	
4.	Kepala Bidang PPHD	1		
5.	Kepala Bidang Damkar	1		
6.	Kasubag Program dan Keuangan		1	
7.	Kasubag Umum dan Kepegawaian		1	
8.	Kasi PPHD	1		
9.	Kasi Tindak Internal		1	
10.	Kasi Linmas	1		
11.	Kasi Operasional		1	
12.	Kasi Intelijen	1		
13.	Staf Skretariat	5	1	
14.	Staf Bidang OPS	4		
15.	Staf Bidang PPHD	2		
16.	Staf Bidang Damkar	3		
17.	PPPK	7	4	
Pegawai Kotrak				
1.	Anggota Damkar	41		134
2.	Anggota Banpol PP	73	5	
3.	Tenaga Administrasi	3	1	
4.	Tenaga Kebersihan	2	2	
5.	Sopir	7		
Jumlah		126	8	172

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	PASCA SARJANA (S-2)	7
2.	SARJANA (S-1)	15
3.	Diploma (DIII)	1
4.	SLTA	149
5.	SMP	-
6.	SD	-
	Jumlah	172

Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	6
2.	Golongan III	13
3.	Golongan II	9
4.	Golongan I	-
Jumlah		28

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Tabel 2.4
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Diklat Struktural

No.	Jenis Diklat	Jumlah (Orang)
1.	Struktural	6
2.	PPNS	1
3.	Diklat Dasar Pol PP	43
4.	Diklat Damkar I	44
5.	Diklat Inspektur	1
Jumlah		95

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa sumber daya aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 172 pegawai, yang terdiri dari 158 laki-laki dan 18 perempuan. Dari total tersebut, terdapat 38 ASN yaitu 27 PNS dan 11 orang PPPK serta 134 pegawai kontrak yang meliputi tenaga administrasi, sopir, kebersihan, anggota Banpol PP, dan anggota Damkar. Secara struktural, jabatan yang ada meliputi Kepala Dinas, Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, 2 (dua) Kasubag, serta beberapa Kasi yang menangani bidang operasional, penegakan peraturan, dan ketertiban umum. Kemudian pada Tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa dari aspek tingkat pendidikan, aparatur didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 149 orang, diikuti Sarjana (S-1) sebanyak 15 orang, Pascasarjana (S-2) sebanyak 6 orang, dan Diploma (D-III) sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan menengah, sementara tingkat pendidikan tinggi masih terbatas pada sebagian kecil ASN.

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 5 orang berada pada golongan IV, 13 orang pada golongan III, dan 9 orang pada golongan II, sedangkan tidak terdapat pegawai pada golongan I. Kondisi ini menggambarkan bahwa mayoritas ASN berada pada jenjang karier menengah, dengan sebagian kecil telah mencapai golongan tinggi. Sementara itu, pada Tabel 2.4 dari sisi pelatihan dan pengembangan kompetensi, tercatat ada 6 orang telah mengikuti diklat struktural, 1 orang memiliki sertifikasi sebagai PPNS, 43 orang mengikuti Diklat Dasar Pol PP, 44 orang telah menyelesaikan Diklat Damkar I, serta 1 orang telah mengikuti Diklat Inspektur. Data ini mencerminkan adanya upaya peningkatan kapasitas aparatur, terutama dalam bidang teknis operasional Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, guna mendukung profesionalisme dan kualitas pelayanan di lapangan.

Dalam menunjang tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung seluruh pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga sebagai input atau (capital) dalam proses pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk mencapai tujuan organisasi.

Tabel 2.5

Aset Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No.	Jenis Sarana	Jumlah (unit)	Kondisi
1.	Gedung Kantor	1	Baik
2.	Kendaraan Roda 4	5	3 Baik 2 RB
3.	Kendaraan Roda 2	28	20 baik 8 RB
4.	Kendaraan roda 6	6	5 Baik 1 RB

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan data pada Tabel 2.5, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki berbagai aset pendukung operasional yang terdiri dari 1 unit gedung kantor dalam kondisi baik, 5 unit kendaraan roda empat dengan 3 unit dalam kondisi baik dan 2 unit rusak berat, 28 unit kendaraan roda dua yang terdiri dari 20 unit dalam kondisi baik dan 8 unit rusak berat, serta 6 unit kendaraan roda enam dengan 5 unit dalam kondisi baik dan 1 unit rusak berat. Secara umum, kondisi aset yang dimiliki masih tergolong layak dan dapat digunakan, meskipun terdapat beberapa sarana yang perlu dilakukan perawatan dan peremajaan agar dapat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran secara optimal.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pengukuran indikator kinerja utama pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan pada Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah yang menekankan pada integrasi seluruh proses, mulai dari perencanaan kinerja, penetapan indikator, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi, dalam satu sistem yang komprehensif.

Tabel 2.6

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/indikator kinerja utama (IKU)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	70 persen	70 persen	75 persen	78 persen	78 persen
2	Persentase Penanganan bahaya Kebakaran	40 persen	45 persen	45 persen	50 persen	75 persen
3	Nilai LAKIP	B	B	BB	BB	BB
4	Jumlah inovasi yang diterapkan	0	0	0	0	0
5	Persentase capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	95,00	93,00	95,59	95,00	97,24
6	Persentase Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	56	70	75	89	
7	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	78	80	85	85	89
8	Persentase pelayanan penyelamatan dan dievakuasi korban kebakaran	40	45	45	50	70
9	Waktu tanggap (respons tim) penanganan kebakaran	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit

Sumber: Sekretariat Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan data pada Tabel 2.6, kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai pada periode tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Pada indikator penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, capaian kinerja meningkat secara bertahap dari 70 persen pada tahun 2020 dan 2021, menjadi 75 persen pada tahun 2022, serta 78 persen pada tahun 2023 dan 2024, yang menggambarkan konsistensi dalam peningkatan efektivitas penegakan peraturan di daerah. Sementara itu, penanganan bahaya kebakaran juga menunjukkan kemajuan signifikan, dari 40 persen pada tahun 2020 meningkat hingga mencapai 75 persen pada tahun 2024,

menandakan peningkatan kapasitas dan responsivitas bidang pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugasnya.

Dari sisi akuntabilitas kinerja, hasil LAKIP mengalami peningkatan dengan nilai B pada tahun 2020–2021 dan meningkat menjadi BB pada tahun 2022 hingga 2024, yang menunjukkan perbaikan tata kelola dan pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Namun, pada indikator jumlah inovasi yang diterapkan, belum terdapat capaian selama periode tersebut, yang mengindikasikan perlunya dorongan dalam pengembangan inovasi pelayanan. Adapun persentase capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara keseluruhan menunjukkan hasil yang stabil dan tinggi, dengan capaian rata-rata di atas 93 persen dan mencapai 97,24 persen pada tahun 2024, mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Kemudian pada kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di berbagai aspek. Pada indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan, terjadi peningkatan yang konsisten dari 56 persen pada tahun 2020 menjadi 89 persen pada tahun 2023, yang mencerminkan meningkatnya efektivitas aparat Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat secara cepat dan tepat. Sementara itu, persentase Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditegakkan juga mengalami kemajuan dari 78 persen pada tahun 2020 menjadi 89 persen pada tahun 2024, menunjukkan adanya peningkatan komitmen dan kinerja dalam pelaksanaan fungsi penegakan peraturan daerah. Pada bidang pemadam kebakaran, persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran meningkat dari 40 persen pada tahun 2020 menjadi 70 persen pada tahun 2024, menggambarkan peningkatan kapasitas, kesiapsiagaan, serta kecepatan tim dalam memberikan layanan penyelamatan kepada Masyarakat.

Selain itu, waktu tanggap (response time) dalam penanganan kebakaran tetap terjaga stabil selama lima tahun terakhir, yakni rata-rata 15 menit, yang menandakan adanya konsistensi dalam kecepatan dan kesiapan petugas dalam menghadapi kejadian darurat kebakaran. Secara

keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berhasil meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan terhadap masyarakat dan aset daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kelompok sasaran layanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepuluan Mentawai Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. melakukan pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat demi menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, adapun dalam menjalankan tugas layanan sesuai dengan SOP.
b. sebelum melaksanakan tugas dibutuhkan perencanaan yang matang dengan melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi dengan dinas terkait serta jajaran samping (TNI/POLRI) dan Trantib Kecamatan guna meminimalkan hasil capaian penertiban.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan yang ditemui perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh sebagaimana yang petakan dalam Tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih ada pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tidak maksimal nya penegakan PERDA dan PERKADA	1. Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait 2. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap perda yang menjadi kewenangannya 3. Masih adanya pelanggaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			perda dan perkada yang terulang kembali 4. Penegakan perda selama ini belum memberikan efek jera kepada masyarakat
2	Masih belum mengertinya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja terhadap tugas dan fungsinya	Tidak memahami tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan SOP	Belum terlaksananya diklat dasar kepamongprajaan

2.2.2 Isu Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Isu-isu strategi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum sangat dipengaruhi oleh konteks perencanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum pada skala nasional. sebagaimana ketenteraman, keamanan dan ketertiban di Kepulauan Mentawai juga menjadi isu dan permasalahan strategis.

Pengembangan keamanan dan ketenteraman umum bagi masyarakat yang aman dan kondusif diatas dinamika sosial ekonomi, hukum dan politik yang demokratis dan transparan, sehingga kebablasan beraktifitas bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Beberapa isu strategis Satpol PP dan Damkar adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia Personil Satpol PP dan Damkar yang perlu ditingkatkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
b. Perlu adanya keseriusan pemerintah serta dukungan anggaran bagi Satpol PP dan Damkar.
c. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk Patroli
d. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.
e. Masih kurangnya Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan Tibum dan Kebakaran.
f. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintahan desa dan dusun dalam rangka meningkatkan ketertiban umum.
g. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran masih terbat

Tabel 2.8
Isu Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISULINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi besar di bidang pariwisata, kelautan, dan perikanan yang membutuhkan jaminan ketertiban umum, keamanan, dan perlindungan masyarakat.	Keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur Satpol PP dan Damkar di tingkat kecamatan dan desa.	Peningkatan risiko bencana kebakaran akibat perubahan iklim dan kekeringan berkepanjangan.	Perubahan iklim global yang meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana kebakaran hutan dan lahan.	Implementasi kebijakan nasional terkait ketertiban umum, penegakan hukum daerah, dan pengendalian kebakaran hutan/lahan.	Ancaman kebakaran di wilayah padat pemukiman dan fasilitas umum di kawasan pesisir.	Penguatan kapasitas dan profesionalitas Satpol PP dan Damkar dalam mewujudkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di wilayah kepulauan.
Karakter wilayah kepulauan dengan jarak antar pulau yang cukup jauh memerlukan sistem pengawasan dan pelayanan penegakan Perda yang adaptif dan berbasis teknologi.	Minimnya sarana dan prasarana pendukung seperti kendaraan patroli, mobil pemadam, dan peralatan keselamatan.	Keterkaitan antara penataan ruang wilayah, pembangunan pemukiman, dan pengelolaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik lahan atau gangguan ketertiban.	Komitmen global terhadap pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketahanan iklim (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction).	Penyesuaian dengan arah pembangunan nasional berketahanan iklim dan pengurangan risiko bencana.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pencegahan kebakaran.	Pengembangan sistem pelayanan tanggap darurat kebakaran yang cepat dan berbasis komunitas.
Potensi sumber daya manusia lokal dapat diberdayakan sebagai aparatur penegak ketertiban dan relawan pemadam kebakaran di wilayah	Keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur Satpol PP dan Damkar di tingkat kecamatan dan desa.	Perlunya integrasi perencanaan Satpol PP dan Damkar dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan	Dorongan menuju tata kelola pemerintahan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.	Penguatan kelembagaan dan kapasitas daerah dalam penegakan perda dan perlindungan	Terbatasnya pelatihan tematik Lokal(Kearifan lokal, mitigasi bencana)	Integrasi fungsi penegakan Perda, penanggulangan kebakaran, dan ketahanan lingkungan dalam pembangunan daerah berkelanjutan.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISULINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
terpencil.		daya dukung lingkungan.		masyarakat sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014.		
	Minimnya sarana dan prasarana pendukung seperti kendaraan patroli, mobil pemadam, dan peralatan keselamatan.	Keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mitigasi kebakaran hutan atau lahan di wilayah permukiman.			Kondisi geografis kepulauan yang menyebabkan keterlambatan respons terhadap keadaan darurat.	Penguatan kelembangaan dan sistem pengembangan karir berbasis kinerja
	Belum optimalnya penegakan peraturan daerah dan pelaksanaan ketertiban umum.				Kebutuhan sistem kolaboratif antar pulau dalam penegakan perda dan penanggulangan kebakaran.	Optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah, instansi vertikal, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan aman, tertib, dan tangguh bencana.
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum, keselamatan, dan kesiapsiagaan bencana kebakaran.					
	Akses transportasi antar pulau yang sulit menghambat respon cepat terhadap kejadian kebakaran					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISULINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dan gangguan ketertiban.					

BAB III
TUJUAN, SASARAN ,STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama 5 tahun.

Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi pada akhir suatu periode, dan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator yang relevan. indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran serta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan rencana strategis pembangunan secara keseluruhan yang mengacu kepada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan masa jabatan 2025-2029.

Berdasarkan tabel 3.1 bahwasanya tujuan Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat”.

3.2 Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel 3.1 yang ada dibawah ini dapat disimpulkan bahwa sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ada 3 (tiga) sasaran. Sasaran pertama yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah,dimana target kinerja pada tahun 2025 adalah 78% sedangkan target kinerja pada tahun 2030 adalah 100%.

Pada sasaran kedua adalah Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi dengan Tingkat tanggap waktu respons 15 menit bahwa target kinerja pada tahun 2025 adalah 50% adapun target kinerja pada tahun 2030 adalah 100%.

Pada sasaran ketiga ada pada Meningkatnya akun tabilitas kinerja instansi pemerintah yang terdiri dari tiga indikator yaitu Nilai LAKIP, Inovasi, dan Persentase kinerja PD. Dimana pada indikator nilai lakip target kinerja pada tahun 2030 adalah BB. Kemudian pada indikator inovasi target kinerja dari tahun ke tahun berjumlah satu. Adapun indikator Persentase kinerja PD target kinerja pada tahun 2030 sebesar 100%.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		Persentase penurunan tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum	78	80	82	85	85	100
		Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda di Masyarakat (%)	75,0	77	79	81	83	85
		Persentase Layanan Penanganan Kebakaran (%)	81	82	82	82	82	82
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah	Persentase penegakan pelanggaran Peraturan Daerah (%)	78%	80%	82%	85%	85%	100%
	Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	Tingkat tanggap waktu respons 15 menit	50%	55%	60%	65%	70%	100%
	Meningkatnya akun tabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai LAKIP	B	BB	BB	BB	BB	BB
		Inovasi	1	1	1	1	1	1
		Persentase kinerja PD	70%	75%	80%	85%	89	100%

3.3 Strategi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029

Tabel 3.2

Strategi Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tahun 2025-2029

Tujuan	sasaran	strategi	lokasi
1	2	3	4
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum	1. Penguatan forum kerukunan umat beragama 2. Penguatan peran pemuda, perempuan, tokoh budaya dan tokoh masyarakat. 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan/bantuan hukum. 4. Penguatan fungsi forkopimda. 5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (Narkoba, Tawuran, LGBT, Judi dan judi online dan lainya).	Kabupaten kepulauan Mentawai

Berdasarkan tabel 3.2 tentang Strategi Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dijelaskan bahwa Satpol PP dan Damkar memiliki 5 (lima) strategi dengan lokasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 3.3

Strategi Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan	sasaran	strategi	lokasi
1	2	3	4
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum	1. Penguatan forum kerukunan umat beragama 2. Penguatan peran pemuda, perempuan, tokoh budaya dan tokoh masyarakat. 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan/bantuan hukum. 4. Penguatan fungsi forkopimda 5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (Narkoba, Tawuran, LGBT, Judi dan judi online dan lainya)	Kabupaten kepulauan Mentawai

Berdasarkan Tabel 3.3 tentang strategi pembangunan RPJMD Tahun 2025–2029, difokuskan pada upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang beradab, tenteram, dan imparsial. Tujuan tersebut diwujudkan melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap norma dan hukum sebagai dasar terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman sosial di daerah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi yang ditempuh antara lain melalui penguatan forum kerukunan umat beragama sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antarumat beragama guna menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman masyarakat Mentawai. Selain itu, dilakukan penguatan peran pemuda, perempuan, tokoh budaya, dan tokoh masyarakat dalam menjaga nilai-nilai moral dan sosial sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Upaya lainnya meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dan bantuan hukum, sehingga masyarakat dapat memperoleh keadilan dan perlindungan hukum secara lebih merata. Strategi ini juga diperkuat dengan penguatan fungsi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah, serta pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat seperti narkoba, tawuran, perjudian, dan praktik sosial menyimpang lainnya. Seluruh strategi ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara terintegrasi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berkarakter, tertib, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hukum.sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di atas bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan masing-masing komponen.

Pentahapan Rencana Strategis Tahun 2025–2029 dilaksanakan agar menjadi fokus perencanaan perangkat daerah mengarah pada prioritas pembangunan setiap tahunnya. Prioritas pembangunan pada perangkat daerah merupakan tema atau agenda pembangunan perangkat daerah tahunan yang menjadi benang merah capaian antara menuju tujuan dan sasaran 5 (lima) tahunan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui rencana program perangkat daerah tahunan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 3.4
Pentahapan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tahun 2025-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Konsolidasi kelembagaan, peningkatan disiplin, dan penguatan kapasitas aparatur Satpol PP dan Damkar.	Peningkatan kinerja pelayanan penegakan perda dan perlindungan masyarakat.	Penguatan koordinasi lintas sektor dan penerapan sistem terpadu penegakan perda serta penanggulangan kebakaran.	Modernisasi pelayanan publik, digitalisasi sistem kerja, dan peningkatan efektivitas koordinasi daerah.	Konsolidasi hasil pembangunan dan penguatan kemandirian kelembagaan Satpol PP dan Damkar.

3.4 Arah Kebijakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah pedoman dan strategi utama yang dirumuskan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD, menyajikan langkah konkret dan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi daerah tersebut. Arah kebijakan ini menjelaskan bagaimana perangkat daerah akan mengimplementasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam periode 5 tahun. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah berperan sebagai peta jalan yang mengarahkan perangkat daerah untuk fokus pada prioritas pembangunan, mengelola sumber daya secara efektif, dan mencapai target kinerja sesuai dengan mandat RPJMD dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial	Misi 7: Mewujudkan Masyarakat yang Aman Harmonis dan Berkeadilan.	Pelaporan kinerja berbasis bukti yang relevan. Menguatkan peran forum-forum strategi daerah Forum Kerukunan UmaT Beragama (FKUB), Forkopimda dalam mencegah dan memediasi isu-isu sensitif seperti toleransi, diskriminasi dan konflik sosial.	
			Penguatan peran tokoh agama dalam meningkatkan kapasitas kerohanian umat/masyarakat untuk	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
			mencegah terjadinya potensi pelanggaran norma dan hukum.	
			Kolaborasi lintas sektor dalam memberikan advokasi dan penyuluhan hukum terhadap penyakit masyarakat (Narkoba, Tawuran, LGBT, Judi dan judi online dan lainya). Penguatan literasi digital dan media sosial di kalangan remaja dan keluarga untuk mencegah paparan konten negatif, kekerasan digital, dan promosi judi online	

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas dapat dijelaskan bahwa arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan masing-masing komponen. Kemudian diturunkan pada sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, dan indikator kegiatan. Hal tersebut bertujuan untuk melihat hierarki kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang harus konsisten dan relevan dengan pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan Tabel 3.5 diatas dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai:

1. Penguatan terhadap pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) melalui penyediaan tempat pengaduan laporan masyarakat secara online dan offline,membentuk tim yang respons,cepat tanggap dan akurat sedangkan untuk pelayanan penyelamatan dan dievakuasi korban kebakaran sigap dengan laporan online maupun offline,dan waktu respons kebakaran dan dievakuasi penyelamatan serta monitoring hasil evaluasi
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan agar tujuan SPM dan cpaian kinerja satpol pp dan damkar tercapai
3. Peningkatan kapasitas aparatur dengan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan baik anggota Satpol PP dan Damkar

4. Pencapaian tujuan yaitu terwujudnya kabupaten kepulauan mentawai sesuai dengan RPJMD,serta tercipta nya ketentraman dan ketertiban umum
5. Evaluasi dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta mengidentifikasi risiko yang terjadi.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan semua sumber daya sebagai masukan, untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk SDM, barang jasa atau modal. Rencana program selama 5 tahun Renstra PD 2025-2029, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program - program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Tahun 2025-2029. Kemudian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan, dinyatakan dalam persentase dan dalam satuan rupiah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Secara lebih terperinci rencana program, kegiatan dan pendanaan SKPD meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal, kondisi akhir dan target pendanaan indikatif disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

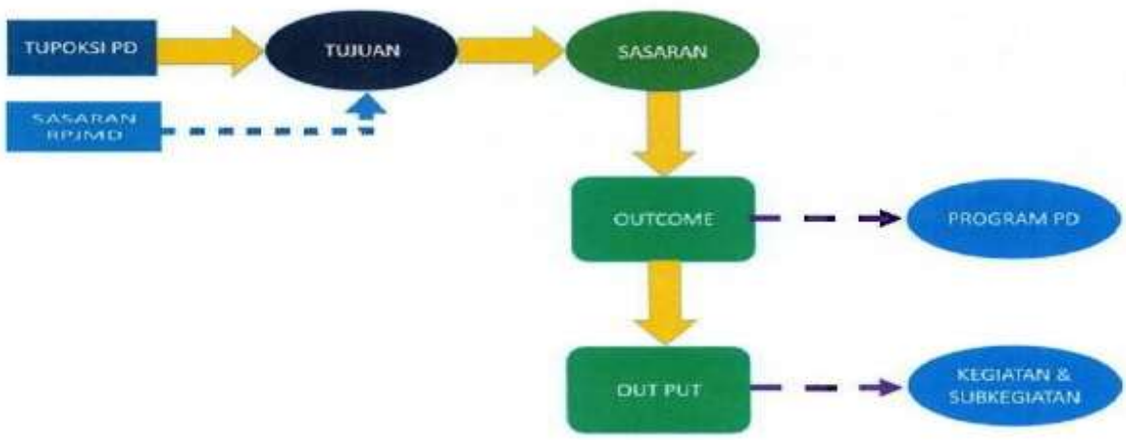
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan pokok yang dilaksanakan:		
	1	Kegiatan Administrasi Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dengan Sub kegiatan :	
		a.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
		b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	2	Kegiatan administrasi umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	

		Kebakaran, dengan Sub Kegiatan :	
		a.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
		b.	Penyediaan peralatan rumah tangga
		c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		d.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :	
		a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		b.	Penyediaan pelayanan umum kantor
	4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :	
		a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajakPenyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak
		b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		c.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
		d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya
II.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		a.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
		b.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
	2	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
		a.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
III	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		a.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		b.	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
		c.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan,penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri
		d.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan Pemerintahan Daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra bahwa Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program Rensta



Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program - program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Tahun 2025-2029. Kemudian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan, dinyatakan dalam persentase dan dalam satuan rupiah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Pada satpol pp dan damkr dalam melaksanakan kegiatannya dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2
Kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mewujudkan masyarakat yang aman harmonis dan berkeadilan	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat				Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda di Masyarakat (%)		
					Persentase Layanan Penanganan Kebakaran (%)		
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah					
			Terwujudnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah secara berkelanjutan.	Jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pelibatan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah meningkat.	Persentase tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase penurunan pelanggaran perda/perkada	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelanggaran dan Pengaduan trantibum dalam	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					kab /kota yang ditangani	dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	
					Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggara dan ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat provinsi	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ket masyarakat tingkat kabupaten / kota	
					Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan tindakan	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
				Presentase Jumlah PPNS yang Aktif	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pelayanan waktu tanggap penanganan kebakaran dan penyelematan		Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Terselenggaranya pelayanan penanganan kebakaran dan penyelamatan dengan waktu tanggap yang lebih cepat dan tepat	Persentase pelayanan penanganan kebakaran dan penyelamatan yang dilaksanakan sesuai standar waktu tanggap	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui pencegahan,penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja perangkat Daerah			Nilai Lakip		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani		Meningkatnya Kualitas Kinerja perangkat Daerah			Jumlah Inovasi yang diterapkan		
					Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah		
			Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan Tugas			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Peangkat Daerah	
				Terlaksananya		Administrasi Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				pelayanan administrasi umum		Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2030, arah pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini difokuskan pada peningkatan efektivitas pelayanan publik, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pencapaian target kinerja tahun 2026–2030 yang selaras dengan visi daerah untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, dan berdaya tanggap terhadap bencana kebakaran.

Selama periode 2026–2030, target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diarahkan untuk meningkatkan persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta peningkatan respons dan efektivitas penanggulangan kebakaran. Hal ini sejalan dengan strategi pelaksanaan program yang tercantum dalam tabel, di mana kegiatan diarahkan untuk memperkuat fungsi penegakan hukum daerah melalui pembinaan dan pengembangan kapasitas PPNS, peningkatan koordinasi dengan Forkopimda, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban. Dengan dukungan kegiatan yang berkesinambungan, pemerintah daerah menargetkan peningkatan capaian indikator kinerja kunci (IKK) seperti penyelesaian gangguan ketertiban umum hingga di atas 90% dan penegakan Perda dan Perkada mencapai 95% pada akhir periode 2030.

Di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, target kinerja diarahkan pada peningkatan persentase keberhasilan penanganan kebakaran hingga mencapai 80% pada tahun 2030, dengan waktu tanggap darurat (response time) yang tetap dipertahankan di kisaran 15 menit. Untuk mendukung pencapaian tersebut, berbagai kegiatan dilakukan, seperti penguatan sistem komando kebakaran, peningkatan kemampuan teknis personel, serta pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat di setiap kecamatan terus ditingkatkan guna membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko kebakaran dan bencana lainnya.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026–2030 diarahkan agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan fokus pada peningkatan capaian kinerja pelayanan publik yang terukur dan berorientasi

hasil (outcome based). Melalui penguatan peran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, diharapkan tercipta kondisi daerah yang lebih tertib, aman, dan responsif, dengan pelayanan yang semakin profesional, cepat, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 4.3
Uraian Sub kegiatan Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Bidang Urusan/Pro Gram/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ke										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	2.745.730.815	100 Persen	2.749.412.248	100 Persen	2.881.910.566	100 Persen	2.863.932.718	100 Persen	2.796.150.310	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, ketepatan waktu penyelesaian dokumen keuangan, dan kualitas laporan keuangan yang akurat serta tepat waktu.	45 orang	45 orang	3.357.200.000	45 orang	3.482.200.000	45 orang	3.497.200.000	45 orang	3.512.200.000	45 orang	3.527.200.000	
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang, 11 orang p3k	28 ASN,11 org p3k	3.254.000.000	28 ASN,11org p3k	3.379.000.000	28 ASN,11 org p3k	3.394.000.000	28 ASN,11 org p3k	3.409.000.000	28 ASN,11 org p3k	3.424.000.000	
Penyediaan pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Veñfikasi Keuangan SKPD	6 orang	6 orang	103.200.000	6 orang	103.200.000	6 orang	103.200.000	6 orang	103.200.000	6 orang	103.200.000	
Administrasi	Persentase	8	8	526.000.0	8 jenis,4	775.00	8	875.600.0	8	940.600.0	8	1.205.600.	

Bidang Urusan/Pro Gram/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ke									Ket
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	jenis, 4 paket ,12 laporan	jenis,4 paket, 12 laporan	00	paket,12 laporan	0.000	jenis,4 paket, 12 laporan	00	jenis,4 paket, 12 laporan	00	jenis,4 paket, 12 laporan	000	
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 jenis	8 jenis	10.000.000	8 jenis	30.000.000	8 jenis	40.000.000	8 jenis	50.000.000	8 jenis	60.000.000	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga disediakan	1 paket	1 paket	168.000.000	1 paket	275.000.000	1 paket	285.600.000	1 paket	300.600.000	1 paket	450.600.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	80.000.000	1 paket	90.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	170.000.000	1 paket	180.000.000	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetekan dan penggandaan Yang disediakan disediakan	2 paket	2 paket	18.000.000	2 paket	30.000.000	2 paket	45.000.000	2 paket	60.000.000	2 paket	65.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	250.000.000	12 laporan	350.000.000	12 laporan	355.000.000	12 laporan	360.000.000	12 laporan	450.000.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 rek,143 org	2 rek,143 org	1.750.000.000	2 rek,143 org	1.750.000.000	2 rek,143 org	1.750.000.000	2 rek,143 org	1.750.000.000	2 rek,143 org	1.750.000.000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber	Jumlah laporan	2 rekeni	2 rek	30.000.000	2 rek	30.000.000	2 rek	30.000.000	2 rek	30.000.000	2 rek	30.000.000	

Bidang Urusan/Pro Gram/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ke										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
daya air dan listrik	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	ng											
Penyediaan pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga kontrak yang menerima Gaji	143 orang	143	1.720.000.000	143	1.720.000.000	143	1.720.000.000	143	1.720.000.000	143	1.720.000.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42 unit	42 unit	1.805.000.000	42 unit	1.923.200.000	42 unit	2.103.800.000	42 unit	2.375.000.000	42 unit	2.339.800.000	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajakPenyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional yang dipelihara dan di bayarkan pajak nya	20 unit r-2, 6 unit r-6,3 unit r-4	20 unit r-2, 6 unit r-6,3 unit r-4	1.500.000.000	20 unit r-2, 6 unit r-6,3 unit r-4	1.500.000.000	20 unit r-2, 6 unit r-6,3 unit r-4	1.500.000.000	20 unit r-2, 6 unit r-6,3 unit r-4	1.500.000.000	20 unit r-2, 6 unit r-6,3 unit r-4	1.500.000.000	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipalihara	12 unit	12 unit	25.000.000	12 unit	25.000.000	12 unit	25.000.000	12 unit	25.000.000	12 unit	25.000.000	
Pemeliharaan/Rehabil	Jumlah	1	1	250.000.0	1 gedung	368.20	1	548.800.0	1	820.000.0	1	784.800.0	

Bidang Urusan/Pro Gram/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ke										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
itasi gedung kantor dan bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	gedung	gedung	00		0.000	gedung	00	gedung	00	gedung	00	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	55 Persen	55 Persen	274.573.082	60 Persen	349.268.075	65 Persen	356.551.686	68 Persen	361.670.071	70 Persen	365.390.638	
	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraa n Tibumtranmas	50 persen	55 persen	45.762.180	60 persen	58.211.346	65 persen	59.425.281	75 persen	60.278.345	80 persen	60.898.440	
	Persentase Penyelenggaraa n Tibumtranmas	50 persen	68 persen	91.524.361	70 persen	116.422.692	75 persen	118.850.562	78 persen	120.556.690	80 persen	121.796.879	
	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraa n ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	75 persen	75 persen	228.810.901	75 persen	291.056.729	80 persen	297.126.405	85 persen	301.391.726	90 persen	304.492.199	
	Persentase	65	68	91.524.36	70 Persen	116.42	75	118.850.5	78	120.556.6	80	121.796.8	

Bidang Urusan/Pro Gram/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ke										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Cakupan Perlindungan Masvarakat	Persen	Persen	1		2.692	Persen	62	Persen	90	Persen	79	
	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1	2 org	45.762.180	2 org	58.211.346	2 org	59.425.281	2 org	60.278.345	2 org	60.898.440	
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	75 Persen	78 Persen	91.524.361	80 Persen	116.422.692	82 Persen	118.850.562	85 Persen	120.556.690	90 Persen	121.796.879	
	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	10 Persen	20 persen	45.762.180	25 persen	58.211.346	25 persen	59.425.281	25 persen	60.278.345	25 persen	60.898.440	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1 laporan	3 laporan	325.500.000	3 laporan	349.250.000	3 laporan	364.25.000	3 laporan	378.000.000	3 laporan	387.000.000	
Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban	3 laporan	3 laporan	325.500.000	3 laporan	349.250.000	3 laporan	364.250.000	3 laporan	378.000.000	3 laporan	387.000.000	

Bidang Urusan/Pro Gram/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ke										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	umum dan perlindungan masyarakat												
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	75%	80%	457.621.803	82%	499.893.136	85%	510.317.870	86%	517.643.607	90%	522.968.702	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	457.621.803	100%	499.893.136	100%	510.317.870	100%	517.643.607	100%	522.968.702	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan,10 org,1 paket	12 laporan,10 org,1 paket	3.144.750.000	12 laporan, 10 org,1 paket	3.375.000.000	12 laporan,10 org,1 paket	3.520.500.000	12 laporan,10 org,1 paket	3.651.000.000	12 laporan,10 org,1 paket	3.738.000.000	
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 laporan	12 laporan	1.048.250.000.000	12 laporan	1.125.000.000	12 laporan	1.173.500.000	12 laporan	1.217.000.000	12 laporan	1.246.500.000	
Pembinaan Aparatur	Jumlah Sarana	10 org	10 org	1.048.250	10 org	1.125.0	10 org	1.173.500	10 org	1.217.000	10 org	1.246.000.	

Bidang Urusan/Pro Gram/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ke									Ket
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemadam Kebakaran	dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			.000.000		00.000		.000		.000		000	
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 paket	1 paket	1.048.250 .000.000	1 paket	1.125.0 00.000	1 paket	1.173.500 .000	1 paket	1.217.000 .000	1 paket	1.246.000. 000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegah an Kebakara n	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	520 org	500	1.048.250 .000	500 org	1.125.0 00.000	500 org	1.173.500 .000	500 org	1.217.000 .000	500 org	1.246.000. 000	520 org
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan	520 org	500	1.048.250 .000	500 org	1.125.0 00.000	500 org	1.173.500 .000	500 org	1.217.000 .000	500 org	1.246.000. 000	

Bidang Urusan/Pro Gram/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun Ke										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan												

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program - program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Tahun 2025-2029. program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah Pada Satpol PP dan Damkar. dalam melaksanakan kegiatannya dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini:

. Tabel 4.4
Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Progran Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang kondusif	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	
			Pencegahan gangguan Trantibum melalui deteksi dini dan patroli	
			Penindakan pelanggaran Perda/Perkada dan penanganan unjuk rasa	
			Koordinasi penyelenggaraan Trantibum dan Linmas tingkat kabupaten	
			Pembinaan dan peningkatan kapasitas PPNS Satpol PP dan Informasi Kepegawaian ASN	
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran serta Non Kebakaran	Meningkatnya kemampuan penanganan kebakaran dan penyelamatan korban dengan cepat dan tepat	Pencegahan kebakaran melalui sosialisasi dan pengawasan	
			Pengendalian dan pemadaman kebakaran di wilayah kabupaten	
			Penyelamatan korban kebakaran dan bencana non-kebakaran	
			Pengadaan sarana prasarana Damkar dan alat pelindung diri	
3.	Program Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terwujudnya SDM pemadam kebakaran yang profesional dan tangguh dalam penanggulangan kebakaran	Pelatihan dan sertifikasi aparatur Damkar	
			Pembinaan kedisiplinan dan kesiapsiagaan petugas pemadam	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran	
			Pembentukan dan pembinaan relawan kebakaran (Community Fire Fighters)	
			Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok siaga kebakaran di tingkat desa/kelurahan	

4.2 Penyelenggaraan Bidang Urusan

Target kinerja pencapaian tujuan sasaran Renstra OPD melalui Indikator Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 5 tahun ke depan (2025-2029) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase penurunan tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum	78	80	82	85	85	100
Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda di Masyarakat (%)	75,0	77	79	81	83	85
Persentase Layanan Penanganan Kebakaran (%)	81	82	82	82	82	82
Persentase penegakan pelanggaran Peraturan Daerah (%)	78%	80%	82%	85%	85%	100%
Tingkat tanggap waktu respons 15 menit	50%	55%	60%	65%	70%	100%
Nilai LAKIP	B	BB	BB	BB	BB	BB
Inovasi	1	1	1	1	1	1
Persentase kinerja PD	70%	75%	80%	85%	89	100%

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Persentase penurunan tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2025 mencapai target 78% dimana target kinerja pada tahun 2030 sebesar 100%. Adapun Persentase penegakan pelanggaran Peraturan Daerah pada tahun 2025 78% dimana target kinerja pada tahun 2030 sebesar 100%. Dengan harapan persentase kinerja PD pada 2030 mencapai 100%.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Bidang Urusan/indikator	Satuan	Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	55	58	60	65	68	70
3	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	50	55	60	65	75	80
4	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	65	68	70	75	78	80
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan erkada serta penyelenggaraa n ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	persen	75	75	75	80	85	90
6	Persentase Cakupan Perlindungan Masvarakat	persen	65	68	70	75	78	80
7	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	persen	75	78	80	82	85	90
8	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	1	2	2	2	2	2
9	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	persen	10	20	25	25	25	25
10	Cakupan Penyebaran Informasi dan edukasi Rawan kebakaran	persen	75	80	82	85	86	90
11	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	persen	85	88	92	93	94	95

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada bidang urusan/indikator Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Indikator Kinerja Kunci tahun 2025 sebesar 65% dimana pada tahun 2030 target Indikator Kinerja Kuncinya mencapai 80%. Selanjutnya pada bidang urusan Cakupan Penyebaran Informasi dan edukasi Rawan kebakaran target Indikator Kinerja Kuncinya pada tahun 2030 sebesar 90%.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Renstra 2025-2029, merupakan dokumen yang strategis sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penyusunan Rencana Strategis berpedoman kepada dokumen Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029 serta dokumen lainnya dan masukan pemangku kepentingan. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 – 2029 mendukung memuat tujuan, sasaran, strategi pembangunan dan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Sehubungan dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 menjadi panduan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja, serta pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota, oleh karena itu kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Rencana Strategis ini digunakan secara fleksibel sesuai dengan perkembangan pembangunan sehingga dapat mulai berlaku dari tahun 2025 -2029. Kemudian dalam pelaksanaan anggarannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan.
b. Penetapan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator kinerja dalam Rencana Strategis 2025-2029 dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dan situasi serta kondisi.
c. Pada saat Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 belum tersusun dan untuk menjaga berkesinambungan

pembangunan serta mengisi kekosongan Rencana Kerja setelah Rencana Strategis 2025 - 2029 berakhir, maka Rencana Strategis 2025 - 2029 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.

d. Renstra ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD.

Demikian dibuat Rencana Strategis (Renstra) ini sebagai bahan SKPD dalam melaksanakan kegiatan 5 tahunan.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i
Daftar Isi..... ii
Daftar Tabel..... iii
Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 19

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029..... 29
3.2 Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029..... 30
3.3 Strategi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 31
3.4 Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029..... 31

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 39
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 65

BAB V PENUTUP 67

DAFTAR TABEL

2.1	Susunan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12
2.2	Kondisi Aktual Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	17
2.4	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024	17
2.5	Masalah Penanggulangan Bencana di Kepulauan Mentawai pada Tahap Pra Bencana	19
2.6	Masalah Penanggulangan Bencana di Kepulauan Mentawai pada Tahap Saat Tanggap Darurat	21
2.7	Masalah Penanggulangan Bencana di Kepulauan Mentawai pada Tahap Pasca Bencana	22
2.8	Isu Strategis Penanggulangan Bencana Daerah	28
3.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai	30
3.2	Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	30
3.3	Tujuan,Sasaran,Strategi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31
3.4	Penahapan Rencana Strategis	31
3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra	32
4.1	Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	41
4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra	41
4.3	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029	51
4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	63
4.5	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	65
4.6	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	65

Daftar Gambar

		Halaman
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9
Gambar 2.2	Grafik Tingkat Pendidikan Aparatur Perangkat Daerah	13
Gambar 2.3	Diagram Kegiatan Penanggulangan Bencana	15
Gambar 2.4	Kategori Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, dalam *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* 2015-2030 (Kerangka Kerja Sendai) telah dirumuskan hasil yang diharapkan dapat tercapai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana, sebagaimana juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kerangka penanggulangan bencana di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengenal adanya sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang instrumen utamanya terkait dengan sistem perencanaan pembangunan seperti Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Daerah (Renaksi PRBD), Rencana Kontinjensi (Renkon), dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis dan selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dalam periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menyusun Renstra berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029, Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2025-2029 dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Surat Edaran Bupati Nomor: 100.3.4.2-176 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Persiapan, dalam tahap persiapan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
    a. Pembentukan tim penyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, mencakup peraturan perundang-undangan, panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan anggaran, literatur tentang perencanaan dan penganggaran;
    c. Penyusunan agenda kerja tim Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    d. Pengumpulan data dan informasi, antara lain peraturan perundang-undangan yang terkait, kebijakan pemerintah terkait, dokumen RPJMD, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Renstra Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, kementerian/lembaga (K/L) terkait, serta hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.
2. Penyusunan Rancangan, rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:

a. Perumusan rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan RPJMD yang terdiri dari:
    1. Pengolahan data dan informasi;
    2. Analisis gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    3. Analisis Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat, K/L dan Renstra Perangkat Daerah
    4. Penelaahan RPB;
    5. Perumusan isu-isu strategis;
    6. Perumusan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    7. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    8. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
b. Penyajian rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Penyusunan Rancangan, rancangan akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, melalui dua tahap yaitu:
    a. Perumusan rancangan akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melalui kegiatan penajaman visi dan misi, penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
    b. Penyajian rancangan akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Penetapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   Rancangan akhir Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah melalui keputusan kepala daerah. Penetapan Perkada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan

Dengan ditetapkannya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Mentawai maka akan berfungsi antara lain sebagai:
a. Operasional RPJMD Tahun 2025-2029 di bidang penanggulangan bencana;
b. Dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
d. Kontrak kinerja kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan kepala daerah;
e. Landasan terwujudnya layanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merupakan penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
34. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
35. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis;
37. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
38. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
39. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan;
40. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;
41. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana;
42. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana;
43. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
44. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
45. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

46. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
47. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
48. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerahdengan Tugas dan Fungsi;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4);
55. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
56. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Tahun Anggaran 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor 63);
57. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 Nomor 12.

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, peraturan/regulasi yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Surat Edaran Bupati Kepulauan Mentawai Nomor:100.3.4.2-176 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

a. Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Mentawai ini dimaksudkan untuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, arahan kebijakan serta strategi pembinaan dan pemberdayaan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2025-2029.
b. Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara berkesinambungan.
c. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya dengan berbagai kendala, tantangan dan peluang.

Tujuan dari penyusunan Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

a. Memberikan pedoman pada sekretariat, bidang, sub bagian, seksi serta staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyusunan perencanaan serta dalam penentuan skala prioritas program dan kegiatan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun mendatang;
b. Mendukung upaya pencapaian arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029 di bidang penanggulangan bencana di Kepulauan Mentawai;
c. Menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang ada;
d. Sebagai salah satu instrumen evaluasi, monitoring dan mengukur kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

1.4 Sistematika Penulisan

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka struktur Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi acuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD. Bab ini terdiri atas:

1.1 Latar belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bab ini menggambarkan tentang gambaran umum tentang aspek dan pelayanan, permasalahan yang dihadapi dan isu strategis dalam menjalankan pelayanan dan pelaksanaan tugas urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bab ini terdiri atas:

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2025-2026). Bab ini terdiri atas:

3.1 Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025–2029
3.2 Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025–2029
3.3 Strategi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025–2029
3.4 Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025–2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan kenerja penyelenggaraan urusan bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bab ini terdiri atas:

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Pada Bab Penutup, disajikan upaya pengendalian dan evaluasi implementasi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki fungsi:

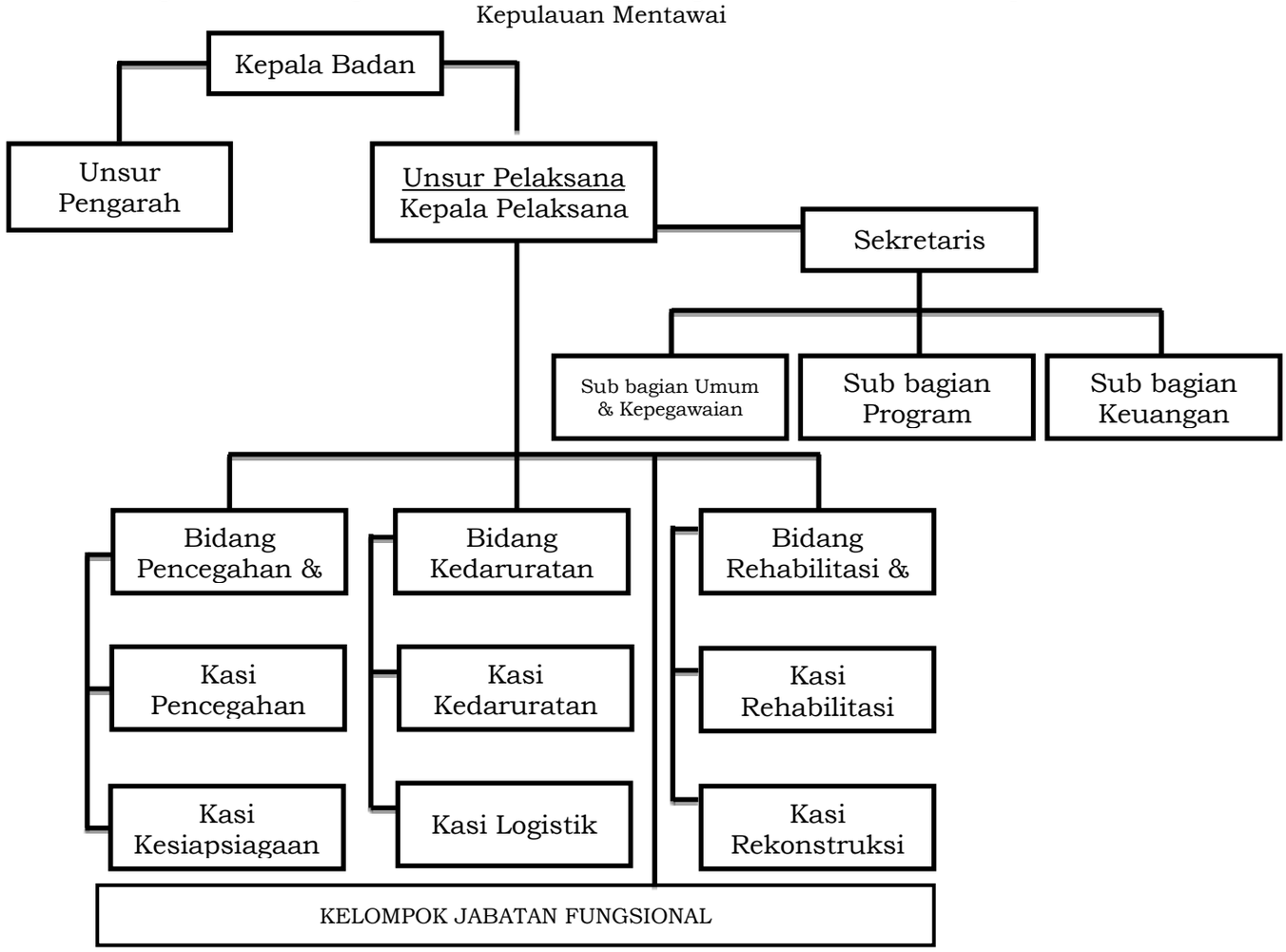
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. Pengkordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai 35 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari:

1. Unsur Kepala, Sekretaris Daerah (*ex-officio*)
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana
   a. Kepala Pelaksana
   b. Sekretariat Pelaksana, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Program;
      3. Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
      1. Seksi Pencegahan;
      2. Seksi Kesiapsiagaan.
   d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
      1. Seksi Kedaruratan;
      2. Seksi Logistik.
   e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
      1. Seksi Rehabilitasi;
      2. Seksi Rekonstruksi.
   f. Satuan Tugas (Fungsional) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)

Bagan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Oktober 2025

Sedangkan tugas dan fungsi unsur-unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Unsur Kepala, Sekretaris Daerah (*ex-officio*)
   Tugas :
   Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.
   Fungsi:
   a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
   b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
   c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Unsur Pengarah
   Tugas pokok dan fungsinya diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Unsur Pelaksana
   a. Kepala Pelaksana
   Tugas:
   Membantu kepala badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.
   Fungsi:
   1. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
   2. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
   3. Pengelolaan keuangan;
   4. Pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
   5. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tata laksana; dan

6. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat Pelaksana

Tugas :

Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Fungsi:

1. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Pembinaan fasilitasi tugas dan fungsi Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Sekretariat Pelaksana terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok:
      Memberikan pelayanan dan dukungan administrasi kepegawaian, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan aset, persuratan dan kerumahtanggaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
   b. Sub Bagian Program, mempunyai tugas pokok:
      Mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja.
   c. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok:
      Menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas :

Melaksanakan kegiatan pencegahan melalui pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tentang keamanan dan keselamatan yang berlaku dan melakukan segala upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik untuk menghadapi kemungkinan kegiatan penanganan bencana.

Fungsi:

1. Perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
3. Penyiapan pelatihan penanggulangan bencana alam;
4. Penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan logistik dan peralatan untuk menghadapi kemungkinan kegiatan penanganan bencana; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:

1. Seksi Pencegahan, mempunyai tugas :
   Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana melalui kegiatan pencegahan.
2. Seksi Kesiapsiagaan, mempunyai tugas :
   Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam penyiapan pelatihan, sarana dan prasarana serta dukungan logistik dalam rangka kesiapsiagaan dari kemungkinan terjadinya bencana.

d. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas :

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana, mengumpulkan data korban dan kerusakan di lokasi bencana, serta mengadakan, menerima, menyiapkan, dan menyalurkan bantuan logistik saat terjadi bencana.

Fungsi:

1. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan komando tanggap darurat bencana;
3. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

1. Seksi Kedaruratan, mempunyai tugas pokok:
   Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melakukan tindakan koordinasi penyelamatan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan keamanan saat terjadi bencana di lokasi terjadinya bencana.
2. Seksi Logistik, mempunyai tugas pokok:
   Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam rangka penyiapan dukungan logistik untuk kejadian bencana.

e. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas :

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan menganalisis, mengevaluasi rehabilitasi fisik terbatas, rehabilitasi mental, penyiapan rancangan konstruksi tahan gempa dalam rangka penanggulangan bencana.

Fungsi:

1. Perumusan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
3. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:

1. Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas pokok:
   Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kegiatan rehabilitasi serta pengendalian dan evaluasi kegiatan rehabilitasi akibat bencana.
2. Seksi Rekonstruksi, mempunyai tugas pokok:
   Melakukan sebagian tugas pokok Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kegiatan rekonstruksi serta pengendalian dan evaluasi kegiatan rekonstruksi akibat bencana.

f. Satuan Tugas (Fungsional) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)

Tugas :

Membantu kepala badan dalam menyelenggarakan komunikasi, koordinasi, komando, kendali secara efektif dan efisien melalui pengumpulan, pengolahan/analisis, verifikasi, pendistribusian data/informasi secara cepat, tepat dan akurat dalam pelaksanaan operasi penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Fungsi:

1. Pemantauan dan deteksi dini terhadap semua gejala, ancaman dan kejadian bencana di wilayah provinsi selama 24 jam/hari, 7 hari/minggu, serta secara terus-menerus membuat catatan dan laporan harian;
2. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi serta perkembangan mutakhir situasi ancaman dan kejadian bencana, selanjutnya dilaporkan kepada kepala badan sebagai bahan pertimbangan guna menentukan kebijakan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Menyampaikan secara luas (diseminasi) peringatan dini bencana atas otorisasi dari kepala badan kepada instansi/dinas terkait, stakeholder dan masyarakat daerah terancam bencana melalui semua sarana media informasi dan komunikasi.
4. Penyelenggaraan dukungan koordinasi dan komando antar instansi/lembaga yang terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
5. Penyelenggaraan sistem komunikasi data/informasi guna mendukung operasi penanggulangan bencana.
6. Pada status keadaan darurat bencana, Pusdalops PB ditingkatkan fungsinya

menjadi Posko Tanggap Darurat Bencana di bawah kendali operasi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

2.1.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Susunan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Mentawai berdasarkan jabatan, eselonering dan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

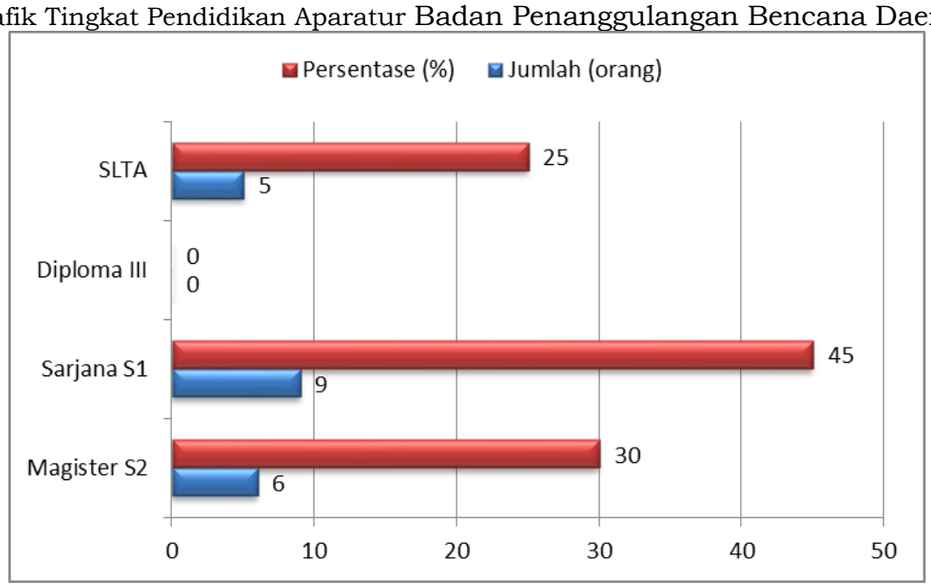
Tabel 2.1
Susunan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Berdasarkan Jabatan, Eselonering dan Status Kepegawaian

No.	Nama Jabatan	Eselon	Status			Jumlah
			PNS	PPPK	PK	
1.	Kepala (*ex-officio*)	IIa	1	-	-	1
2.	Pengarah	-	-	-	-	0
3.	Kepala Pelaksana	IIb	1	-	-	1
4.	Sekretaris Pelaksana	IIIb	1	-	-	1
	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	IVb	0	-	-	0
	Staf	-	3	2	16	21
	Kasubbag. Keuangan	IVb	1	-	-	1
	Staf	-	2	1	2	5
	Kasubbag. Program	IVb	0	-	-	0
	Staf	-	1	1	0	2
5.	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	IIIb	0	-	-	0
	Kasubbid. Pencegahan	IVb	0	-	-	0
	Staf	-	1	1	2	4
	Kasubbid. Kesiapsiagaan	IVb	1	-	-	1
	Staf	-	1	1	2	4
6.	Kabid. Kedaruratan dan Logistik	IIIb	1	-	-	1
	Kasubbid. Kedaruratan	IVb	1	-	-	1
	Staf	-	1	2	24	26
	Kasubbid. Logistik	IVb	0	-	-	0
	Staf	-	0	1	0	1
7.	Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	IIIb	1	-	-	1
	Kasubbid. Rehabilitasi	IVb	0	-	-	0
	Staf	-	2	1	0	3
	Kasubbid. Rekonstruksi	IVb	1	-	0	1
	Staf	-	1	1	1	3
	Jumlah		21	11	47	79

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Oktober 2025

Sedangkan untuk tingkat pendidikan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2
Grafik Tingkat Pendidikan Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Oktober 2025

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 20 (dua puluh) jabatan termasuk 14 (empat belas) jabatan struktural terdiri dari eselon II, eselon III, dan eselon IV serta 1 (satu) jabatan fungsional kebencanaan. Memperhatikan susunan kepegawaian dan tingkat pendidikan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ada pada saat ini, maka jumlah dan kualifikasi aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memadai, karena jumlah sumber daya manusia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap tahunnya terus menurun, sementara itu pemenuhan kebutuhan aparatur yang memiliki kapasitas di bidang penanggulangan bencana sangat mendesak. Untuk periode 5 (lima) tahun ke depan diharapkan adanya penambahan aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memenuhi kualifikasi di bidang penanggulangan bencana. Aparatur tersebut tidak hanya untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia pada jabatan yang tersedia, tetapi juga untuk memenuhi kekurangan sumber daya manusia di bidang teknis penanggulangan bencana, diantaranya yaitu petugas Pusdalops PB, petugas gudang logistik dan peralatan, serta petugas pada Tim Reaksi Cepat (TRC).

Jumlah Sarana dan Prasarana berdasarkan kondisi aktual sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Kondisi Aktual Sarana dan Prasarana yang Dimiliki
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sarana & Prasarana	Jumlah (unit)	Kondisi
1	Kendaraan Roda 6	3	Baik
2	Kendaraan Roda 4	11	11 Baik
			1 Rusak Ringan
3	Kendaraan Roda 2	30	19 Baik
			11 Rusak Berat
4	Kapal Motor	2	Baik
5	Long Boat	3	Baik
6	Body Long Boat	1	Baik
7	Floating Pump	7	Baik
8	Motor Boat	10	6 Baik
			4 Rusak Ringan
9	Perahu	5	4 Rusak Berat
			1 Rusak Ringan
10	Perahu Karet	6	4 Baik
			2 Rusak Berat
11	Mesin Perahu Karet dan Perlengkapannya	2	2 Baik
12	Perkakas Bengkel Bermesin (Blok)	1	Baik

No	Sarana & Prasarana	Jumlah (unit)	Kondisi
13	Teropong	2	Baik
14	GPS	8	Baik
15	Gudang (Conteiner)	1	Baik
16	Mesin Ketik Manual	7	2 Baik
			5 Rusak Berat
17	Filling Besi	4	2 Baik
			2 Rusak Ringan
18	Band Kas	2	Baik
19	Lemari Piring	1	Baik
20	Papan Nama Instansi	1	Baik
21	White Board	1	Baik
22	Kursi Besi/Metal	64	Baik
23	Bangku Tunggu Kayu	2	Baik
24	Bangku Tunggu Besi	2	Rusak Berat
25	Meja Biro	29	27 Baik
			2 Rusak Berat
26	Meja Rapat (Meating table)	1	Baik
27	Mesin Penghancur kertas	1	Baik
28	Meja Layanan Pengaduan	1	Baik
29	Telepon	1	Rusak Berat
30	Kompor Gas	1	Baik
28	Tabung Gas	1	Baik
29	Sofa	1	Rusak Berat
30	Jam Mekanis	6	4 Baik
			2 Rusak Berat
31	AC	5	Baik
32	Pendingin Ruangan/Kipas Angin	7	1 Baik
			6 Rusak Berat
33	Televisi	5	Baik
34	Wireless	1	Baik
35	Megaphone	5	Baik
36	Camera Film	5	Baik
37	Dispenser	5	3 Baik
			2 Rusak Berat
38	Handy Cam	2	1 Baik
			1 Hilang
39	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Baik
40	Alat Pembantu pemadan kebakaran	1	Baik
41	PC Unit	9	Baik
42	Note Book	21	7 Baik
			14 Rusak Berat
43	Printer	23	9 Baik
			14 Rusak Berat
44	Tenda Pengungsi	6	Baik
45	Tenda Keluarga	230	Baik
46	Pompa Alkon	10	Baik
47	Nozzle Jet	10	Baik
48	Alat Penjernih Air	40	Baik
49	Gergaji Mesin	5	Baik
50	Velbed	230	Baik
51	Light Tower	2	Baik
52	Genset	2	Baik
53	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	26	21 Baik
			5 Rusak Berat
54	Kursi Putar Staf	31	20 Baik
			11 Rusak Berat
55	Lemari Arsip dinamis	12	Baik
56	UPS	1	Baik
57	Digital (Parabola)	2	Baik
58	Projektor (Infokus)	1	Baik
59	Handy Talky	127	97 Baik
			30 Rusak Berat
60	Unit Transcarver/Transmiter VHF	9	Baik
61	Unit Transceiver SSB Portable	8	Baik
62	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	8	Baik
63	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	18	Baik
64	Satelite Link (Up/Down Link)	1	Baik
65	Switch	2	Baik
66	Menara Antena Lain-lain	137	Baik
67	Senter	12	3 Baik

No	Sarana & Prasarana	Jumlah (unit)	Kondisi
			9 Rusak Berat
68	Stabilizer	2	Baik
69	Safeti helmet	4	Baik
70	Racun Api	4	Baik
71	Meja Kerja	2	Baik
72	Baterry / acu	6	Baik
73	Mesin Pompa Air	1	Baik
74	Mesin Potong/Senso	2	Rusak Berat
75	Mesin Potong Rumput	1	Baik
76	PDL Pemadam Kebakaran	20	Baik
77	Gedung Perkantoran	1	Baik
78	Gudang Logistik	1	Baik

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Oktober 2025

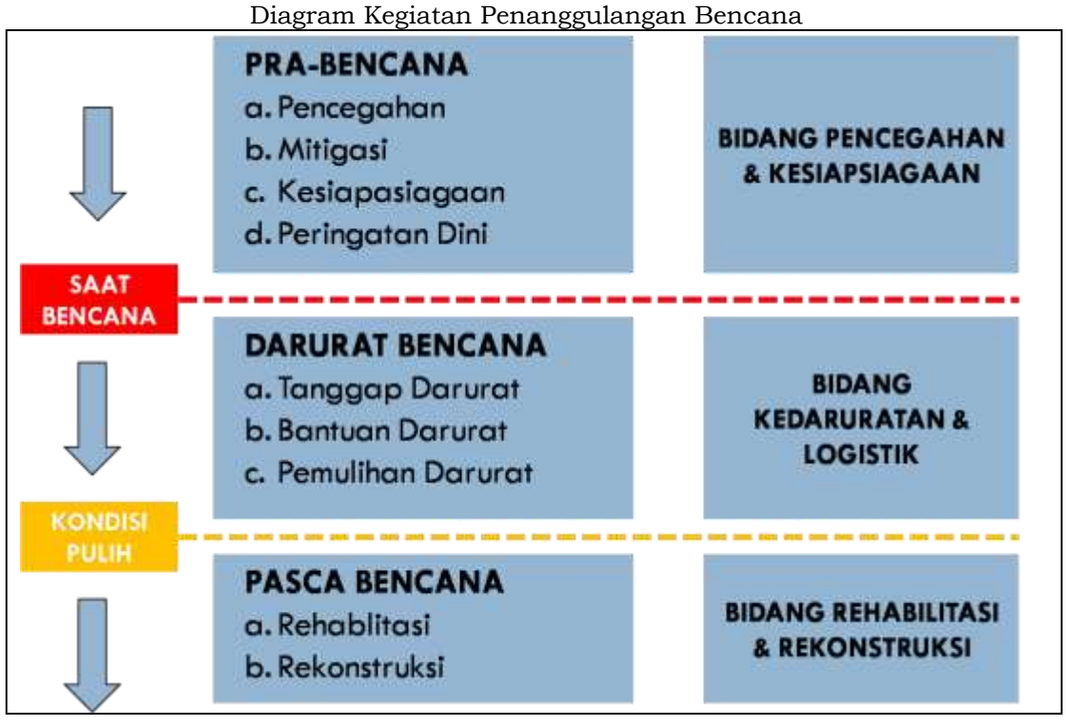
Berdasarkan kondisi aktual sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini, maka jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai belumlah memadai. Selain itu, dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada saat tanggap darurat maka dibutuhkan ketersedian peralatan dan logistik *stock opname* yang siap sedia pada saat dibutuhkan, dan ketersediaan gedung Pusdalops PB serta gudang logistik dan peralatan sangatlah penting.

Diharapkan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, pembangunan gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat diselesaikan, serta penyediaan peralatan dan logistik *stock opname* dapat dimasukkan dalam kebijakan anggaran setiap tahunnya. Selain itu, perlu juga diupayakan pembangunan gedung Pusdalops PB serta gudang logistik dan peralatan dalam rangka menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kepulauan Mentawai serta pencapaian target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025-2029.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Keterkaitan antara kegiatan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

Gambar 2.3
Diagram Kegiatan Penanggulangan Bencana



Badan Penanggulangan Bencana Daerah dituntut untuk terus berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan peran dan fungsi yang diamanatkan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerahdalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk "tanggap darurat" bencana saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana (pascabencana) itu sendiri. Apabila diterapkan ke dalam daur program kerja, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus sistemik kegiatan kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa resiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi, dan rekonstruksi yang berkesinambungan melibatkan berbagai pihak (*stakeholders*) terkait, sesuai dengan ketentuan umum tahapan penanggulangan bencana. Selain itu amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, menuntut Badan Penanggulangan Bencana Daerahuntuk terus dapat meningkatkan mutu dan kuantitas pelayanan kebencanaa sesuai dengan urusan yang telah ditetapkan. Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan dari Badan Penanggulangan Bencana dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018-2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Desa Tangguh Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Desa	2 Desa
		Persentase Kelompok Masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	0%	0%	5%	17,5%	5%	17,5%	5%	13,95%	5%	11,63%
			0 kelompok	0 kelompok	2 kelompok	7 kelompok	2 kelompok	7 kelompok	2 kelompok	6 kelompok	2 kelompok	5 kelompok
2.	Meningkatnya penanganan kedaruratan bencana	Persentase bencana yang tertangani	100%	100%	75%	106.25%	100%	121,88%	100%	187%	100%	100%
3.	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LAKIP	-	-	B	B	C	CC	B	B	B	BB
		Jumlah Inovasi yang Diterapkan	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90%	90,30%	90%	93,07%	90%	91,26%	94%	95,47%	94%	92,56%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Mentawai, Oktober 2025

Adapun hasil yang dicapai dalam melaksanakan pelayanan dasar yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat pada tahun 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Capain Kinerja Standar Pelayanan Minimal
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020-2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	15.568	2.536	3.217	4.428	9.217
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	15.568	2.536	3.217	4.428	9.217
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	12.560	856	592	672	516
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebaka ran	100	100	100	100	100

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sasaran layanan penanggulangan bencana menekankan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan manfaatnya harus menyentuh langsung kepada masyarakat, dengan mengedepankan kualitas pelayanan publik yang baik. Bahwa untuk mencapai hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana menyusun perencanaan yang berkualitas yang diarahkan untuk menjawab tantangan lingkungan strategis yang dinamis. Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai kebijakan bersifat *multistakeholder*, lintas bidang, lintas ruang dan

merupakan upaya yang bersifat pengarusutamaan yang diarahkan untuk mengurangi risiko bencana. Kelompok sasaran layanan utama penanggulangan bencana terutama ditujukan kepada masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana (risiko tinggi) dan kelompok rentan. Secara lebih rinci, sasaran tersebut dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kerentanan:

a. Kelompok Rentan (prioritas utama)
b. Anak-anak dengan kondisi terbatas secara fisik dan psikologis
c. Lansia (Lanjut Usia) yang memiliki keterbatasan mobilitas dan kesehatan
d. Penyandang Disabilitas yang membutuhkan aksesibilitas khusus
e. Perempuan terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok perempuan terdampak
f. Orang dengan penyakit kronis/kondisi medis khusus
g. Masyarakat kurang mampu yaitu penduduk di daerah miskin dan terpencil yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk mitigasi atau evakuasi
h. Masyarakat di wilayah terdampak bencana yaitu masyarakat yang secara langsung berada di lokasi bencana (saat tanggap darurat).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugasnya melakukan kerjasama pada tiga pilar penanggulangan bencana yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha harus terjalin dengan baik yang didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB). sehingga tercapai sasaran berikut ini:

1. Meningkatnya Kapasitas Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Daerah untuk pengurangan risiko bencana
2. Meningkatnya penanganan darurat bencana secara terpadu
3. Meningkatnya pemulihan infrastuktur, pelayanan publik dan penghidupan masyarakat pasca bencana

Selain itu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi-fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana sesuai dengan tahapan-tahapan penanggulangan bencana yaitu pra bencana melaksanakan fungsi koordinasi dan pelaksana, saat bencana melaksanakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, serta pada pasca bencana melaksanakan fungsi koordinasi dan pelaksana.

Adapun Mitra Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Kepulauan Mentawai:

a. Unsur TNI/POLRI
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
c. Badan Penanggulangan Bencana Daerahse- provinsi Sumatera Barat
d. PT. PLN Distribusi Kabupaten Kepulauan Mentawai
e. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai
f. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai
g. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai
h. Dinas Pekerjaan Umum,dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai
i. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai
j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai
k. Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai
m. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Mentawai
n. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah Padang Panjang
o. Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kabupaten Kepulauan Mentawai
p. Unsur *Pentahelix*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan tugasnya adalah menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup perumusan kebijakan, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanggulangan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata. Untuk mendukung hal

tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selalu bersinergi dengan unsur *pentahelix* yaitu perangkat kerja pemerintah, BUMD, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media massa. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari komponen bangsa yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah pada khususnya dan berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat pada umumnya, wajib berperan serta bersama-sama dengan Pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengakselerasi penanggulangan bencana, terutama dalam hal mengimplementasikan dan mendorong bantuan apabila terjadi bencana seperti yang sudah berjalan BUMD biasanya memberikan bantuan berupa logistik dan dukungan sumbangan uang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melakukan tugasnya melaksanakan kerja sama dengan:

a. Kemitraan Bidang Sosial Kemanusiaan dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Kepulauan Mentawai.
b. Kerjasama dengan Dunia Usaha (Bank Nagari)
c. Kerjasama dengan BMKG Padang Panjang
d. Kerjasama dengan masyarakat/NGO (seperti: Fondasi Hidup, Jemari Sakato, Yayasan CDRM & CDS, dan lain-lain)
e. Kerjasama dengan Akademisi (UNP)
f. Kerjasama dengan Media (Radio Sasaraina)
g. Kerjasama dengan Antar Pemerintah (Mitra Praja Utama)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan kerentanan bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai maka dapat dianalisis masalah penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Masalah Penanggulangan Bencana di Kepulauan Mentawai
Pada Tahap Pra Bencana

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
Memahami risiko bencana	• Belum lengkapnya aturan dan standar operasional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pananggulangan bencana
	• Terbatasnya analisis, manajemen dan penggunaan data yang relevan serta penyebaran informasi praktis
	• Kurangnya penggunaan dan penguatan *baseline* dan penilaian risiko bencana secara periodik
	• Kurangnya pengembangan, pembaharuan dan penyebarluasan secara berkala informasi risiko bencana malalui teknologi informasi geospasial
	• Belum sistematisnya pengevaluasian, pencatatan, pembagian dan pempublikasian perhitungan kerugian akibat bencana dalam berbagai aspek
	• Kurangnya ketersediaan informasi terpilah terkait risiko bencana dan kerugian yang dapat diakses secara memadai
	• Belum memadainya akses ke data yang dapat dipercaya dan tepat waktu
	• Masih kurangnya pengetahuan bagi pejabat pemerintah di semua tingkatan, masyarakat sipil, komunitas dan relawan, serta lembaga usaha
	• Kurangnya dialog dan kerjasama antar komunitas ilmiah dan teknologi, *stakeholder* yang relevan dalam pengambilan keputusan terkait manajemen risiko bencana
	• Terbatasnya penggunaan pengetahuan dan praktek tradisional yang sesuai dalam penilaian risiko bencana dan implementasi kebijakan
	• Masih kurangnya kapasitas teknis dan ilmiah dalam

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	menerapkan metodologi dan model untuk menilai risiko bencana
	• Kurangnya investasi dalam inovasi dan pengembangan teknologi jangka panjang dalam manajemen risiko bencana
	• Belum memadainya penggabungan pengetahuan risiko bencana seperti halnya dalam pendidikan profesional dan pelatihan
	• Kurangnya penerapan informasi risiko untuk pengembangan dan implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana
Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana	• Belum memadainya pengarusutamaan dan pengintegrasian pengurangan risiko bencana di semua sektor
	• Belum memadainya adopsi dan penerapan strategi pengurangan risiko bencana dan perencanaan di daerah
	• Belum adanya penilaian terhadap kapasitas manajemen risiko bencana secara teknis, finansial dan administratif dalam menangani risiko
	• Belum adanya mekanisme dan insentif untuk memastikan manajemen risiko bencana sesuai dengan ketentuan keselamatan yang ada
	• Belum adanya mekanisme untuk melakukan penilaian dan melaporkan kepada publik progres perencanaan daerah
	• Belum jelasnya peran dan tugas bagi wakil masyarakat dalam lembaga manajemen risiko bencana
	• Masih lemahnya forum koordinasi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana
	• Kurang memadainya peraturan dan finansial pemerintah daerah untuk dapat bekerja dengan masyarakat dalam mengelola risiko
	• Masih kurangnya dukungan anggota DPRD untuk mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana terkait penganggaran
	• Kurangnya pengembangan standar kualitas seperti sertifikasi dan penghargaan untuk manajemen risiko bencana
	• Belum adanya rumusan kebijakan publik yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi isu-isu pencegahan sesuai dengan peraturan
Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan	• Belum memadainya pengalokasian sumber daya yang diperlukan di semua tingkat pemerintahan untuk pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana
	• Belum adanya mekanisme transfer risiko bencana dan asuransi, berbagi risiko dan retensi serta perlindungan finansial bagi investasi publik dan swasta
	• Masih kurangnya perkuatan masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan investasi swasta
	• Lemahnya perlindungan dan dukungan pelestarian lembaga budaya serta benda dan situs bersejarah lainnya
	• Masih kurangnya upaya struktural dan non struktural dalam rangka ketangguhan risiko bencana di tempat kerja
	• Belum memadainya pengarusutamaan penilaian risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan penggunaan lahan dan pelaksanaannya
	• Belum memadainya pengarusutamaan penilaian risiko bencana
	• Belum terintegrasinya manajemen risiko bencana dalam pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier terutama di daerah
	• Belum memadainya desain dan implementasi kebijakan inklusif dan mekanisme jaring pengaman sosial
	• Belum diadopsinya kebijakan dan program untuk mengatasi

Prioritas Kerangka Kerja Sendai	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana
	bencana yang disebabkan oleh mobilitas manusia
	• Masih lemahnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan terpadu dalam pengurangan risiko bencana
	• Belum terjaminnya kelangsungan layanan dan integrasi manajemen risiko bencana dalam bisnis dan praktek
	• Belum terintegrasinya manajemen risiko bencana di seluruh sektor industri pariwisata
Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk membangun kembali dengan lebih baik dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi	• Belum dilakukannya review dan pembaharuan kebijakan kesiapsiagaan dan kontinjensi, perencanaan dan program dengan melibatkan institusi yang relevan
	• Belum memadainya investasi dalam pengembangan, pemeliharaan dan perkuatan *multi-hazard*
	• Belum terjaminnya keamanan, efektifitas dan operasional infrastruktur penting yang baru selama dan setelah bencana
	• Belum memadainya pusat-pusat komunitas untuk mempromosikan kesadaran masyarakat dan aktivitas pemberian bantuan
	• Belum diadopsinya kebijakan publik yang mendukung peran pekerja layanan publik untuk bantuan darurat dan persiapan proses pemulihan pasca bencana
	• Masih kurangnya pelatihan tanggap darurat bencana bagi tenaga kerja dan tenaga sukarela
	• Belum terjaminnya kelangsungan operasional dan perencanaan pada tahap pasca bencana
	• Masih kurangnya kerjasama lembaga yang beragam, otoritas yang berjenjang dan *stakeholder* yang relevan di semua tingkatan
	• Belum tergabungnya manajemen risiko bencana ke dalam pemulihan pasca bencana
	• Belum dikembangkannya pedoman untuk kesiapsiagaan dalam rekosntruksi bencana
	• Belum dipertimbangkannya sarana relokasi fasilitas publik dan infrastruktur untuk area di luar jangkauan risiko
	• Masih lemahnya kapasitas dari otoritas daerah untuk mengevakuasi orang yang hidup di daerah rawan bencana
	• Belum adanya mekanisme pendaftaran kasus dan *data base* kematian yang disebabkan oleh bencana
	• Masih belum memadainya skema pemulihan untuk memberikan dukungan psikososial dan layanan kesehatan mental bagi korban bencana

Tabel 2.6
Masalah Penanggulangan Bencana Di Kepulauan Mentawai
Pada Tahap Saat Tanggap Darurat

Aspek Kedaruratan	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Saat Tanggap Darurat
Koordinasi	• Masih terkendalanya koordinasi antar instansi
	• Perlu dipikirkan kerjasama antar wilayah karena kondisi penanggulangan bencana pada satu kecamatan dengan kecamatan lainnya tidak sama
	• Belum memadainya sistem peringatan dini, *data base* kebencanaan, rencana kontinjensi dan kebijakan operasionalnya dalam penanganan tanggap darurat
	• Perlu diperjelas kebijakan anggaran terkait ketersediaan dan sistem pengelolaan dana tidak terduga dari APBD dan dana siap pakai dari APBN
Komando	• Butuh ketegasan komando saat kedaruratan
Kaji cepat	• Butuh akurasi data
	• Buruknya basis data korban, kerusakan, pengungsi, dan lain-lain.

Aspek Kedaruratan	Masalah Penanggulangan Bencana pada Tahap Saat Tanggap Darurat
Status bencana	• Masih lemahnya otoritas yang berwenang menyatakan status bencana
Penyelamatan dan evakuasi	• Belum meratanya penanganan darurat
	• Belum jelasnya Protap dan kurang siapnya personil
	• Belum memadainya penetapan aturan main dalam komunikasi
	• Belum optimalnya sumber daya
	• Masih adanya kendala transportasi
	• Masih adanya kendala peralatan
	• TRC membutuhkan tim khusus terlatih, peralatan, sertifikasi, lingkup kerja yang jelas, peningkatan sumber daya manusia, peralatan perorangan
	• Butuh Tim SAR yang terlatih dalam berbagai medan
	• Belum lengkapnya data dan informasi potensi tim evakuasi dari masyarakat dan dunia usaha, serta belum jelasnya sistem komando (terkait dengan Renkon dan Protap penanganan tanggap darurat)
Kebutuhan dasar	• Masih adanya kendala pengelolaan bantuan (petugas, manajemen, gudang)
	• Butuh sumber daya khusus tanggap darurat
	• Belum terdatanya dengan baik sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tersedia pada komunitas (pendekatan lebih bersifat *relief*)
Perlindungan	• Masih lemahnya perspektif gender dan kelompok rentan serta pemenuhan hak-hak dan kebutuhan
Pemulihan awal	• Masih terbatasnya pelayanan medis darurat
	• Belum optimalnya pelibatan sektor swasta masih
	• Belum jelasnya peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam proses pelaksanaan kegiatan/proyek yang dilaksanakan Perangkat Daerah lain

Tabel 2.7
Masalah Penanggulangan Bencana di Kepulauan Mentawai
pada Tahap Pasca Bencana

Aspek Pasca Bencana	Masalah Penanggulangan Bencana pada saat Pasca Bencana
Rehabilitasi	• Ketidakpastian koordinasi dalam melakukan rehabilitasi
	• Masih terkendalanya data korban jiwa dan korban selamat
	• Masih terkendalanya data kebutuhan korban
	• Belum meratanya distribusi
	• Belum lengkap dan akuratnya pendataan
	• Belum jelasnya batas waktu pemberian bantuan
	• Belum jelasnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan rehabilitasi
	• Lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi
Rekonstruksi	• Masih terkendalanya data kerusakan rumah/bangunan
	• Belum lengkap dan akuratnya pendataan
	• Perlu rumusan yang jelas tentang standar kerusakan rumah
	• Belum meratanya distribusi
	• Bantuan belum sesuai kebutuhan dan berkualitas rendah
	• Belum jelasnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan rekonstruksi
	• Lemahnya pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rekonstruksi

2.2.2 Isu Strategis

a. Isu Strategis Internasional/ Global

Isu atau fenomena global yang akan mewarnai, mempengaruhi dan memberi dampak pada berbagai kebijakan yaitu perubahan iklim.

Prinsip-prinsip pengembangan dan pengelolaan bencana yang mendasar dalam perspektif global, yaitu :

1. *Disaster Relief* sebagai kebijakan untuk memberikan asistensi kemanusiaan kepada korban tanpa memperhatikan kebangsaan, ras, suku, agama, ataupun aliran politik. Hal ini langsung ditekankan pada penyelamatan kehidupan dengan segera dengan mencegah bertambahnya kematian dan kelaparan.
2. *Disaster Rehabilitation and Reconstruction*: merupakan aktivitas untuk rehabilitasi komunitas dengan tujuan mengembalikan fungsi masyarakat sebagaimana semula, mengurangi kerusakan komunitas dari bencana di waktu mendatang. Rekonstruksi akan terkait dengan membangunan infrastruktur. Prinsip ini merupakan prioritas kedua ataupun ketiga.
3. *Prevention, Mitigation and Preparedness*: mendorong tumbuhnya penghargaan atas kehidupan dan penghematan anggaran melalui pencegahan bencana baik yang berisiko pada masyarakat maupun ekonomi akibat bencana perbuatan manusia maupun alamiah.

   Hal ini sejalan dengan penuntasan pencapaian Sustainable Development Goal's (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan komitmen baru oleh berbagai negara dengan menargetkan 3 tujuan mulia yang dicapai ditahun 2029 yakni mengakhiri kemiskinan, mengatasi dan menekan kesenjangan, serta mengatasi perubahan iklim. Beberapa SDG yang paling relevan dengan bencana adalah SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), SDG 13 (Aksi Iklim). Pada SDG 1 secara tidak langsung, terpengaruh karena bencana seringkali memperburuk kemiskinan dan kerentanan masyarakat. SDG 11 berfokus pada pengurangan dampak buruk bencana alam, sedangkan SDG 13 menekankan pada memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam.
   Elaborasi lebih lanjut adalah sebagai berikut:
   <u>SDG 1 (Tanpa Kemiskinan)</u>:
   Bencana dapat memperburuk kemiskinan dan kerentanan masyarakat, terutama di negara berkembang. SDG 1 bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya, dan pengurangan risiko bencana dapat membantu mencapai tujuan ini. Bencana dapat menghambat kemajuan pembangunan dan bahkan membalikkan kemajuan yang telah dicapai dalam mengurangi kemiskinan.
   <u>SDG 2 (Tanpa Kelaparan)</u>
   Bencana dapat mengganggu rantai pasokan makanan dan menyebabkan kelaparan.
   <u>SDG 5 (Kesetaraan Gender)</u>
   Bencana dapat memperburuk kesenjangan gender dan mengacaukan akses perempuan terhadap sumber daya dan layanan.
   <u>SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan):</u>
   SDG 11 memiliki target untuk secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak bencana. Target lain termasuk mengurangi kerugian ekonomi langsung yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berkaitan dengan air, relatif terhadap produk domestik bruto global. Fokus SDG 11 adalah pada perlindungan masyarakat miskin dan orang-orang yang rentan.
   <u>SDG 13 (Aksi Iklim):</u>
   SDG 13 bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Target SDG 13 juga mencakup mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. SDG 13 menekankan pentingnya meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik, serta kapasitas manusia dan kelembagaan dalam mitigasi, adaptasi, dan peringatan

dini perubahan iklim.

SDG 15 (Kehidupan di Daratan)

Bencana seperti banjir dan longsor dapat merusak ekosistem dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs dan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan pengembangan, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera.

b. Isu Strategis Nasional

Seiring dengan meningkatnya intensitas kejadian bencana (alam dan non alam) di dunia, isu manajemen bencana menjadi elemen penting dalam pengembangan wilayah. Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai risiko bencana seperti gunung berapi, tsunami, banjir, kekeringan, dan sebagainya, saat ini manajemen bencana menjadi isu prioritas nasional. Kemunculan Undang- undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengindikasikan pemerintah berupaya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko bencana. Sejauh ini, peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui rekayasa fisik infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dalam mengelola risiko bencana tersebut.

Sejalan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029, maka perumusan isu strategis penanganan bencana adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Potensi Dampak dan Risiko Bencana Geologi

   Peningkatan potensi dampak dan risiko bencana geologi di Indonesia terlihat dari data Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017 yang menunjukkan jumlah sesar atau patahan aktif meningkat menjadi 295, termasuk penambahan di zona laut dan darat Pulau Jawa. Subduksi selatan Jawa menunjukkan tiga lokasi seismic gap yang berpotensi memicu gempa dengan kekuatan hingga magnitudo 9 atau lebih, berpotensi menimbulkan tsunami. Jumlah penduduk terdampak gempa tertinggi adadi Jawa dan Bali, dengan analisis kerugian fisik mencakup fasilitas umum. Ancaman tsunami tinggi tersebar di hampir seluruh wilayah pantai Indonesia, dengan proyeksi kenaikan jumlah populasi terdampak dan potensi kerugian fisik, ekonomi, serta kerusakan lingkungan meningkat dari 2015 hingga 2045. Selain itu, erupsi gunungapi di Indonesia juga memiliki dampak global dengan 70 gunung api perlu mendapat perhatian khusus.

2. Meningkatnya Risiko dan Potensi Dampak Bencana Akibat Perubahan Iklim

   Perubahan iklim global, didorong oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan, meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan peningkatan hari hujan lebat dan suhu udara rata-rata yang lebih tinggi. Fenomena La Nina dan El Nino menunjukkan variabilitas yang tinggi, berkontribusi pada cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Data menunjukkan peningkatan frekuensi curah hujan ekstrem, terutama di Kalimantan Barat dan Papua. Kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan juga meningkat. Peningkatan tinggi muka air laut juga dapat menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk (displacement) di daerah Pantai dan pesisir, contohnya di beberapa wilayah pesisir pantai utara pulau Jawa. Perubahan iklim juga berdampak pada kesehatan manusia, meningkatkan penyakit yang ditularkan oleh vektor, air,

dan makanan. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tidak terkendali menambah kerentanan terhadap bencana.

3. Pertumbuhan Penduduk, Alih Fungsi Lahan, dan Percepatan Perkembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Investasi
   Alih fungsi lahan di Indonesia, meskipun tren deforestasi menurun, masih mempengaruhi risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Perkembangan pusat pertumbuhan dan kawasan investasi mendorong perubahan penggunaan lahan dan urbanisasi cepat, memberikan tekanan pada perkotaan dan meningkatkan risiko bencana. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan mempengaruhi ketersediaan permukiman dan infrastruktur, sering menyebabkan urban sprawl dan penurunan kualitas lingkungan. Kawasan industri yang berkembang menghadapi tantangan perencanaan yang memadai untuk menghindari masalah lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan kepadatan penduduk di kawasan permukiman meningkatkan risiko bencana non alam seperti bencana kebakaran permukiman. Pertumbuhan dan migrasi penduduk juga mendorong peningkatan risiko epidemi dan wabah penyakit. Peningkatan kegiatan industri termasuk industri yang memanfaatkan bahan minyak dan gas bumi, bahan kimia berbahaya, dan nuklir di hampir seluruh wilayah di Indonesia, meningkatkan potensi kejadian bencana gagal teknologi. Peningkatan risiko bencana gagal teknologi juga semakin meningkat dengan perkembangan kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang tidak terkendali.
4. Potensi Kejadian Konflik Sosial
   Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa, memiliki tantangan besar dalam pengelolaan konflik sosial. Potensi konflik sosial di Indonesia dapat muncul akibat ketimpangan sosial dan ekonomi, isu etnis dan agama, pemanfaatan identitas politik, sengketa atas tanah dan sumber daya alam, migrasi masuk, dan lainnya. Histori kejadian konflik di Indonesia di level mikro, meso, maupun makro dan tantangan kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi meningkatkan potensi kejadian bencana akibat konflik sosial termasuk di jangka menengah ke depan. Tantangan semakin membesar dalam penanggulangan bencana akibat konflik sosial karena belum adanya sistem jaringan pengamatan potensi konflik sosial yang terpadu. Sistem jaringan pengamatan ini perlu untuk dimanfaatkan oleh pihak pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan konflik sosial.
5. Belum Optimalnya Pemantauan, Evaluasi, dan Akuntabilitas Bidang Penanggulangan Bencana
   Pemantauan dan evaluasi upaya penanggulangan bencana yang dilakukan di setiap tahapan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah penting dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan upaya tersebut dalam pengurangan risiko bencana. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya juga penting dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas upaya penanggulangan bencana. Pemantauan dan evaluasi, juga melingkupi pengawasan dan pelaporan pemerintah daerah dan pemerintahan pusat terhadap seluruh penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pengawasan dan pelaporan ini perlu untuk ditingkatkan dan dikelola dalam sistem informasi untuk mempermudah pengambilan keputusan berkaitan bencana. Sistem informasi ini juga dibutuhkan tidak hanya untuk menjadi sarana pelaporan hasil pengawasan pemerintah, tetapi juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan

dalam rencana penanggulangan bencana. Selain itu, sistem informasi ini juga perlu untuk dibangun dalam mengakomodasi pelaporan capaian sasaran-sasaran dalam komitmen global, pengembangan metadata indikator penanggulangan bencana, dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di berbagai tingkatan pemerintahan dan kontribusi pihak pemerintah.

6. Kebutuhan Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Kolaborasi Multi-Pihak
   Tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia masih memiliki persoalan dan tantangan yang dihadapi terutama berkaitan dengan dukungan sistem regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan kolaborasi multipihak. Transformasi tata kelola penanggulangan bencana ke depan dibutuhkan dalam berbagai hal seperti: penguatan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga; pemanfataan teknologi, informasi, dan inovasi; pemberdayaan masyarakat; dan penguatan pendanaan. Transformasi tata kelola dalam penanggulangan bencana di Indonesia juga perlu didukung dengan kolaborasi multipihak di tingkat daerah, nasional, regional, maupun global. Kerjasama multipihak dalam bentuk kemitraan pengetahuan, pemanfaatan teknologi, pendanaan, termasuk pelaksanaan kegiatan. Kolaborasi multipihak juga perlu didorong untuk meningkatkan akses terhadap bantuan bencana dari masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional, maupun pihak lainnya.
7. Pengelolaan Satu Data dan Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi Kebencanaan
   Data terpadu dan pemanfaatan sistem informasi teknologi merupakan komoditas penting dalam tata kelola penanggulangan bencana ke depan. Indonesia telah mengimplementasikan pemanfaatan dan pengelolaan data terpadu melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga telah menerbitkan regulasi terkait pengelolaan data terpadu kebencanaan melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana. Berbagai kebijakan di tingkat nasional dan sistem informasi teknologi juga telah tersedia di tingkat pusat untuk penanggulangan bencana. Dalam jangka menengah ke depan pengelolaan data terpadu dan pemanfaatan sistem informasi teknologi masih menjadi tantangan terutama untuk untuk meningkatkan pemahaman risiko bencana dan pengambilan keputusan yang tepat. Persoalan dan tantangan terkait keterbukaan akses, integrasi data, interoprabilitas data, keamanan dan privasi, standardisasi data (ketersediaan dan kualitas data), serta peningkatan partisipasi para pihak masih dihadapi dan memerlukan solusi dalam jangka menengah ke depan.
8. Kebutuhan Penguatan Kepemimpinan dan Peran Strategis Indonesia dalam Pengurangan Risiko Bencana di Tingkat Global
   Indonesia telah memiliki peran penting dalam upaya pengurangan risiko bencana global dengan peran kepemimpinannya dalam forum dan inisiatif internasional.

c. Isu Strategis Regional/ Daerah

Sejalan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat pada Misi Kepala Daerah Misa Kelima yaitu Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana. Ada beberapa isu strategis terkait resiliensi bencana yaitu:

1. Kondisi bangunan di Sumatera Barat Sebagian besar belum ramah gempa
2. Deforestasi dan Drainase yang buruk menyebabkan terjadinya banjir ketika hujan lebat

3. Permukiman di zona merah gunung api tidak bisa dipindahkan karena alasan ekonomi (pertanian, dan lain-lain).
4. Kondisi EWS tidak layak dan tidak berfungsi
5. Partisipasi dalam pelatihan mitigasi bencana masih rendah
6. Ketersediaan alat berat untuk tanggap darurat sangat minim
7. Potensi megathrust di Mentawai mencapai 8,5 magnitudo.
8. Ancaman Bencana tidak mengenal batas wilayah Administrasi

Sementara sebagai isu strategis di regional Kabupaten Kepulauan Mentawai fakta bahwa sebagai wilayah yang dilintasi jalur Zona Megathrust Mentawai-Siberut sangat rentan pada potensi bencana gempa bumi dan tsunami. Zona megathrust Mentawai adalah daerah sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal yang lokasinya berada di sebelah barat Kepulauan Mentawai. Zona Megathrust Mentawai merupakan hasil dari aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia di bawah Lempeng Eurasia. Selain gempa bumi dan tsunami, potensi bencana lainnya juga menjadi permasalahan pembangunan kedepan seperti banjir, gelombang/cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan. Kesiapsiagaan dalam memitigasi bencana menjadi hal penting dan strategis kedepan untuk meminimalisir segala kerugian yang ditumbulkan akibat bencana yang terjadi.

Secara ringkas perumusan isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat disimpulkan sebagaimana dijelaskan dalam table di bawah ini:

Tabel 2.8
Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Kepulauan Mentawai termasuk dalam kawasan potensi yang rawan bencana baik berupa gempa bumi (tektonik), gelombang besar tsunami, abrasi pantai dan longsor. Dari 43 desa yang ada, 33 desa diantaranya merupakan desa pesisir, yang pada kondisi saat ini kawasan pesisir merupakan kawasan rawan bencana terhadap bahaya tsunami.	1. Masih lemahnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan terpadu dalam pengurangan risiko bencana 2. Belum memadainya investasi dalam pengembangan, pemeliharaan dan perkuatan multi-hazard 3. Belum memadainya sistem peringatan dini, data base kebencanaan, rencana kontinjensi dan kebijakan operasionalnya dalam penanganan tanggap darurat 4. Belum terakomodir nya materi edukasi kebencanaan dalam kurikulum sekolah 5. Belum adanya pemetaan lokasi detail untuk daerah yang berpotensi longsor dan likuifaksi 6. Masih Minimnya Identifikasi potensi dan mitigasi bencana banjir	Belum adanya kesepahaman (koordinasi) lintas sektoral menjadikan KLHS sebagai prinsip dasar dalam proses pembangunan,tentunya dimulai dari perencanaan.	Penuntasan pencapaian Sustainable Development Goal's (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berkaitan erat dengan isu kebencanaan adalah Isu Perubahan Iklim secara global. Perubahan iklim merupakan salah satu penyebab utama peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam di dunia. Peningkatan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh perubahan iklim memicu berbagai bencana, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan badai yang semakin parah.	1. Meningkatnya Potensi Dampak dan Risiko Bencana Geologi dan Perubahan Iklim 2. Kebutuhan Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Kolaborasi Multi-Pihak	Potensi megathrust Mentawai-Siberut berpotensi mengguncang wilayah Sumatera dengan kekuatan Magnitudo 8,9 SR	1. Zona Megathrust Mentawai-Siberut sangat rentan pada potensi bencana gempa bumi dan tsunami. 2. Potensi bencana lainnya juga menjadi permasalahan pembangunan kedepan seperti banjir, gelombang/cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan.

BAB III
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menilik pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Adapun prinsip-prinsip penanggulangan bencana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Cepat dan tepat, yaitu bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan;
2. Prioritas, yaitu bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia;
3. Koordinasi dan keterpaduan; koordinasi yaitu bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung; keterpaduan yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.
4. Berdaya guna dan berhasil guna; berdaya guna yaitu bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan; berhasil guna yaitu bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
5. Transparansi dan akuntabilitas; transparansi yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan; akuntabilitas yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
6. Kemitraan, yaitu bahwa penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah tetapi dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat luas, bahkan juga dilakukan dengan organisasi atau lembaga di luar negeri, termasuk dengan pemerintahannya.
7. Pemberdayaan, yaitu bahwa upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengetahui, memahami dan melakukan langkah-langkah antisipasi, penyelamatan dan pemulihan bencana.
8. Non diskriminatif, yaitu bahwa dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
9. Non proletisi, yaitu bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

3.1. Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025- 2029

Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Daerah adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Kepulauan Mentawai selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentunya harus selaras dan mendukung visi misi kepala daerah selama 5 (lima) tahun rencana pembangunan. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 5 (lima) tahun rencana sebagai penjabaran secara teknis pada visi Kepala Daerah yaitu “Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera” pada misi 5 yaitu “Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh”. Sasaran jangka menengah yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah : “Menurunnya Resiko terhadap Dampak Bencana”.

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana memiliki makna bahwa tujuan pembangunan sangat penting untuk dicapai seperti pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur yang berkualitas namun tetap harus mengedepankan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan prinsip mempertahankan kualitas hidup secara berkelanjutan. Begitu juga tangguh terhadap bencana sebagai bentuk kesiapan masyarakat untuk menghadapi dan memulihkan diri dari dampak bencana, melalui gerakan masyarakat terstruktur yang melibatkan semua komponen.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2025-2029

VISI: KEPULAUAN MENTAWAI MAJU BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”				
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
MISI 5: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana	Terwujudnya ekosistem alam yang berkualitas dan resiliensi terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Menurunnya resiko terhadap dampak bencana	Persentase Penurunan Dampak Bencana

3.2. Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sesuai dengan isu strategis yang menjadi pokok perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Kepulauan Mentawai jangka menengah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	*Baseline* 2024	Target Kinerja Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya ekosistem alam yang berkualitas dan resiliensi terhadap bencana		Indeks Resiko Bencana (IRBI)	190,67%	189,38 - 188,11	189,38 - 188,11	189,38 - 188,11	189,38 - 188,11	189,38 - 188,11	189,38 - 188,11
		Menurunnya resiko terhadap dampak bencana	Persentase Penurunan Dampak Bencana	%	5	10	15	20	25	30
		Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LAKIP	Nilai/ Predikat	B	B	B	B	B	B
			Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	2	2	2	2	2	2
			Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	85	87	88	90	92	95

3.3. Strategi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Badan Penanggulangan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029. Strategi jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan bagaimana cara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi yang ditempuh dalam memenuhi tujuan dan sasaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun rencana sebagaimana disimpulkan pada tabel penahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah berikut ini:

Tabel 3.3
Strategi Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2025-2029

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Menurunnya resiko terhadap dampak bencana	Terwujudnya ekosistem alam yang berkualitas dan resiliensi terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Menurunnya Resiko Terhadap Dampak Bencana	1. Mitigasi Struktural a. Pembangunan infrastruktur tahan bencana b. Pembangunan infrastruktur perlindungan c, Pembangunan tata ruang berbasis resiko 2. Mitigasi Non Struktural a. Pemetaan Kawasan Rawan Bencana b. Edukasi dan penyuluhan c. Penyusunan regulasi dan kebijakan d. Simulasi dan latihan 3. Kesiapsiaagn dan Peringatan Dini a. Sistem peringatan dini b. Rute dan peta evakuasi c. Kesiapan medis dan tanggap darurat 4. Konservasi lingkungan a. Reforestasi dan penghijauan b. Pengelolaan sampah dan limbah

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 perlu adanya penjabaran atas penahapan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai prioritas pembangunan tahunan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Penahapan Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan peraturan perundang-undangan Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien berupa legalisasi dokumen kebencanaan seperti: Rencana Kontijensi, Rencana Penanggulangan Bencana, Kajian Resiko Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana,	Peningkatan sinergi antar instansi/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar instansi, Pemda, TNI, Kepolisian, akademisi, lembaga usaha, masyarakat,	Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.	Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Rencana Rehabiltasi Rekonstruksi Pasca Bencana	media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana			lebih baik

3.4 Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra adalah rumusan tindakan yang spesifik dan terarah untuk mengimplementasikan strategi pembangunan daerah. Hal ini berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, memastikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerja secara sinergis dan konsisten untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam Renstra. Strategi ini menggambarkan bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan arah kebijakan menguraikan langkah-langkah konkret untuk merealisasikan strategi tersebut. Arah kebijakan menjadi panduan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan memastikan bahwa setiap tindakan selaras dengan tujuan dan sasaran Renstra. Arah kebijakan membantu memastikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerja secara sinergis dan konsisten, menghindari duplikasi atau tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan. Arah kebijakan juga berfungsi sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, arah kebijakan merupakan komponen penting dalam Renstra yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Arah kebijakan yang jelas dan terarah akan membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini disajikan dalam tabel arah kebijakan yang direncanakan dalam periode lima tahun kedepan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan program dan kegiatan yang selaras dengan capaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Keterangan
1.	Penyusunan regulasi pengarusutamaan kebencanaan	Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan Kawasan Pembangunan di daerah dukung (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data	1. Pengintegrasian Kebencanaan dalam Perencanaan Pembangunan a. Mengintegrasikan kebencanaan dalam perencanaan pembangunan untuk mengurangi risiko bencana. b. Mempertimbangkan aspek kebencanaan dalam pengambilan keputusan pembangunan. 2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pemerintah Daerah a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola bencana. b. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada aparatur pemerintah daerah tentang kebencanaan.	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Keterangan
		kebencanaan daerah dengan data nasional.	3. Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Respons Bencana a. Mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif untuk mengurangi risiko bencana. b. Meningkatkan respons bencana yang cepat dan efektif. 4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bencana. b. Memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang kebencanaan. 5. Pengalokasian Sumber Daya yang Efektif a. Mengalokasikan sumber daya yang efektif untuk pengelolaan bencana. b. Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam pengalokasian sumber daya. 6. Pengawasan dan Evaluasi yang Efektif a. Pemerintah melalui instansi terkait mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan regulasi kebencanaan. b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan bencana.	
2.	Penguatan penyediaan infrastruktur dengan menggunakan bahan ramah lingkungan.	Rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan dan perlindunganhutan. Pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Optimalisasi pengurangan sampah dan limbah Peningkatan kapasitas kelembagaan, pemangku kepentingan dan dalam masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan tangggap iklim	1. Pengembangan Standar dan Regulasi a. Mengembangkan standar dan regulasi yang mendukung penggunaan bahan ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur. b. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar dan regulasi yang ada. 2. Penelitian dan Pengembangan Bahan Ramah Lingkungan a. Bersama stakeholder Pentahelix meningkatkan penelitian dan pengembangan bahan ramah lingkungan yang dapat digunakan dalam pembangunan infrastruktur. b. Bersama stakeholder Pentahelix mengembangkan teknologi yang mendukung penggunaan bahan ramah lingkungan. 3. Edukasi dan Pelatihan a. Meningkatkan edukasi dan pelatihan tentang penggunaan bahan ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur. 4. Kerjasama dan Kolaborasi	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Keterangan
			a. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam penggunaan bahan ramah lingkungan. b. Mengembangkan kemitraan yang efektif untuk meningkatkan penggunaan bahan ramah lingkungan	
3.	Pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang	Penambahan pembentukan desa tangguh bencana terutama pada kawasan yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana Pembangunan sistem peringatan dini (early warning system) multi ancaman bencana terpadu melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi	1. Pengintegrasian Rencana Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana a. Mengintegrasikan rencana tata ruang dan pengelolaan bencana untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang peralatan penanggulangan bencana. b. Mempertimbangkan aspek kebencanaan dalam perencanaan tata ruang. 2. Penetapan Standar dan Kriteria Pembangunan Infrastruktur a. Bersama OPD teknis lainnya yang terkait menetapkan standar dan kriteria pembangunan infrastruktur yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang peralatan penanggulangan bencana. b. Bersama OPD teknis lainnya yang terkait mengembangkan pedoman teknis untuk pembangunan infrastruktur yang tahan bencana. 3. Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur a. Mendorong pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengendalikan pembangunan infrastruktur untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang peralatan penanggulangan bencana. b. Mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pembangunan infrastruktur. 4. Pengembangan Infrastruktur yang Tahan Bencana a. Mengembangkan infrastruktur yang tahan bencana dan dapat menampung peralatan penanggulangan bencana. b. Meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana. 5. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pemerintah Daerah a. Mendorong meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Keterangan
			dalam mengelola pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang peralatan penanggulangan bencana. b. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada aparat pemerintah daerah tentang pengelolaan bencana. 6. Partisipasi Stakeholder Pentahelix a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang peralatan penanggulangan bencana. b. Mengembangkan kemitraan yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.	
4.	Pemulihan kawasan pesisir dan pulau kecil yang rawan bencana abrasi melalui kombinasi green infrastructure dan nature-based solutions	1. Peningkatan kapasitas 2. wilayah dan masyarakat yang inklusif terhadap pesisir. Ancaman bencana Iklim terutama bencana hidrometeorologi melalui kesiapsiagaan bencana 3. Pengembangan masterplan dampak drainase yang di dalamnya merencanakan sistem dan drainase wilayah yang terintegrasi dengan peningkatan intensitas hujan akibat perubahan cuaca. 4. Pelayanan pencegahan dan terhadap Kesiapsiagaan terhadap pesisir bencana. 5. Penyusunan rencana atau evakuasi yang meliputi yang Jalur dan tempat evakuasi terutama terhadap ancaman banjir dan tanah longsor dalam	1. Pengintegrasian konsep Green Infrastructure dan Nature-Based Solution ke dalam dokumen perencanaan, pembangunan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau kecil. 2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau kecil yang berkelanjutan. 3. Restorasi Ekosistem Pesisir Merestorasi ekosistem pesisir yang rusak atau terdegradasi untuk meningkatkan kemampuan alami dalam menghadapi abrasi dan bencana lainnya. 4. Mendorong Pengembangan Hutan Mangrove yang dapat melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan bencana lainnya. 5. Pembangunan Infrastruktur Hijau: Membangun infrastruktur hijau seperti tanggul hijau, hutan pantai, dan lain-lain untuk melindungi kawasan pesisir dan pulau kecil dari abrasi dan bencana lainnya 6. Pengembangan Sistem Peringatan Dini: Mengembangkan sistem peringatan dini yang dapat memprediksi dan memberikan peringatan tentang potensi abrasi dan bencana lainnya.	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Keterangan
5.	Pembangunan shelter, jalan evakuasi, radio, kesiapsiagaan bencana dan rambu-rambu (alat peraga)	strategi pengurangan risiko bencana. 6. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana termasuk bencana iklim.	1. Pengintegrasian pembangunan fasilitas umum menjadi multi fungsi seperti sekolah dan shelter, RS dengan shelter, rumah ibadah dengan shelter, dsb 2. Aktivasi radio dan EWS di titik lokasi rawan bencana 3. Revitalisasi jalur evakuasi yang sudah ada dan menyiapkan jalur evakuasi baru di lokasi rawan bencana yang belum ada 4. Pemasangan rambu kebencanan di lokasi yang rawan bencana	
6.	Penguatan kapasitas Masyarakat dalam menghadapi bencana	Kolaborasi lintas sektor dalam penguatan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dan penyediaan rambu-rambu/alat peraga kebencanaan.	1. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang cara menghadapi bencana dan mengurangi risiko. 2. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bencana dan cara menghadapinya kepada masyarakat. 3. Mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif untuk memprediksi dan memberikan peringatan tentang potensi bencana. 4. Menguatkan jaringan dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi lain untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.	
7.	Pengelolaan kawasan rawan bencana	Pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1. Mengidentifikasi dan memetakan kawasan rawan bencana untuk menentukan prioritas pengelolaan. 2. Mengembangkan rencana pengelolaan bencana yang efektif dan terkoordinasi untuk mengurangi risiko bencana. 3. Menguatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan. 4. Mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif untuk memprediksi dan memberikan peringatan tentang potensi bencana	
8.	Penegakan Perda dalam kawasan rawan bencana.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana termasuk bencana iklim.	1. Mendorong mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk memantau kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah. 2. Mendorong meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan kawasan rawan bencana. 3. Mendorong mengembangkan sanksi yang efektif untuk pelanggaran peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan kawasan rawan bencana 4. Mendorong meningkatkan kerja sama antar stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi lain, dalam penegakan peraturan daerah	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Keterangan
9.	Penguatan infrastruktur sistem peringatan dini yang terintegrasi	Kolaborasi lintas sektor dalam penguatan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dan penyediaan rambu-rambu/alat peraga kebencanaan.	Mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif untuk memprediksi dan memberikan peringatan tentang potensi bencana.	
10.	Peningkatan kesiap siagaan bencana.	Penambahan pembentukan desa tangguh bencana terutama pada kawasan yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana	1. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pemerintah Daerah 2. Mendorong meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang peralatan penanggulangan bencana. 3. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada aparat pemerintah daerah tentang pengelolaan bencana.	
11.	Perencanaan pembangunan berbasis bencana. Rekomendasi membangun Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk ketersediaan database Klimatologi.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana termasuk bencana iklim.	Pengintegrasian Rencana Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana 1. Mengintegrasikan rencana tata ruang dan pengelolaan bencana untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang peralatan penanggulangan bencana. 2. Mempertimbangkan aspek kebencanaan dalam perencanaan tata ruang.	
12.	Rehabilitasi lahan Adaptasi Perubahan Iklim pada Kawasan Pesisir Peningkatan Kapasitas Adaptasi Masyarakat Pesisir Terhadap Perubahan Iklim. Pemberdaya an Pembina an Masyara	1. Peningkatan kapasitas wilayah dan masyarakat yang inklusif terhadap pesisir. Ancaman bencana Iklim terutama bencana hidrometeorologi melalui kesiapsiagaan bencana 2. Pengembangan masterplan dampak drainase yang di dalamnya merencanakan sistem dan drainase wilayah yang terintegrasi dengan peningkatan intensitas hujan	Menguatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan.	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Keterangan
	kat untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. Peningkatkan informasi ke publik terkait aturan hukum kerusakan wilayah dan laut. Pengembangan perencanaan erintegrasi terkait perizinan pemanfaatan laut	akibat perubahan cuaca. 3. Meningkatkan koordinasi antara Badan Meteorologi,Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi/PVMBG, Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH), dan instansi/lembaga terkait dalam penyebaran informasi bencana. 4. Kerjasama dalam pengembangan teknologi air bersih pada kawasan pesisir terutama pada kawasan zona merah pemanfaatan air bawah tanah		

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Proses penyusunan program dan kegiatan merupakan operasionalisasi teknis kebijakan dan strategi yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pemilihan program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai pelaksana, koordinator, dan komando dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, peralatan dan logistik, serta pemulihan atau penanganan pasca bencana secara terkoordinasi dan menyeluruh. Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dalam bidang penanggulangan bencana.

Program merupakan perwujudan dari berbagai strategi dan langkah operasional dalam rangka pencapaian setiap tujuan. Adapun program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan atau dalam periode Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Penanggulangan Kebakaran

Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai bagian dari pencapaian sasaran.

Sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan maka program dan kegiatan yang akan dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penanggulangan Kebencanaan
   Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
   b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
   c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
   d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
3. Program Penanggulangan Kebakaran
   Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline 2024	Target Kinerja Tahun					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Menurunnya resiko terhadap dampak bencana	Terwujudnya ekosistem alam yang berkualitas dan resiliensi terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Menurunnya Resiko Terhadap Dampak Bencana	Persentase Penurunan Dampak Bencana	0	5	10	15	20	25	30

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATA/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menurunnya Resiko Terhadap Dampak Bencana	Terwujudnya ekosistem alam yang berkualitas dan resiliensi terhadap bencana				Indeks Resiko Bencana (IRBI)		
		Menurunnya Resiko Terhadap Dampak Bencana			Persentase Penurunan Dampak Bencana		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiaagaan Terhadap Bencana		Jumlah Desa Tangguh Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiaagaan Terhadap Bencana			
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk	Sosialisasi,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATA/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	
					Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
					Persentase penanganan pra bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATA/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
					Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Kajian Resiko Bencana yang dilegalkan	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Kontijensi	
					Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
					umlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat	*Terlaksananya Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat*			
					Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATA/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Penyakit/Wabah Prioritas	Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana	*Terlaksananya Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana*	*Persentase penanganan pasca bencana*	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi	Pengelolaan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATA/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Kebencanaan	Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
						PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	
			Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	*Terlaksananya Layanan Pencegahan Kebakaran*	*Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran*	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	*Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran*	*Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran*		
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran dan Non Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATA/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah dokumen Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun yang disebabkan (B3) dalam Kabupaten/ Kota	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
						Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani		Meningkatnya Kualitas Kinerja perangkat Daerah			Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dievaluasi Inspektorat setiap tahunnya		
					Jumlah Inovasi yang diterapkan		
					Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah		
			Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan Tugas			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terkoordinasinya penyusunan dokumen perencanaan dan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATA/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				evaluasi kinerja perangkat daerah		Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya pelayanan administrasi Keuangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Peangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya pelayanan administrasi umum		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATA/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya layanan pengadaan barang milik daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	
					Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATA/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan	Pemeliharaan/Re	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATA/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Kepulauan Mentawai untuk empat tahun ke depan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sebelum Perubahan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra BPBD		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**															
1.05.03	**Program Penanggulangan Kebencanaan**				**915,243,609**		**1,369,764,541**		**1,398,329,512**		**1,418,402,870**		**1,432,994,243**	**90%**	**6,534,734,775**	**BPBD**
		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	75%	80%	91,524,361	82%	136,976,454	85%	139,832,951	86%	141,840,287	90%	143,299,424	90%	653,473,477	BPBD
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	47%	50%	91,524,361	55%	136,976,454	60%	139,832,951	70%	141,840,287	75%	143,299,424	75%	653,473,477	
		Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	2%	10%	91,524,361	20%	136,976,454	30%	139,832,951	40%	141,840,287	50%	143,299,424	50%	653,473,477	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra BPBD		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		terhadap bencana														
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	100%	91,524,361	100%	136,976,454	100%	139,832,951	100%	141,840,287	100%	143,299,424	100%	653,473,477	
		Persentase penanganan pra bencana	40%	45%	183,048,721	50%	273,952,909	55%	279,665,902	60%	283,680,574	65%	286,598,849	65%	1,306,946,955	
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	60%	60%	91,524,361	60%	136,976,454	60%	139,832,951	60%	141,840,287	60%	143,299,424	60%	653,473,477	
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	91,524,361	100%	136,976,454	100%	139,832,951	100%	141,840,287	100%	143,299,424	100%	653,473,477	
		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	91,524,361	100%	136,976,454	100%	139,832,951	100%	141,840,287	100%	143,299,424	100%	653,473,477	
		Persentase penanganan pasca bencana	100%	100%	91,524,361	100%	136,976,454	100%	139,832,953	100%	141,840,287	100%	143,299,426	100%	653,473,481	
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**47 Persen**	**50 Persen**	**91,524,361**	**55 Persen**	**136,976,454**	**60 Persen**	**139,832,951**	**70 Persen**	**141,840,287**	**75 Persen**	**143,299,424**	**75 Persen**	**653,473,477**	**BPBD**
1.05.03.2.01.07	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	100	100	91,524,361	100	136,976,454	100	139,832,951	100	141,840,287	100	143,299,424	500	653,473,477	BPBD

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra BPBD		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	**75 Persen**	**0 Persen**	**91,524,361**	**80 Persen**	**136,976,454**	**85 Persen**	**139,832,951**	**90 Persen**	**141,840,287**	**100 Persen**	**143,299,424**	**100 Persen**	**653,473,477**	
1.05.03.2.01.08	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang dilegalkan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	143,299,424	1	143,299,424	BPBD
1.05.03.2.02.22	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	1	91,524,361	0	-	0	-	1	141,840,287	0	-	2	233,364,648	BPBD
1.05.03.2.02.23	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.03.2.02.26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	0	0	-	1	136,976,454	0	-	0	-	0	-	1	136,976,454	BPBD
1.05.03.2.02.27	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	0	-	0	-	1	139,832,951	0	-	0	-	1	139,832,951	BPBD

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra BPBD		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**2 Persen**	**10 Persen**	**91,524,361**	**20 Persen**	**136,976,454**	**30 Persen**	**139,832,951**	**40 Persen**	**141,840,287**	**50 Persen**	**143,299,424**	**50 Persen**	**653,473,477**	
1.05.03.2.02.18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	82	50	91,524,361	0	-	0	-	50	141,840,287	0	-	100	233,364,648	BPBD
1.05.03.2.02.19	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	0	-	50	136,976,454	0	-	0	-	0	-	50	136,976,454	BPBD
1.05.03.2.02.28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100	0	-	0	-	50	139,832,951	0	-	50	143,299,424	100	283,132,375	BPBD
		Persentase penanganan pra bencana	**40 Persen**	**45 Persen**	**183,048,721**	**50 Persen**	**273,952,909**	**55 Persen**	**279,665,902**	**60 Persen**	**283,680,574**	**65 Persen**	**286,598,849**	**65 Persen**	**1,306,946,955**	**BPBD**
1.05.03.2.02.13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	0	0	-	0	-	2	279,665,902	0	-	0	-	2	279,665,902	BPBD
1.05.03.2.02.20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	0	0	-	2	273,952,909	0	-	0	-	2	286,598,849	4	560,551,758	BPBD

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra BPBD		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	dan Kesiapsiagaan															
1.05.03.2.02.21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	0	20	183,048,721	0	-	0	-	20	283,680,574	0	-	40	466,729,295	BPBD
		Persentase Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	**60 Persen**	**0 Persen**	**91,524,361**	**0 Persen**	**136,976,454**	**40 Persen**	**139,832,951**	**0 Persen**	**141,840,287**	**0 Persen**	**143,299,424**	**40 Persen**	**653,473,477**	
1.05.03.2.02.15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	0	1	91,524,361	1	136,976,454	1	139,832,951	1	141,840,287	1	143,299,424	5	653,473,477	BPBD
	Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat															
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban**	**100 Persen**	**100 Persen**	**91,524,361**	**100 Persen**	**136,976,454**	**100 Persen**	**139,832,951**	**100 Persen**	**141,840,287**	**100 Persen**	**143,299,424**	**100 Persen**	**653,473,477**	**BPBD**
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan,	0	100	91,524,361	100	136,976,454	100	139,832,951	100	141,840,287	100	143,299,424	500	653,473,477	BPBD

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra BPBD		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana														
1.05.03.2.03.09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	**100 Persen**	**100 Persen**	**274,573,083**	**100 Persen**	**410,929,362**	**100 Persen**	**419,498,853**	**100 Persen**	**425,520,861**	**100 Persen**	**429,898,272**	**100 Persen**	**653,473,477**	**BPBD**
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	0	0	91,524,361	1	136,976,454	1	139,832,951	1	141,840,287	1	143,299,424	4	653,473,477	BPBD
1.05.03.2.03.10	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	**75%**	**80%**	**91,524,361**	**82%**	**136,976,454**	**85%**	**139,832,951**	**86%**	**141,840,287**	**90%**	**143,299,424**	**90%**	**653,473,477**	BPBD
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0	1	91,524,361	1	136,976,454	1	139,832,951	1	141,840,287	1	143,299,424	5	653,473,477	BPBD

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra BPBD		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana															**BPBD**
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase penanganan pasca bencana**	**100 Persen**	**100 Persen**	**91,524,361**	**100 Persen**	**136,976,454**	**100 Persen**	**139,832,953**	**100 Persen**	**141,840,287**	**100 Persen**	**143,299,426**	**100 Persen**	**653,473,481**	**BPBD**
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.03.2.04.10	Kordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	0	1	91,524,361	1	136,976,454	1	139,832,953	1	141,840,287	1	143,299,426	5	653,473,481	BPBD
1.05.04	**PROGRAM PENANGGULA**	**Indeks Resiko Bencana**	**0%**	**0%**	**915,243,606**	**0%**	**999,786,272**	**0%**	**1,020,635,740**	**0%**	**1,035,287,212**	**0%**	**1,045,937,404**	**90%**	**5,016,890,234**	**BPBD**

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra BPBD		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	NGAN KEBAKARAN															
	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran															
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**100 Persen**	**100 Persen**	**915,243,606**	**100 Persen**	**999,786,272**	**100 Persen**	**1,020,635,740**	**100 Persen**	**1,035,287,212**	**100 Persen**	**1,045,937,404**	**100 Persen**	**5,016,890,234**	**BPBD**
		Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	**75%**	**80%**	**457,621,803**	**82%**	**499,893,136**	**85%**	**510,317,870**	**86%**	**517,643,606**	**90%**	**522,968,702**	**100 Persen**	**2,508,445,117**	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	0	1	457,621,803	1	499,893,136	1	510,317,870	1	517,643,606	1	522,968,702	5	2,508,445,117	BPBD
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		**100 Persen**	**457,621,803**	**100 Persen**	**499,893,136**	**100 Persen**	**510,317,870**	**100 Persen**	**517,643,606**	**100 Persen**	**522,968,702**	**100 Persen**	**2,508,445,117**	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non	0	1	457,621,803	1	499,893,136	1	510,317,870	1	517,643,606	1	522,968,702	5	2,508,445,117	BPBD

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra BPBD		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Kebakaran														
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun yang disebabkan (B3) dalam Kabupaten/ Kota	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran															
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**100 Persen**	**-**	**100 Persen**	**-**	**100 Persen**	**-**	**100 Persen**	**-**	**100 Persen**	**-**	**BPBD**
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra BPBD		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	edukasi masyarakat															
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**	**0**	**100**	**2,367,735,207**	**100**	**2,247,019,646**	**100**	**2,218,913,655**	**100**	**2,310,244,193**	**100**	**2,430,774,516**	**100**	**11,574,687,217**	**BPBD**
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**BPBD**
1.05.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan yang disusun (dokumen)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan ASN**	**0**	**100 Persen**	**2,200,000,000**	**100 Persen**	**2,079,284,439**	**100 Persen**	**2,051,178,448**	**100 Persen**	**2,142,508,986**	**100 Persen**	**2,263,039,309**	**100 Persen**	**10,736,011,182**	**BPBD**
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (orang)	433	28	2,200,000,000	28	2,079,284,439	28	2,051,178,448	28	2,142,508,986	28	2,263,039,309	140	10,736,011,182	BPBD
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honorarium pengelola kegiatan dan gaji pegawai kontrak yang dibayarkan	72	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian**	**Meningkatnya pelayanan**	**0**	**100 Persen**	**-**	**100 Persen**	**-**	**100 Persen**	**-**	**100 Persen**	**-**	**100 Persen**	**-**	**100 Persen**	**-**	**BPBD**

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra BPBD		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Perangkat Daerah	**administrasi kepegawaian perangkat daerah**														
1.05.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Mesin sidik jari absensi (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas dan kelengkapan yang tersedia (stel)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Meningkatnya pelayanan administrasi umum**	**0**	**100 Persen**	**94,735,207**	**100 Persen**	**87,735,207**	**100 Persen**	**87,735,207**	**100 Persen**	**87,735,207**	**100 Persen**	**87,735,207**	**100 Persen**	**445,676,035**	**BPBD**
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrk yang tersedia	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	5	10	75,000,000	10	62,735,207	10	62,735,207	10	62,735,207	10	62,735,207	50	325,940,828	BPBD
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	4	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis)	5	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Kordinasi SKPD	Jumlah rapat dan koordinasi yang dilakukan	12	2	19,735,207	3	25,000,000	3	25,000,000	3	25,000,000	3	25,000,000	14	119,735,207	BPBD

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra BPBD		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya pelayanan dan kelancaran Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0**	**80 Persen**	**-**	**80 Persen**	**-**	**80 Persen**	**-**	**80 Persen**	**-**	**80 Persen**	**-**	**80 Persen**	**-**	**BPBD**
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan masin yang dibeli	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang dibeli	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0**	**100 Persen**	**73,000,000**	**100 Persen**	**80,000,000**	**100 Persen**	**80,000,000**	**100 Persen**	**80,000,000**	**100 Persen**	**80,000,000**	**100 Persen**	**393,000,000**	**BPBD**
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik dan komunikasi yang dibayarkan	12	3	73,000,000	3	80,000,000	3	80,000,000	3	80,000,000	3	80,000,000	15	393,000,000	BPBD
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah tenaga pelayanan	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia (orang)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Meningkatnya pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**0**	**80 Persen**	**-**	**80 Persen**	**-**	**80 Persen**	**-**	**80 Persen**	**-**	**80 Persen**	**-**	**80 Persen**	**-**	**BPBD**

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome / Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra BPBD		Keterangan
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	BPBD
			0		**4,198,222,422**		**4,616,570,459**		**4,637,878,907**		**4,763,934,275**		**4,909,706,163**		**23,126,312,226**	

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiaagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Sub Urusan

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Kebencanaan
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan
			Penyusunan Rencana Kontijensi	Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan
			Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan
		Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan
		Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kegiatan
			Kordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan

4.2. Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaran bidang urusan sebagai ukuran capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan karena menjadi indikator keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah, yang digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan rencana dimasa depan. Penilain tersebut sebagai akuntabilitas kinerja dan informai tentang pencapain kinerja penyelenggaran bidng urusan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah kepada masyarakat. Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkkan kinerja yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Ini dapat dilihat pada tabel 4.5 dan tabel 4.6

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Indikator	Baseline 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	190,67%	189,38 - 188,11	189,38 - 188,11	189,38 - 188,11	189,38 - 188,11	189,38 - 188,11	189,38 - 188,11
2.	Persentase Penurunan Dampak Bencana	%	5	10	15	20	25	30
3.	Nilai LAKIP	Nilai/ Predikat	B	B	B	B	B	B
4.	Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	2	2	2	2	2	2
5.	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	85	87	88	90	92	95

Indikator kinerja yang harus dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai selama kurun waktu 5 (lima) tahun diuraikan pada tabel 4.6 yaitu:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2025	Target Capaian Setiap Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	75	80	82	85	86	90
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	47	50	55	60	70	75
3	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	2	10	20	30	40	50
4	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penanganan pra bencana	Persen	40	45	50	55	60	65
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	60	60	60	60	60	60
7	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2025	Target Capaian Setiap Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
8	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
9	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	100	100	100	100	100	100

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk tahun 2025-2029 akan diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah. IKK ini merupakan alat ukur yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB V
PENUTUP

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai ini merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oleh karena itu, setiap unsur aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program yang tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD Tahun 2025-2029 menjadi proses penting dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan daerah di bidang kebencanaan dapat tercapai sesuai dengan langkah-langkah direncanakan. Proses ini melibatkan pemantauan, penilaian, dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD. Begitu juga dengan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai rencana, serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka dilakukan tindakan korektif dan/atau penyempurnaan kebijakan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pengendalian Pelaksanaan Renstra OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra ke dalam Renja selama lima tahun kedepan. Pengendalian pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 tersebut antara lain:

1. Pengendalian penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun selama tahun 2025- 2029. Hal ini untuk memastikan tujuan dan sasaran Renstra OPD dapat dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana kerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Memastikan target kinerja terbagi secara proporsional kepada setiap bidang pengampu.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala minimal 1 kali dalam setahun untuk melihat ketercapaian target Renstra dan target kinerja di masing- masing unit kerja sesuai dengan urusan dan tupoksi.
4. Pengendalian pelaksanaan rencana kerja dilakukan oleh masing-masing pimpinan bidang pengampu.
5. Pimpinan melalui bagian Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing pimpinan bidang pengampu sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
6. Pimpinan melalui bagian Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pembahasan pada penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya
7. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja paruh waktu untuk melakukan penyesuaian kebijakan atau perubahan asumsi makro yang mendasari penyusunan perencanaan kerja OPD.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 dilakukan dalam rangka penilaian terhadap pencapaian target kinerja dan menganalisis penyebab kegagalan ataupun keberhasilannya. Penilaian ini mencakup evaluasi kinerja secara menyeluruh, serta evaluasi terhadap kebijakan dan program strategis baik sebagai pendorong maupun sebagai penghambat ketercapaian target program kerja. Hasil

evaluasi ini akan menjadi bahan utama dalam perumusan kebijakan Renstra berikutnya yang dikoordinasikan oleh unit kerja sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam konteks organisasi pemerintah, risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko tersebut meliputi, antara lain: korupsi, penurunan penerimaan daerah, kegagalan dalam pelaksanaan program prioritas, hingga penurunan kualitas pelayanan publik. Keberadaan risiko ini tidak hanya mengancam efektivitas organisasi, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi hal yang terutama dan penting dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang yang mungkin timbul selama proses pembangunan. Dalam melakukan manajemen risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setelah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi impact atau probability atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi.

Manajemen risiko dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 ini dilakukan hingga pada level sasaran kerja yang lebih detail menjelaskan target operasional kerja, tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah tersebut antara lain identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Melalui mitigasi risiko yang tepat dan terukur akan mampu mengendalikan dan mengelola risiko laten yang berpotensi ada mengagalkan tujuan dari perencanaan pembangunan. Mitigasi tersebut telah dimulai sejak pada proses perencanaan, sehingga perlu dipantau terus pada tahapan pelaksanaan, pengendalian, dan dilakukan monitoring/evaluasi kinerja pembangunan daerah.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025-2026

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i
Daftar Tabel..... ii
Daftar Gamba..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 4
1.3.Maksud dan Tujuan 7
1.4.Sistematika Penulisan 7

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1.Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 9
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah 9
2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah 16
2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah 18
2.1.4 Kelompok sasaran layanan 24
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 25
2.2.1.Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah 25
2.2.2.Isu Strategis 26

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN..... 29
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 29
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 30
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 32
3.4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 34

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 36
4.1. Uraian Program 36
4.2. Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan 77

BAB V : PENUTUP 84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan 1
Gambar 1.2 Diagram alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 16
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 16
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 17
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering dan Fungsional di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 17
Tabel 2.5 Jumlah Gedung Kantor/Gudang/ di Perangkat Daerah Tahun 2025..... 17
Tabel 2.6 Jumlah Kendaraan Bermotor Dinas Sosial P3A Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2024 18
Tabel 2.7 Jumlah Panti Rehabilitasi Sosial Anak di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 18
Tabel 2.8 Target dan Realisasi Capaian SPM Tahun 2024 19
Tabel 2.9 Jumlah dan Jenis Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak Tahun 2020-2024 20
Tabel 2.10 J Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 s/d 2024 21
Tabel 2.11 Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak Tahun 2020-202421
Tabel 2.12 Jumlah Kasus Kekerasan berdasarkan Jenis Pelayanan Tahun 2020-2024 22
Tabel 2.13 Jumlah Forum Anak Tahun 2020 s/d 2024 22
Tabel 2.14 Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak Tahun 2020-2024 22
Tabel 2.15 J Jumlah Kelompok/Organisasi Perempuan Berdasarkan Bidangnya Tahun 2024 22
Tabel 2.16 Jumlah PPKS berdasarkan kecamatan Tahun 2024 23
Tabel 2.17 J Jumlah DTKS berdasarkan kecamatan Tahun 2024 24
Tabel 2.18 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 25
Tabel 2.19 Isu Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 27
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-202929
Tabel 3.2 Tujuan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025-2029 30
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025-2029 31
Tabel 3.4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 32
Tabel 3.5 Penahapan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai 2026-2030..... 33
Tabel 3.6 Arah Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 34
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 41
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 47
Tabel 4.3 Subkegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah76
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2025-2029 77
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2025-2029..... 78

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 7, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan dokumen yang bersifat indikatif. Dengan telah terbitnya Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun Renstra Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam mengawal tercapainya perencanaan dan pembangunan daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu untuk melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029, selain menyesuaikan kepada RPJMD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat juga menyesuaikan dengan Renstra Kementerian Sosial RI Tahun 2025-2029 dan Renstra Kementerian PPPA RI Tahun 2025-2029 dan didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.

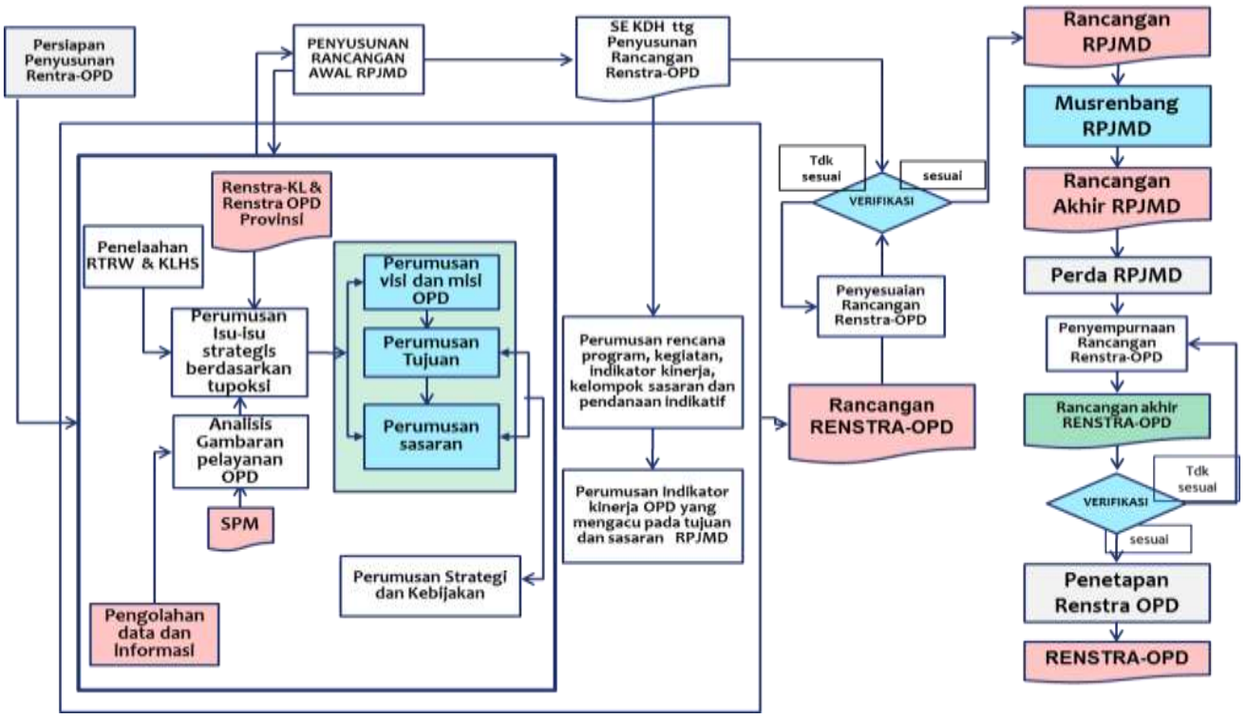
Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya adalah dengan dokumen penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) dan dokumen penetapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban pemerintah. Rencana Strategis Dinsos P3A dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat melalui Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati.

Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu Dinas/OPD. Dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, serta menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (*performance*) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Namun demikian dengan adanya tuntutan dan kebutuhan seiring dengan perkembangan kemajuan dan dengan dilakukannya berbagai macam evaluasi segala bidang maka perlu sebuah perubahan, dalam perubahan tersebut perlu ditampilkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang bersifat *outcome* yang tentunya lebih terukur. Perubahan tersebut perlu dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program perangkat daerah dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap perangkat daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja perangkat daerah.



Gambar 1.2
Diagram alir Tahapan Penyusunan Renstra
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah didahului dengan rapat internal tim dan juga disusun agenda kerja tim penyusun Renstra. Selain itu juga dilakukan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

1. Persiapan Penyusunan Renstra, terdiri atas :
   a. Pembentukan SK Tim penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.
   b. Orintasi mengenal Renstra.
   c. Penyusunan Agenda Tim Penyusunan Renstra.
   d. Penyiapan Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah antara lain:
   a. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   b. Perumusan masalah dan isu strategis
   c. Perumusan tujuan dan sasaran.
   d. Perumusan strategi dan arah kebijakan.
   e. Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Rancangan RENSTRA antara lain:
   a. Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempunaan Ranwal Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat daerah/ lintas perangkat daerah.
   c. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
   d. Hasil Kesepakatan Forum perangkat daerah dituangkan dalam Berita Acara.
   e. Rancangan Renstra perangkat daerah disempurnakan berdasarkan berita acara.
4. Rancangan Akhir RENSTRA antara lain:
   a. Perumusan rancangan akhir Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029
   b. Perumusan Rancangan Akhir Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/ kegiatan/ sub kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tantang RPJMD.
5. Penetapan RENSTRA antara lain:
   a. Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah kepada kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dilakukan proses penetapan Restra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
c. Penetapan Perkada Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan suasana keamanan dan kenyaman yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat maka arah pembangunan perlu dirumuskan dan direncanakan dengan mengedepankan prioritas sasaran program untuk menuju Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat serta menuju Indonesia Emas 2045. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya adalah dengan dokumen penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) dan dokumen penetapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban pemerintah.

Renstra Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
17. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
26. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
36. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas;
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
40. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
41. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
48. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran pelayanan perangkat daerah, perumusan masalah, isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, perumusan strategi, arah kebijakan, perumusan program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu limat tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merumuskan latar belakang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis serta dasar hukum yang relevan dan signifikan dan menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Bab ini terdiri atas:

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bab ini berisi penyajian data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah disertai evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir, serta mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah dan mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat memengaruhi perangkat daerah baik secara langsung atau pun tidak langsung. Bab ini terdiri atas:

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2. Permasalah dan Isu Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya dan mengacu pada Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang dijabarkan secara operasional dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan disertai dengan indikator kinerja dan targetnya yang didukung dengan program prioritas pembangunan daerah, Bab ini terdiri atas:

3.1 Tujuan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029
3.3 Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub kegiatan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya, dan menjelaskan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci beserta Target dan Pagu Indikatif untuk pencapaian 5 (lima) tahun ke depan, Bab ini terdiri atas:

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesesuaian antara target kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

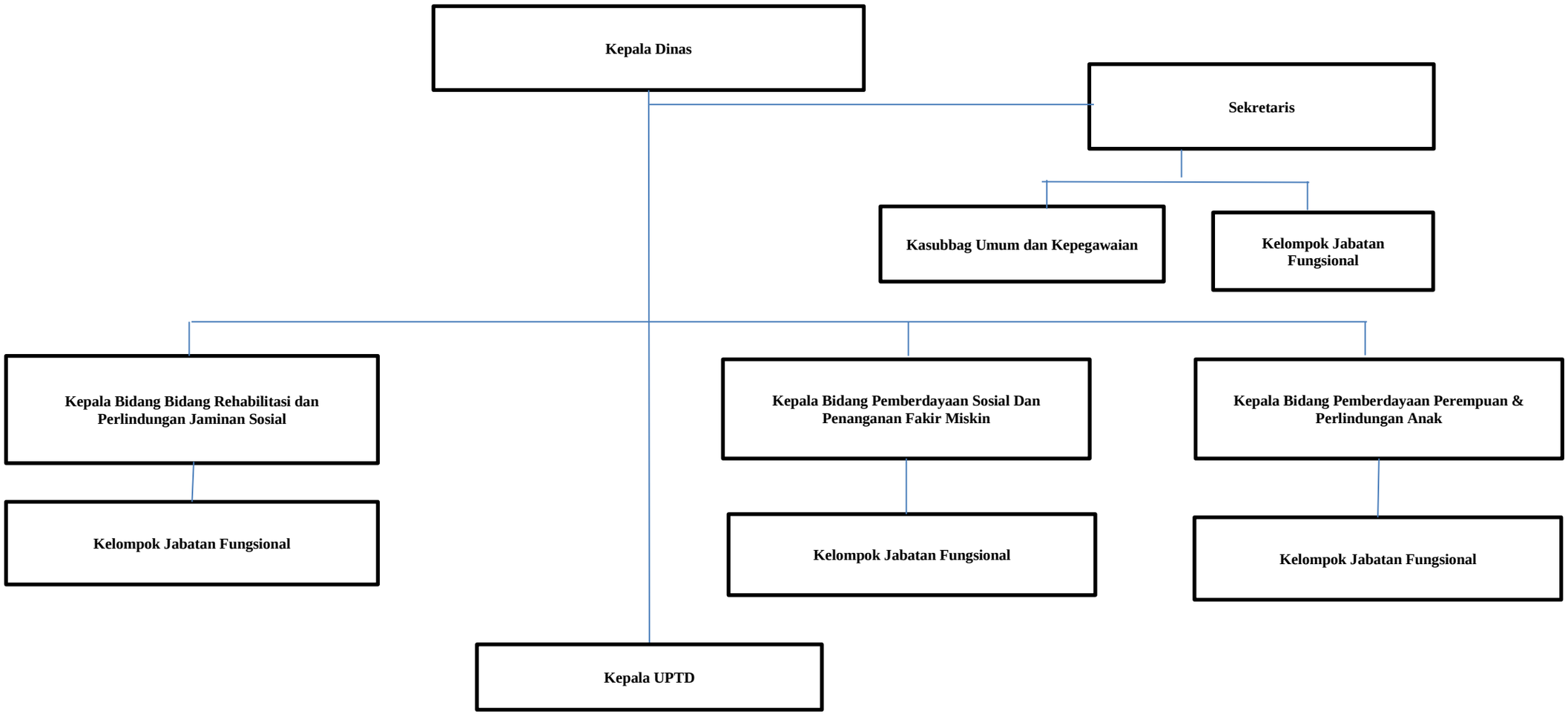
2.1.1 Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Susunan organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

A. Dinas terdiri dari
   1. Sekretariat dan
   2. Bidang.
B. Sekretaris
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   2. Sub substansi Program dan Keuangan
C. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial:
   1. Sub substasi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia
   2. Sub substansi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang
   3. Sub substansi perlindungan dan jaminan sosial.
D. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
   1. Sub substansi identifikasi dan penguatan kapasitas
   2. Sub substansi pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan
   3. Sub substansi kelembagaan, kepahlawanan, restorasi sosial
E. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   1. Sub substansi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
   2. Sub substansi perlindungan perempuan dan anak; dan
   3. Sub substansi pemenuhan hak anak
F. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 dapat dilihat pada bagan struktur organisasi dan tata kerja berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam meaksanakan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok dan fungsi:

A. Kepala Dinas

Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan Rencana Strategis Dinas berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan, dan kebijakan yang ada;
2. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan kebijakan pada Dinas;
3. perumusan pedoman kerja Dinas sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
4. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
5. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan fungsi penunjang urusan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Dinas dengan Organisasi Perangkat Daerah lain
7. penjalinan kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Dinas
8. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan
9. pelaksanaan fungis lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

B. Sekretaris

Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris sebagaimana dimaksud mempunyai tugas Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.

Untuk melaksankan tugas sebagaimana yang dimaksud, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan dan penyiapan Rencana Strategis Dinas berdasarkan usulan Bidang serta kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas;
2. penyusunan dan penyiapan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan upaya peningkatan dan pengembangan kebijakan pada Dinas;
3. penyusunan dan penyiapan pedoman kerja Dinas sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

4. pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan tugas dan fungsi Dinas sebagai pedoman;
5. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
6. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Administrasi Umum, Administrasi Kepegawaian, serta Penyusunan Program, dan Administrasi Keuangan
7. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
8. pengevaluasian pelaksanaan program pada kesekretariatan Dinas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
9. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian

Untuk melaksankan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

1. penyiapan rencana program dan kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijakan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan DPA;
2. penyiapan rencana program dan kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Dinas;
3. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
5. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian
7. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
8. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
9. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Sekretaris; dan
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

C. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang serta perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial menyelenggarakan Fungsi:

1. pengarahan penyusunan rencana kegiatan dan sub kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial;
2. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
3. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga
4. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
5. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
6. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
7. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
8. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
9. pelaksanaan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti dan/atau lembaga;
10. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
11. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
12. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial; dan
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

D. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin yang meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan, serta kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan Fungsi:

1. pengarahan penyusunan rencana kegiatan dan sub kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
2. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
3. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil
4. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
5. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
6. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perdesaan;
7. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
8. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
9. pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan daerah kabupaten;
10. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

E. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di pimpin oleh Kepalah Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak dan data gender.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Fungsi:

1. pengarahan penyusunan rencana kegiatan dan sub kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. penyiapan perumusan, forum koordinasi penyusunan, perumusan kajian, koordinasi dan sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
3. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

4. penyiapan perumusan, forum koordinasi penyusunan, perumusan kajian, koordinasi dan sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, serta bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
5. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
6. penyiapan standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
7. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
8. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
9. penyiapan perumusan, forum koordinasi penyusunan, perumusan kajian, koordinasi dan sinkronisasi penerapan, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi serta bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
10. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
11. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
12. penyiapan perumusan, forum koordinasi penyusunan, perumusan kajian, koordinasi dan sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi serta bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
13. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
14. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
15. penyiapan perumusan, forum koordinasi penyusunan, perumusan kajian, koordinasi dan sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi serta bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
16. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
17. penyiapan perumusan, forum koordinasi penyusunan, perumusan kajian, koordinasi dan sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi serta bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

18. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
19. penyiapan perumusan, forum koordinasi penyusunan, perumusan kajian, koordinasi dan sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi serta bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
20. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
21. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
22. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan
23. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi seperti yang telah disebutkan di atas, Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak memiliki sumber daya yang mendukung penyelenggaraan kegiatannya. Sumber daya tersebut yaitu sumber daya manusia, asset/modal, serta sarana prasarana lain.

A. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai Non-PNS pegawai Non PNS terdiri dari Pegawai Non PNS dengan Perjanjian Kerja (Non PNS PK) dan Pegawai Sukarela. Berikut ini merupakan jumlah sumber daya manusia di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

OPD	Pendidikan								Jumlah
	SMA		D3		S1		S2		
	L	P	L	P	L	P	L	P	
Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	3	3	-	1	7	10	2	2	28

Sumber data : Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, kondisi Oktober 2025

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2025 sebanyak 28 orang dengan kualifikasi pendidikan paling banyak Strata 1 yaitu sebanyak 17 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 10 orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

OPD	Pendidikan								Jumlah
	SMA		D3		S1		S2		
	L	P	L	P	L	P	L	P	
Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	10	6	-	2	3	5	-	-	26

Sumber data : Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, kondisi Oktober 2025

Dari Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Non PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2025 sebanyak 26 orang dengan kualifikasi pendidikan paling banyak SMA yaitu sebanyak 16 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 10 orang dan perempuan sebanyak 6 orang.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

OPD	Golongan								Jumlah
	I		II		III		IV		
	L	P	L	P	L	P	L	P	
Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	2	-	10	15	-	2	29

Sumber data : Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, kondisi Oktober 2025

Dari Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai PNS Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2022 sebanyak 29 orang dengan kualifikasi golongan paling banyak golongan III yaitu sebanyak 25 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 10 orang dan perempuan sebanyak 15 orang.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering dan Fungsional

Lokasi	Struktural			Fungsional		Jmlh
	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	PEKSOS AHLI	FUNGSIONAL TERTENTU	
Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	1	4	-	5	-	10

Sumber data : Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, kondisi Oktober 2025

Dari Tabel 2.4 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai PNS berdasarkan jabatan struktural dan fungsional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 sebanyak 13 orang dengan kualifikasi eselon paling banyak eselon III yaitu sebanyak 4 orang dan fungsional tertentu sebanyak 5 orang.

B. Aset/Modal

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, didukung oleh sarana dan prasanan yang ada. Sarana dan prasarana tersebut berada ditingkat kabupaten, yang berupa bangunan dan kendaraan.

Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan DINAS SOSIAL P3A adalah sebagai berikut:

1) Gedung Kantor/Gudang/Rumah Dinas

Tabel 2.5
Jumlah Gedung Kantor/Gudang

Nama Gedung	Alamat	Luas	Tahun Pengadaan	Ket
Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Jln. Raya Tuapejat KM.4	425M²	2002	Mutasi dari BKD

Sumber data : Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, kondisi Oktober 2025

Pada Tabel 2.5 dapat dilihat bawah gedung tempat kerja Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan hasil mutasi dari Badan Keuangan Daerah (BKD) pada Tahun 2022 dengan luas 425M².

2) Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 26 unit, dengan rincian 5 unit kendaraan roda empat dan 21 unit kendaraan roda dua.

Berikut merupakan tabel jumlah kendaraan dinas di lingkungan Dinas Sosial P3A Kabupaten Kepulauan Mentawai:

Tabel 2.6
Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Kondisi

OPD	Roda 4		Roda 2	
	Baik	Rusak	Baik	Rusak
Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	4	1	16	5

Sumber data : Sekretariat Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, kondisi Oktober 2025

Panti Sosial Asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita- cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada 8 lembaga panti sosial anak yang melakukan pelayanan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7.

Tabel 2.7
Jumlah Panti Rehabilitasi Sosial Anak

No	Nama Panti	Alamat	Sasaran
1.	Panti Sosial Pembinaan Anak Mentawai Baithul Mugni (YAPISMEN)	Muara Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara	Anak Terlantar
2.	Kasih Abadi Untuk Mentawai (KAUM)	Sipora Utara	Anak Terlantar, Yatim Piatu, Anak Keluarga Kurang Mampu dan Eks Korban Tsunami
3.	Panti Sosial Anak Yatim, Fakir Miskin Darul 'Ulum Mentawai	Sikakap ,Kec. Sikakap	Anak Yatim dan Fakir Miskin
4	Amal Mentawai	Jln Raya Tuapejat KM 8	Anak Yatim dan Fakir Miskin
5	Panti Asuhan Darul Arqam Mentawai	Desa Muara Siberut	
6	Panti Asuhan Islamic Center Siberut	Desa mailepet	
7	Panti asuhan yayasan cahaya budi siberut	Desa muara siberut	
8	Panti asuhan tangan pengharapan	Desa mailepet	

2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai pada kurun waktu 5 tahun yang lalu (2020-2024) adalah sebagai berikut:

A. Realisasi SPM

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sebagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik sehingga merupakan salah satu perangkat daerah pelaksana pelayanan minimal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun hasil capaian SPM bidang sosial pada Tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.8. berikut:

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Capaian SPM Tahun 2024

No	Jenis Pelayan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)			
		Indikator	Target	Realisasi	
			%	Absolut	%
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Telantar dari jumlah Populasi Penyandang Disabilitas Telantar di daerah kabupaten Kepulauan Mentawai yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	100%	67	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Anak Terlantar dari Populasi Anak Telantar di daerah kabupaten Kepulauan Mentawai yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	100%	140	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar dari Populasi Lanjut Usia Telantar di daerah kabupaten Kepulauan Mentawai yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	100%	329	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar pantI	Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan Pengemis dari Populasi Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten Kepulauan Mentawai yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	100%	0	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten Kepulauan MentawaI dari Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	155	100%

Pada Tabel 2.8 dapat dilihat bahwa dari lima jenis SPM bidang Sosial pada Tahun 2024 terdapat lima indikator SPM dengan hasil capaian sesuai dengan target (100%).

B. Capaian Kinerja

Kinerja atau prestasi kerja berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 dapat

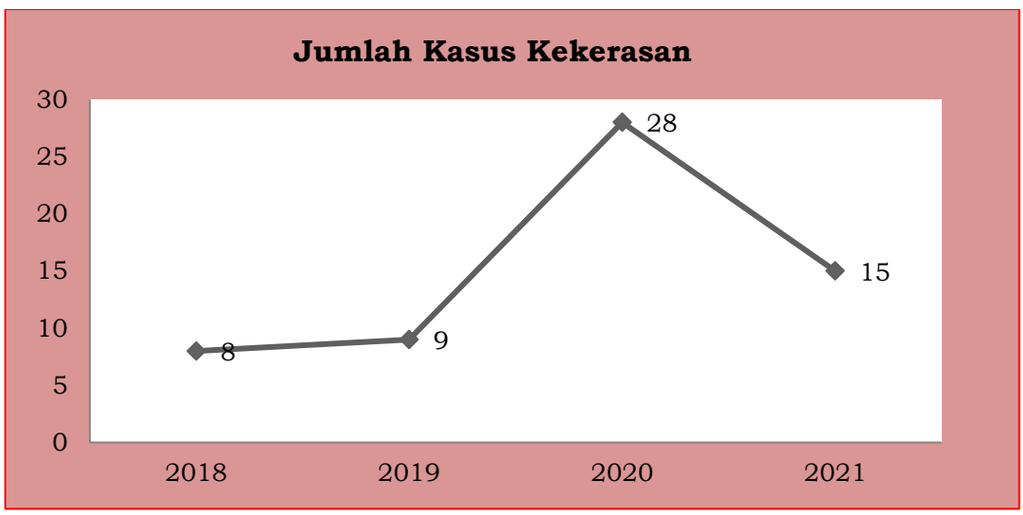
digambarkan dalam Tabel 2.8. Dalam tabel ini tergambar rasio atau persentase capaian kinerja atas target setiap tahun yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.

Tabel 2.9
Jumlah dan Jenis Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak Tahun 2020-2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kasus Kekerasan	28	15	18	13	25
2	Status					
	-Korban	21	15	15	13	18
	-Saksi	5	4	3	1	1
	-Pelaku	2	1	9	0	4
3	Jenis Kekerasan					
	-Percabulan	10	13	15	1	0
	-Persetubuhan	7	0	1	11	15
	-Sodomi	2	0	0	0	0
	-Curian Motor	2	0	0	0	4
	-Pemukulan	7	0	0	0	3
	-kekerasan fisik dan mental	0	1	0	1	0
	-narkotika	0	1	1	0	1

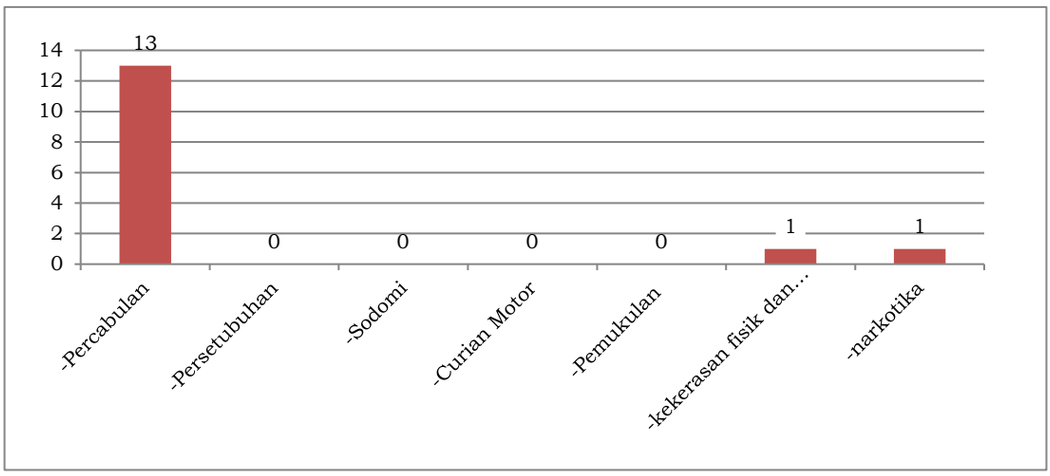
Tabel 2.9 dapat dilihat bahwa kasus kekerasan pada anak mengalami fluktuatif yang mana pada tahun 2020 berjumlah 28 kasus, menurun pada tahun 2021 dan 2022 yaitu 15 dan 18 kasus. Pada tahun 2023 kasus meningkat menjadi 13 kasus dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 25 kasus.

Grafik 2.1
Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak Tahun 2018-2021



Pada grafik 2.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 s/d tahun 2020 terjadi peningkatan kasus kekerasan pada perempuan dan anak secara signifikan, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan kasus menjadi 15 kasus.

Grafik 2.2
Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak
Berdasarkan Jenis Kasus Tahun 2021



Pada grafik 2.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 jenis kekerasan yang tertinggi berupa kasus pencabulan sebanyak 13 kasus dari 15 kasus yang ada.

Tabel 2.10
Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2020 s/d 2024

No	Jenis kelamin	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
1	Perempuan	21	78%	13	86.7%	16	100%	12	92,31%	19	100%
2	Laki-laki	6	22%	2	13.3%	0	0%	1	7,69%	0	0%

Pada Tabel 2.10 dapat dilihat bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak pada tahun 2023 kasus dialami oleh anak perempuan sebanyak 92,31% dan anak laki laki sebanyak 7,69% sedangkan pada tahun 2024 kejadian kasus kekerasan pada anak perempuan sebesar 100%.

Tabel 2.11
Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
1	Pagai Selatan	6	23%	0	0%	0	0%	2	15,3%	2	8%
2	Pagai Utara	2	8%	3	20%	2	11,1%	1	7,7%	0	0%
3	Sikakap	7	27%	3	20%	4	22,2%	3	23%	3	12%
4	Sipora Selatan	4	15%	1	7%	3	16,7%	4	30,8%	3	12%
5	Sipora Utara	1	4%	1	7%	2	11,1%	0	0%	11	44%
6	Siberut Barat Daya	0	0%	2	13%	1	5,5%	0	0%	0	0%
7	Siberut Selatan	2	8%	3	20%	0	0%	1	7,7%	1	4%
8	Siberut Tengah	2	8%	0	0%	1	5,5%	0	0%	2	8%
9	Siberut Utara	0	0%	1	7%	4	22,2%	0	0%	2	8%
10	Siberut Barat	2	8%	1	7%	1	5,5%	2	15,3%	1	4%
11	Luar Mentawai	1	4%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total		26	100%	15	100%	18	100%	13	100%	25	100%

Pada Tabel 2.11 dapat dilihat bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak dari tahun 2020 s/d tahun 2024 paling banyak terjadi pada Kecamatan Sikakap, pada tahun 2020 sebesar 27%, tahun 2021 sebesar 20%, tahun 2022 sebesar 22,2%, tahun 2023 sebesar 23% dan pada tahun 2024 sebesar 12%.

Pada Tabel 2.12
Jumlah Kasus Kekerasan berdasarkan Jenis Pelayanan Tahun 2020-2024

NO	Jenis Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
1	UPTD	0	0	0	0	0
2	Pelayanan Terpadu	1	0	0	0	0
3	Rumah singgah	0	0	0	2	0
4	Unit perlindungan PPA kepolisian	5	6	7	19	15
5	Lembaga lain	0	0	7	22	15

Pada Tabel 2.12 dapat dilihat bahwa penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak dari tahun 2020-2024 paling banyak di unit perlindungan PPA Kepolisian.

Tabel 2.13
Jumlah Forum Anak Tahun 2020 s/d 2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pagai Selatan	0	0	0	0	0
2	Pagai Utara	0	0	0	1	1
3	Sikakap	1	1	1	1	1
4	Sipora Selatan	0	0	1	1	1
5	Sipora Utara	1	1	1	1	1
6	Siberut Barat Daya	0	0	1	1	1
7	Siberut Selatan	0	0	1	1	1
8	Siberut Tengah	0	0	0	1	1
9	Siberut Utara	0	0	0	1	1
10	Siberut Barat	0	0	0	0	0
11	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	1	1	1	1
Total		3	3	6	9	9

Pada Tabel 2.13 dapat dilihat bahwa forum anak di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2020 dengan jumlah forum anak sebanyak 3 forum anak, dan pada tahun 2024 menjadi 9 forum anak. Ada 2 kecamatan yang belum membentuk Forum Anak kecamatan

Tabel 2.14
Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak Tahun 2020-2024

	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Kabupaten Layak Anak	-	-	-	Pratama	Pratama
2	Kecamatan Layak Anak	0	0	1	2	3
3	Desa Layak Anak	0	0	3	3	3

Pada Tabel 2.14 dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 Tingkat Kabupaten Layak Anak menjadi tingkat Pratama, Kecamatan Layak Anak tahun 2024 menjadi 3 Kecamatan dan Desa Layak Anak menjadi 3 Desa

Tabel 2.15
Jumlah Kelompok/Organisasi Perempuan Berdasarkan Bidangnya Tahun 2024

No	Nama Organisasi	Bergerak di Bidang			
		Ekonomi	Politik	Sosial	Hukum
1	Organisasi Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	√	√	√	√
2	Organisasi Bhayangkari	√		√	

No	Nama Organisasi	Bergerak di Bidang			
		Ekonomi	Politik	Sosial	Hukum
3	Organisasi Persit 0319	√		√	
4	Organisasi Adhyaksa	√			
5	Organisasi Jalasenatri	√			
6	Organisasi PKK	√		√	√
7	Organisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)	√		√	
8	Organisasi Ikatan Bidan Indinesia (IBI)	√		√	
9	Organisasi Wanita Islam (WI)	√		√	
10	Organisasi Ikatan Istri Anggota Dewan (IKIAD)	√			
11	Organisasi PPNI	√			
12	Organisasi PWKI	√		√	
13	Organisasi WKRI	√		√	

Pada Tabel 2.15 dapat dilihat bahwa dari 13 organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai semuanya bergerak di bidang ekonomi, dan hanya 1 organisasi yang bergerak di bidang politik.

Tabel 2.16
Jumlah PPKS Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

No	JENIS PPKS/ PPKS	KECAMATAN										Jumlah
		Sipora Utara	Sipora Selatan	Pagai Utara	Pagai Selatan	Sikakap	Siberut Selatan	Siberut Barat Daya	Siberut Tengah	Siberut Utara	Siberut Barat	
1	Anak balita terlantar (0-5 Thn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Anak balita terlantar (5-18 Thn)	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3
3	Anak yang berhadapan dengan hukum (12-17 THN)	0	1	0	0	8	0	0	0	0	0	9
4	Anak Jalanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Anak dengan kedisabilitasan (ADK) (0-17 THN)	23	14	4	17	20	8	2	4	0	19	111
6	Anak korban Kekerasan (0-17 THN)	0	3	1	2	3	0	1	0	2	0	12
7	Anak yang memerlukan perlakuan khusus	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
8	Lannjut usia terlantar	196	316	128	417	269	372	196	90	406	162	2552
9	Penyandang disabilitas	20	59	34	44	42	56	66	61	55	49	486
10	Tuna susila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Gelandangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pengemis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pemulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kelompok minoritas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bekas warga binaan LPM	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
16	Orang dengan HIV AIDS	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
17	Korban penyalah gunaan Napza	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	Korban Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	JENIS PPKS/ PPKS	KECAMATAN										Jumlah
		Sipora Utara	Sipora Selatan	Pagai Utara	Pagai Selatan	Sikakap	Siberut Selatan	Siberut Barat Daya	Siberut Tengah	Siberut Utara	Siberut Barat	
19	Korban tindak kekerasan	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5
20	Pekerja migran bermasalah social (PMBS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Korban bencana alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Korban bencana sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Fakir Miskin	350	150	405	347	225	150	0	650	200	0	2477
25	Keluarga Bermasalah Social Psikologis	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0	0	0	0	0	0	459	75	425	0	959
	JUMLAH	593	546	573	828	571	591	724	880	1088	240	6634

Pada Tabel 2.17 dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 sebanyak 20.376 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 67.297 jiwa.

Tabel 2.17
Jumlah DTKS berdasarkan kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	Rumah Tangga	Anggota Rumah Tangga
1	PAGAI SELATAN	2538	8256
2	SIKAKAP	2379	7450
3	PAGAI UTARA	1541	4925
4	SIPORA SELATAN	2480	7609
5	SIPORA UTARA	2119	6440
6	SIBERUT SELATAN	1660	5784
7	SIBERUT BARAT DAYA	1706	6414
8	SIBERUT TENGAH	2071	7018
9	SIBERUT UTARA	1735	6356
10	SIBERUT BARAT	2147	7045
TOTAL		20376	67297

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak memiliki tantangan dan peluang dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan pelaksanaan layanan antara lain:

1. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang membutuhkan penanganan cepat, tepat, dan berkeadilan.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan karena faktor budaya, stigma, maupun rasa takut.
3. Keterbatasan sumber daya manusia pendamping dan tenaga profesional di lapangan.
4. Keterbatasan akses masyarakat di wilayah terpencil terhadap layanan sosial dan perlindungan anak.

5. Tuntutan masyarakat terhadap layanan yang ramah, mudah diakses, serta berbasis teknologi informasi.
6. Perlunya koordinasi lintas sektor dalam menangani isu-isu sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak secara komprehensif.

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan layanan antara lain:

1. Dukungan regulasi nasional dan daerah terkait perlindungan perempuan dan anak, termasuk kebijakan pengarusutamaan gender.
2. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap isu kekerasan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak.
3. Adanya teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelayanan, pengaduan, dan diseminasi informasi (misalnya aplikasi dan media digital).
4. Semakin terbukanya ruang kerja sama dengan lembaga non-pemerintah, komunitas lokal, serta mitra pembangunan dalam memberikan layanan.
5. Kesempatan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis, maupun jejaring kerja antar daerah.
6. Kebijakan anggaran pemerintah yang mulai memberikan prioritas pada perlindungan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk merumuskan strategi pembangunan yang tepat, perlu diidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Permasalahan tersebut dijabarkan mulai dari masalah pokok, masalah yang lebih spesifik, hingga akar permasalahan, sehingga arah kebijakan yang diambil dapat lebih terarah dan efektif. Berikut disajikan tabel rumusan masalah pokok, masalah, akar masalah, serta arah kebijakan yang menjadi dasar perumusan strategi pembangunan:

Tabel 2.18
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kualitas tata kelola perangkat daerah yang belum optimal, baik dari sisi kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, maupun efektivitas manajemen pelayanan.	- Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM aparatur. - Belum maksimalnya pemanfaatan sistem informasi manajemen. - Lemahnya monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	- Rekrutmen dan distribusi aparatur tidak sesuai kebutuhan teknis. - Minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM. - Belum adanya sistem tata kelola berbasis digital yang terintegrasi
2	Masih tingginya permasalahan kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, dan kelompok rentan yang membutuhkan penanganan komprehensif.	- Data dan pemetaan kelompok rentan belum akurat dan mutakhir. - Keterbatasan sarana prasarana layanan kesejahteraan sosial. - Rendahnya kapasitas pendamping sosial di lapangan.	- Sistem pendataan masih manual dan terfragmentasi. - Anggaran layanan sosial belum proporsional dengan kebutuhan. - Belum ada standar kompetensi dan pelatihan berkelanjutan bagi pendamping.
3	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap	- Adanya stigma sosial dan budaya malu/ takut melapor. - Kurangnya sosialisasi	- Budaya patriarki masih kuat. - Keterbatasan media informasi yang ramah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	perempuan dan anak, yang dipengaruhi oleh budaya lokal, stigma sosial, serta keterbatasan akses.	dan edukasi terkait mekanisme pengaduan. - Terbatasnya akses masyarakat di daerah terpencil terhadap layanan pengaduan.	masyarakat. - Infrastruktur komunikasi di kepulauan belum merata.
4	Tingginya angka kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, baik dalam lingkungan rumah tangga, pendidikan, maupun sosial kemasyarakatan.	- Minimnya mekanisme pencegahan di tingkat keluarga dan masyarakat. - Lemahnya sistem perlindungan dan penegakan hukum. - Kurangnya layanan pemulihan korban yang komprehensif.	- Rendahnya edukasi dan kesadaran gender di tingkat keluarga. - Mekanisme koordinasi dengan aparat penegak hukum belum kuat. - Keterbatasan tenaga profesional (psikolog, konselor, pekerja sosial).
5	Belum optimalnya penerapan prinsip kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan daerah.	- Rendahnya pemahaman aparatur daerah tentang pengarusutamaan gender (PUG). - Belum terintegrasinya PUG dalam perencanaan dan penganggaran daerah. - Kurangnya data terpilah gender untuk mendukung kebijakan.	- Sosialisasi dan advokasi PUG belum berkelanjutan. - Sistem perencanaan daerah masih berorientasi umum, belum sensitif gender. - Mekanisme pengumpulan data gender belum sistematis.
6	Keterbatasan akses layanan perlindungan perempuan dan anak di wilayah terpencil dan kepulauan, yang menjadi karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai.	- Kondisi geografis yang sulit dijangkau. - Keterbatasan tenaga layanan dan fasilitas pendukung di lapangan. - Minimnya pemanfaatan teknologi digital untuk jangkauan layanan.	- Transportasi antar pulau belum memadai. - Distribusi SDM layanan belum merata. - Infrastruktur jaringan internet terbatas.
7	Kurangnya koordinasi lintas sektor dan jejaring kerja sama dengan lembaga lain dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, serta penyelesaian masalah sosial.	- Belum ada mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan. - Rendahnya sinergi program dengan OPD lain, lembaga non-pemerintah, dan komunitas lokal. - Tumpang tindih program antar lembaga terkait isu sosial, perempuan, dan anak.	- Belum ada forum koordinasi lintas sektor yang permanen. - Perencanaan masih sektoral, bukan terintegrasi. - Lemahnya regulasi/ pedoman kolaborasi antar lembaga.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam upaya mewujudkan pembangunan sosial yang berkeadilan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghadapi berbagai isu strategis yang perlu diperhatikan di masa mendatang. Isu-isu tersebut muncul dari dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan geografis yang berkembang baik di tingkat global, nasional, maupun regional.

Secara global, isu kemiskinan, kesenjangan gender, perlindungan anak, hingga perubahan iklim akan memengaruhi kualitas hidup masyarakat termasuk di daerah kepulauan. Sementara itu, di tingkat nasional, fokus pemerintah pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan sistem perlindungan sosial, dan pencegahan kekerasan berbasis gender maupun kekerasan terhadap anak menuntut kesiapan daerah untuk beradaptasi. Pada level regional, kondisi geografis Mentawai yang terpisah

oleh pulau-pulau menimbulkan tantangan tersendiri dalam akses layanan sosial, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingginya angka kemiskinan dan kerentanan sosial
   - Masih terdapat kelompok masyarakat miskin dan rentan yang memerlukan intervensi perlindungan sosial.
   - Akses terhadap program bantuan sosial belum merata di seluruh pulau akibat hambatan geografis.
2. Akses pelayanan sosial yang belum optimal di wilayah kepulauan
   - Kondisi geografis Mentawai yang tersebar menimbulkan kesenjangan pelayanan sosial.
   - Keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi memperlambat respon cepat terhadap kasus sosial.
3. Pemberdayaan perempuan yang belum maksimal
   - Perempuan di wilayah pedesaan dan kepulauan masih menghadapi keterbatasan akses ekonomi, pendidikan, dan kesempatan kerja.
   - Masih terdapat praktik budaya dan sosial yang menempatkan perempuan pada posisi kurang berdaya.
4. Kekerasan terhadap perempuan dan anak
   - Kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap perempuan dan anak masih terjadi.
   - Sistem perlindungan dan pendampingan korban belum merata di seluruh wilayah Mentawai.
5. Perlindungan anak dari berbagai risiko sosial
   - Anak masih rentan terhadap eksploitasi, pernikahan usia dini, pekerja anak, serta kekerasan di lingkungan keluarga maupun sekolah.
   - Belum optimalnya layanan ramah anak di seluruh kecamatan.
6. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pelayanan sosial
   - Tenaga pendamping sosial, psikolog, dan konselor masih terbatas.
   - Fasilitas pendukung layanan perlindungan perempuan dan anak perlu diperkuat.
7. Kerentanan terhadap bencana alam dan dampaknya pada kelompok rentan
   - Mentawai sebagai daerah rawan bencana (gempa dan tsunami) meningkatkan risiko sosial terutama bagi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
   - Perlunya penguatan sistem perlindungan sosial berbasis kesiapsiagaan bencana.

Tabel 2.19
Isu Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi sumber daya alam (pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata)	Masih tingginya angka kemiskinan. Msih rendahnya pemberdayaan masyarakat miskin	Pembangunan yang berkelanjutan	isu kemiskinan, kesenjangan gender, perlindungan anak, hingga perubahan iklim akan	percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan sistem perlindungan sosial, dan pencegahan	kondisi geografis Mentawai yang terpisah oleh pulau-pulau menimbulkan tantangan tersendiri dalam	1. Tingginya angka kemiskinan dan kerentanan sosial. 2. Akses

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			memengaruhi kualitas hidup masyarakat termasuk di daerah kepulauan	kekerasan berbasis gender maupun kekerasan terhadap anak menuntut kesiapan daerah untuk beradaptasi	akses layanan sosial, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak	pelayanan sosial yang belum optimal di wilayah kepulauan. 3. Pemberdayaan perempuan yang belum maksimal. 4. Kekerasan terhadap perempuan dan anak. 5. Perlindungan anak dari berbagai risiko sosial. 6. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pelayanan sosial. 7. Kerentanan terhadap bencana alam dan dampaknya pada kelompok rentan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung pencapaian visi daerah “Kepulauan Mentawai Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera” melalui misi pembangunan yang relevan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pada Urusan Bidang Sosial, tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya transformasi sosial yang inklusif, responsif, dan berkualitas, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, kelompok marginal, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Kondisi lima tahun ke depan yang ingin dicapai adalah meningkatnya produktivitas masyarakat yang inklusif dan berdaya saing.

Pada Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tujuan diarahkan pada peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi melalui penguatan peran keluarga, pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kondisi lima tahun ke depan yang diharapkan adalah terciptanya kehidupan keluarga dan masyarakat yang inklusif, berwawasan lingkungan, serta ramah perempuan dan anak. Di samping itu, dalam rangka mendukung misi “Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Terpercaya”, tujuan Dinas adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, bebas KKN, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi lima tahun mendatang yang ingin dicapai adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang prima.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029

Visi: Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera			
MISI	TUJUAN	SASARAN	
Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif dan Berkualitas	Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Produktivitas Masyarakat yang Inklusif	
Misi 4 : Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi	Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Berbasis Sosial Budaya dan Lingkungan	Pembangunan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat yang Inklusif dan berwawasan lingkungan	
Misi 8: Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif dan terpercaya.	Terwujudnya Birokrasi yang Prima	1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif. handal, transparan dan akuntabel
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang prima , adaptif, inovatif dan melayani

Dengan demikian, seluruh tujuan Renstra ini diharapkan menjadi arah nyata bagi pencapaian pembangunan sosial di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang spesifik, terukur, realistis, terjangkau dalam lima tahun, serta senantiasa ditingkatkan secara berkelanjutan (SMART-C).

Dari tujuan dan sasaran RPJMD diatas, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan tujuan strategis perangkat daerah yaitu:

Tabel 3.2
Tujuan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	*Baseline* 2024	Target				
			2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dan perlindungan, pemberdayaan perempuan dan hak anak yang berkualitas	Indeks Kesejahteraan Sosial	57,09	58,00	58,02	58,05	58,08	59,00
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,35	90,57	90,79	91,01	91,23	91,45
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,66	66,85	67,03	67,22	67,40	67,59

3.2 Sasaran Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan kondisi sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial melalui penyediaan layanan yang lebih cepat, tepat, merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, sehingga mampu menurunkan angka permasalahan sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Meningkatnya kesetaraan gender serta pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak, ditandai dengan menurunnya kasus kekerasan dan diskriminasi, meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta terciptanya lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah terhadap perempuan dan anak.
3. Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah yang tercermin dari tata kelola organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga setiap program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dengan sasaran tersebut, DSP3A Kabupaten Kepulauan Mentawai menargetkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan mampu menghasilkan perubahan nyata yang terukur, realistis, dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai prinsip SMART-C.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Capaian				
					2026	2027	2028	2029	2030
1. Meningkatnya Produktivitas Masyarakat yang Inklusif. 2. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. 3. Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas.	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dan perlindungan, pemberdayaan perempuan dan hak anak yang berkualitas		Indeks Kesejahteraan Sosial	57,09	58,00	58,02	58,05	58,08	59,00
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,35	90,57	90,79	91,01	91,23	91,45
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,66	66,85	67,03	67,22	67,40	67,59
		Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Penurunan PPKS	1,00	1,25	1,5	1,65	I,85	2
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Ketimpangan Gender	0,848	0,848	0,847	0,847	0,846	0,846
			Persentase Penurunan Kasus KDRT	30	45	48	50	55	60
		Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak	60,3	64,5	66,8	69,2	71,7	74,2
			Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Anak	1,3	1,45	1,6	1,8	2,0	2,4
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai lakip						
			Jumlah inovasi yang diterapkan						
			Persentase						

3.3 Strategi Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029

Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi rencana program prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029. Strategi jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan bagaimana cara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rumusan strategi dalam kurun waktu 5 tahun rencana adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029

VISI : Kepulauan Mentawai Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 1 Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas		
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Sasaran 1.1. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial	- Jaminan Kesehatan yang Inklusif - Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif - Pembinaan dan Pemberdayaan PPKS - Pemberdayaan ekonomi bagi Masyarakat Miskin - Pemberdayaan ekonomi bagi kepala keluarga perempuan, pemuda, disabilitas. - Pembangunan shelter, jalan evakuasi, radio, kesiapsiagaan bencana dan rambu rambu (alat peraga) - Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana
MISI 4 Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi		
MISI 7 Mewujudkan Masyarakat yang Aman Harmonis dan Berkeadilan		
Terwujudnya Kesetaraan Gender, Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	Sasaran 2.1. Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak	- Pembangunan Keluarga - Perlindungan Hak Anak - Perlindungan Perempuan - Perlindungan Disabilitas - Pembangunan Lingkungan Sosial yang Inklusif - Pembangunan Responsif Gender - Penegakan regulasi dalam perlindungan anak dan kekerasan pada perempuan. - Penguatan sistem keamanan lingkungan. - Penguatan Proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program Kesetaraan Gender - Peningkatan koordinasi, pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa tentang pemenuhan hak anak dan peningkatan perwujudan Kabupaten Layak Anak (KLA); - Peningkatan Pemahaman, kapasitas dan koordinasi pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga masyarakat tentang pencegadan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

MISI 8 Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Terpercaya		
Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	- Pelayanan publik berbasis digital - Penyediaan platform online pelayanan masyarakat sebagai sarana evaluasi, koreksi, pengaduan dari masyarakat - Pengelolaan aset daerah - Inovasi pelayanan publik - Penguatan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik - Revolusi Mental - Peningkatan kualitas SDM - Standar Pelayanan, Transparansi, dan Akuntabilitas

Untuk mencapai tujuan strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai secara efektif, diperlukan perencanaan yang terstruktur dan bertahap. Penahapan ini dirancang untuk memastikan setiap strategi dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, mulai dari tahap perintisan, penguatan, perluasan, integrasi, hingga pemantapan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tahapan tersebut meliputi: (1) tahap fondasi pada tahun 2026 yang berfokus pada pembangunan dasar program dan sistem; (2) tahap penguatan pada tahun 2027 dengan memperluas cakupan layanan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan; (3) tahap perluasan pada tahun 2028 melalui penerapan program secara lebih luas dan merata; (4) tahap integrasi pada tahun 2029 dengan menghubungkan berbagai program dan kebijakan lintas sektor; serta (5) tahap pemantapan dan keberlanjutan pada tahun 2030 yang diarahkan pada pelembagaan dan penguatan hasil capaian agar berkelanjutan.

Dengan penahapan ini, diharapkan seluruh strategi yang mendukung tujuan utama yaitu terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial, terwujudnya kesetaraan gender serta perlindungan hak perempuan dan anak, serta meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dapat tercapai secara terukur, realistis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Mentawai.

Tabel 3.5
Penahapan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Memulai program jaminan kesehatan inklusif, pendataan PPKS, dan *pilot project* pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin, perempuan kepala keluarga, pemuda, dan disabilitas.	Perluasan cakupan perlindungan sosial adaptif, peningkatan kapasitas PPKS, serta pengembangan usaha mikro berbasis komunitas.	Pembinaan berkelanjutan PPKS, pembangunan shelter awal, dan perintisan infrastruktur kesiapsiagaan bencana (rambu evakuasi, jalur evakuasi).	Penguatan perlindungan sosial inklusif berbasis teknologi, pembangunan shelter tambahan, serta radio komunikasi kebencanaan.	Pemantapan sistem perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan, serta kesiapsiagaan bencana terintegrasi dengan komunitas.
Mulai sosialisasi pembangunan keluarga inklusif, advokasi perlindungan perempuan & anak, serta pelatihan pemahaman gender.	Pembentukan forum anak & perempuan, penguatan regulasi perlindungan anak dan perempuan, serta pengembangan program	Implementasi KLA tahap awal, peningkatan kapasitas aparat & masyarakat dalam pencegahan kekerasan.	Integrasi kebijakan responsif gender dalam perencanaan & penganggaran daerah, penguatan sistem keamanan lingkungan	Terwujudnya KLA, pemantapan regulasi dan sistem perlindungan anak & perempuan, serta kesetaraan gender yang melembaga dalam kebijakan publik.

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	lingkungan sosial inklusif.		berbasis masyarakat.	
Pengembangan pelayanan publik berbasis digital dasar (platform aduan & evaluasi masyarakat).	Penguatan inovasi pelayanan publik, implementasi standar pelayanan minimum, dan peningkatan akuntabilitas.	Integrasi pengelolaan aset daerah, pengembangan revolusi mental ASN, serta penguatan kapasitas SDM.	Digitalisasi penuh pelayanan publik, pemantapan sistem transparansi & akuntabilitas lintas program.	Tata kelola perangkat daerah yang profesional, terpercaya, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3.4 Arah Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran konkrit strategi pembangunan yang merupakan bagian dari upaya merealisasikan sasaran dan tujuan strategis jangka menengah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029.

Tabel 3.6
Arah Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah kebijakan Renstra PD
1	Penerapan standar pelayanan publik berbasis digital sesuai NSPK Kementerian Sosial dan Permen PANRB tentang pelayanan publik	Digitalisasi Pelayanan dan Partisipasi Publik	Pengembangan platform digital pelayanan sosial, pengaduan, dan partisipasi masyarakat
	Penerapan standar kompetensi ASN dan budaya kerja sesuai NSPK BKN & LAN	Peningkatan Kapasitas dan Budaya Kerja Aparatur	Pelatihan teknis, manajerial, dan budaya kerja adaptif bagi aparatur Dinsos P3A
	Penetapan standar SPM dan SOP layanan berbasis kebutuhan pengguna (citizen-centric)	Desain Pelayanan Berorientasi Pengguna (*Citizen-Centric*)	Perbaikan SOP layanan Dinsos P3A berbasis kebutuhan masyarakat rentan dan kelompok prioritas
	Penyusunan inovasi daerah sesuai Permendagri 104/2018 tentang inovasi daerah	Inovasi Berkelanjutan dan Adaptabilitas	Pengembangan inovasi layanan sosial berbasis teknologi dan adaptasi kebijakan baru sesuai dinamika kebutuhan
	Penerapan standar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi	Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelayanan melalui publikasi kinerja berbasis digital
2	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai PP 2/2018	Pemenuhan SPM Sosial	Pelaksanaan program/kegiatan prioritas untuk pemenuhan layanan dasar sosial sesuai SPM
	Operasionalisasi regulasi perlindungan sosial adaptif sesuai NSPK Kemensos	Peningkatan perlindungan sosial yang integratif, adaptif, inklusi	Penguatan jaminan sosial, bantuan sosial, dan sistem perlindungan adaptif bagi kelompok rentan
	Sinkronisasi regulasi perlindungan sosial antar	Perluasan perlindungan sosial	Integrasi layanan sosial dengan sektor pendidikan,

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah kebijakan Renstra PD
	sektor sesuai NSPK nasional	pada sector pendidikan, transportasi, tenaga kerja, layanan dasar, dan layanan public.	kesehatan, tenaga kerja, dan transportasi
	Pedoman nasional pemberdayaan sosial sesuai NSPK Kemensos	Pemberdayaan PPKS	Penguatan pembinaan, rehabilitasi, dan pemberdayaan PPKS secara berkelanjutan
3	Standar kesiapsiagaan bencana sosial sesuai BNPB dan Kemensos	Kolaborasi lintas sektor dalam penguatan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini dan penyediaan rambu rambu/alat peraga kebencanaan	Pengembangan shelter, jalur evakuasi, rambu bencana, serta pelatihan kesiapsiagaan masyarakat
4	Pedoman PUG sesuai Instruksi Presiden No. 9/2000	Penguatan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah	Integrasi PUG dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program daerah
	NSPK pembangunan ketahanan keluarga dari BKKBN	Penguatan ketahanan keluarga untuk kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dan anak	Pengembangan program keluarga responsif gender untuk mendukung perlindungan perempuan dan anak
	Standar edukasi kesehatan reproduksi sesuai Kemenkes & BKKBN	Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini	Sosialisasi, penyuluhan, dan layanan konseling kesehatan reproduksi remaja
	Pedoman penanganan kekerasan perempuan & anak (Peraturan Menteri PPPA)	Sinergi lintas sector dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penguatan koordinasi antar lembaga dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan
	NSPK pemberdayaan ekonomi perempuan dan kelompok rentan	Penguatan jumlah angkatan kerja perempuan	Peningkatan keterampilan, akses usaha, dan program pemberdayaan ekonomi perempuan
	Pedoman pengembangan lingkungan sosial inklusif sesuai NSPK Kemensos	Pengembangan program kerukunan berbasis keluarga untuk lingkungan sosial yang harmonis dan inklusif	Program kerukunan keluarga dan masyarakat berbasis nilai sosial budaya local
	NSPK Kabupaten/Kota Layak Anak dari KemenPPPA	Mendorong Mentawai menjadi kabupaten layak anak	Peningkatan indikator KLA melalui pemenuhan hak anak, fasilitas ramah anak, dan partisipasi anak
5	Standar sistem pelaporan kinerja pemerintah daerah	Pengembangan Sistem Pelaporan yang Mudah Diakses	Penyediaan sistem informasi monitoring & evaluasi berbasis digital yang mudah diakses masyarakat
	NSPK pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik	Pemanfaatan Teknologi	Integrasi teknologi dalam setiap aspek pelayanan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sebagai amanat Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pencapaian terget kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 (lima) tahun 2025-2029 selanjutnya implementasinya terintegrasi ke dalam program program yang menunjang penyelenggaraan bidang urusan sosial, diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
7. Program Perlindungan Perempuan
8. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
9. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
10. Program Perlindungan Khusus Anak

Uraian kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan urusan dinas sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
   2) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
   3) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
   4) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
   5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   3) Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
   4) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   5) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

c. Administrasi Umum
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
   5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
   6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
   7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   10) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   11) Penyediaan Makanan dan Minuman
   12) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daeran
   13) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
   14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

a. Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
   1) Sub kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
   2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT

b. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
   2) Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
   3) Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
   4) Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
   5) Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
   1) Sub kegiatan Penyediaan Permakanan
   2) Sub kegiatan Penyediaan Sandang
   3) Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu
   4) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
   5) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
   6) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
   7) Sub kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
   8) Sub kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
   9) Sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
   10) Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
   11) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
   12) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
   13) Sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
   1) Sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
   2) Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
   3) Sub kegiatan Penyediaan Permakanan
   4) Sub kegiatan Penyediaan Sandang
   5) Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu
   6) Sub kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti
   7) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
   8) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
   9) Sub kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

10) Sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
11) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
12) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
13) Sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
14) Sub kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

a. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar.
   1) Sub kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
   2) Sub kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar
   3) Sub kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
b. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
   2) Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
   3) Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
   1) Sub kegiatan Penyediaan Makanan
   2) Sub kegiatan Penyediaan Sandang
   3) Sub kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
   4) Sub kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
   5) Sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial
b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
   1) Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
   2) Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
   1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
   2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
   3) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
   4) Sub kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG
b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
   1) Sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
   2) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
3) Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
   a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      2) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
      1) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
      2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
   c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
      2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
      3) Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
      4) Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
   a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
      1) Sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
      2) Sub kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
   a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
      1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
      2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
   b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
      1) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
      2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      3) Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4) Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

10. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

c. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
   2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

d. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   1) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
   3) Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
   4) Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

e. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
   1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   3) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019, sub kegiatan adalah aktivitas atau layanan yang merupakan bagian dari suatu kegiatan. Sub kegiatan lebih spesifik daripada kegiatan dan merupakan implementasi konkret dari kegiatan tersebut.

Sub kegiatan menggambarkan aktivitas atau layanan yang dilakukan untuk mencapai sasaran kegiatan. Subkegiatan terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja yang diperlukan untuk mencapai keluaran yang diharapkan dalam kegiatan tersebut. Dengan kata lain, sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari kegiatan utama, memberikan detail tentang aktivitas dan belanja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuan Sub kegiatan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan utama dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien melalui pencapaian berbagai keluaran yang telah ditetapkan. Berikut tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan dan target pagu indikatif dalam rangka mencapai tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Rencana Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatnya Produktivitas Masyarakat yang Inklusif. 2. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. 3. Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas.	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dan perlindungan, pemberdayaan perempuan dan hak anak yang berkualitas				Indeks Kesejahteraan Sosial		
					Indeks Pembangunan Gender		
					Indeks Perlindungan Anak		
		Meningkatkan kesejahteraan sosial PPKS			Penurunan PPKS		
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial		Persentase penurunan PPKS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Terlakananya Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kab/Kota	Persentase PSKS yang dilatih		
			Meningkatnya Rehabilitasi sosial		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti social	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti social yang mendapatkan bantuan	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti social	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana		Persentase penyaluran bantuan tepat sasaran	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Terlaksananya Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana mendapatkan bantuan	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan Sosial		Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial telah menerima jaminan social	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Terlaksananya Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Tersedianya data PMKS yang valid	Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE.
1	2	3	4	5	6	7	8
					PMKS menerima perlindungan dan jaminan social		
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan			Indeks Ketimpangan Gender		
					Persentase Penurunan Kasus KDRT		
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase OPD yang menggunakan PPRG dalam perencanaan dan penganggaran	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Terlaksananya Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintahan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD yang mengikuti Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintahan	Kegiatan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintahan kewenangan kabupaten/kota	
				Terlaksananya Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya perlindungan terhadap		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE.
1	2	3	4	5	6	7	8
			perempuan		penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		
				Terlaksananya Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah/lembaga yang melaksanakan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	
				Terlaksananya Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya pemberdayaan dan pemenuhan hak anak		Pencanangan Kecamatan Layak Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Terlaksananya Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang mendapat Pelembagaan PHA	Kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan	

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE.
1	2	3	4	5	6	7	8
				kewenangan kabupaten/kota		kabupaten/kota	
		Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak			Indeks Perlindungan Khusus Anak		
					Persentase penurunan Kasus Kekerasan Anak		
			Meningkatnya perlindungan terhadap anak		Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Terlaksananya Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah para pihak yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	
				Terlaksananya Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota	Jumlah layanan perlindungan khusus anak yang memerlukan koordinasi	Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota	
				Terlaksananya	Jumlah lembaga penyedia	Kegiatan penguatan	

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KE.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Penguatan dan pengembangan tingkat daerah	dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah			Nilai lakip		
					Jumlah inovasi yang diterapkan		
					Persentase capaian kinerja perangkat daerah		

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	3.619.911.954	100%	3.536.629.502	100%	3.610.382.111	100%	3.662.210.017	100%	3.699.883.851	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat	2 Dokumen/ 1 laporan	2 Dokumen/ 1 laporan	12.000.000	2 Dokumen/ 1 laporan	7.000.000	2 Dokumen/ 1 laporan	12.000.000	2 Dokumen/ 1 laporan	12.000.000	2 Dokumen/ 1 laporan	12.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	100%	100%	3.058.953.918	100%	3.018.953.918	100%	3.058.953.918	100%	3.098.953.918	100%	3.098.953.918	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	31 Orang	3.034.753.918	32 Orang	3.034.753.918	33 Orang	3.034.753.918	34 Orang	3.034.753.918	35 Orang	3.034.753.918	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	22.200.000	1 Dokumen	22.200.000	1 Dokumen	22.200.000	1 Dokumen	22.200.000	1 Dokumen	22.200.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	72 Laporan	72 Laporan	2.000.000	72 Laporan	2.000.000	72 Laporan	2.000.000	72 Laporan	2.000.000	72 Laporan	2.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dan kelengkapan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	69.958.036	100%	69.175.584	100%	70.428.193	100%	72.256.099	100%	101.929.933	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.500.000	1 Paket	3.500.000	1 Paket	3.500.000	1 Paket	5.500.000	1 Paket	5.500.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	3.500.000	1 Paket	3.500.000	1 Paket	3.970.157	1 Paket	3.798.063	1 Paket	3.793.063	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	5.958.036	2 Paket	5.175.584	2 Paket	5.958.036	2 Paket	5.958.036	2 Paket	5.631.870	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Paket	1.000.000	Paket	1.000.000	Paket	1.000.000	Paket	1.000.000	Paket	1.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	80.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang diadakan	100%	100%	65.000.000	100%	57.500.000	100%	55.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3 Paket	15.000.000	3 Paket	15.000.000	3 Paket	15.000.000	3 Paket	15.000.000	3 Paket	15.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2 Unit	10.000.000	1 Unit	7.500.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	10.000.000	1 Unit	5.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa pelayanan umum kantor dan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	114.000.000	100%	114.000.000	100%	114.000.000	100%	114.000.000	100%	114.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	yang dibayar												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	54.000.000	1 Laporan	54.000.000	1 Laporan	54.000.000	1 Laporan	54.000.000	1 Laporan	54.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah layak pakai	100%	100%	150.000.000	100%	135.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	154.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	35.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	25.000.000	4 unit	25.000.000	4 unit	25.000.000	4 unit	25.000.000	4 unit	25.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	8 Unit	20.000.000	8 unit	20.000.000	8 unit	20.000.000	8 unit	20.000.000	8 unit	20.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	35.000.000	1 unit	20.000.000	2 unit	35.000.000	2 unit	35.000.000	2 unit	34.000.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2 Unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2 Unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	20.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				183.048.721		249.946.568	85%	255.158.935		258.821.803		261.484.351	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial	75%	80%	36.609.744	82%	49.989.314	85%	51.031.787	86%	51.764.361	90%	52.296.870	
	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar												
	Persentase Potensi dan sumber												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar												
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza	75%	80%	36.609.744	82%	49.989.314	85%	51.031.787	86%	51.764.361	90%	52.296.870	
	Persentase Pekerjaan Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial Yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana sesuai Standar	80%	81%	36.609.744	82%	49.989.314	85%	51.031.787	86%	51.764.361	90%	52.296.870	
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensi dalam Pelayanan Sosial	25%	30%	36.609.744	32%	49.989.314	35%	51.031.787	36%	51.764.361	40%	52.296.870	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	15%	20%	36.609.744	22%	49.989.314	25%	51.031.787	30%	51.764.361	40%	52.296.870	
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Masyarakat KAT yang diberdayakan	100%	100%	63.048.721	100%	75.946.568	100%	81.158.935	100%	84.821.803	100%	87.484.351	
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	75 Keluarga	35 Keluarga	20.000.000	36 Keluarga	30.000.000	37 Keluarga	35.212.367	38 Keluarga	36.821.803	40 Keluarga	38.484.351	
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	75 Keluarga	75 Keluarga	43.048.721	75 Keluarga	45.946.568	75 Keluarga	45.946.568	75 Keluarga	48.000.000	75 Keluarga	49.000.000	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dilatih	100%	100%	100.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	63 Orang	43 Orang	20.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah TenagaKesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	12 Orang	12 Orang	20.000.000	12 Orang	30.000.000	12 Orang	30.000.000	12 Orang	30.000.000	12 Orang	30.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Kewenangan Kabupaten/Kota	yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota												
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 Keluarga	30 Keluarga	20.000.000	30 Keluarga	30.000.000	30 Keluarga	30.000.000	30 Keluarga	30.000.000	30 Keluarga	30.000.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	3 Lembaga	1 Lembaga	20.000.000	1 Lembaga	25.000.000	1 Lembaga	25.000.000	1 Lembaga	25.000.000	1 Lembaga	25.000.000	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	0 Sertifikat	40 Sertifikat	20.000.000	10 Sertifikat	25.000.000	10 Sertifikat	25.000.000	10 Sertifikat	25.000.000	10 Sertifikat	25.000.000	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota		100%	100%	10.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000	
Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/ keluhan yang dilayani dan/ atau ditindaklanjuti	Laporan	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	17.000.000	2 Laporan	17.000.000	2 Laporan	17.000.000	2 Laporan	17.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah				10.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	
Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Lembaga	2 Lembaga	10.000.000	2 Lembaga	17.000.000	2 Lembaga	17.000.000	2 Lembaga	17.000.000	2 Lembaga	17.000.000	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			100%	915.243.605	100%	1.127.007.247	100%	1.150.509.772	100%	1.167.025.618	100%	1.179.031.027	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15%	20%	183.048.721	22%	225.401.449	25%	230.101.954	30%	233.405.124	40%	235.806.205	
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15%	20%	183.048.721	22%	225.401.449	25%	230.101.954	30%	233.405.124	40%	235.806.205	
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15%	20%	183.048.721	22%	225.401.449	25%	230.101.954	30%	233.405.124	40%	235.806.205	
	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15%	20%	183.048.721	22%	225.401.449	25%	230.101.954	30%	233.405.124	40%	235.806.205	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti												
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	15%	20%	183.048.721	22%	225.401.449	25%	230.101.954	30%	233.405.124	40%	235.806.205	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti sosial yang mendapatkan bantuan	100%	100%	615.243.605	100%	762.007.247	100%	785.509.772	100%	802.025.618	100%	814.031.027	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100 Orang	110.000.000	120 Orang	130.000.000	125 Orang	135.000.000	125 Orang	135.000.000	130 Orang	140.000.000	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	Orang	75 Orang	75.000.000	80 orang	83.000.000	80 orang	85.000.000	80 orang	85.000.000	80 orang	85.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota												
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65 Orang	65.000.000	70 Orang	74.500.000	75 Orang	80.000.000	75 Orang	80.000.000	75 Orang	80.000.000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8 Orang	35.243.605	8 Orang	75.000.000	8 Orang	75.000.000	8 Orang	75.000.000	8 Orang	75.000.000	
Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	20 Orang	50.000.000	20 Orang	30.000.000	40 Orang	70.000.000	40 Orang	75.000.000	40 Orang	75.000.000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20 Orang	40.000.000	20 Orang	50.000.000	20 Orang	50.000.000	20 Orang	55.000.000	20 Orang	55.000.000	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,	Orang	10 Orang	30.000.000	10 Orang	35.000.000	10 Orang	35.000.000	10 Orang	35.000.000	10 Orang	35.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota												
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	390 Orang	50 Orang	60.000.000	50 Orang	79.507.247	50 Orang	80.509.772	50 Orang	82.025.618	50 Orang	84.031.027	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15 Orang	30.000.000	15 Orang	35.000.000	15 Orang	35.000.000	15 Orang	35.000.000	15 Orang	35.000.000	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20 Orang	40.000.000	20 Orang	45.000.000	20 Orang	45.000.000	20 Orang	45.000.000	20 Orang	45.000.000	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10 Orang	30.000.000	10 Orang	35.000.000	10 Orang	35.000.000	10 Orang	35.000.000	10 Orang	35.000.000	
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20 Orang	50.000.000	20 Orang	60.000.000	20 Orang	60.000.000	20 Orang	65.000.000	20 Orang	70.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan bantuan	100%	100%	200.000.000	100%	240.000.000	100%	240.000.000	100%	240.000.000	100%	240.000.000	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40 Orang	25.000.000	40 Orang	30.000.000	40 Orang	30.000.000	40 Orang	30.000.000	40 Orang	30.000.000	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10 Orang	25.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	30.000.000	10 Orang	30.000.000	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30 Orang	30.000.000	30 Orang	35.000.000	30 Orang	35.000.000	30 Orang	35.000.000	30 Orang	35.000.000	
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25 Orang	30.000.000	25 Orang	35.000.000	25 Orang	35.000.000	25 Orang	35.000.000	25 Orang	35.000.000	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan	Orang	20 Orang	25.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Kabupaten/Kota												
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15 Orang	25.000.000	15 Orang	30.000.000	15 Orang	30.000.000	15 Orang	30.000.000	15 Orang	30.000.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	25 Orang	100.000.000	25 Orang	125.000.000	25 Orang	125.000.000	25 Orang	125.000.000	25 Orang	125.000.000	
Pemberian BimbinganSosial kepada Keluarga Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20 Orang	40.000.000	20 Orang	50.000.000	20 Orang	50.000.000	20 Orang	50.000.000	20 Orang	50.000.000	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/ atau Identitas Anak bagi	Orang	20 Orang	20.000.000	20 Orang	25.000.000	20 Orang	25.000.000	20 Orang	25.000.000	20 Orang	25.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota												
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10 Orang	20.000.000	10 Orang	25.000.000	10 Orang	25.000.000	10 Orang	25.000.000	10 Orang	25.000.000	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10 Orang	20.000.000	10 Orang	25.000.000	10 Orang	25.000.000	10 Orang	25.000.000	10 Orang	25.000.000	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10 Orang	20.000.000	10 Orang	25.000.000	10 Orang	25.000.000	10 Orang	25.000.000	10 Orang	25.000.000	
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10 Orang	20.000.000	10 Orang	25.000.000	10 Orang	25.000.000	10 Orang	25.000.000	10 Orang	25.000.000	
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Kabupaten/Kota												
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			100%	457.621.803	100%	583.208.659	100%	595.370.849	100%	603.917.541	100%	610.130.153	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1.Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	5%	8%	76.270.300	10%	97.201.443	12%	99.228.475	15%	100.652.923	20%	101.688.359	
	2.Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	5%	10%	76.270.300	12%	97.201.443	15%	99.228.475	18%	100.652.923	25%	101.688.359	
	3.Persentase Daerah yang Melaksanaka Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	75%	80%	76.270.300	82%	97.201.443	85%	99.228.475	86%	100.652.923	90%	101.688.359	
	4.Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	60%	61%	76.270.300	62%	97.201.443	65%	99.228.475	66%	100.652.923	70%	101.688.359	
	5.Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	40%	42%	76.270.300	45%	97.201.443	46%	99.228.475	48%	100.652.923	50%	101.688.359	
	6.Persentase Keluarga Miskin dan Rentang Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	5%	20%	76.270.300	22%	97.201.443	25%	99.228.475	30%	100.652.923	40%	101.688.359	
	7.Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan												

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun												
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				207.621.803		258.208.659		263.370.849		268.917.541		275.130.153	
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20 Orang	60.000.000	20 Orang	80.000.000	20 Orang	85.000.000	20 Orang	85.000.000	20 Orang	90.000.000	
Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20 Orang	70.000.000	20 Orang	85.000.000	20 Orang	85.000.000	20 Orang	90.000.000	20 Orang	90.000.000	
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20 Orang	77.621.803	20 Orang	93.208.659	20 Orang	93.370.849	20 Orang	93.917.541	20 Orang	95.130.153	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/ Kota	Persentase Data Fakir Miskin yang Valid	100%	100%	250.000.000	100%	325.000.000	100%	332.000.000	100%	335.000.000	100%	335.000.000	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	Orang	60.500 Orang	100.000.000	60.500 Orang	125.000.000	60.500 Orang	130.000.000	60.500 Orang	130.000.000	60.500 Orang2	130.000.000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	21.500 Keluarga	60.000.000	21.500 Keluarga	85.000.000	21.500 Keluarga	87.000.000	21.500 Keluarga	90.000.000	21.500 Keluarga	90.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Keluarga	21.500 Keluarga	60.000.000	21.500 Keluarga	75.000.000	21.500 Keluarga	75.000.000	21.500 Keluarga	75.000.000	21.500 Keluarga	75.000.000	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60.500 Keluarga	30.000.000	60.500 Keluarga	40.000.000	60.500 Keluarga	40.000.000	60.500 Keluarga	40.000.000	60.500 Keluarga	40.000.000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA			100%	411.859.622	100%	416.577.613	100%	425.264.892	100%	431.369.672	100%	435.807.252	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	1.Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	75%	80%	137.286.541	82%	138.859.204	85%	141.754.964	86%	143.789.891	90%	145.269.084	
	2.Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaan-nya	82%	85%	137.286.541	88%	138.859.204	90%	141.754.964	91%	143.789.891	94%	145.269.084	
	3.Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan	85%	86%	137.286.541	88%	138.859.204	90%	141.754.964	92%	143.789.891	95%	145.269.084	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Sosial												
	4.Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar												
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase Korban Bencana mendapat bantuan	100%	100%	321.859.622	100%	326.577.613	100%	335.264.892	100%	341.369.672	100%	345.807.252	
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	325 Orang	120 Orang	100.000.000	120 Orang	100.000.000	120 Orang	105.000.000	120 Orang	110.000.000	120 Orang	110.000.000	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	50 Orang	65.000.000	50 Orang	69.000.000	50 Orang	70.000.000	50 Orang	70.000.000	50 Orang	72.000.000	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	52.000.000	4 Unit	53.000.000	4 Unit	55.000.000	
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang	100 Orang	56.859.622	100 Orang	57.577.613	100 Orang	58.264.892	100 Orang	58.369.672	100 Orang	58.807.252	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Kewenangan Kabupaten/Kota												
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang diberdayakan dalam Keesiapsiagaan Menghadapi Bencana	100 %	100 %	65.000.000	100 %	65.000.000	100 %	65.000.000	100 %	65.000.000	100 %	65.000.000	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1 Kampung	20.000.000	1 Kampung	20.000.000	1 Kampung	20.000.000	1 Kampung	20.000.000	1 Kampung	20.000.000	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20 Orang	45.000.000	20 Orang	45.000.000	20 Orang	45.000.000	20 Orang	45.000.000	20 Orang	45.000.000	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Kabupaten/ Kota													
Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang	20 Orang	25.000.000	20 Orang	25.000.000	20 Orang	25.000.000	20 Orang	25.000.000	20 Orang	25.000.000	
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				228.810.901		249.946.568		255.158.935		258.821.803		261.484.351	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	4%	4,5%	114.405.451	4,6%	124.973.284	4,8%	127.579.468	5,0%	129.410.902	6,0%	130.742.176	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	61,2%	62,2%	114.405.451	62,8%	124.973.284	63,5%	127.579.468	64,0%	129.410.902	64,5%	130.742.176	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota				78.810.901		84.946.568		90.158.935		93.821.803		96.484.351	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Orang	50 Orang	45.000.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	55.000.000	50 Orang	55.000.000	50 Orang	55.000.000	
Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan	Orang	40 Orang	33.810.901	40 Orang	34.946.568	40 Orang	35.158.935	40 Orang	38.821.803	40 Orang	41.484.351	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	PUG tingkat Kab/Kota												
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Organisasi	3 Organisasi	50.000.000	3 Organisasi	60.000.000	3 Organisasi	60.000.000	3 Organisasi	60.000.000	3 Organisasi	60.000.000	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	3 Organisasi	25.000.000	3 Organisasi	30.000.000	3 Organisasi	30.000.000	3 Organisasi	30.000.000	3 Organisasi	30.000.000	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah lembaga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan	1 Lembaga/ 30 orang/ 1 Dokumen	1 Lembaga/ 30 orang/ 1 Dokumen	100.000.000	1 Lembaga / 30 orang/ 1 Dokumen	105.000.000	1 Lembaga / 30 orang/ 1 Dokumen	105.000.000	1 Lembaga/ 30 orang/ 1 Dokum	105.000.000	1 Lembaga / 30 orang/ 1 Dokumen	105.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Kewenangan Kabupaten/Kota	pemberdayaan perempuan								en				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1 Lembaga	40.000.000	1 Lembaga	40.000.000	1 Lembaga	40.000.000	1 Lembaga	40.000.000	1 Lembaga	40.000.000	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	60 Orang	40.000.000	60 Orang	45.000.000	60 Orang	45.000.000	60 Orang	45.000.000	60 Orang	45.000.000	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		100%	100%	274.573.082	100%	283.272.777	100%	289.180.127	100%	293.331.377	100%	296.348.931	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan	82%	85%	274.573.082	88%	283.272.777	90%	289.180.127	91%	293.331.377	94%	296.348.931	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Komprehensif												
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/ perangkat daerah yang melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota	1 Dokumen/ 2 Perangkat daerah/lembaga/kelompok	1 Dokumen/2 Perangkat daerah/lembaga/kelompok	114.573.082	1 Dokumen/2 Perangkat daerah/lembaga/kelompok	118.272.777	1 Dokumen/2 Perangkat daerah/lembaga/ kelompok	124.180.127	1 Dokumen/2 Perangkat daerah/ lembaga/ /kelompok	126.331.377	1 Dokumen/2 Perangkat daerah/lembaga/ kelompok	127.348.931	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	67..000.000	1 Dokumen	68.000.000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Perangkat daerah/lembaga/kelompok	2 Perangkat daerah/lembaga/kelompok	54.573.082	2 Perangkat daerah/lembaga/kelompok	58.272.777	2 Perangkat daerah/lembaga/ kelompok	59.180.127	2 Perangkat daerah/ lembaga/ /kelompok	59.331.377	2 Perangkat daerah/lembaga/ kelompok	59.348.931	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	10 orang/ 1 layanan	10 orang/ 1 layanan	110.000.000	10 orang/ 1 layanan	115.000.000	10 orang/ 1 layanan	115.000.000	10 orang/ 1 layanan	117.000.000	10 orang/ 1 layanan	117.000.000	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan	Orang	10 orang	50.000.000	10 orang	50.000.000	10 orang	50.000.000	10 orang	50.000.000	10 orang	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan												
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	1 Layanan	1 Layanan	60.000.000	1 Layanan	65.000.000	1 Layanan	65.000.000	1 Layanan	67.000.000	1 Layanan	67.000.000	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				91.524.361		99.978.627		102.063.574		103.528.721		104.593.740	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/ atau Penyusunan	85%	86%	91.524.361	88%	99.978.627	90%	102.063.574	92%	103.528.721	95%	104.593.740	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Kebijakan												
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan/ Data			91.524.361		99.978.627		102.063.574		103.528.721		104.593.740	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen		91.524.361		99.978.627		102.063.574		103.528.721		104.593.740	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				274.573.082		333.262.091		340.211.914		345.095.738		348.645.801	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	60%	62%	274.573.082	65%	333.262.091	68%	340.211.914	70%	345.095.738	72%	348.645.801	
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota			134.573.082		173.262.091		180.211.914		185.095.738		188.645.801	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usahayang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada	Organisasi		70.000.000		90.000.000		95.000.000		95.000.000		98.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha												
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		64.573.082		83.262.091		85.211.914		90.095.738		90.645.801	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan terhadap lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten	20 orang/ 10 Dokumen	20 orang/ 10 Dokumen	140.000.000	20 orang/ 10 Dokumen	160.000.000	20 orang/ 10 Dokumen	160.000.000	20 orang/ 10 Dokumen	160.000.000	20 orang/ 10 Dokumen	160.000.000	
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	35.000.000	10 Orang	40.000.000	10 Orang	40.000.000	10 Orang	40.000.000	10 Orang	40.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota												
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		100%	100%	228.810.901	100%	333.262.091	100%	340.211.914	100%	345.095.738	100%	348.645.801	
Meningkatnnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	82%	85%	114.405.451	88%	166.631.045	90%	170.105.957	91%	172.547.869	94%	174.322.901	
	2.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	66%	70%	114.405.451	71%	166.631.045	72%	170.105.957	74%	172.547.869	75%	174.322.901	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah para pihak yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	19 Perangkat daerah/lembaga/kelompok/1 dokumen	19 Perangkat daerah/lembaga/kelompok/1 dokumen	50.000.000	19 Perangkat daerah/lembaga/kelompok/1 dokumen	70.000.000	19 Perangkat daerah/lembaga/kelompok/1 dokumen	72.000.000	19 Perangkat daerah/lembaga/kelompok/1 dokumen	75.000.000	19 Perangkat daerah/lembaga/kelompok/1 dokumen	78.000.000	
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan	30 Orang	30 Orang	30.000.000	30 Orang	40.000.000	30 Orang	40.000.000	30 Orang	42.000.000	30 Orang	45.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA												
koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	33.000.000	1 Dokumen	33.000.000	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	21 orang/1 layanan/2 dokumen	20 orang/1 layanan/2 dokumen	90.000.000	20 orang/1 layanan/ 2 dokumen	115.000.000	20 orang/1 layanan/ 2 dokumen	120.000.000	20 orang/1 layanan /2 dokumen	120.000.000	20 orang/1 layanan/ 2 dokumen	120.000.000	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	21 Orang	20 Orang	40.000.000	20 Orang	50.000.000	20 Orang	50.000.000	20 Orang	50.000.000	20 Orang	50.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	2 Layanan	50.000.000	2 Layanan	65.000.000	2 Layanan	70.000.000	2 Layanan	70.000.000	2 Layanan	70.000.000	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusu yang mendapatkan penguatan dan pengembangan tingkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	88.810.901	1 Laporan	148.262.091	1 Laporan	148.711.914	1 Laporan	150.095.738	1 Laporan	150.645.801	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia LayananAMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	1 Lembaga	1 Lembaga	20.000.000	1 Lembaga	25.000.000	1 Lembaga	25.000.000	1 Lembaga	25.000.000	1 Lembaga	25.000.000	
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindunganbagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	1 Kegiatan	13.810.901	1 Kegiatan	28.262.091	1 Kegiatan	28.711.914	1 Kegiatan	30.095.738	1 Kegiatan	30.645.801	
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	2 Orang	2 Orang	10.000.000	2 Orang	20.000.000	2 Orang	20.000.000	2 Orang	20.000.000	2 Orang	20.000.000	
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi,dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	
Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	Orang	4 Orang	15.000.000	4 Orang	25.000.000	4 Orang	25.000.000	4 Orang	25.000.000	4 Orang	25.000.000	
Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Ket
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	khusus tingkat daerah kabupaten/kota												

Berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-218 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2-514 Tahun 2024 tentang Program Unggulan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025, bahwa dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawau Tahun 2025-2029 maka terdapat beberapa Program Unggulan yang menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan Tahun 2025. Salah satu diantaranya menjadi program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat.

Program ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 99.999.000,- (*sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti social	
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan Sosial	Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	
4	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintahan kewenangan kabupaten/kota	
			Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	
			Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya pemberdayaan dan pemenuhan hak anak	Kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	
			Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten / kota	
			Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	

4.2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Target indikator kinerja perangkat daerah ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPD akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,09	58,00	58,02	58,05	58,08	59,00
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,35	90,57	90,79	91,01	91,23	91,45
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,66	66,85	67,03	67,22	67,40	67,59
4	Penurunan PPKS	%	1,00	1,25	1,5	1,65	I,85	2
5	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,848	0,848	0,847	0,847	0,846	0,846
6	Persentase Penurunan Kasus KDRT	%	30	45	48	50	55	60

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	60,3	64,5	66,8	69,2	71,7	74,2
8	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Anak	%	1,3	1,45	1,6	1,8	2,0	2,4

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah merupakan tolok ukur utama yang secara langsung menggambarkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan perangkat daerah. IKK berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai capaian tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah yang lebih operasional, sehingga dapat menunjukkan kontribusi nyata dari setiap perangkat daerah terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

Dalam dokumen Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025–2029, IKK berperan penting sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja tahunan, sekaligus menjadi dasar dalam pelaporan kinerja perangkat daerah. Dengan IKK, pencapaian kinerja dapat diukur secara lebih spesifik dan akurat, baik dari sisi *output* maupun *outcome* program, sehingga memudahkan proses pengendalian, perbaikan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Target kinerja yang ditetapkan melalui IKK mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, seluruh aparatur perangkat daerah diharapkan menjadikan IKK sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai dasar penilaian capaian kinerja yang akan diukur secara periodik. Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan Napza	75%	80%	82%	85%	86%	90%	75%
2	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar	75%	80%	82%	85%	86%	90%	75%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	HIV/ AIDS dan Napza							
3	Persentase Pekerjaan Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosialdan/ atau Relawan Sosial Yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana sesuai Standar	80%	81%	82%	85%	86%	90%	80%
4	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensi dalam Pelayanan Sosial	25%	30%	32%	35%	36%	40%	25%
5	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	15%	20%	22%	25%	30%	40%	15%
6	Persentase Masyarakat KAT yang diberdayakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase PSKS yang dilatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Penyandang Disabilitas yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	15%	20%	22%	25%	30%	40%	15%
9	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	5%	8%	10%	12%	15%	20%	5%
10	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	5%	10%	12%	15%	18%	25%	5%
11	Persentase Daerah yang Melaksanaka Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	75%	80%	82%	85%	86%	90%	75%
12	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	60%	61%	62%	65%	66%	70%	60%
13	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	40%	42%	45%	46%	48%	50%	40%
14	Persentase Keluarga Miskin dan Rentang	5%	20%	22%	25%	30%	40%	5%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan							
15	Persentase Data Fakir Miskin yang Valid	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	75%	80%	82%	85%	86%	90%	75%
17	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaan-nya	82%	85%	88%	90%	91%	94%	82%
18	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	85%	86%	88%	90%	92%	95%	85%
19	Persentase Korban Bencana mendapat bantuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Persentase Masyarakat yang diberdayakan dalam Keesiapsiagaan Menghadapi Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	4%	4,50%	4,60%	4,80%	5,00%	6,00%	4%
22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	61,20%	62,20%	62,80%	63,50%	64,00%	64,50%	61,20%
23	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	82%	85%	88%	90%	91%	94%	82%
24	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/ atau Penyusunan Kebijakan	85%	86%	88%	90%	92%	95%	85%
25	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	60%	62%	65%	68%	70%	72%	60%
26	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan	82%	85%	88%	90%	91%	94%	82%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
			2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Layanan Komprehensif							
27	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	66%	70%	71%	72%	74%	75%	66%

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 merupakan dokumen berkesinambungan dari rencana strategis Pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (2025-2029) dan sekaligus merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Masa berlaku Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah selama empat tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dan ruang koordinasi serta kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
2. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu empat tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR..... iii

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.....10
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.....22

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029 41
3.2. Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029.....41
3.3. Strategi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029 43
3.4. Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029 44

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....46
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 64

BAB V. PENUTUP.....82

DAFTAR TABEL

2.1. Susunan Kepegawaian SKPD Berdasarkan Jabatan, Eselonering dan Status Kepegawaian 14
2.2. Kondisi Aktual Sarana dan Prasarana yang Dimiliki SKPD 15
2.3. Rincian Aset Tetap Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai 17
2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2018-2024 18
2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Sebelum Perubahan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 – 2021.....19
2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Setelah Perubahan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2022.....22
2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Setelah Perubahan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.....25
2.8. Permasalahan Pembangunan Daerah 28
2.9. Isu-Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.....35
3.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.....37
3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 38
3.3. Strategi RENSTRA 2025-2030 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai.....39
3.4.Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2025-2029.....39
4.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029 44
4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 102
4.3. Rencana Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan 112
4.4. Daftar Sub Kegitan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 128
4.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 129
4.6. Indikator Kinerja Kunci 131

DAFTAR GAMBAR

1.1. Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2
1.2. Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan 3
2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 13
2.2. Grafik Tingkat Pendidikan Aparatus SKPD 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan sasaran, kebijakan dan program prioritas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini menjadi bagian penting dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dimana Renstra menjadi pedoman yang memberikan arah dalam melaksanakan program pembangunan, kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pembangunan pertanian dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang berdampak tidak langsung dalam penciptaan kondisi perekonomian yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain juga telah memiliki korelasi positif yang kuat dengan sektor pertanian.

Pembangunan pertanian adalah merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian.

Sumber Daya Manusia (SDM) bersama-sama dengan Sumber Daya Alam (SDA), teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian.

Pembangunan Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan dalam upaya peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. Beberapa faktor pendukung untuk mencapai terwujudnya pembangunan pertanian tersebut antara lain, kesiapan SDM, tertatanya kelembagaan, berkembangnya Inovasi teknologi tepat guna spesifik lokasi dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai.

Dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029, maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian, harus menyusun Renstra untuk menjaga arah bagi tercapainya rencana pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya sektor pertanian.

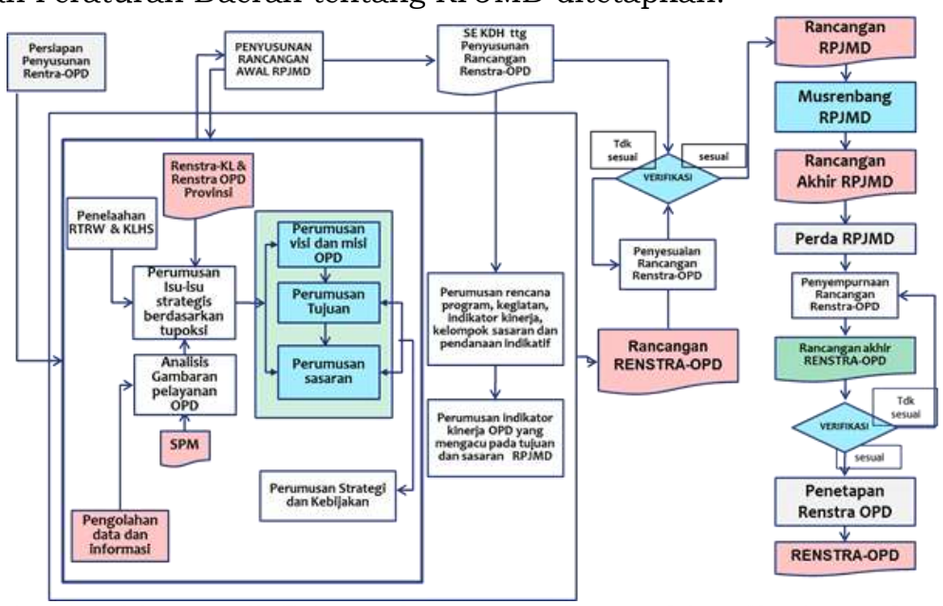
Menurut Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tahapan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan diawali dengan:

1. Persiapan Penyusunan Renstra, antara lain :
   a. Pembentukan SK Tim penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.
   b. Orintasi mengenal RENSTRA.

c. Penyusunan Agenda Tim Penyusunan RENSTRA.
d. Penyiapan Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

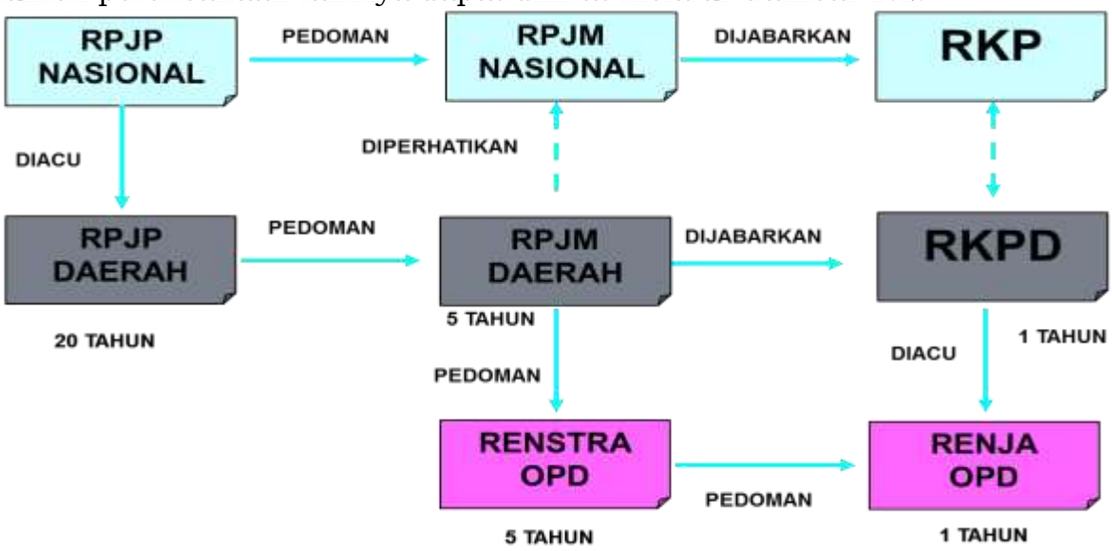
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah antara lain:
   a. Analisis gambaran pelayanan.
   b. Analisis permasalahan.
   c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya.
   d. Analisis isu strategis.
   e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdarkan sasaran indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.
   f. Perumusan Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.
   g. Perumusan rencana progran, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.
3. Rancangan RENSTRA antara lain:
   a. Penyempurnaan rancangan awal Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah.
   b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat daerah/ lintas perangkat daerah.
   c. Hasil Kesepakatan Forum perangkat daerah dituangkan dalam Berita Acara.
   d. Rancangan Renstra perangkat daerah disempurnakan berdasarkan berita acara.
4. Rancangan Akhir RENSTRA antara lain:
   a. Penyempurnaan rancangan akhir Renstra perangkat daerah berdasarkan surat Peraturan Daerah tentang RPJMD.
   b. Perumusan rancangan akhir Renstra perangkat daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
5. Penetapan RENSTRA antara lain:
   a. Rancangan Akhir Renstra perangkat daerah disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk diverivikasi.
   b. Rancangan Akhir Renstra perangkat daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
   c. Rancangan akhir Renstra perangkat daerah yangtelah disempurnakan disampaikan kembali oleh perangkat daerah kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk dilakukan proses penetapan Ranstra perangkat daerah.

Penetapan Renstra Perangkat darah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.



Gambar 1.1. Diagram alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tentunya memperhatikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah, propinsi maupun pusat. Penyelarasan tersebut terkait dengan pelaksanaan tupoksi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan agar lebih efektif dan efisien. Hubungan dan keterkaitan dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat melalui Gambar 1.2.



Gambar 1.2
Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden RI no 22 tahun 2009, tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertanian No. 43 tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumberdaya Lokal.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Permentan No. 43 tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Berbasis Sumberdaya Lokal;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
33. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 31 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 3 tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4;

36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2015-2035);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045 (lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 (lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4);
42. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
43. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Tahun Anggaran 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor 63);
44. Peraturan Bupati Nomor 100.3.4.2-176 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, peraturan/regulasi yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

1. Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini dimaksudkan untuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, arahan kebijakan serta strategi pembinaan dan pemberdayaan dalam pelaksanaan Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 2025-2029.
2. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara berkesinambungan.
3. Memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya dengan berbagai kendala, tantangan dan peluang.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

1. Memberikan pedoman pada sekretariat, bidang, sub bagian, seksi serta staf Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam penyusunan perencanaan serta dalam penentuan skala prioritas program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun mendatang;

2. Mendukung upaya pencapaian arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029 di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan di Kepulauan Mentawai;
3. Menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya yang ada;
4. Sebagai salah satu instrumen evaluasi, monitoring dan mengukur kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

1.4. Sistematika Penulisan

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, maka struktur Renstra Perangkat Daerah yang menjadi acuan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD. Bab ini terdiri atas:

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menggambarkan tentang gambaran umum tentang aspek dan pelayanan, permasalahan yang dihadapi dan isu strategis dalam menjalankan pelayanan dan pelaksanaan tugas urusan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Bab ini terdiri atas:

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2025-2026). Bab ini terdiri atas:

3.1 Tujuan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.2 Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.3 Strategi Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.4 dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan kenerja penyelenggaraan urusan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Bab ini terdiri atas:

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Pada Bab Penutup, disajikan upaya pengendalian dan evaluasi implementasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut :

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat,membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Kelompok Jabatan Punsional Sub- Subtansi Program dan Keuangan;

3. Bidang Ketahanan Pangan,membawahi:

a. Kelompok Jabatan fungsional Sub-Substansi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan ;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;

4. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ,membawahi:

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perkebunan;

5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan , membawahi :

a. Kelompok Jabatanfungsional Sub-Substansi Pengembangan Peternakan;
b. Kelompok Jabatanfungsional Sub-Substansi Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner;

6. Bidang Perikanan

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawas Benih Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayan Nelayan
c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Sumber Daya Perikanan

7. UPTD

a. Sekretariat ;
b. Bidang
c. Sub Bagian;
d. Kelompok Jabatan Fungsional
e. Bagan Susunan Organisasi

1) Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai :
   Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2) Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai :

a) Perumusan kebijakan Daerah di bidang pangan, bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan, bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan;
c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, lingkungan hidup dan perhubungan;
d) Pelaksanaan administrasi di bidang pangan, bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan; dan
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Tugas dan Fungsi Sekretariat
   Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas.

1) Fungsi Sekretariat antara lain :

a) Pengoordinasian penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
b) Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, hukum, kelembagaan, tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, hubungan masyarakat, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
c) Pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia pegawai aparatur sipil negara, rencana kebutuhan aset, rencana pemanfaatan aset, rencana anggaran kas, rencana program kerja tahunan, rencana pengendalian risiko, dan dokumen perencanaan lainnya di lingkungan Dinas;
d) Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi rencana strategis, laporan evaluasi rencana kerja, dokumen manajemen risiko, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan realisasi fisik dan keuangan, laporan pemanfaatan aset, laporan pengelolaan piutang/utang, laporan keuangan bulanan, semester, dan tahunan atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, dan laporan lainnya di lingkungan Dinas;
e) Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah, survei kepuasan masyarakat, penilaian dan evaluasi capaian reformasi birokrasi, penilaian dan evaluasi manajemen risiko, serta penilaian dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu membantu sekretaris dalam urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan;

Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
b) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
c) Penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
d) Penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
e) Penyiapan bahan pengelolaan urusan kerumahtanggaan;
f) Penyiapan bahan kerja sama dan kehumasan;
g) Penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
h) Penyiapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
i) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Sub Bagian Program dan Keuangan adalah membantu sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan aset Daerah, evaluasi dan pelaporan Dinas.

Fungsi Sub Bagian Program dan Keuangan:

a) Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di lingkungan Dinas;
b) Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
c) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
d) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan aset Daerah di lingkungan Dinas;
e) Penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Tugas dan Fungsi Bidang

1. Bidang Ketahanan Pangan

a. Tugas Bidang Ketahanan Pangan

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

b. Fungsi Bidang Ketahanan Pangan, antara lain :

1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5) Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan, dan pengawasan mutu dan keamanan pangan;

7) Penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
8) Penyiapan pelaksananaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
9) Penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
10) Penyiapan pengelolaan cadangan pangan Daerah dan menjaga keseimbangan cadangan pangan Daerah;
11) Penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
12) Penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar; dan
13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

2. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

a. Mempunyai Tugas :
Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

b. Mempunyai Fungsi :

1) Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
2) Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
3) Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
4) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di tanaman pangan, hortikultura, dan bidang perkebunan;
5) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
6) Penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
7) Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
8) Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
9) Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Mempunyai Tugas :
Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

b. Mempunyai Fungsi:

1) Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
2) Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
3) Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
4) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
5) Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
6) Pengawasan peredaran dan pengunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;

7) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
8) Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
9) Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
10) Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
11) Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Perikanan

a. Bidang Perikanan mempunyai tugas :
Menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

b. Mempunyai fungsi:

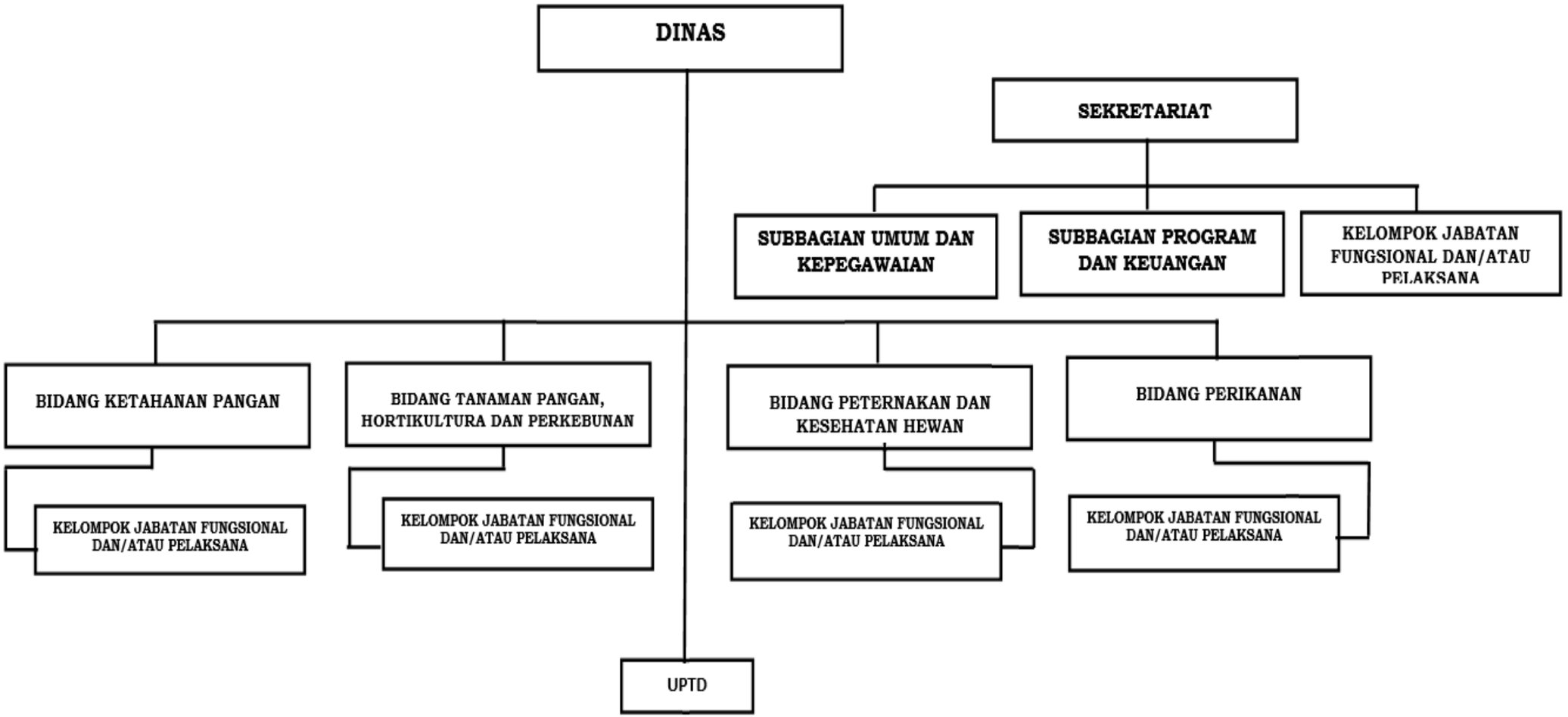
1) Penyusunan program kerja di bidang pemberdayaan nelayan kecil, penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, penerbitan rekomendasi perizinan pembudidaya ikan, penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan dan pengelolaan pembudidaya ikan;
2) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil, penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, penerbitan rekomendasi perizinan pembudidaya ikan, penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan dan pengelolaan pembudidaya ikan;
3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan nelayan kecil, penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, penerbitan rekomendasi perizinan pembudidaya ikan, penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan dan pengelolaan pembudidaya ikan;
4) Pelaksanaan koordinasi di bidang pemberdayaan nelayan kecil, penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, penerbitan rekomendasi perizinan pembudidaya ikan, penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan dan pengelolaan pembudidaya ikan;
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan nelayan kecil, penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup, pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, penerbitan rekomendasi perizinan pembudidaya ikan, penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan dan pengelolaan pembudidaya ikan;
6) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
7) Pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
8) Pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
9) Pelaksanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
10) Pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
11) Pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan; dan

12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. UPTD

UPTD dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, jenis serta tata kerja UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Gambar 2.1 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN



2.1.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Susunan Kepegawaian SKPD Berdasarkan Jabatan, Eselonering dan Status Kepegawaian

No.	Nama Jabatan	Eselon	Status			Jumlah
			PNS	CPNS	PK	
1	Kepala Dinas	II.a	1	-		1
2	Sekretaris Dinas	III.a	1	-		1
	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	IV	1	-		1
	Staf	-	3	-		3
	Perencana Ahli Muda	IV	1	-		1
	Staf	-	4			4
3	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	III	1	-		1
	Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	IV	2	-		2
	Staf	-	2			2
4	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	III	1	-		1
	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	IV	1			1
	Staf	-	2	-		2
	Pengendali Organisme Penggagu Tanaman	IV	1	-		1
	Staf	-	2			2
5	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	III	1	-		1
	Penyuluh Pertanian Ahlimuda	IV/a	1			1
	Staf	-	2	-		2
	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	IV	1	-		1
	Staf	-	2	-		2
6	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	III	1			1
	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	IV	1			1
	Staf		4			4
7	Penyuluh Pertanian		33			33
8	Pegawai Kontrak				81	81
	Jumlah		70	-	81	151

Sumber: Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah sebanyak 225 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 102 orang, P3K 16 orang dan pegawai kontrak 107 orang. Rincian pegawai negeri terdiri dari :

A. 1 jabatan Kepala Dinas , Esselon II/a
B. 1 jabatan Sekretaris, Esselon III/a
C. 4 jabatan Kepala Bidang, Esselon III/b
D. 1 jabatan Kepala UPTD, Esselon IV/a
E. 1 jabatan Kasubag, Esselon IV/a
F. 8 jabatan fungsional, Esselon IV/a
G. 1 jabatan KTU (UPTD), Esselon IV/b
H. 20 jabatan staf
I. 33 jabatan penyuluh pertanian PNS

Rincian pegawai kontrak terdiri dari :

A. 44 tenaga penyuluh pendamping
B. 3 tenaga dokter hewan
C. 6 tenaga administrasi
D. 17 tenaga kebersihan
E. 10 tenaga keamanan
F. 1 tenaga sopir

Sedangkan untuk tingkat pendidikan aparatur DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat

dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2 Grafik Tingkat Pendidikan Aparatur SKPD



Sumber: Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

2. Sarana dan Prasarana (Aset/Modal)

Kondisi aktual sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Kondisi Aktual Sarana dan Prasarana yang Dimiliki SKPD per Oktober 2025

No	Saran dan Prasarana	Jumlah (unit)	kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
	ALAT BESAR				
	Transportable Generating Set	6	2		4
	electric Generating set lainnya (dst)	1	1		
	KOMPUTER				
	PC Unit	23	9		14
	Laptop	13			13
	Notebook	6	6		
	Monitor	7			7
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	32	9		23
	Peralatan Jaringan Lainnya	1			1
	ALAT ANGKUTAN				
	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	1	1		
	Pick Up	1	1		
	Sepeda Motor	44	22		22
	Bemo	1	1		
	Alat angkutan darat bermotor lainnya (dst)	2	1		1
	speedboat/ motor tempel	5	1		4
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR				
	Mesin jahit Terpal	1	1		
	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam lainnya	1			1
	Meteran Kain	1	1		
	Global Positioning System	7			7
	Alat ukur/tes alat kepribadian lainnya (dst)	5	5		
	Alat ukur lainnya (dst)	1	1		
	ALAT PERTANIAN				
	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lainnya (dst)	18	1		17
	Alat Penyimpanan Hasil Pertanian Lainnya	2	2		
	Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester)	5	5		
	Alat Prosesing lainnya	1	1		
	Alat Pengolahan Lainnya	4	4		
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	15	2		13
	Mesin Ketik Manual Standart (14-16 Inchi)	1	1		

No	Saran dan Prasarana	Jumlah (unit)	kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
	Lemari Kayu	40	25		15
	Filing Cabinet Besi	11	1		10
	Brandkas	1			1
	White Board	2	2		
	Overhead Projector	2			2
	Papan Nama Instansi	4	3		1
	Meja Kerja Kayu	44	31		13
	Meja Rapat	6	6		
	Kursi Tamu	10	10		
	Kursi Putar	9	6		3
	Kursi Biasa	1			1
	Mesin Pemotong Rumput	15	12		3
	Lemari Es	2	1		1
	AC Split	23	20	1	2
	Reach in Frezzer	3	3		
	Televisi	6	5		1
	Sound System	7	7		
	Unit Power Supply	2			2
	Stabilisator	2			2
	Camera Video	8	6		2
	Timbangan Barang	1	1		
	Tiang Bendera	1	1		
	Dispenser	2	2		
	Handy Cam	3	2		1
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5	5		
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2		
	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	33	21		12
	Meja Operator	1	1		
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	1		2
	Kursi Kerja Pejabat lainnya	60	37		23
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat eselon II	1			1
	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	3	3		
	Buffet Kaca	4	4		
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
	Layar Film/Projector	5	5		
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN				
	Alat Kedokteran Bedah Lainnya (dst)	1	1		
	ALAT LABORATORIUM				
	Alat laboratorium umum lainnya (dst)	6	4		2
	Petri Dish	2	2		
	Distiling Apparatus	4	4		
	Meja Kerja	20	20		
	Beaker	3	3		
	Lampu Spirtus	1	1		
	Jumlah	564	336	1	227

Sumber: Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Berdasarkan kondisi aktual sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini, maka jumlah dan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memadai. Selain itu, dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada saat tanggap darurat maka dibutuhkan ketersedian peralatan *stock opname* Obat- obatan yang siap sedia pada saat dibutuhkan, dan ketersediaan gedung BPP serta rehab gedung kantor dan peralatan sangatlah penting.

Diharapkan dalam periode 4 (empat) tahun ke depan, pembangunan gedung kantor DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat diselesaikan, serta penyediaan peralatan

dan logistik *stock opname* dapat dimasukkan dalam kebijakan anggaran setiap tahunnya. Selain itu, perlu juga diupayakan pembangunan gedung BPP dan peralatan dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pertanian di Kepulauan Mentawai serta pencapaian target kinerja SKPD tahun 2025-2029.

Tabel 2.3
Rincian Aset Tetap Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Kepulauan Mentawai per Oktober 2025

No	Jenis Aset	Jumlah
1	Tanah	7.227.010.000,-
2	Peralatan dan Mesin	2.347.316.484,-
3	Gedung dan Bangunan	17.519.934.720,-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.360.501.539,-
5	Aset Tetap Lainnya	361.153.000,-
6	Kontruksi dalam Pengerjaan	59.780.000,-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tahun	20.801.712.764,-
	Jumlah	26.073.982.979,-

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Capaian SPM)

Melaksanakan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian merupakan tanggungjawab pemerintah (pusat dan daerah), bersama-sama dengan masyarakat. Lembaga koordinasi fungsional Dewan Ketahanan Pangan yang telah dibentuk pada 43 kabupaten/kota di Sumatera Barat berfungsi memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat, agar memiliki kemampuan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan ditingkat wilayah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Bab IV disebutkan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan Pemerintahan Absolut, urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, urusan pemerintahan wajib meliputi yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal 12 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi 18 urusan pemerintahan termasuk didalamnya bidang pangan, dan dengan demikian tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis di bidang ketahanan pangan perlu ditingkatkan guna terwujudnya pemantapan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Berdasarkan Permentan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Ketahanan Pangan dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 berikut jenis pelayanan dasar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
2. Distribusi dan Akses Pangan;
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
4. Penanganan Kerawanan Pangan.
5. Layanan Penyuluhan
6. Bantuan Sarana Pertanian dan Pertanian yang diserahkan kepada masyarakat
7. Bantuan Pra Sarana Pertanian dan Pertanian yang diserahkan kepada masyarakat
8. Pelayanan Jasa Pemeriksaan dan Pengobatan Hewan serta Vaksinasi

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2018-2024

Sasaran	Indikator Kinerja	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio Cadangan Pangan Utama	0,50	0,35	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75	50	48	54	52,06
Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	85	80	85	80
Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LAKIP	-	-	-	-	-	-	75	66,4	80	69,4	80	76,80	80	76,95
	Jumlah Inovasi yang Diterapkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94%	85%

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Sebelum Perubahan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2017 – 2021

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										Unit Penanggung Jawab
							2017		2018		2019		2020		2021		2017		2018		2019		2020		2021		2017		2018		2019		2020		2021		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualiatas Pelayan ASN	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																																			DKPP
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		21,704	100%	2714	6,808,192,286	204	8,304,782,286	150	3,097,751,286	-	-	0	-	150	7,012,439,516	263	5,365,832,692	5,00	3,084,830,986					5.5	103.0	129	65	0	0.0					DKPP
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Ketersedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet		150	100%	23	10,350,000	23	10,350,000	23	10,350,000	0	-	0	-	23	5,524,700	23	5,524,700	23	6,924,700	0	-	0	-	100	53.4	100	53	100	66.9					DKPP
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Ketersediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan		684	100%	3	2,990,252,286	3	2,990,252,286	3	2,990,252,286	0	-	0	-	3	2,990,252,286	3	4,697,822,124	3	2,990,252,286	0	-	0	-	100	100.0	100	157	100	100.0					DKPP
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Ketersediaan Jasa Administrasi Keuangan		144	100%	19	9,964,000	23	9,964,000	36	9,964,000	0	-	0	-	19	219,036,530	23	219,036,530	36	9,964,000	0	-	0	-	100	2,198.3	100	2198	100	100.0					DKPP
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat pembersih / Kebersihan Kantor		204	100%	0	-	38	-	38	27,820,000	0	-	0	-	0	-	34	39,609,000	38	27,820,000	0	-	0	-	0	-	89	0	100	100.0					DKPP
		Penyediaan alat tulis kantor	Ketersediaan Alat Tulis Kantor		54	100%	12	117,000,000	25	110,400,000	9	31,370,000	0	-	0	-	12	117,000,000	25	39,609,000	9	31,370,000	0	-	0	-	100	100.0	100	36	100	100.0					DKPP
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan Barang cetakan dan penggandaan		10	100%	36	23,000,000	32	11,400,000	3	6,000,000	0	-	0	-	36	23,000,000	32	6,000,000	3	6,000,000	0	-	0	-	100	100.0	100	53	100.00	100.0					DKPP
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		11	100%	12	3,283,771,000	12	2,589,596,000	2,00	16.800.000	0	-	0	-	12	3,283,771,000	2	16.015.000	3,00	26.415.000	0	-	0	-	100	100.0	0	0	0	0.0					DKPP
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Ketersediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan		54	100%	17	298,784,000	17	220,168,000	9,00	26.355.000	0	-	0	-	17	298,784,000	12	38.699.000	17,00	55.969.000	0	-	0	-	100	100.0	0	0							DKPP

		Penyediaan makanan dan minuman	Ketersediaan Makanan dan Minuman		137	100%	24	44,971,000	24	1,721,380,000	24,00	100.000.000	0	-	0	-	24	44,971,000	1	130.000.000	25,00	198.294.625	0	-	0	-	100	100.0	0	0	0	0.0					DKPP
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		60	100%	6	30,100,000	20	641,272,000	11	21,995,000	0	-	0	-	6	30,100,000	19	358,231,338	18	12,500,000	0	-	0	-	100	100.0	95	56	164	56.8					DKPP
													0	-	0	-						0	-	0	-										DKPP
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		80%	78	70%	153	873,947,900	494	3,523,524,000	181	421,120,000					116	869,668,460	25	1,029,601,693	116	1,029,601,693					76	99.5	5	29	64	244.5					DKPP
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara		78	80%	12	10,840,000	20	122,303,000	3	17,000,000	0	-	0	-	12	10,840,000	20	18,860,000	3	18,860,000	0	-	0	-	100	100.0	100	15	100	110.9					DKPP
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		76	80%	45	29,991,500	4	108,986,000	75	24,990,000	0	-	0	-	45	29,991,500	4	105,063,300	75	105,063,300	0	-	0	-	100	100.0	100	96	100	420.4					DKPP
		Operasional Pusat Kesehatan Hewan	Tersedianya Operasional Puskeswan		84	80%	12	421,301,000	0	-	75	286,900,000	0	-	0	-	12	421,301,000	0	0	0	0	0	-	0	-	100	100.0	0	0	0	0.0					DKPP
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor		**12**	80%	**1**	**57,940,000**	**2**	**-**	**0**		0	-	0	-	**1**	**53,660,560**	**2**	**20,564,542**	**1**	**20,564,542**	0	-	0	-	**100**	**92.6**	100	0	0	0.0					DKPP
		Operasional BPP Sipora Utara	Tersedianya Operasional BPP Sipora Utara		294	80%	1	34,860,000	14	609,241,000			0	-	0	-	1	34,860,000	14	20,096,000	1	20,096,000	0	-	0	-	100	100.0	100	3	0	0.0					DKPP
		Operasional BPP Sipora Selatan	Tersedianya Operasional BPP Sipora Selatan		318	80%	12	94,700,000	200	246,030,000			0	-	0	-	12	94,700,000	200	38,834,000	1	38,834,000	0	-	0	-	100	100.0	100	16	0	0.0					DKPP
		Operasional BPP Siberut Selatan	Tersedianya Operasional BPP Siberut Selatan		280	80%	12	58,415,400	14	609,241,000			0	-	0	-	12	58,415,400	14	24,732,700	1	24,732,700	0	-	0	-	100	100.0	100	4	0	0.0					DKPP
		Operasional BPP Pagai Selatan	Tersedianya Operasional BPP Pagai Selatan		265	80%	2	40,000,000	14	609,241,000			0	-	0	-	2	40,000,000	14	26,774,400	14	26,774,400	0	-	0	-	100	100.0	100	4	0	0.0					DKPP
		Operasional BPP Sikakap	Tersedianya Operasional BPP Sikakap		282	80%	15	114,900,000	14	609,241,000	21	77,230,000	0	-	0	-	15	114,900,000	14	173,324,500	21	173,324,500	0	-	0	-	100	100.0	100	28	100	224.4					DKPP
		Operasional BBU Sipora Utara	Tersedianya Operasional BBU Sipora Utara		293	80%	4	11,000,000	14	609,241,000	7	15,000,000	0	-	0	-	4	11,000,000	3	601,352,251	3	601,352,251	0	-	0	-	100	100.0	21	99	43	4009.0					DKPP
3		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					5	30,000,000	14	609,241,000	168	24,499,900	0	-	0	-	5	30,000,000	28	95,894,000	23	23,577,900					100	100.0	200	16	14	96.2					DKPP
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan monitoring dan evaluasi		21	100%	5	74,300,000	14	609,241,000	3	145,000,000	0	-	0	-	5	74,300,000	14	47,000,000	3	158,340,000		0	-	0	0	100.0	100	8	100	109.2					DKPP
		Statistik Pertanian	Jumlah Dokumen Statistik Pertanian		6	100%	1	200,000,000	14	609,241,000	2	6,810,000	0	-	0	-	1	200,000,000	14	48,894,000	2	55,704,000		0	-	0	0	100.0	100	8	100	818.0					DKPP
4		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan			66	85%	37	46,769,450	42	1,827,723,000	12	22,000,000	0	-	0	-	37	46,769,450	14	601,352,251							100	100.0	33	33	0	0.0					DKPP
		Pengembangan desa mandiri pangan	Terwujudnya Lokasi Kawasan Mandiri Pangan		16	85%	15	20,725,000	14	609,241,000	6	20,000,000	0	-	0	-	15	20,725,000	14	1,040,298,323	0	35.250.000					100	100.0	100	171	0	0.0					DKPP

		Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi (DID Tambahan 2020)	Meningkatnya Luas Areal Tambah Tanam dan Produksi Tanaman Padi		25	85%	15	24,334,500	14	609,241,000			0	-	0	-	15	24,334,500	0	-	100	-					100	100.0	0	0	0	0.0					DKPP
		Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyar (DID Tambahan 2020)	Meningkatnya Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat		25	85%	7	1,709,950	14	609,241,000	6	2,000,000	0	-	0	-	7	1,709,950	0	-	100	-					100	100.0	0	0	1667	0.0					DKPP
5		Program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan agroindustri berbasis kawasan (sentra produksi)			10,593	80%	7	18,622,000	14	609,241,000			0	-	0	-	40	1,077,890,600	983	-							100	100.0	0	0	100	100.0					DKPP
		Pengembangan Pertanian Terpadu	Terlaksananya integrasi pertanian peternakan dan		48	80%	15	965,665,000	14	609,241,000	**3**	**47,237,500**	0	-	0	-	**15**	**965,665,000**	**8**	**392.679.050**	**3**	**47,237,500**					100	100.0	0	0	100	100.0					DKPP
		Pembangunan Jaringan Irigasi Lokal	terbangunnya Jaringan Irigasi Lokal		9.270	85%	12	78,507,000			**13**	**19,396,000**	0	-	0	-	**12**	**78,507,000**	**975**	**1.398.767.999**	**13**	**19,396,000**					100	100.0	0	0	100	100.0					DKPP
		Pengembangan Ternak Sapi	Terlaksananya pengembangan ternak sapi		275	85%	12	29,104,000			**5**	**18,102,500**	0	-	0	-	**12**	**29,104,000**	**0**	**850.000**	**5**	**18,102,500**					100	100.0	0	0	100	100.0					DKPP
		Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Taikako Dusun Muara	Panjang jalan usaha tani yang dibangun yang dibangun		500	85%					**0**	**389,577,000**	0	-	0	-			**0**	**0**	**0**	**389,577,000**					0	-	0	0	0	100.0					DKPP
		Pembangunan Jalan Pertanian Desa Sikakap Dusun Pinatektek	Terbangunnya jalan pertanian		500	85%	1	4,614,600			**0**		0	-	0	-	1	4,614,600	**0**	**0**	**0**						100	100.0	0	0	0	0.0					DKPP
																						Rata-rata capaian kinerja (%)				83		80		100						
																						Predikat kinerja				87.5	Baik									

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Setelah Perubahan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2020-2022

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										Unit Penanggung Jawab
							1		2		2020		2021		2022		1		2		2020		2021		2022		1		2		2020		2021		2022		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan ASN	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Meningkatnya Kelancaran Kegiatan Perkantoran terlaksananya kegiatan administrasi keuangan**	50%	610	91.1					291	19,613,084,059	340	28,431,840,814	340	28,431,840,814					291	19,613,084,059	340	28,431,840,814	340	28,431,840,814					100	100.00	100	100.00	100	100.00	DKPP
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**Kelancaran administrasi perkantoran lancarnya adinistrasi perkantoran**		768	96.0					353	7,909,665,542	428	11,490,001,000	178	9,977,528,219					353	7,909,665,542	428	11,490,001,000	178	8,957,519,947					99.9	100.00	100	100.00	100	89.78	DKPP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Meningkatnya kesejateraan aparatur												81	7,324,137,970								81	6,522,246,988					0	0.00	0	0.00	100	89.05	DKPP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya kesejateraan aparatur												97	2,653,390,249								97	2,435,272,959					0	0.00	0	0.00	100	91.78	DKPP
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran	5%	139	96.7					203	22,225,000	12	630,000,000	390	735,717,500					203	22,225,000	12	630,000,000	388	645,416,813					100	100.00	100	100.00	99.5	87.73	DKPP
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	lancarnya administrasi perkantoran								378	312,000,440			6	64,800,000					378	312,000,440			4	46,827,000					100	100.00	0	0.00	66.7	72.26	DKPP
		Penyediaaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya kelancaran rapat perkantoran		99	98.0					349	74,065,200	151	232,942,000	22	73,519,500					349	74,065,200	151	232,942,000	22	63,555,823					100	100.00	100	100.00	100	86.45	DKPP
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran		94	99.5					384	35,350,000	36	115,779,295	125	45,540,000					384	35,350,000	36	115,779,295	125	25,899,600					100	100.00	100	100.00	100	56.87	DKPP
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	meningkatnya imporrnasi/waw asan ASN		80	25.0					373	965,047,200	96	370,476,400	225	275,929,000					373	965,047,200	96	370,476,400	225	254,567,195					100	100.00	100	100.00	100	92.26	DKPP
		Penyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya koordinasi dan singronisasi program dan kegiatan antar kab/pnspinsi dan pemerintah pusat		93	35.4							36	62,500,000	12	275,929,000							36	62,500,000	12	254,567,195					0	0.00	100	100.00	100	92.26	DKPP
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	lancarnya administrasi perkantoran		90	80.8							9	1,477,142,096	12	114,500,000							9	1,477,142,096	12	68,152,963					0	0.00	100	100.00	100	59.52	DKPP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	lancarnya administrasi perkantoran		111	158.3					326	176,684,044	100	515,675,800	12	114,500,000					326	176,684,044	100	515,675,800	12	68,152,963					100	100.00	100	100.00	100	59.52	DKPP

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	meningkatnya kesejaterahan aparatur								175	49,884,000									175	49,884,000								100	100.00	0	0.00	0	0.00	DKPP
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAEARAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	lancarnya administrasi perkantoran		40	71.9							12	435,342,884	12	537,474,000							12	435,342,884	24	537,474,000							0	100.00	0	100.00	DKPP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terkelolanya aset kendaraan dinas operasional								142	116,237,000			3	61,680,000					142	116,237,000			3	49,045,500					100	100.00	0	0.00	100	79.52	DKPP
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainya	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran								0	0		-	2	4,270,000					0	0			2	4,270,000					0	0.00	0	0.00	100	100.00	DKPP
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendunkung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran								199	10,180,500			1	50,000,000					1	10,180,500			1	47,724,599					0.5	100.00	0	0.00	100	95.45	DKPP
					96	96.1							60	431,524,000	60	431,524,000							60	431,524,000	60	431,524,000							100	100.00	100	100.00	DKPP
		PENATAAN ORGANISASI	menjadi pedoman penyusunan program tahun berikutnya		147	177.0							15	20,000,000	15	20,000,000							15	20,000,000	15	20,000,000							100	100.00	100	100.00	DKPP
		Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	menjadi pedoman penyusunan program tahun berikutnya		60	82.6					20	465,211,000	8	36,000,000	12	68,720,000					20	465,211,000	8	36,000,000	12	67,810,000					100	100.00	100	100.00	100	98.68	DKPP
2		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase tingkat pengawasan		100	543.0					214	2,808,965,040	11	2,104,359,600	11	2,104,359,600					214	2,808,965,040	11	2,104,359,600	11	2,104,359,600					100	100.00	100	100.00	100	100.00	DKPP
		PENGAWASAN PENGGUNA SARANA PERTANIAN	tersedianya sarana pertanian		100	543.0							11	2,104,359,600	11	2,104,359,600							11	2,104,359,600	11	2,104,359,600					0	0.00	100	100.00	100	100.00	DKPP
		Pendampingan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian	tersedianya sarana pertanian								45	1,020,973,900			9	2,056,240,650					45	1,020,973,900	9		9	1,702,426,404					100	100.00	0	0.00	100	82.79	DKPP
		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAINNYA	**Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak**																												0	0.00	0	0.00	0	0.00	DKPP
		Pengadaan benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	tersedianya bibit benih sapi,kerbau,iti k dan ayam								169	1,787,991,140			3	1,168,556,000					169	1,787,991,140			1	160,759,200					100	100.00	0	0.00	33.3	13.76	DKPP
		Pengadaan Hijauan pakan Ternak	Tersedianya Hijauan pakan ternak								0	0			2	67,545,000					0	0			2	58,766,200					0	0.00	0	0.00	100	87.00	DKPP
3		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Prasarana yang dibangun		670	97.9					5222	6,220,222,416	7	28,602,264,780	7	29,390,686,530					5222	6,220,222,416.00	7	28602264781	7	29390686530					100	100.00	100	100.00	100	100.00	DKPP
		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	panjang irigasi yang terbangun																												0	0.00	0	0.00	0	0.00	DKPP

		Penyusunan Peta lahan pertanian Pangan Berkelanjutan	Tersedianya Peta LP2B		0	0.0					0	0	0	-	1	578,254,900					0	0	0	-	1	476,238,400					0	0.00	0	0.00	100	82.36	DKPP
		Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	terbangunnya jaringan irigasi		104	80.6					4184	4,688,267,129	220	7,096,134,200	220	7,096,134,200					4184	4,688,267,129	220	7,096,134,200	270	7,096,134,200					100	100.00	100	100.00	123	100.00	DKPP
		Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	terbangunnya embung		100	84.3					0	0	1	21,506,130,580	1	21,506,130,580					0	0	1	21,506,130,580	3	21,506,130,580					0	0.00	100	100.00	300	100.00	DKPP
		Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang dibangun								720	350,000,000			1	210,166,850					720	350,000,000			1	207,678,850					100	100.00	0	0.00	100	98.82	DKPP
		Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	terpeliharanya gedung kantor BPP								0	0									0	0									0	0.00	0	0.00	0	0.00	DKPP
		Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainya	terbangunya jalan usaha tani		69	33.2					318	1,181,955,287	0	-	0	-					318	1,181,955,287	1.38	476,238,400	1.38	476,238,400					100	100.00	0	0.00	0	0.00	DKPP
4		**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Rasio Cadangan Pangan Utama**		**92**	**90.7**					**23**		**880**	**7,482,400,000**	**880**	**7,482,400,000**					**0**		**880**	**7,482,400,000**	**880**	**7,482,400,000**					**100**	**0.00**	**100**	**100.00**	**100**	**100.00**	**DKPP**
		PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA	Meningkatnya jumlah stok pasikan dan harga pangan yang dipantau		100	0.0					16	945,335,000	3	-	3	-					16	945,335,000	3	-	3	-					100	100.00	100	0.00	100	0.00	DKPP
		Pelaksanaan pencapaian target kosumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Meningkatnya jumlah stok pasikan dan harga pangan yang dipantau		60	72.9					7	492,812,100	300	1,458,199,334	8	877,038,000					7	492,812,100	300	1,458,199,334	8	820,280,000					100	100.00	100	100.00	100	93.53	DKPP
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatkan Pendapatan Petani		95	84.6							30	2,575,629,200	8	877,038,000							30	2,575,629,200	8	820,280,000					0	0.00	100	100.00	100	93.53	DKPP
5		**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Peningkatan Produkai Tanaman Perkebunan**		**117**	**508.3**							**30**	**14,395,979,000**	**14**	**268,832,000**							**15**	**3,620,000,000**	**7**	**75,440,000**					**0**	**0.00**	**50**	**25.146**	**50**	**28.06**	**DKPP**
		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Produkai Tanaman Perkebunan		100	100.0							15	10,775,979,000	7	134,416,000							15	3,620,000,000	7	75,440,000					0	0.00	100	33.59	100	56.12	DKPP
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan	Peningkatan Produkai Tanaman Perkebunan		17	408.3							15	3,620,000,000	7	134,416,000							15	3,620,000,000	7	75,440,000					0	0.00	100	100.00	100	56.12	DKPP
6		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan penyuluh		80	83.8							150	800,000,000	0	-							150	800,000,000	0	-					0	0.00	100	100.00	0	0.00	DKPP
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			80	83.8							150	800,000,000	1	37,994,000							150	800,000,000	1	37,728,300					0	0.00	100	100.00	100	99.30	DKPP
																										Rata-rata capaian kinerja (%)				100		91.667		75		
																										Predikat kinerja				88.9	Baik					

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Setelah Perubahan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun ke-										Realisasi Capaian Tahun ke-										Rasio Capaian pada Tahun ke-										Unit Penanggung Jawab
							2023		2024		3		4		5		2023		2024		3		4		5		2023		2024		3		4		5		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Mengetahui Tingkat Pencapaian dan Kesesuaian antara Rencana yang telah ditetapkan dengan hasil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	85%	100%	91.15	305	8,905,713,906	54	9,706,634,875							305	8,664,770,213	16	9,067,631,626							100	97.29	29.63	93.42							DKPP
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah		100%		12	-	17	29,997,000							12	-	17	-							100	0.00	100	0.00							DKPP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah		100%		2	8,445,744,306	7	7,468,017,125							2	8,228,275,586	7	7,017,142,890																	DKPP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah		100%		301	331,089,600	5	192,548,750							301	325,667,458	5	149,994,810																	DKPP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah		100%		4	77,500,000	11	1,942,042,000							4	70,297,169	11	1,873,869,926																	DKPP

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah		100%		10	51,380,000	10	74,030,000							10	40,530,000	10	26,624,000																	DKPP
2	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan, Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Indek Ketahanan Pangan		52%	84.63	1	343,718,000	2	278,993,500							1	304,862,146	2	118,222,567							100	88.70	100	42.37							DKPP
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Skor Indek Ketahanan Pangan		52%		1	-	2	178,999,500							1	-	2	92,368,627																	DKPP
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Skor Indek Ketahanan Pangan		52%		1	343,718,000	2	80,000,000							1	304,862,146	2	17,278,440																	DKPP
		Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi Pangan Perkapita /Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Indek Ketahanan Pangan		52%		1	-	2	19,994,000							1	-	2	8,575,500																	DKPP
3	Meningkatnya Pendapatan Petani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pala, Pinang, Sarana Prasarana Pertanian		60%	80	1	6,597,820,000	2	3,694,344,806							1	6,377,960,500	2	3,361,217,670							100	96.67	100	90.98							DKPP
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pala, Pinang, Sarana Prasarana Pertanian		60%		1	4,323,793,400	2	1,114,439,600							1	4,111,317,100	2	1,047,260,214																	DKPP

	Melindungi dan Memelihara Kesehatan Hewan	Pengelolaan Sumber daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Sapi, Babi, Unggas		60%		1	-	2	45,822,906							1	-	2	34,733,500																	DKPP
	Meningkatkan Produksi Peternakan	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sapi, Babi, Unggas		60%		1	-	2	29,982,600							1	-	2	25,466,600																	DKPP
	Meningkatkan Produksi Peternakan	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sapi, Babi, Penambahan Populasi Ternak, Unggas		60%		1	2,274,026,600	2	2,504,099,700							1	2,266,643,400	2	2,253,757,356																	DKPP
4	Pemetaan Potensi Pertanian, Dasar Perencanaan Pembangunan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kawasan Pertanian yang dilengkapi dengan Utilitas Pertanian		85%	95	1	637,109,600	2	649,975,500							1	624,960,600	2	617,884,495							100	98.09	100	95.06							DKPP
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Kawasan Pertanian yang dilengkapi dengan Utilitas Pertanian		85%		1	-	2	30,000,000							1	-	2	28,672,000																	DKPP
	Panjang Jalan Usaha Tani yang terbangun	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian		85%		1	637,109,600	2	619,975,500							1	624,960,600	2	589,212,495																	DKPP
5	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Bencana Pertanian yang tertangani		100%		1	-	2	26,270,800							1	-	2	14,025,900							100	0.00	100	53.39							DKPP
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Bencana Pertanian yang tertangani		100%		1	-	2	26,270,800							1	-	2	14,025,900							100	0.00	100	53.39							DKPP
																										Rata-rata capaian kinerja (%)	100		85.93								
																										Predikat kinerja	92.96	Sangat Baik									

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai lembaga daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan fungsi penunjang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan memiliki tantangan dan peluang dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan organisasi. Adapun sasaran layanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu: Desa Dusun, kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok wanita tani, PKK atau Dasawisma, Kelompok Nelayan, Kelompok Budidaya, Kelompok Pengolahan Ikan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Selama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagai perangkat daerah yang mengurusi Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tentunya berbagai permasalahan muncul dan menjadi isu/permasalahan daerah juga menjadi permasalahan bangsa. Permasalahan tersebut jika dibiarkan atau tidak ditangani segera maka dalam jangka waktu tertentu akan berdampak pada Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dan pada akhirnya akan mempengaruhi orientasi dan tujuan pembangunan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

Tabel. 2.8
Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Masih rendahnya kualitas pembangunan daerah	1. Masih rendahnya kualitas perencanaan pembagunan daerah 2. Masih rendahnya Peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah	1. Kurangnya data dan informasi yang akurat 2. Masih minimnya penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah. 3. Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi. 4. Belum terkelolanya data dan informasi sebagai basis data perencanaan pembangunan. 5. Capaian realisasi target kinerja pembangunan daerah belum dapat tecapai secara maksimal 6. Masih rendahnya kemampuan sumber daya aparatur dalam mendukung fungsi perencanaan penelitian dan pengembangan. 7. Masih belum semua target program yang sudah direncanakan dapat direalisasikan 8. Masih minimnya riset/kajian/penelitian pembangunan daerah 9. Masih minimnya pemanfaatan IPTEK dan pengembangan inovasi daerah 10. Rendahnya Anggaran dan investasi untuk riset dan inovasi

Permasalahan yang kini sedang dihadapi dunia adalah perubahan iklim global, Alihfungsi lahan, Kemandirian Pangan pengembangan komoditas

pertanian Strategis, Pompanisasi dan padi Gogo, harga pangan dan energi meningkat, sehingga negara-negara yang semula menjadi pengekspor pangan cenderung menahan produknya dijadikan stok pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stok pangan nasional, Kerjasama, Pengembang Infrastruktur pendidikan dan pelatihan kepada petani.

Permasalahan Secara Nasional dalam Rencana Pembangunan jangka menengah (RPJMD):

1. Indonesia Ketergantung pada impor pangan
2. Pegeseran pola Konsumsi
3. Devisit Beras
4. Keterbatasan Infrastruktur
5. Perubahan Iklim

Dalam Rencana Kerja pembangunan Daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029 Maka isu Strategis Pengembangan sektor pertanian yang tidak sekedar menjual material tapi harus mampu memberi nilai tambah terhadap komoditi pertanian . Sehingga mampu mensejahterakan petani begitu juga dalam hal penumbuhan lokal (Ketahanan pangan)

Ketahanan pangan dihasilkan oleh suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga sub sistem yaitu : *a) Ketersediaan pangan* dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk; *b) Distribusi pangan* yang lancar dan merata; *c) Konsumsi pangan* setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan. Untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan yang mantap, dalam pelaksanaan program harus memfokuskan pada lima fundamental penanganan pertanian yang mencakup:

1. Pembangunan/perbaikan infrastruktur perbenihan, riset dan sebagainya;
2. Penguatan kelembagaan petani melalui pertumbuhan dan penguatan kelompok tani dan gabungan kelompok tani;
3. Perbaikan penyuluhan melalui penguatan kelembagaan penyuluhan dan tenaga penyuluh;
4. Perbaikan pembiayaan pertanian melalui perluasan akses petani ke sistem pembiayaan;
5. Penciptaan sistem pasar pertanian yang menguntungkan petani.

Keterlibatan seluruh masyarakat untuk mengawal arah pembangunan daerah khususnya pembangunan ketahanan pangan agar berjalan dan terlaksana dengan baik akan terwujud apabila disusun perencanaan yang sinergis dan terintegrasi serta memperhatikan keberlanjutan proses perencanaan.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah kemandirian pangan masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan.

Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut pertambahan penduduk, semakin terbatasnya sumber daya alam dan beralih fungsinya lahan pertanian, masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, serta besarnya proporsi penduduk miskin. Permintaan bahan pangan per kapita juga meningkat didorong oleh meningkatnya pendapatan, kesadaran kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat.

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut ;

A. Aspek Ketersediaan

Semakin terbatasnya kapasitas produksi pangan daerah disebabkan

beberapa kendala antara lain : (i) Berkurangnya lahan pertanian produktif karena alih fungsi lahan untuk perumahan dan peruntukan lainnya; (ii) Penyediaan sarana produksi (pupuk an organik) belum sepenuhnya terjamin sampai ke tingkat petani, sementara pupuk organik belum bisa di andalkan sebagai substitusi pupuk an organik; (iii) masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penanganan hasil panen dan pengolahan serta pemasaran hasil pertanian, masih menjadi kendala yang menyebabkan penurunan kemampuan penyediaan pangan (iv) Terbatasnya infrastruktur irigasi (teknis/setengah teknis/ sederhana) yang potensial dan dapat diandalkan; (v) kerusakan yang disebabkan oleh kekeringan maupun banjir semakin tinggi karena fungsi perlindungan alamiah telah sangat berkurang.

Komitmen penyediaan cadangan pangan pemerintah yang telah disepakati oleh provinsi sebesar 200 ton dan kabupaten/kota sebesar 100 ton sejauh ini masih di tingkat provinsi yang memenuhinya, sedangkan pada tingkat kabupaten/kota masih belum seluruhnya memfasilitasinya.

B. Aspek Distribusi Pangan

Tidak stabilanya harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan antara lain ; (i) Kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan; (ii) Pembinaan distribusi dan harga pangan melalui pelaksanaan monev harga pangan strategis belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan, penyediaan hasil analisis, peta distribusi pangan strategis yang akurat masih terbatas ; (iii) belum terpolanya distribusi bahan pangan antar kabupaten/kota dimana arus keluar masuk bahan pangan melalui banyak pintu-pintu masuk yang tersebar pada kabupaten/kota yang berada pada daerah perbatasan dengan Provinsi tetangga, sehingga menyulitkan dalam pemantauan distribusi bahan pangan tersebut, hal ini mengakibatkan fluktuasi harga pangan; (iv) belum ada jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali gabah/ beras; (v)_Bervariasinya kemampuan distribusi pangan antar wilayah, antar musim yang menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan agar tersedia sepanjang waktu di konsumen; (vi) Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan.

C. Aspek Konsumsi Pangan

Konsumsi dan keamanan Pangan Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah yang dicirikan dengan pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi seimbang dan aman. Sampai saat ini konsumsi beras per kapita masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 111,00 kg/kapita/tahun. Dengan jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah, serta persaingan pemanfaatan sumberdaya yang semakin ketat, maka dominasi beras dalam pola konsumsi pangan ini cukup memberatkan upaya pemantapan ketahanan pangan berkelanjutan yang tertumpu pada sumberdaya wilayah (lokal). Permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi dan diantisipasi dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman adalah : (1) keterbatasan kemampuan ekonomi; (2) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan dan gizi; (3) keterbatasan kemampuan mengolah bahan pangan lokal yang diminati masyarakat sebagai pangan alternatif pengganti beras (substitusi); (4) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan; (5) pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum; (6) pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, serta (7) pengelolaan konsumsi dalam rumah tangga yang kurang diperhatikan kebutuhan gizi setiap individu anggotanya. Belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat sehingga konsumsi pangan masih terpaku pada komoditas tertentu. Konsumsi pangan umbi-umbian masih rendah sedangkan konsumsi beras semakin menjadi pangan strategis di masyarakat sehingga diperlukan perubahan pola pikir melalui sosialisasi gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan di

masyarakat dengan pemenuhan sumber karbohidrat selain beras. Penganekaragaman pangan dapat berjalan dengan baik melalui dukungan dari stakeholder yang terkait melalui koordinasi yang baik.

D. Kurang Optimalnya Pemanfaatan Lahan.

Optimalisasi pemanfaatan lahan belum membudaya dikalangan petani. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya lahan kosong, indek pertanaman yang rendah, belum dimanfaatkannya lahan pekarangan dan sistim budidaya polikultur yang belum banyak diterapkan petani. Kondisi ini selain tidak dapat meningkatkan nilai guna lahan juga dapat mengggganggu upaya konservasi lahan.

E. Belum Tercapainya Efisiensi yang Lebih dari Kegiatan Usaha Tani

Pendekatan program yang hanya berorientasi terhadap upaya peningkatan produksi cenderung menyebabkan ekploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak efisiennya kegiatan usaha tani. Kondisi ini menyebabkan tidak tercapainya efisiensi usaha tani yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya keuntungan yang diterima petani.

F. Lemahnya Kelembagaan Petani

Salah satu strategi dalam menggerakkan petani dalam pembangunan pertanian adalah melalui pemberdayaan kelembagaan tani. Kelembagaan tani berperan sebagai jembatan antara petani dan pemerintah serta dapat menjadi wadah advokasi dan penyampaian aspirasi petani. Kelembagaan tani yang kuat dan mandiri dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani. Namun pada saat ini kelembagaan petani belum kuat dan mandiri, sehingga belum dapat berperan secara optimal sebagai mitra pemerintah dan penyalur aspirasi petani.

G. Belum Kuatnya Sistim Penyuluhan

Sistem penyuluham pertanian dibangun oleh subsistim sumberdaya personil, subsistim kelembagaan, subsistim sarana dan subsistim metode penyuluhan. Disadari bahwa pada saat ini sistim penyuluhan belum kuat, sehingga belum mampu secara optimal untuk melakukan pemberdayaan petani dan kelembagaan petani. Faktor penyebab belum kuatnya sistim penyuluhan adalah keterbatasan penyuluh baik dari segi jumlah maupun kompotensi, kelembagaan penyuluhan yang belum mandiri dan inovatif, kurangnya sarana serta metode yang belum sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat petani.

H. Rendahnya Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian

Salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan petani adalah melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian. Namun pada saat ini peningkatan nilai tambah produk pertanian masih rendah. Rendahnya peningkatan nilai tambah produk pertanian disebabkan oleh belum tersedianya peralatan yang memadai dan penguasaan teknologi oleh petani.

I. Masih kurangnya ketersediaan benih unggul dan bermutu

Benih merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan usaha tani. Ketersediaan benih unggul dan bermutu belum dapat memenuhi kebutuhan petani baik dari aspek jumlah dan waktu yang sesuai dengan kegiatan usaha tani. Walaupun pemerintah telah memberikan bantuan benih melalui berbagai kegiatan, namun sistim pemberian bantuan belum memihak kepada petani, sehingga bantuan tersebut kurang tepat guna dan bernilai guna.

J. Ketersediaan pupuk yang tidak memadai

Upaya memperbaiki atau meningkatkan kualitas kesuburan lahan dapat dilakukan melalui pemberian bahan organik. Bahan organik yang dgunakan berasal dati kompos yang menggunakan bahan baku utama limbah pertanian atau pupuk kandang dari limbah ternak. Salah satu strategi untuk mendorong penggunaan bahan organik dalam memperbaiki kesuburan lahan adalah dengan pemberian subsidi pupuk organik, namun sistim pemberian subsidi pupuk organik belum tepat. Saat ini subsidi pupuk organik diberikan kepada swasta/produsen. Idealnya subsidi pupuk organik adalah untuk petani, karena

pupuk organik dapat dibuat oleh petani dan untuk keperluan petani.

K. Masih Lemahnya Permodalan Petani

Salah satu persoalan dalam meningkatkan pendapatan petani adalah lemahnya permodalan dan akses petani ke lembaga permodalan. Masalah ini cukup serius yang perlu mendapat perhatian khusus. Untuk mengatasi persolan tersebut perlu dilakukan penguatan permodalan dan meningkatkan akses petani ke lembaga keuangan, baik di Propinsi maupun di kabupaten/kota.

L. Terbatasnya Ketersediaan Infrastruktur serta Prasarana Lahan dan Air

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaanya sangat memprihatinkan adalah ketersediaan irigasi. Banyaknya jaringan irigasi yang rusak mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian tidak mencukupi. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir, kerusakan sumberdaya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani.

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, balai-balai penyuluhan serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas.

M. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Terkait dan Birokrasi

Kinerja pembangunan pertanian Tanaman Pangan Hortikultura sangat ditentukan oleh keterpaduan diantara subsistem pendukungnya, yaitu mulai dari subsistem hulu, subsistem budidaya usaha tani (on-farm) subsistem hilir (pengolahan dan pemasaran) dan subsistem pendukung (keuangan pendidikan dan transportasi). Keterkaitan antar subsistem sangat erat namun penanganannya terkait dengan kebijakan berbagai sektor. Sementara Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura hanya memiliki kewenangan dalam aspek budidaya/usahatani. Lemahnya koordinasi terjadi juga antara pemerintah propinsi daerah (propinsi dengan kabupaten/kota) serta antara pemerintah kab/Kota.

N. Jumlah Penyuluh yang masih kurang dan sebaran penyuluh yang belum merata

Penyuluh PNS Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya 43 orang, sedangkan jumlah desa 43.

O. Kompetensi Penyuluh yang masih rendah

Sebagian Penyuluh yang sudah mengikuti diklat dasar penyuluh pertanian dan sebagian belum. Kemudian penyuluh yang sudah mendapatkan diklat dasar belum mendapatkan diklat lanjutan sehingga skill terbatas dalam penerapan di lapangan.

Mengacu kepada arah kebijakan RPJMD 2025-2026 maka arah kebijakan umum dan strategi pembangunan ketahanan pangan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
3. Stabilnya harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen;
4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;
5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
6. Tercapainya keamanan pangan segar
7. Pengolahan Pangan pokok yang beragam.

Faktor penghambat ataupun faktor pendorong ditinjau dari renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan potensi dan tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Secara umum masih cukup tersedia potensi sumberdaya alam dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan. Sedangkan dari kapasitas sumberdaya manusia dan sumberdaya

teknologi, memiliki potensi untuk ditingkatkan, untuk mendukung pengembangan ketersediaan dan distribusi pangan serta perbaikan konsumsi pangan.Di sisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat, berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan.

2.2.2. Isu Strategis

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2009 selanjutnya disebut dengan RTRWP dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRWP Sumatera Barat yang bersifat umum disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif kabupaten dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. RTRWP juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan zonasi peruntukan.

Penetapan zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi. Indikasi arahan peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan indikasi arahan peraturan zonasi yang melengkapi rencana umum tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah disusun. ruang lingkup ketahanan pangan termasuk pada Program Pengembangan Kawasan Pertanian dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengembangan Pertanian, dapat dijadikan salah satu upaya pengembangan ketahanan pangan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola kawasan sebagai sentra pengembangan produk pangan olahan berbasis sumberdaya lokal, sehingga dapat memberikan dampak kepada masyarakat melalui peningkatan nilai tambah serta memberikan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dari proses KLHS terdapat 5 Isu strategis, yaitu: (1) Alih Fungsi Lahan; (2) Penurunan Kualitas Hutan; (3) Penurunan Kualitas Air; (4) Penurunan Ketersedian air; dan (5) Pencemaran udara, dan dari hasil kajian pengaruh didapatkan 12 program prioritas yang diperkirakan memiliki pengaruh/dampak negatif terhadap isu strategis, diantaranya adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Industri Berbasis Kawasan (Sentra Produksi); Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak; Peningkatan Kesejahteraan Petani.

1. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil review terhadap faktor-faktor dari pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ditinjau dari Gambaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota; Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Ketahanan

Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, maka dalam pembangunan ketahanan pangan pada umumnya, dan di Sumatera Barat khususnya terdapat isu-isu strategis yang berkembang saat ini, isu-isu tersebut antara lain:

a) Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat dan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta belum berkembangnya industri pangan lokal.
b) Angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan namun akses pangan masyarakat belum terjamin.
c) Alih fungsi lahan cenderung meningkat, mengakibatkan berkurangnya lahan produktif sebagai sumber penyediaan pangan.
d) Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang Aman, Beragam, Bergizi dan Berimbang.
e) Tingginya intensitas bencana alam yang berdampak serius terhadap tingkat kerawanan pangan masyarakat.
f) Masih rendahnya Nilai Tukar Petani dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan ketahanan pangan.
g) Rendahnya jaminan mutu dan keamanan pangan masyarakat serta masih lemahnya pengawasan keamanan pangan segar.
h) Ancaman kelaparan global dan ketergantungan pangan dari luar.
i) Perubahan iklim global, konversi dan degradasi sumber daya lahan dan air.

Tabel. 2.9
Isu-Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Kepulauan Mentawai termasuk dalam kawasan yang memiliki cuaca yang berubah secara ekstrim Kabupaten Kepulauan Mentawai bisa mengalami El Nino yang mengakibatkan : - Berkurangnya Curah Hujan: El Niño umumnya menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia, karena adanya pergeseran sirkulasi udara di atas wilayah tersebut. - Kekeringan: Curah hujan yang berkurang dapat menyebabkan kekeringan, terutama di wilayah-wilayah yang bergantung pada air hujan untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari. - Perubahan Pola Musim: El Niño dapat menyebabkan perubahan pola musim, seperti musim kemarau yang lebih panjang atau musim hujan yang lebih singkat.	Masih lemahnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan terpadu dalam pengurangan risiko pertanian Jaringan irigasi, jalan usaha tani kurang memadai dan embung yang belum tersedia Belum selesainya peta LP2B dan rencana induk pertanian. SDM petani tentang pertanian yang masih rendah	Masih kurangnya persentase ketahanan pangan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang Menjadikan KLHS prinsip dasar dalam proses pembangunan pertanian yang dimulai dari perencanaan.	- Krisis Pangan - Malnutrisi - Dampak Perubahan Iklim - Pentingnya Pertanian Berkelanjutan	- Ketahanan Pangan - Pengelolaan Lahan - Perubahan Iklim	- Perubahan Iklim - Ketersediaan Lahan - Teknologi Pertanian - Akses Ke Pasar - Ketahanan Pangan - Ketersediaan Pangan - Infrastruktur Pertanian - Kondisi Petani	Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat 6 Prioritas dimana Prioritas 1 tidak ada. Prioritas 2 terdapat di Desa Muntei (Kec. Siberut Selatan) Prioritas 3 terdapat di Desa Madobag (Kec. Sib Selatan), Desa Sagulubeg (Kec. Siberut Barat Daya), Desa Bojakan (Sib. Utara), Desa Simatalu (Kec. Siberut Barat) Prioritas 4 tidak ada Prioritas 5 tidak ada Prioritas 6 tidak ada. Zona Megathrust Mentawai-Siberut sangat rentan pada potensi bencana gempa bumi dan tsunami. Potensi bencana lainnya juga menjadi permasalahan seperti banjir, gelombang/cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan. Potensi serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah sebagai dokumen perencanaan yang memandu pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Dan juga menjabarkan RPJMD dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih spesifik. Untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan memastikan Pembangunan di bidang kepariwisataan berjalan sesuai rencana dan mencapai sasaran visi serta misi Pembangunan daerah. Dimana Visi Pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 : “Kepulauan Mentawai Maju berdaya Saing dan Sejahtera.”

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan manusia yang Inklusif, Responsif, dan berkualitas;
2. Mewujudkan transformasi Ekonomi melalui peningkatan produktifitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Ekonomi Daerah;
3. Mewujudkan Pembangunan infrastruktur kewilayah yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana
6. Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia
7. Mewujudkan Masyarakat yang Aman Harmonis dan Berkeadilan
8. Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Tepercaya.

Misi yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah misi 2 yaitu “Mewujudkan Transpormasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah”. Sasaran yang ingin dicapai Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

3.2. Sasaran RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Implementasi visi misi ini diperlukan:

Kerja Keras, yaitu upaya yang dilakukan dengan komitmen, dorongan dan niat yang kuat, tulus dan ikhlas untuk mengemban amanat dan mengerahkan seluruh usaha, kemampuan, dan kesungguhan dalam mengatasi hambatan, serta mampu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dan mencapai target yang diinginkan.

Kerja Cepat, yaitu mengerjakan menyelesaikan pekerjaan dengan efisien dan efektif, bukan hanya sekadar buru-buru, melainkan dengan perencanaan, prioritas, dan pemanfaatan waktu yang baik untuk mencapai hasil yang maksimal.

Kerja Cerdas, yaitu cara bekerja yang mengutamakan efisiensi, produktivitas, dan penggunaan sumber daya secara optimal, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, begitu juga memandang solusi yang tepat dengan berbagai alternatif pilihan untuk beberapa hal yang perlu pengambilan keputusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kerja Tepat, yaitu bekerja dengan akurasi yang tinggi, fokus pada pencapaian output, outcome dan benefit dari yang akan menjadi tujuan pekerjaan. Efektivitas dari sisi waktu dan efisiensi dari sisi anggaran sangat mempengaruhi pola kerja sehingga lebih tepat pengelolaan sumber daya yang ada, tepat dalam mengeksekusi, tepat dalam pencapaian target kerja dan tepat dalam pemanfaatannya.

Gerak Bersama, upaya pencapaian visi dan misi ini merupakan tanggung jawab bersama, seluruh komponen dan pemangku kepentingan, pembangunan yang dihadirkan adalah pembangunan yang inklusif melibatkan semua pihak dan tidak diskriminatif. Perlu gerak bersama untuk menghidupkan dan mengelola segala potensi yang ada untuk kemajuan bersama menuju Kepulauan Mentawai yang Maju Berdaya Saing dan Sejahtera.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Menilik pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip Budidaya Pertanianya adalah sebagai berikut:

Pengaturan penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan meliputi :

1. perencanaan budi daya Pertanian;
2. tata ruang dan tata guna Lahan budi daya Pertanian;
3. penggunaan Lahan;
4. perbenihan dan perbibitan;
5. penanaman;
6. pengeluaran dan pemasukan Tanaman, benih, bibit, dan hewan;
7. Pemanfaatan air;
8. Pelindungan dan pemeliharaan Pertanian;
9. Panen dan pascapanen;
10. Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian;
11. Usaha Budi Daya Pertanian;
12. Pembinaan dan pengawasan;
13. Penelitian dan pengembangan;
14. Pengembangan sumber daya manusia;
15. Sistem informasi;

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2025-2029

VISI: KEPULAUAN MENTAWAI MAJU BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
MISI 2: Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%) Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian,kehutanan dan perikanan (Juta/orang)

Sesuai dengan isu strategis yang menjadi pokok perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai jangka menengah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	47,34	47,13	46,92	46,71	46,62	46,50
			Tingkat Produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	200,58	201,59	202,59	203,60	198,73	204,60

3.3. Strategi RENSTRA 2025-2030 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Strategi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi daerah serta rencana program prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029. Strategi jangka menengah DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan bagaimana cara DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.
Strategi yang ditempuh dalam memenuhi tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun rencana adalah:

Tabel 3.3
Strategi RENSTRA 2025-2030 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Kep. Mentawai

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Memperbaiki dan memperkuat dasar- dasar yang menjadi landasan pengembangan sektor pertanian seperti sarana dan prasarana (infrastruktur), kebijakan, tata kelola, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM)	Memperkuat landasan kunci sektor pertanian yang memberikan dampak besar terhadap pembangunan daerah	Pertumbuhan yang memberikan manfaat secara merata kepada pelaku utama, pelaku usaha, dan kelembagaan petani	Pembangunan pertanian yang mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan dan kesinambungan ekonomi jangka panjang	Penguatan basis pertanian untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan

3.4. Arah Kebijakan RENSTRA 2025-2030 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Arah kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2030 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalamrangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rumusan arah kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai disajikan dalam Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2025-2029

Visi: Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera			
Misi ke-2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Ekonomi Daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pengalokasian 10% anggaran untuk sektor Pertanian, Perikanan, Pengembangan sektor primer berbasis kawasan dan Komoditas Unggulan.	Pemantapan Ketahanan Pangan, meliputi aspek: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan di daerah rentan rawan pangan. Mempertimbangkan aspek kebencanaan dalam pengambilan keputusan pembangunan. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan Beragam, Bergizi Seimbang Aman (B2SA) Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pemerintah Daerah Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola ketahanan pangan. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada aparatur pemerintah daerah tentang ketahanan pangan. Peningkatan Produksi Pangan Perluasan Lahan Pertanian Pengembangan Teknologi Pertanian Peningkatan Kapasiats Petani Peningkatan Kenektifitas dan asesibilitas Melakukan pemasaran hasil Pertanian. Memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang kebencanaan. Peningkatan Produktivitas:

Visi: Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera			
Misi ke-2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Ekonomi Daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Penggunaan teknologi modern dan inovasi dalam budidaya, seperti penggunaan pupuk organik, aplikasi teknologi informasi, dan pemanfaatan genetika tanaman. Peningkatan kualitas bibit dan varietas unggul. Pengembangan sistem irigasi yang efisien. Peningkatan Daya Saing: Pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan, seperti kelapa sawit, untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Peningkatan kualitas produk dan standar internasional untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Penyederhanaan regulasi dan birokrasi untuk mendukung investasi dan pengembangan usaha perkebunan. Keberlanjutan: Peningkatan praktik pertanian berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik, pengurangan penggunaan pestisida, dan pengelolaan air yang efisien. Penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Pengembangan inovasi untuk memanfaatkan limbah perkebunan sebagai sumber energi terbarukan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perkebunan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kegiatan peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perkebunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

4.1.1. Program

Program merupakan perwujudan dari berbagai strategi dan langkah operasional dalam rangka pencapaian setiap tujuan. Adapun program Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan atau dalam periode Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan
6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
9. Program Penyuluhan Pertanian
10. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

4.1.2. Kegiatan

Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai bagian dari pencapaian sasaran.

Sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan maka program dan kegiatan yang akan dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan tugas dan fungsinya

adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1) Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Kordinasi Perangkat Daerah
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
g. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Laporan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia
3) Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
h. Program Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Terdiri dari kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :
1) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
i. Program Penanganan Keamanan Pangan
Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
1) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2) Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
j. Program Pengawasan Kerawanan Pangan
Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

k. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
2) Pendampingan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian
3) Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
4) Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
5) Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
6) Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Setek

l. Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kab/Kota.

1) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
2) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota
3) Pengawasan Produksi Benih/Bibit dan Ternak
4) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam Satu Daerah Kab/Kota Lainnya
5) Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Kabupaten/Kota Lainnya
6) Pengadaan Hijauan Pakan Ternak

m. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Pengembangan Prasarana Pertanian
2) Pengendalian Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
3) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
4) Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
5) Pengembangan Prasarana Pertanian
6) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
7) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
8) Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
9) Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya

n. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Pengawasan Produksi Benih/Bibit, HPT Bahan Pangan
2) Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan

o. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
2) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

p. Program Penyuluhan Pertanian

Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Pelatihan Dasar)
2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa
3) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
4) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra DKPP		OPD Penanggungjawab	LOKASI	SUMBER DANA
							2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat yang lebih sejahterah dan berkualitas	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat, Kesejahteraan dan Menguranggi Kerawanan Pangan	Persentase Kelompok Masyarakat di Daerah Rawan Pangan dan Yang Berisiko Stunting																			

		1	2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat	60%	47,34	274.573.082	47,13 %	999.786.272	46,92 %	1.020.635.741	46,71 %	1.035.287.213	46,50 %	1.045.937.404	4,50%	4.376.219.712			
			2 09 03 1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terwujudnya keragaman konsumsi pangan	60	70	274.573.082	71 %	999.786.272	72 %	1.020.635.741	74 %	1.035.287.213	75 %	1.045.937.404	75 %	4.376.219.712	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara, Kec. Sipora Selatan, Kec. Siberut Baratdaya, Kec. Siberut Selatan, Kec. Siberut Tenggah, Kec. Siberut Utara, Kec. Siberut Barat, Kec. Pagai Utara	DAU/ DIF/ DAK

																			, Kec. Sikakap dan Kec. Pagai Selatan	
		oke	2 09 03 1.01 0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Laporan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	1 laporan	174.573.082	4 laporan	889.786.272	4 laporan	905.635.741	5 laporan	918.287.213	6 laporan	926.937.404	20 laporan	3.815.219.712	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora utara, Kec. Sipora Selatan, Kec. Siberut barat daya, Kec. Siberut Selatan, Kec. Siberut Tenggah, Kec. Siberut	

																				Utara, Kec. Siberut barat, Kec. Pagai Utara, Kec. Sikakap dan Kec. Pagai Selatan	
		oke	2 09 03 2.01 0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	0 dokumen	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	110.000.000	3 dokumen	115.000.000	3 dokumen	117.000.000	3 dokumen	119.000.000	15 dokumen	561.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara Desa Tuapejat	DAU
		2	2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	10	8%	274.573.082	7%	499.893.136	72 %	510.317.870	74 %	517.643.607	75 %	522.968.702	75 %	2.325.396.397	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
			2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahana	Tersedianya Peta Kerentanan	10	1 dokumen	274.573.082	1 dokumen	499.893.136	1 dokumen	510.317.870	1 dokumen	517.643.607	1 dokumen	522.968.702	5 dokumen	2.325.396.397	DINAS KETAHANAN PANGAN,		

				n Pangan Kecamatan	dan Ketahanan Pangan														PERTANIAN DAN PERIKANAN		
			2 09 04 2.01 0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 dokumen	1 dokumen	274.573.082	1 dokumen	499.893.136	1 dokumen	510.317.870	1 dokumen	517.643.607	1 dokumen	522.968.702	5 dokumen	2.325.396.397	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara Desa Tuapejat	DAU
		3	2.9.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Sumber Daya Ekonomi untuk untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	60	10 Ton	128.810.901	62 %	699.786.272	65 %	620.635.741	66 %	605.287.213	70 %	545.937.404	70 %	2.600.457.531	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
			2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Swasembada Pangan	20 Ton	10 Ton	128.810.901	20 Ton	699.786.272	20 ton	620.635.741	20 Ton	605.287.213	20 Ton	545.937.404	110 Ton	2.600.457.531	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		

			2 09 03 2.02 0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 ton	10 ton	128.810.901	20ton	699.786.272	20 ton	620.635.741	20 Ton	605.287.213	20 ton	545.937.404	110 ton	2.600.457.531	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara Desa Sipora Jaya	DAU/ DIF
		4	2.9.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya kualitas pangan	50	52	100.000.000	55 %	300.000.000	60 %	400.000.000	62 %	430.000.000	65 %	500.000.000	65 %	1.730.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
			2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Stunting	0	12	100000000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	430.000.000,00	12 Laporan	500.000.000,00	12 Laporan	1730000000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
			2 09 05 2.01 0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar	12	12	100.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	430.000.000,00	12 Laporan	500.000.000,00	12 Laporan	1.730.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Provinsi Sumatera Barat dan Luar Provinsi Sumatera Barat	DAU

					asal tumbuhan															
		5	3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan peternakan	60	65 %	2.745.730.815	70	7.310.234.261	72	8.080.032.947	75	8.196.023.770	80 %	8.280.337.785	80 %	34.612.359.578	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
			3 27 02 2.01	Pengawasan Pengguna an Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	60%	65 %	1.100.000.000,00	70 %	4.671.909.377,00	72 %	5.386.688.631,00	75 %	5.464.015.847,00	80 %	5.520.225.190,00	80 %	22.142.839.045,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	10 Kecamatan (Sipora Utara, Sipora Selatan, Siberut Selatan, Siberut Tengah, Siberut Utara	DAU dan DIF

																				Siberut Barat Daya, Siberut Barat, Sikakap, Pagai Utara, Pagai Selatan)	
			3 27 02 2.01.002	Pendampingan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Terhadap Kegiatan Dinas	12 Laporan	12 laporan	1.100.000.000	12 laporan	1.671.909.377	12 laporan	2.286.688.631	12 laporan	2.364.015.847	12 laporan	2.420.225.190	12 laporan	9.842.839.045	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	10 Kecamatan (Sipora Utara, Sipora Selatan, Siberut Selatan, Siberut Tengah, Siberut Utara Siberut Barat Daya, Siberut Barat,	DAU/ DIF

																			Sikakap, Pagai Utara, Pagai Selatan)	
			3 27 02 2.01.003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak		0	0	8.270 batang	1.692.950.000	18.327 batang	1.792.950.000	18.337 Batang	1.792.950.000	20.437 Batang	1.792.950.000	65.371 Batang	7.071.800.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	10 Kecamatan (Sipora Utara, Sipora Selatan, Siberut Selatan, Siberut Tengah, Siberut Utara, Siberut Barat Daya, Siberut Barat, Sikak	DAU/ DIF

																			ap, Pagai Utara, Pagai Selatan)	
			3 27 02 2.01.008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	batang	0	0		599.550.000	20.610 batang	599.550.000	20.610 batang	599.550.000	20.610 batang	599.550.000	82.440 batang	2.398.200.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
					Jumlah Benih Kelapa Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	0	0	0	6.870 batang	199.850.000	6.870 batang	199.850.000	6.870 batang	199.850.000	6.870 batang	199.850.000	27.480 batang	1.918.560.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Pagai Selatan, Pagai Utara, Siberut Selatan, Siberut Utara, Siberut Barat Daya, Siberut Utara	DAU/ DIF

					Jumlah Benih Cengkeh Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	0	0	0	6.870 batang	199.850.000	6.870 batang	199.850.000	6.870 batang	199.850.000	6.870 batang	199.850.000	27.480 batang	1.534.848.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Pagai Selatan, Pagai Utara, Siberut Barat Daya, Siberut Tengah, Siberut Barat, Siberut Utara	DAU/ DIF
					Jumlah Benih Pinang Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	0	0	0	6.870 batang	199.850.000	6.870 batang	199.850.000	6.870 batang	199.850.000	6.870 batang	199.850.000	27.480 batang	1.227.878.400	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Pagai Selatan, Pagai Utara, Siberut Barat Daya, Siberut Tengah, Siberut Barat, Siberut Utara	DAU/ DIF

			3 27 02 2.01.0 09	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	batang	0	0	110 .500 batang	407.500.000	110 .500 batang	407.500.000	110 .500 batang	407.500.000	110 .500 batang	407.500.000	442 .000 batang	1.630.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Siberut Barat, Kec. Siberut Selatan, Siberut Utara, Kec. Sipora Utara, Kec. Sipora Selatan, Kec. Pagai Selatan, Kec. Sikakap	DAU/ DIF
					Jumlah Benih Pisang Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	0	0	0	110 .500 batang	407.500.000	110 .500 batang	407.500.000	110 .500 batang	407.500.000	110 .500 batang	407.500.000	442 .000 batang	1.304.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Siberut Barat, Kec. Siberut Selatan, Siberut Utara, Kec. Sipora Utara, Kec.	DAU/ DIF

																			Sipora Selatan, Kec. Pagai Selatan, Kec. Sikakap	
			3 27 02 2.01.013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	stek	0	0	200.000 stek	300.000.000	200.000 stek	300.000.000	200.000 stek	300.000.000	200.000 stek	300.000.000	800.000 stek	1.200.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Pagai Selatan, Pagai Utara, Sikakap, Sipora Selatan, Sipora Utara, Siberut Barat, Siberut Tengah, Siberut Selatan	DAU/ DIF

					Jumlah Benih Nilam Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	0	0	0	200.000 stek	300.000.000	200.000 stek	300.000.000	200.000 stek	300.000.000	200.000 stek	300.000.000	800.000 stek	960.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Pagai Selatan, Pagai Utara, Sikakap, Sipora Selatan, Sipora Utara, Siberut Barat, Siberut Tengah, Siberut Selatan	DAU/ DIF
			3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Satu Daerah Kabupaten/Kota Lainnya	Terkendalinya Bibit Ternak dan Pakan Ternak		2940	1.645.730.815	2.390 Ekor	2.638.324.884	2.690 Ekor	2.693.344.316	2.219 Ekor	2.732.007.923	2.280 Ekor	2.760.112.595	13.581 Ekor	19.965.869.718	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		

			3.27.02.2.06.002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 ton	1 ton	353.730.815	1 ton	403.570.000	1 ton	404.570.000	1 ton	405.570.000	1 ton	407.570.000	5 ton			Kec. Sipora Utara (Desa tuapejat, Desa Sipora Jaya, Desa Bukit Pamewa), Kec. Sipora Selatan (Desa Mara, Desa matobe, Desa Bosua, Desa Nemnemleleu, Desa Sioban)	

			3.27.02.2.06.003	Pengadaaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten Kota Lain	Tersedianya Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	ekor	2940	1.292.000.000	2.390 Ekor	2.234.754.884	2.690 Ekor	2.288.774.316	2.219 Ekor	2.326.437.923	2.280 Ekor	2.352.542.595	13.581 Ekor	10.494.509.718	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara (Desa tuapejat, Desa Sipora Jaya, Desa Bukit Pamewa), Kec. Sipora Selatan (Desa Mara, Desa matobe, Desa Bosua, Desa Nemnemleleu, Desa Sioban), Kec. Siberut Barat Daya (Desa Pasakiat Taileleu),	DAU/DIF

																				Kec. Siberut Barat (Desa Simalegi Dusun Betaet), Kec. Pagai Utara, Kec. Sikakap (Taikako dan Desa Sikakap) Kab. Kep Mentawai	

				A.1. Pengadaan Ternak Sapi	Meningkatnya jumlah populasi ternak sapi / terbelinya bibit ternak sapi 69 ekor	2.940 ekor	290 Ekor	630.000.000	290 Ekor	630.000.000	290 Ekor	1.752.000.000	319 Ekor	1.752.000.000	280 Ekor	1.192.000.000	1.469 Ekor	5.956.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara (Desa tuapejat, Desa Sipora Jaya, Desa Bukit Pamewa), Kec. Sipora Selatan (Desa Mara, Desa matobe, Desa Bosua, Desa Nemnemleleu, Desa Sioban), Kec. Siberut Barat Daya (Desa Pasakiat Taileleu),	DAU/ DIF

																				Kec. Siberut Barat (Desa Simalegi Dusun Betaet), Kec. Pagai Utara, Kec. Sikakap (Taikako dan Desa Sikakap) Kab. Kep Mentawai	

				A.2 Pengadaan ternak Babi	Meningkatnya jumlah populasi ternak Babi / terbelinya bibit ternak babi 50 ekor	45.240 ekor	3.712 Ekor	466.430.000	2.100 Ekor	466.430.000	2.100 Ekor	270.000.000	1.600 Ekor	710.000.000	1.700 Ekor	642.500.000	11.212 Ekor	2.555.360.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara (Desa tuapejat, Desa Sipora Jaya, Desa Bukit Pamewa), Kec. Sipora Selatan (Desa Mara, Desa matobe, Desa Bosua, Desa Nemnemleleu, Desa Sioban), Kec. Siberut Barat Daya (Desa Pasakiat Taileleu),	DAU/ DIF

																				Kec. Siberut Barat (Desa Simalegi Dusun Betaet), Kec. Pagai Utara, Kec. Sikakap (Taikako dan Desa Sikakap) Kab. Kep Mentawai	

				A.3 Pengadaan Unggas	Meningkatnya jumlah populasi ternak Unggas / terbelinya bibit ternak unggas	82.880 ekor	-	0	-	200.000.000	300 Ekor	200.000.000	300 Ekor	200.000.000	300 Ekor	360.000.000	900 Ekor	960.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara (Desa tuapejat, Desa Sipora Jaya, Desa Bukit Pamewa), Kec. Sipora Selatan (Desa Mara, Desa matobe, Desa Bosua, Desa Nemnemleleu, Desa Sioban), Kec. Siberut Barat Daya (Desa Pasakiat Taileleu),	DAU/ DIF

																			Kec. Siberut Barat (Desa Simalegi Dusun Betaet), Kec. Pagai Utara, Kec. Sikakap (Taikako dan Desa Sikakap) Kab. Kep Mentawai	
										2.000.000.000		6.000.000.000		6.481.000.000		6.885.000.000					
		6	3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi	4%	5%	1.830.487.210	5%	4.998.931.360	5%	5.103.178.704	5%	5.176.436.065	5%	5.229.589.022	5%	22.338.622.361	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		

			3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terpeliharanya Prasarana Pertanian			600.000.000		-		-		-		-		-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
			3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	0	1 dokumen	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	600.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	10 Kecamatan (Sipora Utara, Sipora Selatan, Siberut Selatan, Siberut Tengah, Siberut Utara, Siberut Barat Daya, Siberut Barat, Sikakap, Pagai Utara	DAU/ DIF

																			, Pagai Selatan)	
			3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terbangunnya Prasrana Pertanian		4 unit	1.230.487.210	8 unit	4.998.931.360	10 unit	5.103.178.704	9 unit	5.176.436.065	7 unit	5.229.589.022	25 unit	15.800.386.199	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	5 unit	1.230.487.210	6 unit	2.000.000.000	3 unit	2.604.247.344	3 unit	2.705.249.344	3 unit	2.705.249.344	13 unit	11.245.233.242	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara, Sipora Selatan, Kec. Pagai Selatan, Kec. Pagai Utara, Kec. Siberut Selatan,	DAU/ DIF/ DAK

				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	-	-	1 unit	1.000.000.000	2 unit	1.100.000.000	1 unit	1.201.000.000	1 unit	1.254.152.957	4 Unit	4.555.152.957			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usahatani yang direhabilitasi			-	3 unit	1.198.931.360	3 unit	1.398.931.360	3 unit	1.270.186.721	3 unit	1.270.186.721	12 unit	5.138.236.162			
				Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	unit		-	1 unit	800.000.000	-	-	-	-		-		800.000.000			

		7	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			137.286.541	60 %	666.524.182	60 %	680.423.828	60 %	690.191.476	60 %	697.291.602	80 %	2.734.431.088	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
			3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultiura dan perkebunan			137.286.541	62 %	333.262.091	65 %	340.211.914	66 %	345.095.738	70 %	348.645.801	80 %	1.367.215.544	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
			3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	60%	65 %	137.286.541	62 %	333.262.091	65 %	340.211.914	66 %	345.095.738	70 %	348.645.801	80 %	1.367.215.544	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Siberut Barat, Kec. Siberut Utara, Kec. Siberut Selatan, Kec. Pagai Selatan, Kec. Sipora	DAU/ DIF

					yang Dikendalikan														Selatan	
		8	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	0	0	457.621.803	1%	208.288.807	2%	212.632.446	2%	215.684.836	3%	217.903.626	8%	1.312.131.518	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
			3.27.02.2.05.006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan	Meningkatnya kesehatan Hewan Ternak	0	1 Laporan	457.621.803	1 laporan	208.288.807	1 Laporan	212.632.446	1 Laporan	215.684.836	1 Laporan	217.903.626	5 Laporan	1.312.131.518	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	10 Kecamatan (Sipora Utara, Sipora Selatan, Siberut Selatan, Siberut Tengah, Siberut Utara	

																			Siberut Barat Daya, Siberut Barat, Sikakap, Pagai Utara, Pagai Selatan)	
			3.27.02.2.05.006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan	Meningkatnya kesehatan Hewan Ternak		1 Laporan	457.621.803	1 laporan	208.288.807	1 Laporan	212.632.446	1 Laporan	215.684.836	1 Laporan	217.903.626	5 Laporan	1.312.131.518	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	10 Kecamatan (Sipora Utara, Sipora Selatan, Siberut Selatan, Siberut Tengah, Siberut Utara Siberut Barat Daya, Siberut Barat,	

																			Sikakap, Pagai Utara, Pagai Selatan)	
		9	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	0,10	15	549.146.164	20	1.999.572.544	22	2.041.271.480	25	2.070.574.428	30	2.091.874.808		8.752.439.424	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
			3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas penyuluhan		43 unit	274.573.082	45 unit	999.786.272	43 unit	1.020.635.740	43 unit	1.035.287.214	52 unit	1.045.937.404	192 unit	4.376.219.712	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		

			3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	36 orang	137.286.541	36 orang	499.893.136,00	36 orang	510.317.870,00	36 orang	517.643.607,00	36 orang	522.968.702,00	7 unit	2.188.109.856,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara Desa Sipora Jaya, Desa Sido Makmur Bukit Pamewa, Kec. Siberut Selatan Desa Mailepppet, Kec. Sipora Selatan Desa Saureinu, Kec. Siberut Utara Desa Malancan dan Sotboyak, Kec. Pagai Selatan	DAU/ DIF/ DAK

																			Desa Bulasat dan Desa Belerak sok.	
			3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	20 orang	137.286.541	20 orang	499.893.136,00	20 orang	510.317.870,00	20 orang	517.643.607,00	20 orang	522.968.702,00	43 unit	2.188.109.856,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara dan Sipora Selatan ,Pagai Utara , Pagai Selatan, Sikakap, Siberut Barat Daya, Siber	DAU/ DIF/ DAK

																			ut Selatan, Siberut Tengah,Siberut Barat.	
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan	meningkatnya Pendapatan Masyarakat		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (TON)	8.695	13.000	4.300.000.000	14.000	8.560.000.000	15.000	8.810.000.000	16.000	9.060.000.000	17.000	9.360.000.000	18.000	9.610.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah kabupaten/kota		500	4.300.000.000	1.026	8.260.000.000	1.026	8.510.000.000	1.026	8.760.000.000	1.026	9.010.000.000	1.026	9.260.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	

			3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	500	4.300.000.000	500	5.000.000.000	500	5.000.000.000	500	5.000.000.000	500	5.000.000.000	500	5.000.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang di Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	-	-	20	130.000.000	20	130.000.000	20	130.000.000	20	130.000.000	20	130.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang di Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitr	Unit Usaha	-	-	6	130.000.000	6	130.000.000	6	130.000.000	6	130.000.000	6	130.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	

					aan Usaha															
			3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				500	3.000.000.000	500	3.250.000.000	500	3.500.000.000	500	3.750.000.000	500	4.000.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.03.2.03	Pengelolaan dan PenyelenggaraanTempat Pelelangan Ikan	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Penjualan Es Balok			-	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelan	Dokumen	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	

					gan Ikan (TPI)															
			3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Layanan	-	-	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupate	Jumlah prosedur dan Persyaratan penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT		-		30	100.000.000	40	112.500.000	50	125.000.000	60	137.500.000	70	150.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	

				n/Kota																
			3.25.03.2.04.0003	Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Jumlah Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan	Rekomendasi			10	50.000.000	10	52.500.000	10	55.000.000	10	57.500.000	10	60.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.03.2.04.0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha yang Diterbitkan	Rekomendasi			20	50.000.000	30	60.000.000	40	70.000.000	50	80.000.000	60	90.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (TON)	308,14	450	170.000.000	460	6.705.000.000	470	7.805.000.000	480	7.905.000.000	490	8.005.000.000	2.350	8.105.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	

			3.25.04.2.01	*Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota*	*Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*		-	-	5	360.000.000	5	360.000.000	5	360.000.000	5	360.000.000	5	360.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau dampak negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan yang diterbitkan	Rekomendasi	-	-	5	360.000.000	5	360.000.000	5	360.000.000	5	360.000.000	5	360.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	

				, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak mengguna kan Modal Asing atauTenaga Kerja Asing															
			3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Meningkatnya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil		13	170.000.000	44	2.990.000.000	44	3.090.000.000	44	3.190.000.000	44	3.290.000.000	44	3.390.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	6	100.000.000	16	2.400.000.000	16	2.500.000.000	16	2.600.000.000	16	2.700.000.000	16	2.800.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	

			3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mengikuti Pembentukan dan pengembangan kelembagaan	Kelompok	-	-	16	80.000.000	16	80.000.000	16	80.000.000	16	80.000.000	16	80.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kelompok	-	-	5	130.000.000	5	130.000.000	5	130.000.000	5	130.000.000	5	130.000.000	DKP4	Kab. Kep. Mentawai	

			3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahunan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	7	70.000.000	7	380.000.000	7	380.000.000	7	380.000.000	7	380.000.000	7	380.000.000	DKP5	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudidaya ikan kecil (TDPIK) yang diterbitkan dalam		-	-	6	100.000.000	6	100.000.000		100.000.000	6	100.000.000	18	100.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	

					1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota															
			3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan tanda daftar bagi Pembudidayaan ikan kecil(TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan prosedurPerizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil Bagi Pembudidayaan Ikan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Rekomendasi	-	-	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	

			3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudidayaan Ikan Kecil yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi	-	-	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	meningkatkan produksi ikan secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem perairan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat		-	-	73	3.255.000.000	73	4.255.000.000	73	4.255.000.000	73	4.255.000.000	73	4.255.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	

			3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Unit	-	-	7	1.500.000.000	7	1.500.000.000	7	1.500.000.000	7	1.500.000.000	7	1.500.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Unit	-	-	5	1.000.000.000	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	

			3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan ikan di darat	Unit	-	-	35	175.000.000	35	175.000.000	35	175.000.000	35	175.000.000	35	175.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk pembudidayaan Ikan	Unit	-	-	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaat Air Untuk Pembudidayaan Ikan didarat	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembu	Dokumen	-	-	5	130.000.000	5	130.000.000	5	130.000.000	5	130.000.000	5	130.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	

					didayaan Ikan															
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan	meningkatnya Pendapatan Masyarakat		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ton)	73,070	105	66.000.000	110	6.500.000.000	115	6.500.000.000	120	6.500.000.000	125	6.500.000.000	130	6.500.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		1	6.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	

			3.25.06.2.01.0005	Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	Dokumen	1	6.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi produk perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan		-	-	4	1.250.000.000	4	1.250.000.000	4	1.250.000.000	4	1.250.000.000	4	1.250.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	

			3.25.06.2.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan Pemasaran skala micro dan kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan Berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan resiko	Unit Usaha	-	-	4	1.250.000.000	4	1.250.000.000	4	1.250.000.000	4	1.250.000.000	4	1.250.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	

			3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		11	60.000.000	12	5.200.000.000	12	5.200.000.000	12	5.200.000.000	12	5.200.000.000	12	5.200.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
			3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengelolaahn dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan ikan untuk komsumsi dan ussha pengolahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Ton	1	30.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	

			3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi	Pelaku Usaha	10	30.000.000	10	5.000.000.000	10	5.000.000.000	10	5.000.000.000	10	5.000.000.000	10	5.000.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kab. Kep. Mentawai	
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	0	100 persen	7.560.459.586	100 persen	7.388.314.261	100 persen	7.540.761.344	100 persen	7.647.889.936	100 persen	7.725.761.937	100 persen	37.863.187.064	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		

			3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara Desa Tuapejat	DAU
			3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan yang disusun (dokumen)	0	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara Desa Tuapejat	DAU
			3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan ASN	0	100 Persen	7.560.459.586	100 Persen	7.388.314.261	100 Persen	7.540.761.344	100 Persen	7.647.889.936	100 Persen	7.725.761.937	100 Persen	30.293.377.128	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		DAU
			3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji	70 org	86 org	7.482.379.586	86 org	7.310.234.261	86 org	7.462.681.344	86 org	7.569.809.936	86 org	7.647.681.937	86 org	29.902.977.128	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIK	Kec. Sipora Utara Desa Tuapejat	DAU

					dan tunjangannya (orang)														ANAN		
			3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honorarium pengelola kegiatan	2 org	2 org	78.080.000	2 org	78.080.000	2 org	78.080.000	2 org	78.080.000	2 org	78.080.000	2 org	390.400.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara Desa Tuapejat	DAU
			3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum	0	0	47.900.000,00	0	35500000	0	37.000.000,00	0	38.000.000,00	0	39.000.000,00	0	183.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		DAU
			3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrk yang tersedia	5 jenis	5 jenis	500.000	5 jenis	500.000	5 jenis	1.000.000	5 jenis	1.000.000	5 jenis	1.000.000	5 jenis	4.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara Desa Tuapejat	DAU
			3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 tahun	1 tahun	500.000	1 tahun	500.000	1 tahun	500.000	1 tahun	500.000	1 tahun	500.000	1 tahun	2.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara Desa Tuapejat	DAU

			3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	1 tahun	1 tahun	30.000.000	1 tahun	31.500.000	1 tahun	32.000.000	1 tahun	32.500.000	1 tahun	33.000.000	1 tahun	159.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara Desa Tuapejat	DAU
			3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	1 tahun	1 tahun	2.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	3.500.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	4.500.000	1 tahun	17.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara Desa Tuapejat	DAU
			3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis)	1 tahun	1 tahun	14.400.000	1 tahun	0	1 tahun	0	1 tahun	0	1 tahun	0	1 tahun	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara Desa Tuapejat	DAU
			3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Kordinasi SKPD	Jumlah rapat dan koordinasi yang dilakukan	12 kali	12 kali	0	12 kali	0	12 kali	0	12 kali	0	12 kali	0	12 kali	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara Desa Tuapejat	DAU

			3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan dan kelancaran Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	60.000.000	-	65.000.000	-	70.000.000	-	75.000.000	-	10.000.000	-	280.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		DAU
			3.27.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	50.000.000,00	2 unit	55.000.000,00	2 unit	60.000.000,00	2 unit	65.000.000,00	2 unit	0	2 unit	230.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		DAU
			3.27.01.2.07.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang dibeli	5 jenis	5 jenis	10.000.000	5 jenis	10.000.000	5 jenis	10.000.000	5 jenis	10.000.000	5 jenis	10.000.000	5 jenis	50.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara Desa Tuapejat	DAU

			3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	1 tahun	87.500.000	1 tahun	87.500.000	1 tahun	87.500.000	1 tahun	87.500.000	1 tahun	87.500.000	5 tahun	1.130.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		DAU
			3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik dan komunikasi yang dibayarkan	1 tahun	1 tahun	87.500.000	1 tahun	87.500.000	1 tahun	87.500.000	1 tahun	87.500.000	1 tahun	87.500.000	5 tahun	437.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara Desa Tuapejat	DAU
			3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah tenaga pelayanan	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia (orang)	1 tahun	1 tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara Desa Tuapejat	DAU
			3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	5 unit	5 unit	72.000.000	5 unit	77.100.000	5 unit	82.200.000	5 unit	87.300.000	5 unit	22.400.000	5 unit	341.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		DAU

					pemerintah daerah															
			3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (unit)	5 unit	5 unit	20.000.000	5 unit	20.000.000	5 unit	20.000.000	5 unit	20.000.000	5 unit	20.000.000	5 unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara Desa Tuapejat	DAU
			3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	4 unit	4 unit	2.000.000	4 unit	2.100.000	4 unit	2.200.000	4 unit	2.300.000	4 unit	2.400.000,00	20 unit	11.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara Desa Tuapejat	DAU
			3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direha	2 unit	2 unit	50.000.000,00	2 unit	55.000.000,00	2 unit	60.000.000,00	2 unit	65.000.000,00	2 unit	0	2 unit	230.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kec. Sipora Utara Desa Tuapejat	DAU/ DAK

					bilitasi (unit)															
JUMLAH								18.528.689.184		40.336.331.095		42.824.890.101		43.550.018.544		44.222.602.290		136.360.244.673	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		

Adapun Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran pembangunan 1, dalam rangka menuju pendapatanperkapita setara negara maju, sasaran visi tahun 2025-2030	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat					
					Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)		
					Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang		
						PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	

Sasaran pembangunan 2, dalam rangka pengentasan kemiskinandan ketimpangan berkurang, sasaran visi tahun 2025-2030,				Tersedianya bahan pangan lokal		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
		Meningkatnya Investasi, Ketahanan Pangan, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/Hilirisasi		Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Laporan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	

				Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	
				Tersedianya Cadangan Beras Pemerintah		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Pangan			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Tersedianya Jaminan Ketersediaan Pangan Segar yang Aman untuk Dikonsumsi oleh Masyarakat		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	

				Terjaganya Sistem Keamana Pangan dan Mutu Pangan yang Terpadu		Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
				Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian	
					Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
						Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
					Peningkatan Produksi Hortikultura	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
						Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	

					Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Satu Daerah Kabupaten/Kota Lainnya	
						Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
						Pengadaaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten Kota Lain	
						A.1. Pengadaan Ternak Sapi	
						A.2 Pengadaan ternak Babi	
						A.3 Pengadaan Unggas	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Terperliharanya Prasarana Pertanian		Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
				Terbangunnya Prasarana Pertanian		Pembangunan Prasarana Pertanian	

				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
				Terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
				Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	

				Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultiura dan perkebunan		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	
				Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Penurunan Angka Kejadian Penyakit Menular Ternak dan zoonosis dalam waktu 1 tahun	Prosentase Penurunan Angka Kejadian Penyakit Menular Ternak dan zoonosis dalam waktu 1 tahun	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan	

				Penurunan Angka Kejadian Penyakit Menular Ternak dan zoonosis dalam waktu 1 tahun	Prosentase Penurunan Angka Kejadian Penyakit Menular Ternak dan zoonosis dalam waktu 1 tahun	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Peningkatan kapasitas penyuluhan		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	

				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Kordinasi SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah tenaga pelayanan	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.3 Rencana Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat	60%	47,34	274.573.082	47,13%	999.786.272	46,92%	1.020.635.741	46,71%	1.035.287.213	46,50%	1.045.937.404	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Terwujudnya keragaman konsumsi pangan	60	70	274.573.082	71%	999.786.272	72%	1.020.635.741	74%	1.035.287.213	75%	1.045.937.404	
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Laporan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	1 laporan	174.573.082	4 laporan	889.786.272	4 laporan	905.635.741	5 laporan	918.287.213	6 laporan	926.937.404	
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	0 dokumen	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	110.000.000	3 dokumen	115.000.000	3 dokumen	117.000.000	3 dokumen	119.000.000	

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	10	8%	274.573.082	7%	499.893.136	72%	510.317.870	74%	517.643.607	75%	522.968.702	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersediannya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	10	1 dokumen	274.573.082	1 dokumen	499.893.136	1 dokumen	510.317.870	1 dokumen	517.643.607	1 dokumen	522.968.702	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 dokumen	1 dokumen	274.573.082	1 dokumen	499.893.136	1 dokumen	510.317.870	1 dokumen	517.643.607	1 dokumen	522.968.702	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Sumber Daya Ekonomi untuk untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	60	10 Ton	128.810.901	62%	699.786.272	65%	620.635.741	66%	605.287.213	70%	545.937.404	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Swasembada Pangan	20 Ton	10 Ton	128.810.901	20 Ton	699.786.272	20 ton	620.635.741	20 Ton	605.287.213	20 Ton	545.937.404	
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	20 ton	10 ton	128.810.901	20ton	699.786.272	20 ton	620.635.741	20 Ton	605.287.213	20 ton	545.937.404	

	Kabupaten/Kota												
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya kualitas pangan	50	52	100.000.000	55%	300.000.000	60%	400.000.000	62%	430.000.000	65%	500.000.000	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Stunting	0	12	100000000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	430.000.000,00	12 Laporan	500.000.000,00	
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	12	12	100.000.000	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	430.000.000,00	12 Laporan	500.000.000,00	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan peternakan	60	65%	2.745.730.815	70	7.310.234.261	72	8.080.032.947	75	8.196.023.770	80%	8.280.337.785	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	60%	65%	1.100.000.000,00	70%	4.671.909.377,00	72%	5.386.688.631,00	75%	5.464.015.847,00	80%	5.520.225.190,00	

Pendampingan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Terhadap Kegiatan Dinas	12 Laporan	12 laporan	1.100.000.000	12 laporan	1.671.909.377	12 laporan	2.286.688.631	12 laporan	2.364.015.847	12 laporan	2.420.225.190	
Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak		0	0	8.270 batang	1.692.950.000	18.327 batang	1.792.950.000	18.337 Batang	1.792.950.000	20.437 Batang	1.792.950.000	
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	batang	0	0		599.550.000	20.610 batang	599.550.000	20.610 batang	599.550.000	20.610 batang	599.550.000	
	Jumlah Benih Kelapa Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	0	0	0	6.870 batang	199.850.000	6.870 batang	199.850.000	6.870 batang	199.850.000	6.870 batang	199.850.000	
	Jumlah Benih Cengkeh Bersertifikat	0	0	0	6.870 batang	199.850.000	6.870 batang	199.850.000	6.870 batang	199.850.000	6.870 batang	199.850.000	

	Perkebunan Berbentuk Batang												
	Jumlah Benih Pinang Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	0	0	0	6.870 batang	199.850.000	6.870 batang	199.850.000	6.870 batang	199.850.000	6.870 batang	199.850.000	
Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	batang	0	0	110.500 batang	407.500.000	110.500 batang	407.500.000	110.500 batang	407.500.000	110.500 batang	407.500.000	
	Jumlah Benih Pisang Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	0	0	0	110.500 batang	407.500.000	110.500 batang	407.500.000	110.500 batang	407.500.000	110.500 batang	407.500.000	
Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk	stek	0	0	200.000 stek	300.000.000	200.000 stek	300.000.000	200.000 stek	300.000.000	200.000 stek	300.000.000	

	Setek												
	Jumlah Benih Nilam Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	0	0	0	200.000 stek	300.000.000	200.000 stek	300.000.000	200.000 stek	300.000.000	200.000 stek	300.000.000	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Satu Daerah Kabupaten/Kota Lainnya	Terkendalinya Bibit Ternak dan Pakan Ternak		2940	1.645.730.815	2.390 Ekor	2.638.324.884	2.690 Ekor	2.693.344.316	2.219 Ekor	2.732.007.923	2.280 Ekor	2.760.112.595	
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0 ton	1 ton	353.730.815	1 ton	403.570.000	1 ton	404.570.000	1 ton	405.570.000	1 ton	407.570.000	
Pengadaaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten Kota Lain	Tersediannya Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	ekor	2940	1.292.000.000	2.390 Ekor	2.234.754.884	2.690 Ekor	2.288.774.316	2.219 Ekor	2.326.437.923	2.280 Ekor	2.352.542.595	
A.1. Pengadaan Ternak Sapi	Meningkatnya jumlah populasi	2.940 ekor	290 Ekor	630.000.000	290 Ekor	630.000.000	290 Ekor	1.752.000.000	319 Ekor	1.752.000.000	280 Ekor	1.192.000.000	

	ternak sapi / terbelinya bibit ternak sapi 69 ekor												
A.2 Pengadaan ternak Babi	Meningkatnya jumlah populasi ternak Babi / terbelinya bibit ternak babi 50 ekor	45.240 ekor	3.712 Ekor	466.430.000	2.100 Ekor	466.430.000	2.100 Ekor	270.000.000	1.600 Ekor	710.000.000	1.700 Ekor	642.500.000	
A.3 Pengadaan Unggas	Meningkatnya jumlah populasi ternak Unggas / terbelinya bibit ternak unggas	82.880 ekor	-	0	-	200.000.000	300 Ekor	200.000.000	300 Ekor	200.000.000	300 Ekor	360.000.000	
						2.000.000.000		6.000.000.000		6.481.000.000		6.885.000.000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan luas lahan pertanianyang ditetapkan menjadi	4%	5%	1.830.487.210	5%	4.998.931.360	5%	5.103.178.704	5%	5.176.436.065	5%	5.229.589.022	
Pengembangan Prasarana Pertanian	Terperliharanya Prasarana Pertanian			600.000.000		-		-		-		-	

Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	0	1 dokumen	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
Pembangunan Prasarana Pertanian	Terbangunnya Prasrana Pertanian		4 unit	1.230.487.210	8 unit	4.998.931.360	10 unit	5.103.178.704	9 unit	5.176.436.065	7 unit	5.229.589.022	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	5 unit	1.230.487.210	6 unit	2.000.000.000	3 unit	2.604.247.344	3 unit	2.705.249.344	3 unit	2.705.249.344	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	-	-	1 unit	1.000.000.000	2 unit	1.100.000.000	1 unit	1.201.000.000	1 unit	1.254.152.957	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi			-	3 unit	1.198.931.360	3 unit	1.398.931.360	3 unit	1.270.186.721	3 unit	1.270.186.721	

Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	unit		-	1 unit	800.000.000	-	-	-	-		-	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			137.286.541	60%	666.524.182	60%	680.423.828	60%	690.191.476	60%	697.291.602	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultiura dan perkebunan			137.286.541	62%	333.262.091	65%	340.211.914	66%	345.095.738	70%	348.645.801	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	60%	65%	137.286.541	62%	333.262.091	65%	340.211.914	66%	345.095.738	70%	348.645.801	

	Perkebunan yang Dikendalikan												
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	0	0	457.621.803	1%	208.288.807	2%	212.632.446	2%	215.684.836	3%	217.903.626	
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan	Meningkatnya kesehatan Hewan Ternak	0	1 Laporan	457.621.803	1 laporan	208.288.807	1 Laporan	212.632.446	1 Laporan	215.684.836	1 Laporan	217.903.626	
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan	Meningkatnya kesehatan Hewan Ternak		1 Laporan	457.621.803	1 laporan	208.288.807	1 Laporan	212.632.446	1 Laporan	215.684.836	1 Laporan	217.903.626	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	0,10	15	549.146.164	20	1.999.572.544	22	2.041.271.480	25	2.070.574.428	30	2.091.874.808	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan kapasitas penyuluhan		43 unit	274.573.082	45 unit	999.786.272	43 unit	1.020.635.740	43 unit	1.035.287.214	52 unit	1.045.937.404	

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	36 orang	137.286.541	36 orang	499.893.136,00	36 orang	510.317.870,00	36 orang	517.643.607,00	36 orang	522.968.702,00	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	20 orang	137.286.541	20 orang	499.893.136,00	20 orang	510.317.870,00	20 orang	517.643.607,00	20 orang	522.968.702,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	0	100 persen	7.560.459.586	100 persen	7.388.314.261	100 persen	7.540.761.344	100 persen	7.647.889.936	100 persen	7.725.761.937	

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulan yang disusun (dokumen)	0	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan ASN	0	100 Persen	7.560.459.586	100 Persen	7.388.314.261	100 Persen	7.540.761.344	100 Persen	7.647.889.936	100 Persen	7.725.761.937	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (orang)	70 org	86 org	7.482.379.586	86 org	7.310.234.261	86 org	7.462.681.344	86 org	7.569.809.936	86 org	7.647.681.937	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honorarium pengelola kegiatan	2 org	2 org	78.080.000	2 org	78.080.000	2 org	78.080.000	2 org	78.080.000	2 org	78.080.000	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum	0	0	47.900.000,00	0	35500000	0	37.000.000,00	0	38.000.000,00	0	39.000.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrk yang tersedia	5 jenis	5 jenis	500.000	5 jenis	500.000	5 jenis	1.000.000	5 jenis	1.000.000	5 jenis	1.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 tahun	1 tahun	500.000	1 tahun	500.000	1 tahun	500.000	1 tahun	500.000	1 tahun	500.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	1 tahun	1 tahun	30.000.000	1 tahun	31.500.000	1 tahun	32.000.000	1 tahun	32.500.000	1 tahun	33.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan pengganda an yang tersedia	1 tahun	1 tahun	2.500.000	1 tahun	3.000.000	1 tahun	3.500.000	1 tahun	4.000.000	1 tahun	4.500.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan untuk kantor yang tersedia (jenis)	1 tahun	1 tahun	14.400.000	1 tahun	0	1 tahun	0	1 tahun	0	1 tahun	0	
Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Kordinasi SKPD	Jumlah rapat dan koordinasi yang	12 kali	12 kali	0	12 kali	0	12 kali	0	12 kali	0	12 kali	0	

	dilakukan												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan dan kelancaran Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	60.000.000	-	65.000.000	-	70.000.000	-	75.000.000	-	10.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	50.000.000,00	2 unit	55.000.000,00	2 unit	60.000.000,00	2 unit	65.000.000,00	2 unit	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang dibeli	5 jenis	5 jenis	10.000.000	5 jenis	10.000.000	5 jenis	10.000.000	5 jenis	10.000.000	5 jenis	10.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan Penunjang Urusan	1 tahun	1 tahun	87.500.000	1 tahun	87.500.000	1 tahun	87.500.000	1 tahun	87.500.000	1 tahun	87.500.000	

	Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan listrik dan komunikasi yang dibayarkan	1 tahun	1 tahun	87.500.000	1 tahun	87.500.000	1 tahun	87.500.000	1 tahun	87.500.000	1 tahun	87.500.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah tenaga pelayanan	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia (orang)	1 tahun	1 tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	5 unit	5 unit	72.000.000	5 unit	77.100.000	5 unit	82.200.000	5 unit	87.300.000	5 unit	22.400.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	5 unit	5 unit	20.000.000	5 unit	20.000.000	5 unit	20.000.000	5 unit	20.000.000	5 unit	20.000.000	

	dipelihara (unit)												
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	4 unit	4 unit	2.000.000	4 unit	2.100.000	4 unit	2.200.000	4 unit	2.300.000	4 unit	2.400.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (unit)	2 unit	2 unit	50.000.000,00	2 unit	55.000.000,00	2 unit	60.000.000,00	2 unit	65.000.000,00	2 unit	0	

Tabel. 4.4 Daftar Sub Kegitan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masvarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Laporan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Sumber Daya Ekonomi untuk untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan peternakan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			Pendampingan Pengguna Sarana Pendukung Pertanian	
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Satu Daerah Kabupaten/Kota Lainnya	
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Pengadaaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten Kota Lain	
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan luas lahan pertanianyang ditetapkan menjadi	Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	
			Pembangunan Prasarana Pertanian	
			Pembangunan, Rehabilitasi	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
			dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
5	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan	
			Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan	
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	

Tabel. 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	Persen	47,34	47,13	46,92	46,71	46,62	46.5	
	Tingkat Produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Rp.Juta /orang	200,58	201,59	202,59	203,6	198,73	204,6	
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Nilai	0,39	0,79	1,19	1,59	1,99	4,17	
	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	Persen	18,96	19,72	20,51	21,33	22,18	23,98	
	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	Persen	80,11	82,28	85,13	85,75	86,12	87	

Tabel. 4.6 Indikator Kinerja Kunci

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	60	70	71	72	74	75	
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	10	8	7	7	5	4	
3	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	60	61	62	65	66	70	
4	Persentase pangan yang memenuhi syarat mutu	Persen	50	52	55	60	62	65	
5	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	60	65	70	72	75	80	
6	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	60	65	70	72	75	80	
7	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	60	65	70	72	75	80	
8	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Persen	4	5	5	5	5	5	
9	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	60	65	70	72	75	80	
10	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV	Persen	0	0	1	2	2	3	

	atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)								
11	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persen	10	15	20	22	25	30	
12	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persen	10	15	20	22	25	30	
13	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	60	61	62	65	66	70	
14	Persentase Penanganan Dampak Perubahan lklim Terhadap Pertanian	Persen	60	65	70	72	75	80	
15	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	11.896,00	14.000,00	16.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	
16	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	331,10	350,00	400,00	500,00	700,00	1.000,00	
17	Angka Konsumsi Ikan	Nilai	60,00	60,50	61,00	61,50	62,00	62,50	

BAB V
PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029, merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan selama kurun waktu 5 tahun ke depan.

Rencana Strategis ini juga dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan di provinsi Sumatera Barat.

1. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

   Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan melibatkan pemantauan (monitoring), evaluasi kinerja, dan pelaporan secara teratur untuk memastikan tujuan tercapai. Contoh aktivitas pengendalian meliputi penyusunan program dan rencana kerja sesuai Renstra, pelaksanaan koordinasi dengan unit lain, dan penilaian kinerja bawahan. Sementara itu, evaluasi menekankan pada analisis data dan informasi akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan tahunan.

   a. Penyusunan dan Sinkronisasi Program
      Menyusun program dan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dan Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain untuk memastikan sinkronisasi dan keselarasan pelaksanaan tugas.
   b. Pengawasan Kegiatan
      Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan spesifik, seperti pengadaan benih ikan atau pelatihan pembudidaya, sesuai dengan norma dan standar yang berlaku dan Membagikan tugas dan mengarahkan bawahan sesuai dengan kompetensi mereka untuk membagi tugas secara merata.
   c. Pelaporan Kinerja
      Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan Menggunakan laporan kinerja sebagai dasar untuk menyarankan perbaikan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
   d. Pengumpulan dan Analisis Data
      Mengumpulkan data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif terkait potensi dan pelaksanaan program perikanan dan Melakukan analisis data untuk mengidentifikasi masalah, tantangan, serta capaian kinerja dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.
   e. Penilaian dan Rekomendasi Kebijakan
      Menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan serta seluruh program kerja untuk mendorong prestasi dan perbaikan dan Menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi untuk mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas di masa mendatang.
   f. Tindak Lanjut dan Perbaikan Berkelanjutan
      Menggunakan hasil evaluasi untuk menyempurnakan dan menyesuaikan strategi pelaksanaan Renstra dan Memastikan bahwa evaluasi dilaksanakan secara teratur dan terpadu untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pencapaian tujuan organisasi

2. Manajemen Resiko Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (management oversight) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.
b. Penilaian Risiko Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:
    1) Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
    2) Penilaian risiko strategis OPD;
    3) dan Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.
c. Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakterisitik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:
    1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;
    2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
    3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
    4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
    5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.
d. Informasi dan Komunikasi yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern. Struktur organisasi

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

1) Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
2) Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
3) Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

3. Tata Kelola Satu Data Indonesia ditingkat Perangkat Daerah

Tata kelola Satu Data Indonesia dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang akurat, utuh, dan komprehensif yang menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan Renstra, dengan memanfaatkan data dari berbagai instansi dan pemangku kepentingan perikanan. Contohnya, Dinperikanan mengumpulkan data produksi perikanan, data luas wilayah perikanan, dan data aspek ekonomi perikanan untuk mendukung program-program dalam Renstra, seperti peningkatan produksi dan pemberdayaan usaha kecil perikanan, serta melakukan evaluasi berdasarkan data tersebut secara berkala.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan diperlukan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya, kebersamaan dan kerja keras dari semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka *Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah"*

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 37

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025 – 2029 44
3.2 Sasaran Resntra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025 – 2029 44
3.3 Strategi Resntra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025 – 2029 49
3.4 Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025 – 2029 51

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG
4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan 54
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 59

BAB V PENUTUP 62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan 13
Tabel 2.2 Kebutuhan dan Ketersediaan ASN/PNS 14
Tabel 2.3 Rekapitulasi Barang Milik Daerah 17
Tabel 2.4 Rekapitulasi Perangkat Daerah Kabupaten yang Telah Melaksanakan Perjanjian Kerjasama 24
Tabel 2.5 Formulasi Perhitungan 6 (enam) Jenis Dokumen 26
Tabel 2.6 Persentase Kepemilikan KTP-el,KIA,Akta lahir, Tahun 2024 28
Tabel 2.7 Persentase Kepemilikan KIA Tahun 2024 28
Tabel 2.8 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2024 28
Tabel 2.9 Persentase Kepemilikan Akta Kematian Tahun 2024 28
Tabel 2.10 Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Tahun 2024 28
Tabel 2.11 Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Tahun 2024 28
Tabel 2.12 Rekapitulasi Penerbitan Buku Profil Perkembangan Kependudukan dan Buku Data Kependudukan 33
Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 34
Tabel 2.14 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 39
Tabel 2.15 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Rancangan Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029 40
Tabel 2.16 Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 43
Tabel 3.1 Rancangan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 46
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 50
Tabel 3.3 Keselarasan Visi-Misi Pembangunan Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 52
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 52
Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 54
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan 57
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 59
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 60
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1 Hirarki Dokumen Perencanaan	1
Gambar	2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12
Gambar	2.2 Sebaran SDM Dinas Dukcapil kondisi Oktober 2025	13
Gambar	2.3 ASN/PNS berdasarkan Pangkat/Golongan	14
Gambar	2.4 ASN/PNS berdasarkan Pendidikan Terakhir	14
Gambar	2.5 Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Indikator Sasaran Strategis III	29
Gambar	3.7 Target, Realisasi, Capaian Indikator Sasaran Strategis IV	31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

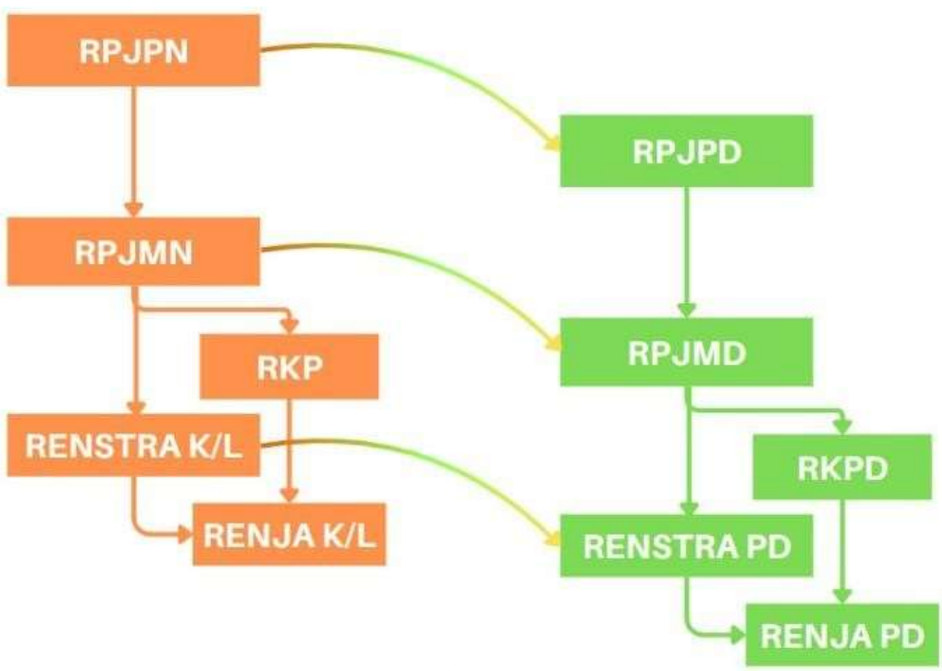
Merujuk pada Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan bentuk yang lebih kongkrit dari dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Di tingkat pemerintah daerah juga diamanahkan untuk menyusun perencanaan baik jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD), dan dokumen rencana kerja tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d. Mengoptimalisasi partisipasi masyarakat, dan
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Secara hirarki dokumen perencanaan, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Hirarki Dokumen Perencanaan



Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui dengan jelas tingkatan dan hubungan dokumen perencanaan antar pemerintah pusat dengan kementerian/lembaga, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar kementerian/lembaga dengan perangkat pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah dengan perangkat pemerintah daerah. Seluruh dokumen perencanaan secara *top-down*, akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pada level di bawahnya. Begitupun juga sebaliknya, dalam hirarki *bottom-up* dokumen perencanaan di level bawah harus menunjang pencapaian target kinerja yang sudah dirumuskan dan ditetapkan pada dokumen perencanaan di atasnya.

Perangkat daerah yang menjadi unit kerja pemerintah daerah juga diwajibkan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah/RPJMD. Berdasarkan pada ayat (1) pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif dimana informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Penyusunan Renstra-PD menjadi kewenangan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana yang diatur pada ayat (2) pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan peraturan pimpinan perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi bagian penyelenggara pemerintahan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga berkewajiban menyusun dokumen perencanan lima tahunan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
2. Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran
4. Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun

2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan pelaksaanan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 459
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (pemutakhiran ke-5);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 no.4
20. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat No.2 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 No.2 , Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 no.4,tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 4)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4) ;
24. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, peraturan/regulasi yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjadi penentu arah dan pedoman bagi unit kerja (dinas) dalam rangka pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah:

a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. Ketetapan sebagaimana dimaksud pada poin 1, mencakup uraian tentang mandat, tugas, fungsi dan kewenangan serta peran, kondisi, tantangan, kebijakan, strategi, program, kegiatan, sub kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran strategis yang harus dicapai serta indikator output, indikator outcome, target capaian, pendanaan, dan indikator kinerja utama;

c. Merumuskan program prioritas pembangunan agar mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terkait urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan sinergis;
d. Menetapkan pedoman untuk penyusunan rencana kerja serta perencanaan penganggaran perangkat daerah;
e. Mewujudkan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antar perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
f. Menetapkan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam 5 (lima) tahun ke depan; dan
g. Meningkatkan akuntabilitas, kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan khususnya urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 yang merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD. Bab ini terdiri atas:

1.1 Latar belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bab ini menggambarkan tentang gambaran umum tentang aspek dan pelayanan, permasalahan yang dihadapi dan isu strategis dalam menjalankan pelayanan dan pelaksanaan tugas urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bab ini terdiri atas:

1.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2025-2026). Bab ini terdiri atas:

3.1 Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025–2029
3.2 Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025–2029
3.3 Strategi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025–2029
3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025–2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan kenerja penyelenggaraan urusan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bab ini terdiri atas:

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Pada Bab Penutup, disajikan upaya pengendalian dan evaluasi implementasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai wewenang sebagai sebagai berikut:

1) Koordinasi antar lembaga pemerintah lembaga non pemerintah di provinsi dan antar kabupaten/kota secara berkala;
2) Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi kependudukan di provinsi;
3) Penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, data pribadi di provinsi dan kabupaten/kota;
4) Fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
5) Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
6) Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
7) Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
8) Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
9) Pembinaan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan, termasuk pembinaan pendokumentasian penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
10) Bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, dan pendayagunaan data kependudukan;
11) Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi data kependudukan serta penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
12) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
13) Pemberian konsultasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
14) Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
15) Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.

Secara garis besar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai peranan penting dalam hal pelaksanaan/pengelolaan urusan administrasi kependudukan termasuk melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah tingkat Kabupaten, serta bertanggungjawab dalam hal penyajian data kependudukan yang diharapkan menjadi salah satu acuan dalam hal perumusan kebijakan pembangunan daerah. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat provinsi bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan koordinasi,

pembinaan, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan merupakan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dalam Permendagri ini telah diatur secara detail alur/tata cara pemanfaatan data kependudukan yang menjadi kewenangan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

Dari fungsi koordinasi/pengawasan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat provinsi memiliki peran penting dalam hal pemberian rekomendasi untuk pengangkatan dan/atau pemberhentian pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Selain dari hal di atas, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 4-6 November 2024 di Mataram, Nusa Tenggara Barat dan ditegaskan ulang pada kegiatan Forum Dukcapil Prima yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 19 November 2024 yang juga dikomandoi oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan tema “Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024”, disampaikan bahwa mulai tahun 2025 Ditjen Dukcapil Kemendagri akan memberikan kewenangan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memfasilitasi penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) bagi penduduk yang berada di luar domisili tetapnya yang membutuhkan layanan penerbitan KTP yang disebabkan hilang dan/atau rusaknya fisik KTP-el tersebut. Masyarakat potensial yang membutuhkan layanan ini berupa:

1. Pegawai pemerintah/swasta yang bertugas dalam rentang waktu tertentu di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, tetapi tidak memindahkan data kependudukan dari tempat tinggal asalnya;
2. Mahasiswa dari luar daerah baik dalam maupun luar provinsi yang sedang menempuh pendidikan;
3. Masyarakat lainnya yang sedang berkunjung, dan lain sebagainya.

pada poin di atas, karena kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka penerima layanannya mahasiswa/masyarakat yang kuliah dan tidak menutup kemungkinan bagi seluruh masyarakat lainnya.

Pengimplementasian kebijakan tersebut masih menunggu arahan/payung hukum lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Daerah telah diterbitkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 23 Tahun 2017 yang telah diganti menjadi Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Terakhir diubah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dari sisi aturan yang lebih tinggi, dasar pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3481/SJ tanggal 14 September 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam hal menjalankan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan Daerah urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
b. pelaksanaan kebijakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan administrasi urusan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Dinas;
c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas;
d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan lingkup Dinas;
e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas;
b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup Dinas;
e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas;
f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup dinas; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup Dinas;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Dinas;
c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas;
d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagian Ketiga Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk; dan

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Identitas Penduduk, mempunyai tugas :
   a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identitas penduduk;
   b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identitas penduduk;
   c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang identitas penduduk; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pindah Datang Penduduk, mempunyai tugas:
   a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pindah datang penduduk;
   b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pindah datang penduduk;
   c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pindah datang penduduk;
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendataan Penduduk, mempunyai tugas:
   a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pendataan penduduk;
   b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendataan penduduk;
   c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pelaporan kebijakan di bidang pendataan penduduk;
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan pencatatan sipil.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; dan
g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.

1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelahiran, mempunyai tugas:
   a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencatatan kelahiran;
   b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pencatatan kelahiran;

c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pencatatan kelahiran;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya

2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perkawinan dan Perceraian, mempunyai tugas :
a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencatatan perkawinan dan perceraian;
b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencatatan perkawinan dan perceraian;
c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pencatatan perkawinan dan perceraian;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya kelompok

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian, mempunyai tugas:
a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pencatatan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

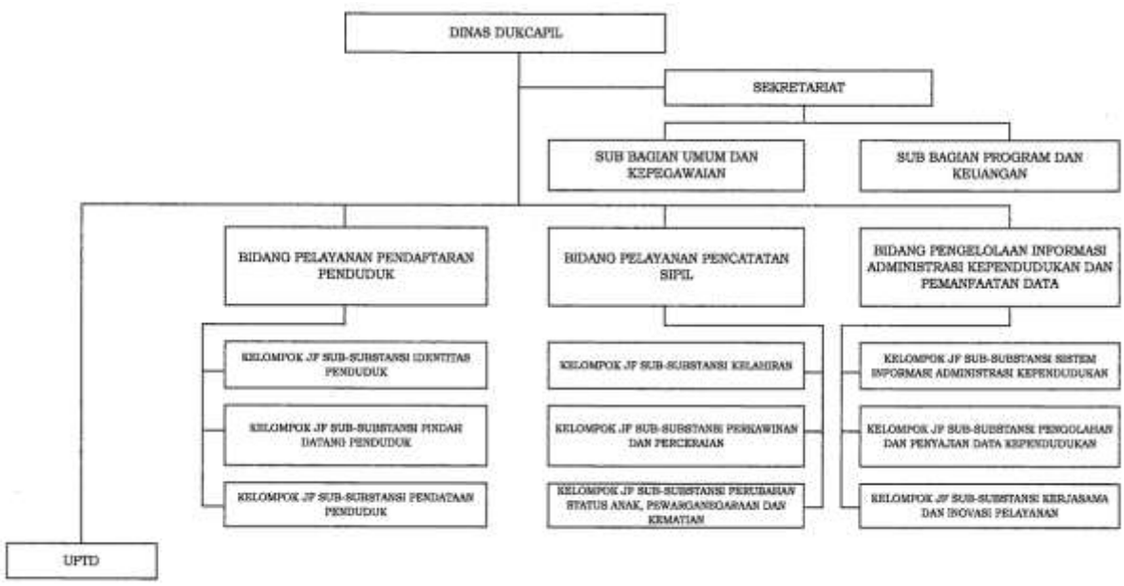
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan; b. C.
b. perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data ke kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas:
   a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
   b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
   c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Penyajian Data, mempunyai tugas :
   a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan penyajian data kependudukan;
   b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan penyajian data kependudukan;
   c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengolahan dan penyajian data kependudukan; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama Inovasi Pelayanan, mempunyai tugas: dan
   a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerjasama dan inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
   b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama dan inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
   c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kerjasama dan inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



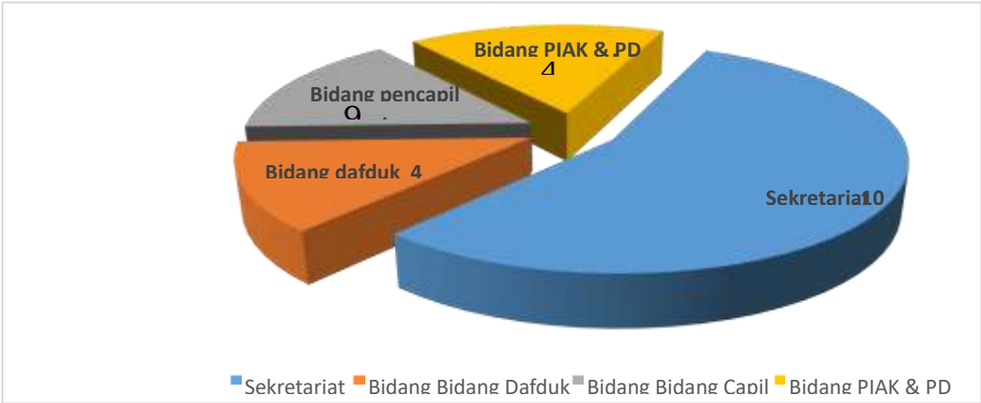
Sumber data: Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1) Sumber daya manusia

Secara keseluruhan, berdasarkan kondisi per 31 Desember 2024, jumlah personil keseluruhan (ASN/Non ASN) berjumlah 54 orang yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang berstatus ASN/PNS dan 27 (dua puluh tujuh) orang berstatus tenaga kontrak di Dinas yaitu dibawah naungan bidang Pendaftaran penduduk (operator komputer 4 orang) , dibawah naungan bidang pencatatan Sipil (operator komputer 9 orang), dibawah naungan bidang PIAK dan PD (4 orang arsip/dokumen kependudukan) dan dibawah naungan sekretariat (4 orang tenaga administrasi, 2 orang tenaga pengamanan, 4 orang tenaga kebersihan) 27 Tenaga kontrak yang tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kepulauan Mentawai.

Gambar 2.2
Sebaran SDM Dinas Dukcapil kondisi Oktober 2025



Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dilihat berdasarkan pangkat/golongan, maka ASN/PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dikelompokkan menjadi:

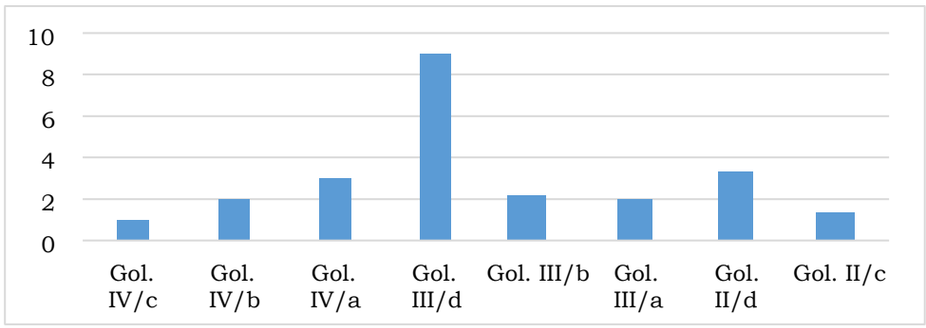
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

		GOLONGAN IV		
1	Pembina Utama	IV	E	-
2	Pembina Utama Madya	IV	D	-
3	Pembina Utama Muda	IV	C	1
4	Pembina Tingkat I	IV	B	-
5	Pembina	IV	A	4
		GOLONGAN III		
1	Penata Tingkat I	III	D	9
2	Penata	III	C	-
3	Penata Muda Tingkat I	III	B	2
4	Penata Muda	III	A	2
		GOLONGAN II		
1	Pengatur Tingkat I	II	D	3
2	Pengatur	II	C	1
3	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	-
4	Pengatur Muda	II	A	-
	GOLONGAN I			
1	Juru Tingkat I	I	D	-
2	Juru	I	C	-
3	Juru Muda Tingkat I	I	B	-
4	Juru Muda	I	A	-
			Jumlah:	22

Sumber data: Subbag. Umum dan Kepegawaian

Secara gambar, dapat disajikan sebagai berikut:

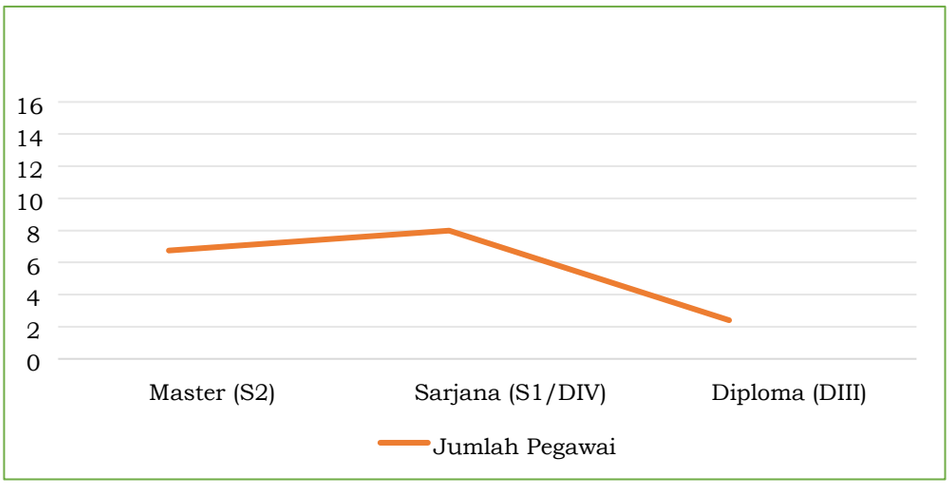
Gambar 2.3
ASN/PNS berdasarkan Pangkat/Golongan



Sumber data: Subbag. Umum dan Kepegawaian

Dari segi pendidikan terakhir, ASN/PNS lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 6 (enam) orang dengan pendidikan master (strata 2/S2), 9 (sembilan) orang dengan pendidikan sarjana (strata 1), dan 2 (dua) orang dengan pendidikan diploma serta SMA 4 (empat) orang

Gambar 2.4
ASN/PNS berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber data: Subbag. Umum dan Kepegawaian

Kebutuhan/kondisi ideal jumlah ASN/PNS berdasarkan hasil analisis jabatan/ analisis beban kerja jumlah ASN/PNS yang seharusnya adalah berjumlah 69 (enam puluh sembilan) orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kebutuhan dan Ketersediaan ASN/PNS

NO	NAMA JABATAN (Permen PANRB 41/2018)	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Sekretariat		26	7	-19
1	Kepala Dinas	1	1	0
2	Sekretaris Dinas	1	1	0
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	1	0
4	Petugas keamanan	2	0	-2
5	Operator boat	1	0	-1
6	Pranata teknologi informasi komputer	1	0	-1
7	Pengamidnistrasian kepegawaian	1	0	-1
8	Pengelola kepegawaian	1	0	-1
9	Pengamidnistrasian umum	1	0	-1
10	Sekretaris	1	0	-1
11	Analis tata usaha	1	0	-1
12	Pramu bakti	1	0	-1

NO	NAMA JABATAN (Permen PANRB 41/2018)	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)
13	Pengelola pemanfaatan barang milik daerah	1	1	0
14	Pengemudi	1	0	-1
15	Pramu kebersihan	4	0	-4
16	Kasubag Perencana dan keuangan	1	1	0
17	Pengadministrasi perencanaan dan program	1	0	-1
18	Penyusunan program anggaran dan pelaporan	1	0	-1
19	Analis perencanaan	1	0	-1
20	Bendahara	1	1	0
21	Pengelola gaji	1	1	0
22	Pengelola keuangan	1	0	-1
Bidang Pendaftaran Penduduk		16	4	-11
23	Kepala bidang pelayanan pendaftaran penduduk	1	1	0
24	Kepala Seksi Identitas Penduduk	1	1	0
25	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	0	-1
26	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	1	0	-1
27	Pengadministrasi Kependudukan	1	0	-1
28	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	1	1	-1
29	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	1	1	0
30	Pengadministrasi Kependudukan	1	0	-1
31	Pengawas Kependudukan	1	0	-1
32	Pengelola Mutasi Penduduk	1	0	-1
33	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	1	0	-1
34	Pengadministrasi Kependudukan	1	0	-1
35	Penyusun Pencatatan Dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	1	0	-1
36	Pengelola Data	1	0	-1
Kepala Bidang Pencatatan Sipil		16	3	-13
37	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	1	1	0
38	Kepala Seksi Kelahiran	1	0	-1
39	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	1	0	-1
40	Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	1	0	-1
41	Pengolah Data	1	0	-1
42	Pengelola Data Administrasi Dan Verifikasi	1	0	-1
43	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	1	1	0
44	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	1	0	-1
45	Pengadministrasi Izin Kawin Dan Izin Cerai	1	0	-1
46	Pengadministrasi Perkawinan dan Pencatatan Pernikahan	1	0	-1
47	Penyusunan Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	1	0	-1
48	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	1	1	0
49	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	1	0	-1
50	Pengadministrasian Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	1	0	-1
51	Penyusunan Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	1	0	-1
52	Pranata Kearsipan	1	0	-1
Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		17	6	-11
53	Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1	1	0
54	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1	0	-1
55	Analis Sistem Informasi dan Jaringan	1	1	0
56	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	1	0	-1
57	Pengadministrasian Kependudukan	1	0	-1
58	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	0
59	Kepala Seksi Pengelolaan Dan Penyajian Data Kependudukan	1	1	0
60	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	1	0	-1
61	Penyusunan Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	1	0	-1
62	Pengolah Data	1	0	-1
63	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	1	1	0
63	Analis Pelayanan	1	0	-1

NO	NAMA JABATAN (Permen PANRB 41/2018)	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)
65	Analis Kerjasama Diklat	1	0	-1
66	Pengadministrasian Program dan Kerjasama	1	0	-1
67	Pranata Komputer Penyedia	1	0	-1
68	Pranata Komputer Mahir	1	0	-1
69	Pranata Komputer Terampil	1	1	0
Jumlah		69	22	-47

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase ketersediaan ASN/PNS atas kebutuhan yang seharusnya hanya sebesar 55,35%. Kekurangan personil ini lebih banyak dari jabatan pelaksana dengan berbagai nomenklatur jabatan. Jika dirinci lebih lanjut per unit kerja (sekretariat/bidang), maka persentase ketersediaan jumlah ASN/PNS sebagai berikut:

a) Sekretariat
   Jumlah kebutuhan di Sekretariat sebanyak 26 (dua puluh enam) orang sedangkan ketersediaan ASN/PNS hanya 7 (tujuh) orang atau 26,92 %. Kekosongan personil terdapat pada jabatan fungsional sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.
b) Bidang Pendaftaran Penduduk
   Jumlah kebutuhan di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk sebanyak 16 (sebelas) orang sedangkan ketersediaan ASN/PNS hanya tersedia 4 (empat) orang atau 25%. Kekurangan personil terdapat pada jabatan pelaksana sebanyak 12 (dua belas) orang.
c) Bidang Pencatatan Sipil
   Jumlah kebutuhan di Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil sebanyak 16 (enam belas) orang dengan ketersediaan ASN/PNS hanya 3 orang atau 18,75%. Kekurangan personil terdapat pada jabatan fungsional sebanyak 13 (tigabelas) orang.
d) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
   Jumlah kebutuhan di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan ketersediaan ASN/PNS hanya 6 (enam) orang atau 13,29%. Kekurangan tersebut berasal dari 11 (sebelas) orang jabatan fungsional.

Dari uraian di atas, secara persentase dapat diketahui bahwa unit kerja dengan kekurangan ASN/PNS terbesar terdapat pada unit kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dengan persentase kekurangan sebesar 53,34% sedangkan unit kerja dengan persentase ketersediaan ASN/PNS terbesar terdapat pada unit kerja Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil dengan tingkat ketersediaan sebesar 63,63%.

Kekurangan personil dari jumlah kebutuhan ideal ini disebabkan karena adanya mutasi dan promosi ASN Dinas Kependudukan dna Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai ke dalam dan/atau keluar instansi Pemerintah Daerah serta belum adanya penambahan ASN dari penerimaan CPNS dan PPPK pada tahun 2024 yang dialokasikan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2) Sarana dan prasarana

Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi terkait pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selain dari segi sumber daya manusia yang tersedia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai. juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang diamanahkan.

Berdasarkan jenis sarana dan prasarana (berupa barang milik daerah dalam bentuk aset tetap) per 31 Desember 2024, barang milik daerah yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Barang Milik Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kepulauan Mentawai

Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Nilai Rp.
Aset Tetap	-	-	519	3.635.446.848
Peralatan Dan Mesin	-	-	519	2.997.594.804
Alat Besar	-	-	2	21.916.400
Alat Angkutan	-	-	2	382.820.000
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	-	-	2	4.125.000
Alat Kantor Dan Rumah Tangga		-/-	1	736.149.349
Alat Studio,Komunikasi Dan Pemancar			1	82.612.500
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	-	-	8	11.990.000
Komputer	-	-	8	1.757.981.555
Kendaraan Bermotor beroda Dua	-	-		
Sepeda Motor	Kendaraan Roda Dua		5	75.040.000
Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	-	-		
Speed Boat	Motor Tempel		3	273.130.000
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	-	-		
Perahu Penyeberangan	Perahu Penyeberangan		1	34.650.000
Alat Ukur Universal		-		
Global Positioning System	Global Positioning System		1	4.125.000
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	-	-		
Alat Kantor	-	-		450.350.750
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	-	-	17	282.237.000
Lemari Besi/Metal	Lemari Besi/Metal	-	1	39.820.000
Lemari Besi/Metal	Lemari Besi/Metal	-	1	74.800.000
Lemari Kayu	Lemari Kayu	-	1	7.599.000
Lemari Kayu	Lemari Kayu	-	1	7.599.000
Lemari Kayu	Lemari Kayu	-	1	7.599.000
Lemari Kayu	Lemari Kayu	-	1	12.472.500
Lemari Kayu	Lemari Kayu	-	1	12.472.500
Lemari Kayu	Lemari Kayu	-	1	12.472.500
Lemari Kayu	Lemari Kayu	-	1	12.472.500
Rak Besi	Rak Besi	-	1	1.800.000
Filing Cabinet Besi	Filing Cabinet Besi	-	1	2.970.000
Filing Cabinet Besi	Filing Cabinet Besi	-	1	2.970.000
Filing Cabinet Besi	Filing Cabinet Besi	-	1	2.970.000
Filing Cabinet Besi	Filing Cabinet Besi	-	1	2.970.000
Filing Cabinet Besi	Filing Cabinet Besi	-	1	2.970.000
Brandkas	Brandkas	-	1	18.480.000
Brandkas	Brandkas	-	1	59.800.000
Alat Kantor Lainnya	-	-	57	168.113.750
Papan Visual/Papan Nama	Papan Visual/Papan Nama	-	1	1.932.955
Papan Visual/Papan Nama	Papan Visual/Papan Nama	-	12	4.900.000
Papan Visual/Papan Nama	Papan Visual/Papan Nama	-	12	4.900.000
Alat Penghancur Kertas	Alat Penghancur Kertas	-	1	3.230.795
Papan Pengumuman	Papan Pengumuman	-	1	9.600.000
Papan Pengumuman	Papan Pengumuman	-	1	9.955.000
Papan Pengumuman	Papan Pengumuman	-	1	9.955.000
Papan Pengumuman	Papan Pengumuman	-	1	9.955.000
Papan Pengumuman	Papan Pengumuman	-	1	9.955.000
Papan Pengumuman	Papan Pengumuman	-	1	9.955.000
Papan Pengumuman	Papan Pengumuman	-	1	9.955.000
Papan Pengumuman	Papan Pengumuman	-	1	9.955.000
Papan Pengumuman	Papan Pengumuman	-/-	1	9.955.000

Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Nilai Rp.
Alat Kantor Lainnya	Alat Kantor Lainnya	-/-	11	49.280.000
Alat Kantor Lainnya	Alat Kantor Lainnya	-	11	14.630.000
Alat Rumah Tangga	-	-		189.436.600
Meubelair	-	-	19	48.749.500
Meja Kerja Kayu	Meja Kerja Kayu	-	7	2.500.000
Meja ½ Biro	Meja ½ Biro	-	1	3.217.500
Meja ½ Biro	Meja ½ Biro	-	1	3.217.500
Meja ½ Biro	Meja ½ Biro	-	1	3.217.500
Meja ½ Biro	Meja ½ Biro	-	1	3.217.500
Meja ½ Biro	Meja ½ Biro	-	1	3.217.500
Meja ½ Biro	Meja ½ Biro	-	1	3.217.500
Meja ½ Biro	Meja ½ Biro	-	1	3.217.500
Meja ½ Biro	Meja ½ Biro	-	1	3.217.500
Bangku Tunggu	Bangku Tunggu	-	1	2.310.000
Bangku Tunggu	Bangku Tunggu	-	1	2.310.000
Sofa	Sofa	-	1	7.944.750
Sofa	Sofa	-	1	7.944.750
Alat Pembersih	-	-	1	2.496.000
Mesin Pemotong Rumput	Mesin Potong Rumput	-	1	2.496.000
Alat Pendingin	-	-	27	31.198.000
A.C. Split	Ac	-	1	5.478.000
A.C. Split	Ac	-	1	5.845.000
A.C. Split	Ac	-	1	4.950.000
A.C. Split	Ac	-	7	4.975.000
A.C. Split	Ac	-	7	4.975.000
A.C. Split	Ac	-	10	4.975.000
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	29	106.993.100
Televisi	Televisi	-	1	7.900.000
Televisi	Televisi	-	1	1.850.000
Televisi	Televisi	-	11	6.320.500
Sound System	Sound System	-	12	64.240.000
Camera Video	Camera Video	-/-	1	3.175.600
Camera Film	Camera Film	-	1	6.820.000
Camera Film	Camera Film	–	1	6.820.000
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lainnya	-	1	9.867.000
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-		96.361.999
Meja Kerja Pejabat	-	-		73.885.000
Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	-	7	1.800.000
Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	-	7	1.800.000
Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	-	7	1.800.000
Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	-	7	1.800.000
Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	-	7	1.800.000
Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	-	7	1.800.000
Meja Kerja Pejabat Eselon V	Meja Kerja Pejabat Eselon V	-	1	4.598.000
Meja Kerja Pejabat Eselon V	Meja Kerja Pejabat Eselon V	-	1	4.598.000
Meja Kerja Pejabat Eselon V	Meja Kerja Pejabat Eselon V	-	1	4.598.000
Meja Kerja Pejabat Eselon V	Meja Kerja Pejabat Eselon V	-	1	4.598.000
Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	-	6	29.843.000
Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	-	6	2.970.000
Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	-	6	2.970.000
Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	-	6	2.970.000
Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	-	6	2.970.000
Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	-	6	2.970.000
Kursi Kerja Pejabat	-	-	21	22.476.999
Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iii	-	7	3.999.999
Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	-/-	1	2.211.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	-	1	2.211.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	-	1	2.211.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	-	1	2.211.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	-	1	2.211.000

Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Nilai Rp.
Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	-/-	1	2.211.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	-/-	1	2.211.000
Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	Kursi Kerja Pejabat Eselon Iv	-/-	7	3.000.000
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	-	-		
Alat Studio	-	-		82.612.500
Peralatan Studio Dan Video Film	-	-	73	63.052.500
Layar Film/Projektor	Layar Film/Projektor	-	1	5.613.500
Camera Digital	Camera Digital	-	12	9.064.000
Camera Digital	Camera Digital	-	12	9.064.000
Camera Digital	Camera Digital		12	9.064.000
Camera Digital	Camera Digital		12	9.064.000
Camera Digital	Camera Digital		12	9.064.000
Camera Digital	Camera Digital	-	12	9.064.000
Alat Studio Lainnya	-	-	21	19.560.000
Alat Studio Lainnya	Alat Studio Lainnya	-	7	6.520.000
Alat Studio Lainnya	Alat Studio Lainnya	-	7	6.520.000
Alat Studio Lainnya	Alat Studio Lainnya	-	7	6.520.000
Komputer	-	-		638.688.000
Komputer Unit	-	-		638.688.000
Personal Komputer	-	-	200	618.688.000
P.C Unit	Komputer Pc	-	1	9.460.000
P.C Unit	Komputer Pc	-	1	9.460.000
P.C Unit	Komputer Pc	-	1	9.295.000
P.C Unit	Personal Computer	-	1	9.295.000
P.C Unit	P.C Unit	-	1	9.295.000
P.C Unit	P.C Unit	-	1	9.295.000
P.C Unit	Personal Komputer	-	1	11.825.000
P.C Unit	Personal Komputer	-	1	11.825.000
P.C Unit	P.C Unit		1	11.825.000
P.C Unit	Personal Komputer	-	6	9.794.000
P.C Unit	Personal Komputer	-	6	9.794.000
P.C Unit	Personal Komputer	-	6	9.794.000
Lap Top	Laptop	-	1	14.960.000
Lap Top	Laptop	-	1	14.960.000
Lap Top	Lap Top	-	1	9.454.500
Lap Top	Lap Top	-	1	9.454.500
Lap Top	Laptop	-	1	9.454.500
Lap Top	Laptop	-	1	9.454.500
Lap Top	Lap Top	-	1	9.454.500
Lap Top	Lap Top	-	1	9.454.500
Lap Top	Lap Top	-	1	9.454.500
Lap Top	Lap Top	-	1	9.454.500
Lap Top	Lap Top	-	1	9.454.500
Lap Top	Lap Top		1	9.454.500
Lap Top	Lap Top		1	24.200.000
Lap Top	Lap Top		5	16.335.000
Lap Top	Lap Top		5	16.335.000
Lap Top	Lap Top		5	16.335.000
Lap Top	Lap Top		5	16.335.000
Lap Top	Lap Top		5	16.335.000
Lap Top	Lap Top		5	16.335.000
Lap Top	Lap Top		5	8.125.000
Lap Top	Lap Top		11	14.650.000
Lap Top	Lap Top		11	14.650.000
Lap Top	Lap Top		11	14.650.000
Lap Top	Lap Top		11	14.650.000
Lap Top	Lap Top		7	11.000.000
Lap Top	Lap Top		7	11.000.000
Lap Top	Lap Top		12	15.167.000
Note Book	Note Book		1	14.465.000
Note Book	Note Book		6	24.699.000

Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Nilai Rp.
Note Book	Note Book		8	18.000.000
Note Book	Note Book		8	18.000.000
Note Book	Note Book		8	18.000.000
Note Book	Note Book		8	18.000.000
Note Book	Note Book		8	18.000.000
Note Book	Note Book		8	18.000.000
Komputer Unit Lainnya	-	-	108	20.000.000
Komputer Unit Lainnya	Komputer Unit Lainnya	-	12	8.000.000
Komputer Unit Lainnya	Komputer Unit Lainnya	-	1 2	1.500.000
Komputer Unit Lainnya	Komputer Unit Lainnya	-	12	1.500.000
Komputer Unit Lainnya	Komputer Unit Lainnya	-	12	1.500.000
Komputer Unit Lainnya	Komputer Unit Lainnya	-	12	1.500.000
Komputer Unit Lainnya	Komputer Unit Lainnya	-	12	1.500.000
Komputer Unit Lainnya	Komputer Unit Lainnya		12	1.500.000
Komputer Unit Lainnya	Komputer Unit Lainnya		12	1.500.000
Komputer Unit Lainnya	Komputer Unit Lainnya	-	12	1.500.000
Peralatan Komputer	-	-		1.119.293.555
Peralatan Mini Komputer			24	6.458.100
Card Reader	Peralatan Mini Komputer	-	12	3.229.050
Card Reader	Peralatan Mini Komput	-	12	3.229.050
Peralatan Personal Komputer	-	-		483.450.955
Printer	Peralatan Personal Komputer	-	1	9.718.500
Printer	Peralatan Personal Komputer	-	1	1.932.955
Printer	Peralatan Personal Komputer	-	1	2.345.000
Printer	Peralatan Personal Komputer	-	1	59.950.000
Printer	Peralatan Personal Komputer	-	1	59.950.000
Printer	Peralatan Personal Komputer	-	1	3.888.500
Printer	Peralatan Personal Komputer	-	1	2.850.000
Printer	Peralatan Personal Komputer	-	12	8.550.000
Printer	Peralatan Personal Komputer	-	3	52.470.000
Printer	Peralatan Personal Komputer	-	3	52.470.000
Printer	Peralatan Personal Komputer		3	3.600.000
Printer	Peralatan Personal Komputer		3	3.600.000
Printer	Peralatan Personal Komputer		12	3.164.500
Printer	Peralatan Personal Komputer		12	3.164.500
Printer	Peralatan Personal Komputer		12	3.406.000
Printer	Peralatan Personal Komputer		12	3.406.000
Printer	Peralatan Personal Komputer		11	6.200.000
Printer	Peralatan Personal Komputer		11	4.150.000
Printer	Peralatan Personal Komputer		11	4.150.000
Printer	Peralatan Personal Komputer		8	57.525.000
Printer	Peralatan Personal Komputer		8	7.601.667
Printer	Peralatan Personal Komputer		8	7.601.667
Printer	Peralatan Personal Komputer		8	7.601.667
Printer	Peralatan Personal Komputer		8	7.601.667
Printer	Peralatan Personal Komputer		8	7.601.667
Printer	Peralatan Personal Komputer		8	7.601.665
Scanner	Peralatan Personal Komputer		7	30.450.000
Scanner	Peralatan Personal Komputer		7	30.450.000
Scanner	Peralatan Personal Komputer	-	7	30.450.000
Peralatan Jaringan	-	-	32	466.864.500
Server	Server + Os + Setting/Server Mainframe	Hpe Dl380/Gen 9 2p	1	179.899.500
Server	Server	Hpe Dl 380 Gen 9/Pkm 000556211	11	177.540.000
Router	Vpn Router/Server Mainframe	Mikrotik/Router Indoor	12	4.290.000
Modem	Modem	/	3	2.950.000
Modem	Modem	-	3	2.950.000
Peralatan Jaringan Lainnya	Peralatan Jaringan Lainnya	-	1	97.000.000
Peralatan Jaringan Lainnya	Peralatan Jaringan Lainnya		1	2.235.000

Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Nilai Rp.
Gedung Dan Bangunan				626.147.544
Bangunan Gedung Tempat Kerja			1	88.100.000
Bangunan Gedung Tempat Olahraga			1	88.100.000
Bangunan Gedung Tempat Tinggal				538.047.544
Rumah Negara Golongan I		Tipe B Permanen	1	538.047.544
Jalan Jaringan Dan Irigasi				9.800.000
Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain -Lain	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain -Lain		1	9.800.000
Aset Tetap Lainnya				1.904.500
Bahan Perpustakaan Tercetak				1.904.500
Buku Umum				1.904.500
Ilmu Pengetahuan Umum	Ilmu Pengetahuan Umum		12	65.000
Ilmu Pengetahuan Umum	Ilmu Pengetahuan Umum		8	69.000
Ilmu Pengetahuan Umum	Ilmu Pengetahuan Umum		8	70.000
Ilmu Pengetahuan Umum	Ilmu Pengetahuan Umum		8	350.000
Ilmu Pengetahuan Umum	Ilmu Pengetahuan Umum		8	100.000
Ilmu Pengetahuan Umum	Ilmu Pengetahuan Umum		8	100.000
Ilmu Pengetahuan Umum	Ilmu Pengetahuan Umum		8	80.000
Ilmu Pengetahuan Umum	Ilmu Pengetahuan Umum		8	57.000
Ilmu Pengetahuan Umum	Ilmu Pengetahuan Umum		8	75.000
Ilmu Pengetahuan Umum	Ilmu Pengetahuan Umum		8	85.000
Ilmu Pengetahuan Umum	Ilmu Pengetahuan Umum		8	53.000
Buku Umum Lain-Lain	Buku Umum Lain-Lain		7	100.063
Buku Umum Lain-Lain	Buku Umum Lain-Lain		7	100.063
Buku Umum Lain-Lain	Buku Umum Lain-Lain		7	100.063
Buku Umum Lain-Lain	Buku Umum Lain-Lain		7	100.063
Buku Umum Lain-Lain	Buku Umum Lain-Lain		7	100.062
Buku Umum Lain-Lain	Buku Umum Lain-Lain Buku Umum Lain-Lain		7	100.062
Buku Umum Lain-Lain	Buku Umum Lain-Lain		7	100.062
Buku Umum Lain-Lain	Buku Umum Lain-Lain		7	100.062

Sumber data: Aplikasi bmd

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai. menyusunan Renstra Perangkat Daerah periode tahun 2020-2024 yang memuat renstra organisasi perangkat daerah mulai tahun 2023-2026. Dengan demikian maka gambaran kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai.hanya pada rentang waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Merujuk pada Indikator Tujuan dan Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama perangkat daerah dan Indikator Kinerja Kunci yang ditetapkan pada Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai.Tahun 2020-2024, dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Mentawai.Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Rasio penduduk berktp persatuan penduduk	-	-	100 %	99%	99,10%	99 %	100 %	100 %	100,19%	97,11 %	99,76%	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-
2	Persentase penduduk dengan dokumen pencatatan sipil lengkap	-	-	96,16 %	90 %	90,10 %	97 %	90 %	96,16 %	93,35 %	90,40 %	95,74 %	93,19 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-
3	Persentase data kependudukan yang valid dan update	-	-	90%	80%	82%	85%	100%	100%	95%	80%	100%)	100%))	-	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	-	-	Sangat Baik (90)	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-
5	Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam satu tahun	-	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50%	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-
6	Pemanfaatan data kependudukan	-	100 %	-	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	48 %	50%	50,1 %	50,2%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-

Sumber data: Lakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kep Mentawai

Sasaran Strategis I Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan yang Terintegrasi diukur berdasarkan *(Jumlah OPD yang telah memiliki Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data / jumlah keseluruhan OPD*) x *100%*.

Rumusan Sasaran Strategis I berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data

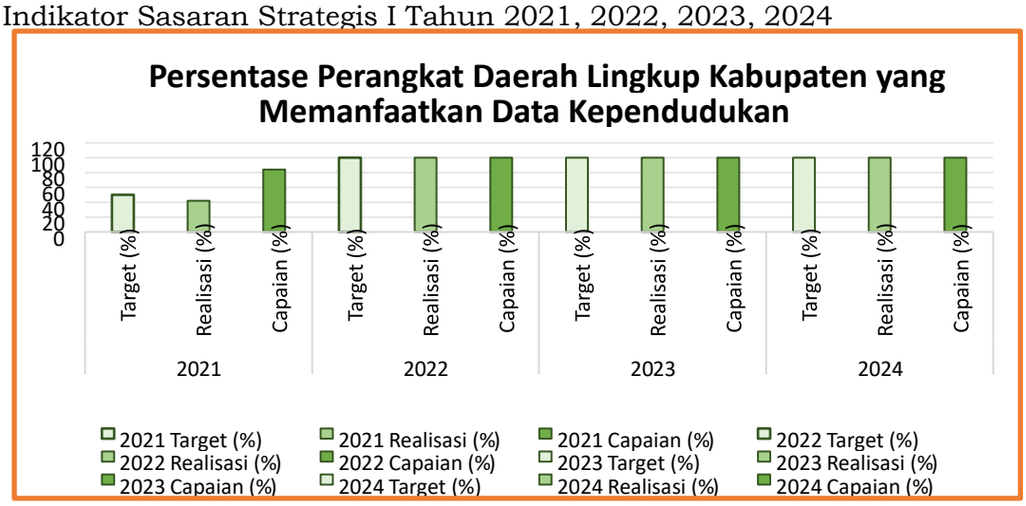
Kependudukan. Dalam Pasal 4 Permendagri tersebut diatur kriteria lembaga penyelenggara dan lembaga pengguna data kependudukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Lembaga Penyelenggara
   a) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
   b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, dan/atau;
   c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
   2) Lembaga Pengguna
   a) Lembaga Negara;
   b) Kementerian/Lembaga Negara Non Kementerian;
   c) Badan Hukum Indonesia, dan/atau;
   d) Organisasi Perangkat Daerah

Dari pointer di atas, jelas bahwa kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjuk sebagai lembaga penyelenggara baik di tingkat kabupaten/kota. Dengan kewenangan tersebut dan dalam rangka peningkatan pemanfaatan data kependudukan sebagai salah satu acuan pengambilan kebijakan perumusan program/kegiatan pembangunan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya untuk mensosialisasikan manfaat penggunaan data kependudukan ke perangkat daerah. Hal ini dipertegas dengan merumuskan maksud tersebut dengan merumuskannya menjadi salah satu sasaran strategis yang dituangkan ke dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029.

Sampai dengan tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menargetkan indikator pada Sasaran Strategis I untuk seluruh perangkat daerah, dengan kata lain target indikator Sasaran Strategis I ini sebesar 100% atau 50 (lima puluh) perangkat daerah. Target ini mengacu dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029.

Grafik 2.4
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian
Indikator Sasaran Strategis I Tahun 2021, 2022, 2023, 2024



Sumber data: lakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Target yang ditetapkan pada tahun pertama untuk Sasaran Strategis I hanya untuk 50% perangkat daerah lingkup Pemerintah kabupaten. Sampai dengan akhir tahun 2021 baru dapat direalisasikan sebesar 42%, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2021 hanya 84%. Sejak tahun 2022 sampai tahun 2024, dimana target yang ditetapkan menjadi 100% untuk seluruh perangkat daerah sudah dapat direalisasikan sama dengan target dan menghasilkan capaian sebesar 100% secara konsisten.

Untuk menjaga konsistensi dalam hal merealisasikan target kinerja Sasaran Strategis I ini, upaya-upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Secara konsisten dan berkesinambungan melakukan sosialisasi dan edukasi ke setiap perangkat daerah akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan;
2) Melakukan rapat koordinasi perangkat daerah kabupaten terkait pemanfaatan data kependudukan secara berkala;
3) Melakukan koordinasi yang intensif dengan Capil Provinsi dan Kemendagri dalam hal percepatan proses sertifikasi ISO 27001 serta pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
4) Melengkapi sarana dan prasarana untuk mendapatkan sertifikasi ISO 27001 sebagai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Berikut rekapitulasi data kinerja Sasaran Strategis I sampai dengan Tahun 2024:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Perangkat Daerah Kabupaten yang Telah Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Sampai Tahun 2024

No.	Instansi/OPD	Kepala Instansi/OPD	Nomor Register (Disdukcapil)	Nomor Register (Instansi/OPD)
1	Dinas Kesehatan kab. Kepulauan mentawai	Lahmudin,skm,sip	470/225.1/DUKCAPIL	-
2	DPMPTSP kab. Kepulauan mentawai		000.4.7.2/05/DUKCAPIL	000.4.7.2/05/DPMPTSP
3	DINAS PARIWISATA kab. Kepulauan mentawai	Joni Anwar	000.4.7.2/07/DUKCAPIL	000.4.7.2/07/DISPARPORA
4	Dinas Perikanankab kepulauan mentawai		000.4.7.2/04/DUKCAPIL	-000.4.7.2/04/DPP
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan kab.kepulauan mentawai	Elisa Siriparang	000.4.7.2/02/DUKCAPIL	000.4.7.2/02/DISKOPRINDAG
6	Dinas PERTANIAN kab.kepulauan mentawai	Hati sama hura	000.4.7.2/155/DUKCAPIL	000.4.7.2/55/DPP
7	SATPOL PP DAN DAMKAR kab.kepulauan mentawai	Pujho rahajo	000.4.7.2/156/DUKCAPIL	000.4.7.2/156/SATPOLPP
8	DISDIKBUD Kab kepulauan mentawai	DRS.A.ORESTE SAKERU	000.4.7.2/157/DUKCAPIL	000.4.7.2/814/DISDIKBUD
9	KESBANGPOL Kab Kepulauan Mentawai	Rikson,SH.M.SI	470/225.3/DUKCAPIL	
10	DPMDP2KB Kab Kepulauan Mentawai	Ridwan Siritubui	470/225.4/DUKCAPIL	

No.	Instansi/OPD	Kepala Instansi/OPD	Nomor Register (Disdukcapil)	Nomor Register (Instansi/OPD)
11	DINSOSP3A Kab Kepulauan Mentawai	Miko Sorot Ogok	000.4.7.2/03/DUKCAPIL	
12	INSPEKTORAT Kab Kepulauan Mentawai	Miko Siregar		170.13/57/SETDA
13	DISHUB Kab Kepulauan Mentawai	Edi Sukarni		470/233/SETDA
14	RSUD Kab Kepulauan Mentawai			470/231/SETDA
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Kepulauan Mentawai	Sahad Pardamaian		470/317.2/SETDA
16	Dinas KOMINFO Kab Kepulauan Mentawai	Heri Robertus		470/236/SETDA
17	Desa Sipora Jaya Kab Kepulauan Mentawai	M. Lutfi		470.13/58/SETDA
18	BKPSDM kab.kepulauan mentawai	Oreste Sakerebau	470/225.2/DUKCAPIL	

Sumber data: Bidang PIAK dan PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran Strategis II Meningkatnya Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan yang Lengkap diukur berdasarkan (% penduduk yang memiliki KTP-el + % penduduk yang memiliki KIA + % penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0-17 tahun + % penerbitan akta perkawinan yang dilaporkan + % penerbitan akta perceraian yang dilaporkan + % penerbitan akta kematian yang dilaporkan) / 6.

Rumusan Sasaran Strategis II didasarkan pada UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Kartu Identitas Anak, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dijelaskan bahwa dokumen kependudukan terdiri dari:

1) Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el);
2) Kartu Identitas Anak (KIA);
3) Akta Kelahiran;
4) Akta Kematian;
5) Akta Perkawinan; dan 6) Akta Perceraian.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai “perpanjangan tangan” pemerintah pusat di daerah dalam pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sekaligus melakukan fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan fungsi-fungsi lainnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat kabupaten/kota maka ke-6 jenis dokumen pokok kependudukan ini dirumuskan menjadi salah satu sasaran strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Tahun 2020 - 2024. Dasar pengukuran target dan realisasi dari indikator kinerja Sasaran Strategis II ini merupakan realisasi dari 5 (lima) tahun

Adapun formulasi penghitungan disetiap komponen Sasaran Strategis II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Formulasi Perhitungan 6 (enam) Jenis Dokumen Kependudukan Sebagai Komponen Sasaran Strategis II

NO	INDIKATOR	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN
1	Persentase Kepemilikan KTP-el	Jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun yang memiliki KTP-el) / (Jumlah penduduk usia lebih dari 17 tahun/yang telah menikah) x 100%
2	Persentase Kepemilikan KIA	Jumlah penduduk usia 0 - 17 tahun yang telah memiliki KIA) / (Jumlah penduduk yang usia 0 - 17 tahun) x 100%
3	Persentase Kelahiran Anak Usia 0-17 Tahun	Jumlah penduduk usia 0 - 17 tahun yang memiliki akta kelahiran) / (Jumlah penduduk usia 0 - 17 tahun) x 100%
4	Persentase Kepemilikan Akta Kematian dari setiap peristiwa kematian yang dilaporkan	jumlah akta kematian yang diterbitkan) / (Jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan) x 100%
5	Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	(Jumlah buku nikah/akta perkawinan yang diterbitkan / (Jumlah peristiwa perkawinan yang dilaporkan) x 100%
6	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian pada setiap individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan	(Jumlah akta perceraian yang diterbitkan) / (Jumlah peristiwa perceraian yang dilaporkan) x 100%

Grafik 2.5
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis II
Tahun 2021, 2022, 2023,2024



Sumber data: Lakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Dari grafik di atas, realisasi yang diperoleh setiap tahunnya telah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian minimal sudah 100%. Disisi lain, jika dilihat secara berkesinambungan sejak tahun 2021, terdapat tren negatif persentase capaian kinerja pada Sasaran Strategis II ini. Capaian tertinggi terdapat pada tahun 2021 sebesar 102,55% dari target 86,43% dengan realisasi 88,64% dan capaian terendah diperoleh pada tahun 2024 sebesar 100,89% dari target 92,37% dengan realisasi 93,19%. Tren negatif yang diperlihatkan dari penurunan persentase capaian bukan serta merta dapat diartikan bahwa kinerja pada Sasaran Strategis II ini berkinerja buruk. Hal ini karena kenaikan target setiap tahunnya yang semakin mendekati 100% sebagai batas maksimal target kinerja, dan dengan realisasi yang berbanding lurus dengan target, sehingga capaian sebagai

hasil dari perbandingan realisasi atas target secara bertahap juga akan mendekati angka capaian 100% dari capaian tahun-tahun sebelumnya yang sudah lebih dari 100%. Dengan kata lain semakin lama target akan mendekati 100%, jika target sudah 100% dengan realisasi yang diperoleh juga 100% sebagai nilai maksimal kinerja maka capaian sudah akan terkunci dibesaran 100%.

Capaian kinerja yang diperoleh dengan hasil baik ini, tentu tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2024:

1) Secara konsisten melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera barat terkait dengan ketersediaan dan kebutuhan blangko KTP-el .
2) Penambahan/*refocusing* anggaran untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan blangko KTP-el pada kondisi tertentu, seperti penerbitan KTP-el bagi pemilih pemula pada pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala pemerintahan;
3) Mengupayakan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan untuk Dinas Dukcapil;
4) Mengajukan usulan bimtek dan studi lapangan terkait pencatatan sipil baik ke kecamatan dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumbar;
5) Melakukan koordinasi dan konsultasi lintas sektoral dalam upaya peningkatan dan percepatan serta penyamaan persepsi akan pentingnya dokumen kependudukan;
6) Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala ke ke kecamatan dalam rangka membina dan mengawasi pencapaian target kinerja dinas secara khusus dan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
7) Penerbitan dokumen terkait perekaman KTP-el dan Penerbitan KIA di sekolah-sekolah;
8) Melaksanakan rapat koordinasi dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dalam hal pemanfaatan fasilitasi layanan administrasi pencatatan sipil terkait penerbitan akta kelahiran dan akta kematian pada instansi pemberi layanan publik, diantaranya dengan Pustu,Puskesmas dan RSUD di Kepulauan Mentawai;
9) Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk percepatan perekaman data KTP-el bagi siswa SLTA yang berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupatenmentawai;
10) Melakukan fasilitasi perbaikan alat rekam cetak KTP-el dan KIA dengan bekerja sama dengan rekanan/penyedia pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang membutuhkan perawatan dan penggantian *sparepart* alat rekam cetaknya;
11) Berkoordinasi secara intensif lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak di beberapa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mengalami kekurangan logistik pelayanan (ribbon, film, blangko KIA dan blangko KTP-el) dengan cara melakukan “subsidi silang sementara” antar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12) Meminjamkan alat rekam cetak dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten kepulauan mentawai ke kantor kecamatan yang membutuhkan; dan

13) Secara konsisten mengambil blangko KTP-el ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi sesuai kebutuhan

Berikut data kinerja per jenis dokumen kependudukan yang menjadi unsur Sasaran Strategis II di akhir Tahun 2024:

1) KTP-el

Tabel 2.6
Persentase Kepemilikan KTP-el,KIA,Akta lahir, Tahun 2024

NO	Uraian	Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP-el	% Realisasi
1	Kepemilikan KTP-el	67.979	66.073	97,20

Sumber data: Data DKB Semester II Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri Tahun 2024

2) KIA

Tabel 2.7
Persentase Kepemilikan KIA Tahun 2024

NO	Uraian	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun	Jumlah Anak yang Memiliki KIA 0-17 Tahun	% Realisasi
1	Kepemilikan KIA	1.25.29.857	1.26.14.645	27.49,05
Jumlah		125.298.57	126.146.45	61,94

Sumber data: Data DKB Semester II Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri Tahun 2024

3) Akta Kelahiran

Tabel 2.8
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2024

NO	Uraian	Jumlah Usia 0-17 Tahun	Jumlah Anak yang Memiliki Akte Kelahiran Usia 0-17 Tahun	% Realisasi
1	Kepemilikan Akta Lahir	32.180	29.356	91,22
Jumlah		32.180	29.356	91,22

Sumber data: Data DKB Semester II - Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri Tahun 2024

4) Akta Kematian

Tabel 2.9
Persentase Kepemilikan Akta Kematian Tahun 2024

NO	Uraian	Jumlah Peristiwa Kematian yang Dilaporkan	Jumlah Kepemilikan Akte Kematian dari Peristiwa Kematian yang Dilaporkan	% Realisasi
1	Kepemilikan Akta Kematian	377	377	100
Jumlah		377	377	100

Sumber data: Data DKB Semester II - Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri Tahun 2024

5) Akta Perkawinan

Tabel 2.10
Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Tahun 2024

NO	Uraian	Jumlah Pasangan yang Perkawinannya Dilaporkan	Jumlah Kepemilikan Buku Nikah/Akte Perkawinan dari Peristiwa Perkawinan yang Dilaporkan	% Realisasi
1.	Kepemilikan Akta Kawin	26.891	26.891	100
Jumlah (Prov. Sumatera Barat)		26.891	26.891	100

Sumber data: Data DKB Semester II - Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri Tahun 2024

6) Akta Perceraian

Tabel 2.11
Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Tahun 2024

NO	Uraian	Jumlah Peristiwa Perceraian yang Dilaporkan	Jumlah Kepemilikan Akte Perceraian dari Peristiwa Perceraian yang Dilaporkan	% Realisasi
9	Kepemilikan Akta cerai	153	153	100
Jumlah		153	153	100

Sumber data: Data DKB Semester II - Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri Tahun 2024

Sasaran Strategis III Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada tahun n.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktitivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Lebih lanjut, implementasi pelaksanaan SAKIP juga diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan

Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu perangkat daerah sudah barang tentu turut menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai dasar penentuan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai akuntabilitas kinerja tersebut dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat atas hasil evaluasi dokumen LKjIP tahun sebelumnya.

Gambar 2.5
Perbandingan Target, Realisasi, Capaian Indikator Sasaran Strategis III
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024



Sumber data: lakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa kinerja indikator Sasaran Strategis III pada setiap tahunnya dapat direalisasikan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Melihat dari persentase capaian, sama halnya dengan Sasaran Strategis II, dengan kenaikan target setiap tahunnya yang semakin mendekati nilai 100 (jumlah nilai maksimal) dengan realisasi yang sangat baik, maka otomatis persentase capaian akan semakin menurun. Secara

umum Grafik 2.6 ini dapat menggambarkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara konsisten dan terus menerus tetap berupaya melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja di segala aspek walaupun dengan segala keterbatasan yang ada sehingga realisasi yang diperoleh atas target indikator akuntabilitas kinerja dapat dicapai dengan sangat baik.

Hal-hal yang telah dilaksanakan dalam rangka perbaikan/peningkatan akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diantaranya:

1) Masing-masing personil telah menyusun dokumen rencana aksi yang mencakup sasaran kinerja, target per triwulan, serta langkah-langkah pencapaian target. Pemantauan progres pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan secara rutin setiap bulan per unit kerja yang dapat dibuktikan dengan notulen pelaksanaan rapat evaluasi;
2) Dalam pemanfaatan dashboard pembangunan, Dinas Kependudukan telah dan terus berupaya untuk mengentri capaian kinerja per triwulan dengan tepat waktu sesuai *timeline* realisasi target kinerjanya;
3) Dokumen pelaporan kinerja secara optimal telah dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan perencanaan dan atau sebagai alat mengukur prakiraan keberhasilan kinerja baik pada tahun berjalan maupun pada tahapan perencanaan tahun berikutnya.
4) Tetap berupaya dengan maksimal terkait perbaikan dan peningkatan AKIP di internal dinas di tengah keterbatasan sumber daya;
5) Menambah personil khususnya di unit kerja terkecil (lingkup bidang PIAK) yang berasal dari ASN/PNS pindahan dari luar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada akhir triwulan IV Tahun 2024 sebagai staf pelaksana yang pindah (promosi) ke OPD lain.

Sasaran Strategis IV Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi diukur berdasarkan hasil pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas instansi penerima layanan baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota yang dilakukan di setiap akhir tahun dengan melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat pada Perguruan Tinggi Negeri yang ada kabupaten .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut mempertegas bahwa pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik. Pelayanan publik yang diberikan harus berkualitas. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Kualitas layanan publik menjadi salah satu indikasi terselenggaranya pemerintah yang baik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu perangkat daerah lingkup Pemerintah secara langsung memberikan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan kepada masyarakat.

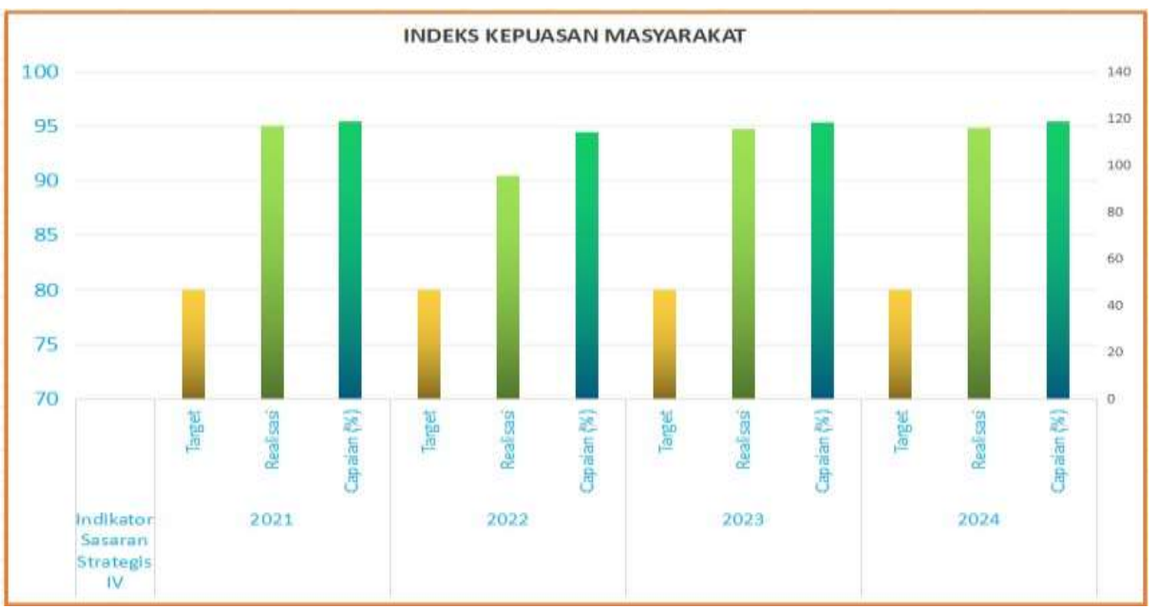
Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat, ruang lingkup pelaksanaan survei adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan; syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur; prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3) Waktu Penyelesaian; merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4) Biaya/tarif; merupakan ongkos yang dikenakan pada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh layanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5) Produk spesifikasi jenis layanan; adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini merupakan hasil dari spesifikasi jenis layanan;
6) Kompetensi pelaksana; kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
7) Perilaku pelaksana; adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan; merupakan tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut; dan
9) Sarana dan Prasarana; sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Gambar 3.7
Target, Realisasi, Capaian Indikator Sasaran Strategis IV
Tahun 2021, 2022, 2023, 2024



Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator Sasaran Strategis IV mengalami fluktuasi dari Tahun 2021 sampai Tahun 2023. Pada tahun 2021 target 80 direalisasikan dengan capaian 100%, tahun 2022 target yang sama diperoleh realisasi 85 dengan capaian 90%. Pada tahun 2023 dan 2024 dengan target yang sama dengan dua tahun sebelumnya, diperoleh realisasi 94,75 dan 94,79 serta capaian 100% dan 100%.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka perbaikan kualitas dan peningkatan kuantitas layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai kewenangan, diantaranya:

1) Secara rutin telah mengingatkan seluruh PPTK agar memperhatikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan jadwal yang telah disusun sedemikian

rupa, baik pada pelaksanaan rapatrapat internal maupun pada amanat apel pagi lingkup dinas;

2) Sampai tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyediakan tenaga IT yang diharapkan mampu secara maksimal mendukung pelaksanaan pelayanan;
3) Secara berkala telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kemendagri. Hal ini dikarenakan pengelolaan database kependudukan sepenuhnya sudah menjadi kewenangan Ditjen DukcapilKemendagri;
4) Dalam pemberian layanan dengan kondisi yang ada saat ini, ruangan yang dimanfaatkan untuk pemberian layanan tatap muka menggunakan ruangan yang telah dilengkapi sarana yang cukup memadai;
5) Dengan keterbatasan anggaran, ruang perekaman fisabilitas untuk yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilakukan sedikit pemugaran/rehab ringan termasuk perbaikan ruang kepala dinas. Rehab ringan ini dilakukan pada triwulan IV Tahun Anggaran 2024; dan
6) Monitoring pelaksanaan tugas *Cleaning Service* secara berkala telah dilakukan, namun tetap perlu peningkatan pemantauan agar kebersihan prasarana pelayanan secara keseluruhan tetap optimal.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Dimana IKK urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memiliki 2 (dua) IKK yakni Penyajian Data Kependudukan Skala kabupaten dalam Satu Tahun dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Indikator Kinerja Kunci I Penyajian Data Kependudukan Skala kabupaten Dalam Satu Tahun diukur berdasarkan *(Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam satu tahun) / (2 kali) x 100%.*

Penyajian data kependudukan skala kabupaten ini terdiri dari 2 jenis buku, yakni Buku Profil Perkembangan Kependudukan kabupaten kepulauan mentawai dan Buku Data Kependudukan Kabupaten kepulauan mentawai Semester I dan Semester II. Buku Profil Perkembangan Kependudukan kabupaten kepulauan mentawai diterbitkan satu kali se tahun yang menyajikan data kependudukan dan data sektoral yang berkaitan dengan data kependudukan pada tahun sebelumnya sedangkan Buku Data Kependudukan kepulauan mentawai diterbitkan sebanyak dua kali, yakni Buku Data Kependudukan Semester II tahun sebelumnya yang diterbitkan pada Semester I tahun berkenaan dan Buku Data Semester I tahun berkenaan yang diterbitkan pada Semester II tahun berkenaan.

Penerbitan Buku Profil Perkembangan Kependudukan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010, dan dasar hukum penyusunan Buku Data Kependudukan per semester adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019.

Sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, Dinas Kependudukan secara konsisten telah melaksanakan kewajibannya terhadap penerbitan ke-dua jenis buku ini baik yang diterbitkan secara fisik/cetak maupun secara digital/*e-book*. Penerbitan secara digital ini sebagai salah satu upaya untuk merelease buku tersebut saat kondisi anggaran yang terbatas.

Tabel 2.12
Rekapitulasi Penerbitan Buku Profil Perkembangan Kependudukan dan Buku Data Kependudukan Semester I dan Semester II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Buku Data	Jumlah Cetak		Th Terbit	Ket.
1.	Buku Data Kependudukan Semester II 2022	10	buku	Triwulan I 2023	
2.	Buku Data Kependudukan Semester I 2023	15	buku	Triwulan III 2023	
3.	Buku Data Kependudukan Semester II 2023	15	Buku	Triwulan I 2024	
4.	Buku Data Kependudukan Semester I 2024	10	buku	Triwulan I 2024	
5.	Buku Data Kependudukan Semester II 2024	15	buku	Triwulan III 2024	
6.	Buku Profil Perkembangan Tahun 2021	50	Buku	Semester I 2022	
7.	Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2022	50	Buku	Semester I 2023	
8.	Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2023	30	Buku	Semester I 2024	
9.	Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2024	softcopy	Buku	-	Sedang dalam proses penyusunan di Semester I Tahun 2025, tdk dicetak yang disebabkan efisiensi anggaran, sehingga ditambahkan dengan penerbitan buku dalam bentuk *e-book*

Sumber data: Bidang PIAK dan PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk Indikator Kinerja Kunci II Pemanfaatan data kependudukan diukur berdasarkan (Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama / Jumlah keseluruhan OPD lingkup kabupaten) x 100%. Secara definisi operasional, IKK ini sama dengan Sasaran Strategis I sehingga uraian capaian kinerja terhadap IKK II ini tidak dijelaskan kembali.

Realisasi/Capaian atas indikator kinerja tersebut tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya dukungan anggaran program/kegiatan. Dukungan anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami fluktuasi. Kondisi ini tidak terlepas dari kondisi keuangan daerah. Disisi lain, sejak tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak lagi menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Kinerja realisasi anggaran sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 memiliki kinerja sangat baik, dengan persentase realisasi anggaran di atas 90% (>95%). Kinerja anggaran yang baik ini dapat diwujudkan atas komitmen seluruh pengelola keuangan di internal dinas untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas ditengah kondisi sumber daya manusia yang sangat minim.

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kepulauan Mentawai
Tahun 2020 - 2024

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	Program/ Kegiatan	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		6.310.252.265	6.888.617.272	5.065.670.939	4.812.485.336	-	5.093.797.397	5.530.939.485	4.710.124.530	4.505.358.000	-	95,67	80,29	94,23	93,62		6,55	6,69
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	5.039.797.397	6.982.103.024	6.634.167.419	6.947.358.865	-	4.788.857.012	6.851.372.435,87	6.496.488.034	6.624.921.097	-	95,02	98,13	97,92	95,36		12,76	13,29
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.114.460	339.263.190	369.228.000	352.554.975	-	110.778.200	336.771.522	342.381.796	342.829.300	-	97,93	99,27	92,73	97,24		68,08	68,60
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.702.159.841	3.927.175.002	4.558.027.355	4.715.129.876	-	2.502.780.568	3.862.937.967	4.514.322.132	4.436.772.765	-	92,62	98,36	99,04	94,10		21,62	23,16
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.539 .425	110.960.826	53.527.900	76.449.876	-	36.783.010	105.745.555	52.383.284	74.900.688	-	95,44	95,30	97,86	97,97		59,66	60,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.994.200	75.798.760	45.677.600	93.354.800	-	4.147.066	75.420.000	41.298.293	92.552.052	-	83,04	99,50	90,41	99,14		494,13	599,17
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.200.016.121	560.420.672	460.835.882	494.445.200	-	1.197.173.044	558.970.491	456.596.071	486.690.426	-	99,76	99,74	99,08	98,43		(21,26)	(21,68)

6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.928.000	696.506.000	-	-	-	33.928.000	665.774.030	-	-	-	100,00	95,59	-	-		617,63	587, 44
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	743.660.450	875.461.584	942.254.292	957.068.328	-	703.760.085	855.257.128	925.354.822	941.201.536	-	94,63	97,69	98,21	98,34		8,97	10,48
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	203.384.900	396.516.990	204.616.390	258.355.810	-	199.507.039	390.495.742,87	164.151.636	249.974.330	-	98,09	98,48	80,22	96,76		24,28	30,02
B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	804.471.219	708.695.201	360.845.035	277.281.329	-	780.243.536	704.788.820	357.943.090	266.621.200	-	96,99	99,45	99,20	96,16		(28,05)	(28, 13)
9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	74.300.800	91.028.701	25.175.000	20.000.000	-	73.519.600	90.371.420	24.812.500	19.910.000	-	98,86	99,28	98,56	99,55		(23,46)	(23, 13)
10	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	358.185.579	471.086.000	264.076.000	137.802.329	-	350.260.536	468.176.700	262.025.290	127.285.200	-	97, 79	99,38	99,22	92,37		(20,08)	(20, 60)
11	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	371.984.840	146.580.500	71.594.035	119.479.000	-	356.463.400	146.240.700	71.105.300	119.426.000	-	95, 83	99,77	99,32	99,96		(14,96)	(14, 13)
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	398.937.400	399.116.928	175.195.000	277.281.329	-	389.133.306	394.550.925	174.198.500	271.584.382	-	97, 54	98,86	99,43	97,95		0,74	0,48
12	Pelayanan Pencatatan Sipil	128.434.500	61.092.600	68.002.700	50.000.000	-	127.333.500	60.964.600	67.139.500	49.481.100	-	99,14	99,79	98,73	98,96		(22,53)	(22, 76)
13	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	142.342.400	205.101.928	43.429.800	115.000.000	-	136.453.900	200.929.345	43.344.700	112.149.753	-	95, 86	97,97	99,80	97,52		43,35	42,52

D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	542.252.150	548.070.787	193.184.100	374.552.961	-	531.279.450	543.997.674	192.799.940	346.787.425	-	97, 98	99, 26	99, 80	92, 59		10,07	5,90
15	Penataam Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	47.827.300	-	-	-	-	47.691.500	-	-	-	-	99, 72	-	-		-	-
16	Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	290.103.050	399.601.440	153.184.100	334.552.961	-	286.137.003	395.949.874	152.855.970	307.049.425	-	98, 63	99, 09	99, 79	91, 78		31,49	25,95
17	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	252.149.100	100.642.047	40.000.000	40.000.000	-	245.142.447	100.356.300	39.943.970	39.738.000	-	97, 22	99, 72	99, 86	99, 35		(40,11)	(39, 93)
E	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	99.469.100	126.634.240	50.000.000	113.297.940	-	97.322.821	125.580.340	49.113.860	112.792.300	-	97, 84	99, 17	98, 23	99, 55		31,13	32,60
18	Penyediaan Profil Kependudukan	99.469.100	126.634.240	50.000.000	113.297.940	-	97.322.821	125.580.340	49.113.860	112.792.300	-	97, 84	99, 17	98, 23	99, 55		31,13	32,60

Sumber data: Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Data Olahan

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tugas pokok, fungsi serta kewenangan penyelenggaran pemerintah urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, memiliki fungsi pelayanan dalam pemanfaatan data kependudukan sebagaimana yang telah diuraikan pada penjelasan kinerja Sasaran Strategis I (tabel 2.4). Dimana sampai tahun 2024 seluruh perangkat daerah telah melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain perangkat daerah, instansi vertikal/instansi pemberi layanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diantaranya:

1) Komisi Pemilihan Umum (KPU);
2) Kantor Wilayah Imigrasi;
3) BPJS Kesehatan; dan

Terkait fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Barat juga melayani seluruh perangkat daerah. Beberapa bentuk kongkrit pengimplementasian tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap OPD:

1) Pemberian data kependudukan yang di minta untuk keperluan pemberantasan seperti kemiskinan,stunting,BPJS
2) Berkolaborasi dengan dalam rangka memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam berbagai *event* seperti pelaksanaan Pekan Layanan Adminduk baik yang dipusatkan di kabupaten maupun di kecamatan dan desa, layanan adminduk pada kegiatan *car free day*, layanan aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ke instansi vertikal dan atau perguruan tinggi.

Instansi layanan publik yang telah bermitra dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pemberian layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain: RSUD,Puskesmas ,pustu dan bidan setempat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2.1 Permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diatasi. Pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih rendah, dan masih banyak masyarakat yang belum atau enggan melakukan pembaruan data kependudukan, terutama data kematian. Terdapat beberapa perangkat daerah yang belum sepenuhnya memahami kegunaan data kependudukan dalam pelaksanaan program. Masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui tentang Kartu Identitas Anak (KIA) serta kegunaannya, meskipun KIA belum menjadi dokumen wajib kependudukan. Akses terhadap layanan kependudukan masih sulit dijangkau oleh masyarakat yang berada di lokasi terpencil seperti kec.Siberut Barat, perbatasan antar daerah, daerah terisolir, dan daerah yang sulit diakses transportasi karena BBM mahal dan cuaca yang ekstrim Selain itu, masih banyak anak yang lahir di luar pernikahan atau dari orang tua yang menikah tidak tercatat pada akta KUA / gereja sehingga enggan untuk mengurus akta kelahiran. Keengganan orang tua untuk mengurus akta kelahiran dan adanya praktik pernikahan siri juga menjadi kendala dalam pencatatan kependudukan. Belum adanya kebutuhan mendesak untuk segera memiliki dokumen kependudukan juga menjadi faktor penghambat.

Pengelolaan data kependudukan masih belum terintegrasi dengan data antar sektor, dan belum ada analisis yang menggambarkan keterkaitan data yang ditampilkan sehingga kegunaan data kependudukan belum optimal. Berbagai permasalahan ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan kesadaran masyarakat, perluasan akses layanan, penghapusan kebijakan yang kontraproduktif, integrasi data antar sektor, dan pemanfaatan data kependudukan yang lebih optimal dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan

Secara substantif, permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya, antara lain:

1) Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan *Single Identity Number* dalam pemanfaatan data kependudukan;
2) Belum optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pengurusan dan pemanfaatan dokumen kependudukan;
3) Perubahan regulasi dalam pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI mewajibkan setiap instansi/lembaga pengguna menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat ISO/IEC 27001;
4) Terdapat perubahan definisi operasional dari beberapa indikator kinerja kepemilikan dokumen kependudukan berdasarkan Rancangan Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
5) Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk yang sudah memiliki KTP-el masih sangat rendah, dan merujuk pada Rancangan Renstra Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa indikator kinerja terkait IKD akan menjadi indikator program pada Program Pendaftaran Penduduk;
6) Masih perlu upaya peningkatan kesadaran dan atau kepedulian masyarakat atas *update* data-data/dokumen kependudukan. Kecenderungan masyarakat sampai dengan saat ini, pengurusan/*update* data/dokumen kependudukan hanya sewaktu-waktu diperlukan saja, dan bahkan ada unsur kesengajaan untuk tidak memperbaharui dokumen kependudukannya jika dikhawatirkan akan berdampak pada penerimaan bantuan sosial dan sejenisnya;
7) Akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terutama di pantai barat atau kepulauan masih sangat sulit;
8) Masih maraknya pernikahan yang belum disahkan secara hukum negara yang berdampak pada status anak dalam hukum/peraturan perundangan-undangan lingkup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9) Belum terintegrasinya pengelolaan data kependudukan antar sektor, sehingga upaya pengoptimalan penggunaan data kependudukan dalam basis perencanaan dan pengambilan kebijakan masih sangat minim.
10) Rata-rata kondisi peralatan pelayanan administrasi kependudukan sudah tidak layak dan usulan penggantian/pembelian peralatan baru yang diajukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kecamatan masing-masing belum mendapatkan respon yang menggembirakan. Disisi lain, fasilitasi pengadaan peralatan baru dari Ditjen Dukcapil Kemendagri yang telah diuapayakan juga belum mendapatkan jawaban yang kongkrit.

2.2.2 Identifikasi Isu Strategis

Merujuk pada Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, urusan administrasi kependudukan dan pencatata sipil masuk dalam 3 (dua) prioritas nasional baik secara langsung maupun tidak, yakni:

Tabel 2.14
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dalam RPJMN Tahun 2025-2029

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas			Kegiatan Prioritas			Proyek Prioritas
			Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator	
1	PN.4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas	PP.04.17 Peningkatan kualitas perlindungan anak	01-Terpenuhinya hak dan perlindungan anak	03-*Persentase anak usia 04 tahun yang memiliki akta kelahiran*				
2	PN.6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	PP.06.01 Sistem Pendataan Sosial Ekonomi Terintegrasi	01-Tersedianya data dalam satu sistem yang efisien, tepat, dan efektif untuk mendukung perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan	01-Persentase data sosial ekonomi keluarga Indonesia yang ternutakhirkan dan terpilah secara berkala	KP.06.01.02 Pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi	01-Terselenggaran ya pemanfaatan data yang optimal untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional	02-Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan data regsosek melalui SEPAKAT	ProP.06.01.02. 03 Integrasi dan Pemutakhiran Data Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati
3	PN.7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	PP.07.01 Reformasi politik dan tata kelola pemilu	03-Terwujudnya penguatan dan pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat	*01-Jumlah daerah dengan indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori "sangat baik"*	KP.07.01.02 *Pelayanan identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib KTP*	01-*Terselenggaranya pelayanan identitas kependudukan digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP*	01-*Persentase penduduk yang menggunakan identitas kependudukan digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP*	ProP.07.01.02. 01. *Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional*
								ProP.07.01.02. 02 *Peningkatan kuantitas layanan administrasi kependudukan*

Sumber data: Lampiran II Perpres Nomor 12 Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang berkaitan langsung dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah pada
Prioritas Nasional 04 dan Prioritas Nasional 07. Sedangkan pada Prioritas Nasional 06 bersifat unsur pendukung dalam pemutakhiran data kependudukan untuk pengembangan statistik hayati.
Secara eksplisit, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada RPJMN 2025-2029 adalah:

1) Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun;
2) Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP; dan
3) Pemutakhiran data kependudukan.

Dari Rancangan Renstra Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan menjadi bagian dari Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 20252029, penyelenggaraan dan/atau pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan menjadi bagian kewenangan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 2.15
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dalam Rancangan Renstra Kemendagri Tahun 2025-2029

PROGRAM			KEGIATAN		
Program Tata Kelola Kependudukan	Sasaran (outcome)	IKP		Sasaran output)	IKK
	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Jumlah daearah dengan indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori "sangat baik"	Kegiatan Pembinaan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	IKK.3 Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran
					IKK.4 Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal
					IKK.5 Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah
					IKK.6 Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai
					IKK.8 Persentase penerbitan KIA dalam layanan adminduk
			Kegiatan Penguatan Adminstrasi Kependudukan dan Identitas Digital	Meningkatnya sistem kependudukan dan pencatatan sipil, serta memperkenalkan identitas kependudukan digital untukmemungkinkan semua warga negara dan penduduk indonesia mengakses pelayanan pemerintah dan swasta yang lebih baik	IKK.8 Persentase penduduk yang menggunakan identitas kependudukan digital bagi penduduk wajib KTP

Sumber data: Revisi 7 Matrik Rancangan Renstra Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Pada tabel 2.14, diuraikan dengan jelas bahwa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang akan menjadi target kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah:

1) Kepemilikan Akta Kelahiran;
2) Kepemilikan Akta Kematian;

3) Kepemilikan Akta Perkawinan;
4) Kepemilikan Akta Perceraian;
5) Penerbitan KIA; dan
6) Aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

Berkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai salah satu acuan perencanaan, dimana KLHS berfungsi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi dan menilai dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat penerapan kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD.

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dijelaskan 7 (tujuh) poin penting hasil perumusan isu PB paling strategis, yakni:

1) Masih tingginya intensitas bencana dan perubahan iklim;
2) Rendahnya pelayanan air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah dan air limbah untuk masyarakat;
3) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air;
4) Belum meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah;
5) Terdegradasinya keanekaragaman hayati darat dan laut;
6) Belum optimalnya upaya penguatan perlindungan masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintah daerah;dan
7) Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan antar berbagai tingkatan lembaga dan institusi.

Dari isu PB tersebut diatas, yang bersinggungan dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah pada isu ke-6 yakni pengelolaan layanan adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam pelayanan publik yang menunjang kinerja pemerintah daerah dan perlindungan hak-hak sipil dalam pengamanan data kependudukan dan kepastian hukum terkait dengan dokumen kependudukan serta pada isu ke-7 dalam susbtansi pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai kebutuhan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan instansi/lembaga pengguna.

Terkait dengan indikator TBP dalam dokumen KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase Penduduk Umur 0-17 Tahun dengan kepemilkan akte kelahiran dengan nomor indikator TBP 1.4.1(j). Jika merujuk pada RPJMN Tahun 2025-2029, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 dan Rancangan Renstra Kementerian Dalam Negeri maka definisi operasional terhadap kepemilikan akta kelahiran sudah diganti menjadi kepemilikan akta kelahiran pada anak umur 0-4 tahun.

Dari uraian-uraian di atas, baik dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Rancangan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029 serta Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 serta beranjak dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka *rumusan isu strategis urusan administrasi kependudukan* adalah sebagai berikut:

1) Terdapat perubahan formulasi kepemilikan dokumen kependudukan sehingga membutuhkan strategi/penyesuaian arah kebijakan;
2) Kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kematian masih sebatas kebutuhan akan layanan publik yang mensyaratkan dokumen akta kematian, ditambah dengan adanya kekhawatiran jika Kepala Keluarga penerima bantuan sosial meninggal dan dilaporkan/diterbitkan akta

kematiannya akan berakibat dihentikannya bantuan sosial bagi ahli waris atau setidaknya membutuhkan proses pembaharuan data yang memakan waktu. Terkait hal ini perlu dilakukan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat dan/atau stakeholder yang mempunyai kewenangan atas penyaluran bantuan sosial yang sudah terkoneksi dengan data kependudukan;

3) Masih masifnya praktek perkawinan yang tidak/belum disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada status hubungan dalam keluarga, sehingga status hukum suami-isteri maupun anak kandung secara biologis belum/tidak bisa diakui secara administrasi kependudukan;
4) Status perceraian yang belum diakui secara peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai potensi permasalahan yang cukup signifikan, terlebih apabila individu yang bercerai tersebut melakukan pernikahan sebelum perceraian dari pernikahan sebelumnya disahkan. Jika hal ini tidak diantisipasi maka permasalah utama yang akan ditimbulkan adalah status perkawinan/pasangan yang terdata dalam database kependudukan serta ketidakjelasan status anak dari setiap perceraian/pernikahan yang tidak disahkan tersebut;
5) Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu upaya peningkatan perlindungan anak yang masih dibawah umur yang bisa dijadikan pedoman status hubungan dalam keluarga antara si-anak dengan orang tua, yang selama ini hanya bisa diketahui melalui Kartu Keluarga;
6) Salah satu upaya transformasi digitalisasi administrasi kependudukan adalah dengan peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada penduduk wajib KTP, yang dimasa mendatang akan diarahkan menjadi upaya mewujudkan *Single Identity Number*;
7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi penerima manfaat layanan;
8) Keakuratan data kependudukan dalam setiap elemen data menjadi hal yang sangat krusial. Karena menyangkut dengan data pokok penduduk yang menjadi objek analisa diantaranya usia, domisili, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, dan lain sebagainya; dan
9) Dengan akurasi data kependudukan yang sangat baik sebagaimana pada poin 8, maka pendayagunaan data kependudukan lintas sektoral/stakeholder dapat lebih dioptimalkan dalam pengambilan kebijakan perencanaan dan/atau penganggaran pembangunan;

Tabel 2.16
Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu- Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
1. Data Kependudukan sebagai basis perencanaan Pembangunan 2. Peningktan Pelayanan Publik 3. Pemanfaatan Inovasi Digital 4. Potensi Kolaborasi Lintas Sektor	1. Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan Single Identity 2. Number dalam pemanfaatan data kependudukan; 3. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pengurusan dan pemanfaatan dokumen kependudukan; 4. Perubahan regulasi dalam pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI 5. Terdapat perubahan definisi operasional dari beberapa indikator kinerja 6. Cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk yang sudah memiliki KTP-el masih sangat rendah, dan merujuk Penduduk; 7. Masih perlu upaya peningkatan kesadaran dan atau kepedulian masyarakat atas update data-data/dokumen kependudukan. 8. Akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terutama di pantai barat atau kepulauan masih sangat sulit; 9. Masih maraknya pernikahan yang belum disahkan secara hukum negara 10. Belum terintegrasinya pengelolaan data kependudukan antar sektor, 10)Rata-rata kondisi peralatan pelayanan administrasi kependudukan sudah tidak layak	1. Rendahnya Pendidikkan 2. Hukum dan Tata Kelola Pemerintahaan	Ancaman siberbterhadap data kependudukan semakinnyata di Tengah konflik global dan kompetensi data	1. Akses pelayanan publik 2. Peningkatan DigitalisasiPelayanan	1. Akses Pelayanan Publik 2. Akses pelayanan publik yangadil dan merata	1. Terdapat perubahan formulasi kepemilikan dokumen kependudukan sehingga membutuhkan strategi/penyesuaian arah kebijakan 2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kematian masih sebatas kebutuhan akan layanan publik yang mensyaratkan dokumen akta kematian 3. Masih masifnya praktek perkawinan yang tidak/belum disahkan menurut peraturan perundang-undangan 4. Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan salah satu upaya peningkatan perlindungan anak yang masih dibawah umur

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Merujuk pada Bab I, ayat 49 dan 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri menyatakan yang dimaksud dengan Tujuan dalam kerangka perencanaan pemerintahan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Perumusan tujuan perangkat daerah tentu harus menunjang rencana pembangunan daerah yang dirumuskan melalui visi - misi pembangunan daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun visi Pembangunan Tahun 2025-2029:

TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG PRIMA

Penjabaran dari visi pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Misi ini menjadi penjabaran operasional dari visi yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah, sekaligus menangkap peluang dan potensi strategis yang dimiliki.

Berdasarkan misi pembangunan tersebut yang telah dirumuskan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak menjadi urusan yang langsung mendukung salah satu misi. Namun demikian, pengelolaan dan/atau pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berupa pemberian layanan pemerintahan kepada penerima manfaat layanan publik termasuk pada urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara substansi melekat pada Misi ke 8 (delapan) dari delapan misi pembangunan tahun 2025-2029, yakni: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang handal transparan dan akuntabel

Bertolak dari kondisi/pencapaian kinerja, permasalahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat, kementerian/ lembaga, serta arah kebijakan pembangunan daerah melalui visi - misi pembangunan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 dan rumusan Tujuan urusan perangkat daerah penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 serta diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, maka rumusan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pada Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tujuan 1	: Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien
Tujuan 2	: Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan melayani

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sama halnya dengan rujukan rumusan tujuan, Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Berdasarkan rumusan tujuan sebagaimana yang telah duraikan sebelumya, maka turunan dari Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dirumuskan menjadi Sasaran Strategis Tujuannya adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien

Sasaran 1.1 : Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan untuk semua kebutuhan

Sasaran 1.2 : Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan

Secara lengkap hubungan antara visi-misi pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029, dan rumusan Tujuan, Sasaran beserta indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rancangan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						Keterangan/ Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi Kependudukan	Sangat Baik (90)	Sangat Baik (90,50)	Sangat Baik (91)	Sangat Baik (91,50)	Sangat Baik (92)	Sangat Baik (92,50)	Rumusan Tujuan dan IK merujuk pada Inmendagri 2 2025 dan Rancangan Renstra Kemendagri
		Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan untuk semua kebutuhan	*Persentase perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan*	36,11	50	58,8	64,70	73,5	82,3	*Jumlah permintaan/pemanfaatan data kependudukan*
		Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	*Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan*	94,25 %	94,17%	94,25 %	94,50 %	95,00 %	95,92 %	*DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri*
			Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk : *1. Persentase perekaman ktp-el.* *2. Kepemilikan kk.* *3. Kepemilikan ikd.* 4. *Kepemilikan kia* *Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil :* *1.persentase kepemilikan dok akta perkawinan* *2. persentase kepemilikan dok akta perceraian* *3. . persentase kepemilikan dok akta kelahiran* *4. . persentase kepemilikan dok akta kematian*	 98,4% 99% 35% 65% 100% 100% 100% 100%	 98,75% 99,1% 40% 70% 100% 100% 100% 100%	 98,80% 99,5% 45% 75% 100% 100% 100% 100%	 99% 99,6% 55% 76% 100% 100% 100% 100%	 99,4% 99,75% 75% 78% 100% 100% 100% 100%	 99,5% 99,5% 80% 80% 100% 100% 100% 100%	*DKB Ditjen Dukcapil Kemendagri*

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						Keterangan/ Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip	A (80,05)	A (80,10)	A (80,15)	A (80,20)	A (80,25)	A (80,30)	LKjIP
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	2	2	2	2	2	2	SKM
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	*A (80,05)*	*A (80,10)*	*A (80,15)*	*A (80,20)*	*A (80,25)*	*A (80,30)*	*LKjIP*

Sumber data: Data Olahan

Rumusan Tujuan, Sasaran berikut indikator kinerja pada Rancangan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (tujuan 1 dan sasaran 1.1 dan 1.2) dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tujuan 1: Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sangat indentik dengan layanan publik, memerlukan pengukuran yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pemberi layanan.

Terkait dengan hal ini dan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan layanan publik secara langsung kepada masyarakat, maka objek pengukuran dari indikator kinerja pada Tujuan 1 ini adalah persentase kepemilikan dokumen kependudukan dengan cara jemput bola.

Sasaran 1.1: Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan untuk semua kebutuhan

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah dirumuskan pada Tujuan 1, maka diperlukan upaya peningkatan pemanfaatan data kependudukan pada setiap instansi/stakeholder. Upaya pendayagunaan data kependudukan untuk setiap urusan pemerintah dan/atau non pemerintah dilakukan dengan peningkatan dan optimalisasi sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi dan melakukan kerjasama pemaanfaatan data kependudukan.

Terkait dengan perubahan kebijakan pemanfaatan data kependudukan untuk instansi pengguna data yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dimana pada kebijakan sebelumnya, setiap lembaga pengguna dapat mengakses data kependudukan melalui aplikasi resmi yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri berdasarkan dokumen Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan. Pada kebijakan baru pemanfaatan data kependudukan bahwa setiap instansi pengguna yang membutuhkan akses data *by system* atau melalui aplikasi yang telah ditetapkan wajib melaksanakan kebijakan pengelolaan/keamanan data dengan sertifikasi ISO/IEC 27001. Penerapan sertifikasi ISO ini berdampak cukup signifikan terhadap lembaga pengguna karena membutuhkan standarisasi baik *hardware, software,* maupun sarana prasarana pendukung lainnya yang membutuhkan biaya pengadaan dan pemeliharaan yang cukup besar. Dengan kondisi ini, banyak usulan perpanjangan perjanjian kerjasama pemanfaatan data yang kewenangan mutlaknya berada pada Ditjen Dukcapil Kemendagri tidak/belum disetujui.

Perubahan kebijakan ini yang berdampak pada penyesuaian formulasi dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan data. Pada kondisi sebelumnya, formulasi pemanfaatan data kependudukan diukur berdasarkan instansi pengguna yang telah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini perangkat daerah lingkup Provinsi Sumatera Barat dimana sampai dengan akhir Tahun 2024 seluruh perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data, dengan capaian kinerja indikator sasaran 100% (Sasaran 1.1 Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026).

Menyikapi perubahan kebijakan pemanfaatan data sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dilakukan penyesuaian formulasi sasaran, yang sebelumnya hanya diukur berdasarkan yang telah melakukan

PKs pemanfaatan data dirubah dengan jumlah *stakeholder* yang memanfaatkan data kependudukan baik yang dapat mengakses langsung data kependudukan berdasarkan PKs maupun yang membutuhkan data kependudukan secara konvensional. Sehingga target yang ditetapkan pada Rancangan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tidak lagi diukur berdasarkan persentase, tapi berdasarkan jumlah absolut lembaga pemerintah/non pemerintah baik *by system* ataupun tidak.

Sasaran 1.2: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan

Salah satu yang bisa dijadikan gambaran keberhasilan kinerja layanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan tingkat kepemilikan dokumen kependudukan. Tingkat/persentase kepemilikan dokumen kependudukan didasarkan pada jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang diwajibkan sesuai dengan klasifikasinya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, dan memperhatikan matriks Rancangan Renstra Kemendagri urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dari Ditjend Dukcapil Kemendagri serta pointer-pointer pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dokumen kependudukan yang menjadi instrumen indikator kinerja pada Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil adalah:

a. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital;
b. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak;
c. Persentase penerbitan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun;
d. Persentase penerbitan akta kematian dari penduduk yang berstatus meninggal;
e. Persentase penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang berstatus menikah; dan
f. Persentase penerbitan akta perceraian bagi penduduk berstatus cerai.

Untuk mengukur Substansi Sasaran 1.2 pada Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 ini berbeda dengan Sasaran 1.2 pada Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, walaupun secara nomenklatur sasarannya sama.

Dimana terdapat pergantian indikator antara persentase kepemilikan KTP-el menjadi aktivasi IKD serta perubahan formulasi perhitungan pada kepemilikan dokumen kependudukan lainnya, maka terlihat penurunan target sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.1.

Sasaran 2.1 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan instrumen pengukuran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sesuai kewenangannya. Sasaran 2.2 secara rumusan sama dengan indikator kinerja Tujuan 1 sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Inmendagri 2 Tahun 2025 yang menjadi instrumen pengukuran layanan perangkat daerah.

3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra perangkat daerah dirumuskan sebagai upaya perencanaan tindakan yang komprehensif dan berisikan langkahlangkah/upaya yang akan dilakukan diberbagai aspek seperti sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub

kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran perangkat daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang menjalankan urusan pemerintahan kongkuren lingkup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang tugas pokok dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil tingkat provinsi, maka dalam pencapaian tujuan/sasaran perangkat daerah yang telah dirumuskan akan diaktualisasikan dalam bentuk strategi.

Untuk menjawab permasalahan seperti yang telah diuraikan pada

Bab II yang sejalan dengan upaya merealisasikan tujuan/sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dalam lingkup visi-misi pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan, maka strategi perangkat daerah yang akan dilaksanakan khususnya dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah :

a. Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dalam koridor peraturan perundang-undangan; dan
b. Mengupayakan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan administrasi kependudukan baik secara konvensional maupun digitalisasi pelayanan.

Sebagai langkah kongkrit merealisasikan strategi, perlu dirumuskan tahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029	TAHUN V (2030)
[1] Peningkatan keakuratan data kependudukan melalui verifikasi dan validasi data kependudukan baik di internal Instansi pengelola (pusat, provinsi dan daerah) dan eksternal secara intensif dan berkesinambung an	[1] Peningkatan keakuratan data kependudukan melalui verifikasi dan validasi data kependudukan baik di internal Instansi pengelola (pusat, provinsi dan daerah) dan eksternal secara intensif dan berkesinambung an	[1] Peningkatan keakuratan data kependudukan melalui verifikasi dan validasi data kependudukan baik di internal Instansi pengelola (pusat, provinsi dan daerah) dan eksternal secara intensif dan berkesinambung an	[1] Peningkatan keakuratan data kependudukan melalui verifikasi dan validasi data kependudukan baik di internal Instansi pengelola (pusat, provinsi dan daerah) dan eksternal secara intensif dan berkesinambung an	[1] Peningkatan keakuratan data kependudukan melalui verifikasi dan validasi data kependudukan baik di internal Instansi pengelola (pusat, provinsi dan daerah) dan eksternal secara intensif dan berkesinambung an
[2] Optimalisasi penyajian data kependudukan yang lebih dinamis sesuai peraturan perundangundangan	[2] Optimalisasi penyajian data kependudukan yang lebih dinamis sesuai peraturan perundangundangan	[2] Optimalisasi penyajian data kependudukan yang lebih dinamis sesuai peraturan perundangundangan	[2] Optimalisasi penyajian data kependudukan yang lebih dinamis sesuai peraturan perundangundangan	[2] Optimalisasi penyajian data kependudukan yang lebih dinamis sesuai peraturan perundangundangan
[3] Peningkatan sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi kepada pemangku kepentingan terkait pemanfaatan data kependudukan	[3] Peningkatan sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi kepada pemangku kepentingan terkait pemanfaatan data kependudukan	[3] Peningkatan sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi kepada pemangku kepentingan terkait pemanfaatan data kependudukan	[3] Peningkatan sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi kepada pemangku kepentingan terkait pemanfaatan data kependudukan	[3] Peningkatan sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi kepada pemangku kepentingan terkait pemanfaatan data kependudukan
[4] Menciptakan inovasi yang mudah digunakan dalam rangka peningkatan pemanfaatan data kependudukan	[4] Menciptakan inovasi yang mudah digunakan dalam rangka peningkatan pemanfaatan data kependudukan	[4] Menciptakan inovasi yang mudah digunakan dalam rangka peningkatan pemanfaatan data kependudukan	[4] Menciptakan inovasi yang mudah digunakan dalam rangka peningkatan pemanfaatan data kependudukan	[4] Menciptakan inovasi yang mudah digunakan dalam rangka peningkatan pemanfaatan data kependudukan
[5] Peningkatan kualitas dan kualitas	[5] Peningkatan kualitas dan kualitas	[5] Peningkatan kualitas dan	[5] Peningkatan kualitas dan kualitas	[5] Peningkatan kualitas dan kualitas

TAHUN I (2026)	TAHUN II (2027)	TAHUN III (2028)	TAHUN IV (2029	TAHUN V (2030)
sumber daya pelayanan baik aparatur maupun sarana prasarana	sumber daya pelayanan baik aparatur maupun sarana prasarana	kualitas sumber daya pelayanan baik aparatur maupun sarana prasarana	sumber daya pelayanan baik aparatur maupun sarana prasarana	sumber daya pelayanan baik aparatur maupun sarana prasarana
[6] Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan akan pentingnya *updating* data dan kepemilikan dokumen kependudukan melalui sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	[6] Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan akan pentingnya *updating* data dan kepemilikan dokumen kependudukan melalui sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	[6] Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan akan pentingnya *updating* data dan kepemilikan dokumen kependudukan melalui sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	[6] Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan akan pentingnya *updating* data dan kepemilikan dokumen kependudukan melalui sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	[6] Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan akan pentingnya *updating* data dan kepemilikan dokumen kependudukan melalui sosialisasi, komunikasi, informasi, edukasi terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
[7] Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan urusan administrasi kependudukan ke pemerintah pusat sebagai upaya pencapaian target kinerja dengan kualitas "sangat baik"	[7] Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan urusan administrasi kependudukan ke pemerintah pusat sebagai upaya pencapaian target kinerja dengan kualitas "sangat baik"	[7] Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan urusan administrasi kependudukan ke pemerintah pusat sebagai upaya pencapaian target kinerja dengan kualitas "sangat baik"	[7] Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan urusan administrasi kependudukan ke pemerintah pusat sebagai upaya pencapaian target kinerja dengan kualitas "sangat baik	[7] Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan urusan administrasi kependudukan ke pemerintah pusat sebagai upaya pencapaian target kinerja dengan kualitas "sangat baik"
[8] Peningkatan koordinasi, konsultasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggara urusan adminduk capil di kab/kota	[8] Peningkatan koordinasi, konsultasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggara urusan adminduk capil di kab/kota	[8] Peningkatan koordinasi, konsultasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggara urusan adminduk capil di kab/kota	[8] Peningkatan koordinasi, konsultasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggara urusan adminduk capil di kab/kota	[8] Peningkatan koordinasi, konsultasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggara urusan adminduk capil di kab/kota
[9] Menciptakan inovasi yang mudah digunakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan adminduk capil	[9] Menciptakan inovasi yang mudah digunakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan adminduk capil	[9] Menciptakan inovasi yang mudah digunakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan adminduk capil	[9] Menciptakan inovasi yang mudah digunakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan adminduk capil	[9] Menciptakan inovasi yang mudah digunakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan adminduk capil
[10] Peningkatan fasilitasi/kerjasa ma lintas instansi dalam melaksanakan pelayanan bagi penduduk yang rentan adminduk capil	[10] Peningkatan fasilitasi/kerjasa ma lintas instansi dalam melaksanakan pelayanan bagi penduduk yang rentan adminduk capil	[10] Peningkatan fasilitasi/kerjasa ma lintas instansi dalam melaksanakan pelayanan bagi penduduk yang rentan adminduk capil	[10] Peningkatan fasilitasi/kerjasa ma lintas instansi dalam melaksanakan pelayanan bagi penduduk yang rentan adminduk capil	[10] Peningkatan fasilitasi/kerjasa ma lintas instansi dalam melaksanakan pelayanan bagi penduduk yang rentan adminduk capil

Sumber data: Data olahan

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi dan penahapan renstra perangkat daerah yang ditetapkan sebagai arah untuk mewujudkan tujuan/sasaran, memerlukan arah kebijakan yang terukur untuk kinerja dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka lokus utama pengimplementasian program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Sumatera Barat dan instansi pemerintah/non pemerintah tingkat provinsi dalam rangka pelayanan urusan aministrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Terkait dengan hal ini, arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Renstra periode Tahun 2025-2029 adalah dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Keselarasan Visi-Misi Pembangunan Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Misi 8: Tata Kelola Pemerintah Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif			
Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi			
TUJUAN RENSTRA PD URUSAN ADMINDUK CAPIL	SASARAN RENSTRA PD URUSAN ADMINDUK CAPIL	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan untuk semua kebutuhan	Mengupayakan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dalam koridor peraturan perundangundangan	[1] Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			[2] Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			[3] Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			[4] Penyediaan Profil Kependudukan
	Meningkatnya penduduk yg memiliki dokumen kependudukan	Mengupayakan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan administrasi kependudukan baik secara manual /off line maupun on line/ digital	[1] Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			[2] Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
			[3] Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
			[4] Pelayanan Pencatatan Sipil
			[5] Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
			[6] Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Sumber data: Data

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2025-2029	Ket
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani	1. Digitalisasi Pelayanan dan Partisipasi Publik 2. Peningkatan Kapasitas dan Budaya Kerja Aparatur. 3. Desain Pelayanan Berorientasi Pengguna (Citizen-	1. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Penyelenggaraan 3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2025-2029	Ket
		Centric). 4. Inovasi Berkelanjutan dan Adaptabilitas. 5. Penguatan Akuntabilitas danTransparansi.	Informasi Administrasi Kependudukan 5. Penyediaan Profil Kependudukan 6. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 7. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 8. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan 9. Pelayanan Pencatatan Sipil 10. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 11. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Urusan dministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Upaya mengatasi permasalahan yang akan diselesaikan melalui rangkaian perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan dalam bentuk tujuan/sasaran perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan dari rangkaian pembangunan dari tingkat pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan daerah maka dibutuhkan program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dieksekusi dalam setiap tahun periode renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka program prioritas pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan program penunjang urusan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk;
b. Program Pencatatan Sipil;
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, dan
e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Perwujudan yang lebih kongkrit dari 6 (enam) program urusan dan penunjang urusan akan diaktualisasikan ke dalam bentuk kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing program tersebut.

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi Kependudukan			
		Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan untuk semua kebutuhan	*Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan*	Sasaran prog (outcome) Meningkatn ya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Perekaman ktp el	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
		Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	*Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan*		Persentase Kepemilikan Kartu keluarga	
			Persentase penduduk yang memiliki		Persentase Kepemilikan Identitas	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan
			dokumen pendaftaran penduduk : *1. Persentase perekaman kt pel* *2. Kepemilikan kk* *3. Kepemilikan ikd* *4. Kepemilikan kia* *Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil :* *1.persentase kepemilikan dok akta perkawinan* *2. persentase kepemilikan dok akta perceraian* *3. . persentase kepemilikan dok akta kelahiran* *4. . persentase kepemilikan dok akta kematian*		Kependudukan Digital	
				Sasaran keg : Meningkatn ya kualitas ,kuantitas layanan pendaftaran penduduk		Keg. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
				Sasaran prog (outcome) Meningkatn ya kualitas layanan pencatatan sipil	1.persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Program Pencatatan Sipil
					2. persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	
					3. persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	
					4. . persentase	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan
					akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	
				Sasaran keg : Meningkatn ya kualitas ,kuantitas layanan Pencatatan Sipil		Keg. Pelayanan Pencatatan sipil
				Sasaran prog : Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yg dimanfaatkan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Jumlah perangkat siak yang memenuhi staki iso 27001		Keg. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Terlaksana nya Pemanfaatan Data Peristiwa Kependuduk an	Jumlah Opd pengguna yg menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Cakupan pengelolaan profile kependudukan	Program Pengelolaan Profile Kependudukan
				Sasaran keg. Jumlah buku profile yang dicetak		Keg. Penyusunan Profile Kependudukan

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN ADMNISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK															
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	30 %	35 %		40 %		45%		55 %		75%		80 %		
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	62 %	65 %		70 %		75 %		76 %		78%		80 %		
Pelayanan Pendaftaran Penduduk		98 %	98,4 %	150.000.000	98,75%	200.000.000	98,80%	250000000	99%	2750000000	99,4%	280000000	99,5%	285000000	
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	4	150.000.000	4	200.000.000	4	230.000.000	4	250.000.000	4	255.000.000	4	260.000.000	
Penataan Pendaftaran Penduduk		98 %	98,4 %	150.000.000	98,75%	200.000.000	98,80%	250000000	99%	2750000000	99,4%	280000000	99,5%	285000000	
Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP-EL, Formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-EL, Formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	2	2	150.000.000	2	200.000.000	2	250000000	2	255.000.000	2	260.000.000	2	265.000.000	

PROGRAM PENCATATAN SIPIL															
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	250000000	100%	2750000000	100%	2750000000	100%	275000000	
	persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Pelayanan Pencatatan sipil		100%	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	250000000	100%	2750000000	100%	2750000000	100%	275000000	
Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4	4	150.000.000	4	160.000.000	4	180.000.000	4	185.000.000	4	200.000.000	4	225.000.000	
Pembinaan dan pengawasan Penyelengaraan Pencatatan Sipil		100%	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	250000000	100%	2750000000	100%	2750000000	100%	275000000	
Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan bimtek	4	4	150.000.000	100%	200.000.000	100%	250000000	100%	2750000000	100%	2750000000	100%	275000000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN															

Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yg dimanfaatkan	47,22%	50%	150000000	22	150000000	24	150000000	26	150000000	28	150000000	30	150000000	
Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		17	18	20.000.000	22	25.000.000	24	28.000.000	26	30.000.000	28	32.000.000	30	35.000.000	
Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Opd pengguna yg menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	17	18	20.000.000	22	25.000.000	24	28.000.000	26	30.000.000	28	32.000.000	30	35.000.000	
Komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan Masyarakat	Dua jenis informasi yang diperoleh masyarakat	2	2	15.000.000	2	20.000.000	2	22.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFILE KEPENDUDUKAN															
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Cakupan pengelolaan profile kependudukan	1 buku	1 buku	25.000.000	1 buku	25.000.000	1 buku	25.000.000	1 buku	25.000.000	1 buku	25.000.000	1 buku	25.000.000	
Penyusunan Profil Kependudukan		1 buku	1 buku	25.000.000	1 buku	25.000.000	1 buku	25.000.000	1 buku	25.000.000	1 buku	25.000.000	1 buku	25.000.000	
Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah buku profile yang dicetak.	1 buku	1 buku	25.000.000	1 buku	25.000.000	1 buku	25.000.000	1 buku	25.000.000	1 buku	25.000.000	1 buku	25.000.000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran	5	5	3.635.556.159		3.700.000.000		3.750.000.000		3.760.000.000		3.765.000.000		3.780.000.000	
Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6Dok	6dok	10.000.000	6Dok	15.000.000	6Dok	20.000.000	6Dok	25.000.000	6Dok	27.000.000	6Dok	30.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase Koordinasi Penyusunan Rencana Program,Anggaran, Evaluasi,dan Pelaporan	6Dok	6dok	10.000.000	6Dok	15.000.000	6Dok	20.000.000	6Dok	25.000.000	6Dok	27.000.000	6Dok	30.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2	2	2.838.670.206	2	2.840.670.206	2	2.845.670.206	2	2.850.670.206	2	2.855.670.206	2	2.860.670.206	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	12	12	2.815.990.706	12	2.850.990.706	12	2.860.990.706	12	2.880.990.706	12	2.885.990.706	12	2.890.990.706	
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	1	1	22.679.500	1	23.000.000	1	25.000.000	1	28.000.000	1	30.000.000	1	32.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		5	5	170.755.953	5	175.755.953	5	180.755.953	5	185.755.953	55	190.755.953	5	200.755.953	
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan Bangunan kantor	Jumlah paketb komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1paket	1	6.002.500	1	7.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000	

Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	1	112.012.053	1	115.012.053	1	120.012.053	1	125.012.053	1	130.012.053	1	135.000.000	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	1	23.222.400	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1dok	1dok	3.600.000	1dok	4.000.000	1dok	5.000.000	1dok	6.000.000	1dok	7.000.000	1dok	8.000.000	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72	72	25.919.000	72	28.000.000	72	30.000.000	72	35.000.000	72	36.000.000	72	40.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2laporan	2laporan	594.300.000	2laporan	596.500.000	2laporan	598.000.000	2laporan	600.000.000	2laporan	655.000.000	2laporan	680.000.000	
Penyediaan jasa komunikasi , sumber air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber air dan listrik	2	2	62.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	2	75.000.000	2	78.000.000	2	80.000.000	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12lap	12	532.300.000	12	555.000.000	12	560.000.000	12	570.000.000	12	580.000.000	12	590.000.000	
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		1	1	31.830.000	1	35.000.000	1	36.000.000	1	38.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	1	31.830.000	1	35.000.000	1	36.000.000	1	38.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	

Tabel. 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas	Outcome		Kegiatan / Sub Kegiatan	KET
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Sasaran prog (outcome) Meningkatn ya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Perekaman ktp el		
		Persentase Kepemilikan Kartu keluarga		
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital		
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		
	Sasaran keg : Meningkatn ya kualitas ,kuantitas layanan pendaftaran penduduk		Keg. Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Sasaran prog (outcome) Meningkatn ya kualitas layanan pencatatan sipil	1.persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
		2. persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
		3. persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
		4. . persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
	Sasaran keg : Meningkatn ya kualitas ,kuantitas layanan Pencatatan Sipil		Keg. Pelayanan Pencatatan sipil	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Sasaran prog : Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yg dimanfaatkan		
	Sasaran keg. Jumlah perangkat siak yang memenuhi staki iso 27001		Keg. Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
	Terlaksana nya Pemanfaatan Data Peristiwa Kependuduk an	Jumlah Opd pengguna yg menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFILE KEPENDUDUKAN	Sasaran prog : Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Cakupan pengelolaan profile kependudukan		
	Sasaran keg. Jumlah buku profile yang dicetak		Keg. Penyusunan profile kependudukan	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Poin utama untuk menganalisa keberhasilan/kegagalan perangkat daerah dalam mengelola seluruh sumber daya yang ada untuk merealisasikan tujuan/sasaran yang telah ditetapkan melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah adalah:

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini yaitu:

a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Renstra, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
b. Bidang kewenangan,tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraanakuntabilitas kinerja;
d. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesisifik,dapat dicapai,relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

Dari uraian diatas dan rangkuman kondisi saat ini dan harapan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 5 (lima) tahun ke depan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	nilai	Sangat baik (90)	Sangat baik (90,50)	Sangat baik (91)	Sangat baik (91,50)	Sangat baik (92)	Sangat baik (92,50)	Rumusan tujuan IKA merujuk pada Inmendagri 2 Tahun 2025 dan Rancangan Renstra Kemendagri
2	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	Stakeholder	36,11 (13)	48,38 (15)	54,83 (17)	61,29 (19)	77,41 (24)	100 (31)	diukur berdasarkan Jumlah permintaan/pemanfaatan data kependudukan
3	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	persen tase	94,25 %	94,40 %	44,17 %	47,08 %	50,00 %	52,92 %	DKB Ditj Dukcapil Kemendagri

4.	Persentase penduduk yang memiliki dokumen Pendaftaran penduduk 1. Perekaman kt pel 2. Kepemilikan kk 3. Kepemilikan indentitas kependudukan digital (IKD) 4. Kepemilikan KIA Persentase penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil 1. Kepemilikan dokumen akta perkawinan 2. Kepemilikan akta cerai 3. Kepemilikan Akta Kelahiran 4. Kepemilikan Akta Kematian	persen tase	98,4% 99% 35% 65% 100% 100% 100% 100%	98,75% 99,1% 40% 70% 100% 100% 100% 100%	98,80% 99,5 % 45% 75% 100% 100% 100% 100%	99% 99,6% 55% 76% 100% 100% 100% 100%	99,4% 99,75% 75% 78% 100% 100% 100% 100%	99,5% 99,5% 80% 80% 100% 100% 100% 100%	
5	Nilai Lakip	Nilai	*A (80,05)*	*A (80,10)*	*A (80,15)*	*A (80,20)*	*A (80,25)*	*A (80,30)*	Nilai evalua LKjIP
6	Jumlah Inovasi yang diterapkan		*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	SKM
7	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	*A (80,05)*	*A(80,05)*	*A (80,15)*	*A(80,20)*	*A (80,25)*	*A (80,30)*	LKjIP

Sumber data: Data Olahan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pada tahapan Rancangan sebagaimana yang telah ditetapkan pada :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang disurvei}}{\text{Jumlah penduduk yang di survei}}$ x 100%	%	90%
2	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menfaatkan Data Kependudukan}}{\text{Jumlah OPD}}$ x 100%	%	100%
3	Persentase Perekaman ktp el	$\frac{\text{KTP yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk}}$ x 100%	%	
4	Persentase Kepemilikan KK	$\frac{\text{KK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan}}$ x 100%	%	
5	Persentase Kepemilikan IKD	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki Identitas Kependudukan Digital (Akumulasi dari data seluruh kabupaten/kota)}}{\text{Total Penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP}}$ x100%	%	
6	Persentase Kepemilikan KIA	$\frac{\text{Jumlah Anak yang Memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak wajib KIA}}$ x100%	%	
	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{\text{Akta kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan yang tercatat dan melaporkan}}$ x 100%	%	18%
8	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{\text{Akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa Perkawinan yang tercatat dan melaporkan}}$ x 100%	%	18%
9	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{\text{Akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa perceraian yang tercatat dan melaporkan}}$ x 100%	%	17%
10	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	$\frac{\text{Akta kelahiran yang diterbitkan}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 17 tahun}}$ x 100%	%	17%
11	Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun.	$\frac{\text{Jumlah Data Kependudukan yang disusun}}{\text{Dua Dokumen}}$ x100%	%	17%

12	Nilai Lakip	$\frac{\text{Realisasi Keuangan}}{\text{Pagu Anggaran}}$ x100%	%	
13	Jumlah Inovasi yang Diterapkan	$\frac{\text{Inovasi}}{\text{Jumlah Inovasi yang diterapkan}}$ x100%	%	
14	Persentase Capaian Kinerja Perangkat	$\frac{\text{Capaian Kinerja perangkat daerah}}{\text{Jumlah Capaian Kinerja}}$ x100%	%	

Pada indikator IKU dan IKK, terdapat perubahan definisi operasional sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab III, dan khusus untuk IKK sampai saat ini masih menunggu peraturan perundang-undangan terbaru yang akan mengatur Indikator Kinerja Kunci ini.

BAB V
PENUTUP

5.1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD

Rancangan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029, merupakan tahap kedua dalam mencapai rumusan final/penetapan Renstra yang menjadi panduan utama dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan/sasaran dinas dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 telah dioptimalkan dalam koridor peraturan perundang-undangan terkait perencanaan sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I dan selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan di level yang lebih tinggi, diantaranya:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasioanal Tahun 2025-2045;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
3. Rancangan Renstra Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
5. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah kabuapten kepulauan mentawai Tahun 2025-2029; dan
6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Daerah kabuapten kepulauan mentawai Tahun 2025-2029.

Sebelum ditetapkan sebagai dokumen resmi perencanaan perangkat daerah tahun 2025-2029, rancangan ini akan terus berproses di setiap tahapannya yakni tahapan rancangan akhir yang disertai dengan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), revisi berdasarkan hasil reviu, dan diakhiri dengan penetapan. Disetiap proses tersebut akan dilakukan segala penyesuaian terhadap dinamika baik dari segi kebijakan maupun perubahan peraturan perundang-undangan yang terbit selama proses penyusunan renstra ini.

5.2 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko di perangkat daerah mengacu pada serangkaian prosedur dan kebijakan yang diatur untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang mungkin mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, manajemen risiko menjadi salah satu tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Manajemen risiko pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan kebutuhan yang mendasar untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif, perangkat daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa Rancangan ini merupakan langkah lanjutan, sehingga dibutuhkan koordinasi serta kolaborasi berbagi pihak baik di internal Dinas Kependudukan maupun instansi pemerintah lainnya di tingkat pusat, pemerintah daerah yang mempunyai wewenang perencanaan dan pengelola urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil demi menghasilkan dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 yang dapat diandalkan sebagai acuan kinerja dinas untuk 5 (lima) tahun mendatang.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 4

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029..... 37

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029..... 38

3.3 Strategi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029..... 38

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029..... 40

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program 43

4.2 Uraian Kegiatan 46

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif..... 59

4.4 Uraian Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 93

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana 95

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK 99

BAB V PENUTUP 102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	15
Tabel 2.2	*Bazeting* PNS DPMDP2KB Berdasarkan Eselon dan Golongan Tahun 2025	15
Tabel 2.3	Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan	16
Tabel 2.4	Keadaan Alokasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2020-2024	17
Tabel 2.5	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana DPMDP2KB	17
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Pelaksanaan Program OPD	24
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024	26
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan alasan Pembangunan daerah	27
Tabel 2.9	Faktor penghambat dan pendorong DPMDP2KB terhadap pencapaian visi,misi dan program kepala daerah	30
Tabel 2.10	Permasalahan Pelayanan DPMDP2KB berdasarkan telaah rencana tata ruang wilayah beserta factor penghambat dan pendorong	31
Tabel 2.11	Permasalahan pelayanan OPD berdasarkan analisis KLHS	34
Tabel 2.12	Tabel relevansi potensi, permasalahan dan isu strategis OPD	34
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029	37
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renstra DPMDP2KB Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029	38
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, dan Strategi DPMDP2KB Tahun 2025-2029	39
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	40
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Renstra DPMDP2KB	40
Tabel 4.1	Indikator Kinerja DPMDP2KB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	43
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	48
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	81
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama	98
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
Gambar 1.2	Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan	4
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai	14

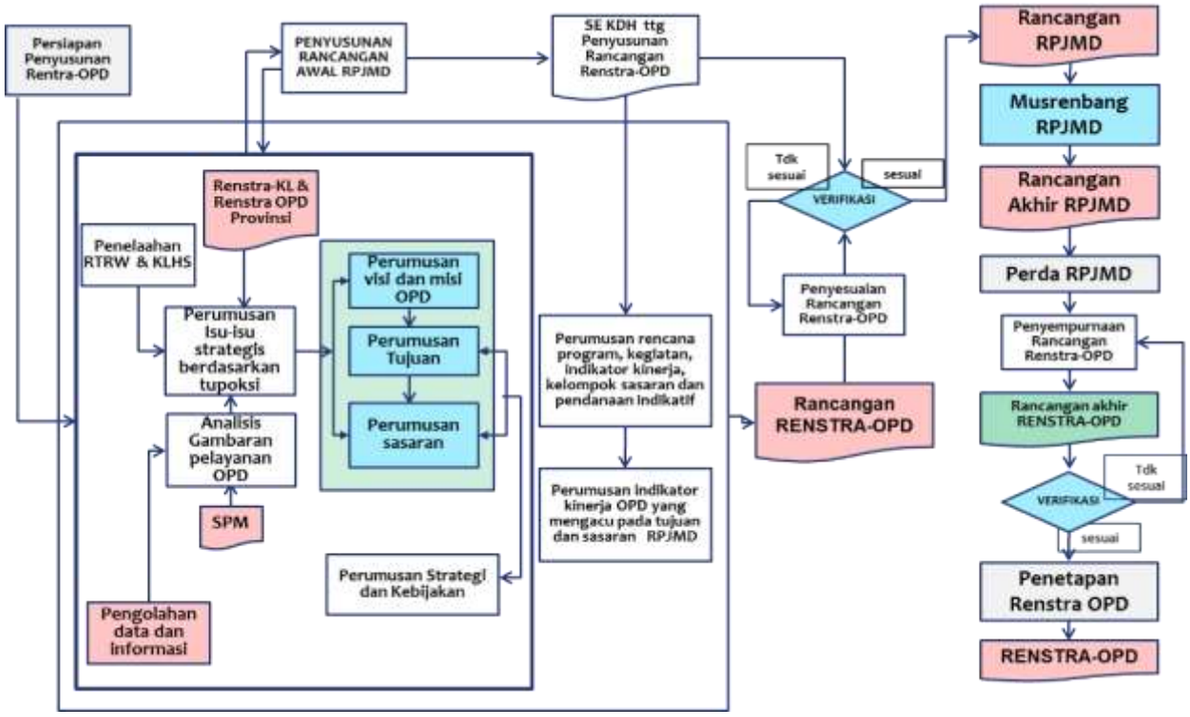
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan dokumen yang bersifat indikatif. Dengan telah terbitnya Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun Renstra Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun berpedoman pada RPJMD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi acuan dalam penilaian kinerja.

Gambar 1.1
Diagram alir Tahapan Penyusunan Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diawali dengan:

1. Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029, meliputi :
    a. Pembentukan Tim penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
    b. Pelaksanaan orintasi penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
    c. Penyusunan Agenda Tim Penyusunan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    d. Analisis Data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir
    e. Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya.
    f. Penyiapan Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah antara lain:
    a. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    b. Perumusan masalah dan isu strategis
    c. Perumusan tujuan dan sasaran.
    d. Perumusan strategi dan arah kebijakan.
    e. Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Rancangan RENSTRA antara lain:
    a. Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempunaan Ranwal Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat daerah/ lintas perangkat daerah.
    c. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPRD, Tokoh Masyarakat, Akademisi, Asosiasi Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perwakilan /Kelompok Perempuan, Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak dan Pemangku Kepentingan terkait.
    d. Hasil Kesepakatan Forum perangkat daerah dituangkan dalam Berita Acara.

e. Rancangan Renstra perangkat daerah disempurnakan berdasarkan berita acara.

4. Rancangan Akhir RENSTRA antara lain:

   a. Perumusan rancangan akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029

   b. Perumusan Rancangan Akhir Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/subkegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tantang RPJMD.

5. Penetapan RENSTRA antara lain:

   a. Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala perangkat daerah kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk dilakukan proses penetapan Restra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

   b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

   c. Penetapan Perkada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentunya memperhatikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah, provinsi maupun pusat. Penyelarasan tersebut terkait dengan pelaksanaan tupoksi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar lebih efektif dan efisien. Hubungan dan keterkaitan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat melalui Gambar 1.2.

Gambar 1.2

Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berpedoman pada RPJMD dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4).
24. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, peraturan dan dokumen strategis lain yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Pedoman dalam fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Untuk dasar penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai penjabaran operasional visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah menyangkut fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merumuskan latar belakang Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis serta dasar hukum yang relevan dan signifikan dan menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bab ini terdiri atas:

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematik Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MAYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bab ini berisi penyajian data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah disertai evaluasi capaian pelaksanaan urusna 5 (lima) tahun terakhir, serta mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah dan mengidentifikasi isu-isu strategis yang dpat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bab ini terdiri atas:

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya dan mengacu pada Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang dijabarkan secara operasinal dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan disertai dengan indikator kinerja dan targetnya yang didukung dengan program prioritas pembangunan daerah, Bab ini terdiri atas:

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Subkegiatan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya, dan menjelaskan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci berserta Target dan Pagu Indikatif untuk pencapaian 5 (lima) tahun kedepan, Bab ini terdiri atas:

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui IKU

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesesuaian antara target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Gambararan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah.

DPMDP2KB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana .
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) yang dipimpin oleh pejabat eselon II b (Kepala Dinas) sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Prigram dan Kuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Usaha dan Teknologi Tepat Guna; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerja Sama dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
4. Bidang Pembinaan Keuangan Desa
   a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Perencanaan Keuangan dan Aset Desa;

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Penatausahaan Keuangan dan Aset; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Desa.

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Keluarga Berencana;

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi.

6. UPTD

Secara rinci tugas dan fungsi DPMDP2KB sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga BErencana antara lain:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas. Sedangkan Fungsinya sebagai berikut :

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;

b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Dinas;

c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditatapkan;

d. pengelolaan data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

e. pengorganisasian penyusunan laporan kinerja Dinas;

f. penyelenggaraan pengelolaan, barang milik Negara/Daerah di lingkup Dinas: dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas :

a) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas;

b) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;

c) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;

d) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas; dan

e) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan.

f) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas; dan

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

a) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di lingkungan Dinas;

b) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;

c) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;

d) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;

e) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas; dan

f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang ini memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. perumusan dan penyusunan kebijakan dan rencana kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. pengoordinasikan kebijakan di bidang Kelembagaan, di bidang Pengembangan Usaha dan Teknologi Tepat Guna, dan di bidang Kerja Sama dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;

c. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa yang mendukung/mendorong pemberdayaan dan pembangunan desa;

d. pelaksanaan kebijakan pembangunan partisipatif dan kerja sama desa;

e. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan

f. pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

g. pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

h. pelaksanaan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang

tugasnya; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Keuangan Desa

   Bidang ini memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan perencnanan keuangan dan aset desa, di bidang pembinaann penatausahaan keuangan dan aset desa, dan di bidang pembinaan dan pelaporan dan penaggung jawab keuangan desa,
   b. penyimpanan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaaan perencanaan keuangan dan aset desa, di bidang pembinaan penata usahaan keuangan dan aset desa dan di bidang pembinaan pelaporan dan penanggung jawab keuangan desa:
   c. penyimpanan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan perencanaan keuangan dan aset desa, di bidang pembinaan pelaporan dan penanggung jawaban keuang desa; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

   Bidang ini memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan keluarga berencana, di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan di bidang data dan informasi;
   b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan keluarga berencana, di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan di bidang data dan informasi;
   c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan keluarga berencana, di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan di bidang data dan informasi; dan
   d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai



2.1.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. Sumber Daya Manusia

Upaya mewujudkan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Kelarga Berencana kurun waktu 5 tahun yang akan datang tentu didukung oleh sumber daya aparatur yang dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Sumber daya manusia menjadi salah satu input yang paling berpengaruh dalam mengelola organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 92 orang, terdiri dari laki-laki 44 orang dan perempuan 48 orang. Berdasarkan status kepegawaiannya, jumlah aparatur PNS berjumlah 27 orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) berjumlah 9 orang.

Tabel 2.1
Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Staf	PPPK	PK	Jumlah
1	Kepala DPMDP2KB	1							1
2	Sekretariat		1	2		6	3	13	25
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		1		2	2	2	2	9
4	Bidang Pembinaan Keuangan Desa		1		3	0	2	2	8
5	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		1		2	5	2	5	15
6	Balai KB (Plkb,Satpam,CS)							34	34
Jumlah		1	4	2	7	13	9	56	92

Sumber data : Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Kelarga Berencana, Kondisi Oktober 2025

Sekretariat memiliki jumlah staf terbanyak diantara jumlah pegawai pada bidang lain, hal ini dinilai masih wajar mengingat tugas operasional dan beban kerja di sekretariat cukup tinggi karena menyangkut pelayanan kepada publik baik itu di lingkungan aparatur maupun di luar Pemerintah Daerah.

Tabel 2.2
Bazeting PNS DPMDP2KB Berdasarkan Eselon dan Golongan Tahun 2025

No.	Eselon	Golongan / Ruang (0rg)												Jumlah
		IV			III				II				I	
		a	b	c	a	b	C	d	a	b	c	d		
1	II.b			1										1
2	III.a		1											1
3	III.b	2						1						3
4	IV	1					1							2
5	Fungsional	1					2	4						7
6	Staf				1	5		3		1		3		13
7	PPPK													9
8	Pegawai Kontrak													56
TOTAL		4	1	1	2	5	3	8	0	1		3	0	92

Sumber data : Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Kelarga Berencana, Kondisi Oktober 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa Golongan golongan IIId di DPMDP2KB merupakan golongan paling banyak berjumlah 8 orang. Golongan nomor dua paling banyak yaitu golongan IIIc sebanyak 3 orang. Golongan paling tinggi IVc berjumlah 1 orang. Golongan IVa berjumlah 4 orang, golongan IVb berjumlah 1 orang, golongan IVc berjumlah 1 orang. Golongan paling rendah yaitu golongan IIb berjumlah 1 orang dan golongan IId berjumlah 3 Orang.

Tabel 2.3
Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Uraian	S2		S1		D3		SLTA/ Sederajat		Jumlah
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1	Kepala DPMDP2KB	1		-		-		-		1
2	Sekretariat	2	2	1		1		8	11	25
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-		3	4	-		-	2	9
4	Bidang Pembinaan Keuangan Desa	1	1	2	1		1	2	0	8
5	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2		9	3	-			1	15
6	Balai KB (Plkb,Satpam,CS)	-		5	7		1	7	14	34
Jumlah (orang)		6	3	20	15	1	2	17	28	92
Persentase (%)		9,47%		36,84%		3,15%		50,52%		

Sumber data : Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, kondisi Oktober 2025

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.3 tingkat pendidikan karyawan DPMDP2KB yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 35 orang (36,84%). Tingkat pendidikan yang tinggi tentunya akan berbanding lurus dengan capaian kinerja yang positif dan selanjutnya akan mempermudah dalam mencapai visi dan misi organisasi. Kebijakan dalam peningkatan kapasitas aparatur di DPMDP2KB juga mengakomodir bagi setiap orang yang ingin mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur baik yang ada di dalam daerah, di luar propinsi ataupun di luar negeri serta mendukung sepenuhnya bagi setiap pegawai yang ingin meningkatkan jenjang pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

B. Anggaran

Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Bidang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan urusan pemerintahan bidang penegendalian penduduk dan keluarga berencana, tentunya didukung dengan anggaran yang memadai. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) alokasi anggaran DPMDP2KB mengalami penurunan, yaitu dari tahun 2020 sebesar Rp.11.117.541.933 menjadi Rp.9.924.454.364 di tahun 2021 penurunan ini disebabkan adanya dampak Covid 19 yang terjadi di Indonesia sehingga anggaran lebih diutamakan untuk pemenuhan kesehatan.

Pada Tahun 2022 sampai 2024 anggaran mengalami kenaikan dan penurunan lagi dengan rincian Pada Tahun 2022

alokasi anggaran DPMDP2KB 9.954.966.66 belanja Operasi 9.863.552.38 terdiri dari (belanja pegawai 3.428.237.956 dan Belanja Barang dan Jasa 6.435.314.433), Belanja Modal 91.414.274. Pada Tahun 2023 alokasi anggaran DPMDP2KB 9.587.161.400 belanja Operasi 9.405.383.400 terdiri dari (belanja pegawai 2.848.581.852. Belanja Barang dan Jasa 6.556.801.548), Belanja Modal 181.778.000. Pada Tahun 2024 alokasi anggaran DPMDP2KB 8.076.151.984 belanja Operasi 8.043.021.984 terdiri dari (belanja pegawai 3.094.866.884 dan Belanja Barang 4.948.155.100), belanja modal 33.130.000. hal ini disebabkan karena adanya efisiensi penggunaan anggaran beberapa program yang dirasionalisasikan karena berkurangnya dana transfer dari Pemerintahan Pusat.

Realisasi belanja daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukan trend yang fluktuatif, pada tahun tahun 2020 sampai 2024. Pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.114.753.697,- atau 71,98 persen. Tahun 2021 realisasi angaran sebesar Rp. 7.762.205.023,-. Realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 7.949.426.511,00 atau 79,85 persen. Realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 7.942.239.539,00 atau 82,84 persen. Realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 6.804.049.687,00 atau 84,25 persen.

Tabel 2.4
Keadaan Alokasi Anggaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-(juta rupiah)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Belanja	11.117.541.933	9.924.454.364	9.954.966.663	9.587.161.400	8.076.151.984,00	3.114.753.697,00	7.762.205.023,00	7.949.426.511,00	7.942.239.539	6.804.049.687
Belanja Operasi	9.934.311.933	9.666.746.796	9.863.352.389	9.405.383.400	8.043.021.984	2.316.607.848	7.515.350.105	7.870.608.777	7.769.761.539	6.772.036.327
Belanja Modal	1.183.230.000	258.707.568	91.414.274	181.778.000	33.130.000	798.145.849	246.854.918	78.817.734	172.478.000	32.013.360

Sumber data: Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2020-2024

Peningkatan alokasi anggaran DPMDP2KB dikarenakan oleh kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMDP2KB sebagai fungsi penunjang perencanaan, peningkatan alokasi anggaran juga berbanding lurus dengan perencanaan yang telah diprogramkan.

C. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang tugas dan fungsi DPMDP2KB, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung seluruh pelayanan di DPMDP2KB. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga sebagai input atau *capital* dalam proses pelayanan DPMDP2KB untuk mencapai tujuan organisasi.

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana DPMDP2KB

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.731 m^2	Baik
2.	Mesin Ketik Manual Standard	3	Rusak Berat
3.	P.C Unit	9	Baik
4.	P.C Unit	3	Kurang Baik

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
5.	P.C Unit	44	Rusak Berat
6.	Note Book	10	Rusak Berat
7.	Lap Top	3	Baik
8.	Lap Top	2	Kurang Baik
9.	Lap Top	15	Rusak Berat
10.	Printer	7	Baik
11.	Printer	46	Rusak Berat
12.	Televisi	2	Rusak Berat
13.	Overhead Projector	2	Baik
14.	Layar Film/Projector	5	Baik
15.	Camera Video	3	Rusak Berat
16.	Handy Cam	3	Rusak Berat
17.	Camera Electronic	3	Rusak Berat
18.	Telephone Mobile	13	Resak Berat
19.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	10	Rusak Berat
20.	Sound System	10	Baik
21.	Global Positioning System	1	Kurang Baik
22.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Rusak Ringan
23.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Baik
24.	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	Baik
25.	Sepeda Motor	30	Baik
26.	Sepeda Motor	3	Kurang Baik
27.	Sepeda Motor	8	Rusak Berat
28.	Speed Boat / Motor Tempel	3	Rusak Berat
29.	Perahu Penyeberangan	3	Rusak Berat
30.	Rak Besi	10	Rusak Berat
31.	Brandkas	1	Rusak Berat
32.	Lemari Kayu	11	Baik
33.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	Baik
34.	Filing Cabinet Besi	1	Baik
35.	Lemari Kaca	4	Baik
36.	Lemari Penyimpan	20	Baik
37.	Meja 1/2 Biro	10	Baik
38.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
39.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Baik
40.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	Baik
41.	Meja Kerja Pejabat lain-lain	21	Baik
42.	Meja Panjang	1	Baik
43.	Meja Kerja Kayu	2	Baik
44.	Meja Rapat	20	Baik
45.	Sofa	3	Baik
46.	Bangku Tunggu	1	Baik
47.	Kursi Kayu	1	Baik
48.	Kursi Besi/Metal	11	Baik
49.	Kursi Fiber Glas/Plastik	40	Baik
50.	White Board	5	Baik
51.	Electric Generating Set	6	Baik
52.	Mesin Pemotong Rumput	3	Rusak Berat
53.	A.C. Split	5	Baik
54.	A.C. Split	3	Rusak Berat
55.	A.C. Window	3	Baik
56.	Kompas	1	Baik
57.	Papan Nama Instansi	2	Baik
58.	Transportable Water Pump	1	Baik
59.	Transportable Water Pump	2	Rusak Berat
60.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	144 m^2	Baik
61.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	64 m^2	Baik

Sumber data : Sektretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kondisi Oktober 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Secara garis besar kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal. Beberapa indikator kinerja pelayanan telah mencapai target kinerja dan ada beberapa pencapaian kinerja dibawah target yang direncanakan.

Pencapaian kinerja pelayanan pada tahun 2020-2024 ini mengacu kepada sasaran dan indikator pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024 secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Dari 5 (lima) sasaran strategis yang telah disepakati dalam penetapan kinerja DPMDP2KB Tahun 2024, sebagian besar telah mencapai kinerja sebagaimana yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program yang ditetapkan, namun harus juga diakui bahwa masih terdapat pencapaian kinerja sasaran maupun kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Secara lengkap capaian kinerja sasaran strategis masing-masing bagian/bidang dapat diuraikan secara kuantitatif sebagai berikut :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja Program Administrasi Pemerintahan Desa adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa dan kinerja Aparatur Desa. Capaian Kinerja Program dapat dilihat melalui capaian kinerja indikator kegiatan. Pencapaian sasaran di atas diperoleh melalui sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bidang Keuangan Desa antara lain:

a. Terlaksananya Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 84.982.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 72.509.000,- (85.32%), Target yang ingin dicapai tersusunnya RPDes dan RAPBDes yang tepat waktu dan tepat sasaran. Dari 43 desa yang ada semua mendapat fasilitasi dan pendampingan dakam penyusunan RPDes dan RAPBDes.

b. Terlaksananya Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 89.173.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.374.157,- (53.13%), Target yang ingin dicapai terlaksananya optimalisasi pencairan Dana Desa untuk menunjang pembangunan Desa. Dari 43 desa

yang ada semua terfasilitasi, walau hanya 23 desa yang bisa di datangi ke lokasi. Dana Desa yang disalurkan terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Dana Desa.

c. Terlaksananya Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 45.626.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 45.425.200,- (99.56%), Target yang ingin dicapai terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Desa sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam pengelolaan Pemerintahan Desa. Pelatihan diadakan di 4 lokasi yaitu Kecamatan Sipora Utara, Sipora Selatan, Siberut Selatan dan Siberut Barat. Dari 657 orang Aparatur Desa yang ditargetkan, sebanyak 352 orang telah mendapatkan pelatihan.

d. Terlaksananya Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 5.384.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.364.700,- (99.63%), target yang ingin dicapai terlaksananya pendampingan terhadap Pemerintahan Desa dalam membuat Rancangan Peraturan Desa. Dari 10 Ranperdes yang ditargetkan, 6 Ranperdes dapat dituntaskan dalam tahun 2024.

e. Terlaksananya Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 23.019.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.001.800,- (99.92%), Target yang ingin dicapai meningkatnya keberdayaan BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pendampingan pendaftaran BUMDes secara online di Pusat. Kegiatan dilaksanakan di 3 lokasi yaitu Kecamatan Sipora Selatan, Siberut Selatan dan Sikakap. Dari 30 BUMDes yang ditargetkan, 15 BUMDes telah mendapatkan pendampingan. Selain itu juga dilakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap 2 BUMDes Bersama yaitu Bumdesma Jaya Madobag di Siberut Selatan yang bergerak di penampungan hasil pertanian dan Bumdesma Simako Jaya Mandiri di Kecamatan Sikakap yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Bumdesma merupakan kerjasama antar Desa, bisa terdiri dari dua atau beberapa Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola secara bersama.

f. Terlaksananya Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 59.999.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 59.743.300,- (99.57%), Target yang ingin dicapai terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Aparatur Desa sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam mengelola aset Desa dengan kegiatan dilakukan sebanyak 2 kali.

g. Terlaksananya Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 49.137.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.137.900,- (98.29%), target yang ingin dicapai terlaksananya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM Anggota BPD agar lebih memahami tugas dan wewenang yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam menampung aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja Pemerintahan Desa. Pelatihan diadakan

di 4 lokasi yaitu Kecamatan Siberut Barat, Siberut Selatan, Siberut utara dan Sipora Selatan. Dari 265 orang Anggota BPD yang ditargetkan, sebanyak 180 orang telah mendapatkan pelatihan.

h. Terlaksananya Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 39.355.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.095.117,- (99.34%), target yang ingin dicapai terlaksananya terfasilitasinya desa dalam menetapkan batas Desa.

2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pencapaian sasaran di atas diperoleh melalui sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain:

a. Terlaksananya Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 86.165.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 84.622.700,- (98.21%), target yang ingin dicapai adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah fasilitasi pembentukan Lembaga Adat Desa di Kecamatan Sipora Utara dan Sipora Selatan. Selain itu juga sudah dilakukan pelatihan untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Kecamatan Sipora Utara dan Sipora Selatan. Dari 33 lembaga kemasyarakatan yang ada, semua sudah mendapatkan pembinaan tahun ini.

b. Terlaksananya Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggara gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 234.612.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 232.012.876,- (98.89%), target yang ingin dicapai adalah meningkatnya keberdayaan Dasa Wisma selaku ujung tombak dari pemberdayaan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pembinaan Dasa Wisma telah dilakukan sebanyak 2 kali di Desa Sipora Jaya dan Desa Bukit Pamewa. Dari 16 Dasa Wisma yang ditargetkan, 14 Dasa Wisma telah mendapatkan pembinaan. Selain itu kader TP PKK juga telah mengikuti Jambore kader yang diadakan di Kota Bukittinggi.

3. Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten bertujuan untuk mendapatkan data keluarga akseptor KB yang akurat. Pencapaian sasaran, diperoleh melalui sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

a. Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 43.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- (41.10%), kegiatan yang terlaksana berupa pembayaran biaya transportasi petugas pencatatan dan pelaporan KB di fasilitas pelayanan kesehatan

pada 15 Puskesmas selama 12 Bulan. Target yang ingin dicapai adalah tersedianya data pelayanan KB di Faskes yang terupgrade.

b. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 120.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.354.133,- (39.46%). Hasil yang ingin dicapai adalah tersedianya data register pengendalian lapangan serta data dasar Program Bangga Kencana dan penurunan *stunting*. Kegiatan berupa pembayaran honorarium tenaga PLKB sebagai pengolah data lapangan. Pelaksanaan kegiatan tidak maksimal karena tidak meratanya tenaga PLKB di Desa. Pada tahun 2024 tercatat jumlah KB aktif adalah 6.808 orang dari 12.385 pasangan usia subur.

4. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Program pembinaan keluarga berencana bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, peningkatan derajat kesehatan dan mutu layanan KB. Pencapaian sasaran, diperoleh melalui sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

a. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 140.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 108.161.600,- (77.26%). Sasaran dari kegiatan ini adalah calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan dan anak usia 0-59 bulan. Target yang diharapkan adalah teridentifikasinya risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran untuk mencegah kasus yang serupa dan penanganan pada kasus *stunting* yang terjadi. Audit *Stunting* dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan penurunan *stunting*, dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu di Kecamatan Sipora Utara dan Sipora Selatan.

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 496.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 287.231.500,- (57.91%). Target yang diharapkan tersedianya penunjang operasional balai KB selama 1 tahun.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 150.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.400.000,- (37.60%). Hasil yang didapatkan adalah terlaksanannya 49 kali rapat koordinasi tingkat Desa dan Kecamatan serta mini lokakarya dari 100 kali yang ditargetkan.

d. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 100000000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 88794673,- (88.79%). Hasil yang di dapatkan adalah tersosialisasinya Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.

e. Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada *Stakeholders* dan Mitra Kerja yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 104.174.000,- (52.09%). Kegiatan berupa rapat koordinasi antara TPPS, *stakeholder* dan dan mitra terkait dalam penanganan *stunting*. Targetnya rapat koordinasi akan diadakan 10 kali dalam setahun tetapi tahun ini hanya bisa terlaksana sebanyak 5 kali.

   Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 129000000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 94800000,- (73.49%). Dengan target kinerja Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 129 Orang, dengan realisai Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 100 Orang.

f. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 13.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.800.000,- (13.33%). Alokon didistribusikan ke seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Target yang diharapkan adalah tersedianya alat dan obat kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan. Dari 15 puskesmas yang ditargetkan hanya 6 puskesmas yang mendapatkan distribusi alokon.

g. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 223.510.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 116.825.000,- (52.27%). Kegiatan pelayanan pemasangan *implant* pada pasangan usia subur. Dari 703 Pasangan Usia Subur yang ditargetkan, 473 orang telah mendapat pelayanan pemasangan *implant*.

h. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 15.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.463.000,- (21.92%). Pembinaan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Fasyankes dalam upaya peningkatan pelayanan KB serta peningkatan cakupan pencatatan dan pelaporan. Dari 15 puskesmas yang ditargetkan, 5 puskesmas sudah mendapatkan pembinaan.

i. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 3.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- (0%). Hasil yang diharapkan adalah terselenggaranya konvergensi program pada level pimpinan di Kampung KB. Kegiatan ditargetkan 1 kali tetapi tidak terlaksana.

j. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 271.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 140.300.000,- (51.68%). Kegiatan dilaksanakan di Kampung KB, berupa orientasi teknis ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan yang bertujuan untuk

memberikan informasi, pemahaman dan keterampilan kepada peserta dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga. Dari 43 Kampung KB yang ada, 18 Kampung KB telah mendapatkan orientasi teknis.

5. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Pencapaian sasaran, diperoleh melalui sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 300.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 291.276.000,- (97.09%). Kegiatan berupa pengadaan alat bantu penyuluhan yang terdiri dari seperangkat alat permainan edukatif dan media, berisi materi yang yang akan disuluhkan kepada keluarga yang memiliki ibu hamil dan baduta agar meningkatkan penerapan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk menurunkan *prevalensi stunting*. Target pengadaan set permainan sebanyak 25 set tetapi realisasinya 31 set. Hal ini disebabkan karena harga pasar lebih kecil dari pada anggaran sehingga volume barang di perbanyak menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Barang yang ada kemudian didistribusikan ke Poktan BKB.

b. Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko *Stunting* (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 156.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 120.600.000,- (77.31%). Kegiatan berupa pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan pendampingan sasaran beresiko *stunting* dan balita yang dilakukan oleh 52 orang Tim Pendamping Keluarga. Pelaporan disampaikan melalui aplikasi dan manual oleh 42 orang TPK dari 52 tenaga yang ada.

c. Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 171.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 118.500.000,- (69.06%). Kegiatan berupa pendampingan oleh TPK terhadap keluarga beresiko *stunting*. Pendampingan yang diberikan berupa fasilitasi dan edukasi dengan *treatment* dan upaya kesehatan untuk meningkatkan status gizi sebagai upaya pencegahan *stunting*. Dari 52 orang TPK yang ada hanya 42 orang yang aktif.

Capaian kinerja pelaksanaan program dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah berikut ini:

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program OPD

No	Program	Capaian Kinerja (%)
1	Administrasi Pemerintahan Desa	82.73
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	100
3	Pengendalian Penduduk	63
4	Pembinaan Keluarga Berencana	58.56
5	Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	95.18
Rata-rata		79.89

Agar kinerja OPD dapat tercapai, maka dimasa yang akan datang perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja pada perjanjian kinerja perlu diselaraskan kembali, sehingga sinkron dengan program dan kegiatan dengan tetap mengacu pada Renstra.
2. Membangun sinergitas antar bidang dalam menetapkan indikator program dan kegiatan sehingga target kinerja OPD dapat dicapai, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan datang perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam namun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menjadi acuan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang sinergi dan berkelanjutan.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Desa Mandiri	1 Desa	1 Desa	100 %	3 Desa	3 Desa	100%	3 Desa	3 Desa	100%	11 Desa	3 Desa	27%	4 Desa	3 Desa	75 %
		Jumlah Desa Maju	6 Desa	6 Desa	100%	5 Desa	5 Desa	100%	9 Desa	9 Desa	100%	10 Desa	10 Desa	100%	12 Desa	10 Desa	83%
		Jumlah Desa Berkembang	20 Desa	20 Desa	100%	22 Desa	22 Desa	100%	20 Desa	20 Desa	100%	18 Desa	22 Desa	81%	24 Desa	24 Desa	100%
		Jumlah Desa Tertinggal	16 Desa	16 Desa	100%	13	13 Desa	100%	11	11 Desa	100%	4 Desa	8 Desa	50%	3 Desa	6 Desa	200%
2	Meningkatnya Pengelola Sumber Daya Desa	Persentase BUMDes dengan capaian aset > 300 Juta	40 %	5%	12,5%	40%	5%	12,5%	40 %	5%	12,5%	40 %	5%	12,5%	40 %	5%	12,5%
3	Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase pasangan usia subur dengan aktif KB	70 %	40%	70%	70 %	40%	57%	70 %	40%	57%	70%	45%	64%	70%	54 %	77 %
4	Meningkatnya Perencanaan Keluarga Berencana	Rata-rata Usia Kawin Pertama ≥ 19 Tahun	65 %	40%	61%	65 %	45%	69%	65 %	47%	72%	65%	47%	72%	65 %	47%	72%
6	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip	B	B	100%	B	B	100%	B	BB	100%	B	100%	100%	B	B	100%
		Jumlah Inovasi yang ditrapkan	1	0	0%	1	0	100%	2	0	100%	2	0	100%	4	0	0
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	80

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran yang menjadi target koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPMDP2KB, sebagai berikut:

1. KB (termasuk usia reproduksi tingkat akseptor KB, seperti perempuan usia subur).
2. Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, terkait intervensi gizi dan kesehatan.
3. Anak-anak dan remaja, dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak anak.
4. Perempuan dan kepala keluarga, terkait pemberdayaan ekonomi dan perlindungan.
5. Aparatur Desa / kader PKK / kader KB, yang menjadi ujung tombak program di lapangan.
6. Masyarakat rentan / miskin / marginal, penerima manfaat bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, atau akses KB.
7. Keluarga pra-sejahtera, sebagai fokus pengendalian penduduk dan peningkatan kesejahteraan.
8. Pemberdayaan Masyarakat / Desa Kader desa, aparatur desa, kelompok ekonomi local.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai perangkat daerah yang mengurusi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentunya berbagai permasalahan muncul dan menjadi isu/permasalahan daerah juga menjadi permasalahan bangsa. Permasalahan tersebut jika dibiarkan atau tidak ditangani segera maka dalam jangka waktu tertentu akan berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan dan pada akhirnya akan mempengaruhi orientasi dan tujuan pembangunan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

Tabel. 2.8
Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa serta keluarga yang berkualitas.	Masih rendahnya kapasitas dan kemandirian masyarakat.	Rendahnya persentase Desa dengan BUMDes aktif dan berkembang.
			Miniminya Jumlah kelompok masyarakat yang mengembangkan usaha ekonomi produktif.
			Rendahnya persentase masyarakat yang terlibat dalam program

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
			pemberdayaan berbasis Desa.
		Masih rendahnya kualitas tata Kelola Desa.	Rendahnya persentase Desa Mandiri.
			Tingginya persentase Desa tertinggal.
			Rendahnya persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai standar akuntabilitas.
			Minimnya jumlah Desa yang mendapatkan pendampingan/pembinaan pengelolaan keuangan.
			Kurangnya persentase Desa dengan laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai regulasi.
		Masih rendahnya kesejahteraan keluarga dan keluarga berkualitas.	Belum optimal angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR).
			Rendahnya persentase pasangan usia subur peserta KB aktif.
			Rendahnya rata-rata usia kawin pertama.
			Rendahnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).
			Belum optimal Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga).
			Rendahnya persentase keluarga dengan kategori sejahtera (hasil Pendataan Keluarga).
			Tingginya angka *prevalensi stunting* pada balita.
			Rendahnya *Age Spesific Fertility Rate* (ASFR) 15-19 Tahun.
			Rendahnya proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi.
			Rendahnya Indeks Lansia Berdaya.
			Rendahnya Indeks Pengasuhan Keluarga yang dimiliki remaja.
			Rendahnya persentase Kampung Keluarga berkualitas mandiri.

A. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 yaitu “Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera”.

1. Maju: Menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mampu berdiri tegak dan sejajar dengan daerah lain, akselerasi disegala sektor pembangunan, mengejar yang

belum tercapai, memperbaiki yang ada dan meningkatkan apa yang sudah diraih. Begitu juga pembangunan untuk kemajuan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, infrastruktur yang handal, dan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Berdaya Saing: Upaya pembangunan untuk kemajuan di setiap lini pembangunan seiring dengan memastikan kualitas dan mutu sehingga memiliki keunggulan yang dapat dijadikan penggerak pertumbuhan sosial, ekonomi dan budaya. Sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, memiliki kebudayaan yang unik dan bernilai tinggi, dan memiliki keunggulan komparatif (keunggulan yang relatif terhadap daerah lain) dan keunggulan kompetitif (keunggulan yang unik dan sulit ditiru) sehingga Kepulauan Mentawai diperhitungkan dalam kancah persainagan Domestik, Nasional dan Internasional.
3. Sejahtera: Kehidupan Mayarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dalam suasana aman, nyaman, terlindungi dan damai, serta adanya kesempatan yang sama bagi semua untuk berkembang dan maju. Sejahteta ,mencakup pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memiliki kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan yang melibatkan semua orang tanoa diskriminasi, pembangunan manusia yang hakiki.

Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pemnbangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai tTambah, dan Daya Saing Ekonomi Daerah.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana
6. Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia.
7. Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Berkeadilan.
8. Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Tepercaya.

Berdasarkan misi 4 (Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi) merupakan misi Kepala Daerah yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentunya harus berada pada posisi yang penting dalam mendukung dan berkontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.

Tabel 2.9
Faktor Penghambat dan Pendorong DPMDP2KB Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan DPMDP2KB	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Misi 4 Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.		1. Keterbatasan jumlah SDM terutama di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil. 2. Rendahnya Kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan masih rendah. 3. Koordinasi antar lembaga masih belum optimal. Kelembagaan masyarakat di beberapa desa belum berjalan efektif. 4. Regulasi teknis pelaksanaan program sering berubah dan belum adaptif terhadap karakter kepulauan. 5. Keterbatasan anggaran daerah untuk kegiatan non-fisik dan pembinaan Masyarakat serta tingginya Biaya operasional akibat kondisi geografis kepulauan. 6. Sarana prasarana pelayanan KB dan pemberdayaan belum merata di seluruh pulau. 7. Masih adanya pandangan tradisional yang membatasi penerimaan terhadap program KB. 8. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa di beberapa wilayah. 9. Ketergantungan terhadap bantuan pemerintah masih tinggi. 10. Keterbatasan jaringan internet di sebagian wilayah kepulauan. 11. Rendahnya literasi digital aparatur desa dan masyarakat. 12. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis data digital. 13. Kurangnya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program sosial dan pemberdayaan. 14. Belum optimalnya peran dunia usaha dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.	1. Adanya aparatur Dinas PMDP2KB yang memiliki dedikasi dan semangat tinggi melayani masyarakat . 2. Keberadaan kader pemberdayaan dan PLKB yang memahami kondisi sosial budaya lokal. 3. Dukungan dana desa yang dapat digunakan untuk pemberdayaan dan ketahanan sosial-ekologi. 4. Bantuan sarana pelayanan KB dari pemerintah pusat. 5. Program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi lokal. 6. Partisipasi dan Kearifan Lokal Masyarakat Mentawai memiliki nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang kuat. 7. Dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat melalui program prioritas.
	1. Program Penataan Desa 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 5. Program Pengendalian Penduduk 6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 7. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	1. Masih minimnya pemberdayaan Masyarakat desa 2. Masih minimnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam 3. Belum terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk		

B. Telaahan Renstra K/L serta Renstra Dinas Terkait di Provinsi

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa dan Kementrian Desa dan PDTT Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang sinergis dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah peningkatan jumlah Desa mandiri. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sedangkan pembangunan kawasan perdesaan yang merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam 1 (satu) Kabupaten, dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan Desa dan kawasan perdesaan tersebut diarahkan untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa serta memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan yang merupakan mandat yang cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Alokasi Dana Desa melalui APBN yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tentunya akan dapat dioptimal pemanfaatannya apabila didukung dengan berfungsinya kelembagaan desa dan aparatur yang kompeten. Disamping itu sudah terimplementasinya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), terfasilitasinya penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa, terintegrasinya data informasi desa/kelurahan melalui data website Profil Desa dan Kelurahan (Aplikasi Prodeskel) yang terpublikasi secara online.

Sedangkan Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Sumatera Barat untuk renstra tahun 2021 s/d 2026 adalah: Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 5 misi Gubernur Sumatera Barat untuk dilaksanakan dalam periode 5 tahun yang akan datang. Adapaun Misi Gubernur Sumatera Barat yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut : pada misi : 1. “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.”. Pada tujuan 1 yaitu mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing pada sasaran ke 4 “Meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi” dengan strategi Meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan Inovasi pada Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintah Desa. Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020- 2024, serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis.

Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (MCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*UnmetNeed* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age SpeciicFertilityRatio* (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditagetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Rencana Strategis BKKBN 2020-2024 sebagaimana tertera sebelumnya, seluruh Sasaran Strategis diatas dirumuskan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan BKKBN. Agar upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan tersebut dapat tetap terukur, maka BKKBN menggunakan Indikator Dampak "Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)". Sebagaimana dijabarkan pada Bab I (Potensi dan Permasalahan), LPP merupakan indikator yang upaya pencapaiannya harus secara komprehensif melibatkan lintas sektor/bidang serta harus dikoordinasikan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia. Target LPP dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ini mengacu pada Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 dengan interval 5 (lima) tahunan, yang disusun pada tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, dan UNFPA. Ditetapkan target LPP dalam periode 2015-2020 dapat mencapai 1,11 persen, dan diharapkan penurunan LPP dapat mencapai 0,95 persen selama periode 2020-2025.

Telaahan terhadap Renstra K/L serta Renstra Dinas terkait bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra DPMDP2KB Tahun 2025-2029. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra DPMDP2KB dengan Renstra K/L serta Renstra Dinas serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan tata ruang yang mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang peruntukannya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diatur dalam

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, pada pasal 4 disebutkan bahwa penataan ruang wilayah daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan potensi sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis ekonomi kerakyatan, kearifan lokal serta ramah lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana. Pengembangan dan pemanfaatan wilayah yang menjadi suatu proses pembangunan harus sesuai dengan peruntukan struktur ruang yang tersedia.

Tabel 2.10
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;	1. Sebagai sekretariat BKPRD, masih lemahnya koordinasi lintas sektoral terkait penataan ruang. 2. Masih terbatasnya pemahaman dan informasi yang diterima masyarakat terkait rencana tata ruang wilayah.	1. Tumpang tindih kewenangan penataan ruang. 2. Terbatasnya kewenangan DPMDP2KB secara teknis terhadap pemanfaatan ruang pada pelaksanaan pembangunan. 3. Masyarakat tidak begitu peduli dengan RTRW. 4. Belum tersedianya (paripurna) regulasi daerah yang secara detail mengatur rencana pola ruang daerah.	1. Belum terintegrasinya pemanfaatan struktur ruang dan pola ruang daerah.
2	Rencana struktur ruang wilayah;			
3	Rencana pola ruang wilayah;			
4	Penetapan kawasan strategis;			
5	Arahan pemanfaatan ruang wilayah;			
6	Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;			
7	Kelembagaan; dan			
8	Hak, kewajiban, serta peran masyarakat			

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan Daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam kebijakan rencana program tata ruang. Proses perencanaan pembangunan baik itu melalui pendekatan *top-up* dan *bottom-up* tentunya harus memperhatikan dan mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kajian terhadap lingkungan hidup, apakah perencanaan tersebut memberikan dampak negatif kepada lingkungan atau sebaliknya.

Tabel 2.11
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Keterkaitan (*interdependency*); KLHS dapat diselenggarakan secara komprehensif atau holistik.	Belum adanya kesepahaman (koordinasi) lintas sektoral menjadikan KLHS sebagai prinsip dasar dalam proses pembangunan, tentunya dimulai dari perencanaan.	Belum tersedianya regulasi daerah terkait KLHS sebagai pedoman dalam proses perencanaan pembangunan berkelanjutan.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan
2	Keseimbangan (*equilibrium*); keseimbangan antara kepentingan sosial ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, keseimbangan kepentingan pembangunan pusat dan daerah.			
3	Keadilan (*justice*); tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan masyarakat tertentu karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber- sumber alam atau modal atau pengetahuan.			

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan gambaran permasalahan-permasalahan yang dikedepankan untuk diatasi dan berdampak luas. Suatu kondisi atau situasi yang menjadi isu strategis apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau menghilangkan peluang besar untuk meningkatnya pelayanan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 2.12
Tabel Relevansi Potensi, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			Global	Nasional	Regional	
Potensi sumber daya alam (pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata)	Masih minimnya pemberdayaan Masyarakat desa Masih minimnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam	1. Pembangunan daerah harus sesuai dengan peruntukan ruang. 2. Pembangunan yang berkelanjutan	1. Perubahan Iklim 2. Pembangunan yang berkelanjutan 3. Pengendalian karbon	1. Pengelolaan sumber daya alam 2. Pembangunan yang ramah lingkungan 3. Pembangunan wilayah	1. Keterkaitan antar daerah 2. Pengendalian polusi 3. Pengembangan wilayah pesisir 4. Pengolahan limbah	1. Belum optimalnya Digitalisasi Layanan dan Administrasi 2. Mendorong keberadaan Koperasi Merah Putih 3. Belum optimal Pemberdayaan Masyarakat Adat

Berdasarkan Permasalahan dan uraian sebelumnya dapat ditentukan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPMDP2KB Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMDP2KB Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai unsur publik, diharapkan mampu melaksanakan perencanaan pelayanan dengan baik, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Digitalisasi Layanan dan Administrasi

Layanan DPMDP2KB masih banyak manual sehingga kurang cepat, transparan, dan sulit dijangkau masyarakat luas. Kendala tersebut disebabkan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Desa. Rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat. Kesenjangan akses internet yang belum memadai untuk seluruh Desa di Daerah.

Perlunya dukungan kebijakan SPBE dengan tren transformasi layanan publik berbasis digital. Dukungan dana pusat/daerah untuk digitalisasi Desa membangun sistem pelayanan. Hal yang perlu dilakukan untuk menjawah kebutuhan era digitalisasi adalah sebagai berikut:

a. Integrasi dengan portal layanan publik Daerah.

b. Penerapan tanda tangan elektronik dan arsip digital sampai ke Desa.

2. Mendorong Keberadaan Koperasi Merah Putih

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menjadi landasan kebijakan nasional untuk membentuk 70–80 ribu koperasi di seluruh Desa/Kelurahan Indonesia. Program ini mendukung peran koperasi sebagai konsolidator ekonomi Desa misalnya menekan inflasi, meningkatkan harga hasil tani, mengurangi peran tengkulak, serta memperluas akses modal dan inklusi keuangan. Rakor lintas institusi di tingkat pusat dan daerah menggaris bawahi pentingnya keterpaduan pelaksana antar OPD (kemenko pangan, desa, koperasi, sosial, dalam negeri, dll) untuk mencapai target percepatan pembentukan koperasi.

Beberapa dokumen perlu menyelaraskan program ini dengan dokumen perencanaan seperti Renstra dan RPJMD, termasuk penyediaan anggaran, pengaturan kelembagaan, satgas, dan mekanisme pengendalian serta pelaporan.

Berdasarkan konteks di atas, Dinas PMDP2KB yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa merumuskan beberapa isu strategis berikut:

a. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih mendukung Instruksi Presiden melalui pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan, pengesahan koperasi, dan fasilitasi legalitas sesuai target nasional.

b. Penguatan Kelembagaan dan SDM pembentukan satgas atau tim koordinasi di tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten untuk mengawal pembentukan koperasi dan pendampingan teknis dan hukum.

c. Sinergi dengan program sosial terkait mengajak Kader Program Keluarga Harapan (KPM), baik sebagai anggota koperasi maupun sebagai pelaku usaha yang memasok produk ke koperasi Desa.

d. Akomodasi dalam dokumen perencanaan Daerah menyelaraskan program ini dalam Renstra, RPJMD, serta APBD/APBD-P, terutama dengan menyiapkan Perkada pembentukan dan penganggaran koperasi.

e. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan menyusun mekanisme pengawasan pelaksanaan, termasuk pelaporan capaian

pembentukan dan fungsionalitas koperasi kepada DPRD dan OPD terkait.

f. Pemanfaatan Ekonomi Kerakyatan mendorong koperasi menjadi pusat distribusi produk unggulan desa (pertanian, jasa, kerajinan) untuk pemerataan ekonomi lokal dan penguatan ketahanan pangan.

3. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Adat

Isu strategis Renstra DPMDP2KB 2025–2029 terkait pemberdayaan masyarakat adat, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Masih terbatasnya regulasi dan keputusan Daerah terkait pengakuan komunitas adat. Proses identifikasi, verifikasi, dan validasi masyarakat hukum adat belum berjalan maksimal.
2. Keterbatasan kapasitas kelembagaan adat. Lembaga adat di tingkat desa/nagari belum sepenuhnya berfungsi sebagai mitra pemerintah desa. Dukungan anggaran, pembinaan, dan fasilitasi masih minim.
3. Kurangnya integrasi kearifan lokal dalam pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa lebih berorientasi pada aspek fisik-ekonomi, belum optimal melibatkan nilai budaya/adat. Potensi kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan, pertanian, dan sosial belum tergarap maksimal.
4. Ancaman marginalisasi masyarakat adat. Masuknya investasi dan pembangunan infrastruktur sering menimbulkan konflik lahan atau pengurangan ruang hidup masyarakat adat. Rendahnya akses masyarakat adat terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar.
5. Menurunnya regenerasi dan pelestarian nilai adat. Generasi muda kurang terlibat dalam kegiatan adat. Modernisasi dan migrasi berpotensi melemahkan eksistensi adat dan budaya lokal.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat adat dalam perumusan kebijakan. Musrenbang desa/nagari belum secara khusus mengakomodasi suara masyarakat adat. Mekanisme advokasi adat ke tingkat kabupaten masih lemah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis Daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat Daerah tentunya harus selaras dan mendukung visi misi Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun rencana pembangunan. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 (lima) tahun rencana sebagai penjabaran secara teknis pada misi 4 yaitu Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2025-2029

	VISI: KEPULAUAN MENTAWAI MAJU BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”		
Misi	Tujuan		Sasaran
MISI 4: Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyarakat Berbasis Sosial Budaya dan Lingkungan	1	Memperkuat Tatanan Kehidupan Sosial, Budaya Masyarakat
		2	Pembangunan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat yang Inklusif dan berwawasan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan srategis perangkat daerah antara lain sebagai berikut:

a. diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan;
b. untuk mewujudkan misi pembangunan daerah yang dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
c. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
d. dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
e. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Berangkat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, memperhatikan permasalahan yang terpetakan dan isu-isu strategis yang dirumuskan, serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029, sebagaimana diuraikan dalam tabel 3.3 dibawah ini.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029

Sesuai dengan isu strategis yang menjadi pokok perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jangka menengah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra DPMDP2KB Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2025-2029

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Memperkuat Tatanan Kehidupan Sosial, Budaya Masyarakat	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa Serta Keluarga Yang Berkualitas		Indeks Desa Membangun (IDM)	6,98	9,30	11,63	13,95	16,28	20,93
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	62,94	64,64	66,34	68,04	69,74	71,44
		Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat	Persentase desa dengan BUMDes aktif dan berkembang.	40%	45%	50%	55%	60%	65%
			Jumlah kelompok masyarakat yang mengembangkan usaha ekonomi produktif.	40%	45%	50%	55%	60%	65%
			Persentase masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan berbasis desa.	75%	80%	85%	85	90%	90%
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai standar akuntabilitas	90%	90%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan/pembinaan pengelolaan keuangan.	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa
			Persentase desa dengan laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai regulasi	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Pembangunan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat yang Inklusif dan berwawasan lingkungan		Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berkualitas	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)..	2,45%	2,42%	2,40%	2,38%	2,36%	2,34%
			Persentase pasangan usia subur peserta KB aktif.	70%	72%	75%	79%	79%	80%
			Rata-rata usia kawin pertama	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun
			Angka prevalensi stunting pada balita.	14 %	12%	10%	8%	5%	2%
			Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	11,9	11,7	11,5	11,4	11,3	11,2
			Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi	70	71	73	75	76	77
			Indeks Lansia Berdaya	58,69	59,46	60,21	60,52	61,20	61,5
			Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	84,87	86,15	87,33	88,4	88,9	89
			Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	67,29	72,29	77,29	82,29	87,29	92,29
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip	83,65	83,80	83,84	84,00	84,15	84,30
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	1	2	2	2	2	2
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3 Strategi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mencapai tujuan dan sasaran

jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan Daerah serta rencana program prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan yang ditempuh dalam memenuhi tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun rencana adalah:

Tabel 3.3
Strategi DPMDP2KB Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian desa serta keluarga yang berkualitas	Meningkatnya kapasitas dan Kemandirian Masyarakat	• Mengoptimalkan kelembagaan masyarakat desa serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). • Mengembangkan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal. Focus Lokasi adalah masyarakat di 43 Desa
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola desa	• Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. b)Mengembangkan tata kelola pemerintahan desa berbasis teknologi informasi. • Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. • Pengembangan sistem pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi yang transparan dan mudah diakses. • Penguatan fungsi monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Focus Lokasi adalah: Aparatur Desa di 43 Desa
	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berkualitas	• Meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pentingnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga. • Mengintegrasikan program keluarga berencana dengan upaya penurunan stunting • Memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana. • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam program pengendalian penduduk.
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan ketercapaian target kinerja dan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Pentahapan pembangunan daerah dilaksanakan agar menjadi fokus pembangunan mengarah pada prioritas pembangunan setiap tahunnya. Prioritas pembangunan Daerah merupakan tema atau agenda pembangunan

pemerintah Daerah tahunan yang menjadi benang merah capaian antara menuju tujuan sasaran 5 (lima) tahunan dalam RENSTRA melaluli Program pembangunan Daerah tahunan.

Tabel. 3.4
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan dibidang Infrastruktur untuk peningkatan produktifitas menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Penguatan dibidang sumber daya ekonomi untuk peningkatan produktifitas menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Akselarasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan transformasi ekonomi daerah	Penguatan fondasi Transformasi untuk pembangunan berkelanjutan dan berdaya saing	Transformasi Pembangunan untuk pemangunan inklusif dan berkelanjutan

Pentahapan pembangunan 2026-2030 tersebut bukan hanya sekedar urutan waktu melainkan kerangka kerja yang merefleksikan fokus kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara progresif, tahapan tersebut dirancang melalui 5 (lima) fase strategis dimulai dari penguatan pondasi, percepatan, pemantapan, pemerataan hingga memastikan pencapaian target dan persiapan merancang perencanaan pembangunan periode berikutnya dan ini menjadi langkah dan keinginan yang kuat antara pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk pencapaian pembangunan yang lebih baik lagi.

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan penjabaran dari RPJMD Kepala Daerah yang menjabat, serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Renstra menjadi panduan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel. 3.5
Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	OPERSIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian desa serta keluarga yang berkualitas	1. Membangun Budaya Pelayanan Prima. 2. Fondasi Digitalisasi dan Keterbukaan Informasi. 3. Pemantapan Smart Governance dan Partisipasi Inklusif. 4. Konsolidasi Digitalisasi dan Tata Kelola Data Terpadu. 5. Inovasi Berkelanjutan dan Adaptabilitas.	1. Peningkatan kapasitas dan kemandirian Masyarakat 2. Penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Penguatan sistem informasi desa yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. 3. Penguatan fungsi monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa 4. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berkualitas: Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor	

Secara umum, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana akan mencakup hal-hal berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan kemandirian Masyarakat: DPMDP2KB memiliki peran sentral dalam peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Ini meliputi Fasilitasi pembentukan, pengembangan, dan penguatan BUMDes serta Pengembangan inovasi desa berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan pembinaan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan Desa. Meningkatkan frekuensi partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan Desa. Arah kebijakan disini akan fokus pada masayarakat di Desa.
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Desa: DPMDP2KB bertugas dalam hal peningkatan kualitas tata kelola Desa. Arah kebijakan menekankan pada Penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Desa. Penguatan sistem informasi desa yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Daerah.
3. Penguatan fungsi monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa: DPMDP2KB memiliki beran dalam Kebijakan: Penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan berkelanjutan terkait pengelolaan keuangan desa. Penerapan sistem informasi keuangan Desa yang terintegrasi dengan sistem akuntabilitas Daerah. Penguatan koordinasi dengan inspektorat,

camat, dan lembaga pengawas lainnya untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan regulasi. Peningkatan transparansi publik melalui kewajiban desa mempublikasikan APBDes dan realisasi penggunaannya.

4. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berkualitas: DPMDP2KB berperan dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berkualitas. Hal ini meliputi: Pengembangan program Generasi Berencana (Genre) untuk remaja. Peningkatan pembinaan keluarga dalam aspek kesehatan reproduksi dan gizi. Penguatan pelayanan KB berbasis jemput bola melalui posyandu. Optimalisasi peran tenaga lini lapangan serta kader KB di masyarakat. Lokus kegiatan ini adalah: Masyarakat dan Kampung KB.
5. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor: DPMDP2KB memililiki dalam Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor meliputi pembentukan forum koordinasi lintas sektor di bidang pemberdayaan masyarakat, Desa, kependudukan, dan KB. Pengembangan kemitraan dan program tanggung jawab sosial untuk mendukung pemberdayaan masyarakat Desa dan keluarga.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menegah perangkat daerah, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dijabarkan dalam matrik berikut. Tabel 4.4.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD pada Misi 4, yaitu Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.

Tabel 4.1
Indikator Kinerja DPMDP2KB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	6,98	6,98	9,30	11,63	13,95	16,28	20,93
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	-	62,94	64,64	66,34	68,04	69,74	71,44
3	Persentase desa dengan BUMDes aktif dan berkembang	25%	40%	45%	50%	55%	60%	65%
4	Jumlah kelompok masyarakat yang	25%	40%	45%	50%	55%	60%	65%

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	mengembangkan usaha ekonomi produktif							
5	Persentase masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan berbasis desa	75%	75%	80%	85%	85%	90%	90%
6	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai standar akuntabilitas	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
7	Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan /pengelolaan keuangan	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa
8	Persentase desa dengan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai regulasi	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2,68	2,45	2,42	2,40	2,38	2,36	2,34
10	Persentase pasangan usia subur peserta KB aktif	70	72%	72%	75%	79%	79%	80%
11	Rata-rata usia kawin pertama	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun
12	Angka Prevelansi Stunting pada Balita	26,3%	14%	12%	10%	8%	5%	2%
13	Age specific fertility rate (ASFR) 15-19 Tahun	44,5	11,9	11,7	11,5	11,4	11,3	11,2
14	Proporsi KB yang terpenuhi		70	71	73	75	76	77
15	Indeks Lansia Berdaya	57,89	58,69	59,46	60,21	60,52	61,20	61,519
16	Indeks Pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	83,48	84,87	86,15	87,33	88,4	88,9	89
17	Persentase kampung Keluarga berkualitas mandiri	62,29	67,29	72,29	77,29	82,29	87,29	92,29
18	Nilai Lakip	83,65	83,65	83,80	83,84	84,00	84,15	84,30
19	Jumlah Inovasi yang diterapkan	1	1	2	2	2	2	2
20	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.2 Uraian Kegiatan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa. indikator Jumlah desa yang dilakukan penataan. Out Put Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa.
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dilakukan penataan. Out Put Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
   Administrasi Pemerintahan Desa
3. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya . Out Put Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa danLembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
4. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk. Output Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
5. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Out Put Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal. Output Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
7. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB). Out Put Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
8. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. Out Put Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
9. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. Out Put Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
10. Kegitan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Out Put Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

11. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Out Put Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
12. Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR). Out Put Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)
13. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Out Put Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Out Put Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan
15. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Out Put Terlaksananya pelayanan administrasi umum
16. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Out Put Terlaksananya layanan pengadaan barang milik daerah
17. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Out Put Tersedianya Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
18. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Out Put Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah

Tabel 4.2
Program , Kegiatan, Subkegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Meningkatnya tatanan kehidupan sosia, Budaya Masyarakat	Terwujudnya Pemberdayaan dan kemandirian desaserta keluarga yang berkualitas						
		Meningkatnya Kapasitas dan kemandirian masyarakat					
			Meningkatnya kualitas Penataan Desa		Persentase Fasilitasi Penataan Desa Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang dilakukan penataan	Penyelenggaraan Penataan Desa	
					Jumlah Kewenangan Desa yang di fasilitasi	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	
		Meningkatnya kualitas Tata Kelola Desa			Persentase Desa Mandiri		
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan Pengawasan pemerintahahan desa		Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPDyang ditingkatkan Kapasitasnya. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					1. Jumlah perencanaan Nagari di fasilitasi, 2 Jumlah Apartur Desa yang dilatih penyusunan perencanaannya	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
					Jumlah Peraturan Desa yang di usulkan yang di evaluasi	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Des	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa danLembaga Kerja Sama antar Desa	
					Jumlah Desa yang dilakukan pemilihan Kepala Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
					Jumlah Pemberhentian perangkat Desa	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					1. Jumlah Nagari di fasilitasi profil nagarinya, 2 Jumlah aparatur desa yang di latih pengelolaan data profil desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
					Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan asetnya	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
					Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
			Meningkatnya Kapasitas Lemabaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum Adat dalam pembangunan		Persentase Pasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persentase Pasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
						Meningkatnya	
					Jumlah LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, danKarang Taruna), LembagaAdat Desa/Kelurahan danMasyarakat Hukum Adatyang DitingkatkanKapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
		Meningkatnya Kesejahteraan keluarga dan Keluarga Berkualitas					
Pembangunan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk		Indeks Pembangunan Keluarga (i Bangga) Angka KelahiranTotal/Fertility Rate (TFR) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR per WUS Usia 15-49 Tahun	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	f
				Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapatkan advokasi,Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal		
				Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
					Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	
					Jumlah Data dan informasi keluarga yang tersedia	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
					Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Program Bangga Kencana	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	
			Meningkatnya pemberdaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR) Persentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	
					Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Penyediaan dan distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Penyuluhan KKBPK	
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
					Jumlah Komunikasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan Budaya Lokal	
					Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) oleh pokja advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	
				Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
					Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang tersedia	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	
					Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
					Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB	
				Terlaksanya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
				Daerah Kabupaten/Kota			
					Jumlah Laporan Pengendalian Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
					Jumlah Orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB	
					Jumlah DASHAT di Kampung KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			Meningkatnya Pemberdayaan		Persentase keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
			dan Peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)				
				Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	
					Persentasesekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	
					Jumlah Laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah orang yang mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	
					Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan pelatihan teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orientasi dan pelatihan teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
					Pembentukan kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pembentukan kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
				Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
					Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Ballita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Ballita)	
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Ballita) yang mendapat pendampingan	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Ballita)	
				Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)		Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	
					Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang mendapatkan Pembinaan Perencanaan Menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Pembinaan Perencanaan Menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	
					Jumlah Unit Sarana edukasi PKBR di Kelompok Kegiatan	Penyediaan Sarana edukasi PKBR di Kelompok Kegiatan	
		Meningkatnya akuntabilitas			Nilai Lakip		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
		kinerja Perangkat Daerah					
					Jumlah Inovasi Yang diterapkan		
					Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah		
					Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya pelayanan administrasi umum		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	Penyediaan Peralatan rumah tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya layanan pengadaan barang milik daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
					dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

1. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen). Target 2025 100 %. Pagu Indikatif 60.000.000 Target 2026 100 %. Pagu Indikatif 70.000.000. Target 2027 100 %. Pagu Indikatif 80.000.000 Target 2028 100 %. Pagu Indikatif 90.000.000. Target 2029 100 %. Pagu Indikatif 100.000.000. Target 2029 100 %. Pagu Indikatif 110.000.000.
2. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen). Target 2025 100 %. Pagu Indikatif 41.000.000 Target 2026 100 %. Pagu Indikatif 51.000.000. Target 2027 100 %. Pagu Indikatif 61.000.000 . Target 2028 100 %. Pagu Indikatif 71.000.000. Target 2029 100 %. Pagu Indikatif 81.000.000. Target 2029100 %. Pagu Indikatif 91.000.000.
3. Sub kegiatan Penyedian gaji dan tunjangan ASN. Indikator Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.Target tahun 2025 = 26 Orang. Pagu Indikatif 3.597.268.402 Target tahun 2026 = 27 orang. Pagu Indikatif 3.612.268.402. Target Tahun 2027= 28 orang. Pagu Indikatif 3.973.492.242.Target 2028= 28 orang. Pagu Indikatif 3.973.492.242 . Target 2029= 28 orang, Pagu Indikatif 3.973.492.242 Target 2030= 28 orang. Pagu Indikatif 3.983.492.242.
4. Sub kegiatan Penyedian admistrasi pelaksanaan tugas ASN.
   Indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. .Target tahun 2025 = 26 Orang. Pagu Indikatif 3.597.268.402 Target tahun 2026 = 27 orang. Pagu Indikatif 3.612.268.402. Target Tahun 2027= 28 orang. Pagu Indikatif 3.973.492.242.Target 2028= 28 orang. Pagu Indikatif 3.973.492.242 . Target 2029= 28 orang, Pagu Indikatif 3.973.492.242 Target 2030= 28 orang. Pagu Indikatif 3.983.492.242.
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen). Target tahun 2025 = 12 Dokumen, Pagu Indikatif 27.000.000 , Target tahun 2026 = 12 Dokumen. Pagu Indikatif 27.100.000. Target Tahun 2027= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 27.300.000. Target 2028= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 27.600.000. Target 2029= 12 Dokumen, Pagu Indikatif 27.800.000 Target 2030= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 27.900.000.
6. Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah. Indikator Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola . Target tahun 2025 = 12 Laporan, Pagu Indikatif 43.500.000 , Target tahun 2026 = 12 Laporan. Pagu Indikatif 43.600.000. Target Tahun

2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 43.700.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 43.800.000. Target 2029= 12 Laporan, Pagu Indikatif 43.900.000 Target 2030= 12 Laporan. Pagu Indikatif 44.000.000.

7. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik daerah. Indikator Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) . Target tahun 2025 = 12 Dokumen, Pagu Indikatif 30.000.000 , Target tahun 2026 = 12 Dokumen. Pagu Indikatif 31.000.000. Target Tahun 2027= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 33.000.000. Target 2028= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 36.000.000. Target 2029= 12 Dokumen Pagu Indikatif 38.000.000 Target 2030= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 39.000.000.
8. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD. Indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (Laporan) . Target tahun 2025 = 12 Laporan, Pagu Indikatif 50.000.000 , Target tahun 2026 = 12 Laporan. Pagu Indikatif 50.100.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 50.300.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 50.700.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 50.800.000 Target 2030= 12 Laporan. Pagu Indikatif 50.900.000.
9. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Indikator Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengfkapan (Paket) . Target tahun 2025 = 1 Paket, Pagu Indikatif 30.000.000 , Target tahun 2026 = 1 Paket. Pagu Indikatif 30.300.000. Target Tahun 2027= 1 Paket. Pagu Indikatif 30.500.000. Target 2028= 1 Paket. Pagu Indikatif 30.700.000. Target 2029= 1 Paket Pagu Indikatif 30.900.000 Target 2030= 1 Paket. Pagu Indikatif 41.000.000.
10. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai. Indikator Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen) . Target tahun 2025 = 12 Dokumen, Pagu Indikatif 120.000.000 , Target tahun 2026 = 12 Dokumen. Pagu Indikatif 130.000.000. Target Tahun 2027= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 140.000.000. Target 2028= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 170.000.000. Target 2029= 12 Dokumen Pagu Indikatif 180.000.000 Target 2030= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 180.000.000.

11. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Indikator Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan . Target tahun 2025 = 27 Orang, Pagu Indikatif 60.000.000 , Target tahun 2026 = 27 Orang. Pagu Indikatif 61.000.000. Target Tahun 2027= 27 Orang. Pagu Indikatif 62.000.000. Target 2028= 27 Orang. Pagu Indikatif 63.000.000. Target 2029= 27 Orang Pagu Indikatif 64.000.000Target 2030= 27 Orang. Pagu Indikatif 66.000.000.
12. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang) . Target tahun 2025 = 27 Orang, Pagu Indikatif 55.000.000 , Target tahun 2026 = 27 Orang. Pagu Indikatif 56.000.000. Target Tahun 2027= 27 Orang. Pagu Indikatif 57.000.000. Target 2028= 27 Orang. Pagu Indikatif 58.000.000. Target 2029= 27 Orang Pagu Indikatif 59.000.000Target 2030= 27 Orang. Pagu Indikatif 59.000.000.
13. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan . Target tahun 2025 = Orang, Pagu Indikatif 750.000.000 , Target tahun 2026 = Orang. Pagu Indikatif 760.000.000. Target Tahun 2027= Orang. Pagu Indikatif 770.000.000. Target 2028= Orang. Pagu Indikatif 780.000.000. Target 2029= Orang Pagu Indikatif 790.000.000Target 2030= Orang. Pagu Indikatif 790.000.000.
14. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Indikator Jumlah Laporan penyedia jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan . Target tahun 2025 = 12 Laporan, Pagu Indikatif 44.400.000 , Target tahun 2026 = 12 Laporan. Pagu Indikatif 44.500.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 44.600.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 44.700.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 44.800.000 Target 2030= 12 Laporan. Pagu Indikatif 44.800.000.
15. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disediakan . Target tahun 2025 = 7 Paket, Pagu Indikatif 34.867.400, Target tahun 2026 = 7 Paket. Pagu Indikatif

35.900.400. Target Tahun 2027= 7 Paket. Pagu Indikatif 37.000.000. Target 2028= 7 Paket. Pagu Indikatif 38.000.000. Target 2029= 7 Paket Pagu Indikatif 39.000.000 Target 2030= 7 Paket. Pagu Indikatif 39.000.000.

16. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor Indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan . Target tahun 2025 = 10 Paket, Pagu Indikatif 56.601.00 , Target tahun 2026 = 10 Paket. Pagu Indikatif 56.901.000. Target Tahun 2027= 10 Paket. Pagu Indikatif 56.901.000. Target 2028= 10 Paket. Pagu Indikatif 56.901.000. Target 2029= 10 Paket Pagu Indikatif 56.901.000Target 2030= 10 Paket. Pagu Indikatif 56.901.000
17. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan . Target tahun 2025 = 10 Paket, Pagu Indikatif 26.006.400 , Target tahun 2026 = 10 Paket. Pagu Indikatif 26.900.400. Target Tahun 2027= 10 Paket. Pagu Indikatif 27.000.000. Target 2028= 10 Paket. Pagu Indikatif 28.000.000. Target 2029= 10 Paket Pagu Indikatif 29.000.000 Target 2030= 10 Paket. Pagu Indikatif 33.000.000
18. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD . Target tahun 2025 = 12 Laporan, Pagu Indikatif 75.302.000 , Target tahun 2026 = 12 Laporan. Pagu Indikatif 75.802.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 78.300.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 78.300.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 80.000.000 Target 2030= 12 Laporan. Pagu Indikatif 90.000.000
19. Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atu Bangunan Lainnya Indikator Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan . Target tahun 2025 = 1 Paket, Pagu Indikatif 109.154.000 , Target tahun 2026 = 1 Paket. Pagu Indikatif 109.354.000. Target Tahun 2027= 1 Paket. Pagu Indikatif 109.554.000. Target 2028= 1 Paket. Pagu Indikatif 109.654.000. Target 2029= 1 Paket Pagu Indikatif 109.854.000 Target 2030= 1 Paket. Pagu Indikatif 109.854.000
20. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan . Target

tahun 2025 = 1 Paket, Pagu Indikatif 120.000.000 , Target tahun 2026 = 1 Paket. Pagu Indikatif 120.100.000. Target Tahun 2027= 1 Paket. Pagu Indikatif 120.300.000. Target 2028= 1 Paket. Pagu Indikatif 120.500.000. Target 2029= 1 Paket Pagu Indikatif 120.600.000 Target 2030= 1 Paket. Pagu Indikatif 120.600.000

21. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara . Target tahun 2025 = 1 Paket, Pagu Indikatif 150.000.000 , Target tahun 2026 = 1 Paket. Pagu Indikatif 150.100.000. Target Tahun 2027= 1 Paket. Pagu Indikatif 150.200.000. Target 2028= 1 Paket. Pagu Indikatif 150.300.000. Target 2029= 1 Paket Pagu Indikatif 150.400.000 Target 2030= 1 Paket. Pagu Indikatif 150.500.000
22. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitas . Target tahun 2025 = 1 Paket, Pagu Indikatif 50.400.000 , Target tahun 2026 = 1 Paket. Pagu Indikatif 50.500.000. Target Tahun 2027= 1 Paket. Pagu Indikatif 50.600.000. Target 2028= 1 Paket. Pagu Indikatif 50.600.000. Target 2029= 1 Paket Pagu Indikatif 50.700.000 Target 2030= 1 Paket. Pagu Indikatif 50.800.000
23. Sub Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan . Target tahun 2025 = 12 Dokumen, Pagu Indikatif 9.990.000 , Target tahun 2026 = 12 Dokumen. Pagu Indikatif 9.100.000. Target Tahun 2027= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 9.000.000. Target 2028= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 9.000.000. Target 2029= 12 Dokumen Pagu Indikatif 9.000.000 Target 203012 Dokumen. Pagu Indikatif 9.000.000
24. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik Indikator Jumlah Laporan penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan . Target tahun 2025 = 12 Laporan, Pagu Indikatif 44.400.000 , Target tahun 2026 = 12 Laporan. Pagu Indikatif 44.600.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 44.700.000. Target 2028= 12 Laporan.

Pagu Indikatif 44.800.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 44.900.000 Target 2030=12 Laporan. Pagu Indikatif 44.900.000

25. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Indikator Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya . Target tahun 2025 = 1 Unit, Pagu Indikatif 13.298.250 , Target tahun 2026 = 1 Unit. Pagu Indikatif 13.398.250. Target Tahun 2027= 1 Unit. Pagu Indikatif 13.498.250. Target 2028= 1 Unit. Pagu Indikatif 13.598.250. Target 2029= 1 Unit Pagu Indikatif 13.698.250. Target 2030=1 Unit. Pagu Indikatif 13.698.250
26. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lapangan Indikator Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya . Target tahun 2025 = 2 Unit, Pagu Indikatif 8.000.000 , Target tahun 2026 = 2 Unit. Pagu Indikatif 8.900.000. Target Tahun 2027= 2 Unit. Pagu Indikatif 9.000.000. Target 2028= 2 Unit. Pagu Indikatif 9.100.000. Target 2029= 2 Unit Pagu Indikatif 9.200.000. Target 2030=2 Unit. Pagu Indikatif 11.200.000
27. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Indikator Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara . Target tahun 2025 = 8 Unit, Pagu Indikatif 6.500.000 , Target tahun 2026 = 8 Unit. Pagu Indikatif 6.800.000. Target Tahun 2027= 8 Unit. Pagu Indikatif 6.900.000. Target 2028= 8 Unit. Pagu Indikatif 7.000.000. Target 2029= 8 Unit Pagu Indikatif 7.500.000. Target 2030= 8 Unit. Pagu Indikatif 10.000.000
28. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Jumlah Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya. Target tahun 2025 = 8 Unit, Pagu Indikatif 9.000.000 , Target tahun 2026 = 8 Unit. Pagu Indikatif 9.100.000. Target Tahun 2027= 8 Unit. Pagu Indikatif 9.200.000. Target 2028= 8 Unit. Pagu Indikatif 9.300.000. Target 2029= 8 Unit Pagu Indikatif 9.400.000. Target 2030= 8 Unit. Pagu Indikatif 9.500.000

29. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Indikator Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara . Target tahun 2025 = 12 Laporan, Pagu Indikatif 7.000.000 , Target tahun 2026 = 12 Laporan. Pagu Indikatif 7.100.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 7.200.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 7.300.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 7.400.000. Target 2030= 12 Laporan. Pagu Indikatif 7.500.000.
30. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Indikator Jumlah Mebel yang Dipelihara. Target tahun 2025 = 12 Laporan, Pagu Indikatif 6.000.000 , Target tahun 2026 = 12 Laporan. Pagu Indikatif 6.100.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 6.200.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 6.300.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 6.400.000. Target 2030= 12 Laporan. Pagu Indikatif 6.500.000.
31. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya Indikator Jumlah gedung kator dan bangunan lainnya yang di pelihara. Target tahun 2025 = 12 Laporan, Pagu Indikatif 60.000.000 , Target tahun 2026 = 12 Laporan. Pagu Indikatif 61.000.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 62.000.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 63.000.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 64.000.000. Target 2030= 12 Laporan. Pagu Indikatif 65.000.000
32. Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendaliaan kualitas pelayaana publik dan tata laksanan Indikator Jumlah dokumen minitoring evaluasi dan penegndalian kualitas pelayanan publik dan tatatlksanan. Target tahun 2025 = 12 Laporan, Pagu Indikatif 20.000.000 , Target tahun 2026 = 12 Laporan. Pagu Indikatif 21.000.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 23.000.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 24.000.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 25.000.000. Target 2030= 12 Laporan. Pagu Indikatif 26.000.000
33. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penghapusan, Pengabungan dan perubahan stsus Desa Indikator Jumlah desa yang dilakukan Pembentukan dan Penghapusan, perubahan statusnya. Target Tahun 2026 = 9 Desa. Pagu Indikatif 250.000.000. Target Tahun 2027= 9 Desa. Pagu Indikatif 125.000.000. Target 2028= 8 Desa.

Pagu Indikatif 175.000.000. Target 2029= 9 Desa. Pagu Indikatif 125.000.000. Target 2030= 9 Desa. Pagu Indikatif 125.000.000

34. Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa Indikator Jumlah desa yang terfasilitasi tata wilayahnya Target Tahun 2026 = 3 Desa. Pagu Indikatif 100.000.000. Target Tahun 2027= 2 Desa. Pagu Indikatif 75.000.000. Target 2028= 4 Desa. Pagu Indikatif 125.000.000. Target 2029= 3 Desa. Pagu Indikatif 85.000.000. Target 2030= 2 Desa. Pagu Indikatif 90.000.000
35. Sub Kegiatan Fasiliatasi Penataan Kewenangan Desa Indikator Jumlah Desa yang terfasilitasi Jumlah Kewenangannya Target Tahun 2026 = 5 Desa. Pagu Indikatif 150.000.000. Target Tahun 2027= 7 Desa. Pagu Indikatif 200.000.000. Target 2028= 5 Desa. Pagu Indikatif 150.000.000. Target 2029= 4 Desa. Pagu Indikatif 100.000.000. Target 2030= 5 Desa. Pagu Indikatif 150.000.000
36. Sub Kegiatan Fasilitasi Penamanaan dan Kode Desa Indikator Jumlah Desa yang terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa Target Tahun 2026 = 43 Desa. Pagu Indikatif 5.100.000. Target Tahun 2027= 43 Desa. Pagu Indikatif 5.200.000. Target 2028= 43 Desa. Pagu Indikatif 5.300.000. Target 2029= 43 Desa. Pagu Indikatif 5.400.000. Target 2030= 43 Desa. Pagu Indikatif 5.500.000
37. Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan kesatuan hukum adat Indikator Jumlah Desa yang terfasilitasi Penetapan kesatuan Hukum adat Target Tahun 2026 = 43 Desa. Pagu Indikatif 8.100.000. Target Tahun 2027= 43 Desa. Pagu Indikatif 8.200.000. Target 2028= 43 Desa. Pagu Indikatif 8.300.000. Target 2029= 43 Desa. Pagu Indikatif 8.400.000. Target 2030= 43 Desa. Pagu Indikatif 8.600.000
38. Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa Indikator Jumlah desa yang terfasilitasi sarana dan prasarana Target Tahun 2026 = 43 Desa. Pagu Indikatif 500.000.000. Target Tahun 2027= 43 Desa. Pagu Indikatif 750.000.000. Target 2028= 43 Desa. Pagu Indikatif 400.000.000. Target 2029= 43 Desa. Pagu Indikatif 700.000.000. Target 2030= 43 Desa. Pagu Indikatif 400.000.000
39. Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan aset desa Indikator Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan asetnya Target tahun 2025 = 43 Dokumen, Pagu Indikatif 65.000.000 , Target tahun 2026 = 43 Dokumen. Pagu Indikatif 67.000.000. Target Tahun 2027= 43

Dokumen. Pagu Indikatif 67.000.000. Target 2028= 43 Dokumen. Pagu Indikatif 67.000.000. Target 2029= 43 Dokumen Pagu Indikatif 67.000.000. Target 2030= 43 Dokumen. Pagu Indikatif 67.000.000

40. Sub Kegiatan Fasilitas penetapan dan penegasan batas desa Indikator Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Target tahun 2025 = 43 Desa, Pagu Indikatif 25.000.000 , Target tahun 2026 = 43 Desa. Pagu Indikatif 26.000.000. Target Tahun 2027= 43 Desa. Pagu Indikatif 26.000.000. Target 2028= 43 Desa. Pagu Indikatif 26.000.000. Target 2029= 43 Desa. Pagu Indikatif 26.000.000. Target 2030= 43 Desa. Pagu Indikatif 26.000.000
41. Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD Indikator Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kasitas Target tahun 2025 = 20 Orang, Pagu Indikatif 29.000.000 , Target tahun 2026 = 86 Orang. Pagu Indikatif 29.100.000. Target Tahun 2027= 86 Orang. Pagu Indikatif 29.200.000. Target 2028= 86 Orang. Pagu Indikatif 29.400.000. Target 2029= 86 Orang. Pagu Indikatif 29.500.000. Target 2030= 86 Orang. Pagu Indikatif 29.600.000
42. Sub Kegiatan Fasilitas Fasilitas penyusun perencanaan pembangunan desa Indikator 1. Jumlah perencanaan Nagari di asilitasi, 2 Jumlah Apartur Desa yang dilatih penyusunan perencanaannya Target tahun 2025 = 43 Dokumen, Pagu Indikatif 128.968.000 , Target tahun 2026 = 43 Dokumen. Pagu Indikatif 128.978.000. Target Tahun 2027= 43 Dokumen. Pagu Indikatif 128.988.000. Target 2028= 43 Dokumen. Pagu Indikatif 128.998.000. Target 2029= 43 Dokumen Pagu Indikatif 129.978.000. Target 2030= 43 Dokumen. Pagu Indikatif 129.978.000
43. Sub Kegiatan Fasilitas pengolaan keuang desa Indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Target tahun 2025 = 43 Dokumen, Pagu Indikatif 128.968.000 , Target tahun 2026 = 43 Dokumen. Pagu Indikatif 128.978.000. Target Tahun 2027= 43 Dokumen. Pagu Indikatif 128.988.000. Target 2028= 43 Dokumen. Pagu Indikatif 128.998.000. Target 2029= 43 Dokumen

Pagu Indikatif 129.978.000. Target 2030= 43 Dokumen. Pagu Indikatif 129.978.000

44. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Indikator Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Target tahun 2025 = 129 Orang, Pagu Indikatif 95.000.000 , Target tahun 2026 = 129 Orang. Pagu Indikatif 96.000.000. Target Tahun 2027= 129 Orang. Pagu Indikatif 97.000.000. Target 2028= 129 Orang. Pagu Indikatif 98.000.000. Target 2029= 129 Orang. Pagu Indikatif 99.000.000. Target 2030= 129 Orang. Pagu Indikatif 99.000.000
45. Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Indikator Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Target tahun 2025 = 12 Dokumen, Pagu Indikatif 109.154.000 , Target tahun 2026 = 12 Dokumen. Pagu Indikatif 109.165.000. Target Tahun 2027= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 109.165.000. Target 2028= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 109.165.000. Target 2029= 12 Dokumen Pagu Indikatif 109.165.000. Target 2030= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 109.165.000
46. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Indikator Jumlah Desa yang dilakukan pemilihan Kepala Desa Target Tahun 2026 = 43 Desa. Pagu Indikatif 210.000.000. Target Tahun 2027= 43 Desa. Pagu Indikatif 220.000.000. Target 2028= 43 Desa. Pagu Indikatif 230.000.000. Target 2029= 43 Desa. Pagu Indikatif 240.000.000. Target 2030= 43 Desa. Pagu Indikatif 250.000.000
47. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Indikator 1. Jumlah Nagari di fasilitasi profil nagarinya, 2 Jumlah aparatur desa yang dilatih pengelolaan data profil desa Target Tahun 2026 = 43 Desa. Pagu Indikatif 81.000.000. Target Tahun 2027= 43 Desa. Pagu Indikatif 82.000.000. Target 2028= 43 Desa. Pagu Indikatif 83.000.000. Target 2029= 43 Desa. Pagu Indikatif 84.000.000. Target 2030= 43 Desa. Pagu Indikatif 85.000.000
48. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Indikator Jumlah Pemberhentian Perangkat Desa Target Tahun 2026 = 43 Desa. Pagu Indikatif 110.000.000. Target Tahun 2027= 43 Desa. Pagu Indikatif 120.000.000. Target 2028= 43 Desa. Pagu Indikatif 130.000.000. Target 2029= 43 Desa. Pagu

Indikatif 140.000.000. Target 2030= 43 Desa. Pagu Indikatif 150.000.000

49. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa Indikator Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Target Tahun 2026 = 27 Dokumen. Pagu Indikatif 41.000.000. Target Tahun 2027= 27 Dokumen. Pagu Indikatif 41.000.000. Target 2028= 27 Dokumen. Pagu Indikatif 41.000.000. Target 2029= 27 Dokumen. Pagu Indikatif 41.000.000. Target 2030= 27 Dokumen. Pagu Indikatif 41.000.000
50. Sub Kegiatan Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggara gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga Indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Target tahun 2025 = 43 Dokumen, Pagu Indikatif 418.095.000 , Target tahun 2026 = 43 Dokumen. Pagu Indikatif 419.095.000. Target Tahun 2027= 43 Dokumen. Pagu Indikatif 419.095.000. Target 2028= 43 Dokumen. Pagu Indikatif 419.095.000. Target 2029= 43 Dokumen Pagu Indikatif 419.095.000. Target 2030= 43 Dokumen. Pagu Indikatif 419.095.000
51. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Target tahun 2025 = 10 Lembaga, Pagu Indikatif 150.000.000 , Target tahun 2026 = 10 Lembaga. Pagu Indikatif 151.000.000. Target Tahun 2027= 10 Lembaga. Pagu Indikatif 152.000.000. Target 2028= 10 Lembaga. Pagu Indikatif 154.000.000. Target 2029= 10 Lembaga Pagu Indikatif 155.000.000. Target 2030= 10 Lembaga. Pagu Indikatif 155.000.000
52. Sub Kegiatan Fasilitasi Buln Bhakti Gotong Royong Indikator Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Target tahun 2025 = 1 Laporan, Pagu Indikatif 150.000.000 , Target tahun 2026 = 1 Laporan. Pagu Indikatif 151.000.000. Target Tahun 2027= 1 Laporan. Pagu Indikatif 150.000.000. Target 2028= 1 Laporan. Pagu Indikatif 150.000.000. Target 2029= 1 Laporan Pagu Indikatif 153.000.000. Target 2030= 1 Laporan. Pagu Indikatif 153.000.000

53. Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Indikator Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapatkan advokasi,Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal Target Tahun 2026 = 20 Pendidikan. Pagu Indikatif 160.000.000. Target Tahun 2027= 20 Pendidikan. Pagu Indikatif 170.000.000. Target 2028= 20 Pendidikan. Pagu Indikatif 180.000.000. Target 2029= 20 Pendidikan. Pagu Indikatif 190.000.000. Target 2030= 20 Pendidikan. Pagu Indikatif 200.000.000
54. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GPDK) Tingkat Kabupaten Indikator Jumlah Dokumen Penyusunan Dan Pemanfaatan Garand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Target Tahun 2026 = 1 Dokumen. Pagu Indikatif 180.000.000. Target Tahun 2027= 1 Dokumen. Pagu Indikatif 200.000.000. Target 2028= 1 Dokumen. Pagu Indikatif 220.000.000. Target 2029= 1 Dokumen. Pagu Indikatif 230.000.000. Target 2030= 1 Dokumen. Pagu Indikatif 230.000.000
55. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Indikator Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Target Tahun 2026 = 12 Dokumen. Pagu Indikatif 50.000.000. Target Tahun 2027= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 60.000.000. Target 2028= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 70.000.000. Target 2029= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 80.000.000. Target 2030= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 80.000.000
56. Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Indikator Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan Target Tahun 2026 = 12 Dokumen. Pagu Indikatif 70.000.000. Target Tahun 2027= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 80.000.000. Target 2028= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 90.000.000. Target 2029= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 100.000.000. Target 2030= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 100.000.000

57. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Indikator Jumlah Laporan Pembinaaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Target Tahun 2026 = 12 Dokumen. Pagu Indikatif 80.000.000. Target Tahun 2027= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 90.000.000. Target 2028= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 100.000.000. Target 2029= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 110.000.000. Target 2030= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 120.000.000
58. Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Indikator Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Target tahun 2025 = 43 Laporan, Pagu Indikatif 43.800.000 , Target tahun 2026 = 43 Laporan. Pagu Indikatif 43.900.000. Target Tahun 2027= 43 Laporan. Pagu Indikatif 43.900.000. Target 2028= 43 Laporan. Pagu Indikatif 43.900.000. Target 2029= 43 Laporan Pagu Indikatif 43.900.000. Target 2030= 43 Laporan. Pagu Indikatif 43.900.000
59. Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Indikator Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Target tahun 2025 = 12 Dokumen, Pagu Indikatif 120.000.000 , Target tahun 2026 = 12 Dokumen. Pagu Indikatif 121.000.000. Target Tahun 2027= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 121.000.000.. Target 2028= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 121.000.000.. Target 2029= 12 Dokumen Pagu Indikatif 121.000.000.. Target 2030= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 121.000.000.
60. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Indikator Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Target Tahun 2026 = 10 Balai. Pagu Indikatif 75.000.000. Target Tahun 2027= 10 Balai. Pagu Indikatif 85.000.000. Target 2028= 10 Balai. Pagu Indikatif 95.000.000. Target 2029= 10 Balai. Pagu Indikatif 105.000.000. Target 2030= 10 Balai. Pagu Indikatif 115.000.000
61. Sub Kegiatan Penyediaan dan distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Indikator Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan

Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Target Tahun 2026 = 10 Balai. Pagu Indikatif 60.000.000. Target Tahun 2027= 10 Balai. Pagu Indikatif 70.000.000. Target 2028= 10 Balai. Pagu Indikatif 80.000.000. Target 2029= 10 Balai. Pagu Indikatif 90.000.000. Target 2030= 10 Balai. Pagu Indikatif 110.000.000

62. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja Indikator Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra KerjA Target tahun 2025 = 10 Organisasi, Pagu Indikatif 199.999.000 , Target tahun 2026 = 10 Organisasi. Pagu Indikatif 110.999.000. Target Tahun 2027= 10 Organisasi. Pagu Indikatif 189.999.000.. Target 2028= 10 Organisasi. Pagu Indikatif 197.999.000.. Target 2029= 10 Organisasi Pagu Indikatif 199.999.000.. Target 2030= 10 Organisasi. Pagu Indikatif 199.999.000.
63. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Indikator Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Target tahun 2025 = 12 Dokumen, Pagu Indikatif 100.000.000 , Target tahun 2026 = 12 Dokumen. Pagu Indikatif 110.000.000. Target Tahun 2027= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 120.000.000.. Target 2028= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 130.000.000.. Target 2029= 12 Dokumen Pagu Indikatif 140.000.000.. Target 2030= 12 Dokumen. Pagu Indikatif 140.000.000.
64. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa, dan Mini Lokakarya Indikator Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (MinilokTarget tahun 2025 = 12 Laporan, Pagu Indikatif 150.000.000 , Target tahun 2026 = 12 Laporan. Pagu Indikatif 151.000.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif

152.000.000.. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 153.000.000.. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 155.000.000.. Target 2030= 12 Laporan. Pagu Indikatif 155.000.000.

65. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan Budaya Lokal Indikator Jumlah Komunikasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan Budaya Lokal Target Tahun 2026 = 12 Laporan. Pagu Indikatif 80.000.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 90.000.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 100.000.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 110.000.000. Target 2030= 12 Laporan Pagu Indikatif 120.000.000
66. Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja Indikator Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) oleh pokja advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja Target Tahun 2026 = 12 Laporan. Pagu Indikatif 60.000.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 70.000.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 80.000.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 90.000.000. Target 2030= 12 Laporan Pagu Indikatif 110.000.000
67. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Indikator Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Target tahun 2025 = 12 Laporan, Pagu Indikatif 496.000.000 , Target tahun 2026 = 12 Laporan. Pagu Indikatif 498.000.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 499.000.000.. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 500.000.000.. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 510.000.000.. Target 2030= 12 Laporan. Pagu Indikatif 510.000.000.
68. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK Indikator Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK Target tahun 2025 = 12 Laporan, Pagu Indikatif 139.996.000 , Target tahun 2026 = 12 Laporan. Pagu Indikatif 149.996.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 149.996.000.. Target 2028= 12 Laporan.

Pagu Indikatif 149.996.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 149.996.000. Target 2030= 12 Laporan. Pagu Indikatif 149.996.000.

69. Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB Indikator Jumlah organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) di lini lapangan PKB/PLKB Target Tahun 2025 = 20 Organisasi. Pagu Indikatif 129.000.000. Target Tahun 2026 = 20 Organisasi. Pagu Indikatif 129.000.000Target Tahun 2027= 20 Organisasi. Pagu Indikatif 129.000.000. Target 2028= 20 Organisasi. Pagu Indikatif 129.000.000. Target 2029= 20 Organisasi Pagu Indikatif 129.000.000. Target 2030= 20 Organisasi Pagu Indikatif 129.000.000
70. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Indikator Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang tersedia Target Tahun 2025 = 12 Laporan. Pagu Indikatif 60.000.000. Target Tahun 2026= 12 Laporan. Pagu Indikatif 70.000.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 80.000.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 90.000.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 110.000.000. Target 2030= 12 Laporan Pagu Indikatif 120.000.000
71. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Indikator Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Target Tahun 2025 = 43 Orang. Pagu Indikatif 129.000.000. Target Tahun 2026= 43 Orang. Pagu Indikatif 139.000.000. Target Tahun 2027= 43 Orang. Pagu Indikatif 140.000.000. Target 2028= 43 Orang. Pagu Indikatif 145.000.000. Target 2029= 43 Orang Pagu Indikatif 150.000.000. Target 2030= 43 Orang Pagu Indikatif 150.000.000.
72. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan dan jejaringnya Indikator Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Target Tahun 2025 = 10 Laporan. Pagu Indikatif 13.500.000. Target Tahun 2026= 10 Laporan. Pagu Indikatif

13.600.000. Target Tahun 2027= 10 Laporan. Pagu Indikatif 13.700.000. Target 2028= 10 Laporan. Pagu Indikatif 13.700.000. Target 2029= 10 Laporan Pagu Indikatif 13.800.000. Target 2030= 10 Laporan Pagu Indikatif 13.800.000.

73. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP Target Tahun 2025 = 50 Orang. Pagu Indikatif 223.508.000 Target Tahun 2026= 50 Orang. Pagu Indikatif 224.609.000 Target Tahun 2027= 50 Orang. Pagu Indikatif 234.609.000. Target 2028= 50 Orang. Pagu Indikatif 244.609.000. Target 2029= 50 Orang Pagu Indikatif 246.609.000. Target 2030= 50 Orang Pagu Indikatif 246.609.000.
74. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jeajaringnya Indikator Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Target Tahun 2025 = 12 Laporan. Pagu Indikatif 15.796.000 Target Tahun 2026= 12 Laporan. Pagu Indikatif 15.890.000.
75. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Indikator Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Target Tahun 2025 = 10 Dokumen. Pagu Indikatif 3.746000. Target Tahun 2026= 10 Dokumen. Pagu Indikatif 3.856.000. Target Tahun 2027= 10 Dokumen. Pagu Indikatif 6.000.000. Target 2028= 10 Dokumen. Pagu Indikatif 7.000.000. Target 2029= 10 Laporan Pagu Indikatif 8.000.000. Target 2030= 10 Dokumen Pagu Indikatif 8.000.000.
76. Sub Kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Jumlah Organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Target Target Tahun 2026= 10 Laporan. Pagu Indikatif 45.000.000. Target Tahun 2027= 10 Laporan. Pagu Indikatif 55.000.000. Target 2028= 10 Laporan. Pagu Indikatif 60.000.000. Target 2029= 10 Laporan Pagu

Indikatif 70.000.000. Target 2030= 10 Laporan Pagu Indikatif 70.000.000.

77. Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB Indikator Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB Target Tahun 2026= 12 Laporan. Pagu Indikatif 60.000.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 70.000.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 80.000.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 90.000.000. Target 2030= 12 Laporan Pagu Indikatif 100.000.000.
78. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Jumlah DASHAT di Kampung KB Target Tahun 2026= 12 Laporan. Pagu Indikatif 70.000.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 80.000.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 90.000.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 110.000.000. Target 2030= 12 Laporan Pagu Indikatif 120.000.000.
79. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di kampung KB Indikator Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Target Tahun 2025 = 10 Kampung. Pagu Indikatif 271.496.000 Target Tahun 2026= 10 Kampung. Pagu Indikatif 282.496.000 Target Tahun 2027= 10 Kampung. Pagu Indikatif 283.496.000. Target 2028= 10 Kampung. Pagu Indikatif 284.496.000. Target 2029= 10 Kampung Pagu Indikatif 285.496.000. Target 2030= 10 Kampung Pagu Indikatif 285.496.000.
80. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Indikator Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia Target Tahun 2025 = 30 Unit. Pagu Indikatif 300.000.000 Target Tahun 2026= 30 Unit. Pagu Indikatif 310.000.000 Target Tahun 2027= 30 Unit. Pagu Indikatif 320.000.000. Target 2028= 30 Unit. Pagu Indikatif

330.000.000. Target 2029= 30 Unit Pagu Indikatif 340.000.000. Target 2030= 30 Unit Pagu Indikatif 340.000.000.

81. Sub Kegiatan Orientasi Pelatihan Teknis Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Indikator Jumlah kader yang mengikuti Orientasi Pelatihan Teknis Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Target Tahun 2026= 12 Laporan. Pagu Indikatif 120.000.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 130.000.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 140.000.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 150.000.000. Target 2030= 12 Laporan Pagu Indikatif 160.000.000.
82. Sub Kegiatan Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL Indikator Persentasesekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia Target Tahun 2026= 12 Laporan. Pagu Indikatif 60.000.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 70.000.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 80.000.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 90.000.000. Target 2030= 12 Laporan Pagu Indikatif 100.000.000.
83. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Indikator Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Target Tahun 2026= 12 Laporan. Pagu Indikatif 75.000.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 86.000.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 95.000.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 105.000.000. Target 2030= 12 Laporan Pagu Indikatif 120.000.000.
84. Sub Kegiatan Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga Target Tahun 2026= 12 Laporan. Pagu Indikatif 80.000.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 90.000.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif

110.000.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 120.000.000. Target 2030= 12 Laporan Pagu Indikatif 130.000.000.

85. Sub Kegiatan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga Indikator Jumlah orang yang mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Target Tahun 2026= 12 Laporan. Pagu Indikatif 70.000.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 80.000.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 90.000.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 110.000.000. Target 2030= 12 Laporan Pagu Indikatif 120.000.000.
86. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya operasional bagi pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan EkonomiKeluarga/UPPKS) Indikator Penyediaan Biaya operasional bagi pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
    dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS Target Tahun 2026= 12 Laporan. Pagu Indikatif 60.000.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 70.000.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 80.000.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 90.000.000. Target 2030= 12 Laporan Pagu Indikatif 110.000.000.
87. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya operasional bagi pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan EkonomiKeluarga/UPPKS) Indikator Penyediaan Biaya operasional bagi pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R
    dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS Target Tahun 2025= 12 Laporan. Pagu Indikatif 156.000.000 Target Tahun 2026= 12 Laporan. Pagu Indikatif 157.000.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 158.000.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 159.000.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 159.000.000. Target 2030= 12 Laporan Pagu Indikatif 159.000.000.

88. Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan Target Tahun 2026= 12 Laporan. Pagu Indikatif 140.000.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 150.000.000. Target 2028 = 12 Laporan. Pagu Indikatif 160.000.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 170.000.000. Target 2030= 12 Laporan Pagu Indikatif 180.000.000.

Sub Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR Indikator Jumlah Remaja yang dilakukan Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Target Tahun 2026= 12 Laporan. Pagu Indikatif 150.000.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 160.000.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 170.000.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 180.000.000. Target 2030= 12 Laporan Pagu Indikatif 190.000.000.

Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja Indikator Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang mendapatkan Pembinaan Perencanaan Menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja Target Tahun 2025= 12 Laporan. Pagu Indikatif 160.000.000. Target Tahun 2026= 12 Laporan. Pagu Indikatif 170.000.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 180.000.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 190.000.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 110.000.000. Target 2030= 12 Laporan Pagu Indikatif 120.000.000.

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana edukasi PKBR di Kelompok Kegiatan Indikator Jumlah Unit Sarana edukasi PKBR di Kelompok Kegiatan Target Tahun 2025= 12 Laporan. Pagu Indikatif 171.600.000. Target Tahun 2026= 12 Laporan. Pagu Indikatif 171.600.000. Target Tahun 2027= 12 Laporan. Pagu Indikatif 171.600.000. Target 2028= 12 Laporan. Pagu Indikatif 171.600.000. Target 2029= 12 Laporan Pagu Indikatif 171.600.000. Target 2030= 12 Laporan Pagu Indikatif 171.600.000.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN URUSAN PEMERI TAHA DAERAH KABUPATEN /KOTA	Presentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelapoan tugas layanan perangkat daerah	100 %	100%	7.283.392.452	100%	7.342.709.452	100%	7.841.154.992	100 %	7.898.230.992	100 %	7.930.540.692	100 %	7.979.141.692	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terkoordinasinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	41.245.000	1 Dokumen	51.245.000	1 Dokumen	56.369.500	1 Dokumen	61.997.500	1 Dokumen	62.197.200	1 Dokumen	63.197.200	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	100 %				60.000.000	100 %	70.000.000	100 %	80.000.000	100 %	90.000.000	100 %	110.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	100%	41.245.000	100%	51.245.000	100%	56.369.500	100 %	61.997.500	100 %	62.197.200	100 %	63.197.200	
Administrasikeu angan Perangkat Derah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan	2 Layanan	2 Layanan	4.866.508.402	2 Layanan	4.905.508.402	2 Layanan	5.291.832.242	2 Layanan	5.338.080.242	2 Layanan	5.362.790.242	2 Layanan	5.386.291.242	
Penyedian gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tinjangan ASN	26 Orang	27 Orang	3.597.268.402	28 Orang	3.612.268.402	28 Orang	3.973.492.242	28 Oran g	3.973.492.242	28 Oran g	3.973.492.242	28 Oran g	3.983.492.242	
Penyyedian admistrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	12 Dokum en	65.640.000	12 Dokum en	65.740.000	12 Dokum en	65.940.000	12 Dokum en	65.988.000	12 Dokum en	65.998.000	12 Dokum en	65.999.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		12 Dokum en	27.000.000	12 Dokum en	27.100.000	12 Dokum en	27.300.000	12 Dokum en	27.600.000	12 Dokum en	27.800.000	12 Dokum en	27.900.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola		12 Lapora n	43.500.000	12 Lapora n	43.600.000	12 Lapora n	43.700.000	12 Lapora n	43.800.000	12 Lapora n	43.900.000	12 Lapora n	44.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		12 Dokum en	30.000.000	12 Dokum en	31.000.000	12 Dokum en	33.000.000	12 Dokum en	36.000.000	12 Dokum en	38.000.000	12 Dokum en	39.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		12 Lapora n	50.000.000	12 Lapora n	50.100.000	12 Lapora n	50.300.000	12 Lapora n	50.700.000	12 Lapora n	50.800.000	12 Lapora n	50.900.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		27 Orang	38.100.000	27 Orang	38.400.000	27 Orang	38.600.000	27 Orang	38.800.000	27 Orang	38.900.000	27 Orang	39.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		1 paket	30.000.000	1 paket	30.300.000	1 paket	30.500.000	1 paket	30.700.000	1 paket	30.900.000	1 paket	41.000.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan		12 Dokum	120.000.000	12 Dokum en	130.000.000	12 Dokum en	140.000.000	12 Dokum en	170.000.000	12 Dokum en	180.000.000	12 Dokum en	180.000.000	

Bidang Urusan/Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
	Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		en												
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		27 Orang	60.000.000	27 Orang	61.000.000	27 Orang	62.000.000	27 Orang	63.000.000	27 Orang	64.000.000	27 Orang	66.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)		27 Orang	55.000.000	27 Orang	56.000.000	27 Orang	57.000.000	27 Orang	58.000.000	27 Orang	59.000.000	27 Orang	59.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		orang	750.000.000	Orang	760.000.000	Orang	770.000.000	Orang	780.000.000	Orang	790.000.000	Orang	790.000.000	
Admistrsasi umum perangkat derah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	100 %	100%	675.720.800	100%	678.157.800	100%	682.455.000	100 %	684.955.000	100 %	689.255.000	100 %	703.555.000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan	12Laporan	12Laporan	44.400.000	12Laporan	44.500.000	12Laporan	44.600.000	12Laporan	44.700.000	12Lap oran	44.800.000	12Lap oran	44.800.000	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	Rp34.867.400	7 Paket	35.900.400	7 Paket	37.000.000	7 Pak et	38.000.000	7 Pak et	39.000.000	7 Pak et	39.000.000	
Penyediaan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	55.601.000,00	10 Paket	55.901.000	10 Paket	55.901.000	10 Pak et	55.901.000	10 Pak et	55.901.000	10 Pak et	55.901.000	
Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	26.006.400,00	10 Paket	26.900.400	10 Paket	27.000.000	10 Pak et	28.000.000	10 Pak et	29.000.000	10 Pak et	33.000.000	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	75.302.000	12 Laporan	75.802.000	12 Laporan	78.300.000	12 Lap oran	78.300.000	12 Lap oran	80.000.000	12 Lap oran	90.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)		1 Paket	109.154.000	1 Paket	109.354.000	1 Paket	109.554.000	1 Paket	109.654.000	1 Paket	109.854.000	1 Paket	109.854.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.100.000	1 Paket	120.300.000	1 Paket	120.500.000	1 Paket	120.600.000	1 Paket	120.700.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)		1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.100.000	1 Paket	150.200.000	1 Paket	150.300.000	1 Paket	150.400.000	1 Paket	150.500.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1 Paket	50.400.000	1 Paket	50.500.000	1 Paket	50.600.000	1 Paket	50.600.000	1 Paket	50.700.000	1 Paket	50.800.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		

Bidang Urusan/Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang uandangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokume n	12 Dokum en	9.990.000	12 Doku men	9.100.000	12 Doku men	9.000.000	12 Dok ume n	9.000.000	12 Dok ume n	9.000.000	12 Dok ume n	9.000.000	
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tersedianya Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	1.530.120.000	100 Perse n	1.534.400.000	100 Perse n	1.634.500.000	100 Pers en	1.634.600.000	100 Pers en	1.634.700.000	100 Pers en	1.634.700.000	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Lapora n	44.400.000	12 Lapor an	44.600.000	12 Lapor an	44.700.000	12 Lap oran	44.800.000	12 Lap oran	44.900.000	12 Lap oran	44.900.000	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Lapora n	1.485.720.000	12 Lapor an	1.489.800.000	12 Lapor an	1.589.800.000	12 Lap oran	1.589.800.000	12 Lap oran	1.589.800.000	12 Lap oran	1.589.800.000	
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemeritahan daerah	Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	109.798.250	100 Perse n	112.398.250	100 Perse n	113.998.250	100 Pers en	115.598.250	100 Pers en	117.598.250	100 Pers en	126.398.250	
Penyediaan jasa pemeliharaan,biay a pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	13.298.250	1 Unit	13.398.250	1 Unit	13.498.250	1 Unit	13.598.250	1 Unit	13.698.250	1 Unit	16.698.250	
Penyediaan jasa pemeliharaan,biay a pemeliharaan, dan pajak dan perizinan kendaraan dinas opeerasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	8.000.000	2 Unit	8.900.000	2 Unit	9.000.000	2 Unit	9.100.000	2 Unit	9.200.000	2 Unit	11.200.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	6.500.000	8 Unit	6.800.000	8 Unit	6.900.000	8 Unit	7.000.000	8 Unit	7.500.000	8 Unit	10.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)		8 Unit	9.000.000	8 Unit	9.100.000	8 Unit	9.200.000	8 Unit	9.300.000	8 Unit	9.400.000	8 Unit	9.500.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		12 Lapora n	7.000.000	12 Lapora n	7.100.000	12 Lapora n	7.200.000	12 Lapora n	7.300.000	12 Lapora n	7.400.000	12 Lapora n	7.500.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		12 Lapora n	6.000.000	12 Lapora n	6.100.000	12 Lapora n	6.200.000	12 Lapora n	6.300.000	12 Lapora n	6.400.000	12 Lapora n	6.500.000	
Pemeliharaan /rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kator dan bangunan lainnya yang di pelihara		12 Lapora n	60.000.000	12 Lapora n	61.000.000	12 Lapora n	62.000.000	12 Lapora n	63.000.000	12 Lapora n	64.000.000	12 Lapora n	65.000.000	
Penataan organisasi	Jumlah pelayanan publik dan tatataksana		12Lapora n	60.000.000	12Lapora n	61.000.000	12Lapora n	62.000.000	12Lapora n	63.000.000	12Lapora n	64.000.000	12Lapora n	65.000.000	
Monitoring, evaluasi dan pengendaliaan kualitas pelayaana publik dan tata laksanan	Jumlah dokumen minitoring evaluasi dan penegndalian kualitas pelayanan publik dan tatatlksanan		12 Dokum en	20.000.000	12 Dokum en	21.000.000	12 Dokum en	23.000.000	12 Dokum en	24.000.000	12 Dokum en	25.000.000	12 Dokum en	26.000.000	
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	0	0	0	100%	1.013.200.000	100%	1.163.400.000	100%	863.600.000	100%	1.023.800.000	100%	779.100.000	

Bidang Urusan/Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	0	0	0	30 %	900.000.000	50%	950.000.000	70%	970.000.000	75%	990.000.000	90%	995.000.000	
Penyelenggaraan Penataan Desa	Terlaksananya Desa yang dilakukan penataannya	0	0	-	10 Desa	1.013.200.000	10 Desa	1.163.400.000	10 Desa	863.600.000	10 Desa	1.023.800.000	3 Desa	779.100.000	
Pembentukan dan Penghapusan, Pengabungan dan perubahan stsus Desa	Jumlah desa yang dilakukan Pembentukan dan Penghapusan, perubahan statusnya	0	0	0	9	250.000.000	9	125.000.000	8	175.000.000	9	125.000.000	9	125.000.000	
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi tata wilayahnya	0	0	0	3	100.000.000	2	75.000.000	4	125.000.000	3	85.000.000	2	90.000.000	
Fasiliatasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Jumlah Kewenangannya	0	0	0	5	150.000.000	7	200.000.000	5	150.000.000	4	100.000.000	5	150.000.000	
Fasilitasi Penamanaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	0	43 Desa	-	43 Desa	5.100.000	43 Desa	5.200.000	43 Desa	5.300.000	43 Desa	5.400.000	43 Desa	5.500.000	
Fasilitasi Penetapan kesatuan hukum adat	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penetapan kesatuan Hukum adat	0	43 Desa	-	43 Desa	8.100.000	43 Desa	8.200.000	43 Desa	8.300.000	43 Desa	8.400.000	43 Desa	8.600.000	
Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi sarana dan prasarana	0	43 Desa	0	43 Desa	500.000.000	43 Desa	750.000.000	43 Desa	400.000.000	43 Desa	700.000.000	43 Desa	400.000.000	
PROGRAM ADMIISTRASI PEMERINTAHA N DESA	Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	92%	92%	320.335.262	92%	299.935.882	92%	306.190.722	92%	310.586.164	92%	1.095.621.000	92%	1.116.721.000	
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	85 %	75%	50.772.600	100%	30.000.000	100%	40.000.000	100%	60.000.000	100%	80.000.000	100%	100.000.000	
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	6,98%	6,98%	60.000.000	9,30%	70.000.000	11,63%	80.000.000	13,95%	90.000.000	16,28%	110.000.000	20,93%	120.000.000	
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	43¨Des a 1¨Doku men	100 Persen	581.090.000	100 Perse n	1.027.221.000	100 Perse n	1.049.341.000	100 Pers en	1.071.561.000	100 Pers en	1.095.621.000	100 Pers en	1.116.721.000	
Fasilitas pengelolaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan asetnya	43 Dokume n	43 Dokum en	65.000.000	43 Doku men	67.000.000	43 Doku men	67.000.000	43 Dok ume n	67.000.000	43 Dok ume n	67.000.000	43 Dok ume n	67.000.000	
Fasilitas penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	43 Desa	43 Desa	25.000.000	43 Desa	26.000.000	43 Desa	26.000.000	43 Des a	26.000.000	43 Des a	26.000.000	43 Des a	26.000.000	
Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kasitas	20 Orang	20 orang	29.000.000	86 Orang	29.100.000	86 Orang	29.200.000	86 Orang	29.400.000	86 Orang	29.500.000	86 Orang	29.600.000	
Fasilitas penyusun perencanaan pembangunan desa	1. Jumlah perencanaan Nagari di fasilitasi, 2 Jumlah Apartur Desa yang dilatih penyusunan perencanaannya	43 Dokume n	43 Dokum en	128.968.000	43 Doku men	128.978.000	43 Doku men	128.988.000	43 Dok ume n	128.998.000	43 Dok ume n	129.978.000	43 Dok ume n	129.978.000	
Fasilitas pengolaan keuang desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	43 Dokume n	43 Dokum en	128.968.000	43 Doku men	128.978.000	43 Doku men	128.988.000	43 Dok ume n	128.998.000	43 Dok ume n	129.978.000	43 Dok ume n	129.978.000	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang	129 Orang	129 Orang	95.000.000	129 Orang	96.000.000	129 Orang	97.000.000	129 Orang	98.000.000	129 Orang	99.000.000	129 Orang	99.000.000	

Bidang Urusan/Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
Pemerintahan Desa	Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas														
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	12 Dokume n	12 Dokum en	109.154.000	12 Dokum en	109.165.000	12 Dokum en	109.165.000	12 Dok ume n	109.165.000	12 Dok ume n	109.165.000	12 Dok ume n	109.165.000	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang dilakukan pemilihan Kepala Desa	43 desa	43 desa	-	43 desa	210.000.000	43 desa	220.000.000	43 desa	230.000.000	43 desa	240.000.000	43 desa	250.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1. Jumlah Nagari di fasilitasi profil nagarinya, 2 Jumlah aparatur desa yang dilatih pengelolaan data profil desa	43 desa	43 desa	-	43 desa	81.000.000	43 desa	82.000.000	43 desa	83.000.000	43 desa	84.000.000	43 desa	85.000.000	
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Pemberhentian Perangkat Desa	43 desa	43 desa	-	43 desa	110.000.000	43 desa	120.000.000	43 desa	130.000.000	43 desa	140.000.000	43 desa	150.000.000	
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Des	27 Dokume n	27 Dokum en	-	27 Dokum en	41.000.000	27 Dokum en	41.000.000	27 Dok ume n	41.000.000	27 Dok ume n	41.000.000	27 Dok ume n	41.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYA A LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	80%	80%	718.095.000	90%	721.095.000	90%	721.095.000	90%	723.095.000	90%	727.095.000	90%	727.095.000	
	Persentase Pasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	75%	75%	-	80%	500.000.000	85%	530.000.000	90%	600.000.000	90%	650.000.000	90%	700.000.000	
Pemebrdayaan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemebrdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota.	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	105 Lembaga Ke masyaraka t	105 Lembaga Ke masyara kat	718.095.000	105 Lembag a Ke masyara kat	721.095.000	105 Lembag a Ke masyara kat	721.095.000	105 Lemb aga Ke masy arakat	723.095.000	105 Lemb aga Ke masy arakat	727.095.000	105 Lemb aga Ke masy arakat	727.095.000	
Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggara gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	43 Dokume n	43 Dokum en	418.095.000	43 Dokum en	419.095.000	43 Dokum en	419.095.000	43 Dok ume n	419.095.000	43 Dok ume n	419.095.000	43 Dok ume n	419.095.000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	10 Lembaga	10 Lembag a	150.000.000	10 Lemba ga	151.000.000	10 Lemba ga	152.000.000	10 Lem baga	154.000.000	10 Lem baga	155.000.000	10 Lem baga	155.000.000	

Bidang Urusan/Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya														
Fasilitasi Buln Bhakti Gotong Royong	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		1 Laporan	150.000.000	1 laporan	151.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	1 Laporan	153.000.000	1 Laporan	153.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indeks Pembangunan Keluarga (i Bangga)		62,94%	200.000.000	64,64%	250.000.000	66,34%	270.000.000	68,04%	280.000.000	69,74%	290.000.000	71,44%	300.000.000	
	Angka KelahiranTotal/Fertility Rate (TFR)	1.3 Persen	1.3 Persen	163.800.000	1.3 Persen	244.900.000	1.3 Persen	254.900.000	1.3 Perse n	264.900.000	1.3 Perse n	274.900.000	1.3 Perse n	284.900.000	
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR 15-19)		11,9%		11,7%	300.000.000	11,5%	340.000.000	11,4%	360.000.000	11,3%	380.000.000	11,2%	400.000.000	
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR per WUS Usia 15-49 Tahun		2,45%		2,42%	320.000.000	2,40%	350.000.000	2,38%	380.000.000	2,36%	400.000.000	2,34%	430.000.000	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Jumlah kebijakan yang di sinkronisasi			-											
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapatkan advokasi,Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal				20 Satuan Pendidikan	160.000.000,00	20 Satuan Pendidikan	170.000.000,00	20 Satuan Pendidikan	180.000.000,00	20 Satuan Pendidikan	190.000.000,00	20 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GPDK) Tingkat Kabupaten	Jumlah Dokumen Penyusunan Dan Pemanfaatan Garand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-		180.000.000,00	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	220.000.000,00	1 Dokumen	230.000.000,00	1 Dokumen	230.000.000,00	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,5%	100 Persen	163.800.000	100 Persen	244.900.000	100 Persen	254.900.000	100 Perse n	264.900.000	100 Perse n	274.900.000	100 Perse n	284.900.000	
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen			50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000	
Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan					70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem	Jumlah Laporan Pembinaaan Dan Pengawasan			-		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00	

Bidang Urusan/Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
Informasi Keluarga	Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga														
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	43Laporan	43Laporan	43.800.000,00	43Laporan	43.900.000,00	43Laporan	43.900.000,00	43Laporan	43.900.000,00	43Laporan	43.900.000,00	43Laporan	43.900.000,00	
Pengolahan dan pelaporan data penegndalian lapangan dan pelyanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	120.000.000,00	12 Dokumen Dokumen	121.000.000,00	12 Dokumen Dokumen	121.000.000,00	12 Dokumen Dokumen	121.000.000,00	12 Dokumen Dokumen	121.000.000,00	12 Dokumen Dokumen	121.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR)	64 %	61 %	1.932.041.000	61,50%	2.213.446.000	61,75%	2.362.800.000	62%	2.454.800.000	62,50%	2.567.900.000	62,67%	2.627.900.000	
	Persentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need	15,2%	15,2%	500.000.000	15,0%	530.000.000	14,8%	490.000.000	14,4%	420.000.000	14,1%	415.000.000	13,9%	408.000.000	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearufan Budaya Lokal	Terlaksananya Jenis Media KIEyang adakan	1Dokumen	70 Persen	1.085.995.000	70 Persen	1.159.995.000	70 Persen	1.270.995.000	70 Persen	1.310.995.000	70 Persen	1.354.995.000	70 Persen	1.384.995.000	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				10 Balai	75.000.000		85.000.000		95.000.000		105.000.000		115.000.000	
Penyediaan dan distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)					60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		110.000.000	
Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra KerjA	10 Organisasi	10 Organisasi	199.999.000	10 Organisasi	110.999.000	10 Organisasi	189.999.000	10 Organisasi	197.999.000	10 Organisasi	199.999.000	10 Organisasi	199.999.000	
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	110.000.000	12 Dokumen	120.000.000	12 Dokumen	130.000.000	12 Dokumen	140.000.000	12 Dokumen	140.000.000	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan,	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	151.000.000	12 Laporan	152.000.000	12 Laporan	153.000.000	12 Laporan	155.000.000	12 Laporan	155.000.000	

Bidang Urusan/Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
Rapat Koordinasi Desa, dan Mini Lokakarya	Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok														
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan Budaya Lokal	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	80.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000	
Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) oleh pokja advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		110.000.000	
Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Lapora n	496.000.000	12 Lapora n	498.000.000	12 Lapora n	499.000.000	12 Lapo ran	500.000.000	12 Lapo ran	510.000.000	12 Lapo ran	510.000.000	
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12Laporan	12Lapora n	139.996.000	12Lapora n	149.996.000	12Lapora n	149.996.000	12Lapo ran	149.996.000	12Lapo ran	149.996.000	12Lapo ran	149.996.000	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1Lapora n	100 Persen	318.000.000	100 Persen	338.000.000	100 Persen	349.000.000	100 Perse n	364.000.000	100 Perse n	389.000.000	100 Perse n	399.000.000	
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) di lini lapangan PKB/PLKB			129.000.000	20 Organisasi	129.000.000	20 Organisasi	129.000.000	20 Organisasi	129.000.000	20 Organisasi	129.000.000	20 Organisasi	129.000.000	
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang tersedia			60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		110.000.000		120.000.000	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	43 Orang	43 Orang	129.000.000	43 Orang	139.000.000	43 Orang	140.000.000	43 Ora ng	145.000.000	43 Ora ng	150.000.000	43 Ora ng	150.000.000	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	10Faske s	100 Persen	252.804.000	100 Persen	254.099.000	100 Persen	248.309.000	100 Perse n	258.309.000	100 Perse n	260.409.000	100 Perse n	260.409.000	

Bidang Urusan/Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
	Kabupaten/Kota														
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10 Laporan	10 Lapora n	13.500.000	10 Lapor an	13.600.000	10 Lapor an	13.700.000	10 Lap oran	13.700.000	10 Lap oran	13.800.000	10 Lap oran	13.800.000	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	50 Orang	50 Orang	223.508.000	50 Orang	224.609.000	50 Orang	234.609.000	50 Ora ng	244.609.000	50 Ora ng	246.609.000	50 Ora ng	246.609.000	
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			-											
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jeajaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Lapora n	15.796.000	12 Lapora n	15.890.000	12 Lapora n		12 Lapo ran		12 Lapo ran		12 Lapo ran		
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber- KB	Terlaksananya Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber- KB Organisasi kemasyarakatan yang ditingkatkan pemberdayaannya	1Dokum en	100 Perse	275.242.000	100 Perse	461.352.000	100 Perse	494.496.000	100 Perse	521.496.000	100 Perse	563.496.000	100 Perse	583.496.000	
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	10 Dokume n	10 Dokum en	3.746.000	10 Dokum en	3.856.000	10 Dokum en	6.000.000	10 Dok ume n	7.000.000	10 Dok ume n	8.000.000	10 Dok ume n	8.000.000	
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				10 Laporan	45.000.000	10 laporan	55.000.000	10 laporan	60.000.000	10 Laporan	70.000.000	10 Laporan	70.000.000	
Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 laporan	80.000.000	12 laporan	90.000.000	12 Laporan	100.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB				12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 laporan	90.000.000	12 laporan	110.000.000	12 Laporan	120.000.000	
Pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan	10 Kampun g	10 Kampu ng	271.496.000	10 Kampu ng	282.496.000	10 Kampu ng	283.496.000	10 Kam pung	284.496.000	10 Kam pung	285.496.000	10 Kam pung	285.496.000	

Bidang Urusan/Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
	Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)														
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	20%	30%	787.600.000	50%	1.563.600.000	60%	1.664.600.000	70%	1.775.600.000	80%	1.795.600.000	90%	1.900.600.000	
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	58,62			61,12	200.000.000	62,62	220.000.000	64,13	230.000.000	65,64	238.000.000	68,16	250.000.000	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui PembinaanKetahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	100 %	300.000.000	100 %	775.000.000	100 %	845.000.000	100 %	925.000.000	100 %	1.005.000.000	100 %	1.080.000.000	
Pengadaan Sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	30 Unit	30 Unit	300.000.000	30 Unit	310.000.000	30 Unit	320.000.000	30 Unit	330.000.000	30 Unit	340.000.000	30 Unit	340.000.000	
Orientasi Pelatihan Teknis Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi Pelatihan Teknis Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			-		120.000.000,00		130.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000,00	
Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Persentasesekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia					60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)					75.000.000,00		85.000.000,00		95.000.000,00		105.000.000,00		120.000.000,00	
Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)					80.000.000,00		90.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00	
Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah orang yang mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)					70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00	

Bidang Urusan/Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
Penyediaan Biaya operasional bagi pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan EkonomiKeluarga/UPPKS)	Penyediaan Biaya operasional bagi pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS			-		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		110.000.000,00	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 Persen	100 Persen	487.600.000,00	100 Persen	788.600.000,00	100 Persen	819.600.000,00	100 Perse n	850.600.000,00	100 Perse n	790.600.000,00	100 Perse n	820.600.000,00	
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita	12 laporan	12 laporan	156.000.000,00	12 laporan	157.000.000,00	12 laporan	158.000.000,00	12 lapor an	159.000.000,00	12 lapor an	159.000.000,00	12 lapor an	159.000.000,00	
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	140.000.000,00	12 Laporan	150.000.000,00	12 laporan	160.000.000,00	12 laporan	170.000.000,00	12 Laporan	180.000.000,00	
Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	Jumlah Remaja yang dilakukan Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga					150.000.000,00	12 Laporan	160.000.000,00	12 laporan	170.000.000,00	12 laporan	180.000.000,00	12 Laporan	190.000.000,00	
Pembinaan Perencanaan Menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang mendapatkan Pembinaan Perencanaan Menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja			160.000.000,00	12 Laporan	170.000.000,00	12 Laporan	180.000.000,00	12 laporan	190.000.000,00	12 Laporan	110.000.000,00	12 Laporan	120.000.000,00	
Penyediaan Sarana edukasi PKBR di Kelompok Kegiatan	Jumlah Unit Sarana edukasi PKBR di Kelompok Kegiatan	12 laporan	12 laporan	171.600.000,00	12 laporan	171.600.000,00	12 laporan	171.600.000,00	12 laporan	171.600.000,00	12 laporan	171.600.000,00	12 laporan	171.600.000,00	

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan Pencatatan data Pengumpulan Data Keluarga, output terlaksananya pemutakhiraan Data verval KRS pada 43 Desa. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, output tersedianya data pelayananan KB 15 Puskesmas dan 1 RSUD.

Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal. Subkegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB, output Tersedianya biaya operasional 10 sarana Balai Penyuluhan KB. Subkegiatan Advokasi Program Banggga kencana Oleh Pokja Advokasi Stakeholders dan Mitra Kerja, output Terlaksananya pembinaan genting di Tk Kabupaten.

Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. Subkegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat Obat dan Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke Faskes Termasuk jaringan dan jejaringnya, output Tersedianya alat obat kontrasespsi pad 24 faskes dan jejaring. Subkegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), output tercapainya Akseptor 350 Implan, 3 MOW, 1 MOP.

Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting0 di Kampung KB, output Terlaksananya DASHAT pada 8 Kampung KB.

Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Subkegiatan Penyediaaan Biaya Operasional bagi Kelompok Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKA), output Terlaksananya pembinaan kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL pada 17 Kampung KB.

Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Subkegiatan Pendampingan keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Catin, Ibu hamil, Ibu Pascasalin/Persalinan, Baduta/balita), output Terlaksananya Pendampingan Catin, Ibu hamil, Ibu Pascasalin/Persalinan, Baduta/balita) oleh 52 Tim Pendamping Keluarga.

Tabel 4.4
Daftar Sub kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	
			Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengendalian pendistribusian alat dan Obat kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Ballita)	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 melalui IKU

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Desa Membangun (IDM) Target Kinerja Tahunan pada tahun 2025 6,98% (3 Desa Mandiri) tahun 2026 9,30%, (4 Desa Mandiri) tahun 2027 11,63, (5 Desa Mandiri) tahun 2028 13,95 (6 Desa Mandiri) , tahun 2029 16, 28 (7 Desa Mandiri), tahun 2030 20,93 (9 Desa Mandiri). Terdapat peningkatan setiap tahun target kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Desa Membangun (IDM) Peningkatan target kinerja tahunan dari tahun 2025 ke tahun 2026 bertambah satu desa mandiri yaitu dari 3 desa mandiri menjadi 4 desa Mandiri. Dari tahun 2026 ke tahun 2027 bertambah satu desa mandiri yaitu dari 4 desa mandiri menjadi 5 desa Mandiri. Dari tahun 2027 ke tahun 2028 bertambah satu desa mandiri yaitu dari 5 desa mandiri menjadi 6 desa Mandiri. Dari tahun 2028 ke tahun 2029 bertambah satu desa mandiri yaitu dari 6 desa mandiri menjadi 7 desa Mandiri. Dari tahun 2029 ke tahun 2030 bertambah Dua desa mandiri yaitu dari 7 desa mandiri menjadi 9 desa Mandiri. Jadi, peningkatan target kinerja tahunan Indikator Kinerja Utama Indeks Desa Membangun (IDM) sejak tahun 2025 desa Mandiri yang berjumlah 3 Desa yaitu Desa 2 Desa di Kecamatan Sipora Utara Desa Desa Tuapejat dan Desa Sipora Jaya. 1 Desa di Kecamatan Sikakap yaitu Desa Sikakap. Pada tahun 2030 target desa Mandiri menjadi 9 Desa. Jadi, dari tahun 2025 sampai tahun 2030 ada peningkatan target tahunan dengan total 6 Desa.

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang diukur melalui Dimensi Ketentraman, Kemandirian, Kebahagiaan. Berdasarkan Indeks Pembangunan Keluarga hasil Pemutakhiran PK 2024 Kabupataen Kepulauan Mentawai 55,60. Pada dimensi ketentraman 57, 22, pada dimensi kemandirian 43, 96, pada dimensi kebahagiaan 65,63. Pada tahun 2025 target Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 62, 94. Pada tahun 2026 target 64, 64. Pada tahun 2027 target 66, 34. Pada tahun 2028 target 68, 64. Pada tahun 2029 target 69, 74. Pada tahun 2030 target 71,44. Jadi, dari tahun 2025 sampai 2030 terdapat kenaikan target sebanyak 8, 50.

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Persentase desa dengan BUMDes aktif dan berkembang pada tahun 2025 40 %, pada tahun 2026 45%, pada tahun 2027 50%, pada tahun 50%, pada tahun 2028 55%, pada tahun 2029 60 %, pada tahun 2030 65 %. Jadi setiap tahun ada kenaikan target sebanyak 5 %. Kenaikan target tahunan dari tahun 2025 sampai 2030 sebayak 25 %.

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Persentase kelompok masyarakat yang mengembangkan usaha ekonomi produktif pada tahun 2025 40%%, pada tahun 2026 45%, pada tahun 2027 50%, pada tahun 50%, pada tahun 2028 55%, pada tahun 2029 60 %, pada tahun 2030 65 %. Jadi setiap tahun ada kenaikan target sebanyak 5 %. Kenaikan target tahunan dari tahun 2025 sampai 2030 sebayak 25 %.

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Persentase masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan berbasis desa pada tahun 2025 75, %, tahun 2026 80%, tahun 2027 85%, tahun 2028 85%, tahun 2029 90%, tahun 2023 90%. Jadi kenaikan target dari tahun 2025 ke 2026 5 %. Pada tahun 2027 ke tahun 2028 tidak ada kenaikan target tetap 85%, pada tahun 2029 target 90 %, ada penambahan target 5 % di tahun 2029 dari tahun 2028. Pada tahun 2030 target 90% sama dengan target tahun 2028. Jadi, dari tahun 2025 sampai 2023 terdapat penambahan target 10 %.

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai standar akuntabilitas tahun 2025 90 %, tahun 2026 90%, 2027 90%, 2028 90%, 2029 90 %, 2030 90%. Jadi dari tahun 2025 sampai tahun 2030 target Kinerja Indikator Kinerja Utama Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai standar akuntabilitas 90 %.

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan/pembinaan pengelolaan keuangan tahun 2025 43 Desa, tahun 2026 43 Desa, 2027 43 Desa, 2028 43 Desa, 2029 43 Desa, 2030 43 Desa . Jadi dari tahun 2025 sampai tahun 2030 target Kinerja Indikator Kinerja Utama Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan/pembinaan pengelolaan tetap 43 Desa.

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Persentase desa dengan laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai regulasi 2025 90 %, tahun 2026 90%, 2027 90%, 2028 90%, 2029 90 %, 2030 90%. Jadi dari tahun 2025 sampai tahun 2030 target Kinerja Indikator Kinerja Utama Persentase desa dengan laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai regulasi 90%.

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) tahun 2025 2,45 %, tahun 2026 2,42%, 2027 2,40%, 2028 2,38%, 2029 2,36%, 2030 2,34%. Jadi dari tahun 2025 sampai tahun 2030 target Kinerja Indikator Kinerja Utama Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) terjadi penurunan target 0,11 %

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Persentase pasangan usia subur peserta KB aktif tahun 2025 70 %, tahun 2026 72%, 2027 75%, 2028 79%, 2029 79%, 2030 80%. Jadi dari tahun 2025 sampai tahun 2030 target Kinerja Indikator Kinerja Utama Persentase pasangan usia subur peserta KB aktif terjadi kenaikan target 10 %.

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Rata-rata usia kawin pertama Tahun 2025 (21 tahun) tahun 2026 (21 tahun), 2027 (21 tahun) ,2028 (21 tahun) , 2029 (21 tahun), 2030 (21 tahun) . Jadi dari tahun 2025 sampai tahun 2030 target Kinerja Indikator Kinerja Utama Rata-rata usia kawin pertama tetap 21 Tahun.

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Angka prevalensi stunting pada balita tahun 2025 14 %, tahun 2026 12 %, 2027 10%, 2028 8%, 2029 5%, 2030 2%. Jadi dari tahun 2025 sampai tahun 2030 target Kinerja Indikator Kinerja Utama Angka prevalensi stunting pada balita terjadi penurunan target menjadi 2 %.

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun, tahun 2025 11,9%, tahun 2026 11,7 %, 2027 11,5%, 2028 11,4%, 2029 11,3%, 2030 11,2%. Jadi dari tahun 2025 sampai tahun 2030 target Kinerja Indikator Kinerja Utama Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun terjadi penurunan target menjadi 0,50 %.

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi, tahun 2025 70%, tahun 2026 71 %, 2027 73%, 2028 75%, 2029 76%, 2030 77%. Jadi dari tahun 2025 sampai tahun 2030 target Kinerja Indikator Kinerja Utama Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhiterjadi penurunan target menjadi 7 %.

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Lansia Berdaya, tahun 2025 58,69%, tahun 2026 59,46 %, 2027 60,21%, 2028 60,52%, 2029 61,20%, 2030 61,5%. Jadi dari tahun 2025 sampai tahun 2030 target Kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Lansia Berdaya terjadi kenaikan target menjadi 2,81 %.

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja, tahun 2025 84,87%, tahun 2026 86,15 %, 2027 87,33%, 2028 88,4%, 2029 88,9%, 2030 89 %. Jadi dari tahun 2025 sampai tahun 2030 target Kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Lansia Berdaya terjadi kenaikan target menjadi 4,13 %.

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri tahun 2025 67,29%, tahun 2026 72,29%, 2027 77,29%, 2028 82,29%, 2029 87,29%, 2030 92,29%. Jadi dari tahun 2025 sampai tahun 2030 target Kinerja Indikator Kinerja Utama Utama Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri terjadi kenaikan target 25 %.

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Nilai Lakip tahun 2025 83,65%, tahun 2026 83,80%, 2027 83,84%, 2028 84,00%, 2029 84,15%, 2030 84,30%. Jadi dari tahun 2025 sampai tahun 2030 target Kinerja Indikator Kinerja Utama Nilai Lakip terjadi kenaikan target 0,65 %.

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Jumlah Inovasi yang diterapkan tahun 2025 (1), tahun 2026 (2) 2027 (2), 2028 (2), 2029 (2), 2030 (2). Jadi dari tahun 2025 sampai tahun 2030 target Kinerja Indikator Kinerja Utama Jumlah Inovasi yang diterapkan menjadi 2.

Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 100%, tahun 2026 100% 2027 100%, 2028 100%, 2029 100%, 2030 100%. Jadi dari tahun 2025 sampai tahun 2030 target Kinerja Indikator Kinerja Utama Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah tetap 100%.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator	Target Kinerja Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	6,98	9,30	11,63	13,95	16,28	20,93
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	62,94	64,64	66,34	68,04	69,74	71,44
3	Persentase desa dengan BUMDes aktif dan berkembang.	40%	45%	50%	55%	60%	65%
4	Persentase kelompok masyarakat yang mengembangkan usaha ekonomi produktif.	40%	45%	50%	55%	60%	65%
5	Persentase masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan berbasis desa.	75%	80%	85%	85	90%	90%
6	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai standar akuntabilitas	90%	90%	90%	90%	90%	90%
7	Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan/pembinaan pengelolaan keuangan.	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa
8	Persentase desa dengan laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai regulasi	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	2,45%	2,42%	2,40%	2,38%	2,36%	2,34%
10	Persentase pasangan usia subur peserta KB aktif.	70%	72%	75%	79%	79%	80%
11	Rata-rata usia kawin pertama	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun
14	Angka prevalensi stunting pada balita.	14 %	12%	10%	8%	5%	2%
15	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	11,9	11,7	11,5	11,4	11,3	11,2
16	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi	70	71	73	75	76	77
17	Indeks Lansia Berdaya	58,69	59,46	60,21	60,52	61,20	61,5
18	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	84,87	86,15	87,33	88,4	88,9	89
19	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	67,29	72,29	77,29	82,29	87,29	92,29
20	Nilai Lakip	83,65	83,80	83,84	84,00	84,15	84,30
21	Jumlah Inovasi yang diterapkan	1	2	2	2	2	2
22	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan sebagai ukuran capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan karena menjadi indikator keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah, yang digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan rencana di masa depan. Penilaian tersebut sebagai akuntabilitas kinerja dan informasi tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah kepada masyarakat. Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Ini dapat dilihat pada tabel 4.4 dan tabel 4.5

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator	Target Kinerja Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	6,98	9,30	11,63	13,95	16,28	20,93
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	62,94	64,64	66,34	68,04	69,74	71,44
3	Persentase desa dengan BUMDes aktif dan berkembang.	40%	45%	50%	55%	60%	65%
4	Jumlah kelompok masyarakat yang mengembangkan usaha ekonomi produktif.	40%	45%	50%	55%	60%	65%
5	Persentase masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan berbasis desa.	75%	80%	85%	85	90%	90%
6	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai standar akuntabilitas	90%	90%	90%	90%	90%	90%
7	Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan/pembinaan pengelolaan keuangan.	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa	43 Desa
8	Persentase desa dengan laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai regulasi	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)..	2,45%	2,42%	2,40%	2,38%	2,36%	2,34%
10	Persentase pasangan usia subur peserta KB aktif.	70%	72%	75%	79%	79%	80%
11	Rata-rata usia kawin pertama	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun	21 Tahun
12	Angka prevalensi stunting pada balita.	14 %	12%	10%	8%	5%	2%
13	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	11,9	11,7	11,5	11,4	11,3	11,2

NO	Indikator	Target Kinerja Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	6,98	9,30	11,63	13,95	16,28	20,93
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	62,94	64,64	66,34	68,04	69,74	71,44
14	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi	70	71	73	75	76	77
15	Indeks Lansia Berdaya	58,69	59,46	60,21	60,52	61,20	61,5
16	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	84,87	86,15	87,33	88,4	88,9	89
17	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	67,29	72,29	77,29	82,29	87,29	92,29
18	Nilai Lakip	83,65	83,80	83,84	84,00	84,15	84,30
19	Jumlah Inovasi yang diterapkan	1	2	2	2	2	2
20	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Base line (2025)	Tahun					
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase fasilitasi penataan desa	Persen	7	12	23	47	70	100	
2	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	25	30	32	35	40	50	
3	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persen	10	12	20	25	30	40	
4	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen	7	12	19	35	58	70	
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Permasyarakatan Desa (LPD)	Persen	10	12	20	25	30	40	
6	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	4	10	15	20	25	30	
7	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	5,25	5,75	6,25	7,25	8,25	9,25	
8	Angka Kelahiran Total (Total *Fertility Rate*/TFR)	Nilai	2,68	2,4	2,38	2,37	2,35	2,33	
9	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	Nilai	11	11,2	11	11,2	11,1	11,1	
10	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR)	Persen	51,60	61,50	61,75	62,00	62,50	62,67	
11	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)	Persen	12,95	11,90	12,30	12,50	12,70	12,80	
12	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	
13	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Persen	58,62	61,12	62,62	64,13	65,64	68,16	

BAB V
PENUTUP

Perencanaan yang berkualitas akan mampu mendorong visi dan misi kepala daerah kepada sebuah kenyataan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi dokumen Rencana Strategis (Renstra) oleh masing-masing perangkat daerah, sehingga lebih operasional dan dapat untuk dilaksanakan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah yang strategis dan merupakan penjabaran secara teknis RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana kurun waktu 5 tahun.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra ini dapat berjalan efektif. Renstra ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Mentawai serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.

Manajemen Resiko dalam menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 ini dilakukan hingga pada level sasaran pembangunan yang lebih detail menjelaskan target operasional pembangunan. Tahapan proses pengelolaan resiko pemerintahan daerah tersebut antara lain: Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Melaluli mitigasi risiko yang tepat dan terukur akan mampu mengendalikan dan mengelola risiko yang berpotensi dan menggagalkan tujuan dari perencanaan pembangunan. Mitigas tersebut telah dimulai sejak pada proses perencanaan, sehingga perlu dipantau terus pada tahapan pelaksanaan, pengendalian, dan dilakukan monitoring/ evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029 menjadi komitmen dan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalaian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 1
1.3 Maksud dan Tujuan..... 4
1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika..... 7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika..... 7
2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika..... 12
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika..... 15
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika..... 21
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika..... 21
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika..... 21
2.2.2 Isu Strategis 23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029..... 27
3.2 Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029..... 27
3.3 Strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029..... 29
3.4 Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029..... 30

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN URUSAN
4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 32
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 60

BAB V PENUTUP..... 62

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Jumlah Pegawai	12
Tabel	2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	12
Tabel	2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	13
Tabel	2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Struktural	13
Tabel	2.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	13
Tabel	2.6	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	14
Tabel	2.7	Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2024	17
Tabel	2.8	Urusan Hasil Evaluasi Capaian Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	19
Tabel	2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	20
Tabel	2.10	Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika	21
Tabel	2.11	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	21
Tabel	2.12	Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	25
Tabel	3.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029	27
Tabel	3.2	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika	28
Tabel	3.3	Tujuan, Sasaran dan Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika	29
Tabel	3.4	Tahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029	30
Tabel	3.5	Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	30
Tabel	4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	34
Tabel	4.2	Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan	49
Tabel	4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	56
Tabel	4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika	60
Tabel	4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	11
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika	33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang beriorentasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 serta Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.4.2-176 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, tak terkecuali rencana strategis perangkat daerah juga merupakan bagian dari sistem perencanaan daerah dan nasional. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik disusun berpedoman pada RPJMD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta acuan dalam penilaian kinerja. Di dalam renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.

Dengan adanya perubahan SOTK baru Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statisik merupakan OPD yang terbentuk berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2025.Sebagai Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugas menjalankan sebagian urusan daerah di bidang informasi yang berbasis TIK, disamping beban tugas lain yang tak kalah pentingnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibutuhkan suatu perencanaan sebagai arah kebijakan dan sasaran yang akan dituju. Rencana strategis ini adalah sebuah dokumen resmi pemerintah daerah yang dibutuhkan sebagai pengarah dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah secara khusus dan pembangunan daerah pada umumnya dalam masa waktu 5 (lima) tahun Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Tahapan penyusunan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik diawali dengan persiapan penyusunan renstra, penyusunan rancangan renstra, penyusunan rancangan akhir renstra dan penetapan renstra Dinas Komunikasi Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik tentunya memperhatikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan baik ditingkat daerah, propinsi maupun pusat. Penyelarasan tersebut terkait dengan pelaksanaan tupoksi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik agar lebih efektif dan efesien. Alur penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawaia 2025-2029 dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang mengatur penyusunan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Diubah dengan PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025- 2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
21.. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah:

1. Pedoman pelaksanaan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik selama tahun 2025-2029.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.
3. Pedoman dalam fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai penjabaran operasional visi dan misi kepala daerah menyangkut fungsi urusan komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik.
2. Sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai selama Tahun 2025-2029.
3. Sebagai instrumen penilaian kinerja dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai selama lima Tahun kedepan.
4. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dalam urusan bidang komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis (renstra) Dinas Komunikasi dan Informatik Kabupaten Kepulauan Mentawai ini ditulis dengan sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini di antaranya berisikan latar belakang penulisan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang juga berisikan tentang dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dari renstra.Bab ini terdiri dari :

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEG.

Dalam bab II ini berisikan penyajian data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah disertai evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir, serta mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah. Bab ini terdiri dari :

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan dan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab III ini menjelaskan tujuan dan sasaran beserta strategis dan arah kebijakan perangkat daerah yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar,prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkanoleh pemerintah pusat sesuai kewenangannya dan mengacu pada sasaran 5 (lima)tahun kedepan disertai dengan indikator kinerja. Bab ini terdiri dari :

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat daerah tahun 2025-2029

3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memaparkan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang menagcu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuktakhirannya dan menjelaskan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci beserta target pagu indikatif untuk pencapaian 5 (lima) tahun kedepan. Bab ini terdiri dari :

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V : PENUTUP

Bab menjelaskan kesesuaian antara target kinerja Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan Daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, Uraian tugas jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan Fungsi:

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. Merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang komunikasi dan informatika, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, fungsi :

a. Perumusan Kebijakan Daerah urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Tugas dan Fungsi:

a. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
d. Pelaksanaan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

SubBagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dan Fungsi:

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
c. Menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan dinas;
d. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas;
e. Menyiapkan bahan pengelolaan urusan kerumahtanggaan;
f. Menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
g. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
h. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
i. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan dinas; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Sektoral

Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Sektoral mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis supervisi urusan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik yang memiliki fungsi kehumasan Pemerintah Daerah dan bidang statistik sektoral.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Sektoral menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik;
b. Pelaksanaan sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik;
c. Pelaksanaan monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik;penyusunan strategi komunikasi publik;
d. Penyusunan strategi komunikasi publik;
e. Penyusunan konten;
f. Penyelenggaraan diseminasi informasida pengelolaan media komunikasi publik;
g. Pelayanan informasi publik;
h. Pengelolaan relasi media;
i. Pengelolaan kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat;
j. Penguatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik;
k. Pengelolaan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi; dan
l. Penyusunan kebijakan teknis verifikasi, validasi dan penyebarluasan data statistik sektoral;

m. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis verifikasi , validasi dan penyebarluasan data statistik sektoral;
n. Pelaksanaan kompilasi data statistik sektoral;
o. Pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi verifikasi, validasi dan penyebarluasan data statistik sektoral;
p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Statistik Sektoral mempunyai tugas:

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis verifikasi, validasi dan penyebarluasan data statistic sektoral;
b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan verifikasi, validasi dan penyebarluasan data statistik sektoral;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan verifikasi, validasi dan penyebarluasan data statistik sektoral;
d. Melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi, bimbingan teknis, penerapan dan supervisi verifikasi, validasi dan penyebarluasan data statistik sektoral melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan teknis tata kelola statistik di lingkungan pemerintah daerah;
e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan sumber daya manusia statistik di lingkungan pemerintah daerah;
f. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di bidang statistik yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data dan informasi pembangunan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan statistik, pengembangan infrastruktur statistik dan koordinasi statistik;
g. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di bidang statistik yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data dan informasi pembangunan pemerintah daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan statistik, pengembangan infrastruktur statistik dan koordinasi statistik;
h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan verifikasi, validasi dan penyebarluasan data statistik sektoral; dan
i. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lainnya Yang Diberikan Oleh Atasan.

Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian

Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, norma standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis supervisi urusan bidang komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi informatika dan bidang persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Aplikasi Informatika dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah; dan
b. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah yang diselenggarakan melalui penyelenggaraan Pemerintah Digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
    1) tata kelola pemerintah digital pada Pemerintah Daerah;
    2) manajemen Pemerintah Digital;
    3) audit teknologi informasi komunikasi;
    4) penyelenggara Pemerintah Digital pada Pemerintah Daerah;
    5) promosi literasi Digital, dan kolaborasi penyelenggaraan Pemerintah Digital; dan
    6) penyelenggaraan pengelolaan kabupaten dengan pendekatan kota cerdas;
c. Penyusunan kebijakan pengamanan informasi;

d. Pengelolaan sumber daya keamanan informasi;
e. Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi noneletronik;
f. Penyediaan layanan keamanan informasi;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Persandian mempunyai tugas:

a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis persandian dan keamanan informasi;
b. pelaksanaan teknis kebijakan persandian dan keamanan informasi;
c. melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi;
d. pelaksanaan kegiatan keamanan informasi di lingkup kabupaten yang terdiri dari tata kelola, layanan operasional dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data keamanan informasi;
e. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) persandian dan keamanan informasi serta peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
f. melakukan penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan perangkat lunak dan keras persandian dan keamanan informasi serta jaring komunikasi sandi;
g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Persandian dan keamanan informasi;
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

UPTD

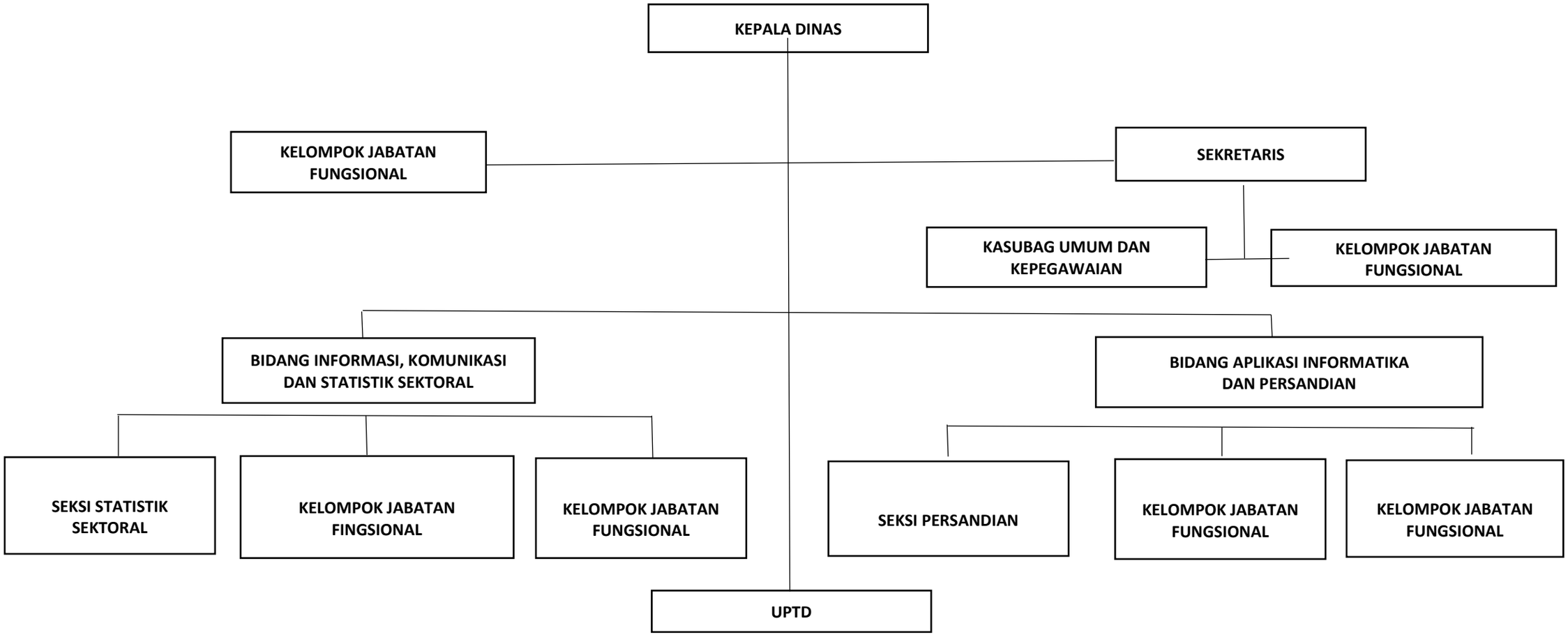
1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan kebutuhan.
2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, jenis serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Struktur Organisasi

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bagan struktur organisasi dapat dilihat pada renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari :

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai dari segi sarana prasarana selain perangkat pendukung pelayanan, terdapat unit layanan yakni Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Sasaraina, yang secara umum memiliki peran dalam penghimpunan data berita serta penyebarluasan informasi. Untuk Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tenaga berjumlah 44 orang yang terdiri dari tenaga ASN dan Non ASN dengan perincian sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	ASN / CPNS	19 Orang
2.	PPPK	8 Orang
3.	PEGAWAI KONTRAK (PARUH WAKTU	17 Orang
	JUMLAH	44 Orang

Berdasarkan gender komposisi pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik adalah sebagai berikut :

1. Laki – laki sebanyak 20 (dua puluh) orang.
2. Perempuan sebanyak 24 (dua puluh dua) orang.

Sumber Daya Manusia Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik tersebut tersebar pada 3 (tiga) unit kerja sebagai berikut :

- Sekretariat
- Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian
- Bidang Informasi, Komunikasi dan Statistik Sektoral

Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan berikut :

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT / GOL	JUMLAH
1	*2*	*3*
1.	PEMBINA UTAMA MUDA / IV c	1
2.	PEMBINA TK.I / IV b	1
3.	PEMBINA/ IV a	3
4.	PENATA TK. I / III d	3
5.	PENATA / III c	3
6.	PENATA MUDA TK.I / III b	1
7.	PENATA MUDA / III a	3
8.	PENGATUR TK.I /II d	3
9.	PENGATUR / II c	1
10.	PPPK	8
11.	PEGAWAI KONTRAK (PARUH WAKTU)	17
	JUMLAH	44

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	*2*	*3*
1.	S3	-
2.	S2	6
3.	S1 / D4	18
4.	D III	6
5.	SMU/SMA Sederajat	14
JUMLAH		44

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Struktural

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	*2*	*3*
1.	DIKLAT PIM II	1
2.	DIKLAT PIM III	1
3.	ADUM	3
JUMLAH		5

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya

No	JABATAN	JUMLAH
1	*2*	*3*
1.	STRUKTURAL	5
2.	FUNGSIONAL	6
JUMLAH		11

2.1.2.1 Sarana dan Prasarana

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik memiliki sarana kantor yang beralamat di jalan raya km.4 tuapejat. Dalam pelaksanaan pelayanan selain perangkat pendukung operasional kantor, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik juga memiliki unit layanan pendukung yaitu layanan penyebar luasan informasi/ Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Sasaraina. Adapun Layanan yang dilaksanakan pada unit LPPL Radio Sasaraina diantaranya; 1) Kegiatan Siaran, 2) Kegiatan Reportase, 3) Kegiatan Live Streaming, 4) Talk Show, 5) Berita Sasaraina TV.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik didukung oleh sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut:

Tabel 2.6

Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1.	Meja Kerja Kayu	5	Unit
2.	Meja Rapat	1	Unit
3.	Meja Tambahan	1	Unit
4.	Meja Panjang	1	Unit
5.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
6.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit
7.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	Unit
8.	Meja Rapat Pejabat lainnya	1	Unit
9.	Meja Kerja Pejabat lain-lain	6	Unit
10.	Meja 1/2 Biro	6	Unit
11.	Meja Siaran Sasaraina TV	1	Unit
12.	Kursi Tamu	1	Unit
13.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
14.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	Unit
15.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	Unit
16.	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	50	Unit
17.	Kursi Kayu	1	Unit
18.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Unit
19.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	Unit
20.	Kursi Kerja Pejabat lainnya	12	Unit
21.	Kursi Besi/Metal	1	Unit
22.	Lemari Penyimpan	3	Unit
23.	Filing Cabinet Besi	2	Unit
24.	Lemari Arsip Pejabat lainnya	5	Unit
25.	Gordyin/Kray	55	Helai
26.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	42	Unit
27.	Mini Bus (Penumpang 14 Org Kebawah)	1	Unit
28.	Sepeda Motor	3	Unit
29.	A.C. Split	12	Unit
30.	A.C. Window	2	Unit
31.	P.C Unit	19	Unit
32.	Personal Komputer lainnya	4	Unit
33.	Komputer PC	4	Unit
34.	Lap Top	8	Unit
35.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Unit
36.	Printer Epson	4	Unit
37.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit
38.	Peralatan Cetak lainnya	2	Unit
39.	Scanner Brother	1	Unit
40.	Monitor	2	Unit
41.	Keyboard	2	Unit
42.	Mouse	1	Unit
43.	Hard Disk	4	Unit
44.	Proyektor/Infokus	1	Unit
45.	Tripot Layar Infokus	1	Unit

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
46.	Televisi	2	Unit
47.	Panel UVS	1	Unit
48.	Alat komunikasi radio ssb lainnya	9	Unit
49.	Sound System	1	Unit
50.	Loudspeaker	2	Unit
51.	Mixer Audio	3	Unit
52.	Microphone	13	Unit
53.	Microphone Table Stand	3	Unit
54.	Peralatan Jaringan lainnya	14	Unit
55.	Perkakas bengkel listrik lainnya	1	Unit
56.	Alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya	1	Unit
57.	Tangga	1	Unit
58.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Unit
59.	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Unit
60.	Pompa Air	1	Unit
61.	Portable Generating Set	1	Unit
62.	Target Drone	1	Unit
63.	Repeater Roip	1	Unit
64.	Router	1	Unit
65.	Peralatan Jaringan lainnya	6	Unit
66.	Router	6	Unit
67.	Server	2	Unit
68.	Switch	10	Unit
69.	Transmitter	1	Unit
70.	Uninterupted Power Supply (UPS)	2	Unit
71.	Wireless Video	2	Unit
72.	Peralatan Jaringan lainnya	4	Unit
73.	Acces Point	11	Unit
74.	Komputer Jaringan lainnya	1	Unit
75.	Alat Studio Lainnya	4	Unit
76.	Audio Compressor	2	Unit
77.	Camera Digital	2	Unit
78.	Alat Studio Lainnya	3	Unit
79.	Digital Camera	1	Unit
80.	Alat Studio Lainnya	1	Unit
81.	Camera	1	Unit
82.	Alat Studio Video Lainnya	1	Unit
83.	Peralatan Jaringan lainnya	1	Unit
84.	CCTV	11	Unit
85.	Radio	6	Unit
86.	Gimbal	1	Unit
87.	Global Positioning System	1	Unit
88.	Alat Kantor Lainnya	3	Unit
89.	Alat laboratorium mekanika tanah dan batuan	1	Unit
90.	Alat Pemadam/Portable	2	Unit

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, sebagaiman diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan

kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Demikian pula halnya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk mengukur tentang sejauhmana keberhasilan rencana strategis Dinas Kominfo, perlu adanya evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat dalam capaian kinerja berdasarkan sasaran rencana strategis (renstra) periode sebelumnya 2023-2026.

Penetapan indikator Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kepulauan Mentawai adalah tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya sistem komunikasi dan informatika serta SPBE	Persentase Pembangunan sarana yang berfungsi dengan baik	85	85	100	85	85	100	86	86	100	-	-	-	-	-	-
2.	Meningkatnya cakupan layanan komunikasi dan Informatika	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informati	3	3	100	3	3	100	3	3	100	-	-	-	-	-	-
3.	Meningkatnya cakupan layanan komunikasi Dan Informatika	Nilai Indeks SPBE	1,72	NA	NA	1,89	NA	NA	2,7	1,41	67	-	-	-	-	-	-
	Renstra Strategis Kominfo Tahun 2023-2026																
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Elektroni Terhadap Masyraka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	100	30	30	100
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektron	Nilai Indeks SPBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,32	66	2,2	2,46	111

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
3.	Meningkatnya Cakupan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Informasi Publik Berbasis Elektronik Yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	100	75	75	100
4.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,45	72,45	101	71,45	73,60	103
		Jumlah Inovasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	100	3	3	100
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas evaluasi renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik tahun sebelumnya bisa dikatakan sudah berjalan sesuai dengan apa yag ditargetkan dan direncanakan.

Tabel 2.8
Urusan Hasil Evaluasi Capaian Urusan
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Pembangunan Sarana Yang Berfungsi dengan baik	85	86	86	-	-
2.	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informatika	3	3	3	3	3
3.	Nilai Indeks SPBE	1,72	NA	NA	1,32	2,46
4.	Persentase Layanan Elektronik Terhadap Masyarakat	20	20	20	20	30
5.	Persentase Layanan Informasi Publik Berbasis Elektronik	70	70	70	70	75

Dilihat dari tabel diatas atas capaian urusan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dalam hal indikator sudah tercapai pada target yang direncanakan walaupun ada seperti Nilai Indeks SPBE di tahun 2021 dan 2022 dikarenakan tidak adanya penilaian.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai didukung oleh beberapa inovasi pelayanan urusan dalam rangka percepatan pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sebagai berikut :

1. AREPKAM (audio streaming podcast Kepulauan Mentawai)
   Merupakan Aplikasi yang di fungsikan untuk memungkinkan Anda menerima dan memutar konten audio seperti musik, podcast, atau buku audio secara langsung melalui internet tanpa perlu mengunduh file ke perangkat Anda. Penyajiannya melalui Siaran LPPL Radio Sasaraina secara Streaming Audio dan visual melalui Program Talkshow/Podcast.
2. LUAT (Layanan Umum Apilkasi dan Teknologi)
   Adalah media diskusi dan layanan Pengaduan terhadap layanan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penyajiannya Melalui Aplikasi Telegram.
3. LO'SUA (Layanan Audio Visual)
   Merupakan Penyediaan dan penggunaan media yang melibatkan suara (audio) dan gambar (visual) secara bersamaan untuk tujuan pendidikan, pengajaran, informasi, komunikasi, dan rekreasi. Penyajiannya melalui Visual pada Chanel Youtube Sasaraina TV, berupa Berita, Live Event dan Talkshow.

   Untuk pelaksanaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dapat dilihat realisasi anggaran pada yang tersedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sebagai berikut:

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kepulauan Mentawai

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PETUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.103.516.150	-	-	-		1.825.525.897	-	-	-	-	86.78	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	570.190.500	-	-	-	-	559.954.500	-	-	-	-	98,20	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.758.557.000	-	-	-	-	3.326.207.479	-	-	-	-	88,50	-	-	-	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	4.259.116.759	4.249.457.782	3.517.622.694	3.607.783.617	-	3.821.645.337	3.745.018.520	3.317.440.129	3.350.668.790	-	89,73	88,13	94,31	92,87	-	-
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	-	128.674.574	1.335.910.547	533.105.900	409.353.600	-	121.774.800	1.197.191.590	531.731.300	347.380.745	-	94,64	89,62	99,74	84,86	-	-
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	-	3.526.281.040	3.850.645.800	3.080.869.300	3.021.657.700	-	3.138.738.377	3.698.223.700	3.037.436.071	2.908.084.000	-	89,01	96,04	98,59	96,24	-	-
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	-	-	-	81.734.800	-	-	-	-	70.354.200	-	-	-	-	86,08	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat dari segi realisasi anggaran dari tahun ke tahun adanya peningkatan realisasi anggaran dari beberapa program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menjadi urusan tugas, pokok dan fungsi perangkat daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sasaran ini dapat berupa individu, kelompok, atau komunitas tertentu yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

Tabel 2.10
Kelompok Sasaran Layanan Diskominfo

Kelompok Sasaran	Jenis/Bentuk Layanan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	- Penyediaan internet - Fasilitasi Zoom dan Livestreaming - Peliputan dan publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	- Fasilitasi/Koordinasi/ Asistensi
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan
Pemerintah /Desa	- Fasilitasi/Koordinasi/ Asistensi
LSM/ Organisasi Nirlaba/ Pihak Swasta	- Fasilitasi permintaan informasi publik (PPID)

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi untuk menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan; reproduksi dan distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital. Pada tabel berikut disajikan pemetaan permasalahan dalam pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

Tabel 2.11
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum adanya grand design pengembangan sistem informatika daerah yang mendukung penerapan SPBE	Koordinasi dengan stakeholder (Bappeda, Ortala dll) untuk penyusunan Master Plan	Tidak terbangunnya kejasama yang efektif dengan stakeholder

NO.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Belum Kuatnya Fondasi Transformasi Digital dalam Mendukung Ekosistem Digital Pada Berbagai Sektor dan Belum Optimalnya Implementasi SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Implementasi SPBE Belum Sepenuhnya Berdampak pada Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Masih Lemahnya Kapasitas Pengelolaan dan Sistem Koordinasi Pelaksanaan SPBE Intra dan Antar Instansi Pemerintahan
			Implementasi Kebijakan SPBE yang Belum Menyeluruh dan Terpadu
			Kapasitas SDM SPBE yang terbatas
			Implementasi Pemanfaatan Aplikasi
3.	Keterbatasan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang komunikasi dan informatika	Belum adanya Pendidikan dan pelatihan SDM di Bidang TIK	Keterbatasan anggaran
4.	Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet	Wilayah pemukiman yang tersegmentasi	Letak georafis.
5.	Belum adanya SDM persandian yang kompeten dalam memastikan keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Penempatan SDM belum berdasarkan kapasitas	SDM yang belum memenuhi kriteria berdasarkan kompeten
6.	Belum optimalnya penyebarluasan informasi dan pemanfaatan komunikasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan	Belum optimalnya penyebarluasan informasi publik	Keterlibatan media massa dan media sosial, komunitas dan aparatur dalam penyebarluasan informasi publik belum optimal. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta SDM. Masih tingginya tendensi masyarakat mempercayai berita negatif dan hoax dan menyebarkan kembali melalui media sosial.
7.	Belum adanya sumber daya aparatur dibidang statistik	Penempatan SDM belum berdasarkan kapasitas	SDM yang belum memenuhi kriteria berdasarkan kompeten dibidang statistik

Berdasarkan tabel diatas terdapat permasalahan pokok dalam melaksanakan pelayan diskominfo yakni :

a. Belum optimalnya penyebarluasan informasi dan pemanfaatan komunikasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
b. Belum kuatnya fondasi transformasi digital pada berbagai sektor dan belum optimalnya implementasi SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
c. Belum adanya Sumber daya aparatur dibidang persandian dan bidang statistik yang kompeten dibidangnya.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi yang harus jadi perhatian utama dalam perencanaan Pembangunan daerah karena berdampak signifikan, seperti penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan pemerintahan daerah.

1. Isu Global

Isu global yang menjadi perhatian daerah adalah penuntasan pencapaian Sustainable Development Goal's (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan komitmen baru oleh berbagai negara dengan menargetkan 3 tujuan mulia yang dicapai ditahun 2030 yakni mengakhiri kemiskinan, mengatasi dan menekan kesenjangan, serta mengatasi perubahan iklim. TPB/SDG's bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak meninggalkan satu orangpun (No-one Left Behind) merupakan Prinsip utama SDG's. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDG's harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama kelompok tertinggal. TPB/SDG's merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1) Tanpa Kemiskinan;
2) Tanpa Kelaparan;
3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4) Pendidikan Berkualitas;
5) Kesetaraan Gender;
6) Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7) Energi Bersih dan Terjangkau;
8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10) Berkurangnya Kesenjangan;
11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13) Penanganan Perubahan Iklim;
14) Ekosistem Lautan;
15) Ekosistem Daratan;
16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

2. Isu Nasional

Industri 5.0 merupakan konsep yang menekankan kolaborasi antara manusia dan teknologi, dengan fokus pada kemanusiaan, keberlanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan. Konsep ini memadukan teknologi canggih seperti AI, IoT, dan robot dengan

nilai-nilai kemanusiaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas hidup. Industri 5.0 juga mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

3. Isu Regional

Isu regional adalah masalah yang bersifat lokal dan terbatas pada wilayah tertentu, yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Seperti Kesenjangan ekonomi, Tingkat pengangguran, keterbatasan akses infrastruktur, perusakan lingkungan dan konflik social.

Tabel 2.12
ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik:	Belum Optimalnya Penyebarluasan Informasi dan Pemanfaatan Kanal Komunikasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Isu pada Pilar Sosial: a. Minimnya infrastruktur dan literasi digital 2. Isu pada Pilar Ekonomi: a. Tidak adanya pendataan secara terintegrasi kapasitas ekonomi dan dampak fiskal untuk database pertimbangan dampak ekonomi terhadap bencana b. Penguatan ekonomi lokal dan keadilan	1. Transformasi Digital Global; Standar layanan digital yang semakin tinggi berdasarkan praktik baik internasional, dan 2. Peningkatan ketergantungan pada infrastruktur digital untuk kegiatan ekonomi dan sosial 3. Keamanan Siber dan Privasi Data; Peningkatan serangan siber lintas negara yang menyasar	1. Implementasi SPBE: Integrasi sistem informasi nasional dan daerah, Standardisasi infrastruktur dan platform digital pemerintahan 2. Infrastruktur Digital Nasional; Pengembangan pusat data nasional dan komputasi awan pemerintah, Kesenjangan infrastruktur digital antara Jawa dan luar	1. Pengembangan Smart vilage/Smart Region; Integrasi layanan publik berbasis digital, Pemanfaatan IoT untuk pengelolaan utilitas dan transportasi daerah, Kolaborasi antar daerah dalam pengembangan ekosistem digital 2. Kesenjangan Digital Intra-Regional; Disparitas akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan, Pemerataan infrastruktur	1. Optimalisasi Kanal Komunikasi Publik dalam Penyebarluasan Informasi 2. Penguatan Kemitraan dengan Media Lokal dan Komunitas untuk Meningkatkan Literasi Khalayak terhadap Informasi 3. Penguatan Transformasi Digital pada berbagai sektor Produktif melalui Literasi dan Keterampilan Digital 4. Percepatan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
		lokasi ruang 3. Isu pada Pembangunan Hukum dan Tata Kelola: Rendahnya optimalisasi tata kelola pemerintahan	infrastruktur penting, 4. Regulasi global terkait perlindungan data yang menjadi acuan standar internasional, 5. Ketegangan geopolitik yang berimplikasi pada keamanan infrastruktur digital.	Jawa 3. Transformasi Ekonomi Digital; Pertumbuhan sektor e-commerce dan fintech yang	digital di daerah terpencil, Peningkatan literasi digital masyarakat daerah	Implementasi SPBE untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025-2029

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan adalah komponen penting dalam perencanaan strategis yang saling terkait dan mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, sasaran adalah indikator terukur untuk mengukur pencapaian tujuan, strategi adalah rencana aksi untuk mencapai sasaran, dan arah kebijakan adalah pedoman tindakan untuk melaksanakan strategi.

Sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan layanan dasar di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik maka perumusuan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Bupati Kepulauan Mentawai Kabupaten Kepulauan Mentawai yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik tentunya harus selaras dan mendukung visi misi kepala daerah selama 5 tahun rencana pembangunan. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai 5 tahun rencana sebagai penjabaran secara teknis pada misi 8 yaitu penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif dan terpercaya.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029

Visi : Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera			
Misi	Tujuan	Sasaran	
Misi 8 : Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang responsif, Inovatif dan Terpercaya	Terwujudnya Birokrasi Yang Prima	1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelo Pemerintahan Yang Inklus Handal, Transparan dan Akuntabel
		2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani

3.2 Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Sesuai dengan isu strategis yang menjadi pokok perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kominfo, tujuan dan sasaran Kominfo jangka menengah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Handal	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Nilai Indeks SPBE 2. Nilai Indeks Pemerintahan digital	2,46	2,50 1,4	2,60 1,7	2,80 2	2,1	2,1	
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani		Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	1. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) 2. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	65,00 1,27	68,00 1,30	70,00 2,00	72,00 2,50	75,00 3,00	77,00 3,50	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	1.Nilai LAKIP 2.Jumlah Inovasi 3.Persentase capaian kinerja perangkat daerah	73,62 2 90,00	73,63 2 91,00	73,64 2 91,25	73,65 2 91,30	73,66 2 91,35	73,67 2 91,40	

*) Nilai Target Indeks SPBE (terkait keamanan) disesuaikan dengan perubahan arah kebijakan pada Indeks Pemdi (Pemerintahan Digital)

3.3 Strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik adalah strategi dan kebijakan Dinas Kominfo untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kominfo menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.,. Strategi yang akan diambil untuk mencapai sasaran ada beberapa strategi sebagai berikut :

a. Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Publik.
b. Optimalisasi Pemanfaatan Kanal Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Penyebarluasan Informasi Publik.
c. Peningkatan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
d. Implementasi Ekosistem Digital pada berbagai sektor.
e. Peningkatan Implementasi SPBE pada Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik.

Strategi dan kebijakan yang ditempuh dalam memenuhi tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dalam kurun waktu 5 tahun rencana adalah:

Tabel 3.3
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

VISI : Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera".		
MISI 8 : Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif dan terpercaya.		
Tujun		Strateg
Terwujud Nya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Menguatnya Fondasi Transformasi Digital dalam Mendukung Ekosistem Digital pada Berbagai Sektor dan Optimalisasi Implementasi SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Implementasi Ekosistem Digital pada berbagai sektor
		Peningkatan ImplementasiSPBE pada Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik
	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Publik
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,Bersih dan Akuntabilitas	Optimalnya Penyebarluasan Informasi dan Pemanfaatan Kanal Komunikasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
		Mengaktifkan kembali Kelompok Informasi Masyarak (KIM) di Kecamatan yang sudah terbentuk
		Optimalisasi Pemanfaatan Kanal Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Penyebarluasan Informasi Publik
		Peningkatan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik
		Peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan program, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta dukungan operasional tugas pegawai

Penahapan Renstra dilaksanakan agar menjadi fokus perencanaan mengarah pada prioritas perencanaan setiap tahunnya. Prioritas Pembangunan Daerah merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi capaian antara menuju tujuan sasaran 5 (lima) tahunan dalam RENSTRA melaluli Program pembangunan daerah tahunan.

Tabel 3.4
Tahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2029

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)
Melakukan sosialisasi sekaligus pembentukan 8 Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang baru. Pemantapan dan Rekonsiliasi Domain Kebijakan SPBE dan Domain Layanan SPBE.	Koordinasi dan Inisialisasi Domain Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE. Penguatan Domain Kebijakan SPBE dan Domain Layanan SPBE. Melakukan Pembentukan 8 Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).	Penguatan domain Kebijakan SPBE, Domaian Tatakelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE. Melakukan sosialisasi sekaligus pembentukan 8 Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang baru.	Monitoring dan Evaluasi domain Kebijakan SPBE, Domaian Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE. Melakukan sosialisasi sekaligus pembentukan 8 Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang baru.

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kominfo dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Diskominfo. Arah Kebijakan Renstra Diskominfo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1.		Strategi Misi 3 : Sasaran : Pembangunan Infrstruktur Yang berkeadilan 1. fasilitasi penyediaan BTS / Internet	1. Pemanfaatan Infrastruktur telekomunikasi untuk Perluasan akses dan peningkatan transformasi digital pemerintah daerah. 2. Percepatan digitalisasi dan integrasi sistem elektronik berbagi pakai untuk layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan.	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
2.		Strategi Misi : 3 Sasaran : Meningkatnya Desa Mandiri 1. Pembangunan smart city/ village	1. Fasilitasi implementasi inovasi yang mendukung smart city/village 2. Pemberdayaan komunitas informasi masyarakat (KIM) untuk 43 desa.	
3.		Strategi Misi : 8 Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Handal, Transparan dan Akuntabel 1. Transpormasi Digital dalam penyelenggaraan Pemerintahan	1. Percepatan digitalisasi dan integrasi SPBE 2. implementasi layanan SPBE 3. Fasilitasi pengelolaan dan Pengawasan portal dan situs website agar sesuai standar 4. Percepatan digitalisasi dan integrasi sistem elektronik berbagi 5. pakai untuk layanan SPBE	
4.		Strategi Misi : 8 1. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani 2. Pelayanan Publik Berbasis digital 3. Penyediaan Platform online Pelayan Masyarakat Sebagai Sarana evaluasi, Koreksi, Pengaduan dari Masyarakat. 4. Inovasi Pelayanan Publik	1. Membuat SOP pelayanan Publik. 2. Membuat Alur /Prosedur Pelayanan Publik 3. Peningkatan penguasaan pemanfaatan digitalisasi (sosialisasi dan pelatihan)	

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

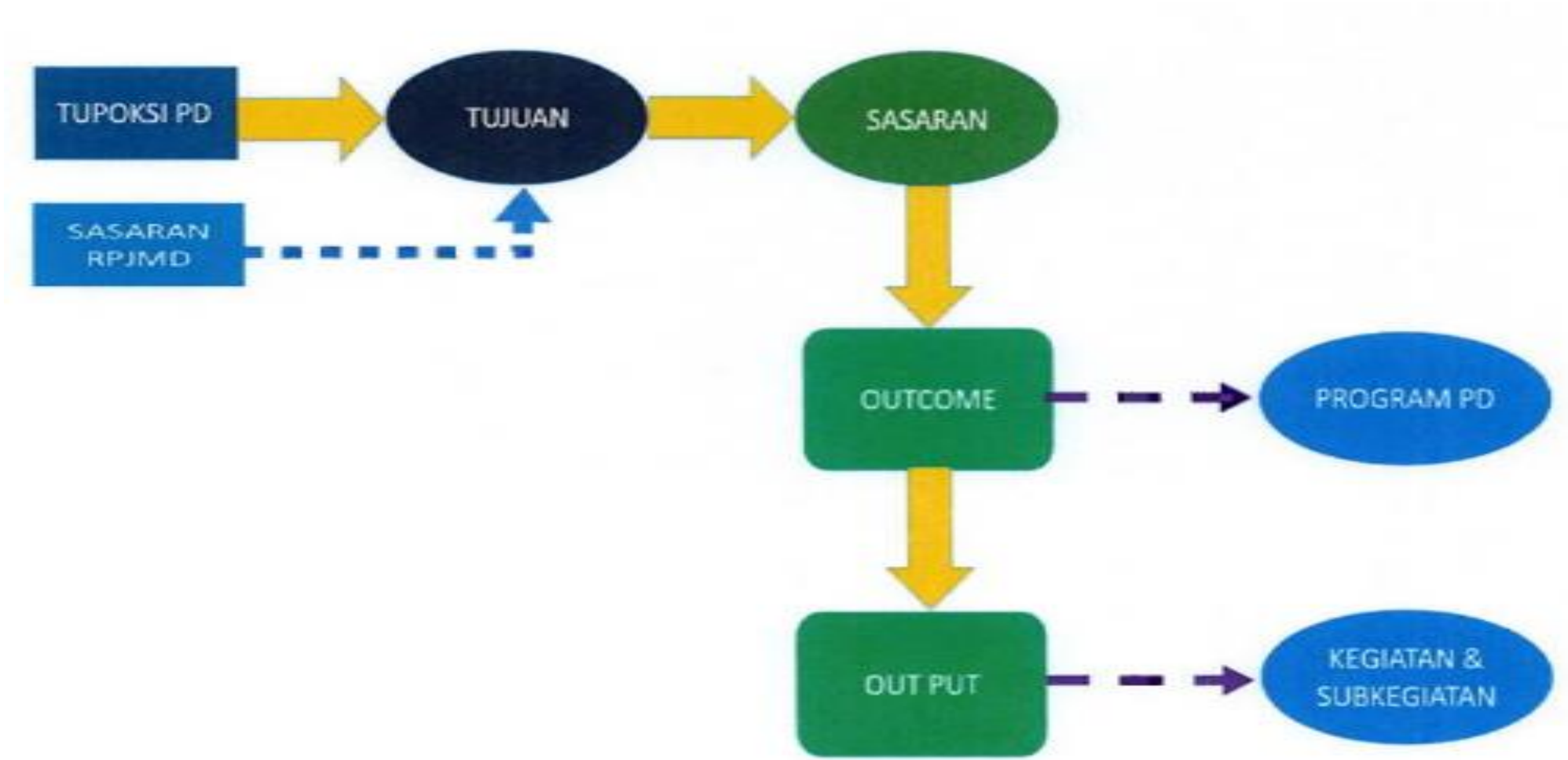
Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Kominfo selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kominfo. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kominfo. Berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menegah perangkat daerah, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Kominfo yang dijabarkan dalam matrik berikut. Indikator kinerja Dinas Kominfo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kominfo dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Kominfo yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA DINAS KOMINFO 2025-2029 dalam rancangan akhir RPJMD pada misi 8 yaitu Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif dan terpercaya.

Rencana program dan kegiatan yang telah di tetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

Berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang dijabarkan dalam matrik berikut.

Sesuai Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan kelima kalinya, uraian program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Diskominfo adalah sebagai berikut:

GAMBAR 4.1 KERANGKA PERUMUSAN PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
Misi 8, Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Inklusif, Handal, Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital				Indeks SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika			Nilai indikator teknologi digital		
				Jumlah domain	Meningkatnya Pemanfaatan nama dan sub domain dilingkungan pemerintah daerah	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	dokumen Pengelolaan Nama Domain dan sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah dokumen Pengelolaan Nama Domain dan sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
					Meningkatnya nilai indeks SPBE	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Pemanfaatan Pusat data Nasional	Aplikasi Jumlah aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data	Jumlah aplikasi Jumlah aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data	Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat data Nasional	
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dokumen usulan Proses Bisnis di Dinas Kominfo	Dokumen Proses Bisnis di Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Proses Bisnis di Dinas Kominfo	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis	
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	
			Terlaksananya Penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	
			Terlaksananya Koordinasi pengelolaan data dan informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan arsitektur SPBE Pemerintah daerah	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan arsitektur SPBE Pemerintah daerah	Sub Kegiatan Koordinasi pengelolaan data dan informasi	
			Terlaksana Koordinasi penyusunan dan /	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan /	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
			atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	
			Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Jumlah dokumen Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Jumlah dokumen Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	
			Terlaksananya Pembangunan dan / atau pengembangan aplikasi khusus SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan / atau yang dikembangkan sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan / atau yang dikembangkan sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Pembangunan dan / atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	
			Terlaksananya Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Jumlah aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Jumlah aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daeraH	Sub Kegiatan Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	
			Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dgn seluruh PD dan disampaikan kepada PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen usulan Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dgn seluruh PD dan disampaikan kepada PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				dan PD yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	dan PD yang membidangi anggaran dan keuangan daerah		
			Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	Jumlah PD yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten /Kota cerdas	Jumlah PD yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten /Kota cerdas	Sub Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab / Kota	Jumlah PD di Pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah PD di Pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab / Kota	
			Terlaksananya Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan PEMDA yang terintegrasi	Jumlah Layanan PEMDA yang memanfaatkan portal Pelayanan PEMDA terintegrasi yaitu Portal pelayanan Publik, Portal Administrasi pemrintahan dan atau Portal data Nasional	Jumlah Layanan PEMDA yang memanfaatkan portal Pelayanan PEMDA terintegrasi yaitu Portal pelayanan Publik, Portal Administrasi pemrintahan dan atau Portal data Nasional	Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan PEMDA yang terintegrasi	
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Audit TIK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Audit TIK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	
			Terlaksananya	Jumlah Implementasi	Jumlah Implementasi	Sub Kegiatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
			Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan atau kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan atau kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan atau kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Sub Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan atau kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	
			Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
			Terlaksananya Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	Akses Internet yang disediakan oleh Dinas	Jumlah PD yang memanfaatkan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas	Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	
						Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab / Kota	
			Tersedianya Start-Up digital di wilayah Kab/Kota yang dirintis	Jumlah Start-up digital yang dirintis di wilayah Kab/Kota yang sudah memiliki purwarupa produk	Jumlah Start-up digital yang dirintis di wilayah Kab/Kota yang sudah memiliki purwarupa produk	Sub Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi Start-Up digital di wilayah Kab/Kota	
			Meningkatnya adopsi teknologi	Persentase tingkat adopsi teknologi	Persentase tingkat adopsi teknologi digital	Sub Kegiatan Pendampingan dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
			digital di Sektor Prioritas dan UMKM Pemda Kab/kota	digital di Sektor Prioritas dan UMKM Pemda Kab/kota	di Sektor Prioritas dan UMKM Pemda Kab/kota	fasilitasi adopsi teknologi digital di Bidang Ekonomi Digital Mencakup Sektor Prioritas dan UMKM	
			Meningkatnya literasi digital di masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang gital	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang gital	Sub Kegiatan Pendampingan dan fasiliotasi dalam penyelengggaraan edukasi literasi digital	
						Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Tersedianya start-up digital di wilayah kabupaten/kota yang dirintis	Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwarupa produk	Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwarupa produk	Sub Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi Start-up digital di wilayah Kab/Kota	
			Meningkatnya literasi digital dimasyarakat	Jumlah Masyarakat yang mendapat nliterasi dibidang digital	Jumlah Masyarakat yang mendapat nliterasi dibidang digital	Sub Kegiatan Pendampingan dan fasilitasi Dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	
Misi 8, Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan		Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah			Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
Melayani							
				Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatana Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktifitas realsi media kepada media yang memenuhi kriteria 1. Terferifikasi dewan pers 2.Terdaftar diDinas Kominfo 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	Jumlah aktifitas realsi media kepada media yang memenuhi kriteria 1. Terferifikasi dewan pers 2.Terdaftar diDinas Kominfo 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	Sub Kegiatan Relasi Media	
			Terlaksananya Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
			Terlaksananya dukungan admistratif keunagan dan tata kelola komisi informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik	Jumlah laporan dukungan admistratif keunagan dan tata kelola komisi informasimdi Daerah yang akuntabel serta disampaikan nkepada Kementrian Komunikasi dan Informatika	Jumlah laporan dukungan admistratif keunagan dan tata kelola komisi informasimdi Daerah yang akuntabel serta disampaikan nkepada Kementrian Komunikasi dan Informatika	Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan dan tata kelola komisi informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik	
			Tersedianya	Jumlah permohonan	Jumlah permohonan	Sub Kegiatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
			Pelayanan Informasi Publik	informasi publik yang diseslesaikan sesuai dengan peraturan perundangan	informasi publik yang diseslesaikan sesuai dengan peraturan perundangan	Pelayanan Informasi Publik	
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan komunikasi publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar imnformasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan komunikasi publik	
			Terlaksananya Monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas pemerintah daerah	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas pemerintah daerah	Sub Kegiatan Monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik	
			Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi	
			Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Sub kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
			Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah konten informasi publik	Jumlah konten informasi publik	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
			Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang difasilitasi mengikuti bimtek / pelatihan	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang difasilitasi mengikuti bimtek / pelatihan	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
Misi 8, Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani		Meningkatnya kinerja perangkat daerah			Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran	Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Meningkatnya Kesejahteraan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Tersedianya gaji dan tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Terwujudnya dukungan Administrasi yang diperlukan untuk Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
					Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terpenuhinya kebutuihan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Adanya peningkaytan pengetahuan,keterampilan dan kapasitas SDM	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Tersediaya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran oprasional kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Tersedianya	Tersedianya Bahan	Jumlah Dokumen	Penyediaan Bahan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
			Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan unutk menunjang kebutuhan informasi aparatur	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pihak terkait	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Meningkatnya Kesadaran Perangkat Daerah Pentingnya Adminsitrasi BMD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedumh Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
					Daerah	Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
						Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpulan,pengelohan,analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpulan,pengelohan,analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpulan,pengelohan,analisis dan diseminasi data statistik sektoral.	
				Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Terintegrasi	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Terintegrasi	
				Terbangunnya Metadata Statistik Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Statistik Sektoral yang dihimpun	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Statistik Sektoral	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
				Berkembangnya Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Statistik	
				Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
						Kegitan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
				Ditetapkanya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektrik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektrik	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektrik	
				Tersedianya layanan	Jumlah Perangkat	Sub Kegiatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket
				keamanan informasi untuk perangkat daerah di tingkat Kabupaten/Kota	Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	
					Nilai lakip		
					Jumlah inovasi yang diterapkan		
					Persentase capaian kinerja perangkat daerah		

Guna Memastikan pencapaian sasaran strategis maupun program, kegiatan, dan sub kegiatan di dalamnya, maka disampaikan pula rencana pendanaannya serta program prioritas sebagai indikasi pendanaan dinas komunikasi dan informatika sebagaimana terlampir pada Tabel 4.2 dan tabel 4.3 rencana ini bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	2,46	2,6	2.288.109.013	2,8	2.548.062.416	3	2.601.199.520	3,2	2.638.540.367	3,2	2.665.683.521	
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan nama dan sub domain dilingkungan pemerintah daerah	10 domain	10 domain	205.956.504	10 domain	35.335.934	10 domain	55.376.941	10 domain	40.806.102	10 domain	43.894.705	
Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah dokumen Pengelolaan Nama Domain dan sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	1 dok	1 dok	205.956.504	1 dok	35.335.934	1 dok	55.376.941	1 dok	40.806.102	1 dok	43.894.705	
Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya nilai indeks SPBE	2,46	2,6	1.905.956.504	2,8	2.371.382.746	3	2.586.031.056	3,2	2.393.703.734	3,2	2.490.104.690	
Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat data Nasional	Jumlah aplikasi Jumlah aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data	aplikasi	1 aplikasi	34.326.084	1 aplikasi	35.335.934	1 aplikasi	55.376.941	1 aplikasi	40.806.102	1 aplikasi	43.894.705	
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis	Jumlah Dokumen Proses Bisnis di Dinas Kominfo	dokumen	1 dok	34.326.084	1 dok	35.335.934	1 dok	55.376.941	1 dok	40.806.102	1 dok	43.894.705	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	laporan	1 lap	34.326.084	1 lap	35.335.934	1 lap	55.376.941	1 lap	40.806.102	1 lap	43.894.705	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional	dokumen	1 dok	34.326.084	1 dok	35.335.934	1 dok	55.376.941	1 dok	40.806.102	1 dok	43.894.705	
Sub Kegiatan Koordinasi pengelolaan data dan informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan arsitektur SPBE Pemerintah daerah	data	1 data	34.326.084	1 data	35.335.934	1 data	55.376.941	1 data	40.806.102	1 data	43.894.705	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan / atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	dokumen	1 dok	34.326.084	1 dok	35.335.934	1 dok	55.376.941	1 dok	40.806.102	1 dok	43.894.705	
Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Jumlah dokumen Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	dokumen	1 dok	34.326.084	1 dok	35.335.934	1 dok	55.376.941	1 dok	40.806.102	1 dok	43.894.705	
Sub Kegiatan Pembangunan dan / atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan / atau yang dikembangkan sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	aplikasi	1 aplikasi	34.326.084	1 aplikasi	35.335.934	1 aplikasi	55.376.941	1 aplikasi	40.806.102	1 aplikasi	43.894.705	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Jumlah aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	aplikasi	1 aplikasi	34.326.084	1 aplikasi	35.335.934	1 aplikasi	55.376.941	1 aplikasi	40.806.102	1 aplikasi	43.894.705	
Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dgn seluruh PD dan disampaikan kepada PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan PD yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	dokumen	1 dok	34.326.084	1 dok	35.335.934	1 dok	55.376.941	1 dok	40.806.102	1 dok	43.894.705	
Sub Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	Jumlah PD yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten /Kota cerdas	OPD	28 OPd	34.326.084	28 OPd	35.335.934	28 OPd	55.376.941	28 OPd	40.806.102	28 OPd	43.894.705	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab / Kota	Jumlah PD di Pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	28 OPd	28 OPd	1.700.000.000	28 OPd	1.700.000.000	28 OPd	1.700.000.000	28 OPd	1.700.000.000	28 OPd	1.700.000.000	
Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan	Jumlah Layanan PEMDA yang memanfaatkan portal Pelayanan PEMDA	layanan	10 layanan	34.326.084	10 layanan	35.335.934	10 layanan	55.376.941	10 layanan	40.806.102	10 layanan	43.894.705	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PEMDA yang terintegrasi	terintegrasi yaitu Portal pelayanan Publik, Portal Administrasi pemrintahan dan atau Portal data Nasional												
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Audit TIK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	dokumen	1 dok	34.326.084	1 dok	35.335.934	1 dok	55.376.941	1 dok	40.806.102	1 dok	43.894.705	
Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	implementasi	1 implementasi	34.326.084	1 implementasi	35.335.934	1 implementasi	55.376.941	1 implementasi	40.806.102	1 implementasi	43.894.705	
Sub Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan atau kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan atau kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	dokumen	1 dok	34.326.084	1 dok	35.335.934	1 dok	55.376.941	1 dok	40.806.102	1 dok	43.894.705	
Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	aplikasi	1 aplikasi	34.326.084	1 aplikasi	35.335.934	1 aplikasi	55.376.941	1 aplikasi	40.806.102	1 aplikasi	43.894.705	
Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	Jumlah PD yang memanfaatkan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas	28 OPd	28 OPd	34.326.084	28 OPd	35.335.934	28 OPd	55.376.941	28 OPd	40.806.102	28 OPd	43.894.705	
Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab / Kota	Meningkatnya nilai indeks SPBE	10 domain	10 domain	102.978.252	10 domain	106.007.802	10 domain	166.130.823	10 domain	122.418.306	10 domain	131.684.115	
Sub Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi Start-Up digital di wilayah Kab/Kota	Jumlah Start-up digital yang dirintis di wilayah Kab/Kota yang sudah memiliki purwarupa produk	Star-up	1 start-up	34.326.084	1 start-up	35.335.934	1 start-up	55.376.941	1 start-up	40.806.102	1 start-up	43.894.705	
Sub Kegiatan Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di Bidang Ekonomi Digital Mencakup Sektor Prioritas dan UMKM	Persentase tingkat adopsi teknologi digital di Sektor Prioritas dan UMKM Pemda Kab/kota	persentase	20 persen	34.326.084	20 persen	35.335.934	20 persen	55.376.9410	20 persen	40.806.102	20 persen	43.894.705	
Sub Kegiatan Pendampingan dan fasiliotasi dalam penyelengggaraan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang gital	masyarakat	-	34.326.084	-	35.335.934	-	55.376.941	-	40.806.102	-	43.894.705	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
edukasi literasi digital													
Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya nilai indeks SPBE	10 domain	10 domain	68.652.168	10 domain	70.671.868	10 domain	110.376.941	10 domain		10 domain	87.789.410	
Sub Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi Start-up digital di wilayah Kab/Kota	Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwarupa produk	Star-up	1 star-up	34.326.084	1 star-up	35.335.934	1 star-up	55.376.941	1 star-up	40.806.102	1 star-up	243.894.705	
Sub Kegiatan Pendampingan dan fasilitasi Dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	Jumlah Masyarakat yang mendapat nliterasi dibidang digital	masyarakat	-	34.326.084	-	35.335.934	-	55.376.941	-	40.806.102		43.894.705	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	25%	25%	353.322.954	45%	349.925.195	50%	357.222.509	65%	362.350.525	75%	366.078.092	
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi MMPublik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
Sub Kegiatan Relasi Media	Jumlah aktifitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria 1. Terferifikasi dewan pers 2.Terdaftar diDinas Kominfo 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	aktifitas	1 aktfitas	32.120.268	1 aktfitas	31.811.381	1 aktfitas	32.474.773	1 aktfitas	32.940.956	1 aktfitas	33.279.826	
Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	3 KIM	3 KIM	32.120.269	3 KIM	31.811.381	3 KIM	32.474.773	3 KIM	32.940.956	3 KIM	33.279.826	
Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan dan tata kelola komisi informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik	Jumlah laporan dukungan admistratif keuangan dan tata kelola komisi informasimdi Daerah yang akuntabel serta disampaikan nkepada Kementrian Komunikasi dan Informatika	laporan	1 laporan	32.120.269	1 laporan	31.811.381	1 laporan	32.474.774	1 laporan	32.940.956	1 laporan	33.279.826	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diseslesaikan sesuai dengan peraturan perundangan	permohonan	1 permohonan	32.120.269	1 permohonan	31.811.381	1 permohonan	32.474.774	1 permohonan	32.940.957	1 permohonan	33.279.826	
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan komunikasi publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar imnformasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	persentase	persentase	32.120.269	persentase	31.811.381	persentase	32.474.774	persentase	32.940.957	persentase	33.279.826	
Sub Kegiatan Monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas pemerintah daerah	rekomendasi	1 rekomendasi	32.120.269	1 rekomendasi	31.811.382	1 rekomendasi	32.474.774	1 rekomendasi	32.940.957	1 rekomendasi	33.279.827	
Sub Kegiatan Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	persentase		32.120.269		31.811.382		32.474.774		32.940.957		33.279.827	
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	media		32.120.269						32.940.957		33.279.827	
Sub kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	strategi	1 strategi	32.120.269	1 strategi	32.120.269	1 strategi	32.120.269	1 strategi	32.940.957	1 strategi	33.279.827	
Sub Kegiatan Penyusunan Konten	Jumlah konten informasi publik	konten	konten	32.120.269	konten	32.120.269	konten	32.120.269	konten	32.940.957	konten	33.279.827	
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Publik	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang difasilitasi mengikuti bimtek / pelatihan	orang	10 org	32.120.269	10 org	31.811.382	10 org	32.474.774	10 org	32.940.957	10 org	33.279.827	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas pokok	100%	100%										
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran	100%	100%	23.614.036	100%	22.444.88	100%	22.444.887	100%	3.291.646	100%	27.523.306	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	6 dok	6 dok	23.614.036	6 dok	22.444.887	6 dok	22.444.887	6 dok	3.291.646	6 dok	27.523.306	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Daerah	Daerah												
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan ASN	100%	100%	2.522.200.000	100%	2.522.200.000	100%	2.522.200.000	100%	2.522.200.000	100%	2.522.200.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 org	27 org	2.500.000.000	27 org	2.500.000.000	27 org	2.500.000.000	27 org	2.500.000.000	27 org	2.500.000.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dok	1 dok	22.200.000	1 dok	22.200.000	1 dok	22.200.000	1 dok	22.200.000	1 dok	22.200.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi ASN	persentase	100%	23.614.036	100%	20.004.719	100%	22.444.887	100%	6.683.292	100%	55.523.306	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1 paket	23.614.036	1 paket	20.004.719	1 paket	22.444.887	1 paket	3.291.646	1 paket	27.523.306	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 org	10 o rg	23.614.036	10 org	20.004.719	10 org	22.444.887	10 org	3.291.646	10 org	27.523.306	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	23.614.036	100%	20.004.719	100%	22.444.887	100%	19.749.876	100%	165.139.836	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	23.614.036	1 paket	20.004.719	1 paket	22.444.887	1 paket	3.291.646	1 paket	27.523.306	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 pake	23.614.036		20.004.719		22.444.887		3.291.646		27.523.306	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	23.614.036	4 paket	20.004.719	4 paket	22.444.887	4 paket	3.291.646	4 paket	27.523.306	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	23.614.036	2 paket	20.004.719	2 paket	22.444.887	2 paket	3.291.646	2 paket	27.523.306	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dok	1 dok	23.614.036	1 dok	20.004.719	1 dok	22.444.887	1 dok	3.291.646	1 dok	27.523.306	
Pelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 dok	36 dok	23.614.036	36 dok	20.004.719	36 dok	22.444.887	36 dok	3.291.646	36 dok	27.523.306	
Kegiatan Pengadaan	Meningkatnya Kesadaran	100%	100%	23.614.036	100%	20.004.719	100%	22.444.887	100%	3.291.646	100%	110.093.224	

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan /Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	2026		2027		2028		2029		2030		Ket
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah Pentingnya Adminsitrasi BMD												
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	3 unit	23.614.036	1 unit	20.004.719	1 unit	22.444.887	1 unit	3.291.646	1 unit	27.523.306	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	1 unit	23.614.036		20.004.719		22.444.887		3.291.646		27.523.306	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	23.614.036	3 unit	20.004.719	3 unit	22.444.887	3 unit	3.291.646	3 unit	27.523.306	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	3 unit	23.614.036	3 unit	20.004.719	3 unit	22.444.887	3 unit	3.291.646	3 unit	27.523.306	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	47.228.072	100%	20.004.719	100%	44.889.774	100%	6.583.292	100%	55.046.612	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 lap	3 lap	23.614.036	3 lap	20.004.719	3 lap	22.444.887	3 lap	3.291.646	3 lap	27.523.306	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 lap	3 lap	23.614.036	3 lap	20.004.719	3 lap	22.444.887	3 lap	3.291.646	3 lap	27.523.306	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	100%	100%	47.228.072	100%	40.009.438	100%	67.334.6617	100%	9.874.939	100%	82.569.918	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	4 unit	23.614.036	4 unit	20.004.719	4 unit	22.444.887	4 unit	3.291.646	4 unit	27.523.306	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	23.614.036	5 unit	20.004.719	5 unit	22.444.887	5 unit	3.291.646	5 unit	27.523.306	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	23.614.036	1 gedung	20.004.719	1 gedung	22.444.887	1 gedung	3.291.646	1 gedung	27.523.306	

Adapun rencana program dan kegiatan prioritas yang ditunjang dengan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
			Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Pemanfaatan Pusat data Nasional	Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat data Nasional	
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dokumen usulan Proses Bisnis di Dinas Kominfo	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	
		Terlaksananya Penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	
		Terlaksananya Koordinasi pengelolaan data dan informasi	Sub Kegiatan Koordinasi pengelolaan data dan informasi	
		Terlaksana Koordinasi penyusunan dan / atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan / atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE	
		Terlaksananya Pembangunan dan / atau pengembangan aplikasi khusus SPBE	Sub Kegiatan Pembangunan dan / atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Daerah	
		Terlaksananya Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	
		Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	Sub Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab / Kota	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab / Kota	
		Terlaksananya Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan PEMDA yang terintegrasi	Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan PEMDA yang terintegrasi	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	
		Terlaksananya Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	
		Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan atau kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Sub Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan atau kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	
		Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum	Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	
			Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab / Kota	
		Tersedianya Start-Up digital di wilayah Kab/Kota yang dirintis	Sub Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi Start-Up digital di wilayah Kab/Kota	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya adopsi teknologi digital di Sektor Prioritas dan UMKM Pemda Kab/kota	Sub Kegiatan Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di Bidang Ekonomi Digital Mencakup Sektor Prioritas dan UMKM	
		Meningkatnya literasi digital di masyarakat	Sub Kegiatan Pendampingan dan fasiliotasi dalam penyelengggaraan edukasi literasi digital	
			Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Tersedianya start-up digital di wilayah kabupaten/kota yang dirintis	Sub Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi Start-up digital di wilayah Kab/Kota	
		Meningkatnya literasi digital dimasyarakat	Sub Kegiatan Pendampingan dan fasilitasi Dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Relasi Media	Sub Kegiatan Relasi Media	
		Terlaksananya Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
		Terlaksananya dukungan admistratif keunagan dan tata kelola komisi informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik	Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan dan tata kelola komisi informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik	
		Tersediasnya Pelayanan Informasi Publik	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan komunikasi publik	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan komunikasi publik	
		Terlaksananya Monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik	Sub Kegiatan Monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik	
		Terlaksananya Diseminasi Informasi	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi	
		Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Sub kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Sub Kegiatan Penyusunan Konten	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpulan,pengelohan ,analisis dan diseminasi data statistik sektoral	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Terintegrasi	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
		Terbangunnya Metadata Statistik Statistik Sektoral	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sikronisasi Pengumpulan,pengelohan,analisis dan diseminasi data statistik sektoral.	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Terintegrasi	
		Berkembangnya Infrastruktur	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Statistik Sektoral	
		Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
			Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Statistik	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	
		Ditetapkanya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
		Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegitan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektrik	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tersedianya layanan keamanan informasi untuk perangkat daerah di tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektrik	
		Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	

4.2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Kinerja Penyelenggaran bidang urusan sebagai ukuran capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi bagian penting dalam perencanaan karena menjadi indikator keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah, yang digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan rencana dimasa depan. Penilain tersebut sebagai akuntabilitas kinerja dan informasi tentang pencapain kinerja penyelenggaran bidang urusan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator Kinerja Dinas Kominfo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kominfo dalam waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Nilai Indeks SPBE	Indeks	2,46	2,46	2,50	2,60	2,80	3,20	3,50
2.	Nilai Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	1,4	1,7	2	2,1	2,4	2,4

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terha akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	persen	65,00	65,00	68,00	70,00	72,00	75,00	77,00
4.	Indeks Pembangunan Statistik(IPS)	Indeks	1,27	1,27	1,30	2,00	2,50	3,00	3,50
5.	Nilai LAKIP	Nilai	73,62	73,62	73,63	73,64	73,65	73,66	73,67
6.	Jumlah Inovasi Yang diterap	Jumlah	2	2	2	2	2	2	2
7.	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	persen	90,00	90,00	91,00	91,25	91,30	91,35	91,40

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah (survei)	persen	65,00	65,00	68,00	70,00	72,00	75,00	77,00
2.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	1,27	1,27	1,30	2,00	2,50	3,00	3,50

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai penjabaran strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat program, kegiatan, indikator kinerja, target, dan perkiraan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan berbasis data.

Penyusunan Renstra ini telah mempertimbangkan isu-isu strategis di bidang komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi panduan yang jelas dan terukur bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dab Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025-2029, serta berkontribusi signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan prioritas pembangunan daerah di era digital.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah yang strategis dan merupakan penjabaran secara teknis RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Kominfo kurun waktu 5 tahun.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra ini dapat berjalan efektif. Renstra ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut. Manajemen Risiko dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 ini dilakukan hingga pada level sasaran pembangunan yang lebih detail menjelaskan target operasional pembangunan. Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintahan daerah tersebut antara lain: Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Melalui mitigasi risiko yang tepat dan terukur akan mampu mengendalikan dan mengelola risiko yang berpotensi dan menggagalkan tujuan dari perencanaan pembangunan.

Mitigasi tersebut telah dimulai sejak pada proses perencanaan, sehingga perlu dipantau terus pada tahapan pelaksanaan, pengendalian, dan dilakukan monitoring/evaluasi kinerja pembangunan daerah. Penyelenggaran Satu data Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai hadir sebagai suatu upaya untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan penggunaan data terpadu dalam penyusunan perencanaan yang berkualitas melalui penyelenggaraan satu data terpadu yaitu perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data. Perencanaan yang berkualitas disusun dari data yang akurat. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo dan Informatika 2025-2029 menjadi komitmen dan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Kominfo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra ini dapat berjalan efektif. Renstra Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan Renstra Komunikasi dan Informatika serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mentasi dan menagtisifasi hal yang akan terjadi tersebut.

Manajemen risiko dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 dilakukan hingga pada level sasaran yang lebih detail menjelaskan target operasional pembangunan. Tahapan proses pengelolaan resiko Dinas Komunikasi dan Informatika, antara lain identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Melalui mitigasi risiko yang tepat dan terukur akan mampu mengendalikan dan mengelola risiko yang berpotensi dan menggagalkan tujuan dari perencanaan, sehingga perlu dipantau terus pada tahapan pelaksanaan, pengendalian dan dilakukan monitoring atau evaluasi kinerja.

Dengan langkah-langkah tindak lanjut ini, diharapkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

PERANGKAT DAERAH:
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 5
1.3 Maksud dan Tujuan..... 7
1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan..... 21
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2025 – 2029..... 25
3.2 Sasaran Resntra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2025 – 2029..... 26
3.3 Strategi Resntra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2025 – 2029..... 30
3.4 Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2025 – 2029..... 32

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG
4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 34
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 60

BAB V PENUTUP..... 65

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1 Komposisi Pegawai Dinas Koperindag berdasarkan jenjang Pendidikan.....	15
Tabel	2.2 Tanah dan Gedung yang dimiliki.....	17
Tabel	2.3 Kendaraan Bermotor yang dimiliki.....	17
Tabel	2.4 Tabel Pertumbuhan Anggaran 2020-2024.....	18
Tabel	2.5 Karakterisktik Sasaran layanan.....	21
Tabel	2.6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis.....	23
Tabel	3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra.....	29
Tabel	3.2 Strategi Renstra Perangkat Daerah.....	31
Tabel	3.3 Penahapan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan 20225-2029.....	31
Tabel	3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	31
Tabel	4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.....	38
Tabel	4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.....	48
Tabel	4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	58
Tabel	4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.....	62
Tabel	4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1 Diagram alir Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai	2
Gambar	1.2 Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaa.....	5
Gambar	2.1 Struktur Organisasi Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai	11
Gambar	2.2 Komposisi ASN berdasarkan Jenis Kelamin	15
Gambar	2.3 Komposisi PNS Dinas Koperindag Berdasarkan Jenjang Pendidikan	16
Gambar	2.4 Komposisi ASN Dinas Koperindag Kab. Kep. Mentawai berdasarkan Jabatan	16
Gambar	2.5 Komposisi ASN Dinas Koperindag Kab. Kep. Mentawai berdasarkan Usia	16
Gambar	2.6 Komposisi ASN Dinas Koperindag Kab. Kep. Mentawai berdasarkan Tingkat Diklat Struktural	17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan telah terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 telah menghasilkan pimpinan daerah, kepala dan wakil kepala daerah terpilih dan secara defenitif dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Pelantikan kepala dan wakil kepala daerah menjadi momentum dimulainya penyusunan renstra sebagai dasar perwujudan pencapaian visi misi kepala daerah. Maka dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan berkewajiban menyusun Renstra tahun 2025 – 2029 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya – upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka 5 tahun kedepan.

Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 juga sebagai fondasi pembangunan jangka panjang perangkat daerah pada periodisasi pertama pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing masing daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 memperhatikan dan menyelaraskan secara substansi pada Renstra Propinsi Sumatera Barat tahun 2025- 2029 dan Renstra Tahun 2025-2029 sesuai dengan kewenangannya disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

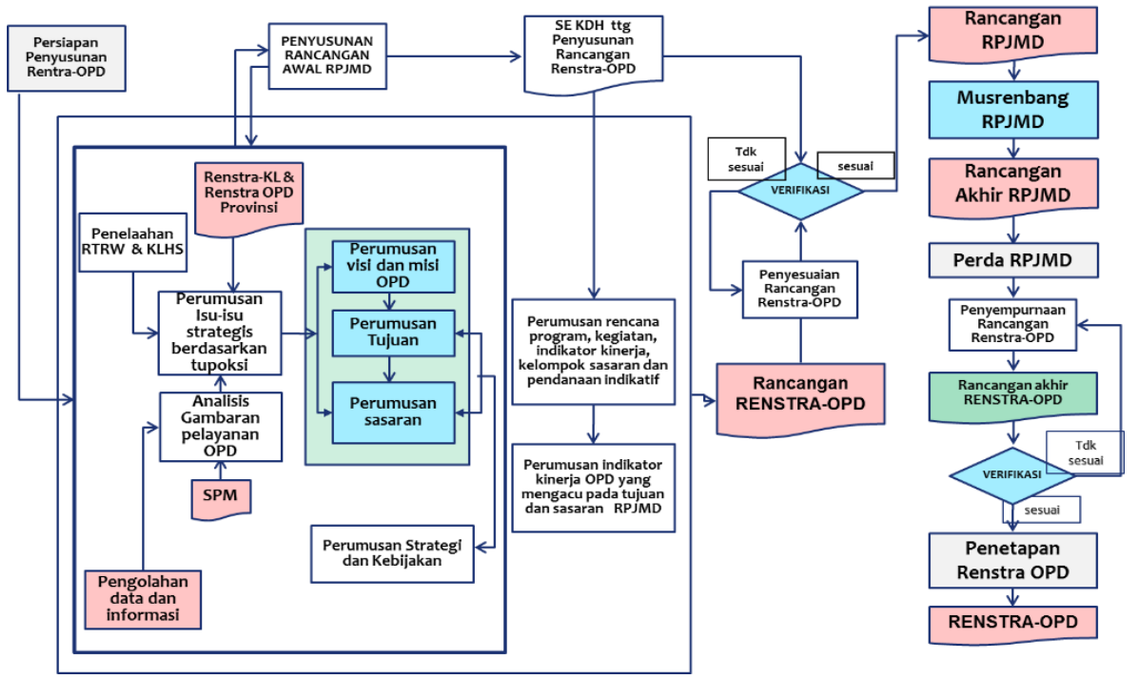
Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita,17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial.

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan

suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.



Gambar 1.1
Diagram alir Tahapan Penyusunan Renstra
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran

pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Peran ini disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas, yaitu: Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengh Perindsutrian dan Perdagangan memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan RPJMD, khususnya dalam: menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program sektoral ekonomi rakyat, menjadi pelaksana program prioritas yang menyasar penguatan ekonomi lokal dan bersinergi dengan perangkat daerah lain dalam menyukseskan agenda pembangunan ekonomi jangka menengah.

Tahapan penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 telah dimulai sejak tahun 2024 yaitu dengan penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra Tahun 2025-2029 dan berlanjut pada tahun 2025 hingga pada penetapan Renstra. Tahapan penyusunan Rensra Tahun 2025- 2029 antara lain:

1. Persiapan, antara lain:
   a. Pembentukan SK Tim Penyusun Renstra Tahun 2025-2029.
2. Rancangan Awal Renstra, antara lain:
   a. Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 .
   b. Pembahasan dan Kesepakatan rancangan Awal Renja oleh oleh Kepala Dinas bersama Tim Penyusun Renstra Tahun 2025-2029.
3. Rancangan Renstra, antara lain:
   a. Penyempurnaan rancangan awal Renstra RPJMD menjadi rancangan Renstra berdasarkan saran penyempurnaan rancangan awal Renstra hasil konsultasi dengan bappeda.
4. Rancangan Akhir Renstra, antara lain:
   a. Penyempurnaan rancangan Renstra menjadi rancangan akhir Renstra berdasarkan berita acara kesepakatan hasil verifikasi yang bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara.
   b. Penyampaian rancangan akhir Renstra ke Bappeda Renstra Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah juga memperhatikan daya dukung lingkungan sebagai bentuk pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lanskap perencanaan pembangunan daerah memerlukan analisis yang kuat dalam memperhitungkan kemampuan daya dukung dan daya tampung wilayah sehingga mampu membawa pembangunan yang berkelanjutan melalui sebuah kajian lingkungan hidup yang sistematis dan terukur.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

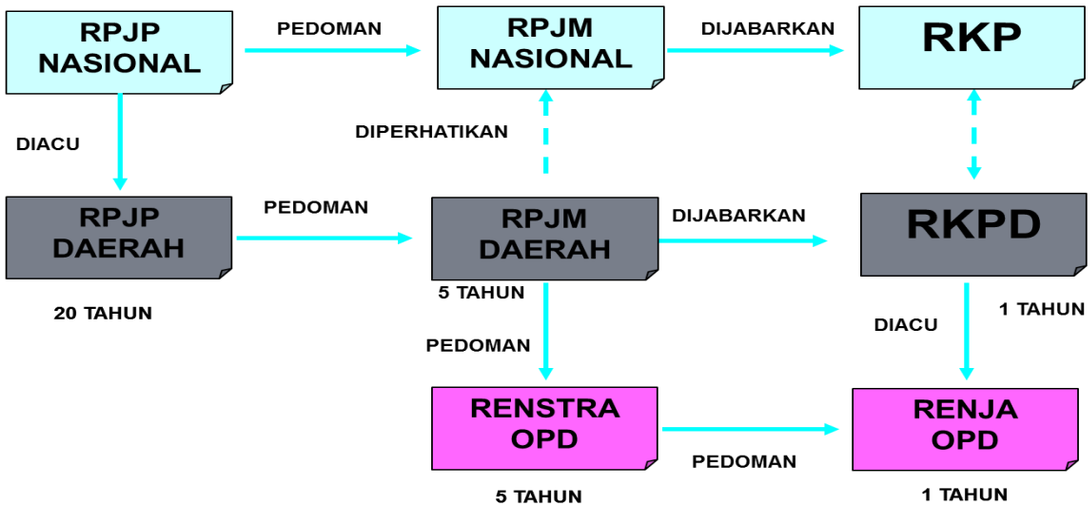
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Renstra sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 bahwa penyusunan KLHS dalam Renstra ini tidak hanya mengkaji dampak sebuah kegiatan, melainkan mengupayakan agar Kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang akan disusun dapat menjamin keberlanjutan pembangunan sehingga memastikan prospek pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Renstra Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun sebagai bentuk pembagian peran untuk pencapaian visi misi kepala daerah 5 (lima) tahun kedepan dan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan perangkat Daerah. Renstra merupakan penjabaran lebih detail dari visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk setiap Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra yang selaras dengan RPJMD memastikan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini

mencegah terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan, kolaborasi antar sektor dan spasial, serta memastikan semua upaya pembangunan terarah pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang berfungsi sebagai penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sesuai dengan tugas dan fungsi urusan pemerintahan yang ditangani oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

Renstra juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Renja Dinas (Rencana Kerja Perangkat Daerah). Renstra Dinas disusun dengan mengacu dan menyesuaikan secara langsung terhadap arah kebijakan, visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD. Dalam hal ini Renstra menjadi penjabaran sektoral dari RPJMD, khususnya dalam urusan koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan. Setiap program dan kegiatan strategis dalam Renstra mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) RPJMD. RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang menjabarkan RPJMD untuk setiap tahun berjalan. Dalam konteks ini RKPD menjadi penghubung antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra) dengan perencanaan tahunan (Renja). Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renstra dijabarkan secara bertahap ke dalam RKPD setiap tahun selama periode RPJMD. Dinas harus memastikan bahwa target tahunan dalam Renstra selaras dengan prioritas pembangunan tahunan dalam RKPD.

Renja Dinas merupakan dokumen operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas dan RKPD. Renja berfungsi sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun. Dalam hal ini Renja adalah penjabaran tahunan dari Renstra, dengan rincian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target, serta kebutuhan anggaran. Penyusunan Renja juga mempertimbangkan tema pembangunan dan prioritas tahunan yang ditetapkan dalam RKPD. Renja menjadi dasar penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan proses penganggaran melalui APBD, dengan demikian Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan memiliki hubungan yang erat dan berkesinambungan dengan RPJMD, RKPD, dan Renja Dinas. Renstra tidak dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang bertingkat dan saling terkait. Melalui keselarasan antara dokumen-dokumen tersebut, program pemberdayaan koperasi, pengembangan UMKM, peningkatan daya saing industri lokal, dan penguatan sistem perdagangan dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.



Gambar 1.2
Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan

1.2 Dasar hukum penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Diubah dengan PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, ada peraturan dan dokumen strategis lain yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2029 Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai pedoman bagi seluruh komponen/ aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan

dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, akuntabel dan berkualitas.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029
2. Sebagai dasar penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja 5 (lima) tahunan bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten kepulauan mentawai
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan koperasi, koperasi menengah, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.2 Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Tugas fungsi dan

stuktur Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah Perindustrian dan Perdagangan .

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN ,SASARAN,STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Perindustrian dan Perdagangan.

Pada bagian ini dikemukakan Perumusan tujuan didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perangkat daerah yang telah ditetapkan.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Perindustrian dan Perdagangan.

Pada bagian ini Narasi sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Renstra OPD yang memiliki hubungan sebab akibat

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan kenerja penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan dan kearsipan. Bab ini terdiri atas:

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Bab ini Menguraikan tahapan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, menguraikan pengendalikan dan pengelolaan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Renstra

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

Gambaran Pelayanan SKPD dalam konteks penyusunan Rencana Strategis diperlukan didalam menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang dalam hal ini adalah terkait dengan kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sumberdaya yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan yang terkait dengan kondisi kepegawaian, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, kinerja pelayanan yang dilaksanakan tentunya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan serta tantang dan peluang didalam usaha untuk mengembangkan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai fungsi :

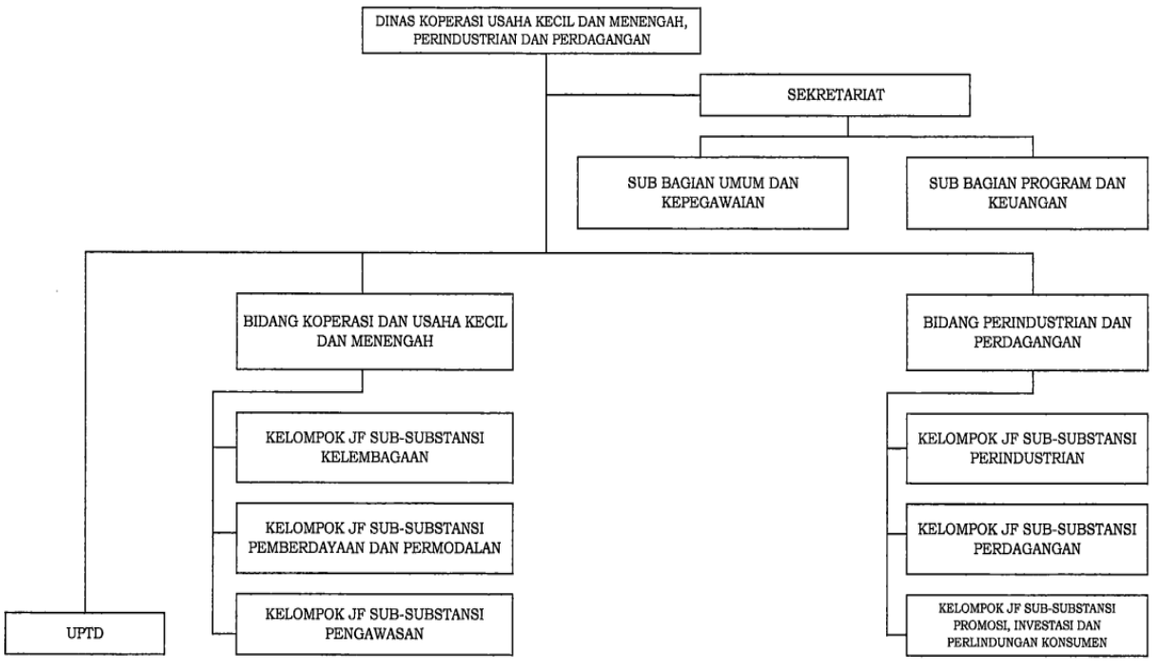
1. Perumusan kebijakan daerah urusan koperasi, urusan usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan koperasi, urusan usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan koperasi, urusan usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
4. Pelaksanaan administrasi urusan koperasi, urusan usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian dan urusan perdagangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   2) Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 3 (tiga) kelompok fungsional sub koordinasi terdiri dari :
   a) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kelembagaan Analis Kebijakan.
   b) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan dan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Analis Kebijakan.
   c) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pengawasan Koperasi.
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan 2 (dua) kelompok fungsional sub koordinasi terdiri dari :
   a) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian.
   b) Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan Ahli Muda.

Adapun struktur lengkap organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam gambar dibawah ini :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai

A. Kepala Dinas

1. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan.

B. Sekretaris

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkup Dinas.
   a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
   b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Dinas;
   c. Penataan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas;
   d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
   e. Pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas; dan
   f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

   1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

   a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas;

b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas;
c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan dinas; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di lingkungan Dinas;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
2. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi usaha kecil dan menengah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana, Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi usaha kecil dan menengah, pemberdayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan pengawasan koperasi usaha kecil dan menengah;
   b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemberdayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan pengawasan koperasi usaha kecil dan menengah;
   c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemberdayaan dan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan pengawasan koperasi usaha kecil dan menengah;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

   1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kelembagaan Analis Kebijakan Ahli Muda, mempunyai tugas :

   a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan;
   b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan;

c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kelembagaan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pemberdayaan dan Permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Analis Kebijakan Ahli Muda, mempunyai tugas:

a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan permodalan;
b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan permodalan;
c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemberdayaan dan permodalan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pengawasan Koperasi Ahli Muda, mempunyai tugas:

a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan permodalan;
b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan permodalan;
c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemberdayaan dan permodalan; dan
a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

D. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
2. Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan.

Perindustrian :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang industri agro, industri non agro, sarana dan prasarana pengembangan industri;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang industri agro, industri non agro, sarana dan prasarana pengembangan industri;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang industri agro, industri non agro, sarana dan prasarana pengembangan industri;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Perdagangan :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, bina usaha dan fasilitasi perdagangan, dan promosi dan pemasaran;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, bina usaha dan fasilitasi perdagangan, dan promosi dan pemasaran;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dalam negeri, bina usaha dan fasilitasi perdagangan, dan promosi dan pemasaran;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perdagangan Analis Perdagangan Ahli Muda, mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perdagangan;
b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan;
c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perdagangan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Promosi, Investasi dan Perlindungan Konsumen Pengawas Kemetrologian Ahli Muda, mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi, investasi dan perlindungan konsumen;
b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi, investasi dan perlindungan konsumen;
c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang promosi, investasi dan perlindungan konsumen; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

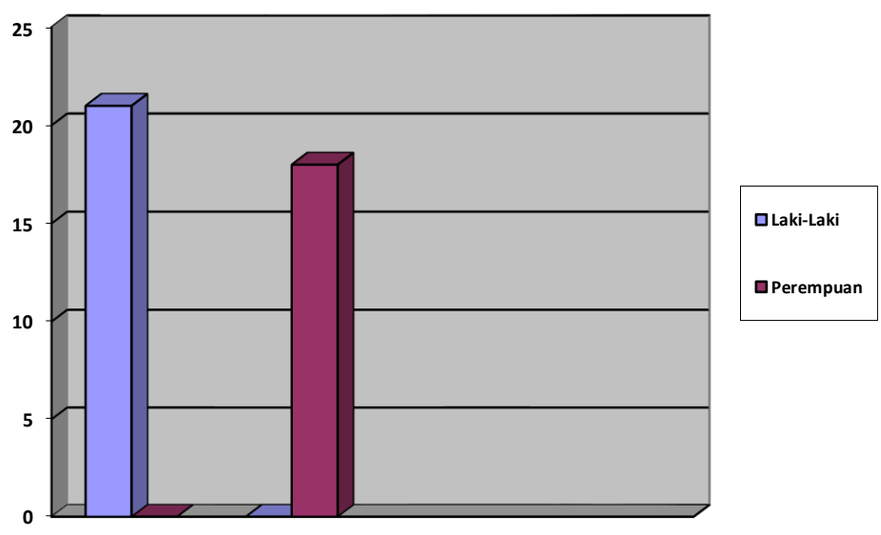
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai per Juni 2025, jumlah ASN di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan adalah 26 (dua puluh enam) orang dan Non ASN sebanyak 13 (tiga belas) orang.

a. Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Dengan perimbangan laki-laki sebanyak 21 orang (53,85%) dan perempuan sebanyak 18 orang (46,15%), yang menunjukan perimbangan gender yang baik sebagaimana nampak dalam grafik disamping ini :

Gambar 2.2
Komposisi ASN berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kondisi Oktober 2025

b. Komposisi Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan

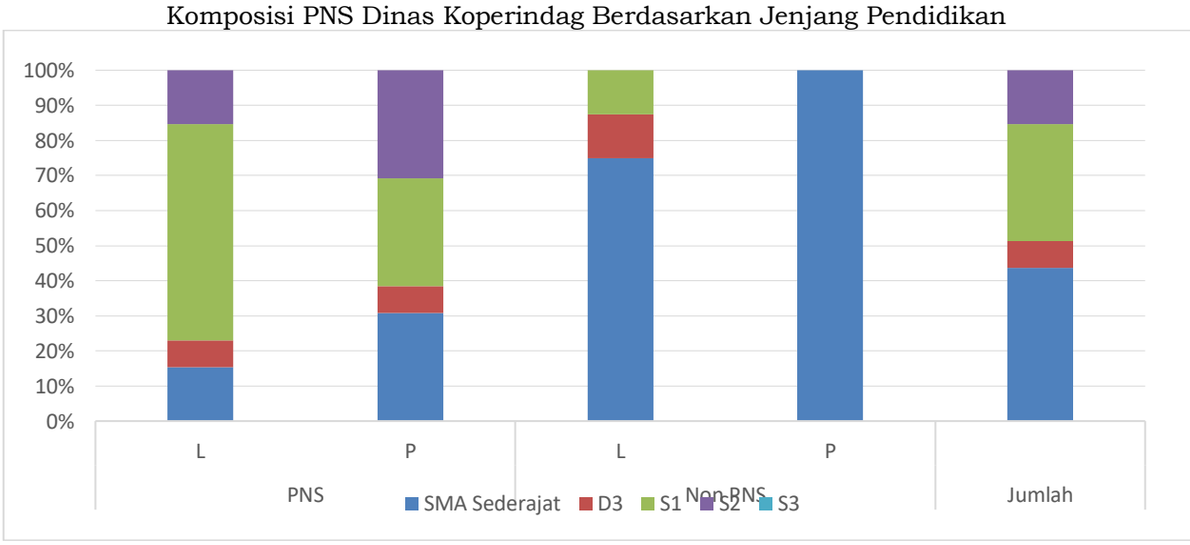
Bila diurut per jenjang pendidikan, maka jumlah terbanyak adalah jenjang pendidikan SMA sebanyak 17 (tujuh belas) orang, Diploma III sebanyak 3(tiga) orang kemudian S1 sebanyak 13 (tiga sebelas) orang, S2 sebanyak 6 (enam) orang. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan memiliki keseragaman sumber daya manusia yang cukup baik. Selanjutnya apabila datanya dipilah menurut jenjang tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukan perimbangan gender yang cukup baik, komposisi per jenjang pendidikan data dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Komposisi Pegawai Dinas Koperindag Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	2	4	6	5	17
2	D3	1	1	1	0	3
3	S1	8	4	1	0	13
4	S2	2	4			6
5	S3					
Jumlah		13	13	8	5	39

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kondisi Oktober 2025

Gambar 2.2
Komposisi PNS Dinas Koperindag Berdasarkan Jenjang Pendidikan

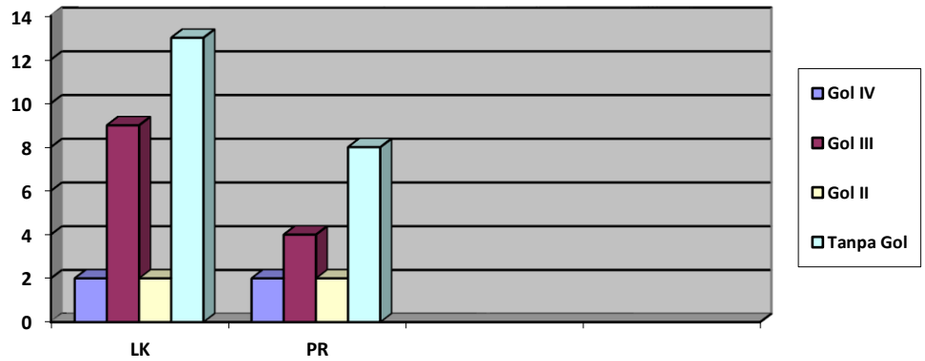


Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kondisi Oktober 2025

c. Komposisi ASN berdasarkan pangkat dan golongan

Sebagian besar SDM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan untuk Golongan III sebanyak 15 (lima belas) orang, Golongan II sebanyak 2 (dua) orang dan golongan IV sebanyak 5 (lima) orang, Golongan IX sebanyak 1 (satu) orang, Gol VII sebanyak 1 (satu), Gol V sebanyak 2 (dua) orang tanpa gol sebanyak 13 (tiga belas) orang dan untuk maka dapat dilihat perimbangan gender dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Gambar 2.3
Komposisi ASN Dinas Koperindag Kab. Kep. Mentawai berdasarkan Pangkat/Golongan

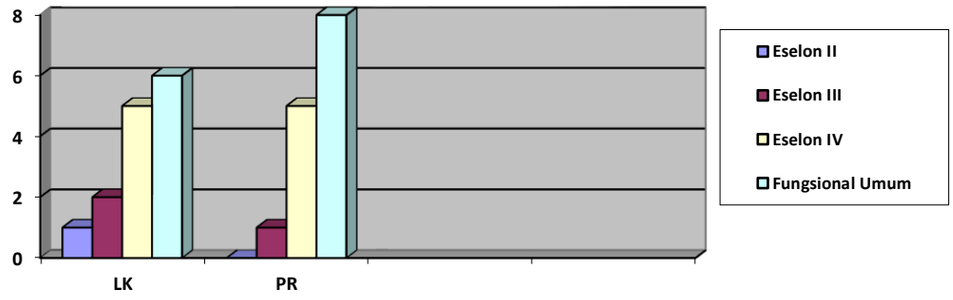


Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kondisi Oktober 2025

d. Komposisi ASN berdasarkan Jabatan

Komposisi ASN berdasarkan jabatan terdiri dari Eselon II 1 (satu) orang, Eselon III sebanyak 2 (dua) orang, Eselon IV sebanyak 2 (dua) orang dan Jabatan Fungsional sebanyak 5 (lima) orang. Komposisi tersebut dapat dilihat dari perbandingan gender dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Gambar 2.4
Komposisi ASN Dinas Koperindag Kab. Kep. Mentawai berdasarkan Jabatan

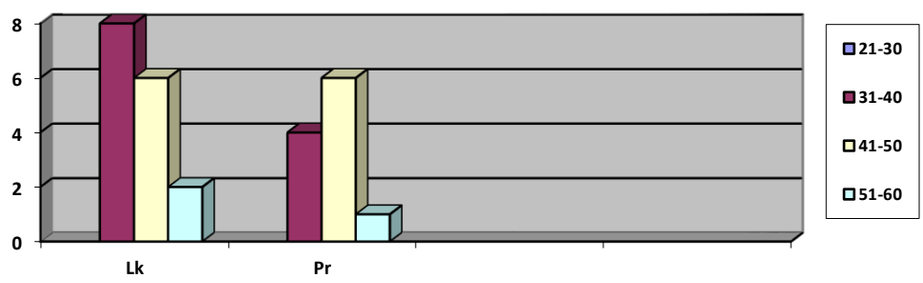


Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kondisi Oktober 2025

e. Komposisi ASN berdasarkan Usia

ASN di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada umumnya didominasi usia antara 41-50 tahun dan 31-40 tahun. Komposisi ASN berdasarkan usia dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Gambar 2.5
Komposisi ASN Dinas Koperindag Kab. Kep. Mentawai berdasarkan Usia

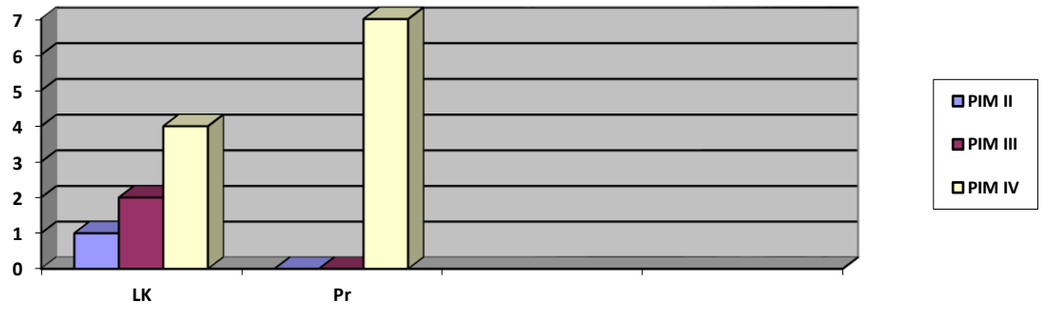


Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kondisi Oktober 2025

f. Komposisi ASN berdasarkan Tingkat diklat struktural

Dari 20 orang SDM Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sudah mengikuti PIM IV sebanyak 5 (lima) orang, komposisi ASN berdasarkan tingkat diklat struktural dapat dilihat dari grafik sebagai berikut :

Gambar 2.6
Komposisi ASN Dinas Koperindag
Kab. Kep. Mentawai berdasarkan Tingkat Diklat Struktural



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kondisi Oktober 2025

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain :

a. Kondisi Sarana Prasarana Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan berupa Tanah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Tanah dan Gedung yang dimiliki

No.	Uraian	Luas
1.	Tanah Bangunan Industri Lainnya	30.000 M2
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.550 M2
3.	Tanah Kosong Lainnya	5.000 M2

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kondisi Oktober 2025

b. Untuk aset bergerak pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kendaraan Bermotor yang dimiliki

No.	Uraian	Jumlah
1.	Isuzu Pick Up D-Max	1 (unit)
2.	Kijang LX standar	1 (unit)
	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sejumlah 17 (tujuh belas) unit terdiri dari :	
	1. Honda/Mega Pro	1 (unit)
	2. Kharisma/honda	1 (unit)
	3. Honda/Supra X 125	1 (unit)
	4. Honda/Revo	2 (unit)
	5. Honda Vario	6 (unit)
	6. Honda-Matik/New Beat Pop	2 (unit)
	7. KLX 150S	2 (unit)

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kondisi Oktober 2025

2.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama lima tahun terakhir, alokasi anggaran untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Koperindag) menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, mencerminkan respons terhadap kebutuhan pengembangan sektor strategis ini. Pada tahun kedua, anggaran mengalami sedikit penurunan sebesar 1,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian fiskal atau refocusing anggaran untuk penanganan prioritas lainnya pada saat itu. Memasuki tahun ketiga, terjadi peningkatan alokasi anggaran sebesar 9,77%, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sektor koperasi dan UKM, serta mendukung pertumbuhan industri pengolahan lokal melalui program-program pemberdayaan dan fasilitasi usaha. Peningkatan tersebut berlanjut secara signifikan pada tahun keempat, dengan lonjakan anggaran mencapai 43,60%. Kenaikan ini mencerminkan strategi agresif dalam mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi, penguatan sektor informal, serta peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah melalui berbagai program pelatihan, akses pembiayaan, dan fasilitasi pemasaran. Namun, pada tahun kelima, anggaran mengalami penurunan tajam sebesar 44,21%. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, seperti realokasi anggaran daerah, penyesuaian fiskal secara menyeluruh, atau berkurangnya program strategis yang bersumber dari dana bantuan luar atau dana alokasi khusus. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Koperindag dalam menjaga keberlanjutan program pemberdayaan dan pengembangan sektor-sektor prioritas. Secara keseluruhan, dinamika anggaran menunjukkan adanya fluktuasi yang perlu dikelola dengan strategi perencanaan dan pelaksanaan program yang adaptif, agar dampak pembangunan ekonomi kerakyatan melalui koperasi, UKM, dan industri lokal tetap optimal dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya Pagu anggaran dan realisasi APBD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 Tabel Pertumbuhan Anggaran 2020-2024

No.	Tahun	Alokasi Anggaran	Pertumbuhan (%)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1.	2020	7.711.950.337		5.521.380.632	71,77
2.	2021	7.575.350.917	- 1,77	5.968.292.001	78,79
3.	2022	8.316.042.859	9,77	7.174.682.684	86.28
4.	2023	11.948.061.724	43,60	8.289.823.088	69,38
5.	2024	6.664.006.228	- 44,21	6.030.927.547	90.50
Jumlah					

Sumber : Sekretariat, kondisi Oktober 2025

Masalah klasik yang sering dihadapi oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah ketidak merataan distribusi bahan pokok, fluktuasi harga yang tidak terkendali, serta minimnya data real-time terkait kebutuhan pangan masyarakat. Di sisi lain, terdapat persoalan inefisiensi penyaluran bantuan, terutama untuk masyarakat kurang mampu, karena data penerima tidak akurat, sistem distribusi masih manual, dan pengawasan yang lemah. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan sistem yang mampu menjawab tantangan tersebut secara komprehensif melalui pendekatan teknologi dan data, sehingga lahirlah inovasi SILABOK (Sistem Layanan Bahan Pokok).

SILABOK adalah sebuah inovasi sistem digital yang dirancang untuk

mengelola dan mendistribusikan bahan kebutuhan pokok secara efisien, akurat, dan terintegrasi. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi, basis data penerima manfaat, serta mekanisme pelaporan digital untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan transparansi dalam penyaluran bahan pokok.

SILABOK (Sistem Layanan Bahan Pokok) merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang sangat relevan dengan tantangan zaman saat ini. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan prinsip transparansi, sistem ini mampu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan dalam distribusi bahan pokok kepada masyarakat. Jika diterapkan dengan baik, SILABOK bukan hanya menjadi solusi jangka pendek saat krisis, tetapi juga menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan ketahanan pangan lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan Strategis SILABOK

1. Menjamin Ketersediaan Bahan Pokok.
2. Agar masyarakat selalu dapat mengakses kebutuhan dasar seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan lainnya, terutama di masa krisis atau lonjakan harga.
3. Menjaga Stabilitas Harga Pasar.
4. SILABOK membantu mencegah permainan harga atau penimbunan dengan memantau stok dan distribusi secara langsung.
5. Meningkatkan Efisiensi Distribusi.
6. Menghindari distribusi manual yang memakan waktu, biaya, dan rawan manipulasi data.
7. Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi.
8. Semua proses terdokumentasi secara digital, mengurangi potensi penyimpangan
9. Mempercepat Respon Pemerintah.

Memberikan informasi real-time terkait situasi pangan di lapangan, sehingga pemerintah bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

Tantangan implementasi SILABOK

1. Kesiapan Infrastruktur Teknologi. Daerah pelosok mungkin kekurangan akses internet atau perangkat digital.
2. Literasi Digital Masyarakat dan Petugas. Tidak semua warga atau petugas lapangan mampu mengoperasikan sistem digital dengan baik.
3. Keakuratan dan Validitas Data. Jika data penerima tidak valid, maka bantuan tetap tidak akan tepat sasaran.
4. Anggaran dan Sumber Daya Manusia. Dibutuhkan investasi untuk membangun dan memelihara sistem serta pelatihan petugas.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Koperindag) Kabupaten Kepulauan Mentawai menyadari pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan. Mengingat kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan wilayah kepulauan dengan tantangan konektivitas dan aksesibilitas, maka kerja sama yang terstruktur dan berkesinambungan menjadi sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan sektor koperasi, UMKM, industri kecil, dan perdagangan lokal.

Selama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029, Dinas Koperindag akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi yang berperan sebagai motor penggerak ekonomi rakyat di Mentawai.

Beberapa bentuk kerja sama yang telah dan akan terus dikembangkan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain meliputi:

1. Kerja Sama Perencanaan dan Integrasi Program
   Dinas Koperindag senantiasa menjalin koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam merancang dan menyelaraskan program kerja yang bersifat strategis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pengembangan koperasi, UMKM, serta industri dan perdagangan lokal selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah serta arah kebijakan prioritas nasional.
2. Digitalisasi dan Promosi Produk UMKM
   Dalam menghadapi era transformasi digital, kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sangat penting untuk mendorong literasi digital bagi pelaku UMKM, pengembangan platform pemasaran digital, serta peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Selain itu, promosi produk-produk unggulan Mentawai juga dilakukan melalui berbagai kanal informasi publik untuk memperluas jangkauan pasar, baik di tingkat lokal maupun nasional.
3. Fasilitasi Legalitas Usaha dan Akses Pembiayaan
   Bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, serta lembaga perbankan seperti Bank Nagari, BPR, koperasi simpan pinjam, Dinas Koperindag turut mendorong percepatan legalisasi usaha melalui fasilitasi pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), sertifikasi halal, serta sertifikat produk industri rumah tangga (P-IRT). Selain itu, kemitraan dengan lembaga keuangan juga mendukung peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun program pembiayaan mikro berbunga rendah.
4. Lembaga Swadaya Masyarakat
   Keterlibatan LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat berperan dalam menjangkau kelompok masyarakat yang berada di daerah terpencil dan belum terlayani secara optimal oleh program pemerintah.

Kerja sama yang terbangun ini tidak hanya berfokus pada jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan, berbasis potensi unggulan daerah seperti perikanan, pertanian organik, serta produk kerajinan khas Mentawai. Dinas Koperindag Kabupaten Kepulauan Mentawai percaya bahwa melalui kemitraan strategis dan kolaborasi lintas sektor, pembangunan ekonomi rakyat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, inklusif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama antar lembaga, Renstra 2025–2029 diharapkan menjadi pendorong utama terwujudnya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang lebih mandiri secara ekonomi, berdaya saing, dan berkarakter lokal yang kuat dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan zaman.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan pada Renstra adalah :

1. Koperasi seperti Koperasi aktif maupun tidak aktif.
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti : Usaha perorangan atau kelompok yang memiliki skala mikro, kecil, atau menengah dan UMKM seperti sektor kuliner, kerajinan, fashion, industri rumah tangga.
3. Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) seperti : Pelaku industri

manufaktur berskala kecil dan menengah ; pengrajin, pembuat makanan olahan.
4. Pelaku Perdagangan seperti : pedagang pasar tradisional maupun modern dan grosir.
5. Calon wirausaha baru ; Individu atau kelompok yang belum memiliki usaha tapi berpotensi untuk memulai.
6. Mayarakat umum termasuk konsumen dan masyarakat penerima manfaat dari keberadaan UMKM dan koperasi.

Tabel 2.5 Karakterisktik Sasaran layanan

Kelompok Sasaran	Karakteristik Umum
Koperasi	Berbasis anggota, berbadan hukum, banyak yang belum tertib administrasi dan digitalisasi.
UMKM	Modal terbatas, manajemen usaha belum optimal, rendah akses pasar dan pembiayaan, inovasi produk terbatas.
IKM	Skala produksi kecil-menengah, teknologi sederhana, keterbatasan alat produksi dan SDM.
Pedagang	Beragam dari sektor informal hingga formal, akses terhadap sistem distribusi dan pemasaran masih lemah.
Calon WUB	Kurang pengalaman, minim modal dan pengetahuan usaha, butuh pembinaan intensif.

(sumber data : data diolah Dinas Koperindag)

Beberapa intervensi strategis yang umum dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah Perindustrian dan Perdagangan antara lain:

1. Pembinaan dan Pelatihan
   - Pelatihan manajemen usaha, keuangan, digital marketing, packaging.
   - Pelatihan perkoperasian dan tata kelola organisasi.
2. Fasilitasi Akses Permodalan.
   - Bantuan permodalan melalui program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat, Hibah.
   - Kemitraan dengan lembaga keuangan/perbankan.
3. Pameran dan Promosi Produk
   - Fasilitasi UMKM/IKM ikut pameran atau event lokal dan nasional
   - Promosi melalui media sosial, dan aplikasi digital.
4. Fasilitasi Legalitas Usaha
   - Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha), sertifikasi halal , izin edar.
5. Revitalisasi Pasar Tradisional
   - Perbaikan fasilitas pasar
6. Penguatan Kelembagaan Koperasi.
   - Audit koperasi, RAT, transformasi koperasi konvensional ke koperasi modern.
   - Peningkatan tata kelola dan SDM koperasi.
7. Pendampingan dan Inkubasi Bisnis.
   - Program inkubator usaha bagi WUB dan UMKM pemula.

Dengan melakukan intervensi yang tepat, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dapat membantu meningkatkan kinerja koperasi, UKM dan pengusaha lokal serta meningkatkan perekonomian daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

a. Permasalahan pada Bidang Industri

1. Belum adanya Industri yang berskala besar yang mampu menumbuhkan lapangan kerja baru.

Hal ini berdampak pada rendahnya serapan tenaga kerja lokal, kurangnya nilai tambah dari pengolahan hasil alam, dan ketergantungan pada sektor primer. Tanpa adanya industri menengah atau besar, sektor IKM tidak memiliki mitra hulu-hilir yang bisa mendorong pertumbuhan berkelanjutan

2. Peralatan yang dipakai masih bersifat Tradisional sehingga hasil produksi tidak memadai.
   Penggunaan alat sederhana berdampak pada rendahnya kapasitas produksi, kualitas produk yang belum standar pasar, dan efisiensi usaha yang rendah. Kondisi ini menghambat pelaku IKM untuk naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas.
3. Rasio elektrifikasi belum sesuai harapan diasumsikan masih di bawah kurang lebih 50 %.
   Akses listrik yang terbatas terutama di wilayah-wilayah terpencil menghambat pertumbuhan industri kecil, baik dari sisi produksi, pengemasan, hingga distribusi. Hal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan sentra industri berbasis potensi lokal.

Dampak terhadap target dari permasalahan diatas adalah terhambatnya pencapaian target peningkatan jumlah IKM produktif dan naik kelas dan sulitnya mendorong investasi sektor industri karena kurangnya infrastruktur dasar.

b. Permasalahan Bidang Perdagangan

1. Belum mempunyai pasar utama (Sentral Market) yang mampu melayani transaksi barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat.
   Tidak adanya pusat perdagangan skala kabupaten yang terintegrasi membatasi sirkulasi barang dan jasa, serta menyulitkan kontrol terhadap distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Pasar yang tersebar dan belum tertata juga menyulitkan promosi produk lokal secara berkelanjutan.
2. Masih terbatasnya pasar produk daerah. Produk lokal belum memiliki pasar tetap atau jaringan distribusi yang kuat.
   Kurangnya kerja sama antarwilayah dan terbatasnya transportasi antar pulau juga menjadi faktor penyebab rendahnya jangkauan pasar.
3. Belum adanya Produk unggulan daerah.
   Ketiadaan produk yang di-branding sebagai khas atau unggulan daerah menyebabkan rendahnya identitas ekonomi lokal. Ini juga menghambat upaya pengembangan sektor UMKM dan IKM ke arah yang lebih fokus dan terarah
4. Terbatasnya Promosi dan Investasi.
   Upaya menarik investor masih lemah akibat terbatasnya promosi potensi daerah dan kurangnya data potensi usaha yang akurat dan terbuka. Selain itu, iklim usaha masih dianggap belum menarik karena infrastruktur dan pelayanan usaha belum optimal.
5. Margin dari transaksi dagang belum termanfaatkan secara maksimal untuk menopang peningkatan nilai total produksi barang dan jasa.
   Nilai tambah dari aktivitas perdagangan belum sepenuhnya dinikmati oleh pelaku usaha lokal. Sistem distribusi yang panjang dan biaya logistik yang tinggi membuat margin keuntungan justru berpindah ke pelaku usaha di luar daerah.
   Dampak terhadap target dari permasalahan diatas adalah rendahnya realisasi investasi dan pertumbuhan sektor perdagangan, sulitnya meningkatkan nilai produksi daerah karena kurangnya nilai tambah dan promosi dan sasaran meningkatnya usaha mikro naik kelas dan kontribusi ekonomi lokal menjadi terhambat.

c. Permasalahan Bidang Koperasi dan UKM.

1. Koperasi belum Mampu bersaing dan Koperasi yang ada sekarang sekitar 90% koperasi tidak aktif.
   Kondisi ini menunjukkan lemahnya kelembagaan koperasi, baik dari sisi manajemen, pengawasan, maupun partisipasi anggota. Koperasi belum menjadi kekuatan ekonomi kolektif yang berfungsi untuk menyalurkan kredit, mendukung pemasaran, atau pengadaan bahan baku bagi anggotanya.
2. Dampak terhadap target dari permasalahan diatas adalah sulitnya mencapai sasaran meningkatnya kontribusi koperasi dalam pembangunan daerah, tidak aktifnya koperasi menghambat pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi terfokus hanya pada individu/UMKM, bukan kelompok koperasi.

Permasalahan-permasalahan di atas memberikan gambaran nyata bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan masih menghadapi tantangan mendasar yang harus diatasi melalui:

1. Perencanaan strategis yang adaptif dan berbasis potensi lokal.
2. Penguatan infrastruktur ekonomi, terutama akses energi, transportasi, dan pasar.
3. Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha, melalui pelatihan dan pendampingan.
4. Revitalisasi koperasi dan penataan kelembagaan ekonomi rakyat.
5. Pengembangan produk unggulan dan promosi investasi terarah.
6. Kolaborasi lintas sektor dengan instansi pusat dan swasta

Tanpa intervensi yang sistematis terhadap permasalahan tersebut, pencapaian target tujuan dan sasaran Renstra akan berjalan lambat dan tidak optimal. Oleh karena itu, perumusan strategi ke depan harus bersifat holistik, berbasis data, dan fokus pada penguatan struktur ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, maka isu strategis yang diangkat dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Koperasi	Masih rendahnya jumlah koperasi aktif	Pengawasan Koperasi aktif dan koperasi tidak aktif	koperasi tidak aktif karena tidak mampu beradaptasi dengan transformasi digital dan kebutuhan pasar	koperasi tidak aktif karena kelembagaan yang lemah, manajemen yang buruk, atau tidak sesuai dengan	koperasi tidak aktif karena pengurus tidak kompeten atau tidak aktif.	Pengembangan SDM

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
				kebutuhan anggotanya		
	Rendahnya kualitas SDM tentang koperasi	Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas dan Anggota	Tanpa pendidikan yang memadai, koperasi akan kehilangan arah dan tidak bisa bersaing di pasar global.	Dibutuhkan pendidikan untuk memahami prinsip, etika, dan tata kelola koperasi secara benar.	keterbatasan anggaran atau tenaga ahli untuk menyelenggarakan pelatihan koperasi secara rutin.	Pengembangan sistim hukum, kebijakan dan pemerintahan
Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Belum berkembangnya IKM pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan	Pembangunan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian / perikanan	IKM di negara berkembang sering tertinggal dalam rantai pasok global karena rendahnya inovasi, teknologi, dan standar mutu produk.	Banyak IKM belum mampu memenuhi standar mutu, kemasan, dan sertifikasi (halal, PIRT, BPOM, dll).	Minimnya alat pengolahan, akses listrik, atau air bersih mempersulit berkembangnya IKM.	Minimnya fasilitas produksi (sentra IKM, rumah kemasan, alat pengolahan, dsb.)
UMKM	Belum berkembangnya pembinaan kelompok pengrajin	Pembangunan Rumah rumah produksi	Produk kerajinan sering menggunakan bahan lokal dan ramah lingkungan, sehingga potensial mendukung ekonomi hijau jika dibina dengan baik.	Banyak kelompok pengrajin tidak memiliki akses rutin ke pelatihan, pembinaan, dan fasilitasi pameran atau pemasaran.	Minimnya akses ke balai pelatihan, sentra industri kecil, rumah produksi bersama.	Pengembangan identitas lokal dan budaya daerah
	Rendahnya daya saing hasil-hasil produksi	Sertifikasi halal, pelatihan packaging, E-Marketplace	Konsumen global makin peduli pada produk yang memiliki kemasan menarik dan ramah lingkungan.	Mendorong daya saing produk lokal melalui e-commerce, kemasan menarik, dan promosi digital	UMKM lokal belum banyak yang memanfaatkan marketplace (Tokopedia, Shopee, dll).	Keterbatasan UMKM dalam pemanfaatan E-Marketplace dan digital marketing
Perdagangan	Masih rendahnya jumlah pusat/sentra perdagangan	Revitalisasi Pasar Rakyat	Di banyak negara berkembang, pasar rakyat adalah bagian penting dari ekonomi informal. Penataan dan revitalisasi pasar menjadi agenda global untuk inklusi ekonomi.	Pasar rakyat diprioritaskan sebagai penghubung UMKM ke konsumen akhir dan instrumen kestabilan harga.	Kurangnya dana pemeliharaan dan manajemen profesional mengakibatkan pasar menjadi kumuh dan ditinggalkan pembeli.	Tidak optimalnya fungsi pasar sebagai pusat ekonomi lokal, penggerak UMKM, dan stabilisator harga.
	Belum optimalnya kegiatan promosi terhadap produk-produk unggulan	Promosi di Media Online dan Ofline (Datang dan menghadiri kegiatan promosi di dalam dan luar ngeri)	Promosi sangat penting agar produk lokal bisa masuk ke rantai nilai global (ekspor, mitra luar negeri).	Daerah didorong aktif dalam promosi produk unggulan melalui event lokal, nasional, dan internasional.	Promosi sering terbatas pada event tahunan tanpa strategi pemasaran berkelanjutan.	Minimnya partisipasi daerah dalam event promosi nasional/internasional..

BAB III
TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk mewujudkan pembangunan sektor koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian dan perdagangan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan relevan dengan Misi yang kedua yaitu : Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi daerah.

Tujuan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan 2025-2029 memperhatikan sasaran dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan NSPK. Tujuan dari Dinas Koperasi berbentuk kondisi ideal dari suatu ruang lingkup pada 5 (lima) tahun mendatang yang menjadi kewenangan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan. Tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan adalah :

“Terwujudnya Pertumbuhan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,IKM dan Perdagangan Yang Inklusif ”

Tujuan ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan berkelanjutan, memperkuat kelembagaan koperasi dan UMKM, mendorong peningkatan daya saing IKM, serta memperluas akses pasar melalui sistem perdagangan yang transparan, efisien, dan adil. Pertumbuhan yang inklusif menekankan pada pemerataan manfaat ekonomi di seluruh lapisan masyarakat, pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah termasuk kelompok rentan, serta penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pembinaan, pendampingan, fasilitasi pembiayaan, inovasi, dan digitalisasi. Dengan berpedoman pada NSPK, pelaksanaan kebijakan dan program dilakukan secara terstandar, terukur, dan akuntabel, guna menjamin terciptanya tata kelola pembangunan koperasi, UMKM, IKM, dan perdagangan yang profesional, partisipatif, serta berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang dirancang mengacu pada standar nasional, dilakukan secara terukur, dan diarahkan untuk menjamin kualitas layanan serta hasil pembangunan yang setara dan berkeadilan. Secara umum, pertumbuhan yang inklusif mencerminkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menekankan pada partisipasi aktif dan pemerataan manfaat bagi semua pelaku ekonomi, terutama yang berasal dari kelompok ekonomi kecil dan menengah, masyarakat rentan, perempuan, dan pelaku usaha mikro berbasis desa dan komunitas lokal. Dengan arah tujuan tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman dalam merancang sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan secara terstruktur, terintegrasi, dan terukur, dalam rangka mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan transformasi ekonomi daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam jangka waktu lima tahun ke depan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Perindustrian dan Perdagangan menargetkan terwujudnya ekosistem usaha yang kondusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dan daya saing koperasi, UMKM, industri kecil menengah (IKM),

serta penguatan sistem perdagangan daerah yang inklusif dan efisien.
Kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan adalah:

1. Peningkatan jumlah koperasi aktif dan berkualitas dengan struktur organisasi sehat, tata kelola transparan, dan berbasis digital ;
2. Meningkatnya kontribusi UMKM dan IKM terhadap perekonomian daerah melalui program UMKM naik kelas, dengan target peningkatan jumlah UMKM berizin, tersertifikasi, terhubung digital, serta mampu menembus pasar nasional dan ekspor;
3. Terciptanya pasar rakyat yang representatif, tertata, dan kompetitif, melalui revitalisasi pasar rakyat dengan standar nasional (layak fungsi, bersih, ramah lingkungan, inklusif, dan terhubung ke rantai pasok);
4. Tumbuhnya wirausaha baru dan pelaku usaha produktif di sektor prioritas berbasis potensi unggulan daerah ;
5. Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dan platform e-commerce oleh pelaku UMKM dalam aktivitas promosi, transaksi, dan distribusi produk;
6. Meningkatnya akses pelaku usaha terhadap pembiayaan produktif, kemitraan usaha, dan fasilitasi legalitas usaha secara terukur dan berkelanjutan.

Rumusan tujuan ini tidak hanya bersifat spesifik dan terukur (Specific, Measurable), tetapi juga dapat dicapai (Attainable) melalui program yang selaras dengan kewenangan dan kapasitas perangkat daerah, realistis dan relevan (Realistic) terhadap tantangan dan peluang pembangunan ekonomi daerah, serta dirancang untuk dapat diukur pencapaiannya dalam kurun waktu 5 tahun (Time-bounded). Selain itu, melalui evaluasi berkala dan peningkatan kapasitas kelembagaan, rumusan ini juga mengakomodasi prinsip perbaikan berkelanjutan (Continuously improved), baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan program pembangunan koperasi, UMKM, IKM, dan perdagangan.

3.2. Sasaran Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah yang menggambarkan tercapainya tujuan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil/outcame program perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan yang sinkron dengan tujuan Renstra sebagai berikut:

1. Sasaran 1 ”Meningkatnya kontribusi koperasi dalam pembangunan daerah”;
   Koperasi adalah entitas ekonomi rakyat yang mencerminkan semangat inklusif dan kebersamaan. Dengan mendorong koperasi menjadi aktif, sehat, dan produktif, maka kontribusi koperasi terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan akan meningkat. Hal ini secara langsung mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagaimana dimaksud dalam tujuan.
2. Sasaran 2 “Meningkatnya usaha mikro naik kelas”;
   Usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah menunjukkan adanya peningkatan kapasitas, kualitas, dan kemandirian pelaku usaha. Proses ini menciptakan struktur ekonomi lokal yang lebih kokoh, memperluas basis pelaku usaha, dan memperkuat ekosistem

ekonomi rakyat. Naiknya kelas UMKM akan memperbesar kontribusinya terhadap pembangunan daerah dan mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

3. Sasaran 3 “Meningkatnya Investasi Daerah”;
   Investasi daerah yang tumbuh, baik dari sektor swasta, koperasi, maupun pelaku UMKM, menjadi motor penggerak utama pertumbuhan sektor riil. Semakin tinggi investasi di sektor IKM, perdagangan, dan UMKM akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan produksi, serta perluasan pasar. Investasi yang berpihak dan menjangkau pelaku ekonomi kecil memperkuat sisi inklusivitas dari pertumbuhan yang dicita-citakan.

Ketiga sasaran tersebut saling memperkuat dan tidak berdiri sendiri, sehingga mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah Perindustrin dan Perdagangan secara sinergis dan tertata.

Berikut adalah rumusan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan yang telah disesuaikan dengan masing-masing urusan pemerintahan daerah yang diampu, yaitu:

1. Urusan Koperasi.
   Sasaranya adalah “Meningkatnya Kontribusi Koperasi dalam Pembangunan Daerah". Urusan koperasi menitikberatkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, tata kelola koperasi yang sehat, serta digitalisasi koperasi agar dapat menjadi instrumen ekonomi kerakyatan yang produktif dan profesional. Dengan meningkatnya jumlah koperasi aktif, sehat, dan berperan dalam rantai ekonomi lokal, maka kontribusinya terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan pemberdayaan masyarakat akan meningkat.
2. Urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
   Sasaranya adalah "Meningkatnya Usaha Mikro Naik Kelas" urusan UMKM bertanggung jawab terhadap pemberdayaan, penguatan, dan pendampingan usaha mikro agar dapat berkembang menjadi usaha kecil atau menengah (naik kelas). Ini mencakup fasilitasi legalitas usaha, akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, sertifikasi produk, serta adopsi teknologi digital. Dengan demikian, UMKM akan memiliki daya saing yang lebih tinggi, mampu mengakses pasar lebih luas, dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
3. Urusan Perindustrian (terkait IKM).
   Sasarannya adalah "Meningkatnya Investasi Daerah" urusan perindustrian mencakup pembinaan dan pengembangan IKM berbasis sumber daya lokal dan kearifan daerah (seperti olahan pertanian, perikanan, dan kerajinan). IKM yang berkembang menjadi lebih modern, inovatif, dan terintegrasi ke dalam rantai pasok akan mendorong pertumbuhan sektor manufaktur skala kecil, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas pasar produk lokal.
4. Urusan Perdagangan
   Sasarannya adalah "Meningkatnya Investasi Daerah" melalui perdagangan. Peningkatan investasi daerah difokuskan pada penguatan infrastruktur perdagangan seperti revitalisasi pasar rakyat, peningkatan promosi dagang, fasilitasi kemitraan usaha, dan integrasi UMKM/IKM dalam sistem distribusi. Peningkatan iklim usaha dan perdagangan akan menarik investasi swasta serta memperkuat sirkulasi ekonomi lokal dan regional.

Kondisi sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah, Perindustrian dan Perdagangan yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 “Meningkatnya Kontribusi Koperasi dalam Pembangunan Daerah”
   Dalam jangka waktu lima tahun ke depan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan menargetkan peningkatan peran koperasi sebagai pelaku ekonomi rakyat yang sehat, aktif, modern, dan profesional. Sasaran ini diwujudkan melalui meningkatnya jumlah koperasi aktif dan berkinerja baik, terbangunnya sistem tata kelola koperasi yang akuntabel, serta tumbuhnya koperasi yang berbasis sektor produktif strategis. Dengan langkah tersebut, koperasi diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
2. Sasaran 2 “Meningkatnya usaha mikro naik kelas”;
   Dalam periode lima tahun mendatang, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan menargetkan peningkatan jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil atau menengah melalui intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan. Sasaran ini dicapai melalui program fasilitasi perizinan dan legalitas usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku UMKM, kemudahan akses pembiayaan, serta perluasan pasar melalui digitalisasi dan promosi produk. Perpindahan usaha mikro ke kelas yang lebih tinggi akan memperkuat struktur ekonomi lokal, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
3. Sasaran 3 “Meningkatnya Investasi Daerah”;
   Selama periode Renstra lima tahun ke depan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan menetapkan sasaran meningkatnya investasi daerah khususnya pada sektor perdagangan, UMKM, dan industri kecil dan menengah. Sasaran ini diwujudkan melalui penguatan iklim usaha yang kondusif, revitalisasi sarana perdagangan seperti pasar rakyat, promosi potensi produk unggulan daerah, serta fasilitasi kemitraan usaha dan perluasan pasar. Meningkatnya investasi akan memperluas akses modal bagi pelaku usaha lokal, mendorong pertumbuhan sektor produktif, serta mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai beserta indikatornya kinerja disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Investasi, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/Hilirisasi Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Terwujudnya Pertumbuhan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, IKM dan Perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan		Rasio volume koperasi terhadap PDRB (Persentase)	0,369	0,372	0,386	0,398	0,412	0,427	
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (Persentase)	0,39	0,79	1,19	1,59	1,99	4,17	
			Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (Persentase)	80,11	82,28	85,13	85,75	86,12	87	
			Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	44,42	47,25	50,08	52,91	55,74	58,57	
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,39	
		Meningkatnya kontribusi koperasi dalam pembangunan daerah	Persentase Koperasi Sehat (Persentase)	0,14	0,05	0,06	0,08	0,08	0,08	
		Meningkatnya investasi daerah	jumlah investasi yang terealisasi (Investor)	2	2	2	2	2	2	
		Meningkatnya usaha mikro naik kelas	Jumlah Usaha Mikro Non Formal menjadi Formal (UMKM)	779	817	857	899	943	990	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Lakip (Nilai)	85	85	85	85	85	85	
			Jumlah Inovasi yang diterapkan (Nilai)	2	2	2	2	2	2	
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	100	100	100	

3.3. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Mentawai secara efektif dan berkelanjutan. Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan maka strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung Strategi Pembangunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Strategi Renstra Perangkat Daerah

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Lokasi
Terwujudnya Pertumbuhan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,IKM dan Perdagangan yang inklusif	Meningkatnya Kontribusi Koperasi dalam Pembangunan Daerah	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Manajemen, dan SDM Koperasi.	Kabupaten Kepulauan Mentawai
	Meningkatnya usaha mikro naik kelas	- Peningkatan kapasitas usaha mikro seperti pelatihan wirausaha, manajemen, dan akuntansi, - Fasilitasi legalitas dan sertifikasi seperti pendampingan perizinan NIB, PIRT, Halal	Kabupaten Kepulauan Mentawai
	Meningkatnya investasi daerah	- Peningkatan Produksi Pelaku IKM - Fasilitasi pameran dan promosi produk seperti keikut sertaan UMKM/IKM dalam pameran dan promosi produk unggulan daerah - Pengembangan kawasan perindustrian dan perdagangan seperti Revitalisasi pasar rakyat	Hilirisasi Komoditas unggulan daerah: Pisang (Kec. Pagai Selatan, Kec. Sib. Utara), Sagu (Kec. Sib.Selatan), Kelapa (Kec.Sipora Utara, Kec. Sib. Barat Daya). Revitalisasi Pasar (Tuapejat, Sioban, Sikabaluan, Muara Siberut, Sikakakp

Sumber Data : Data diolah Dinas Koperindag

Pentahapan Renstra dilaksanakan agar menjadi prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah Perindustrian dan Perdagangan. Prioritas pembangunan tahunan merupakan tema atau agenda pembangunan tahunan yang menjadi benang merah capaian antara menuju tujuan dan sasaran 5 (lima) tahunan dalam Renstra melalui rencana program pembangunan tahunan. Tabel penahapan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan 2025-2029

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fokus pada pendataan, sosialisasi, dan penguatan kelembagaan dasar.	Pembinaan, fasilitasi legalitas, dan awal digitalisasi.	Fokus pada inkubasi, ekspansi digital, dan promosi sektor riil.	Kemitraan strategis, perluasan pasar dan promosi.	Evaluasi, penilaian hasil, dan peluncuran program unggulan.

3.4. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut :

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
	Terwujudnya Pertumbuhan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,IKM dan Perdagangan yang inklusif	1. Koperasi rakyat menjadi distributor pangan sehat gratis untuk sekolah dan desa wisata. 2. Koperasi juga mengelola logistik wisata dan produksi UMKM, serta menyetor pajak dari aktivitas digital. 3. Hilirisasi Komoditas Unggulan Daerah (Kelapa, Pisang, Sagu, Ikan). 4. Kebijakan Kemudahan berinvestasi. 5. Penetapan peta dan kawasan Investasi strategis. 6. Budidaya Komoditas unggulan daerah. 7.Penguatan dan pengendalian rantai pasok pangan. 8. Pengawasan dan mitigasi kerawanan pangan. 9. Penyediaan infrastruktur pendukung investasi. 10.Promosi dan Digitalisasi investasi. 11. Kolaborasi dan kemitraan Pentahelix (akademisi, bisnis /pelaku usaha, komunitas / masyarakat, pemerintah, media). 12 Mendorong UMKM lokal ekspor (kopra, sagu, ikan asap) melalui program paspor ekspor digital. 13. PAD diperoleh dari lisensi produk, sertifikasi halal digital, dan fee ekspor lokal. 14. Produk seperti RDF, kopra	1.Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas, pengelola dan anggota Koperasi 2.Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan Koperasi. 3.Pelaksanaan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi. 4.Meningkatkan kemampuan pengembangan usaha mikro melalui perencanaan strategis, inovasi, dan adaptasi dengan perubahan pasar 5.Melaksanakan kerjasama dengan stakeholder seperti pemerintah, lembaga keuangan. 6.Mendorong pelaku usaha mikro untuk memiliki legalitas formal seperti NIB, PIRT, Sertifikat Halal 7. Fasilitasi bantuan alat dan mesin produksi (modernisasi alat kerja) untuk IKM sesuai sektor unggulan daerah. 8. Pengembangan dan revitalisasi sentra IKM berbasis komoditas unggulan daerah	

		organik, dan sagu olahan diekspor dengan sistem blockchain.	(misalnya sentra batik, makanan olahan) 9. Peningkatan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 10. Peningkatan Pengembangan Ekspor 11. Peningkatan Stabilisasi Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting . 12. Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. 13. Peningkatan Sarana Distribusi 14. Peningkatan perencanaan dan pembangunan industri 15. Peningkatan Pengendalian Izin Usaha Industri	

Sumber data : Data diolah Dinas Koperindag

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai ditentukanlah program kegiatan dan sub kegiatan. Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

Program kegiatan dan sub kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

A. Bidang Koperasi dan UKM

1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :
1. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
2. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :
1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :
1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
2. Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
3. Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
4. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
5. Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
6. Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota
7. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

Sub Kegiatan :
1. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
2. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
4. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
5. Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
6. Pemulihan Usaha Mikro
7. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil
8. Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
9. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
10. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
11. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sub Kegiatan :
1. Pengembangan Usaha Mikro
2. Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
3. Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
4. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

B. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Sub Kegiatan :
1. Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik

Kegiatan : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat

Sub Kegiatan :
1. Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sub Kegiatan :
1. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Sub Kegiatan :
1. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi

Perdagangan

3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Kegiatan	:	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	1. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

4. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Kegiatan	:	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	1. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

C. Sekretariat

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam hal ini Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang .

Tujuan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan adalah ”Terwujudnya Pertumbuhan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah, IKM dan Perdagangan yang Inklusif dan Berkelanjutan ”.Tujuan tersebut selaras dengan sasaran RPJMD dan sesuai dengan Tugas dan Fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, selain itu, dalam mengupayakan terwujudnya tujuan tersebut, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan juga menyusun sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan

yang diturunkan secara berjenjang. Penurunan secara berjenjang ini menghasilkan beberapa program beserta dengan indikator,output, dan outcome seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya Pertumbuhan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,IKM dan Perdagangan yang inklusif				Rasio volume koperasi terhadap PDRB		
					Rasio PDRB Industri Pengolahan		
					Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok		
					Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB		
					Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah		
		Meningkatnya kontribusi koperasi dalam pembangunan daerah			Persentase Koperasi Sehat (Persentase)		
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi	Peningkatan kepatuhan jaringan pelayanan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
				Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kabupaten/Kota	
			meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Terlaksananya pendidikan dan latihan perkoperasian	Peningkatan pengurus,pengawas, pengelola koperasi yang sudah memiliki sertifikat uji kompetensi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Meningkatnya daya saing koperasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
				Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
				Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
				Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
				Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	
				Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya usaha mikro naik kelas			Jumlah Usaha Mikro Non Formal menjadi Formal (UMKM)		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Pertumbuhan Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Meningkatnya usaha mikro dengan melakukan pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan,penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Pertumbuhan Wirausaha	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Usaha Mikro	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Usaha MIkro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
				Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pemulihan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
				Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
				Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
				Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			Meningkatnya daya saing umkm		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah ukmk yang terfasilitas peningkatan kapasitas produksi dan pengolahan, SDM, Pemasaran serta desain dan teknologi	Meningkatnya usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	
				Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pengembangan Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
				Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	
				Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		Meningkatnya investasi daerah			jumlah investasi yang terealisasi (Investor)		
			meningkatnya kemudahan proses perizinanan dan pendaftaran berusaha		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Meningkatnya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
				Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen,	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	
				Meningkatnya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	
				Tersedianya Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Terlaksananya pengendalian harga dan stock barang penting di tingkat pasar kabupaten	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			Meningkatnya kualitas perizinan		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			berusaha sektor perindustrian				
				Terlaksananya fasilitas izin bagi IKM	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	
			Meningkatnya		Persentase Capaian Kinerja	PROGRAM PENUNJANG	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Kualitas Kinerja Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan tersedia tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Persentase pemenuhan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pemeliharaan barang milik daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	kendaraan peorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
					Nilai Lakip (Nilai)		
					Jumlah Inovasi yang diterapkan (Nilai)		
					Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)		

Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAANDINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					10.657.000.000		12.571.000.000		13.578.000.000		13.454.000.000		14.423.000.000	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.100.000.000		3.328.000.000		3.594.000.000		3.728.000.000		3.818.000.000	
Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	100	3.100.000.000	100	3.328.000.000	100	3.594.000.000	100	3.728.000.000	100	3.818.000.000	
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.637.740.000		2.829.684.000		3.076.913.000		3.193.059.000		3.271.064.340	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan tersedia tepat waktu	Persentase	100	100	2.637.740.000	100	2.829.684.000	100	3.076.913.000	100	3.193.059.000	100	3.271.064.340	
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.611.460.000		2.803.404.000		3.050.633.000		3.165.799.000		3.243.163.340	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	22	26	2.611.460.000	26	2.803.404.000	26	3.050.633.000	26	3.165.799.000	26	3.243.163.340	
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.611.460.000		2.803.404.000		3.050.633.000		3.165.799.000		3.243.164.340	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Dokumen	12	12	26.280.000	12	26.280.000	12	26.280.000	12	27.260.000	12	27.900.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tugas ASN													
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					144.850.000		165.177.000		165.177.000		171.331.000		175.465.660	
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum	Persentase	100	100	144.850.000	100	165.177.000	100	165.177.000	100	171.331.000	100	175.465.660	
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					40.000.000		46.561.000		46.561.000		48.300.000		49.466.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	6	40.000.000	6	46.561.000	6	46.561.000	6	48.300.000	6	49.466.000	
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					17.000.000		19.924.000		19.924.000		20.660.000		21.158.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	17.000.000	2	19.924.000	2	19.924.000	2	20.660.000	2	21.158.000	
2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					6.000.000		8.692.000		8.692.000		9.016.000		9.233.660	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	6.000.000	12	8.692.000	12	8.692.000	12	9.016.000	12	9.233.660	
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					81.850.000		90.000.000		90.000.000		93.355.000		95.608.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24	81.850.000	24	90.000.000	24	90.000.000	24	93.355.000	24	95.608.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					252.000.000		267.729.000		283.500.000		292.650.000		298.797.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan jasa penunjang	Persentase	100	100	252.000.000		267.729.000	100	283.500.000	100	292.650.000	100	298.797.000	
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000		38.000.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	38.000.000	12	38.000.000	12	38.000.000	12	38.000.000	12	38.000.000	
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					214.000.000		229.729.000		245.500.000		254.650.000		260.797.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	214.000.000	12	229.729.000	12	245.500.000	12	254.650.000	12	260.797.000	
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					65.410.000		65.410.000		68.410.000		70.960.000		72.673.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	persentase	100	100	65.410.000	100	65.410.000	100	68.410.000	100	70.960.000	100	72.673.000	
2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan					65.410.000		65.410.000		68.410.000		70.960.000		72.673.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	10	65.410.000	10	65.410.000	10	68.410.000	10	70.960.000	10	72.673.000	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					200.000.000		250.000.000		270.000.000		280.000.000		287.000.000	
meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	50	55	200.000.000	58	250.000.000	60	270.000.000	65	280.000.000	70	287.000.000	
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota					200.000.000		250.000.000		270.000.000		280.000.000		287.000.000	
Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi	Peningkatan kepatuhan jaringan pelayanan koperasi	Persentase	50	55	200.000.000	58	250.000.000	60	270.000.000	65	280.000.000	70	287.000.000	
2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi					100.000.000		100.000.000		120.000.000		120.000.000		127.000.000	
Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	0	63	100.000.000	65	100.000.000	68	120.000.000	70	120.000.000	75	127.000.000	
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang					100.000.000		150.000.000		150.000.000		160.000.000		160.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	20	135	100.000.000	135	150.000.000	135	150.000.000	135	160.000.000	135	160.000.000	
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					250.000.000		300.000.000		324.000.000		336.000.000		344.000.000	
meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	50	55	250.000.000	58	300.000.000	60	324.000.000	65	336.000.000	70	344.000.000	
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					250.000.000		300.000.000		324.000.000		336.000.000		344.000.000	
Terlaksananya pendidikan dan latihan perkoperasian	peningkatan pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah memiliki sertifikat uji kompetensi	Persentase	50	55	250.000.000	58	300.000.000	60	324.000.000	65	336.000.000	70	344.000.000	
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					250.000.000		300.000.000		324.000.000		336.000.000		344.000.000	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	32	135	250.000.000	137	300.000.000	137	324.000.000	139	336.000.000	140	344.000.000	
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					200.000.000		300.000.000		324.000.000		336.000.000		344.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	40	50	200.000.000	55	300.000.000	60	324.000.000	65	336.000.000	70	344.000.000	
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					200.000.000		300.000.000		324.000.000		336.000.000		344.000.000	
Meningkatnya daya saing koperasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Persentase	40	50	200.000.000	55	300.000.000	60	324.000.000	65	336.000.000	70	344.000.000	
2.17.06.2.01.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya					0		0		0		100.000.000		0	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi	Keluarga	0	0	0	0	0	0	0	10	100.000.000	0	0	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dan Pengembangan Ekonomi Lainnya													
2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi					0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	0	0	0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	
2.17.06.2.01.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					150.000.000		0		0		0		0	
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	0	43	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha					0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisas	Unit Usaha	0	0	0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	i Usaha													
2.17.06.2.01.0006 - Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					0		100.000.000		0		0		0	
Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	Unit Usaha		0	0	10	100.000.000	0	0	0	0	0	0	
2.17.06.2.01.0007 - Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000		0		0		36.000.000		0	
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	0	5	50.000.000	0	0	0	0	2	36.000.000	0	0	
2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota					0		0		124.000.000		0		144.000.000	
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	0	0	0	0	0	63	124.000.000	0	0	65	144.000.000	
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					2.000.000.000		2.300.000.000		2.484.000.000		2.577.000.000		2.639.000.000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	8,21	10	2.000.000.000	12	2.300.000.000	15	2.484.000.000	18	2.577.000.000	20	2.639.000.000	
	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	0,93	1		2		5		10		15		
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,					2.000.000.000		2.300.000.000		2.484.000.000		2.577.000.000		2.639.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan														
Meningkatnya usaha mikro dengan melakukan pendataan,kemitraan,kemudahan perizinan,penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	8,21	10	2.000.000.000	12	2.300.000.000	15	2.484.000.000	18	2.577.000.000	20	2.639.000.000	
	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	0,93	1		2		5		10		15		
2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro					200.000.000		300.000.000		200.000.000		300.000.000		200.000.000	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha		20	200.000.000	30	300.000.000	20	200.000.000	30	300.000.000	20	200.000.000	
2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro					0		300.000.000		300.000.000		300.000.000		250.000.000	
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha			0	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	40	250.000.000	
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					0		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha			0	3	110.000.000	3	110.000.000	3	110.000.000	3	110.000.000	
2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha					150.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		200.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN /SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	Satuan	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mikro														
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kali Koordinasi		2	150.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	3	200.000.000	
2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil					0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terfasilitasinya Usaha MIkro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha			0	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	
2.17.07.2.01.0008 - Pemulihan Usaha Mikro					0		0		0		0		100.000.000	
Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha			0		0		0		0	2	100.000.000	
2.17.07.2.01.0009 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil					0		100.000.000		100.000.000		150.000.000		100.000.000	
Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha			0	2	100.000.000	2	100.000.000	3	150.000.000	2	100.000.000	
2.17.07.2.01.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro					100.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha		10	100.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
				Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
				Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
				Kabupaten/Kota	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
				Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	
				Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pengembangan Usaha Mikro	
				Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
				Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	
				Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
	PERDAGANGAN	barang yang efisien, merata dan terintegrasi			
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
8	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	

Sumber data : data diolah Dinas Koperindag

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029.

Dalam upaya mewujudkan tujuan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Terwujudnya Pertumbuhan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, IKM dan Perdagangan Yang Inklusif. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan menetapkan beberapa indikator kinerja utama (IKU) sebagai tolok ukur utama pencapaian tujuan strategis tersebut. lima indikator utama yang

menjadi fokus adalah:

1. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB
   Indikator ini memberikan gambaran sejauh mana kontribusi ekonomi koperasi terhadap total perekonomian daerah. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin besar pula peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Melalui pembinaan kelembagaan koperasi, peningkatan kapasitas manajerial dan usaha, serta penguatan akses terhadap pasar dan pembiayaan, diharapkan volume usaha koperasi dapat meningkat signifikan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya bertumbuh secara kuantitas, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap struktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan rasio ini diharapkan memperkuat posisi koperasi sebagai salah satu pilar utama ekonomi daerah yang inklusif.
2. Rasio PDRB Industri Pengolahan
   Indikator ini menunjukkan kontribusi sektor Rasio PDRB Industri Pengolahan menunjukkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan, yang merupakan indikator penting dalam mengukur sejauh mana pertumbuhan sektor industri, khususnya IKM, dapat mendorong pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pencapaian Rasio PDRB Industri Pengolahan yang semakin meningkat tidak hanya menjadi indikator pertumbuhan sektor industri, tetapi juga mencerminkan efektivitas program-program pemberdayaan koperasi, UKM, dan IKM secara menyeluruh, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok.
   Indikator ini mengukur seberapa baik daerah menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging, dan lainnya. Target ini juga sejalan dengan upaya pengendalian inflasi daerah dan perlindungan daya beli masyarakat, yang merupakan bagian penting dari dimensi inklusivitas dalam pembangunan ekonomi.
4. Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB
   Rasio ini menggambarkan kontribusi ekspor terhadap total output ekonomi daerah, yang menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pelaku ekonomi lokal, khususnya Koperasi, UKM, dan IKM, mampu menembus pasar ekspor dan meningkatkan daya saingnya secara global. Dengan demikian, peningkatan rasio ekspor barang dan jasa terhadap PDRB tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga menunjukkan keberhasilan program dan kebijakan pemberdayaan koperasi, UKM, IKM, serta penguatan sektor perdagangan yang inklusif, sebagaimana tercantum dalam tujuan dan sasaran Renstra.
5. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
   Indikator ini menunjukkan tingkat keberadaan dan peran UKM dalam struktur ekonomi daerah, serta menjadi ukuran sejauh mana program pemberdayaan dan pengembangan UKM telah berhasil meningkatkan jumlah dan kapasitas UKM secara proporsional. Dengan demikian, Proporsi Jumlah UKM menjadi indikator yang relevan dan representatif dalam mencerminkan keberhasilan upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta peningkatan investasi daerah.

Kelima indikator ini dipilih untuk mengukur kontribusi nyata sektor koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terhadap perekonomian daerah, serta menjamin stabilitas sektor perdagangan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Indikator Kinerja Utama Dinas

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio volume koperasi terhadap PDRB	Persentase	0,369	0,372	0,386	0,398	0,412	0,427	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persentase	0,39	0,79	1,19	1,59	1,99	4,17	
3	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	Persentase	80,11	82,28	85,13	85,75	86,12	87	
4	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persentase	44,42	47,25	50,08	52,91	55,74	58,57	
5	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Persentase	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,39	
6	Persentase Koperasi Sehat	Persentase	0,14	0,05	0,06	0,08	0,08	0,08	
7	jumlah investasi yang terealisasi (Investro)	Jumlah	2	2	2	2	2	2	
8	Jumlah Usaha Mikro Non Formal menjadi Formal (UMKM)	Jumlah	779	817	857	899	943	990	
9	Nilai Lakip	Nilai	85	85	85	85	85	85	
10	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah	2	2	2	2	2	2	
11	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	

Sumber data : RPJMD 2025-2029

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	40	40	50	55	60	65	70	
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	50	50	55	58	60	65	70	
3	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	8,21	8,21	10	12	15	18	20	
4	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persentase	10	10	15	20	25	30	40	
5	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	50	50	55	58	60	65	70	
6	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	0,93	0,93	1	2	5	10	15	
II	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	40	40	50	55	60	65	70	
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	50	50	55	58	60	65	70	
3	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	8,21	8,21	10	12	15	18	20	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					KET
4	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persentase	10	10	15	20	25	30	40	
5	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	50	50	55	58	60	65	70	
6	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	0,93	0,93	1	2	5	10	15	
II	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	65	65	70	75	78	80	85	
2	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase	65	65	70	75	78	80	85	
3	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	80,11	80,11	82,28	85,13	85,75	86,12	87	
III	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	80	80	82	85	88	89	90	

(sumber data : data diolah Dinas Koperindag)

BAB V
PENUTUP

5.1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD

Pengendalian pelaksanaan Renstra merupakan proses pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Tujuan utama dari pengendalian adalah memastikan bahwa pelaksanaan rencana strategis OPD berjalan sesuai dengan arah, target, dan kebijakan yang telah ditentukan, serta mampu merespons dinamika dan perubahan lingkungan strategis yang mungkin terjadi selama periode perencanaan.Tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian, dan Perdagangan mengikuti prinsip-prinsip manajemen pemerintahan berbasis hasil (result-based management) serta regulasi perencanaan dan penganggaran pemerintah. Berikut adalah uraian tahapan pengendalian dan evaluasinya:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Aksi
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
3. Monitoring dan Pengendalian.
4. Evaluasi Kinerja (Triwulan dan Tahunan)
5. Pelaporan dan Tindak Lanjut
6. Audit dan Pengawasan Eksternal

Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dilakukan secara berjenjang dan sistematis mulai dari perencanaan tahunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, hingga tindak lanjut. Tujuannya adalah memastikan bahwa program/kegiatan mendukung visi dan misi serta sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

5.2. Manajemen Resiko Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan, diperlukan suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang mungkin timbul. Salah satu pendekatan tersebut adalah penerapan Manajemen Risiko Strategis di lingkungan Perangkat Daerah. Manajemen Risiko Strategis merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagi Perangkat Daerah, pendekatan strategis terhadap risiko bukan hanya berfungsi sebagai upaya mitigasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, menilai, memantau, dan merespons risiko-risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan, seperti Renstra (Rencana Strategis) maupun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Risiko-risiko ini bisa berasal dari faktor internal, seperti keterbatasan SDM atau ketidakefisienan proses kerja, maupun faktor eksternal, seperti perubahan regulasi, kondisi sosial-politik, atau bencana alam.Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko strategis di lingkungan Perangkat Daerah adalah untuk:

1. Menjamin pencapaian sasaran strategis melalui pengelolaan risiko yang proaktif.
2. Mendorong akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam pengambilan keputusan.

3. Meningkatkan kinerja organisasi, dengan mengurangi potensi kerugian dan mengoptimalkan peluang.
4. Menjaga kesinambungan pelayanan publik meskipun menghadapi ketidakpastian atau gangguan.

Proses manajemen risiko dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi Risiko: Langkah awal dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang bisa terjadi di lingkungan perangkat daerah. Risiko ini bisa bersifat internal maupun eksternal.
2. Penilaian Risiko: Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Penilaian ini melibatkan analisis mendalam dan kuantifikasi risiko.
3. Pengendalian Risiko: Pengendalian risiko dilakukan melalui pengembangan strategi mitigasi yang efektif, baik melalui pencegahan, pengurangan, atau transfer risiko kepada pihak ketiga.
4. Monitoring dan Evaluasi: Proses manajemen risiko harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan relevansi strategi yang telah diterapkan.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 4
1.3 Maksud dan Tujuan..... 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..... 30

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029..... 41
3.2 Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029..... 42
3.3 Strategi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029..... 44
3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 44

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJ. PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 47
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 73

BAB V PENUTUP 76

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan DPMPTSP Kabupaten Kepalauan Mentawai	14
Tabel	2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/ Eselonnya DPMPTSP Kabupaten Kepalauan Mentawai	14
Tabel	2.3	Sarana dan Prasarana DPMPTSP KKM	15
Tabel	2.4	Data Izin Berdasarkan KBLI	21
Tabel	2.5	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022-2024...	23
Tabel	2.6	Data Perkembangan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2024 Periode 2020 s/d 2024	24
Tabel	2.7	Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Tahun 2023 dan 2024..	25
Tabel	2.8	Perolehan Nilai Evaluasi SAKIP DPMPTSP KKM Periode 2020-2024.....	25
Tabel	2.9	Pencapaian Kinerja DPMPTSP KKM 2020-2024.....	28
Tabel	2.10	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPMPTSP	32
Tabel	2.11	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran DPMPTSP.....	37
Tabel	3.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP KKM 2025-2029	43
Tabel	3.2	Penahapan RENSTRA DPMPTSP KKM 2025-2029.....	44
Tabel	3.3	Arah kebijakan Renstra DPMPTSP.....	45
Tabel	4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RENSTRA DPMPTSP KKM 2025-2029	49
Tabel	4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendanaan RENSTRA DPMPTSP KKM 2025-2029	60
Tabel	4.3	Indikator Kinerja Utama RENSTRA DPMPTSP KKM 2025-2029.....	74
Tabel	4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK) RENSTRA DPMPTSP KKM 2025-2029	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Tahapan Penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	2
Gambar	1.2	Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan.	4
Gambar	2.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai	13
Gambar	2.2	Data Izin Tahun 2020-2024.....	22
Gambar	2.3	Nilai SKM Tahun 2020-2024.....	23
Gambar	2.4	Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2020-2024.....	24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan local, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan keada masyarakat., bahwa setiap Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Renstra yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Kebuapaten Kepulauan Mentawai.

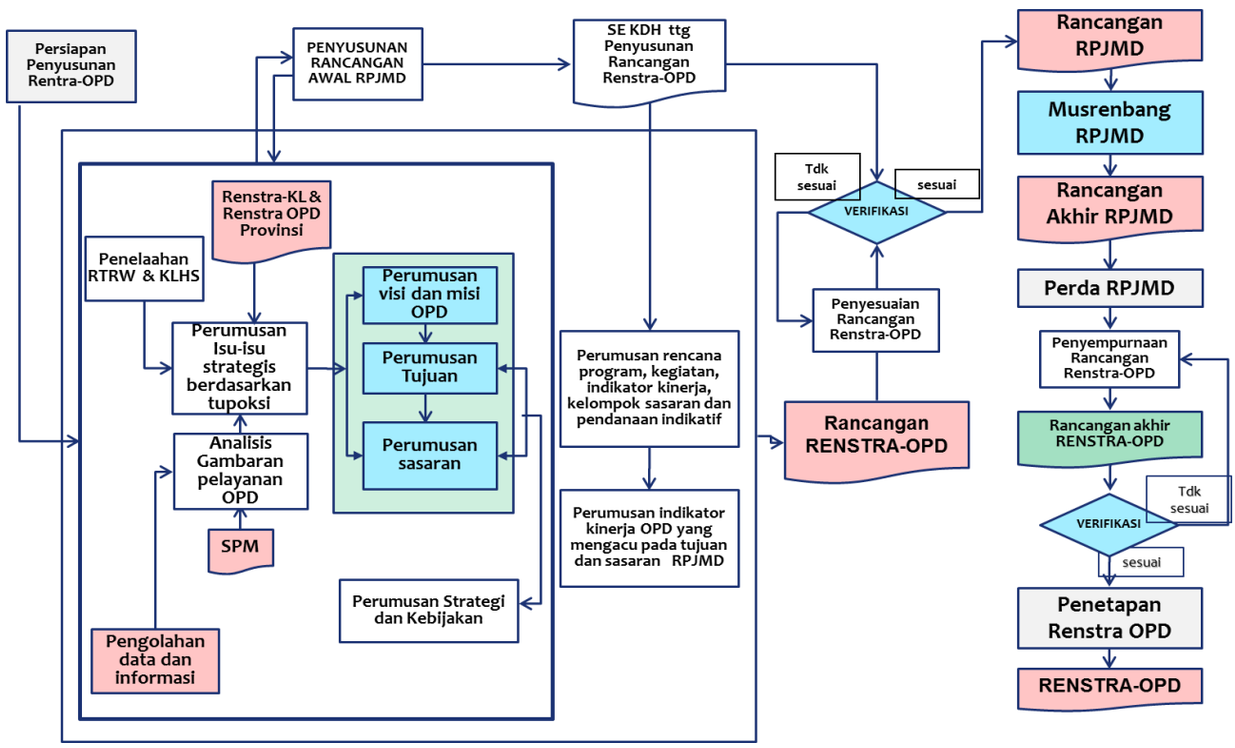
Secara umum Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan

mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra, yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati.

Adapun proses Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tertuang pada bagan 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

a. Pendahuluan;
b. Gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. Permasalahan dan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. Tujuan dan sasaran;
e. Strategi dan arah kebijakan;
f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan

h. Penutup.

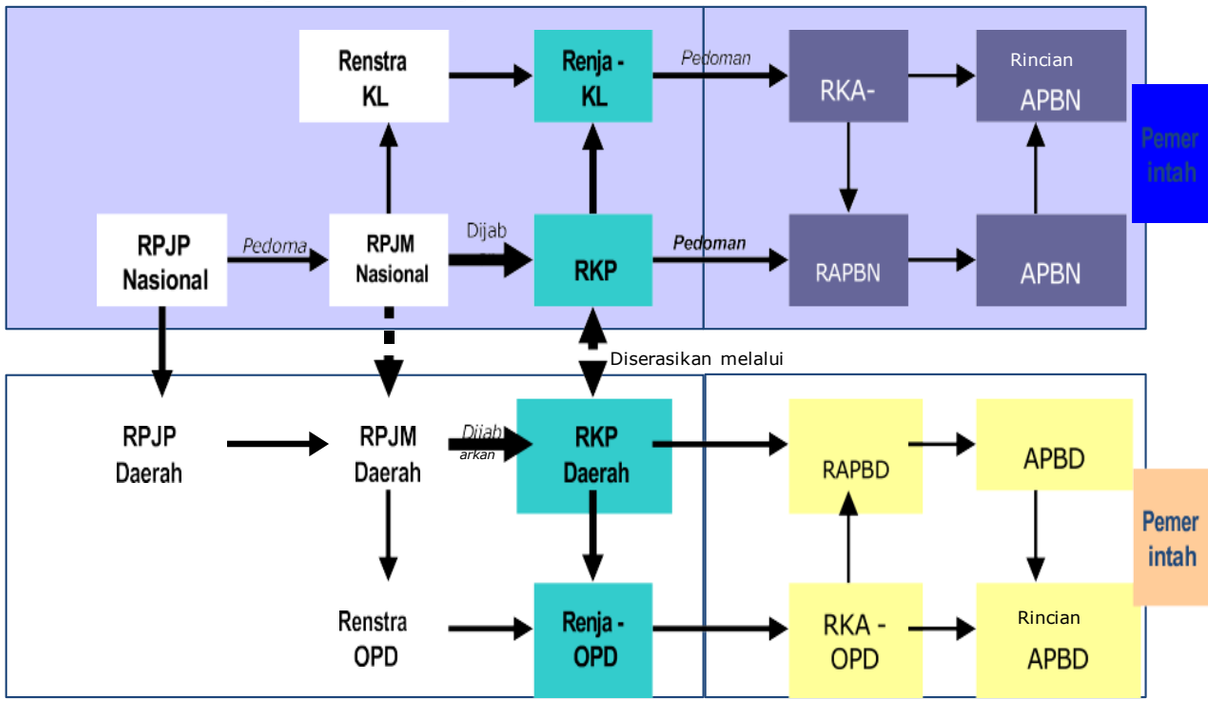
Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

a. Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
b. Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
c. Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara.
d. Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disempurnakan berdasarkan Berita Acara
e. Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan sistematika
f. Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut disampaikan oleh kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
g. Penyampaian Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
h. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
i. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara.
j. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
k. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
l. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.
m. Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Keterkaitan arah kebijakan dan strategi nasional Dokumen Perencanaan antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai terlihat pada bagan 1.2 berikut:

Gambar 1.2

Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Keterkaitan arah kebijakan dan strategi nasional antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan BKPM, upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Investasi. Keterkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi selaras yang tertuang pada Visi dan Misi arah kebijakan daerah provinsi Sumatera Barat. Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian kinerja sasaran yang diimplementasikan melalui program yang terukur secara kuantitatif dan kualitatif.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendyagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten /Kota;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;

23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
25. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Elektronik;
26. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4);
31. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Selain dengan peraturan Perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 antara lain:

a. Instruksi Menteri dalam negeri Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
b. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis,

efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan Daerah
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
7. Mengintegrasikan program-program internal serta menjadi dasar dalam penyusunan cascading program-program lintas sektoral guna menunjang pembangunan bidang penanaman modal, perizinan dan Tenaga Kerja dalam pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan Tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran rencana pembangunan Daerah di bidang urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.
2. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
3. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenanaan.
6. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 5 tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sistematika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.1 Latar Belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, fungsi Renstra Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, keterkaitan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.2 Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Memuat tentang penyajian data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah disertai evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir, serta mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentangen tujuan dan sasaran beserta strategis dan arah kebijakan Dinas Komuni yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangannya dan mengacu pada sasaran 5 (lima) tahun kedepan disertai dengan indikator kinerja

3.1 Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sasaran rencana pembangunan daerah tahun 2025-2029 dan/atau Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Cascading kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu cascading kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai dari tujuan,sasaran, *outcome* dan *output* serta indikator masing-masing.

3.3 Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.

3.4 Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memaparkan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuktakhirannya dan menjelaskan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci beserta target pagu indikatif untuk pencapaian 5 (lima) tahun kedepan

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Bab menjelaskan kesesuaian antara target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dengan dibelakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbagan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan kewenangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. Penyelenggaraan PTSP Daerah bertujuan:

a. Meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
c. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah. Penyelenggaraa
d. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
e. Penerbitan dokumen izin dan non izin;
f. Men izin dan non izin;
g. Penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
h. Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkaitan dengan Investasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:

a. Pelaksanaan pelayanan;
b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
c. Pengelolaan informasi;
d. Penyuluhan kepada masyarakat;
e. Pelayanan konsultasi; dan
f. Pendampingan hukum.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penanaman modal dan perizinan. Kedudukan dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang

menyelenggarakan bidang penanaman modal dan perizinan yang mana diatur dalam Peraturan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, rincian mengenai susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut diuraikan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai.

a. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan Daerah urusan penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi urusan penanaman modal, bidang tenaga kerja dan bidang pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Program dan Keuangan
3. Bidang Penanaman Modal, Membawahi:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
4. Bidang Ketenagakerjaan, Membawahi:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelatihan dan Perlindungan Tenaga Kerja; dan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Tenaga Kerja dan Hubungan Dunia Usaha.
5. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Membawahi:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Informasi dan Pengaduan;
   c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembagan dan Pengolahan Data.
6. UPTD

1) Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana, dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan dinas.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
   a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas;
   b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan Dinas;
   c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
   d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
   e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
   f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkungan Dinas;
   g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan, mempunyai tugas:
   a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di lingkungan Dinas;
   b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
   c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
   d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
   e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
   f. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal.
5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal , mempunyai tugas:
   a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
   b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
   c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
   d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, mempunyai tugas:
   a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
   b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
   c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
   d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
7) Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan.
8) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelatihan dan Perlindungan Tenaga Kerja, mempunyai tugas:

a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan perlindungan tenaga kerja;
b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan dan perlindungan tenaga kerja;
c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelatihan dan perlindungan tenaga kerja;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

9) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Tenaga Kerja dan Hubungan Dunia Usaha, mempunyai tugas:
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan tenaga kerja dan hubungan dunia usaha;
b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan tenaga kerja dan hubungan dunia usaha;
c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kelembagaan tenaga kerja dan hubungan dunia usaha;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

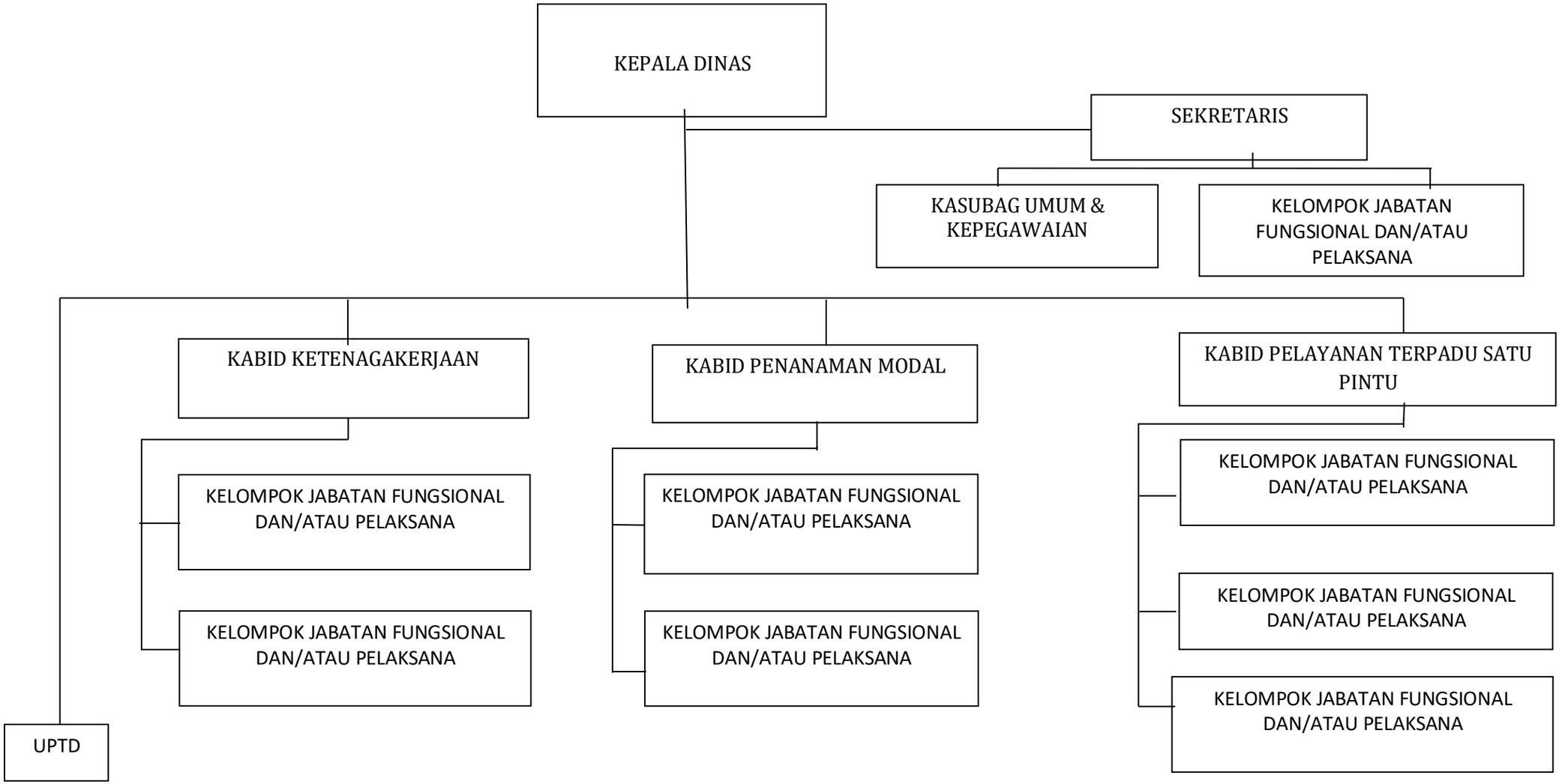
10) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

11) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan, mempunyai tugas:
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan perizinan;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

12) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Informasi dan Pengaduan, mempunyai tugas:
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Informasi dan Pengaduan;
b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Informasi dan Pengaduan;
c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Informasi dan Pengaduan;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

13) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Pengolahan Data, mempunyai tugas:
a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pengolahan data;
b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pengolahan data;
c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengembangan dan pengolahan data;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



2.1.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber daya yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal. Sumber daya merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mencakup PNS Kabupaten Kepulauan Mentawai serta didukung oleh tenaga pendukung adminitrasi dan tenaga teknis yang di klasifikasikan ke dalam komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan. Dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai didukung oleh 51 Orang personil yang terdiri dari 27 PNS dan 24 Orang Tenaga Kontrak dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-			-	-	-
2	SMA Sederajat	2	1		2	7	8	20
3	D3	1	1		1			3
4	S1	7	2		2	1	3	15
5	S2	7	6					13
6	S3							
Jumlah		17	10		5	8	11	51

(sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Dari jumlah pegawai sebanyak 51 orang ini kemudian di tentukan kompisisi pegawai berdasarkan Eselonnya. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi Eselonnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah pegawai berdasarkan Eselonnya

No	Uraian	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III/ Koordinator	4
3	Eselon IV	3
4	Fungsional	6
6	Staf	37
Jumlah		51

(sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Berdasarkan data pada tabel di atas, pegawai Eselon II sebanyak satu orang yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai, 4 orang Eselon III/Koordinator yaitu satu Sekretaris dan 3 Kepala bidang, 3 orang pegawai Eselon IV yaitu satu Kasubag Umum, satu kepala UPT BLK Mini, satu Kepala sub Bagian Tata Usaha, enam orang pejabat Fungsioanal dan staf berjumlah 37 orang, sehingga total jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah 51 orang.

Dalam mendukung kinerja pegawai negeri sipil di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, juga telah dibantu tenaga

adminsitrasi/operator computer/office boy dan tenaga pendamping sebanyak 8 orang. Dalam mendukung pelayanan perizinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung dengan sarana prasarana yang cukup memadai, terdapat ruang *back office* yang digunakan untuk memproses perijinan dan *front office* yang digunakan untuk melayani berbagai perijinan ataupun registrasi ulang perizinan. Tidak hanya itu, di *lobby* Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyediakan berbagai informasi terkait perizinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Jaringan internet/wifi gratis untuk memberikan kenyamanan kepada para pemohon dan tenaga administrasi yang ramah di Bagian *FRONT OFFICE*.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menempati gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai namun belum tersedia gedung yang mamadai dalam melaksanakan pelayanan perizinan yang strategis dan representative. Dimana salah satu faktor pendukung pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah tersedia gedung kantor yang layak, nyaman dan strategis.

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai berasal dari APBD dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Harga
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mitsubishi / Koda Deluxe	2005	Rusak Berat	88,539,692.00
2	Sepeda Motor	SUZUKI / SMASH NR	2009	Baik	13,299,000.00
3	Sepeda Motor	SUZUKI / SMASH NR	2009	Baik	13,299,000.00
4	Sepeda Motor	SUZUKI / SMASH NR	2009	Baik	13,299,000.00
5	Motor Boat	YAMAHA	2009	Baik	83,820,000.00
6	Lemari Kayu	LOKAL	2009	Baik	6,501,000.00
7	Filing Cabinet Besi	ELITE	2009	Baik	3,976,400.00
8	Brandkas	CASSA	2009	Baik	13,530,000.00
9	Overhead Projector	TOSHIBA	2009	Baik	20,064,000.00
10	Meja 1/2 Biro	LOKAL	2009	Baik	9,487,500.00
11	Bangku Tunggu	CHAIRMAN	2009	Baik	4,807,000.00
12	Meja Kerja Pejabat Eselon II	LOKAL	2009	Baik	2,915,000.00
13	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	LION	2009	Baik	3,991,700.00
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	epson	2009	Baik	9,515,000.00
15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASER	2009	Baik	1,925,000.00
16	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	2009	Baik	3,092,750.00
17	Peralatan Jaringan	Peralatan jar.	2009	Baik	10,120,000.00

No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Harga
	lainnya	Komputer			
18	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2009	Baik	35,774,000.00
19	Sepeda Motor	honda supra X125 / NF 125 TR	2010	Baik	18,296,667.00
20	Sepeda Motor	honda supra X125 / NF 125TR	2010	Baik	18,296,667.00
21	Sepeda Motor	honda supra X125 / NF 125TR	2010	Baik	18,296,666.00
22	Alat Penghancur Kertas	dino	2010	Baik	2,954,750.00
23	Bangku Tunggu	-	2010	Baik	3,850,000.00
24	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	lion	2010	Baik	8,860,500.00
25	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	yuli	2010	Baik	1,670,455.00
26	P.C Unit	LG/Sun Case	2010	Baik	7,788,000.00
27	P.C Unit	GTC/Simbadda	2010	Rusak Berat	15,730,000.00
28	Note Book	Vaio	2010	Baik	19,580,000.00
29	Buku Umum Lain-lain	-	2010	Baik	1,605,600.00
30	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Elite / 2 pintu	2011	Baik	3,476,000.00
31	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	2011	Baik	2,475,000.00
32	Internet	Skynet	2011	Baik	34,485,000.00
33	Note Book	Toshiba	2011	Baik	29,656,000.00
34	electric generating set lainnya (dst)	Honda	2012	Baik	80,135,000.00
35	Lemari Kayu	Lokal	2012	Baik	9,988,000.00
36	Rak Besi	Lokal / -	2012	Baik	23,160,000.00
37	Meja 1/2 Biro	-	2012	Baik	22,002,750.00
38	Sofa	Lokal / -	2012	Baik	7,920,000.00
39	A.C. Split	Panasonic	2012	Baik	60,094,650.00
40	Sound System	-	2012	Baik	39,765,000.00
41	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Lokal / -	2012	Baik	1,925,000.00
42	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Lokal / -	2012	Baik	34,716,000.00
43	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Lokal / -	2012	Baik	17,919,000.00
44	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Dexon / 2 Pintu	2012	Baik	7,920,000.00
45	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA	2012	Baik	2,915,000.00
46	P.C Unit	Ben Q / -	2012	Baik	8,860,500.00
47	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2012	Baik	4,267,695,428.00
48	Global Positioning System	Map 62s	2013	Baik	5,568,750.00
49	Rak Besi	- / -	2013	Baik	1,815,000.00
50	Papan Visual/Papan Nama	- / -	2013	Baik	31,350,000.00
51	Meja Rapat	Lokal	2013	Baik	9,042,000.00
52	Meja Podium	LOKAL	2013	Baik	5,940,000.00

No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Harga
53	Meja Resepsionis	Lokal / Meja L	2013	Baik	4,961,000.00
54	Meja 1/2 Biro	Lokal / 1/2 Biro	2013	Baik	10,549,000.00
55	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lokal / 2 Pintu	2013	Baik	8,999,100.00
56	P.C Unit	HP Pavillun 20	2013	Baik	8,965,000.00
57	P.C Unit	HP PORTABLE	2013	Baik	17,963,000.00
58	Jaringan Distribusi Lain-lain	-	2013	Baik	14,861,000.00
59	Lukisan lain-lain	-	2013	Baik	1,188,000.00
60	Meja Rapat	Lokal	2014	Baik	6,930,000.00
61	Meja 1/2 Biro	Lokal	2014	Baik	3,960,000.00
62	Bangku Tunggu	KSA / -	2014	Baik	6,930,000.00
63	Camera Video	Canon / 60 D	2014	Baik	14,652,000.00
64	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Lokal / Tangga Aluminium	2014	Baik	2,970,000.00
65	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	-	2015	Baik	14,500,000.00
66	Speed Boat / Motor Tempel	Yamaha	2015	Baik	97,790,000.00
67	Perahu Penyeberangan	Lokal	2015	Baik	39,875,000.00
68	White Board Electronic	Lokal	2015	Baik	3,300,000.00
69	Layar Film/Projector	Infocus	2015	Baik	9,735,000.00
70	P.C Unit	HP All In One	2015	Baik	9,790,000.00
71	P.C Unit	HP All In One	2015	Baik	9,955,000.00
72	P.C Unit	dell	2015	Baik	20,000,000.00
73	Papan Pengumuman	Lokal	2016	Baik	74,976,000.00
74	Telephone (PABX)	PANASONIC	2016	Baik	16,170,000.00
75	Unit Tranceiver VHF Portable	LUPAX/ T-1088	2016	Baik	14,850,000.00
76	P.C Unit	HP Allin One/HP 20-R002L	2016	Baik	9,955,000.00
77	Note Book	-	2016	Baik	19,690,000.00
78	Note Book	-	2016	Baik	9,999,000.00
79	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	BROTHER/ADS-1100W	2016	Baik	4,500,000.00
80	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson/L800	2016	Baik	4,950,000.00
81	Mesin Ketik Listrik	Nakajima/AX-150	2017	Baik	2,992,000.00
82	Mesin Fotocopy Double Folio	CANON/ iR 2520 W	2017	Baik	35,750,000.00
83	Filing Cabinet Besi	lion	2017	Baik	2,499,200.00
84	Meja Rapat	lokal	2017	Baik	5,390,000.00
85	Meja Resepsionis	lokal	2017	Baik	17,930,000.00
86	Sofa	SMART LAND	2017	Baik	9,460,000.00
87	A.C. Split	POLYLITRON/ 5 PK- CS-J4%FFPB	2017	Baik	50,600,000.00
88	Televisi	LG	2017	Baik	29,975,000.00
89	Camera Video	gopro / 60 pro hero 5	2017	Baik	7,815,500.00
90	Meja Kerja Pejabat lain-lain	lokal / meja kerja partisi	2017	Baik	19,800,000.00
91	Kursi Kerja Pejabat	RGOTEC	2017	Baik	4,620,000.00

No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Harga
	Eselon II				
92	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	RGOTEC	2017	Baik	14,025,000.00
93	peralatan studio audio lainnya (dst)	PHANTOM / PHANTOM3	2017	Baik	14,960,000.00
94	P.C Unit	HP/ 20-c030LA1019,5	2017	Baik	28,050,000.00
95	Note Book	Asus/A456UR	2017	Baik	20,814,200.00
96	Printer (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER/HL-1201	2017	Baik	4,785,000.00
97	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	2017	Baik	9,988,000.00
98	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	-	2017	Baik	988,400,000.00
99	Sepeda Motor	HONDA / REVO VIT FI	2018	Baik	13,016,850.00
100	Sepeda Motor	HONDA / BEAT POP FI CW VIN	2018	Baik	14,147,400.00
101	Tool Kit Set	Lippro	2018	Baik	65,890,000.00
102	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	OLIMPIA CARINA	2018	Baik	2,990,000.00
103	Filing Cabinet Besi	Lion	2018	Baik	5,830,000.00
104	Meubeleur lainnya	Lokal	2018	Baik	35,200,000.00
105	A.C. Split	PANASONIK / CU-PN18TKP	2018	Baik	17,985,000.00
106	Camera Video	CAMDIG CANON EOS / M6 KIT 15-45 IS STM	2018	Baik	14,600,000.00
107	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Lokal / 1/2 biro	2018	Baik	6,160,000.00
108	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	CHAIRMAN / C41	2018	Baik	11,990,000.00
109	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Lokal / Pintu Geser	2018	Baik	23,925,000.00
110	Telephone Mobile	SAMSUNG / GALAKSI S2	2018	Baik	9,000,000.00
111	Water Inspector	Lucky	2018	Baik	9,988,000.00
112	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	-	2018	Baik	443,225,450.00
113	Sumur Gali (SGL)	-	2018	Baik	19,800,000.00
114	alat kedokteran bedah lainnya (dst)	SAMSUNG	2019	Baik	10,000,000.00
115	Air Compresor	-	2020	Baik	12,650,500.00
116	Mesin Bor Cylinder	-	2020	Baik	8,910,000.00
117	perkakas pengangkat lainnya (dst)	-	2020	Baik	13,970,000.00
118	Lemari Kayu	-	2020	Baik	7,920,000.00
119	Filing Cabinet Besi	Lokal	2020	Baik	4,994,000.00
120	Kasur/Spring Bed	Bola Dunia	2020	Baik	8,800,000.00
121	Mesin Pemotong Rumput	Honda	2020	Baik	11,000,000.00
122	A.C. Split	PANASONIC / LN9WKJ	2020	Baik	12,000,000.00
123	Mesin Jahit	Singer	2020	Baik	27,280,000.00
124	Mesin Jahit	Singer	2020	Baik	19,800,000.00
125	Mesin Obras	Singer	2020	Baik	6,710,000.00

No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Harga
126	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal	2020	Baik	1,980,000.00
127	Microphone/Wireless MIC	JKCOUSTIC	2020	Baik	3,000,000.00
128	Microphone/Wireless MIC	JKCOUSTC	2020	Baik	3,000,000.00
129	Layar Film/Projector	VIEWSONIC	2020	Baik	5,500,000.00
130	Timing Unit	-	2020	Baik	5,247,000.00
131	P.C Unit	Asus / All In One	2020	Baik	11,825,000.00
132	Note Book	LONOVO / IDEAPAD 330-141KB	2020	Baik	19,778,000.00
133	Note Book	LENOVO / BIDEAPAD 330-141KB	2020	Baik	9,889,000.00
134	Note Book	Asus	2020	Baik	9,955,000.00
135	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	epson / Work Force DS-970	2020	Baik	19,745,000.00
136	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet M28W	2020	Baik	14,905,000.00
137	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3110	2020	Baik	2,475,000.00
138	Sound System	-	2021	Baik	6,500,000.00
139	P.C Unit	ACER / C22-1650	2021	Baik	12,683,770.00
140	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON / PIXMA G3010	2021	Baik	3,239,170.00
141	Modem	ADFAN	2021	Baik	1,728,100.00
142	Kursi Besi/Metal	-	2022	Baik	3,333,000.00
143	A.C. Split	SHARP	2022	Baik	16,650,000.00
144	Tangki Air	tiger	2022	Baik	4,950,000.00
145	Printer (Peralatan Personal Komputer)	brother	2022	Baik	5,883,000.00
146	Printer (Peralatan Personal Komputer)	brother	2022	Baik	3,607,500.00
147	Sepeda Motor	Nmax	2024	Baik	32,970,000.00
148	Tempat Tidur Kayu	lokal	2024	Baik	27,492,480.00
149	A.C. Split	Panasonic	2024	Baik	6,350,000.00
150	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2024	Baik	7,925,400.00
151	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2024	Baik	21,256,500.00
152	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2024	Baik	3,352,200.00
153	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2024	Baik	2,109,000.00
154	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	lokal	2024	Baik	3,377,175.00
155	Meja Rapat Pejabat lainnya	lokal	2024	Baik	7,525,800.00
156	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Chairman	2024	Baik	2,408,700.00
157	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya	Dalam Negeri / Kayu Jati	2024	Baik	10,000,000.00
158	P.C Unit	Asus	2024	Baik	76,923,000.00
159	P.C Unit	Asus	2024	Baik	8,500,000.00
160	Lap Top	Lenovo / Core i3	2024	Baik	12,000,000.00

No	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Harga
161	Lap Top	Lenovo	2024	Baik	7,200,000.00
162	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L312	2024	Baik	14,250,000.00
163	Printer	Epson / L312	2024	Baik	5,000,000.00
164	alat peraga pelatihan lainnya (dst)	Singer	2024	Baik	70,897,920.00
165	Kursi Putar	CHAIRMAN	2009	Baik	1,485,000.00
166	Jam Mekanis	SEIKO	2009	Baik	1,546,400.00
167	Kipas Angin	PANASONIC	2009	Baik	475,000.00
168	Kipas Angin	SAKAI	2024	Baik	500,000.00
169	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	FANTONI	2024	Rusak Berat	1,283,700.00
170	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	FANTONI	2024	Baik	3,851,100.00
171	Kursi Kerja Pejabat lainnya	FATURA	2024	Baik	3,487,000.00
172	Peralatan Personal Komputer lainnya	Lokal	2024	Baik	535,000.00
173	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Futura	2024	Baik	3,366,000.00
174	Rollmeter	HSKC	2024	Baik	360,000.00
175	Kipas Angin	Tecstrar, rebency	2024	Baik	2,310,000.00
176	External	Harddisk Ekternal	2024	Baik	1,427,750.00
177	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Fantoni / F320	2024	Baik	900,000.00
178	Kursi Kerja Pejabat lainnya	-	2024	Baik	443,520.00
179	Kursi Kerja Pejabat lainnya	-	2024	Baik	43,903,530.00
180	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	OLIMPYA	2024	Baik	1,499,850.00
181	White Board	- / -	2024	Baik	750,000.00
182	Jam Mekanis	Seiko	2024	Baik	1,197,900.00
183	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	Soligen ABC / -	2024	Baik	2,420,000.00
184	Meja 1/2 Biro	Lokal / 1/2 Biro	2024	Baik	1,496,000.00
185	Kursi Putar	Uchiwa	2024	Baik	1,683,000.00
186	Kursi Biasa	Ergotec / 704u	2024	Baik	9,280,700.00
187	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Lokal / Tangga Aluminium	2024	Baik	1,485,000.00

(sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu))

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara eletronik. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang

terintegrasi. Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan pelayanan OSS. Adapun peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pendampingan bagi pemohon yang memerlukan bantuan dan informasi mengenai OSS, diantaranya melaksanakan pendaftaran akun OSS membantu pengisian data OSS antara lain data legalitas perusahaan, data pemegang saham, maksud dan tujuan perusahaan, data perusahaan, lokasi izin, data BPJS.

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal bertujuan untuk tercapainya pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal yang terintegrasi secara elektronik, terstandar, cepat, sederhana, dan transparan. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Serta Perizinan Berusaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai Bagian Kesatu pasal 37. Untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan mencangkup 56 jenis perizinan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, jenis usaha berdasarkan KBLI dan perizinan berusaha diproses melalui oss.go.id. Ada beberapa izin proses nya beralih dari Sicantik melalui OSS RBA diantaranya:

Tabel 2.4
Data Izin Berdasarkan KBLI

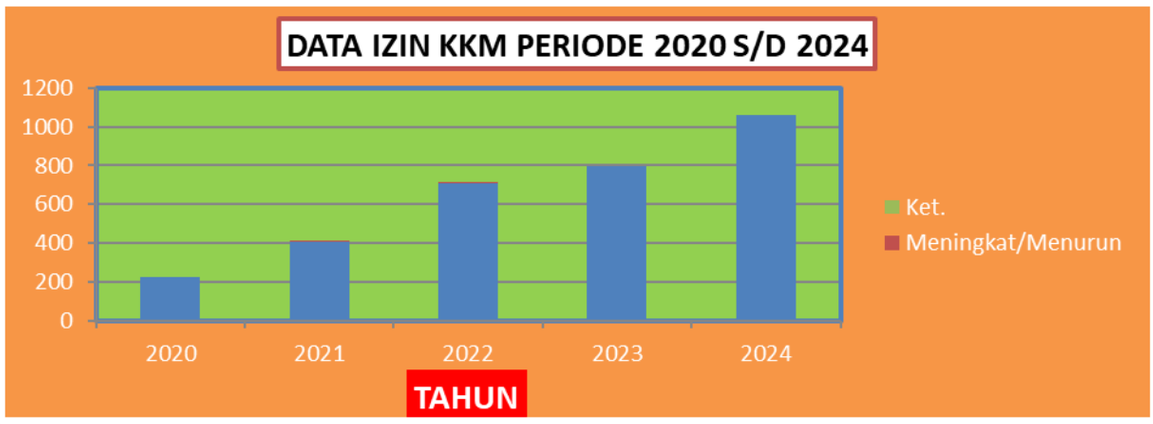
No	Nama Izin	Keterangan
1	Izin lingkungan	Berdasarkan PP 5 tahun 2021 Menjadi Persetujuan Lingkungaan
2	Izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) untuk usaha jasa kegiatan pengumpulan	
3	Izin operasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3) untuk penghasil kegiatan penyimpanan	
4	Izin pembuangan air limbah ke air permukaan	
5	Izin Remisi	
6	Persetujuan Pemanfatan Ruang	Dicabut berdasarkan perwal no 1 tahun 2022 tentang pencabutan perwal nomor 3 tahun 2018 tentang persetujuan pemanfaatan ruang
7	Izin Peruntukan Penggunaan tanah	Peraturan Pemerintah nomor 21 Atr BPN nomor 13 tahun 2021 menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
8	Izin lokasi	
9	Izin Mendirikan Bangunan	Berdasarkan PP 16 tahun 2021 menjadi PBG
10	Izin usaha jasa kontruksi	Berdasarkan PP 5 tahun 2021 bukan kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan kementrian.
11	Izin pendirian program atau satuan pendidikan	Berdasarkan surat edaran permendikbud, permohonan diproses melalui OSS RBA sampai penerbitan NIB, untuk pemenuhan persyaratan izin operasional diproses melalui sicantik Cloud.
12	Izin penyelenggaraan satuan pendidikan	
13	Izin usaha industri	Berdasarkan pp no 5 tahun 2021 diproses melalui OSS RBA pada PBUMKU
14	Izin Perluasan	
15	- Bidang usaha toko swalayan.	
	- Bidang usaha pusat perbelanjaan	
16	- Surat tanda pendaftaran waralaba penerimaan waralaba dari dalam negeri. Penerima waralaba lanjutan dari luar negeri dan waralaba lanjutan dari dalam negeri	
17	Izin pemanfaatan dan penggunaan dan penggunaan bagian-bagian jalan	Berdasarkan pp no 5 tahun 2021 diproses melalui OSS RBA pada

No	Nama Izin	Keterangan
18	Tanda daftar gudang	PBUMKU
19 20	Izin mendirikan rumah sakit Izin operasional rumah sakit	Berdasarkan PP 5 tahun 2021 diproses melalui OSS RBA menjadi 1 KBLI berisiko tinggi sehingga berubah menjadi Izin
21 22	Izin operasional laboratorium klinik umum dan khusus Izin toko alat kesehatan	Berdasarkan PP no 5 tahun 2021 bukan menjadi kewenangan kab/kota menjadi kewenangan Provinsi
23	Izin optik	Berdasarkan pp no 5 tahun 2021 diproses melalui OSS RBA berisiko menengah rendah yaitu Sertifikat Standar
24 25 26 27 28 29	Izin Radiologi Izin operasional Klinik Izin puskesmas Izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek Izin penyelenggaraan parkir diluar ruang milik jalan Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet	Berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021 diproses melalui OSS RBA, Berisiko Menengah Tinggi
29 30 31 32 33 34 35 36 37	- usaha budidaya holtikultura - usaha perbenihan hortikultura - usaha budidaya tanaman perkebunan - usaha industri pengelolaan hasil perkebunan usaha perkebunan yang terintegrasi - antara budidaya dengan industri pengelolaan hasil perkebunan - usaha produksi benih perkebunan Pendaftaran usaha perkebunan Pendaftaran usaha tanaman pangan Pendaftaran usaha holtikultura Izin usaha perikanan Izin usaha Peternakan Izin usaha rumah potong hewan - apotik veteriner - Depo - Petshop - Poultry - Toko Obat Hewan	Berdasarkan PP 5 tahun 2021 diproses melalui OSS RBA berisiko Rendah
38	Izin usaha Warung internet dan game online	Berdasarkan PP 5 tahun 2021 diproses melalui OSS RBA dan bukan menjadi kewenangan

Berdasarkan rekapitulasi penerbitan perizinan tahun 2020-2024 di berbagai sektor di Kabupaten Kepulauan Mentawai, jumlah penerbitan izin mengalami fluktuasi, pelayanan data perizinan berusaha dan non berusaha berdasarkan OSS RBA mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan telah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap perizinan berusaha melalui aplikasi OSS.

Gambar 2.2

Data Izin Tahun 2020-2024



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai berharap mampu memberikan penanaman modal dan pelayanan secara prima dengan mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan pasti. Sehubungan hal tersebut, dilakukan survey kepuasan masyarakat yang menghasilkan nilai indeks kepuasan masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, khususnya untuk memperbaiki dan lebih meningkatkan kinerja pelayanan PTSP. Berikut dapat dilihat nilai SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari tahun 2020 s/d 2024.

Tabel 2.5
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

No	Tahun	Nilai Rata-Rata	Meningkat/Menurun	Keterangan
1	2020		(Belum ada SKM)	-
2	2021		(Belum ada SKM)	
3	2022	77.89	-	-
4	2023	87.55	112%	Meningkat
5	2024	87.14	9.95%	Menurun

(sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Berdasarkan nilai rata-rata SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai selalu berubah-ubah dan tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan yang signifikan. Kinerja pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai masih termasuk dalam kategori BAIK.

Gambar 2.3
Nilai SKM Tahun 2020-2024



Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.

Semakin banyak jumlah investor dalam hal ini pelaku usaha maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan. Output kegiatan penanaman modal adalah terfasilitasinya pendaftaran izin penanaman modal dan upaya untuk menstimulus Realisasi Investasi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut disajikan perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal selama 5 (lima) Tahun dari Tahun 2020 s/d 2024.

Tabel 2.6
Data Perkembangan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2024
KKM Periode Tahun 2020 s/d 2024

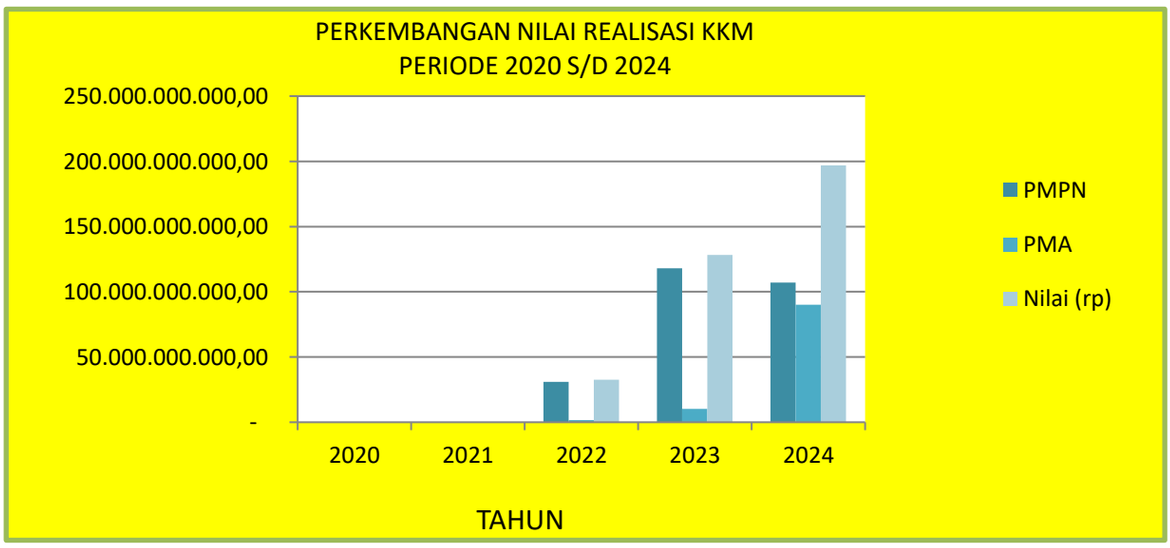
No	Tahun	Status Penanaman Modal		Nilai (Rp)
		PMDN	PMA	
1	2020	14,464,000	-	14,464,000
2	2021	6,323,200,000	14,764,400	6,337,964,400
3	2022	29,375,300,000	1,600,200,000	30,975,500,000
4	2023	13,807,277,000	104,207,919,986	118,015,196,986
5	2024	7,934,950,000	89,982,284,866	97,917,234,866
Total Nilai Realisasi Investasi		57,455,191,000	195,805,169,252	253,260,360,252

(sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Berdasarkan tabel diatas terlihat nilai/jumlah Nilai Realisasi Investasi yang mengalami peningkatan signifikan pada 2 Tahun terakhir. Hal ini

disebabkan adanya penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik dari Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi Republik Indonesia untuk membantu dalam melaksanakan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan di Daerah.

Gambar 2.4
Perkembangan Realisasi Invetasi Tahun 2020-2024



Indikator sasaran pada pada tahun 2020 Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompentesi dimana target 80% dengan capaian 70%. Tahun 2021 capaian 75% dan tahun 2022 capaian 87,50% mengalami peningkatan berdasarkan LAKIP tahu bersangkutan. Periode Renstra tahun 2023-2026 indikator sasaran dan IKU mengalami perubahan sehingga persentase target capaian juga mengalami perubahan. Capaian Target dan Realisasi kinerja tahun 2023-2024 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Meningkat/ Menurun
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2023	2.75%	1.39%	50.55%	58,97%
		2024	2.70%	1.33%	49.26%	97.46%

(sumber data : BPS yang diolah)

Dalam hal penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi, SAKIP pun sebenarnya dapat digunakan untuk menilai sejauh mana upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penerapan SAKIP seharusnya dapat mendorong instansi pemerintah untuk mewujudkan *good governance* termasuk pemberantasan korupsi. SAKIP yang memberikan manfaat adalah sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam mendesain program dan kegiatan.

Selanjutnya, SAKIP pun seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP

yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggunjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian. Berdasarkan hal tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilakukan penilaian terhadap SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan memperoleh nilai SAKIP sebagaimana laporan hasil evaluasi pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Perolehan Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020-2024

No	Tahun	Nilai Rata-Rata	Predikat
1	2020	71,67	BB
2	2021	69,90	B
3	2022	59.50	CC
4	2023	68.05	B
5	2024	71.10	BB

(sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Faktor penting lain yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan hasil evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

a. Pemahaman SAKIP oleh seluruh pegawai dilingkungan kerja.
b. Reviu atas Dokumen Perencanaan dan Realisasi kinerja Perangkat Daerah.
c. Penentuan target kinerja sasaran yang secara kumulatif sudah tercapai pada tahun-tahun sebelumnya.
d. Pelaksanaan evaluasi Internal yang dilaksanakan
e. Kelengkapan data pendukung yang dipersiapkan oleh Perangkat Daerah untuk penilaian setiap komponen SAKIP.
f. Penggunaan informasi teknologi untuk dapat mempermudah penelusuran data dan pengukuran kinerja.

Prestasi kinerja aparatur dalam mewujudkan pelayanan prima dapat dilihat dari penghargaan yang diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai:

1. Penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori “Baik dengan Catatan” Tahun 2023 dengan indeks pelayanan publik 87,55 (Baik) dari Masyarakat melaui SKM (survei Kepuasan Masyarakat).
2. Penghargaan predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik Ombudsman Indonesia tahun 2022 sesuai amanat Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai,, dengan nilai rata-rata 85,42.
3. Penghargaan kebersihan kantor OPD dalam rangka peringatan HUT RI-78 tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Bupati Kepulauan Mentawai 2023.
4. Penghargaan sebagai perangkat daerah dengan capaian nilai monitoring *Center For Prevention (MCP)* terbaik dengan skor 93% di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 dari Bupati Kepulauan Mentawai 2023.

Program Inovasi lingkup (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai:

1. Tanda tangan digital (*digital signature)*
   Tanda tangan digital digunakan dalam penandatangan dokumen perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tanda tangan digital ini membantu kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi

lebih ringan dan cepat. Kepala dinas tidak perlu lagi melakukan penandatangan dokumen secara manual dalam jumlah besar, karena dengan tanda tangan digital, penandatanganan dokumen perizinan dapat dilakukan dengan mudah melalui komputer atau telepon genggam pintar selama 24 jam dari berbagai tempat, sehingga dapat mempercepat proses pelayanan perizinan. Selain itu juga, adanya tanda tangan digital mencegah terjadinya pemalsuan tanda tangan dan dokumen perizinan karena menggunakan *Quick Response Code* (QR code).

2. Pelayanan jemput bola atau pelayanan bergerak
   Pelayanan bergerak dimaksudkan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya kepada Pelaku Usaha yang belum memiliki izin usaha di wilayah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya yang jarak tempuhnya cukup jauh dari Ibu kota Kabupaten. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mempermudah pelaku usaha untuk memperoleh legalitas perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).
3. Inovasi PESONA GATEWAY (PESan Online Aktual GATEWAY), Bahwa untuk melaksanakan SMS Gateway serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, perlu adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat informasi monitoring proses non perizinan yang sedang dimohonkan dengan memanfaatkan teknologi SMS Gateway dan Sistem Sicantik Cloud. Adapun jenis non perizinan yang dilaksanakan Notifikasi SMS Gateway meliputi :
   a. Sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
   b. Sektor pendidikan dan kebudayaan;
   c. Sektor Kesehatan; dan
   d. Bidang lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
4. Inovasi Tahun 2024 yaitu “ALAEI INVESTASI“ berupa buku panduan “Cara Cepat Pengisian LKPM melalui Sistem OSS.

Pada tahun anggaran 2023 terjadi perubahan Renstra periode Renstra 2023-2026 dimana sasaran dan realisasi sasaran juga terjadi perubahan. Perubahan capaian target dapat terlihat pada table diatas. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diperoleh dari perbandingan realisasi dengan target. TPT merupakan data yang diperoleh dari Badan pusat Statistik. Capaian kinerja dari 2023 sampai dengan 2024 setiap tahun mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sangat rendah capaian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja. Beberapa penyebab rendahnya capaian ini (oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) antara lain :

1. Masih banyaknya perusahaan yang tidak melaporkan adanya lowongan kerja kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Kurangnya koordinasi dengan perusahaan agar perusahaan mau untuk melaporkan adanya lowongan kerja tersebut.

Capaian indikator untuk Pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan pada tahun 2023 dan 2024 sangat rendah yaitu 1,15% dan 0,04%, hal ini disebabkan terbatasnya jumlah lowongan pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Capaian indikator Jumlah Calon Pelaku Usaha yang Berinvestasi/Jumlah Nilai Realisasi Investasi yang mengalami peningkatan signifikan pada 2 Tahun terakhir. Hal ini disebabkan adanya penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik dari Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi Republik Indonesia untuk membantu dalam melaksanakan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan di Daerah. Data investasi melalui perusahaan yang melaporkan kegiatan penanaman modalnya melalui LKPM (Laporan Kegiatan

Penanaman Modal) online, dan data Investasi diperoleh dari rencana investasi berdasarkan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS).

Berikut disajikan target dan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020-2024.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Anggaran Pada Tahun ke – (Rp)					Realisasi Aggaran Tahun ke – (Rp)					Rasio Capaian Tahun ke- (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	Belanja Daerah	*4,498,464,000*	*7,320,500,000*	*7,776,117,700*	*5,386,080,897*	*5,161,792,977*	*4,058,506,500*	*3,837,657,335*	*4,403,524,319*	*3,930,129,421*	*4,500,610,915*	*90,22*	*52,4*	*56,6*	*73*	*87,2*
1	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Perkantoran	3,660,500,000	4,325,500,000	4,618,800,000	4,286,080,897	4,136,792,977	3,509,909,350	3,296,631,285	3,542,910,311	3,253,958,574	3,471,107,044	*95,88*	*76,2*	*76,7*	*75,9*	*83,9*
2	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu	343,722,000	510,000,000	560,000,000	150,000,000	153,000,000	103,300,000	60,610,400	146,636,800	75,435,200	42,129,700	*30,6*	*11,9*	*26,2*	*50,3*	*27,5*
3	Jumlah data dan informasi	-	250,000,000	250,000,000								*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Persentase Kesesuaian Perencanaan Penanaman modal dengan realisasi penanaman modal (Investasi)	-	500,000,000	612,317,700	150,000,000	153,000,000	-	-	-	-	99,976,846	*0*	*0*	*0*	*0*	*65,3*
5	Meningkatnya Promosi dan kerjasama Investasi	-	500,000,000	500,000,000								*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6	Persentase realisasi investasi	-	250,000,000	250,000,000	100,000,000	102,000,000		143,087,200	311,978,008	303,299,400	286,704,350	*0*	*57,2*	*12,48*	*30,33*	*28,11*
7	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				200,000,000	100,000,000				29,003,200		*0*	*0*	*0*	*14,5*	*0*
8	Persentase tenaga kerja dilatih yang telah bekerja	494,242,000	700,000,000	700,000,000	400,000,000	412,000,000	445,297,150	337,328,450	401,999,200	268,433,047	552,135,375	*90,10*	*48,2*	*57,4*	*67,1*	*13,4*
9	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	-	285,000,000	285,000,000								*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Anggaran Pada Tahun ke – (Rp)					Realisasi Aggaran Tahun ke – (Rp)					Rasio Capaian Tahun ke- (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
10	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS bipartif struktur upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan				100,000,000	105,000,000	-	-	-	-	48,557,600	*0*	*0*	*0*	*0*	*0.46*

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KKM		Global	Nasional	Regional	
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memfasilitasi Perizinan untuk pengembangan Infrastruktur Pariwisata seperti Resor, Homestay dan fasilitas pendukung lainnya	- Masih adanya kompleksitas dalam proses perizinan yang mengambat Investasi - Perlu peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan perizinan termasuk pemanfaatan teknologi informasi	- Memastikan kelengkapan dokumen KLHS dalam setiap permohonan Izin - Melakukan verifikasi terhadap dokumen KLHS	- Pembangunan Berkelanjutan dimana pembangunan yang dilakukan terkait dengan perizinan dan penanaman modal mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial	- Mendorong Investasi Hijau dengan memberikan kemudahan perizinan dan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di sekto-sektor tertentu - Mendorong pengelolaan limbah yang baik dengan memberikan kemudahan perizinan dan insentif bagi pelaku usaha pengelolaan limbah	- Transisi energi, peningkatan Investasi pada energi surya, angin, dan bioenergi akan menciptakan lapangan kerja baru - Ekonomi Hijau	Peningkatan Investasi dan Kemudahan Berusaha: - Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, pengurangan birokrasi, dan peningkatan transparansi - Mengidentifikasi dan mempromosikan potensi investasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, termasuk sektor-sektor unggulan seperti pariwisata bahari, perikanan, dan kelautan - Membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung investasi, seperti pelabuhan, bandara, jalan, dan jaringan telekomunikasi - Membentuk kawasan ekonomi khusus atau klaster industri untuk menarik investasi dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membatu perizinan usaha Perikanan dan memastikan praktik-praktik ramah lingkungan			- Mengidentifikasi potensi dampak pembangunan terhadap perubahan iklim			
3	Memberikan pelatihan keterampilan kepada Masyarakat lokal sesuai dengan kebutuhan industri Pariwisata dan Perikanan	- Keterbatasan Sumber Daya	- Memberikan Rekomendasi terkait pengelolaan ling. Perlu diperhatikan	- Mengidentifikasi potensi kerusakan lingkungan akibat aktifitas pembangunan	- Mendorong pembangunan yang ramah lingkungan dan tahan terhadap perubahan iklim	- Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam terkait iklim	
4	Memfasilitasi penyaluran tenaga kerja lokal ke perusahaan termasuk kerja sama perusahaan dan lembaga pelatihan	- Perlu Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar berbagai instansi terkait dalam		- Mengidentifikasi dampak pembangunan terhadap keaneka ragaman hayati	- Melindungi keanekaragaman hayati dengan memberikan kemudahan		

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KKM		Global	Nasional	Regional	
	untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas.	proses perizinan	dalam kegiatan usahanya	seperti hilangnya habitat alami danterancamnya spesies tertentu	perizinan bagi usaha-usaha yang tidak merusak lingkungan		
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memberikan kemudahan perizinan bagi Investor yang tertarik pengembangan Komoditi Unggulan	- Peningkatan keterbukaan informasi terkait Investasi dan Perizinan kepada Masyarakat - Kurangnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), rendahnya kualitas SDM, Belum Optimalnya Koordinasi Instansi terkait serta belum maksimalnya pemanfaatan sistem informasi perizinan	- Melakukan Pengawasan dan penegakan hukum	- Memperbaiki tata kelola lingkungan di Daerah -	Ketenagakerjaan: - Transisi menuju ekonomi hijau - Pekerjaan hijau (green jobs)		Pengembangan Sumber Daya Manusia: - Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk pelatihan vokasi dan keterampilan yang relevan dengan potensi daerah - Memberikan dukungan dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian daerah - Menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan berbagai sektor ekonomi dan menarik investasi.
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu terus meningkatkan Efisiensi dan Transparansi dalam Pelayanan Perizinan	- Aksesibilitas yang sulit ke pulau-pulau terluar bisa menghambat					Penguatan Tata Kelola Pemerintahan: - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, termasuk pelayanan perizinan dan ketenagakerjaan.

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KKM		Global	Nasional	Regional	
		pelayanan perizinan dan penyerapan tenaga kerja Keterbatasan Infrastruktur dasar seperti transportasi dan komunikasi - bisa menjadi kendala dalam pengebangan investasi dan ketenagakerjaan Ketergantungan pada sektor tertentu seperti Pariwisata - atau Perikanan bisa membuat ekonomi rentan terhadap perubahan ekternal Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja lokal dimana perlu - program pelatihan khusus yang disesuaikan dengan potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja lokal - Pelatihan dan					- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi dan pelayanan publik - Meningkatkan koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketenagakerjaan, dan instansi terkait lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: - Mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan melibatkan masyarakat lokal. - Menerapkan praktik perikanan yang berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. - Memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap kegiatan ekonomi dan investasi. Pengembangan Ekonomi Kreatif: - Pengembangan Ekonomi Kreatif: - Mendorong pengembangan produk-produk lokal yang kreatif dan inovatif.

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KKM		Global	Nasional	Regional	
		pengembangan tenaga kerja lokal dimana perlu program pelatihan khusus yang disesuaikan dengan potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja lokal					

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian antara lain:

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, pengurangan birokrasi, dan peningkatan transparansi.
2. Mengidentifikasi dan mempromosikan potensi investasi di Kab. Kep. Mentawai, termasuk sektor-sektor unggulan seperti pariwisata bahari, perikanan, dan kelautan.
3. Membentuk kawasan ekonomi khusus atau klaster industri untuk menarik investasi dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk pelatihan vokasi dan keterampilan yang relevan dengan potensi daerah.
5. Memberikan dukungan dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian daerah
6. Menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan berbagai sektor ekonomi dan menarik investasi.
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, termasuk pelayanan perizinan dan ketenagakerjaan.
8. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi dan pelayanan publik.
9. Meningkatkan koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketenagakerjaan, dan instansi terkait lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
10. Mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan melibatkan masyarakat lokal.
11. Peningkatan kualitas SDM Aparatur dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas penunjang di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan daya dorong dari penanaman modal yang besar dan dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, berbagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi perlu dijadikan program prioritas. Langkah langkah umum yang bersifat generic seperti perbaikan pelayanan perizinan, kepastian pelayanan dan keamanan bagi para calon investor, upaya penguatan implementasi regulasi, informasi yang akurat dan didukung oleh dokumen yang terkait dan insentif bagi para calon investor oleh Pemerintah Daerah juga perlu menentukan prioritas kebijakan yang relevan untuk mendorong pertumbuhan investasi daerah.

Tabel 2.11
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	ASPEK/AREA PERBAIKAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN	PERMASALAHAN
1	Manajemen perubahan	Belum optimalnya pelaksanaan standar pelayanan dan pelaksanaan kode etik dalam menerapkan reward dan punishment	Belum optimalnya penataan kelembagaan dikarenakan lemahnya pemahaman tupoksi dan beberapa penugasan masih tumpang tindih serta masih dalam penyesuaian untuk pelayanan publik Pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM serta penilaian reformasi birokrasi	Belum optimal penyelenggaraan PTSP
2	Manajemen SDM	Keterbatasan kompetensi SDM PTSP dalam melayani penanaman modal kepada masyarakat	Kuantitas dan kualitas SDM yang masih kurang dan belum seluruh memenuhi kompetensi tupoksi Perlu adanya evaluasi jabatan dan analisis jabatan	Keterlambatan dalam proses dan penyelenggaraan PTSP
3	Pelayanan Publik	Pelayanan perizinan dan nonperizinan belum optimal (Cakupan seluruh kewewenangan perizinan dan nonperizinan belum seluruh ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan.	Seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan seluruh dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (renaksi dengan KPK)	Kewenangan pelayanan Belum keseluruhan pelimpahan perizinan dan nonperizinan diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Pelayanan administrasi PTSP belum memenuhi standar/target (Waktu Pelayanan belum memenuhi standar pelayanan)	Reviu standar pelayanan dan SOP dan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung	Pelayanan PTSP belum memenuhi rencana tindak lanjut dari IKM
		Belum berkembangnya daya tarik investasi Kabupaten Kepulauan Mentawai	Peningkatan realisasi penanaman modal, iklim penanaman modal yang kondusif dan kemudahan berusaha	Sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang belum optimal

NO	ASPEK/AREA PERBAIKAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN	PERMASALAHAN
4	Tata Laksana	Pelayanan administrasi PTSP belum terintegrasi secara elektronik (Penyediaan infrastuktur dan system informasi pelayanan belum optimal) SOP belum seluruhnya diterapkan	Sistem penyimpanan data base belum tersedia/filling system dan belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD teknis (Pembangunan infrastruktur Pelayanan secara elektronik/PSE) Belum ditetapkan core bisnis secara keseluruhan di unit kerja dan Reviu standar pelayanan dan SOP dan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung	Belum optimal pengembangan teknologi informasi. Berbasis IT/E – Office (belum terinformasikan/tersampaikan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara menyeluruh) Hasil IKM Pelayanan belum memenuhi target
5	Akuntabilitas	Cakupan monev terhadap pengukuran kinerja masih bersifat manual dan baru sebagian yang melakukan keterlibatan pengelolaan pengukuran kinerja	Komitmen dan keterlibatan kepemimpinan dan seluruh pegawai dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja	Baru sebagian pegawai yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja
6	Pengawasan	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal belum memenuhi target / belum menyeluruh kepda PMA/PMDN Monev internal dan PTSP belum optimal Kinerja pengelolaan penyuluhan dan konsultasi kepada masyarakat masih rendah Belum melaksanakan WBS (Whistle Blowing System) sepenuhnya, akan tetapi fitur untuk WBS telah dibangun di Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai	Tersedia Pedoman pelaksanaan penanaman modal dan Data potensi dan peluang/profil investasi harus up to date Perlu kartu kendali dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Belum adanya koordinasi dan harmonisasi peraturan terkait PM dan PTSP baik di pusat, provinsi dan daerah kab/kota Pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM serta penilaian reformasi birokrasi	Laporan pelaksanaan penanaman modal PMA/PMDN belum memenuhi target Belum akurasi laporan pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Belum otpimlnya fungsi pembinaan, konsultasi dan penyuluhan kepada masyarakat Penangan benturan kepentingan belum optimal

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan aspek diantaranya :

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   Adapun beberapa permasalahan yang menjadi fokus pembahasan sebagai berikut:
   a. Belum tersedianya Regulasi Daerah Mengenai Tata Ruang
   b. Keterbatasan lahan yang tersedia untuk kegiatan investasi terutama bagi perusahaan yang membutuhkan area yang luas.
2. Promosi Penanaman Modal
   Adapun beberapa permasalahan yang menjadi fokus pembahasan sebagai berikut:
   a. Belum optimalnya promosi peluang investasi Kabupaten Kepulauan Menatawai dalam forum- forum Investasi Regional maupun nasional
   b. Kurangnya daya tarik untuk investor berinvestasi
   c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung promosi investasi daerah
   d. Kurangnya inovasi tentang investasi.
3. Pelayanan Penanaman Modal
   Adapun beberapa permasalahan yang menjadi fokus pembahasan sebagai berikut
   a. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan dan nonperizinan
   b. Aplikasi OSS dinilai belum lengkap dalam menyediakan jenis usaha dan perizinan yang ada di Indonesia, dan persoalan sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan daerah
   c. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung layanan penanaman modal
   d. Kurangnya kompetensi SDM
   e. Belum optimal memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha.
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   Adapun beberapa permasalahan yang menjadi fokus pembahasan sebagai berikut :
   a. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban laporan kegiatan penanaman modal serta legalitas usaha.
   b. Belum Optimalnya Pemantauan pelaksanaan penanaman Modal
   c. Belum Optimalnya Pembinaan kepada pelaku usaha
   d. Belum Optimalnya Pengawasan pelaksanaan penanaman Modal
5. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
   Adapun beberapa permasalahan yang menjadi fokus pembahasan sebagai berikut :
   a. Terjadinya gap dan /atau kurang koordinasi antar urusan penanaman modal dan pelayanan penanaman modal tekait data sektoral penanaman modal
   b. Belum optimalnya pengelolaan database Perizinan dan Non Perizinan
   c. Belum Optimalnya Informasi kepada Masyarakat
   d. Kurangnya pendidikan dan pelatihan terkait penanaman Modal.
6. Rendahnya Kompetensi tenaga kerja
   a. Rendahnya motivasi pencari kerja untuk menjadi wirausaha/entrepreneurship
   b. Kompetensi Tenaga Kerja yang rendah
   c. Keterbatasan informasi pasar kerja
   d. Pencari kerja belum mengetahui terkait bakat dan minat yang dimiliki Terbatasnya Peluang kerja yang tersedia
   e. Masih banyaknya lowongan kerja yang tidak terdata
   f. Perusahaan tidak pro aktif dalam melaporkan informasi lowongan kerja

g. Kurangnya media penyampaian informasi
h. Kurangnya sarana operasional untuk aplikasi bursa kerja online
i. Belum optimalnya penyediaan data ketenagakerjaan
j. Kurangnya pemahaman Perusahaan tentang aturan ketenagakerjaan
k. Belum maksimalnya lembaga tripartite.

Gambaran solusi atau faktor-faktor penentu keberhasilan berdasarkan beberapa permasalahan di atas, berikut gambaran solusi yang dapat dilakukan

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan inovasi terhadap peningkatan kinerja penanaman modal dan pelayanan penanaman modal
2. Melakukan pemutakhiran dan atau reviu terhadap ketentuan terkait dalam pelayanan penanaman modal
3. Mengusulkan penguatan dukungan anggaran terhadap meningkatkan daya saing daerah.
4. Mempercepat pembentukan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kepulauan Mentawai
5. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi sumber daya manusia.

BAB III
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai dengan arahan dari Bappeda Kabupaten Kepulauan Menatawai dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkup Kabupaten Kepulauan Mentawai berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkrit yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkrit dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inkusif, Bekualitas dan Berkelanjutan dan Terwujudnya Birokrasi yang Prima. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 2 dan Misi 8 RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029, yaitu: “Mewujudkan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Penguatan Transfornasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Terpercaya”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai bidang Tenaga Kerja dan Penanaman Modal,

dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil/outcame program perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan sasaran strategi sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
2. Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas.
3. Meningkatnya Kualitaas pelayanan Publik yang Prima, adaptif, inovatif dan Melayani.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan Renstra Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029

NSPK/Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Pembangunan Ekono yang Inklusif, Berku dan Berkelanjutan	Terwujudnya kesempatan kerja yang inklusif dan berkualitas		Tingkat Pengganguran Terbuka	1,24	1,21	1,18	1,14	1,12	1,09	
		Menurunnya tingkat pengganguran	Pesentase Tenaga Kerja disektor Prioritas yang meningkat Produktivitasnya	0,1	0,18	0,2	0,22	0,24,	0,26	
		Meningkatnya Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	88.505.000.000	90.000.000.000	92.000.000.000	95.000.000.000	98.000.000.000	100.000.000.000	
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan PTSP	87,2	87,5	88	88,25	88,5	90	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
			Jumlah inovasi yang diterapkan	2	2	2	2	2	2	
			Persentase capaian kinerja perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	

Ket :
Dalam penentuan target 2025-2029 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*.

3.3 Strategi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Mentawai secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antar perangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Pentahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029

TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2026	TAHAP IV 2027	TAHAP V 2029
Fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang detail, pengalokasian anggaran, serta pembentukan tim kerja pelaksanaan Renstra	Pelaksanaan program dan kegiatan secara bertahap, monitoring dan evaluasi, serta penyesuaian jika diperlukan	Pelaksanaan program dan kegiatan secara bertahap, monitoring dan evaluasi, serta penyesuaian jika diperlukan	Pelaksanaan program dan kegiatan secara bertahap, monitoring dan evaluasi, serta penyesuaian jika diperlukan.	Evaluasi menyeluruh terhadap capaian Renstra, identifikasi keberhasilan dan kendala, serta penyusunan laporan akhir

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama

periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Memfasilitasi dan mendorong masuknya investasi ke daerah, termasuk promosi potensi investasi dan memberikan informasi kepada calon investor.	Peningkatan Investasi berupaya menarik investasi, baik dari dalam maupun luar daerah, dengan memberikan kemudahan perizinan insentif fiskal, dan peningkatan infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha Pengembangan Potensi Daerah fokus pada investasi yang memanfaatkan potensi lokal seperti pariwisata bahari, perikanan dan pertanian	Mempermudah dan mempercepat proses perizinan Investasi Menyederhanakan regulasi yang menghambat investasi	
2	Melaksanakan pelayanan perizinan berusaha, baik perizinan baru maupun perpanjangan, serta perizinan non-usaha.	Penguatan Kelembagaan dengan memperkuat lembaga pelayanan perizinan satu pintu (PTSP) untuk memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada investor	Menciptakan system pelayanan perizinan yang transparan, efektif dan efisien.	
3	Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perizinan dan kegiatan investasi di daerah.		Meningkatkan Promosi Potensi Investasi daerah Membangun Kerja Sama yang baik dengan para investor	
4	Menyelenggarakan PTSP untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non-perizinan dalam satu tempat.		Menyediakan pelayanan perizinan yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayanan publik	
			Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap system pelayanan Mendorong pengembangan kawasan industri yang potensial	
			Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM Memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif di daerah Memfasilitasi penciptaan lapangan kerja baru Updating informasi pasar kerja Mendorong pengembangan kewirausahaan Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi profesi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan pokasi Mengembangkan kapasitas entrepreneurship Melakukan kerja sama dengan dunia usaha untuk pengembangan kompetensi tenaga kerja	
5	Menyelenggarakan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.	Pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terutama sektor-sektor unggulan daerah Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta perlindungan hak-hak pekerja Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.	Peningkatan kompetensi tenaga kerja Memaksimalkan fungsi lembaga kerjasama trirpartit Meningkatkan Hubungan Industrial Pembinaan pelaku usaha terkait aturan Ketenagakerjaan Meningkatkan kapasitas dan aksebilitas investasi dan PTSP melalui capcity building kelembagaan menuju good dan clean governance	
5	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan ekonomi daerah.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendukung dalam memfasilitasi serta sinergitas dengan instansi terkait/stakeholder dan pemohon PTSP. Mengembangkan inovasi-inovasi pelayanan publik	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam hal ini Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, yang tertuang dalam Cascading. Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai ditentukanlah program dan kegiatan.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil *(outcome*) dan keluaran *(output)* dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Proram Pengembangan Iklim Penanaman Modal
7. Program Promosi Penanaman Modal
8. Program Pelayanan Penanaman Modal
9. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Kegiatan tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
4. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penepatan) didaerah kabupaten/kota
5. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerjadalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

6. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
7. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
8. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
9. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
10. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
11. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
12. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
13. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
16. Administrasi Umum Perangkat Daerah
17. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
18. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
19. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menegah perangkat daerah, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang dijabarkan dalam matrik berikut.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DPMPTSP KKM

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Ekonomi Darah	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan				Pertumbuhan Ekonomi		
		Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas			Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja pada lapangan usaha sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		
			Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang di Laksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Mengukur produk akhir RTK	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
				Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
			Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			
				Meningkatnya Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	Mengukur apakah peserta telah menguasai unit kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
				Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP, PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS KetenagaKerjaan)		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja	Jumlah PP yang di sahkan dan PKB yang di daftarkan dalam periode tahun berjalan	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
				Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah perselisihan yang diselesaikan tepat waktu dan adil, jumlah penyelesaian perselisihan melalui jalur perundingan bipartit, jumlah mediasi dan konsiliasi yang berhasil, serta jumlah mogok kerja dan penutupan perusahaan yang dapat dicegah atau diatasi	Terselenggaranya Layanan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingandi 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Meningkatnya pencari kerja yang mengakses informasi bursa kerja	Mengukur hasil langsung dari kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
				Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase peserta yang terlayani pada layanan terpadu CPMI	Jumlah PMI yang mendapat Pelindungan di Daerah Kabupaten/ Kota	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
				Tersedianya pedoman penerbitan IMTA	Jumlah Perpanjangan IMTA yang Diterbitkan	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerjadalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang divalidasi	Tervalidasinya Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) Untuk Pengesahan RPTKA Perpanjangan Bagi TKA yang Bekerja di Lokasi Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi PenggunaanTenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam1 (satu) Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Tersusunnya penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah investor yang menerima insentif/fasilitas dalam 1 tahun	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Peraturan Daerah /Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Modal	Modal	Kemudahan Penanaman Modal	
				Mencakup potensi sumber daya alam, infrastruktur, sumber daya manusia, dan peluang investasi yang ada	Tersusunnya Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
				Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Jumlah Izin/Non-Izin yang Diterbitkan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	PenyediaanPelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Berusaha Berbasis Risiko	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Persentase realisasi investasi	Hasil langsung dari kegiatan pengendalian	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			=	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
				Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani	Jumlah kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam proses Perencanaan dan Penganggaran	Mengukur kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Pencanaan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kesejahteraan ASN	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya kapasitas dan kompetensi ASN	Mengukur seberapa cepat proses layanan kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
					dilakukan		
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase dokumen administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD	Mengukur barang yang berhasil diperoleh sesuai perencanaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan |Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	
				Jumlah unit Kendaraan Dinas operasional atau	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lapangan yang disediakan	Lapangan	lapangan	
				Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	
				Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Mengukur hasil langsung dari kegiatan penyediaan jasa penunjang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi PD	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya yang dipelihara/ diRehabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja Perangkat Daerah) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN+A1:N66	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELIN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				228.810.902		249.946.568		255.158.936		258.821.804		261.484.352	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase perencanaan tenaga kerja yang disusun	0%	10%	114.405.451	50%	124.973.284	60%	127.579.468	70%	129.410.902	90%	130.742.176	
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	66%	67%	114.405.451	69%	124.973.284	70%	127.579.468	72%	129.410.902	75%	130.742.176	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	228.810.902	1	249.946.568	1	255.158.936	1	258.821.804	1	261.484.352	
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Dokumen	1	228.810.902	1	249.946.568	1	255.158.936	1	258.821.804	1	261.484.352	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				504.925.908		833.155.227		850.529.784		862.739.343		871.614.504	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	0,01%	0,02%	168.308.636	0,02%	277.718.409	0,02%	283.509.928	0,02%	287.579.781	0,03%	290.538.168	
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,45%	0,51%	168.308.636	0,56%	277.718.409	0,62%	283.509.928	0,68%	287.579.781	0,73%	290.538.168	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN+A1:N66	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELIN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	65,16 Rp Juta/ tenaga kerja/ tahun	66,05 Rp Juta/ tenaga kerja/ tahun	168.308.636	66,82 Rp Juta/ tenaga kerja/ tahun	277.718.409	67,46 Rp Juta/ tenaga kerja/ tahun	283.509.928	68,16 Rp Juta/ tenaga kerja/ tahun	287.579.781	68,84 Rp Juta/ tenaga kerja/ tahun	290.538.168	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Meningkatnya Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	persen	70	504.925.908	75	833.155.227	75	850.529.784	75	862.739.343	75	871.614.504	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	32	336.617.272	32	555.436.818	32	567.019.856	32	575.159.562	32	581.076.336	
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	1	168.308.636	1	277.718.409	1	283.509.928	1	287.579.781	1 unit	290.538.168	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				320.000.000		333.000.000		340.211.914		345.095.738		348.645.801	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	40%	42%	120.000.000	44%	130.000.000	45%	130.211.914	46%	125.095.738	48%	118.645.801	
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	0%	10%	200.000.000	50%	203.000.000	60%	210.000.000	70%	220.000.000	90%	230.000.000	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN+A1:N66	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELIN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Meningkatnya pencari kerja yang mengakses informasi bursa kerja		42	120.000.000	44	130.000.000	45	130.211.914	46	125.095.738	48	118.645.801	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	100	120.000.000	100	130.000.000	100	130.211.914	100	125.095.738	100	118.645.801	
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peserta yang terlayani pada layanan terpadu CPMI	Persen	17	100.000.000	20	103.000.000	20	105.000.000	20	110.000.000	20	120.000.000	
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	orang	75	100.000.000	75	103.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	100	120.000.000	
Penerbitan Perpanjangan IMTA yangLokasi Kerjadalam1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pedoman penerbitan IMTA	Persen	10	100.000.000	15	100.000.000	14	105.000.000	17	110.000.000	20	110.000.000	
Validasi Pembayaran Dana Kompensasi PenggunaanTenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjanga	Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi	SKRD	5	100.000.000	5	100.000.000	5	105.000.000	5	110.000.000	5	110.000.000	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN+A1:N66	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELIN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
n bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam1 (satu)													
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				143.693.246		134.137.992		136.935.296		138.901.034		140.329.936	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	37.000	37.500	71.846.623	38.000	67.068.996	39.000	68.467.648	40.000	69.450.517	42.000	70.164.968	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0%	10%	71.846.623	50%	67.068.996	60%	68.467.648	70%	69.450.517	90%	70.164.968	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapatkan fasilitasi pemenuhan persyaratan kerja	Persen	30	100.000.000	35	100.000.000	40	100.000.000	45	100.000.000	50	100.000.000	
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahan	30	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	40	50.000.000	40	50.000.000	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN+A1:N66	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELIN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perselisihan yang diselesaikan tepat waktu dan adil, jumlah penyelesaian perselisihan melalui jalur perundingan bipartit, jumlah mediasi dan konsiliasi yang berhasil, serta jumlah mogok kerja dan penutupan perusahaan yang dapat dicegah atau diatasi.	persen	30	43.693.246	28	34.137.992	26	36935296	20	38901034	20 persen	40329936	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	3	43.693.246	5	34.137.992	5	36.935.296	5	38.901.034	5	40.329.936	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN+A1:N66	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELIN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				283.048.721		328.288.807		332.264.892		331.684.836		317.903.626	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	88,505,000,000	90,000,000,000	183.048.721	92,000,000,000	208.288.807	95,000,000,000	212.632.446	98,000,000,000	215.684.836	100,000,000,000	217.903.626	
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	2,25%	3,05%	100.000.000	4,35%	120.000.000	4,85%	119.632.446	5,05%	116.000.000	5,80%	100.000.000	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal		80	100.000.000		120.000.000		119.632.446		116.000.000	80	100.000.000	
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah /Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	100.000.000		120.000.000	1	119.632.446	1	116.000.000	1	100.000.000	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	mencakup potensi sumber daya alam, infrastruktur, sumber daya manusia, dan peluang investasi yang ada.	persen	75	183.048.721	80	208.288.807	80	212.632.446	85	215.684.836	85	217.903.626	
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Dokumen	1	91.524.361	1	104.144.404	1	106.316.223	1	107.842.418	1	108.951.813	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN+A1:N66	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELIN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota												
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	91.524.361	1	104.144.404	1	106.316.223	1	107.842.418	1	108.951.813	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				37.000.000		50.000.000		53.000.000		55.000.000		57.000.000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	2,25%	3,05%	37.000.000	4,35%	50.000.000	4,65%	53.000.000	5,02%	55.000.000	5,46%	57.000.000	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab / Kota	Persen	3,05%	37.000.000	4,35%	50.000.000	4,65%	53.000.000	5,02%	55.000.000	5,46%	57.000.000	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	37.000.000	1	25.000.000	1	28.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen			1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN+A1:N66	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELIN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	70%	72%	100.000.000	75%	100.000.000	80%	100.000.000	85%	100.000.000	90%	100.000.000	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	70%	70%	100.000.000	75%	100.000.000	80%	100.000.000	85%	100.000.000	90%	100.000.000	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	200	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektroniK	Pelaku Usaha	50	50.000.000	60	50.000.000	75	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN+A1:N66	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELIN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				109.829.233		104.144.403		106.316.223		107.842.418		108.951.813	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	70%	75%	109.829.233	80%	104.144.403	85%	106.316.223	90%	107.842.418	100%	108.951.813	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase realisasi investasi	Persen	90	109.829.233	90	104.144.403	90	106.316.223	90	107.842.418	90	108.951.813	
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	150	36.609.744	150	34.714.801	150	35.438.741	150	35.947.473	150	36.317.271	
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	15	36.609.744	15	34.714.801	15	35.438.741	15	35.947.473	15	36.317.271	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN+A1:N66	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELIN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	15	36.609.744	15	34.714.801	15	35.438.741	15	35.947.473	15	36.317.271	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Persen	100	3.161.686.448	100	3.088.946.281	100	3.153.362.938	100	3.198.630.221	100%	3.231.535.126	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Acuan/Pedoman Perangkat Daerah Dalam proses Perencanaan dan Penganggaran	Persen	100	0	100	0	100	10.000.000	100	10.000.000	100	15.000.000	
Penyusunan Dokumen Pencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen					4	10.000.000	4	10.000.000	4	15.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kesejahteraan ASN	Persen	100	2.837.686.448	100	2.679.946.281	100	2.759.362.938	100	2.694.630.221	100	2.759.535.126	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	50	2.797.686.448	50	2.639.946.281	50	2.719.362.938	50	2.654.630.221	50	2.719.535.126	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN+A1:N66	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELIN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi ASN	Persen			100	25.000.000		0	100	20.000.000	100	25.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	stel			30	25.000.000			45 Stel	20.000.000	30 Stel	25.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	188.000.000	100	158.000.000	100	183.000.000	100	188.000.000	100	193.000.000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	15	8.000.000	15	8.000.000	15	8.000.000	15	8.000.000	15	8.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	50	70.000.000	50	60.000.000	50	60.000.000	50	65.000.000	50	70.000.000	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	0,00	5	0,00	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN+A1:N66	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELIN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	100.000.000	36	80.000.000	36	100.000.000	36	100.000.000	36	100.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD	Persen	100	15.000.000	100	95.000.000	100	70.000.000	100	155.000.000	100	108.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan |Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	unit				-		-	1	100.000.000		-	
Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang disediakan	unit			2	25.000.000	1	20.000.000		-		35.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	unit	3		15	20.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	0	23.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	1	15.000.000	8	50.000.000	1	25.000.000		30.000.000	1	50.000.000	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN+A1:N66	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELIN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persen	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36	60.000.000	36	60.000.000	36	60.000.000	36	60.000.000	36	60.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan Tupoksi PD	Persen	100	46.000.000	100	56.000.000	100	56.000.000	100	56.000.000	100	56.000.000	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN+A1:N66	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELIN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.000.000	
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unut	15	12.000.000	15	12.000.000	15	12.000.000	15	12.000.000	15	12.000.000	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya yang dipelihara/ diRehabilitasi	unut			2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR	*BASELINE*	TARGET TAHUN				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,24	1,21	1,18	1,14	1,12	1,09
2	Persentase Tenaga Kerja disektor Prioritas yang meningkat Produktivitasnya	0,1	0,18	0,2	0,22	0,24,	0,26
3	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	88.505.000.000	90.000.000.000	92.000.000.000	95.000.000.000	98.000.000.000	100.000.000.000
4	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap pelayanan PTSP	87,2	87,5	88	88,25	88,5	90
5	Nilai LAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB
6	Jumlah inovasi yang diterapkan	2	2	2	2	2	2
7	Persentase capaian kinerja perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU perangkat daerah. IKK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini **:**

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE*	TARGET TAHUN				
			2024	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase perencanaan tenaga kerja yang disusun	Persen	0	10	50	60	70	90
2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	66	67	69	70	72	75

3	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Persen	0,01	0,018	0,02	0,022	0,024	0,026
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,45	0,51	0,56	0,62	0,68%	0,73
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp Juta/ tenaga kerja/ tahun	65,16	66,05	66,82	67,46	68,16	68,84
6	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	jumlah	37.000	37.500	38.000	39.000	40.000	42.000
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	0%	10	50	60	70	90
8	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persen	40	42	44	45	46	48
9	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	0	10	50	60	70	90
10	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Juta rupiah	88.505	90.000	92.000	95.000	98.000	100.000
11	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	Persen	2,25	3,05	4,35	4,85	5,05	5,8
12	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	70	72	75	80	85	90
13	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	70	75	80	85	90	100

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai penjabaran strategis dari RPJMD Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat program, kegiatan, indikator kinerja, target, dan perkiraan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan berbasis data.

Penyusunan Renstra ini telah mempertimbangkan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi panduan yang jelas dan terukur bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025-2029, serta berkontribusi signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan prioritas pembangunan Daerah di era digital.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Karena itu, RENSTRA ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan bidang Ketenaakerjaan dan bidang Penanaman Modal dan atau target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 ini telah memperhatikan:

1. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
   Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk mengukur capaian kinerja.
2. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah.
   Manajemen risiko di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan upaya sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pelayanan publik, investasi, dan perizinan. Dengan penerapan manajemen risiko, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Tata Kelola Satu Data Indonesia di Tingkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
   Tata kelola Satu Data Indonesia (SDI) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan upaya strategis untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi SDI di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demikian penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Menawai Tahun 2025-2029 yang memuat prioritas pembangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah dengan maksud membuat landasan dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan sehingga diharapkan pelaksanaan prorgam pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memberikan konstribusi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai serta dapat mencapai Target yang telah ditetapkan pada Visi Misi Kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai beserta Stakeholder terkait berkomitmen untuk mencapai Tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam Renstra dimaksud untuk menjaga agar Realisasi Investasi dapat mendukung petumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 ini kami ucapkan terima kasih, seiring dengan hal tersebut kami juga berharap untuk kritik dan sarannya bagi kesempurnaan program ini.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 4
1.3 Maksud dan Tujuan..... 6
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 8
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan..... 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025 – 2029..... 24
3.2 Sasaran Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025 – 2029..... 26
3.3 Strategi Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025 – 2029 28
3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025 – 2029..... 29

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 33
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 54

BAB V PENUTUP..... 56

DAFTAR TABEL

2.1	Daftar ASN menurut Kepangkatan dan Golongan Tahun 2025.....	13
2.2	Daftar ASN Sipil menurut Tingkat PendidikanTahun 2025.....	13
2.3	Daftar ASN menurut Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2025	14
2.4	Daftar ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	14
2.5	Daftar Aset/Modal	14
2.6	Angaran dan Belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021-2025	15
2.7	Realisasi Target Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022-2024.....	16
2.8	Realisasi Target Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022-2024	18
2.9	Kinerja Pelayanan Bidang Perpustakaan 2020-2024.....	19
2.10	Nilai hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh ANRI dalam kurun waktu 2020-2024...	20
2.11	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan.....	21
2.12	Isu Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.....	23
3.1	Tujuan dan Sasaran RPJM Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029.....	25
3.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2029	27
3.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan StrategiDinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025.....	28
3.4	Penahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kearsipann dan Perpustakaan 2026-2030	28
3.5	Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025-2029.....	29
4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025-2029.....	34
4.2	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025-2030.....	45
4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	52
4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU)Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2030.....	54
4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2030.....	54

DAFTAR GAMBAR

1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2

1.2 Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya..... 3

2.1 Struktur Organisasi Dinas Kearsipan Dan PerpustakaanKabupaten Kepulauan Mentawai..... 9

2.3 Peta TGM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024..... 17

2.4 Peta IPLM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024..... 18

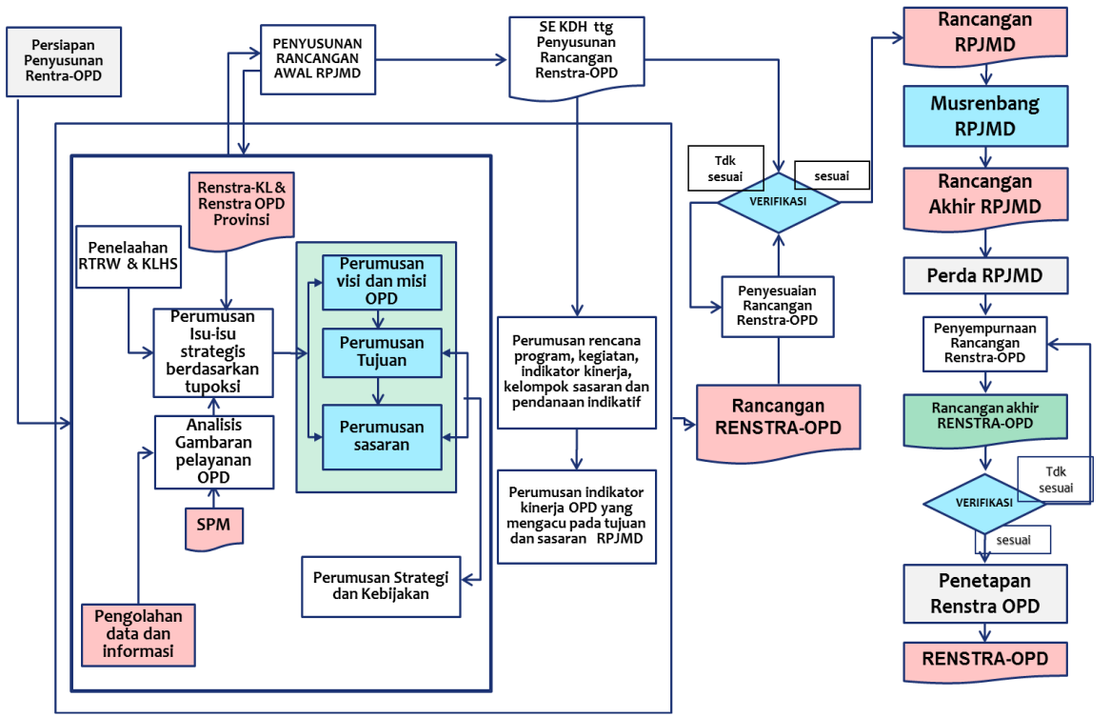
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 telah memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Renstra disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah , pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji dalam gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

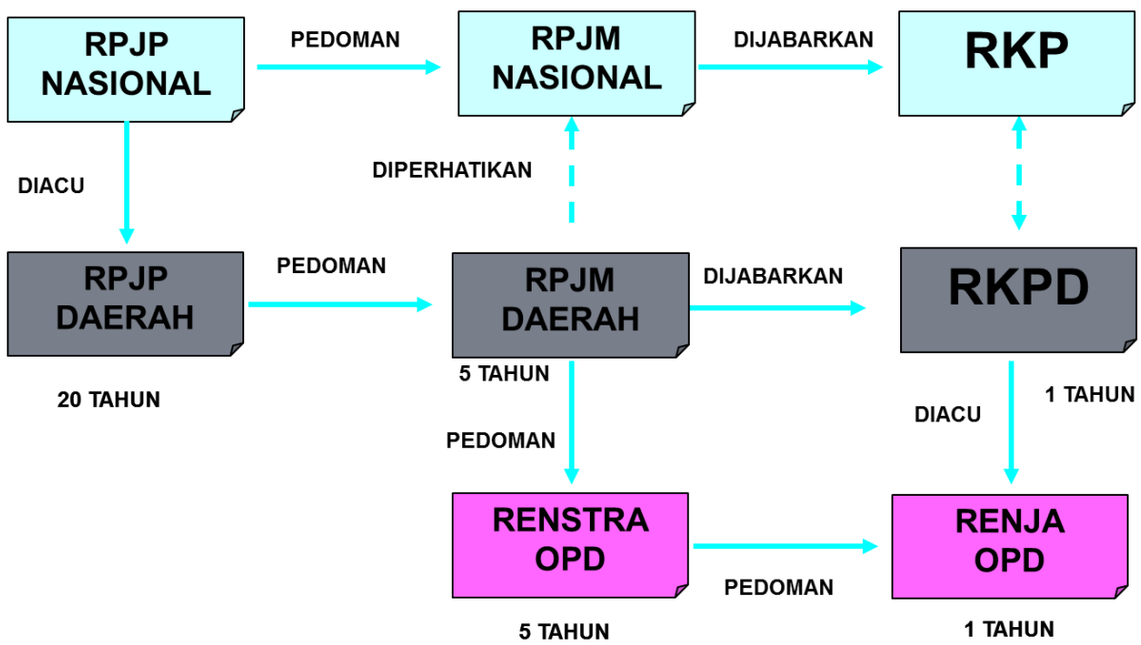
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, tahapan penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan diawali dengan:

1. Persiapan Penyusunan Renstra, antara lain :
   a. Pembentukan SK Tim penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.
   b. Orintasi mengenal RENSTRA.
   c. Penyusunan Agenda Tim Penyusunan RENSTRA.
   d. Penyiapan Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah antara lain:
   a. Analisis gambaran pelayanan.
   b. Analisis permasalahan.
   c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya.
   d. Analisis isu strategis.
   e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdarkan sasaran indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.
   f. Perumusan Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.
   g. Perumusan rencana progran, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.
3. Rancangan Renstra antara lain:
   a. Penyempurnaan rancangan awal Renstra perangkat daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah.
   b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat daerah/ lintas perangkat daerah.
   c. Hasil Kesepakatan Forum perangkat daerah dituangkan dalam Berita Acara.
   d. Rancangan Renstra perangkat daerah disempurnakan berdasarkan berita acara.
4. Rancangan Akhir Renstra antara lain:
   a. Penyempurnaan rancangan akhir Renstra perangkat daerah berdasarkan surat Peraturan Daerah tentang RPJMD.

b. Perumusan rancangan akhir Renstra perangkat daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

5. Penetapan Renstra antara lain:
   a. Rancangan Akhir Renstra perangkat daerah disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk diverifikasi.
   b. Rancangan Akhir Renstra perangkat daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
   c. Rancangan akhir Renstra perangkat daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh perangkat daerah kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk dilakukan proses penetapan Renstra perangkat daerah.
   d. Penetapan Renstra Perangkat daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Mentawai mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 , maka untuk sinkronisasi perencanaan dengan Pemerintah Pusat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, melakukan koordinasi dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) dan Arsip Nasional RI (ANRI), khususnya untuk program-program yang harus ada dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Program-program dimaksud beserta indikatornya disepakati melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang dilaksanakan dan ditetapkan setiap tahunnya. Hubungan dan keterkaitan dokumen Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan dokumen perencanaan lainnya tersebut dapat dilihat melalui Gambar 1.2.



Gambar 1.2
Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

Dalam pengimplementasian pada pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Dokumen Renstra dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) guna lebih memfokuskan pada kegiatan sesuai dengan

perkembangan yang ada. Nilai Strategis Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai berikut:

a. Penentu Arah Dan Fokus Kinerja
   Renstra membantu menetapkan arah dan prioritas pembangunan dalam bidang kearsipan dan perpustakaan selama periode lima tahun, sehingga seluruh program dan kegiatan lebih terarah dan terukur.
b. Instrumen Akuntabilitas Kinerja
   Renstra menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (seperti Rencana Kerja/Renja dan RencanaKinerja Tahunan/RKT), serta sebagai tolak ukur dalam evaluasi kinerja organisasi.
c. Alat Integrasi Program
   Sebagai dokumen strategis, Renstra mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan agar selaras antara pusat dan daerah dengan perangkat daerah lainnya.
d. Pendorong Peningkatan Layanan Publik
   Dengan Renstra yang terencana dan strategis, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dapat meningkatkan kualitas layanan informasi, literasi, dan pengelolaan arsip bagi masyarakat dan pemerintahan.
e. Sarana Tranparansi dan Partisipasi
   Renstra juga menunjukkan transparansi perencanaaan pembangunan di bidang kearsipan dan perpustakaan, serta dapat menjadi sarana partisipasi publik dalam memberikan masukan dan pengawasan.

Selanjutnya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, bahwa Renstra Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 – 2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2055 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perecanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-

2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4)

22. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 72 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, peraturan/regulasi yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan pembangunan daerah kurun waktu Tahun 2025-2029.
2. Menjadi dasar dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah periode 2025-2029
3. Membuat acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kearsipan dan PerpustakaanKabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Sebagai dasar penyusunan pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tujuannya dari penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya kesinambungan pelaksanaan Pembangunan bidang kearsipan dan perpustakaan, serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam urusan perpustakaan dan kearsipan;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan perpustakaan dan kearsipan, dan
3. Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD. Bab ini terdiri atas:

1.1 Latar belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Bab ini menggambarkan tentang gambaran umum tentang aspek dan pelayanan, permasalahan yang dihadapi dan isu strategis dalam menjalankan pelayanan dan pelaksanaan tugas urusan Kearsipan dan Perpustakaan. Bab ini terdiri atas:

1.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Kepulauan

Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2025-2026). Bab ini terdiri atas:

3.1 Tujuan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025–2029

3.2 Sasaran Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025–2029

3.3 Strategi Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025–2029

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025–2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan kenerja penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan dan kearsipan. Bab ini terdiri atas:

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Pada Bab Penutup, disajikan upaya pengendalian dan evaluasi implementasi Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2029

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintah bidang Kearsipan dan Perpustakaan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, urusan bidang Kearsipan dan Perpustakaan menjadi bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang wajib dibentuk di daerah.

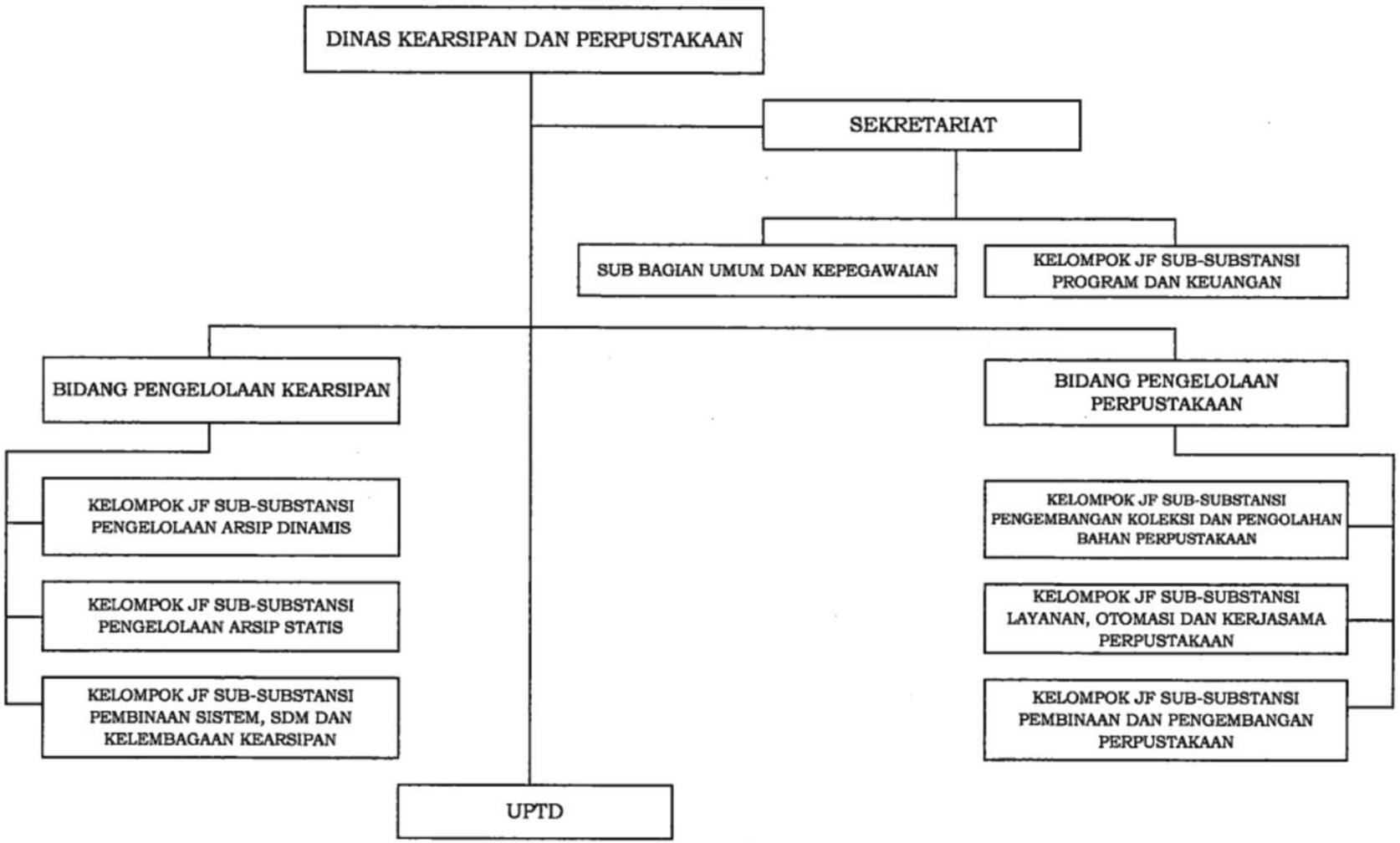
Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 72 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kearsipan dan Perpustakaan serta tugas pembantu yang diberikan kepada daerah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat; membawahi
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan
3. Bidang Pengelolaan Kearsipan, membawahi
    a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Arsip Dinamis
    b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Arsip Statis
    c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Sistem, SDM dan Kelembagaan
4. Bidang Pengelolaan Perpustakaan, membawahi :
    a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Layanan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan
    b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan koleksi dan Pengelolaan Bahan Pustaka
    c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai



Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 72 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas:

a. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
b. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah.

Fungsi Kepala Dinas:

a. Perumusan kebijakan daerah urusan kearsipan dan perpustakaan;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan kearsipan dan perpustakaan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kearsipan dan perpustakaan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

2. Sekretariat

Tugas:

a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

Fungsi:

a. Koordinasi penyusunan rencana, program,evaluasi, dan pelaporan dinas;
b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkungan dinas;
c. Penataan organisasi dan tata laksana lingkungan dinas;
d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup dinas;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas:

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan tanggungjawab sekretaris.

Fungsi:

a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaaan dinas;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup dinas;
d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup Dinas;
e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata lingkup dinas;
f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup dinas; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Kelompok JF Sub-Substansi Program dan Keuangan

Berkedudukan dibawah dan tanggung jawab sekretaris.

Tugas:

a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkungan Dinas;

b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Dinas;
c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas;
d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolan keuangan lingkup Dinas;
e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengelolaan Kearsipan

Tugas:

a. Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
b. Bidang pengelolaan kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dibidang penelolaan Kearsipan Daerah.

Fungsi:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Pengelolaan Arsip Statis, dan Pembinaan Sistem Sumber daya Manusia dan Kelembagaan Kearsipan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Pengelolaan Arsip Statis, dan Pembinaan Sistem Sumber daya Manusia dan Kelembagaan Kearsipan;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Pengelolaan Arsip Statis, dan Pembinaan Sitem Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Kearsipan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Kelompok JF SUB- Substansi Pengelolaan Arsip Dinamis

Tugas dan Fungsi:

a) Melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan arsip dinamis;
b) Melakukan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan arsip dinamis;
c) Melakukan Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan arsip dinamis;
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Kelompok JF SUB-Substansi Pengelolaan Arsip Statis

Tugas dan Fungsi:

a) Melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Arsip Statis;
b) Melakukan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Arsip Statis;
c) Melakukan Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Arsip Statis;
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kelompok JF Sub-Substansi Pembinaan Sistem, SDM dan Kelembagaan Kearsipan

Tugas dan Fungsi:

a) Melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kearsipan;

b) Melakukan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kearsipan;
c) Melakukan Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kearsipan;
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Perpustakaan

Tugas:

Bidang Pengelolaan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perpustakaan.

Fungsi:

a. Melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Layanan, Otomasi dan kerjasama Perpustakaan dan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
b. Melakukan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan dan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
c. Melakukan Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan dan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Kelompok JF Sub-Substansi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan

Tugas dan Fungsi :

1) Melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
2) Melakukan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
3) Melakukan Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Kelompok JF Sub-Substansi Layanan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan

Tugas dan Fungsi :

1) Melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan;
2) Melakukan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan;
3) Melakukan Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan;
4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Kelompok JF Sub Substansi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

Tugas dan Fungsi:

1) Melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
2) Melakukan Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;

3) Melakukan Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas:

a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
b. Kelompok fungsional melaksanakan tugasnya berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi:

a. Kelompok jabatan fungsional merupakan tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
b. Setiap kelompok fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas;
c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja;
d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan roda organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka organisasi harus digerakkan oleh seluruh elemen yang ada baik pejabat struktural, pejabat fungsional maupun staf. Secara umum jumlah sumber daya manusia ASN yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan per Oktober 2025 sebanyak 22 orang, rincian menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.1
Daftar ASN menurut Kepangkatan dan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1	IV/c	1
2	IV/b	1
3	III/d	5
5	III/c	2
6	III/b	2
7	III/a	2
8	II/d	4
9	II/c	1
10	XI	3
11	IX	1
Jumlah		22

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kondisi Oktober 2025

Tabel. 2.2
Daftar ASN Sipil menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	3
2	S1	11
3	DIII	1
4	SLTA/Sederajat	7

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kondisi Oktober 2025

Tabel. 2.3
Daftar ASN menurut Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

No	Jabatan Struktural	Jumlah orang
1.	Eselon IIb	1 Orang
2.	Eselon IIIa	-
3.	Eselon IIIb	2 Orang
4.	Eselon IVa	-
5.	Arsiparis Muda	1 Orang
6.	Pustakawan Muda	3 Orang
7.	Perencana Ahli Muda	1 Orang
8.	Pustakawan Terampil	1 Orang
9.	Fungsional Umum	7 Orang
10.	P3K	4 orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kondisi Oktober 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan jumlah PNS sebanyak 18 Orang.

Tabel. 2.4
Daftar ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan Struktural	Jumlah orang
1.	Laki – laki	12 orang
2	Perempuan	11 orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kondisi Oktober 2025

2.1.2.2 Sarana/Prasarana (Aset/Modal)

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepulaua Mentawai berlokasi di Jl. Raya Tuapejat Km. 8 Kecamatn Sipora Utara. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan dipertimbangkan dari segi akses yang sangat mudah dijangkau dengan berbagai jenis kendaraan umum ataupun pribadi.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki 2 buah gedung, terdiri atas gedung perpustakaan dan Gedung Kearsipan. Kondisi kedua gedung tersebut masih jauh dari standar perpustakaan dan kearsipan. Selain itu secara kepemilikan asset, gedung Kearsipan dan Perpustakaan saat ini merupakan eks gedung Balai Benih Utama (BBU) asset milik Dinas Pertanian. Sehingga secara sarana, belum memiliki gedung sendiri yang sesuai dengan standar gedung Depo Arsip dan Perpustakaan. Hal ini perlu dipertimbangkan sebagai prioritas dalam kegiatan pembangunan sarana/parasarana gedung kantor Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sedangkan jumlah Sarana dan Prasarana lainnya seperti kendaraan dinas, komputer dan peralatan lainnya sampai akhir tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut inI.

Tabel. 2.5
Daftar Aset/Modal

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah
1	Kendaraan Roda 2	6
2	Kendaraan Roda 4	3
3	Kendaraan Roda 3	1
4	PC Unit	7
5	Laptop	3
6	Scaner	1
7	Printer	7
8	Handy Cam	1
9	Alat Penghancur Kertas	1
10	Brandkas	1

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah
11	Electric generating set	1
12	Mesin Pemotong Rumput	1
13	Televisi	2
14	Filing Kabinet Besi	5
15	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	1
16	Lemari Penyimpanan	7
17	Almari Buku	4
18	Rak Besi	7
19	Tenda	3
20	Meja	17
21	Kursi	28
22	Kursi Baca Anak	90
23	Kanopi	1
24	Buku	23.764 Eksemplar
25	Tanah	1 Ha
25	Gedung Perpustakaan	1 Unit

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, kondisi Oktober 2025

2.1.2.3 Kondisi Anggaran dan Belanja

Anggaran dan belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam kurun periode 3 tahun terakhir yakni:

Tabel. 2.6
Angaran dan Belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Tahun 2021 – 2025

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2021	3.568.444.528,-	3.489.594.083,-	97,79
2	2022	4.455.705.790,-	4.164.911.722,-	93,47
3	2023	15.463.144.195,-	9.234.454.804,-	59,72
4	2024	7.918.088.040,-	5.385.101.536,-	68,01
5	2025*	6.988.174.890,-	-	-

Ket: *Tahun berjalan
Sumber: Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, kondisi Oktober 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Demikian pula halnya dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk mengukur tentang sejauh mana keberhasilan rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, diperlukan adanya evaluasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Evaluasi kinerja mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada dasarnya telah dilaksanakan dan berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2020-2024 baik mempedomani pada RPD dan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023-2026. Realisasi kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022-2024 sebagai mana Tabel 2.7:

Tabel 2.7
Realisasi Target Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022-2024

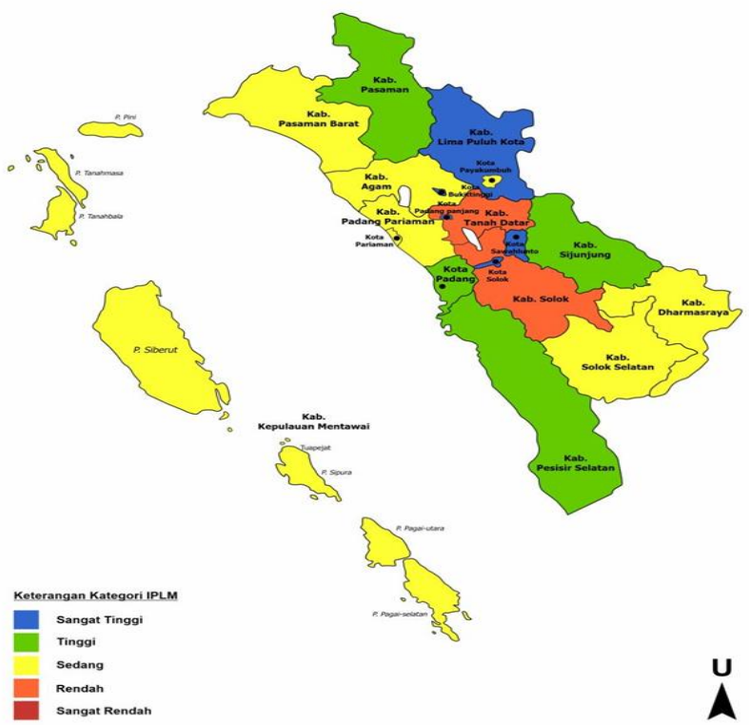
No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Leterasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	10	8	80	61,8	54,78	88,64	61,2	63,62	103,9	62,3	45,67	73,30	65,5	57,59	87,92
2	Meningkatnya Budaya gemar membaca Masyarakat	Nilai Tingkat budaya kegemaran membaca	Nilai	25	28	112	26	15	57,69	28	43,87	156	50	60,8	121	60	68,18	113
3	Meningkatnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Nilai tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Persen	30	23	76,67	30	15	50	27%	28%	105	32%	38%	126	35%	39,30%	112
4	Meningkatnya kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	100	CC	B	100	CC	B	100	B	BB	107	B	BB	107
5	Meningkatnya kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah	-	-	-	1	1	100	-	-	-	1	1	100	1	1	100
6	Meningkatnya kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat Daerah	Persen	82	80,2		85	84,5		80	84	105	80	73,67	91,7	82	68	82,92

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Selanjutnya Pasal 4 menjelaskan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk *cognitive skill* memampukan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan. Kewajiban pemerintah atas ketersediaan perpustakaan di masyarakat diperjelas dalam Pasal 7 ayat (1) butir c, menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air. Selaras dengan amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2) butir q menyatakan bahwa perpustakaan masuk pada urusan wajib pemerintahan baik pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Perkembangan literasi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat bergantung kepada kegemaran membaca masyarakat. Berdasarkan Kajian Budaya Baca Masyarakat Indonesia tahun dari Tahun 2021 – 2024 menunjukkan rata-rata tingkat kegemaran membaca masyarakat Kepulauan Mentawai berada dibawah mengalami peningkatan 15 atau berada pada kategori "*sangat kurang*", pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 68.18 termasuk kategori *"sedang"*. Secara rata-rata nasional yaitu 53,84 dan rata-rata provinsi 73,70.

Gambar 2.3
Peta TGM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) RI setiap tahun mengeluarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah sebuah instrumen pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan

kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Pada tahun 2024, berdasarkan data Perpustakaan Nasional RI dalam mengukur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) setiap provinsi/kabupaten/kota, bahwa IPLM Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar *"57.59"* dengan kategori *"Sedang"*,

Gambar 2.4
Peta IPLM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Tabel 2.8
Pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

Rekapan Nilai IPLM Kab. Kepulauan Mentawai

Jumlah Penduduk (BPS 2022)	**91.430**
Jumlah Civitas Sekolah (BPS 2022)	**25.379**
Jumlah Civitas Akademika (BPS 2022)	**0**
Jumlah Kelembagaan (BPS 2022)	**267**

NO	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN		NILAI	INTERPRETASI
INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT		:	**57,59**	**Sedang**
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	:	0,3371	Pencapaian layanan perpustakaan sebesar 34 persen dari standar
2	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)	:	0,2838	Pencapaian koleksi perpustakaan sebesar 28 persen dari standar
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	:	0,5195	Pencapaian tenaga perpustakaan sebesar 52 persen dari standar
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4)	:	0,0470	Pencapaian tingkat kunjungan masyarakat sebesar 5 persen dari standar
5	Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP (UPLM5)	:	0,8436	Pencapaian perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 84 persen dari standar
6	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	:	1,0000	Pencapaian keterlibatan masyarakat sebesar 100 persen dari standar
7	Anggota Perpustakaan (UPLM7)	:	1,0000	Pencapaian jumlah anggota perpustakaan sebesar 100 persen dari standar
Keterangan Standar:				
UPLM1: Jumlah kelembagaan UPLM2: 2 x jumlah penduduk UPLM3: 1 tenaga perpustakaan melayani 2500 penduduk UPLM4: 2% dari jumlah penduduk				UPLM5: 22,39% dari jumlah perpustakaan UPLM6: 2% dari jumlah penduduk UPLM7: 2% dari jumlah penduduk

Sumber: PERPUSNAS RI, 2024

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk pelindungan kepentingan negara dan hak – hak keperdataan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal, harus bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif yang membutuhkan pemahaman dan pemaknaan yang kuat dari berbagai kalangan, terutama di kalangan penyelenggara negara. Penyelenggaraan urusan kearsipan merupakan salah satu amanah pencapaian tujuan untuk *"Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel".* Melalui program pengelolaan arsip dan program perlindungan dan penyelamatan arsip, dengan indikator kinerja sasaran yaitu:

1. PersentasePerangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku
2. Persentase Kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan

Kinerja capaian pelayanan urusan bidang perpustakaan pada kurun waktu 2020-2024 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Kinerja Pelayanan Bidang Kearsipan Tahun 2020-2024

No	Bidang Urusan/Indikator	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	2,7	5,5	5,56	3,5	39,3%
2.	Persentase Kualitas dan kuantitas khasanah kearsipan	1	1,5	1,17	1,2	39,30%
3.	Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	26	25	33	35	39,30%
4.	Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setuiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	5	5	6,5	7	7

Dalam rangka mewujudkan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi, maka dituntut adanya peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan. Strategi percepatan untuk mewujudkan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan baik yang dilakukan pihak eksternal (ANRI) maupun internal pada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan *trigger* yang perlu dilakukan secara terus-menerus, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui ketersediaan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah, yang pada saatnya menjadi memori daerah dan akan membentuk memori bangsa.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu dilakukan pengawasan kearsipan secara nasional. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional, yang dilakukan terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah.Pengawasan kearsipan dilaksanakan oleh ANRI dalam rangka mengukur kesesuaian penerapan prinsip, kaidah, standar yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan dilaksanakan terhadap 34 (tiga puluh empat) pemerintah daerah provinsi yang dilakukan oleh ANRI, dan 508 (lima ratus delapan) pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilakukan oleh Provinsi sesuai kewenangannya, dan di verifikasi oleh ANRI .Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan pada Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui monitoring tindak lanjut dari hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan pada tahun sebelumnya.

Pengawasan kearsipan berdampak pada Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) karena menjadi salah satu indeks RB, yaitu pada area perubahan Tata Laksana dengan ukuran pencapaian pada aspek hasil antara dengan indikator: kualitas pengelolaan arsip, diukur dengan nilai hasil pengawasan kearsipan dari ANRI. Nilai hasil pengawasan kearsipan menjadi acuan dalam menentukan Indeks Kinerja penyelenggaraan kearsipan pada objek pengawasan. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh ANRI dalam kurun waktu 2023-2024, sebagai berikut:

Tabel. 2.10
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan
Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh ANRI Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	NA	NA	C (Kurang)	C (Kurang)	D (Sangat Kurang)
2.	Indeks Digitalisasi Arsip	NA	NA	1,2	22,41 (Sangat Kurang)	61,29 (Baik)

Hasil ini menunjukan terjadi penurunan nilai hasil pengawasan ekternal kearsipan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh ANRI, hal ini selain karen terjadi perubahan indikator penilaian, juga karena tidak terjadinya peningkatan tata kelola kearsipan oleh Perangkat Daerah, baik unit pencipta arsip maupun oleh Lembaga Kearsipan Daerah (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan). Kurangnya komitmen, keterbatasan anggaran, kekurangan sarana prasarana dan SDM bidang kearsipan menyebabkan belum berjalannya tata kelola arsip yang baik, benar dan baku oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selain itu Nilai Indeks Digitalisasi Arsip Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Tahun 2023 sampai tahun 2024 sudah mengalami peningkatan, karena mulai tahun 2024 telah digunakannya Aplikasi Srikandi untuk pengelolaan kearsipan di beberapa Perangkat Daerah.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kelompok Sasaran adalah pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan Organisasi Perangkat Daerah. Kelompok sasaran layanan mencakup layanan pengelolaan kearsipan di daerah dan layanan perpustakaan mencakup lapisan masyarakat masyarakat umum, mulai dari anak-anak, remaja, mahasiswa, pendidik hingga masyarakat umum, dengan karakteristik:

a. Bidang Kearsipan

Karakteristik Kearsipan merupakan Unit Kearsipan Penyelenggaraan Tata Kearsipan yang meliputi Pengurusan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan, Penataan, Pemeliharaan dan Penyusutan arsip serta diikuti Tata Usaha atau Administrasi berupa rekaman kegiatan atau peristiwa diikuti dengan perkembangan era digitalisasi

b. Bidang Perpustakaan

Karakteristis kelompok sasaran: *Individual or group* yaitu apakah si pengguna datang ke perpustakaan sebagai individu atau sebagai suatu

kelompok; *Place of learning,* yaitu tempat yang biasa digunakan oleh pengguna untuk membaca buku atau belajar; *Social situation,* yaitu aspek sosial dari pengguna perpustakaan; *Leisure or necessity factor,* yaitu apakah pengguna berkunjung ke perpustakaan untuk sekedar mengisi waktu luang atau karena dia membutuhkan buku atau informasi tertentu; *Subject of study,* yaitu bidang apa yang sedang didalami pengguna. Apakah dia sedang menulis mengenai suatu subjek tertentu yang sangat khusus, atau sedikit lebih luas; *Level of study,* yaitu tingkat pendidikan pengguna. Kebutuhan mahasiswa S1 tentu berbeda dengan kebutuhan mahasiswa tingkat S2 atau S3; *Motivation,* yaitu sejauh mana keinginan dan antusiasme pengguna dalam memanfaatkan layanan perpustakaan. Intervensi yang dilakukan untuk layanan adalah :

a. Layanan Pojok baca anak-anak dengan kegiatan *Story Talling*, Mewarnai, dan Buku cerita gambar
b. Menyediakan buku Pelajaran dan buku novel remaja
c. Meningkatkan jumlah koleksi buku sesusi kebutuhan Masyarakat
d. Fasilitas umum seperti Rumah Sakit Umu Daerah telah disediakan POCADI (Pojok baca Digital)

Adapun Kelompok Sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan:

a. Bidang Pengelolaan Perpustakaan, dengan kelompok Sasaran:
    1) Dinas Pendidikan
    2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
    3) Dinas Kominfo
    4) Pemustaka (pelajar, Masyarakat umum)
    5) Pustakawan/Pengelola Perpustakaan
    6) Penerbit
    7) Perpustakaan Sekolah/Perpustakaan Desa/Taman Bacaan Masyarakat
    8) Satuan Pendidikan Tingkat Dasar (SD/SMP sederajat
    9) Forum penggiat literasi
b. Bidang Pengelolaan Kearsipan, dengan kelompok sasaran:
    1) Seluruh Perangkat Daerah
    2) Masyarakat umum
    3) BUMD
    4) Pemerintahan Desa

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Mengacu pada BAB II Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 dan Laporan KLHS 2025-2029 yang berhubungan dengan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, serta hasil Penjaringan yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, maka dirumuskan lah permasalahan yang berhubungan dengan Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Permasalahan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Adapun pemetaan Permasalahan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan yakni sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.11
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Bidang Kearsipan dan Perpustakaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
A. Bidang Kearsipan			
1.	Belum terlaksananya pengelolaan arsip secara baku sesuai dengan	Belum terkelolanya arsip pemerintah daerah	1. Kurangnya komitmen Pencipta Arsip untuk

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	standar pengelolaan kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	secara baku sesuai NSPK	mengelola Arsip sesuai NSPK 2. Kurangnya sarana dan prasana kearsipan 3. Minimnya SD Aparatur pengelola arsip 4. Keterbatasan anggaran untuk mengelola arsip 5. Belum maksimal pengunaan digitalisasi kearsipan
2. Bidang Perpustakaan			
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat	Masih rendahnya budaya baca masyarakat	1. Kurangnya koleksi bahan bacaan 2. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas perpustakaan 3. Keterbatasan Tenaga Pustakawan yang professional 4. Masih kurangnya promosi dan sosialisasi budaya baca 5. Keterbatasan Anggaran 6. Kurangnya dukungan pemerintah dan Masyarakat 7. Buday abaca belum mengakar

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2029 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Budaya Literasi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Perangkat Daerah belum optimal dalam mengelola dan menjaga arsip secara baku sesuai dengan NSPK Kearsipan.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan.
4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia Pengelola perpustakaan dan pengelolaan kearsipan.

Perumusan Isu Strategis tersebut berdasarkan hasil identifikasi isu strategis sesuai dengan lingkungan dinamis (global, nasional, regional) yang dapat memengaruhi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu Starategi tersebut merupakan hasil perumusan dari berbagai sumber seperti: RPJMN 2025-2025, RENSTRA PERPUSNAS RENSTRA ANRI, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 serta hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Tabel hasil identifikasi isu strategis tersebut sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.12
Isu Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu- Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pembangunan Sumberdaya Manusia	Masih Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan	1. Rendahnya Pendidikkan 2. Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan	1. Indonesia masuk 10 besar negara Tingkat Membaca Paling Rendah 2. Kearsipan yang berkelanjutan	1. Budaya baca Masyarakat Indonesia masih Rendah 2. Digitalisasi Arsip dan Arsip sebagai memori kolektif bangsa	1. Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan IPLM paling rendah di Sumatera Barat 2. Nilai Pengawasan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Mentawai paling rendah di Sumatera Barat	1. Masih rendahnya Budaya Baca Masyarakat 2. Perangkat Daerah belum optimal dalam mengelola dan menjaga arsip secara baku sesuai dengan NSPK Kearsipan 3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan 4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia Pengelola perpustakaan dan pengelolaan kearsipan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran rencana pembangunan Kabupaten Temanggung.

Penyusunan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025-2029 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025 – 2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran strategi, arah kebujakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

a. Visi

Visi Kepulauan Mentawai 2025-2029 memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah periode pertama implementasi dalam penguatan fondasi pembangunan jangka panjang Mentawai Emas 2045, perumusan visi tersebut juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 5 tahun terakhir, sehingga Visi Kepulauan Mentawai2025-2029 adalah:

"*KEPULAUAN MENTAWAI MAJU, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA*"

Perumusan Visi RPJMD Tahun 2025-2045 sebagai Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera memiliki makna:

Maju

Menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mampu berdiri tegak dan sejajar dengan daerah lain, akselerasi di segala sektor pembangunan, mengejar yang belum tercapai, memperbaiki yang ada dan meningkatkan apa yang sudah diraih. Begitu juga pembangunan untuk kemajuan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, infrastruktur yang handal, dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Berdaya Saing

Upaya pembangunan untuk kemajuan di setiap lini pembangunan seiring dengan memastikan kualitas dan mutu sehingga memiliki keunggulan yang dapat dijadikan penggerak pertumbuhan sosial, ekonomi dan budaya. Sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, memiliki kebudayaan yang unik dan bernilai tinggi, dan memiliki keunggulan komparatif (keunggulan yang relatif terhadap daerah lain) dan keunggulan kompetitif (keunggulan yang unik dan sulit ditiru) sehingga Kepulauan Mentawai diperhitungkan dalam kancah persaingan domestik, nasional dan internasional.

Sejahtera

Kehidupan masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dalam suasana aman, nyaman, terlindungi dan damai, serta adanya kesempatan yang sama bagi semua untuk berkembang dan maju. Sejahtera juga mencakup pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi

mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan yang melibatkan semua orang tanpa diskriminasi, pembangunan manusia yang hakiki.

b. Misi

Visi pembangunan tersebut diimplementasikan dalam perwujudan 8 misi pembangunan untuk mengejewantahkan visi dalam bentuk nyata. Misi pembangunan ini tentunya merupakan aktivitas yang ditentukan mengarah pada langkah-langkah terwujudnya kondisi yang ingin dicapai. 8 Misi Pembangunan Daerah 2025-2029 yakni:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Ekonomi Daerah.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana.
6. Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia.
7. Mewujudkan Masyarakat yang Aman Harmonis dan Berkeadilan.
8. Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Tepercaya.

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran misi secara lebih rinci dan terukur. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, sedangkan sasaran adalah target spesifik dan terukur yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program prioritas dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJM Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029:

Tujuan	Sasaran	
1. Terwujudnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berkualitas dan Berdaya Saing	1.1	Meningkatnya Mutu Pendidikan
	1.2	Meningkatnya Mutu Kesehatan Masyarakat
	1.3	Meningkatnya Produktivitas Masyarakat yang Inklusif
2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan	2.1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
	2.2	Meningkatnya Investasi, Stabilisasi Ekonomi dan Nilai Tambah/ Hilirisasi
	2.3	Meningkatnya Kesempatan Kerja yang Inklusif dan Berkualitas
3. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	3.1	Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan
	3.2	Meningkatnya pengelolaan air baku untuk kehidupan produktif
4. Terwujudnya Kawasan sebagai Basis Kemajuan Wilayah yang didukung PSU Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	4.1	Meningkatnya Desa Mandiri.
	4.2	Meningkatnya Kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan
1. Terwujudnya Harmonisasi Kehidupan Masyaraka Berbasis Sosial Budaya dan Lingkungan	5.1	Memperkuat Tatanan Kehidupan Sosial, Budaya Masyarakat
	5.2	Pembangunan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat yang Inklusif dan berwawasan lingkungan
6.Terwujudnya ekosistem alam yang Berkualitas dan Resiliensi Terhadap Bencana	6.1	Meningkatnya pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan
	6.2	Menurunnya risiko terhadap dampak bencana
7. Terwujudnya Pariwisata yang	7.1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata

Berdaya Saing dan Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan		dalam pembangunan Daerah
	7.2	Meningkatnya Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat
8. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial	8.1	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukumpemerintah
	8.2	Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
9. Terwujudnya Birokrasi Kelas Dunia	9.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel
	9.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani

Berdasarkan urusan dan kewenangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai perangkat daerah yang mengurus urusan wajib bukan pelayanan dasar berperan penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Sebagai perangkat daerah yang membantu Kepada Daerah dalam urusan Kearsipan dan Perpustakaan, misi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, yakni:

a. Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas, untuk Urusan Bidang Perpustakaan.
b. Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Tepercaya untuk Urusan Bidang Kearsipan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan Urusan sebagai berikut:

a. Urusan Perpustakaan, dengan tujuan:
   "Meningkatnya Literasi Masyarakat"
b. Urusan Kearsipan dengan tujuan:
   "Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan"

Selanjutnya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tersebut, bahwa Perangkat Daerah, bahwa:

1. Mempertimbangkan kondisi Perangkat Daerah (PD) yang ada saat ini direkomendasikan agar RENSTRA cukup memiliki 1 (satu) Tujuan
2. Jika PD pengampu lebih dari satu urusan, Tujuan RENSTRA PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama Tahun 2025-2029, yakni

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
2. Meningkatkan Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah.

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Meningkatnya Mutu Pendidikan	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Tata Kelola Kearsipan	1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	60	62	65	68	70	72	
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel		2. Meningkatkan Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah	C	C	CC	CC	B	B	
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovati dan melayani		3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	BB	
			2. Jumlah Inovasi yang diterapkan	2	3	4	4	6	6	
			3. Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	83	84	85	87	

3.3 Strategi Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2029

Strategi RENTRA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025 – 2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan melalui optimalisasi sumberdaya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan Renstra Perangkat Daerah. Strategi yang akan dilakukan RENSTRA yang akan dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama Tahun 2025-2029 yakni:

Tabel 3.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2029

Visi: Kepulauan Mentawai Maju, Berdaya Saing Dan Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI: Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas		
Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Tata Kelola Kearsipan	1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	a. Meningkatkan Pembinaan terhadap Perpustakaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan kewenangannya b. Melakukan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno c. Meningkatkan Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan.
	2. Meningkatkan Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah	a. Meningkatkan Pengelolaan Arsip b. Meningkatkan Upaya Perlindungan Dan Penyelamatan Aset c. Mengelola Perizinan Penggunaan Arsip d. Melakukan Akreditasi dan Sertifikasi Lingkup Kearsipan
	3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai pedoman/Ketentuan yang berlaku b. Mengelola Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku c. Mengelola Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sebelum dilakukan penyusunan arah kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025 - 2029, terlebih dahulu dilakukan Penyusunan Penahapan Renstra. Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas Pembangunan Tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disajikan sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel. 3.4
Penahapan Renstra Dinas Kearsipann dan Perpustakaan 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan sarana dan prasarana dan SDM pendukung pengelolaan perpustakaan dan kearsipan	Penguatan Kapasitas SDM Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan	Penguatan Digitalisasi dalam pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan	Penguatan fondasi Transformasi pengelolaan perpustakaan dan kearsipan yang berkualitas	Transformasi pengelolaan perpustakaan dan kearsipan yang berkualitas

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029, serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menjadi panduan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Arah Kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran pada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2029, sebagaimana Tabel 3.5 berikut:

Tabel. 3.5
Arah Kebijakan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2025-2029	Ket
1.	Meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatkan kualifikasi Layanan Pendidikan	1. Melaksanakan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 2. Melaksanakan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten 3. Melaksanakan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten 4. Melaksanakan Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 5. Melaksanakan Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten 6. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten 7. Melaksanakan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten 8. Melaksanakan Pengembangan Bahan Pustaka 9. Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 10. Melaksanakan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten 11. Melaksanakan Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	10 Kec

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2025-2029	Ket
			12. Melaksanakan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten 13. Melaksanakan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 14. Melaksanakan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 15. Melaksanakan Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten 16. Melaksanakan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 17. Melakukan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara. 18. Melaksanakan Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	
2.	Meningkatnya Indeks Pengawasan Kearsipan	Meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi	1. Mengelola Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 2. Melaksanakan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 3. Melaksanakan Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI 4. Melaksanakan Akuisisi, Pengolahan Preservasi dan Arsip Statis 5. Melaksanakan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten Melalui JIKN 6. Melaksanakan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten 7. Melaksanakan Penilaian dan Penetapan Pemusnahan arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 Tahun 8. Melaksanakan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun 9. Melaksanakan Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana 10. Melaksanakan Pemulihan dan Penyimpanan Arsip	Seluruh Perangkat Daerah, BUMD & Pemerintahan Desa

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2025-2029	Ket
			Akibat Bencana 11. Melaksanakan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten 12. Melaksanakan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten 13. Melaksanakan Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan 14. Melaksanakan Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan 15. Melaksanakan penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 16. Melaksanakan penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 17. Melaksanakan Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang 18. Melaksanakan Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang 19. Melaksanakan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan kualitas Perencanaan 2. Meningkatkan kualitas Pelaporan 3. Meningkatkan Pelaksanaan Evaluasi dan Internal secara berkala 4. Meningkatkan Melakukan akurasi data 5. Menerapkan Sistem Manejemen Pengendalian Inernal 6. Menerapkan Manajemen Pengendalian Resiko	Tuapejat
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Inovasi pelayanan public	1. Meningkatkan Penguatan Internal Organisasi 2. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur yang memberikan pelayanan	Tuapejat

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029	Arah Kebijakan RENSTRA 2025-2029	Ket
			3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan 4. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan *stake holder* terkait 5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala	
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Internal Organisasi 2. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur yang memberikan pelayanan 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan 4. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan *stake holder* terkait 5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala	Tuapejat

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menegah perangkat daerah, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam matrik berikut.

Indikator kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam lima tahun mendatang (2025-2029) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD pada misi 1 yaitu Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas dan misi 8 yaitu Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif dan tepercaya. Selanjutnya dilakukan Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output*. Program, Kegiatan dan Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan pemutakhirannya.

Hasil Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025-2029 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Meningkatnya Mutu Pendidikan	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Tata Kelola Kearsipan	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia Kabupaten Kepulauan Mentawa	Meningkatnya Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	A. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan a. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik b. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten c. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten d. Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan e. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten f. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						g. Pengembangan Bahan Pustaka h. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten b. Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat c. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten d. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca e. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						f. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten g. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten.	
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel		2. Meningkatkan Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan pemerintah daerah sebagai bahan akuntabiltas pelaksanaan pemerontahan	Meningkatnya Nilai Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah	A. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota a. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis b. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis c. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota a. Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI b. Akuisisi, Pengolahan Preservasi dan Arsip Statis 3. Kegiatan Pengelolaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Simpul Jaringan Informasi KearsipanNasional Tingkat Kabupaten/Kota a. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten Melalui JIKN b. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten B. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 1. Kegiatan Pemusnahan Arsip Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun a. Penilaian dan Penetapan Pemusnahan arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 Tahun b. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						di bawah 10 Tahun 2. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota a. Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana b. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 3. Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan a. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten b. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten c. Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan d. Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan 4. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota a. Melaksanakan penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip b. Melaksanakan penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 5. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang a. Penilaian dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang b. Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang c. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovati dan melayani			Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	4. Nilai SAKIP	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan d. Penyediaan Bahan-bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 4. Kegiatan Pengadaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Barang Milik Daerah a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Pengadaan Peralatan dan Mesin c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urussan Pemerintah Daerah a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Uraian Program dan Kegiatan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2026:

A. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan:
   1. Program Pembinaan Perpustakaan
      a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

B. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan
   1. Program Pengelolaan Arsip
      a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
      b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
      c. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
   2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
      a. Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
      b. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
      c. Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
      d. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
      e. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang

Urusan Penunjang Pemerintah Daerah:
   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah
      e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah
      f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dimulai dari tahun 2025 – 2030, untuk upaya kesinambungan Perencanaan PD yaitu pijakan Renja Tahun 2030. Uraian Rencana program program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif pada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025-2029 sebagaimana Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2.
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025-2030

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
A. PROGRAM PEMBINAAAN PERPUSTAKAAN															
(Meningkatnya Layanan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan)	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	68	70	4.645.001.078	71	1.650.000.000	72	1.915.000.000	73	1.925.000.000	74	2.025.000.000	75	2.085.000.000	
1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Perpustakaan Yang Dikelola Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	24	30	330.302.600	35	415.000.000	40	615.000.000	45	625.000.000	50	725.000.000	55	735.000.000	
a. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumalah Layanan pepustakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Managemen Layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM:Information Technology Service Management)	-	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
b. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan ditingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar nasional Perpustakaandi wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	-	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	
c. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang dikembangkan	-	-	-	-	-	20	30.000.000	-	-	25	40.000.000	30	50.000.000	
d. Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Pepustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10	10	33.544.400	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	
e. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten	Jumlah peprustakaan Khusus yang dibina sesuai kewenagan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	-	-	-	-	-	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
f. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Peprustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30	25	46.758.200	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	
g. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah layanan Peprustakaan Rujukan yang dikembangkan tingkat Kabupaten/Kota melalui Peningkatan Koleksi	-	-	-	-	-	-	-	3	70.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	
h. Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	186.890	-	-	200	65.000.000	500	100.000.000	500	100.000.000	500	100.000.000	500	100.000.000	
i. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan perpustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi Perpustakaan	186.890	-	-	-	-	1.000	30.000.000	-	-	1.000	30.000.000	1.000	30.000.000	
j. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan,Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca	2	2	4.314.698.478	2	1.235.000.000	4	1.300.000.000	5	1.300.000.000	5	1.300.000.000	5	1.350.000.000	
a. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	20 Lokus	25	117.721.000	30	185.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	
b. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah Sarana yang terbangun dan terpelihara.	1	1	4.196.977.478	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	
c. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	-	1	-	-	-	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
d. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Insklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	-	-	-	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	5	100.000.000	
e. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah kabupaten/KOta yang dipilih dan didukung kegiatannya	-	-	-	-	-	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	
B. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO															
(Meningkatnya Pelesatarian Naskah Nasional dan Naskah Kuno)	Persentasi Naskah Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	100.000.000	
1. Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	100.000.000	
a.Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi/daidakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50.000.000	3	50.000.000	
b. Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Persentase Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah/disiangi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50.000.000	3	50.000.000	
B. PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTFIKASI PUSTAKAWAN															
(Meningkatnya kualitas Perpustakaan dan Pustakawan)	Persentase Pustakawan yang memiliki Sertfikasi di bidang profesi Pustakawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	100.000.000	
1. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	100.000.000	
a. Akreditasi Perpustakaan	Jumlah Perpusatakaan yang Terakreditasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50.000.000	3	50.000.000	
b. Sertfikasi Pustakawan	Jumlah Pustakawan yang memiliki Sertfikat Profesi Pustakawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50.000.000	3	50.000.000	
I. URUSAN BIDANG KEARSIPAN															
A. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP															
(Meningkatnya Tata Kola Arsip Dinamis dan Arsip Statis)	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	39	40		45		50		55		60		65		
1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten															

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan	11.750	12.000	40.714.800	12.500	50.000.000	13.000	50.000.000	13.500	50.000.000	14.000	50.000.000	14.500	50.000.000	
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1.500	1.650	-	1.750	20.000.000	1.850	20.000.000	1.950	20.000.000	2.000	20.000.000	2.500	20.000.000	
Pengawasan Arsip Dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pengawasan Arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	5	5	-	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	
2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten				-		-		-		-		-		-	
a. Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah asli Arsip terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan akusisi pengolahan presevasi dan Akses Arsip Statis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten		15%		-		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	-	50.000.000	
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota JIKN	Pengguna	Pengguna	0	Pengguna	0	Pengguna	0	Pengguna	0	Pengguna	0	Pengguna	0	
Permerdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	26 Laporan	26 Laporan	0	26 Laporan	50.000.000	26 Laporan	50.000.000	26 Laporan	50.000.000	26 Laporan	50.000.000	26 Laporan	50.000.000	
B. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP															
(Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai dengan NSPK)	Persentase Cakupan Perlidnungan dan Penyelamatan Arsip	0	1		2		3		4		5		6		
1. Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		10%													
a. Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan	0	0	0	0	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun														
b. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memilki Retensi di Bawah 10 tahun	Jumlah Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan	0	0	0	0	0	100	52.000.000	100	52.000.000	100	52.000.000	100	52.000.000	
2. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten				0		0		102.000.000		102.000.000		102.000.000		102.000.000	
a. Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	0	0	0	0	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	
c. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	0	0	0	0	0	100	52.000.000	100	52.000.000	100	52.000.000	100	52.000.000	
III. URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH															
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	23.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	
a. Penyusunan Dokumen Pencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	25.000.000	3 dokumen	25.000.000	3 dokumen	23.000.000	3 dokumen	22.000.000	3 dokumen	22.000.000	3 dokumen	22.000.000	
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	2.750.000.000	100%	2.768.893.795	100%	2.750.000.000	100%	2.750.000.000	100%	2.750.000.000	100%	2.750.000.000	
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan	2.700.000.000	21 Orang/ bulan	2.718.893.795	21 Orang/ bulan	2.700.000.000	21 Orang/ bulan	2.700.000.000	21 Orang/ bulan	2.700.000.000	21 Orang/ bulan	2.700.000.000	
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	74.952.202	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
a, Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	74.952.202	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	234.000.000	100%	229.000.000	100%	210.340.503	100%	181.000.000	100%	181.000.000	100%	181.000.000	
a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 Paket	20 Paket	12.000.000	20 Paket	12.000.000	20 Paket	12.000.000	20 Paket	12.000.000	20 Paket	12.000.000	20 Paket	12.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	60.000.000	3 Paket	55.000.000	3 Paket	46.340.503	3 Paket	42.000.000	3 Paket	42.000.000	3 Paket	42.000.000	
c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	13 Paket	13 Paket	17.000.000	13 Paket	17.000.000	13 Paket	17.000.000	13 Paket	17.000.000	13 Paket	17.000.000	13 Paket	17.000.000	
d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	
e. Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	130.000.000	36 Laporan	130.000.000	36 Laporan	120.000.000	36 Laporan	110.000.000	36 Laporan	110.000.000	36 Laporan	110.000.000	
5. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah		100%	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	0	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	
a. Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan |Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit					1 Unit	350.000.000							
b. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	26 Unit	26 Unit	0	26 Unit	0	26 Unit	0	26 Unit	0	26 Unit	0	26 Unit	0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	38.000.000	1 unit	38.000.000	1 unit	0	1 unit	38.000.000	1 unit	38.000.000	1 unit	38.000.000	
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah		100%	100%	387.000.000	100%	312.000.000	100%	312.000.000	100%	254.189.374	100%	254.189.374	100%	254.189.374	
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Laporan	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000	2 Laporan	12.000.000	
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	15 Laporan	15 Laporan	75.000.000	15 Laporan		15 Laporan		15 Laporan		15 Laporan		15 Laporan		
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	11 Laporan	300.000.000	11 Laporan	300.000.000	11 Laporan	300.000.000	11 Laporan	242.189.374	11 Laporan	242.189.374	11 Laporan	242.189.374	
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	71.000.000	100%	71.000.000	100%	71.000.000	100%	71.000.000	100%	71.000.000	100%	71.000.000	
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan	1 Unit	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
atau Kendaraan Dinas jabatan	dibayarkan Pajaknya														
b. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	50.000.000	10 Unit	50.000.000	10 Unit	50.000.000	10 Unit	50.000.000	10 Unit	50.000.000	10 Unit	50.000.000	
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 unit	15 unit	6.000.000	15 unit	6.000.000	15 unit	6.000.000	15 unit	6.000.000	15 unit	6.000.000	15 unit	6.000.000	
d. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainya yang dipelihara/ diRehabilitasi	1 unit	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0	

Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 tabel berikut:

Tabel. 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4	(5)
I.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Dengan Standar Nasional Perpustakaan	1. Kegiatan Pembinaan Perpustakaan a. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik b. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten c. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten d. Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan e. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten f. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten g. Pengembangan Bahan Pustaka h. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 3. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota i. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten j. Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat k. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten l. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca m. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial n. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten o. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten	
II	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis DaerahKabupaten/Kota a. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis b. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis c. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota a. Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI b. Akuisisi, Pengolahan Preservasi dan Arsip Statis 3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi KearsipanNasional Tingkat Kabupaten/Kota a. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten Melalui JIKN b. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten	
III	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	1. Kegiatan Pemusnahan Arsip Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun a. Penilaian dan Penetapan Pemusnahan arsip yang Memiliki Retensi di bawah	

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGAIAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4	(5)
			10 Tahun b. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun 2. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota a. Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana b. Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 3. Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan a. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten b. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten c. Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan d. Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan 4. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota a. Melaksanakan penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip b. Melaksanakan penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 5. Kegiatan Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang a. Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang b. Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang c. Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Target keberasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2025-2029, salah satunya melalui penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. IKU yaitu ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, PD bisa mengetahui kinerja 5 tahun kedepam. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2030, sebagaimana Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	60	62	65	68	70	72	
2.	Nilai Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah	Indeks	C	C	CC	CC	B	B	
3.	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	BB	BB	BB	BB	
4.	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah	2	3	4	4	6	6	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	81	83	84	85	87	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proses atau kegiatan operasional yang mendukung pencapaian IKU. IKK lebih berfokus pada proses, output, dan efisiensi kegiatan, seperti kecepatan penyelesaian tugas, kualitas output, serta efektivitas penggunaan sumber daya. Setelah IKU ditetapkan, Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun untuk mengukur pelaksanaan proses yang mendukung pencapaian IKU.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2030 yang ingin dicapai sebagaimana dijabarkan pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	68,18	70	72	75	78	80	
2.	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	39,30	41	45	50	55	60	
3.	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	60	62	65	66	68	70	
4.	Persentase Realiasasi Phisik	%	80	81	83	84	85	87	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dan Keuangan Perangkat Daerah								
5.	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	%	80	81	83	84	85	87	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah dokumen perencanaan urusan kearsipan dan perpustakaan untuk periode tahun 2025-2029. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan dan Perpustakaan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, program kegiatan, dan Subkegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L/Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Karena itu, RENSTRA ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Kearsipan dan perpustakaan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan dan atau target kinerja sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 ini telah memperhatikan:

1. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD (Menguraikan tahapan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD
2. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah (Menguraikan pengendalikan dan pengelolaan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD).
3. Tata Kelola Satu Data Indonesia di tingkat Perangkat Daerah (Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat Perangkat Daerah (PD) bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan daerah)

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025-2029 ini.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI			i
DAFTAR GAMBAR			ii
DAFTAR TABEL			iii
BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan.....	2
	1.3	Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4	Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA.....		7
	2.1	Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	7
	2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	19
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		21
	3.1	Tujuan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029.....	21
	3.2	Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.....	21
	3.3	Strategi Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029.....	24
	3.4	Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029	25
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....		26
	4.1	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	26
	4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	42
BAB V	PENUTUP		44

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Uraian Tabel	
Tabel	2.1	Data Berdasarkan Golongan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	13
Tabel	2.2	Data Berdasarkan Jabatan Struktural	14
Tabel	2.3	Data Berdasarkan Pendidikan Formal	14
Tabel	2.4	Data Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural	14
Tabel	2.5	Tanah dan Gedung yang Dimiliki Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	15
Tabel	2.6	Peralatan dan Mesin yang Dimiliki	16
Tabel	2.7	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 2020-2024	17
Tabel	2.8	Pemasukan PAD dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 2020-2024.....	17
Tabel	2.9	Karakteristik Sasaran Layanan	18
Tabel	2.10	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	20
Tabel	3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	22
Tabel	3.2	Penahapan RENSTRA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	24
Tabel	3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	25
Tabel	4.1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DISPARPORA	28
Tabel	4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendanaan	34
Tabel	4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	41
Tabel	4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ...	42
Tabel	4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	43

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Uraian Gambar	
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan local, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan keada masyarakat., bahwa setiap Satuan Kerja Pariwisata Pemuda dan Olahraga diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Dengan telah terselenggaranya pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 telah menghasilkan pimpinan daerah, Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang secara defenitif dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati menjadi momentum dimulainya penyusunan Renstra sebagai dasar perwujudan pencapaian visi misi Bupati. Selanjutnya, dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2025-2029 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

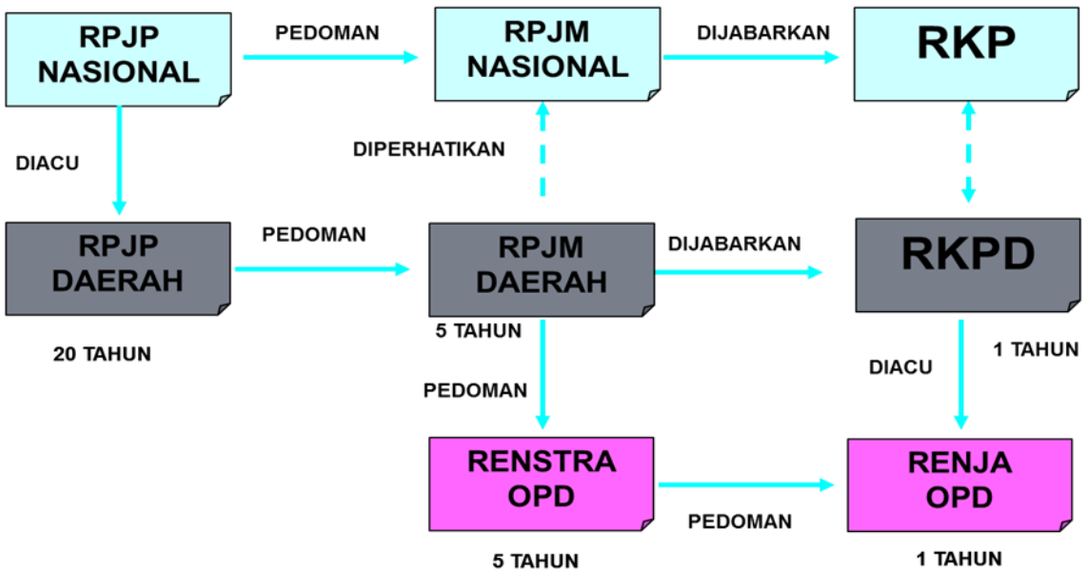
Sebagai unsur pelaksana maka Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Kebuapaten Kepulauan Mentawai.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra, yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati.

Adapun proses Penyusunan rancangan awal Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

1. Persiapan Penyusunan Renstra, antara lain :
   a. Pembentukan SK Tim penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.
   b. Orintasi mengenal RENSTRA.
   c. Penyusunan Agenda Tim Penyusunan RENSTRA.
   d. Penyiapan Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah antara lain:
   a. Analisis gambaran pelayanan.
   b. Analisis permasalahan.
   c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya.
   d. Analisis isu strategis.
   e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdarkan sasaran indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.
   f. Perumusan Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.
   g. Perumusan rencana progran, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.
3. Rancangan RENSTRA antara lain:
   a. Penyempurnaan rancangan awal Renstra perangkat daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah.
   b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat daerah/ lintas perangkat daerah.
   c. Hasil Kesepakatan Forum perangkat daerah dituangkan dalam Berita Acara.
   d. Rancangan Renstra perangkat daerah disempurnakan berdasarkan berita acara.
4. Rancangan Akhir RENSTRA antara lain:
   a. Penyempurnaan rancangan akhir Renstra perangkat daerah berdasarkan surat Peraturan Daerah tentang RPJMD.
   b. Perumusan rancangan akhir Renstra perangkat daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
5. Penetapan RENSTRA antara lain:
   a. Rancangan Akhir Renstra perangkat daerah disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk diverivikasi.
   b. Rancangan Akhir Renstra perangkat daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
   c. Rancangan akhir Renstra perangkat daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh perangkat daerah kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk dilakukan proses penetapan Ranstra perangkat daerah.
   d. Penetapan Renstra Perangkat daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tentunya memperhatikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah, propinsi maupun pusat. Penyelarasan tersebut terkait dengan pelaksanaan tupoksi pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga agar lebih efektif dan efisien. Hubungan dan keterkaitan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat melalui Gambar 1.2.



Keterkaitan arah kebijakan dan strategi nasional antara Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan BKPM, upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Investasi. Keterkaitan dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Provinsi selaras yang tertuang pada Visi dan Misi arah kebijakan daerah provinsi Sumatera Barat. Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian kinerja sasaran yang diimplementasikan melalui program yang terukur secara kuantitatif dan kualitatif.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendyagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
22. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
23. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Elektronik;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;

Selain dengan peraturan Perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 antara lain:

a. Instruksi Menteri dalam negeri Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
b. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan Daerah
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
7. Mengintegrasikan program-program internal serta menjadi dasar dalam penyusunan cascading program-program lintas sektoral guna menunjang pembangunan bidang penanaman modal, perizinan dan Tenaga Kerja dalam pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
2. Tersedianya pedoman untuk menentukan skala prioritas pembangunan sektor pariwisata, pemuda dan olahraga di Daerah;
3. Tersedianya pedoman dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan sektor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

1.1 Latar Belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, fungsi Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, keterkaitan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.2 Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Memuat tentang penyajian data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah disertai evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir, serta mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentangen tujuan dan sasaran beserta strategis dan arah kebijakan Dinas Komuni yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangannya dan mengacu pada sasaran 5 (lima) tahun kedepan disertai dengan indikator kinerja

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
Sasaran rencana pembangunan daerah tahun 2025-2029 dan/atau Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Cascading kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga cascading kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mulai dari tujuan,sasaran, *outcome* dan *output* serta indikator masing-masing.

3.3 Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029.

3.4 Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memaparkan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuktakhirannya dan menjelaskan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci beserta target pagu indikatif untuk pencapaian 5 (lima) tahun kedepan

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Bab menjelaskan kesesuaian antara target kinerja Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dengan dibelakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbagan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkaitan dengan Investasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Susunan organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
e. Bidang Ekonomi Kreatif;
f. Bidang Pemuda dan Olahraga; dan
g. UPTD.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan. Kedudukan dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata pemuda dan olahraga, yang mana diatur dalam Peraturan Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, rincian mengenai susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut diuraikan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai.

a. Tugas Pokok

Dinas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata pariwisata pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penertapan Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada;
2. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan kebijakan pada dinas;

3. Perumusan pedoman kerja dinas sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
4. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan organisasi perangkat daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
5. Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional dinas dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan fungsi penunjang urusan bidang pariwisata pemuda dan olahraga;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada dinas dengan organisasi perangkat daerah lain;
7. Penjalinan kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja dinas;
8. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepala Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
   1. Kepala Dinas;
   2. Sekretariat, membawahi:
      a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      b. Sub Substansi Program dan Keuangan;
   3. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, Membawahi:
      a. Sub Substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
      b. Sub Substansi Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
      c. Sub Substansi Pengembangan Industri Wisata.
   4. Bidang Pemasaran Pariwisata, Membawahi:
      a. Sub Substansi Strategi Pemasaran dan Merek Pariwisata;
      b. Sub Substansi Promosi Pariwisata; dan
      c. Sub Substansi Riset dan Analisis Data Pariwisata.
   5. Bidang Ekonomi Kreatif, Membawahi:
      a. Sub Substansi Riset, Edukasi, Pengembangan SDM dan Infrastruktur;
      b. Sub Substansi Akses Permodalan dan Pemasaran; dan
      c. Sub Substansi Fasilitasi HKI dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.
   6. Bidang Pemuda dan Olahraga, Membawahi:
      a. Sub Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
      b. Sub Substansi Pembudayaan dan Peningkatan Olahraga; dan
      c. Sub Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda Olahraga.
   7. UPTD

1) Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana, dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan dinas.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan dan penyiapan rencana strategis dinas berdasarkan usulan bidang serta kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh dinas;
   b. Penyusunan dan penyiapan rencana kerja tahunan yang berisikan upaya peningkatan dan pengembangan kebijakan pada dinas;
   c. Penyusunan dan penyiapan pedoman kerja dinas sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
   d. Pendistribusian tugas kepada kepala sub bagian dan sub koordinator substansi berdasarkan tugas dan fungsi dinas;

e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan sekretariat organisasi perangkat daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
f. Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional dinas dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan administrasi umum, administrasi kepegawaian, serta penyusunan program dan administrasi keuangan;
g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan kepala sub bagian dan sub koordinator substansi sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
h. Pengevaluasian pelaksanaan program pada kesekretariatan dinas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk pengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengembalian keputusan; dan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan tugas:
a. Penyiapan rencana permasalahan, kebutuhan dan kebijakan pada sub bagian umum dan kepegawaian sebagai bahan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
b. Penyiapan rencana sub kebijakan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan sebagai bahan penyusunan rencana strategis dinas;
c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan prgogram sub bagian umum dan kepegawaian;
e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
f. Pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
g. Pemberian petunjuk, penilaian dan pembinaan bawahan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
i. Pelap[oran pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban kepada sekretaris; dan
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
a. Pengarahan penyusunan rencana kegiatan dan sub kegiatan bidang destinasi dan industri pariwisata berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada bidang destinasi dan industri pariwisata;
b. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata, kawasan pariwisara serta industri pariwisata;
c. Koordinasi dan sinkornisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata kawsan pariwisata serta industri pariwisata;
d. Penyusunan nirma, standar, prosedur,dan kriteria di bidang pengembangan daya tarik wisata, kawsan pariwisata serta industri pariwisata;
e. Pemantauan,analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daya tarik wisata, kawasan pariwisata serta industri pariwisata;

f. Pemerian bimbingan teknis dan surpervisi di bidang pengembangan daya tarik wisata, kawasan pariwisata serta industri pariwisata;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daya tarik wisata, kawasan pariwisata serta industri pariwisata
h. Pelaksanaan admintarsi di bidang destinasi dan industri Pariwisata;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

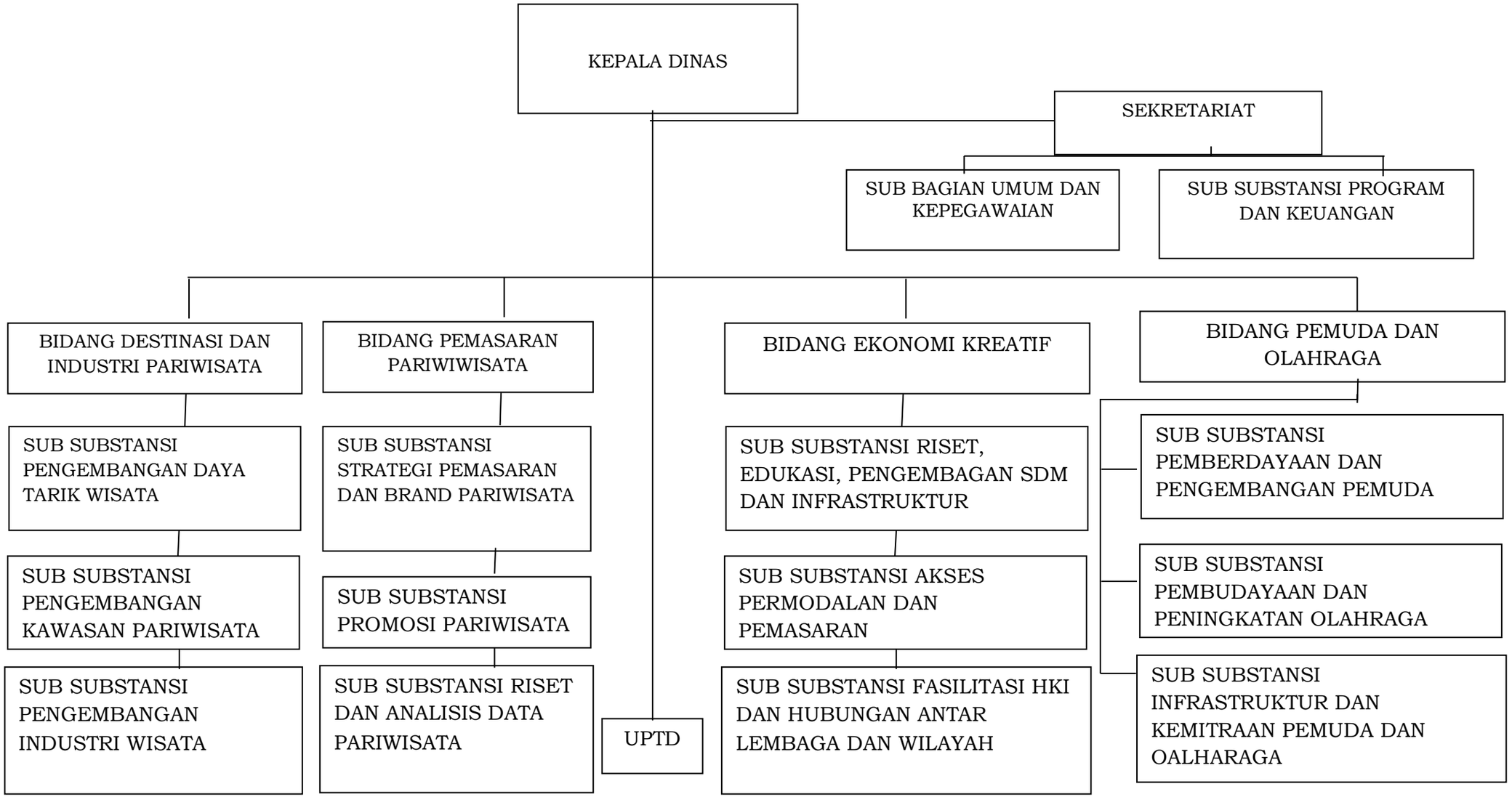
5) Bidang Pemasaran parisiata mempunyai tugas
a. Pengarahan penyusunan rencana kegiata dan subkebitan bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada bidang pemasaran pariwisata;
b. Perumusan kebijakan di bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata serta risert dan analisis data pariwisata;
c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan fi bifang strategi pemasaran dan brand pariwisata promosi pariwisata serta riset dan analisis data pariwisata;
d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata serta risset dan analisis data pariwisata;
e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang strategi pe,asaram dan brand pariwisata, promosi pariwisata serta riset dan analisis data pariwisata;
f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata seta riset dan analisis data pariwisata;
g. Pelaksanaan administrasi di bidang pemasaran parisiata;
h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang ekonomi kreatif pariwisata menyelenggarakan fungsi:
a. Pengarahan pungsunan rencana kegiata dan sub kegiatan bidang ekonomi kreatif berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada bidang ekonomi kreatif;
b. Perumusan kebijakan di bidang riset, edukasi,pengembangan SDM dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi hak kekayaan interlektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
c. Kordinasi dan singkornisasi pelaksaan kebijakan di bidang riset, edukasi, pengembaan SDM dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hungungan antar lembnaga wilayah;
d. Penyusunan nirma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang riset, edukasi, pengembagan SDM dan infrasutrur, akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lenbaga dan wilayah;
e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset, edikasi, pengembagan SDM dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi hal lelayaan intelektual dan hubungan antara lembaga dan wilayah;
f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset, edukasi, pengembagaan sdm dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi Hak Kekayaan intelektual dan hubungan antar lembanga dan wilayah;
g. Pelakasanaan evaluasi dan pelalopran di bidang riset,edukasi, pengembganan SDM dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaram serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
h. Pelaksanaan administrasi bidang ekonomi kreatif;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7) Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsinya:
   a. Pengarahan penyusunan rencana kegiatan dan sub kegiatan bidang pemuda dan olahraga berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada bidang pemuda dan olahraga;
   b. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda, kapasitas kepramukaan serta pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dasn infrastruktur kemitraan olahraga;
   c. Koordinasi dan sinklronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda, kapasitas kepramukaan serta pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
   d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda, kapasitas kepramukaan serta pembudayaan olahraga peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
   e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda, kapasitas kepramukaan serta pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
   f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda, kapasitas kepramukaan serta pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
   g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda, kapasitas kepramukaan serta pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur kemitraan olahraga;
   h. Pelaksanaan administrasi bidang pemuda dan olahraga;
   i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga



2.1.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Upaya pencapaian target kinerja pembangunan pariwisata lima tahun kedepan harus didukung oleh peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia pariwisata, penciptaan inovasi, peningkatan kualitas kinerja dan kuantitas sumber daya manusia Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Sumber daya manusia merupakan modal utama pariwisata karena sumber daya inilah yang menjadi penghasil ide, kreativitas dan pengetahuan untuk dikembangkan menjadi produk dan jasa yang bernilai ekonomi.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mencakup PNS Kabupaten Kepulauan Mentawai serta didukung oleh tenaga pendukung adminitrasi dan tenaga teknis yang di klasifikasikan ke dalam komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan. Dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai didukung oleh 51 Orang personil yang terdiri dari 39 PNS dan 43 Orang Tenaga Kontrak dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Berdasarkan Golongan
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

No	Golongan	Jumlah		Jumlah	Ket
		Perempuan	Laki-laki		
1	IV/a	2	1	3	
2	IV/b	-	2	2	
3	III/d	2	7	9	
4	III/c	1	1	2	
5	III/b	3	3	6	
6	III/a	1	1	2	
7	II/d	3	3	6	
8	II/c	2	4	6	
9	II/b	-	2	2	
10	I/d	-	1	1	

(sumber data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga)

Berdasarkan data pegawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga jumlah pegawai menurut golongan dapat dijelaskan sebagai berikut: pengawai dengan golongan IV/a berjumlah 3 orang terdiri dari 2 perempuan 1 laki-laki. Golongan IV/b berjumlah 2 orang pegawai laki-laki. Golongan III/d berjumlah 9 orang terdiri dari 2 perempuan 7 laki-laki. Golongan III/c berjumlah 2 orang, terdiri dari 1 perempuan dan 1 laki-laki. Golongan III/b berjumlah 6 orang, terdiri dari 3 perempuan dan 3 laki-laki. Golongan III/a berjumlah 2 orang, dengan komposisi 1 perempuan dan 1 laki-laki. Golongan II/d berjumlah 6 orang, terdiri dari 3 perempuan dan 3 laki-laki. Golongan II/c berjumlah 6 orang, terdiri dari 2 perempuan dan 4 laki-laki. Sementara golongan II/b memiliki 2 orang pegawai, seluruhnya laki-laki. Untuk golongan I/d terdapat 1 orang laki-laki.

Tabel 2.2
Data Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Esselon	Jumlah		Jumlah	Ket
		Perempuan	Laki-laki		
1	II	-	2	2	
2	III	1	3	4	
3	IV	4	4	8	

(sumber data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga)

Berdasarkan data pegawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural terdiri dari 14 orang. Pengawai yang menduduki eselon II berjumlah 2 orang laki-laki. Eselon III berjumlah 4 orang, terdiri dari 1 perempuan dan 3 laki-laki. Sedangkan eselon IV berjumlah 8 orang, terdiri dari 4 perempuan dan 4 laki-laki.

Tabel 2.3
Data Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Jumlah		Jumlah	Ket
		Perempuan	Laki-laki		
1	S2	2	5	7	
2	S1	9	11	20	
3	D3	-	1	1	
4	SLTA	3	11	14	
5	SLTP	-	1	1	

(sumber data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga)

Jika dilihat dari tingkat pendidikan formal, pegawai dengan kualifikasi S2 berjumlah 7 orang, terdiri dari 2 perempuan dan 5 laki-laki. Pengawai dengan pendidikan S1 merupakan kelompok terbanyak yaitu 20 orang, terdiri dari 9 perempuan dan 11 laki-laki. Selanjutnya terdapat 1 pegawai laki-laki dengan pendidikan D3. Pegawai pendidikan SLTA berjumlah 14 orang, terdiri dari 3 perempuan dan 11 laki-laki, dan Pendidikan SLTP 1 orang laki-laki.

Tabel 2.4
Data Berdasarkan Pendidikan & Pelatihan Jabatan Struktural

No	Pendidikan	Jumlah		Jumlah	Ket
		Perempuan	Laki-laki		
1	PIM II	-	1	1	
2	PIM III	1	-	1	
3	PIM IV	2	8	10	

(sumber data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga)

Berdasarkan data pendidikan dan pelatihan jabatan struktural (PIM) pengawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga kondisi oktober 2025, diketahui bahwa jumlah keseluruhan pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (PIM) sebanyak 12 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 1 orang pegawai laki-laki yang telah mengikuti PIM II, kemudian 1 orang perempuan telah mengikuti PIM III, dan 10 orang telah mengikuti PIM IV terdiri dari 2 perempuan dan 8 laki-laki.

Berdasarkan profil SDM aparatur diatas menurut kepangkatan dan pendidikan, dapat diketahui bahwa pegawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagian besar cukup memadai, namun mengingat Dinas Pariwisata Pemuda dan

Olahraga memiliki tusi di bidang Pemasaran, bidang Pengembangan Kelembagaan dan Destinasi, dan bidang Pemuda dan Olah Raga, maka masih dibutuhkan peningkatan keterampilan khusus terkait pengembangan kepariwisataan guna meningkatkan sumber daya aparatur yang semakin handal.

Salah satu faktor yang memepengaruhi efektivitas perlengkapan urusan pariwisata pemuda dan olah raga adalah ketersediaan perlengkapan kerja. Dalam Lima tahun terakhir telah diupayakan secara terencana peningkatan rasio perlengkapan kerja dibandingkan dengan jumlah pegawai dan beban kerja melalui penambahan berbagai kebutuhan prasarana dan sarana kantor seperti gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, jaringan, dan aset tetap lainnya.

Walaupun secara keseluruhan, dukungan perlengkapan kerja kantor semakin memadai, namun untuk mendorong implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan pariwisata yang masih dalam proses pengembangan maka dibutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan kerja. Untuk itu, setiap tahun juga disusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) guna memastikan penyediaan yang efisien dan pemanfaatan secara efektif.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menempati gedung Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai namun salah satu faktor pendukung pelayanan prima dalam penyelenggaraan pelayanan adalah tersedia gedung kantor yang layak, nyaman dan strategis.

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai berasal dari APBD dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Tanah dan Gedung yang Dimiliki
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

No.	Uraian	Luas	Ket
1.	Tanah Lapangan Taman lainnya	10.320 M2	*Home stay (*Mapaddegat)
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.000 M2	Kantor Dinas Pariwisata, Jln Tuapeijat KM 9
3.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	400 M2	Maileppet (Sib.selatan)
4.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	400 M2	Katiet (sipora selatan)
5.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	400 M2	Pokai (sib.utara)
6.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	400 M2	Dusun Jati (Sipora Utara)
7.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	10.000 M2	Dususn Sibudak Oinan, Desa Saibi Samukop, Kec. Siberut Tengah
8.	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	10.000 M2	Dusun Kulukubuk, Desa Madobag, Kec. Siberut Selatan
9.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	36 M2	Dusun Buttui, Desa Madobag, Kec.Siberut Selatan
10.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	36 M2	Deas Muntei, Kec. Siberut Selatan
11.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	35 M2	Tanah untuk Pembangunan POS Pengawas Pantai Malakopa Dusun Malakopa Desa Malakopa

No.	Uraian	Luas	Ket
12.	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	36 M2	Dususn Kulukubuk, Desa Madobag, Kec, Siberut Selatan
13.	Tanah Persil Lainnya	42.900 M2	Katiet, Kec. Sipora Selatan

(sumber data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga)

Tabel. 2.6
Peralatan dan Mesin yang Dimiliki

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Alat pemeliharaan tanaman (Tangki Semprot)	10 Unit	Baik
2.	Printer Epson	2 Unit	Baik
3.	Pompa air (sanyo)	1 Unit	Baik
4.	Printer MP/MP 270	4 Unit	Baik
5.	Printer Broter / HL 2730	1 Unit	Baik
6.	Printer / MP 237	1 Unit	Baik
7.	Printer Canon	2 Unit	Baik
8.	Laptop acer	1 Unit	Baik
9.	Komputer dell	1 Unit	Baik
10.	Komputer asus	4 Unit	Baik
11.	Komputer HP	5 Unit	Baik
12.	Printer epson/ L3250	1 Unit	Baik
13.	Printer broter / HL 3070 CW	1 Unit	Baik
14.	Kamera under water (60 pro hero back komplit)	2 Unit	Baik
15.	Mesin potong rumput sthell	8 Unit	Baik
16.	AC LG 1 PK	5 Unit	Baik
17.	AC LG 2 PK	1 Unit	Baik
18.	P.C apple	1 Unit	Baik
19.	Laptop asus / vivobook	1 Unit	Baik
20.	Laptop acer aspire	1 Unit	Baik
21.	Laptop HP/ core i7	1 Unit	Baik
22.	Printer epson L3210	1 Unit	Baik
23.	Printer epson scaner GT 1500	1 Unit	Baik
24.	Komputer PC all in one (AIO HP)	2 Unit	Baik
25.	Laptop Asus	1 Unit	Baik
26.	Infocus in 2104	1 Unit	Baik
27.	Viar (motor tiga roda)	2 Unit	Baik
28.	AC panasonic 1 PK	1 Unit	Baik
29.	AC panasonic ½ PK	1 Unit	Baik
30.	Laptop asus core i5	3 Unit	Baik
31.	Laptop axioo core i5	6 Unit	Baik
32.	Motor ATV	4 Unit	Baik
33.	Mesin boat yamaha 40 PK	1 Unit	Baik
34.	Banana boat	2 Unit	Rusak Berat
35.	Speker aktif 15 inc+stand	1 Set	Baik
36.	Orgen yamaha sx 700+stand	1 Unit	Baik
37.	Stabilizer 3000 watt	1 Unit	Baik
38.	Genset honda SH 7000 DXE	1 Unit	Rusak Berat
39.	P.C asus all in one	4 Unit	Rusak Berat
40.	Mini bus toyota rush	1 Unit	Baik
41.	Lemari es	1 Unit	Baik
42.	Televisi panasonic	1 Unit	Rusak Berat
43.	Camera canon EOS7500D	3 Unit	Baik
44.	Brandkas	2 Unit	Rusak Ringan
45.	Under water camera go pro	2 Unit	Baik
46.	Alat selam	5 Unit	Baik
47.	Mesin kompresor	1 Unit	Baik

(sumber data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga)

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pagu anggaran dan realisasi APBD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga selama tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pagu anggaran APBD tahun 2020 sebesar Rp14.853.623.637, di tahun 2021 turun sebesar Rp7.967.617.889, dan naik di tahun 2022 sebesar Rp19.629.220.177, di tahun 2023 turun Rp14.435.789.612 dan di tahun 2024 naik lagi sebesar Rp16.311.342.401. Untuk lebih jelasnya Pagu anggaran dan realisasi APBD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1.	2020	14.853.623.637,00	13.462.215.944,00	90,63
2.	2021	7.967.617.889,00	7.967.617.889,00	100,00
3.	2022	19.629.220.177,00	19.629.220.177,00	100,00
4.	2023	14.435.789.612,00	13.536.584.510,00	93,77
5.	2024	16.311.342.401,00	10.849.497.071,00	88,50

(sumber data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga)

Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga yang dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah dalam PAD adalah Retribusi pelaku Surfing. Pencapaian target dan realisasi perolehan PAD tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Pemasukan PAD dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Sumber Pendapatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	
			(Rp.)	(Rp.)	(%)
1.	2020	Retribusi Wisata Surfing	2.200.000.000	1.226.800.000	55,76%
2.	2021	Retribusi Wisata Surfing	3.000.000.000	858.700.000	28,62%
3.	2022	Retribusi Wisata Surfing	3,404.000.000	6.000.000.000	126,26%
4.	2023	Retribusi Wisata Surfing	9,725.800.000	7,487.600.000	76,98%
5.	2024	Retribusi Wisata Surfing	16.655.166.214	9.897.262.616	59,50%

(sumber data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga)

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Kelompok sasaran layanan merupakan pihak atau sekelompok orang yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program, kegiatan atau layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Salah satu program layanan yang sudah dibuat oleh Dinas Pariwisata yaitu Inovasi tentang *PIC, Surveyor*, Pengelola, dan HIDUP (Himpunan Data Urusan Pariwisata).

Kelompok sasaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mencakup berbagai pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan

pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan pariwisata. Berdasarkan regulasi seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;, sasaran ini dibagi menjadi beberapa kategori:

a. Wisatawan: orang yang melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata di luar tempat tinggalnya untuk rekreasi, liburan, bisnis atau kepentingan lainnya;
b. Pelaku usaha pariwisata: orang atau badan hukum yang mengelola usaha dibidang pariwisata;
c. Masyarakat lokal: penduduk yang tinggal disekitar destinasi wisata dan berperan dalam mendukung pengelolaan serta pengembangan pariwisata;
d. Investor dan mitra stategis: pihak yang menanamkan modal atau menjalin kemitraan dalam pengembangan pariwisata;
e. Komunitas dan organisasi: kelompok atau organisasi yang berperan dalam mendukung, mempromosikan, dan melestarikan pariwisata; dan
f. Media dan influenser: pihak yang berperan dalam menyebarkan informasi dan mempromosikan pariwisata.

Tabel 2.9
Karakteristik Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran	Karakteristik Umum
Wisatawan	Wisatawan domestik (masyarakat dalam negeri yang berkunjung didestinasi wisata) + Wisatawan mancanegara (turis asing yang datang ke daerah tujuan wisata).
Pelaku usaha pariwisata	Pengelola destinasi wisata (BUMDes, swasta, pemerintah) + Penyedia jasa perhotelan, restoran, transportasi wisata + Agen perjalanan, tour operator.
Masyarakat lokal	Penduduk sekitar destinasi (penerima manfaat ekonomi dan sosial dari kegiatan pariwisata) + Kelompok sadar wisata (pokdarwis) + UMKM lokal yang menyediakan produk wisata.
Investor dan mitra stategis	Investor dalam dan luar negeri + Lembaga keuangan dan perbankan + Lembaga pendukung (akademisi, konsultan pariwisata).
Komunitas dan organisasi	Komunitas pecinta alam, budaya dan seni + LSM yang bergerak di bidang lingkungan dan kebudayaan.
Media dan influenser	Media massa untuk promosi destinasi + *Content creator* pariwisata.

(sumber data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga)

2.1.5 Mitra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam Pemberian Pelayanan

Dalam ekosistem pemberian pelayanan di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak bekerja sendirian. Keberhasilan program mereka sangat bergantung pada sinergi dengan berbagai pihak yang disebut sebagai stakeholder atau mitra kerja.

Secara umum, mitra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok utama:

a. Mitra Sektor Pariwisata

   Pihak-pihak ini berperan dalam mengelola destinasi, meningkatkan kualitas layanan, dan mempromosikan potensi daerah seperti:

   1) PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia): Menjamin ketersediaan akomodasi dan standar pelayanan bagi wisatawan;
   2) HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia): Menyediakan jasa pemandu wisata profesional;
   3) ASITA *(Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies):* Menarik wisatawan melalui paket perjalanan;

4) Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata): Masyarakat lokal yang mengelola objek wisata di tingkat desa/kelurahan;
5) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD): Fokus pada strategi pemasaran dan *branding* daerah.

b. Mitra Sektor Kepemudaan
Mitra di sektor ini berfokus pada pemberdayaan, peningkatan kapasitas, dan karakter generasi muda yaitu:
1) KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia): Wadah bagi berbagai organisasi kepemudaan (OKP);
2) Karang Taruna: Mitra utama di tingkat desa untuk pembinaan sosial dan ekonomi kreatif pemuda;
3) Purna Paskibraka Indonesia (PPI): Terlibat dalam pendidikan karakter dan kepemimpinan;
4) Wirausaha Muda: Kelompok binaan untuk mendorong kemandirian ekonomi.

c. Mitra Sektor Olahraga
Fokus pada pembinaan atlet, penyelenggaraan ajang olahraga (event), dan pengelolaan fasilitas olahraga yaitu:
1) KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia): Membina cabang-cabang olahraga prestasi;
2) KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia): Mengelola olahraga tradisional dan rekreasi masyarakat;
3) NPCI (National Paralympic Committee Indonesia): Wadah bagi atlet penyandang disabilitas;
4) Pengcab (Pengurus Cabang) Olahraga: Organisasi teknis tiap cabang olahraga (seperti PSSI, PBSI, dll).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Permasalahan pelayanan di bidang pariwisata umumnya mencakup aspek kualitas layanan, infrastruktur, SDM, regulasi, hingga promosi pada Daerah adalah:

a. Kualitas pelayanan yang belum optimal
1) kurangnya standar pelayanan prima (SOP) di destinasi wisata;
2) petugas kurang ramah atau kurang profesional; dan
3) waktu respons terhadap keluhan wisatawan lambat.

b. Infrastruktur penunjang tidak memadai
1) akses jalan menuju destinasi wisata rusak atau terbatas;
2) transportasi umum menuju lokasi wisata belum terintegrasi; dan
3) fasilitas umum (toilet, tempat parkir, pusat informasi) minim dan kurang bersih.

c. Kurangnya SDM pariwisata yang kompeten
1) pemandu wisata kurang terlatih dalam bahasa asing; dan
2) kurangnya tenaga ahli untuk pengelolaan destinasi secara profesional.

d. Sistem informasi dan digitalisasi yang lemah
1) informasi destinasi kurang lengkap dan tidak update;
2) tidak semua destinasi memiliki website atau platform pemesanan *online*; dan
3) minim pemanfaatan teknologi seperti *e-ticketing*, aplikasi wisata dan peta digital.

e. Masalah keamanan dan kenyamanan
1) kurangnya petugas keamanan di destinasi wisata; dan
2) masih ada kasus penipuan dan pemalakan terhadap wisatawan.

f. Koordinasi antarinstansi lemah
1) Kurangnya sinergi dengan pihak swasta, komunitas dan masyarakat.

g. Promosi dan *branding* yang kurang maksimal
1) promosi destinasi wisata tidak konsisten;

2) belum memanfaatkan media sosial dan influenser secara optimal; dan
3) kurangnya paket wisata yang menarik dan terintegrasi.

Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, maka isu strategis yang diangkat dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 menggunakan analisis SWOT atau faktor internal dan eksternal yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

No.	Permasalahan Utama	Faktor Penyebab	Dampak Jika Tidak Diatasi	Isu Trategis
1	Kunjungan Wisatawan	Promosi Pariwisata Kurang Maksimal	Pendapatan Daerah Turun	Peningkatan Promosi dan Branding Destinasi
2	Infrastruktur Destinasi Belum Memadai	Keterbatasan Anggaran dan Koordinasi	Wisatawan Enggan Datang	Penguatan Infrastruktur Pariwisata
3	SDM Pariwisata belum Kompeten	Minim Pelatihan dan Sertifikasi	Kualitas Layanan Rendah	Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata
4	Ketergantungan pada Wisata Alam	Diversifikasi Produk Wisata Kurang	Daya Tarik Menurun di Musim Tertentu	Pengembangan Produk Wisata Kreatif dan Budaya
5	Kurangnya Sinergi dengan Pelaku Usaha	Koordinasi Antar Stakeholder Lemah	Potensi Pariwisata tidak Tergarap Penuh	Peningkatan Kolaborasi dengan Pelaku Usaha
6	Rendahnya Prestasi Pemuda di Bidang Akademik dan Non Akademik	Kurangnya Pelatihan, Lomba dan Pembinaan Intensif	Daya Saing Pemuda Menurun	Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pemuda Berprestasi
7	Kurangnya Wadah Kreatifitas dan Inovasi Pemuda	Fasilitas Terbatas dan Dukungan Pemerintah Kurang	Pemuda Sulit Manyalurkan Bakat	Peningkatan Sarana Prasarana Kreatif dan Pusat Kegiatan Pemuda

(sumber data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga)

BAB III
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai dokumen perencanaan yang memandu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Dan juga menjabarkan RPJMD dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih spesifik. Untuk itu, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memastikan pembangunan di bidang kepariwisataan berjalan sesuai rencana dan mencapai sasaran visi serta misi pembangunan Daerah. Visi pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah *Kepulauan Mentawai Maju berdaya Saing dan Sejahtera* yang dijabarkan melalui 8 Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang inklusif, responsif, dan berkualitas;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah, dan daya saing ekonomi Daerah;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur kewilayah yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi;
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh bencana;
6. Mewujudkan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelas dunia;
7. Mewujudkan masyarakat yang aman harmonis dan berkeadilan; dan
8. Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan tepercaya.

Misi yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah misi ke 6 (enam). tujuan yang ingin dicapai adalah: Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan memenuhi prinsip SWOT yakni *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman). Sasaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah:

1. Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam pembangunan Daerah; dan
2. Meningkatnya Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pariwisata Pemuda dan Olahraga beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket-
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia	Terwujudnya Pariwisata yang Berdaya Saing dan Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan		Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0,98	0,872	0,912	0,953	0,993	1,15	
			Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	1,03	1,064	1,092	1,128	1,143	1,174	
		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam pembangunan Daerah	Persentase retribusi terhadap PAD	5,73	5,75	5,80	5,85	5,90	6,50	
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,1586	0,1649	0,1712	0,1838	0,2026	0,25	
		Meningkatnya Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat	Persentase Pertumbuhan ekonomi kreatif	3%	3.2%	3.8%	4%	4.5%	5%	
		Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai lakip	B	BB	BB	BB	BB	BB	
			Jumlah inovasi yang diterapkan	3	4	5	6	7	8	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket-
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.3 Strategi Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan destinasi pariwisata;
   a. Meningkatkan daya tarik wisata melalui pengembangan infrastruktur pendukung (akses jalan, fasilitas umum, dan sanitasi);
   b. Revitalisasi objek wisata agar sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
   c. Pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal.
2. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata
   a. Digital marketing melalui media sosial website, dan platform travel online;
   b. Event promosi pariwisata (festival budaya, sport tourism, MICE); dan
   c. Kerja sama promosi dengan agen perjalanan, influencer dan maskapai penerbangan.
3. Peningkatan kualitas SDM pariwisata
   a. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk pelaku usaha pariwisata, pemandu wisata, dan pengelola dentinasi;
   b. Penguatan peran komunitas sadar wisata (pokdarwis); dan
   c. Meningkatkan kapasitas ASN Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam pengelolaan pariwisata.
4. Penguatan tata kelola dan regulasi pariwisata
   a. Penyusunan peraturan Daerah dan peraturan Bupati terkait pengelolaan pariwisata;
   b. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) di sektor pariwisata; dan
   c. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan destinasi.
5. Pengembangan produk wisata berbasis kearifan lokal
   a. Pengembangan wisata budaya dan kuliner khas Daerah;
   b. Paket wisata tematik (wisata alam, religi, dan sejarah);
   c. Mendorong ekonomi kreatif sebagai pendukung pariwisata.
6. Peningkatan investasi dan kemitraan
   a. Mendorong investasi swasta dalam pengembangan destinasi dan sarana pariwisata;
   b. Kerjasama dengan BUMDes untuk pengelolaan desa wisata; dan
   c. *Public private partnership* (PPP) untuk proyek besar pariwisata.
7. Penerapan konsep pariwisata berkelanjutan
   a. Pelestarian lingkungan hidup pada destinasi wisata;
   b. Pengelolaan *carrying capacity* untuk mencegah *overtourism*; dan
   c. Edukasi wisatawan dan pelaku usaha tentang *green tourism.*

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Penguatan Infrastruktur Daerah untuk Peningkatan Produktivitas menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Penguatan Sumber Daya Ekonomi untuk Peningkatan Produktivitas menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan transformasi ekonomi daerah	Penguatan fondasi Tranformasi untuk pembangunan berkelanjutan dan berdaya saing	Transformasi Pembangunan untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan

3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut :

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga

Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
Terwujudnya Pariwisata yang Berdaya Saing dan Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan	Penyusunan Rencana Induk Pariwisata; Pengembangan Kawasan Pariwisata Prioritas; Pengembangan Desa Wisata; Pengadaan Tanah; Penyelenggaraan even/ atratksi dan pekan budaya dan olah raga wisata secara berkelanjutan; Penyusunan Rencana Induk Ekonomi Kreatif; Pembangunan sanggar kreatif masyarakat/ desa; Sertifikasi pelaku Ekonomi Kreatif; Penerapan hospitality dan Rekomendasi Usaha Ekonomi Kreatif; . Pelatihan usaha Ekonomi kreatif; . Fasilitasi pemasaran dan promosi, kolaborasi serta jaringan Pendirian PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu).	Penyusunan regulasi pengelolaan destinasi; Revitalisasi objek wisata unggulan dan mengembangkan desa wisata berbasis budaya dan alam; Penguatan promosi digital (*website*, media sosial, *marketplace*); Penyelenggaraan event pariwisata daerah; Kerjasama dengan agen perjalanan dan influenser; Pelatihan hospitality dengan pelayanan wisata; Sertifikasi pemandu wisata dan pengelola destinasi; Pembentukan dan penguatan pokdarwis; Pengembangan wisata tematik (kuliner, Sejarah, religi); . Fasilitasi ekonomi kreatif berbasis pariwisata; . Penyusunan paket wisata minat khusu; . Pengelolaan carrying capacity destinasi; . Edukasi wisatawan tentang green tourism; . Penerapan standar kebersihan, Kesehatan, keselamatan dan lingkungan (CHSE).

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam penyusunan Renstra Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam hal ini Renstra Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, yang tertuang dalam Cascading. Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai ditentukanlah program dan kegiatan.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil *(outcome*) dan keluaran *(output)* dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Program Pemasaran Pariwisata;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan;
5. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Kegiatan tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
3. Penetapan Rencana Induk Pariwisata Di Kabupaten/Kota;
4. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;

5. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah;
6. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
7. Penyediaan Prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai Ruang Berekreasi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Instan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota;
8. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
9. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
10. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota;
11. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
14. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga;
15. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
17. Administrasi Umum Perangkat Daerah
18. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
19. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menegah perangkat daerah, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang dijabarkan dalam matrik berikut.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra DISPARPORA

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket-
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia	Terwujudnya Pariwisata yang Berdaya Saing dan Ekonomi Kreatif yang Berkelanjutan				Rasio PDRB Akomodasi Mamin		
		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dalam pembangunan Daerah			Persentase retribusi terhadap PAD		
					Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		
			Meningkatnya kinerja sektor pariwisata		Pertumbuhan retribusi sektor pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Tersedianya sarana prasarana pendukung pariwisata dan tersusunnya dokumen pengelolaan daya tarik wisata		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan KSP dan terbentuknya kelembagaan pengelola KSP		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket-
				Tersedianya fasilitas wisata yang ramah CHSE		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya TDUP (tanda daftar usaha pariwisata) yang legal dan terdaftar		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya peta zonasi pengembangan destinasi dan kawasan strategis pariwisata		Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota	
						PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				Terlaksananya promosi pariwisata di event nasional dan luar negeri serta tersedianya platform digital promosi pariwisata		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Tersedianya area ruang terbuka untuk rekreasi dan penyediaan media informasi digital di ruang publik		Penyediaan Prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai Ruang Berekreasi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Instan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	
						PROGRAM	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket-
						PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
				Terlaksananya sosialisasi atau kampanye kesadaran pemuda dan terbentuknya organisasi/ komunitas pemuda aktif		Penyadaran,Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota	
				Terlaksananya fasilitasi pembentukan/ registrasi OKP baru		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	
						PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	
				Terlaksananya sosialisasi pembinaan olahraga pendidikan dan terwujudnya kompetisi olahraga antar pelajar		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	
				Terlaksananya event kejuaraan olahraga sesuai cabang yang direncanakan		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah kab/Kota	
				Tersusunnya database organisasi olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket-
		Meningkatnya Kontribusi Usaha Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat			Rasio PDRB Ekonomi Kreatif		
			Meningkatnya kinerja sektor ekonomi kreatif		Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terampil	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
				Terlaksananya pelatihan kompetensi SDM dan tersertifikasinya kompetensi SDM pariwisata		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
				Terlaksananya pelatihan keterampilan kreatif serta pendampingan manajemen usaha dan inovasi produk		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			Persentase capaian kinerja perangkat daerah		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket-
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersadianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjngan Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjngan Urusan Pemerintahan Daerah	
					Nilai lakip		
					Jumlah inovasi yang diterapkan		
					Persentase capaian kinerja perangkat daerah		

Bidang Urusan/ Program/ outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline (2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahunan										PD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH													
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah													
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah yang disediakan	12	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	44	45	3.900.000.000	45	3.900.000.000	45	3.900.000.000	45	3.900.000.000	45	3.900.000.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40	40	550.000.000	40	700.000.000	40	700.000.000	40	700.000.000	40	700.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	10	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah paket bahan Barang	5	10	40.000.0	10	40.000.0	10	40.000.0	10	40.000.0	10	40.000.0	

Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			00		00		00		00		00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	24	100.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	132.000.000	12	132.000.000	12	132.000.000	12	132.000.000	12	132.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	5	53.522.000	5	53.522.000	5	53.522.000	5	53.522.000	5	53.522.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang di perbaiki	10	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diperbaiki	1	1	200.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA													
Pengelolaan Daya Tarik Wisata													

Kabupaten/Kota													
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksanannya pembangunan sarana dan prasarana di daya tarik wisata	1	1	200.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	11	11	250.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota													
Fasilitasi kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	terwujudnya kegiatan dalam Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	2	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	
Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota													
Fasilitasi kegiatan Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota	1	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA													
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri													

Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota													
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	5	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	
Penyediaan Prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai Ruang Berekreasi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Instan Kreatif di Daerah Kabupaten /Kota													
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri yang disediakan	10	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF													
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar													
Fasilitasi	Jumlah	20	20		20		20		20		20		

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	perorangan mengikuti Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000	
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah perorangan mengikuti pelatihan	30	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	30	250.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN													
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota													
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	10	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN													
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga													

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah event yang terselenggara	5	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	

Program prioritas adalah program yang ditetapkan pemerintah (pusat maupun daerah) sebagai program unggulan dan menjadi fokus utama pelaksanaan pembangunan dalam satu periode perencanaan karena memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Program prioritas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/ Kota	Fasilitasi kegiatan Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/ Kota	
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	
			Penyediaan Prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai Ruang Berekreasi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Instan Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kinerja sektor ekonomi kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/ kota	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	
				Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Indikotor Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Indikator	Target Tahun						Ket -
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0,98	0,872	0,912	0,953	0,993	1,15	
Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	1,03	1,064	1,092	1,128	1,143	1,174	
Persentase retribusi terhadap PAD	5,73	5,75	5,80	5,85	5,90	6,50	
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,1586	0,1649	0,1712	0,1838	0,2026	0,25	
Persentase Pertumbuhan ekonomi kreatif	3%	3.2%	3.8%	4%	4.5%	5%	
Nilai lakip	B	BB	BB	BB	BB	BB	
Jumlah inovasi yang diterapkan	3	4	5	6	7	8	

Indikator	Target Tahun						Ket -
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian IKU perangkat daerah. IKK Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini**:**

Tabel. 4.5
Indikotor Kinerja Kunci Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

No.	Indikator	Satuan	Ba seline Tahun 2025	Target Tahunan					Ket-
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	11,20	12,00	15,00	18,00	20,00	25,00	
2	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	2,25	3,05	4,35	4,65	5,02	5,46	
3	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	Persen	2,25	2,85	3,65	4,05	4,62	5,46	
4	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen	10,00	15,00	20,00	22,00	25,00	30,00	
5	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persen	10,00	15,00	20,00	22,00	25,00	30,00	
6	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	1,00	5,00	8,33	16,67	25,00	41,67	
7	Rasio Wirausaha Pemuda	Rasio	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	
8	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/ kursus/ *training* dan memperoleh sertifikat	Persen	25	35	45	65	85	90	
9	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persen	-	0,01	0,05	0,08	0,10	0,20	

BAB V
PENUTUP

Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai penjabaran strategis dari RPJMD Tahun 2025-2029. Dokumen ini memuat program, kegiatan, indikator kinerja, target, dan perkiraan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan berbasis data.

Penyusunan Renstra ini telah mempertimbangkan isu-isu strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi panduan yang jelas dan terukur bagi seluruh jajaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025-2029, serta berkontribusi signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan prioritas pembangunan Daerah di era digital.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Karena itu, RENSTRA ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja.

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 ini telah memperhatikan:

1. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
   Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk mengukur capaian kinerja.
2. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah.
   Manajemen risiko di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan proses sistematis terpadu untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko operasional, reputasi, dan keuangan dalam pencapaian sasaran program. Ini mencakup keselamatan wisata, fasilitas olahraga, dan efektivitas penggunaan anggaran untuk meminimalisir dampak negatif.
3. Tata Kelola Satu Data Indonesia di Tingkat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
   Tata kelola Satu Data Indonesia (SDI) di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan upaya strategis untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi SDI di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Demikian penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Menawai Tahun 2025-2029 yang memuat prioritas pembangunan di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah dengan maksud membuat landasan dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan sehingga diharapkan pelaksanaan prorgam pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat memberikan konstribusi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai serta dapat

mencapai Target yang telah ditetapkan pada Visi Misi Kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai beserta Stakeholder terkait berkomitmen untuk mencapai Tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam Renstra dimaksud untuk menjaga agar Realisasi Investasi dapat mendukung petumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 ini kami ucapkan terima kasih, seiring dengan hal tersebut kami juga berharap untuk kritik dan sarannya bagi kesempurnaan program ini.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI			i
DAFTAR TABEL			ii
DAFTAR GAMBAR			iii
BAB I	PENDAHULUAN		
	1.1	Latar Belakang.....	1
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan.....	2
	1.3	Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERAKAT DAERAH		
	2.1	Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah.....	6
	2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah.....	27
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
	3.1	Tujuan Renstra Sekretariat Daerah 2025 – 2029.....	36
	3.2	Sasaran Renstra Sekretariat Daerah 2025 – 2029.....	38
	3.3	Strategi Renstra Sekretariat Daerah 2025 – 2029.....	39
	3.4	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah 2025 – 2029..	40
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
	4.1	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	44
	4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	45
BAB V	PENUTUP.....		76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Aparatur Pada Sekretariat Daerah	13
Tabel. 2.2	Data Jumlah Pegawai pada Sekretariat Daerah berdasarkan Kepangkatan/golongan ASN dan PPPK Sekretariat Daerah	15
Tabel 2.3	Keadaan Alokasi Keuangan Sekretariat Daerah 2020-2024	17
Tabel 2.4	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024	18
Tabel 2.5	Rekapitulasi Sarana Prasarana Sekretariat Daerah	18
Tabel 2.6	Capaian Pelaksanaan Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 - 2024	21
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	28
Tabel. 2.8	Merumuskan Isu Strategis Sekretariat Daerah	30
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029	37
Tabel 3.2	Tujuan dan sasaran renstra Sekretariat Daerah	38
Table 3.3	Penahapan Renstra Sekeretariat Daerah	40
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029	43
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran	45
Tabel 4.2	Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah	45
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	55
Tabel 4.4	Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	69
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah	74
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	12
Gambar 2.2	PNS Menurut Pendidikan	13
Gambar 2.3	Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin	14
Gambar 2.4	Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural	14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabel, dan transparan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai memegang peran strategis sebagai unsur pembantu Kepala Daerah. Fungsi utama Sekretariat Daerah adalah sebagai motor penggerak koordinasi, fasilitasi, serta administrasi pemerintahan yang menjembatani hubungan antara Kepala Daerah, perangkat daerah, legislatif, dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan manajerial Sekretariat Daerah menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun.

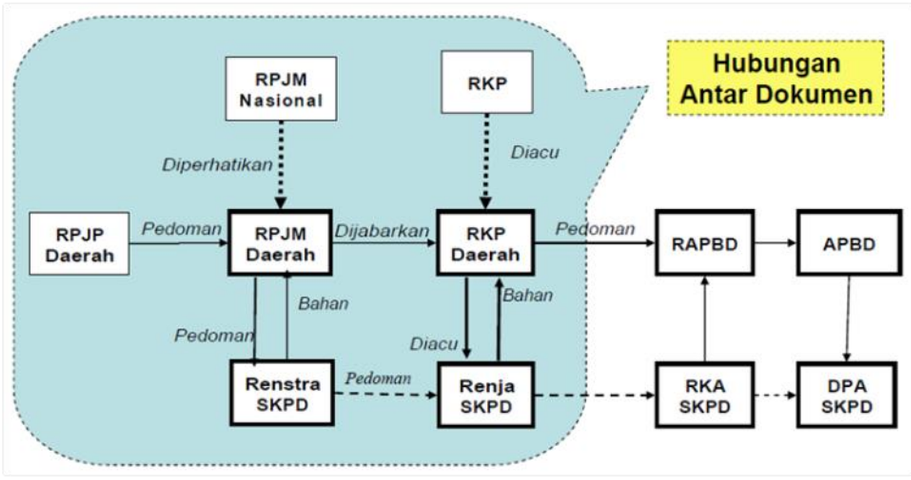
Selain berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan Renstra Sekretariat Daerah juga mempedomani Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sekretariat Daerah secara khusus menjadikan Misi ke-8 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu “Penguatan transformasi tata Kelola birokrasi yang responsif, inovatif dan terpercaya” sebagai acuan utama dalam perumusan Rencana Strategis. Misi ini kemudian diterjemahkan dalam tujuan yakni “Terwujudnya birokrasi yang prima”, dengan penekanan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 ini dilakukan secara partisipatif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Sekretariat Daerah. Proses ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya (2021–2024), termasuk capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan berbagai tantangan yang belum terselesaikan secara optimal. Refleksi atas capaian masa lalu juga menjadi catatan penting agar Renstra 2025–2029 lebih responsif terhadap tantangan dan peluang strategis di masa depan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja perangkat daerah. Penyusunan Renstra ini merupakan proses berkelanjutan dan sistematis yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya di daerah. Melalui perencanaan strategis dapat diperoleh informasi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan organisasi. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Gambar 1.1
Bagan Alir Hubungan Keterkaiatan Dokumen Perencanaan



Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029 didasari oleh kebutuhan untuk menghadirkan arah kebijakan yang terukur, terarah, dan sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Renstra ini diharapkan menjadi instrumen yang memastikan setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah berperan aktif dalam menyelaraskan program kerja dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian integral dari implementasi reformasi birokrasi yang menuntut adanya perencanaan yang adaptif terhadap tantangan eksternal, seperti dinamika sosial-politik, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perecanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 Nomor 52).

Selain dasar hukum sebagaimana dimaksud diatas, penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 juga mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050- 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah memberikan gambaran yang jelas tentang program dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah dan menjadi dokumen perencanaan Sekretariat Daerah selama 5 (lima) Tahun. Selain itu, Renstra Sekretariat Daerah juga menjadi landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 juga dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan renja dan instrumen pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan kinerja Sekretariat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah:

1. mengoperasionalkan visi, misi, dan program Kepala Daerah dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah;
2. menjamin konsistensi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan antar-perangkat daerah, sesuai dengan kerangka pembangunan jangka menengah;
3. menguatkan fungsi koordinasi, administrasi, dan fasilitasi Sekretariat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan aparatur serta pelayanan administrasi umum;
4. mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) dengan prinsip efektif, efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel; dan
5. mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan kebijakan nasional, terutama dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan, koordinasi lintas perangkat daerah, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I Pendahuluan mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Sekretariat Daerah, fungsi Renstra Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah, keterkaitan Renstra Sekretariat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Sekretariat Daerah, memuat dasar hukum dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah, juga memuat tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah serta menguraikan

pokok bahasan dalam penulisan Renstra Sekretariat Daerah dan susunan garis besar isi dokumen.
Pendahuluan terdiri atas:
1.1 Latar belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan tujuan
1.4 Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah menguraikan tentang gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah yang meliputi penguraian: Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Kelompok Sasaran Layanan; Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan; Dukungan BUMD dalam pemberian pelayanan; Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta menguraikan permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis pada Sekretariat Daerah.
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah terdiri dari:
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2025-2026).

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan Uraian Program; Uraian Kegiatan; Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif; raian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; serta Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) di Sekretariat Daerah periode Renstra 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Pada Bab Penutup, disajikan upaya pengendalian dan evaluasi implementasi Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen ini merupakan pedoman strategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah serta pelayanan administratif. Pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Sekretariat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, susunan atau struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari jabatan sebagai berikut:

Sekretariat Daerah terdiri dari asisten:

A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
   1. Bagian Pemerintahan;
   2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
   3. Bagian Hukum.

B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
   1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
   2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
   3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

C. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
   1. Bagian Organisasi;
   2. Bagian Umum; dan
   3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Secara rinci tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah

   Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

   Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
   b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
   c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
   d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

   Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan:
   a. koordinasi perumusan kebijakan daerah bidang urusan pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat;
   b. koordinasi pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah bidang urusan pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat;

c. koordinasi pelaksanaan tugas pembantuan dan pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang urusan pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat; dan
e. pelayanan administrasi pemerintahan di bidang pemerintahan umum, hukum, kesejahteraan rakyat, dan pengembangan dan Kerja Sama Daerah.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah di bidang pemeritahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampang yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pecapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pemerintahan:

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumasan kebijak daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah.

Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewiliayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah;
c. penyiapan bahan pnegoordinasaan pelaksanaan tugas perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah;
e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, dan pelayanan administrasi pemerintahan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, kerjasama Daerah, dokumentasi hukum dan informasi.

Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Dearah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi Pembangunan, dan pengadaan barang/jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa;

c. penyusunan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi Pembangunan, dan pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perekonomian,dan sumber daya alam.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.
Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasiaan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan
e. pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
b. penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah di bidang organisasi
d. penyiapan pelaksanaan pemantauan bidang dan evaluasi di umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang organisasi;
f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi Daerah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerahdi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan

analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Umum mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang tata usaha pimpinan, star ahli dan kepegawaian, keuangan, rurnah tangga dan perlengkapan; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di hidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

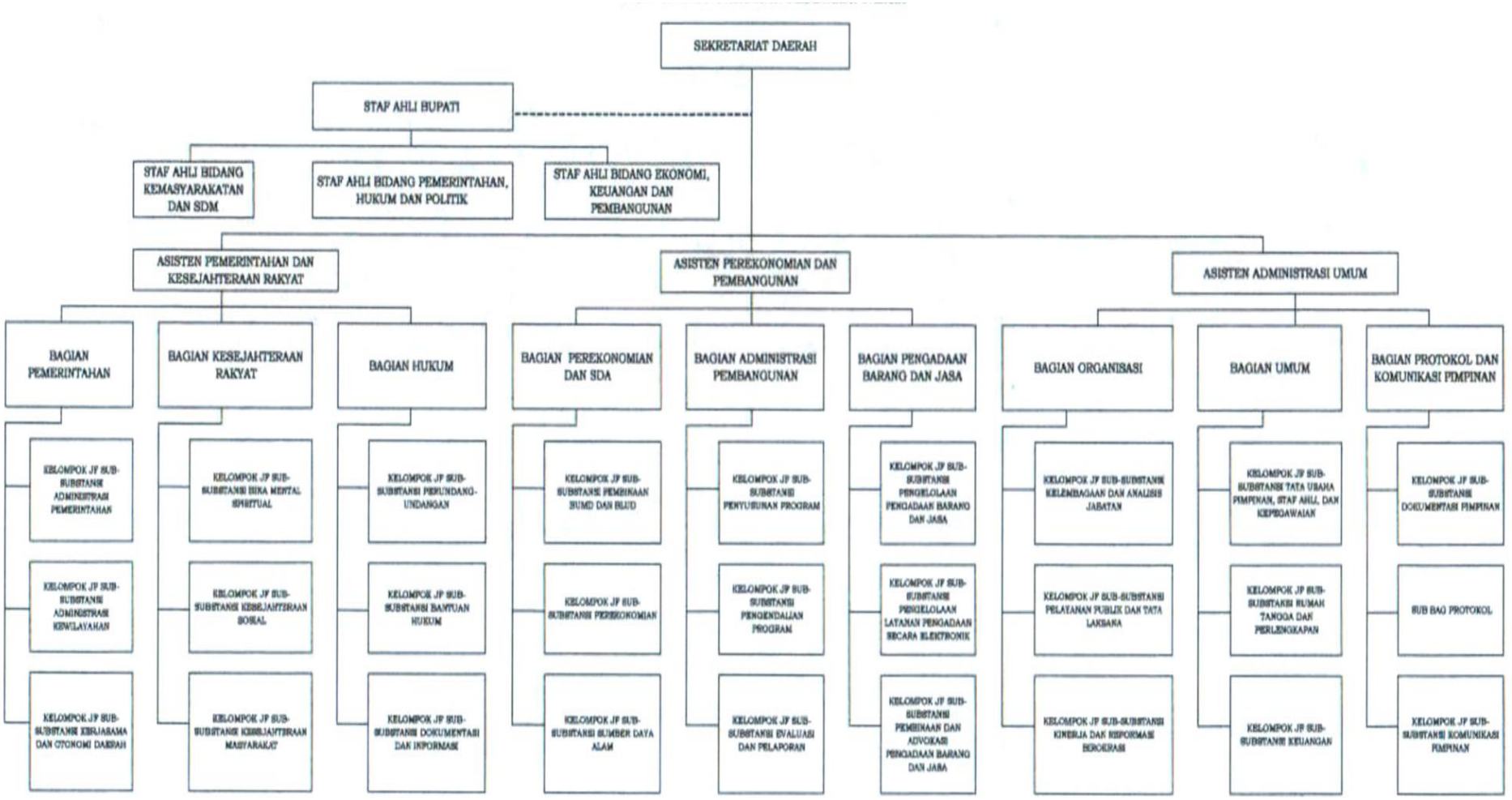
Dalam struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, terdapat kelompok jabatan fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Jabatan fungsional merupakan jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdapat pada Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Pemerintahan
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Kewilayahan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerja Sama dan Otonomi Daerah
4. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Mental Spritual
5. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Sosial
6. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Masyarakat
7. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perundang-undangan
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bantuan Hukum
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Dokumentasi dan Informasi
10. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyusunan Program
11. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Program
12. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan
13. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
14. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
15. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan and Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
16. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
17. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
18. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi
19. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
20. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rumah Tangga dan Perlengkapan
21. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan
22. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Dokumentasi Pimpinan
23. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Komunikasi Pimpinan

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah



Sumber : Sekretariat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Upaya mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah kurun waktu 2025-2029 yang akan datang tentu didukung oleh sumber daya aparatur yang dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Sumber daya manusia menjadi salah satu input yang paling berpengaruh dalam mengelola organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 87 orang, terdiri dari laki-laki 50 orang, dan perempuan 37 orang. Berdasarkan jabatan jumlah pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

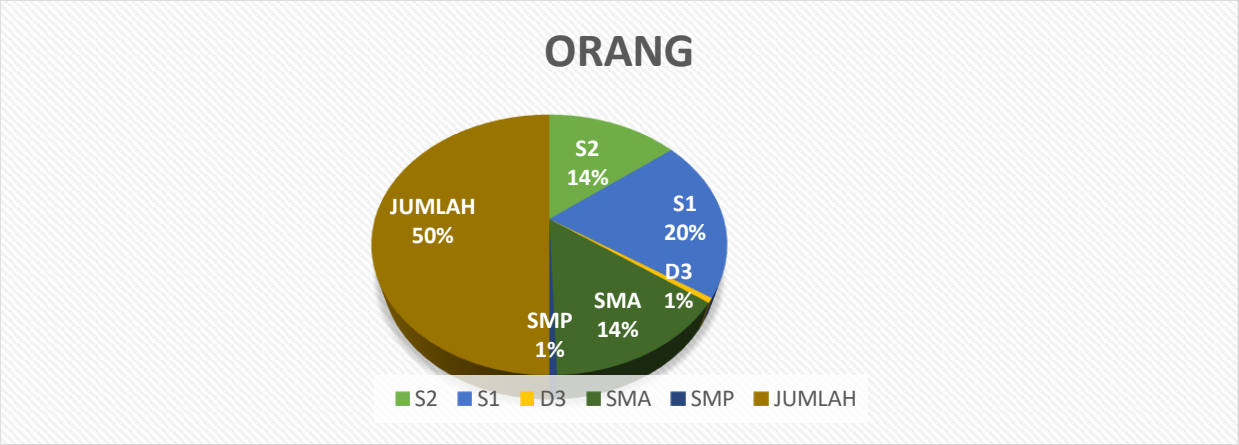
Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Pada Sekretariat Daerah

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	wanita	
1	Eselon II	7	-	7
2	Eselon III	3	5	9
3	Eselon IV	-	1	1
4	Jabatan Fungsional Tertentu	14	12	26
5	Pelaksana	26	19	45
	Total	50	37	87

Sumber : Sekretariat Daerah

Rincian pegawai berdasarkan pendidikan didominasi oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 14% atau 25 Orang, S1 sebanyak 39% atau 35 orang, D3 sebanyak 1 Orang disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 37% atau sebanyak 25 orang, SMP sebanyak 3% atau 1 Orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

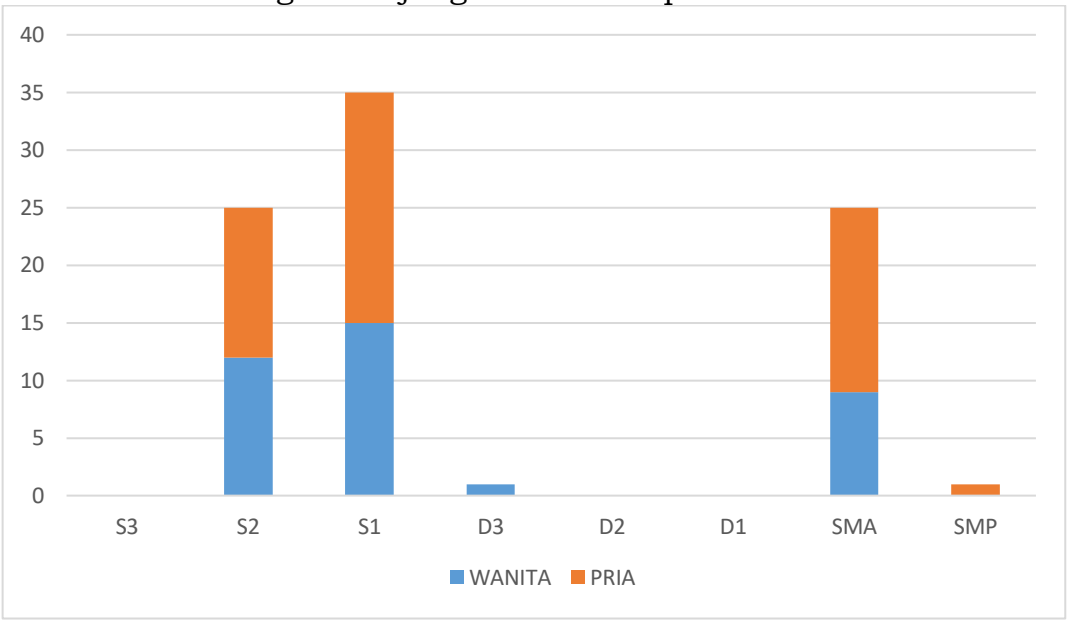
Gambar 2.2
PNS Menurut Pendidikan



Sumber : Sekretariat Daerah

Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari S3 sampai SMP, terdapat kesenjangan gender pada jenjang SLTA .

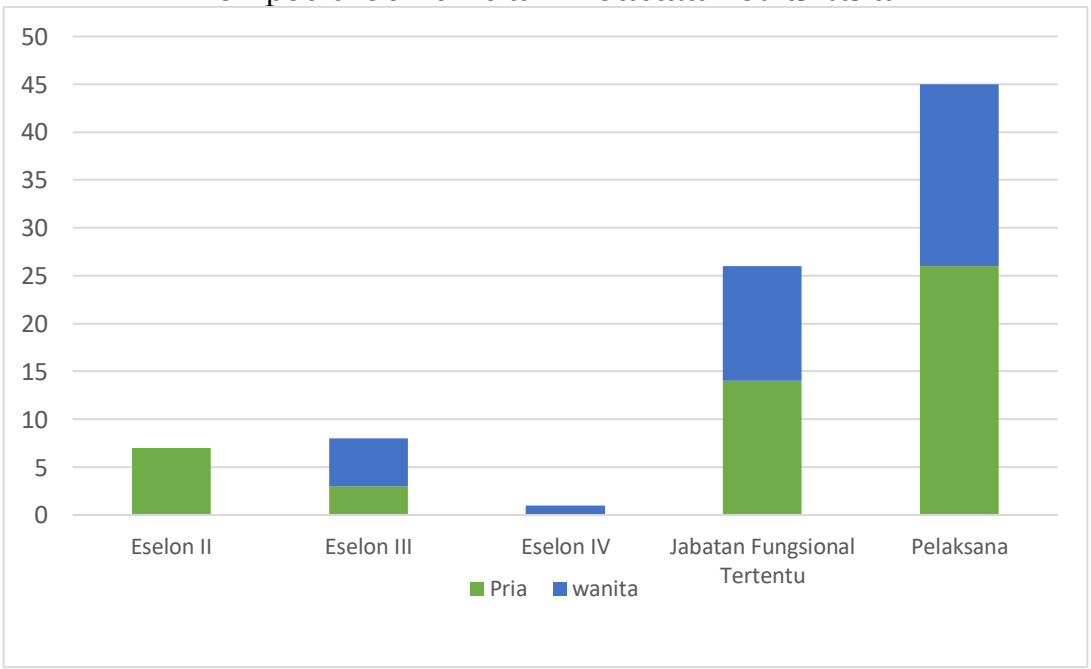
Gambar 2.3
Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin



Sumber : Sekretariat Daerah

Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan.

Gambar 2.4
Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural



Sumber : Sekretariat Daerah

Tabel. 2.2
Data Jumlah Pegawai pada Sekretariat Daerah berdasarkan Kepangkatan/golongan ASN dan PPPK Sekretariat Daerah

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Madya, IV/d	1
2.	Pembina Utama Muda, IV/c	4
3.	Pembina Tk.I, IV/b	4
4.	Pembina, IV/a	5
5.	Penata Tk.I, III/d	17
6.	Penata, III/c	9
7.	Penata Muda Tk.I, III/b	19
8.	Penata Muda, III/a	11
9.	Pengatur Tk.I, II/d	10
10.	Pengatur, II/c	4
11.	Pengatur Muda Tk.I, II/b	2
12.	Pengatur Muda, II/a	1
13.	Juru Tk.I, I/d	1
	Jumlah PNS	88
	GOL PPPK	JUMLAH
1.	IX	8
2.	VII	3
3.	V	6
4.	III	1
	Jumlah PPPK	18

Sumber : Sekretariat Daerah

Berdasarkan data kepangkatan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat Daerah saat ini sebanyak 88 orang, dengan komposisi yang relatif seimbang antara pejabat struktural dan fungsional. Dari jumlah tersebut, terlihat adanya distribusi yang cukup merata pada golongan III (56 orang) yang merupakan kelompok pelaksana teknis utama, serta dukungan dari golongan IV (14 orang) yang berfungsi sebagai pejabat pengawas, administrator, maupun pejabat pimpinan tinggi. Selain itu, masih terdapat ASN golongan II dan I (18 orang) yang berperan dalam mendukung tugas-tugas administratif dasar.

Komposisi ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah memiliki kekuatan sumber daya manusia yang cukup baik, dengan dominasi pegawai di jenjang penata muda sampai penata tingkat I (golongan III) yang menjadi tulang punggung pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Kehadiran pegawai golongan IV juga menjamin adanya peran pengawasan, pembinaan, serta pengambilan keputusan strategis di tingkat pimpinan.

Sementara itu, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 18 orang, dengan distribusi pada golongan IX, VII, V, dan III. Keberadaan PPPK ini turut memperkuat kinerja Sekretariat Daerah, khususnya dalam bidang-bidang yang membutuhkan tenaga teknis, sehingga mampu menutupi potensi kekurangan di level operasional.

Dengan komposisi tersebut, secara umum jumlah dan jenjang kepangkatan ASN maupun PPPK di Sekretariat Daerah sudah memadai untuk mendukung kinerja organisasi. Namun, tetap diperlukan pengembangan kapasitas (capacity building) serta pemerataan beban kerja

agar tidak terjadi penumpukan tugas pada golongan tertentu, khususnya di level pelaksana teknis (golongan III).

2.1.2.2 Keuangan

Untuk menunjang tugas dan fungsi sekretriat daerah perlu dukungan anggaran yang memadai, selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) alokasi anggaran sekretariat daerah mengalami peningkatan disebabkan oleh meningkatnya beban kerja, tuntutan pelayanan administrasi Pemerintahan yang semakin kompleks, serta kebutuhan operasional yang semakin besar. Seiring dengan dinamika pembangunan dan tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi, Sekretariat Daerah dituntut untuk menjadi pusat koordinasi pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan efisien.

Peningkatan alokasi anggaran tersebut juga didorong oleh pelaksanaan berbagai kebijakan strategis seperti digitalisasi administrasi pemerintahan, penguatan sistem tata kelola kelembagaan, serta optimalisasi fungsi koordinasi antar perangkat daerah. Selain itu, kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas kepala daerah, termasuk kegiatan strategis lintas sektor, juga berkontribusi terhadap kenaikan anggaran.

Tidak hanya untuk belanja operasional, peningkatan anggaran juga mencakup belanja modal dalam rangka pengembangan infrastruktur perkantoran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja yang memadai. Dengan demikian, alokasi anggaran yang meningkat diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Meskipun demikian, tantangan dalam pengelolaan keuangan masih ada, antara lain keterbatasan fiscal daerah, kebutuhan efesiensi belanja, serta penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah. Oleh karna itu Sekretariat daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan anggaran yang efektif, efesiern, transparan dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Ke depan, dalam periode Renstra 2025 -2029 dukungan anggaran diarahkan tidak hanya untuk menjaga keberlangsungan fungsi pelayanan administrasi, tetapi juga untuk mendukung transformasi digital birokrasi, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta penguatan koodinasi lintas sector. Dengan demikian, secretariat Daerah diaharapkan mampu menjadi pusat layanan administrasi pemerintahan yang adaptif, responsive dan professional.

Tabel 2.3
Keadaan Alokasi Keuangan Sekretariat Daerah 2020-2024

Uraian	Anggaran (Juta Rupiah)					Realisasi Anggaran (Juta Rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja	47.003.516.451	43.306.457.367	52.252.631.878	53.684.789.261	46.639.586.388	44.437.106.776	40.939.226.269	50.490.371.917	51.524.260.006	44.007.364.755	93,94	94,53	96,62	95,97	94,35	242,886,981,345	231,398,329,723
Belanja Operasi	44.261.785.951	42.850.768.928	50.590.019.049	50.528.876.471	45.209.410.388	41.437.106.776	40.503.922.407	48.915.101.365	48.379.251.126	42.599.568.244	93,61	94,52	96,68	95,74	94,22	46,688,172,157	44,366,989,984
Belanja Modal	2.741.730.500	455.688.439	1.662.612.829	3.155.912.790	1.430.176.000	2.719.565.835	435.303.862	1.575.270.552	3.145.008.880	1.407.796.511	99,19	95,52	94,74	99,65	98,43	1,889,224,112	1,856,589,128

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah tentunya didukung oleh ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun rencana. Pada tahun 2024 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja	46.639.586.388	44.007.364.755	94,36
2.	▪ Belanja Operasi	45.209.410.388	42.599.586.244	94,23
3.	▪ Belanja Modal	1.430.176.000	1.407.796.511	95,44

Anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2024 untuk belanja sebesar Rp. 46.639.586.388 yang terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp. 45.209.410.388 dan belanja Modal sebesar Rp. 1.430.176.000. Dapat direalisasi untuk belanja Operasi sebesar Rp. 42.599.586.244 (94,23%) yang terdiri dari belanja Modal sebesar Rp. 1.407.796.511 (95,44).

2.1.2.3 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang tugas dan fungsi pelayanan sekretariat daerah diperlukan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan di Sekretariat Daerah.

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sarana Prasarana Sekretariat Daerah

a. Tanah dan Bangunan

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
TANAH DAN BANGUNAN			
1.	Tanah Rumah dinas Sekda	1,270	Bersertifikat
2.	Tanah Rumah dinas Bupati KM 4	870	Bersertifikat
3.	Rumah dinas Wa. Bupati KM 4	880	Bersertifikat
4.	Tanah Rumah dinas Pemkab KM 4 (1)	1,630	Bersertifikat
5.	Tanah Rumah dinas Pemkab KM 4 (2)	1,550	Bersertifikat
6.	Tanah Pasar Ibu Kabupaten	9,990	Bersertifikat
7.	Tanah Ktr Bupati	4,930	Bersertifikat
8.	Tanah Ktr Penghubung Pdg	390	Bersertifikat
9.	Tanah Telkom Tpjt	2,470	Bersertifikat
10.	Tanah Ktr PLN Tpjt	7,280	Bersertifikat
11.	Tanah Kantor Bank Nagari Tpjt	520	Bersertifikat
12.	Tanah Kantor Radio Sasaraina	867	Bersertifikat
13.	Air Bersih	191	Bersertifikat
14.	Tanah Sekretariat Perkantoran Pemda	2,210	Bersertifikat
15.	Tanah Kuburan SP III	10,000	Bersertifikat
16.	Tanah Kosong Simabuk	100,000	Bersertifikat
17.	Tanah Perkebunan Muslim	8,785	Bersertifikat
18.	Tempat Pembuangan Akhir Sampah	51,400	Bersertifikat
19.	Tanah Pendopo	15,000	Belum Bersertifikat

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
20.	Tanah Telkom Sioban	250	Belum Bersertifikat
21.	Tanah Kantor Ex BKKBN	2,500	Belum Bersertifikat
22.	Tanah Pemda	909,363	Belum Bersertifikat
KENDARAAN DINAS			
1.	Mobil Dump Truk/Tangki air	1 Unit	Baik
2.	Mobil Truck	1 Unit	Baik
3.	Mobil Roda 4	26 Unit	Baik
4.	Kendaraan bermotor roda 3	3 Unit	Baik
5.	Kendaraan bermotor rodda 2	17 Unit	Baik
MOBILER DAN PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR			
1.	Kursi Tamu	100 Unit	Baik
2.	Kursi Chaiman	18 Unit	Baik
3.	Meja Kerja	140 Unit	Baik
4.	Komputer	60 Unit	Baik
5.	Laptop dan Note book	50 Unit	Baik
6.	Printer	52 Unit	Baik
7.	Infocus	16 Unit	Baik

2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2020-2024 menurut indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan/atau indikator lainnya.

Secara umum, capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada periode Renstra Tahun 2020–2024 menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, mayoritas indikator pelayanan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, baik dalam aspek koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penyelenggaraan administrasi pemerintahan, maupun dukungan terhadap pelaksanaan tugas kepala daerah. Hal ini tercermin dari meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran, kelancaran penyelenggaraan rapat koordinasi lintas sektor, serta ketepatan waktu penyampaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi teknis tertentu, keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem administrasi dan pelayanan, serta faktor eksternal seperti dinamika kebijakan pusat dan kondisi geografis wilayah kepulauan yang turut memengaruhi efektivitas pelayanan.

Upaya perbaikan terus dilakukan melalui penguatan kapasitas aparatur, penyederhanaan proses bisnis pelayanan administrasi, serta pemanfaatan sistem informasi manajemen. Selain itu, peningkatan koordinasi lintas OPD menjadi prioritas penting untuk mempercepat

pengambilan keputusan strategis dan memperkuat sinkronisasi program pembangunan daerah.

Dengan demikian, kinerja pelayanan Sekretariat Daerah pada periode 2020–2024 dapat dikatakan telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif. Hasil evaluasi kinerja ini sekaligus menjadi landasan penting dalam penyusunan Renstra 2025–2029, khususnya dalam penetapan sasaran dan strategi yang lebih terukur serta adaptif terhadap tantangan pembangunan ke depan.

Tabel 2.6

Capaian Pelaksanaan Urusan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 - 2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Nilai IKM > 60	70	75	80			-	78,64	81,25	-	93,84	-	104,8	-	-	-
2	Persentase OPD menerapkan SPM	70	75	80	80	80	-	75	70	95	-	-	100	87,5	118,7	-
3	Nilai EKPPD	2,80	2,90	3,00	2,6	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
4	Penyusunan APBD tepat Waktu	30 November	30 November	30 November			30 Novembe	30 November	30 November			100	100	100	-	-
5	Jumlah Kasus pembangunan daerah	2	1	1			2	3	1			100	300	100	-	-
6	Jumlah kasus intoleran (SARA)	0	0	0			0	0	0		5	-	-	-	-	-
7	Persentase MoU yang ditindaklanjuti	40	50	60	80	30	40	50	11	75	-	100	100	18,3	93,75	-
8	Realisasi CSR	2 M	3 M	4 M		-	2 M	-	-		88,42	100	-	-	-	-
9	Nilai Standar Pelayanan Publik				B	B				C	9/9	-	-	-		
10	Tingkat Kematangan UKPBJ				9/9	9/9				9/9	95				9/9	95

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
11	Persentase OPD yang Mengikuti ULP tepat waktu				90	99				85	90	-	-	-	94,4	90,9
12	Penyelesaian Perkara hukum Pemda baik Litigasi maupun Non Litigasi				88	88				90	0	-	-	-	102,2	0
13	Persentase Jumlah Produk Hukum yang digugat atau bermasalah				2	2				0	93,84				0	4,69
14	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Mendukung Program Proiritas Daerah				100	100				100	100	-	-	-	100	100
15	Cakupan Desa yang Terakses Listrik	-	-	-	90.70	93,02				100	128	-	-	-	110,2	137,6
16	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan,dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah				100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
17	Persentase MOU yang Ditindaklanjuti				20					30		-	104,8	-	-	-

Selama periode 2020 hingga 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Capaian kinerja ini menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam beberapa indikator, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
   Target IKM pada periode ini meningkat dari 70 pada tahun 2020 menjadi 80 pada tahun 2022. Realisasi menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu sebesar 78,64 pada tahun 2021 dan 81,25 pada tahun 2022, yang berarti target tahun 2022 berhasil terlampaui. Namun, data capaian untuk tahun 2020, 2023, dan 2024 tidak tersedia.
2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh OPD
   Target capaian meningkat dari 70% pada 2020 menjadi 80% pada 2024. Realisasi sempat turun menjadi 70% pada 2022 namun meningkat tajam menjadi 95% pada 2023. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam penerapan SPM meskipun ada fluktuasi capaian.
3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
   Target nilai EKPPD ditetapkan naik secara bertahap dari 2,80 menjadi 3,00 hingga 2022. Namun, realisasi untuk tahun-tahun tersebut tidak tersedia. Pada 2023 dan 2024, realisasi nilai tercatat 2,6 dan 2,7, masih di bawah target.
4. Ketepatan Waktu Penyusunan APBD
   Selama lima tahun terakhir, target waktu penyusunan APBD tetap pada tanggal 30 November. Capaian menunjukkan bahwa target ini berhasil dipenuhi secara konsisten dari 2020 hingga 2024.
5. Jumlah Kasus Pembangunan Daerah
   Jumlah kasus ditargetkan terus ditekan dari 2 kasus menjadi 1 kasus. Realisasi menunjukkan adanya fluktuasi, yakni 2 kasus pada 2020 dan meningkat menjadi 3 kasus di tahun 2021, namun kembali turun menjadi 1 kasus pada 2022. Data untuk tahun-tahun berikutnya tidak tersedia.
6. Kasus Intoleransi (SARA)
   Target nihil kasus intoleransi berhasil dicapai dari 2020 hingga 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan dengan tercatat 5 kasus, yang menjadi perhatian serius dalam isu kerukunan sosial.
7. Persentase MoU yang Ditindaklanjuti
   Capaian menunjukkan peningkatan dari 30% pada 2020 menjadi 75% pada 2023. Meskipun sempat menurun menjadi 11% pada 2023, tren secara umum cukup progresif.
8. Realisasi *Corporate Social Responsibility* (CSR)
   Target realisasi CSR meningkat dari Rp2 miliar (2020) menjadi Rp4 miliar (2022). Namun, data realisasi sangat terbatas, hanya tercatat Rp2 miliar pada tahun 2021. Keterbatasan data ini menunjukkan perlunya sistem pelaporan yang lebih baik.

9. Nilai Standar Pelayanan Publik
   Pada tahun 2022 dan 2023, nilai yang diperoleh adalah B dan C, yang menunjukkan adanya penurunan mutu layanan publik. Namun, diindikasikan bahwa 9 dari 9 aspek telah dinilai.
10. Tingkat Kematangan UKPBJ
    Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa menunjukkan capaian maksimal dengan nilai 9/9 selama dua tahun berturut-turut (2022–2023), dengan rasio capaian sebesar 95%.
11. Kepatuhan OPD terhadap Proses ULP
    Persentase OPD yang mengikuti proses Unit Layanan Pengadaan tepat waktu mencapai 90% pada 2022 dan meningkat menjadi 99% pada 2023, menunjukkan koordinasi antar-OPD yang semakin baik.
12. Penyelesaian Perkara Hukum
    Capaian penyelesaian perkara hukum menunjukkan nilai yang stagnan di angka 88% pada 2022–2023, tetapi menurun drastis menjadi 0% pada 2024. Ini merupakan kemunduran signifikan dalam aspek hukum dan harus segera ditangani.
13. Produk Hukum Bermasalah
    Jumlah produk hukum yang bermasalah ditargetkan sebanyak 2% dan berhasil dijaga pada angka tersebut hingga 2023. Rasio capaian tahun 2024 sebesar 93,84%, menunjukkan efektivitas pengawasan produk hukum.
14. Kebijakan yang Mendukung Program Prioritas Daerah
    Tingkat dukungan kebijakan terhadap program prioritas daerah tercapai 100% dari 2022 hingga 2024, mencerminkan keselarasan kebijakan internal dengan rencana pembangunan daerah.
15. Cakupan Desa Terakses Listrik
    Capaian elektrifikasi desa meningkat dari 90,70% pada 2022 menjadi 93,02% pada 2023, dengan rasio capaian yang tinggi (128%), menunjukkan progres signifikan dalam pembangunan infrastruktur dasar.
16. Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
    Kepatuhan terhadap penyusunan perencanaan dan pelaporan mencapai 100% secara konsisten dari 2022 hingga 2024, mencerminkan tingkat disiplin administratif yang tinggi.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah dengan kelompok sasaran layanan antara lain:

1. Pemerintah Pusat
   Sekretariat Daerah menjadi penghubung antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga pusat, termasuk pelaporan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan pusat di daerah.

2. Perangkat Daerah
   Sekretariat Daerah berperan dalam koordinasi antar perangkat daerah (Dinas, Badan, dan bagian lainnya) untuk sinkronisasi program dan kebijakan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
   Sebagai mitra kepala daerah, DPRD dilayani Sekretariat Daerah dalam penyediaan dokumen, fasilitasi rapat, penyusunan peraturan daerah, dan koordinasi pembahasan APBD.
4. Pemerintah Provinsi
   Untuk kabupaten/kota, Sekretariat Daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat lintas wilayah atau skala besar.
5. Instansi Vertikal
   Termasuk kantor kementerian atau lembaga nasional yang ada di daerah (misalnya: Polres, Kemenag, BPS, Kejaksaan dan intansi vertikal lainnya). Sekretariat Daerah menjalin koordinasi dalam hal pelaksanaan program nasional di daerah
6. Masyarakat
   Sebagai penerima manfaat utama dari layanan pemerintahan. Sekretariat Daerah mengelola pengaduan masyarakat, memberikan layanan informasi, dan memastikan keterbukaan informasi public.
7. Organisasi Kemsyarakatan (Ormas)
   Sekretariat Daerah melayani ormas melalui fasilitasi kerja sama, izin kegiatan, pembinaan, hingga pendanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Lembaga Keagamaan
   Dalam hal pembinaan kehidupan beragama, dukungan kegiatan keagamaan, serta kerja sama penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan.
9. Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah
   Sekretariat Daerah melalui bagian pengadaan atau koordinasi membantu proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan perangkat daerah
10. Pemerintah Desa
    Dalam hal pembinaan administrasi, keuangan, dan koordinasi kebijakan pembangunan desa.
11. BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
    Untuk menjalin kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, CSR, serta pelayanan publik bersama
12. BUMD & BLUD
    BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) menerima fasilitasi kebijakan, pengawasan administratif, serta koordinasi penyelenggaraan layanan publik.

13. Media
    Sebagai mitra komunikasi publik, media dilibatkan untuk penyebaran informasi, klarifikasi kebijakan, dan peliputan kegiatan pemerintah daerah.
14. Lembaga Pendidikan & Perguruan Tinggi
    Untuk kerja sama riset, pengembangan SDM, magang, pelatihan, dan edukasi Masyarakat.
15. Lembaga Penelitian
    Dalam hal kerja sama kajian kebijakan, inovasi daerah, dan riset Pembangunan.
16. Stakeholder Lainnya
    Termasuk NGO, LSM, mitra pembangunan internasional, asosiasi profesi, komunitas, dan pihak lain yang relevan dengan kebijakan dan program pemerintah daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Starategis Sekretariat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah serta stakeholder lainnya dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi pemerintahan umum;
2. Belum optimalnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial;
3. Belum optimalnya pelayanan fasilitasi penyusunan produk hukum dan bantuan hukum;
4. Belum optimalnya pelayanan administrasi pembangunan
5. Belum optimalnya tata kelola pengadaan barang dan jasa;
6. Belum optimalnya perumusan kebijakan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam;
7. Belum optimalnya penataan organisasi;
8. Belum optimalnya administrasi pelayanan umum; dan
9. Belum optimalnya layanan keprotokolan dan dokumentasi serta publikasi pimpinan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah terdiri dari faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah. Faktor internal yang mempengaruhi antara lain:

1. Jumlah aparatur di beberapa bagian belum memenuhi kebutuhan organisasi;
2. Kapasitas aparatur belum seluruhnya memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi;
3. Pola pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah yang belum berorientasikan pada peningkatan kinerja dalam organisasi;

4. Masih kurangnya koordinasi internal sekretariat daerah dalam mencapai tujuan organisasi;
5. Kurangnya disiplin aparatur dalam pelaksanaan tugas;
6. Belum adanya penerapan reward and punishment bagi aparatur dalam organisasi.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah meliputi:

1. Adanya dampak penerapan kebijakan efisiensi keuangan negara berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD;
2. Belum optimalnya perencanaan program dan anggaran kegiatan organisasi.
3. Penempatan aparatur belum sesuai dengan kebutuhan organisasi;
4. Distribusi penempatan aparatur yang belum berimbang;
5. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.
6. Minimnya dukungan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi; dan
7. Minimnya dukungan sarana prasarana kerja.

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Belum optimalnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Belum optimalnya kualitas perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat
			Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kebijakan di bidang pemerintahan dan kerja sama Daerah
			Belum optimalnya kualitas pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan koordinasi hukum
		Belum optimalnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Belum optimalnya kualitas perumusan kebijakan dan pengadministrasian pembangunan daerah
			Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kebijakan Pengadaan Barang dan jasa
			Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam
		Belum optimalnya kualitas kebijakan dan tata kelola pelayanan publik	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kebijakan bidang penataan organisasi
			Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kebijakan di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi pimpinan
			Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kebijakan bidang pelayanan umum

2.2.2 Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan gambaran pelayanan Sekretariat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dibagi menjadi 3 (tiga) isu utama, yaitu:

1. Belum optimalnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
   a. kurangnya kepatuhan terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan;
   b. belum optimalnya penyelenggaraan bantuan hukum serta peningkatan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
   c. belum Optimalnya Pengelolaan Bantuan Beasiswa untuk Masyarakat dan Bantuan Rumah Ibadah serta Lembaga Keagamaan;
   d. kurangnya fasilitas kegiatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan;
   e. proses administrasi di Sekretariat Daerah yang sering terlambat karena banyaknya tahapan verifikasi dan disposisi;
   f. dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) tidak selalu dijadikan sebagai acuan dalam pemberian pelayanan;
2. Belum optimalnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan:
   a. belum optimalnya tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa;
   b. belum optimalnya tata kelola administrasi pembangunan;
   c. belum optimalnya tata kelola administrasi perekonomian dan Sumber Daya Alam;
3. Belum optimalnya kualitas tata kelola dan penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik:
   a. kurangnya fasilitas produk Pelayanan kedinasan;
   b. masih adanya perbedaan pemahaman keprotokolan;
   c. pengambilan keputusan oleh hierarki yang kaku
   d. informasi layanan publik (terkait kebijakan anggaran, atau program prioritas) belum mudah diakses oleh masyarakat
   e. mekanisme pengaduan masyarakat atau partisipasi publik masih terbatas
   f. belum optimalnya kepatuhan standar pelayanan publik

Tabel. 2.8
Merumuskan Isu Strategis Sekretariat Daerah

Potensi Daerah Yang menjadi Kewenangan Sekretariat Daerah	Permasalahan Sekretariat Daerah	Isu KLHS Yang relevan dengan Sekretariat Daerah	Isu Lingkungan dinamis yang relevan dengan Sekretariat Daerah			Isu Strategis Sekretariat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Potensi Pariwisata 2. Potensi Pertanian dan Perkebunan 3. Kebijakan yang berpihak pada masyarakat.	1. Belum optimalnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat 2. Belum optimalnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan 3. Belum optimalnya kualitas kebijakan dan tata kelola pelayanan publik	1. Rendahnya daya saing daerah 2. Hukum dan tata kelola Pemerintahan 3. Kemiskinan	Faktor eksternal dunia yang bisa berdampak pada OPD, seperti krisis ekonomi global dimana Indonesia meluncurkan paket stimulus US$1,5 miliar untuk menstabilkan ekonomi di tengah perlambatan global dan ketegangan perdagangan. Termasuk subsidi transportasi, bantuan upah, dan bantuan sosial untuk kelompok rentan.	Faktor kebijakan dan kondisi dalam negeri, seperti: • Stabilitas ekonomi dan inflasi Bank Indonesia dan pemerintah menerapkan strategi “burden sharing”: BI meningkatkan bunga deposito pemerintah untuk membantu pembiayaan program seperti perumahan terjangkau dan koperasi desa Situasi ekonomi tetap kuat meski terjadi unjuk rasa politik. Pemerintah menilai fundamental ekonomi solid, dan merilis paket insentif untuk menjaga pertumbuhan sosial dan investasi. Ekonomi Indonesia tumbuh melambat, dengan pertumbuhan kuartal I/2025 sebesar 4,87%—pertumbuhan terendah sejak pertengahan 2021—didorong oleh ketegangan perdagangan global • Reformasi birokrasi Reformasi birokrasi di Indonesia terus menunjukkan hasil positif. Pemerintah telah menyederhanakan lebih dari	Kondisi di daerah itu sendiri • Tingkat kemiskinan daerah • Infrastruktur yang belum memadai - jalan dan jembatan rusak parah - kurangnya aksesibilitas dan mobilitas - infrastruktur pulau belum merata - pelabuhan dan dermaga minim - tantangan logistik dan pendukung resiliensi - upaya rehabilitasi dan infrastruktur pasca bencana - bandara Mentawai diperbarui • SDM lokal - tingkat pendidikan dan partisipasi - tantangan geografis dan kualitas lembaga pendidikan - inisiatif pemerintah daerah untuk meningkatkan SDM	1. Belum optimalnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat a. kurangnya kepatuhan terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan; b. belum optimalnya penyelenggaraan bantuan hukum serta peningkatan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat; c. belum optimalnya pengelolaan bantuan beasiswa untuk masyarakat dan bantuan rumah ibadah serta lembaga keagamaan; d. kurangnya fasilitas kegiatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan; e. proses administrasi di Sekretariat Daerah yang sering terlambat karena banyaknya tahapan verifikasi dan disposisi; f. dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) tidak selalu dijadikan sebagai acuan dalam pemberian pelayanan; 2. Belum optimalnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan: a. belum optimalnya tata kelola pengadaan barang dan jasa; b. belum optimalnya tata kelola administrasi pembangunan; c. belum optimalnya tata kelola administrasi perekonomian dan sumber daya alam; 3. Belum optimalnya kualitas tata kelola dan penyelenggaraan kebijakan pelayanan publik: a. kurangnya fasilitas produk pelayanan kedinasan; b. masih adanya perbedaan pemahaman keprotokolan; c. pengambilan keputusan oleh hierarki yang

Potensi Daerah Yang menjadi Kewenangan Sekretariat Daerah	Permasalahan Sekretariat Daerah	Isu KLHS Yang relevan dengan Sekretariat Daerah	Isu Lingkungan dinamis yang relevan dengan Sekretariat Daerah			Isu Strategis Sekretariat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				55.000-unit organisasi, meningkatkan indeks RB di berbagai level pemerintahan, dan mendorong layanan berbasis digital	- fokus pembangunan SDM terintegrasi	kaku d. informasi layanan publik (terkait kebijakan anggaran, atau program prioritas) belum mudah diakses oleh masyarakat e. mekanisme pengaduan masyarakat atau partisipasi publik masih terbatas f. belum optimalnya kepatuhan standar pelayanan publik

Isu strategis dapat dilihat dari lingkungan dan secara global, nasional dan regional yang dapat mempengaruhi OPD baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Lingkungan Global
   Faktor eksternal dunia yang bisa berdampak pada OPD, seperti Krisis ekonomi global.
   Indonesia meluncurkan paket stimulus US$1,5 miliar untuk menstabilkan ekonomi di tengah perlambatan global dan ketegangan perdagangan. Termasuk subsidi transportasi, bantuan upah, dan bantuan sosial untuk kelompok rentan.

2. Lingkungan Nasional
   Faktor kebijakan dan kondisi dalam negeri, seperti:
   a. Stabilitas ekonomi dan inflasi
      Bank Indonesia dan pemerintah menerapkan strategi "burden sharing": BI meningkatkan bunga deposito pemerintah untuk membantu pembiayaan program seperti perumahan terjangkau dan koperasi desa.
      Situasi ekonomi tetap kuat meski terjadi unjuk rasa politik. Pemerintah menilai fundamental ekonomi solid, dan merilis paket insentif untuk menjaga pertumbuhan sosial dan investasi.
      Ekonomi Indonesia tumbuh melambat, dengan pertumbuhan kuartal I/2025 sebesar 4,87%—pertumbuhan terendah sejak pertengahan 2021—didorong oleh ketegangan perdagangan global.

   b. Reformasi birokrasi
      Reformasi birokrasi di Indonesia terus menunjukkan hasil positif. Pemerintah telah menyederhanakan lebih dari 55.000 unit organisasi, meningkatkan indeks RB di berbagai level pemerintahan, dan mendorong layanan berbasis digital.

3. Lingkungan Regional/Lokal
   Kondisi di daerah itu sendiri, seperti:
   a. Tingkat kemiskinan daerah
      BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatat bahwa garis kemiskinan naik menjadi Rp461.088 per orang per bulan pada tahun 2024 (naik dari Rp421.113 tahun sebelumnya), berdampak terhadap persentase penduduk miskin yang juga naik dari 13,72 % (2023) menjadi 13,89 % (2024).

   b. Infrastruktur yang belum memadai
      1) Jalan dan Jembatan Rusak Parah
         Kepala Dinas PU Mentawai menyatakan bahwa banyak infrastruktur jalan dan jembatan di daerah ini mengalami kerusakan berat. Dari data tahun 2012, dari total rencana jalan sepanjang 821,70 km, baru sekitar 465 km yang dibangun, dan sebagian besar kini rusak parah. Peningkatan infrastruktur masih terhambat oleh keterbatasan anggaran dan koordinasi antara sektor.

2) Kurangnya Aksesibilitas dan Mobilitas
Warga mengeluhkan rendahnya kualitas infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan koneksi internet. Kondisi ini tidak hanya mempersulit mobilitas masyarakat, tapi juga menaikkan biaya hidup akibat kurangnya aksesibilitas dan transportasi.

3) Infrastruktur Pulau Belum Merata
Wakil Gubernur Sumbar menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur penghubung antarpulau, seperti Jalan Trans-Mentawai, telah berjalan. Namun, akses internal dalam pulau—misalnya jalan lintas timur dan rencana jalan lintas barat—masih sangat lemah dan membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat. Rasio elektrifikasi pada tahun 2019 juga baru mencapai 53,4 %.

4) Pelabuhan dan Dermaga Minim
Untuk mendukung sektor pariwisata yang potensial, fasilitas seperti dermaga sangat dibutuhkan. Saat ini, fasilitas dermaga di Mentawai masih terbatas — hal ini menjadi hambatan bagi pengembangan wisata dan distribusi barang maupun mobilitas antar pulau.

5) Tantangan Logistik dan Pendukung Resiliensi
Bappenas menekankan perlunya konsistensi antar sektor dalam membangun infrastruktur logistik yang andal seperti pelabuhan, gudang, dan jalur distribusi untuk mempercepat kemajuan ekonomi dan ketahanan lokal di Mentawai.
Upaya Rehabilitasi dan Infrastruktur Pasca Bencana

BNPB menyebut alokasi dana sekitar Rp 206 miliar untuk Mentawai banyak yang belum terpakai karena isu site plan dan kendala izin, termasuk untuk pembangunan hunian tetap, air bersih, dan listrik di Pagai Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi pasca-bencana masih memerlukan percepatan.

6) Bandara Mentawai Diperbarui
Infrastruktur bandara lama menghadapi risiko erosi, namun telah dibangun terminal dan landasan baru sepanjang 1.500 meter, yang mulai dioperasikan per Oktober 2023. Ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki akses udara ke Mentawai.

c. SDM lokal
1) Tingkat Pendidikan dan Partisipasi
Per akhir 2024, hanya 6,07 % penduduk Mentawai yang menempuh pendidikan tinggi (S1, S2, S3, dan diploma) dengan rincian:
a) S1: 4,33 %;
b) D3: 1,18 %;
c) S2: 0,19 %;
d) S3: 0,003 %.

Sementara 23,55% penduduk belum tamat SD, dan 25,22% belum atau tidak pernah sekolah. Ini menunjukkan angka melek huruf dan kualitas pendidikan dasar yang masih perlu banyak perbaikan.

2) Tantangan Geografis dan Kualitas Lembaga Pendidikan
Mentawai termasuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), yang menghadapi masalah seperti rendahnya rata-rata lama sekolah, angka partisipasi rendah, serta efektivitas anggaran pendidikan yang belum optimal.

3) Inisiatif Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan SDM
Pemerintah Kabupaten telah memasukkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan, menyekolahkan sekitar 400 siswa ke perguruan tinggi ternama seperti UGM, ITB, IPB, agar mereka dapat kembali dan membangun daerah dengan kapabilitas tinggi.

4) Fokus Pembangunan SDM Terintegrasi
Pemerintah daerah juga memfokuskan pembangunan SDM dalam kerangka kesejahteraan masyarakat. Strategi mencakup:
   a) Pengentasan kemiskinan
   b) Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan
   c) Penurunan angka stunting
   d) Penguatan ketahanan pangan dan energy

Selain itu, melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, Mentawai ditargetkan mampu menyerap hingga 10.000 tenaga kerja, dengan dukungan pengiriman 600 pelajar untuk studi pariwisata—sebagai upaya menciptakan tenaga kerja siap pakai berkualitas lokal.

d. Potensi bencana alam

1) Zona Megathrust: Gempa Bumi dan Tsunami
Mentawai berada di zona Sunda Megathrust, batas lempeng Australia–Eurasia, yang berpotensi menghasilkan gempa masif hingga magnitudo 8,9.
Potensi tsunami bisa mencapai ketinggian 20 meter, dengan waktu tiba ke pesisir hanya kurang dari 7 menit, membuat kesiapsiagaan respons sangat krusial.

2) Kerawanan Gempa dan Tsunami
Sebanyak 33 dari 43 desa di Mentawai terletak di zona pesisir rawan tsunami dan abrasi. Ini termasuk dalam kategori kerawanan gempa VIII, artinya gempa dapat menyebabkan kerusakan parah pada bangunan.

3) Simulasi dan Sistem Peringatan Dini
BNPB bersama UGM dan BPBD Mentawai telah mempersiapkan sistem peringatan dini tsunami (TEWS), termasuk pelatihan masyarakat, denah evakuasi, prosedur tetap, dan pemantauan.

Simulasi kesiapsiagaan tanggap darurat skala besar telah dilakukan, termasuk apel kesiapsiagaan, pelatihan evakuasi, dan pemetaan zona rawan.

4) Ancaman Bencana Tambahan
   Berdasarkan RPJMD Mentawai, desa ini juga rentan terhadap gelombang ekstrem & abrasi, cuaca ekstrem, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan, serta penyakit epidemi (dengan risiko lebih rendah).

5) Fungsi Pengetahuan Lokal dalam Mitigasi
   Komunitas Mentawai memiliki pengetahuan adat seperti membaca tanda alam, ritual “Tinapat”, dan penggunaan kentongan, yang efektif dan terbukti menjadi alat mitigasi tradisional menghadapi gempa, tsunami, dan abrasi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi, arah kebijakan dan program perioritas pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komperehensif mengenai metode atau pendekatan pemerintah daerah dalam tujuan dan khususnya sasaran sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efesiensi pembangunan daerah. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi dapat digunakan sebagi instrumen untuk melakukan tranformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah saling berhubungan satu sama lainnya. Strategi diawali dengan perumusan alternatif strategi yang memperhatikan faktor - faktor internal dan ekternal yang berada dalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Sekretariat Daerah

A. Tujuan renstra Sekretariat Daerah
   Terwujudnya tata kelola pemerintahan efektif dan efisien.

B. Sasaran Sekretariat Daerah
   Untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah serta memastikan koordinasi dan pelayanan adminisitratif berjalan optimal sekretariat Daerah menetapkan beberapa sasaran strategis.
   Adapun sasaran strategis renstra sekretariat daerah adalah:
   Meningkatkan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan, dan meningkatnya kualitas kebijakan dan tata Kelola pelayanan publik.

C. Strategi Sekretariat Daerah
   Strategi dalam renstra sekretariat daerah bertujuan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sekaligus mendukung kelancaran koordinasi, pelayanan administratif dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
   Adapun strategi yang dilakukan oleh sektretariat daerah untuk mencapai sasaran yang diinginkan adalah:
   1. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan strategi adalah:
      a. meningkatkan tata keloala pemerintahan;
      b. meningkatkan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat;
      c. meningkatkan indeks penataan peraturan per undang-undangan dan pelayanan hukum;

d. meningkatkan kerja sama daerah yang ditindaklanjuti.

2. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan dengan strategi sebagai berikut:
   a. meningkatkan pelaksanaan penyusunan kebijakan perekonomian dan sumber daya alam;
   b. meningkatkan kinerja BUMD dan BLUD
   c. meningkatkan ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan
   d. meningkatkan kepatuhan dalam pemenuhan ketepatan waktu dan tingkat layanan barang dan jasa.

3. meningkatnya kualitas kebijakan dan tata Kelola pelayanan publik dengan strategi:
   a. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketataaksanaan pemerintah daerah
   b. meningkatnya koordinasi dan pelaporan kinerja, pelayanan publik dan reformasi birokrasi
   c. meningkatkan kualitas pelayanan umum dan keprotokolan

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029

Visi: Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 8: Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif dan terpercaya.	Terwujudnya Birokrasi yang prima.	1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel.
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani.

Sesuai dengan isu strategis yang menjadi pokok perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah, tujuan dan sasaran sekretariat daerah jangka menengah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	62,95	63,25	63,50	63,75	64,10	64,45	
		Meningkatknya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai EPPD	2,80	2,90	3,00	3,00	3,00	3,00	
			Nilai Evaluasi SAKIP	65,90	66,20	66,50	66,75	67,00	67,10	
			Indeks Reformasi Hukum	80,00	83,00	85,00	87,00	90,00	93,00	
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	74,00	74,25	74,50	74,75	75,00	75,50	
		Meningkatnya kualitas kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani		Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai lakip	66,90	71	73	75	77	78	
			Jumlah inovasi yang diterapkan	1	2	2	2	2	2	
			Persentase capaian kinerja perangkat daerah	82	84	85	87	89	90	

3.3 Strategi Sekretariat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam renstra Sekretariat daerah adalah strategi dan kebijakan sekretariat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029. Strategi dan kebijakan jangka menengah sekretariat daerah menunjukkan bagaimana cara sekretariat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Mentawai (Jangka Menengah):

1. Koordinasi dan Sinergi Antar OPD:
   a. melaksanakan rapat koordinasi rutin antar OPD.
   b. mengembangkan sistem informasi kebijakan yang terintegrasi.
2. Peningkatan Kualitas Layanan Publik:
   a. implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
   b. pengembangan aplikasi layanan publik berbasis digital.
3. Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah:
   a. penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi aparatur pemerintah.
   b. kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk program pengembangan kapasitas.
4. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat:
   a. penyelenggaraan forum konsultasi publik secara berkala.
   b. pengembangan platform digital untuk partisipasi masyarakat.
5. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran:
   a. implementasi sistem e-budgeting dan e-audit.
   b. publikasi laporan keuangan secara berkala melalui situs resmi.

Table 3.3
Penahapan Renstra Sekeretariat Daerah

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah 2026–2030	Implementasi awal program dan kegiatan Renstra.	Penguatan kapasitas aparatur dan sumber daya dalam pelaksanaan Renstra.	Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Renstra dan pencapaian sasaran.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah periode berikutnya.

Penahapan Pembangunan 2025-2030 tersebut bukan hanya sekedar urutan waktu melainkan kerangka kerja yang merefleksikan fokus kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara progresif, tahapan tersebut dirancang melalui 5 (lima) fase strategis dimulai dari penguatan fondasi, percepatan, pemantapan, pemerataan hingga memastikan pencapaian target dan persiapan merancang perencanaan pembangunan periode berikutnya dan ini menjadi langkah dan keinginan yang kuat antara pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk pencapaian pembangunan yang lebih baik lagi.

3.4 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

Arah Kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kepala daerah yang menjabat, serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sekretariat Daerah. Renstra Sekretariat Daerah menjadi panduan bagi Sekretariat Daerah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evalusi pembangunan daerah dan instruksi menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencanapembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Sekretariat Daerah tahun 2025-2029, arah kebijakan dalam renstra sekretariat daerah akan mencakup hal-hal berikut:

1. Perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat merupakan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan di bidang pendidikan, keagamaan, sosial, kemasyarakatan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta perlindungan perempuan dan anak. Arah kebijakan ini di fokuskan pada peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
2. Penyelenggaraan kebijakan di bidang pemerintahan dan kerja sama yang meliputi tata kelola pemerintahan, pembinaan administrasi kewilayahan dan pelaksanaan kerjasama daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan koordinasi hukum yang meliputi penyusunan produk hukum daerah, bantuan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah serta pengelolaan informasi hukum.
4. Perumusan kebijakan dan pengadministrasian pembangunan daerah meliputi penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
5. Penyelenggaraan kebijakan Pengadaan Barang dan jasa yang meliputi penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
6. Penyelenggaraan kebijakan bidang perekonomian dan sumber daya alam meliputi pengendalian dan distribusi perekonomian, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, serta kebijakan energi dan air.
7. Penyelenggaraan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi antara lain pelayanan keprotokolan kegiatan pimpinan daerah dan tamu, koordinasi dalam rangka mengkomunikasikan dan mendokumentasikan kegiatan pimpinan daerah.
8. Penyelenggaraan kebijakan bidang penataan organisasi meliputi pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, peningkatan kinerja dan refomasi birokrasi, koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah, fasilitasi, monitoring, evaluasi pelayanan publik dan tata laksana.
9. Penyelenggaraan kebijakan bidang pelayanan umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, aset dan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Arah kebijakan yang dilaksanakan oleh sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebgaai berikut:

a. Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan
   1) memastikan RPJMD dan rencana pelaksanaan (seperti RKPD) diinternalisasi oleh semua OPD.
   2) menjamin keselarasan pelaksanaan di seluruh sektor, penghindaran duplikasi program, dan penguatan kolaborasi antar OPD.
b. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
   1) mendorong reformasi birokrasi sesuai misi RPJMD.
   2) implementasi e-government, e-office, dan sistem informasi manajemen untuk mempercepat pengambilan keputusan dan transparansi proses.

c. Pengembangan SDM Aparatur
   1) meningkatkan kapasitas aparatur dalam analisis kebijakan, manajemen pembangunan, dan pemahaman isu prioritas lokal (infrastuktur, kesehatan, pariwisata, dsb).
   2) inisiasi vocational training atau pelatihan berbasis kebutuhan program RPJMD.

d. Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program
   1) mensinkronkan dokumen RPJMD 2025-2029 dengan RKPD dan perencanaan OPD.
   2) memfasilitasi musrenbang, konsultasi publik, dan keterlibatan masyarakat agar pelaksanaan program benar-benar berbasis keabutuhan wilayah.

e. Monitoring, Evaluasi dan Akuntabilitas
   1) membangun sistem monitoring untuk mengevaluasi capaian indikator RPJMD.
   2) tingkatkan akuntabilitas melalui pelaporan transparan dan penguatan mekanisme pengaduan publik.

f. Fasilitas dan Pendampingan OPD
   1) membantu OPD dalam menyiapkan dokumen teknis, anggaran dan pelaporan kinerja.
   2) dukung kolaborasi antar OPD dan antar jenjang pemerintahan.

g. Komunikasi Publik dan Sosialisasi
   1) menyebarluaskan informasi visi, misi, dan kebijakan RPJMD kepada masyarakat luas.
   2) membuka akses publik terhadap capaian perencanaan dan target pembangunan.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah kebijakan Renstra PD	Ket
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	a. membangun budaya pelayanan prima. b. penguatan integritas dan pencegahan korupsi. c. fondasi digitalisasi dan keterbukaan informasi d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme asn. e. pemantapan smart governance dan partisipasi inklusif. f. konsolidasi digitalisasi dan tata kelola data terpadu g. keberlanjutan dan penguatan digitalisasi pemerintahan	a. Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan 1) memastikan RPJMD dan rencana pelaksanaan (seperti RKPD) diinternalisasi oleh semua OPD. 2) menjamin keselarasan pelaksanaan di seluruh sektor, penghindaran duplikasi program, dan penguatan kolaborasi antar OPD. b. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 1) mendorong reformasi birokrasi sesuai misi RPJMD. 2) implementasi e-government, e-office, dan sistem informasi manajemen untuk mempercepat pengambilan keputusan dan transparansi proses. c. Pengembangan SDM Aparatur 1) meningkatkan kapasitas aparatur dalam analisis kebijakan, manajemen pembangunan, dan pemahaman isu prioritas lokal (infrastuktur, kesehatan, pariwisata, dsb). 2) inisiasi vocational training atau pelatihan berbasis kebutuhan program RPJMD. d. Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program 1) mensinkronkan dokumen RPJMD 2025-2029 dengan RKPD dan perencanaan OPD. 2) memfasilitasi musrenbang, konsultasi publik, dan keterlibatan masyarakat agar pelaksanaan program benar-benar berbasis keabutuhan wilayah. e. Monitoring, Evaluasi dan Akuntabilitas 1) membangun sistem monitoring untuk mengevaluasi capaian indikator RPJMD. 2) tingkatkan akuntabilitas melalui pelaporan transparan dan penguatan mekanisme pengaduan publik. f. Fasilitas dan Pendampingan OPD 1) membantu OPD dalam menyiapkan dokumen teknis, anggaran dan pelaporan kinerja. 2) dukung kolaborasi antar OPD dan antar jenjang pemerintahan g. Komunikasi Publik dan Sosialisasi 1) menyebarluaskan informasi visi, misi, dan kebijakan RPJMD kepada masyarakat luas. 2) membuka akses publik terhadap capaian perencanaan dan target pembangunan	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, inovatif dan melayani	a. digitalisasi pelayanan dan partisipasi publik. b. Peningkatan kapasitas dan budaya kerja aparatur. c. desain pelayanan berorientasi pengguna (citizen-centric). d. inovasi berkelanjutan dan adaptabilitas. e. penguatan akuntabilitas dan transparansi.		

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab ini memuat uraian lengkap mengenai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang oleh Sekretariat Daerah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029.

Setiap program dan kegiatan disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung terhadap program prioritas pembangunan daerah, serta diarahkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah dan indikator kinerja kunci (IKK) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Uraian yang disajikan dalam bab ini meliputi:

a. Deskripsi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan: Penjabaran maksud, ruang lingkup, dan fokus pelaksanaan yang mendukung tujuan strategis Renstra dan RPJMD;
b. Indikator Kinerja: Ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
c. Target Kinerja Tahunan: Sasaran terukur yang hendak dicapai setiap tahun selama periode 2025–2029;
d. Pagu Indikatif: Alokasi anggaran indikatif yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah dan skala prioritas tahunan.

Seluruh program dan kegiatan ini disusun secara sinergis antar bagian dan subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dengan pendekatan hasil (result-based) untuk memastikan bahwa output dan outcome yang dihasilkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan, efektivitas koordinasi antar perangkat daerah, dan pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah.

Melalui pendekatan tersebut, diharapkan program dan kegiatan Sekretariat Daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendukung fungsi strategis Sekretariat Daerah sebagai fasilitator utama dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan indikator kinerja dilakukan secara terukur dan selaras dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), serta memperhatikan keterkaitan logis antara input, proses, output, dan outcome. Dengan demikian, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah selama periode Renstra 2025–2029 dapat dipantau secara efektif, dievaluasi secara berkala, dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran

INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	Tahun 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indeks Reformasi Birokrasi	62,95	63,25	63,50	63,75	64,10	64,45	Baik
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,80	2,90	3,00	3,00	3,00	3,00	Baik
Nilai Sistem Akuntabiltas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP)	65,90	66,20	66,50	66,75	67,00	67,10	Baik
Indeks Reformasi Hukum	80,00	83,00	85,00	87,00	90,00	93,00	Baik
Indeks Tata Kelola Pengadaan	74,00	74,25	74,50	74,75	75,00	75,50	Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat	84,50	84,65	84,70	84,80	84,84	85,00	Baik
Indeks Pelayanan Publik	3,30	3,30	3,35	3,40	3,45	3,50	Baik
Indeks Kualitas Kebijakan	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	Baik

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tabel 4.2
Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien				Indeks reformasi birokrasi		
		Meningkatkan kualitas kebijakan dan tata kelola pelayanan publik			Efektivitas kebijakan dan tata kelola pelayanan publik		
			Meningkatnya kualitas kebijakan dan tata kelola pelayanan publik		Efektivitas kebijakan dan tata kelola pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	
				Terlaksananya perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
				Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Perangkat Daerah			
				Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Persentase pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Meningkatnya sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah sarana dan prasarana pegawai	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengolahan administrasi kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksanany a pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase administrasipenu njang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
				Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan internet,listrik,air bersih dan telepon seluler pimpinan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sum ber daya air dan listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksanany a Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kendaraan Dinas Jabatan			
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan nya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab ilitasi	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan KDH/WKDH	Persentase administrasi gaji dan tunjangan KDH/WKDH	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah	
				Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disediakan		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Jumlah orang yang menerima dana penunjang		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah		Kepala Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat daerah	Persentase Fasilitasi kebutuhan harian rumah tangga pimpinan daerah	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Wakil Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Wakil Tangga Kepala Daerah	
			Meningkatnya tat kelola organisasi Pemerintah Daerah		Indek kematangan organisasi	Penataan Organisasi	
				Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan public dan tatalaksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
				Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
				Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring,evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan public dan tata laksana	Monitoring,Evaluasi dan pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
				Terlaksananya Koordinasi	Jumlah dokumen koordinasi dan	Koordinasi dan Penyusunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan yang terfasilitasi	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
				Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	
				Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
				Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
		Meningkatkan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			Efektifitas Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		
			Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		Efektifitas Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan dan otonomi daerah		Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Administrasi Tata Pemerintahan	
				Terlaksanany a penataan administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	
				Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
				Terlaksananya fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Otonomi Daerah	Otonomi Daerah		
			Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan rakyat		Efektifitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
				Terlaksananya Kebijakan,Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil kebijakan ,evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan social meliputi urusan social,transmigrasi,kesehatan,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,admindukcapil,pemberdayaan masyarakat desa,pengendalian penduduk dan KB	Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	
				Terlaksananya Kebijakan ,evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kebijakan,evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan,olah raga,pariwisata,pendidikan,kebudayaan,perpustakaan,kearsipan,trantibum,linmas	Pelaksanaan Kebijakan ,evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan		1. Persentase capaian aksi HAM 2. Persentase produk hukum yang dihasilkan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan produk Hukum Daerah	Jumlah produk hokum daerah yang disusun	Fasilitasi Penyusunan produk Hukum Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus pemda yang ditangani dan bantuan hokum kepada masyarakat miskin	Fasilitasi Bantuan Hukum	
				Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan disebarluaskan	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah		Efektifitas kerja sama daerah	Fasilitasi Kerjasama Dalam Daerah	
				Melakukan fasilitasi kerjasama daerah dengan kabupaten/kota dan instansi lainnya	Jumlah kerja sama dalam negeri	Fasiitasi Kerjasama Dalam Negeri	
		meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan			Efektivitas Pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan		
			meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan		Efektivitas Pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian		Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
				Terlaksamnanya Koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen evaluasi dan pengendalian pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananny aPengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan distribusi perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan		Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
				Terlaksananny aFasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
				Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
				Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa		Tingkat kematangan UKPBJ	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
				Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang dan Jasa	Jumlah PNS peserta sosialisasi peraturan kebijakan pengadaan barang dan jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang dan Jasa	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan		Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			sumber daya alam		sumber daya alam		
				Terlaksananya Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energy dan air	Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah			Nilai lakip		
					Jumlah inovasi yang diterapkan		
					Persentase capaian kinerja perangkat daerah		

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4		5		6		7		8		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
SEKRETARIAT DAERAH													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Efektivitas kebijakan dan tata kelola pelayanan publik												
Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	10	34.375.000	10	34.375.000	10	50.617.336	10	50.617.336	10	50.617.336	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data Kepegawaian Perangkat Daerah	-	12	23.320.000	12	23.320.000	12	39.562.000	12	39.562.000	12	39.562.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan												

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4		5		6		7		8		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.003.126.697	99	9.925.885.095	99	9.905.578.913	99	9.921.821.645	99	9.965.288.660	99	9.983.478.653	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	117.570.000	12	40.328.398	12	40.328.398	12	56.570.734	12	67.984.653	12	76.853.652	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	570.773.500	4	550.609.248	4	530.303.066	4	546.545.402	4	557.959.321	4	565.459.321	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	119.374.000	1	54.069.798	1	54.069.798	1	70.312.134	1	81.726.053	1	89.726.053	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	662.980.000	12	652.036.398	12	631.730.216	12	647.972.552	12	659.386.471	12	667.386.471	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	791.738.000	12	793.670.198	12	773.364.016	12	789.606.352	12	799.106.352	12	807.106.352	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4		5		6		7		8		
	SKPD												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kiendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disedfiakan	1.202.317.600	1	803.311.836	1	640.556.300	1	656.798.636	1	666.298.636	1	672.298.636	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	10	160.000.000	10	139.693.818	10	155.936.154	10	166.436.154	10	174.936.154	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	929.311.000	12	852.069.398	12	831.763.216	12	848.005.552	12	857.005.552	12	865.005.552	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4		5		6		7		8		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	544.950.000	12	467.708.398	12	447.402.216	12	463.644.552	12	475.058.471	12	483.927.470	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.488.000.000	24	1.410.758.398	24	1.390.452.216	24	1.406.694.552	24	1.418.694.552	24	1.427.563.551	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	379.897.491	8	302.655.889	8	282.349.707	8	298.592.040	8	310.005.959	8	318.874.958	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4		5		6		7		8		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3.948.200.000	25	3.870.958.398	25	3.850..652.216	25	3.866.894.549	25	3.878.308.468	25	3.887.177.467	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	1.356.742.000	0	1.279.500.398	0	1.259.194.216	0	1.275.436.549	0	1.286.850.468	0	1.295.350.468	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16.900.000	10	120.000.000	10	99.693.818	10	115.936.151	10	125.436.151	10	133.436.151	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	195.600.000	4	118.358.398	4	98.052.216	4	114.294.549	4	124.794.549	4	133.663.548	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil	613.838.494	1	536.596.893	1	516.290.711	1	532.533.044	1	545.033.044	1	553.902.043	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4		5		6		7		8		
	Kepala Daerah												
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang Disediakan	161.000.000	28	83.758.399	28	63.452.217	28	79.694.550	28	90.194.550	28	99.063.549	
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	1.170.015.000	1	1.148.282.399	1	1.127.976.217	1	1.144.218.550	1	1.155.632.469	1	1.164.501.468	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah												
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	523.345.250	12	464.096.399	12	443.790.217	12	460.032.550	12	471.446.469	12	480.315.468	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang	423.345.250	12	359.742.299	12	339.436.117	12	355.678.450	12	367.092.369	12	375.961.368	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4		5		6		7		8		
	disediakan												
Penataan Organisasi	Indeks kematangan organisasi												
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	250.243.000	36	115.200.000	36	94.893.818	36	111.136.151	36	122.550.070	36	131.419.069	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	139.102.000	1	27.710.399	1	27.710.399	1	43.952.732	1	55.366.651	1	64.235.650	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi	171.849.000	36	37.623.399	36	37.623.399	36	53.865.732	36	65.279.651	36	74.148.650	
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	51.040.200	1	51.040.200	1	51.040.200	1	67.282.533	1	78.696.452	1	87.565.451	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan	84.461.200	1	65.000.000	1	65.000.000	1	81.242.333	1	92.656.252	1	101.525.251	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4		5		6		7		8		
	Kinerja Pemerintah Daerah												
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan												
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	403.698.000	12	180.501.399	12	180.501.399	12	196.743.732	12	208.157.651	12	217.026.650	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	298.667.000	12	111.810.399	12	95.810.300	12	112.052.633	12	123.466.552	12	132.335.551	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	149.567.900	12	72.326.299	12	68.326.299	12	84.568.632	12	95.982.551	12	104.851.550	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													
Administrasi Tata Pemerintahan	Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan												
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen Penataan Administrasi Pemerintahan	98.467.000	4	263.467.000	4	231.912.328	4	262.961.144	4	284.768.856	4	295.073.457	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4		5		6		7		8		
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	129.817.200	30	294.817.200	30	263.262.528	30	294.311.344	30	316.119.056	30	326.423.657	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	196.600.700	5	361.600.700	5	330.046.028	5	361.094.844	5	382.902.556	5	393.207.157	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat												
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.503.170.600	8	6.016.569.970	8	5.953.460.624	8	5.984.509.440	8	6.006.317.152	8	6.016.621.753	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	-	3	1.500.000.000	3	1.468.445.328	3	1.499.494.144	3	1.521.301.856	3	1.531.606.457	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4		5		6		7		8		
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.563.785.000	8	3.513.399.369	8	3.481.844.697	8	3.462.893.516	8	3.484.701.228	8	3.495.005.829	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase capaian aksi HAM												
	Persentase produk hukum yang dihasilkan												
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah berupa Perda, Perbup dan keputusan yang difasilitasi	252.141.600	15	417.141.600	15	385.586.928	15	416.635.744	15	438.443.456	15	448.748.057	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus Pemda yang ditangani dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat miskin	415.532.000	5	554.128.300	5	580.532.000	5	548.977.328	5	580.026.144	5	551.933.857	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang di dokumentasikan dan disebarluaskan	102.862.600	4	78.694.880	4	267.862.600	4	236.307.928	4	267.356.744	4	289.164.456	
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Efektivitas kerja sama												

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4		5		6		7		8		
	daerah												
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Melakukan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Kabupaten/Kota dan Instansi Lainnya	49.999.800	1	500.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan												
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan distribusi perekonomian												
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen evaluasi dan pengendalian pengelolaan BUMD dan BLUD	271.894.200	17	280.950.498	17	276.279.981	17	280.416.060	17	283.322.532	10	285.435.297	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4		5		6		7		8		
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen ETPD,Dokumen Koordinasi Tim Percepatan TPAKD,Pengendalian Inflasi dan Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa (SSHB)	85.651.000	5	94.707.298	5	90.036.781	5	94.172.860	5	97.079.392	5	99.192.157	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan												
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	88.366.000	1	97.422.298	1	92.751.781	1	96.887.860	1	99.794.392	1	101.907.157	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	114.561.800	1	123.618.098	1	118.947.581	1	123.083.660	1	125.990.192	1	128.102.957	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	229.112.000	1	238.168.298	1	233.497.781	1	237.633.860	1	240.540.392	1	242.653.157	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4		5		6		7		8		
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat kematangan UKPBJ												
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Barang dan Jasa	291.581.000	12	300.637.298	12	295.966.781	12	300.102.862	12	303.009.455	12	305.122.223	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil layanan Pengadaan Secara Elektronik	370.229.800	12	379.286.098	12	374.615.581	12	378.751.660	12	381.658.192	12	383.770.957	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah PNS Peserta Sosialisasi Peraturan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	225.248.000	15	234.304.298	15	229.633.780	15	233.769.859	15	236.676.391	15	238.789.156	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam												

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4		5		6		7		8		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air,Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,Pertanahan	68.906.000	1	77.962.301	1	73.291.784	1	77.427.863	1	80.334.395	1	82.447.160	
Jumlah Total Pagu		33.519.058.282		40.255.750.656		39.329.596.187		40.149.772.669		40.726.132.343		41.145.089.614	

Tabel 4.4
Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PROIRITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase peningkatan perencanaan perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Fasilitasi kunjungan tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NO	PROGRAM PROIRITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NO	PROGRAM PROIRITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat daerah	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Wakil Tangga Kepala Daerah	
			Penataan Organisasi	
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
			Monitoring,Evaluasi dan pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
			Fasilitasi Keprotokolan	
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	

NO	PROGRAM PROIRITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Lakip OPD Kategori Baik	Administrasi Tata Pemerintahan	
			Penataan Administrasi Pemerintahan	
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
			Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	
			Pelaksanaan Kebijakan ,evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			Fasilitasi Penyusunan produk Hukum Daerah	
			Fasilitasi Bantuan Hukum	
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
			Fasilitasi Kerjasama Dalam Daerah	
			Fasiitasi Kerjasama Dalam Negeri	
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber utamanya listrik dan pengendalian inflasi	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	

NO	PROGRAM PROIRITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Koordinasi,Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan barang dan Jasa	
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
			Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi Air	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	*2030*	
	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	62,95	63,25	63,50	63,75	64,10	64,45	
2	Nilai EPPD	2,80	2,90	3,00	3,00	3,00	3,00	
3	Nilai Evaluasi SAKIP	65,90	66,20	66,50	66,75	67,00	67,10	
4	Indeks Reformasi Hukum	80,00	83,00	85,00	87,00	90,00	93,00	
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan	74,00	74,25	74,50	74,75	75,00	75,50	
6	Indeks Kualitas Kebijakan	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	
7	Nilai lakip	66,90	71	73	75	77	78	
8	Jumlah inovasi yang diterapkan	1	2	2	2	2	2	
9	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	82	84	85	87	89	90	

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persen	30	40	45	50	60	70	
2	Persentase MOU yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	70	72	75	76	80	85	
4	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	75	78	80	82	85	90	
5	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,8	
6	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Persen	22,90	22,95	23,04	23,18	23,41	24,11	
7	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Persen	10,50	10,71	11,14	12,03	14,44	18,77	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029 telah memuat secara komprehensif visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini juga dirumuskan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sekretariat Daerah sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan, koordinator antar-OPD, dan penggerak reformasi birokrasi.

Renstra ini menjadi pedoman utama dan acuan operasional bagi Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian visi “Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif dan terpercaya.”. Setiap komponen perencanaan strategis melalui sasaran dan program telah dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk pelaksanaan yang akuntabel dan terukur.

Sebagai dokumen yang bersifat dinamis, Renstra ini tidak hanya menjadi acuan konseptual, tetapi harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap tahapan pembangunan. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah akan melaksanakan evaluasi dan pengendalian secara berkala, baik secara tahunan maupun setiap akhir periode Renstra, untuk memastikan program berjalan efektif dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan daerah. Kegiatan ini juga mencakup penyesuaian strategi atau kebijakan apabila diperlukan.

5.1 Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui mekanisme monitoring internal secara periodik oleh unit perencana, yang mencakup pemantauan indikator kinerja utama (IKU), realisasi program, serta efektivitas kegiatan. Evaluasi dilakukan setiap tahun melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta reviu dan analisis atas capaian kinerja.

Agar pelaksanaan Renstra tetap dalam koridor yang ditetapkan, Sekretariat Daerah akan memperkuat koordinasi lintas bagian dan subbagian, memanfaatkan sistem informasi manajemen kinerja, serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah dalam fungsi pengawasan internal. Dengan demikian, setiap penyimpangan atau deviasi dapat segera diidentifikasi dan dikoreksi.

Keberhasilan implementasi Renstra juga sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran Sekretariat Daerah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM, budaya kerja yang adaptif, serta peningkatan akuntabilitas akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan kinerja organisasi yang efektif dan efisien.

Sebagai penutup, diharapkan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi dokumen yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif, visioner, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan

daerah. Semoga dokumen ini dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang prima, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kedepan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh OPD, masyarakat, mitra pembangunan, dan instansi vertikal—baik di tingkat provinsi maupun pusat. Kolaborasi yang sinergis ini diharapkan dapat menjadikan Renstra ini tidak sekadar dokumen birokratis, tetapi sebuah instrumen hidup yang mencerahkan arah pembangunan serta mewujudkan harapan masyarakat Mentawai.

Demikian penutup Renstra ini kami sampaikan. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai konteks lokal—serta menjadi warisan konkret yang membawa Mentawai menuju masa depan yang lebih sejahtera.

5.2 Manajemen Risiko Strategis Sekretariat Daerah

Manajemen Risiko menjadi bagian penting dari pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029. Pengelolaan risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi hambatan, menganalisis tingkat risiko, serta menyiapkan langkah mitigasi agar tujuan, sasaran, dan program dapat tetap tercapai secara efektif.

Risiko utama yang mungkin dihadapi antara lain:

a. Risiko kebijakan – adanya perubahan regulasi nasional maupun daerah yang memengaruhi pelaksanaan program.
b. Risiko keuangan – keterbatasan alokasi anggaran atau adanya refocusing anggaran akibat kondisi darurat.
c. Risiko sumber daya manusia – keterbatasan kapasitas ASN/PPPK atau distribusi SDM yang belum optimal.
d. Risiko teknis dan operasional – keterlambatan pelaksanaan kegiatan akibat kendala administratif atau teknis lapangan.
e. Risiko eksternal – kondisi sosial, politik, maupun bencana alam yang berpotensi memengaruhi stabilitas pelaksanaan program pembangunan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Sekretariat Daerah akan menerapkan strategi mitigasi melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kapasitas aparatur, serta penyusunan rencana kontinjensi (contingency plan) pada setiap program prioritas.

Selain itu, Renstra merupakan dokumen yang bersifat dinamis, sehingga memungkinkan dilakukan penyesuaian atau perubahan apabila terjadi kondisi yang signifikan memengaruhi arah kebijakan pembangunan. Perubahan dapat dilakukan, misalnya, karena:

a. Adanya perubahan RPJMD atau kebijakan pembangunan nasional/provinsi.
b. Terjadinya keadaan darurat (bencana, krisis ekonomi, pandemi, atau kondisi force majeure lainnya).
c. Adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang berimplikasi pada peran dan fungsi Sekretariat Daerah.

d. Hasil evaluasi kinerja tahunan yang menunjukkan perlunya penyesuaian strategi, sasaran, atau program agar lebih relevan dengan kebutuhan daerah.

Proses perubahan Renstra akan dilakukan secara terencana dan sistematis dengan tetap mengacu pada regulasi perencanaan pembangunan daerah, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta memastikan konsistensi dengan arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan adanya manajemen risiko dan fleksibilitas penyesuaian Renstra, diharapkan pelaksanaan program dapat lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang berkelanjutan.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 11
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan..... 12
2.5 Permasalahan Dalam Pelayanan Perangkat Daerah..... 13
2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah..... 14

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Stategis Perangkat Daerah..... 17
3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah..... 18
3.3 Strategi Perangkat Daerah..... 19
3.4 Arah Kebijakan..... 20

BAB VI PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 22
4.2 Kinerja Penyelengaraan Bidang Urusan..... 62

BAB V PENUTUP 66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Aparatur Golongan IV Pertahun 2025 9
Tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur Golongan III Per Tahun 2025 9
Tabel 2.3 Sumber Daya Aparatur Golongan II Per Tahun 2025 9
Tabel 2.4 Sumber Daya Aparatur PPPK Per Tahun 2025..... 10
Tabel 2.5 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan 10
Tabel 2.6 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Diklat Kepemimpinan. 10
Tabel 2.7 Sumber Daya Aparatur Fungsional Tertentu 10
Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana yang ada di Sekretariat DPRD 11
Tabel 2.9 Perkembangan Indikator Sekretriat DPRD 12
Tabel 2.10 Permasalahan Dalam Pelayanan Sekretariat DPRD 14
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD 17
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD 18
Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi 20
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Restra Perangkat Daerah 24
Tabel 4. 2 Rencana Program Program / kegiatan / Sub Kegiatan dan pendanaan 46
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 63
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD 64
Tabel 4.5 Tujuan sasaran dan indikator sasaran 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar I 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun atas dasar Surat Edaran Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.4.2 - Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 berpedoman pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029 disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program, kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun fungsinya yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Proses Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029 meliputi :

1. Persiapan Penyusunan Renstra Persiapan yang dimaksud antara lain Pembentukan Tim Penyusun Renstra melalui Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.
2. Penyusunan Rancangan Awal dan Rancangan Renstra Mencakup pengolahan data dan informasi, perumusan pohon kinerja Sekretariat DPRD yaitu tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif selama tahun periode Renstra, dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan program RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029.
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Menyempurnakan rancangan Renstra dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029.

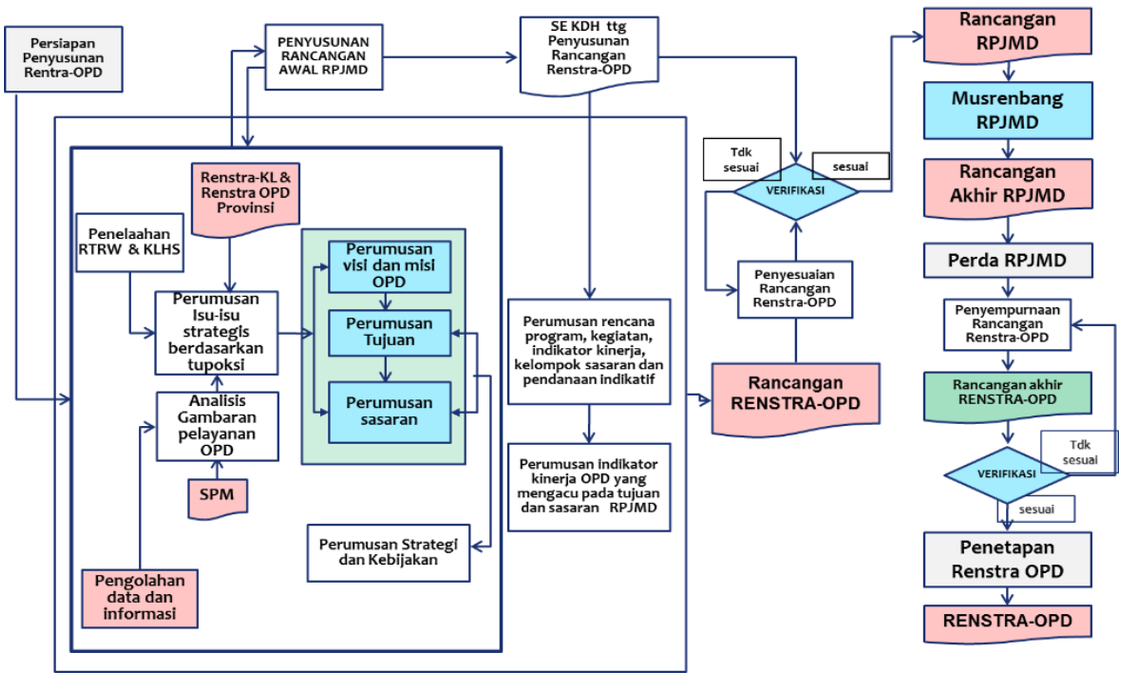
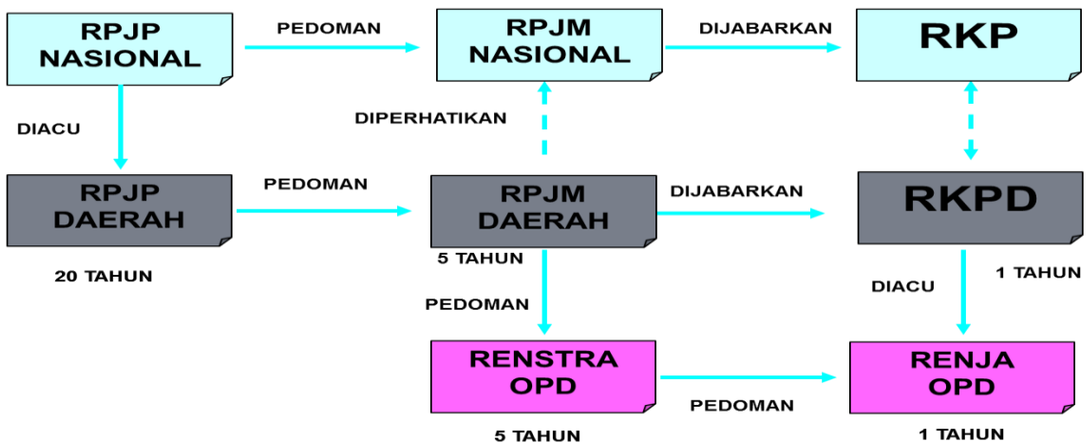


Diagram alir Tahapan Penyusunan Renstra
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Penetapan Renstra Rancangan akhir Renstra diverifikasi akhir oleh Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menjamin kesesuaian dengan dimulai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029. Selain itu juga disahkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setetah Peraturan Bupati tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029 ditetapkan. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029 disusun secara simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Renstra ini digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu masa perencanaan Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai salah satu bagian komponen perencanaan.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabuapten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah untuk menjabarkan rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang termuat dalam Rencana RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 ke dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Selain itu juga sebagai pedoman bagi seluruh pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tahun 2025-2029. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah :

a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;

c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKA serta DPA;
d. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai baik tahunan maupun tahun periode Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan
- 2.5 Permasalahan Dalam Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah
- 3.4 Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

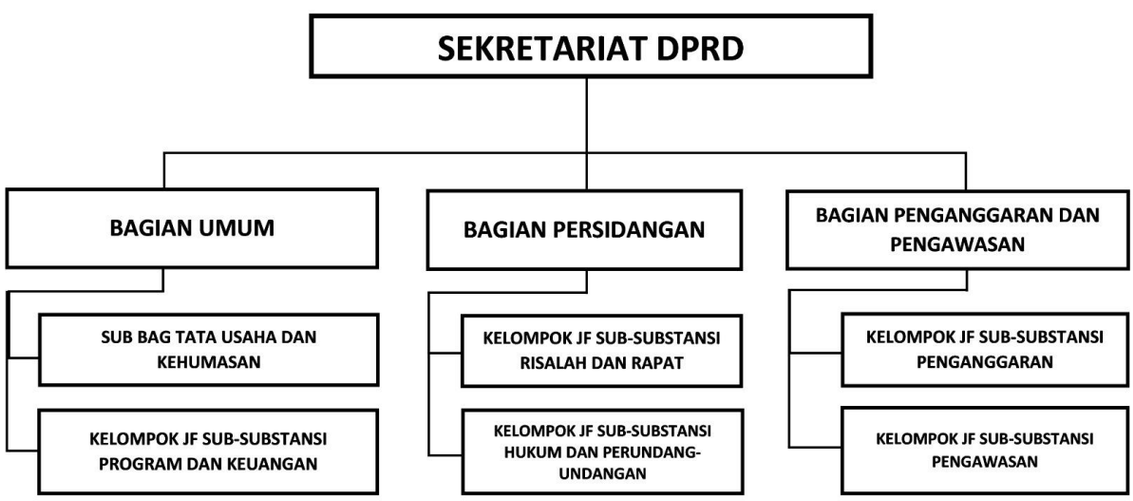
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pada Tahun 2021 ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, di mana disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah pelaksana layanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
e. Pelaksanaan tuga slain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi Sekretariat DPRD beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi yaitu sebagai berikut :



1.Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, sebagai berikut :

a) Sekretaris DPRD;
b) Bagian Umum, membawahi ;
   1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kehumasan; dan
   2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan.
c) Bagian Persidangan, membawahi:
   1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Risalah dan Rapat; dan
   2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hukum dan Perundang-Undangan;
d) Bagian Penganggaran dan Pengawasan, membawahi **:**
   1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penganggaran; dan
   2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub – Substansi Pengawasan;

2. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

3. Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

4. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d masing masing dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing masing pengelompokan uraian tugas dan fungsi

5. Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sekretariat DPRD mempunyai fungsi dan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariat dan keuangan , mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan megoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan ketatausahaan, kehumasan, program dan keuangan Sekretariat DPRD.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahan, dan kehumasan Sekretariat DPRD;
b. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan dukungan penyusunan program dan keuangan Sekretariat DPRD;

c. Evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi ketatatusahaan dan kehumasan sekretariat DPRD;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan keuangan sekretarait DPRD;
e. Penyiapan bahan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kehumasan , mempunyai tugas :
   a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kehumasan sekretariat DPRD;
   b. Melakukan penyiapan bahan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kehumasan sekretariat DPRD;
   c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kehumasan sekretariat DPRD;
   d. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
   e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional sub-substansi Program dan Keuangan, mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelayanan adminiistrasi dan pemberian dukungan program dan keuangan sekretariat DPRD;
   b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan program dan keuangan sekretariat DPRD;
   c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan program dan keuangan sekretariat DPRD;
   d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Persidangan

1. Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang risalah, rapat, hukum dan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi :
   a. Perencanaan pelayan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang risalah, rapat, hukum dan perundang -undangan;
   b. Pelaksanaan pelayanan adminiistrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang risalah, rapat hukum dan perundang-undangan;
   c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang risalah, rapat, hukum dan perundang-undangan;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Risalah dan Rapat, mempunyai tugas :
    b. Melakukan penyiapan bahan perumusan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang risalah dan rapat;
    c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang risalah dan rapat;
    d. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang risalah dan rapat; dan
    e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Hukum dan perundang-undangan, mempunyai tugas :
    a. Melakukan penyiapan bahan perumusan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang hukum dan perundang-undangan;
    b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang Hukum dan perundang-undangan;
    c. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang hukum dan perundang-undangan; dan
    d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang penganggaran dan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bagian penganggaran dan pengawasan menyelenggarakan fungsi :
    a. Perencanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang penganggaran dan pengawasan
    b. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang penganggaran dan pengawasan;
    c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang penganggaran dan pengawasan;
    d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Penganggaran mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang penganggaran;
b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan admnistrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi di bidang penganggaran;
c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadapa tugas dan fungsi DPRD di bidang penganggaran; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengawasan, mempunyai tugas :
   a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan pelayanan admnistrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang Pengawasan;
   b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan admnistrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang Pengawasan;
   c. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD di bidang pengawasan; dan
   d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dapat digambarkan sebagai berikut :

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat berdasarkan Golongan, Pendidikan maupun Jabatan Struktural dan Fungsional Tertentu, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Golongan IV
Per Tahun 2025

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembina Utama (IV/e)	0	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	0	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang	
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	3 orang	
5	Pembina (IV/a)	0	
JUMLAH		**4 orang**	

Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur Golongan III
Per Tahun 2025

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Penata Tingkat I (III/d)	5 orang	
2	Penata (III/c)	2 orang	
3	Penata Muda Tingkat I (III/b)	7 orang	
4	Penata Muda (III/a)	8 orang	
JUMLAH		**22 orang**	

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur Golongan II
Per Tahun 2025

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pengatur Tingkat I (II/d)	2 orang	
2	Pengatur (II/c)	4 orang	
3	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0	
4	Pengatur Muda (II/a)	0	
JUMLAH		**6 orang**	

Tabel 2.4
Sumber Daya Aparatur PPPK
Per Tahun 2025

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	IX	5 orang	
2	VII	1 orang	
3	V	3 orang	
JUMLAH		**9 orang**	

Tabel 2.5
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan
Pada Periode 2025

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pasca Sarjana (S2)	6 orang	
2	Sarjana (S1)	22 orang	
3	Diploma (D3)	3 orang	
4	SLTA	10 orang	
5	SLTP	0 orang	
6	SD	0 orang	
JUMLAH		**41 orang**	

Tabel 2.6
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Diklat Kepemimpinan

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH
1	SPAMEN/ TK. II	0 orang
2	SPAMA/PIM TK.III	3 orang
3	SPADYA/ADUML A/ PIM TK.IV	6 orang
JUMLAH		**9 orang**

Tabel 2.7
Sumber Daya Aparatur Fungsional Tertentu

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	KET.
1	JFA UTAMA	0 orang	
2	JFA MADYA	0 orang	
3	JFA MUDA	3 Orang	
4	JFA PERTAMA	0 Orang	
JUMLAH		**3 orang**	

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa asset pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai keadaan per 17 Juni 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.2.2.2-210 Tahun 2025 dapat dilihat dalam daftar dibawah ini:

Tabel 2.8
Sarana dan Prasarana yang ada di Sekretariat DPRD

NO	URAIAN	NILAI
1.	Tanah	170.350.000,-
2.	Golongan Alat Besar	236.148.567,-
3.	Golongan Alat Angkutan	2.910.618.725,-
4.	Golongan Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.975.000,-
5.	Golongan Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.691.408.338,-
6.	Golongan Alat Studio Komunikasih dan Pemancar	483.112.600,-
7.	Golongan Alat Laboratorium	263.642.000,-
8.	Golongan Alat Komputer	1. 586.794.050,-
9.	Golongan ALat Keselamatan Kerja	167.200.000,-
10.	Golongan Bangunan Gedung	5.091.408.330,-
11.	Golongan Bangunan Air dan Irigasi	479.471.200,-
12.	Golongan Instalasi	78.898.850,-
13.	Golongan Jaringan	218.347.500,-
14.	Golongan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	6.930.000,-

NO	URAIAN	NILAI
15.	Golongan Tanaman	62.323.250,-

2.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan.

Dalam memberikan pelayanan terhadap pelayanan fungsi anggota DPRD maka ukuran indikator kinerja yang digunakan adalah kepuasan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah anggota DPRD serta masyarakat yang mengunjungi DPRD. Pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD secara prinsip adalah memfasilitasi penyelenggaraan agenda setiap pimpinan dan anggota DPRD. Selain itu, juga menjaga keselarasan agenda dan komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD. Secara umum pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD telah mencapai 90% pada tahun 2023 dengan harapan ditahun berikutnya pelayanan dapat ditingkatkan.

Tabel 2.9
Perkembangan Indikator Sekretriat DPRD
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Peraturan Daerah disetujui/ ditetapkan DPRD	5	5	16	16	16
Persentase pelayanan Sekretariat DPRD Kab.Kep.Mentawai terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD sesuai SOP	85	90	100	100	100
Jumlah Aspirasi Masyarakat yang disampaikan ke DPRD sesuai dengan SOP.	5	14	12	12	16
Jumlah Produk hukum yang difalisitasi Sekretariat DPRD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah yang dibahas dan didukung oleh DPRD.	5	8	12	12	16
Persentase kebijakan Pemerintah Daerah yang di dukung oleh DPRD	80	95	100	100	100

Sumber: RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Sasaran utama kelompok layanan Sekretariat DPRD adalah Anggpta DPRD, serta unsur-unsur di dalam DPRD serta Fraksi dan Pimpinan DPRD, yang memerlukan dukungan administrasi, keuangan, teknis dan Propesional dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya, serta Masyarakat yang menjadi pihak yang menerima dampak dari kinerja DPRD melalui pengelola informasi dan keterbukaan publik. Berikut adalah rincian sasaran kelompok layanan sekretariat DPRD:

1. Sasaran Utama :

   a. Anggota DPRD :
      Sekretariat DPRD menyediakan layanan administrasi, keuangan dan fasilitasi teknis yang diperlukan oleh para anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.
   b. Pimpinan DPRD :
      Memberikan dukungan profesional dan administratif agar pimpinan DPRD dapat mengoordinasikan kegiatan dan menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif

2. Sasaran Pendukung :

   a. Fraksi-fraksi DPRD:
      Memberikan dukungan administrasi, keuangan dan informasi yang diperlukan oleh masing- masing fraksi dalam mengemban tugasnya.
   b. Tenaga ahli DPRD :
      Menyediakan dan mengkordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD untuk mengdukung tugas dan fungsi DPRD.

3. Sasaran Publik :
   Masyarakat, melalui fungsi penyediaan informasi dan hubungan masyarakat, Sekretariat DPRD juga melayani masyarakat dengan memberikan akses informasi publik terkait kegiatan DPRD serta pengelolaan aspirasi yang masuk.

4. Sasaran Organisasi :
   Sekretariat DPRD itu sendiri melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas serta pengelolaan administrasi dan keuangan internal sekretariat DPRD untuk mencapai efesiensi dan efektifitas organisasi.

2.5 Permasalahan Dalam Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut:

a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
b. Keterlambatan materi Ranperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.

c. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
d. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.
e. Dinamika politik yang berkembang dilembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

Dengan demikian sekretariat dprd harus meningkatkan pelayanan terhadap lembaga DPRD salah satunya menyiapkan Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan anggota DPRD dalam kerangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan difasilitasi penyediaannya juga administrasi keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD dilakukan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan administrasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk di dalamnya kinerja diselenggarakan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku.

Tabel 2.10
Permasalahan Dalam Pelayanan Sekretariat DPRD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pelayanan Sekretariat DPRD	1. Belum optimalnya layanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD - Political will dan dinamika politik 2. Sarana dan prasarana yang ada belum memadai 3. Target kinerja Perangkat Daerah belum tercapai	1. Terbatasnya pegawai secara kuantitas dan kualitas 2. Beban pekerjaan yang tidak sama antar bagian 3. Belum tersedianya pedoman/juknis tata laksana layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD 4. Tingginya volumen kegiatan dan aktifitas DPRD 5. Pertanggungjawaban pekerjaan kepada dua pihak yaitu eksekutif (Bupati) dan legislatif (pimpinan DPRD) 6. Terbatasnya lahan untuk sekretariat DPRD 7. Kualitas dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan 8. Monitoring dan evaluasi kinerja pegawai belum maksimal

2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan review terhadap faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka isu strategis Sekretariat DPRD

Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 bisa diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah pelaksana layanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sedangkan tugas dan fungsi DPRD menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang diturunkan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai disebutkan yaitu :

   Fungsi DPRD :
   a. Pembentukan Perda;
   b. Anggaran; dan
   c. Pengawasan.

   Sedangkan Tugas dan Wewenang DPRD :
   a. Membentuk Perda bersama Kepala Daerah;
   b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah;
   c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
   d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah kepada Menteri melalui gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
   e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian international di Daerah;
   f. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
   g. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
   i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk melaksanakan layanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sebagaimana disebutkan di atas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
      1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
      2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
      3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
      4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya :

a) Pengembangan profesionalitas aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan secara berkesinambungan
b) Penyusunan target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional dan proporsional dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan sehingga memberikan rasa nyaman dan puas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
c) Konsistensi political will dalam membangun sinergitas kelembagaan eksekutif dengan legislatif secara benar dan proporsional
d) Dinamika politik yang berkembang di DPRD dapat memberikan warna dalam pengambilan keputusan di Sekretariat DPRD. Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah diukur untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan menggunakan rumus pengukuran capaian kinerja.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Sekretariat DPRD selama lima tahun.
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah tentunya harus selaras dan mendukung visi misi kepala daerah selama 5 tahun rencana pembangunan. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD dalam jangka waktu 5 tahun sebagai penjabaran secara teknis pada misi 8 yaitu penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif dan terpercaya.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029

Visi: **Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera**			
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	
Misi 8: Penguatan transformasi tata Kelola birokrasi yang responsif, inovatif dan terpercaya.	Terwujudnya Birokrasi yang Prima	1	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang inkfosif, handal, transparan dan akuntabel
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani

3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sesuai dengan isu strategis yang menjadi pokok perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan

Sekretariat DPRD, tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD jangka menengah disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029

Nspk dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100	100	100	100	100	100
			Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	75	78	80	82	85	90
		Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas perangkat daerah	Nilai Lakip	75	75	76	76	77	77
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	1	1	1	1	1	1
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	85	86	87	88	89	90

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD adalah strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029. Strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD menunjukkan bagaimana cara Sekretariat DPRD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil *(outcome)* program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2030 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2030 yaitu :

1. Meningkatnya Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD
2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi	Terwujudnya Kepulauan Mentawai Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera	
Misi	Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Terpercaya.	
Tujuan	Sasaran	Startegi
Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	1. Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	1. Peningkatan Kualitas Persidangan. 2. Peningkatan Kualitas Kajian Perundang-Undangan

	2. Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan pengawasan	1. Pemanfaatan Teknologi. 2. Penguatan Prosedur Pengawasan yang Transparan. 3. Penguatan dan pengembangan Anggaran. 4. Kolaborasi dan Koordinasi dengan Pihak eksternal
	3. Meningkatnya Kualitas perangkat daerah	1. Meningkatkan sumber daya manusia. 2. Tranformasi Digital 3. Perbaikan Proses Layanan 4. Perbaikan Tata kelola Pemerintahan

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepala daerah yang menjabat, serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sekretariat DPRD. Renstra Sekretariat DPRD menjadi panduan bagi Sekretariat DPRD untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tabun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, arah kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD akan mencakup hal-hal berikut:

1. Strategi Pemantapan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi perkantoran dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   1) Melakukan peningkatan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
   2) Melakukan pemanfaatan dan pemeliharaan inventaris dan aset
   3) Tersedianya peralatan gedung kantor yang representative
2. Strategi peningkatan kualitas pelayanan sekretariat dalam memfasilitasi kelancaran tugas DPRD dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut :
   1) Menyediakan fasilitas bagi DPRD untuk melakukan pembahasan ranperda yang berasal dari eksekutif maupun inisiatif DPRD
   2) Menyediakan fasilitas bagi dewan untuk melakukan reses kedaerah pemilihan dan kunjungan kerja ke dalam daerah.
   3) Menyediakan fasilitas bagi DPRD untuk melaksanakan kegiatan studi banding keluar daerah dalam rangka mencari bahan perbandingan ke daerah lain untuk dijadikan bahan masukan dalam rnacangan pembagunan Kabupaten Kepualauan Mentawai.
   4) Meyedikaan fasilitas bagi DPRD untuk mengikuti orientasi maupun peningkatan kapasitas DPRD.

5) Mendorong terlaksananya semua kegiatan publikasi rapat paripurna DPRD.

Strategi meningkatkan sumber daya manusia Sekretariat DPRD di capai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Peningkatan kualiats dan komptensi aparatur sekretariat DPRD.
2) Melengkapi sarana berbasis digital
3) Penyususunan SOP kegiatan sebagai pedoman pelaksanan tugas dan fungsi aparatur
4) Peningkatan pengawasan internal kegiatan kesekretariatan dan keuangan.

BAB VI
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dan sub kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan dan sub kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan dan sub kegiatan. *Outcome* dan *output* saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk b*eneficiaries* tertentu, yang mencerminkan berfungsinya *output* dari kegiatan dan sub kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029 diantaranya :

a. Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD.
b. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan program-program Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Dari rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan

pencapaian target *outcome* program dan *output* kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 disertai pagu indikatif anggaran sebagai mana Tabel berikut :

Tabel 4.1

TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Dukungan pelasaksaan tugas dan fungsi DPRD				Tingkat kepuasaan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD		
		Meningkatnya Kualitas fasilitasi rapat Pimpinan dan Anggota DPRD					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian perundang-undangan		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian perundang-undangan	Program 1. Dukungan pelaksanan tugas dan fungsi DPRD	
				Dokumen peraturan daerah atau peraturan DPRDn	Dokumen peraturan daerah atau peraturan DPRD	Kegiatan 1.1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
						Sub kegiatan 1.1.1 penyusunan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						pembahasan program pembentukan peraturan daerah	
						Sub kegiatan 1.1.2 pembahasan rancangan peraturan Daerah	
						Sub kegiatan 1.1.3 penyelenggaraan kegiatan perundang-unadangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelsan /keyteranga n dan/atau naskah akademik	
						Sub Kegiatan Sosialiasai Peraturan daeah yang dilakukan Bersama DPRD dengan Pemerintaha hn Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Dokumen kebijakan anggaran	Dokumen kebijakan anggaran	Kegiatan 1.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	
						Sub kegiatan 1.2.1 pembahasan KUA dan PPAS	
						Sub kegiatan 1.2.2 pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Sub kegiatan 1.2.3 pembahasan APBD	
						Sub kegiatan 1.2.4 pembahasan APBD perubahan	
						Sub kegiatan 1.2.5 pembahasan pertanggung jawaban APBD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
		Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan pengawasan		Laporan penyelenggaraan pengawasan	Laporan penyelenggaraan pengawasan	Kegiatan 1.3 Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	
						Sub kegiatan 1.3.1 pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	
						Sub kegiatan 1.3.2 pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						r	
						Sub kegiatan 1.3.3 pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	
						Sub kegiatan 1.3.4 pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Sub kegiatan 1.3.5 pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	
						Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran	
						Sub kegiatan 1.3.6 pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						kepala daerah	
				Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja DPRD	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja DPRD	Kegiatan 1.4 peningkatan kapasitas DPRD	
						Sub kegiatan 1.4.1 orientasi anggota DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Sub kegiatan 1.4.2 pendalaman tugas DPRD	
						Sub kegiatan 1.4.3 penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	
						Sub kegiatan 1.4.4 penyediaan tenaga ahli fraksi	
						Sub kegiatan 1.4.5 penyusunan program kerja DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Sub kegiatan 1.4.6 publikasi dan dokumentasi DPRD	
				laporan hasil kegiatan penyaringan aspirasi masyarakat	laporan hasil kegiatan penyaringan aspirasi masyarakat	Kegiatan 1.5 penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyrakat	
						Sub kegiatan 1.5.1 kunjungan kerja dalam daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Sub kegiatan 1.5.2 pelaksanaan reses	
						Sub Kegiatan Sosialiasai Rancangan Peraturan Daerah	
				Dokumen Laporan koordinasi dan konsultasi	dokumen Laporan koordinasi dan konsultasi	kegiatan 1.6 fasilitasi tugas DPRD	
						Sub kegiatan 1.6.1 koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Sub kegiatan 1.6.2 penyusunan laporan kinerja DPRD	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas badan Musyawarah	
			Meningkatnya Kualitas Kinerja perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Kinerja perangkat Daerah	Program 2 penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/ kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan	Kegiatan 2.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Sub kegiatan 2.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						sub kegiatan 2.1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlasaksananya Kegiatan Admnistrasi Kepegawai	Terlasaksananya Kegiatan Admnistrasi Kepegawaian Perangkat	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				an Perangkat Daerah	Daerah		
						Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelenglapan nya	
				Terlaksana nya pelayanan administra si umum	terlaksanan ya pelayanan administrasi umum	Kegiatan 2.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Sub kegiatan 2.2.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Sub kegiatan 2.2.2 penyedian peralatan dan perlengkapan kantor	
						sub kegiatan 2.2.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						sub kegiatan 2.2.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						sub kegiatan 2.2.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						sub kegiatan 2.2.6 penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya layanan pengadaan barang milik daerah	Terlaksanannya layanan pengadaan barang milik daerah	Kegiatan 2.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	
						Sub kegiatan 2.3.1 pengadaan mebel	
				Tersediany a jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan 2.4 penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Sub kegiatan 2.4.1 penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	
						Sub kkegiatan 2.4.2 penyediaan jasa pelayanan umum kantor	
				Tersediany a jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan 2.5 pemeliharaa n barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daearah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Sub kegiatan 2.5.1 penyediaan jasa pemeliharaan biaya , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
						Sub kegiatan 2.5.2 penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemelihraan , pajak dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	
						Sub kegiatan 2.5.3 pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
						Sub kegiatan 2.5.4 pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Tersediany a jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan 2.6 pelayanan keuangan dan kesejahteraa n DPRD	
						Sub kegiatan 2.6.1 penyelenggr aan administrasi keuangan DPRD	
						Sub kegiatan 2.6.2 penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Sub kegiatan pelaksanaan Medical Cek Up DPRD	
				Terlaksananya layanan administrasi DPRD	Terlaksanan ya layanan administrasi DPRD	Kegiatan 2.7 layanan administrasi DPRD	
						Sub kegiatan Penyelenggaraan Admistrasi keanggotaan DPRD	
						Sub kegiatan 2.7.1 fasilitasi fraksi DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
						Sub kegiatan 2.7.2 penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	

TABEL 4.2

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaa	100%	14.778.093.385	100%	14.438.097.310	100%	14.739.188.321	100%	14.950.772.926	100%	15.104.574.297	

DAERAH KAB/KOTA	n, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah											
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Perangkat Daerah**	**49 Orang**	**3.624.657.689**	**49 Orang**	**3.805.890.573**	**49 Orang**	**3.996.185.102**	**49 Orang**	**4.195.994.357**	**49 Orang**	**4.405.794.075**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Perangkat Daerah	41 Orang	3.467.809.289	41 Orang	3.641.199.753	41 Orang	3.823.259.741	41 Orang	4.014.422.728	41 Orang	4.215.143.865	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Pelayanan dan	8 orang	156.848.400	8 orang	164.690.820	8 orang	172.925.361	8 orang	181.571.629	8 orang	190.650.211	

	Pelaksanaan Tugas Fungsi Perangkat Daerah											
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima layanan administrasi perangkat daerah				**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**	
Pegadaan pakaian pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	1 paket	150.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Perangkat		**707.836.970**		**849.737.219**		**1.878.069.115**		**3.517.653.905**		**2.162.009.839**	

	Daerah											
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Perangkat Daerah	1 tahun	20.167.400	1 tahun	21.175.770	1 tahun	22.234.559	1 tahun	23.346.286	1 tahun	24.513.601	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Perangkat Daerah	2 Paket	112.728.000	2 Paket	118.364.400	2 Paket	124.282.620	2 Paket	130.496.751	2 Paket	137.021.589	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas	3 Paket	250.183.920	3 Paket	262.693.116	3 Paket	275.827.772	3 Paket	289.619.160	3 Paket	304.100.118	

	Fungsi Perangkat Daerah											
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Perangkat Daerah	1 Paket	105.000.000	1 Paket	110.250.000	1 Paket	115.762.500	1 Paket	121.550.625	1 Paket	127.628.156	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Perangkat Daerah	1 Paket	104.737.500	1 Paket	109.974.375	1 Paket	115.473.094	1 Paket	121.246.748	1 Paket	127.309.086	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi	4 laporan	115.020.150	4 laporan	120.771.158	4 laporan	126.809.715	4 laporan	133.150.201	4 laporan	139.807.711	

	Perangkat Daerah											
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Perangkat Daerah		**138.616.000**		**106.508.400**		**122.484.660**		**890.857.359**		**161.985.963**	
Pengadaan Kendaraan Dinas	Meningkatnya Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Perangkat Daerah	1 Unit	46.000.000					1 Unit	750.000.000			
Pengadaan Mebel	Meningkatnya Pelayanan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi	1 Paket	92.616.000	1 Paket	350.508.400	1 Paket	122.484.660	1 Paket	140.857.359	1 Paket	161.985.963	

	Perangkat Daerah											
Penyediaan Jasa Penujang Uruusan Pemerintahan Daerah			**741.510.000**		**793.415.700**		**852.709.536**		**916.529.414**		**977.657.652**	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	1 tahun	116.970.000	1 tahun	125.157.900	1 tahun	137.673.690	1 tahun	151.441.059	1 tahun	159.013.112	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	1 tahun	624.540.000	1 tahun	668.257.800	1 tahun	715.035.846	1 tahun	765.088.355	1 tahun	818.644.540	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			**719.527.200**		**791.479.920**		**870.627.912**		**957.690.703**		**1.053.459.774**	

Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	6 Unit	192.582.600	6 Unit	211.840.860	6 Unit	233.024.946	6 Unit	256.327.441	6 Unit	281.960.185	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	22 Unit	88.244.100	22 Unit	97.068.510	22 Unit	106.775.361	22 Unit	117.452.897	22 Unit	129.198.187	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	45 Unit	51.922.500	45 Unit	57.114.750	45 Unit	62.826.225	45 Unit	69.108.848	45 Unit	76.019.732	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Terpeliharanya Gedung	1 Unit	386.77	1 Unit	425.45	1 Unit	468.001.38	1 Unit	514.801	1 Unit	566.281	

Bangunan Lainnya	Kantor		8.000		5.800		0		.518		.670	
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			**10.292.348.968**		**10.806.966.416**		**11.347.314.737**		**11.914.680.474**		**12.510.414.498**	
Penyelenggaraan Kesejahteraan Administrasi Keuangan DPRD	Terselenggaranya Administrasi Kesejahteraan DPRD	20 Orang	9.792.522.968	20 Orang	10.282.149.116	20 Orang	10.796.256.572	20 Orang	11.336.069.401	20 Orang	11.902.872.871	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	120 Stel	299.826.000	120 Stel	314.817.300	120 Stel	330.558.165	120 Stel	347.086.073	120 Stel	364.440.377	
Gerenal Cekup Anggota DPRD	Tersedianya Gerenal Cek Up Anggota DPRD	20 Orang	200.000.000	20 Orang	210.000.000	20 Orang	220.500.000	20 Orang	231.525.000	20 Orang	243.101.250	
Layanan Administrasi DPRD			**485.000.000**		**509.250.000**		**534.712.50**		**1.761.448.125**		**589.520.531**	

							0					
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Terselenggaranya Administrasi Keanggotaan DPRD		-	20 orang	150.000.000 -		-	20 Orang	1.200.000.000			
Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksanannya Fasilitasi Fraksi DPRD	5 laporan	35.000.000	5 laporan	36.750.000	5 laporan	38.587.500	5 laporan	40.516.875	5 laporan	42.542.719	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya Kebutuhan RT DPRD	1 tahun	450.000.000	1 tahun	672.500.000	1 tahun	696.125.000	1 tahun	670.931.250	1 tahun	746.977.813	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		80%	19.729.328.172	80%	18.995.939.167	80%	19.392.079.074	80%	19.670.457.048	80%	19.872.810.685	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			**1.378.550.000**		**1.516.405.000**		**1.668.045.500**		**1.834.850.050**		**2.018.335.055**	

penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dok Pembentukan Perda yang dihasilkan DPRD	2 Laporan	221.928.000	2 Laporan	244.120.800	2 Laporan	268.532.880	2 Laporan	295.386.168	2 Laporan	324.924.785	
Pembahasan Peraturan Daerah	Jumlah Dok Hasil Pembahasan Perda	12 Perda	900.086.000	12 Perda	990.094.600	12 Perda	1.089.104.060	12 Perda	1.198.014.466	12 Perda	1.317.815.913	
Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dok Kajian Peraturan Perudang-Undangan	2 Laporan	256.536.000	2 Laporan	282.189.600	2 Laporan	310.408.560	2 Laporan	341.449.416	2 Laporan	375.594.358	
Fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan Naskah Akademik	Jumlah dok hasil penyusunan penjelasanatau tereangan dan/atau naskakh akademik Nyang difasilitasi			2 Dok	80.000.000	2 Dok	80.000.000	2 dok	80.000.000	2 dok	80.000.000	

Sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah daerah	Jumlah orang yangb mengikuti sosialisasi peraturan daerah yag dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah daerah			60 Orang	600.000.000	60 orang	600.000.000	60 org	600.000.000	60 org	600.000.000	
Pembahasan kebijakan Anggaran			**827.533.350**		**910.286.685**		**1.001.315.354**		**1.101.446.889**		**1.211.591.578**	
Pembahsan KUA PPAS	Jumlah Dok Hasil pembahasan KUA PPAS	1 Dok	24.187.590	1 Dok	26.606.349	1 Dok	29.266.984	1 Dok	32.193.682	1 Dok	35.413.051	
Prmbahasan KUA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dok Hasil pembahasan KUA PPAS Perubahan	1 Dok	24.187.590	1 Dok	26.606.349	1 Dok	29.266.984	1 Dok	32.193.682	1 Dok	35.413.051	
Pembahasan APBD	Jumlah Dok Hasil pembahasa	1 Dok	242.08	1 Dok	266.28	1 Dok	292.917.33	1 Dok	322.209	1 Dok	354.429	

	n APBD		0.440		8.484		2		.066		.972	
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dok Hasil pembahasan APBD Perubahan	1 Dok	246.285.690	1 Dok	270.914.259	1 Dok	298.005.685	1 Dok	327.806.253	1 Dok	360.586.879	
Pembahasan Laporan Pertanggunjawaban APBD	Jumlah Dok Hasil pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dok	290.792.040	1 Dok	319.871.244	1 Dok	351.858.368	1 Dok	387.044.205	1 Dok	425.748.626	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			**2.154.063.690**		**2.369.470.059**		**2.606.417.065**		**2.867.058.771**		**3.153.764.649**	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Lap Hasil pengawasan Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan	326.119.500	3 Laporan	358.731.450	3 Laporan	394.604.595	3 Laporan	434.065.055	3 Laporan	477.471.560	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	Jumlah Lap Hasil pengawasan Pemerintah	3 Laporan	524.013.000	3 Laporan	576.414.300	3 Laporan	634.055.73	3 Laporan	697.461.303	3 Laporan	767.207.433	

Infrastruktur	an urusan bid Infrastruktur						0					
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan rakyat	Jumlah Lap Hasil pengawasan Pemerintahan urusan bid Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	327.054.000	3 Laporan	359.759.400	3 Laporan	395.735.340	3 Laporan	435.308.874	3 Laporan	478.839.761	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Lap Hasil pengawasan Pemerintahan urusan bid Perekonomian	3 Laporan	340.130.000	3 Laporan	374.143.000	3 Laporan	411.557.300	3 Laporan	452.713.030	3 Laporan	497.984.333	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Lap Hasil pengawasan Pemerintahan urusan bid Sumbr Daya Alam	3 Laporan	474.850.000	3 Laporan	522.335.000	3 Laporan	574.568.500	3 Laporan	632.025.350	3 Laporan	695.227.885	

Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dok hasil pengawasan penggunaan anggaran			4 laporan	650.000.000	4 lap	650.000.000	4 lap	650.000.000	4 lap	650.000.000	
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil pembahasan LKPj Kepela Daerah	1 Dok	161.897.190	1 Dok	178.086.909	1 Dok	195.895.600	1 Dok	215.485.160	1 Dok	237.033.676	
Peningkatan Kapasitas DPRD			**1.565.609.070**		**1.722.169.977**		**1.894.386.975**		**2.533.825.672**		**2.292.208.239**	
Orientasi DPRD	Jumlah Dok Hasil Orientasi							1 Dok	450.000.000			
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dok Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 laporan	993.414.300	6 laporan	1.092.755.730	6 laporan	1.202.031.303	6 laporan	1.322.234.433	6 laporan	1.454.457.877	
Penyediaan Kelompok Pakar	Jumlah Orang Dalam	3 Orang	126.00	3 Orang	138.60	3 Orang	152.460.00	3 Orang	167.706	3 Orang	184.476	

dan Tim Ahli	Kelompok Pakar		0.000		0.000		0		.000		.600	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Laporan	315.000.000	5 Laporan	346.500.000	5 Laporan	381.150.000	5 Laporan	419.265.000	5 Laporan	461.191.500	
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dok Rencana Kerja DPRD	12 Laporan	26.194.770	12 Laporan	28.814.247	12 Laporan	31.695.672	12 Laporan	34.865.239	12 Laporan	38.351.763	
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dok Publikasi dan Dok DPRD	5 Laporan	105.000.000	5 Laporan	115.500.000	5 Laporan	127.050.000	5 Laporan	139.755.000	5 Laporan	153.730.500	
Pelaksanaan dan Pegawasan Kode Etik			**225.000.000**		**247.500.000**		**272.250.000**		**299.475.000**		**329.422.500**	
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dok Penyusunan Kode Etik	3 Laporan	150.000.000	3 Laporan	165.000.000	3 Laporan	181.500.000	3 Laporan	199.650.000	3 Laporan	219.615.000	
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dok Pengawasan Kode Etik	3 Laporan	75.000.000	3 Laporan	82.500.000	3 Laporan	90.750.000	3 Laporan	99.825.000	3 Laporan	109.807.500	

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			**3.937.515.820**		**4.331.267.402**		**4.764.394.142**		**5.240.833.556**		**5.764.916.912**	
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	5 Laporan	834.195.600	5 Laporan	917.615.160	5 Laporan	1.009.376.676	5 Laporan	1.110.314.344	5 Laporan	1.221.345.778	
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dok Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dok	3.103.320.220	3 Dok	3.413.652.242	3 Dok	3.755.017.466	3 Dok	4.130.519.213	3 Dok	4.543.571.134	
Sosialisasi Rancangan Peraturan daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Rancangan peratutran Daerah			60 Orang	600.000.000	60 Org	600.000.000	60 Orang	600.000.000	60 Org	600.000.000	
Fasilitasi Tugas DPRD			**1.121.944.770**		**1.234.139.247**		**1.357.553.172**		**1.493.308.489**		**1.642.639.338**	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dok Hasil Koordinasi	5 Laporan	1.088.904.00	5 Lapora	1.197.794.40	5 Laporan	1.317.573.8	5 Laporan	1.449.3	5 Laporan	1.594.2	

DPRD	dan Konsultasi DPRD		0	n	0		40		31.224		64.346	
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi dan AKD dan Kinerja DPRD	3 Dok	33.040.770	3 Dok	36.344.847	3 Dok	39.979.332	3 Dok	43.977.265	3 Dok	48.374.991	
Fasilitasi Kegiatan Anggota Bamus	Jumlah Dok hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan Musyawarah	2 Dok		2 Dok	300.000.000	2 Dok	300.000.000	2 Dok	300.000.000	2 Dok	300.000.000	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten kepulauan Mentawai dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan RPJMD :
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Akuntabel.

Sasaran RPJMD :
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif dan Integratif

Tujuan Perangkat Daerah :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD

Indikator Tujuan :
Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sasaran 1 Perangkat Daerah :
Meningkatnya Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD

Indikator Sasaran :
1) Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD badan pembentukan Perda.
2) Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Fungsi DPRD di Bidang Anggaran dan Pengawasan

Sasaran 2 Perangkat Daerah :
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sasaran :

1) Capaian Program Perangkat Daerah

Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah.

TABEL 4.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks kepuasan pelayanan pimpinan dan anggota DPRD	Indeks	74	74	75	76	77	78	
2.	Persentase Fasilitasi Rapat DPRD tepat waktu	Persen	75	78	80	82	85	90	
3.	Persentase aspirasi masyarakat yang ditanggapi DPRD	persen	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase ranperda yang disetujui tepat waktu	persen	75	78	80	82	85	90	
5.	Nilai lakip	nilai	75	75	76	76	77	77	
6.	Jumlah inovasi yang	jumlah	1	1	1	1	1	1	

	diterapkan								
7.	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	persen	85	86	87	88	89	90	

TABEL 4.4

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) Sekretariat PRD

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketepatan penetapan Perda APBD	Pesen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penetapan Ranperda	Pesen	75	78	80	82	85	90	
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pesen	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5
Tujuan sasaran dan indikator sasaran

Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran
1	2	3
Mendorong Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sesuai standar operasional prosedur (SOP)	Jumlah Peraturan Daerah disetujui/ ditetapkan oleh DPRD
		Persentase Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap tugas pokok dan fungsi Dewan sesuai standar operasional prosedur (SOP)

	Meningkatnya pelayanan penyampaian aspirasi Masyarakat ke DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan keDPRD sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum,kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitiandan layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD	Terwujudnya haronisasi hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jumlah produk hukum yang difasilitasi Sekretariat DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah dibahas dan didukung oleh DPRD
		Persentase kebijakan Pemerintah Daerah yang didukung oleh DPRD

BAB V
PENUTUP

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, pada setiap tahun anggaran, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1) Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan dasar penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tercapainya sasaran pembangunan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Sekretariat DPRD.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Sekretariat DPRD serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan urusan dasar penunjang pemerintahan dan atau target kinerja sasaran Sekretariat DPRD.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Sekretariat DPRD, harus terus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Sekretariat DPRD. Lakip tersebut akan menjadi bukti (*prove)* pencapaian kinerja dan bahan perbaikan *(improving*) pencapaian kinerja Sekretariat DPRD di masa yang akan datang. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat DPRD ini.

Strategi pengolaaan resiko berfokus pada meminimalisir dampak negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Prioritas utama adalah mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan resiko yang paling signifikan. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlangsungan operasional dan kelanjutan proses.

Pengendalian dan pengelolaan resiko atas tujuan dan sasaran strategis dapat dilakukan melalui serangkaian langkah sistematis dengan proses identifikasi resiko, analis dan evaluasi untuk memahami kemungkinan serta dampaknya. Setelah itu diterapkan strategi penanganan resiko seperti menghindarinya, menguranginya dan memindahkan pihak lain atau menerima resiko tersebut jika dampaknya kecil, selanjutnya langkah terakhir proses pegendalian dan pengelolaan resiko dengan pemantauan dan peninjauan berkala untuk memastikan efektivitasnya.

Tata kelola satu data Indonesia di perangkat daerah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan melibatkan beberapa peran utama yaitu pembina data daerah, walidata daerah dan produsen data daerah. Peran ini terkoordinasi melalui forum satu data Indonesia tingkat daerah untuk memastikan data yang dihasilkan akurat, mutakhir dan dapat dipertangung jawabkan. Prosesnya mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaaan dan penyebarluasan data. Adapun proses satu data dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Data
   Perangkat Daerah mengidentifikasi kebutuhan data berdasarkan rencana pembangunan dan berkoordinasi dengan Forum Satu Data untuk menyusun daftar data prioritas.
2. Pengumpulan Data
   Produsen data mengumpulkan data sesuai daftar yang disepakati, melengkapi dengan metadata lalu menyampaikan kepada walidata.
3. Pemeriksaan Data
   Walidata memeriksa data yang disampaikan oleh produsen data untuk memastikan sesuai standar data, metadata, dan prinsip interoperabilitas, jika tidak sesuai, data dikembalikan untuk diperbaiki.
4. Penyebarluasan Data
   Setelah data diverifikasi, Walidata menyebarluaskannya melalui portal Satu Data Daerah, sehingga dapat diakses dan digunakan pihak lain.

Sebagai penutup, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pegawai Sekretariat DPRD beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

LAMPIRAN I

A. Metadata Indikator Kinerja Utama

Sasaran IKU Pemerintah Daerah	Tujuan/ sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Penjelasan / formulasi penghitungan	sumber data	Keterangan (Penanggungjawab)
Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	terwujudnya kualitas fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	indeks kepuasan layanan pimpinan dan anggota DPRD	indeks	indeks kepuasan layanan pimpinan dan anggota DPRD	Sekretariat, Pimpinan dan Anggota DPRD dirilis oleh Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
	meningkatnya kualitas fasilitasi rapat pimpinan dan anggota DPRD	persentase fasilitasi rapat-rapat DPRD	persen	persentase fasilitasi rapat rapat DPRD tepat waktu	Jumlah Fasilitasi Rapat-Rapat DPRD tepat waktu dibagi jumlah rapat-rapat yang difasilitasi dikali 100 persen	Sekretariat DPRD

	meningkatnya kualitas fasilitasi aspirasi masyarakat kepada pimpinan dan anggota DPRD	persentase aspirasi masyarakat yang ditanggapi oleh DPRD	persen	Persentase Aspirasi masyarakat yang ditanggpi DPRD	Jumlah aspirasi masyarakat yang ditanggapi DPRD dibagi jumlah aspirasi masyarakat yang diterima atau ditampung dikali 100 persen	Sekretariat DPRD
	meningkatnya Kulitas Fasilitasi proses legislasi oleh DPRD	Persentase Ranperda yang disetujui tepat waktu	persen	Persentase Ranperda yang disetujui Tepat waktu	jumlah ranperda yang disetujui tepat waktu dibagi jumlah ranperda yang dibahas dikali 100 persen	Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Nilai Lakip	nilai	nilai Lakip	nilai Lakip dikeluarkan oleh Inspektorat setiap tahunnya	Inspektorat
		jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah	jumlah Inovasi yang diterapkan	jumlah inovasi yang diterapkan	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah	jumlah target kinerja perangkat yang tercapai dibagi jumlah target kinerja dikali 100 persen	Sekretariat DPRD

B. Metadata Indikator Kinerka Kunci

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2025					KET
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketepatan penetapan perda APBD tahun N	persen	100	100	100	100	100	100	
2	persentase Penetapan Ranperda tahun N	persen	75	78	80	82	85	90	
3	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah	persen	100	100	100	100	100	100	

LAMPIRAN II

Identifikasi Risiko Strategis OPD
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat
Nama OPD	:	SEKRETARIAT DPRD
Tahun Penilaian	:	2024
Periode yang dinilai	:	Periode RPD Tahun 2023-2026
Tujuan Strategis	:	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Akuntabel, Transparan dan Melayani
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	G	h	i	j	k
1	Tujuan: Terwujudnya Kinerja Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD									

	Sasaran Strategis OPD: Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Legalisasi Fungsi DPRD	Persentase Penetapan ranperda	Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dengan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-ungan yang digunakan	RSO.24.34.03.01	Sekwan	tidak semua pegawai sekretariat DPRD yang memahami dan mentafsirkan PERUNDANG-UNDANGAN	Internal	C	Kualitas SDM belum kompeten	Sekwan
	Program: Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		keterlambatan ranperda dan eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD	RSO.24.34.03.02	Sekwan	tidak sesuainya rencana kerja DPRD dengan bahan ranperda bahan yang disampaikan	ekternal	UC	belum terlaksananya pembahasan ranperda yang sesuai target kinerja DPRD	sekwan

			menjadi tidak dapat maksimal			ke DPRD				
			Banyaknya kegiatan yang terfokus di akhir tahun anggran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terptogram sesuai mekanisme anggran yang ada	RSO.24.34.03.03	Sekwan	Terlambatnya ranperda disampaikan ke DPRD	Eksternal	UC	tidak tercapainya ranperda	Sekwan

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

24	Tahun
	jenis
34	resiko
	entitas
03	OPD
	no.
01	urut

Kolom c diisi dengan indikator kinerja
tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa
yang merupakan risiko
Kolom e diisi dengan
Kode risiko
Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/
berkepentingan untuk mengelola risiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko,
sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan Material
Kolom h diisi dengan sumber risiko
(eksternal/internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab
risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak
risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom k diisi dengan pihak/unit yang
menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar
terjadi

LAMPIRAN XVII
PERATURANBUPATIKEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i
DAFTAR TABEL..... ii
DAFTAR GAMBAR..... iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 4
1.3 Maksud dan Tujuan..... 6
1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 20

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029..... 27
3.2 Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029..... 28
3.3 Strategi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029..... 30
3.4 Arah Kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029..... 31

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Uraian Program, Kegitan, Subkegiatan..... 33
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 62

BAB V PENUTUP..... 64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan.....	14
Tabel 2.2	Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	41
Tabel 2.3	Keadaan Alokasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, 2024-2024.....	15
Tabel 2.4	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.....	16
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2020-2024.....	19
Tabel 2.6	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	20
Tabel 2.7	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	22
Tabel 2.8	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	23
Tabel 2.9	Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	24
Tabel 2.10	Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	24
Tabel 2.11	Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.....	25
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029.....	27
Tabel 3.2	Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, 2025-2029.....	28
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029...	29
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 2025-2029.....	30
Tabel 3.5	Penahapan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.....	31
Tabel 3.6	Arah Kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.....	31
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.....	34
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	44
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	59
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama.....	62
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram alir Tahapan Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah……..	3
Gambar 1.2	Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan…	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah……..	15
Gambar 3.1	Konsep Penyusunan Renstra……..	28
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah……..	29
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah……..	33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD dan merupakan dokumen yang bersifat indikatif. Dengan telah terbitnya Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyusun Renstra Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam mengawal tercapainya perencanaan dan pembangunan daerah.

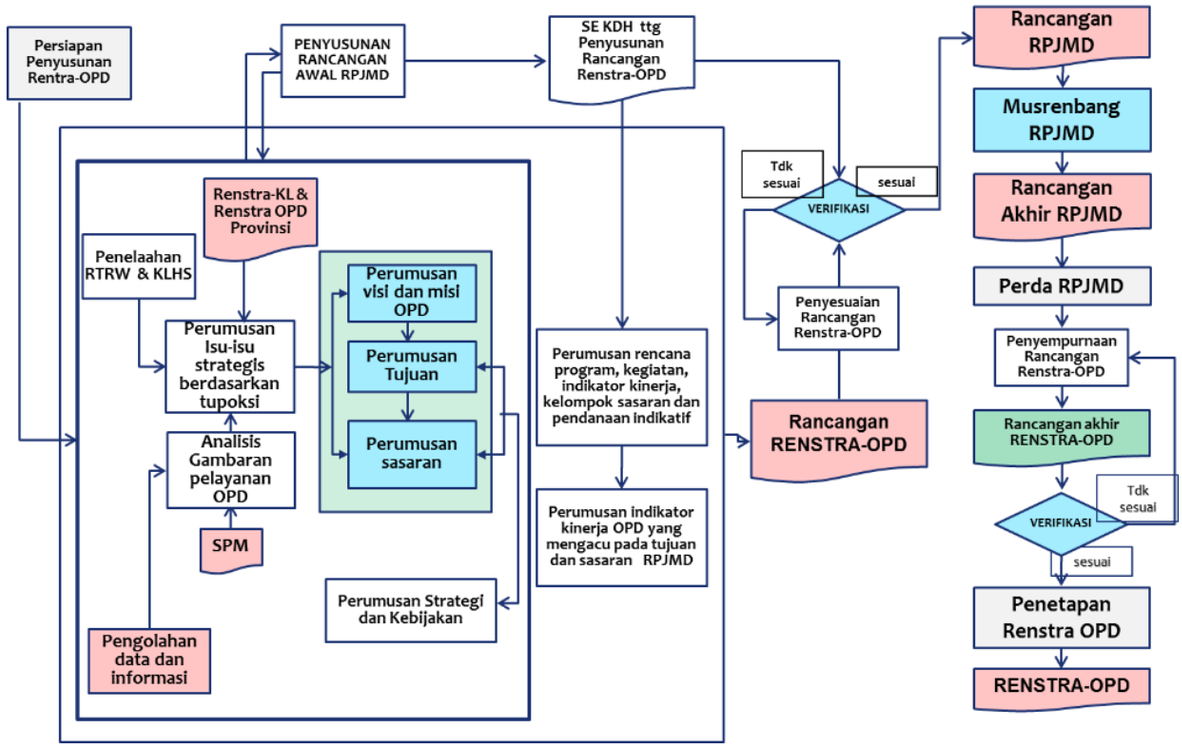
Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah dokumen perencanaan strategis berorientasi pada hasil yang akan dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah disusun berpedoman pada RPJMD dan secara substansi, sistematika berpedoman Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra, antara lain :
   a. Pembentukan SK Tim penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.
   b. Orientasi mengenal Renstra.
   c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusunan Renstra.
   d. Inventarisir data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan
   e. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah antara lain:
   a. Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
   b. Perumusan masalah dan isu strategis.
   c. Perumusan tujuan dan sasaran.
   d. Perumusan strategi dan arah kebijakan.
   e. Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
3. Penyusunan Rancangan Renstra antara lain:
   a. Penyususnan Rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan proses penyempunaan Ranwal Renstra perangkat Daerah berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
   b. Rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dibahas dalam Forum Perangkat daerah/ lintas perangkat daerah.

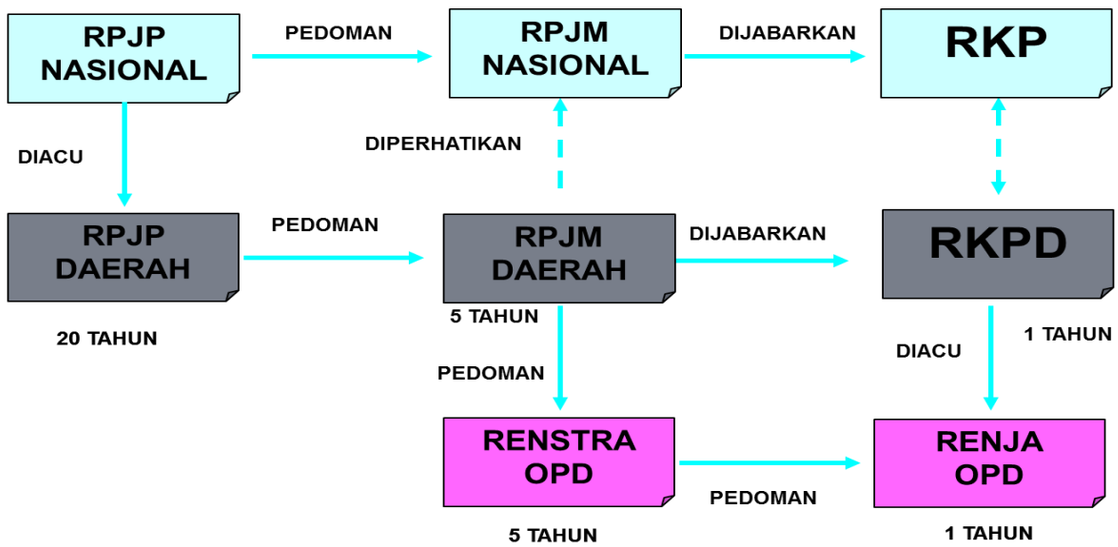
c. Forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan /kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak dan pemangku kepentingan terkait.
d. Hasil Kesepakatan Forum perangkat Daerah dituangkan dalam Berita Acara.
e. Rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah disempurnakan berdasarkan berita acara.
f. Rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang telah disempurnakan berdasarkan hasil berita acara disampaikan kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk diverifikasi.
g. Rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

4. Rancangan Akhir Renstra antara lain:
   a. Perumusan rancangan akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029
   b. Perumusan Rancangan Akhir Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/subkegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tantang RPJMD.
   c. Rancangan akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang telah disempurnakan disampaikan ke Inspektorat untuk direviu oleh APIP.
   d. Rancangan akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah disempurnakan berdasarkan hasil reviu oleh APIP.
5. Penetapan Renstra antara lain:
   a. Rancangan Akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala perangkat daerah kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk dilakukan proses penetapan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
   b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
   c. Penetapan Perkada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.



Gambar 1.1
Diagram alir Tahapan Penyusunan Renstra
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tentunya memperhatikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah, provinsi maupun pusat. Penyelarasan tersebut terkait dengan pelaksanaan tupoksi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah agar lebih efektif dan efisien. Hubungan dan keterkaitan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat melalui Gambar 1.2.



Gambar 1.2
Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RenjaBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

Inovasi Daerah. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Diubah dengan PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun.

2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
3. Pedoman dalam fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai penjabaran operasional visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah menyangkut fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan RenjaBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merumuskan latar belakang Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahTahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahTahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis serta dasar hukum yang relevan dan signifikan dan menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Bab ini terdiri atas:

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Bab ini berisi penyajian data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah disertai evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir, serta mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan yang berkaitan dengan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan InovasiDaerahdan mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat memengaruhi perangkat daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bab ini terdiri atas:

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya dan mengacu pada sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang dijabarkan secara operasional dalam jangka waktu 5 (lima) tahun disertai dengan indikator kinerja dan target pencapaian yang didukung dengan program prioritas pembangunan daerah, Bab ini terdiri atas:

3.1 Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahTahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahTahun 2025-2029
3.3 Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahTahun 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahTahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat program, kegiatan, subkegiatan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya, dan menjelaskan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci beserta target dan pagu indikatif untuk pencapaian 5 (lima) tahun kedepan, Bab ini terdiri atas:

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesesuaian antara target kinerja Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerahsebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHANDAN ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Risetdan Inovasi Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawaimelaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana kerja dan keuangan badan;
2. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian danpengembangan;
3. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
4. pemantauann evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan, sertapenelitian dan pengembangan;
5. pelaksanaan kesekretariatan Badan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan OrganisasiBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang dipimpin oleh pejabat eselon II b (Kepala Badan) sebagai berikut:

1. kepala Badan;
2. sekretariat;
3. bidang perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
4. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
6. bidang riset dan inovasi Daerah; dan
7. UPTD.

Secara rinci tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

A. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris Badan, memiliki:

Tugas : Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Fungsi : a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan Badan;

b. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, hukum, kelembagaan, tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, hubungan masyarakat, sistem pengendalian intern pemerintah, dan

pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan;

c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi rencana strategis, laporan evaluasi rencana kerja, rencana kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur negara, rencana kebutuhan aset, rencana pemanfaatan aset, rencana anggaran kas, rencana program kerja tahunan, rencana pengendalian risiko, dan dokumen perencanaan lainnya di lingkungan Badan;
d. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi rencana strategis, laporan evaluasi rencana kerja, dokumen manajemen risiko, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan realisasi fisik dan keuangan, laporan pemanfaatan aset, laporan pengelolaan piutang/utang, laporan keuangan bulanan, semester, dan tahunan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan, dan laporan lainnya di lingkungan Badan;
e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah, survei kepuasan masyarakat, penilaian dan evaluasi manajemen risiko, serta penilaian dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian umum dan kepegawaian, mempunyai :

Tugas : membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
c. penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan;
d. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
e. penyiapan bahan pengelolaan urusan kerumahtanggaan;
f. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan aset Daerah di lingkungan Badan;
g. penyiapan bahan kerja sama dan kehumasan;
h. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
i. penyiapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
j. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala bidang memiliki:

Tugas : membantu Kepala Badan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.

Fungsi :
a. analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
b. analisis dan pengkajian kewilayahan;

c. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan Daerah;
e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
g. evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
h. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
i. identifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan Daerah;
k. pengamanan datamelalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi
l. penyusunan evaluasidan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

C. Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dipimpin oleh Kepala Bidang, memiliki:

Tugas : membantu Kepala Badan melakukan dan mengoordinasikan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
c. pelaksanaan verifikasi Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
d. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunanmanusia;
f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian, lembaga, dan provinsi pada lingkup bidang pemerintahan dan pembangunanmanusia;
j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
k. pelaksanaan pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang pemerintahan danpembangunan manusia;
l. pelaksanan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
m. pelaksanan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang, memiliki:

Tugas : membantu Kepala Badan melakukan dan mengoordinasikan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.

Fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
c. pelaksanaan verifikasi Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
d. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah dan RPJMD lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait anggaran pendapatan belanja daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian, lembaga, dan provinsi pada lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
k. pelaksanaan pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
l. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. Bidang Riset dan Inovasi dipimpin oleh kepala Bidang, memiliki:

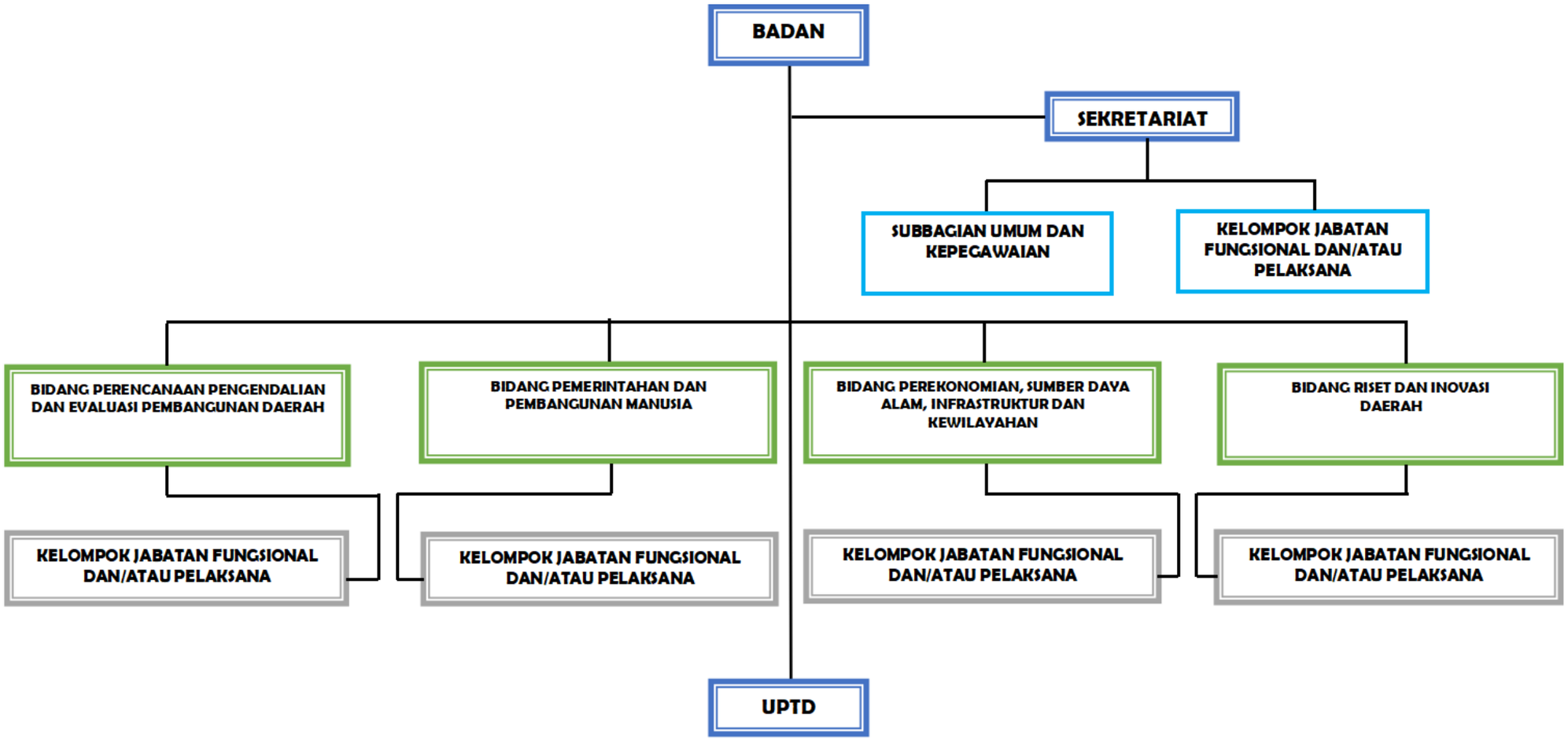
Tugas : membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.

Fungsi :
a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitan, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.

g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
h. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

F. UPTD

UPTD dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas badan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pembentukannya, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

2.1.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Upaya mewujudkan target kinerjaBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah kurun waktu 5 tahun yang akan datang tentu didukung oleh sumber daya aparatur yang dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Sumber daya manusia menjadi salah satu input yang paling berpengaruh dalam mengelola organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Sumber daya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 51 orang, terdiri dari laki-laki 30orang, dan perempuan 21 orang. Berdasarkan status kepegawaiannya, jumlah aparatur PNS berjumlah 36 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) berjumlah 4 orang, dan pegawai kontrak sebanyak 11 orang.

Tabel 2.1
Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Staf	PPPK	PK	Jumlah
1	Kepala Bappeda	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	1	1	7	2	8	20
3	Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan	-	1	-	2	3	-	-	6
4	Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	-	1	-	2	4	-	-	7
5	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	-	1	-	2	2	1	1	7
6	Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian dan Pengembangan	-	1	-	3	3	1	2	10
Jumlah		1	5	1	10	19	4	11	51

Sumber data : Sekretariat Bapperida, kondisi Oktober 2025

Sekretariat memiliki jumlah staf terbanyak diantara jumlah pegawai pada bidang lain, hal ini dinilai masih wajar mengingat tugas operasional Badan beban kerja di sekretariat cukup tinggi dan menyangkut pelayanan kepada publik baik itu di lingkungan aparatur maupun di luar pemerintah daerah.

Tabel 2.2
Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Uraian	S2	S1	D2	SLTA/ Sederajat	Jumlah
1	Kepala Bappeda	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	2	9	1	8	20
3	Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya dan Pemerintahan	2	3	-	1	6
4	Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1	6	-	-	7
5	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	2	5	-	-	7
6	Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan	2	8	-	-	10

No	Uraian	S2	S1	D2	SLTA/ Sederajat	Jumlah
	Program, Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian dan Pengembangan					
Jumlah (orang)		10	31	1	9	51
Persentase (%)		19,61	60,78	1,96	17,65	

Sumber data : Sekretariat Bapperida, kondisi Oktober 2025

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2 tingkat pendidikan karyawan Bapperida yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 31 orang (60,78%). Tingkat pendidikan yang tinggi tentunya akan berbanding lurus dengan capaian kinerja yang positif dan selanjutnya akan mempermudah dalam mencapai tujuan organisasi. Kebijakan dalam peningkatan kapasitas aparatur di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah juga mengakomodir bagi setiap orang yang ingin mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur baik yang ada di dalam daerah, di luar propinsi ataupun di luar negeri serta mendukung sepenuhnya bagi setiap pegawai yang ingin meningkatkan jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun demikian, kendala SDM menjadi isu penting yang perlu diperhatikan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terutama ketersediaan tenaga fungsional perencana dan peneliti. Hal ini sangat perlu, mengingat perlunya tenaga dalam penyusunan beberapa perencanaan dan kajian/penelitian.

2.1.2.2 Anggaran

Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi urusan penunjang perencanaan penelitian dan pengembangan, tentunya didukung dengan anggaran yang memadai. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) alokasi anggaran Bapperida mengalami penurunan, yaitu dari tahun 2020 sebesar Rp12.515.752.798 menjadi Rp8.367.340.153 di tahun 2021 penurunan ini disebabkan adanya dampak Covid-19 yang terjadi di Indonesia sehingga anggaran lebih diutamakan untuk pemenuhan kesehatan. Pada Tahun 2022 sampai 2024 anggaran mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini disebabakan karena adanya efisiensi penggunaan anggaran sehingga beberapa program yang dirasionalisasikan karena berkurangnya dana transfer dari Pemerintah Pusat. Realisasi belanja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif yaitu pada tahun2020 dan 2024. Pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesarRp12.062.247.864 atau 96,38 persen, tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp7.567.128.242 atau 90,44 persen, realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp9.189.492.295 atau 94,40 persen, realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp8.314.104.366 atau 97,56 persen, dan realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp9.010.005.045 atau 94,82 persen.

Tabel 2.3
Keadaan Alokasi Anggaran
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (juta rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Belanja	12.515.752.798	8.367.340.153	9.734.211.595	8.522.356.525	9.502.580.380	12.062.247.864	7.567.128.242	9.189.492.295	8.314.104.366	9.010.005.452
Belanja Operasio	12.421.252.798	8.173.633.501	9.570.019.647	8.049.476.525	8.695.454.030	11.968.137.864	7.473.538.242	9.062.633.295	7.841.274.366	8.216.096.519
Belanja Modal	94.500.000	193.706.652	164.191.948	472.880.000	807.126.350	94.110.000	93.590.000	126.859.000	472.830.000	793.908.933

Sumber data : Lakip Bapperida Tahun 2020-2024

Peningkatan alokasi anggaran Bapperida dikarenakan oleh kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida sebagai fungsi penunjang perencanaan, peningkatan alokasi anggaran juga berbanding lurus dengan berbagai kajian dan perencanaan yang telah diprogramkan.

2.1.2.3 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang tugas dan fungsi pelayananBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung seluruh pelayanan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga sebagai input atau (*capital*)dalam proses pelayanan Bapperida untuk mencapai tujuan organisasi.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

No	Nama Barang	Volume	Kondisi Barang
1	kursi putar	20 unit	baik
2	tanah bangunan kantor pemerintah	2.390 m2	baik
3	sepeda motor	1 unit	baik
4	rak kayu	3 unit	baik
5	*Loudspeaker*	12 set	Baik
6	*Sound System*	2 set	baik
7	*Handycam*	4 unit	baik
8	Alat Rumah Tangga Lain-lain	16 set	baik
9	Laptop	10 unit	baik
10	Bangunan Gedung KantorPermanen	762 m^2	baik
11	Mobil roda 4	1 unit	baik
12	Lemari Besi	4 unit	baik
13	Filling Besi/Metal	5 unit	baik
14	*Unit Transceiver SSB Portable*	1 unit	baik
15	Tripot	6 unit	baik
16	Lemari Kaca	3 unit	baik
17	Lemari Kayu	8 unit	baik
18	Meja Komputer	6 unit	baik
19	Kursi lipat	1 unit	baik
20	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	14 unit	baik
21	Printer	21 unit	baik
22	Instalasi Gardu Listrik IndukKapasitas Kecil	1 unit	baik
23	Meja biro	10 unit	baik
24	AC Split	15 unit	baik
25	P.C Unit	16 unit	baik
26	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2 unit	baik
27	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4 unit	baik
28	Bingkai Plastik	2 unit	baik
29	Instalsi Pusat Pengatur ListrikLain-lain	1 unit	baik
30	Papan Visual	3 unit	baik
31	Kursi Rapat	36 unit	baik
32	Sofa	1 unit	baik
33	*Unit Power Supply*	4 unit	baik
34	*Proyektor + Attachment*	2 set	baik
35	Peralatan studio Visual Lain-lain	5 set	baik
36	Ilmu Pengetahuan umum	1 set	baik
37	Televisi	6 unit	baik
38	Tangga Hidrolik	2 unit	baik
39	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 unit	baik
40	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10 unit	baik
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2 unit	baik
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5 unit	baik
43	Buffet Kaca	1 unit	baik
44	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	3 unit	baik
45	Buku Umum Lain-lain	2 set	baik
46	*Global Positioning System*	3 unit	baik

No	Nama Barang	Volume	Kondisi Barang
47	Alat Penghancur Kertas	3 unit	baik
48	Meja Rapat	31 unit	baik
49	Kursi Rapat	286 unit	baik
50	*Camera + Attachment*	5 set	baik
51	*Unintemuptible Power Supply (UPS)*	3 unit	baik
52	*Ploter*	1 unit	baik
53	*Scanner*	1 unit	baik
54	Gerobak Dorong	1 unit	baik
55	Kursi Besi/Metal	5 unit	baik
56	Meja biro	8 unit	baik
57	Mesin Potong Rumput	1 unit	baik
58	*Mic Conference*	12 unit	baik
59	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8 unit	baik
60	*Audio Amplifier*	1 set	baik
61	*Microphone/ Wireless Mic*	1 set	baik
62	*Power Amplifier*	1 unit	baik
63	*Mixer PVC*	1 unit	baik
64	*Jack CBR*	14 unit	baik
65	Instalasi Pusat Pengatur ListrikLain-lain	1 set	baik
66	Jaringan Telepon Di atas TanahKapasitas Kecil	1 set	baik
67	Ilmu Pengetahuan umum	11 set	baik
68	*Stationary Water Pump*	1 unit	baik
69	*Station Wagon*	1 unit	baik
70	Mesin Penghisap Debu	1 unit	baik
71	Lemari Es	2 unit	baik
72	Televisi	1 unit	baik
73	*Hard Disk*	5 unit	baik
74	Motor Boat	3 unit	baik
75	Mesin Penghitung Uang	1 unit	baik
76	Papan Nama Instansi	4 unit	baik
77	Papan pengumuman	2 unit	baik
78	*Digital Audio Storage System*	1 set	baik
79	Bangunan Gedung KantorPermanen (pusdalisbang)	387,83 m2	baik

Sumber data : Sekretariat Bapperida, kondisi Oktober 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Secara garis besar kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terkait dengan pelaksanaan urusan penunjang fungsi perencanaan penelitian dan pengembangan telah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal. Beberapa indikator kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah telah mencapai target kinerja bahkan ada yang melewati 100 persen dan ada beberapa pencapaian kinerja dibawah target yang direncanakan.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerahpada Tahun 2020-2024 secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan. Ada 4 indikator kinerja yang telah tercapai target yang ditetapkan yaitu indikator tingkat kecukupan analisis data pendukung perencanaan pembangunan dengan pencapaian 100 persen, persentase kajian dan inovasi sebagai dasar pengambilan kebijakan

perencanaan daerah dengan persentase 2 persen. Pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah pada Tahun 2023 sesuai dengan target yang telah ditetapkan semuanya tercapai. Capaian kinerja pada tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan tapi ada juga beberapa indikator yang tidak mencapai target, seperti target Persentase Realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerahdi atas 80 persen dengan nilai target pada tahun 2024 adalah 82 persen dan mendapat nilai realisasi 61,84 persen ini belum tercapai dikarenakan ada beberapa indikator yang belum dirilis realisasinya pada tahun 2024, sedangkan pada indikator Persentase capaian kinerja perangkat daerah dengan target 100 persen dan terealisasi 80 persen ini tidak tercapai dikarenakan ada beberapa indikator yang tidak tercapai sehingga akan memengaruhi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Pada indikator jumlah inovasi yang telah diterapkan pencapaian realisasi melebihi target yang telah ditetapkan yaitu targetnya 2 inovasi terealisasi 3 inovasi. Inovasi tersebut adalah:

1. e-Perijinan
   Merupakan sistem informasi layanan perizinan penelitian KKN yang memberikan kemudahan bagi masyarakat/lembaga/instansi dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin penelitian. Aplikasi ini juga dirancang untuk meningkatkan pelayanan kepada publik agar lebih mudah tanpa harus menunggu waktu yang lama.
2. K'renMen (Klinik Perencanaan)
   Klinikperencanaanpembangunandaerahbiasanyaberkisar pada upayameningkatkanefektivitasperencanaanpembangunan di tingkatdaerah. Klinikperencanaanhadirsebagaiinovasiuntukmengatasima salah-masalahtersebutdenganmenyediakanwadahkonsultasi dan pendampinganbagiperangkatdaerahdalammenyusundokumenperencanaa n.
3. Inkubator Inovasi
   Penerapan program tertentu untuk mengembangkan ide/inisiatif inovasi, yang dilakukan pada periode tertentu yakni sejak munculnya gagasan atau inisiatif inovasi sampai dengan implementasi. Tujuan inovasi memberikan akses kepada OPD dalam melakukan percepatan pencapaian kinerja, perubahan pola kerja yang dapat dicapai dengan melakukan inovasi.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahTahun 2020-2024

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Integrasi Perencanaan Pembangunan	Program Urusan Pilihan yang Terintegrasi	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
2	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
		Kesesuian Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
3	Meningkatnya Porsi Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan	Usulan Masyarakat yang menjadi belanja langsung pada APBD	9%	9%	100	12%	12%	100	20%	20%	100	25%	25%	100	28%	28%	100
4	Meningkatnya Hasil Kajian / Inovasi dan Penelitian yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	Kajian / Penelitian yang diterapkan	0.8%	0.8%	100	1.8%	2%	100	2%	2%	100	60%	100%	100	70%	100%	100
5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah diatas 80%	75%	75,40%	100	77%	77.34%	100	79%	79,14%	100	80%	80,05%	100	82%	61,84%	75,41
		Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	BAIK	BAIK	100	BAIK	BAIK	100	BAIK	BAIK	100	BAIK	BAIK	100	BAIK	BAIK	100
6	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip	B	BB	100%	B	BB	100%	B	A	100%	B	A	100%	B	A	100%
		Jumlah Inovasi yang ditrapkan	1	1	100%	1	1	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	3	150%
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	80%	80

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai lembaga daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan memiliki tantangan dan peluang dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan organisasi. Kelompok sasaran layanan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah ada terdiri dari instansi/lembaga/Masyarakat dan Mahasiswa.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis BadanPerencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai perangkat daerah yang mengurusi perencanaan penelitian dan pengembangan tentunya berbagai permasalahan muncul dan menjadi isu/permasalahan daerah juga menjadi permasalahan bangsa. Permasalahan tersebut jika dibiarkan atau tidak ditangani segera maka dalam jangka waktu tertentu akan berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan dan pada akhirnya akan memengaruhi orientasi dan tujuan pembangunan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

Tabel 2.6
Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih rendahnya kualitas pembangunan daerah	1. Masih rendahnya kualitas perencanaan pembagunan daerah 2. Masih rendahnya Peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah	1. Kurangnya data dan informasi yang akurat 2. Masih minimnya penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah. 3. Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi. 4. Belum terkelolanya data dan informasi sebagai basis data perencanaan pembangunan. 5. Capaian realisasi target kinerja pembangunan daerah belum dapat tecapai secara maksimal 6. Masih rendahnya kemampuan sumber daya aparatur dalam mendukung fungsi perencanaan penelitian dan pengembangan. 7. Masih belum semua target program yang sudah direncanakan dapat direalisasikan 8. Masih minimnya riset/kajian/penelitian pembangunan daerah 9. Masih minimnya pemanfaatan IPTEK dan pengembangan inovasi daerah 10. Rendahnya Anggaran dan investasi untuk riset dan inovasi

A. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 yaitu “Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera”.

1. Maju: Menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mampu berdiri tegak dan sejajar dengan daerah lain, akselerasi disegala sektor pembangunan, mengejar yang belum tercapai, memperbaiki yang ada dan meningkatkan apa yang sudah diraih. Begitu juga pembangunan untuk kemajuan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, infrastruktur yang handal, dan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Berdaya Saing: Upaya Pembangunan untuk kemajuan di setiap lini pembangunan seiring dengan memastikan kualitas dan mutu sehingga memiliki keunggulan yang dapat dijadikan penggerak pertumbuhan sosial, ekonomi dan budaya. Sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, memiliki kebudayaan yang unik dan bernilai tinggi, dan memiliki keunggulan komparatif (keunggulan yang relatif terhadap daerah lain) dan keunggulan kompetitif (keunggulan yang unik dan sulit ditiru) sehingga Kepulauan Mentawai diperhitungkan dalam kancah persaingan Domestik, Nasional dan Internasional.
3. Sejahtera: Kehidupan Mayarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dalam suasana aman, nyaman, terlindungi dan damai, serta adanya kesempatan yang sama bagi semua untuk berkembang dan maju. Sejahtera, mencakup pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memiliki kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan yang melibatkan semua orang tanpa diskriminasi, pembangunan manusia yang hakiki.

Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Ekonomi Daerah.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana
6. Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia.
7. Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Berkeadilan.
8. Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Tepercaya.

Berdasarkan urusan dan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai perangkat daerah tentunya harus berada pada posisi yang penting dalam mendukung dan berkontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepada daerah dalam urusan penunjang perencanaan penelitian dan pengembangan, maka misi 8 (Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Terpercaya) merupakan misi kepala daerah yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Tabel 2.7
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Bapperida	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 8 Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Terpercaya	Masih rendahnya kualitas pembangunan daerah	1. Rendahnya komitmen perangkat daerah dalam keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 2. Belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan daerah. 3. Masih minimnya penggunaan teknologi informatika dalam proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. 4. Belum terkelolanya data dan informasi pembangunan mendukung proses perencanaan pembangunan daerah. 5. Masih sangat minimnya kajian/penelitian/inovasi pembanguan daerah.	1. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN semakin kuat dan sudah memasuki pada proses perencanaan. 2. Sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi semakin mudah diakses (*e-goverment*). 3. Semakin diperkuatnya Bapperida sebagai perangkat daerah membantu kepala daerah dalam fungsi perencanaan daerah melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. 4. Telah ada regulasi tentang sistem inovasi daerah (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
	Program perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah			

B. Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Propinsi

Telaah terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Badan Perencanaan PembangunanRiset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Tabel 2.8
Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahBerdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Propinsi Sumatera Barat	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel	1. Kinerja kelembagaan yang efektif dan efisien. 2. Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan. 3. Sinerginya perencanaan pembangunan provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota. 4. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan 5. Tersedianya database perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi 6. Meningkatnya Fungsi Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Belum selarasnya perencanaan pembangunan daerah. 2. Orientasi perencanaan pembangunan daerah belum berorientasi hasil. 3. Belum termanfaatkan secara maksimal data dan informasi dalam proses perencanaan pembangunan.	1. Masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur. 2. Masih lemahnya koordinasi lintas sektoral terkait perencanaan pembangunan daerah. 3. Masih rendahnya kualitas perencanaan daerah yang dilihat dari keselarasan dan konsistensi perencanaan daerah. 4. Belum maksimalnya ketersediaan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. 5. Masih minimnya kajian/penelitian ataupun inovasi daerah yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.	1. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN semakin kuat dan sudah memasuki pada proses perencanaan. 2. Sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi semakin mudah diakses (*e-goverment*). 3. Akses alokasi anggaran lebih mudah.
2	Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih	1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur yang berintegritas dan profesional 2. Meningkatnya kualitas layanan bagi pengguna LPSE sesuai dengan peraturan yang berlaku	1. Belum dipedomaninya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam peningkatan pelayanan. 2. Rendahnya kualitas pelayanan oleh aparatur.	1. Anggapan aparatur bahwa SOP sebagai standar administrasi. 2. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman akan tugas pokok dan fungsi	Reformasi birokrasi hingga ke daerah sudah menjadi tuntutan bagi setiap aparatur

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan tata ruang yang mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang peruntukannya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035, pada pasal 4 disebutkan bahwa penataan ruang wilayah daerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomianmelalui pengembangan potensi sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis ekonomi kerakyatan, kearifan lokal serta ramah lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana. Pengembangan dan pemanfaatan

wilayah yang menjadi suatu proses pembangunan harus sesuai dengan peruntukan struktur ruang yang tersedia.

Tabel 2.9
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;	1. Sebagai sekretariat BKPRD, masih lemahnya koordinasi lintas sektoral terkait penataan ruang. 2. Masih terbatasnya pemahaman dan informasi yang diterima masyarakat terkait rencana tata ruang wilayah.	1. Tumpang tindih kewenangan penataan ruang. 2. Terbatasnya kewenangan Bapperida secara teknis terhadap pemanfaatan ruang pada pelaksanaan pembangunan. 3. Masyarakat tidak begitu peduli dengan RTRW. 4. Belum tersedianya (paripurna) regulasi daerah yang secara detail mengatur rencana pola ruang daerah.	1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pembentukan BKPRD, menyebutkan bahwa Bapperida sebagai sekretariat BKPRD. 2. Belum terintegrasinya pemanfaatan struktur ruang dan pola ruang daerah.
2	Rencana struktur ruang wilayah;			
3	Rencana pola ruang wilayah;			
4	Penetapan kawasan strategis;			
5	Arahan pemanfaatan ruang wilayah;			
6	Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;			
7	Kelembagaan; dan			
8	Hak, kewajiban, serta peran masyarakat			

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam kebijakan rencana program tata ruang. Proses perencanaan pembangunan baik itu melalui pendekatan *top-up* dan *bottom-up* tentunya harus memperhatikan dan mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kajian terhadap lingkungan hidup, apakah perencanaan tersebut memberikan dampak negatif kepada lingkungan atau sebaliknya.

Tabel 2.10
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Keterkaitan (*interdependency*); KLHS dapat diselenggarakan secara komprehensif atau holistik.	Belum adanya kesepahaman (koordinasi) lintas sektoral menjadikan KLHS sebagai prinsip dasar dalam proses pembangunan, tentunya dimulai dari perencanaan.	Belum tersedianya regulasi daerah terkait KLHS sebagai pedoman dalam proses perencanaan pembangunan berkelanjutan.	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan
2	Keseimbangan (*equilibrium*); keseimbangan antara kepentingan sosial ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, keseimbangan kepentingan pembangunan pusat dan daerah.			
3	Keadilan (*justice*); tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan masyarakat tertentu karena adanya pembatasan akses dan kontrol			

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	terhadap sumber- sumber alam atau modal atau pengetahuan.			

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan gambaran permasalahan-permasalahan yang dikedepankan untuk diatasi dan berdampak luas. Suatu kondisi atau situasi yang menjadi isu strategis apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau menghilangkan peluang besar untuk meningkatnya pelayanan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Sebuah isu strategis dapat dilihat dari:

1. Apakah isu tersebut sedang menjadi perhatian.
2. Apakah isu tersebut mendesak.
3. Apakah isu tersebut sesuai dengan kebutuhan publik.
4. Apakah isu tersebut membantu kebutuhan publik.
5. Apakah isu tersebut sesuai dengan visi dan misi.
6. Apakah isu tersebut melibatkan stakeholder luas.
7. Apakah isu strategis tersebut aman dari dampak dari luar.

Tabel 2.11
Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi sumber daya alam (pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata)	Masih rendahnya kualitas pembangunan daerah	1. Pembangunan daerah harus sesuai dengan peruntukan ruang. 2. Pembangunan yang berkelanjutan	1. Perubahan Iklim 2. Pembangunan yang berkelanjutan 3. Pengendalian karbon	1. Pengelolaan sumber daya alam 2. Pembangunan yang ramah lingkungan 3. Pembangunan wilayah	1. Keterkaitan antar daerah 2. Pengendalian polusi 3. Pengembangan wilayah pesisir 4. Pengolahan limbah	1. Belum selarasnya perencanaan pembangunan daerah 2. Belum optimalnya tingkat capaian kinerja pembangunan 3. Belum optimalnya kualitas kelitbangan

Berdasarkan Permasalahan dan uraian sebelumnya dapat ditentukan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah:

1. Belum selarasnya perencanaan pembangunan daerah

   Dalam konteks pembangunan, tahap perencanaan merupakan bagian huluyang sangat menentukan ke mana arah pembangunan akan bermuara, sehingga kualitas dokumen perencanaan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan/kegagalan suatu pembangunan yang direncanakan. Adapun kelemahan-kelemahan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang kerap terjadi meliputi:

   a. Adanya intervensi kepentingan individu/golongansehingga perencanaan mengarah pada hal yang diinginkan, bukan hal yang diperlukan.
   b. Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalamperencanaan pembangunan.
   c. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalamprosesperencanaan pembangunan.

   Hal tersebut mengakibatkan struktur kinerja anggaran dalam dokumen perencanaan tidak jelas antara *input, output* dan *outcome*. Kemudian sulit melihat relevansi antara *input-output* dan *outcome* terhadap kebutuhan/ permasalahan, serta informasi kinerja (indikator dan sasaran kinerja

output dan *outcome*) tidak jelas dan sulit diukur.Perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai sejauh ini masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari masih belum sinkronnya perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD), belum sinkronnya perencanaan daerah dengan perangkat Daerah serta belum ter*update*nya data-data pembangunan.

2. Belum optimalnya tingkat capaian kinerja pembangunan
   Siklus dalam sistem perencanan pembangunan adalah tahap penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dokumen perencanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan. Evaluasi dalam perencanaan pembangunan adalah suatu penilaian objektif dan sistematis dalam proses perumusan kebijakan yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan suatu program pembangunan. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, evaluasi merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari siklus perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini masih belum optimal dalam melaksanakan hasil evaluasi dari pelaksanaan dokumen rencana, setiap tiga bulan perangkat daerah belum rutin melaporkan hasil pelaksanaan DPA kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan sering kali hasil evaluasi baru dilaporkan pada saat akhir tahun, hal ini mengakibatkan tidak dapat mengetahui kebijakan yang telah dirumuskan sudah sesuai atau belum karena tidak adanya evaluasi tersebut. Sering kali Perangkat Daerah pada saat menyampaikan hasil evaluasi hanya berupa laporan hasil evaluasi output kegiatan dan realisasi anggaran bukan hasil kinerja program (*outcome*) bahkan sasaran (*impact*).
3. Belum optimalnya kualitas kelitbangan
   Kondisi yang dihadapi saat ini antara lain yaitu belum dimanfaatkannya hasil-hasil penelitian, belum adanya kajian/riset sebagai bahan kajian perencanaan pembangunan daerah, belum dikelolanya data dan informasi tentang hasil-hasil penelitian dan pengembangan dengan baik dan benar, terbatasnya SDM di bidang penelitian dan pengembangan, Untuk mencapai harapan tersebut, diperlukan inovasi dan kreativitas yang terstruktur dan bersinergi antara *stakeholder*s tersebut dalam kajian perencanaan pembangunan daerah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Badan Perencanaan PembangunanRiset dan Inovasi DaerahTahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

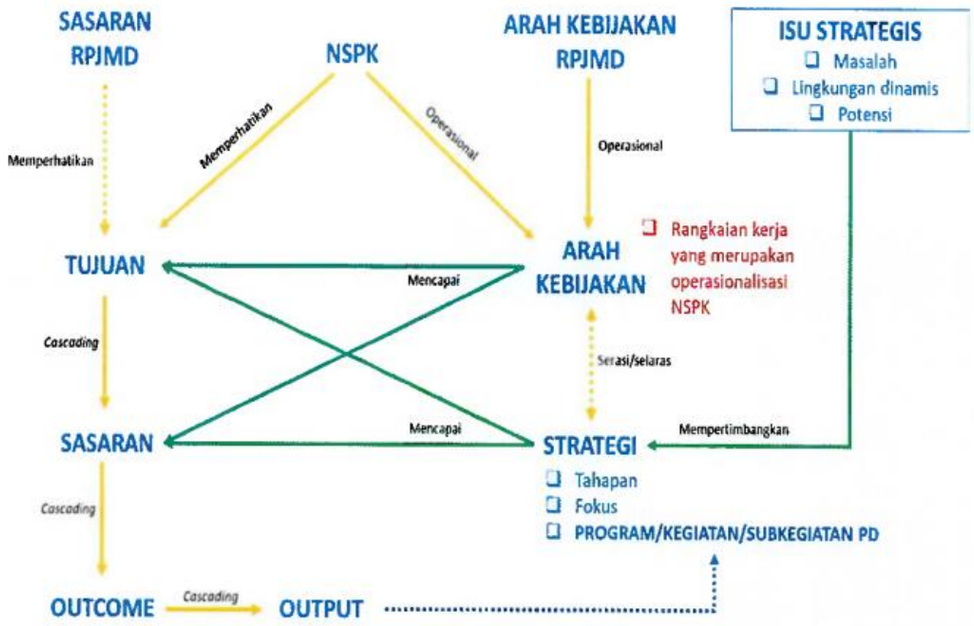
Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah tentunya harus selaras dan mendukung visi misi kepala daerah selama 5 tahun rencana pembangunan. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 5 tahun rencana sebagai penjabaran secara teknis pada misi 8 yaitu penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inivatif dan terpercaya.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029

Visi: Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera			
MISI	TUJUAN	SASARAN	
Misi 8: Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif dan terpercaya.	Terwujudnya Birokrasi yang Prima	1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif. handal, transparan dan akuntabel
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang prima , adaptif, inovatif dan melayani

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan srategis perangkat daerah antara lain sebagai berikut:

a. diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan;
b. untuk mewujudkan misi pembangunan daerah yang dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
c. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
d. dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
e. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.



Gambar 3.1
Konsep Penyusunan Renstra

Perumusan tujuan rencana strategis perangkat daerah memperhatikan sasaran RPJMD dan menjadi indikator pada perumusan sasaran rencana strategis sebagai bagian dari penjabaran kinerja. Perumusan tujuan, sasaran strategis juga harus mendukung ketercapaian arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

Berangkat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, memperhatikan permasalahan yang terpetakan dan isu-isu strategis yang dirumuskan, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, maka tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah adalah:

Tabel 3.2
Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, 2025-2029

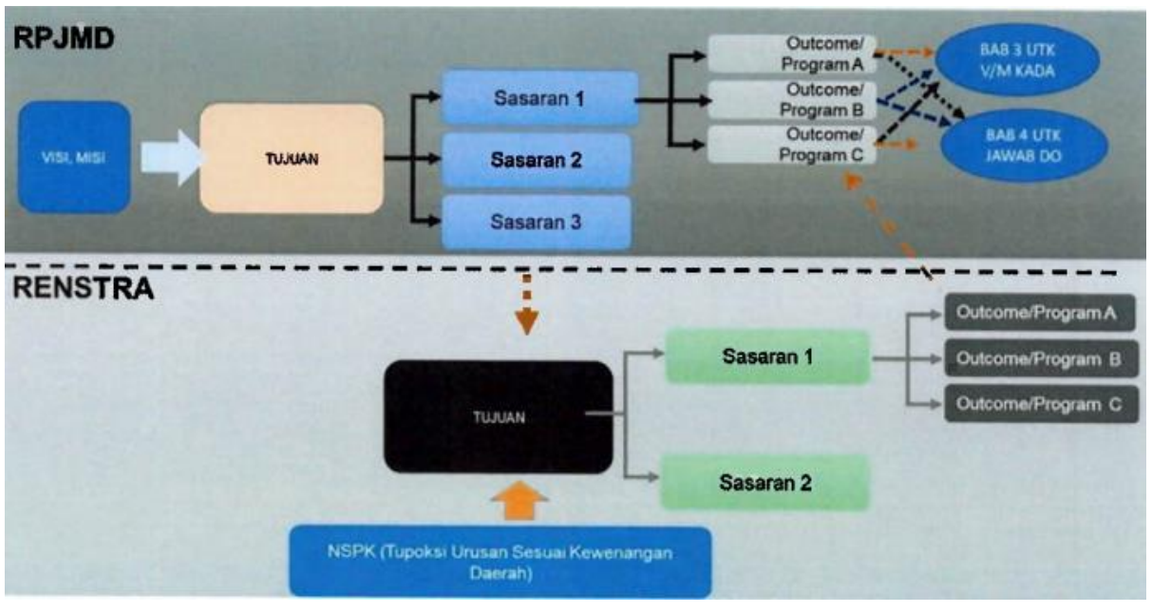
TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Terwujudnya Birokrasi yang Prima	1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif. handal, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkualitas
	2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang prima , adaptif, inovatif dan melayani	

3.2 Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahTahun 2025-2029

Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh perangkat Daerah. Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Keterkaitan antara sasaran dengan tujuan Renstra adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan

daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro.



Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

Perumusan sasaran Renstra harus dapat menjembatani tujuan perangkat daerah dengan sasaran pembangunan jangka menengah yang secara operasional dilaksanakan melalui program prioritas pembangunan sebagai indikasi keberhasilan pencapaian pembangunan. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

a. menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan;
b. memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh;
c. mencegah duplikasi dan tumpang tindih program dan indikator kinerja antar perangkat daerah; dan
d. menjadi dasar penyusunan Renja perangkat Daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah menetapkan sasaran strategis, antara lain:

a. meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah;
b. meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan Daerah; dan
c. meningkatnya kualitas kinerja perangkat Daerah.

Sesuai dengan isu strategis yang menjadi pokok perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah jangka menengah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran
Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahTahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkualitas		Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah di atas 80%	85%	85%	87%	88%	90%	92%	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80%	80%	82%	82%	85%	85%	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Daerah								
		Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	80%	90%	92%	95%	95%	97%	
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang prima , adaptif, inovatif dan melayani		Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip	80,05	80,10	80,15	80,20	80,25	80,30	
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	2	2	2	2	2	2	
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.3 Strategi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahTahun 2025-2029

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah langkah-langkah yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas pada RPJMD Tahun2025-2029. Strategi dan arah kebijakan menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.Strategi dan kebijakan yang ditempuh dalam memenuhi tujuan dan sasaran pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam kurun waktu 5 tahun rencana adalah:

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, dan Strategi
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	▪ Perencanaan Penganggaran terintegrasi ▪ Penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu, konsisten berorientasi hasil berbasis teknologi informatika ▪ Meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan ▪ Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ▪ Meningkatkan Koordinasi dalam pencapaian kinerja pemerintahan daerah
	Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam mendukung Pembangunan Daerah	▪ Peningkatan Kapasitas SDM peneliti daerah ▪ Integrasihasil riset kedalam perencanaan dn kebijakan daerah ▪ Peningkatan investasi daerah dalam riset dan inovasi ▪ Penguatan Teknologi digital untuk mendorong inovasi
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan ketercapaian target kinerja dan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Penahapan pembangunan daerah dilaksanakan agar menjadi fokus pembangunan mengarah pada prioritas pembangunan setiap tahunnya. Prioritas Pembangunan Daerah merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah capaian antara menuju tujuan sasaran 5 (lima) tahunan dalam RENSTRA melalui Program pembangunan daerah tahunan.

Tabel. 3.5
Penahapan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan fondasi perencanaan pembangunan yang sinergi dan selaras	Percepatan Implementasi perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berdampak	Pemantapan implementasi perencanaan pembangunan melalui inovasi dan disertai evaluasi tengah periode	Pemerataan hasil dan peningkatan dampak pembangunan daerah	Penyelesaian target pembangunan, transisi dan keberlanjutan pembangunan daerah

Penahapan Pembangunan 2026-2030 tersebut bukan hanya sekedar urutan waktu melainkan kerangka kerja yang merefleksikan fokus kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara progresif, tahapan tersebut dirancang melalui 5 (lima) fase strategis dimulai dari penguatan fondasi, percepatan, pemantapan, pemerataan hingga memastikan pencapaian target dan persiapan merancang perencanaan pembangunan periode berikutnya dan ini menjadi langkah dan keinginan yang kuat antara pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk pencapaian pembangunan yang lebih baik lagi.

3.4 Arah Kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DaerahTahun 2025-2029

Arah kebijakan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan panduan operasional berupa rangkaian tindakan prioritas, strategi, dan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan serta sasaran perangkat Daerah waktu kurun waktu 5 tahun. Kebijakan ini merupakan penjabaran kinerja yang prioritas dan konkrit, efisien, berorientasi hasil, serta selaras dengan perencanaan jangka menengah. Arah kebijakan RenstraBadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerahantara lain dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel. 3.6
Arah Kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NO	OPERSIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel	1. Membangun Budaya PelayananPrima. 2. Fondasi Digitalisasi dan KeterbukaanInformasi. 3. Pemantapan Smart GovernancedanPartisipasi Inklusif. 4. KonsolidasiDigitalisasidan TataKelolaDataTerpadu. 5. Inovasi Berkelanjutan dan Adaptabilitas.	1. Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Pengkoordinasian dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemanfaatan Data Pembangunan Daerah 5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 6. Penelitian dan Pengembangan (Litbang) untuk Pengembangan Daerah	

Secara umum, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, arah kebijakan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mencakup hal-hal berikut:

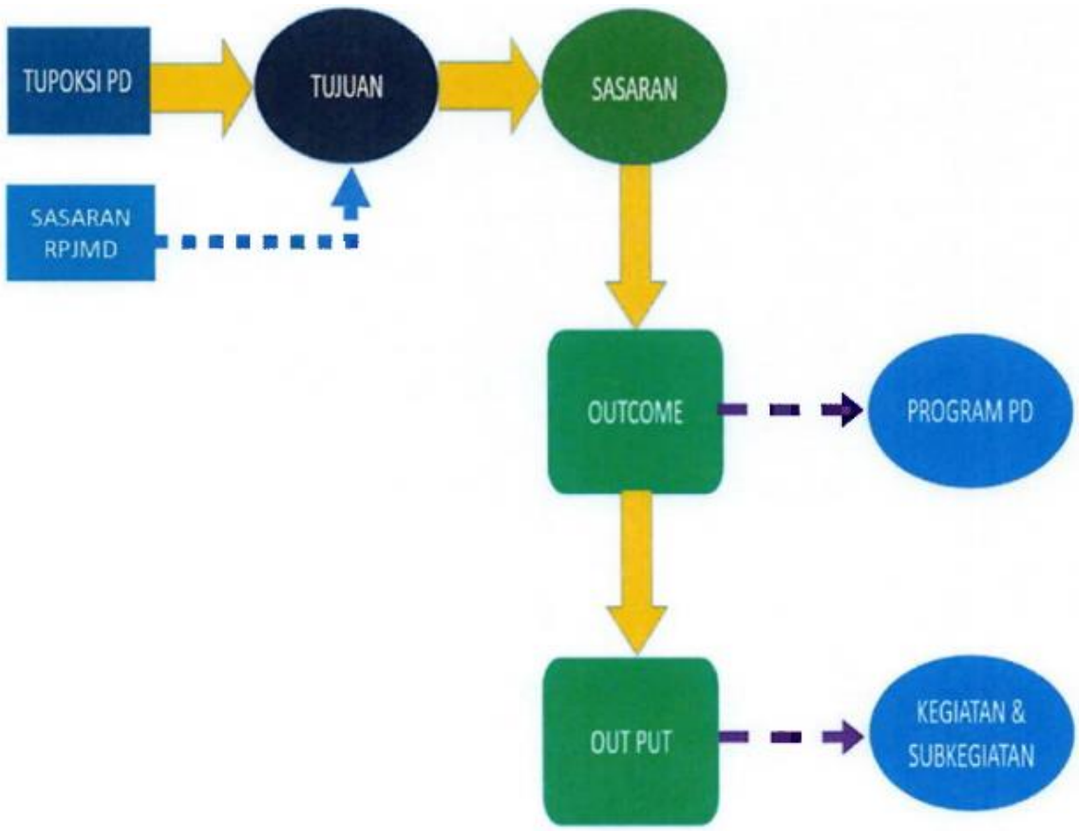
1. Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
   Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah. Ini meliputi penyusunan berbagai dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta dokumen perencanaan lainnya yang dibutuhkan. Arah kebijakan di sini akan fokus pada peningkatan kualitas dan relevansi dokumen perencanaan tersebut.
2. Pengkoordinasian dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
   Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah bertugas mengkoordinasikan seluruh proses perencanaan pembangunan daerah di antara berbagai Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lainnya. Arah kebijakan akan menekankan sinergi, integrasi, dan konsistensi antara berbagai rencana, program, dan kegiatan pembangunan. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah juga memiliki fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
   Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan. Arah kebijakan dapat mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, pengembangan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD), serta peningkatan kualitas pelayanan publik terkait data dan informasi perencanaan.
4. Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemanfaatan Data Pembangunan Daerah
   Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan pusat data dan informasi pembangunan daerah. Arah kebijakan akan menekankan pada penguatan sistem pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pemanfaatan data untuk mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti.
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan:Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berperan dalam memantau, mengevaluasi, dan melaporkan capaian kinerja pembangunan daerah. Arah kebijakan akan berfokus pada pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif dan akuntabel, serta penyediaan laporan yang informatif untuk berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat.
6. Penelitian dan Pengembangan (Litbang) untuk Pengembangan Daerah
   Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah juga memiliki fungsi penelitian dan pengembangan untuk mengkaji isu-isu strategis dan potensi daerah. Arah kebijakan di sini akan mengarahkan pada penelitian yang relevan dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menegah perangkat daerah, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang dijabarkan dalam matrik berikut.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang berkualitas				Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah diatas 80%		
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah			Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah		
				PersentaseCapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dengan Kategori tercapai di atas 80persen		Penyusunan Pendanaan dan Perencanaan	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	
				Terlaksananya		Pengendalian, Evaluasi dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemeritahan dan Pembangunan Manusia		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya alam)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				alam)			
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	
				Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada BidangInfrastruktur dan Kewilayahan		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
		Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dlam mendukung Pembangunan Daerah			Persentase Kebijakan Berbasis Bukti		
			Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan Daerah		
			Meningkatnya Kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang termanfaatkan dalam		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pembangunan dalam penyelesaian Permasalahan Daerah		kebijakan Pembangunan Daerah		
			Meningkatnya Fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan di daerah		Persentase Sailitasi, Pembinaan bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan di daerah		
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan danEvaluasi Penelitian danPengembangan BidangPenyelenggaraan OtonomiDaerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
				Terlaksannya Pengembanan Inovasi dan Teknologi		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan diBidang Teknologi dan Inovasi	
			Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan		Presentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya Kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengemangan potensi unggulan		Persentase kajian berbasis bukti dalam pengemangan potensi unggulan daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			daerah				
			Meningkatnya Kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelasaian permasalahan daerah		Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelasaian permasalahan daerah		
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan novasi di daerah		Persentase fasilitasi, pembinaan bimbinganteknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah		
				Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
					Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Terlaksananya Invensi dan Inovasi		Invensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
					Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	dan inovasi	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani		Meningkatnya Kualitas Kinerja perangkat Daerah			Nilai Lakip		
					Jumlah Inovasi yang diterapkan		
					Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah		
			Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan Tugas			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terkoordinasinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Peangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya pelayanan administrasi umum		Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya layanan pengadaan barang milik daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya layanan pemeliharaan barang		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				milik daerah		Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Guna Memastikan pencapaian sasaran strategis maupun program, kegiatan, dan subkegiatan didalamnya, maka disampaikan pula rencana pendanaannya serta program prioritas sebagai indikasi pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana terlampir pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 rencana ini bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PERENCANAAN													
PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.651.377.218		1.613.384.376		1.647.029.774		1.670.673.284		1.687.859.810	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 persen	100 persen	550.459.073	100 persen	537.794.792	100 persen	549.009.925	100 persen	556.891.095	100 persen	562.619.937	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	550.459.073	100 persen	537.794.792	100 persen	549.009.925	100 persen	556.891.095	100 persen	562.619.937	
	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	100 persen	100 persen	550.459.073	100 persen	537.794.792	100 persen	549.009.925	100 persen	556.891.095	100 persen	562.619.937	
Penyusunan Pendanaan dan Perencanaan	Jumlah dokumen Penyusunan Pendanaan dan Perencanaan	4 dokumen	2 dokumen	986.000.000	2 dokumen	1.076.000.000	2 dokumen	1.065.000.000	2 dokumen	1.080.000.000	2 dokumen	1.087.000.000	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	150.000.000	2 Berita Acara	160.000.000	2 Berita Acara	165.000.000	2 Berita Acara	170.000.000	2 Berita Acara	172.000.000	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	386.000.000	2 Berita Acara	396.000.000	2 Berita Acara	400.000.000	2 Berita Acara	410.000.000	2 Berita Acara	415.000.000	
Koordinasi	Jumlah	4	2	450.000.000	2	520.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	4	500.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Dokumen	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Penyusunan dokumen perencanaan	4 instrumen analisis data	4 instrumen analisis data	350.000.000	4 instrumen analisis data	320.000.000	4 instrumen analisis data	300.000.000	4 instrumen analisis data	300.000.000	4 instrumen analisis data	300.000.000	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4 dokumen	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	160.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	150.000.000	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	36 Orang	36 Orang	200.000.000	36 Orang	160.000.000	36 Orang	150.000.000	36 Orang	150.000.000	36 Orang	150.000.000	
Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah pengendalian evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah	8 Laporan	8 Laporan	315.377.218	8 Laporan	217.384.376	8 Laporan	282.029.774	8 Laporan	290.673.284	8 Laporan	300.859.810	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	315.377.218	2 Laporan	217.384.376	2 Laporan	282.029.774	2 Laporan	290.673.284	2 Laporan	300.859.810	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				605.891.267	100 persen	555.194.118	100 persen	566.772.095	100 persen	574.908.246	100 persen	580.822.433	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	201.963.756	100%	185.064.706	100%	188.924.032	100%	191.636.082	100%	193.607.478	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	201.963.756	100%	185.064.706	100%	188.924.032	100%	191.636.082	100%	193.607.478	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100%	100%	201.963.756	100%	185.064.706	100%	188.924.032	100%	191.636.082	100%	193.607.478	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang	2 Laporan	2 Laporan	205.891.267	2 Laporan	185.064.706	2 Laporan	188.924.031	2 Laporan	191.636.082	2 Laporan	193.607.477	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembangunan Manusia	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia												
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	92.532.353	2 Laporan	94.462.016	2 Laporan	95.818.041	2 Laporan	96.803.738	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	2 Laporan	105.891.267	2 Laporan	92.532.353	2 Laporan	94.462.015	2 Laporan	95.818.041	2 Laporan	96.803.739	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya alam)	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	2 Laporan	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	185.064.706	2 Laporan	188.924.032	2 Laporan	191.636.082	2 Laporan	193.607.478	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	92.532.353	2 Laporan	94.462.016	2 Laporan	95.818.041	2 Laporan	96.803.739	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	4 Laporan	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	92.532.353	2 Laporan	94.462.016	2 Laporan	95.818.041	2 Laporan	96.803.739	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Sumber Daya Alam)												
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	185.064.706	2 Laporan	188.924.032	2 Laporan	191.636.082	2 Laporan	193.607.478	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	92.532.353	2 Laporan	94.462.016	2 Laporan	95.818.041	2 Laporan	96.803.739	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	92.532.353	2 Laporan	94.462.016	2 Laporan	95.818.041	2 Laporan	96.803.739	
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				503.383.983	100 persen	483.230.031	100 persen	493.307.275	100 persen	500.388.820	100 persen	505.536.412	
Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan dalam	Persentase Rekomendasi Kebijakan	100%	100%	125.845.996	100%	120.807.508	100%	123.326.819	100%	125.097.205	100%	126.384.103	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
perencanaan pembangunan	Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan daerah												
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	100%	100%	125.845.996	100%	120.807.508	100%	123.326.819	100%	125.097.205	100%	126.384.103	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan Daerah	100%	100%	125.845.996	100%	120.807.508	100%	123.326.819	100%	125.097.205	100%	126.384.103	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian,pengembangan pengkajian dan penerapan didaerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	100%	100%	125.845.996	100%	120.807.508	100%	123.326.819	100%	125.097.205	100%	126.384.103	
Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Penelitian dan	2 laporan penelitian	2 laporan penelitian	163.897.333	100 persen	160.538.341	100 persen	162.217.880	100 persen	163.398.140	100 persen	164.256.072	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan												
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	80.000.003	1 Laporan	80.000.003	1 Laporan	80.000.001	1 Laporan	80.000.004	1 Laporan	80.000.004	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	83.897.330	1 Laporan	80.538.338	1 Laporan	82.217.879	1 Laporan	83.398.136	1 Laporan	84.256.068	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	3 laporan	3 laporan	211.691.990	3 laporan	201.615.014	3 laporan	206.653.637	3 laporan	210.194.408	3 laporan	212.768.204	
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	1 Dokumen	83.897.330	1 Dokumen	80.538.338	1 Dokumen	82.217.879	1 Dokumen	83.398.136	1 Dokumen	84.256.068	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pendidikan dan Kebudayaan												
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	83.897.330	1 Dokumen	80.538.338	1 Dokumen	82.217.879	1 Dokumen	83.398.136	1 Dokumen	84.256.068	
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	43.897.330	1 Dokumen	40.538.338	1 Dokumen	42.217.879	1 Dokumen	43.398.136	1 Dokumen	44.256.068	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 laporan	1 laporan	83.897.330	1 laporan	80.538.338	1 laporan	82.217.879	1 laporan	83.398.136	1 laporan	84.256.068	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	83.897.330	1 Dokumen	80.538.338	1 Dokumen	82.217.879	1 Dokumen	83.398.136	1 Dokumen	84.256.068	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembanan Inovasi dan Teknologi	1 laporan	1 laporan	43.897.330	1 laporan	40.538.338	1 laporan	42.217.879	1 laporan	43.398.136	1 laporan	44.256.068	
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	43.897.330	1 Dokumen	40.538.338	1 Dokumen	42.217.879	1 Dokumen	43.398.136	1 Dokumen	44.256.068	
PROGRAM RISET				549.146.163	100	516.556.241	100	527.328.466	100	534.898.393	100	540.400.992	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
DAN INOVASI DAERAH					persen		persen		persen		persen		
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	100%	100%	109.829.233	100%	103.311.248	100%	105.465.693	100%	106.979.679	100%	108.080.198	
	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	1	1	109.829.233	100	103.311.248	100	105.465.693	100	106.979.679	100	108.080.198	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan otensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	100%	100%	109.829.233	100%	103.311.248	100%	105.465.693	100%	106.979.679	100%	108.080.198	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	100%	100%	109.829.233	100%	103.311.248	100%	105.465.693	100%	106.979.679	100%	108.080.198	
Meningkatnya fasilitasi, Pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan supervisi terkait Riset dan Inovasi	100%	100%	109.829.233	100%	103.311.248	100%	105.465.693	100%	106.979.679	100%	108.080.198	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	di Daerah												
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	1 laporan	2 laporan	274.573.082	2 laporan	258.278.121	2 laporan	263.664.233	2 laporan	267.449.197	2 laporan	270.200.496	
Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	-	1 naskah	150.000.000	1 naskah	152.000.000	1 naskah	155.000.000	1 naskah	155.000.000	1 naskah	158.000.000	
Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-	1 laporan	124.573.082	1 laporan	106.278.121	1 laporan	108.664.233	1 laporan	112.449.197	1 laporan	112.200.496	
Invensi dan Inovasi	Jumlah Invensi dan Inovasi yang dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	274.573.081	1 laporan	258.278.120	1 laporan	263.664.233	1 laporan	267.449.196	1 laporan	270.200.496	
Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	-	1 laporan	95.073.081	1 laporan	78.278.120	1 laporan	83.164.233	1 laporan	86.449.196	1 laporan	87.200.496	
Fasilitasi dan pembinaan untuk	Jumlah laporan fasilitasi dan	-	1 laporan	95.000.000	1 laporan	95.000.000	1 laporan	95.000.000	1 laporan	95.000.000	1 laporan	96.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
penguatan kerjasama internasional	pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional												
Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah	-	1 kegiatan	84.500.000	1 kegiatan	85.000.000	1 kegiatan	85.500.000	1 kegiatan	86.000.000	1 kegiatan	87.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan Tugas			4.178.421.916	100 persen	4.082.289.958	100 persen	4.167.421.730	100 persen	4.227.246.074	100 persen	4.270.732.538	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	3 dokumen	-	3 dokumen	3.000.000	3 dokumen	3.000.000	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	2.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	-	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	3.000.000	2 dokumen	1.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah												
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	-	2 dokumen	1.000.000	2 dokumen	1.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	1.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan	2 layanan	2 layanan	3.528.421.916	2 layanan	3.032.000.000	2 layanan	3.033.421.730	2 layanan	3.041.246.074	2 layanan	3.042.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang	51 Orang	3.506.421.916	51 Orang	3.010.000.000	51 Orang	3.011.421.730	51 Orang	3.019.246.074	51 Orang	3.020.000.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	22.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	5 layanan admnistrasi	5 layanan admnistrasi	-	5 layanan admnistrasi	10.000.000	5 layanan admnistrasi	15.000.000	5 layanan admnistrasi	20.000.000	5 layanan admnistrasi	20.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	2 orang	10.000.000	3 orang	15.000.000	4 orang	20.000.000	4 orang	20.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang difasilitasi	4 layanan	4 layanan	118.000.000	4 layanan	164.000.000	4 layanan	193.000.000	4 layanan	233.000.000	4 layanan	224.732.538	
Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Komponen	4 Paket	4 Paket	5.000.000	4 Paket	8.000.000	4 Paket	10.000.000	4 Paket	20.000.000	4 Paket	15.732.538	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan												
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	30.000.000	3 Paket	45.000.000	3 Paket	50.000.000	3 Paket	60.000.000	3 Paket	45.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	8.000.000	6 Paket	8.000.000	7 Paket	10.000.000	7 Paket	10.000.000	7 Paket	10.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	0	-	4 Dokumen	3.000.000	6 Dokumen	3.000.000	6 Dokumen	3.000.000	8 Dokumen	4.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	75.000.000	36 Laporan	100.000.000	36 Laporan	120.000.000	36 Laporan	140.000.000	36 Laporan	150.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100 persen	100 persen	-	100 persen	50.000.000	100 persen	150.000.000	100 persen	40.000.000	100 persen	300.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	300.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	-	-	-	1 Unit	50.000.000	-	-	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan												
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-			-	-	2 Unit	40.000.000	Unit	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Unit	150.000.000	-	-	-	-	
Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Tersedianya Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	300.000.000	100 persen	430.000.000	100 persen	430.000.000	100 persen	430.000.000	100 persen	430.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	350.000.000	3 Laporan	350.000.000	3 Laporan	350.000.000	3 Laporan	350.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerahyang dipelihara	4 paket	4 paket	232.000.000	4 paket	393.289.958	4 paket	343.000.000	4 paket	458.000.000	4 paket	252.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan	2 Unit	2 Unit	102.000.000	2 Unit	111.289.958	2 Unit	110.000.000	2 Unit	120.000.000	2 Unit	100.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	-	-	2 Unit	2.000.000	3 Unit	3.000.000	3 Unit	3.000.000	2 Unit	2.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	12 Unit	80.000.000	20 Unit	80.000.000	20 Unit	80.000.000	20 Unit	85.000.000	10 Unit	50.000.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	150.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	100.000.000	
				7.488.220.547		7.250.654.724		7.401.859.340		7.508.114.817		7.585.352.185	

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Pendanaan dan Perencanaan	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya alam)	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Meningkatnya Pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	DAERAH	pembangunan		
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pemngembangan Potensi Unggulan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
		Meningkatnya Kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan dalam penyelesaian Permasalahan Daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
		Meningkatnya Fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan di daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
			Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
4	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
		Meningkatnya Kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengemangan potensi unggulan daerah	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya Kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelasaian permasalahan daerah	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan bimbinganteknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Invensi dan Inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
			Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan sebagai ukuran capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan karena menjadi indikator keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah, yang digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan rencana di masa depan. Penilaian tersebut sebagai akuntabilitas kinerja dan informasi tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah kepada masyarakat. Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkkan kinerja yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Ini dapat dilihat pada tabel 4.4 dan tabel 4.5.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah diatas 80%	Persen	85	85	87	88	90	92	
2	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	80	80	80	82	82	85	
3	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	80	90	92	95	95	97	
4	Nilai Lakip	Nilai	80,05	80,10	80,15	80,20	80,25	80,30	
5	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Inovasi	2	2	2	2	2	2	
6	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	80	82	84	86	88	90	
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	Persen	80	82	84	86	88	90	
3	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	80	82	84	86	88	90	
4	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat	Persen	80	82	84	86	88	90	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA								
5	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	80	82	84	86	88	90	
6	Persentase Rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	Persen	80	82	84	86	88	90	
7	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	80	82	84	86	88	90	
8	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	80	90	92	95	95	97	
9	Persentase Fasilitasi, Pembinaan bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan di daerah	Persen	80	90	92	95	95	97	
10	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	Persen	80	90	92	95	95	97	
11	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persen	80	90	92	95	95	97	
12	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persen	80	90	92	95	95	97	
13	Persentase fasilitasi, pembinaan bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persen	80	90	92	95	95	97	

BAB V
PENUTUP

Perencanaan yang berkualitas akan mampu mendorong visi dan misi kepala daerah kepada sebuah kenyataan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi dokumen Renstra oleh masing-masing perangkat Daerah, sehingga lebih operasional dan dapat untuk dilaksanakan.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah yang strategis dan merupakan penjabaran secara teknis RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah kurun waktu 5 tahun.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra ini dapat berjalan efektif. Renstra ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerahserta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.

Manajemen Risiko dalam menyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan hingga pada level sasaran pembangunan yang lebih detail menjelaskan target operasional pembangunan. Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintahan daerah tersebut antara lain: Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Melalui mitigasi risiko yang tepat dan terukur akan mampu mengendalikan dan mengelola risiko yang berpotensi dan menggagalkan tujuan dari perencanaan pembangunan. Mitigas tersebut telah dimulai sejak pada proses perencanaan, sehingga perlu dipantau terus pada tahapan pelaksanaan, pengendalian, dan dilakukan monitoring/ evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 menjadi komitmen dan pedoman bagi setiap unit kerja dan aparatur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Landasan Hukum.....5
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan badan Keuangan Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Peraangkat Daerah 12
2.1.2 Sumber Daya Perangkat BKAD.....29
2.1.3 Kinerja Pelayanan 42
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 45
2.2 Permasalah dan Isu Strategis.....45
2.1.1 Permasalahan Pelayanan 45
2.1.2 Isu Strategis 50

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....53
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah 54
3.3 Strategi Perangkat Daerah 56
3.4 Arah Kebijakan Renstra.....59

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....61
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....96

BAB V PENUTUP 100

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Repbulik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

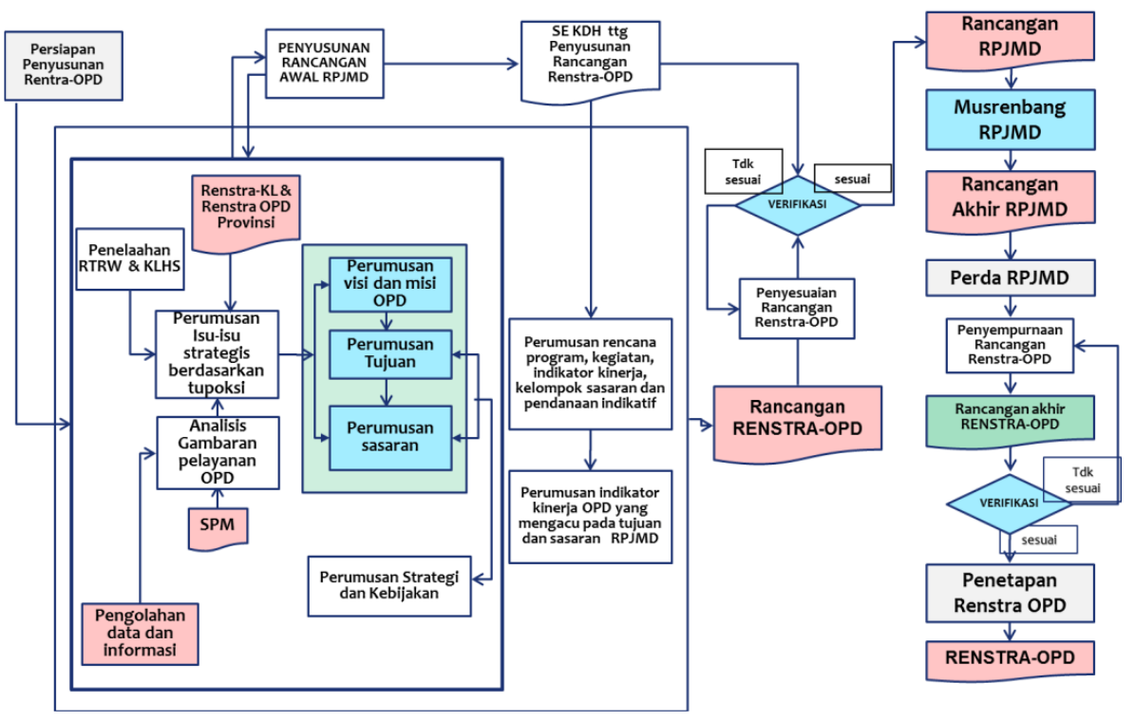
Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, daerah berkewajiban untuk segera Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD harus diselesaiakn dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

Sejalan dengan hal di atas, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedomana Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penyusunan Renstra Perangkat Daerah, diawali dengan:

1. Persiapan Penyusunan Renstra, antara lain:
   a. Pembentukan SK Tim Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029
   b. Orientasi mengenal Renstra
   c. Penyusunan Agenda Tim Penyusunan Renstra
   d. Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, antara lain:
   a. Analisis gambaran pelayanan
   b. Analisis permaslaahan
   c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya
   d. Analisis isu strategis

e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran indikator serta target kinerja dalam rancangan awal rpjmd
f. Perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah
g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indiaktif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.

3. Rancangan Renstra, antara lain:
   a. Penyempurnaan rancangan awal Renstra perangkat daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah
   b. Rancangan Renstra perangkat daerah dibahas dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
   c. Hasil kesepakatan forum perangkat daerah dituangkan dalam berita acara
   d. Rancangan Renstra perangkat daerah disempurnakan berdasarkan berita acara.
4. Rancangan Akhir Renstra, antara lain:
   a. Penyempurnaan rancangan akhir Renstra perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD
   b. Perumusan rancangan akhir Renstra perangkat daerah dilakukan untuk untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
5. Penetapan Renstra, antara lain:
   a. Rancangan akhir Renstra perangkat daerah disampaikan kepada Bapperida untuk diverifikasi
   b. Rancangan akhir Renstra perangkat daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan
   c. Rancangan akhir Renstra perangkat daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh perangkat daerah kepada Kepala Bapperida untuk dilakukan proses penetapan Renstra perangkat daerah
   d. Penetapan Renstra perangkat daerah dengan Perkada pling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan.



Gambar 1.1
Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra OPD

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodesasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra perangkat daerah, selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD). Tahapan penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada pedoman perencanan strategis perangkat daerah, yaitu:

1. Persiapan Penyusunan, meliputi pembentukan tim penyusunan Renstra BKAD, penyiapan data dan informasi dasar dan penyusunan jadwal dan metodologi penyusunan Renstra.
2. Analisis Lingkungan Strategis, meliputi evaluasi Renstra periode sebelumnya, analisis lingkungan internal dan eksternal dan isu strategis.
3. Perumusan Visi, Misi, dan Sasaran BKAD
   - Visi dan Misi BKAD adalah turunan dari visi-misi kepala Daerah
   - Tujuan adalah penjabaran misi BKAD dalam bentuk pernyataan strategis
   - Sasaran adalah capaian yang terukur atas tujuan yang ingin dicapai
4. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan, menyusun kebijakan strategis dan menyesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD dan Nasional.
5. Penyusunan Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja
6. Penyelarasan dan Konsultasi
7. Penetapan Renstra

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen strategis yang disusun sebagai pedoman dan manifestasi visi misi kepala daerah dalam jangka 5 (lima) tahun. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 telah menghasilkan pimpinan daerah, kepala dan wakil kepala daerah terpilih secara defenitif dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi momentum dimulainya penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar perwujudan pencapaian visi misi kepala daerah. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, selain itu RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi jembatan pembangunan menuju Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat serta menuju Indonesia Emas 2045.

Berikut dijelaskan hubungan dokumen Renstra dengan RPJMD, RKPD dan Renja OPD dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Hubungan Dokumen Renstra dengan RPJMD,
RKPD dan Renja OPD

Dokumen	Tingkat	Waktu	Isi Utama	Hubungan dengan Renstra OPD
RPJMD	Daerah (Seluruh OPD)	5 Tahunan	- Visi, misi kepala daerah - Tujuan dan sasaran pembangunan	➢ Renstra OPD mengacu langsung pada RPJMD ➢ Renstra menjabarkan

Dokumen	Tingkat	Waktu	Isi Utama	Hubungan dengan Renstra OPD
			daerah - Program prioritas	tujuan & sasaran RPJMD
Renstra OPD	OPD	5 Tahunan	- Visi, misi OPD - Tujuan, sasaran OPD - Program dan indikator kinerja OPD	➢ Merupakan dokumen strategis OPD yang menjabarkan RPJMD dalam lingkup masing-masing OPD
Renja OPD	OPD	Tahunan	- Rencana kerja tahunan OPD - Kegiatan & anggaran - Indikator kinerja tahunan	➢ Renja OPD menjabarkan Renstra OPD secara tahunan ➢ Menjadi dasar penyusunan RKPD
RKPD	Daerah (Seluruh OPD)	Tahunan	- Rencana pembangunan tahunan daerah - Program & kegiatan prioritas daerah	➢ RKPD disusun berdasarkan kompilasi Renja OPD ➢ Berfungsi sebagai dasar penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peratursan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifkasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 2. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 225);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4);

Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra 2025-2029, antara lain:

a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)
b. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah 2025-2029 adalah sebagai sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah selama periode perencanaan 5 tahun ke depan.
2. Memberikan arah strategis bagi seluruh pegawai dan unit kerja dalam Badan Keuangan da Aset Daerah agar bekerja selaras dengan tujuan pembangunan daerah.
3. Menyinergikan program dan kegiatan Badam Keuangan dan Aset Daerah dengan kebijakan pemerintah daerah, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan kebijakan nasional yang relevan.

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai instansi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dalam mencapai target rencana pembangunan.
2. Sebagai penjabaran operasional visi dan misi kepala daerah menyangkut fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami Restra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan adalah bagian awal dari dokumen Renstra yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai :

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Keuangan Daerah periode sebelumnya, sebelum dipisah, mengemukakan capaian program prioritas Badan Keuangan Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2 Isu Strategis
Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030.
Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN
4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesesuaian antara target kinerja Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
b. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
d. pelaksanaan koordinasi fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan sebagai berikut:

a. Sekretariat, membawahi Subbag Umum dan Kepegawaian
b. bidang perencanaan anggaran Daerah, membawahi:
   (1) subbidang perencanaan anggaran pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
   (2) subbidang perencanaan anggaran perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan wilayah;
c. bidang perbendaharaan Daerah, membawahi:
   (1) subbidang pengelolaan kas Daerah; dan
   (2) subbidang pengelolaan belanja Daerah;
d. bidang akuntansi dan pelaporan, membawahi:
   (1) subbidang kebijakan dan informasi akuntansi; dan
   (2) subbidang evaluasi dan penyusunan laporan keuangan;
e. bidang pengelolaan aset Daerah, membawahi:
   (1) subbidang perencanaan dan pemanfaatan aset Daerah; dan
   (2) subbidang inventarisasi, pengamanan, dan penghapusan aset Daerah;

f. UPTD.

Secara rinci tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, antara lain:

A. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan, mempunyai:

Tugas : membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan.

Fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
b. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, hukum, kelembagaan, tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, hubungan masyarakat, sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan;
c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia pegawai aparatur sipil negara, rencana kebutuhan aset, rencana pemanfaatan aset, rencana anggaran kas, rencana program kerja tahunan, rencana pengendalian risiko, dan dokumen perencanaan lainnya di lingkungan Badan;
d. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi rencana strategis, laporan evaluasi rencana kerja, dokumen manajemen risiko, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan realisasi fisik dan keuangan, laporan pemanfaatan aset, laporan pengelolaan piutang/utang, laporan keuangan bulanan, semester, dan tahunan atas pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan, dan laporan lainnya di lingkungan Badan;
e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah, survei kepuasan masyarakat, penilaian dan evaluasi capaian reformasi birokrasi, penilaian dan evaluasi manajemen risiko, serta penilaian dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
b. penyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
c. penyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan;
d. penyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
e. penyiapkan bahan pengelolaan urusan kerumahtanggaan;
f. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan aset Daerah di lingkungan Badan
g. penyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
h. penyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentai;
i. penyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
j. penyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang umum dan kepegawaian; dan
k. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang perencanaan anggaran Daerah;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran Daerah;
c. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas;
d. pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang perencanaan anggaran Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
e. penyusunan rancangan, koreksi, paraf dan/atau penandatangan naskah dinas;
f. penyelenggaraan dan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. pengoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran sementara serta kebijakan umum perubahan anggaran dan penetapan plafon anggaran sementara perubahan;
h. pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah dan/atau rencana kegiatan

anggaran perubahan/dokumen perubahan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah;

i. penyusunan peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
j. penyusunan peraturan kepala Daerah tentang teknis penyusunan anggaran Perangkat Daerah;
k. pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan Daerah;
l. pengoordinasian perencanaan anggaran belanja Daerah;
m. pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
n. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penyusunan anggaran dan pembiayaan;
o. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
p. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang perencanaan anggaran Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Perencanaan Anggaran Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu kepala bidang perencanaan anggaran Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran pemerintahan dan pembangunan manusia.

Untuk melaksanakan tugas, subbidang perencanaan anggaran pemerintahan dan pembangunan manusia menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang perencanaan anggaran pemerintahan dan pembangunan manusia;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran pemerintahan dan pembangunan manusia;
c. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas;
d. pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbidang perencanaan anggaran pemerintahan dan pembangunan manusia;
e. penyusunan rancangan, koreksi, paraf dan/atau penandatanganan naskah dinas;
f. penyelenggaraan dan keikutsertaan rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah bidang perencanaan anggaran pemerintahan dan pembangunan manusia;
h. penyusunan APBD bidang perencanaan anggaran pemerintahan dan pembangunan manusia;
i. pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka

penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD bidang perencanaan anggaran pemerintahan dan pembangunan manusia;

j. penyempurnaan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD bidang perencanaan anggaran pemerintahan dan pembangunan manusia;
k. penyiapan penetapan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
l. penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen perubahan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah bidang perencanaan anggaran pemerintahan dan pembangunan manusia;
m. pembinaan penyusunan anggaran Perangkat Daerah bidang perencanaan anggaran pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Perencanaan Anggaran Perekonomia, sumber daya alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu kepala bidang perencanaan anggaran Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan wilayah.

Untuk melaksanakan tugas, subbidang perencanaan anggaran perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan wilayah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang perencanaan anggaran perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan wilayah;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan wilayah;
c. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas;
d. pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbidang perencanaan anggaran perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan wilayah;
e. penyusunan rancangan, koreksi, paraf dan/atau penandatanganan naskah dinas;
f. penyelenggaraan dan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
g. pengkajian ulang hasil verifikasi APBD bidang perencanaan anggaran perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan wilayah;
h. penyusunan APBD bidang perencanaan anggaran perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan wilayah;

i. pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD bidang perencanaan anggaran perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan wilayah;
j. penyempurnaan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD bidang perencanaan anggaran perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan wilayah;
k. penyiapan penetapan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
l. penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen perubahan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah bidang perencanaan anggaran perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan wilayah;
m. pembinaan penyusunan anggaran Perangkat Daerah bidang perencanaan anggaran perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan wilayah; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. BIDANG PERBENDAHARAAN

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan.

Untuk melaksanakan tugas, bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja bidang perbendaharaan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
c. penyediaan anggaran kas;
d. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana;
e. pengoordinasian pengelolaan kas Daerah;
f. pengoordinasian pemindahbukuan uang kas Daerah;
g. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan Daerah;
h. pengoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
i. pengoordinasian penempatan uang Daerah dengan membuka rekening kas umum Daerah;
j. pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar surat perintah pencairan dana;
k. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar, serta penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran;
l. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan,

pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;

m. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas;
n. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas surat perintah pencairan dana dengan instansi terkait;
o. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang perbendaharaan Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kas Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, subbidang pengelolaan kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pengelolaan kas Daerah;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di pengelolaan kas Daerah;
c. pengelolaan kas Daerah;
d. pemindahbukuan kas Daerah;
e. pengkajian ulang hasil verifikasi pengelolaan kas Daerah;
f. pengkajian ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas Daerah;
g. pelaksanaan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang Daerah dan penatausahaan dana transfer Daerah sesuai dengan rekening kas umum Daerah;
h. pelaksanaan anggaran kas dan penerbitan surat penyediaan dana;
i. pelaksanaan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran Daerah;
j. pelaksanaan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan atau penerimaan kas;
k. pelaksanaan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
l. pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan Daerah;
m. perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;

n. pelaksanaan pengelolaan utang atau pinjaman dan piutang Daerah;
o. penyusunan dan penyediaan laporan aliran kas secara periodik;
p. pelaksanaan penyusunan, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;
q. penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan surat perintah pencairan dana;
r. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait pendapatan Daerah;
s. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
t. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
u. penyimpanan uang Daerah;
v. penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah Daerah;
w. pemberian pinjaman atas nama pemerintah Daerah;
x. penagihan piutang Daerah yang bukantugas dan fungsi bidang atau Perangkat Daerah lain; dan
y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Pengelolaan Belanja Daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang perbendaharaan Daerah dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan belanja Daerah.
Untuk melaksanakan tugas, subbidang pengelolaan belanja Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penatausahaan pembiayaan Daerah;
b. pengkajian ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan Daerah;
c. pelaksanaan register surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana atas belanja Perangkat Daerah, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen surat perintah membayar;
d. pelaksanaan proses penerbitan surat perintah pencairan dana;
e. pelaksanaan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan perhitungan pihak ketiga dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan surat perintah pencairan dana dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
f. pelaksanaan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan surat perintah pencairan dana;
g. penelitian dan koreksi kelengkapan dokumen surat keterangan penghentian pembayaran serta proses penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran;
h. pelaksanaan pembinaan terhadap Perangkat Daerah dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;

i. pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana Perangkat Daerah, badan layanan umum Daerah dan pejabat penatausaha keuangan Daerah;
j. perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban;
k. penyusunan, koreksi, dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
l. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja Daerah;
m. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Daerah;
n. pengelolaan anggaran belanja Daerah;
o. pengawasan pelaksanaan belanja Daerah;
p. penyiapan dokumen anggaran belanja Daerah;
q. pengoordinasian proses belanja Daerah dengan Perangkat Daerah;
r. pelaksanaan analisis dan evaluasi belanja Daerah; dan
s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. BIDANG AKUNTANSI

Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun rencana kerja dan program kerja bidang akuntansi dan pelaporan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi kegiatan yang meliputi bidang akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, bidang akuntansi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja di bidang akuntansi dan pelaporan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan, yang meliputi kebijakan akuntansi, pedoman teknis dan prosedur penyusunan laporan keuangan Daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c. pengoordinasian pembukuan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Daerah;
d. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan keuangan pemerintah Daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
e. pelaksanaan bimbingan teknis terkait dengan penerapan akuntansi, penyusunan laporan keuangan Daerah, evaluasi dan pembinaan akuntansi;
f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian kerugian Daerah, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik Daerah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang Kebijakan dan Informasi Akuntansi mempunyai tugas membantu kepala bidang akuntansi dan pelaporan dalam melaksanakan tugas di subbidang kebijakan dan Informasi akuntansi.
Untuk melaksanakan tugas, subbidang kebijakan dan informasi akuntansi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja subbidang kebijakan dan informasi akuntansi;
b. penyusunan kebijakan, sistem akuntansi pemerintah Daerah dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah Daerah;
c. penyiapan bahan tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
e. penyiapan bahan penyelesaian permasalahan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan aset Daerah;
g. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi kebijakan dan sistem prosedur akuntansi dan pelaporan;
h. penyiapan bahan peyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Evaluasi dan Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas membantu kepala bidang akuntansi dan pelaporan dalam melaksanakan tugas di subbidang evaluasi dan penyusunan laporan keuangan.
Untuk melaksanakan tugas, subbidang evaluasi dan penyusunan laporan keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja subbidang evaluasi dan penyusunan laporan keuangan;
b. pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan Perangkat Daerah, non badan layanan umum Daerah, badan layanan umum Daerah dan pejabat penatausaha keuangan Daerah;
c. pelaksanaan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
d. pelaksanaan pemantauan atas pengikhtisaran penerimaan non kas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
e. penyiapan bahan penyesuaian atas transaksi non anggaran;
f. penyusunan konsolidasi laporan realisasi APBD semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
g. pelaksanaan pemantauan dan posting atas transaksi non anggaran;
h. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah Daerah;
i. penyusunan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah;

j. penyusunan rancangan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
k. pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
l. pelaksanaan evaluasi dan verifikasi laporan keuangan Perangkat Daerah secara periodik bulanan, semesteran dan tahunan;
m. pelaksanaan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran;
n. pelaksanaan pemantauan atas posting transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
o. melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan Perangkat Daerah, non badan layanan umum Daerah, badan layanan umum Daerah dan pejabat penatausaha keuangan Daerah;
p. penyiapan laporan realisasi anggaran secara periodik bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH

Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, bidang aset menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pemanfaatan, inventarisasi, pengamanan dan penghapusan aset Daerah;
b. pengoordinasian penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
c. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan aset Daerah;
d. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan atau perawatan aset Daerah;
e. pelaksanaan penatausahaan aset Daerah;
f. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi aset Daerah;
g. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum aset Daerah;
h. pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan aset Daerah;
i. pengoordinasian hasil penilaian aset Daerah;
j. penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan aset Daerah;
k. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan aset Daerah;

l. pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan aset Daerah dari Perangkat Daerah;
m. pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan aset Daerah; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

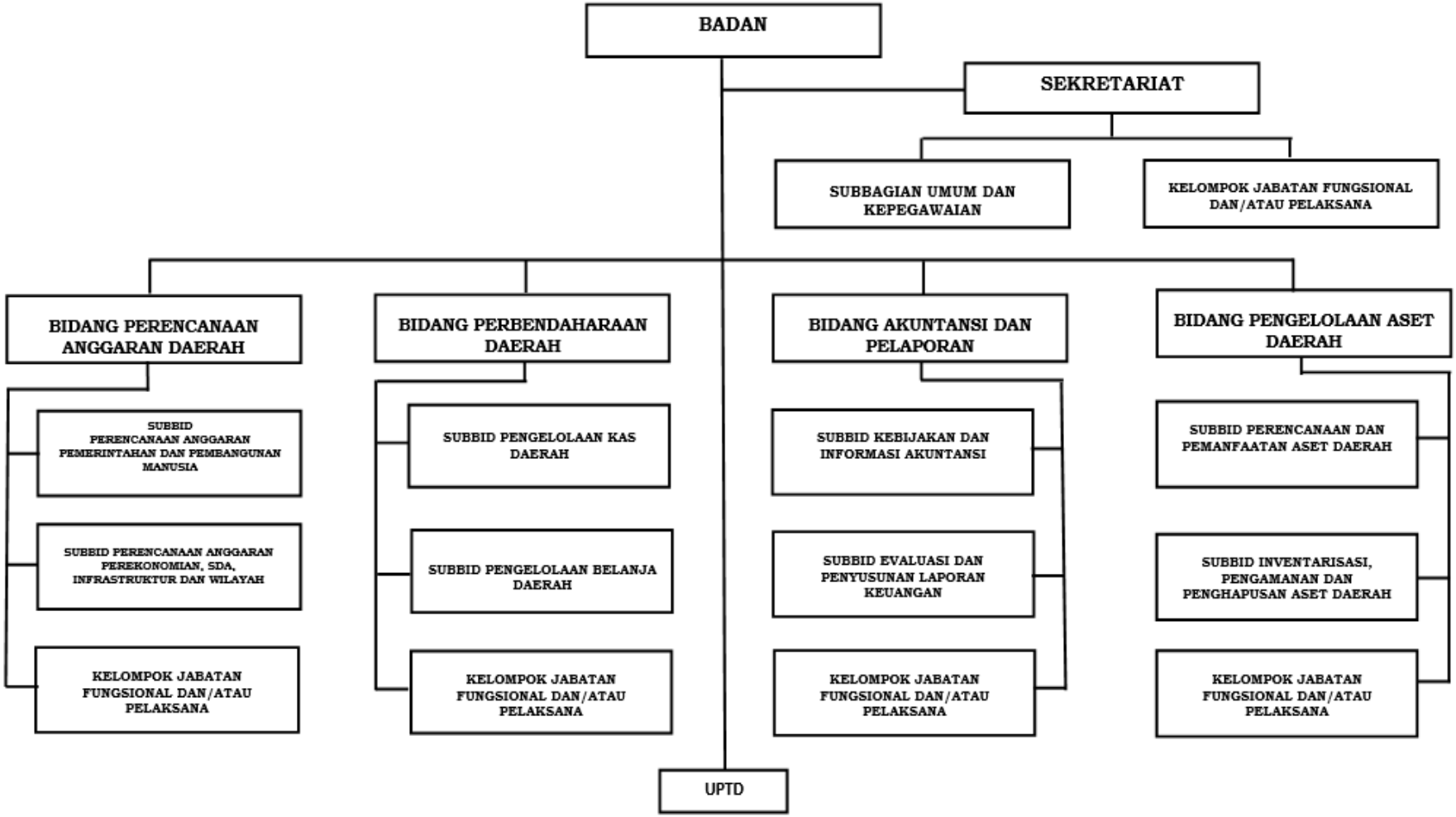
(1) Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset Daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang pengelolaan aset Daerah dalam menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perencanan dan pemanfaatan aset Daerah.
Untuk melaksanakan tugas, subbidang perencanaan dan pemanfaatan aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang perencanaan dan pemanfaatan aset Daerah;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pemanfaatan aset Daerah;
c. penyiapan bahan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
d. penelitian dan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan aset Daerah;
e. penelitian dan penyiapan bahan-bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan atau perawatan aset Daerah;
f. penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan aset Daerah;
g. penyiapan dokumen usulan pemanfaatan aset Daerah;
h. penyiapan konsep surat penyusunan rencana kebutuhan, pemeliharaan/perawatan aset Daerah dan pemanfaatan aset Daerah;
i. penelitian dokumen pengajuan usulan pemanfaatan aset Daerah;
j. penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan aset Daerah;
k. penyiapan dokumen hasil penilaian aset Daerah dalam rangka pemanfaatan aset Daerah;
l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja subbidang perencanaan dan pemanfaatan aset Daerah; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang Inventarisasi, Pengamanan, dan Penghapusan Aset Daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang pengelolaan aset Daerah dalam menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan inventarisasi, pengamanan dan penghapusan aset.
Untuk melaksanakan tugas, subbidang inventarisasi, pengamanan, dan penghapusan aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang inventarisasi, pengamanan dan penghapusan aset Daerah;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang inventarisasi, pengamanan dan penghapusan asset Daerah;
c. penyiapan konsep pelaksanaan inventarisasi aset Daerah;
d. pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan aset Daerah dengan pengurus barang Perangkat Daerah;
e. penyiapan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum aset Daerah;
f. penghimpunan dan penyusunan laporan aset Daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah Daerah;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan aset Daerah;
h. penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset Daerah;
i. penelitian dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset Daerah;
j. penyiapan dokumen hasil penilaian aset Daerah dalam rangka pemindahtanganan aset Daerah;
k. pelaksanaan penatausahaan dan pengendalian aset Daerah;
l. pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan aset Daerah;
m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja subbidang inventarisasi, pengamanan dan penghapusan aset Daerah; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

F. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
(1) UPTD dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, jenis serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia BKAD adalah seluruh pegawai atau aparatur negara yang bekerja di lingkungan BKAD, yang memiliki kompetensi, tugas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Sumber daya manusia BKAD merupakan elemen kunci dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan serta aset daerah. Oleh karena itu, pembinaan, peningkatan kapasitas, dan manajemen SDM yang professional sangat penting agar BKAD mampu menjalankan fungsinya dengan optimal dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029.

Tabel 2.1
Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV/ Fungsional	Pelaksana	PPPK Paruh Waktu	Jumlah
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	2	10	14	28
3.	Bidang Perbendaharaan	-	1	2	7	1	11
4.	Bidang Anggaran	-	1	2	4	2	9
5.	Bidang Akuntansi	-	1	3	5	-	9
6.	Bidang Aset	-	1	2	8	1	12
Jumlah (orang)		1	5	11	34	19	69

Tabel 2.2
Daftar Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	W	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	2	5
3	Eselon IV	3	2	5
4	Fungsional	1	4	5
5	Pelaksana	19	15	34
6	PPPK Paruh Waktu	12	7	19
Jumlah		39	30	69
Persentase (%)		56,52	43,48	

Sumber daya aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 69 orang terdiri dari 39 laki-laki dan 30 wanita dan

berdasarkan status kepegawaiannya, jumlah PNS 50 dan Pegawai PPPK Paruh waktu sebanyak 19 orang.

Jumlah staf paling banyak terdapat pada sekretariat dibanding dengan bidang lain, mengingat tugas operasional Badan Keuangan dan Aset Daerah cukup tinggi dan menyangkut pelayanan kepada publik baik dilingkungan aparatur maupun di luar.

Tabel 2.3
Daftar Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Uraian	S2	S1	D3	SLTA/ Sederajat	Jumlah
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	3	9	1	16	29
3.	Bidang Perbendaharaan	3	3	3	1	10
4.	Bidang Anggaran	1	7	1	-	9
5.	Bidang Akuntansi	3	4	1	1	9
6.	Bidang Aset	1	8	1	1	11
Jumlah (orang)		12	31	7	19	69
Persentase (%)		17,39	44,93	10,14	27,54	

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.3 tingkat pendidikan aparatur BKAD yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 31 orang (44,93%). Tingkat pendidikan tinggi tentunya diharapkan akan berbanding lurus dengan capaian kinerja yang selanjutnya mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Dalam meningkatkan kapasitas aparatur, BKAD juga mengakomodir bagi setiap aparatur yang ingin mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas baik yang ada di dalam daerah dan di luar daerah Mentawai dan mendukung sepenuhnya bagi yang ingin meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2.1.2.2 Sumber Daya Fisik/Sarana Prasarana

Dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pelayanan BKAD, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung seluruh pelayanan di BKAD. Sarana dan prasarana yang ada juga merupakan input dalam proses pelayanan untuk mencapai tujuan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Badan Keuangan Daerah

No.	Nama Barang	Jenis Barang	Kondisi	Volume
1	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Kayu	Baik	2
2	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Besi	Baik	1
3	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Kayu	Kurang Baik	1

No.	Nama Barang	Jenis Barang	Kondisi	Volume
4	Filing Cabinet Besi	Besi	Kurang Baik	1
5	Filing Cabinet Besi	Kayu	Kurang Baik	1
6	Alat Pembersih lainnya	Plastik	Baik	1
7	Lemari Es	Plastik	Baik	1
8	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Kayu	Baik	1
9	Monitor	Plastik	Baik	1
10	Rak Besi	Besi	Baik	1
11	Filing Cabinet Besi	Besi	Baik	2
12	Mesin Pemotong Rumput	Besi	Kurang Baik	1
13	Lap Top	Besi	Baik	1
14	Lap Top	Besi	Baik	1
15	Lap Top	Besi	Baik	1
16	Lap Top	Besi	Baik	1
17	Monitor	Fiber	Baik	1
18	Peralatan Jaringan lainnya	Besi	Baik	1
19	Sepeda Motor	Besi	Baik	1
20	Sepeda Motor	Besi	Baik	1
21	Filing Cabinet Besi	Besi	Baik	4
22	Papan Visual/Papan Nama	Kayu	Kurang Baik	12
23	Alat Penghancur Kertas	Besi	Baik	1
24	Alat Kantor Lainnya	Fiber	Baik	1
25	Alat Kantor Lainnya	Besi	Baik	1
26	Kursi Biasa	Besi	Baik	6
27	Kursi Biasa	Besi	Baik	1
28	Kursi Biasa	Besi	Baik	23
29	Sofa	Kayu	Baik	1
30	A.C. Window	Fiber	Baik	2
31	Televisi	Besi	Baik	1
32	Handy Cam	Fiber	Kurang Baik	1
33	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Kain	Baik	4
34	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Kain	Baik	1
35	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Kain	Baik	3
36	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Kayu	Baik	35
37	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Besi	Baik	10
38	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Besi	Baik	8
39	Alat Pelobang (Cork Borer)	Besi	Baik	1
40	alat laboratorium kwalitas air dan tanah lainnya (dst)	Kaca	Baik	1
41	P.C Unit	Fiber	Baik	5
42	Lap Top	Fiber	Baik	1
43	Lap Top	Fiber	Baik	2
44	Lap Top	Fiber	Baik	1
45	Lap Top	Fiber	Baik	1
46	Peralatan Personal Komputer lainnya		Baik	1
47	Peralatan Personal Komputer lainnya		Kurang Baik	1
48	Peralatan Personal Komputer lainnya	Besi	Baik	1
49	Server	Besi	Baik	1
50	Rak Besi		Baik	1
51	Filing Cabinet Besi	Besi	Baik	5
52	Lemari Es	Fiber	Baik	1
53	Facsimile	Plastik	Baik	1
54	Komputer Jaringan lainnya		Baik	1

No.	Nama Barang	Jenis Barang	Kondisi	Volume
55	P.C Unit	Fiber	Baik	1
56	Lap Top	Fiber	Baik	1
57	Lap Top	Fiber	Baik	1
58	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	Plastik	Baik	1
59	Rak Besi	Besi + Metal	Baik	1
60	Filing Cabinet Besi	Besi	Baik	1
61	Filing Cabinet Besi	Besi	Baik	7
62	Alat Penghancur Kertas	Plastik Campur	Baik	8
63	Meja Resepsionis	Kayu	Baik	1
64	Kursi Rapat		Baik	6
65	A.C. Split	Fiber	Baik	3
66	Televisi	Kaca campur	Baik	1
67	Sound System		Baik	1
68	Meja Rapat Pejabat lainnya	Kayu	Baik	1
69	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Kayu	Baik	3
70	Note Book	Kaca, Plastik Campur	Baik	3
71	Note Book	Fiber	Baik	2
72	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Kaca, Plastik, logam campur	Baik	6
73	Peralatan Jaringan lainnya	Logam Campur	Baik	1
74	Peralatan Jaringan lainnya	Kaca, Plastik & Logam Campur	Baik	1
75	Peralatan Jaringan lainnya	Timah palstik	Baik	1
76	Sepeda Motor	Bensin	Baik	1
77	Sepeda Motor	Bensin	Baik	1
78	Sepeda Motor	Bensin	Baik	1
79	Sepeda Motor	Fiber	Baik	1
80	Reciver	Fiber	Baik	1
81	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)		Baik	1
82	Mesin Pemotong Rumput	-	Baik	1
83	Televisi	-	Baik	1
84	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Fiber	Baik	6
85	Camera Electronic	Fiber	Baik	1
86	P.C Unit	Fiber	Baik	4
87	Lap Top	Fiber	Baik	2
88	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Baik	2
89	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fiber	Baik	6
90	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fiber	Baik	1
91	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Besi	Baik	1
92	Sepeda Motor	Fiber, Besi	Baik	1
93	Global Positioning System	Fiber	Baik	1
94	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Fiber	Baik	2
95	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Fiber	Baik	1
96	Rak Besi	Besi	Baik	1
97	Rak Besi	Besi	Baik	1
98	Rak Besi	Besi	Baik	4
99	Rak Besi	Besi	Baik	1

No.	Nama Barang	Jenis Barang	Kondisi	Volume
100	Alat Penghancur Kertas	Fiber	Baik	2
101	Meja 1/2 Biro	Kayu	Baik	1
102	Sofa	Busa	Baik	1
103	Alat Pembersih lainnya	Fiber	Baik	1
104	A.C. Sentral	Fiber	Baik	1
105	Radio	Fiber	Baik	4
106	Camera Video	Fiber	Baik	1
107	Tiang Bendera	Besi	Baik	1
108	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Fiber	Baik	1
109	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Woll	Baik	1
110	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Besi	Baik	1
111	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Kayu + Kaca	Baik	3
112	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Fiber	Baik	1
113	Katrol	Besi	Baik	1
114	Teropong (Senjata Lain - Lain)	Fiber	Baik	1
115	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	Busa + Plastik	Baik	6
116	P.C Unit	Fiber	Baik	3
117	Note Book	Fiber	Baik	2
118	Note Book	Fiber	Baik	5
119	Note Book	Fiber	Baik	5
120	Note Book	fiber	Baik	1
121	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fiber	Baik	3
122	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fiber	Baik	1
123	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fiber	Baik	1
124	Server	Fiber	Baik	1
125	Server	Fiber	Baik	1
126	Motor Boat	Besi	Baik	2
127	Lemari Penyimpan	Kayu	Baik	1
128	Alat Kantor Lainnya		Baik	1
129	Lemari Es	Besi	Baik	1
130	A.C. Window	fiber besi	Baik	1
131	A.C. Split	fiber/ besi	Baik	4
132	Kipas Angin	fiber	Baik	4
133	Alat Rumah Tangga Lain-lain	besi	Baik	1
134	Alat Rumah Tangga Lain-lain	besi	Baik	1
135	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	kayu	Baik	3
136	Telephone (PABX)	fiber	Baik	1
137	Facsimile	fiber	Baik	1
138	alat kedokteran bedah lainnya (dst)	kaca besi	Baik	1
139	Camero Photo Micrograph	Fiber	Baik	1
140	Camero Photo Micrograph	Fiber	Baik	1
141	Video Printer	plastik	Baik	2
142	Video Printer	Fiber	Baik	1
143	Video Printer	Fiber	Baik	1
144	Video Printer	Fiber	Baik	2
145	Video Printer	Fiber	Baik	1
146	Video Printer	Fiber	Baik	2
147	Generator Set (Lab Scale)	Fiber	Baik	1

No.	Nama Barang	Jenis Barang	Kondisi	Volume
148	P.C Unit	Fiber	Baik	5
149	P.C Unit	besi	Baik	1
150	P.C Unit	Fiber	Baik	1
151	Lap Top	Fiber	Baik	2
152	Note Book	Fiber	Baik	1
153	Sepeda Motor	Besi	Baik	1
154	Rak-Rak Penyimpan		Baik	1
155	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)		Baik	2
156	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)		Baik	1
157	Mesin Fotocopy Folio		Baik	1
158	Lemari Kayu	Kayu	Baik	1
159	Papan Visual/Papan Nama		Baik	1
160	Alat Penghancur Kertas		Baik	1
161	Alat Kantor Lainnya		Baik	2
162	Meja 1/2 Biro		Baik	1
163	A.C. Window		Baik	2
164	Tangga Aluminium		Baik	1
165	Dispenser		Baik	6
166	Alat Rumah Tangga Lain-lain		Baik	1
167	Alat Rumah Tangga Lain-lain		Baik	1
168	Alat Rumah Tangga Lain-lain		Baik	1
169	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		Baik	1
170	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV		Baik	2
171	Uninterruptible Power Supply (UPS)		Baik	1
172	Uninterruptible Power Supply (UPS)		Baik	1
173	Uninterruptible Power Supply (UPS)		Baik	11
174	Layar Film/Projector		Baik	1
175	Meja Kerja	Kayu	Baik	5
176	P.C Unit		Baik	1
177	P.C Unit		Baik	1
178	P.C Unit		Baik	6
179	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Baik	1
180	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Baik	1
181	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Baik	1
182	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Baik	1
183	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Baik	1
184	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Baik	1
185	External		Baik	8
186	Alat Tenis Meja		Baik	1
187	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Besi	Baik	1
188	Sepeda Motor	Besi	Baik	1
189	Sepeda Motor	Besi	Baik	1
190	Sepeda Motor	Besi	Baik	1
191	Sepeda Motor	Besi	Baik	1
192	Sepeda Motor	Besi	Baik	1
193	Sepeda Motor	Besi	Baik	1

No.	Nama Barang	Jenis Barang	Kondisi	Volume
194	Sepeda Motor	Besi	Baik	1
195	Sepeda Motor	Besi	Baik	1
196	Sepeda Motor	Besi	Baik	1
197	Sepeda Motor	Besi	Baik	1
198	Sepeda Motor	Besi	Baik	1
199	Sepeda Motor	Besi	Baik	1
200	Rak-Rak Penyimpan	Kayu + Kaca	Baik	1
201	Lemari Kayu	Kayu	Baik	2
202	Papan Pengumuman	Besi	Baik	70
203	Papan Pengumuman	Besi	Baik	3
204	A.C. Window	Besi	Baik	1
205	Camera Video	Fiber	Baik	1
206	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Kayu	Baik	1
207	Portable Router	Fiber	Baik	4
208	P.C Unit	Fiber	Baik	1
209	Lap Top	Fiber	Baik	1
210	Lap Top	Fiber	Baik	2
211	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fiber	Baik	1
212	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fiber	Baik	1
213	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fiber	Baik	1
214	Server	Besi	Baik	1
215	pompa lainnya (dst)	Besi	Baik	1
216	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Besi	Baik	1
217	Scanner (Universal Tester)	Fiber	Baik	1
218	Lemari Kayu	Kayu	Baik	5
219	A.C. Window	Fiber	Baik	2
220	A.C. Split	Fiber	Baik	6
221	Televisi	Fiber	Baik	1
222	Televisi	FIBER + KACA	Baik	1
223	Wireless	Fiber	Baik	5
224	Dispenser	Fiber	Baik	1
225	Alat Rumah Tangga Lain-lain	kain	Baik	1
226	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Multiplek	Baik	1
227	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Kayu	Baik	1
228	Meja Kerja Pejabat lain-lain	kayu	Baik	7
229	Kursi Kerja Pejabat Eselon II		Baik	1
230	Kursi Kerja Pejabat lainnya		Baik	7
231	Layar Film/Projector	fiber	Baik	1
232	Distiling Apparatus	Fiber	Baik	1
233	P.C Unit	Fiber	Baik	6
234	Lap Top	Fiber	Baik	5
235	Hard Disk	Fiber	Baik	3
236	Hard Disk		Baik	3
237	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fiber	Baik	2
238	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fiber	Baik	4
239	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fiber	Baik	3
240	Server	besi	Baik	1
241	Router	Fiber	Baik	5

No.	Nama Barang	Jenis Barang	Kondisi	Volume
242	P.C Unit	fiber	Baik	3
243	Personal Komputer lainnya	fiber	Baik	2
244	Personal Komputer lainnya	Fiber	Baik	1
245	Printer (Peralatan Personal Komputer)	fiber	Baik	4
246	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Baik	1
247	Printer (Peralatan Personal Komputer)	fiber	Baik	4
248	Printer (Peralatan Personal Komputer)	fiber	Baik	1
249	Alat Pencetak Label	besi	Baik	1
250	Papan Pengumuman	Besi	Baik	30
251	Sofa	kayu+busa	Baik	1
252	P.C Unit	Fiber	Baik	5
253	Lap Top	FIBER	Baik	4
254	Lap Top	Fiber	Baik	4
255	Sepeda Motor	besi	Baik	1
256	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	fiber + besi	Baik	1
257	Kamera Digital	fiber	Baik	1
258	Kamera Digital	fiber	Baik	1
259	P.C Unit	FIBER	Baik	3
260	Lap Top	fiber	Baik	5
261	Lap Top	fiber	Baik	2
262	Printer (Peralatan Personal Komputer)	fiber	Baik	1
263	Printer (Peralatan Personal Komputer)	fiber	Baik	2
264	Printer (Peralatan Personal Komputer)	fiber	Baik	1
265	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	fiber	Baik	1
266	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	fiber	Baik	1
267	Router	fiber	Baik	1
268	Router	fiber	Baik	4
269	Perahu Penyeberangan	kayu	Baik	1
270	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	besi	Baik	3
271	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	besi	Baik	1
272	Wireless	FIBER	Baik	1
273	P.C Unit	Fiber	Baik	4
274	P.C Unit	fiber	Baik	1
275	Lap Top	fiber	Baik	1
276	Lap Top	Fiber	Baik	1
277	Note Book	Fiber	Baik	1
278	Komputer Unit Lainnya	Fiber	Baik	2
279	Printer (Peralatan Personal Komputer)	besi + fiber	Baik	1
280	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fiber	Baik	6
281	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fiber	Baik	2
282	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fiber	Baik	1
283	Server	Besi	Baik	1

No.	Nama Barang	Jenis Barang	Kondisi	Volume
284	Pompa Air	Besi	Baik	1
285	alat pengolahan air kotor lainnya (dst)	-	Baik	1
286	Sepeda Motor	Besi	Baik	1
287	Sepeda Motor	Besi	Baik	1
288	Sepeda Motor	Besi	Baik	1
289	Sepeda Motor	Besi	Baik	1
290	Sepeda Motor	Besi	Baik	1
291	LCD Projector/Infocus	Fiber	Baik	2
292	Papan Pengumuman	Besi	Baik	10
293	Papan Pengumuman	Besi	Baik	1
294	Kursi Besi/Metal	BESI	Baik	12
295	Meja Resepsionis	KAYU	Baik	2
296	Sofa	KAYU+BUSA	Baik	4
297	A.C. Sentral	Fiber	Baik	5
298	A.C. Split	Fiber	Baik	7
299	Kompor Gas (Alat Dapur)	Besi	Baik	1
300	Sound System	FIBER	Baik	1
301	Meja Tamu Biasa		Baik	4
302	Meja Rapat Pejabat lainnya	KAYU	Baik	1
303	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	BESI +BUSA	Baik	1
304	Lemari Arsip Pejabat lainnya		Baik	2
305	P.C Unit	Fiber	Baik	1
306	P.C Unit	FIBER	Baik	2
307	P.C Unit	FIBER	Baik	1
308	Lap Top	FIBER	Baik	2
309	Printer (Peralatan Personal Komputer)	FIBER	Baik	5
310	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	FIBER	Baik	2
311	Pompa Air	besi	Baik	2
312	Scanner (Universal Tester)	Fiber	Baik	1
313	Scanner (Universal Tester)	Fiber	Baik	1
314	CCTV - Camera Control Television System	FIBER	Baik	1
315	Lemari Es	Besi	Baik	2
316	A.C. Split	Fiber	Baik	3
317	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Besi + busa	Baik	6
318	Meja Rapat Pejabat Eselon III	kayu	Baik	1
319	Lemari Arsip Pejabat lainnya	kayu	Baik	5
320	alat komunikasi lainnya lainnya (dst)	fiber	Baik	1
321	alat komunikasi lainnya lainnya (dst)	fiber	Baik	1
322	alat komunikasi lainnya lainnya (dst)	Fiber	Baik	1
323	P.C Unit	FIBER	Baik	1
324	P.C Unit	fiber	Baik	1
325	Lap Top	fiber	Baik	1
326	Lap Top	fiber	Baik	1
327	Lap Top	fiber	Baik	1
328	Lap Top	Fiber	Baik	1
329	Tablet PC	Fiber	Baik	1
330	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fiber	Baik	6

No.	Nama Barang	Jenis Barang	Kondisi	Volume
331	Printer (Peralatan Personal Komputer)	fiber	Baik	1
332	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	FIBER	Baik	2
333	Pompa Air	Besi	Baik	1
334	Brandkas	Besi	Baik	1
335	Meja Kerja Kayu	Kayu	Baik	6
336	Meja Kerja Kayu	Kayu	Baik	10
337	Meja Rapat	Kayu	Baik	2
338	Bangku Tunggu	Besi	Baik	7
339	Meubeleur lainnya	Busa + Besi	Baik	8
340	Meubeleur lainnya	Kayu	Baik	5
341	Meubeleur lainnya	Busa + Besi	Baik	4
342	Meubeleur lainnya	Kayu	Baik	3
343	A.C. Window	Fiber + Besi	Baik	2
344	A.C. Window	Aluminium + Besi	Baik	3
345	Dispenser	Fiber	Baik	4
346	LCD Monitor	Fiber	Baik	1
347	Alat Studio Video Lainnya	Fiber	Baik	1
348	P.C Unit	Fiber	Baik	4
349	Lap Top	Fiber	Baik	2
350	Lap Top	Fiber	Baik	3
351	Komputer Unit Lainnya	Fiber	Baik	1
352	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Fiber	Baik	1
353	Meja Kerja Kayu	Kayu	Baik	5
354	Bangku Tunggu	Besi+Aluminium	Baik	1
355	Bangku Tunggu	Besi+Aluminium	Baik	1
356	Meubeleur lainnya	Kayu	Baik	2
357	A.C. Split	Besi+Aluminium	Baik	1
358	alat komunikasi lainnya lainnya (dst)	Fiber	Baik	1
359	alat komunikasi lainnya lainnya (dst)	Fiber	Baik	1
360	P.C Unit	Fiber	Baik	1
361	Lap Top	Fiber	Baik	1
362	Server	Besi	Baik	1
363	Papan Visual/Papan Nama	Kayu	Baik	10
364	Kursi Biasa	Besi	Baik	6
365	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Plastik	Baik	1
366	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Plastik	Baik	1
367	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	kayu	Kurang Baik	1
368	Meja Tambahan		Baik	1
369	Meja Komputer	Kayu	Kurang Baik	1
370	Loudspeaker	Fiber	Baik	1
371	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Kayu	Baik	1
372	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Kayu	Baik	2
373	Meja Kerja	Kayu	Kurang Baik	8
374	Rak Kayu	Kayu	Baik	1
375	Kursi Biasa	Besi	Baik	20

No.	Nama Barang	Jenis Barang	Kondisi	Volume
376	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Kain	Baik	2
377	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Besi	Baik	26
378	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Besi	Baik	1
379	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Besi	Baik	1
380	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fiber	Baik	1
381	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Fiber	Baik	1
382	Mesin Hitung Manual	fiber	Baik	10
383	Rak Kayu	kayu	Baik	1
384	Alat Kantor Lainnya	kain	Baik	6
385	Bendera Merah Putih	kain	Baik	2
386	Transportable Water Pump	besi	Baik	1
387	Alat Kantor Lainnya		Baik	1
388	Kursi Tamu	Besi + Busa	Baik	1
389	Kursi Tamu	Besi + Busa	Baik	15
390	Exhause Fan	plastik	Baik	3
391	Megaphone	Fiber	Baik	1
392	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Kain	Baik	56
393	Tempat Tidur Besi	-	Baik	4
394	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	Baik	1
395	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	Baik	7
396	Printer (Peralatan Personal Komputer)		Baik	1
397	Unit Power Supply	Besi	Baik	2
398	peralatan antena vhf/fm lainnya (dst)	Fiber	Baik	1
399	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)		Baik	6
400	Rol Meter	Fiber	Baik	49
401	Rol Meter	Fiber	Baik	1
402	Alat Kantor Lainnya		Baik	1
403	Alat Kantor Lainnya		Baik	12
404	Kursi Biasa		Baik	5
405	Router	Fiber	Baik	4
406	Rak Besi	Besi	Baik	1
407	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Kaca/Stanleestil	Baik	1
408	Alat Rumah Tangga Lain-lain	kain kanvas	Baik	40
409	Transportable Water Pump	besi	Baik	1
410	Tangga Aluminium	aluminium	Baik	1
411	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Besi + Busa	Baik	100
412	External/ Portable Hardisk	Fiber	Baik	4

2.1.2.3 Sumber Daya Teknologi Informasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mengelola keuangan dan aset daerah, BKAD juga menggunakan sumber daya teknologi informasi sebagai berikut:

a. SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indosesia)
b. SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah)

c. SIKD-NG (Sistem Informasi Keuangan Daerah Next Generation)
d. SIKD DAU (Sistem Informasi Keuangan Daerah Dana Alokasi Umum)
e. Omspan TKD, aplikasi yang digunakan untuk pengajuan dan monitoring penyaluran belanja transfer DAK, DAK Non Fisik, dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
f. E-Renggar, aplikasi yang digunakan untuk penyampaian laporan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

2.1.2.4 Sumber Daya Keuangan

Badan Keuangan Daerah adalah lembaga pemerintah daerah yang mengelola keuangan dan aset daerah. BKD memiliki peran penting dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan daerah agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparan. Sumber daya keuangan BKD adalah sebagai berikut:

a. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
   BKD tidak menghasilkan pendapatan sendiri, tetapi mengelola keuangan daerah yang berasal dari APBD. Sumber daya keuangan ini digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi.
b. Dana Operasional BKD
   BKD mendapatkan alokasi belanja dari APBD untuk operasional.
c. Dana yang Dikelola
   Dana yang dikelola BKD bukan untuk BKD secara langsung, BKD juga menjadi pengelola teknis dari beberapa dana daerah seperti Dana BOSDA, Dana Hibah dan Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil Pajak, dan dana daerah lainnya.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) alokasi anggaran BKD fluktuatif atau berubah-ubah. Ini disebabkan oleh adanya dampak Covid-19, adanya efisiensi anggaran, sehingga beberapa program dan kegiatan dirasionalisasi karena berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Peningkatan anggaran BKD dikarenakan oleh kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah, merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan. Evaluasi kinerja BKAD biasanya mencakup beberapa aspek utama yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dan aset milik pemerintah daerah, sebagai berikut:

a) Pengelolaan Keuangan Daerah
b) Pengelolaan Aset Daerah
c) Pelayanan Publik Internal
d) Kepatuhan Terhadap Regulasi.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Keuangan dan Aset Daerah bertugas mengelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah, termasuk menyusun anggaran, mengelola pendapatan daerah, melakukan pengeluaran, mengelola aset daerah, dan melakukan pertanggungjawaban keuangan

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisa pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengacu pada sasaran dan indikator pada Renstra Badan Keuangan Daerah 2017-2022, secara umum terlah mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah tahun 2023-2024 mengacu pada Renstra 2023-2026, disini terlihat adanya perbedaan sasaran dan indikator pada Renstra sebelumnya.

Pada indikator jumlah inovasi yang telah ditetapkan telah terealisasi sebanyak 2 inovasi. Inovasi tersebut adalah:

1. Lakon Anggaran (Layanan Konsultasi Penganggaran)
   Merupakan inovasi dalam rangka pembinaan penganggaran pada perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Lakon Anggaran diharapkan dapat menjadi kolaborasi antar teknis bidang anggaran badan keuangan daerah dengan perangkat daerah dalam menyusun, mengelola dan mengevaluasi penganggaran yang ditetapkan dan dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya masih belum optimal dan berkesinambungan mengingat tahapan dan jadwal penyusunan APBD menjadi prioritas yang dilaksanakan sehingga inovasi ini situasional dalam penyelenggaraannya.
2. Miskol (Kamis Kolaborasi)
   Merupakan inovasi kolaborasi antara pengelola keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pelaksanaannya masih belum optimal dan berkesinambungan mengingat tahapan dan jadwal penyusunan APBD menjadi prioritas yang dilaksanakan sehingga inovasi ini situasional dalam penyelenggaraannya.

Tabel 2.5
RINGKASAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2020-2024

RINGKASAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	45.391.516.623,78	34.905.673.555,51	76,90
2021	45.340.441.160,00	31.638.013.029,37	69,78
2022	43.986.409.611,00	49.657.797.284,41	112,89
2023	57.436.430.699,00	47.820.088.328,54	83,26
2024	63.634.929.202,00	53.053.048.383,19	83,37

Yang terdiri dari :
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang Sah
Dapat dilihat dari rincian tabel di bawah ini :

Pajak Daerah

TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	3.832.440.363,00	3.531.794.196,00	92,16
2021	7.661.649.285,00	3.860.497.217,00	50,39
2022	6.774.251.385,00	6.530.785.956,81	96,4
2023	9.016.302.757,00	8.514.261.917,00	94,43
2024	9.016.302.757,00	9.112.561.267,24	101,07

Retribusi Daerah

TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	6.776.532.494,46	5.976.710.358,00	88,2
2021	8.976.710.358,00	3.033.172.955,00	33,79
2022	11.663.347.221,00	19.464.965.166,80	166,89
2023	23.354.404.977,00	13.344.054.501,00	57,14
2024	28.283.771.191,00	15.367.248.573,00	54,33

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	13.850.000.000,00	12.591.521.757,00	90,91
2021	10.684.123.854,00	10.684.123.854,00	100
2022	13.093.811.005,00	13.093.811.005,00	100
2023	14.907.522.965,00	14.907.522.965,00	100
2024	16.476.655.254,00	16.476.655.254,00	100

Lain-lain PAD yang Sah

TA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2020	20.932.543.766,32	12.805.647.244,51	61,18
2021	18.017.957.663,00	14.060.219.003,37	78,03
2022	12.455.000.000,00	10.568.235.155,80	84,85
2023	10.158.200.000,00	11.054.248.945,54	108,82
2024	9.858.200.000,00	12.096.583.288,95	122,71

RINGKASAN REALISASI BELANJA
BADAN KEUANGAN DAERAH

Tahun Anggaran	Uraian		
	Target	Realisasi	Persentase
2020	32.269.008.587,00	28.079.690.024,00	87,02
2021	150.066.756.045,00	146.439.755.450,00	97,58
2022	155.255.103.617,00	89.244.351.294,00	57,48
2023	151.183.894.804,00	137.493.115.351,00	90,94
2024	153.688.236.796,00	148.026.397.539,00	96,32

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Keuangan dan Aset Daerah meliputi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Secara umum, kelompok sasaran ini adalah semua pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah:

a) Perangkat Daerah
Satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset, seperti dinas, badan, dan kantor.

b) Pemangku Kepentingan
Partisipan yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, seperti masyarakat umum, pengusaha, investor, dan lembaga swadaya masyarakat.

c) Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Satuan kerja yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, termasuk yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Permasalah pelayanan Badan Keuangan Daerah umumnya meliputi kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, penanganan pengaduan, dan pengelolaan aset daerah. Beberapa permasalahan spesifik meliputi pengelolaan keuangan yang belum optimal, kurangnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya tata kelola keuangan dan aset daerah	1. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah 2. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah	1. Perencanaan anggaran yang lemah dan reaktif, spesifikasi indiaktor dan target kinerja yang belum jelas menyebabkan anggaran tidak efektif, dan perencanaan tidak sinkron dengan rencana strategis 2. Koordiansi dan komunikasi eksekutif-legislatif belum maksimal 3. Perencanaan anggaran kas yang tidak mempedomani KAK (Kerangka Acuan Kerja) sehingga mempengaruhi penatausahaan keuangan daerah 4. Koordinasi yang tidak berjalan secara efisien dan efektif yang berpengaruh terhadap serapan realisasi keuangan. 5. Kurangnya koordinasi antar Pengelola Keuangan SKPD dalam pemenuhan data dan dokumen untuk mendukung penyusunan laporan keuangan 6. Keterbatasan SDM dalam memahami prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan aset daerah terhadap peraturan yang berlaku dan aplikasi yang digunakan.

A. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Adapun Visi Kepulauan Mentawai 2025-2029 adalah “Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera”

Penyusunan Visi Pembangunan Kepulauan Mentawai 2025-2029 bercermin dari visi pembangunan Nasional 2025-2029 yaitu Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 dan visi pembangunan Propinsi Sumatera Barat 2025-2029 yaitu Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan. Visi yang diangkat untuk kemajuan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan ekonomi melalui hilirisasi produk/komoditas baik di sector pertanian, perikanan dan pariwisata dan menjadi pendorong (*multiplier effect*) tumbuhnya usaha ekonomi baru lainnya. Begitu juga Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang unik menjaga potensi

itu tetap ada untuk kehidupan generasi berikutnya serta menjadi daya dorong dan daya ungkit untuk kemajuan masyarakat Mentawai. Perumusan Visi RPJMD Tahun 2025-2045 sebagai Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera memiliki makna:

1. Maju
   Menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mampu berdiri tegak dan sejajar dengan daerah lain, akselerasi di segala sector pembangunan, mengejar yang belum tercapai, memperbaiki yang ada dan meningkatkan apa yang sudah diraih. Begitu juga pembangunan untuk kemajuan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, infrastruktur yang handal, dan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Berdaya Saing
   Upaya pembangunan untuk kemajuan di setiap lini pembangunan seiring dengan memastikan kualitas dan mutu sehingga memilikikeunggulan yang dapat dijadikan penggerak pertumbuhan sosial, ekonomi dan budaya. Sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, memiliki kebudayaan yang unik dan bernilai tinggi, dan memiliki keunggulan komparatif (keunggulan yang relative terhadap daerah lain) dan keunggulan kompetitif (keunggulan yang unik dan sulit ditiru) sehingga Kepulauan Mentawai diperhitungkan dalam kancah persaingan domestik, nasional dan internasional.
3. Sejahtera
   Kehidupan masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dalam suasana aman, nyaman, terlindungi dan damai, serta adanya kesempatan yang sama bagi semua untuk berkembang dan maju. Sejahtera juga mencakup pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan yang melibatkan semua orang tanpa diskriminasi, pembangunan manusia yang hakiki.

Visi Kepulauan Mentawai 2025-2029 menjadi lebih implementatif dikarenakan keselarasan dengan visi, misi dan arah pembangunan Nasional 2025-2029 serta visi dan misi Pembangunan Propinsi Sumatera Barat 2025-2029. Visi pembangunan tersebut diimplementasikan dalam perwujudan 8 misi pembangunan untuk mengejewantahkan visi dalam bentuk nyata. Misi pembangunan ini tentunya merupakan aktivitas yang ditentukan mengarah pada langkah-langkah terwujudnya kondisi yang ingin dicapai. Misi Pembangunan Daerah 2025-2029 antara lain:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Ekonomi Daerah.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana.
6. Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia.
7. Mewujudkan Masyarakat yang Aman Harmonis dan Berkeadilan.
8. Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Tepercaya.

Berdasarkan urusan dan kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai perangkat daerah yang mendukung dan berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam urusan

penunjang bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka misi 8 (Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Tepercaya) merupakan misi kepala daerah yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 2.7
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BKAD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera				
No.	Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan BKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<u>Misi 8</u> Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Terpercaya <u>Program</u> 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Darang Milik Daerah	Belum optimalnya tata kelola keuangan dan aset daerah	1. Kurangnya kapasitas SDM yang memiliki keahlian teknis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, atau sering terjadi rotasi yang tidak mempertimbangkan kompetensi. 2. Pengawasan dan evaluasi yang belum berjalan efektif baik secara internal maupun eksternal. 3. Adanya celah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. 4. Budaya kerja yang tidak professional dan resistensi terhadap perubahan da teknologi.	1. Kepemimpinan yang kuat dan memiliki komiten terhadap transparansi dan akuntabilitas mendorong perbaikan tata kelola keuangan dan aset daerah. 2. Tersedianya SDM yang kompeten kebijakan dan pedoman teknis, serta sistem informasi keuangan daerah dan barang milik daerah yang terintegrasi. 3. Pembinaan dan pengawasan dari Kemendagri, BPK, BPKP dan instansi lainnya merupakan dukungan yang mendorong tata kelola. 4. Tranparansi dan partisipasi publik.

B. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah serangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif utnuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan dumasukkan dalam kebijakan, rencana, atau program (KRP), termasuk RTRW. KLHS merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) “Setiap usaha/dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah bagian penting dari perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. KLHS merupakan prasyarat dalam penyusunan atau revisi RTRW, artinya sebelum RTRW ditetapkan, KLHS harus terlebih dahulu dilakukan untuk memastikan

bahwa dokumen RTRW sudah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta risiko lingkungan.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehngga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan. Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah:

1. Mengatur pemanfaatan ruang secara terencana
2. Mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor-dan antar-wilayah
3. Melindungi lingkungan hidup
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah
5. Memnerikan kepastian hokum

Berdasarkan telaahan KLHS RPJMD sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan dan Aset Daerah tidak termasuk rekomendasi KLHS.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan dan juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola.

Ciri-ciri Isu Stategis:

1. Mempengaruhi masa depan organisasi
2. Bersifat kompleks dan multidimensi
3. Memerlukan kebijakan atau strategi khusus untuk ditangani
4. Melibatkan banyak pihak (stakeholders)
5. Muncul dari analisis lingkungan internal dan eksternal.

Isu-isu strategis pembangunanDengan memperhatikan permasalahan dan isu strategi di bidang tat kelola pemerintahan pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029, pemetaan masalah berdasarkan tugas dan fungsi beserta faktor penghambat dan pendorong, maka isu strategis BKAD Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel.
2. Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah
   Pengelolaan aset daerah merupakan isu penting yang sering dihaddapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan dan sumber daya yang dimiliki.

Isu strategis yang sesuai dengan lingkungan dinamis meliputi isu global, nasional, dan regional.

Isu Global

Isu Global mencakup perubahan iklim, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan hak asasi manusia.

a) Perubahan Iklim adalah isu global yang mendesak dan memiliki dampak luas, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan permukaan air laut.

b) Kesehatan, pademi COVID-19 telah menyoroti pentingnya kesehatan global dan kebutuhan untuk kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman penyakit menular.
c) Ekonomi, isu ekonomi global meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hutang negara, dan ketimpangan pendapatan.
d) Keamanan global mencakup ancaman terorisme, perang siber, dan konflik bersenjata.
e) Hak Asasi Manusia, Isu hak asasi manusia meliputi kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak-hak minoritas.

Isu Nasional

Isu Nasional melibatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pemerintahan, dan pembangunan berkelanjutan, diantaranya:

a) Kualitas Pelayanan Publik
b) Kualitas pelayanan publik menjadi kunci dalam pembangunan nasional, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
c) Efektivitas Pemerintahan:
d) Pemerintahan yang efektif dan transparan penting untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan.
e) Pembangunan Berkelanjutan:
f) Pembangunan berkelanjutan melibatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.

Isu Regional

Isu Regional lebih spesifik, seperti kerjasama daerah dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah tertentu.

a) Kerjasama Daerah:
b) Kerjasama daerah dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan ekonomi di wilayah tertentu.
c) Pengelolaan Sumber Daya Alam:
d) Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan penting untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan ekonomi di wilayah tertentu.

Tabel 2.8
Isu Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kapasitas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah belum optimal dalam mengimplemen-tasikan peraturan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Pengelolaan keuangan dan aset daerah berfokus pada peningkatan kualitas SDM, transparansi, akuntabilitasi, dan pemanfaatan teknologi.	1. Transparansi dan akuntabilitas 2. Pemanfaatan teknologi 3. Perubahan iklim dan berkelanjutan	1. Optimalisasi belanja Publik 2. Penatausahaan aset yang belum tertib 3. Kulaitas sumber daya manusia 4. Risiko Hukum	1. Ketahanan fiscal 2. Ketimpangan fiskal antar daerah 3. Harminisasi standar 4. Pembangunan infrastruktur	1. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. Peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, sedangkan sasaran adalah target spesifik dan terukur yang diperlukan untuk mencapau tujuan teresebut. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program prioritas dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indicator kinerja sesuai tugas dan fungsi BKAD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indicator kinerja.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2045 “Terwujudnya Kepulauan Mentawai yang Maju Berkelanjutan dan Bermartabat menjadi arah dan pedoman pembangunan menuju Mentawai Emas 2045. Visi ini menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan menuju Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Kepulauan Mentawai 2045 akan menjadi daerah dengan pendapatan per kapita yang tinggi, kemiskinan menurun, sumber daya manusia yang unggul dan lingkungan hidup yang terjaga.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, pengelolaan aset daerah yang optimal, serta peningkatan kapsitas fiskal daerah secara berkelanjutan, serta mendukung pencapaian visi dan misi daerah melalui pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel. Tujuan ini merupakan pernyataan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam periode lima tahun ke depan oleh BKAD, dimana tujuan harus jelas, terukur, realistis, dan relevan dengan tugas dan fungsi, serta mendukung visi misi pemerintah daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah tentunya haru selaras dan mendukung visi misi kepala daerah selama lima tahun rencana pembangunan. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai penjabaran teknis pada Misi 8 yaitu penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsive, inovatif dan terpercaya.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029

Visi : Kepulauan Mentawai Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
Penguatan Transformasi Tata kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan terpercaya	Terwujudnya Birokrasi yang Prima	4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Inklusif, Handal, Transparan dan Akuntabel
		5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima, Adaftif, Inovatif, dan Melayani

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah 2025-2029 adalah target yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sasaran renstra dimaksud antara lain:

a) Selaras dengan visi misi
b) Spesifik dan terukur
c) Dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai dengan isu strategis yang menjadi pokok perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan BKAD, tujuan dan sasaran BKAD jangka menengah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2030

NSPK dan SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Handal, Transparan Dan Akuntabel	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Persentase Serapan Anggaran Terhadap Belanja Daerah	91%	93%	95%	97%	99%	100%	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Jumlah OPD yang Tertib Dalam Pengelolaan Aset Daerah	70%	73%	75%	78%	80%	83%	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima, Adaftif, Inovatif, dan Melayani		Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	78,50	79,10	80,75	81,45	82,10	82,25	
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	2	2	2	2	2	2	
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah

Strategi dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah fokus pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah pada rencana program prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029. Hal ini mencakup perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan, serta pemanfaatan aset daerah secara optimal.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam memenuhi tujuan dan sasaran pelayanan Bappeda dalam kurun waktu 5 tahun adalah:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra
Badan Keuangan Daerah dan Aset
Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029

Visi : "Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera"			
Misi 8 : Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Terpercara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	▪ Melaksanakan tahapan penyusunan APBD seefektif mungkin. ▪ Meningkatkan Pengendalian anggaran dan monitoring secara berkala. ▪ Meningkatkan Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja ▪ Meningkatkan Pengelolaan kas daerah (termasuk penerimaan, pengeluaran, dan penempatan dana, penatausahaan belanja dan pembiayaan daerah ▪ Meningkatkan Penerapan Sistem akuntansi Pemerintah Daerah. ▪ Meningkatkan koordinasi antar unit perangkat daerah dalam	▪ Menetapkan Pedoman teknis penyusunan anggaran. ▪ Menetapkan Kebijakan pengaturan tenggat waktu penyusunan dokumen anggaran. ▪ Merumuskan kebijakan teknis dan menyusun rencana kerja. ▪ Mewajibkan seluruh OPD anggaran kas. ▪ Meningkatkan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang dan piutang daerah, serta pengelolaan dana transfer. ▪ Penerapan sistem akuntansi yang terintegrasi untuk pencatatan dan pelaporan yang akurat.

Visi : “Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera”			
Misi 8 : Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Terpercara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		penyusunan dan pelaporan anggaran. ▪ Mengoptimalkan Penyusunan Laporan Keuangan yang akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya untuk mendukung Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ▪ Pengembangan sistem dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.	▪ Mewajibkan seluruh POD dalam menyusun laporan keuangan tahunan. ▪ Menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi ▪ Peningkatan partisipasi publik melalui tranparansi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk aksebilitas data keuangan daerah.
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah	▪ Melakukan inventarisasi dan penilaian barang milik daerah secara berkala. ▪ Pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah. ▪ Pemanfaatan dan optimalisasi aset idle atau tidak produktif. ▪ Meningkatkan sistem manajemen aset terintegrasi. ▪ Peningkatan kualitas SDM Pengelola BMD ▪ Meningkatkan Kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan BMD.	▪ Menetapkan Kebijakan penghapusan / pemindahtanganan / sewa aset yang tidak produktif. ▪ Menetapkan Standar pemeliharaan aset ditetapkan. ▪ Menetapkan ▪ Regulasi pelaporan aset daerah, audit aset, dan pengendalian fisik aset. ▪ Penerapan sistem manajemen aset terintegrasi ▪ Melakukan pelatihan peningkatan SDM Pengelola Aset ▪ Mewajibkan seluruh OPD menyusun laporan barang milik daerah secara berkala.

Visi : “Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera”			
Misi 8 : Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Terpercara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan ketercapaian target kinerja dan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah	▪ Mengoptimalkan pelaksanaan perencanaan penganggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. ▪ Meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam hal administrasi keuangan, barang dan umum. ▪ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pegawai perangkat daerah.

Penahapan pencapaian Renstra BKAD, mengacu pada struktur umum dokumen Renstra instansi pemerintah daerah, yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2025. Tujuan penahapan Renstra adalah untuk memastikan perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara sistematis, terarah, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi atau pemerintahan. Penahapan ini juga membantu bahwa implementasi Renstra dapat dilaksanakan secara bertahap, efektif, dan efisien.

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persiapan data dan dokumen pendukung dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Percepatan Implementasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Pemantapan Implementasi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui inovasi dan disertai evalausi	Evaluasi hasil kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penyempurnaan dan finalisasi, serta konsolidasi dan skala program sukses.

Penahapan pembangunan 2025-2026 tersebut bukan hanya sekedar urutan waktu melainkan kerangka kerja yang merefleksikan focus kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara progresif. Tahapan tersebut dirancang melalui 5 (l9ma) fase strategis mulai dari tahapan persiapan, percepatan, pemantapan, evaluasi hingga penyempurnaan dan finalisasi dan memastikan pencapaian target dan

persiapan merancang perencanaan pembangunan berikutnya, dan ini menjadi langkah dan keinginan yang kuat antara pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan segala seumber daya yang ada untuk pencapaian pembangunan yang lebih baik lagi.

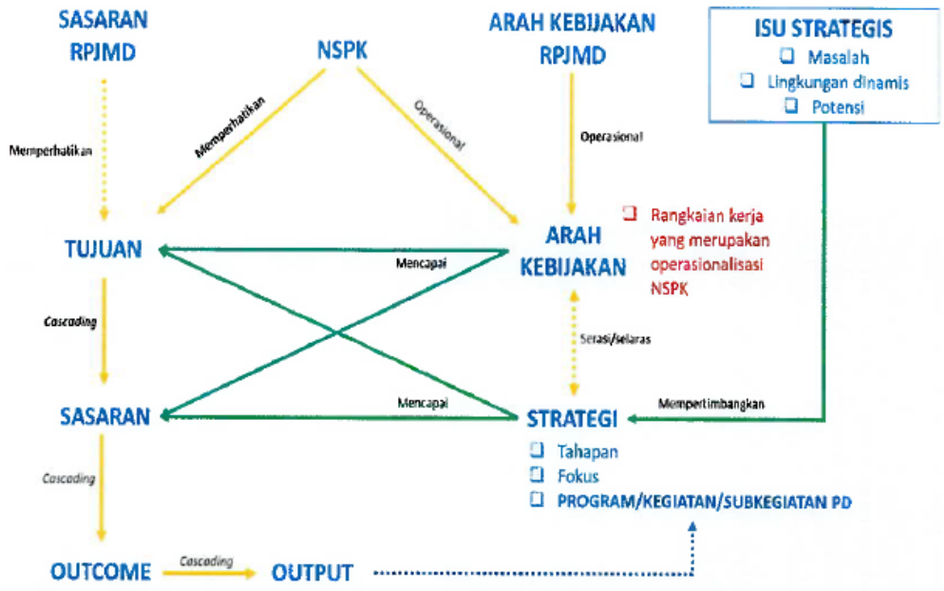
3.4 Arah Kebijakan Renstra

Arah kebijakan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD kepala daerah yang menjabat, serta disesuiakan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah menjadi panduan untuk mencapai visi. Misi, tujaun, dan sasaran pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, arah kebijakan dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah akan mencakup hal-hal berikut:

1. Peningkatan Kualitas Penganggraan APBD
   Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran untuk meningkatkan kualitas penganggaran APBD, bukan sekedar soal teknis penyusunan anggaran, tetapi menyangkut tata kelola yang baik (good governance), partisipasi masyarakat, serta komitmen kepala daerah dan DPRD. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa perencanaan dan penggunaan anggaran daerah lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Penganggaran yang berkualitas akan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
2. Peningkatan Kualitas Manajemen/Pengelolaan Kas Daerah
   Penigkatan kualitas manajemen/pengelolaan kas daerah merupakan bagian penting dalam tata kelola keuangan daerah yang baik. Badan Keuangan dan Aset Daerah harus berupaya sistematis untuk memastikan bahwa dana publik dikelola secara efisien, efektif, akuntabel, dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas daerah, serta mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah.
3. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
   Dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Badan Keuangan dan Aset Daerah harus mampu mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penyampaian LKPD tepat waktu, dan penurunan temuan dan rekomendasi BPK dari tahun ke tahun, serta peningkatan kepercayaan public terhadap pengelolaan keuangan daerah.
4. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
   Barang Milik daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDatau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Badan Keuangan dan Aset Daerah harus menjamin tertib administrasi daerah, meningkatkan daya guna aset milik pemerintah daerah dan mengurangi risiko kehilangan, penyalahgunaan, atau pemborosan aset.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



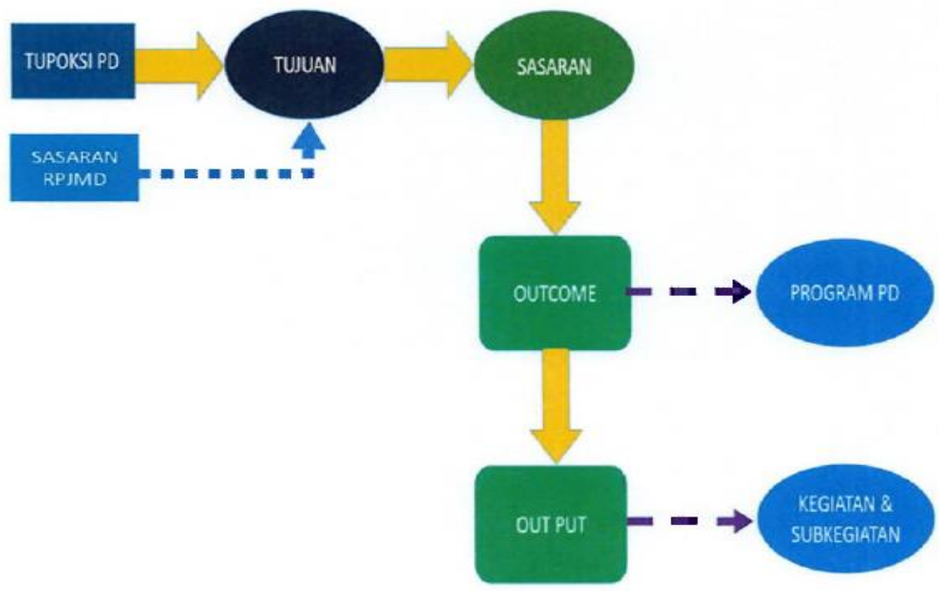
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan/subkegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran yang ditetapkan. Kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap daerah program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetpakan tersebut selanjutnya dirumuskan indicator kinerja dan targetnya. Indikator keluaran program priotitas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indicator kinerja program yang berisi *outcome program*. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan fungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih ybtuk setiap program prioritas, harus menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan tugas dan fungsiBadan Keuangan dan Aset Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam

rancangan awal RPJMD pada misi 8 yaiut penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsive, inovatif dan terpercaya. Indikator dan teknik rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan uang Inklusif, Handal, Transparan dan Akuntabel	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel				Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah			Persentase Serapan Anggaran Terhadap Belanja Daerah		
			Meningkatnya Program Pengelolaan Keuangan Daerah			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran		Persentase Belanja Pegawai Diluar Tunjangan Guru Yang Dialokasikan Melalui Transfer Ke Daerah (TKD)		

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
					Persentase Tahapan Rencana Penganggaran Tepat Waktu dan Pedoman Pelaksanaan APBD	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	
				Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
				Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						APBD	
				Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan bidang anggaran	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dadar		
					Persentase Penurunan SILPA		
					Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolan Perbendaharaan Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Daerah			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Lembaga Keuangan		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	
				Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran erhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Pelaksanaan		Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Laporan Aliran Kas, dan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi Dan Pelaporan		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu		
					Pedoman Pengambilan Keputusan Darah dalam Penyusunan Anggaran dan Salah Satu Syarat Opini BPK Persentase OPD dengan Laporan Keuangan Baik	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan□LO, dan Beban		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
				Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Terkelolanya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegitaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset daerah	Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
					Persentase Barang dan Jasa yang	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Teridentifikasi dan terdokumentasi Dengan Baik dan Tercapainya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara Baik dan Benar		
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		Inventarisasi Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Barang Milik Daerah			
				Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani							
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai LAKIP		
					Jumlah Inovasi yang Diterapkan		

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah		
					Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan Tugas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kegiatan Perencanaan Penganggraan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pelaksanaan Tugas ASN			
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disesdiakan		Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disesdiakan		Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logostik Kantor yang Disediakan		Penyediaan Bahan Logistik	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Pemelihaaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Guna memastikan pencapaian sasaran strategis maupun program, kegiatan, dan sub kegiatan di dalamnya, maka disampaikan pula rencana pendanaannya serta program prioritas sebagai indikasi pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana terlampir pada tabel 4.3 dan tabel 4.4 rencana ini bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIAKTIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH													
KEUANGAN				155.705.600.709		164.591.562.294		171.586.079.175		178.625.520.096		186.292.404.486	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan Tugas	100%	100%	41.879.325.409	100%	43.702.786.009	100%	44.319.266.109	100%	44.706.766.109	100%	45.217.566.109	
Kegiatan Perencanaan Penganggraan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Eavluasi Kinerja	100%	100%	22.323.000	100%	29.019.900	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	200.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	22.323.000	1 Laporan	29.019.900	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	90.000.000	1 Laporan	200.000.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	2 Layanan	2 Layanan	40.359.356.409	2 Layanan	40.941.616.109	2 Layanan	41.041.616.109	2 Layanan	41.141.616.109	2 Layanan	41.241.616.109	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	67 Orang	67 Orang	40.359.356.409	67 Orang	40.459.356.409	67 Orang	40.559.356.409	67 Orang	40.659.356.409	67 Orang	40.759.356.409	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIAKTIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Org/Bln	-	-	12 Org/Bln	482.259.700	12 Org/Bln	482.259.700	12 Org/Bln	482.259.700	12 Org/Bln	482.259.700	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelyanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Orang	-	-	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan	2 Orang	-	-	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	254.396.000	100%	645.000.000	100%	770.500.000	100%	886.000.000	100%	1.051.300.000	
Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.300.000	1 Paket	30.500.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	45.500.000	1 Paket	55.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIAKTIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.188.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	175.500.000	1 Paket	180.500.000	1 Paket	185.500.000	
Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	31.133.000	4 Paket	165.500.000	4 Paket	175.000.000	4 Paket	185.500.000	4 Paket	195.500.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	18.970.000	3 Paket	25.500.000	3 Paket	36.000.000	3 Paket	40.000.000	3 Paket	45.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	18.500.000	1 Dokumen	19.000.000	1 Dokumen	19.500.000	1 Dokumen	19.800.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	158.805.000	1 Laporan	255.000.000	1 Laporan	325.000.000	1 Laporan	415.000.000	1 Laporan	550.000.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	-	100%	250.000.000	100%	375.000.000	100%	425.000.000	100%	450.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang DIsediakan	Unit	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIAKTIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	
Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang DIsediakan	Unit	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	10 Unit	250.000.000	15 Unit	375.000.000	15 Unit	425.000.000	18 Unit	450.000.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	1.237.150.000	100%	1.617.150.000	100%	1.822.150.000	100%	1.922.150.000	100%	2.022.150.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	1.237.150.000	4 Laporan	1.537.150.000	4 Laporan	1.737.150.000	4 Laporan	1.837.150.000	4 Laporan	1.937.150.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	3 Laporan	80.000.000	3 Laporan	85.000.000	3 Laporan	85.000.000	3 Laporan	85.000.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Pemeliharaaan Barang Milik Daerah	100%	100%	6.100.000	100%	210.000.000	100%	220.000.000	100%	232.000.000	100%	242.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIAKTIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	U	-	-	30 Unit	130.000.000	30 Unit	135.000.000	30 Unit	140.000.000	30 Unit	145.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelaihara	Unit	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	
Pemelihaaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	6.100.000	30 Unit	80.000.000	30 Unit	85.000.000	30 Unit	92.000.000	30 Unit	97.500.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran	100%	100%	113.226.275.300	100%	120.146.264.585	100%	126.373.601.166	100%	132.822.744.273	100%	139.693.999.156	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIAKTIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan APBD	100%	100%	200.000.000	100%	1.408.708.500	100%	1.493.708.500	100%	1.596.708.500	100%	1.790.708.500	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	65.000.000	2 Dokumen	68.000.000	2 Dokumen	70.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	65.000.000	2 Dokumen	68.000.000	2 Dokumen	70.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	450.966.500	2 Dokumen	470.966.500	2 Dokumen	480.966.500	2 Dokumen	580.966.500	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	465.462.000	2 Dokumen	485.462.000	2 Dokumen	515.462.000	2 Dokumen	545.462.000	
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	-	-	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	64.000.000	2 Dokumen	74.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIAKTIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	-	-	-	100 Orang	312.280.000	100 Orang	352.280.000	150 Orang	400.280.000	150 Orang	450.280.000	
Kegiatan Koordinasi dan Pengelolan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Realisasi Pencairan Dana APBD, Semakin Efektif dan Efisien	100%	100%	199.835.200	100%	249.794.000	100%	312.242.500	100%	390.303.125	100%	487.878.906	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	62.745.000	1 Dokumen	78.431.250	1 Dokumen	98.039.063	1 Dokumen	122.548.828	1 Dokumen	153.186.035	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-	-	-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen	26.951.000	1 Dokumen	33.688.750	1 Dokumen	42.110.938	1 Dokumen	52.638.672	1 Dokumen	65.798.340	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIAKTIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	1 Dokumen	1 Dokumen	50.272.200	1 Dokumen	62.840.250	1 Dokumen	78.550.313	1 Dokumen	98.187.891	1 Dokumen	122.734.863	
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	59.867.000	1 Dokumen	74.833.750	1 Dokumen	93.542.188	1 Dokumen	116.927.734	1 Dokumen	146.159.668	
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	100%	199.999.800	100%	229.999.770	100%	396.999.736	100%	456.549.696	100%	517.269.650	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIAKTIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	1 Dokumen	1 Dokumen	26.666.200	1 Dokumen	30.666.130	1 Dokumen	35.266.050	1 Dokumen	40.555.957	1 Dokumen	46.639.350	
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-	3 Laporan	36.201.400	3 Laporan	41.631.610	3 Laporan	47.876.352	3 Laporan	55.057.804	3 Laporan	63.316.475	
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		2 Laporan	70.888.000	2 Laporan	81.521.200	2 Laporan	93.749.380	2 Laporan	107.811.787	2 Laporan	123.983.555	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIAKTIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota		2 Dokumen	66.244.200	2 Dokumen	76.180.830	2 Dokumen	87.607.955	2 Dokumen	100.749.148	2 Dokumen	115.861.520	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	87.500.000	1 Dokumen	100.625.000	1 Dokumen	115.718.750	
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	2 Orang	-	-	-	-	2 Orang	45.000.000	2 Orang	51.750.000	2 Orang	51.750.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIAKTIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegitaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	112.626.440.300	100%	118.257.762.315	100%	124.170.650.431	100%	130.379.182.952	100%	136.898.142.100	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan Baik	3 Laporan	3 Laporan	2.000.000.000	3 Laporan	2.100.000.000	3 Laporan	2.205.000.000	3 Laporan	2.315.250.000	3 Laporan	2.431.012.500	
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	Terkelolanya Dana Bagi Hasil Kab/Kota	3 Laporan	3 Laporan	110.626.440.300	3 Laporan	116.157.762.315	3 Laporan	121.965.650.431	3 Laporan	128.063.932.952	3 Laporan	134.467.129.600	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	100%	100%	600.000.000		742.511.700		893.211.900		1.096.009.714		1.380.839.221	
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Barang dan Jasa yang Teridentifikasi dan Terdokumentasi Dengan Baik	100%	100%	600.000.000	100%	742.511.700	100%	893.211.900	100%	1.096.009.714	100%	1.380.839.221	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	12.450.900	5 Dokumen	21.789.075	5 Dokumen	38.130.881	5 Dokumen	66.729.042	5 Dokumen	116.775.824	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	43.750.000	1 Laporan	76.562.500	1 Laporan	133.984.375	1 Laporan	234.472.656	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIAKTIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	10 Laporan	10 Laporan	425.000.000	10 Laporan	488.750.000	10 Laporan	562.062.500	10 Laporan	646.371.875	10 Laporan	743.327.656	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	37.480.600	6 Dokumen	43.102.690	6 Dokumen	49.568.094	6 Dokumen	57.003.308	6 Dokumen	65.553.804	
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan barang milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	50.068.600	2 Laporan	87.620.050	2 Laporan	100.763.058	2 Laporan	115.877.516	2 Laporan	133.259.144	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	2 Laporan	49.999.900	2 Laporan	57.499.885	2 Laporan	66.124.868	2 Laporan	76.043.598	2 Laporan	87.450.138	

a. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas
Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PROGRAM PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan bidang anggaran	
			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolan Perbendaharaan Daerah	
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			Penyiapan, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	
			Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan sebagai ukuran capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dmpak. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan karena menjadi indikator keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah, yang digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan rencana dimasa depan. Penilain tersebut sebagai akuntabilitas kinerja dan informai tentang pencapain kinerja penyelenggaran bidng urusan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah kepada masyarakat. Indikator Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkkan kinerja yang akan dicapai Bapperida dalam waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Ini dapat dilihat pada tabel 4.5 dan tabel 4.6

Tabel 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Serapan Anggaran Terhadap Belanja Daerah	Persen	91	93	95	97	99	100	
2	Persentase Jumlah OPD yang Tertib Dalam Pengelolaan Aset Daerah	Persen	70	73	75	78	80	83	
3	Nilai LAKIP	Nilai	78,50	79,10	80,75	81,45	82,10	82,25	
4	Jumlah Inovasi yang Diterapkan	Inovasi	2	2	2	2	2	2	
5	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)
1	Persentase Belanja Pegawai Diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	Persen	36,90	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	36,08	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	75,00	80,00	81,50	82,00	82,50	83,00	
4	Persentase Penurunan SILPA	Persen	10,00	9,00	8,50	8,00	7,50	6,00	
5	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	7,50	7,80	8,00	8,20	8,50	9,00	
7	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (SIKBD)	Persen	85	95	100	100	100	100	
8	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan tugas Layanan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Perencanaan yang berkualitas akan mampu mendorong visi dan misi kepala daerah kepada sebuah kenyataan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi dokumen Rencana Strategis (Renstra) oleh masing-masing perangkat daerah, sehingga lebih operasional dan dapat untuk dilaksanakan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah yang strategis dan merupakan penjabaran secara teknis RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah kurun waktu 5 tahun.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra ini dapat berjalan efektif. Renstra ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.

Penyelenggaran Satu data Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai hadi sebagai suatu upaya untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan penggunaan data terpadu dalam penyusunan perencanaan yang berkualitas melalui penyelenggaraan satu data terpadu yaitu perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data. Perencanaan yang berkualitas disusun dari data yang akurat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029 menjadi komitmen dan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renstra ini, Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



RINTO WARDANA

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI i

DAFTAR GAMBAR ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan badan Keuangan Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 25

2.2 Permasalah dan Isu Strategis
2.2.1 Permasalahan Pelayanan 25
2.2.2 Isu Strategis 29

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah 32
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah 32
3.3 Strategi Perangkat Daerah 33
3.4 Arah Kebijakan Renstra 39

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 40
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 54

BAB V PENUTUP 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1
Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra 3

Gambar 2 .2
Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan 3

Gambar 2 .3
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah 15

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1
Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan 16
Tabel 2.2
Daftar Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin..... 16
Tabel 2.3
Daftar Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 17
Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana 18
Tabel 2.5
Ringkasan Realisasi Pendapatan Daerah..... 22
Tabel 2.6
Target dan Realisasi PAD Tahun Tahun 2020-2024..... 23
Tabel 2.7
Kontribusi Komponen Realisasi PAD TAhun 2020-2024 23
Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan PAD 24
Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan 26
Tabel 2.10
Faktor Penghambat dan Pendorong 27
Tabel 2.11
Identifikasi Isu Tsrategis 30
Tabel 2.12
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 31

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 ... 32
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah 2025-2029 33
Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Bapenda 2025-2029 35
Tabel 3.4
Penahapan Renstra Badan Pendapatan Daerah 40

Tabel 4.1
Teknisk merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Bapenda..... 41
Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan..... 47
Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung program Prioritas
Pembangunan Daerah..... 53
Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah..... 55
Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Badan Pendapatan Daerah..... 55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 7, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan dokumen yang bersifat indikatif. Dengan telah terbitnya Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun Renstra Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Bapenda sebagai unsur penunjang bidang keuangan, dengan pertimbangan potensi sumber daya, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang selalu dikembangkan.

Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu sebagai pengatur (regulered), pajak dan retribusi merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Lewat penerimaan pajak dan retribusi daerah, pembangunan ekonomi dapat dipercepat. Penyediaan fasilitas umum yang tak bisa disediakan oleh warga negara atau badan usaha seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah umum, kesehatan dan rumah sakit umum harus disediakan oleh negara. Dalam berbagai fakta dilapangan membuktikan, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai ujung tombak dalam mendukung sumber dana pembangunan daerah, dibutuhkan potensi yang cukup besar dalam membangkitkan nilai – nilai pembangunan daerah. Artinya, ketika Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus diberdayakan, dengan tema rasionalitas dan realitas pemberdayaan potensi sumber dayanya, kendala yang dialami pemerintah daerah dalam merumuskan pembangunan, yang teralokasi dalam koridor pembangunan bidang pendapatan daerah dapat terjawab.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dokumen perencanaan strategis Bapenda yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi pelayanan Bapenda. Penyusunan Renstra Bapenda disusun berpedoman pada RPJMD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi acuan dalam penilaian kinerja pelayanan.

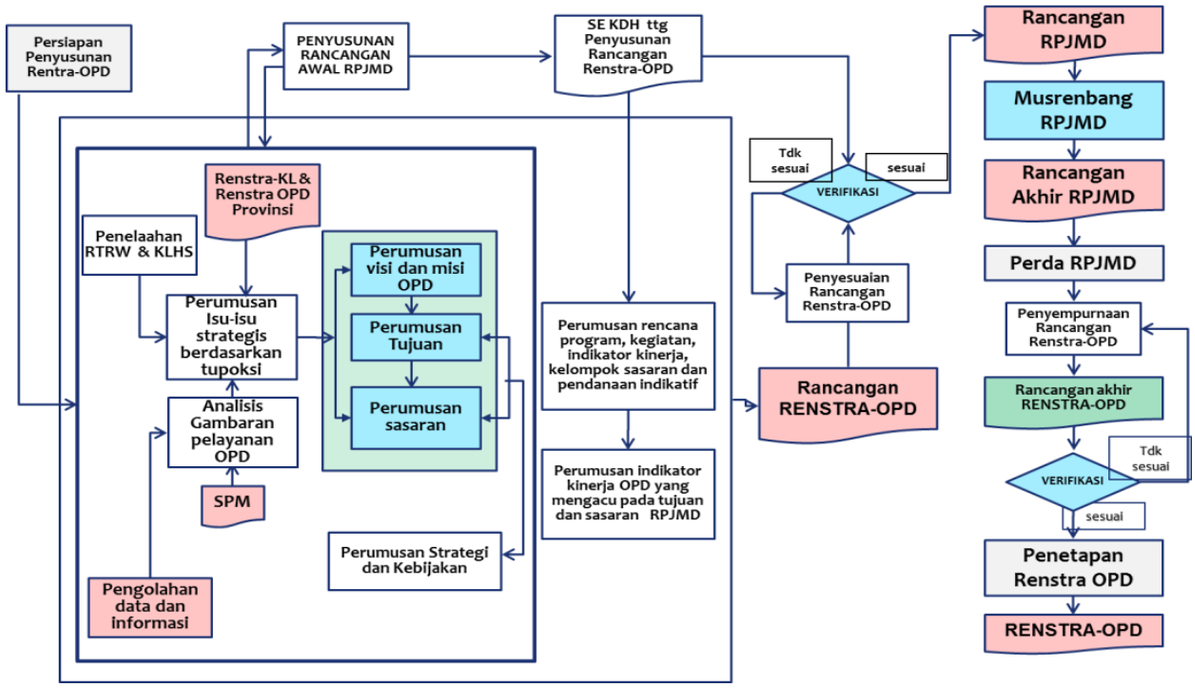
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 – 2029 berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sehinggga tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedomana Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penyusunan Renstra

Perangkat Daerah, diawali dengan:

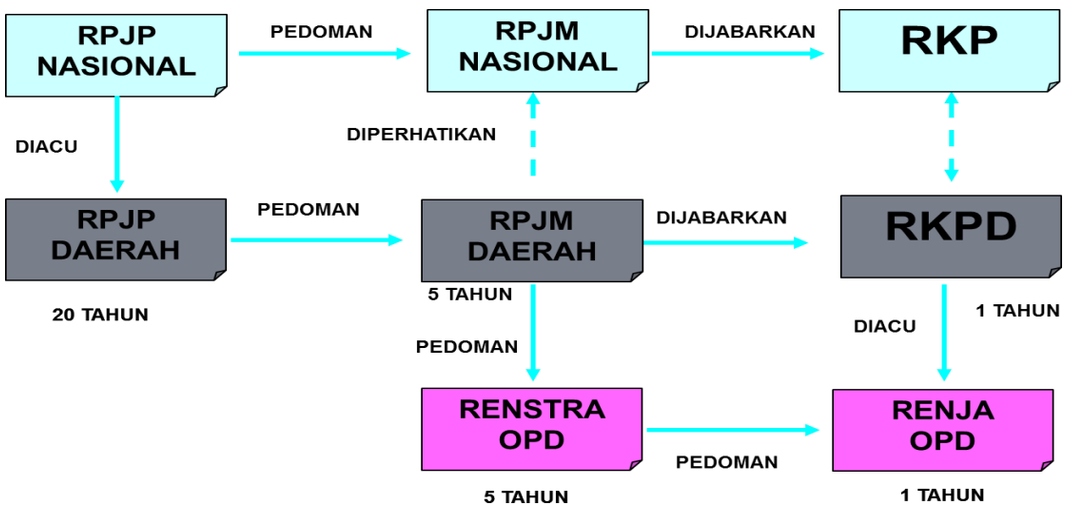
1. Persiapan Penyusunan Renstra, antara lain:
   a. Pembentukan SK Tim penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.
   b. Orientasi mengenal RENSTRA.
   c. Penyusunan Agenda Tim Penyusunan RENSTRA.
   d. Penyiapan Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah antara lain:
   a. Analisis gambaran pelayanan.
   b. Analisis permasalahan.
   c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya.
   d. Analisis isu strategis.
   e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.
   f. Perumusan Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.
   g. Perumusan rencana progran, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.
3. Rancangan RENSTRA antara lain:
   a. Penyempurnaan rancangan awal Renstra perangkat daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah.
   b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat daerah/lintas perangkat daerah.
   c. Hasil Kesepakatan Forum perangkat daerah dituangkan dalam Berita Acara.
   d. Rancangan Renstra perangkat daerah disempurnakan berdasarkan berita acara.
4. Rancangan Akhir RENSTRA antara lain:
   a. Penyempurnaan rancangan akhir Renstra perangkat daerah berdasarkan surat Peraturan Daerah tentang RPJMD.
   b. Perumusan rancangan akhir Renstra perangkat daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
5. Penetapan RENSTRA antara lain:
   a. Rancangan Akhir Renstra perangkat daerah disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk diverifikasi.
   b. Rancangan Akhir Renstra perangkat daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
   c. Rancangan akhir Renstra perangkat daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh perangkat daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk dilakukan proses penetapan Renstra perangkat daerah.
   d. Penetapan Renstra PD dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.

Gambar 1.1
Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Bapenda



Penyusunan Renstra Bapenda tentunya memperhatikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah, propinsi maupun pusat. Penyelarasan tersebut terkait dengan pelaksanaan tupoksi pelayanan Bapenda agar lebih efektif dan efisien. Hubungan dan keterkaitan dokumen Rencana Strategis Bapenda dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat melalui Gambar1.2.

Gambar 1.2
Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bapenda yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapenda dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Diubah dengan PP No.

17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah.

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan RENSTRA Tahun 2025-2029 antara Lain:

a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jagka Menengah Darah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun2025-2029.
b. Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Bapenda.
3. Pedoman dalam fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda.

Tujuan penyusunan Renstra Bapenda Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai penjabaran operasional visi dan misi kepala daerah menyangkut fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi Daerah.
2. Merumuskan tolak ukur kinerja organisasi yang terukur, transparan dan akuntabel.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bapenda Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merumuskan latar belakang Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis serta dasar hukum yang relevan dan signifikan dan menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah. Bab ini terdiri atas:

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi penyajian data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah disertai evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir, serta mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan yang berkaitan dengan pelayanan Badan Pendapatan Daerah dan mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bab ini terdiri atas:

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
    2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
    2.1.2 Sumber Daya Pendapatan Daerah
    2.1.3 Kinerja Badan Pendapatan Daerah
    2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
2.2 Permasalahan dan Isu Strategi Badan Pendapatan Daerah
    2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
    2.2.2 Isu Strategi

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya dan mengacu pada Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang dijabarkan secara operasinal dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan disertai dengan indikator kinerja dan targetnya yang didukung dengan program prioritas pembangunan daerah, Bab ini terdiri atas:

3.1 Tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029
3.3 Strategi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah 2025-2029

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub kegiatan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya, dan menjelaskan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci berserta Target dan Pagu Indikatif untuk pencapaian 5 (lima) tahun kedepan, Bab ini terdiri atas:

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesesuaian antara target kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Pendapatan Daerah

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dipimpin oleh seorang Kepala Badan, dengan susunan organisasi Badan, terdiri atas:

a. Sekretariat
b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
d. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
e. UPTD.

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bapenda mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja dan keuangan Badan;
b. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Secara rinci tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

A. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris badan, memiliki:

Tugas :

Membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan.

Fungsi:

a. Pengoordinasian penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
b. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, hukum, kelembagaan, tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, hubungan masyarakat, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan;
c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia pegawai aparatur sipil negara, rencana kebutuhan aset, rencana pemanfaatan

aset, rencana anggaran kas, rencana program kerja tahunan, rencana pengendalian risiko, dan dokumen perencanaan lainnya di lingkungan Badan;

d. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi rencana strategis, laporan evaluasi rencana kerja, dokumen manajemen risiko, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan realisasi fisik dan keuangan, laporan pemanfaatan aset, laporan pengelolaan piutang/utang, laporan keuangan bulanan, semester, dan tahunan atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, dan laporan lainnya di lingkungan Badan;
e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah, survei kepuasan masyarakat, penilaian dan evaluasi capaian reformasi birokrasi, penilaian dan evaluasi manajemen risiko, serta penilaian dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
c. penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan;
d. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
e. penyiapan bahan pengelolaan urusan kerumahtanggaan;
f. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan aset daerah di lingkungan Badan;
g. penyiapan bahan kerja sama dan kehumasan;
h. penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
i. penyiapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
j. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Bidang – Bidang pada Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari:

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang memiliki:

Tugas:

membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah.

Fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah;
b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
c. pelaksanaaan analisis regulasi pendapatan Daerah;
d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah;

e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
g. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
h. pelaksanaaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan Daerah;
i. pelaksanaaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang pendataan dan perencanaan pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan perencanaan pendapatan Daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, subbidang pendataan dan perencanaan pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan dan perencanaan pendapatan Daerah;
b. koordinasi pendataan dan perencanaan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan;
c. koordinasi dengan bidang terkait hasil pendataan dan perencanaan pajak Daerah dan retribusi Daerah yang dikelola oleh Badan;
d. pelaksanaan penelitian keakuratan data wajib pajak Daerah, wajib retribusi Daerah, serta objek pajak Daerah dan objek retribusi Daerah;
e. penghimpunan dan penyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
f. koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data wajib pajak, objek pajak, wajib retribusi Daerah dan objek retribusi Daerah;
g. koordinasi dengan organisasi perangkat Daerah terkait dalam kerangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penerimaan pendapatan Daerah;
h. penyusunan data potensi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
i. penyiapan usulan penetapan target penerimaan pendapatan Daerah; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang pengkajian dan pengembangan pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan pengembangan pendapatan Daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, subbidang pengkajian dan pengembangan pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan analisa perkembangan penerimaan pendapatan Daerah secara berkala;
b. penyiapan bahan analisis regulasi pendapatan Daerah;
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan pendapatan Daerah;
d. penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;

e. penyiapan bahan perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
f. penyiapan bahan penyusun kajian potensi pengembangan potensi pendapatan Daerah;
g. penyiapan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan Daerah;
h. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan pendapatan Daerah;
i. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pada bank terkait pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi secara daring;
j. penyiapan bahan pengkajian dan penyusunan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan yang menyangkut penerimaan Daerah;
k. penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
l. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, memiliki:

Tugas:

Membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah.

Fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
b. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, dan penilaian pajak Daerah dan retribusi Daerah;
c. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
d. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
e. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan Daerah;
f. pelaporan pendapatan Daerah;
g. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang pendaftaran dan pemungutan mempunyai tugas membantu kepala bidang pengelolaan pendapatan Daerah dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pemungutan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, subbidang pendaftaran dan pemungutan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan petunjuk teknis mengenai perhitungan dan penetapan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
b. penerbitan surat pengukuhan wajib pajak Daerah dan wajib retribusi Daerah;
c. penghitungan dan penetapan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
d. pengoordinasian penerbitan surat ketetapan pajak Daerah dan surat ketetapan retribusi Daerah;
e. penelitian keakuratan terhadap surat pemberitahuan pajak Daerah dan surat pemberitahuan retribusi Daerah serta dokumen lain dan

kelengkapannya;
f. pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
g. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, dan penilaian pajak Daerah dan retribusi Daerah;
h. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas membantu kepala bidang pengelolaan pendapatan Daerah dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembukuan dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, subbidang pembukuan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan Daerah dan pelaporan pendapatan Daerah yang dikelola oleh Badan;
b. penyusunan laporan piutang pajak Daerah dan retribusi Daerah;
c. koordinasi penyusunan laporan penerimaan perangkat Daerah penghasil pendapatan Daerah;
d. penyusunan laporan realisasi penerimaan harian, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan beserta tunggakan yang dikelola oleh Badan;
e. koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap penerimaan pendapatan Daerah;
f. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
g. rekonsiliasi penerimaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
h. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, memiliki:
Tugas:
Membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan evaluasi Pendapatan Daerah.
Fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah;
b. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
c. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah;
d. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan Daerah;
e. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
f. pengendalian dan evaluasi strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
g. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
h. koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan Daerah;
i. pelaksanaaan pemeriksaaan pajak Daerah;
j. monitoring dan evaluasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;

k. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
l. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak Daerah;
m. analisis regulasi pendapatan Daerah;
n. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
o. perumusan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
p. pengelolaan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
q. pengembangan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
r. koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
s. penyelenggaraan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah baik internal maupun eksternal;
t. pemeliharaan basis data pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Subbidang pembinaan dan pengawasan wajib pajak/wajib retribusi mempunyai tugas membantu kepala bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan wajib pajak/ wajib retribusi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, subbidang pembinaan dan pengawasan wajib pajak/wajib retribusi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan wajib pajak/wajib retribusi;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemeriksaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
c. penyiapan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pembinaan dan pengawasan wajib pajak/wajib retribusi;
d. penyiapan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemeriksanaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
e. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penindakan terhadap pelanggaran oleh wajib pajak dan wajib retribusi Daerah dengan perangkat Daerah terkait;
f. penyiapan bahan koordinasi penyelesaian sengketa pajak Daerah dan retribusi Daerah;
g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan petunjuk teknis pemberian pengurangan, keringanan, dan pengajuan keberatan atas kelebihan penghitungan pajak Daerah dan retribusi Daerah dengan bidang terkait:
h. penyiapan bahan koordinasi antar bidang dan perangkat Daerah terkait pemberian pengurangan, keringanan, dan pengajuan keberatan atas kelebihan penghitungan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
i. penyelenggaraan proses pertimbangan atas pemberian pengurangan, keringanan, dan pengajuan keberatan atas kelebihan penghitungan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
j. penyiapan bahan koordinasi penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pengaduan terkait pajak Daerah dan retribusi Daerah dengan bidang terkait;
k. penyiapan bahan koordinasi antar bidang dan perangkat Daerah terkait pengaduan dan tindak lanjut pengaduan bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah;

l. penyelenggaraan proses dan memberikan pertimbangan tindak lanjut pengaduan;
m. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
n. penyiapan bahan penyusunan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang informasi pendapatan Daerah.

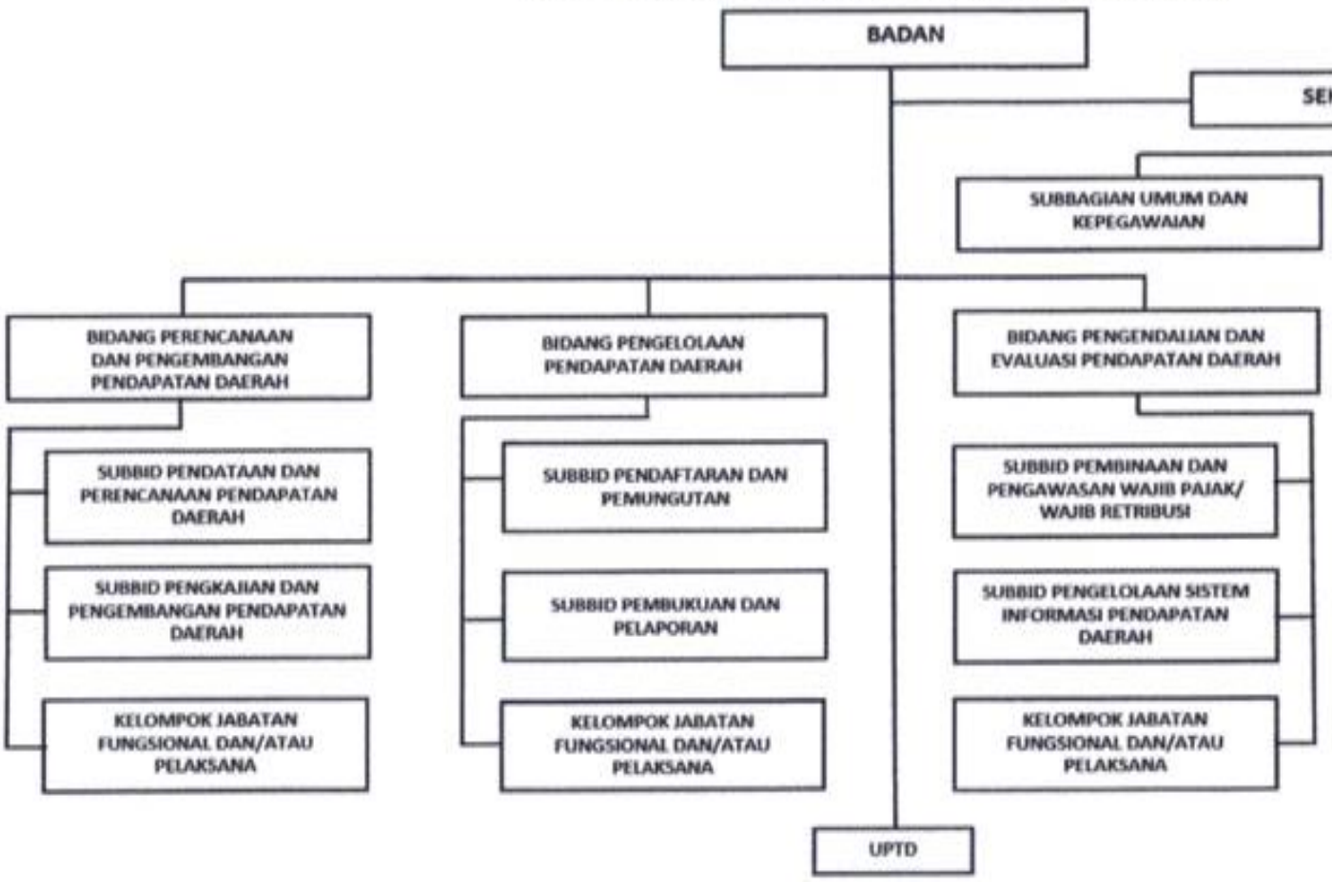
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, subbidang pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan pelayanan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
b. pembangunan, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi daring pendapatan Daerah;
c. pengelolaan dan pemeliharaan basis data sistem informasi pendapatan Daerah;
d. pembangunan, pemeliharaan dan evaluasi jaringan sistem informasi pendapatan Daerah;
e. perbaikan kesalahan data pada sistem informasi pendapatan Daerah;
f. pengelolaan informasi perkembangan pendapatan Daerah melalui informasi teknologi;
g. pembangunan dan pengembangan informasi teknologi pengelolaan pendapatan Daerah; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. UPTD

Gambar 2.3

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



2.1.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Sumber Daya Manusia tersebut harus profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesional, berarti setiap SDM Badan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Mentawai harus memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan bidang pendidikan dan latihan yang diperoleh yang akan menunjang jabatan yang sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

Sehubungan dengan dibentuknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat, berikut daftar pegawai pada Badan Pendapatan Daerah.

Tabel 2.1
Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Unit Kerja	Esselon			Fungsional	Pelaksana	PPPK Paruh Waktu	Jumlah
		II	III	IV				
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	1	1	3	-	6
3.	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	-	1	2	-	1	-	4
4.	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	1	1	-	4	-	6
5.	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	-	1	2	1	1	-	5
Jumlah		1	4	6	2	9		22

Sumber daya aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai bertujuan untuk menetukan jumlah dan kualifikasi (mutu) aparatur secara tepat sesuai dengan beban kerja dan tujuan organisasi, dan dapat memastikan efisiensi SDM, menghindari kelebihan atau kekurangan staf, serta mengoptimalkan produktivitas dan perencanaan kerja Badan pendapatan Daerah. Dalam tahap awal berdirinya Badan Pendapatan Daerah masih membutuhkan SDM untuk memenuhi struktur organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. ASN yang berjumlah 22 orang masih sangat kurang untuk menunjang maksimalnya pekerjaan.

Tabel 2.2
Daftar Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Tingkat Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah(Orang)
		L	W	

No.	Tingkat Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah(Orang)
		L	W	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	2	2	4
3	Eselon IV	4	2	6
4	Fungsional	-	2	2
5	Pelaksana	5	4	9
6	PPPK Paruh Waktu	-	-	-
Jumlah (orang)		12	10	22
Persentase (%)		54,55	45,45	

Sumber daya aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berjumlah 22 orang, terdiri dari 12 orang laki-laki dan 10 orang wanita, hal ini menggambarkan bahwa di Badan Pendapatan Daerah tidak adanya ketimpangan atau kesetaraan partisipasi gender.

Tabel 2.3
Daftar Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Unit Kerja	S2	S1	D3	SLTA/ Sederajat	Jumlah
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	4
2.	Sekretariat	-	3	1	2	4
3.	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	-	4	-	-	4
4.	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	1	-	4	4
5.	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	3	2	-	-	4
Jumlah (orang)		5	10	1	6	22
Persentase (%)		22,72	45,45	4,554	22,27	

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.3 tingkat pendidikan aparatur Badan Pendapatan Daerah yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 10 orang (45,45%). Tingkat pendidikan tinggi tentunya diharapkan akan berbanding lurus dengan capaian kinerja yang selanjutnya mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Dalam meningkatkan kapasitas aparatur, Badan Pendapatan Daerah juga mengakomodir bagi setiap aparatur yang ingin mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas baik yang ada di dalam daerah dan di luar daerah Mentawai dan mendukung sepenuhnya bagi yang ingin meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2.1.2.2 Sumber Daya Fisik/Sarana Prasarana

Dalam menunjang tugas dan fungsi palayanan Bapenda, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung seluruh pelayanan di Bapenda. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga sebagai input atau (*capital*) dalam proses pelayanan Bapenda untuk mencapai tujuan organisasi.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana dan PrasaranaBadan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Jenis /Nama Barang	Merk/Model	Volume	Kondisi
1	Kendis Roda Dua(BA 3305 U)	Yamaha N-Max 150	1	Baik
2	Kendis Roda Dua	Yamaha aerox		Baik
3	Kendis Roda Dua	Honda Vario 150 (BA 3228 U)		Baik
4	Kendis Roda	Honda Revo 2009(BA 3852 U)	1	Baik
5	Meja Biro Eselon III	Lokal	2	Baik
6	Meja 1/2 Biro Eselon IV	Lokal	2	Baik
7	Meja 1/2 Biro Eselon IV	Lokal	2	Baik
8	Meja 1/2 Biro Eselon IV	Lokal	2	Baik
9	Meja Resepsionis		2	Baik
10	Lemari arsip 4 Pintu	expo	2	Baik
11	Lemari arsip 4 Pintu	Lokal	2	Baik
12	Lemari Buku arsip	Lokal	2	Baik
13	Lemari Arsip Lainnya	Lokal	1	Baik
14	Lemari Arsip Dinamis	Lokal	2	Baik
15	Lemari Arsip Dinamis	Lokal	2	Baik
16	Lemari Arsip Dinamis	Lokal	2	Baik
17	Lemari Arsip 2 Pintu	Lokal	2	Baik
18	Filling Cabinet	-	1	Baik
19	Rak Asip Besi	-	1	Baik
20	Kursi kerja eselon IV	Fantoni	2	Baik
21	Kursi kerja eselon IV	Chairman	2	Baik
22	Kursi kerja eselon IV	Chairman	2	Baik
23	Kursi Pejabat Lainnya	Chairman	1	Baik
24	Kursi Pejabat Lainnya	Chairman	1	Baik
25	Kursi Pejabat Lainnya	Chairman	1	Baik
26	Kursi Pejabat Lainnya	Chairman	1	Baik
27	Kursi Pejabat Lainnya	Chairman	1	Baik
No	Jenis /Nama Barang	Merk/Model	Volume	Kondisi

No	Jenis /Nama Barang	Merk/Model	Volume	Kondisi
28	Kursi Kerja	Pabrikan/Futura	15	Baik
No	Jenis /Nama Barang	Merk/Model	Volume	Kondisi
29	Sofa Set	-	1	Baik
30	Komputer PC	Lenovo	2	Baik
31	Komputer PC	Lenovo	2	Baik
32	Komputer PC	Lenovo	2	Baik
33	Komputer PC	Dell all in one	1	Baik
34	Komputer PC	Dell all in one	1	Baik
35	Komputer PC	Lenovo	1	Baik
36	Komputer PC	Lenovo	1	Baik
37	Komputer PC	Lenovo	1	Baik
38	Komputer PC	ASUS	1	Baik
39	Komputer PC	HP	1	Baik
40	Laptop	Radeon Pro560x	1	Baik
41	Scaner	Canon	1	Baik
42	Printer Scaner	HP	1	Baik
43	Printer Biasa	Canon	6	Baik
44	Printer Biasa	Canon	1	Baik
45	Printer Biasa	HP	1	Baik
46	Printer Biasa	Canon	1	Baik
47	Alat Pencetak Label	Raz/T.800	1	Baik
48	Penggiling Kertas	Komic	1	Baik
49	AC Standing	AUX	1	Baik
50	AC Standing	Politron	1	Baik
51	AC	Panasonic	2	Baik
52	Dispenser Stand	Miyako	1	Baik
53	Komputer PC	HP		
54	Meja Kerja	Pabrikan/Futura		
No	Jenis /Nama Barang	Merk/Model	Volume	Kondisi
55	Kursi Kerja			
56	Komputer PC	ASUS		

No	Jenis /Nama Barang	Merk/Model	Volume	Kondisi
57	Komputer PC	ASUS		
58	Komputer PC	ASUS		
No	Jenis /Nama Barang	Merk/Model	Volume	Kondisi
59	Komputer PC	ASUS		
60	Komputer PC	ASUS		
61	Laptop	ASUS T1403CVA		
62	Laptop	ASUS T1403CVA		
63	Proyektor	EPSON HB56C		
64	Laptop	ASUS ASPIRE GO 14		
65	Laptop	ASUS SWIFT X 14		
66	Scanner	Epsone DS-530II	2	Baik
67	Kursi Rapat	ECOS	2	Baik
68	Kursi Rapat	ECOS	2	Baik
69	Kursi Rapat	ECOS	1	Baik
70	Kursi Rapat	ECOS	1	Baik
71	Kursi Rapat	ECOS	1	Baik
72	Kursi Rapat	ECOS	1	Baik
73	Kursi Rapat	ECOS	1	Baik
74	Kursi Rapat	ECOS	15	Baik
75	Kursi Rapat	ECOS	1	Baik
76	Kursi Rapat	ECOS	2	Baik
77	Kursi Rapat	ECOS	2	Baik
78	Kursi Rapat	ECOS	2	Baik
79	Kursi Rapat	ECOS	1	Baik

2.1.2.3 Sumber Daya Teknologi Informasi

Untuk mendukung pelaksanan tugas dan fungsi daalm mengelola pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah menggunakan dan membutuhkan sumber daya teknolgi informasi sebagai berikut:

a) SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia)
b) Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan
c) Sistem Informasi Pengawasan Pajak (SIPP)
d) Sisten Informasi Pendapatan Daerah (SIMPADA)

2.1.2.4 Sumber Daya Keuangan

Badan Pendapatan Daerah adalah lembaga pemerintah daerah yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:

a. Pajak Daerah
   (1) Pajak Hotel
   (2) Pajak Restoran
   (3) Pajak Hiburan
   (4) Pajak Reklame
   (5) Penerangan Jalan
   (6) Pajak Air Tanah
   (7) Pajak Sarang Burung Walet
   (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
   (9) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
   (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
   (11) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
   (12) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
   (13) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
b. Retribusi Daerah
   (1) Retribusi Jasa Umum
   (2) Retribusi Jasa Usaha
   (3) Retribusi Perizinan Tertentu

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020, komponen pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dibagi menurut beberapa jenis meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, dan darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya.

Pendapatan Asli Daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang signifikan yakni rata-rata sebesar 6,83%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang tumbuh sebesar 73,48% dibanding tahun 2021 sebesar (37,93%), namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan yakni sebesar (18,93%) dan pada tahun 2024 kembali naik menjadi 10,71%. Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2022 terjadi disebabkan adanya kerjasama dengan pihak instansi vertikal yang melakukan pengawasan terhadap penerimaan pajak dan retribusi bidang pariwisata serta adanya klaim BPJS tahun sebelumnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sedangkan penurunan pada tahun 2023 disebabkan karena belum optimalnya pengawasan secara menyeluruh terhadap penerimaan pajak dan retribusi dan faktor geografis Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai yang berbentuk Kepulauan sehingga menyebabkan tingginya biaya operasional. Pada komponen Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan tertinggi terdapat pada Pajak Daerah yakni sebesar 19,82% sedangkan Retribusi daerah selama tahun 2020-2024 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar (11,33%), seperti berikut ini:

Tabel 2.5
Ringkasan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2020-2024

No	Komponen PAD	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	R-APBD	
1	Pajak Daerah	3,531,794,196.00	3,860,497,217.00	6,530,785,956.81	8,514,261,917.00	9,112,561,267.24	9,750,886,640.00	19.82
2	Retribusi Daerah	5,976,710,358.00	3,033,172,955.00	19,464,965,166.80	13,344,054,501.00	15,367,248,573.00	22,307,054,501.00	(11.33)
Total		9,508,504,554.00	6,893,670,172.00	25,995,751,123.61	21,858,316,418.00	24,479,809,840.24	32,057,941,141.00	6.83

Berikut disajikan tabel 2.7 perbandingan antara target dengan realisasi PAD, tingkat capaian dan tingkat pertumbuhan anggaran serta pertumbuhan realisasi selama tahun 2020-2024.

Tabel 2.6
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2020-2024

Tahun	Target PAD (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	Tingkat Capaian PAD	Pertumbuhan Anggaran	Pertumbuhan Realisasi
2020	10,608,972,857.46	9,508,504,554.00	90%		
2021	16,638,359,643.00	6,893,670,172.00	41%	36.24%	(37.93)%
2022	18,437,598,606.00	25,995,751,123.61	141%	9.76%	73.48%
2023	32,370,707,734.00	21,858,316,418.00	68%	43.04%	(18.93)%
2024	37,300,073,948.00	24,479,809,840.24	66%	13.22%	10.71%
		Rata-Rata	85%	25.56%	6.83%
2025	32,370,941,141.00			(16.35)	

Tabel 2.7
Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2020-2024

Uraian	Kontribusi Terhadap PAD (%)					
	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata
Pajak Daerah	10.12	12.20	13.15	17.80	17.18	14.09
Retribusi Daerah	17.12	9.59	39.20	27.90	28.97	24.56

Retribusi daerah merupakan komponen yang berkontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2020-2024 yakni sebesar 24,56%. Hal ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber utama terhadap pendapatan asli daerah. Besarnya kontribusi PAD dari Retribusi daerah juga menunjukkan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada APBD tahun 2025, kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD ditargetkan dalam APBD sebesar 14,17% sedangkan Retribusi Daerah sebesar 44,45%.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan cerminan Kinerja Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2024 secara umum dapat dilihat pada table 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan PAD

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah	persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	5%	4.19%	83.82%	5%	3.81%	76.22%	5%	5.90%	118.02%	8%	5.19%	64.90%	8%	5.73%	71.66%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kepulauan Mentawai umumnya mencakup beberapa kategori, antara lain:

1. Wajib Pajak: Individu atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan pajak restoran.
2. Pelaku Usaha: Pengusaha dan pelaku usaha yang membutuhkan informasi dan layanan terkait perizinan, pajak, dan retribusi.
3. Masyarakat Umum: Masyarakat yang memerlukan informasi mengenai kewajiban perpajakan, layanan publik, dan program-program yang disediakan oleh Bapenda.
4. Instansi Pemerintah dan Lembaga: Instansi lain yang membutuhkan kerjasama dalam pengelolaan dan pelayanan pajak daerah.
5. Investor: Individu atau perusahaan yang berencana untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan membutuhkan informasi terkait peraturan dan pajak.

Kelompok sasaran ini bisa berbeda-beda tergantung pada program dan kebijakan yang diterapkan oleh Bapenda.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Beberapa faktor permasalahan tersebut dapat dibedakan menjadi faktor permasalahan internal (dari dalam) dan faktor permasalahan eksternal (dari luar). Adapun faktor permasalahan internal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain :

1. Belum sempurnanya data base pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Belum meratanya sistem pelaporan real time/yang terkoneksi dengan bapenda secara langsung;
3. Piutang yang kenaikannya semakin signifikan dibanding dengan penerimaan dari penagihan tunggakan;
4. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, dan PPNS). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca OPD. Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (appraisal) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah;

   Disamping faktor-faktor permasalahan internal tersebut, terdapat beberapa faktor permasalahan eksternal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.
2. Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah dengan dampaknya yang sangat berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat.

Adapun pemetaan permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan tugas dan fungsinya dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.9
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	MasalahPokok	Masalah	AkarMasalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih Rendahnya Pendapatan Daerah	Menajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah Belum Terpadu dan Optimal	Belum diterapkannya digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan.
			Masih rendahnya sosialisasi sumber-sumber pendapatan dearh bagi pelaku usaha, Wajib Pajak dan Masyarakat.
			Masih rendahnya kolaborasi antar sektor dan antar instansi dalam penegakan.
			Belum terdapatnya Lembaga pengelolaan pendapatan daerah.
			Belum tersedianya SDM pengelolssn pendapatan yang bersertifikat
			Belum optimalnya penerapan insentifdan disinsentif pajak.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Visi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 yaitu “Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera”.

1. Maju: Menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mampu berdiri tegak dan sejajar dengan daerah lain, akselerasi disegala sektor pembangunan, mengejar yang belum tercapai, memperbaiki yang ada dan meningkatkan apa yang sudah diraih. Begitu juga pembangunan untuk kemajuan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, infrastruktur yang handal,dan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Berdaya Saing: Upaya Pembangunan untuk kemajuan di setiap lini pembangunan seiring dengan memastikan kualitas dan mutu sehingga memiliki keunggulan yang dapat dijadikan penggerak pertumbuhan sosial, ekonomi dan budaya. Sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, memiliki kebudayaan yang unik dan bernilai tinggi, dan memiliki keunggulan komparatif (keunggulan yang relatif terhadap daerah lain) dan keunggulan kompetitif (keunggulan yang unik dan sulit ditiru) sehingga Kepulauan Mentawai diperhitungkan dalam kancah persaingan Domestik, Nasional dan Internasional.
3. Sejahtera: Kehidupan Mayarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dalam suasana aman, nyaman, terlindungi dan damai, serta adanya kesempatan yang sama bagi semua

untuk berkembang dan maju. Sejahteta ,mencakup pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memiliki kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan yang melibatkan semua orang tanpa diskriminasi, pembangunan manusia yang hakiki.

Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pemnbangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Ekonomi Daerah.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana
6. Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia.
7. Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Berkeadilan.
8. Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Tepercaya.

Berdasarkan urusan dan kewenangan Bapenda sebagai perangkat daerah tentunya harus berada pada posisi yang penting dalam mendukung dan berkontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepada daerah dalam fungsi penunjang bidang keuangan sub pengelolaan pajak dan retribusi Daerah, maka misi 8 (Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Terpercaya) merupakan misi kepala daerah yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bapenda.

Tabel 2.10
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih/Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	VISI Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: "Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera" Misi ke delapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: 'Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Terpercaya			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tuntutan pelayanan semakin tinggi ditengah	Laju penurunan jumlah	Pemenuhan kebutuhan belanja

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih/Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		perkembangan jumlah wajib pajak dan aparatur pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang kurang proporsional	aparatur dan penambahan jumlah wajib pajak	proporsional oleh stakeholders
2		Perkembangan jumlah sarana dan prasarana semakin meningkat dari tahun ke tahun	Besarnya jumlah asset perangkat daerah	Sistem dan metode pencatatan aset baku dan tertib
3		Penempatan dan distribusi kompetensi aparatur belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Piramida pangkat/ golongan ruang dan background kompetensi kurang ideal	Pelatihan/ pembekalan kompetensi teknis secara reguler
4		Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Rentang/ siklus antara perencanaan dan penganggaran bersifat mengikat	Pola komunikasi efektif antara perencana dengan pelaksana kegiatan
5	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemahaman, kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah yang masih rendah	Regulasi dari Pemerintah pusat yang mengalami perubahan dengan cepat	Dukungan regulasi daerah tentang pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah
6		Resiko pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan potensi besar, membutuhkan Sistem Pengawasan Internal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas Pelaksanaan tugas	Rasio antara aparatur pelaksana pembinaan dan pengendalian dengan jumlah keseluruhan pegawai belum memadai	Penetapan Metode dan SOP pengendalian
7		Sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penertiban Pajak Daerah diperlukan dukungan penuh dari seluruh stakeholder dan instansi terkait	Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan	Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan bupati
8		Bagian dari komponen Pendapatan Asli Daerah, dengan potensi cukup besar	Pemilihan metode pendataan dan database wajib	Jumlah potensi daerah cukup banyak dan

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih/Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		tapi belum dimanfaatkan secara optimal	pajak masih belum optimal	potensi untuk ekstensifikasi pendapatan masih terbuka lebar
9		Resiko pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan potensi besar, membutuhkan Sistem Pengawasan Internal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas Pelaksanaan tugas	Rasio antara aparatur pelaksana pembinaan dan pengendalian dengan jumlah keseluruhan pegawai belum memadai	Penetapan Metode dan SOP pengendalian

2.2.2 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan keberterimaan dan keberlanjutan prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk untuk melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan Pajak Daerah dan koordinator pendapatan daerah khususnya pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara umum perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah berada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai koordinator pendapatan, serta harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan target, serta melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun permasalahan akibatdari kondisi eksternal. Beberapa permasalahan tersebut kemudian diangkat sebagai isu strategis, yaitu permasalahan terkait dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diperinci isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

Tabel 2.11
Identifikasi Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenang-an PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi masih rendah	Peningkatan Kualitas Lingkungan untuk Meningkatkan Pendapatan	Pertumbuhan global mendekati nol atau lambat yang berlangsung selama beberapa tahun atau terjadi kontraksi global (resesi atau depresi).	Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta scarring effect akibat pandemiCOVID-19	Perkembangan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi kabupaten/kota sekitar dan terkhususnya di wilayah Provinsi Sumatera Barat.	Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
	-		Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Pendpaatan	Kenaikan harga barang dan jasa yang berkelanjutan. Termasuk potensi sebagian besar masyarakat tidak mampu mempertahankan gaya hidup saat ini dengan menurunnya daya beli masyarakat			
2		Potensi Pendapatan Asli Daerah Belum akurat					
3		Fasilitas Obyek Retribusi yang belum memadai					
4		Masih terdapat kebocoran Pendapatan Asli Daerah			Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi.		
5		Pelayanan Pembayaran pajak dan retribusi yang kurang baik		Infrastruktur dan layanan publik yang tidak ada, tidak memadai atau tidak merata, namun tidak terbatas pada: jaminan dan tunjangan social yang tidak terjangkau atau tidak memadai, perumahan, edukasi publik, perawatan anak dan lanjut usia, kesehatan, dan sistem sanitasi dan transportasi	Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat.	Masih kurangnya kualitas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan didaerah	
6		Sumber Daya Manusia (SDM) Perpajakan dan Retribusi yang kurang memenuhi kompetensi					

Tabel 2.12
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (di luar kewenangan OPD)	
Aspek Regulasi	Kewenangan perubahan peraturan perpajakan terletak di pemerintah pusat Peraturan perpajakan daerah yang terbatas/ tertutup (closed list) dan pengalihan kewenangan atas evaluasi dan persetujuan regulasi kab/kota ke pemerintah pusat berpengaruh pada optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah	Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah hanya bisa dilakukan melalui intensifikasi penerimaan Pajak Daerah	Perubahan / penetapan regulasi Pajak Daerah adalah kewenangan Pemerintah Pusat Regulasi perpajakan kab/kota harus mendapatkan evaluasi dan persetujuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	Tingkat ketergantungan PAD dari sektor pajak daerah semakin tinggi.
Aspek Pendapatan	Tantangan Penentuan target PAD semakin tinggi tidak diimbangi pengelolaan potensi secara terukur	Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penetapan target PAD lebih cenderung konservatif untuk memastikan penerimaan PAD	Kebijakan Penundaan penyaluran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat	Gap antara target dan realisasi PAD semakin lebar
Aspek Sarana dan Prasarana Pelayanan	Belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan		Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui pengembangan inovasi berbasis Teknologi Informasi	Tuntutan kualitas pelayanan, Perkembangan pendapatan Masyarakat dan jumlah penduduk	Jangkauan pelayanan kurang optimal dibandingkan dengan luas Wilayah operasional
Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM)	Distribusi ASN sesuai tugas dan fungsi masih belum optimal		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Rekrutmen SDM dengan kompetensi Mendukung dengan Tugas dan Fungsi OPD	Penempatan SDM ASN masih belum sesuai dengan bidang kompetensi

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Bapenda selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam RPJMD Tahun 2025-2029, maka dukungan utama yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk berperan menunjang Misi ke-8 dengan Tujuan: "Terwujudnya Birokrasi Kelas Dunia" yang direalisasikan melalui penentuan Sasaran dalam perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu: "Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah". Dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menetapkan rancangan Program untuk mendukung Program Pembangunan Daerah bagian dari Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam rangka mencapai Visi dan Misinya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan misi yang diemban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah *"Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah"* diukur dengan indikator persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029

Visi : Kepulaun Mentawai Maju Berdaya Saing dan sejahtera			
MISI	TUJUAN	SASARAN	
Misi: Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif dan Terpercaya	Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah	1.	Meningkatnya Pendapatan Daerah
		2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima, Adafif, Inovatif dan Melayani

3.2 Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Bapenda atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Dalam upaya pencapaian tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai maka dirumuskan sasaran yaitu "Meningkatnya Pendapatan Daerah" diukur dengan indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan srategis perangkat daerah antara lain sebagai berikut:

a. diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan;
b. untuk mewujudkan misi pembangunan daerah yang dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
c. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
d. dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
e. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Berangkat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, memperhatikan permasalahan yang terpetakan dan isu-isu strategis yang dirumuskan, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Adapun tabel terkait tujuan, dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2025-2029

NO	NSPK/ SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkat-nya Pendapatan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,59	10,2	14,53	16,27	17,46	18,31	
			Meningkat-nya Pendapata Daerah	Persentase peningkatan PAD	7,5	8,7	9,9	10,5	11,5	12	
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,16	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	
2	Meningkat-nya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani		Meningkat nya kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip	75	77	78	80.10	80.15	80.20	
				Jumlah Inovasi yang diterapkan	2	2	2	2	2	2	
				Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini

membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program perangkat daerah. Sebagai contoh, jika visi perangkat daerah adalah meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut. Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan potensi pajak/retribusi, pembangunan infrastruktur/ sarana/prasarana yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi perangkat daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi. Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja perangkat daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas perangkat daerah serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan Masyarakat.

Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai termasuk juga di dalamnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi perangkat daerah diharapkan

mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Mentawai secara efektif dan berkelanjutan. Strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan tujuan dan sasaran disajikan secara detail dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Meningkatkan kontribusi aset daerah sebagai sumber PAD	1) Inventarisasi dan revaluasi seluruh aset daerah (tanah, bangunan, pelabuhan, shelter wisata, pasar, kawasan pelabuhan Tuapejat dan Sipora). 2) Penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati tentang penyewaan dan pemanfaatan aset daerah secara produktif. 3) Penerapan skema KSP (Kerjasama Pemanfaatan), BOT (Build-Operate Transfer), dan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) terhadap aset strategis. 4) Penugasan BUMD untuk mengelola aset potensial sebagai portofolio investasi daerah. 5) Target peningkatan pendapatan dari sewa dan kerjasama aset sebesar Rp10 miliar per tahun mulai tahun 2026.
		Melakukan secara penuh digitalisasi penerimaan PAD dan *SuperApp* Kepulauan Mentawai	1) Pengembangkan aplikasi SuperApp PAD Mentawai yang memuat seluruh ekosistem perpajakan dan retribusi daerah, termasuk e-faktur, simulasi pajak, notifikasi jatuh tempo, reward kepatuhan, dan laporandigital. 2) Menerapkan pembayaran melalui QRIS untuk seluruh retribusi: pasar, parkir, pelabuhan, wisata pantai, dan kegiatan pariwisata. 3) Menyediakan kanal pembayaran PAD di warung digital, mini market, koperasi nelayan dan petani, serta *e-wallet* nasional.
		Optimalisasi Aset Daerah Berbasis Wisata dan Kelautan	1) Membangun sistem e inventory aset untuk pemantauan aset tidak produktif. 2) Aset seperti pelabuhan lama, gedungkosong, dan pasar nelayan dikembangkan menjadi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			pusat ekonomi kreatif berbasis maritim dan pariwisata. 3) Pengembanganlisensi ikon pariwisata Mentawai (pantai, surf spot, budaya lokal) untuk dipasarkan secara digital, termasuk NFT.
		Revitalisasi dan Digitalisasi Pasar Wisata dan Ekonomi Kreatif	1) Menjadikan pasar tradisional di Tuapejat, Siberut, dan Sikakap sebagai pasar digital wisata berbasis QRIS. 4) Membangun zona UMKM digital di sekitar *surf spot* dan pelabuhan, dengan fasilitas pembayaran digital dan pelaporan omzet otomatis.
		Membangun/ mengembangkan BUMD Maritim dan Pariwisata sebagai Penyumbang Dividen PAD	1) Penguatan BUMD disektor transportasi laut, perikanan,air minum,dan pariwisata (seperti *live-on board* dan wisata selancar). 2) BUMD didorong untuk menyetor dividen rutin ke APBD dengan KPI berbasis hasil dan pelayanan.
		Pengembangan program Zero Aste Mentawai dan Retribusi Pengelolaan Sampah Digital	1) Pengembangan bank sampah digital dan industri kompos laut (dari limbah organik kelautan) 2) Penarikan retribusi sampah dari pelaku usaha wisata, restoran, penginapan, dan kapal wisata melalui sistem digital.
		Pengelolaan Sumber Air dan Deviden BUMD Air Minum secara profesional dan dan transparan, melalui pengelolaan sumber air bersih pulau-pulaudengan siste *smart matering* terutama untuk pemenuhan kebutuhan Masyarakat, UMKM, dan wisata, dan berdampak pada kontribusi PAD melalui bumd Air	1) Penguatan BUMD disektor jasa air minum. 2) Penguatan tata Kelola dan kualitas air minum.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Melakukan penyelenggaraan *Event* Berbayar dan Retribusi Pariwisata Digital	1) Setiap festival budaya laut dan *surfing* dikenai retribusi peserta, tiket digital, dan lisensi penyelenggara. 2) Penjualan konten festival dalam bentuk NFT dan penayangan *live* berbayar untuk promosi global.
		Kredit Karbon dan Perlindungan Hutan Pantai	1) Pemetaan hutan mangrove dan hutan lindung untuk masuk ke system perdagangan karbon nasional. 2) PAD diperoleh dari *fee* perdagangan karbon, kerja sama dengan perusahaan *offset* dan *CSR*.
		Smart Target PAD per OPD dan *Dashboard* Kinerja Fiskal	1) Setiapdinasyangmemiliki aset atau potensi seperti Dinas Pariwisata, Perikanan, Koperasi, dan Lingkungan Hidup diberi target PADsebagai bagian dari kinerja Perangkat Daerah. 2) Pendapatan dijadikan indikator kinerja utama (IKU) seluruh perangkat daerah. 3) APBD akan disusun berdasarkan pendekatan revenue-based budgeting, bukan hanya berbasis serapananggaran. 4) Belanja daerah diarahkan untukmendorongaktivitas ekonomi yang berdampak terhadap pertumbuhan PAD. 5) Indikator dan pencapaian diukur melalui dashboard fiskal berbasis data yang realtime.
		Agrowisata dan Pertanian Pulau sebagai sumber PAD	1) Lahan produktif dikembangkan menjadi kawasan agro wisata edukatif (tanaman khas pulau,herbatropis). 2) PAD diperoleh dari tiket masuk, lisensi merek pertanian, dan hasil produkagro-industri.
		Lisensi Budaya Lokal dan Ekonomi Royalti Digital	1) Pembuatan sistem lisensi budayauntukmotifukiran Mentawai, lagutradisional, danupacaraadat. 2) Penjualan lisensi danNFT digunakan untuk mendukung seniman lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			sekaligus menghasilkan PAD.
		Sinergi Wilayah Pesisir dan Plaform Pajak Bersama	1) Kolaborasi fiskal dan logistik antar pulau dan dengan kabupaten tetangga seperti Pesisir Selatan. 2) Pemanfaatan sistempajak digital bersama untuk pelaku usaha lintas wilayah.

Strategi pencapaian Misi 8 yang diampuh oleh Badan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2029 dirumuskan sebagai berikut :

Pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal merupakan langkah strategis untuk menciptakan perekonomian yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Salah satu sasaran utama dalam mencapai tujuan ini adalah pembangunan industri dan ekonomi kreatif, yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Dalam hal ini, industri – manufaktur yang berkelanjutan akan di dorong untuk berkembang, sementara sektor industri kreatif juga dipromosikan sebagai sumber utama pendapatan ekonomi daerah. Penggunaan teknologi inovatif dan ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanian, energi, dan industri lainnya menjadi strategi penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sekaligus mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketahanan fiskal daerah. Strategi seperti meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi pemanfaatan asset daerah, diversifikasi sumber pendapatan daerah, serta meningkatkan transparansi dan pengawasan pendapatan asli daerah yang lebih berkualitas akan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara lebih efektif dan menjadi strategi penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan yang mendukung ekonomi daerah.

Setiap strategi yang dirancang untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan potensi lokal, sektor industri, pariwisata, jasa keuangan, serta koperasi, Kabupaten kepulauan mentawai dapat mencapai perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi, stabil, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan untuk generasi mendatang. Penahapan pembangunan daerah dilaksanakan agar fokus pembangunan mengarah pada prioritas pembangunan setiap tahunnya. Prioritas Pembangunan Daerah merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah capaian antara menuju tujuan sasaran 5 (lima) tahunan dalam RENSTRA melalui Program pembangunan daerah tahunan.

Tabel. 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Membangun fondasi data	Memperkuat pengumpulan	Menggali sumber	Transformasi sistem dan	Memastikan keberlanjutan

dan strategi PAD	dari sumber PAD yang sudah ada	pendapatan baru	akuntabilitas	dan kemandirian keuangan daerah

Penahapan Pembangunan 2025-2030 tersebut bukan hanya sekedar urutan waktu melainkan kerangka kerja yang merefleksikan fokus kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara progresif, tahapan tersebut dirancang melalui 5 (lima) fase strategis dimulai dari penguatan fondasi, percepatan, pemantapan, pemerataan hingga memastikan pencapaian target dan persiapan merancang perencanaan pembangunan periode berikutnya dan ini menjadi langkah dan keinginan yang kuat antara pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk pencapaian pembangunan yang lebih baik lagi.

3.4 Arah Kebijakan Renstra

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema Rencana Kerja. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun dimasing- masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar Renstra mudah dituangkan dalam Rencana Kerja. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Program dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 – 2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, guna mencapai sasaran tertentu. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana.

Indikator kinerja Bapenda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bapenda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bapenda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD pada misi 8 yaitu Penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inivatif dan terpercaya. Indikator dan teknik rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada table 4.1.

Tabel 4.1
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah				Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah		
		Meningkatnya Pendapatan Daerah			Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		
					Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB		
			MENINGKATNYA UPAYA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan		
				Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
				Jumlah Dokumen hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
				Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
				Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		Penetapan Wajib Pajak Daerah	
				Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
				Jumlah data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penilaian dan Verifikasi		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		Penagihan Pajak Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyeleseian Keberatan Pajak Daerah		Penyeleseian Keberatan Pajak Daerah	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
				Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani							
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat			Nilai LAKIP		
					Jumlah Inovasi yang diterapkan		

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Daerah			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah		Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terkoordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kegiatan Perencanaan Penganggraan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah paket Peralatan & Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan		Penyediaan Bahan Logistik	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				undangan yang disediakan			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang disediakan		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara		Pemelihaaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Guna memastikan pencapaian sasaran strategis maupun progam, kegiatan, dan subkegiatan didalamnya, maka disampaikan pula rencana pendanaannya serta program prioritas sebagai indikasi pendanaan Bapenda sebagaimana terlampir pada Tabel 4.2 dan tabel 4.3. Rencana ini bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan													
BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUB-KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE 2024*	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH													
KEUANGAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah	23,393,030,161.00		2,121,887,329.00		2,106,272,042.50		2,316,899,246.75		2,548,589,171.43		2,803,448,088.57	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terkordinasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,-	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan	20,587,666,597.00		1,328,397,357.00		1,349,000,000.00		1,484,900,000.00		1,634,390,000.00		1,798,829,000.00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20,394,226,597.00	43 Org/Bln	1,319,636,557	43 Org/Bln	1,350,000,000	43 Org/Bln	1,485,000,000	43 Org/Bln	1,633,500,000.00	43 Org/Bln	1,796,850,000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	193,440,000.00	1 Dokumen	8,760,800	1 Dokumen	9,000,000	1 Dokumen	9,900,000	1 Dokumen	10,890,000	1 Dokumen	11,979,000	

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan													
BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUB-KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE 2024*	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah	35,935,000.00		37,000,000.00		40,700,000.00		44,770,000.00		49,247,000.00		54,171,700.00	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	35,935,000.00	1 Dokumen	37,000,000	1 Dokumen	40,700,000	1 Dokumen	44,770,000	1 Dokumen	49,247,000	1 Dokumen	54,171,700	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	1,044,513,469.00		341,105,475.00		367,606,142.50		404,366,756.75		444,803,432.43		489,283,775.67	
Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	45,547,000.00	5 Paket	9,973,000	5 Paket	10,173,000	5 Paket	11,190,300	5 Paket	12,309,330	5 Paket	13,540,263	
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan & Perlengkapan Kantor	80,373,250.00	3 Paket	88,410,575	3 Paket	97,251,633	3 Paket	106,976,796	3 Paket	117,674,475	3 Paket	129,441,923	
Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	199,489,500.00	11 Paket	9,997,800	11 Paket	10,000,000	11 Paket	11,000,000	11 Paket	12,100,000	11 Paket	13,310,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	146,431,000.00	10 Paket	161,074,100	10 Paket	177,181,510	10 Paket	194,899,661	10 Paket	214,389,627	10 Paket	235,828,590	

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan													
BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUB-KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE 2024*	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	15,800,000.00	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	11,000,000	1 Dokumen	12,100,000	1 Dokumen	13,310,000	1 Dokumen	14,641,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	556,872,719.00	12 Laporan	61,650,000	12 Laporan	62,000,000	12 Laporan	68,200,000	12 Laporan	75,020,000	12 Laporan	82,522,000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah	724,406,850.00		249,990,497.00		160,000,000.00		176,000,000.00		193,600,000.00		212,960,000.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang disediakan	724,406,850.00	4 Unit	249,990,497	4 Unit	160,000,000	4 Unit	176,000,000	4 Unit	193,600,000	4 Unit	212,960,000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	696,191,266.00		24,925,000.00		25,000,000.00		27,500,000.00		30,250,000.00		33,275,000.00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	696,191,266.00	12	24,925,000	12	25,000,000	12	27,500,000	12	30,250,000	12	33,275,000	

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan													
BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUB-KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE 2024*	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Layanan Pemeliharaan Barang Milik daerah	304,316,979.00		140,469,000.00		153,965,900.00		169,362,490.00		186,298,739.00		204,928,612.90	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya	-	1 Unit	15,000,000	1 Unit	16,000,000	1 Unit	17,600,000	1 Unit	19,360,000	1 Unit	21,296,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	192,526,979.00	10 Unit	2,500,000	10 Unit	2,700,000	10 Unit	2,970,000	10 Unit	3,267,000	10 Unit	3,593,700	
Pemelihaaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	111,790,000.00	1 Paket	122,969,000	1 Paket	135,265,900	1 Paket	148,792,490	1 Paket	163,671,739	1 Paket	180,038,913	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Pendapatan Daerah	1,173,255,364.00		1,705,167,718.00		1,748,000,000.00		1,922,800,000.00		2,115,080,000.00		2,326,588,000.00	

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan													
BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUB-KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE 2024*	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	1,173,255,364.00		1,705,167,718.00		1,748,000,000.00		1,922,800,000.00		2,115,080,000.00		2,326,588,000.00	
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan												
	Persentase penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital												
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-	1 Dokumen	50.165.800	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	87.000.000	1 Dokumen	100.000.000	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.500.000	1 Dokumen	100.550.000	1 Dokumen	106.305.000	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	37,955,000.00	1 Laporan	100,000,830	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,400,000	1 Laporan	110,000,000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	253,380,000.00	1 Unit	166,070,700	1 Unit	170,000,000	1 Unit	187,000,000	1 Unit	205,700,000	1 Unit	226,270,000	

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan													
BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUB-KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE 2024*	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	1 Dokumen	37,999,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	54,000,000	1 Dokumen	69,000,00	1 Dokumen	76,340,000	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	117,112,700.00	1 Objek Pajak	400,066,128	1 Objek Pajak	400,000,000	1 Objek Pajak	400,000,000	1 Objek Pajak	500,400,000	1 Objek Pajak	518,740,000	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	94,000,000	1 Dokumen	53,000,000		100,000,000	
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	-	1 Layanan	99,000,000	1 Layanan	110,000,000	1 Layanan	120,000,000	1 Layanan	130,000,000	1 Layanan	140,000,000	

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan													
BIDANG URUSAN /PROGRAM /OUTCOME /KEGIATAN /SUB-KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTCOME/ OUTPUT	*BASELINE 2024*	2026		2027		2028		2029		2030		KET.
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penilaian dan Verifikasi	-	1 Dokumen	51,369,200	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	1 Dokumen	73,205,000	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-	1 Dokumen	100,996,210	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	219,000,000	1 Dokumen	124,100,000	1 Dokumen	139,540,000	
Penyeleseian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyeleseian Keberatan Pajak Daerah	-	2 Dokumen	49,907,600	2 Dokumen	53,000,000	2 Dokumen	58,300,000	2 Dokumen	64,130,000	2 Dokumen	70,543,000	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	204,214,964.00	1 Dokumen	199,998,750	1 Dokumen	210,000,000	1 Dokumen	231,000,000	1 Dokumen	254,100,000	1 Dokumen	279,510,000	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	560,592,700.00	1 Laporan	164593500	1 Laporan	155,000,000	1 Laporan	160,000,000	1 Laporan	185,150,000	1 Laporan	200,165,000	
Eleltronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	70,000,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	86,000,000	

Tabel 4.3
DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			Penagihan Pajak Daerah	
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			Eleltronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

4.2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Kinerja Penyelenggaran bidang urusan sebagai ukuran capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan karena menjadi indikator keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah, yang digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan rencana dimasa depan. Penilaian tersebut sebagai akuntabilitas kinerja dan informasi tentang pencapaian kinerja penyelenggaran bidang urusan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indicator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah kepada masyarakat. Indikator Kinerja Bapenda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkkan kinerja yang akan dicapai Bapenda dalam waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Ini dapat dilihat pada table 4.4 dan table 4.5

Tabel 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	7,59	10,2	14,53	16,27	17,46	18,31	
2	Persentase peningkatan PAD	Persen	7,5	8,7	9,9	10,5	11,5	12	
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,16	0,17	0,19	0,21	0,23	0,25	
4	Nilai LAKIP	Nilai	75	77	78	80.10	80.15	80.20	
5	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Inovasi	2	2	2	2	2	2	
6	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	7,59	10,2	14,53	16,27	17,46	18,31	
2	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persen	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025- 2029 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pola penjabaran RENSTRA ini mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan sasaran, strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian proses bisnis.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam 5 tahun ke depan, dimana diperlukan konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya Badan Pendapatan Daerah untuk merealisasikan RPJMD Tahun 2025-2029 secara lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing–masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 - 2029.

Melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), *stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan

harapan Kepala OPD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Renstra yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



KINTO WARDANA

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 4
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 9
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 9
2.1 Gambaran Pelayaan BKPSDM 9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis BKPSDM 16

BAB III TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 19
3.1 Tujuan Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029 19
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 19
3.3 Strategi Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029 20
3.4 Arah Kebijakan Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029 22

BAB IV PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARANAAN BIDANG URUSAN 24
4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan 24
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 32

BAB V PENUTUP 34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan 14
Tabel 2.2 Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan 14
Tabel 2.3 Capaian Kinerja 15
Tabel 2.4 Isu Strategis 18
Tabel 3.1 Tujuan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 19
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis 20
Tabel 3.3 Strategi 21
Tabel 3.4 Penahapan Renstra.....21
Tabel 3.5 Arah Kebijakan 22
Tabel 4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan.....25
Tabel 4.2 Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan 28
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas 31
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama.....32
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram alur Tahapan Penyusunan Renstra 3
Gambar 1.2 Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan..... 3
Gambar 2.1Struktur Organisasi BKPSDM 13

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui pilihan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasikan sumber daya secara efektif dalam jangka waktu tertentu. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan berupa peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan daya saing daerah, pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

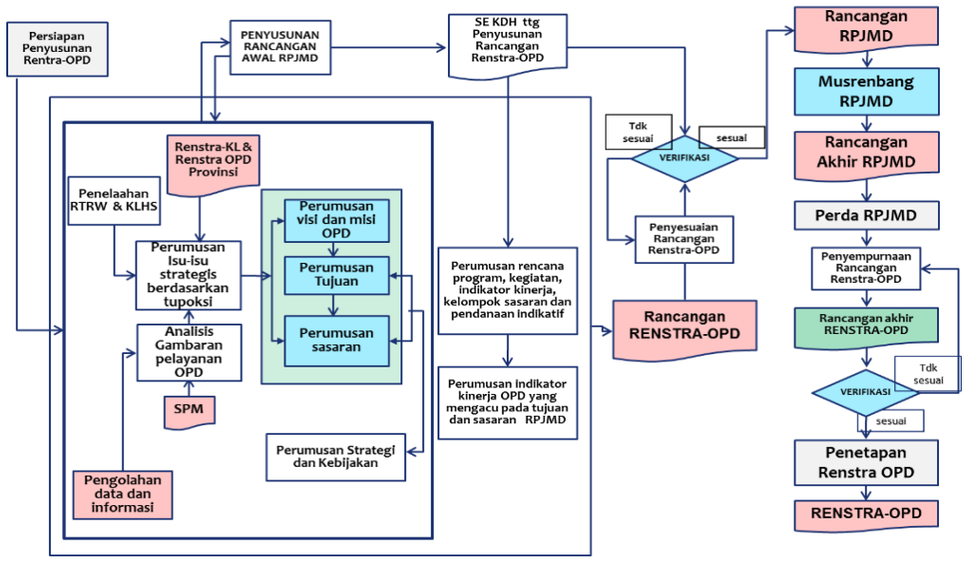
Dalam konteks pembangunan aparatur, keberadaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki peran strategis dalam mengelola manajemen kepegawaian dan mengembangkan kapasitas ASN agar profesional, berintegritas, dan mampu mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan manajemen ASN, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan berorientasi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni periode 2025–2029. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, kegiatan, serta evaluasi kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola kepegawaian yang akuntabel dan pengembangan kompetensi ASN yang berdaya saing.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMD Tahun 2025–2029 dan RPJMN Tahun 2025–2029.
Tahapan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiadiawali dengan:

1. Persiapan Penyusunan Renstra, antara lain :
   a. Pembentukan SK Tim penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.
   b. Orintasi mengenal RENSTRA.
   c. Penyusunan Agenda Tim Penyusunan RENSTRA.
   d. Penyiapan Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah antara lain:
   a. Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
   b. Perumusan masalah dan isu strategis
   c. Perumusan tujuan dan sasaran.
   d. Perumusan strategi dan arah kebijakan.
   e. Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inovasi Daerah
3. Rancangan RENSTRA antara lain:
   a. Penyususnan Rancangan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaTahun 2025-2029 merupakan proses penyempunaan Ranwal Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaTahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

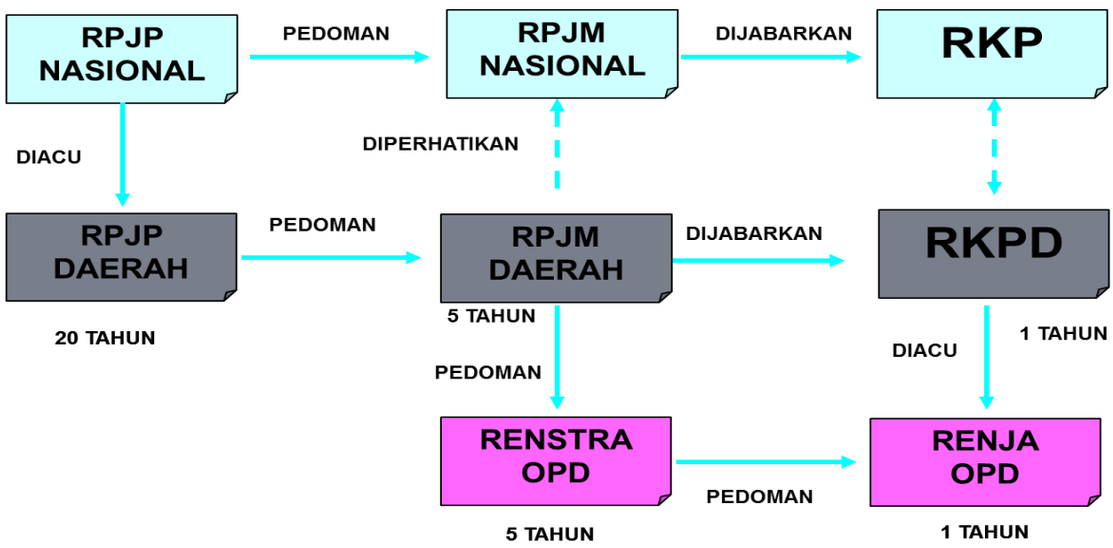
b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat daerah/ lintas perangkat daerah.
c. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan Fungsi Perangkat Daerah seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPRD, Tokoh Masyarakat, Akademisi, Asosiasi Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perwakilan /Kelompok Perempuan, Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak dan Pemangku Kepentingan terkait.
d. Hasil Kesepakatan Forum perangkat daerah dituangkan dalam Berita Acara.
e. Rancangan Renstra perangkat daerah disempurnakan berdasarkan berita acara.

4. Rancangan Akhir RENSTRA antara lain:
   a. Perumusan rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaTahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaTahun 2025-2029 menjadi Rancangan Akhir Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029
   b. Perumusan Rancangan Akhir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiadilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/subkegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiaberdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tantang RPJMD.
5. Penetapan RENSTRA antara lain:
   a. Rancangan Akhir Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaTahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala perangakat daerah kepada kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiauntuk dilakukan proses penetapan Restra Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inovasi Daerah.
   b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiamenyampaikan Rancangan Akhir Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaTahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
   c. Penetapan Perkada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.



Gambar 1. 1
Diagram alir Tahapan Penyusunan Renstra
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiatentunya memperhatikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah, propinsi maupun pusat. Penyelarasan tersebut terkait dengan pelaksanaan tupoksi pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar lebih efektif dan efisien. Hubungan dan keterkaitan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiadengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat melalui Gambar 1.2.



Gambar 1. 2
Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berpedoman pada RPJMD dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiadalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Diubah dengan PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4).
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025–2029 adalah sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama periode lima tahun.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

1. Menjadi penjabaran operasional visi dan misi kepala daerah dalam bidang kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur.
2. Menjamin keterkaitan, konsistensi, dan kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kinerja manajemen ASN.
3. Mengoptimalkan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam manajemen ASN berbasis merit system guna mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, berintegritas, dan berdaya saing.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setiap tahunnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Kab/Kota.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1.4 Sistematik Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB III TUJUAN , SASARAN, SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini diuraikan tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan, penyelenggaraan bidang urusan yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

3.1. Tujuan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029

Menjelaskan Rumusan Tujuan yang di Dasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perangkat Daerah yang telah di tetapkan. serta rumusan narasi yang menunjukkan tugas dan fungsi perangkat Daerah yang memenuhi Prinsip SMART-C (*specific, measurabble, attainable, realistic, time-bounded, dan continously-improved).*

3.2. Sasaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029

Menjelaskan Narasi Sasaran yang dapat dirumuskan dari Tujuan Renstra OPD yang ingin dicapai dalam jangka 5 tahun ke depan.

3.3. Strategi Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029

Menjelaskan Langkah- Langkah yang konprehensif melalui optimalisasi sumber daya, fokus lokasi, pentahapan dan program prioritas yang direncanakan untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran.

3.4 Arah Kebijakan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029

Menjelaskan Arah Kebijakan sebagai rangkaian Kerja Prioritas yang dilakukan sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Arah Kebijakan RPJMD serta Selaras dengan Strategi yang di susun untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini diuraikan program kegiatan sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang akan dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantarannya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.1 Gambaran Pelayaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, mutasi, promosi, kenaikan pangkat, dan pemberhentian ASN;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kinerja, disiplin, penghargaan, dan perlindungan ASN;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, dan bentuk pengembangan lainnya;
5. Pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah (SIMPEG);
6. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan manajemen ASN di lingkungan pemerintah daerah;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, antara lain:

1. Kepala Badan
   A. Tugas : Membantu Bupati sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
   B. Fungsi:
   1) Perumusan kebijakan Daerah urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
   2) Pelaksanaan kebijakan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
   3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
   4) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan;
   5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
   A. Tugas : Penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan admninistrasi pada seluruh bagian dilingkungan Badan.
   B. Fungsi:
   1) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Badan;

2) Pemberian dukungan administrasi yang meliputikepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Badan;
3) Penataan organisasi dan tata laksana lingkup Badan;
4) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan lingkup Badan;
5) Pengelolaan barang milik Daerah lingkup Badan; dan
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunya tugas :
   i. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian di Lingkungan Badan;
   ii. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di Lingkungan Badan;
   iii. Melaksanakan penyiapaan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat di Lingkungan Badan;
   iv. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi di Lingkungan Badan;
   v. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana diLingkungan badan;
   vi. Melaksanakan penyiapan bahan pelasanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Badan;
   vii. Melaksankan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :
   i. Melaksankan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di Lingkungan Badan;
   ii. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di Lingkungan Badan;
   iii. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporaan di Lingkunga Badan;
   iv. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di Lingkungan Badan;
   v. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan Badan;
   vi. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Kepegawaian

A. Tugas: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang formasi, mutasi dan pemberhentian.

B. fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang data dan formasi, di bidang kepangkatan dan pemberhentian, dan di bidang mutasi jabatan;
2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang data dan formasi, di bidang kepangkatan dan pemberhentian, dan di bidang mutasi jabatan;
3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang data dan formasi, di bidang kepangkatan dan pemberhentian, dan di bidang mutasi jabatan;
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kepegawaian membawahi beberapa kelompok jabatan antara lain:
a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Formasi;

Tugas:

i. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang data dan formasi pegawai;
ii. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang data dan formasi pegawai;
iii. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang data dan formasi pegawai; dan
iv. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepangkatan dan Pemberhentian;

Tugas :

i. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepangkatan dan pemberhentian pegawai;
ii. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kepangkatan dan pemberhentian pegawai;
iii. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang kepangkatan dan pemberhentian pegawai; dan
iv. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya

c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Mutasi Jabatan.

Tugas :

i. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang mutasi jabatan pegawai;
ii. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang mutasijabatan pegawai;
iii. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi pelaporan kebijakan di bidang mutasi jabatan pegawai; dan
iv. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

A. Tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksana kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia.

B. Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan aparatur dan KORPRI, di bidang pengembangan dan kesejahteraan, dan di bidang pendidikan dan pelatihan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan aparatur dan KORPRI, di bidang pengembangan dan kesejahteraan dan di bidang pendidikan dan palatihan;
3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan aparatur dan KORPRI, di bidang pengembangan dan kesejahteraan, di bidang pendidikan dan pelatihan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahi beberapa jabatan antara lain:

a) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Aparatur dan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);

Tugas :

i. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan aparatur dan KORPRI;
ii. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan aparatur dan KORPRI;

iii. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pembinaan aparatur dan KORPRI; dan
iv. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

b) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Kesejahteraan

Tugas :

i. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan kesejahteraan;
ii. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan dan kesejahteraan;
iii. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengembangan dan kesejahteraan; dan
iv. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

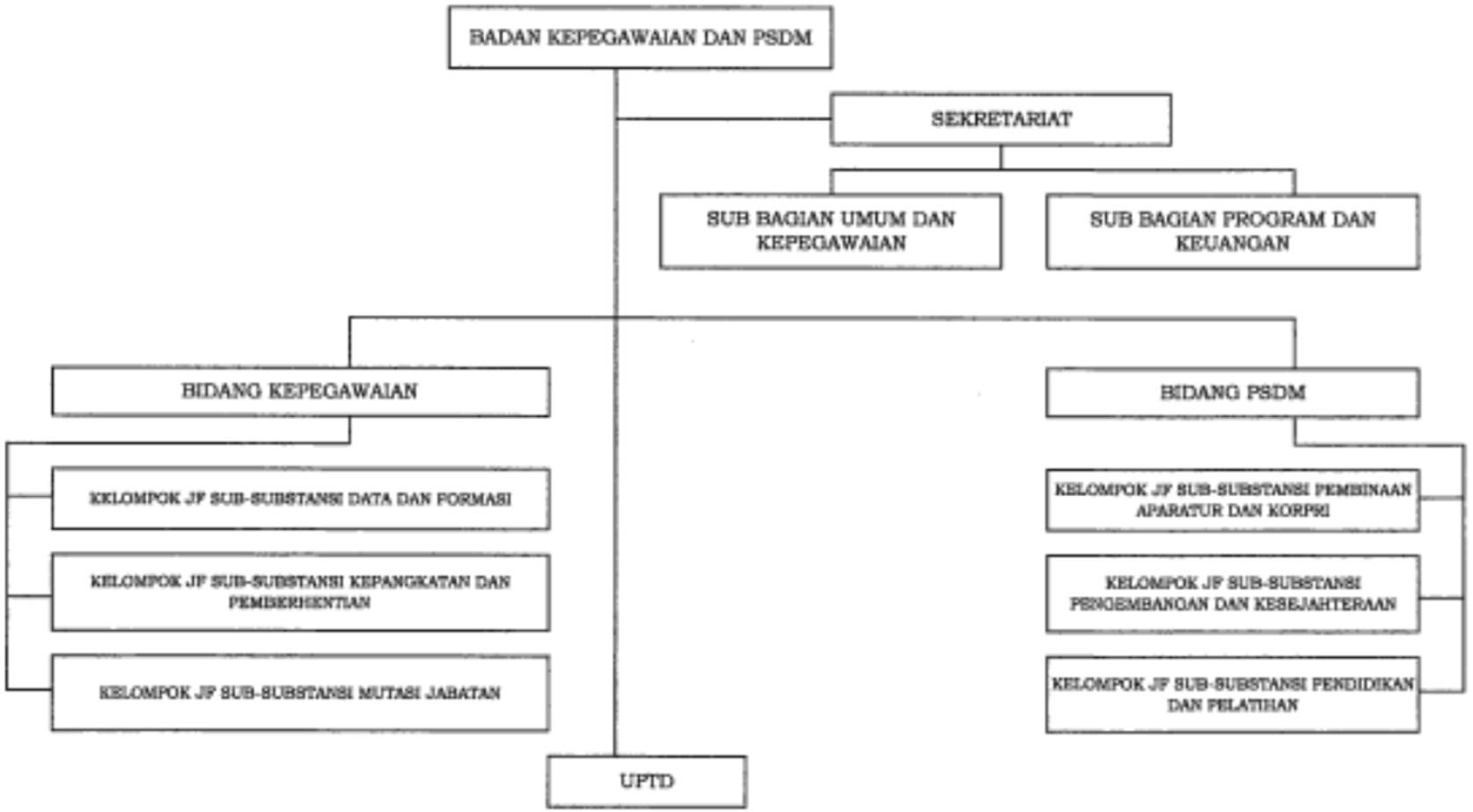
c) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendidikan dan Pelatihan.

Tugas :

i. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan;
ii. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan pelatihan;
iii. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluas pelaporan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan; dan
iv. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Kedudukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam lampiran.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



2.1.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Upaya mewujudkan target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kurun waktu 5 tahun yang akan datang tentu didukung oleh sumber daya aparatur yang dapat bersinergi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Sumber daya manusia menjadi salah satu input yang paling berpengaruh dalam mengelola organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Sumber daya aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berjumlah 51 orang, terdiri dari laki-laki 30 orang, dan perempuan 21 orang. Berdasarkan status kepegawaiannya, jumlah aparatur PNS berjumlah 36 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) berjumlah 4 orang, dan pegawai kontrak sebanyak 11 orang.

Tabel 2.1
Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Staf	PPPK	PK	Jumlah
1	Kepala	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	1	-	5	2	13	22
3	Bidang Kepegawai	-	-	-	6	6	1	0	13
4	Bidang PSDM	-	1	-	5	8	1	0	15
Jumlah		1	2	1	11	19	4	11	51

Sumber: Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kondisi Oktober 2025

Jumlah Pegawai BKPSDM berdasarkan jenjang pedidikan, seperti pada tabel dibawah ini

Tabel 2.2
Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Uraian	S2	S1	D3	SLTA/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	Jumlah
1	Kepala	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	4	2	14	1	21
3	Bidang Kepegawai	4	8	1	1	-	14
4	Bidang PSDM	5	7	-	3	-	15
Jumlah (orang)		10	19	3	18	1	51

Sumber data : Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kondisi Oktober 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, tingkat pendidikan karyawan BKPSDM yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 19 orang. Tingkat pendidikan yang tinggi tentunya akan berbanding lurus dengan capaian kinerja yang positif dan selanjutnya akan mempermudah dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu, jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan S-2 sebanyak 10 orang menunjukkan bahwa BKPSDM juga didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik lanjutan. Pegawai dengan pendidikan D-3 berjumlah 3 orang, sedangkan pegawai dengan pendidikan SLTA/sederajat sebanyak 18 orang dan SLTP/sederajat sebanyak 1 orang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Evaluasi capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai tugas pokok dan fungsi dalam kurun 2020-2024.

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Rata-rata Capaian (%)
1	Persentase usulan kenaikan pangkat ASN yang diproses tepat waktu	%	95	93	95	94	96	95	96	94	97	95	95,2
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan	%	20	18	22	21	24	23	25	23	27	24	92,4
3	Persentase pemutakhiran data kepegawaian pada SIMPEG	%	85	80	88	83	90	85	92	87	95	90	89,0

Perkembangan pengelolaan kenaikan pangkat ASN kurun waktu 2020-2024 dengan capaian rata-rata 95,2% menunjukkan kinerja sudah baik dan mendekati target setiap tahun. Kendala utama adalah keterlambatan usulan dari perangkat daerah dan keterbatasan SDM pengelola kepegawaian. Untuk Untuk ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan kurun waktu 2020-2024 dengan capaian rata-rata 92,4% menunjukkan pelaksanaan diklat ASN cukup baik. Beberapa faktor penyebab belum maksimalnya capaian indikator ini adalah keterbatasan anggaran diklat dan akses geografis ke lokasi pelatihan. Selanjutnya terhadap indikator kinerja pemutakhiran data kepegawaian kurun waktu tahun 2020-2024 dengan capaian rata-rata 89% menunjukkan SIMPEG masih perlu diperkuat, terutama dalam hal integrasi data dan pembaruan berkala. Kendala teknis meliputi keterbatasan infrastruktur jaringan internet di wilayah kepulauan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara umum adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah, termasuk PNS dan PPPK, serta unit kerja perangkat daerah yang membutuhkan layanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Layanan ini mencakup pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta administrasi kepegawaian lainnya yang membantu meningkatkan kualitas dan kinerja ASN serta OPD.

a. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengelola dan memberikan layanan kepegawaian untuk semua ASN, seperti pengembangan kompetensi, administrasi kepegawaian, dan mutasi. Begitu juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui proses rekrutmen dan orientasi awal.

b. Unit Kerja Perangkat Daerah (OPD)

Melalui badan dan dinas Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memberikan layanan dan dukungan terkait kepegawaian untuk memastikan kualitas kinerja dan pelayanan publik dari unit kerja tersebut. Secara keseluruhan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melayani semua pihak yang berkepentingan dengan manajemen kepegawaian daerah, mulai dari individu ASN hingga seluruh unit kerja dalam pemerintahan daerah untuk memastikan terwujudnya ASN yang profesional dan berkualitas.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan fungi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia antara lain:

a. Rendahnya Kompetensi dan Produktivitas ASN
   1. Masih ada ASN dengan kompetensi rendah atau penempatan tidak sesuai jabatan.
   2. Kebutuhan peningkatan diklat teknis, manajerial, dan fungsional.
b. Tidak Optimalnya Sistem Merit dalam Manajemen ASN
   1. Rekrutmen, promosi, mutasi, dan pengembangan karir belum sepenuhnya berbasis kompetensi.
   2. Perlu integrasi sistem informasi manajemen ASN yang lebih akurat.
c. Terbasanya Anggaran dan infrastruktur Pelatihan
   1. Anggaran pengembangan SDM ASN terbatas.
   2. Fasilitas diklat dan jaringan internet di wilayah kepulauan masih belum memadai.
   3. Sarana prasarana terbatas, sebagian peralatan TIK sudah usang, dan akses jaringan internet antar wilayah belum merata.
   4. Terhambatnya pengembangan kapasitas ASN dan pelayanan kepegawaian yang efektif
   5. Alokasi anggaran masih terbatas, sehingga tidak semua ASN yang membutuhkan diklat bisa difasilitasi.
   6. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN.
   7. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan SDM ASN
d. Kelembagaan belum adaptif terhadap kebutuhan layanan Publik
   1. Layanan masih banyak dilakukan manual; keterbatasan jaringan internet di wilayah kepulauan menghambat akses.
   2. Layanan kepegawaian belum sepenuhnya berbasis digital, sehingga kecepatan dan transparansi layanan belum optimal.
   3. Penegakan aturan disiplin belum konsisten.
   4. Evaluasi kinerja ASN melalui e-Kinerja belum berjalan optimal.
   5. Kondisi kepulauan memengaruhi akses ASN terhadap pelayanan kepegawaian dan pengembangan kompetensi.
   6. SIMPEG dan aplikasi kepegawaian belum terintegrasi penuh dengan SPBE.
   7. Perlu transformasi digital layanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Permasalahan di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara target kinerja yang diharapkan (ASN profesional, kompeten, dan berintegritas) dengan realita capaian saat ini (kompetensi belum merata, sistem merit belum optimal, keterbatasan sarana & anggaran). Hal ini berdampak pada belum maksimalnya peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mendukung pencapaian tujuan RPJMD 2025–2029,

khususnya dalam mewujudkan birokrasi yang Prima dan meningkatkan indeks pelayanan publik.

Penentuan isu strategis berdasarkan telaah dan identifikasi masalah mengenai tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaah visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai serta telaah Renstra K/L dan Renstra BKD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Peluang :

1. Perubahan dan perkembangan peraturan di bidan kepegawaian;
2. Keputusan Menpan RB tentang standar kompetensi jabatan;
3. Tuntutan tentang standar pelayanan minimal dalam pelayanan kepegawaian;
4. Kebijakan pengelolaan kepegawaian secara nasional;
5. Banyaknya tawaran peningkatan kapasitas SDM.

Tantangan :

1. Situasi kondisi politik nasional dan lokal dalam pengembangan SDM;
2. Komitmen pengembangan da peningkatan kualitas SDM;
3. Adanya peraturan perundang-undangan yang kurang mendukung pelksanaan diklat;
4. Belum tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur;
5. Ketidaksiapan SDM aparatur mengikuti pesatnya perkembangan informasi dan teknologi.

Kekuatan :

1. Adanya loyalitas pegawai terhadap atasan dan pekerjaannya;
2. Dedikasi Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tinggi;
3. Kemampuan setiap pegawai mengelola administrasi kepegawaian bagus;
4. Struktur organisasi sangat jelas;
5. Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing-masing fungsi.

Kelemahan :

1. Belum optimalnya penggunaan Teknologi informasi;
2. Belum optimal dalam pelayanan administrasi kepagawaian;
3. Belum optimalnya sarana dan prasaran penunjang kinerja aparatur;
4. Belum optimal kedisiplinan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Belum Optimalnya pengelolaan kepegawaian.

Tabel 2.4
Isu Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISI KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISULINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersedianya SDM lokal yang berpotensi namun belum terkelola optimal	Rendahnya Kompetensi dan produktivitas ASN	Kesenjangan Kapasitas SDM Berdampak pada keberlanjutan pembanguna	Kebutuhan transformasi digital dan kompetensi global ASN	Reformasi birokrasi dan penguatan SDM ASN	Minimnya lembaga Pelatihan terstandar di wilayah kepukauan Menatwai	Peningkatan Kualiatas SDM Aparatur Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN
Tugas dan fungsi pengelolaan manajemen ASN	Tidak optimalnya sistem merit dalam manajemen ASN	Ketimpangan gender dan akses layan publik	Tuntutan transparasi dan akuntabilitas ASN secara global	Implementasi sistem merit dan nilai dasar ASN (BerAKHLAK)	ASN belum merata dari sisi kualifikasi dan distribusi	Penguatan sistem merit dan tata kelola manajemen ASN yang akuntabel
Tugas pendidikan dan pelatihan ASN	Terbatasnya Angaran dan Infrastruktur pelatihan	Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dalam menghadapi perubahan iklim	Agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs)	Implementasi Nasional Pengembangan SDM Unggul	Terbatasnya pelatihan tematik Lokal(Kearifan lokal, mitigasi bencana)	Peningkatan kualitas dan relevansi pelatihan ASN berbasis kebutuhan Daerah
Fungsi penataan kelembangaan dan pengembangan karier	Kelembagaan belum adaptif terhadap kebutuhan layanan publik	ketidakselarasan antar program lintas sektor	Transformasi kelembagaan adaptif	peningkatan efektivitas birokrasi	Perubahan Struktural organisasi perangkat daerah	Penguatan kelembangaan dan sistem pengembangan karir berbasis kinerja

BAB III
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran mengacu pada isu – isu strategis yang diperoleh maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengikuti Visi dan Misi dari RPJMD periode 2025–2029, yaitu: "Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera" untuk mewujudkan Visi tersebut terdapat Delapan misi antara lain :

1. Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Ekonomi Daerah.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana.
6. Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia.
7. Mewujudkan Masyarakat yang Aman Harmonis dan Berkeadilan.
8. Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Inovatif dan Terpercaya

Dari 8 (delapan) misi tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masuk pada misi yang ke empat, yaitu Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Inovatif dan Terpercaya.

Rumusan Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2025–2029 adalah "Terwujudnya manajemen Aparatur Sipil Negara yang profesional, kompeten, dan berdaya saing melalui penerapan sistem merit, pengembangan kompetensi, dan pemanfaatan teknologi informasi".

Tabel 3.1
Tujuan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	*Baseline* 2025	Target Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya manajemen Aparatur Sipil Negara yang profesional, kompeten, dan berdaya saing melalui penerapan sistem merit, pengembangan kompetensi, dan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Profesional ASN	74,49	75	80	82	83	85
	Nilai Sistem Merit	129	200	230	260	300	330
	Indeks Pelayanan ASN	75,8	76,00	78,00	80,00	82,00	85,00

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran strategis perangkat daerah adalah ukuran keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam jangka waktu lima tahun, yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Sasaran strategis berfungsi untuk mengukur kinerja OPD, memastikan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi, serta mengendalikan dan mengevaluasi pencapaian visi dan misi kepala daerah. Sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029 antara lain: Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tahun 2025-2029, disusun dalam rangka untuk memberikan penguatan pada pencapaian visi dan misi kepala daerah dan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan. Tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja Renstra Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Strategis
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani	Terwujudnya manajemen Aparatur Sipil Negara yang profesional, kompeten, dan berdaya saing melalui penerapan sistem merit, pengembangan kompetensi, dan pemanfaatan teknologi informas		Indeks Profesional ASN	75	80	82	83	85	
			Nilai Sistem Merit	200	230	260	300	330	
			Indeks Pelayanan ASN	76,00	78,00	80,00	82,00	85,00	
		Meningkatnya kinerja ASN	Persentase SKP ASN dengan predikat Baik	86%	90%	91,5%	93%	95%	
		Meningkatnya Kompetensi ASN	Indeks Kompetensi ASN	70	75	81	83	85	
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi ASN	Persentase penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan	65%	70%	75%	80%	85%	
			Persentase Ketepatan waktu Kenaikan Pangkat PNS	68%	70%	72%	75%	80%	
		Meningkatnya Kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	79	79,5	79,6	79,7	79,8	
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	2 inovasi	3 inovasi	3 inovasi	4 inovasi	4 inovasi	
			Capaian kinerja perangkat daerah	80%	82%	83%	85%	86%	

3.3 Strategi Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu atau merupakan tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai. Strategi yang baik melibatkan koordinasi tim kerja, menggunakan faktor pendukung, memanfaatkan peluang dan mengantisipasi hambatan yang mungkin dihadapi agar gagasan terlaksana secara rasional, efisien dalam pendanaan dan mencapai tujuan secara efektif.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029 fokus pada sasaran meningkatnya implementasi manajemen ASN berbasis sistem merit yang mendukung misi ke 8 (delapan) pada RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Tepercaya.

Tabel 3.3
Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya manajemen Aparatur Sipil Negara yang profesional, kompeten, dan berdaya saing melalui penerapan sistem merit, pengembangan kompetensi, dan pemanfaatan teknologi informas	Meningkatnya kinerja ASN	1. Meningkatkan konsistensi penerapan e-Kinerja. 2. Menerapkan *reward and punishment secara* objektif.
	Meningkatnya kompetensi ASN	1. Mengembangkan pola diklat berbasis kompetensi dan kebutuhan jabatan. 2. Memperluas kerja sama dengan lembaga diklat dan perguruan tinggi. 3. Mengoptimalkan seleksi promosi, mutasi, dan rotasi jabatan berbasis kompetensi
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi ASN	1. Integrasi SIMPEG dengan aplikasi SPBE dan sistem nasional BKN. 2. Digitalisasi layanan kepegawaian agar lebih cepat, akuntabel, dan transparan. 3. Peningkatan layanan kesejahteraan ASN melalui penghargaan, perlindungan, dan pembinaan Korpri. 4. Peningkatan etos kerja ASN melalui pembinaan dan internalisasi nilai dasar ASN.

Penahapan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan agar menjadi fokus perencanaan perangkat daerah mengarah pada prioritas pembangunan setiap tahunnya. Prioritas pembangunan pada perangkat daerah merupakan tema atau agenda pembangunan perangkat daerah tahunan yang menjadi benang merah capaian antara menuju tujuan dan sasaran 5 (lima) tahunan dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui rencana program perangkat daerah tahunan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2026-2030

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan kompetensi ASN berbasis kebutuhan Jabatan	Peningkatan Kapasitas ASN melalui pelatihan dasar dan teknis prioritas	Penguatan Implementasi sistem merit dan digitalisasi manajemena ASN	Evaluasi kinerja pelatihan ASN dan Penyempurnaan Sistem Merit	Konsolidasi dan perluasan transformasi digital Manajemen ASN
Pemutakhiran data dan integrasi sistem informasi kepegawaian	Optimalisasi penggunaan aplikasi digital dalam layanan kepegawaian	Penilaian Indeks sistem merit dan penyusunan strategis	Peningkatan peran UPTD dalam pengembangan Kompetensi ASN	Trsnsformasi kelembagaan UPTD menjadi pusat unggulan pemerintah

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		peningkatan		
Pemetaan Kebutuhan Pelatihan berdasarkan hasil evaluasi kinerja ASN	Penyusunan Modul pelatihan tematik sesuai kebutuhan lokal	Pelaksanaan Pelatihan Tematik berbasis SKKNI dan kebutuhan daerah	Pengemabngan Pelatihan ASN berbasis Kompetensi dan kinerja	Evaluasi menyeluruh dan proyeksi pengambangan SDM Asn 2031-2025
Sosialisasi dan Penguatan budaya kerja Ber AKHLAK di lingkungan ASN	Pembinaan Melalui coaching dan mentoring	Implementasi penuh budaya kerja berbasis kinerja	Penilaian dampak budaya kerja terhadap kinerja pelayanan publik	Penguatan budaya kerja sebagai nilai kelembangaan ASN Mentawai
Penyusunan Roadmap Transformasi kelembagaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Implementasi awal Transforamsi kelembagaan dan tata kelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Optimalisasi Struktur Organisasi adaptif dan responsif	Konsolidasi kelembagaan untuk pelayanan SDM unggul	Evaluasi kinerja organisasi menuju birokrasi kelas Nasioanl

3.4 Arah Kebijakan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah pedoman dan strategi utama yang dirumuskan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD, menyajikan langkah konkret dan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi daerah tersebut. Arah kebijakan ini menjelaskan bagaimana perangkat daerah akan mengimplementasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam periode 5 tahun. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah berperan sebagai peta jalan yang mengarahkan perangkat daerah untuk fokus pada prioritas pembangunan, mengelola sumber daya secara efektif, dan mencapai target kinerja sesuai dengan mandat RPJMD dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang inklusif, handel, transparan dan akuntabel	1. Membangun Budaya Pelayanan Prima. 2. Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi. 3. Fondasi Digitalisasi dan Keterbukaan Informasi. 4. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme ASN. 5. Pemantapan Smart Governance	1. Pelaporan kinerja berbasis bukti yang relevan. 2. Penguatan Karakter dan Kinerja ASN 3. Meningkatkan motivasi, disiplin, dan kinerja ASN dengan menerapkan sistem yang adil, konsisten, transparan, dan berbasis pada data objektif. 4. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang kompetitif dan budaya kerja yang konstruktif. 5. Menyediakan dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi ASN. 6. Membangun kerja sama antar

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
		dan Partisipasi Inklusif. 6. Konsolidasi Digitalisasi dan Tata Kelola Data Terpadu. 7. Keberlanjutan dan Penguatan Digitalisasi Pemerintahan.	lembaga untuk meningkatkan kapasitas ASN. 7. Memberikan beasiswa pendidikan bagi ASN. 8. Menyusun peta jalan/ pola karier ASN. 9. Melakukan rekrutmen jabatan secara terbuka, transparan dan akuntabel. 10. Membangun kelompok talenta (*talent pool*) yang berpotensi tinggi dan dapat dipersiapkan untuk posisi-posisi strategis di masa depan. 11. Meningkatkan kapasitas ASN dalam penggunaan aplikasi Simpeg dan pengintegrasian data ASN. 12. Mengembangkan platform seperti ASN Digital yang menggabungkan berbagai layanan kepegawaian dalam satu portal terpadu. 13. Penguatan Jiwa Korpri dan dan Profesionalisme ASN. 14. Peningkatan Perlindungan Hukum dan Advokasi. 15. Pengembangan Kesejahteraan dan Pemberian Penghargaan. 16. Penerapan Nilai Dasar BerAKHLAK yang Komprehensif. 17. Pengukuran dan Evaluasi Berkelanjutan.

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARANAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah merupakan rincian dari tujuan dan sasaran strategis, yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan berfungsi sebagai panduan selama 5 tahun untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Program dan sub kegiatan tersebut memuat deskripsi, indikator kinerja, lokasi, dan pagu anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan perwujudan dari berbagai strategi dan langkah operasional dalam rangka pencapaian setiap tujuan. Program yang disusun dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Manajemen ASN
3. Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Kegiatan adalah kumpulan dari aktivitas yang mendukung ketercapaian sasaran program, sedangkan sub kegiatan adalah rincian lebih detail yang menghasilkan keluaran langsung.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Barang Milik Daerah, dan Umum
      - Subkegiatan: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
      - Subkegiatan: Administrasi Kepegawaian Internal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
      - Subkegiatan: Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Program Kepegawaian Daerah
   a. Kegiatan: Pengelolaan Kepegawaian ASN
      - Subkegiatan: Pengadaan ASN
      - Subkegiatan: Kenaikan Pangkat, Mutasi, dan Promosi ASN
      - Subkegiatan: Pensiun dan Pemberhentian ASN
      - Subkegiatan: Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN
      - Subkegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian (SIMPEG)
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
   a. Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN
      - Subkegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
      - Subkegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Teknis
      - Subkegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
      - Subkegiatan: Bimbingan Teknis dan Coaching ASN
   b. Kegiatan: Pembinaan Aparatur dan Organisasi Korpri
      - Subkegiatan: Pembinaan Disiplin ASN
      - Subkegiatan: Pembinaan dan Penguatan Korpri
      - Subkegiatan: Pemberian Penghargaan dan Kesejahteraan ASN

Tabel 4. 1
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang inklusif, handel, transparan dan akuntabel	Terwujudnya manajemen Aparatur Sipil Negara yang profesional, kompeten, dan berdaya saing melalui penerapan sistem merit, pengembangan kompetensi, dan pemanfaatan teknologi informas	Meningkatnya kinerja ASN					
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian		Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Program Kepegawaian Daerah	
					Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN		
				Jumlah pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	
						Pengembangan Kompetensi ASN	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
					Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	
				Jumlah Mutasi dan Promosi ASN		Mutasi dan Promosi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Pengelolaan Mutasi ASN	
					Persentase Pegawai dengan SKP	Meningkatnya kualitas	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
					Bernilai Baik	penilaian kinerja ASN	
				Jumlah ASN yang dinilai Kinerjanya		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Pembinaan Disiplin ASN	
		Meningkatnya Kompetensi ASN	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional		Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan		
			Meningkatnya layanan penjamin mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi		Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis		Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		
					Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
					Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
		Meningkatnya kualitas pelayanan			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
		administrasi ASN			Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
					Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
					Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	

Tabel 4. 2
Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				-		-		-		-		-
KEPEGAWAIAN				-		-		-		-		-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	3.252.594.023	100%	3.177.762.367	100%	3.244.031.188	100%	3.290.600.038	100%	3.324.451.051
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan			3.020.305.195		2.950.817.753		3.012.353.888		3.055.596.954		3.087.030.447
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	13 orang/bulan	3.020.305.195	13 orang/bulan	2.950.817.753	13 orang/bulan	3.012.353.888	13 orang/bulan	3.055.596.954	13 orang/bulan	3.087.030.447
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum			79.300.000		77.475.564		79.091.233		80.226.607		81.051.913
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 jenis	3 jenis	4.300.000	3 jenis	4.201.071	3 jenis	4.288.680	3 jenis	4.350.245	3 jenis	4.394.997
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	30.000.000	3 paket	29.309.797	3 paket	29.921.021	3 paket	30.350.545	3 paket	30.662.767
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis	2 jenis	5.000.000	2 jenis	4.884.966	2 jenis	4.986.837	2 jenis	5.058.424	2 jenis	5.110.461
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	12 laporan	12 laporan	40.000.000	12 laporan	39.079.730	12 laporan	39.894.695	12 laporan	40.467.393	12 laporan	40.883.689
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Terlaksananya layanan pengadaan barang milik daerah			8.000.000		7.815.946		7.978.939		8.093.479		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	1 unit	8.000.000	1 unit	7.815.946	1 unit	7.978.939	2 unit	8.093.479	2 unit	8.176.738
Penyediaaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Tersedianya Layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			335.000.000		327.292.735		334.118.073		338.914.419		342.400.894
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 rekening	3 rekening	100.000.000	3 rekening	97.699.324	3 rekening	99.736.738	3 rekening	101.168.483	3 rekening	102.209.222
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	12 laporan	12 laporan	200.000.000	12 laporan	195.398.648	12 laporan	199.473.477	12 laporan	202.336.966	12 laporan	204.418.444
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	2 unit	2 unit	10.000.000	2 unit	9.769.932	2 unit	9.973.674	2 unit	10.116.848	2 unit	10.220.922

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya											
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	5 unit	5.000.000	5 unit	4.884.966	5 unit	4.986.837	5 unit	5.058.424	5 unit	5.110.461
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	20.000.000	1 unit	19.539.865	1 unit	19.947.348	1 unit	20.233.697	1 unit	20.441.844
Program Kepegawaian Daerah				1.098.292.326		833.155.227		850.529.784		862.739.344		871.614.504
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	85%	95%	274.573.082	100%	208.288.807	100%	212.632.446	100%	215.684.836	100%	217.903.626
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				274.573.082								
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		2 dokumen	2 dokumen	174.573.082	2 dokumen	118.288.807	2 dokumen	117.632.446	2 dokumen	120.684.836	2 dokumen	117.903.626
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	2 dokumen	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	90.000.000	2 dokumen	95.000.000	2 dokumen	95.000.000	2 dokumen	100.000.000
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	5%	8%	274.573.082	10%	208.288.807	12%	212.632.446	15%	215.684.836	20%	217.903.626
Pengembangan Kompetensi ASN				274.573.082								
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	10 orang	12 orang	274.573.082	12 orang	208.288.807	12 orang	212.632.446	12 orang	215.684.836	12 orang	217.903.626
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya	70%	75%	274.573.082	80%	208.288.807	82%	212.632.446	85%	215.684.836	90%	217.903.626
Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	-	58,00	59,74	64,52	69,68	75,95		351.369.672		360.807.252
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 dokumen	2 dokumen	449.146.164	2 dokumen	326.577.614	2 dokumen	340.264.892	2 dokumen	351.369.672	2 dokumen	360.807.252
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	100%	100%	449.146.164	100%	326.577.614	100%	340.264.892	100%	351.369.672	100%	360.807.252
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi Aparatur			100.000.000		90.000.000		85.000.000		80.000.000		75.000.000
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 ASN	20 ASN	100.000.000	18 ASN	90.000.000	15 ASN	85.000.000	12 ASN	80.000.000	10 ASN	75.000.000
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1.372.865.408		999.786.272		1.020.635.741		1.035.287.213		1.045.937.404
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan	70%	72%	343.216.352	75%	249.946.568	78%	255.158.935	80%	258.821.803	85%	261.484.351

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	*BASELINE* 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
dasar, kader, manajerial dan fungsional	Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional											
Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				343.216.352		249.946.568		255.158.935		258.821.803		261.484.351
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	15 orang	20 orang	343.216.352	20 orang	249.946.568	20 orang	255.158.935	25 orang	258.821.803	30 orang	261.484.351
Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	45%	50%	343.216.352	55%	249.946.568	60%	255.158.935	62%	258.821.803	65%	261.484.351
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				343.216.352		249.946.568		255.158.935		258.821.803		261.484.351
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	15 orang	20 orang	343.216.352	30 orang	249.946.568	30 orang	255.158.935	40 orang	258.821.803	50 orang	261.484.351
Meningkatnya layanan penjamin mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	40%	45%	343.216.352	50%	249.946.568	55%	255.158.935	60%	258.821.803	65%	261.484.351
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				243.216.352		149.946.568		155.158.935		158.821.803		161.484.351
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	5 orang	20 orang	243.216.352		149.946.568		155.158.935		158.821.803		161.484.351
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	46%	51%	443.216.352	55%	349.946.568	58%	355.158.935	63%	358.821.803	67%	361.484.351
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis				443.216.352		349.946.568		355.158.935		358.821.803		361.484.351
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	5 orang	10 orang	443.216.352	10 orang	349.946.568	10 orang	355.158.935	10 orang	358.821.803	10 orang	361.484.351
				5.913.762.931		4.779.765.883		4.879.442.766		4.949.488.344		4.992.227.910

Tabel 4. 3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Progran Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	
			Pengembangan Kompetensi ASN	
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	
			Mutasi dan Promosi ASN	
			Pengelolaan Mutasi ASN	
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Pembinaan Disiplin ASN	
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
			Meningkatnya layanan penjamin mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
			Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan perangkat daerah tercermin dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tercermin dari capaian IKU dan IKD yang ditetapkan.

Penyajian IKU dan IKD dalam dokumen Renstra menjadi pijakan dalam penyusunan target pembangunan tahunan dan sekaligus memenuhi aspek akuntabilitas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara detail target IKU dan IKD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana disajikan dalam di bawah ini :

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN					KET
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Profesional ASN	Indeks	75	80	82	83	85	
2	Nilai Sistem Merit	Nilai	200	230	260	300	330	
3	Indeks Pelayanan ASN	Indeks	76	78	80	82	85	
4	Persentase SKP ASN dengan predikat Baik	Persen	86%	90%	91,50%	93%	95%	
5	Indeks Kompetensi ASN	Indeks	70	75	81	83	85	
6	Persentase penempatan ASN sesuai dengan analisis jabatan	Persen	65%	70%	75%	80%	85%	
7	Persentase Ketepatan waktu Kenaikan Pangkat PNS	Persen	68%	70%	72%	75%	80%	
8	Nilai SAKIP	Nilai	79	79,5	79,6	79,7	79,8	
9	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Inovasi	2 inovasi	3 inovasi	3 inovasi	4 inovasi	4 inovasi	
10	Capaian kinerja perangkat daerah	Persen	80%	82%	83%	85%	86%	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN					KET
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persen	95%	100%	100%	100%	100%	
2	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	-	58,00	59,74	64,52	69,68	
3	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	Persen	8%	10%	12%	15%	20%	
4	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya	Persen	75%	80%	82%	85%	90%	
5	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persen	72%	75%	78%	80%	85%	
7	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	Persen	50%	55%	60%	62%	65%	

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN					KET
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	Persen	45%	50%	55%	60%	65%	
9	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	51%	55%	58%	63%	67%	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Renstra OPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang didalamnya tujuan dan sasaran serta strategi dalam mencapaiannya. Renstra digunakan sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja (RENJA) dan dijabarkan dalam sasaran – sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program-program pembangunan dan kegiatan pokok sehingga merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan, memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur.

Pengendalian dan evaluasi Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Tahapan pengendalian dan evaluasi meliputi:

1. Pengendalian
- Monitoring rutin setiap triwulan oleh pimpinan OPD.
- Pengukuran capaian indikator kinerja (IKU dan IKK).
- Identifikasi kendala dan hambatan pelaksanaan.

2. Evaluasi
- Dilaksanakan minimal setiap akhir tahun anggaran.
- Membandingkan target dengan realisasi capaian indikator.
- Menyusun rekomendasi perbaikan untuk tahun berikutnya.
- Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati dan menjadi dasar perbaikan Renja OPD dan penyusunan RKPD.

Manajemen Resiko dalam menyusun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029 ini dilakukan hingga pada level sasaran pembangunan yang lebih detail menjelaskan target operasional pembangunan. Tahapan proses pengelolaan resiko pemerintahan daerah tersebut antara lain: Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Melaluli mitigasi risiko yang tepat dan terukur akan mampu mengendalikan dan mengelola risiko yang berpotensi dan menggagalkan tujuan dari perencanaan pembangunan. Mitigas tersebut telah dimulai sejak pada proses perencanaan, sehingga perlu dipantau terus pada tahapan pelaksanaan, pengendalian, dan dilakukan monitoring/ evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029 menjadi komitmen dan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



RINTO WARDANA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, Sebagai mana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangka Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

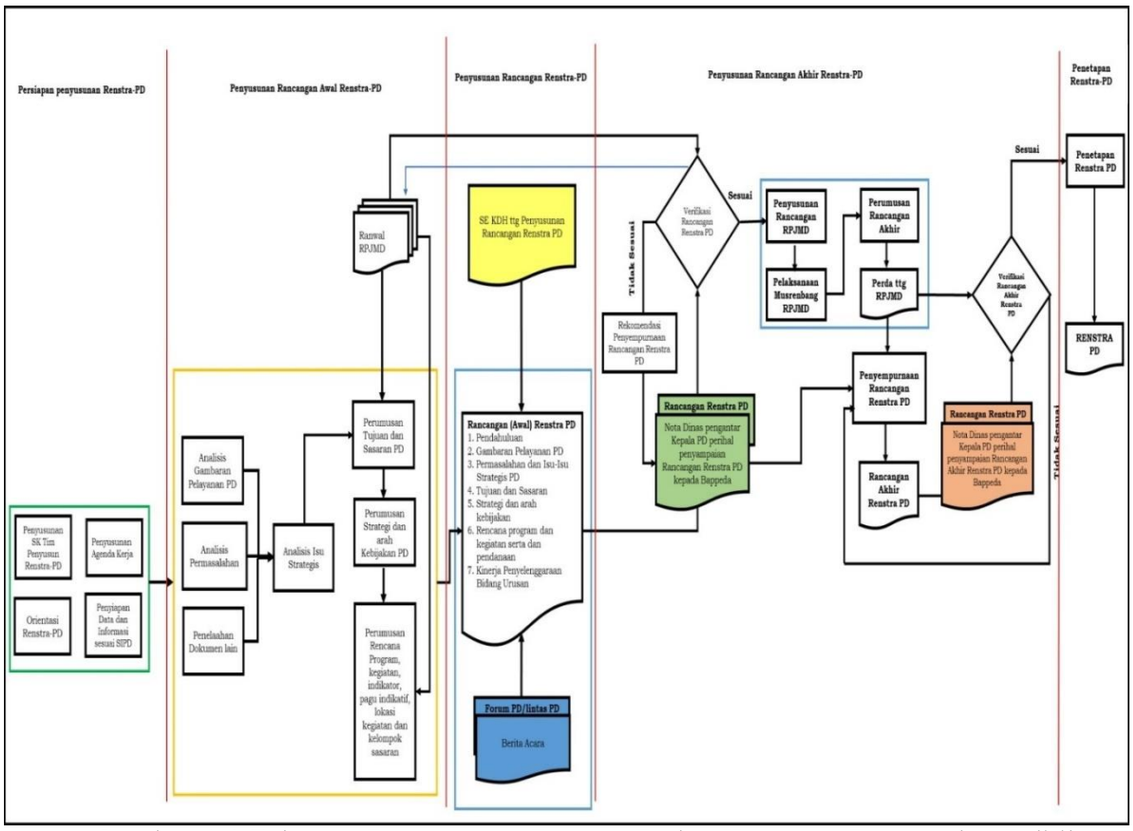
Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan Nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Proses Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra, yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja).

Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mendukung Bupati Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati.
Adapun proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada bagan 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

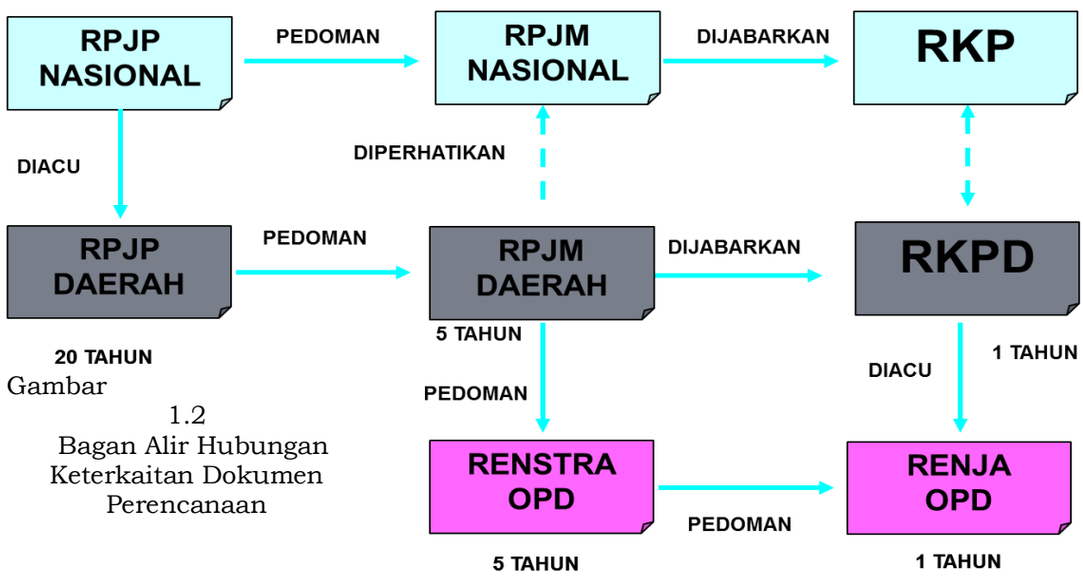
Berdasarkan Instrukri Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, tahapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diawali dengan:

1. Persiapan Penyusunan Renstra, antara lain :
   a. Pembentukan SK Tim penyusunan Renstra Tahun 2025-2029.
   b. Orintasi mengenal RENSTRA.
   c. Penyusunan Agenda Tim Penyusunan RENSTRA.
   d. Penyiapan Data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah antara lain:
   a. Analisis gambaran pelayanan.
   b. Analisis permasalahan.
   c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya.
   d. Analisis isu strategis.
   e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdarkan sasaran indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.
   f. Perumusan Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.
   g. Perumusan rencana progran, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.
3. Rancangan RENSTRA antara lain:
   a. Penyempurnaan rancangan awal Renstra perangkat daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah.
   b. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat daerah/ lintas perangkat daerah.

c. Hasil Kesepakatan Forum perangkat daerah dituangkan dalam Berita Acara.
d. Rancangan Renstra perangkat daerah disempurnakan berdasarkan berita acara.

4. Rancangan Akhir RENSTRA antara lain:
   a. Penyempurnaan rancangan akhir Renstra perangkat daerah berdasarkan surat Peraturan Daerah tentang RPJMD.
   b. Perumusan rancangan akhir Renstra perangkat daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
5. Penetapan RENSTRA antara lain:
   a. Rancangan Akhir Renstra perangkat daerah disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk diverivikasi.
   b. Rancangan Akhir Renstra perangkat daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
   c. Rancangan akhir Renstra perangkat daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh perangkat daerah kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah untuk dilakukan proses penetapan Ranstra perangkat daerah.
   d. Penetapan Renstra Perangkat daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentunya memperhatikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah, propins maupun pusat. Penyelarasan tersebut terkait dengan pelaksanaan tupoksi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar lebih efektif dan efisien. Hubungan dan keterkaitan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat melalui Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Proses Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra, yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mendukung Bupati dan Wakil Bupati Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum penyusuna Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perecanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Berita Negara;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2025 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumateara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4);

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, peraturan/regulasi yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025-2029 adalah Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Mengatur Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah penyesuaian indikator dan target

kinerja perangkat daerah, indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penjabaran visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025- 2029 ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran rencana pembangunan Daerah di bidang urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka 5 Tahun;
3. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan;
4. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenanaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis serta dasar hukum yang relevan dan signifikan dan menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Bab ini terdiri atas:

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi penyajian data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah disertai evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir, serta mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah dan mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung atau pun tidak langsung. Bab ini terdiri atas:

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4 Kelompok sasaran layanan
2.2 Permasalah dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

sesuai kewenangannya dan mengacu pada Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang dijabarkan secara operasional dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan disertai dengan indikator kinerja dan targetnya yang didukung dengan program prioritas pembangunan daerah, Bab ini terdiri atas:

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub kegiatan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya, dan menjelaskan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci berserta Target dan Pagu Indikatif untuk pencapaian 5 (lima) tahun kedepan, Bab ini terdiri atas:

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesesuaian antara target kinerja Renstra Perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bedasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Secara rinci Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

A. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan.

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:

   a. pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan;
   b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
   c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
   d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
   e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan;
   f. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia pegawai aparatur sipil negara, rencana kebutuhan aset, rencana pemanfaatan aset, rencana anggaran kas, rencana program kerja tahunan, rencana pengendalian risiko, dan dokumen perencanaan lainnya di lingkungan Badan;
   g. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan evaluasi rencana strategis, laporan evaluasi rencana kerja, dokumen manajemen risiko, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan realisasi fisik dan keuangan, laporan pemanfaatan aset, laporan pengelolaan piutang/utang, laporan keuangan bulanan, semester, dan tahunan atas pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan, dan laporan lainnya di lingkungan Badan;
   h. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, penilaian mandiri sistem pengendalian intern pemerintah, survei kepuasan masyarakat, penilaian dan evaluasi capaian reformasi birokrasi, penilaian dan evaluasi manajemen risiko, serta penilaian dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
   i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian:

   a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidangumum dan kepegawaian;
   b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
   c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan;
   d. menyiapkan bahan pengelolaan ketata usahaan di lingkungan Badan;
   e. menyiapkan bahan pengelolaan urusan kerumah tanggaan;
   f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
   g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
   h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;

i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang kesatuan bangsa dipimpin Oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, dalam wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalah gunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenagaasing dan lembagaasing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Untuk melaksanakan tugas bidang kesatuan bangsa menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidangideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakterbangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan kerja penyalah gunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenagakerja asing dan lembagaasing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggalika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalah gunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantaua orang asing, tenaga kerja asing dan lembagaasing, kewaspadaan perbatasan antar negara, sertafasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalah gunaan narkotika, fasilitasi kerukun anumat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, sertafasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalah gunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewas padaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerjaasing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan

antar negara, sertafasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalah gunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sertakewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

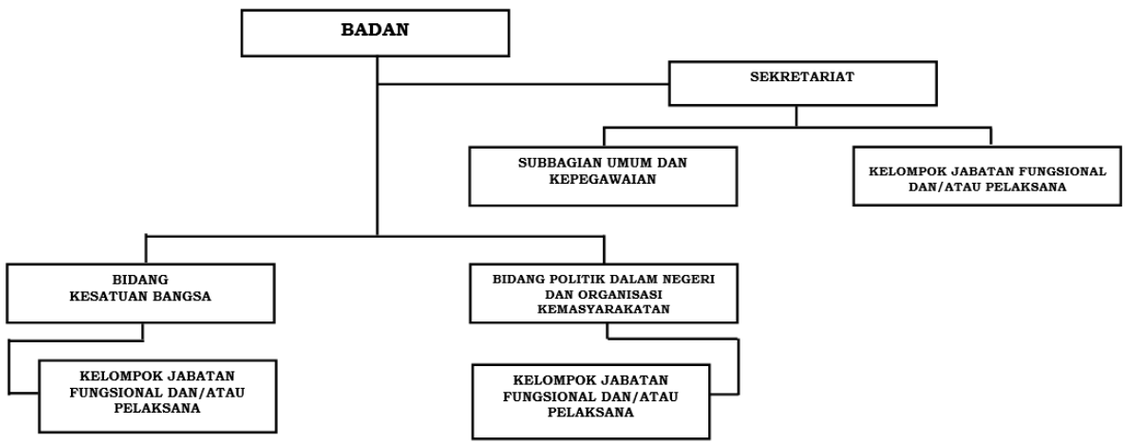
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasanormas dan ormasasing di Daerah;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partaipolitik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan media asing keta ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepaladaerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormasa sing di Daerah;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihanumum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormasasing di Daerah;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.3
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Mentawai



2.1.2 . Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan roda organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka organisasi harus digerakkan oleh seluruh elemen yang ada baik pejabat struktural, pejabat fungsional maupun staf. Secara umum jumlah sumberdaya manusia ASN yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan per April 2025 sebanyak 13, rincian menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.1
Daftar Pegawai Negeri Sipil menurut Kepangkatan dan Golongan Tahun 2025

No	Pangkat/Golongan	Jumlah (orang)
1	IV/b	1
2	III/d	3
3	III/b	1
5	III/a	2
6	II/d	2
7	PPPK	4
	Jumlah	13

(*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2025*)

Tabel. 2.2
Daftar Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat PendidikanTahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	2
2	S1	7
3	DIII	0
4	SLTA/Sederajat	4

(*Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2025*)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jumlah PNS sebanyak 13 Orang.

2.1.2.2 Sarana/Prasarana.

Kantor kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kepulauan Mentawai berlokasi di Jl. Raya Tuapejat Km. 4 Kecamatan Sipora Utara. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan dipertimbangkan dari segi akses yang sangat mudah dijangkau dengan berbagai jenis kendaraan umum atau pun pribadi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 1 buah gedung, Kondisi gedung tersebut masih baik. Jumlah Sarana dan Prasarana lainnya seperti kendaraan dinas, Komputer dan peralatan lainnya sampai akhir tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel. 2.3 Aset/Modal

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	1
2	Kendaraan Roda 2	1
3	PC Unit	4
4	Laptop	6
5	Scaner	1
6	Printer	3
7	Mesin Pemotong Rumput	1
13	Televisi	1
14	Filing Kabinet Besi	5
15	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	1
16	Lemari Penyimpanan	7
17	Almari Buku	4
18	Rak Besi	4
20	Meja	17
21	Kursi	28

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian pula halnya dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk mengukur tentang sejauh mana keberhasilan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diperlukan adanya evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Evaluasi kinerja mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada dasarnya telah dilaksanakan dan berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 - 2024 baik.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD					RealisasiCapaian				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Penurunan konflik sosial di masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%
2	Gangguan keamanan yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%
3	Konflik SARA tertangani	100%	80%	80%	85%	90%	100%	80%	90%	90%	100%
4	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	100%	80%	80%	85%	85%	100%	80%	85%	85%	100%
5	Persentase Ormas terdaftar aktif	100%	80%	75%	80%	85%	60%	60%	85%	85%	100%
6	Persentse berkurang jumlah kasus NAPZA	60%	78%	75%	80%	80%	60%	70%	80%	80%	100%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bukan penyelenggara pelayanan dasar, sehingga tidak memiliki SPM secara langsung seperti dinas kesehatan atau pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap dituntut untuk:

1. Menerapkan prinsip pelayanan publik sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Menyusun standar pelayanan instansional (non-SPM) seperti maklumat layanan, SOP, dan standar waktu layanan.
3. Berkontribusi terhadap pelayanan non-dasar seperti ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini konflik, pembinaan ormas, dan pengawasan ideologi.

Dari tabel 4 di atas dapat dijelaskan, pencapaian indicator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode 2021-2025 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1
   Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang diukurmelalui indicator kinerja konflik di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dipenuhi dengan realisasi capaian tahun terakhir sebesar 100%. Konflik yang diukur merupakan penjumlahan konflik yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai berlatar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksusbudhankam) dalam kurun waktu 1 tahun. Realisasi konflik tahun terakhir sebesar 0 kasus dengan capaian 100% menunjukkan bahwa semua potensi konflik di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat diredam. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai berhasil meredam potensi-potensi konflik yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai sepanjang tahun 2022-2025 sehingga potensi konflik yang ada di daerah tidak pecah menjadi konflik.
2. Sasaran Strategis 2
   Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis yang diukur melalui indikator kinerja persentase konflik SARA yang tertangani di Mentawai dapat dipenuhi dengan realisasi capaian tahun terakhir sebesar 100%. Hal ini dapat terwujud dan terlaksana atas partisipasi semua pihak baik masyarakat, politik dan aspek kehidupan bermasyarakat lainnya.
3. Sasaran Strategis 3
   Meningkatnya partisipasi dalam pembangunan yang diukur melalui indikator tingkat partisipasi dalam pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Kabupaten Kepulauan Mentawai mendekati di angka 80% dimana kesadaran masyarakat dalam partisipasi pemilu cukup besar di bandingkan di daerah lain Propinsi Sumatera Barat.
   Sasaran indikatorke 3 ini termasuk persentase ormas yang aktif, ormas di Kepulauan Mentawai berjumlah 41 ormas terdiri dari 40 ormas yang sudah terdaftar di kemenkumhan dan 2 ormas yang belum terdaftar di kemenkumhan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selalu monitoring keberadaa normas serta kegiatan yang merekalakukan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Sasaran Strategis 4
   Meningkatnya kualitas Kehidupan Masyarakat diukur melalaui indicator berkurangnya jumlah kasus NAPZA dengan target kinerja 75%. Tingkat perkembangan perendaran narkoba di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus di lakukan untuk melindungi gernerasi muda. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Instansi vertikal Polres, Kajari, dan

Kodim 0319/Mentawai selalui melakukaan koordinasi dalam memantau perkembangan peredaran narkoba di Mentawai.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok Sasaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merujuk pada pihak-pihak atau kelompok masyarakat yang menjadi target utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tujuannya adalah untuk membina kehidupan berbangsa dan berpolitik yang harmonis, aman, dan demokratis. Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara umum:

2.1.4.1 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Ormas yang menjadikelompok sasaran pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai diantaranya ormas keagamaan, sosial, kepemudaan, dan profesi. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan pembinaan dan fasilitasi agar kegiatan ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berkontribusi positif terhadap persatuan bangsa.

2.1.4.2 Partai Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KabupatenKepulauan Mentawai memberikan fasilitasi, pendidikan politik, dan pengawasan bantuan keuangan partaipolitik serta mendorong partisipasi politik yang sehat dan demokratis.

2.1.4.3 Pemilih Pemula dan Kaum Muda

Pelajar, mahasiswa, dan generasi muda lainnya menjadi kelompok sasaran kegiatan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Kegiatan yang melibatkan kelompok sasaran tersebut diantaranya pendidikan politik, wawasan kebangsaan, bela negara, sosialisasi P4GN dan program Paskibraka.

2.1.4.4 Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga toleransi, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

2.1.4.5 Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum lainnya Forum-forum tersebut mendorong partisipasi masyarakat dalam deteksi dini potensi konflik, pembauran tarsuku/etnis, serta menjaga stabilitas wilayah.

2.1.4.5 Masyarakat Umum

Masyarakat umum menjadi sasaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui sosialisasi, pendidikan kebangsaan, dan pembinaan ideologi Pancasila

2.1.4.6 Aparatur Pemerintah Daerah

Aparatur pemerintah daerah sebagai mitra kerja untuk sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

2.1.4.7 Mitra Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah berbagai pihak yang bekerjasama atau menjadi rekan strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terutama dalam menjaga stabilitas politik, integrasi bangsa, dan ketahanan nasional. Berikut ini adalah kelompok mitra Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat secara umum:

1. Instansi Pemerintah
   a. Internal Pemerintah Daerah (OPD): Satpol PP, Dinas Pemuda dan Olahraga, BKPSDM, Bappeda, BPKAD, Disdukcapil, Bagian Hukum dll.
   b. Instansi Vertikal: Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum), KPU, Bawaslu, BIN, TNI, POLRI, Kejaksaan, Imigrasi, BNN dll.

2. Forum-forum di Bawah Pembinaan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
   a. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
   b. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
   c. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
   d. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
   e. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
3. Partai Politik
   Sebagai peserta pemilu dan mitra dalam pendidikan politik masyarakat.
4. Media Massa
   Sebagai sarana penyebaran informasi kebangsaan dan klarifikas isu-isu strategis.
5. Akademisi dan Perguruan Tinggi
   Dalam riset, kajian strategis, serta pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan serta pendidikan politik masyarakat
6. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat
   Sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat adat atau komunitas lokal dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.

2.2 Permasalahan dan Isu- isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lima tahun mendatang.

Selain itu perumusan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2025-2029 juga berdasarkan pada telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDG's).

2.2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai selama kurun waktu lima tahun kebelakang, tentu ada tantangan dan peluang untuk lima tahun kedepan, berdasarkan hal tersebut maka dapat diidentifikasi bebera papermasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai. Setelah dilakukan identifikasi resiko terhadap beberapa akar masalah dalam pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai mana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Semakin berkurangnya persatuan dan kesatuan bangsa	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air	- Lemahnya rasa cinta tanah air - Lemahnya implementasi nila-nilai Pancasila - Kuatnya arus globalisasi
		Masih adanya perilaku masyarakat yang intoleran dalam kehidupan beragama	- Pemahaman keagamaan yang sempit dan tertutup - Pengaruh kelompok intoleran dan radikal - Kurangnya dialog antar umat beragama - Penegakan Hukum yang tidak tegas
		Terdapat kelembagaan organisasi ke masyarakatan yang belum mandiri dan belum terdaftar	- Pembinaan ormas belum optimal - Kurangnya kesadaran ormas untuk mendaftar
		Masih adanya potensi konflik yang muncul di tengah masyarakat diantaranya konflik perbatasan, lahan/tanah ulayat, Konflik Sumber Daya Alam, SARA dan ekopolsosbud	- Ketidak jelasan batas administrasi antar tanah ulayat - Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan batas wilayah. - Ketidaksesuaian antara hukum negara dan hukum adat. - Eksploitasi SDA tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan - Provokasi oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan isu SARA untuk kepentingan politik. - Penyalah gunaan kekuasaan politik, korupsi, dan lemahnya tata kelola pemerintahan.
		Masih terjadinya penyimpangan sosial dan kriminalitas di Masyarakat	- Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi - Lemahnya penegakan hukum dan efekjera yang rendah - Pergaulan bebas dan pengaruh negatif media sosial - Kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba sejak dini - Jaringan sindikat narkoba yang terorganisasi dan sulit diberantas
2.	Rendahnya kualitas politik dan demokrasi	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang politik dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemerintahan	- Pendidikan politik yang minim - Ketidak pastian dan percayaan terhadap pemerintah dan politisi

2.2.3 Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan, Bakesbangpol Kabupaten Kepulauan Mentawai merumuskan sejumlah isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam periode perencanaan tahun 2025–2029.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu-isu strategis tersebut dirangkum dalam periode perencanaan tahun 2025–2029 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air	Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Pembangunan Karakter bangsa bagi Masyarakat
Masih adanya perilaku masyarakat yang intoleran dalam kehidupan beragama	Penguatan kerukunan umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa
Terdapat kelembagaan organisasi kemasyarakatan yang belum mandiri dan belum terdaftar	Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan
Masih adanya potensi konflik yang muncul di tengah masyarakat diantaranya konflik perbatasan, lahan/tanah ulayat, Konflik Sumber Daya Alam, SARA dan ekopolsosbud	Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah Masyarakat
Masih terjadinya penyimpangan sosial dan kriminalitas di Masyarakat	Peningkatan upaya pencegahan penyimpangan sosial dan kriminalitas di masyarakat
Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang politik dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemerintahan	Peningkatan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan budaya politik dalam berdemokrasi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Deteksi dini dan cegah dini 2. Penguasaan data sosial politik	1. Kurangnya sumber daya 2. Kurang optimalnya pendataan ormas	1. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Penguatan mitigasi dan penanggulangan bencana	1. Perubahan Iklim; Bakesbangpol perlu mengantisipasi potensi konflik sosial akibat perubahan iklim	1. Pengelolaan sampah Bakesbangpol perlu berperan dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait 2. Kerusakan lingkungan Bakesbangpol perlu memantau potensi konflik yang timbul akibat kerusakan lingkungan dan melakukan langkah-langkah pencegahan.	1. Pengelolaansampah Bakesbangpol perlu berperan dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait	Kab. Kepulauan Mentawai kondusif
			2. Alih Fungsi lahan Bakesbangpol perlu berkoordinasi dengan instansi lain terkait pengaturan tata ruang wilayah, mencegah alih fungsi lahan secara ilegal dan menjamin pengelolaan lahan secara berkelanjutan		2. Kerusakan lingkungan Bakesbangpol perlu memantau potensi konflik yang timbul akibat kerusakan lingkungan dan melakukan langkah-langkah pencegahan.	

Tabel 2.7.
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pengelolaan sumber daya alam Bakesbangpol perlu mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, mendorong partisipasi masyarakat dan menyelesaikan sengketa pengelolaan pengelolaan sumber daya alam secara adil.	Perubahan Iklim Bakesbangpol perlu terlibat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta menjaga stabilitas sosial di daerah yang terdampak.	Perubahan Iklim Bakesbangpol perlu terlibat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta menjaga stabilitas sosial di daerah yang terdampak.	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			5. Non Block Politik luar negeri bebas aktif Indoneisa memiliki kesesuaian prinsip dengan Gerakan Non Blok (GNB) karena keduanya menekankan kemerdekaan menentukan nasib sendiri dan tidak terikat pada blok atau aliansi militer manapun. Indonesia berperan penting dalam GNB sebagai pendiri karena politik bebas aktifnya sejalan dengan tujuan GNB untuk menciptakan perdamaian dunia, menolak intervensi serta mendukung kedaulatan dan kemerdekaan negara anggota.			

BAB III
TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran misi secara lebih rinci dan terukur. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, sedangkan sasaran adalah target spesifik dan terukur yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan *(critical success factor)* yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program prioritas dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra Periode 2025-2029 visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjermahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan masyarakat berlandaskan Pancasila adalah menumbuhkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang stabil, damai, dan toleran, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Hal ini dilakukan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, kerukunanan tarumat, stabilitas politik, dan ketahanan nasional. Menciptakan kondisi sosial politik yang harmonis dan demokratis, meningkatkan partisi pasimasyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, serta menguatkan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk membangun masyarakat yang sejahtera, bersatu, dan cinta tanah air. Kesbangpol juga bertujuan mewujudkan stabilitas daerah yang didukung oleh masyarakat yang sadar dan berperan aktif dalam proses demokrasi. Sedangkan dalam HAM adalah dengan menciptakan dan memelihara kerukunan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat melalui pembinaan ideologi Pancasila, kewaspadaan nasional, serta partisipasi masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, termasuk mengurangi konflik SARA dan menjaga stabilitas sosial. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenanganya diuraikan dibawah tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029

Visi: Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 7: Mewujudkan Masyarakat yang Aman Harmonis dan Berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan masyarakat yang berlandasan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan srategis perangkat daerah antara lain sebagai berikut:

a. diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan;
b. untuk mewujudkan misi pembangunan daerah yang dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
c. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
d. dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
e. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Berangkat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, memperhatikan permasalahan yang terpetakan dan isu-isu strategis yang dirumuskan, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum	Terwujudnya Kehidupan masyarakat yang aman	Tingkat kriminalitas	5.20	5.12	5.04	4.96	4.88	4.8

TUJUAN	Terwujudnya Kehidupan masyarakat yang aman		
INDIKATOR	Indeks demokrasi Indonesia Indeks Harmoni Indonesia		
PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Poltik pada Kader Politik	
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	
Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya ketahanan Ekonomi, Sosial dan Buadaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Buadaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah gunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan.	
Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penaganan konflik sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase KonflikSosial yang Diselesaikan	

3.2 Sasaran Renstra Badan Kesaatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 - 2029

Sesuai dengan isu strategis yang menjadi pokok perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jangka menengah disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 - 2030

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Kehidupan masyarakat yang aman		Tingkat Kriminalitas	5.20	5.12	5.04	4.96	4.88	4.8
	Meningkatnya Kesatuan Bangsa	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Diskriminasi dan Intoleransi Masyarakat	80%	80%	82%	82%	85%	85%
		Persentase Kerukunan Umat Beragama	80%	90%	92%	95%	95%	97%
		Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	80%	90%	92%	95%	95%	97%
	Meningkatnya Pembinaan Politik dan Demokrasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Kinerja Ormas	80%	90%	92%	95%	95%	97%
		Persentase Peningkatan Kapasitas Kinerja Partai Politik	80%	90%	92%	95%	95%	97%
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip	83,65	83,80	83,84	84,00	84,15	84,30
		Jumlah Inovasi yang diterapkan	2	2	2	2	2	2
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

a. Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029

RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025 – 2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran strategi, arah kebujakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

a. Visi

Visi Kepulauan Mentawai 2025-2029 memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah periode pertama implementasi dalam penguatan pondasi pembangunan jangka panjang Mentawai Emas 2045, perumusan visi tersebut juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 5 tahun terakhir, sehingga Visi Kepulauan Mentawai 2025-2029 adalah: “KEPULAUAN MENTAWAI MAJU BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”. Perumusan Visi RPJMD Tahun 2025-2045 sebagai Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera memiliki makna:

- Maju
  Menjadikan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mampu berdiri tegak dan sejajar dengan daerah lain, akselerasi di segala sektor pembangunan, mengejar yang belum tercapai, memperbaiki yang ada dan meningkatkan apa yang sudah diraih. Begitu juga pembangunan untuk kemajuan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, infrastruktur yang handal, dan sumberdaya manusia yang berkualitas.
- Berdaya Saing
  Upaya pembangunan untuk kemajuan di setiap lini pembangunan seiring dengan memastikan kualitas dan mutu sehingga memiliki keunggulan yang dapat dijadikan penggerak pertumbuhan sosial, ekonomi dan budaya. Sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saingtinggi, memiliki kebudayaan yang unik dan bernilai tinggi, dan memiliki keunggulan komparatif (keunggulan yang relative terhadap daerah lain) dan keunggulan kompetitif (keunggulan yang unik dan sulit ditiru) sehingga Kepulauan Mentawai diperhitungkan dalam kancah persaingan domestik, nasional dan internasional.
- Sejahtera
  Kehidupan masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dalam suasana aman, nyaman, terlindungi dan damai, serta adanya kesempatan yang sama bagi semua untuk berkembang dan maju. Sejahtera juga mencakup pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan yang melibatkan semua orang tanpa diskriminasi, pembangunan manusia yang hakiki.

b. Misi

Visi pembangunan tersebut di implementasikan dalam perwujudan 8 misi pembangunan untuk visi dalam bentuk nyata. Misi pembangunan ini tentunya merupakan aktivitas yang ditentukan mengarah pada langkah-langkah terwujudnya kondisi yang ingin dicapai. 8 Misi Pembangunan Daerah 2025-2029 yakni:

a. Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Pembangunan Manusia yang Inklusif, Responsif, dan Berkualitas.
b. Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Ekonomi Daerah.
c. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan.

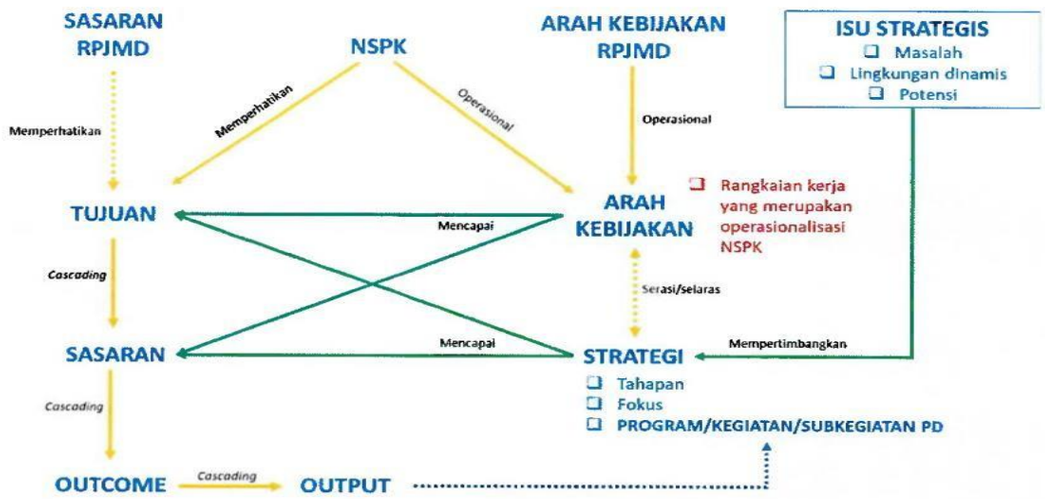
d. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.
e. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Bencana.
f. Mewujudkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia.
g. Mewujudkan Masyarakat yang Aman Harmonis dan Berkeadilan.
h. Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Tepercaya.

c. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

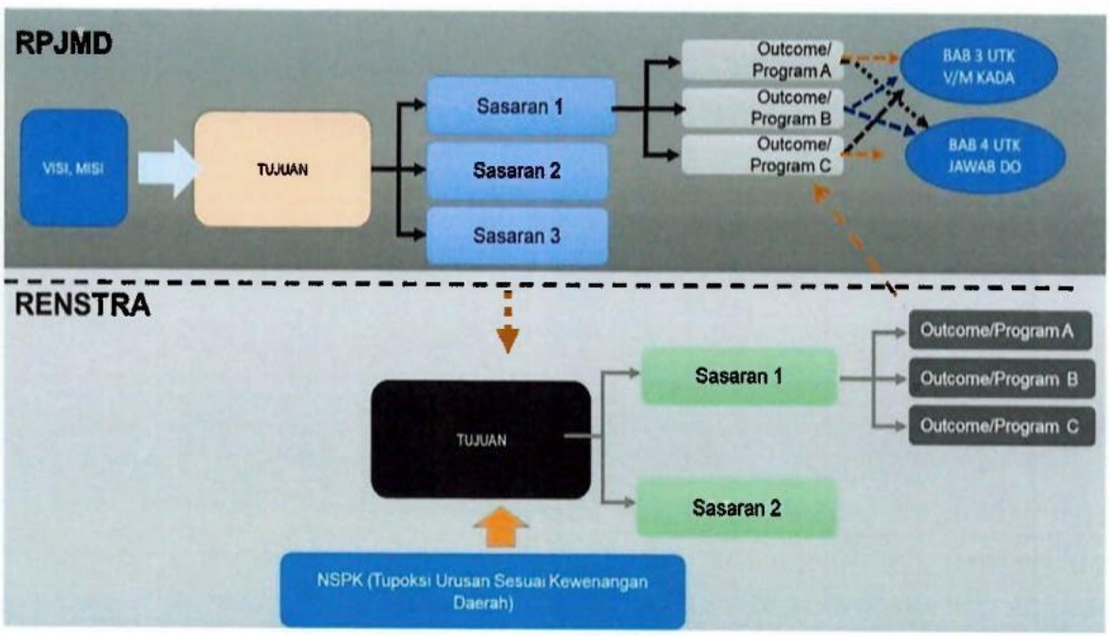
Tujuan dan sasaran adalah penjabaran misi secara lebih rinci dan terukur. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, sedangkan sasaran adalah target spesifik dan terukur yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program prioritas dalam rangka merealisasikan visi dan misi Tujuan dan Sasaran RPJM Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029. Berdasarkan urusan dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah yang mengurus urusan wajib bukan pelayanan dasar berperan penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepada daerah dalam urusan Pemerintahan umum, misi yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam mencapai sasaran Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kerukunanumat beragama dengan indikator kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama.
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan demokrasi dengan indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia.
3. Meningkatnya penyelesaian potensi konflik di masyarakat dengan indikator kinerja persentase potensikonflik yang ditindak lanjuti dengan langkah pencegahan.
4. Meningkatkan Pengawasan Ormas tehadap kegiatan yang mereka lakukan.
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indicator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi, dengan indicator kinerja Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Gambar 3.4
Konsep Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Gambar 3.5
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



3.2 Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

Sasaran mewujudkan hidup demokrasi oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi peningkatan partisipasi politik masyarakat, pengembangan organisasi kemasyarakatan (Ormas), peningkatan pemahaman ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran politik masyarakat, dan peningkatan komunikasi politik serta peran lembaga legislatif. Berikut rincian sasaran-sasarantersebut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandasan Pancasila
   - Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat
     Sasaran ini fokus pada meningkatnya jumlah masyarakat yang aktif dalam proses demokrasi, misalnya dalam pemilihan umum.
   - Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
     Kesbangpol berupaya mengembangkan Ormas sebagaiaset pembangunan daerah dan mendorong kepedulian mereka dalam memberdayakan masyarakat.
   - Peningkatan Pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan persatuan bangsa.

- Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat
  Sasaran ini menumbuhkan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban politiknya serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bernegara.
- Terbukanya Komunikasi Politik
  Kesbangpol berusaha mewujudkan komunikasi yang lebih baik antara struktur politik dan masyarakat untuk memastikan aspirasi rakyat tersalurkan.
- Penguatan Peran Lembaga Legislatif
- Fokus pada peran lembaga legislative dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan serta aspirasi rakyat.
- Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Beretika Politik.
- Menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, berwawasan kebangsaan, dan memiliki etika politik yang baik.

2. Mewujudkan Demokrasi

Sasaran Badan Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mewujudkan demokrasi adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, membangun masyarakat yang sadar politik dan berwawasan kebangsaan, serta mewujudkan kehidupan berpolitik yang demokratis, stabil, dan harmonis. Hal ini dicapai melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan politik, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Berikut adalah rincian sasarannya:

a. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat:
   1. Meningkatnya persentase masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.
   2. Mengadakan kegiatan seperti "Kelas Demokrasi" untuk meningkatkan wawasan politik pelajar.

b. Membangun Masyarakat yang Sadar Politik dan Berwawasan Kebangsaan:
   1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, berwawasan kebangsaan, dan sadar politik.
   2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Mewujudkan Kehidupan Berpolitik yang Demokratis dan Stabil:
   1. Terwujudnya tatanan kehidupan sosial politik yang berdasarkan demokrasi Pancasila dan UUD 1945.
   2. Mewujudkan kehidupan politik yang mantap dan dinamis yang mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
   3. Meningkatkan stabilitas kondisi politik masyarakat.

d. Pembinaan Ideologi dan Fasilitasi Kehidupan Demokrasi:
   1. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terkait penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi.
   2. Melakukan fasilitasi terhadap partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

e. Menjaga Keamanan dan Ketertiban yang Mendukung Demokrasi:
   1. Menurunkan konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).
   2. Meningkatkankerukunanhidupumatberagama.

3. Perlindungan Terhadap Hak Azasi Manusia (HAM)

Sasaran Badan Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia (HAM) antara lain adalah penegakan supremasi hukum dan HAM melalui pembinaan politik dalam negeri, peningkatan kerukunan umat beragama dan kepercayaan, serta penurunan konflik SARA. Selain itu, Kesbangpol juga bertujuan meningkatkan kesadaran

politik masyarakat dan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM. Berikut adalah beberapa sasaran umumKesbangpol terkait HAM:

1. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM.
2. Meningkatkan pemahaman Masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan wawasankebangsaan.
3. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dan HAM di daerah.
4. Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama dan penghayat kepercayaan.
5. Menurunnya konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) di masyarakat.
6. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat.
7. Terciptanya stabilitas dan kenyamanan lingkungan masyarakat.

Adapun upaya Kesbangpol untuk mencapai sasaran ini meliputi:

1. Pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
2. Fasilitasi pencegahan penyalah gunaan narkotika.
3. Pendaftaran, pemberdayaan, dan pengawasan organisasi masyarakat.
4. Koordinasi di bidang pendidikan politik.
5. Pemantauan situasi politikserta pemilihan umum.

Tabel 3.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke				
		2024	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Kesatuan Bangsa	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Diskriminasi dan Intoleransi Masyarakat	3,43	3,53	3,63	3,73	3,83	3,93
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80	85	87	90	95	100
	Parsentase Pendidikan Politik pada kaderpartai Politik	85	85	85	85	90	100
	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	80	85	80	85	90	100
	Parsentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahaan penyalahah gunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	80	80	80	90	95	100
	Persentase konfliksosial yang diselesaikan	68,10	75,50	80,50	85,50	90,50	95,50

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mewujudkan hidup yang Pancasila, demokrasi, dan HAM mencakup pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, fasilitasi partisipasi politik masyarakat, pemberdayaan dan koordinasi organisasi kemasyarakatan (ormas), serta penanganan konflik dan pemeliharaan kerukunan. Kesbangpol melakukan ini melalui penyusunan kebijakan, fasilitasi kegiatan, koordinasi dengan berbagai pihak, serta monitoring dan evaluasi untuk memastikan masyarakat hidup csesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menjalankan demokrasi, dan menghormati HAM. Strategi utama Badan Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Mentawai:

1. Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan:
   Sosialisasi dan Pendidikan: Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi materi tentang nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, termasuk keluarga, organisasi, dan media massa. Pembentukan Forum Kebangsaan: Memfasilitasi dan memantau forum pembauran kebangsaan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman.
2. Fasilitasi Kehidupan Demokrasi:
   Meningkatkan Partisipasi Politik: Meningkatkan partisi pasipolitik masyarakat melalui peningkatan komunikasi dan keterlibatan dalam proses politik lokal dan nasional. Fasilitasi Lembaga Politik: Menghimpun data, melakukan koordinasi, dan memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu dan instansi terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang adil. Pemberdayaan Lembaga Infra-struktur Politik: Berkoordinasi dengan Ormas, Lembaga Profesi, dan LSM untuk memberdayakan infrastruktur politik yang mendukung demokrasi.
3. Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM):
   Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini: Melaksanakan program kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, dan penanganan konfliksosial di daerah untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pemenuhan HAM. Fasilitasi Kerukunan: Memfasilitasi dan memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menjaga kerukunan antar dan intra suku, agama, ras, dan golonganlainnya.
4. Pembinaan dan Pengawasan Ormas:
   Melakukan pendaftaran, fasilitasi, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) agar berperan sebagai asset pembangunan daerah yang sesuai dengan peraturan. Mediasi Sengketa: Memfasilitasi mediasi sengketa antar Ormas untuk menjaga stabilitas sosial.

3.4 Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa Politik untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan

sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel 3.6 Penahapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP II (2028)	TAHAP III (2029)	TAHAP IV (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan pemahaman Pancasila, demokrasi, dan HAM di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Penguatan nilai-nilai Pancasila, Demokrasi dan HAM serta melaksanakan misi yang akan dicapai berjalan dengan menjalankan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan	Akselerasi nilai-nilai Pancasila, Demokrasi dan HAM serta melaksanakanmisi yang akan dicapai	Penguatan fondasinilai-nilai Pancasila, Demokrasi dan HAM	Transformasi pemahaman nilai-nilai Pancasila, Demokrasi dan HAM serta pembinaan yang berkelanjutan

Tabel 3.7
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

MISI KE-7 RPJMD 2025-2029: Mewujudkan masyarakat aman harmonis dan berkeadilan				
TUJUAN RPJMD 2025-2029: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial				
SASARAN RPJMD 2025-2029: 1. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum 2. Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan				
Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai:				
Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum	Index kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum	1. Penguatan forum kerukunanumat beragama	• Menguatkan peran forum forum strategis daerah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forkopimda dalam mencegah dan memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi Dan konfliksosial
			2. Penguatan peran pemuda, perempuan, tokoh budaya dan tokoh masyarakat. 3. Meningkatkan akses	• Penguatan perantokoh agama dalam meningkatkan kapasitas kerohanian umat/masyarakat untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran normadan hukum • Kolaborasi lintas sector dalam memberikan

MISI KE-7 RPJMD 2025-2029: Mewujudkan masyarakat aman harmonis dan berkeadilan				
TUJUAN RPJMD 2025-2029: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial				
SASARAN RPJMD 2025-2029: 1. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum 2. Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan				
Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai:				
Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			masyarakat terhadap layanan/bantuan hukum. 4. Penguatan fungsi forkopimda 5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat (Narkoba, Tawuran, LGBT, Judi dan judi online dan lainya	advokasi dan penyuluhan hukum terhadap penyakit masyarakat (Narkoba, Tawuran, LGBT, judi online dan lainnya). • Penguatan literasi digital dan media sosial di kalangan remaja dan keluarga untuk mencegah paparan konten negatif, kekerasan digital, dan promosi judi online
	Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Index keamanan dan kenyamanan Lingkungan	1. Penguatan system keamanan lingkungan 2. Penguatan forum kerukunan umat beragama 3.Penguatan perantokoh budaya dan tokoh masyarakat 4.Penguatan fungsi forkopindam (linmas, babinsa, Babin kamtibmas)	• Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil. • Pengembangan Sistem Pelaporan yang Mudah Diakses. • Penataan Lingkungan Fisik yang Mendukung Keamanan. • Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Aktif. • PemanfaatanTeknologi. • Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Sosial. • Peningkatan Kesadaran Hukum, melalui penguatan forum lintas sektor (forkopimda, FKUB)

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program Kegiatan, Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan tujuan dan sasaran RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 – 2029, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam Tabel. Rumusan Perencanaan Program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai yang diusulkan ini adalah, hasil dari penjabaran dari undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2020 tentang Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan.

Program merupakan perwuju dan dari berbagai strategi dan langkah operasional dalam rangka pencapaian setiap tujuan. Adapun program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan atau dalam periode Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Program penunjangurusan pemerintahan daerah.
2. Program penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan.
3. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.
4. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitasipenanganankonflik social.
5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.
6. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi ke masyarakatan.

4.2 Uraian Kegiatan

Sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan Kegiatan merupakan bagiandari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai bagian dari pencapaian sasaran.

Sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan maka program dan kegiatan yang akan dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

   Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

   b. Administrasi umum Perangkat Daerah
      - ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - ✓ PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor
      - ✓ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - ✓ Pengadaan Mebel
   - ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

   Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa
      - ✓ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
      - ✓ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
      - ✓ Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
      - ✓ Pengangkatan Purna paskibraka Duta Pancasila
      - ✓ Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna paskibraka
      - ✓ Pembentukan Paskibraka

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

   Terdiridari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
      - ✓ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- ✓ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- ✓ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KE MASYARAKATAN
   Terdiridari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas
      - ✓ Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
      - ✓ Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
      - ✓ Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi SengketaOrmas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
   Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
      - ✓ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
      - ✓ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
      - ✓ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
   Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- ✓ Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- ✓ Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- ✓ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- ✓ Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cas cading tujuan, sasaran, outcome, dan output meliputi program Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian integral pembangunan yang pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai mengacu pada Permendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai dimulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030 yang mana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu pijakan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2030. Daftar program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawahini:

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah		
					Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu		
					Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		
				Tersusunnya dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
				Terlaksanannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Daerah	waktu		
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya Administrasi BMD Perangkat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Pengamanan	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksanannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang berdasarkan tugas dan Fungs	Persentase penyediaan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Layanan Umum Perangkat	Jumlah Pegawai yang berdasarkan tugas dan Fungsi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersediannya Bahan	Jumlah Bahan Logistik	Penyediaan Peralatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Logistik Kantor	Kantor yang Disediakan	dan Perlengkapan Kantor	
				Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersediannya Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpeliharannya Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	Pemeliharaan peralatan dan mesin	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Peralatan dan Mesin Lainnya		lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitas	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	
Peningkata Indeks Demokrasi Indonesia Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik					Indeks Demokrasi Indonesia		
	Meningkatkan Kualitas Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Pembinaan Poilitik Kesatuan Bangsa & kewaspadaan Dini				Indeks Demokrasi Indonesia		
					Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
		Terwujudnya Pembinaan Persentase Ormas/LSM yang dibina Persentase peran potensi paham radikal dan konflik siaol budaya yang ditangani politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini			Persentase Ormas/LSM yang dibina		
			Meningkatnya unsur masyarakat desa yang mendapatkan pemahaman idiologi pancasila dan karakter kebangsaan		Persentase peran potensi paham radikal dan konflik siaol budaya yang ditangani	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	
				Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase unsur masyarakat desa yang mendapatkan pemahaman idiologi pancasila dan karakter kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaa	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Meningkatnya Pembinaan Aktifitas		Cakupan Pembinaan Aktifitas Partai Politik	Program Peningkatan Peran Partai	
					Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
				Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
				Tersedinya Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	
			Tertatanya kelembagaan Ormas		Persentase Ormas yang aktif	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
				Terlaksanya Orang	Jumlah Orang yang	Perumusan Kebijakan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas	Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
				Terlaksanya Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			Meningkatnya kewaspadaan nasional , kualitas fasiltasi penanganan konflik sosial		Persentase peran potensi Persentase peran potensi paham radikal dan konflik siaol budaya yang ditangani	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			Terlaksanya Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
			Terlaksananya Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

4.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program , kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2025-2029 dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCAME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PERENCANAAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, danpelaporan tugaslayanan perangkatdaerah	100 persen	100 persen	1.288.535.325	100 persen	1.258.890.300	100 persen	1.285.143.105	100 persen	1.303.591.644	100 persen	1.317.001.933	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILADAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terlaksanany a Penyusunan Pendanaan dan Perencanaan			777.957.064		999.786.272		1.020.635.741		1.035.287.213		1.045.937.404	
.- Meningkatnya Kesadaran Masyarakatakan IdiologiPancasila danKarakter	1.Cakupan Penguatan IdeologiPancasila danKarakter Kebangsaan	100 persen	100 persen	777.957.064	100 persen	999.786.272	100 persen	1.020.635.741	100 persen	1.035.287.213	100 persen	1.045.937.404	
PROGRAM PENINGKATAN PERANPARTAI				636.806.766		624.866.420		637.897.338		647.054.508		653.710.878	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCAME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
POLITIKDAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIKDAN PENGEMBANGAN ETIKASERTA BUDAYAPOLITIK													
-Meningkatnya EtikadanBudaya Politik	1.Persentase Pendidikan Politikpada KaderPartai Politik	100 persen	100 persen	636.806.766	100 persen	624.866.420	100 persen	637.897.338	100 persen	647.054.508	100 persen	653.710.878	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DANPENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				63.916.842		83.315.523		85.052.978		86.273.934		87.161.450	
-Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	1.Persentase Organisasi Kemasyarakatan yangAktif	60 persen	62 persen	63.916.842	65 persen	83.315.523	68 persen	85.052.978	70 persen	86.273.934	75 persen	87.161.450	
PROGRAM				279.714.394		274.941.225		280.674.829		284.703.984		287.632.786	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCAME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PEMBINAANDAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL, DANBUDAYA													
-Meningkatnya KetahananEkonomi, Sosial,danBudaya Masyarakat	1.Persentase Kebijakandi Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budayadan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi KerukunanUmat Beragamadan Penghayat Kepercayaandi Daerahyang dilaksanakan	100 persen	100 persen	279.714.394	100 persen	274.941.225	100 persen	280.674.829	100 persen	284.703.984	100 persen	287.632.786	
PROGRAM PENINGKATAN				295.172.472		291.604.329		297.685.424		301.958.770		305.065.076	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCAME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KEWASPADAAN													
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL													
- Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100 persen	100 persen	295.172.472	100 persen	291.604.329	100 persen	297.685.424	100 persen	301.958.770	100 persen	305.065.076	
TOTAL				800.231.553.184		844.919.345.481		862.539.427.967		874.921.518.700		883.921.518.700	

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Rencana Program/Kegiatan/Indikator Target dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indicator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (RenjaPerangkat Daerah) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya unsur masyarakat desa yang mendapatkan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			Pembentukan Paskibraka	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Meningkatnya Pembinaan Aktivitas Partai Politik		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya aktivitas Ormas		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya kebijakan ketahan ekonomi, sosial dan budaya		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
6	PROGRAM PENINGKATAN	Meningkatnya penaganan konflik sosial		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja	
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

4.4. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD)

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada periode 2025-2030 tercermin dari capaian IKU dan IKD yang ditetapkan. Penyajian IKU dan IKD dalam dokumen Renstra menjadi pijakan dalam penyusunan target pembangunan tahunan dan sekaligus memenuhi aspek akuntabilitas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara detil target IKU dan IKD Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 di bawah ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD)

No	Indikator		Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat Kriminalitas		5.20	5.12	5.04	4.96	4.88	4.8
2	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Diskriminasi Intoleransi Masyarakat		80%	80%	82%	82%	85%	85%
3	Persentase Kerukunan Umat Beragama		80%	80%	92%	95%	95%	97%
4	Persentase Penanganan Konflik Sosial Di daerah		80%	80%	92%	95%	95%	97%
5	Persentase Peningkatan Kapasitas Kinerja Ormas		80%	80%	92%	95%	95%	97%
6	Persente Peningkatan Kapasitas Kinerja P{artai Politik		80%	80%	92%	95%	95%	97%
7	Nilai Lakip		83,65	83,80	83,84	84,00	84,15	84,30
8	Jumla Inovasi Yang Diterapkan		2	2	2	2	2	2
9	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

perangkatdaerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	60	62	65	68	70	75	
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 ini berisi pedoman pelaksanaan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Rencana strategis diharapkan dapat tercapai sasaran yang efektif dan efisien, secara sinergi sehingga Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi kenyataan sesuai dengan harapan kita semua.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KabupatenKepulauan Mentawai ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja BAKESBAGPOL Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pencapaian sasaran RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai pada periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Penetapan prioritas pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik secara terkoordinir, terintegrasi, dan sinergi serta berkelanjutan;
2. Pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka mendukung pencapaian indicator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029;
3. Adanya upaya peningkatan kinerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis dalam proses pembangunan tersebut sejauh tidak menyimpang dari RPJMD yang telah ditetapkan. Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program perencanaan strategis atau biasa disebut Renstra ditentukan kerjasama yang mendalam oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan program khususnya seluruh Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 ini kami ucapkan terimakasih, seiring dengan hal tersebut kami juga berharap untuk kritik dan sarannya bagi kesempurnaan program ini.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT
2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat 6
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 6
2.1.2 Sumber Daya Inspektorat 11
2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat 14
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan 17
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat 18
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat 18
2.2.2 Isu strategis 19

BAB III TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 24
3.2 Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 25
3.3 Strategi Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 27
3.4 Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 28

BAB IV PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan 30
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 47

BAB V PENUTUP 48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 ASN berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan 15
Tabel 2.2 Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan 15
Tabel 2.3 Komposisi ASN Menurut Gender 15
Tabel 2.4 Tabel Keadaan Alokasi Anggaran 17
Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan..... 17
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2020 - 2024..... 19
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat..... 22
Tabel 2.8 Identifikasi Isu Strategis Inspektorat..... 23
Tabel 3.1 Tujuan Inspektorat 2025-2029 26
Tabel 3.2 Sasaran Inspektorat 2025-2029..... 19
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat, 2025-2029..... 20
Tabel 3.4 Strategi Inspektorat Tahun 2025 - 2029..... 29
Tabel 3.5 Pentahapan Renstra Inspektorat Tahun 2026 - 2030 29
Tabel 3.6 Arah Kebijakan Inspektorat, 2025-2029..... 30
Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 33
Tabel 4.3 Rencana Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Inspektorat Tahun 2025-2030 41
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 47
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama 49
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci..... 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Inspektorat 5
Gambar 1.1 Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen 6
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi 15
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Inspektorat 32

BAB I
PENDAHULUAN

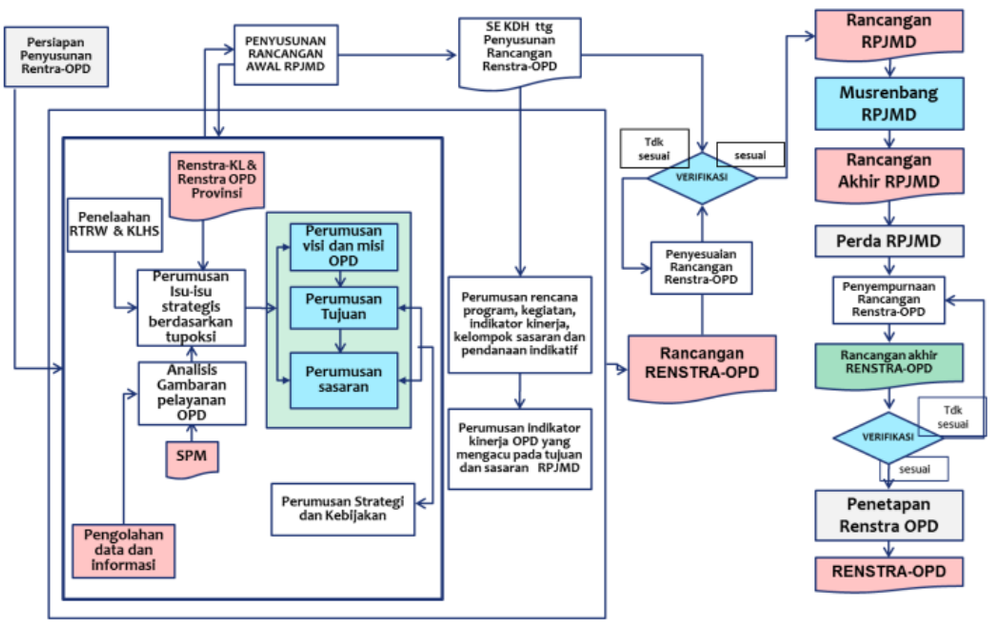
1.1 Latar Belakang

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (*clean government*). Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki tugas penting dalam memastikan setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029 berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dalam rangka mewujudkan pengawasan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kepulauan Mentawai, penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029 menjadi sangat penting. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, dan program kerja Inspektorat Daerah untuk periode lima tahun ke depan, yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025–2029.

Tahapan penyusunan Renstra Inspektorat diawali dengan persiapan penyusunan Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, Penyusunan rancangan akhir Renstra, dan Penetapan Renstra Inspektorat.

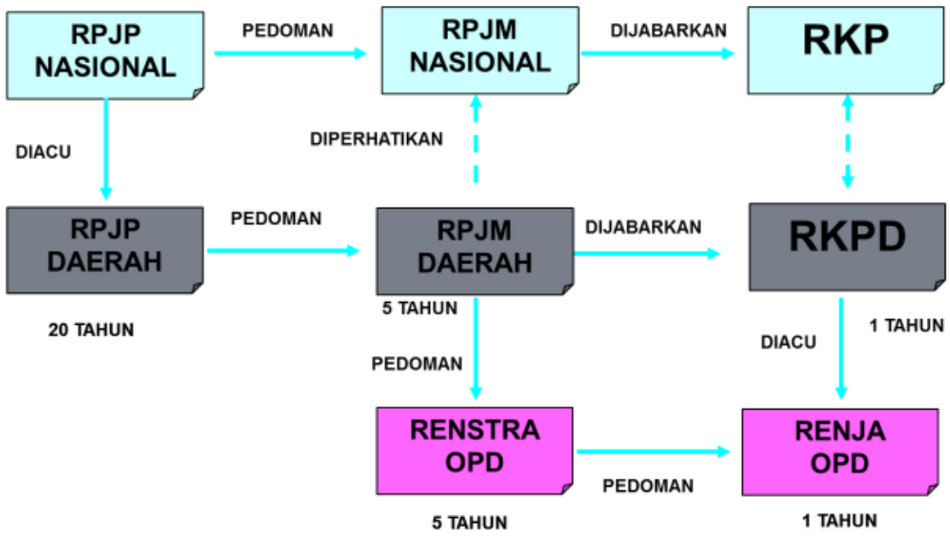


Gambar 1.2 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Inspektorat

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, tak terkecuali rencana strategis perangkat daerah juga merupakan bagian dari sistem perencanaan daerah

dan nasional. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentunya berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi komitmen Inspektorat dan juga sebagai tolok ukur kinerja serta arah kebijakan pembangunan terkait tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat.

Penyusunan Renstra Inspektorat tentunya memperhatikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah, propinsi maupun pusat. Penyelarasan tersebut terkait dengan pelaksanaan tupoksi pelayanan Inspektorat agar lebih efektif dan efisien. Hubungan dan keterkaitan dokumen Rencana Strategis Inspektorat dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat melalui Gambar 1.2.



Gambar 1. 3 Bagan Alir Hubungan Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Inspektorat yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum dalam penyusunan perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonedia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang nomor 59 tahun 2024 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 antara Lain:

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050- 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
b. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Mengatur Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Inspektorat untuk periode 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait perumusan kebijakan pengawasan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Inspektorat.
3. Pedoman dalam fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai penjabaran operasional visi dan misi kepala daerah menyangkut fungsi penunjang pengawasan.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Inspektorat sebagai institusi pengawas dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini merumuskan latar belakang Penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis serta dasar hukum yang relevan dan signifikan dan menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat. Bab ini terdiri atas:

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat

Bab ini berisi penyajian data-data dan informasi terkait pelaksanaan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat disertai evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir, serta mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan yang berkaitan dengan pelayanan Inspektorat dan mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat memengaruhi Inspektorat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Bab ini terdiri atas:

2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat
2.1.2 Sumber Daya Inspektorat
2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat
2.2.1 Permasalah Pelayanan Inspektorat
2.2.2 Isu Strategis
BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan
Bab ini menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya dan mengacu pada Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang dijabarkan secara operasional dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan disertai dengan indikator kinerja dan targetnya yang didukung dengan program prioritas pembangunan daerah, Bab ini terdiri atas:
3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029
3.3 Strategi Inspektorat Tahun 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Inspektorat 2025-2029
BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini memuat Program, Kegiatan, Subkegiatan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya, dan menjelaskan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci berserta Target dan Pagu Indikatif untuk pencapaian 5 (lima) tahun kedepan, Bab ini terdiri atas:
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan
BAB V Penutup
Bab ini menjelaskan kesesuaian antara target kinerja Renstra Inspektorat tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Inspektorat sebagai bagian dari upaya pencapaian sasran pengawasan yang telah direncanakan.
5.1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Inspektorat
5.2 Manajemen Risiko Strategi Inspektorat

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5). Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepulauan Mentawai dengan tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai:

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

b. Fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai:

perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

1. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
2. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
3. penyusunan laporan hasil pengawasan;
4. peleaksanaan koordinasi pencegahan tindak pindana korupsi;
5. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
6. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai:

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur

   Tugas Inspektur yaitu:

   Membantu Bupati memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Sekretariat, terdiri atas:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Program; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu, terdiri dari:
   a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
   b. Inspektur Pembentu Wilayah II;
   c. Inspektur Pembentu Wilayah III;
   d. Inspektur Pembentu Wilayah IV;
   e. Inspektur Pembentu Khusus;
4. Inspektur Pembantu membawahi kelompok jabatan fungsional:
   a. Auditor, dan
   b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)

d. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Inspektorat.

Fungsi Sekretariat antara lain:

a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Inspektorat;
b. Koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan Daerah;
c. Pemberian dukunan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi lingkup Inspektorat;
d. Penataan organisasi dan tata laksanan lingkup Inspektorat;
e. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pembinaan dan pengawasan;
f. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat;
g. Pengeloaan barang milik Daerah lingkup Inspektorat; dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Inspektorat;
b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup Inspektorat;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup Inspektorat;
d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup Inspektorat;
e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Inspektorat;
f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat;
g. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Inspektorat; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup Inspektorat;
b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Inspektorat;
c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Sustansi Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat;
b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat;
c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat; dan
d. Melaksanakan penyiapan bahan layann administrasi pemerintah di bidang pembinaan dan pengawasan Daerah; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu terdiri atas:

Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektu dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai Pembina dan pengawas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan dan pengawasn pengelolaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah sesuai wilayah kerjanya;
b. Pelaskanaan reviu rencana kerja anggaran Inspektorat sesuai wilayah kerjanya;
c. Pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran Inspektorat sesuai wilayah kerjanya;
d. Pelaksanaan reviu laporan keuangan Inspektorat dan Pemerintah Desa sesuai wilayah kerjanya;
e. Pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi pemerinth pada Inspektorat sesuai wilayah kerjanya;
f. Evaluasi system pengendalian internal pada Inspektorat dan Pemerintah Desa sesuai wilayah kerjanya;
g. Penanganan pengaduan Masyarakat dan pemriksaan dengna tujuan tertentu;
h. Pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
i. Pengawalan pencapaian sasaran reformasi birokrasi;
j. Penyusunan standar operasional prosedur bidang pembinaan dan pengawasan;
k. Koordinasi program pembinaan dan pengawasan dngan Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya;
l. Pemeriksaan hibah/bantuan social yang dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya;
m. Pendampingan, asistensi, dan fasilitasi bidang pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya; dan
n. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya

Inspektur Pembantu Wilayah I

Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap

Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Inspektorat;
d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e. Dinas Perikanan;
f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
g. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
h. Kecamatan Pagai Selatan;
i. Kecamatan Sikakap;
j. Kecamatan Pagai Utara;
k. Desa dalam Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Sikakap, dan Kecamatan Pagai Utara.

Inspektur Pembantu Wilayah II

Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut:
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang;
c. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
f. Rumah Sakit Umum Daerah;
g. Kecamatan Sipora Selatan;
h. Kecamatan Sipora Utara; dan
i. Desa dalam Kecamatan Sipora Selatan dan Kecamatan Sipora Utara.

Inspektur Pembantu Wilayah III

Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut:
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Badan Keuangan Daerah;
c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
d. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
e. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
h. Kecamatan Siberut Selatan;
i. Kecamatan Siberut Barat Daya;
j. Kecamatan Siberut Tengah; dan
k. Desa dalam Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Barat Daya, dan Kecamatan Siberut Tengah.

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut:
a. Dinas Kesehatan;
b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

c. Dinas Perhubungan;
d. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Kecamatan Siberut Utara;
h. Kecamatan Siberut Barat; dan
i. Desa dalam Kecamatan Siberut Utara dan Kecamatan Siberut Barat.

Inspektur Pembantu Khusus

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat di bidang pengawasan sewaktu-waktu dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dengan tujuan tertentu;
b. Pengkajian data dan informasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
c. Pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas penanganan pengaduan masyarakat;
d. Pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan dari lembaga lainnya;
e. Pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap pejabat fungsional yang melaksanakan pengawasan pada Inspektur Pembantu Khusus;
g. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
h. Pelaksanaan fungsi lain sesuai degan tugas dan fungsinya;
i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya;
j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di masing-masing wilayah kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(1) Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
(2) Pejabat Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
(3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi, Auditor memiliki wewenang:
    a. Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
    b. Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
    c. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
    d. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan

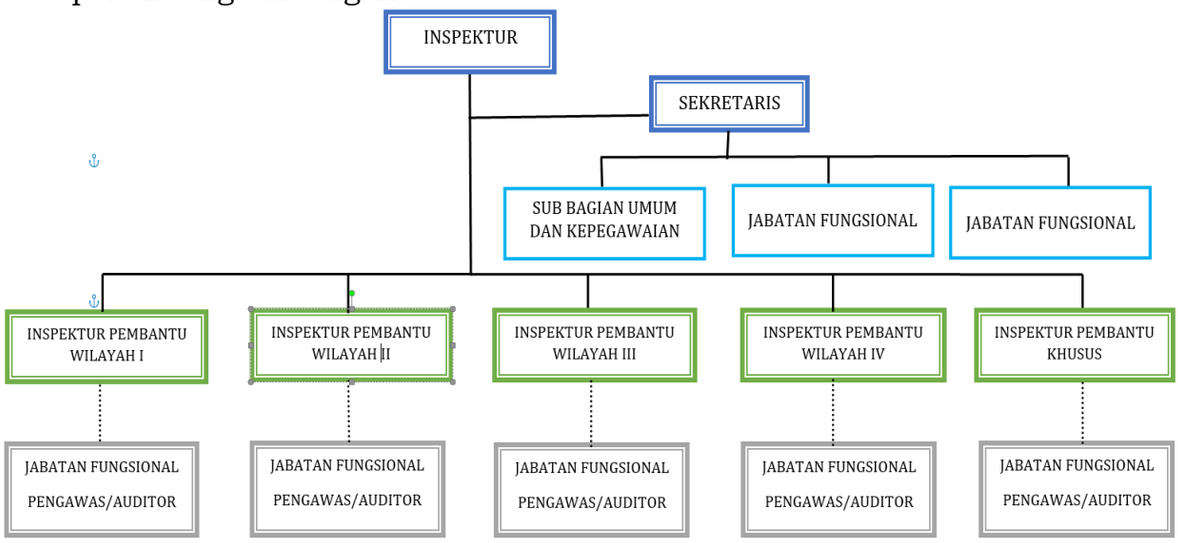
pejabat instansi yang diawasi; dan

e. Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.

(4) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan tenaga fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;

(5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur;

(6) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Kep. Mentawai

2.1.2 Sumber Daya Inspektorat

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Inspektorat Daerah pada tahun 2025 dengan jumlah sebanyak 39 orang (tiga puluh sembilan orang). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai berikut:

Tabel 2.6
ASN berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan Tahun 2025

Jabatan	Golongan/ Ruang	Jumlah
Inspektur	Pembina Tk I, IV/b	1 orang
Sekretaris	-	-
Inspektur Pembantu I, II, III, IV, Khusus	Pembina Tk I, IV/b	1 orang
	Pembina, IV/a	2 orang
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pembina, IV/a	1 orang
Perencana Ahli Muda	Penata Tk. I, III/d	1 orang
Auditor Madya	Pembina, IV/a	2 orang
	Penata Tk. I, III/ d	1 orang
Auditor Muda	Penata Tk. I, III/d	1 orang
	Penata, III/c	2 orang
Auditor Pertama	Penata Muda Tk. I, III/b	4 orang
	Penata Pertama Tk. I, III/a	4 orang
PPUPD Madya	Pembina Tk. I, IV/b	2 orang
PPUPD Muda	Penata Tk. I, III/d	1 orang
PPUPD Pertama	Penata Pertama Tk. I, III/a	3 orang
Fungsional Umum	Penata Tk. I, III/d	1 orang
	Penata Muda, Tk. I, III/b	2 orang
	Penata Muda, III/a	4 orang
	Pengatur Tk. II/ d	2 orang
	Pengatur Muda Tk. I, II/b	1 orang
P3K	IX	1 orang
	V	2 orang
TOTAL		39 orang

Sumber: Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

Tabel 2.7
Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1.	S2	10 Orang
2.	S1	23 Orang
3.	D3	1 Orang
4.	SMA/SMK	5 Orang
	Jumlah	39 Orang

Sumber: Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

Tabel 2.8
Komposisi ASN Menurut Gender Tahun 2025

No.	Perempuan	Laki	Jumlah Personil
1.	17 orang	22 orang	39 Orang

Sumber: Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Tahun 2025, diolah

Menurut rekomendasi BPKP Nomor S-858/K/JF/2020 tanggal 10 Juni 2020 Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebanyak 40 (empat puluh), sedangkan pemenuhan Jabatan Fungsional Auditor sesuai Bezetting pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya terdapat 14 (empat belas) sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 26 (dua puluh enam). Sementara untuk jabatan PPUPD sesuai rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor B/690/M.DM.01.00/2025 tanggal 15 Februari 2025 kebutuhan jabatan fungsional PPUPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 15 (lima belas) sedangkan pemenuhan jabatan fungsional PPUPD hanya terdapat 6 (enam) orang sehingga terdapat selisih kurang 9 (sembilan) orang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai rencana yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai seharusnya didukung dengan anggaran yang memadai. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dan total belanja daerah. Untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan anggaran belanja daerah di atas Rp 1.037.684.888.525 (satu triliun tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) maka anggaran pengawasan diluar gaji dan tunjangan harus dialokasikan sebesar 1% dengan besaran Rp10.376.848.885,25 (Sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah koma dua puluh lima).Namun pada kenyataannya, pagu anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebesar Rp9.899.660.137 termasuk gaji dan tunjangan. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2025, total APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebesar Rp850.132.397.454. dengan pengalokasian 1% sejumlah Rp8.501.323.974,54. Namun pada kenyataannya, pagu anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebesar Rp.8.752.990.351 termasuk gaji dan tunjangan, hal ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2026 pagu anggaran pengawasan telah ditetapkan sebesar Rp6.966.237.819,00 sehingga alokasi anggaran tahun 2026. Selain

belum tercukupinya jumlah SDM Auditor, PPUPD dan anggaran pengawasan, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pengawasan, tentunya didukung dengan anggaran yang Renstra Inspektorat Daerah 2025-2029. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) alokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp14.634.069.380,00. Pada tahun 2021 penurunan ini disebabkan adanya dampak Covid-19 yang terjadi di Indonesia sehingga anggaran lebih diutamakan untuk pemenuhan kesehatan. Realisasi belanja daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan trens yang fluktuatif, pada tahun 2020 dan 2024. Pada Tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp.4.899.714.580,00,- atau 33,47 persen, Tahun 2021 realisasi anggaran sebesar Rp.8.479.975.000,00,- atau 91.47 persen, Realisasi anggaran pada Tahun 2022 sebesar Rp.8.618.362.745,00 atau 95,27 persen, Realisasi Anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp.8.659.566.831.00 atau 93,92 persen, dan Realisasi anggran pada tahun 2024 sebesar Rp.9.488.948.747,00 atau 95,85 persen. Detail anggaran dan realisasi dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.9
Tabel Keadaan Alokasi Anggaran Inspektorat 2020-2024

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2020	14.634.069.380,00	4.899.714.580,00	33,47%
2	2021	9.270.201.358,00	8.479.975.000,00	91.47%
3	2022	9.045.798.800,00	8.618.362.745,00	95,27%
4	2023	9.220.462.404,00	8.659.566.831.00	93,92%
5	2024	9.899.660.137,00	9.488.948.747,00	95,85%

Sumber: LAKIP Inspektorat Daerah, 2020-2024

Utamanya dalam hal kebutuhan terhadap gedung kantor, dengan bertambahnya aparatur yang diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor maupun PPUPD, maka diperlukan pula gedung kantor dengan luasan (daya pendukungnya dan daya tampung) yang memadai beserta Saat ini status pencatatan segala fasilitas aset tanah serta gedung/bangunan Inspektorat Daerah. Berikut sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai:

Tabel 2.10
Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Tahun 2024

No.	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1	Sepeda Motor	Honda/Supra X 125 cc BA 2847 U	Baik
2	Sepeda Motor	Honda/ GL 15A1D M/T 150 cc BA 2980 U	Baik
3	Sepeda Motor	Honda New / NC12AF2CBI A/T 125 CC BA 2972 U	Baik
4	Sepeda Motor	Honda New / Vario Techno BA 2973 U	Baik
5	Sepeda Motor	HONDA / NC12AF2CBI A/T BA 2978 U	Baik
6	Sepeda Motor	Honda / Vario 110 CC BA 3221 U	Baik
7	Sepeda Motor	Honda / Vario BA 3222 U	Baik
8	Lap Top	Asus / Core i7	Baik
9	Lap Top	Asus / Core i7	Baik
10	Lap Top	Asus / Core i7	Baik
11	Lap Top	Asus / Core i7	Baik

No.	Nama Barang	Spesifikasi Nama Barang	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
12	Lap Top	accer / ASER ASPIRE E 14/E5-473G	Baik
13	Lap Top	accer / ASER ASPIRE E 14/E5-473G	Baik
14	Lap Top	ASUS Y1411CDA- BV5812TS	Baik
15	Lap Top	ASUS Y1411CDA- BV5812TS	Baik
16	Lap Top	HP 14s-fq1005AU	Baik
17	Lap Top	HP 14s-fq1005AU	Baik
18	Lap Top	HP 14s-fq1005AU	Baik
19	Lap Top	Apple Mac Air M2	Baik
20	Lap Top	Lenovo Ideapad Slim 3 15 Core i5	Baik
21	Lap Top	ASUS	Baik
22	Lap Top	HP Pavilion Aero / 13-be2001AU	Baik
23	Lap Top	HP Pavilion Aero / 13-be2001AU	Baik
24	Lap Top	HP Pavilion Aero / 13-be2001AU	Baik
25	Lap Top	HP Pavilion Aero / 13-be2001AU	Baik
26	Lap Top	HP Pavilion Aero / 13-be2001AU	Baik
27	Lap Top	HP Pavilion Aero / 13-be2001AU	Baik
28	honda / win		RUSAK BERAT
29	honda/ kharisma		RUSAK BERAT
30	honda/ kharisma		RUSAK BERAT
31	HONDA / SUPRA X	125	RUSAK BERAT
32	Kawasaki	150 Cc	RUSAK BERAT
33	Honda/Supra X	125 Cc	RUSAK BERAT
34	Honda / GL 200 R	200CC	RUSAK BERAT
35	Note Book	Toshiba / Satelite L735	RUSAK BERAT
36	Note Book	Toshiba / Satelite L735	RUSAK BERAT
37	Lap Top	Asus / Core i7	RUSAK BERAT
38	Lap Top	Asus / Core i7	RUSAK BERAT
39	Lap Top	accer / ASER ASPIRE E 14/E5-473G	RUSAK BERAT
40	Lap Top	accer / ASER ASPIRE E 14/E5-473G	RUSAK BERAT
41	Lap Top	Aser / AP AN 515-52-7762	RUSAK BERAT
42	Lap Top	ASUS Y1411CDA- BV5812TS	RUSAK BERAT
43	Lap Top	Lenovo / Intel@ Core I7	RUSAK BERAT

2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat DaerahKabupaten Kepulauan Mentawai merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses pengawasan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi Inspektur untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan data Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020–2022, terlihat bahwa capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Level SPIP Pemda berada pada kisaran 2,7 hingga 2,8, masih sedikit di bawah target 3. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan status selesai juga belum mencapai target, yaitu hanya 79,33% pada 2020, 77,76% pada 2021, dan 76,80% pada 2022.

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	satuan	2020		2021		2022		2023		2024	
			target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	Level SPIP Pemda	Numerik	2.8	2.7	3	2.7	3	2.7	0	0	0	0
2	Presentase rekomendasi yang ditindaklanjut dengan status selesai	%	81	79.33	85	77.76	85	76.80	0	0	0	0
3	Presentase kepatuhan pelaporan LHKPN	%	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
4	OPINI BPK terhadap LKPD	opini	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Level kapabilitas	numerik	3	2.2	3	3 DC	3	2.2	0	0	0	0
6	Presentase APIP yang mengikuti diklat	%	80	0	65.51	65.51	82.57	61.11				
7	Jumlah OPD yang memperoleh kategori nilai WBK/WBBM	OPD	2	0	2	0	4	0	2	0	3	0
8	Persentase tertanganinya DUMAS	%	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
	Maturitas SPIP	Level	0	0	0	0	0	0	3	2.91	3	3
	Persentase Tindak lanjut temuan	Persentase	0	0	0	0	0	0	80	76.80	85	71.63
	Kapabilitas APIP	Level	0	0	0	0	0	0	3	2.70	3	3
	Nilai SAKIP	Nilai		0	0	0	0	0	B	BB	B	B
	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP	Persentase	0	0	0	0	0	0	85	88.57	86	100

Sumber: LAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2020-2024

Berdasarkan data capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020, terlihat bahwa sebagian besar indikator kinerja telah menunjukkan hasil yang baik meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Level SPIP Pemerintah Daerah berada pada angka 2,8 dari target 3, yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah telah berjalan cukup baik. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti mencapai 79,33% dari target 81%, mencerminkan komitmen terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tercapai 100%, sesuai target, sementara opini BPK terhadap LKPD memperoleh WTP. Level kapabilitas APIP berada pada level 3 dengan capaian 2,2, sedangkan persentase APIP yang mengikuti diklat mencapai 80% sesuai target. Selain itu, satuan kerja perangkat daerah (OPD) yang memperoleh predikat WBK/WBBM belum ada, dan seluruh pengaduan masyarakat (DUMAS) berhasil ditangani 100%. Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2020 menunjukkan arah positif meski masih diperlukan peningkatan dalam penguatan kapabilitas APIP dan peningkatan level SPIP daerah.

Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dan penanganan DUMAS konsisten mencapai 100% pada seluruh periode. Opini BPK terhadap LKPD menunjukkan peningkatan, dari WDP pada 2020 dan 2021 menjadi WTP pada 2022. Sementara itu, level kapabilitas APIP masih di bawah target, berada pada kisaran 2,2 hingga 3 DC. Persentase APIP yang mengikuti diklat juga fluktuatif, bahkan sempat 0% di 2020, kemudian naik menjadi 65,51% di 2021, namun turun lagi menjadi 61,11% di 2022. Jumlah OPD yang memperoleh kategori nilai WBK/WBBM belum menunjukkan capaian, meskipun target terus ditetapkan. Secara umum, capaian IKU Inspektorat menunjukkan konsistensi pada aspek kepatuhan dan opini keuangan, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal tindak lanjut rekomendasi, penguatan SPIP, serta peningkatan kapabilitas APIP.

Berdasarkan data Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2023–2024, capaian kinerja menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target. Pada aspek Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, target level 3 berhasil tercapai pada tahun 2024 setelah sebelumnya realisasi masih di bawah target pada tahun 2023. Opini BPK konsisten memperoleh predikat WTP pada kedua tahun, mencerminkan kualitas laporan keuangan daerah yang andal. Namun demikian, indikator WBK/WBBM belum mencapai target karena realisasi masih nihil pada 2023 maupun 2024. Untuk Nilai SAKIP, capaian relatif stabil dengan nilai BB pada 2023 dan B pada 2024. Dari sisi persentase tindak lanjut temuan, capaian masih berada di bawah target, yakni 76,80% di 2023 dan menurun menjadi 71,63% di 2024. Sementara itu, indikator persentase OPD yang telah menerapkan SPIP menunjukkan capaian melampaui target, yaitu 88,57% pada 2023 dan meningkat signifikan menjadi 100% di 2024. Secara keseluruhan, kinerja Inspektorat menunjukkan konsistensi dalam penguatan akuntabilitas dan pengawasan, meskipun perlu peningkatan signifikan pada aspek tindak lanjut temuan dan pencapaian.

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2021–2022, terlihat bahwa program penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan kebijakan, pendampingan, serta asistensi telah dilaksanakan dengan capaian yang bervariasi. Pada program penyelenggaraan pengawasan, realisasi anggaran tahun 2021 mencapai Rp3,379,702,500 dan pada 2022 sebesar Rp3,126,289,900, dengan tren capaian kinerja yang meningkat dari level 2,6 menjadi level 2,7. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal

menunjukkan capaian yang baik, dengan realisasi mencapai 96% pada 2022. Sementara itu, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu juga meningkat meski realisasi masih berada pada kisaran 84%. Untuk program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi, terdapat perkembangan positif pada aspek kepatuhan dan kualitas dokumen, di mana realisasi anggaran mencapai Rp9,347,764,039 pada 2021 dan Rp816,450,039 pada 2022. Beberapa kegiatan seperti perumusan kebijakan teknis dan pendampingan juga menunjukkan tren peningkatan efektivitas, meskipun capaian persentase masih perlu diperkuat agar target Renstra dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2023–2024, dapat dilihat bahwa pelaksanaan program penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan kebijakan, pendampingan, serta asistensi menunjukkan capaian yang cukup baik meskipun dengan fluktuasi realisasi anggaran. Program penyelenggaraan pengawasan pada 2023 terealisasi sebesar Rp2.334.575.127 dengan capaian level 2 (79%), kemudian meningkat pada 2024 dengan capaian level 3 (75%) senilai Rp2.171.939.528. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal menunjukkan hasil sangat baik dengan realisasi mencapai 93% di 2023 dan meningkat hingga 99% di 2024. Sementara itu, pengawasan dengan tujuan tertentu juga mengalami peningkatan dari 91% pada 2023 menjadi 96% pada 2024. Pada program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi, capaian tetap konsisten dengan opini WTP serta keterlibatan 3 OPD, dengan realisasi Rp340.990.200 pada 2023 dan Rp309.747.672 pada 2024. Rincian kegiatan menunjukkan perumusan kebijakan teknis mencapai 82% pada 2023 dan meningkat menjadi 98% di 2024, sedangkan pendampingan dan asistensi stabil dengan capaian 90% di kedua tahun. Secara umum, capaian kinerja Inspektorat memperlihatkan tren positif dalam penguatan kapabilitas pengawasan serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern pemerintah, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan kelompok sasaran pelayanan sebagai pihak-pihak yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat. Kelompok sasaran ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi pelayanan dan arah kebijakan pengawasan. Adapun kelompok sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (OPD)
   Merupakan sasaran utama pengawasan intern. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan mitra strategis Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Melalui pengawasan ini, Inspektorat memberikan rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   Sebagai pengambil kebijakan tertinggi di daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi pengguna utama hasil pengawasan. Informasi dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan Inspektorat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis, pembinaan terhadap perangkat daerah, dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
3. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
   DPRD memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat mendukung tugas

DPRD dengan menyajikan data, informasi, dan hasil pengawasan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan daerah.

4.Aparatur Sipil Negara (ASN)

ASN merupakan subjek pembinaan yang menjadi bagian penting dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Inspektorat Daerah menjalankan fungsi pembinaan melalui sosialisasi anti korupsi, peningkatan pemahaman terhadap kode etik, serta penanganan pengaduan masyarakat yang terkait dengan pelanggaran disiplin ASN.

5.Masyarakat Umum

Sebagai penerima manfaat akhir dari terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih, masyarakat juga merupakan kelompok sasaran pelayanan Inspektorat. Melalui mekanisme pengaduan masyarakat dan keterbukaan informasi, Inspektorat Daerah mendorong peran serta publik dalam pengawasan pembangunan dan pelayanan publik, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah.

6.Aparat Penegak Hukum (APH)

Dalam upaya menjaga akuntabilitas dan penegakan hukum, Inspektorat Daerah bersinergi dengan instansi penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK. Kolaborasi ini dilakukan terutama dalam hal koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang memiliki indikasi kerugian negara atau dugaan tindak pidana.

7.BPK dan BPKP

Sebagai mitra pengawasan eksternal dan pengawasan intern pemerintah pusat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi pihak yang relevan dalam sinkronisasi kegiatan pengawasan. Inspektorat Daerah mendukung pelaksanaan audit dan reviu yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut melalui penyediaan data dan hasil pengawasan intern.

8.Lembaga Pengawas Lainnya

Termasuk di dalamnya Ombudsman, Komisi Informasi, serta lembaga lain yang memiliki mandat pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan publik dan akuntabilitas pemerintahan. Inspektorat Daerah berperan aktif dalam menindaklanjuti laporan dari lembaga tersebut sebagai bagian dari komitmen terhadap pelayanan publik yang berintegritas.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai selaku APIP, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi factor penghambat pelaksanaan fungsi inspektorat secara optimal sebagaimana dapat dipetakan dalam table dibawah ini.

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam memperbaiki tata kelola, pengelolaan risiko, pengendalian intern, atas program strategis pemerintah daerah, kemampuan mencegah serta mendeteksi terjadinya	Belum terpenuhinya kecukupan jumlah dan kompetensi SDM APIP	Masih terbatasnya jumlah JF P2UPD dan JFA serta pengembangan kompetensi SDM berhubungan dengan penganggaran Pemerintah Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	penyimpangan/*fraud*/audit		
		Penerapan Manajemen Risiko belum berlangsung efektif baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun pada tingkat Perangkat Daerah	Regulasi daerah terkait penerapan Manajemen Risiko belum disusun/disahkan serta aturan teknis pelaksanaan Manajemen Risiko belum ada di Perangkat Daerah
			Struktur Manajemen Risiko belum dibentuk secara memadai di Pemerintah Daerah maupun di tingkat Perangkat Daerah
			Pemahaman dan kesadaran SDM pada Pemerintah Daerah terhadap penerapan Manajemen Risiko masih rendah dan belum menjadi budaya di Perangkat Daerah
		Pelaksanaan program pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi belum optimal	Perlunya penguatan Irban khusus yang memiliki fungsi pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi
			Implementasi kerja sama APIP–APH dalam rangka pencegahan korupsi masih belum optimal
		Hasil pengawasan belum bersifat strategis bagi pimpinan daerah untuk mengambil keputusan	Jumlah dan kompetensi SDM belum sebanding dengan beban kerja pengawasan

2.2.2 Isu strategis

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan fungsi Inspektorat Daerah selaku APIP sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dengan memperhatikan potensi permasalahan yang dapat terjadi dan khususnya berpedoman pada isu strategis daerah yaitu transformasi tata kelola pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagaimana terurai dalam tabel di bawah.

Tabel 2.8
Identifikasi Isu Strategis Inspektorat

No	Permasalahan/Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan Internal	Faktor Penentu Keberhasilan Eksternal
1	Belum optimalnya pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dalam memperbaiki tata kelola,	Penguatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Penguatan kapabilitas APIP	Penguatan independensi APIP melalui IAC dan meningkatkan kolaborasi dengan

No	Permasalahan/Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan Internal	Faktor Penentu Keberhasilan Eksternal
	pengelolaan risiko, pengendalian intern atas program strategis pemerintah daerah, kemampuan mencegah serta mendeteksi terjadinya penyimpangan/*fraud*			BPKP, BPK, Irjen Kemendagri, Inspektorat Provinsi, APH serta instansi pengawas lainnya
2	Penerapan Manajemen Risiko tidak didukung dengan regulasi yang memadai	Penguatan aspek legal/regulatif terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah	Sinergitas APIP dalam merumuskan kebijakan teknis dan regulasi terkait penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah yang diimplementasikan secara efektif dan konsisten di seluruh Perangkat Daerah	Kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kebijakan teknis penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Daerah, meliputi: BPKP, Irjen Kemendagri, Pemerintah Provinsi Jatim, serta dukungan dari Biro Hukum Setda, Bappeda, dan Perangkat Daerah terkait
3	Penerapan Manajemen Risiko tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai	Penguatan aspek kelembagaan terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah	Penguatan peran dan kelembagaan APIP dalam penerapan Manajemen Risiko di lingkup Pemerintah Daerah, baik dari aspek kelembagaan, struktur organisasi, maupun dukungan sarana dan prasarana	Respon top manajemen dalam mendukung penguatan kelembagaan dan infrastruktur penerapan Manajemen Risiko
4	Penerapan Manajemen Risiko tidak didukung dengan SDM yang memadai	Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam penerapan Manajemen Risiko di lingkungan pemerintah daerah	Kapabilitas APIP dalam penerapan Manajemen Risiko, termasuk dalam melakukan pendampingan/ asistensi kepada perangkat daerah	Kesadaran dan kepatuhan unsur manajemen daerah dalam penerapan Manajemen Risiko
5	Unit kerja pelaksana fungsi pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi baru terbentuk	Penguatan kapasitas Irban Khusus (Pencegahan Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Kompetensi dan kapabilitas personil Irban Khusus (Pencegahan Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi	Respons top management dan perangkat daerah dalam menyikapi dan mengoptimalkan keberadaan Irban Khusus

No	Permasalahan/Potensi	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan Internal	Faktor Penentu Keberhasilan Eksternal
			Birokrasi) dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi	(Pencegahan Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)
6	Kolaborasi dan sinergitas APIP-APH dalam rangka pencegahan korupsi masih ditingkatkan	Penguatan kolaborasi dan sinergitas APIP-APH	Kompetensi APIP dalam memahami dan menjalin kerja sama dengan APH dalam penanganan pencegahan korupsi	Respons dan komunikasi APH dalam rangka pencegahan korupsi
7	Belum terpenuhinya kecukupan jumlah dan kompetensi SDM APIP	Pemenuhan kecukupan jumlah dan kompetensi SDM APIP	Kompetensi dan kapabilitas SDM APIP dalam pelaksanaan tugas pengawasan (baik dari sisi jumlah maupun kualitas)	Pengangkatan ASN melalui rekrutmen PPPK maupun CPNS/PPPK yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi K/L/D/I

Tabel 2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD (Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026)

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Potensi penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi di seluruh perangkat daerah	Belum optimalnya pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dalam memperbaiki tata kelola, pengelolaan risiko, pengendalian intern atas program strategis pemerintah daerah, serta kemampuan mencegah dan mendeteksi penyimpangan/fraud	Tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan	Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang meningkat secara global.	Implementasi SPIP Terintegrasi dan Reformasi Birokrasi Tematik dari KemenPAN-RB.	Penguatan pengawasan daerah di lingkup Sumatera Barat untuk mewujudkan good governance.	Penguatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Potensi penerapan manajemen risiko dalam seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program daerah	Penerapan Manajemen Risiko tidak didukung dengan regulasi yang memadai	Pengelolaan risiko pembangunan daerah secara berkelanjutan	Adaptasi terhadap standar manajemen risiko internasional (ISO 31000)	Kebijakan nasional SPIP berbasis risiko oleh BPKP	Peraturan Gubernur tentang pedoman SPIP di Sumatera Barat.	Penguatan aspek legal/regulatif terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah
Potensi kelembagaan APIP yang kuat dan berdaya dukung terhadap efektivitas pengawasan	Penerapan Manajemen Risiko tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai	Penguatan tata kelola kelembagaan untuk efisiensi dan efektivitas pengawasan	Digitalisasi sistem pengawasan publik.	Transformasi digital SPIP dan e-audit di pemerintahan.	Keterbatasan infrastruktur pengawasan berbasis teknologi di daerah kepulauan.	Penguatan aspek kelembagaan terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah
Potensi peningkatan kapasitas SDM Inspektorat dalam bidang audit, reviu, dan evaluasi kinerja	Penerapan Manajemen Risiko tidak didukung dengan SDM yang memadai	Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengawas pemerintahan	Kompetensi SDM pengawasan mengikuti standar internasional (IIA, COSO)	Peningkatan level kapabilitas APIP sesuai PermenPANRB No. 5/2023.	Terbatasnya jumlah auditor bersertifikat di wilayah kabupaten kepulauan.	Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam penerapan Manajemen Risiko di lingkungan pemerintah daerah
Potensi terbentuknya unit kerja khusus untuk pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi	Unit kerja pelaksana fungsi pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi baru terbentuk	Pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan	Gerakan antikorupsi dan good governance.	Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	Sinergi antarkabupaten dalam program reformasi birokrasi tematik di Sumatera	Penguatan kapasitas Irban Khusus (Pencegahan Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
		bersih			Barat.	
Potensi kemitraan dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam pencegahan korupsi	Kolaborasi dan sinergitas APIP-APH dalam rangka pencegahan korupsi masih perlu ditingkatkan	Pencegahan korupsi melalui sinergi kelembagaan	Tren kolaborasi multi-lembaga dalam penegakan integritas publik.	Implementasi MoU APIP-APH tentang koordinasi pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat.	Koordinasi pengawasan lintas kabupaten/kota di wilayah kepulauan Sumatera Barat.	Penguatan kolaborasi dan sinergitas APIP-APH
Potensi pengembangan kompetensi aparatur pengawas internal daerah	Belum terpenuhinya kecukupan jumlah dan kompetensi SDM APIP	Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan untuk pelayanan publik berintegritas	Tuntutan profesionalisme dan sertifikasi auditor publik	Program peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	Keterbatasan rekrutmen dan pelatihan SDM di wilayah kepulauan	Pemenuhan kecukupan jumlah dan kompetensi SDM APIP

BAB III
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan Renstra Inspektorat. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Langkah – langkah perumusan tujuan dan sasaran adalah :

a. merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah dan wakil kepala daerah;
b. Menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Dalam hal pernyataan tujuan belum sepenuhnya memecahkan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah maka pernyataan tujuan perlu disempurnakan;
c. merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan;
d. merumuskan dan menyelaraskan indikator tujuan dan sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pada RPJMD;

3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan srategis Inspektorat antara lain sebagai berikut:

a. diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan;
b. untuk mewujudkan misi pembangunan daerah yang dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
c. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
d. dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
e. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Berangkat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah selaku APIP, memperhatikan permasalahan yang terpetakan dan isu-isu strategis yang dirumuskan, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan Inspektorat, 2025-2029

TUJUAN INSPEKTORAT	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	4

3.2 Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Inspektorat. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
b. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
c. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
d. Memenuhi kriteria SMART-C.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve* (SMART-C).

Tabel 3.2
Sasaran Inspektorat, 2025-2029

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan pemerintahan	Indeks persepsi anti korupsi	Indeks	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	4
	Indeks Manajemen Resiko (MRI)	Indeks	82,82	82,98	83,02	83,14	83,27	85,85
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0
Meningkatnya Kinerja Inspektorat	Nilai SAKIP	Nilai	76	79	79,5	79,6	79,7	79,8
	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi
	Capaian kinerja perangkat daerah	Persen	75%	80%	82%	83%	85%	86%

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029, disusun sebagai satu kesatuan pada pencapaian visi dan misi kepala daerah dan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan. Tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja Renstra Inspektorat Daerah disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Strategis
Inspektorat Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	*Baseline* 2024	Target Tahun				
						2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang inklusif, andal, transparan dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Nilai	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	4
		Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan pemerintahan	Indeks persepsi anti korupsi	Indeks	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	4
			Indeks Manajemen Resiko (MRI)	Indeks	82,82	82,98	83,02	83,14	83,27	85,85
			Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	Nilai	76	79	79,5	79,6	79,7	79,8
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi
			Capaian kinerja perangkat daerah	Persen	75%	80%	82%	83%	85%	86%

3.3 Strategi Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Inspektorat adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat serta selaras dengan RPJMD. Strategi yang baik melibatkan koordinasi tim kerja, menggunakan faktor pendukung, memanfaatkan peluang dan mengantisipasi hambatan yang mungkin dihadapi agar gagasan terlaksana secara rasional, efisien dalam pendanaan dan mencapai tujuan secara efektif.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 fokus pada peningkatan kualitas fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mendukung misi ke 8 (delapan) pada RPJMD Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 yaitu Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Tepercaya.

Tabel 3.4
Strategi Inspektorat Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan pemerintahan	1. Membangun dan memantapkan penerapan Manajemen Risiko pada tingkat Pemerintah Daerah dan pada tingkat Inspektorat 2. Optimalisasi pelaksanaan pengawasan berbasis risiko 3. Penguatan Independensi Inspektorat dalam melakukan pengawasan melalui Internal Audit Charter (Piagam Pengawasan Intern) 4. Meningkatkan upaya pencegahan korupsi, penegakan integritas dan reformasi birokrasi 5. Peningkatan Kompetensi SDM APIP 6. Peningkatan Sarana Prasarana penunjang pengawasan

Pentahapan pencapaian Renstra Inspektorat dirumuskan sebagai prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat. Penahapan rencana strategis perangkat daerah dilaksanakan agar menjadi fokus perencanaan perangkat daerah mengarah pada prioritas pembangunan setiap tahunnya. Prioritas pembangunan pada perangkat daerah merupakan tema atau agenda pembangunan perangkat daerah tahunan yang menjadi benang merah capaian antara menuju tujuan dan sasaran 5 (lima) tahunan dalam renstra perangkat daerah melalui rencana program perangkat daerah tahunan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 3.5
Penahapan Renstra Inspektorat Tahun 2026-2030

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
Konsolidasi & Penguatan	Penerapan Sistematis SPIP Terintegrasi	Penguatan Fungsi Konsultatif dan Mitigasi Risiko	Integrasi Tata Kelola dan Evaluasi Kinerja	Evaluasi dan Konsolidasi Strategi Baru Evaluasi capaian roadmap kapabilitas APIP & maturitas SPIP

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
Identifikasi *gap* kapabilitas dan maturitas SPIP	Implementasi pengawasan berbasis risiko di seluruh perangkat daerah	Pelaksanaan pengawasan tematik dan lintas sektor	Audit kinerja atas program prioritas daerah	Penyusunan laporan kinerja pengawasan 5 tahunan
Penyusunan Roadmap Peningkatan Kapabilitas APIP	Pembinaan manajemen risiko dan penguatan SPIP level OPD	Asistensi manajemen risiko oleh OPD	Evaluasi SPIP Terintegrasi	Rekomendasi untuk roadmap pembinaan APIP selanjutnya
Peningkatan kapasitas SDM: pelatihan, sertifikasi auditor, *coaching* dengan BPKP	Reviu pengendalian internal dan kinerja perangkat daerah prioritas	Peningkatan pengawasan atas proyek strategis daerah	Penguatan pemantauan hasil pengawasan untuk pengambilan kebijakan	Integrasi hasil evaluasi dalam Renstra dan RPJMD baru
Penerapan pengawasan berbasis risiko secara konsisten	Pengembangan SOP dan alat kerja pengawasan standar	Integrasi pengawasan intern dalam siklus manajemen kinerja dan anggaran		

3.4 Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat adalah pedoman dan strategi utama yang dirumuskan Inspektorat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD, menyajikan langkah konkret dan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi daerah tersebut. Arah kebijakan ini menjelaskan bagaimana perangkat daerah akan mengimplementasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam periode 5 tahun. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah berperan sebagai peta jalan yang mengarahkan perangkat daerah untuk fokus pada prioritas pembangunan, mengelola sumber daya secara efektif, dan mencapai target kinerja sesuai dengan mandat RPJMD dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.6
Arah Kebijakan Inspektorat Tahun 2025-2029

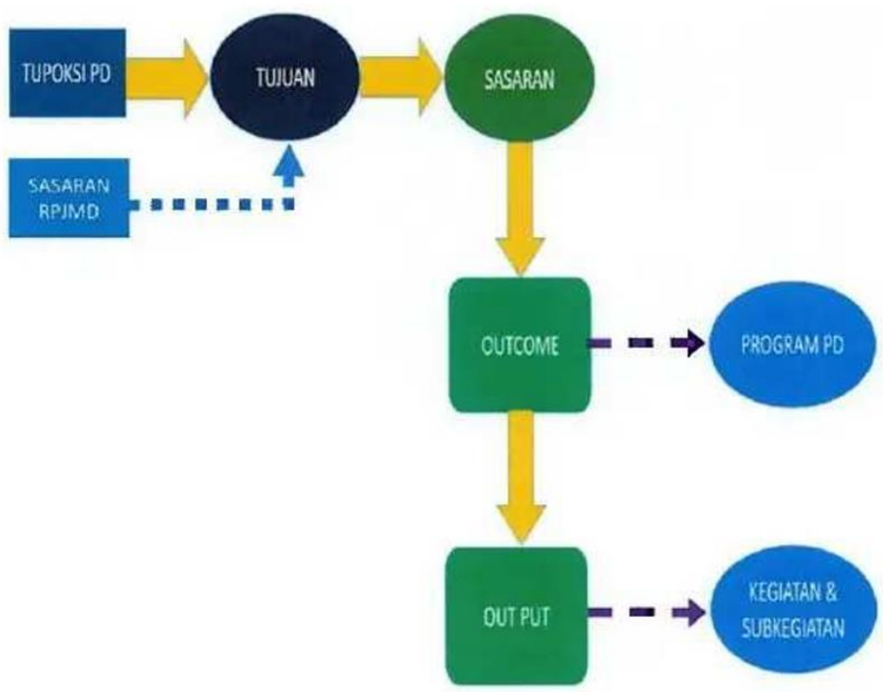
No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD (Inspektorat)	Ket.
1	Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 Terintegrasi	Penguatan integritas dan pencegahan korupsi	Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi APIP dalam pelaksanaan pengawasan berbasis risiko	Selaras dengan NSPK BPKP dan kebijakan nasional pengawasan
2	Penguatan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif	Mendorong penerapan SPIP Terintegrasi di seluruh perangkat daerah	
3	Peningkatan Efektivitas Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dana Desa	Penguatan akuntabilitas dan transparansi keuangan public	Meningkatkan efektivitas pengawasan APBDes dan APBD untuk mencegah penyimpangan	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD (Inspektorat)	Ket.
4	Optimalisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekomendasi pengawasan	
5	Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan dan Pelaporan	Keberlanjutan dan penguatan digitalisasi pemerintahan	Mewujudkan sistem pengawasan berbasis elektronik (e-audit, e-SPIP, e-tindak lanjut)	
6	Penguatan Budaya Integritas ASN	Pencegahan korupsi dan peningkatan integritas aparatur	Membangun budaya kerja berintegritas melalui edukasi, teladan pimpinan, dan pengawasan internal	

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahap penyusunan program dan kegiatan Inspektorat serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Renstra Inspektorat Daerah

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renstra Inspektorat merupakan rincian dari tujuan dan sasaran strategis, yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan berfungsi sebagai panduan selama 5 tahun untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat serta dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Program dan sub kegiatan tersebut memuat deskripsi, indikator kinerja, lokasi, dan pagu anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan perwujudan dari berbagai strategi dan langkah operasional dalam rangka pencapaian setiap tujuan. Program yang disusun dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah, antara lain:

Tabel 4.2
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam pengelenggaraan pemerintahan				Maturitas penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah (SPIP)	
		Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah		Indeks persepsi anti korupsi	
					Manajemen Resiko Indeks (MRI)	
					Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai Sakip Inspektorat	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Meningkatnya kualistas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	Penyelenggaraan pengawasan internal
				Terlaksananya pengawasan kinerja	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				pemerintah daerah	pemerintahan daerah	
				Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
				Terlaksananya Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan
				Terlaksananya Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja
				Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Pengawasan Desa
				Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Kerjasama Pengawasan Internal
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitroring dan Evaluasi Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP
				Meningkatnya kualitas Pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase penyelesaian kerugian keuangan daerah dan penanganan pengaduan masyarakat	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
				Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
				Terlaksananya	Jumlah Laporan	Pengawasan dengan

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tujuan Tertentu
			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan asistensi		1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) 2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
				Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Persentase Kebijakan Teknis dibidang pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang ditetapkan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
				Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
				Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
				Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	Pendampingan dan Asistensi
				Terlaksananya Pendampingan,	Jumlah Perangkat Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Asistensi, Urusan Pemerintah Daerah	yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
				Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
				Terlasannaya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verfikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
			Meningkatnya kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah		Persentase Kepatuhan Penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
				Terlaksananya Perencanaan dan Pelaporan yang disusun Perangkat	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun Perangkat	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Daerah	Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaraanya Administrasi Keuangan tepat waktu dan sesuai strandar	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai standar	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai standar	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daeraha yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai standar	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Terlakasananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Tepat Waktu sesuai standar	yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai standar	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Pengadaan BMD Urusan Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kendaraan Dinas Jabatan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang dibayar tepat waktu sesuai standar	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terselenggaranya Pemerliharaan BMD	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabiliasi Gedung Kantor dan Bangunna Lainnya

Tabel 4.3
Rencana Program dan Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan
Inspektorat Daerah Tahun 2025-2030

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Program Penyelenggaraan Pengawasan		Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	71,63%	75,00%	636.312.343	78,00%	621.672.857	80,00%	634.637.176	82,00%	643.747.546	85,00%	650.369.896
		Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	WTP	WTP	636.312.343	WTP	621.672.857	WTP	634.637.176	WTP	643.747.546	WTP	650.369.896
		Manajemen Risiko Indeks	-	2,75	636.312.343	2,83	621.672.857	2,95	634.637.176	3,09	643.747.546	3,28	650.369.896
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatnya kualistas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang dilaksanakan		100%	1.108.000.000	100%	1.065.000.000	100%	1.103.000.000	100%	1.131.000.000	100%	1.151.000.000
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100%	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	110.000.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	110.000.000
Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	100%	131 Laporan	260.000.000	131 Laporan	250.000.000	131 Laporan	255.000.000	131 Laporan	266.000.000	131 Laporan	270.000.000
Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	100%	37 Laporan	50.000.000	37 Laporan	50.000.000	37 Laporan	50.000.000	37 Laporan	50.000.000	37 Laporan	50.000.000
Pengawasan Desa	Terlaksananya pengawasan desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	100%	22 Laporan	280.000.000	22 Laporan	250.000.000	22 Laporan	280.000.000	22 Laporan	280.000.000	22 Laporan	280.000.000
Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	100%	2 Kesepakatan	200.000.000	2 Kesepakatan	200.000.000	2 Kesepakatan	200.000.000	2 Kesepakatan	200.000.000	2 Kesepakatan	200.000.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100%	2 Dokumen	118.000.000	2 Dokumen	115.000.000	2 Dokumen	118.000.000	2 Dokumen	135.000.000	2 Dokumen	131.000.000
Penyelenggaraan	Meningkatnya	Persentase		100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	kualitas Pengawasan dengan tujuan tertentu	penyelesaian kerugian keuangan daerah dan penanganan pengaduan Masyarakat											
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugaian Negara/ daerah yang ditangani	0,00%	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	8 Laporan	200.000.000	8 Laporan	200.000.000	8 Laporan	200.000.000	8 Laporan	200.000.000	8 Laporan	200.000.000
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,1	3,2	290.000.000	3,3	283.000.000	3,4	289.700.000	3,5	293.900.000	4	296.000.000
		2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pmerintah (APIP)	3,1	3,2		3,3		3,4		3,5		4	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Persentase Kebijakan Teknis dibidang pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang ditetapkan		100%	90.000.000	100%	83.000.000	100%	79.700.000	100%	83.900.000	100%	86.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	100%	4 Rekomendasi	40.000.000	4 Rekomendasi	33.000.000	4 Rekomendasi	29.700.000	4 Rekomendasi	23.900.000	4 Rekomendasi	26.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	100%	4 Rekomendasi	50.000.000	4 Rekomendasi	50.000.000	4 Rekomendasi	50.000.000	4 Rekomendasi	60.000.000	4 Rekomendasi	60.000.000
Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan		100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10 OPD	50.000.000	10 OPD	50.000.000	10 OPD	60.000.000	10 OPD	60.000.000	10 OPD	60.000.000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,	100%	26 OPD	50.000.000	26 OPD	50.000.000	26 OPD	50.000.000	26 OPD	50.000.000	26 OPD	50.000.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
	Penilaian Reformasi Birokrasi	Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi											
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	100%	2 Kegiatan	50.000.000	2 Kegiatan	50.000.000	2 Kegiatan	50.000.000	2 Kegiatan	50.000.000	2 Kegiatan	50.000.000
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlasannaya Pendampingan dn Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerahyang DilakukanPendamping an, Asistensidan Verifikasi PenegakanIntegritas	100%	2 OPD	50.000.000	2 OPD	50.000.000	2 OPD	50.000.000	2 OPD	50.000.000	2 OPD	50.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	6.345.000.000	100%	6.199.000.000	100%	6.328.000.000	100%	6.419.000.000	100%	6.485.000.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Pelaporan yang disusun Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun Perangkat Daerah		100%	100.000.000	100%	60.000.000	100%	100.000.000	100%	76.000.000	100%	61.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	50.000.000	100%	30.000.000	100%	50.000.000	100%	46.000.000	100%	31.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	50.000.000	100%	30.000.000	100%	50.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaraanya Administrasi Keuangan tepat waktu dan sesuai strander	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang terpenuhi sesuai standar	100%	100%	4.700.000.000	100%	4.850.000.000	100%	4.950.000.000	100%	5.050.000.000	100%	5.100.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	40 orang	4.700.000.000	40 orang	4.750.000.000	45 orang	4.850.000.000	45 orang	4.950.000.000	45 orang	5.000.000.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	7 Orang	100000000\	7 Orang	100.000.000	7 Orang	100.000.000	7 Orang	100.000.000	7 Orang	100.000.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai standar	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daeraha yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai standar		100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlakasananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	40 orang	200.000.000	40 orang	200.000.000	45 orang	200.000.000	45 orang	200.000.000	45 orang	200.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu sesuai standar	Persentase administrasi Perangkat daerah yang terpenuhi tepat waktu dan sesuai standar		100%	272.000.000	100%	270.000.000	100%	259.000.000	100%	263.000.000	100%	264.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	15 Paket	10.000.000	15 Paket	10.000.000	15 Paket	10.000.000	15 Paket	10.000.000	15 Paket	10.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	2 Paket	5.000.000	4 Paket	3.000.000	6 Paket	3.000.000	8 Paket	5.000.000	10 Paket	5.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	3 Paket	35.000.000	3 Paket	35.000.000	4 Paket	24.000.000	5 Paket	24.000.000	6 Paket	24.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	1 Paket	7.000.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	9.000.000	1 Paket	10.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan	100%	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	15.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksananya Pengadaan BMD Urusan Perangkat	Persentase Sarana Prasarana kantor yang disediakan		100%	688.000.000	100%	489.000.000	100%	489.000.000	100%	500.000.000	100%	530.000.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Pemerintah Daerah	Daerah												
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	1 Unit	300.000.000	1 Unit	209.000.000	1 Unit	209.000.000	1 Unit	220.000.000	1 Unit	250.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	5 Unit	200.000.000	5 Unit	90.000.000	5 Unit	90.000.000	5 Unit	90.000.000	5 Unit	90.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	5 Jenis	88.000.000	5 Jenis	90.000.000	5 Jenis	90.000.000	5 Jenis	90.000.000	5 Jenis	90.000.000
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Paket Software dan Aset tak berwujud yang disediakan	100%	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000	2 Paket	100.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayar tepat waktu sesuai standar		100%	250.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	3 Jenis	100.000.000	3 Jenis	50.000.000	3 Jenis	50.000.000	3 Jenis	50.000.000	3 Jenis	50.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	4 Jenis	150.000.000	4 Jenis	150.000.000	4 Jenis	150.000.000	4 Jenis	150.000.000	4 Jenis	150.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemerliharaan BMD	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik		100%	135.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	15 Unit	20.000.000	15 Unit	20.000.000	15 Unit	20.000.000	15 Unit	20.000.000	15 Unit	20.000.000
Penyediaan Jasa	Tersedianya Jasa	Jumlah Kendaraan	100%	15 Unit	40.000.000	15 Unit	40.000.000	15 Unit	40.000.000	15 Unit	40.000.000	15 Unit	40.000.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Outcome/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya											
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	8 Unit	25.000.000	8 Unit	20.000.000	8 Unit	20.000.000	8 Unit	20.000.000	8 Unit	20.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000
		TOTAL			8.543.000.000		8.347.000.000		8.520.700.000		8.643.900.000		8.732.000.000

Tabel 4. 4
Daftar Sub kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	Program Pengawasan Internal	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Reviu Laporan Keuangan	
			Reviu Laporan Kinerja	
			Pengawasan Desa	
			Kerjasama Pengawasan Internal	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan APIP	
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
			Pendampingan dan Asistensi	
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

No.	Program Prioritas	Outome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barnag Cetakan dan Pengadaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pengadaan Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	
			Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/ Rehabiliasi Gedung Kantor dan Bangunna Lainnya	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan pemerintah daerah untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam sebuah dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD atau Renstra. Indikator ini menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah (seperti dinas atau kecamatan) dan berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan serta dasar akuntabilitas tahunan melalui pelaporan kinerja.

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan perangkat daerah tercermin dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada periode 2025-2030 tercermin dari capaian IKU dan IKD yang ditetapkan. Tahun 2030 sebagai bagian dari kesinambungan perencanaan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan perangkat daerah tahun 2030.

Penyajian IKU dan IKD dalam dokumen Renstra menjadi pijakan dalam penyusunan target pembangunan tahunan dan sekaligus memenuhi aspek akuntabilitas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara detail target IKU dan IKD Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 2025-2030 sebagaimana disajikan dalam di bawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2026-2030					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Maturitas penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Nilai	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	4
2	Indeks persepsi anti korupsi	Indeks	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	4
3	Indeks Manajemen Resiko (MRI)	Indeks	82,82	82,98	83,02	83,14	83,27	85,85
4	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks	2,7	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0
5	Nilai LAKIP Inspektorat	Nilai	B	B	B	BB	BB	BB
6	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah Inovasi	1	1	1	1	1	1
7	Capaian Kinerja perangkat Daerah	Persen	75	80	82	83	85	869

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2026-2030					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	71,63	75,00	78,00	80,00	82,00	85,00
2	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Manajemen Risiko Indeks	Indeks	-	2,75	2,83	2,95	3,09	3,28
4	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	4
5	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	4

BAB V
PENUTUP

5.1 Pengendalian dan Evaluasi Renstra Inspektorat

Pengendalian pelaksanaan Renstra dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra ke masing-masing wilayah, pengendalian pelaksanaan tersebut antara lain:

a. Pengendalian penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029. Hal ini untuk memastikan tujuan dan sasaran Inspektorat selaras dengan NSPK dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
b. Memastikan target kinerja Inspektorat selaras dengan NSPK dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
c. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala minimal 1 kali dalam setahun untuk melihat ketercapaian target Renstra.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan dalam rangka penilaian terhadap pencapaian target kinerja dan menganalisis penyebab kegagalan ataupun keberhasilannya. Penilaian ini mencakup evaluasi kinerja secara menyeluruh, serta evaluasi terhadap kebijakan dan program Inspektorat baik sebagai pendorong maupun sebagai penghambat ketercapaian target kinerja. Hasil evaluasi Renstra Inspektorat akan menjadi bahan utama dalam perumusan kebijakan Renstra Inspektorat berikutnya.

5.2 Manajemen Risiko Strategis Inspektorat

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam konteks organisasi pemerintah, risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan.

Risiko tersebut meliputi, antara lain: resiko strategis perangkat daaerah, resiko operasional perangkat daerah dan resiko *fraud*. Keberadaan risiko ini tidak hanya mengancam efektivitas perangkat daerah, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap perangkat daerah. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi hal yang terutama dan penting dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan Inspektorat.

Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak atau menghilangkan sebab dari risiko tersebut. Dalam melakukan manajemen risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setelah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan pengendalian risiko yaitu Langkah untuk melakukan pengendalian terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi dampak dan kemungkinan untuk mencegah agar risiko tidak terjadi.

Melalui pengendalian risiko yang tepat dan terukur akan mampu mengendalikan dan mengelola risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan perangkat daerah. Pengendalian tersebut telah dimulai sejak pada proses perencanaan, sehingga perlu di pantau terus pada tahapan pelaksanaan, pengendalian, dan dilakukan monitoring/evaluasi kinerja perangkat daerah.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SIBERUT UTARA
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... ii
Daftar Tabel..... iii
Daftar Gambar..... Iv

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan..... 3
1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 15
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 16
2.3 Sumber daya perangkat Daerah..... 16
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Siberut Utara... 16
2.5 Kinerja Pelayanan Kecamatan Siberut Utara..... 20
2.6 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Siberut Utara..... 20
2.7 Isu Strategis..... 23

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 25
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 26
3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 28
3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 28

BAB IV PROGRAM. KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program, Kegitan, Sub Kegiatan..... 33
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 36

BAB V PENUTUP..... 38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Pegawai Negeri Sipil Menurut Kepangkatan dan Golongan Tahun 2025 10
Tabel 2.2 Daftar Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 10
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin .. 10
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Pada Kecamatan Siberut Utara Masa Periode 2021-2024..... 14
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamaatan Siberut Utara 2023-2024 14
Tabel 2.6 Permasalahaan Pelayanan Kecamatan Siberut Utara 16
Tabel 2.7 Isu Strategis Kecamatan Siberut Utara 17
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Utara Tahun 2025-2030..... 24
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Siberut Utara Tahun 2025 -203025
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Siberut Utara..... 25
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan /Subkegiatan Rentra Kecamatan Siberut Utara 26
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan Renstra Kecamatan Siberut Utara 2025-2030 26
Tabel 4.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 32
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Siberut Utara 33
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Siberut Utara 33

AFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kecamatan Sipora Utara.....9
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra 25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jang Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD (Renstra OPD). Penyusunan RPJMD dikoordinasikan oleh badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra OPD disusun oleh OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencaanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah disetiap OPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jang Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra OPD terdiri dari tahapan Persiapan penyusunan Re nstra OPD, Penyusunan rancangan Renstra OPD, Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra OPD, dalam penyusunan Renstra OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, keijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat daerah (OPD).

OPD Kecamatan Siberut Utara sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas dan fungsinya dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan tupoksi OPD kecamatan Siberut Utara diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan focus program dalam lima tahun mendatang, dokumen Renstra OPD Kecamatan Siberut Utara tahun 2025-2029` tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yaitu Rencana Pembangunan Jang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Renstra-OPD atau Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-OPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Utara Tahun

2025-2029 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4).
19. Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2018 mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Kecamatan Siberut Utara Tahun 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Utara Tahun 2025-2029 antara lain:

a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025- 2029 dapat tercapai.

b. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran OPD Kecamatan Siberut Utara sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029.
c. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Siberut Utara.
d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
e. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders)* tentang rencana pembangunan lima tahunan.
f. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Siberut Utara dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Utara Tahun 2025-2029 antara lain:

a. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
b. Memerikan arahan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama kurun waktu 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Siberut Utara dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Kepulauan Mentawai
c. Memudahkan para pemangku kepentingan *(stakeholders*) untuk menetapkan kebijakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Kecamatan Siberut Utara Kepulauan Mentawai 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra. Bab ini terdiri atas:

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SIBERUT UTARA

Bab ini menggambarkan tentang gambaran umum tentang aspek dan pelayanan, permasalahan yang dihadapi dan isu strategis dalam menjalankan pelayanan dan pelaksanaan tugas urusan Kecamatan Siberut Utara. Bab ini terdiri atas:

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Siberut Utara
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Siberut Utara

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2025-2026). Bab ini terdiri atas:

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Siberut Utara Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Utara Tahun 2025-2029
3.3 Strategi Kecamatan Siberut Utara Tahun 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Siberut Utara Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Pada Bab memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan kenerja penyelenggaraan urusan Kecamatan Siberut Utara. Bab ini terdiri atas:

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Pada Bab Penutup, disajikan upaya pengendalian dan evaluasi implementasi Renstra Kecamatan Siberut Utara Tahun 2025-2029.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SIBERUT UTARA

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Siberut Utara

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Siberut Utara

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

a. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
b. Kepala Kecamatan disebut Camat;
c. Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda Kabupaten/Kota dari PNS yang memenuhi syarat;
d. Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota;
e. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Uraian tugas pokok dan fungsi Camat, Sekretaris Camat dan Seksi-seksi serta Sub Bagian di Kecamatan dapat dijabarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2018 mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut :

1. Camat

Camat menyelenggarakan tugas:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerahdan peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
f. Mengorganisasikan penyelenggraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
h. melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja organisai perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan;
i. melakukan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya kepala OPD Kecamatan Siberut Utara, dibantu oleh Sekcam, Kasi Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Ekonomi dan Pembangunan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Program dan Keuangan. Yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

2. Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas

merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kecamatan;
b. pemberi dukungan administrasi yang meliputi kepegawian, ketatusahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi lingkup kecamatan;
c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup kecamatan;
d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup kecamatan;
e. pengelola barang milik daerah lingkup kecamatan;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum, Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup kecamatan;
b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup kecamatan;
c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup kecamatan;
d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup kecamatan;
e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana lingkup kecamatan;
f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- ungangan lingkup kecamatan;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya;

4. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup kecamatan;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan angaran lingkup kecamatan;
c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup kecamatan;
d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan urusan pengeloaan keuangan lingkup kecamatan;
e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah lingkup kecamatan;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya;

5. Seksi Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pemerintahan ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan urusan

pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
b. melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian pemeliharaan, prasarana dan sarana pelayanan umum;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan;
d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dalam tingkat Kecamatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja OPD yang ada di wilayah Kecamatan dalam bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum melaksanakan penyiapan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

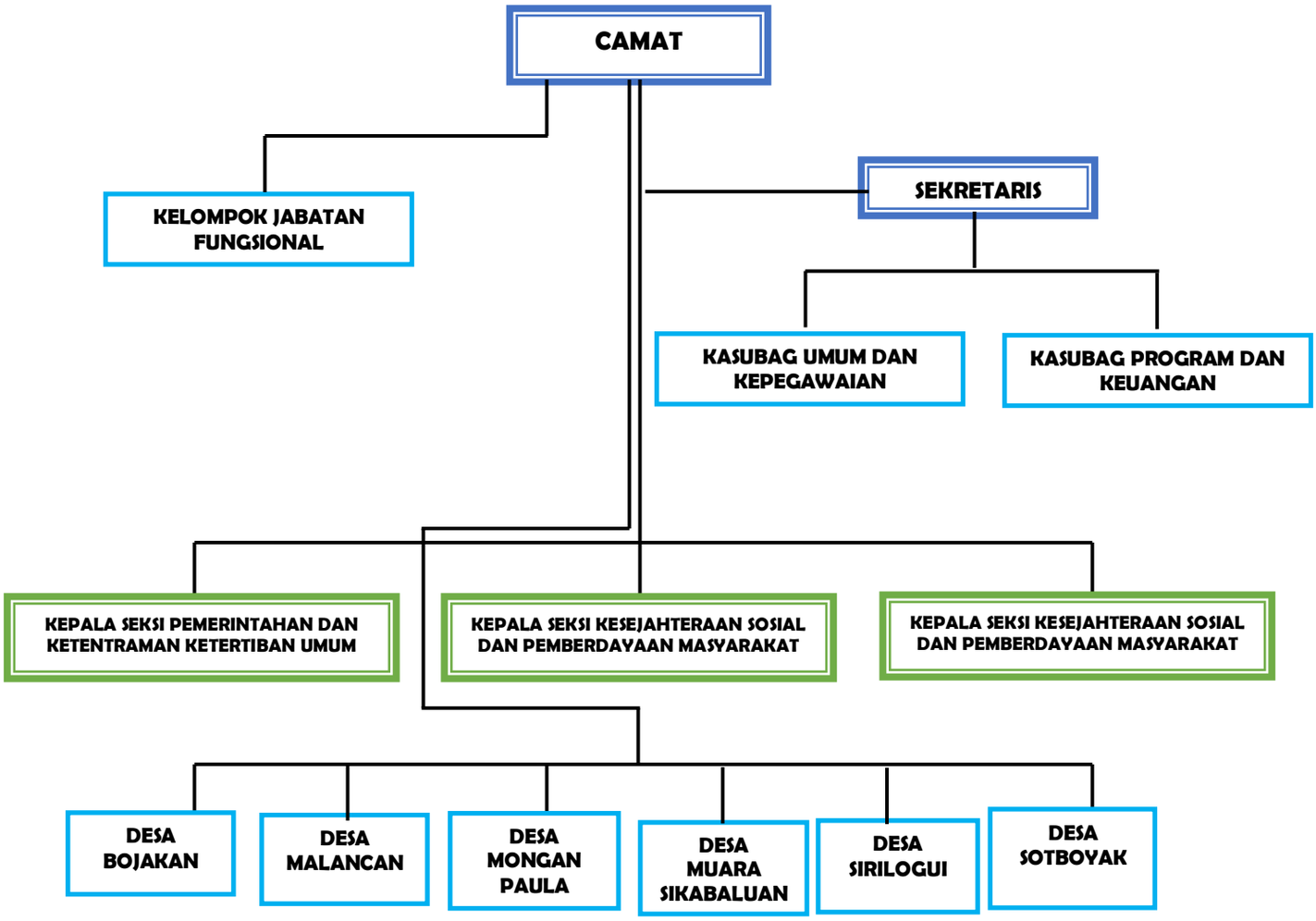
a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial di kecamatan;
b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang kesejahteraan sosial Pemberdayaan Masyarakat;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah di tingkat kecamatan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja OPD yang ada di wilayah Kecamatan dalam bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
f. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), maka Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Camat;
b. Sekretaris, membawahkan:
    1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Susunan Organisasi Kecamatan Siberut Utara dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Kecamatan Siberut Utara



2.2 Sumber Daya Perangkat daerah

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut diatas, potensi yang diharapkan mendukung tugas pokok Kecamatan Siberut Utara, meliputi :

1. Aparatur sebagai manajer (pemikir, perencanaan, pelayanan dan penggerak) yang menjadi kekuatan pendorong yang utama.
2. Hubungan kerja/Koordinasi (pegawai) yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan Siberut Utara berdasarkan data bulan Januari 2025 adalah sejumlah 35 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Pegawai Negeri Sipil
Menurut Kepangkatan dan Golongan Tahun 2025

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah Orang
1	Pengatur Muda II/a	0
2	Pengatur Muda TK.I /II b	1
3	Pengatur II/c	3
4	Pengatur TK.I II/d	3
5	Penata Muda III/a	2
6	Penata Muda TK.I III/	7
7	Penata III/c	5
8	Penata TK.I III/d	2
9	Pemina IV/a	1
10	Tenaga Honorer	11
	Total	35

Sumber : Bezetting Kec.Siberut Utara Th. 2025

Tabel 2.2
Daftar Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Pendidikan	Jumlah Orang
1.	S2	1
2.	SI	16
3.	DIII	1
4.	SLTA / Sederajat	16
5	SLTP/Sederajat	1

Sumber : Bezetting Kec.Siberut Utara Th.2025

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Pegawai	L	P	Jumlah
1	Pegawai Negri Sipil	12	12	24
2	PPPK	3	0	3
3	Kontrak	4	4	8
JUMLAH		19	16	35

Sumber : Bezetting Kec.Siberut Utara Th.2025

Berdasarkan tabel diatas kondisi sumber daya manusia aparatur Kecamatan Siberut Utara tahun 2025, jumlah keseluruhan pegawai tercatat sebanyak 35 orang, yang terdiri dari 24 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang PPPK, dan 8 orang tenaga kontrak. Jika ditinjau dari aspek kepangkatan, sebagian besar pegawai berada pada golongan III, yaitu kelompok pelaksana hingga penata, dengan rincian 7 orang pada golongan III/b, 5 orang III/c, dan 2 orang III/d, sementara golongan IV/a hanya terdapat 1 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur berada pada jenjang menengah dan masih memiliki peluang besar untuk pengembangan karier ke tingkat yang lebih tinggi, baik melalui peningkatan kompetensi maupun jenjang kepangkatan.

Dari sisi tingkat pendidikan, komposisi pegawai di Kecamatan Siberut Utara menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 16 orang, diikuti oleh SLTA/sederajat juga sebanyak 16 orang, serta masing-masing 1 orang dengan jenjang S2, DIII, dan SLTP/sederajat. Hal ini menandakan bahwa kualitas pendidikan aparatur sudah cukup baik, namun peningkatan kapasitas dan pendidikan lanjutan tetap diperlukan, terutama bagi pegawai dengan latar belakang pendidikan menengah ke bawah, agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan dan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.

Dari aspek jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 19 orang dan perempuan sebanyak 16 orang, menunjukkan komposisi yang relatif seimbang antara kedua gender. Keseimbangan ini menjadi potensi yang positif dalam mendukung efektivitas kinerja organisasi melalui pembagian tugas yang proporsional dan kolaboratif. Secara keseluruhan, struktur sumber daya manusia di Kecamatan Siberut Utara telah menunjukkan komposisi yang cukup ideal, namun tetap memerlukan perhatian dalam pengembangan kompetensi, profesionalisme, serta penataan karier yang berkelanjutan agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkualitas bagi masyarakat.

2.3 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Siberut Utara

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Siberut Utara adalah meliputi internal Kecamatan, dan elemen masyarakat yang terlihat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Siberut Utara, yang salah satu point pentingnya adalah menumuhkan partisipasi masyarakat

dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2025-2029.

a. Masyarakat umum-warga yang tinggal di Kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan keluarga kurang mampu
b. Pelaku usaha dan UMKM- para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses, modal dan pemasaran produk
c. Petani-kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk dan akses pasar
d. Kaum muda dan pendidikan-siswa, mahasiswa serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
e. Aparat Pemerintah dan lembaga masyarakat pegawai pemerintah desa RT/RW serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
f. Kelompok keagamaan dan adat, tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestrian tradisi lokal.

2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Siberut Utara

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Siberut Utara berdasarkan pada Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah yang menekankan pada integrasi seluruh proses, mulai dari perencanaan kinerja, penetapan indikator, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi, dalam satu sistem yang komprehensif (SAKIP).

Disamping Kinerja Kecamatan Siberut Utara sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Siberut Utara dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
    a. Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Siberut Utara setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat sangat tidak mencukupi, disebabkan adanya efisiensi anggaran oleh Bapak Presiden Praowo.
    b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di Kecamatan Siberut Utara setiap tahunnya mengalami penurunan juga disebabkan efisiensi anggaran dan perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan.

2. Kinerja Pelayanan di bidang Pemerintahan.
    beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Siberut Utara di bidang pemerintahan tercermin dari :
    a. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparatur Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari –hari.
    b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
    c. Pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa.
    d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
    e. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di desa.

f. Memberikan fasilitas yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

3. Pelayanan di bidang Ekonomi dan Pembangunan
   a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan ;
   b. Monitoring harga sembako;
   c. Monitoring pembangunan desa;
   d. Monitoring Penyaluran beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
   e. Monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Siberut Utara;
   f. Monitoring dan fasilitasi penerbitan izin-izin yang diutuhkan masyarakat;
4. Pelayanan Bidang Pemerintahan Desa

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Siberut Utara yakni Tahun 2021-2024 diketahui bahwa indikator realisasi capaiannya belum maksimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Siberut Utara

Masa periode 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indek Kepuasan Masyarakat				B	B	B	B		B	B	B	B	B					
2	Penetapan APDes tepat waktu				85%	88%	90%	92%		90%	90%	88%	96%	96%					
3	Serapan APDess di atas 90 %				100%	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
4	Penanganan kasus kriminal di kecamatan yang ditangani/diselesaikan				62%	65%	68%	70%		62%	65%	68%	70%	80%					
5	Nilai LAKIP																		
6	Jumlah Inovasi yang diterapkan				1	1	1	1		1	1	1	1	1					
7	Persentase capaian kinerja perangkat daerah				100%	100 %	100 %	100 %		98%	99%	100 %	100 %	100 %					

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Siberut Utara 2021 – 2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Pertumbuhan		
	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2026	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*12*	*13*	*14*	*15*	*17*	*18*
BELANJA DAERAH	2.978.585.824	3.256.555.352		-	2.887.341.990	3.173.146.435		-	96,94	97,44			285.804.445	9,89
BELANJA OPERASI	2.963.135.824	3.234..759.652		-	2.871.891..990	3.151.350.735		-	96,9	97,42	-	-	279.458.745	9,73
Belanja Pegawai	2.054.338.824	2.244.064.352		-	1.970.285.490	2.167.722.835		-	95,91	96,59	-	-	197.437.345	10,02
Belanja arang dan Jasa	908.797.000	990.695.300		-	901.606.500	983.627.900		-	99,23	99,28	-	-	82.021.400	9,09
BELANJA MODAL	15.450.000	21.795.700		-	15.450.000	21.795.700			100	100			6.345.700	41,07

2.5 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Siberut Utara

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Siberut Utara selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Siberut Utara 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

a. Struktur Organisasi Kecamatan belum terisi secara memadai.
b. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah;
c. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
d. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
e. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi terseut ditampung dan diperhatikan serta direalisasikan.
f. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pemangunan daerah yang menuntut perencanaan yang erkualitas;
g. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Siberut Utara harus lebih responsif terhadap dinamika pemangunan masyarakat;
h. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
i. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 3 (tiga) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Siberut Utara antara lain:

a. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
b. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
c. Penerapan otonomi daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Siberut Utara dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
e. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
f. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanan pembangunan; dan Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme.

Tabel 2.6
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Siberut Utara

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik	Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di	Keterbasan SDM petugas pelayanan di kecamatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	kecamatan kurang maksimal	Keterbatasan jumlah sarana dan Prasarana
		Lemahnya koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah daerah
	Lambatnya penyusunan dan penetapan APBDes	Keterbatasan SDM aparatur pemerintahan desa
		Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan desa tentang kebijakan pemerintah kabupaten
		Terbatasnya angaran Kecamatan dalam melakukan pengawasan
Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Masih rendahnya pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan pemerintahan	Rendahnya komitmen perangkat daerah dalam memanfaatkan digitalisasi
		Masih terbatasnya sumber daya manusia dan lembaga di Kepulauan Mentawai dalam menyediakan dan menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan pemerintahan
		Masih rendahnya penerapan sistem meritokrasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan ASN
		Masih rendahnya kinerja ASN

Suatu permasalahan yang sedang hangat diicarakan orang yang mempunyai nilai kekhalayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya. bertitik tolak dari pengertian Isu-Isu Strategis diatas dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, Maka permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkemang terhadap Kecamatan Siberut Utara yang berhasil di oservasi, dan dihimpun fenomenanya dari komentar Aparatur Desa serta Stakeholders sebagai berikut:

a. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Desa dan kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terlambat.
b. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kantor Desa dan Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
c. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintah kurang.
d. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan.
e. Sebagai kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa, permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, uranisasi, keamanan dan ketertiban wilayah.
f. Anggaran dana yang tertuang DPA Kecamatan Siberut Utara belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;

g. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, moiler, dan peralatan lain yang masih kurang;
h. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pemangunan yang ada di Kecamatan Siberut Utara masih teratas;
i. Ada sedikit kesulitan dalam pelaksanaan program tersebut ada koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang kita rencanakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Siberut Utara ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L:

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan funsional
2. maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
3. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
5. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

2.7 Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan gambaran permasalahan-permasalahan yang dikedepankan untuk diatasi dan berdampak luas. Suatu kondisi atau situasi yang menjadi isu strategis apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau menghilangkan peluang besar untuk meningkatnya pelayanan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Sebuah isu strategis dapat dilihat dari:

1. Apakah isu tersebut sedang menjadi perhatian.
2. Apakah isu tersebut mendesak.
3. Apakah isu tersebut sesuai dengan kebutuhan publik.
4. Apakah isu tersebut membantu kebutuhan publik.
5. Apakah isu tersebut sesuai dengan visi dan misi.
6. Apakah isu tersebut melibatkan stakeholder luas.
7. Apakah isu strategis tersebut aman dari dampak dari luar.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut diatas maka isu strategis Kecamatan Siberut Utara dalam periode 2025-2029 adalah peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat, dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat Tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Isu Strategis Perangkat daerah Kecamatan Siberut Utara

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KHLS yang relevan dengan PD	Isu Dinasmis Yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Sumber Daya Alam Pertanian dan Perikanan	• Keterbatasan Sumber Daya manusia • Kurangnya Koordinasi • Keterlibatan Masyarakat yang Kurang	• Pembangunan Yang berkelanjutan • Perubahan Iklim • Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan Hidup • Indikator Tujuan Pembangunan Yang berkelanjutan	• Transformasi Birokrasi • Penyerapan anggaran • Koordinasi dan Pelaksanaan	• Pemanfaatan Teknologi Digital • Partisipasi Masyarakat • Inovasi dan Kreativitas	• Pengelolaan Sumber daya Alam • Pengembangan Ekonomi Regional • Pengelolaan Lingkungan • Kwalitas Pelayanan Publik	• Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik • Masih rendahnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

a. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
b. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas maupun kualitas;
c. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenang Kecamatan;
d. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (*shortcutting*);
e. Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan

BAB III
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Siberut Utara Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Siberut Utara telah menetapkan tujuan, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Adapun tujuannya adalah : "*Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani*"

Untuk dapat merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 melalui Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Mentawai maka OPD Kecamatan Siberut Utara harus menyusun Rencana Strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran, oleh sebab itu OPD Kecamatan Siberut Utara sebagai unsur dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus menentukan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh aparatur Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk :

1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting karena Inkosistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan
2. Kreatif yaitu : setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;
3. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan Desa;
4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Utara Tahun 2025-2029

Sasaran Kecamatan Siberut Utara merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Tujuan dan Sasaran tersebut bisa dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran
Renstra Kecamatan Siberut Utara Tahun 2026-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASLINE 2024	TARGET TAHUN				
						2026	2027	2028	209	2030
Meningkatnya kualitaas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal,transparan, dan akuntabel	Terwujudnya pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indek	81,25	81,24	81,47	82,06	82,35	82,64
		Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan	Ketepatan Waktu Pelayanan	Waktu	1 hari	1 hari	8 jam	8 jam	4 jam	2 jam
			Serapan APBDes diatas 90 %	Persen	75,56	77,86	80,45	82,48	84,21	85
		Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	indeks	77,45	78,12	80,45	81,02	81,28	81,65
Mewujudkan kualitas tata kelola perangkat daerah		Meningkatnya kualitas kinerja Perangkat daerah	Nilai Sakip	Nilai	76 (B)	79 (B)	79,5 (B)	79,6 (B)	79,7 (B)	79,8 (B)
			Inovasi yang diterapkan	Jumlah	1 inovasi	2 inovasi	3 inovasi	3 inovasi	4 inovasi	4 inovasi
			Capaian kinerja perangkat daerah	Persen	75%	80%	82%	83%	85%	86%

3.3 Strategi Renstra Kecamatan Siberut Utara Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA merupakan bagian pentingdari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi merupakn Pendekatan umum atau rencaa tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telh ditetabkan dalam RENSTRA. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komperehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi berisi langkah-langkah dan program untuk mewujudkan visi dan misi.

Penyajian Lokus *(Lokasi fokus*) dalan RENSTRA Kecamatan Siberut Utara sangat penting untuk menunjukan dimana program, kegiatan atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dlam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

Manfaat penyajian lokus dalam RENSTRA ini antara lain :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antar perangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaliasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Kecamatan Siberut Utara

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Digitalisasi dan teknologi (penguatan) Akses Internet, digitalisasi layanan pemerintah, serta inovasi dalam administrasi publik)	Infrastruktur (pembangunan sarana dan sarana publik)	Pemberdayaan masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisai organisasi pemberdayaan masyarakat)	Ekonomi (Dukungan terhadap UMKM dan Optimalisasi BUMDes)	Keamanan dan Ketertiban (Peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat)

3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004, kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/ daerah untuk mencapai tujuan. berikut disajikan kebijakan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan Kecamatan Siberut Utara telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Rencana kerja Kecamatan Siberut Utara merupakan dokumen perencanaan uang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 2024Organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif, dan proses *bottom-up* dan *top-down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai salah satu formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapat legalisasi dan jaminan paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja OPD.

Telaah terhadap kebijakan pembangunan daerah baik di tingkat pusat maupun propinsi, merupakan masuakan bagi peyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat menyentuh sasaran yang tepat.

Kebijakan yang dibuat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Kecamatan Siberut Utara adalah :

a. Otonomi daerah
b. Pemerintahan umum
c. Administrasi keuangan
d. Administrasi perangkat daerah kepegawaian
e. Persediaan.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan
Kecamatan Siberut Utara

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan	Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani
		Peningkatan Penyusunan RKPDesa yang cermat dan tepat waktu menjadi dasar penyusunan APBDesa, RKPDesa	Peningkatan kualitas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) agar lebih cermat dan tepat waktu, sehingga RKPDesa dapat menjadi dasar yang kuat dan valid dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dengan RKPDesa yang baik, pembangunan desa dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, dan efisien
		Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan APBDesa untuk memastikan ketepatan waktu dan efektivitas penggunaan anggaran.	Penyelenggaraan Evaluasi kinerja pelaksanaan APBDesa laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara rutin dan transparan.
		Penguatan Fungsi Forkopincam (linmas, Babinsa, Babinkamtibnas)	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
		peningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan	Proses pelayanan untuk memastikan efisiensi dan efektif
	Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan peningkatan efektivitas penggunaan dana desa
		Penguatan forum koordinasi desa	Peningkatan Forum koordinasi desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, seperti pelayanan administrasi kependudukan
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Peningkatkan nilai LAKIP, menunjukkan akuntabilitas kinerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
		Peningkatan efektifitas penerapan inovasi di kecamatan	Peningkatan Pelayanan publik di kecamatan dapat menjadi lebih efisien, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat
		Peningkatkan transparansi dalam pelaporan kinerja.	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia ASN Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		Melakukan evaluasi kinerja secara teratur dan membuat laporan mengenai kinerja	Menyediakan kerangka acuan untuk pengambilan keputusan dan tindakan

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikasi rencana program prioritas merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh dan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut dijabarkan ke dalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan perangkat daerah terkait, sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas perangkat daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah langsung dalam pencapaian visi, misi kepala daerah.

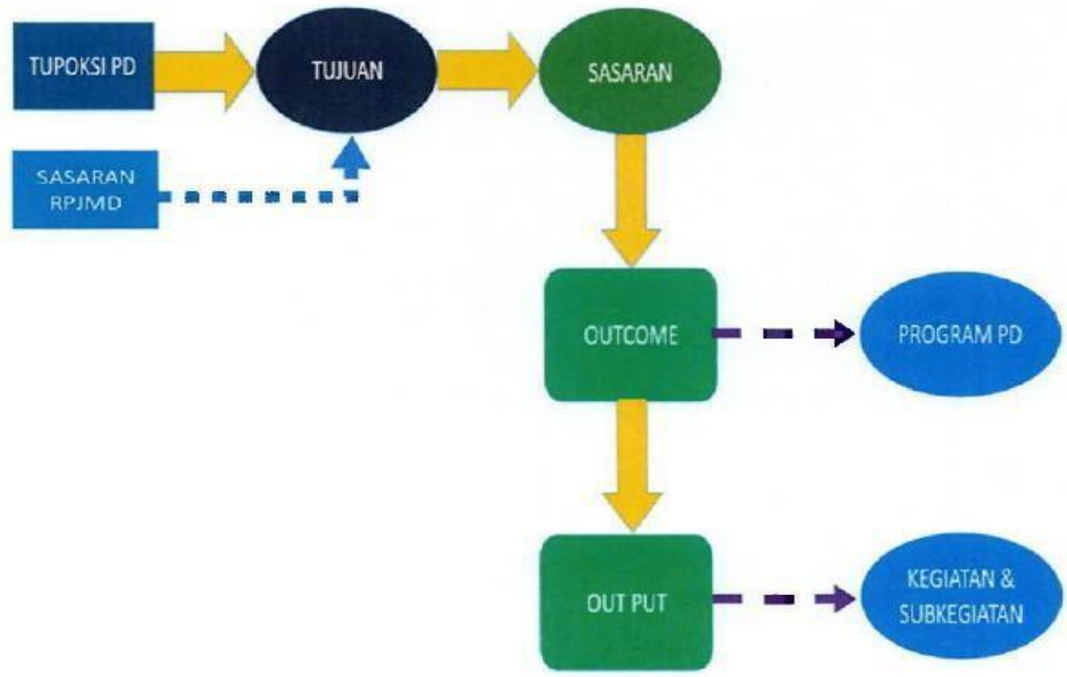
Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada diantara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki kecamatan Siberut Utara adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
b. Administrasi keuangan perangkat daerah
c. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
d. Administrasi Umum perangkat daerah
e. Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintah
f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan pemerintahan daerah
h. Pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat
i. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Uraian sub kegiatan, kinerja dan indicator kecamatan siberut utara meliputi berbagai aspek pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan, sub kegiatan adalah bagian kegiatan yang lebih besar, dan indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian sub kegiatan dan kegiatan tersebut. Sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah merupakan rangkaian aktivitas teknik atau operasional yang paling strategis.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Siberut Utara merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Siberut Utara juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Siberut Utara serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Siberut Utara dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra



Rencana Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan Renstra Kecamatan Siberut Utara Tahun 2025-2030.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Siberut Utara

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
Mewujudkan Masyarakat Aman, Harmonis, dan Berkeadilan	Terwujudnya serta memberikn arah yang jelas bagi Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani	Meningkatnya ketertiban umum, ketentraman dan keamanan wilyah	Kualitas kehidupan masyarakat yang hormonis	Meningkatnya tantibmas dikecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		Meningkatnya pelauayan public dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib	Terpenuhinya Kualitas layanan dan kebutuhn jasa urusan pemerintahan daerah kabupaten kota yang efektif dan efesien	Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja dan kesejahteraannmasyarakat	Ketepatan Waktu Pelayanan		
		Meningkatnya kepuasan masyarakat	Kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase serapan APBDes diatas 90 %		
Mewujudkan kualitas tata kelola perangkat daerah		Meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, tertib dan akuntabel	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	Nilai Sakip		

		Meningkatanya kualitas tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya kulitas sumber daya manuasi di daerah	Jumlah inovasi yang diterapkan	Jumlah inovasi yang diterapkan		
		Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	tercapainya tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan public	Jumlah laporan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah		
		Meningkatnya akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi perangkat daerah perangkat daerah	Terwujudnya persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas perangkat daerah	Nilai Kuantitatif/kategori/predikat	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan		

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan
Renstra Kecamatan Siberut Utara Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				target	Pagu	target	pagu	Target	pagu	target	pagu	target	pagu
KECAMATAN SIBERUT UTARA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	6 Kali		6 Kali	17.050.000	6 Kali	46.000.000	6 Kali	50.000.000	6 Kali	55.000.000	6 Kali	61.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang		27 Orang	2.254.653.970	27 Orang	2.254.653.970	27 Orang	2.254.653.970	27 Orang	2.254.653.970	27 Orang	2.254.653.970
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 Orang		45 Orang	73.200.000	45 Orang	73.200.000	45 Orang	73.200.000	45 Orang	73.200.000	45 Orang	73.200.000
Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Paket		1 Paket	2.412.500	1 Paket	2.412.500	1 Paket	2.412.500	1 Paket	2.412.500	1 Paket	2.412.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	32.059.000	4 Paket	32.059.000	4 Paket	32.059.000	4 Paket	32.059.000	4 Paket	32.059.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1.744.400	4 Laporan	1.744.400	4 Laporan	1.744.400	4 Laporan	1.744.400	4 Laporan	1.744.400
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2 Laporan		2 Lap	51.500.000	2 Lap	51.500.000	2 Lap	51.500.000	2 Lap	51.500.000	2 Lap	51.500.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				target	Pagu	target	pagu	Target	pagu	target	pagu	target	pagu
	SKPD												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah												
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah peralatan	2 Paket		2 Paket	12.000.000	2 Paket	12.000.000	2 Paket	12.000.000	2 Paket	12.000.000	2 Paket	12.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Operasional Perkantoran												
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2.840.000	2 Unit	2.840.000	2 Unit	2.840.000	2 Unit	2.840.000	2 Unit	2.840.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	19.520.000	2 Unit	19.520.000	2 Unit	19.520.000	2 Unit	19.520.000	2 Unit	19.520.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				target	Pagu	target	pagu	Target	pagu	target	pagu	target	pagu
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	11.170.000	1 Unit	11.170.000	1 Unit	11.170.000	1 Unit	11.170.000	1 Unit	11.170.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan												
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan												
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Desa		6 Desa	9.730.000	6 Desa	9.730.000	6 Desa	9.730.000	6 Desa	9.730.000	6 Desa	9.730.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan												
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Desa		6 Desa	12.355.000	6 Desa	12.355.000	6 Desa	12.355.000	6 Desa	12.355.000	6 Desa	12.355.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan												

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				target	Pagu	target	pagu	Target	pagu	target	pagu	target	pagu
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan												
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	120 Orang		120 Orang	21.234.000	120 Orang	21.234.000	120 Orang	21.234.000	120 Orang	21.234.000	120 Orang	21.234.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Desa		6 Desa	9.730.000	6 Desa	9.730.000	6 Desa	9.730.000	6 Desa	9.730.000	6 Desa	9.730.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan												
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan												

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				target	Pagu	target	pagu	Target	pagu	target	pagu	target	pagu
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6 Desa		6 Desa	100.000.000	6 Desa	120.000.000	6 Desa	130.000.000	6 Desa	140.000.000	6 Desa	150.000.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Laporan		2 Lap	9.185.000	2 Lap	9.185.000	2 Lap	9.185.000	2 Lap	9.185.000	2 Lap	9.185.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA													
fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	Jumlah dokumen laporan SPJ APBdes	3 laporan		3 Lap	16.750.000	3 Lap	16.750.000	3 Lap	16.750.000	3 Lap	16.750.000	3 Lap	16.750.000

Berdasarkan Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Kecamatan Siberut Utara Tahun 2025–2030, arah pembangunan kecamatan difokuskan pada peningkatan kinerja pemerintahan, optimalisasi pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa. Melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan Siberut Utara berupaya memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan dengan kegiatan seperti evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, pengadaan sarana dan prasarana perkantoran, serta penyediaan jasa operasional. Program ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan pemerintahan yang efisien dan transparan dengan dukungan sumber daya yang memadai dan anggaran yang meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun.

Selain itu, dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, fokus diarahkan pada peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada camat. Hal ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, terutama dalam hal koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di desa. Kemudian, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menitikberatkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melalui kegiatan koordinasi dan pelaksanaan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Hal ini diharapkan dapat memperkuat peran serta masyarakat dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sementara itu, dalam Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Kecamatan Siberut Utara berfokus pada penguatan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta peran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) untuk menjaga stabilitas wilayah dan memperkuat semangat kebangsaan di tingkat lokal. Secara keseluruhan, rencana program dan kegiatan tahun 2025–2030 menunjukkan bahwa Kecamatan Siberut Utara berkomitmen membangun birokrasi yang adaptif, pelayanan publik yang berkualitas, serta masyarakat yang berdaya saing melalui sinergi antara peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi anggaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

Subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah adalah rangkaian kegiatan spesifik yang dirancang secara terukur dan terarah untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, serta arah kebijakan pemerintah daerah. Subkegiatan ini berfungsi sebagai komponen operasional dari program prioritas yang berperan langsung dalam mendukung penyelesaian isu-isu strategis, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan subkegiatan prioritas didasarkan pada urgensi, dampak, dan kontribusinya terhadap pencapaian target pembangunan daerah, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, subkegiatan prioritas menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program pembangunan agar berjalan tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

Subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas Pembangunan di Kecamatan Siberut Utara dapat drumuskan dalam tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Priotitas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan	Administrasi Umum perangkat daerah	
		Terlaksananya layanan administrasi umum	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Administrasi Umum	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	Pasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasn Pemerintahan Desa	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka Indikator kinerja Kecamatan Siberut Utara selama 5 tahun ke depan (2025-2029) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Siberut Utara

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASLINE 2024	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	209	2030
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indek	81,25	81,24	81,47	82,06	82,35	82,64
2	Ketepatan Waktu Pelayanan	Waktu	1 hari	1 hari	8 jam	8 jam	4 jam	2 jam
3	Serapan APBDes diatas 90 %	Persen	75,56	77,86	80,45	82,48	84,21	85
4	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	indeks	77,45	78,12	80,45	81,02	81,28	81,65
5	Nilai Sakip	Nilai	76 (B)	79 (B)	79,5 (B)	79,6 (B)	79,7 (B)	79,8 (B)
6	Inovasi yang diterapkan	Jumlah	1 inovasi	2 inovasi	3 inovasi	3 inovasi	4 inovasi	4 inovasi
7	Capaian kinerja perangkat daerah	Persen	75%	80%	82%	83%	85%	86%

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai ukuran capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan karena menjadi indikator keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah, yang digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan rencana di masa depan. Penilaian tersebut sebagai akuntabilitas kinerja dan informasi tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Siberut Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Siberut Utara

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	Persen	65	68	68	68	68	68	
3	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu	Persen	75	80	82	83	85	90	
5	Persentase serapan APBDes di atas 90 persen	Persen	75	80	82	83	85	90	

BAB V
PENUTUP

5.1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Kecamatan Siberut Utara

Renstra ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Siberut Utara yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para Pemangku Kepentingan "*stakeholders*", baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui pemberitaan massa media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya. Di samping itu, Renstra Kecamatan Siberut Utara Tahun 2025-2029 ini juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LAKIP nantinya.

Untuk pelaksanaan Renstra Kecamatan Siberut Utara diperlukan tindakan pengendalian dan evaluasi sebagai berikut :

a. Meningkatkan SDM pegawai Kecamatan Siberut Utara melalui bomtek yang dilakukan oleh dinas terkait
b. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dalam meningkatkan pelayanan publik
c. Mengenali dan mengevaluasi Resiko yang ada dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Siberut Utara.
d. Melakukan pendekatan persuasif
e. Mengevaluasi realisasi anggaran dengan target fisik yang telah dicapai per triwulannya.

5.2 Manajeman Resiko Straegi Perangkat Daerah

Kecamatan Siberut Utara dalam mengelola manajemen risiko dengan melakukan pendekatan persuasif untuk menganalisa dan mengevaluasi risiko dengan melakukan laporan atas rencana tindakan pengendalian dan hasil pelaksanaan, strategis itu adalah:

a. Mengikuti Bimtek Implementasi SIPD maupun bimtek kegiatan lainnya yang dilakukan oleh dinas terkait.
b. Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi dengan dinas terkait dalam rangka menyukseskan visi/ misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai.
c. Penambahan sarana dan prasarana

5.3 Tata Kelola Data Indonesia Ditingkat Perangkat Daerah

Penyusunan rencana strategis kecamatan Siberut Utara tahun 2025-2029 disusun berdasarkan tata kelola Satu Data Indonesia (SDI) yang bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan daerah

Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil yang positif bagi kemajuan dan perkambangan dalam urusan pemerinthan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada Masyarakat.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

RINTO WARDANA

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SIBERUT TENGAH
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel ii
Daftar Gambar Iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SIBERUT TENGAH
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Siberut Tengah 7
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Siberut Tengah 20

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029 24
3.2 Sasaran Renstra Dinas Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029 25
3.3 Strategi Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029 27
3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029 27

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 29
4.2 Penyelenggaraan Bidang Urusan 36

BAB V PENUTUP 38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan Tahun 2025	11
Tabel 2.2	Daftar Pegawai Negeri Sipil menurut Kepangkatan dan Golongan Tahun 2025	11
Tabel 2.3	Daftar Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan	12
Tabel 2.4	Keadaan Alokasi Anggaran Kecamatan Siberut Tengah, 2020-2024	14
Tabel 2.5	Inventaris Barang Kecamatan Siberut Tengah	15
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2020-2024	17
Tabel 2.7	Permasalahan Pelayanan Siberut Tengah	21
Tabel 2.8	Isu Strategis Kecamatan Siberut Tengah	22
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029	26
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029	27
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029	27
Tabel 4.1	Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2030.....	32
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama	36
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Kunci	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kecamatan Siberut Tengah 8
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra.. 30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan Daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Menengah terdiri dari RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, sedangkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik diselaraskan dengan RPJMD sehingga terintegrasi setiap Perangkat Daerah dengan baik untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan penetapan Renstra Perangkat Daerah, dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029 yang berpedoman kepada RPJMD, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah.

Kecamatan Siberut Tengah sebagai bagian dari Perangkat Daerah mempunyai tugas dan fungsinya dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Kecamatan Siberut Tengah diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahunan mendatang, dokumen Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029 tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

Renstra merupakan komitmen Kecamatan Siberut Tengah yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan administrasi serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Siberut Tengah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Tahun 2025-2029. RPJMD Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman bagi Kecamatan Siberut Tengah dalam menyusun dan merumuskan Rencana Strategis.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029 dilakukan dengan pendekatan penganggaran *Money Follow*

Program Priority dengan memperhatikan perencanaan berbasis tematik, holistik, integratif dan spasial, begitu juga tetap fokus pada isu strategis pembangunan yang masih menjadi permasalahan pembangunan jangka pendek dan menegah. Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan salah satu instrument pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan Daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah maupun wakil Kepala Daerah yang terpilih tanggal 20 Februari 2025. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029 didasarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4).

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029 antara Lain:

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
b. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Mengatur Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

a. memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025- 2029 dapat tercapai;
b. mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Kecamatan Siberut Tengah sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian RPJMD Tahun 2025-2029;
c. menjadi acuan dalam penyusunan Renja Kecamatan Siberut Tengah;
d. mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
e. memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders)* tentang rencana pembangunan lima tahunan; dan
f. menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Siberut Tengah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

a. merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
b. mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
c. memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan;
d. mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;
e. memudahkan para pemangku kepentingan *(stakeholders*) untuk menetapkan kebijakan; dan
f. meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kecamatan Siberut Tengah diformulasikan dalam sistematika penulisan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal Renstra Kecamatan Siberut Tengah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematik Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SIBERUT TENGAH

Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Siberut Tengah, sumber daya Kecamatan Siberut Tengah, kinerja pelayanan Kecamatan Siberut Tengah, tantangan dan peluang pengembangan Kecamatan Siberut Tengah. Bab ini terdiri atas:

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Siberut Tengah
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Siberut Tengah

BAB III TUJUAN , SASARAN, SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini diuraikan tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan, penyelenggaraan bidang urusan yang akan dicapai Kecamatan Siberut Tengah dalam 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029
3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029
3.3. Strategi Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029
3.4. Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini di Uraikan Program Kegiatan Sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang akan Kecamatan Siberut Tengah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

4.1 Uraian Program
4.2 Uraian Kegiatan
4.3 Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif
4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui IKU
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SIBERUT TENGAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Siberut Tengah

2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Kecamatan Siberut Tengah.

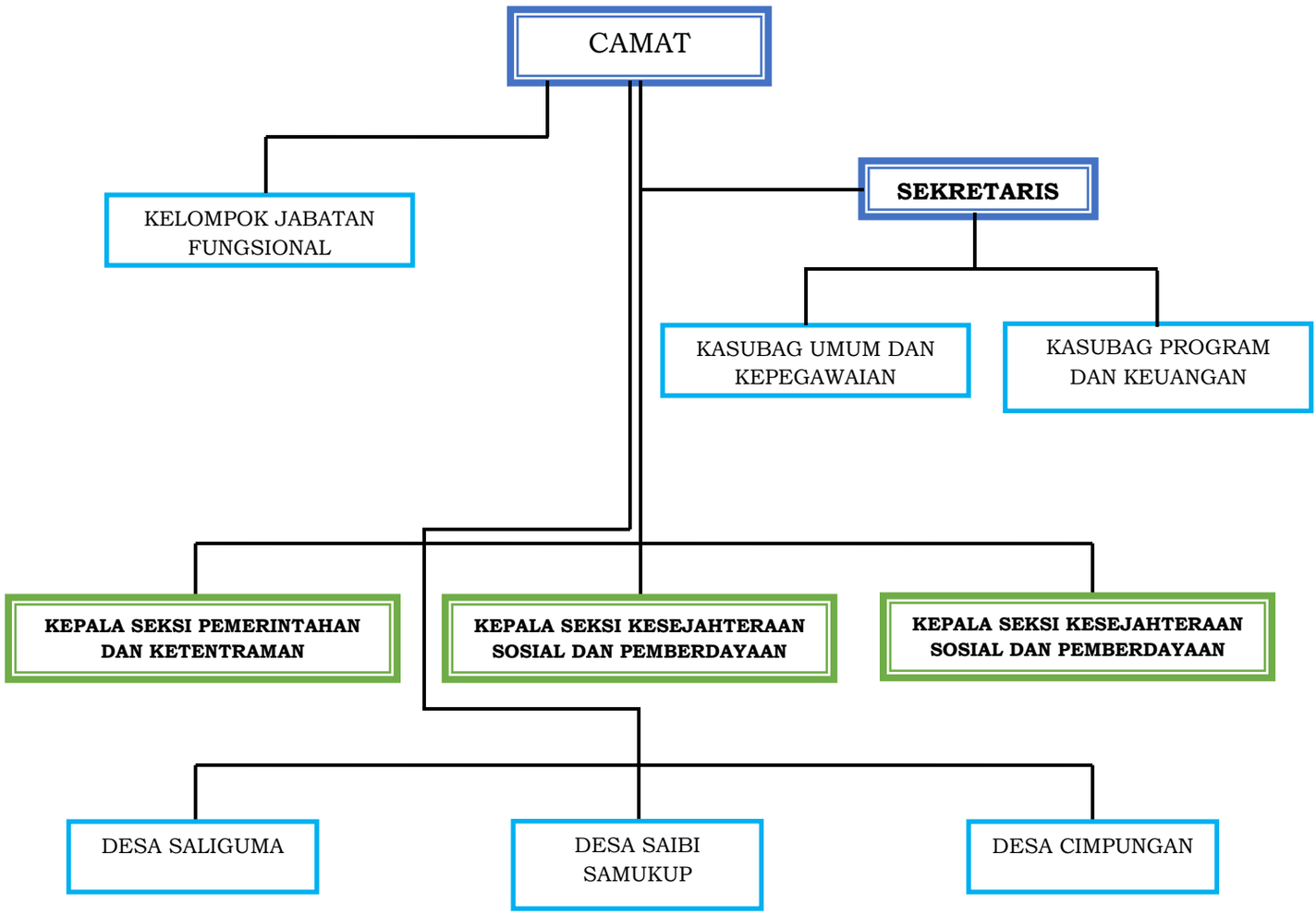
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tugas pokok dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan di wilayah kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Siberut Tengah terdiri dari:

a. camat;
b. sekretaris, membawahkan:
    1. kepala sub bagian umum dan kepegawaian; dan
    2. kepala sub bagian program dan keuangan.
c. kepala seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum
d. kepala seksi kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
e. kepala seksi ekonomi dan pembangunan; dan
f. kelompok jabatan fungsional.

Gambaran tentang bagan susunan organisasi Kecamatan Siberut Tengah adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Kecamatan Siberut Tengah



Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
h. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada camat;
i. pelaksanaan kesekretariatan kecamatan; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tugas masing-masing pejabat struktural adalah sebagai sebagai berikut :

1. Camat

   Camat menyelenggarakan tugas:

   a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
   b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
   d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerahdan peraturan Bupati;
   e. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
   f. mengorganisasikan penyelenggraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah di tingkat kecamatan;
   g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
   h. melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja organisai perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan; dan
   i. melakukan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

   Sekretariat pada kecamatan dipimpin oleh sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

   a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kecamatan;
   b. pemberi dukungan administrasi yang meliputi kepegawian, ketatusahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi lingkup kecamatan;
   c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup kecamatan;
   d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup kecamatan;
   e. pengelola barang milik daerah lingkup kecamatan; dan
   f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub bagian umum dan kepegawaian

   Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala sub bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup administrasi umum, kepala sub bagian umum menyelenggarakan tugas:

   a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup kecamatan;
   b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup kecamatan;
   c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup kecamatan;
   d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup kecamatan;
   e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana lingkup kecamatan;
   f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- ungangan lingkup kecamatan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya;

4. Sub bagian program dan keuangan

Sub bagian keuangan dan penyusunan program dipimpin oleh kepala sub bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. kepala sub bagian program dan keuangan mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup kecamatan;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan angaran lingkup kecamatan;
c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup kecamatan;
d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan urusan pengeloaan keuangan lingkup kecamatan;
e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah lingkup kecamatan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya;

5. Seksi pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum

Seksi pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum dipimpin oleh kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris. Kepala seksi pemerintahan ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan urusan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
b. melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian pemeliharaan, prasarana dan sarana pelayanan umum;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan;
d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dalam tingkat Kecamatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja yang ada di wilayah kecamatan dalam bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum melaksanakan penyiapan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Seksi kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris. Kepala seksi kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan kesejahteraan

sosial di kecamatan;

b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang kesejahteraan sosial pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah di tingkat kecamatan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja yang ada di wilayah Kecamatan dalam bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
f. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Siberut Tengah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, potensi yang diharapkan mendukung tugas pokok Kecamatan Siberut Tengah meliputi :

1. Aparatur sebagai manajer (pemikir, perencanaan, pelayanan dan penggerak) yang menjadi kekuatan pendorong yang utama; dan
2. Hubungan kerja/koordinasi (pegawai) yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan Siberut Tengah.

Berdasarkan data bulan desember 202 adalah sejumlah 24 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan Tahun 2025

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Plt.Camat	1
2	Sekretaris Camat	1
3	Kasi Pemerintahan	1
4	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1
5	Kasubbag Keuangan dan Program	1
6	Kasubbag Umum	1
7	Bendahara Pengeluaran	1
8	Staf bidang Ekonomi & Pembangunan	2
9	Staf Pelaksana Kesejahteraan Sosial & Pemberdayaan Masyarakat	0
10	Staf Pelaksana Kasubag Umum	2

Tabel 2.2
Daftar Pegawai Negri Sipil
Menurut Kepangkatan dan Golongan Tahun 2025

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah Orang
1	Penata TK.I (III/d)	4
2	Penata (III/C)	3
3	Penata Muda TK.I (III/b)	1
4	Penata Muda III/a	3
5	Pengatur TK.I (II/d)	2
7	Pengtaur (II/C)	3
8	Pengatur Muda TK.I (II/b)	0
9	Pengatur Muda II/a	0
	Total	11

Sumber: Bezetting Kec.Siberut Tengah Th.2025.

Tabel 2.3
Daftar Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Pangkat	Jumlah Orang
1.	S2	0
2.	SI	7
3.	DIII	2
4.	SLTA / Sederajat	2

Sumber: Bezetting Kec.Siberut Tengah Th. 2025

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada pada Kecamatan Siberut Tengah jumlah PNS sebayak 11 Orang, Non PNS sebanyak 11 Orang. Rincian Pendidikan Non PNS, S1 berjumlah 7 orang dan SLTA sebanyak 2 orang.

Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Siberut Tengah tentunya didukung dengan anggaran yang memadai. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan penunjang Kecamatan Siberut Tengah selama periode tahun 2021–2024 didukung oleh alokasi anggaran yang fluktuatif namun relatif stabil dalam pelaksanaannya. Secara umum, tren realisasi anggaran menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan rata-rata capaian realisasi mencapai sekitar 93–95% dari total anggaran yang ditetapkan setiap tahunnya. Keadaan alokasi anggaran Kecamatan Siberut Tengah ini dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini. Pada tabel 2.4 di bawah ini dapat dilihat keadaan alokasi anggaran pada tahun 2021 terdapat total anggaran belanja sebesar Rp2.306.532.847 dengan realisasi mencapai Rp2.306.532.847, atau sekitar 98,27% dari total anggaran. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program pada tahun tersebut berjalan sangat efektif dan efisien, dengan hampir seluruh kegiatan dapat direalisasikan sesuai rencana kerja. Pada tahun 2022, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2.305.447.751, dengan realisasi sebesar Rp2.035.149.050 atau 83% dari total pagu. Penurunan rasio realisasi pada tahun ini disebabkan oleh adanya rasionalisasi dan efisiensi belanja yang dilakukan menyesuaikan dengan berkurangnya dana transfer dari Pemerintah Pusat, serta dampak penyesuaian prioritas pembangunan pascapandemi Covid-19. Selanjutnya, pada tahun 2023, alokasi anggaran menurun menjadi Rp1.997.816.132, dengan realisasi sebesar Rp1.907.509.564 atau 94% dari total anggaran. Kinerja ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yang menandakan perbaikan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta meningkatnya kemampuan Kecamatan Siberut Tengah dalam mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Sementara pada tahun 2024, terjadi kenaikan alokasi anggaran menjadi Rp2.350.524.531 dengan realisasi sebesar Rp2.247.048.903, atau 96% dari

pagu. Capaian ini menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang sangat baik, dimana hampir seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

Tabel 2.4

Keadaan Alokasi Anggaran Kecamatan Siberut Tengah

Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15
Belanja	2.306.532.847	2.305.447.751	1.997.816.132	2.350.524.531	2..306.532.847	2.035.149.050	1.907.509.564	2.247.048.903	98,27	83%	94%	96%
Belanja Pegawai	1.110.844.947	1.428.509.851	1.197.992.982	1.331.175.848	1.053.186.752	1.182.340.650	1.123.053.264	1.239.516.903	99,75	97%	98%	93%
Belanja Barang dan Jasa	1.195.687.900	876.937.900	799.823,150	963.490.683	1.188.073.450	852.808.400	784.456.300	951.743.000	79,97	0	92%	99%
Belanja Modal	0	0	25.592.500	2.350.524.531	0	0	25.592.800	55.789.000		88%	95%	99%

Sumber data: Lakip Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2020-2024

Dalam menunjang tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Siberut Tengah, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung seluruh pelayanan di Kecamatan Siberut Tengah. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga sebagai input atau (*capital*) dalam proses pelayanan Kecamatan Siberut Tengah untuk mencapai tujuan organisasi.

Tabel 2.5
Inventaris Barang Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
A	Bangunan		
1	Gedung Kantor	1	Unit
2	Aula	1	Unit
3	Rumah Dinas Camat	1	Unit
4	Rumah Dinas Pegawai	2	Unit
B	Kendaraan		
1	Roda Lima	0	Unit
2	Roda 2	5	Unit
C	Peralatan/Perlengkapan		
1	Komputer PC	5	Unit
2	Laptop	2	Unit
3	Printer	3	Buah
4	Mensin TIK	0	Buah
5	Meja ½ biro	8	Buah
6	Meja Rapat	0	Buah
7	Meja reseption	0	Buah
8	Meja 1 biro	2	Buah
9	Kursi eselon III	2	Buah
10	Kursi Eselon IV	0	Buah
11	Kursi rapat	10	Buah
12	Kursi tamu	1	Set
13	Kursi kerja staf	11	Buah
14	Lemari kayu	9	Buah
15	Filling cabinet	2	Buah
16	Papan pengumuman	1	Buah
17	Sound system	1	Unit
18	Kamera	0	Unit
19	Multi Media Proyektor	1	Unit
20	Mesin Boat	4	Unit
21	Perahu/Body Boat	1	Unit
22	Generating Set	1	Unit
23	Mesin potong rumput	2	Unit
24	Pelbed/TLima tidur besi	0	Unit

Sumber : Bezetting Kec.Siberut Tengah Th.2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Siberut Tengah

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Siberut Tengah berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah yang menekankan pada integrasi seluruh proses, mulai dari perencanaan kinerja, penetapan indikator, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi, dalam satu sistem yang komprehensif (SAKIP).

Kecamatan Siberut Tengah menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya

berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel. Pencapaian kinerja kecamatan siberut selayan dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	100	100	100	100	100
2	Penetapan APBDesa Tepat waktu			100	100	100	100	100	100	80	90	90	90	95	80	90	90	90	95
3	Serapan APBDesa diatas 90 persen			100	100	100	100	100	100	80	90	90	95	95	90	90	90	95	95
4	Penanganan Kasus kriminal dikecamatan yang tertangani			100	100	100	100	100	100	80	80	90	90	90	90	90	90	90	90
5	Aduan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	80	80	80	90	90	80	80	90	90	90
6	Nilai SAKIP			B	B	B	B	B	B	-	-	BB	BB	B	B	B	BB	BB	B
7	Jumlah Inovasi yang diterapkan			1				1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
8	Persentase capaian kinerja perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	93.78	96,18	96.94	97,78	98,94	93.78	96,18	96.94	97,78	98,94

Pencapaian kinerja perangkat daerah Kecamatan Siberut Tengah menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, perangkat daerah memulai dengan dasar yang solid untuk meningkatkan kinerja. Kemudian, pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan berkat implementasi perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif. Pencapaian penetapan APBDes Tepat waktu dan serapan APBDes di Kecamatan Siberut Tengah menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 hingga 2022, pencapaian serapan APBDesa masih berada di bawah 90%. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, terjadi peningkatan yang mencolok dengan pencapaian serapan APBDesa naik signifikan dan stabil di atas 90%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam manajemen keuangan desa dan peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan APBDes. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berhasil meningkatkan kemampuan dalam menyerap anggaran dan melaksanakan program-program pembangunan desa secara lebih efektif dan efisien.

Pencapaian penanganan kasus kriminal di kecamatan Siberut Tengah Tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan signifikan, dengan jumlah kasus yang tertangani meningkat secara bertahap. Selain itu, aduan masyarakat yang ditindaklanjuti juga mengalami kenaikan, menunjukkan efektivitas upaya penegakan hukum dan pelayanan publik. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kecamatan Siberut Tengah telah berhasil meningkatkan kemampuan dalam menangani kasus kriminal dan menindaklanjuti aduan masyarakat. Upaya ini berkontribusi pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Di samping kinerja Kecamatan Siberut Tengah sebagaimana tercantum dalam penjabaran di atas maka secara umum dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi perkantoran
    a. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kecamatan Siberut Tengah selama 5 (Lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan, dimana jasa komunikasi internet yang pernah diputus telah dipasangkan kembali;
    b. penyediaan alat tulis kantor penyediaan alat tulis kantor di Kecamatan Siberut Tengah setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada publik bertambah, sehingga penyediaan alat tulis kantor setiap tahun tidak terpenuhi; dan
    c. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di Kecamatan Siberut Tengah setiap tahunnya mengalami penurunan disebabkan peralatan dan perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.
2. Kinerja pelayanan di bidang pemerintahan.
    Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Siberut Tengah di bidang pemerintahan tercermin dari:
    a. mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada aparat kecamatan dan desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari –hari;
    b. memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah maupun pihak lainnya;
    c. pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa;

d. meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
e. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan didesa; dan
f. memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

3. Pelayanan di bidang ekonomi dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat
   a. monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
   b. monitoring harga sembako;
   c. monitoring pembangunan desa;
   d. monitoring penyaluran beras raskin dan program-program sosial lainnya;
   e. monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Siberut Tengah;
   f. pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan posyandu;
   g. monitoring dan fasilitasi penerbitan izin–izin yang dibutuhkan masyarakat; dan
   h. terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamatan "PATEN".

      PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup pemerintah kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi kantor/badan/dinas pelayanan terpadu di daerah di seluruh Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bawah koordinasi dan binaan camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Siberut Tengah selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Siberut Tengah 5 (Lima) tahun ke depan di antaranya:

a. struktur organisasi kecamatan belum terisi secara memadai;
b. sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di kecamatan;
c. jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas masih cukup rendah maupun sisi kuantitasnya yang semakin terbatas;
d. belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
e. beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
f. semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
g. semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Siberut Tengah harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
h. semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari Masyarakat;

i. pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (Lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan kinerja pelayanan Kecamatan Siberut Tengah antara lain:

a. hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
b. tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
c. penerapan otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *good governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesLimaan bagi Kecamatan Siberut Tengah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
d. terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
e. keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan; dan
f. kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanan pembangunan; dan akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan kecamatan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Berikut beberapa contoh kelompok sasaran layanan kecamatan antara lain:

1. Masyarakat umum: layanan yang ditujukan untuk masyarakat luas, seperti:
   - layanan kesehatan;
   - layanan Pendidikan; dan
   - layanan informasi dan komunikasi.
2. Kelompok rentan: layanan yang ditujukan untuk kelompok rentan, seperti:
   - lansia;
   - anak-anak dan remaja;
   - penyandang disabilitas; dan
   - masyarakat miskin atau rentan.
3. Petani dan nelayan: layanan yang ditujukan untuk petani dan nelayan, seperti:
   - layanan penyuluhan pertanian;
   - layanan bantuan benih dan pupuk; dan
   - layanan pemasaran hasil pertanian.
4. Usaha mikro, kecil, dan menengah: layanan yang ditujukan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, seperti:
   - layanan pelatihan dan pendampingan;
   - layanan akses pembiayaan; dan
   - layanan pemasaran.
5. Masyarakat adat: layanan yang ditujukan untuk masyarakat adat, seperti:
   - layanan pelestarian budaya;
   - layanan pendidikan dan kesadaran masyarakat; dan

- layanan bantuan social.

6. Instansi vertikal yakni: kantor-kantor pemerintahan di tingkat kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi khusus, seperti forkopimcam, kantor polisi, kantor pos, dan lain-lain;
7. Organisasi masyarakat yakni lembaga swadaya masyarakat, kelompok swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, dan organisasi lainnya yang beroperasi di wilayah kecamatan;
8. Pihak lain yakni universitas, lembaga penelitian, dan pihak lain yang memiliki hubungan dengan kegiatan kecamatan.

Dalam menentukan kelompok sasaran layanan di kecamatan, perlu dipertimbangkan beberapa faktor, seperti:

1. Kebutuhan dan masalah: apa kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kecamatan?
2. Prioritas: apa prioritas layanan yang perlu diberikan kepada masyarakat kecamatan?
3. Sumber daya: apa sumber daya yang tersedia untuk mendukung layanan yang akan diberikan kepada masyarakat kecamatan.

Dengan menentukan kelompok sasaran layanan kecamatan yang tepat, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Siberut Tengah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Siberut Tengah

Berikut beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Siberut Tengah di kecamatan yang selalu dihadapi:

a. keterbatasan sumber daya: keterbatasan sumber daya, seperti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur, dapat menghambat kualitas pelayanan;
b. prosedur yang rumit: prosedur yang rumit dan birokratis dapat menyebabkan keterlambatan dan kesulitan dalam pelayanan;
c. keterlibatan masyarakat yang kurang: keterlibatan masyarakat yang kurang dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat menyebabkan pelayanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
d. kualitas pelayanan yang tidak konsisten: kualitas pelayanan yang tidak konsisten dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan kehilangan kepercayaan terhadap Kecamatan Siberut Tengah;
e. teknologi yang belum optimal: pemanfaatan teknologi yang belum optimal dapat menyebabkan keterlambatan dan kesulitan dalam pelayanan;
f. koordinasi yang kurang: koordinasi yang kurang antara Kecamatan Siberut Tengah dan *stakeholder* lainnya dapat menyebabkan tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam pelayanan;
g. keterbatasan akses: keterbatasan akses ke pelayanan dapat menyebabkan kesulitan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan;
h. pengawasan dan evaluasi yang kurang: pengawasan dan evaluasi yang kurang dapat menyebabkan pelayanan yang tidak efektif dan tidak efisien; dan
i. kurangnya transparansi: kurangnya transparansi dalam pelayanan dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dan kesulitan dalam mengakses informasi.

Dengan mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut, Kecamatan Siberut Tengah melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pelayanan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kecamatan Siberut Tengah. Suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhalayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya. Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, maka permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan, maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Siberut Tengah yang berhasil diobservasi, dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur desa serta *stakeholder*s sebagai berikut:

1. kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terlambat.
2. lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintah kurang.
4. lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan.
5. sebagai kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa, permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah.
6. anggaran dana yang tertuang dokumen pelaksanaan anggaran Kecamatan Siberut Tengah belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada
7. fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, mebeleur, dan peralatan lain yang masih kurang;
8. sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Siberut Tengah masih terbatas;
9. ada sedikit kesulitan dalam pelaksanaan program bila program tersebut ada koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang kita rencanakan.

Tabel 2.7
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Siberut Tengah
Kecamatan Siberut Tengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik	Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di kecamatan kurang maksimal	Keterbasan SDM petugas pelayanan di kecamatan
		Keterbatasan jumlah sarana dan Prasarana
		Lemahnya koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah daerah
	Lambatnya penyusunan dan penetapan APBDes	Keterbatasan SDM aparatur pemerintahan desa
		Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan desa tentang kebijakan pemerintah kabupaten
		Terbatasnya angaran Kecamatan dalam melakukan pengawasan
Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan	Masih rendahnya pemanfaatan digitalisasi	Rendahnya komitmen perangkat daerah dalam

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	dalam pengelolaan pemerintahan	memanfaatkan digitalisasi
		Masih terbatasnya sumber daya manusia dan lembaga di Kepulauan Mentawai dalam menyediakan dan menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan pemerintahan
		Masih rendahnya penerapan sistem meritokrasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan ASN
		Masih rendahnya kinerja ASN

2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Siberut Tengah

Isu-isu strategis merupakan gambaran permasalahan-permasalahan yang di kedepankan untuk diatasi dan berdampak luas. Suatu kondisi atau situasi yang menjadi isu strategis apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau menghilangkan peluang besar untuk meningkatnya pelayanan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Sebuah isu strategis dapat dilihat dari:

a. Apakah isu tersebut sedang menjadi perhatian.
b. Apakah isu tersebut mendesak.
c. Apakah isu tersebut sesuai dengan kebutuhan publik.
d. Apakah isu tersebut membantu kebutuhan publik.
e. Apakah isu tersebut sesuai dengan visi dan misi.
f. Apakah isu tersebut melibatkan stakeholder luas.
g. Apakah isu strategis tersebut aman dari dampak dari luar.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas maka isu strategis Kecamatan Siberut Tengah dalam periode 2025-2029 adalah peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat, dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8
Isu Strategis Kecamatan Siberut Tengah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KHLS yang relevan dengan PD	Isu Dinasmis Yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Sumber Daya Alam Pertanian dan Perikanan	• Keterbatasan Sumber Daya manusia • Kurangnya Koordinasi • Keterlibatan Masyarakat yang Kurang	• Pembangunan Yang berkelanjutan • Perubahan Iklim • Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan Hidup • Indikator Tujuan Pembangunan Yang berkelanjutan	• Transformasi Birokrasi • Penyerapan anggaran • Koordinasi dan Pelaksanaan	• Pemanfaatan Teknologi Digital • Partisipasi Masyarakat • Inovasi dan Kreativitas	• Pengelolaan Sumber daya Alam • Pengembangan Ekonomi Regional • Pengelolaan Lingkungan • Kwalitas Pelayanan Publik	• Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik • Masih rendahnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel

Berdasarkan permasalahan dan uraian sebelumnya dapat ditentukan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Siberut Tengah adalah:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

   Kualitas pelayanan publik di Kecamatan Siberut Tengah hingga saat ini masih belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta rendahnya koordinasi antar unit kerja turut mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Proses pelayanan masih banyak dilakukan secara manual, belum sepenuhnya berbasis standar operasional prosedur, serta belum mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

   Permasalahan tersebut diperburuk oleh kondisi geografis Kecamatan Siberut Tengah yang tersebar di wilayah kepulauan dengan akses transportasi terbatas, sehingga menghambat pemerataan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pelayanan juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis digital dan potensi lokal agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan merata di seluruh wilayah kecamatan.

2. Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel.

   Kecamatan Siberut Tengah hingga saat ini masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan, dan akuntabel. Kelemahan tersebut tercermin dari masih terbatasnya kapasitas aparatur dalam mengelola administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif, serta belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* di seluruh lini kerja. Mekanisme koordinasi antarunit kerja masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi, sehingga pelaksanaan kebijakan sering tidak selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, transparansi informasi publik belum berjalan optimal akibat minimnya sistem digitalisasi administrasi, sementara partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan masih rendah, menyebabkan kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya merefleksikan kebutuhan masyarakat.

   Secara analitis, rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kecamatan Siberut Tengah berdampak pada kurang efisiennya pelaksanaan program pembangunan dan lemahnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, serta belum kuatnya budaya kerja berbasis kinerja menjadi faktor utama yang perlu segera dibenahi. Diperlukan upaya peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis dan manajerial, penguatan sistem pengawasan internal, serta penerapan sistem pelayanan dan pelaporan berbasis digital. Selain itu, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi akan memperkuat prinsip inklusivitas dan transparansi, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029 yang maju, berdaya saing dan sejahtera. untuk memujudkan visi tersebut maka di butuhkan beberapa misi antara lain ;

a. mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang inklusif, responsif dan berkualitas;
b. mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, nilai;
c. tambah, daya saing ekonomi daerah;
d. mewujudkan pembangunan insfrakstruktur kewilayahan yang berkualitas, berkeadilan dan berwawasan lingkungan;
e. mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi
f. mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana
g. mewujudkan parawisata dan ekonomi kreatif berkelas dunia;
h. mewujudkan masyarakat yang aman harmonis dan berkeadilan; dan
i. penguatan transformasi tata kelola birokrasi yang responsif, inovatif, dan terpercaya.

Untuk dapat merealisasikan RPJMD Tahun 2025-2029 melalui visi dan misi Daerah maka Kecamatan Siberut Tengah harus menyusun Renstra untuk mencapai tujuan dan sasaran. Oleh sebab itu, Kecamatan Siberut Tengah sebagai unsur dari Pemerintah Daerah harus menentukan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh aparatur kecamatan dan desa dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk:

1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting karena Inkosistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan
2. Kreatif yaitu : setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;
3. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan Desa;
4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Siberut Tengah diharapkan

dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Siberut Tengah telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki sebagai faktor-faktor yang memeengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan yang ingin capai Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani”.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Kecamatan Siberut Tengah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh Kecamatan Siberut Tengah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Siberut Tengah menetapkan sasaran strategi ”Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan”. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Siberut Tengah tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra.

Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Tengah merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Adapun sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

a. meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan;
b. meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan; dan
c. meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Siberut Tengah.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	*Baseline* 2024	Target Tahun					Ket
						2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani		Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	81,25	81,24	81,47	82,06	82,35	82,64	
		Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan	Kecepatan waktu pelayanan	waktu	1 hari	1 hari	8 jam	8 jam	4 jam	2 jam	
			Persentase serapan APBDes di atas 90%	persen	75,56	77,86	80,45	82,48	84,21	85,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	indeks	77,45	78,12	80,45	81,02	81,28	81,65	
		Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LAKIP	nilai	76	79	79,5	79,6	79,7	79,8	
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah inovasi	1 inovasi	2 inovasi	3 inovasi	3 inovasi	4 inovasi	4 inovasi	
			Capaian kinerja perangkat daerah	persen	75	80	82	83	85	86	

3.3 Strategi Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komperehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Renstra diperlukan strategi. Strategi berisi langkah-langkah dan program untuk mewujudkan target - target kinerja. Kebjakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta instansi pemerintah. Pentahapan pencapaian Renstra Kecamatan Siberut Tengah dapat disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan SDM dalam penguatan layanan dalam pemerintahan di kecamatan	Penguatan Infrastruktur digitalisasi pelayanan	Optimalisasi dalam penerapan digitalisasi	Meningkatkan kualitas pelayanan dengan penguatan jangkauan layanan digital	Penerapan transformasi digital dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik

3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Berikut disajikan kebijakan Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keselarasan mulai dari tujuan, strategi dan kebijakan Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025 - 2029 secara lengkap disajikan dalam lampiran tabel dibawah;

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan	Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani
		Peningkatan Penyusunan RKPDesa yang cermat dan tepat waktu menjadi dasar penyusunan APBDesa, RKPDesa	Peningkatan kualitas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) agar lebih cermat dan tepat waktu, sehingga RKPDesa dapat menjadi dasar yang kuat dan valid dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dengan RKPDesa yang baik, pembangunan desa dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, dan efisien

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan APBDesa untuk memastikan ketepatan waktu dan efektivitas penggunaan anggaran.	Penyelenggaraan Evaluasi kinerja pelaksanaan APBDesa laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara rutin dan transparan.
		Penguatan Fungsi Forkopincam (linmas, Babinsa, Babinkamtibnas)	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
		peningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan	Proses pelayanan untuk memastikan efisiensi dan efektif
	Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan peningkatan efektivitas penggunaan dana desa
		Penguatan forum koordinasi desa	Peningkatan Forum koordinasi desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, seperti pelayanan administrasi kependudukan
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Peningkatkan nilai LAKIP, menunjukkan akuntabilitas kinerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
		Peningkatan efektifitas penerapan inovasi di kecamatan	Peningkatan Pelayanan publik di kecamatan dapat menjadi lebih efisien, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat
		Peningkatkan transparansi dalam pelaporan kinerja.	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia ASN Kecamatan
		Melakukan evaluasi kinerja secara teratur dan membuat laporan mengenai kinerja	Menyediakan kerangka acuan untuk pengambilan keputusan dan tindakan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Tengah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Siberut Tengah ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Siberut Tengah adalah sebagai berikut :

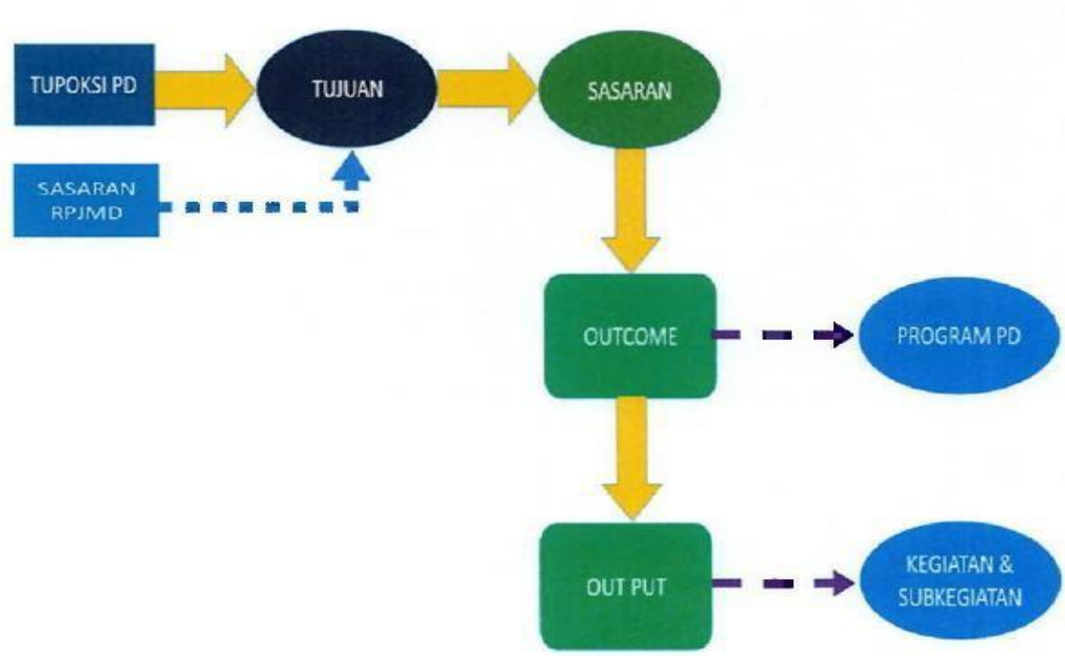
a. penunjang urusan pemerintahan Daerah
   Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.
b. penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
   Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Siberut Tengah serta RPJMD.
c. pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
   Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa merupakan program strategis pemerintah daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.
d. program pemberdayaan masyarakat desa
   Program pemberdayaan masyarakat desa merupakan program strategis Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memastikan adanya pemberdayaan dan pastisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui forum masyarakat
e. program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
   Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum program ini bertujuan untuk memberi wawasan kepada masyarakat secara langsung tentang bagaimana memahami ideologi dan pengamalan Pancasila serta UUD Dasar 1945.

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Siberut Tengah adalah sebagai berikut :

a. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan Siberut Tengah;
b. administrasi keuangan Kecamatan Siberut Tengah;
c. administrasi umum Kecamatan Siberut Tengah;
d. pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
e. penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
f. pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
g. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
h. kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa;
i. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat;
j. fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa;
k. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Republik Indonesia; dan
l. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.

Perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Kecamatan Siberut Tengah merupakan struktur sistematis dalam dokumen Renstra Kecamatan Siberut Tengah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Siberut Tengah. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Kecamatan Siberut Tengah juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Kecamatan Siberut Tengah serta teknik merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Kecamatan Siberut Tengah dijelaskan pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra



Rencana Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Renstra Kecamatan Siberut Tengah yang memuat sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Kecamatan Siberut Tengah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana Renja Perangkat Daerah dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan dijelaskan pada tabel 4.1 rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029.

Rencana kinerja tahun 2026–2030 pada tabel 4.1 di bawah ini menunjukan

arah pembangunan yang konsisten pada peningkatan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Seluruh program menitikberatkan pada pencapaian stabilitas kinerja (90–100%), peningkatan kualitas pelayanan, serta efisiensi pembiayaan melalui peningkatan pagu indikatif secara bertahap. Dari hasil analisis tabel, sebagian besar program mempertahankan target capaian kinerja stabil (90–100%), dengan peningkatan pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan operasional, inflasi, serta penguatan kelembagaan Kecamatan Siberut Tengah.

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2030

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah	90 %	90%	1.627.156.342	90%	2.129.210.452	90%	2.307.722.842	90%	2.301.210.452	90%	2.515.210.452
Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99%	99%	28.050.000	90%	61.496.500	90%	71.496.500	90%	81.496.500	90%	91.496.500
Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Dihasilkan	0%	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Evaluasi capaian Kinerja Program PD terhadap Renstra	1 Laporan	1 Laporan	28.050.000	1 Laporan	61.496.500	1 Laporan	71.496.500	1 Laporan	81.496.500	4 Laporan	91.496.500
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunya Pelaporan Administrasi Keuangan	90%	90%	.445.171.056	90%	1.443.382.342	90%	1.493.382.342	90%	1.519.382.342	90%	1.569.382.342
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	1.308.881.056,	10 Orang/Bulan	1.308.881.056,	10 Orang Bulan	1.184.478.342	10 Orang/Bulan	1.200.478.342	10 Orang/Bulan	1.250.478.342
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Umlah dokumen Administrasi Pelaksanaann Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	136.290.000,	12 Laporan	308.904.000	12 Laporan	308.904.00	12 Laporan	318.904.000	12 Laporan	318.904.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Perangkat daerah	90%	90%	125.842.000	90%	189.331.610	90%	219.844.000	90%	233.331.610	90%	237.331.610
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang disediakan	9 Item	9 Item	4.715.000	9 Item	5..844.000	9 Item	6.844.000	9 Item	7.844.000	9 Item	8.844.000
Penyediaan Barang cetak dan Penggandaa	Jumlah bahan Cetak dan Pengganddaan yang disediakan	3 Paket	3 Paket	9.902.000	3 Paket	2.508.410	3 Paket	3.508.410	3 Paket	4.508.410	3 Paket	5.508.410
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik	4 Item	4 Item	60.620.000	4 Item	47.281.200	4 Item	50.281.200	4 Item	55.281.200	4 Item	57.281.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang Dilakukan	12 laporan	12 Laporan	50.605.000	12 Laporan	133.698.000	12 Laporan	145.698.000	12 Laporan	165.698.000	12 Laporan	165.698.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Operasional Kantor	90%	90%	0	90%	230.000.000	90%	260.000.000	90%	175.000.000	90%	325.000.000
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang disediakan	2 Unit	1 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	80.000.000	0 Unit	0	1 Unit	90.000.000
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	0 Unit	0 Unit	0	6 Unit	100.000.000	6 Unit	100.000.000	6 Unit	100.000.000	6 Unit	80.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	0 Unit	0 Unit	0	7	130.000.000	6	80.000.000	0 Unit	0	6	80.000.000

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	yang disediakan				Unit		Unit				Unit	
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JumlahPengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	-	0 Unit	0	4 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang kegiatan Operasional Kerja Lapangan	90%	90%	149.000.000	90%	192.000.000	90%	192.000.000	90%	192.000.000	12 Rekening	192.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	36.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Honorarium yang dibayarkan	12 Laporan	12 Laporan	143.000.000	12 Laporan	156.000.000	12 Laporan	156.000.000	12 Laporan	156.000.000	12 laporan	156.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	90%	0	90%	13.000.000	90%	71.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan Biaya Pajak	2 Unit	2Unit	5.170.000	2 Unit	13.000.000	2 Unit	13.000.000	5 Unit	20.000.000	4 Unit	25.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan yang direhablitasi	1 Unit	1Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	58.000..000	2 Unit	80.000..000	4 Unit	75.000.000
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka Pelayanan Publik	90%	90%	17.100.000	90%	45.400.000	90%	65.400.000	90%	75.400.000	90%	90.400.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Survei Kepuasan Masyarakat	90%	90%	17.100.000	90%	45.400.000	90%	65.400.000	4000 KK	75.400.000	16.000 KK	90.400.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Target Yang dicapai	300 Orang	300 Orang	17.100.000	300 Orang	45.400.000	300 Orang	65.400.000	4000 KK	75.400.000	16.000 KK	90.400.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Keluraha n	90%	90%	33.778.000	90%	40.446.000	90%	55.446.000	90%	66.446.000	90%	76.446.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan yang di hasilkan	25 Lembaga	25 Lembaga	24.368.000	25 Lembaga	21.462.000	25 Lembaga	28.462.000	25 Lembaga	35.462.000	25 Lembaga	40.462.000

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
			TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Mayarakat	Hasil Kegiatan yang dilaksanakan	3 Laporan	3 Laporan	13.200.000	3 Laporan	18.984.000	3 Laporan	25.984.000	3 Laporan	30.984.000	12 Laporan	35.984.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Kegiataan Urusan Pemerintahan Umum	90%	90%	86.180.000	90%	95.771.000	90%	100.236.000	90%	115.500.000	90%	135.500.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan yang Telah dilaksanakan	90%	90%	86.180.000	90%	95.771.000	90%	100.236.000	90%	115.500.000	90%	135.500.000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesdia Tahun 1945,pelestariaan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	86.180.000	1 Laporan	73.535.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	100.000.000
Pelaksanan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Terlaksananya Forum Muspika Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0	1 laporan	22.236.000	1 Laporan	25.236.000	1 laporan	30.500.000	1 Laporan	35.500.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pemerintahan yang Bebas KKN	90%	90%	47.100.000	90%	75.131.500	90%	78.131.500	90%	100.000.000	90%	125.000.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	47.100.000	95	75.131.500	90	78.131.500	90	100.000.000	90	125.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Capaian Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Desa	95%	95%	47.100.000	100%	75.131.500	100%	78.131.500	100%	100.000.000	100%	125.000.000

Berdasarkan analisa Tabel 4.1 di atas diperoleh beberapa gambaran umum, yaitu pada program penunjang urusan Pemerintahan Daerah mempunyai peran penting dalam memastikan fungsi dasar pemerintahan daerah berjalan optimal, mencakup aspek perencanaan, administrasi, dan pengelolaan keuangan. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah dengan baseline data capaian 90% pada tahun 2024, dan ditargetkan tetap stabil hingga 2030. Untuk Tren anggaran meningkat dari Rp 1,63 miliar (2026) menjadi Rp 2,52 miliar (2030). Peningkatan ini menggambarkan penguatan kapasitas kelembagaan dan adaptasi terhadap beban kerja serta harga barang/jasa.

Analisis program perencanaan dan evaluasi kinerja Kecamatan Siberut Tengah, terlihat konsisten dengan capaian 99% penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi. Anggaran meningkat dari Rp 28 juta (2026) menjadi Rp 91 juta (2030), sejalan dengan peningkatan beban administrasi. Contohnya Renstra dan Renja Perangkat Daerah belum menunjukkan aktivitas berarti (0 dokumen), yang menunjukkan perlunya penjadwalan ulang penyusunan Renstra/Renja Kecamatan Siberut Tengah agar selaras dengan periode RPJMD berikutnya.

Pada sub kegiatan administrasi keuangan Kecamatan Siberut Tengah menunjukan kinerja 90% dengan anggaran meningkat dari Rp 1,44 miliar (2026) ke Rp 1,57 miliar (2030). Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi pembayaran ASN dan penguatan pengelolaan keuangan. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, jumlah pegawai berkurang dari 12 menjadi 10 orang per bulan sejak 2027, sementara anggaran relatif stabil sekitar Rp 1,2 miliar/tahun, menandakan efisiensi belanja pegawai.

Pada sub kegiatan administrasi umum dan logistik kantor di Kecamatan Siberut Tengah, tersedianya perlengkapan dan bahan operasional meningkat dari Rp 125 juta (2026) menjadi Rp 237 juta (2030). Peningkatan ini diarahkan untuk mendukung operasional kantor yang lebih modern dan tertib administrasi.

Program pengadaan barang milik Daerah dan penunjang operasional, program ini menunjukkan tren peningkatan investasi pada sarana prasarana kantor dan operasional pemerintahan. Pengadaan kendaraan dinas, peralatan, dan mebel mulai dianggarkan kembali pada tahun 2027–2030, menunjukkan arah revitalisasi aset pemerintah daerah. Misalnya: Pengadaan kendaraan operasional: mulai 2028 (2 unit, Rp 80 juta) dan 2030 (1 unit, Rp 90 juta). Pengadaan mebel dan mesin lainnya: dimulai tahun 2027–2030 dengan nilai Rp 80–130 juta. Pengadaan sarana gedung: muncul kembali pada tahun 2029–2030 dengan nilai Rp 75 juta/tahun. Kenaikan investasi fisik ini menandakan pergeseran dari pembiayaan rutin ke penguatan aset dan infrastruktur kantor guna menunjang pelayanan publik dan efektivitas kerja.

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Siberut Tengah adalah menjaga kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat melalui pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan. Target capaian tetap 90% sepanjang periode. Anggaran meningkat dari Rp 17,1 juta (2026) menjadi Rp 90,4 juta (2030). Kegiatan utama program ini adalah survei kepuasan masyarakat dengan peningkatan sasaran dari 4.000 KK (2029) menjadi 16.000 KK (2030). Artinya, terjadi perluasan cakupan pelayanan dan partisipasi masyarakat secara signifikan.

Program pemberdayaan masyarakat Desa, program ini mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan desa. Capaian target konsisten 90%. Anggaran meningkat dari Rp 33,7 juta (2026) menjadi Rp 76,4 juta (2030). Kegiatan strategis untuk program ini Adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa yaitu menghasilkan 25 dokumen per tahun, menunjukkan keberlanjutan

perencanaan partisipatif. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat Siberut Tengah pada target capaian program ini meningkat dari 3 laporan (2026–2029) menjadi 12 laporan (2030), menunjukkan perluasan kegiatan dan output nyata pemberdayaan masyarakat.

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, program ini berperan menjaga stabilitas politik, wawasan kebangsaan, dan koordinasi di tingkat kecamatan. Target capaian stabil di 90%. Anggaran meningkat signifikan dari Rp 86 juta (2026) menjadi Rp 135 juta (2030). Kegiatan yang direncanakan seperti, pembinaan wawasan kebangsaan meningkat hingga Rp 100 juta di 2030, menegaskan komitmen terhadap penguatan ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Pelaksanaan forum muspika mulai aktif tahun 2027 (Rp 22 juta) hingga meningkat menjadi Rp 35 juta (2030). Program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa, Fokus utama program ini adalah memastikan pemerintahan desa berjalan transparan dan bebas KKN. Capaian kinerja stabil di 90–100%. Pagu indikatif meningkat dari Rp 47 juta (2026) menjadi Rp 125 juta (2030). Indikator penting yaitu fasilitasi dan pengawasan desa meningkat hingga 100% capaian pada tahun 2027–2030. Indeks kepuasan masyarakat dipertahankan di angka 90–95, menunjukkan efektivitas koordinasi dan pembinaan pemerintah desa.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja target kinerja pencapaian tujuan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Utama (IKU) Kecamatan Siberut Tengah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Siberut Tengah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka indikator kinerja Kecamatan Siberut Tengah selama 5 tahun ke depan (2025-2029) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	81,25	81,24	81,47	82,06	82,35	82,64	
2	Kecepatan waktu pelayanan	waktu	1 hari	1 hari	8 jam	8 jam	4 jam	2 jam	
3	Persentase serapan APBDes di atas 90%	persen	75,56	77,86	80,45	82,48	84,21	85,00	
4	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	indeks	77,45	78,12	80,45	81,02	81,28	81,65	
5	Nilai LAKIP	nilai	76	79	79,5	79,6	79,7	79,8	
6	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah inovasi	1 inovasi	2 inovasi	3 inovasi	3 inovasi	4 inovasi	4 inovasi	
7	Capaian kinerja perangkat daerah	persen	75	80	82	83	85	86	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Siberut Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	persen	68	68	68	68	68	68	
3	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu	persen	75	80	82	83	85	90	
5	Persentase serapan APBDes diatas 90 persen	persen	75	80	82	83	85	90	

BAB V
PENUTUP

Renstra ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh aparatur. di lingkungan Kecamatan Siberut Tengah yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders),* baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui pemberitaan media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya. Di samping itu, Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LAKIP nantinya. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategi ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Renstra Kecamatan Siberut Tengah Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi kantor Kecamatan Siberut Tengah.

Manajemen risiko dalam Renstra Kecamatan Siberut Tengah sangatlah penting untuk memastikan keberhasilan renstra dengan mengindenfikasi risiko, menilai kemungkinan dampak risiko, mengembangkan risiko, serta integrasi manajemen risiko dalam Renstra. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya.

Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat Kecamatan Siberut Tengah bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan daerah serta juga merupakan kebijakan pemerintah untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar-instansi pusat dan daerah.

Dalam bab penutup ini, semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Kecamatan Siberut Tengah.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SIBERUT BARAT
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel ii
Daftar Gambar iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SIBERUT BARAT
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Siberut Barat 7
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Siberut Barat 19

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029..... 23
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029 ...
3.3 Strategi Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029.... 23
3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029 26

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 29
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 39

BAB V PENUTUP 41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan Tahun 2025	10
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)	11
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Honorer	11
Tabel 2.4	Daftar Pegawai Negeri Sipil Menurut Kepangkatan dan Golongan Tahun 2025	11
Tabel 2.5	Daftar Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	11
Tabel 2.6	Inventaris Barang Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025	12
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Siberut Barat Tahun 2020-2024	16
Tabel 2.8	Pencapaian Realisasi Anggaran OPD kecamatan Siberut Barat Tahun 2021-2025	17
Tabel 2.9	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Siberut Barat	20
abel 2.10	Isu Strategis Kecamatan Siberut Barat	21
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029	25
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029 ..	27
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029.....	28
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan /Subkegiatan Renstra Kecamatan Siberut Barat	31
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	33
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	38
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama.....	39
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Organisasi Kecamatan Siberut Barat	8
Gambar 3.1	Kerangka Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	24
Gambar 3.2	Strategi Renstra Kecamatan Siberut Barat	26
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Renstra ini berpedoman dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehingga, Perencanaan Pembangunan Daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki Daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Menengah Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari RPJMD dan Renstra OPD. Penyusunan RPJMD dikoordinasikan oleh BAPPERIDA, sedangkan penyusunan Renstra OPD disusun oleh OPD sesuai dengan tugas dan kewenanganannya.

OPD merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah sehingga terintegrasi setiap OPD dengan baik untuk mencapai tujuan OPD. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

PenahapanRenstra Kecamatan Siberut Barat disusun berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Nebegri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 yang terdiri dari tahapan sebagai berikut: Persiapan penyusunan Renstra OPD, Penyusunan rancangan Renstra OPD, Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra OPD, dalam penyusunan Renstra OPD Kecamtan Siberut Barat Tahun 2025-2029 yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat daerah.

OPD Kecamatan Siberut Barat sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas dan fungsinya dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan tupoksi OPD kecamatan Siberut Barat diperlukan suatu

dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam Empat tahunan mendatang, Dokumen Renstra OPD Kecamatan Siberut Barat tahun 2025-2029 tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

Renstra merupakan komitmen OPD Kecamatan Siberut Barat yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan dan pelayanan administrasi serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi OPD kecamatan Siberut Barat dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.

RPJMD Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman bagi OPD Kecamatan Siberut Barat dalam menyusun dan merumuskan penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029 dilakukan dengan pendekatan penganggaran *Money Follow Program Priority* dengan memperhatikan perencanaan berbasis *tematic, holistic, integrative* dan *spacial*, begitu juga tetap fokus pada isu strategis pembangunan yang masih menjadi permasalahan pembangunan jangka pendek dan menengah.

Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Renstra OPD merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun kedepan selama masa pimpinan Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah yang terpilih tanggal 20 Febrauari 2025. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-OPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 225);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4).

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam pelaksanaan tugas untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan di Kecamatan Siberut Barat, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025-2029 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun secara eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan *(Stakeholders)* tentang rencana pembangunan di Kecamatan Siberut Barat.
4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan pada Kecamatan Siberut Barat.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2026 adalah:

1. Sebagai landasan operasional dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Siberut Barat dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Sebagai bahan rujukan untuk menilai kinerja Kecamatan Siberut Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SIBERUT BARAT

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Siberut Barat

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Siberut Barat

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Siberut Barat

Kecamatan Siberut Barat merupakan salah satu bagian dari wilayah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terletak memanjang dibagian paling barat dan dikelilingi oleh Samudra Hindia, dimana merupakan dari serangkaian pulau non Vulkanik dan puncak-puncak dari suatu panggung penggunungan dibawah laut. Batas-batas wilayah Kecamatan siberut barat adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siberut Utara.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Siberut barat daya
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Lautan Hindia
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Siberut Tengah

Kecamatan Siberut Barat berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kecamatan Siberut Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan Publik dan Pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

a. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dipimpin oleh Camat;
b. Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda Kabupaten/Kota dari PNS yang memenuhi syarat;
c. Camat menerima Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota;
d. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Siberut Barat

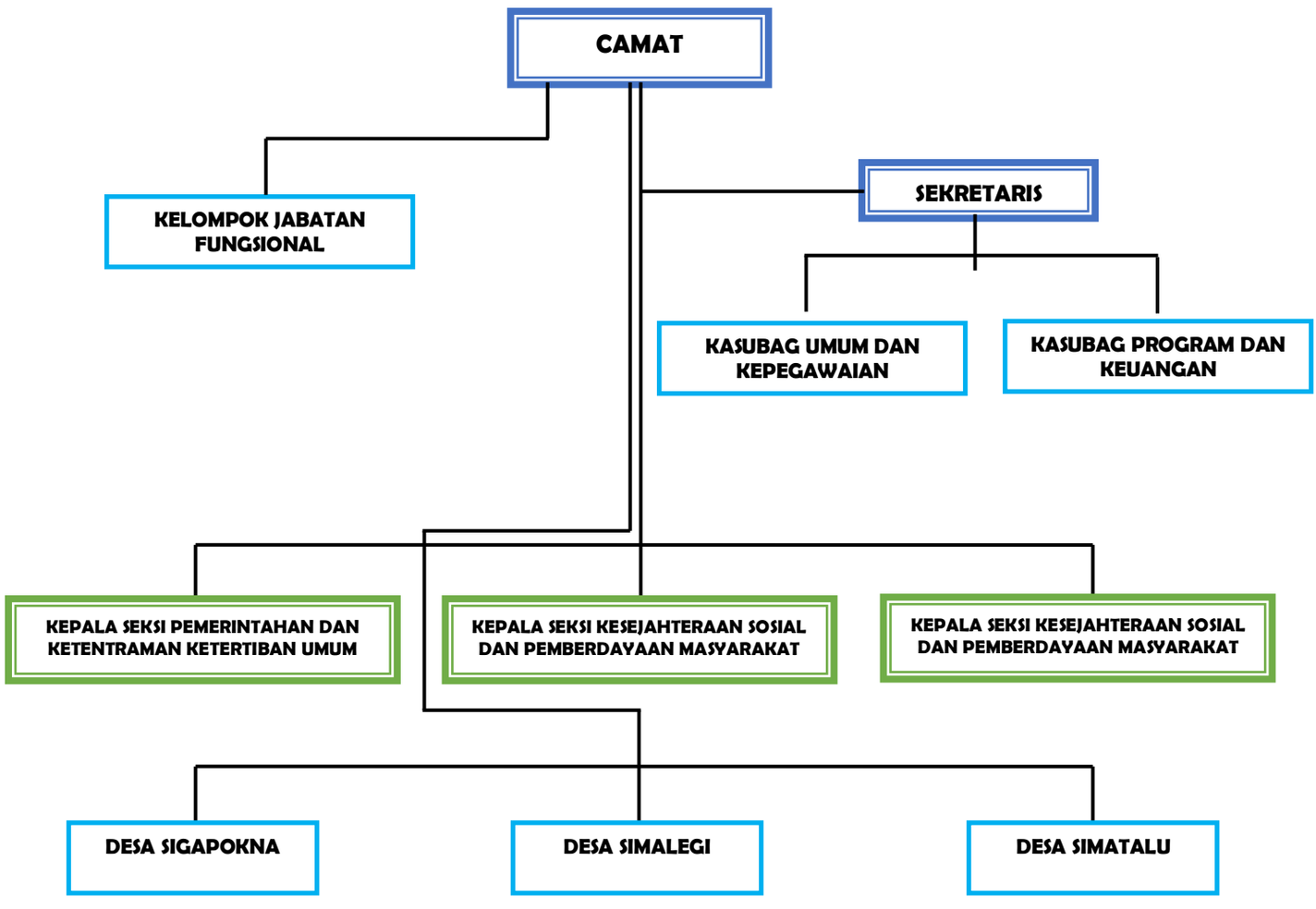
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga. Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai Perangkat Daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan diwilayah kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

1. Kecamatan
2. Sekretariat Kecamatan, yang membawahi:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Jabatan Kelompok Fungsional

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kecamatan Siberut Barat adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Kecamatan Siberut Barat



Secara rinci tugas dan fungsi Kecamatan Siberut Barat sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
h. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada camat;
i. Pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat
   Memimpin tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
b. Sekretaris Camat
   Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian serta melaksanakan pelayanan masyarakat dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
c. Kasi Tata Pemerintahan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pemerintahan di tingkat kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
   Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
d. Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
   Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta prasarana dan fasilitasi pelayanan umum.
   Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat dan sosial lainnya.
e. Kasi Ekonomi Pembangunan

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Ekonomi Pembangunan

f. Kasubbag Keuangan dan Program
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan.

g. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian serta pelayanan masyarakat dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Siberut Barat

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut di atas, potensi yang diharapkan mendukung tugas pokok Kecamatan Siberut Barat meliputi:

1. Aparatur sebagai manajer (pemikir, perencanaan, pelayanan dan penggerak) yang menjadi kekuatan pendorong yang utama.
2. Hubungan kerja/Koordinasi (pegawai) yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan Siberut Barat berdasarkan data bulan Mei 2025 adalah sejumlah 21 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negri Sipil menurut Jabatan Tahun 2025

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Camat	1
2	Sekretaris Camat	1
3	Kasi Pemerintahan	1
4	Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1
5	Plt Kasubbag Keuangan dan Program	1
6	Plh Kasubbag Umum	1
7	Bendahara Pengeluaran	1
8	Staf Pembantu Bendahara	1
9	Staf Pelaksana Kesejahteraan Sosial &Pemberdayaan Masyarakat	1
10	Staf Pelaksana Pemerintahan	1

Sumber : Bezetting Kec.Siberut Barat Th.2025.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)

NO	Tenaga Fungsional	Pendidikan	Jumlah
1	Tenaga Fungsional Administrasi	S1	2
2	Tenaga Fungsional Pemberdayaan Masyarakat	SMA	1

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Honorer

NO	Tenaga Honorer	Pendidikan	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	S1	3
2	Tenaga Administrasi	SMA	1
2	Tenaga Kebersihan	SMA	2
3	Tenaga Keamanan	0	0
4	Tenaga Operator Boat	SMA	2

Tabel 2.4
Daftar Pegawai Negri Sipil menurut Kepangkatan dan Golongan Tahun 2025

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah Orang
1	Pengatur Muda (II/a)	1
2	Pengatur Muda TK. I (II/b)	3
3	Pengatur (II/c)	0
4	Pengatur TK. I (II/d)	0
5	Penata Muda III/a	2
6	Penata Muda TK. I (III/b)	0
7	Penata (III/c)	1
8	Penata TK. I (III/d)	1
9	Pembina Muda, IV/a	1
10	Pembina Tingkat I/IVb	1
	Total	10

Sumber : Bezetting Kec.Siberut Barat Th.2025.

Tabel 2.5
Daftar Pegawai Negeri Sipil menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Pangkat	Jumlah Orang
1.	S2	1
2.	SI	5
3.	DIII	0
4.	SLTA / Sederajat	4

Sumber : Bezetting Kec.Siberut Barat Th. 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa sumber daya aparatur Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025 terdiri atas 10 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati jabatan struktural dan fungsional sesuai kebutuhan organisasi, meliputi Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi, pejabat pelaksana harian, bendahara, serta staf pelaksana pada bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, terdapat 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bertugas di bidang administrasi dan pemberdayaan masyarakat, serta 8 orang tenaga honorer yang mendukung kegiatan operasional kantor, kebersihan, dan transportasi lapangan.

Dari sisi kepangkatan, aparatur Kecamatan Siberut Barat tersebar mulai dari Golongan II/a hingga IV/b, dengan komposisi terbanyak pada Golongan II/b. Adapun tingkat pendidikan pegawai menunjukkan bahwa sebagian besar telah berpendidikan tinggi, yaitu 1 orang S2, 5 orang S1, dan 4 orang SLTA/sederajat. Kondisi ini mencerminkan bahwa aparatur kecamatan memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, meskipun penguatan kompetensi teknis dan manajerial tetap diperlukan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan secara berkelanjutan.

Dalam menunjang tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Siberut Barat, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung seluruh pelayanan di Kecamatan Siberut Barat. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga sebagai input atau *capital* dalam proses pelayanan Kecamatan Siberut Barat untuk mencapai tujuan organisasi.

Tabel 2.6
Inventaris Barang Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
A.	Bangunan		
1	Gedung Kantor	1	Unit
2	Aula	1	Unit
3	Rumah Dinas Camat	1	Unit
4	Rumah Dinas Pegawai	2	Unit
B.	Kendaraan		
1	Roda Empat	0	Unit
2	Roda 2	2	Unit
C.	Peralatan/Perlengkapan		
1	Komputer PC	2	Unit
2	Laptop	2	Unit
3	Printer	3	Buah
4	Mensin TIK	0	Buah
5	Meja ½ biro	8	Buah
6	Meja Rapat	1	Buah
7	Meja reseption	0	Buah
8	Meja 1 biro	2	Buah
9	Kursi eselon III	2	Buah
10	Kursi Eselon IV	0	Buah
11	Kursi rapat	2	Lusin
12	Kursi tamu	2	Set

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
13	Kursi kerja staf	20	Buah
14	Lemari kayu	9	Buah
15	Filling cabinet	2	Buah
16	Papan pengumuman	1	Buah
17	Sound system	1	Unit
18	Kamera	2	Unit
19	Multi Media Proyektor	1	Unit
20	Mesin Boat	4	Unit
21	Perahu/Body Boat	2	Unit
22	Generating Set	1	Unit
23	Mesin potong rumput	2	Unit
24	Pelbed/Tempat tidur besi	0	Unit

Sumber : Bezetting Kec.Siberut Barat Th.2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Siberut Barat

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Siberut Barat berdasarkan pada Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah yang menekankan pada integrasi seluruh proses, mulai dari perencanaan kinerja, penetapan indikator, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi, dalam satu sistem yang komprehensif (SAKIP).

Disamping Kinerja Kecamatan Siberut Barat sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Siberut Barat dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini:

A. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Siberut Barat selama 5 (Lima) tahun yang lalu mengalami perubahan, dimana Jasa Komunikasi Internet yang pernah diputus telah dipasangkan kembali.
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Siberut Barat setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun tidak terpenuhi.
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Siberut Barat setiap tahunnya mengalami penurunan disebabkan peralatan dan perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

A. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan.

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Siberut Barat di Bidang Pemerintahan tercermin dari:

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari –hari.

2. Memberikan kesempatan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
3. Pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan dan Desa.
4. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di Desa.

B. Pelayanan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin Pemerintahan Desa.

1. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
2. Monitoring harga Sembako;
3. Monitoring Pembangunan Desa;
4. Monitoring penyaluran program-program sosial lainnya;
5. Monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Siberut Barat;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
7. Monitoring dan fasilitasi penerbitan izin – izin yang di butuhkan masyarakat;
8. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN". PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

Kecamatan Siberut Barat menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel. Pencapaian indicator kinerja pelayanan Kecamatan Siberut Barat dari tahun 2020-2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rasio capaian 100% selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang

ditetapkan oleh Kecamatan Siberut Barat berhasil direalisasikan dengan efektif.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pada tabel 2.7 dan 2.8 dibawah ini pada tiga program utama Kecamatan Siberut Barat dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang konsisten di atas 93%, bahkan mencapai 95% pada 2024. Namun, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mengalami penurunan untuk dua program utama:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan mengalami penurunan rata-rata anggaran sebesar -25% dan dengan rata-rata realisasi sebesar 95%.
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mengalami penurunan rata-rata anggaran sebesar 35% dan dengan rata-rata realisasi sebesar 97,78%
c. Sebaliknya, program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa mencatat pertumbuhan negatif, dengan rata-rata penurunan anggaran 45%, tetapi realisasi 90%, mencerminkan prioritas dan peningkatan intensitas kegiatan pembinaan desa. Secara keseluruhan, Kecamatan Siberut Barat menunjukkan manajemen anggaran yang baik. dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siberut Barat
Tahun 2020-2024

No	Program	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Program	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD																		
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	95%	95%	92%	84%	94%	95%	95%	95 %	95 %
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan/Desa	0	B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	95%	95%	96,98 %	97,78%	93%	95%	95%	95 %	96%
3	Program Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	95%	95%	92%	95%	93%	95%	97%	97%	98%
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	B	100%	100%	%	100%	100%	100%	95%	95%	95%	98%	98%	92%	94%	95%	96%	96%

Tabel 2.8
Pencapaian Realisasi Anggaran Kecamatan Siberut Barat
Tahun 2021-2025

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja	2.301.746.066	2.301.746.066	2.240.203.137	2.023.867.202	2.248.815.330		2.301.746.066	2.057.130.672	1.950.517.244	2.082.893.596		98,27	91.83	96.38	96.38	-	-
Belanja Pegawai	1.071.529.416	1.071.529.416	1,220,048,652	991.421.502	1.111.072.330		1.071.529.416	1.038.045.852	919.916.544	992.801.986		99,75	85.08	92.79	89	-	-
Belanja Barng dan Jasa	1.230.216.650	1.230.216.650	1.1008.198.420	957.445.700	1.067.314.610		1.230.216.650	1,007.134.	955..675.700	1.024.841.610		79,97	99.89	99.82	96	-	-
Belanja Modal	0	0	11.956.065	75.000.000	70.428.390		0	11.950.000	74.925.000	65.250.000		0	100%	99.80%	100%	-	-

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Siberut Barat memiliki kelompok sasaran dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya, hal tersebut dapat dijelaskan dibawah ini :

A. Pelayanan Bidang Administrasi Perkantoran

Pelayanan Bidang Administrasi Perkantoran merupakan Pelayanan Administrasi kegiatan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Siberut Barat yang Bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Publik, dimana Pelayanan Administrasi Perkantoran ini sasarannya adalah masyarakat Kecamatan Siberut Barat, Pelayanan Bidang Administrasi Perkantoran meliputi:

1. Surat Keterangan Domisili.
2. Surat Izin.
3. Surat Kegiatan Pemerintahan.
4. Surat kegiatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

B. Pelayanan Bidang Administrasi Keuangan

Pelayanan Bidang Administrasi Keuangan merupakan Pelayanan Administrasi Keuangan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Siberut Barat yang Bertujuan untuk meningkatkan Kinerja ASN Perangkat Daerah Kecamatan Siberut Barat, dimana Pelayanan Administrasi Keuangan ini sasarannya adalah Pegawai Perangkat Daerah Kecamatan Siberut Barat, Pelayanan Bidang Administrasi Keuangan meliputi:

1. Dokumen SPP.
2. Dokumen SPM.
3. Dokumen SP2D.
4. Laporan Keuangan.
5. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) GU.
6. Dokumen Pajak baik gaji, Honorarium maupun Ganti Uang (GU).

C. Pelayanan Bidang Pemerintahan

Pelayanan Bidang Pemerintahan merupakan Pelayanan kegiatan Pemerintahan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Siberut Barat yang Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan Peraturan yang berlaku dimana Pelayanan bidang Pemerintahan ini sasarannya adalah masyarakat Kecamatan Siberut Barat, Pelayanan Bidang Administrasi meliputi:

1. Pembinaan Peraturan Per Undang- Undangan, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Surat Keputusan, Surat Edaran yang menyakut Pembinaan dan Pengawasan Anggaran Desa se-Kecamatan Siberut Barat.
2. Pembinaan Peraturan Per Undang- Undangan, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Surat Keputusan, Surat Edaran yang menyakut Pembinaan Tugas dan Fungsi Aparatur Desa se- Kecamatan Siberut Barat.

3. Pembinaan Peraturan Per Undang- Undangan, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Surat Keputusan, Surat Edaran yang menyakut Pembinaan Tugas dan Fungsi Aparatur Desa se- Kecamatan Siberut Barat.
4. Pembinaan Peraturan Per Undang- Undangan, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Surat Keputusan, Surat Edaran yang menyakut Pembinaan Trantibmas Desa se- Kecamatan Siberut Barat.

D. Pelayanan Bidang Perekonomian

Pelayanan Bidang Administrasi Perekonomian merupakan Pelayanan bidang yang dijalankan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Siberut Barat yang Bertujuan untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kecamatan Siberut Barat, dimana Pelayanan Bidang Perekonomian ini sasarannya adalah masyarakat Kecamatan Siberut Barat, Pelayanan Bidang Perekonomian meliputi:

1. Pendataan UMKM se-Kecamatan Siberut Barat.
2. Pendataan Produk Unggulan Masyarakat se-Kecamatan Siberut Barat.
3. Pendataan Harga Sembako Se- Kecamatan Siberut Barat.
4. Pembinaan UMKM se- Kecamatan Siberut Barat.

E. Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan Pelayanan bidang yang dijalankan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Siberut Barat yang Bertujuan untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kecamatan Siberut Barat, dimana Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ini sasarannya adalah masyarakat Kecamatan Siberut Barat, Pelayanan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

1. Pendataan Kelompok Masyarakat se-Kecamatan Siberut Barat.
2. Pendataan Stunting se-Kecamatan Siberut Barat.
3. Pendataan Masyarakat Miskin Se-Kecamatan Siberut Barat.
4. Mengevaluasi Data Penerima Bantuan Sosial Se- Kecamatan Siberut Barat.
5. Mengevaluasi dan Menindaklanjuti Laporan Pengaduan Konflik Sosial.
6. Pembinaan Kelompok masyarakat Se- Kecamatan Siberut Barat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Siberut Barat

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Siberut Barat

Bertitik tolak dari Tugas dan Pokok Kecamatan Siberut Barat di atas dan disesuaikan dengan pelayanan di Kantor Kecamatan Siberut Barat, Maka permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Siberut Barat berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan yang di observasi dan

dihadapi dan dihimpun dalam meningkatkan Kinerja Kecamatan Siberut Barat sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor Kecamatan sehungga pelayanan terhadap masyarakat terlambat.
2. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintah kurang.
4. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang Koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa dan Kecamatan.
5. Sebagai Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa, permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah.
6. Anggaran dana yang tertuang DPA Kecamatan Siberut Barat belum bias mengakomodir semua kekurangan yang ada.
7. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu *computer*, *mebeleur*, dan peralatan lain yang masih kurang.
8. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Siberut Barat masih terbatas.
9. Ada sedikit kesulitan dalam pelaksanaan program tersebut ada koordinasi dengan dinas terkait sehingga harus menunggu dinas tersebut untuk melaksanakan program yang ada hubungannya dengan program yang kita rencanakan.

Tabel 2.9
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Siberut Barat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik	Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di kecamatan kurang maksimal	Keterbasan SDM petugas pelayanan di kecamatan
		Keterbatasan jumlah sarana dan Prasarana
		Lemahnya koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah daerah
	Lambatnya penyusunan dan penetapan APBDes	Keterbatasan SDM aparatur pemerintahan desa
		Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan desa tentang kebijakan pemerintah kabupaten
		Terbatasnya angaran Kecamatan dalam melakukan pengawasan
Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Masih rendahnya pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan pemerintahan	Rendahnya komitmen perangkat daerah dalam memanfaatkan digitalisasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih terbatasnya sumber daya manusia dan lembaga di Kepulauan Mentawai dalam menyediakan dan menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan pemerintahan
		Masih rendahnya penerapan sistem meritokrasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan ASN
		Masih rendahnya kinerja ASN

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut diatas maka isu strategis Kecamatan Siberut Barat dalam periode 2025-2029 adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan terhadap pelayanan masyarakat, Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat, dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat Tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.10
Isu Strategis Kecamatan Siberut Barat

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kurangnya Kualitas Ketepatan Pelayanan	Terdapatanya Sarana dan Prasarana kurang memadai	Digitalisasi dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik yang belum optimal	Kurangnya Sistem Pelayanan Terpadu	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan
Sumber Daya Manusia	Kurangnya SDM Pegawai Kecamatan Siberut Barat	Terdapatnya Pegawai tidak paham dengan digitalisasi	Digitalisasi dan Pelayanan Publik	Pegawai yang Profisional belum optimal	Ketimpangan anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan
Pemberdayaan Masyarakat	Masih adanya Kemiskinan Ekstrim dan Kasus Stunting	Minimnya Anggaran Pemberdayaan Masyarakat	Kesejahteraan Masyarakat	Koordinasi Tingkat Instansi	Ketimpangan anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan
Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa	Minimnya Anggaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Kualitas dan Kapasitas Pemerintahan Desa	Ketimpangan anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan

Isu Strategis merupakan Suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhalayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) dalam memenuhi Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 antara Lain:

1. Kurangnya anggaran Kecamatan Siberut Barat akibat Pendapatan Asli Daerah tidak Memadai dan Akibat Efisiensi Anggaran.

2. Kurangnya Jumlah Pegawai yang berkompoten.
3. Kurangnya Sarana dan Prasrana Kantor Kecamatan Siberut Barat.
4. Penempatan Posisi Jabatan Pegawai yang tidak berkompeten.

Kegiatan rencana tindak pengendalian yang perlu dibangun terhadap Risiko Strategis adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi Anggaran Kecamatan Siberut Barat dalam memenuhi Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Menatawai
2. Melaksanakan koordinasi dan Konsultasi dengan BKPSDM untuk penempatan posisi pegawai sesuai kompentensi disiplin Ilmu;
3. Melaksanakan Pembinaan tentang Tupoksi Pegawai;
4. Melaksanakan Bimtek dan Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai;
5. Melaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Siberut Barat.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Siberut Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani. Dalam hal ini Kecamatan Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai diharapkan mampu menghasilkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas.

Selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Siberut Barat menetapkan sasaran strategi antara lain:

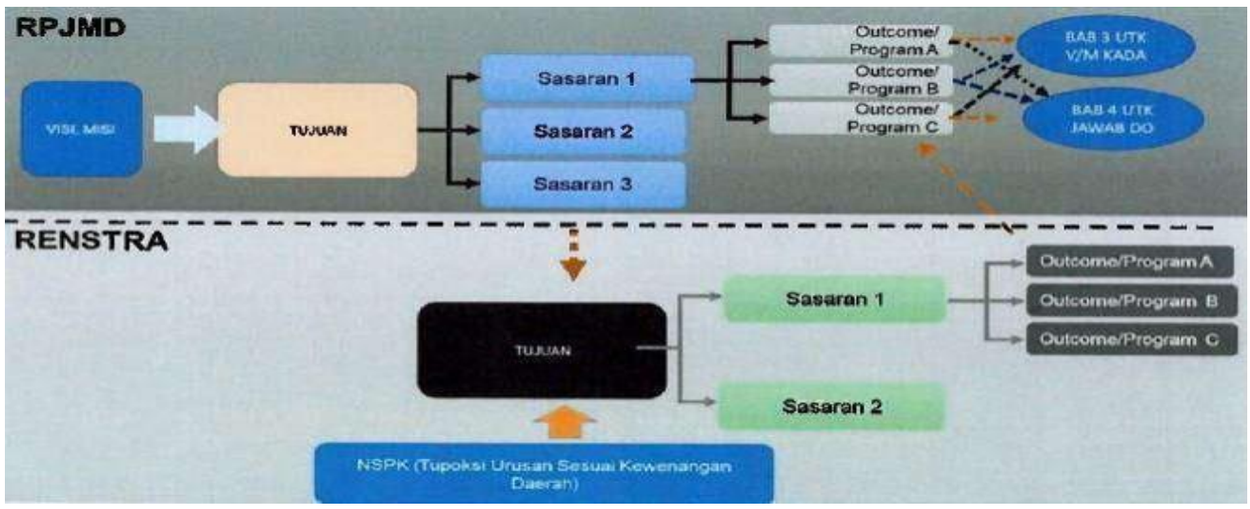
a. Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan.
b. Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan.
c. Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah.

Keterkaitan antara Sasaran dengan tujuan Renstra adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

a. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan.
b. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.
c. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah.
d. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan.

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.1
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Siberut Barat adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

a. Menggunakan teknik *Logical Framework* (*Logframe*);
b. Analisis Masalah dan Kebutuhan;
c. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional;
d. Kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) secara Lengkap;

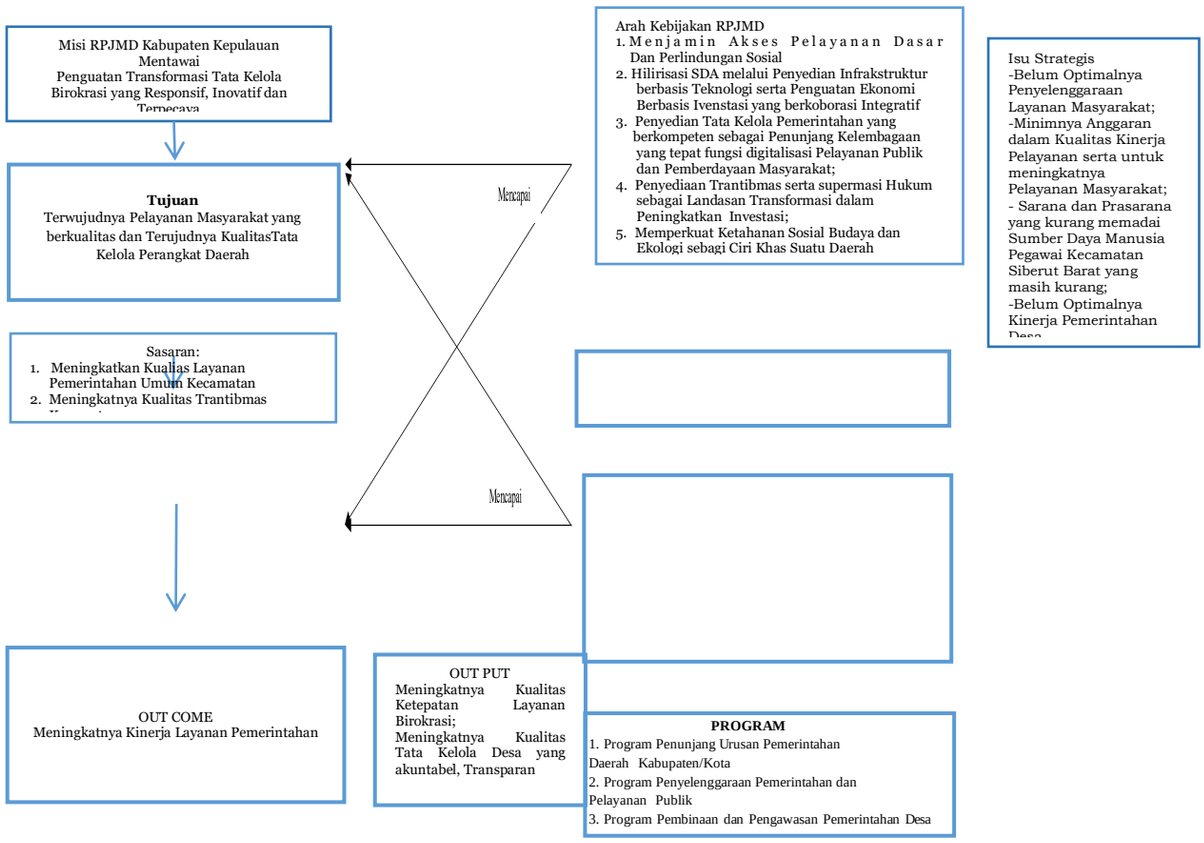
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
						2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani		Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	81,25	81,24	81,47	82,06	82,35	82,64	
		Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan	Kecepatan waktu pelayanan	waktu	1 hari	1 hari	8 jam	8 jam	4 jam	2 jam	
			% serapan APBDes di atas 90%	persen	75,56	77,86	80,45	82,48	84,21	85,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	indeks	77,45	78,12	80,45	81,02	81,28	81,65	
		Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	nilai	76	79	79,5	79,6	79,7	79,8	
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah inovasi	1 inovasi	2 inovasi	3 inovasi	3 inovasi	4 inovasi	4 inovasi	
			Capaian kinerja perangkat daerah	persen	75	80	82	83	85	86	

3.3 Strategi Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029

Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi. Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemah kan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pelayanan publik, Berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa Pembangunan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Publik, serta pelatihan bagi pelayanan Publik. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat berbasis budaya lokal. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Konsep strategi penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.2 berikut ini:

Gambar 3.2
Strategi Renstra Kecamatan Siberut Barat



Sangat penting untuk menunjukkan dimana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Fokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Siberut Barat adalah sebagai beriku:

a. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
b. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
c. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
d. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi dan Teknologi (penguatan akses internet, digitalisasi layanan pemerintahan, serta inovasi dalam administrasi publik)	Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik)	Permberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat)	Ekonomi (dukungan terhadap UMKM dan optimalisasi BUMDes)	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat)

3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan. Arah kebijakan dalam Renstra Kecamatan Siberut Barat adalah pedoman dan strategi utama yang dirumuskan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD, menyajikan langkah konkret dan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi daerah tersebut. Arah kebijakan ini menjelaskan bagaimana perangkat daerah akan mengimplementasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam periode 5 tahun. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah berperan sebagai peta jalan yang mengarahkan perangkat daerah untuk fokus pada prioritas pembangunan, mengelola sumber daya secara efektif, dan mencapai target kinerja sesuai dengan mandat RPJMD dan kebutuhan Masyarakat.

Kebijakan Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan keselarasan mulai dari tujuan, strategi dan arah kebijakan

Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029 secara lengkap disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029

Visi : Kepulauan Mentawai Maju Berdaya Saing dan Sejahtera			
Misi : Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang responsif, Inovatif, dan Terpecaya			
Tujuan	Sasaran	Indikator	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan	● Kecepatan waktu pelayanan ● Persentase serapan APBDes di atas 90%	● Peraturan- Peraturan APBDES ; ● Pengutan Sistem Keuangan Desa; ● Pengukuran Kinerja Keuangan Desa; ● Kualitas Kinerja Aparatur Desa ● Pemanfaatan Teknologi yang ada
	Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	● Pelatihan tentang penyusunan perencanaan dan pelaporan ● Pengembangan kompetensi aparatur kecamatan dalam menggunakan teknologi informasi ● Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Desa; ● Melaksanakan Koordinasi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat; ● Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tamtibmas Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	● Nilai SAKIP ● Jumlah Inovasi yang diterapkan ● Capaian kinerja perangkat daerah	● Perencanaan dan Pengukuran Kinerja; ● Peningkatan Kapasitas ASN di Kecamatan ● Pemanfaatan Teknologi Transparansi; ● Penguatan sarana dan Prasarana Pelayanan Kantor; ● Penguatan Koordinasi dan supervisi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategi yang merupakan wujud nyata operasional rencana strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis kedalam bentuk nyata.

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Siberut Barat ditentukanlah program dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Siberut Barat adalah sebagai berikut:

a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

c. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat secara efektif serta menyediakan pembinaan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan pemberdayaan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

d. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pembinaan nilai-nilai kebangsaan dan Ketahanan Nasional secara efektifl serta memperingati dan merayaan HUT RI. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan pembinaan, sesuai dengan tugas pokok

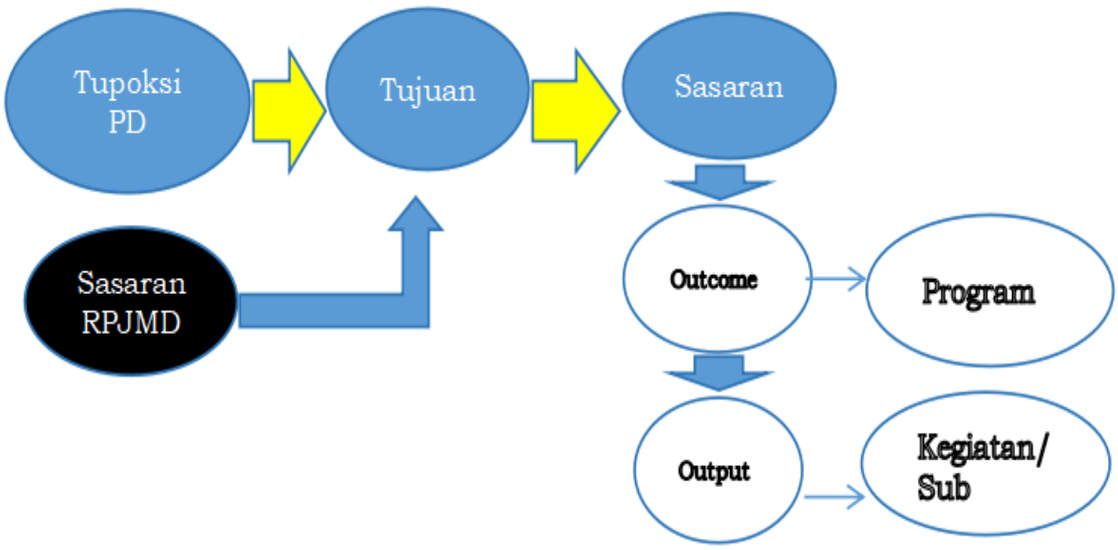
dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

e. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Merupakan program strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara tertib.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Siberut Baratmerupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Siberut Barat juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Siberut Barat serta digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan



Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang lebih besar, yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang telah ditetapkan dalam Kegiatan terkait untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur seperti yang terdapat pada Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Terlaksananya pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dan SOP	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan	Terlaksananya pelayanan administrasi kecamatan tepat waktu dan sesuai standar	Kecepatan waktu pelayanan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa	Persentase serapan APBDes di atas 90%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
		Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan kecamatan yang partisipatif dan berbasis data	Tersusunnya dokumen perencanaan kecamatan yang berkualitas dan tepat waktu	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
		Meningkatnya kualitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat	Tersusunnya laporan kinerja dan evaluasi	Nilai SAKIP	Program Pembinaan dan Pengawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
		perangkat daerah	daerah	kinerja perangkat daerah		Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya budaya inovasi di perangkat daerah	Terciptanya inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Jumlah Inovasi yang diterapkan		
			Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Tercapainya target kinerja perangkat daerah sesuai perjanjian kinerja	Capaian kinerja perangkat daerah		

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2030

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	BASELINE Tahun 2024		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
		Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Tugas Layanan Perangkat Daerah.	100%	1.799.226.855	90%	1.769.395.756	100%	2.339.829.866	100%	2.283.210.452	100%	2.515.210.452	100%	2.547.210.452	Kecamatan Siberut Barat
Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	41.920.000	100%	29.087.500	100%	71.496.500	100%	81.496.500	100%	91.496.500	100%	101.496.500	Kecamatan Siberut Barat
Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Dihasilkan	0%	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Kecamatan Siberut Barat
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	41.920.000	12 Dokumen	29.087.500	12 Dokumen	71.496.500	12 Dokumen	81.496.500	12 Dokumen	91.496.500	12 Dokumen	101.496.500	Kecamatan Siberut Barat
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunya Pelaporan Administrasi Keuangan	100%	1.354.409.654	100%	1.346.217.756	100%	1.457.001756	100%	1.519.382.342	100%	1.569.382.342	100%	1.576.382.342	Kecamatan Siberut Barat
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	10 Orang/Bulan	1.082.674.654	13 Orang/Bulan	1.185.097.756	13 Orang Bulan	1.185.097.756	13 Orang/Bulan	1.200.478.342	13 Orang/Bulan	1.250.478.342	13 Orang/Bulan	1.250.478.342	Kecamatan Siberut Barat
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Umlah dokumen Administrasi Pelaksanaann Keuangan	12 Laporan	271.735.000	48 Dokumen	161.120.000	48 Dokumen	271.904.000	48 Dokumen	318.904.000	48 Dokumen	318.904.000	48 Dokumen	325.904.000	Kecamatan Siberut Barat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	130.902.201	100%	88.590.500	100%	206.331.610	100%	233.331.610	100%	237.331.610	100%	242.331.610	Kecamatan Siberut Barat

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	BASELINE Tahun 2024		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
		Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang disediakan	9 Item	4.490.000	12 Paket	3.383.000	12 Paket	6.844.000	12 Paket	7.844.000	12 Paket	8.844.000	12 Paket	9.844.000	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Barang cetak dan Penggandaa	Jumlah bahan Cetak dan Pengganddaan yang disediakan	3 Paket	1.691.800	12 Paket	1.600.300	12 Paket	3.508.410	12 Paket	4.508.410	12 Paket	5.508.410	12 Paket	6.508.410	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik	4 Item	45.265.401	4 Item	32.112.200	4 Item	50.281.200	4 Item	55.281.200	4 Item	57.281.200	4 Item	60.281.200	Kecamatan Siberut Barat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang Dilakukan	12 laporan	79.455.000	12 Laporan	51.495.000	12 Laporan	145.698.000	12 Laporan	165.698.000	12 Laporan	165.698.000	12 Laporan	165.698.000	Kecamatan Siberut Barat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Operasional Kantor	100%	80.000.00 0	100%	100.000.000	100%	360.000.000	100%	175.000.000	100%	325.000.000	100%	325.000.000	Kecamatan Siberut Barat
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang disediakan	2 Unit	80.000.00 0	0 Unit	0	2 Unit	100.000.000	0 Unit	0	1 Unit	90.000.000	1 Unit	90.000.000	Kecamatan Siberut Barat
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	0 Unit	0	2 Unit	100.000.000	6 Unit	100.000.000	6 Unit	100.000.000	6 Unit	80.000.000	6 Unit	80.000.000	Kecamatan Siberut Barat
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	6 Unit	80.000.000	0 Unit	0	6 Unit	80.000.000	6 Unit	80.000.000	Kecamatan Siberut Barat
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JumlahPengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	80.000.000	4 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	1 Unit	75.000.000	Kecamatan Siberut Barat
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang kegiatan Operasional Kerja Lapangan	100%	162.000.000	100%	162.000.000	100%	174.000.000	100%	174.000.000	100%	192.000.000	100%	192.000.000	Kecamatan Siberut Barat

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	BASELINE Tahun 2024		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
		Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan	12 Bulan	24.000.000	12 Bulan	24.000.000	12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	36.000.000	12 Bulan	36.000.000	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Honorarium yang dibayarkan	12 Laporan	138.000.000	12 Laporan	138.000.000	12 Laporan	138.000.000	12 Laporan	138.000.000	12 laporan	156.000.000	12 laporan	156.000.000	Kecamatan Siberut Barat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	9.995.000	90%	43.500.000	90%	71.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	110.000.000	Kecamatan Siberut Barat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan Biaya Pajak	6 Unit	9.995.000	5 Unit	8.500.000	2 Unit	13.000.000	5 Unit	20.000.000	4 Unit	25.000.000	4 Unit	25.000.000	Kecamatan Siberut Barat
Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan yang direhablitasi	1 Unit	0	0 Unit	35.000.000	1 Unit	58.000..000	2 Unit	80.000..000	4 Unit	75.000.000	4 Unit	85.000.000	Kecamatan Siberut Barat
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	32.085.000	100%	27.900.000	100%	65.400.000	100%	75.400.000	100%	90.400.000	100%	90.400.000	Kecamatan Siberut Barat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Persentase Layanan Publik	100%	32.085.000	100%	27.900.000	100%	65.400.000	100%	75.400.000	100%	90.400.000	100%	90.400.000	Kecamatan Siberut Barat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Data Layanan Publik	400 Dokumen	32.085.000	400 Dokumen	27.900.000	400 Dokumen	65.400.000	400 Dokumen	75.400.000	400 Dokumen	90.400.000	400 Dokumen	90.400.000	Kecamatan Siberut Barat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	38.553.000	100%	20.836.800	100%	54.446.000	100%	66.446.000	100%	76.446.000	100%	76.446.000	Kecamatan Siberut Barat

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	BASELINE Tahun 2024		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
		Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatanyang berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	25 Lembaga	20.215.000	30 Lembaga	15.355.000	30 Lembaga	28.462.000	30 Lembaga	35.462.000	30 Lembaga	40.462.000	30 Lembaga	40.462.000	Kecamatan Siberut Barat
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Mayarakat	Hasil Kegiatan yang dilaksanakan	3 Laporan	18.338.000	1 Laporan	5.481.800	1 Laporan	25.984.000	1 Laporan	30.984.000	1 Laporan	35.984.000	1 Laporan	35.984.000	Kecamatan Siberut Barat
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Nilai-Nilai Luhur Kebangsaan	100%	62.029.0000	100%	38.240.000	100%	100.236.000	100%	115.500.000	100%	135.500.000	100%	135.500.000	Kecamatan Siberut Barat
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan yang Telah dilaksanakan	100%	62.029.000	100%	38.240.000	100%	100.236.000	100%	115.500.000	100%	135.500.000	100%	135.500.000	Kecamatan Siberut Barat
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesdia Tahun 1945,pelestariaan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1 Laporan	47.700.000	100 Orang	33.800.000	100 Orang	75.000.000	100 Orang	85.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	Kecamatan Siberut Barat
Pelaksanan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	14.329.000	1 Dokumen	4.440.000	1 Laporan	25.236.000	1 laporan	30.500.000	1 Laporan	35.500.000	1 Laporan	35.500.000	Kecamatan Siberut Barat
Program Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Laporan Keuangan Desa									90%		90%		Kecamatan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	BASELINE Tahun 2024		Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
		Target Capaian	Pagu Indikatif	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Pemerintahan Desa	yang diselesaikan tepat Waktu	90%	41.065.000	100%	75.131.500	90%	78.131.500	90%	100.000.000		125.000.000		125.000.000	Siberut Barat

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025–2030, arah kebijakan pembangunan kecamatan difokuskan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa. Melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kecamatan Siberut Barat berupaya memastikan kepatuhan terhadap penyusunan perencanaan, pelaporan, serta administrasi keuangan perangkat daerah dengan target capaian 100% setiap tahun. Peningkatan efisiensi operasional juga dilakukan melalui pengadaan sarana dan prasarana kantor, pemeliharaan aset, serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan. Selain itu, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik diarahkan untuk menjaga tingkat kepuasan masyarakat pada layanan publik yang optimal, dengan target capaian 100% hingga tahun 2030. Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, kecamatan menargetkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan desa serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang efektif dan berkesinambungan. Sementara itu, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum berfokus pada pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, guna memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan di tingkat kecamatan. Di sisi lain, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa diarahkan untuk meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan desa dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, rencana program dan kegiatan tahun 2025–2030 ini mencerminkan komitmen Kecamatan Siberut Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Priotitas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan	Administrasi Umum perangkat daerah	
		Terlaksananya layanan administrasi umum	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Administrasi Umum	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Dilimpahkan		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	Pasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasn Pemerintahan Desa	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin.

Target kinerja pencapaian tujuan sasaran Renstra OPD melalui IKU Kecamatan Siberut Barat adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Siberut Barat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka IKU Kecamatan Siberut Barat selama 5 tahun ke depan (2025-2029) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	*Baseline*	Target Tahun					Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	81,25	81,24	81,47	82,06	82,35	82,64	
2	Kecepatan waktu pelayanan	waktu	1 hari	1 hari	8 jam	8 jam	4 jam	2 jam	
3	% serapan APBDes di atas 90%	persen	75,56	77,86	80,45	82,48	84,21	85,00	
4	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	indeks	77,45	78,12	80,45	81,02	81,28	81,65	
5	Nilai SAKIP	nilai	76	79	79,5	79,6	79,7	79,8	
6	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah inovasi	1 inovasi	2 inovasi	3 inovasi	3 inovasi	4 inovasi	4 inovasi	
7	Capaian kinerja perangkat daerah	persen	75	80	82	83	85	86	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Siberut Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	persen	68	68	68	68	68	68	
3	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu	persen	75	80	82	83	85	90	
5	Persentase serapan APBDes diatas 90 persen	persen	75	80	82	83	85	90	

BAB V
PENUTUP

Renstra ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Siberut Barat yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para Pemangku Kepentingan "*stakeholders*", baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya. Di samping itu, Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Renja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LAKIP nantinya.

Untuk pelaksanaan Renstra Kecamatan Siberut Barat diperlukan tindakan Pengendalian dan Evaluasi Renstra Kecamatan Siberut Barat di perlukan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pegawai Kecamatan Siberut Barat melalui Bimtek-Bimtek yang diadakan oleh dinas terkait;
2. Memanfaatkan Sarana dan Prasarana yang ada dalam meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Siberut Barat;
3. Mengenali dan Mengevaluasi Resiko yang ada dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Siberut Barat;
4. Melaksanakan Pendekatan Persuasif dalam menindak Lanjuti Aduan masyarakat yang akan ditindak lanjuti;
5. Mengevaluasi Realisasi Anggaran dengan target fisik yang telah dicapai per Triwulan;

Kecamatan Siberut Barat Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mengelola manajemen Resiko dengan melakukan pendekatan persuasif untuk menganalisa dan mengevaluasi Resiko yang ada sehingga menjadi laporan atas rencana tindakan pengendalian (RTP) dan Hasil Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian pada Risiko Strategis yaitu:

1. Mengikuti Bimtek Implementasi SIPD maupaun Bimtek Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Terkait;
    a. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas Terkait dalam rangka mensukseskan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai;
    b. Penambahan Sarana dan Prasarana kategori Prioritas;
2. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian pada Risiko Operasional yaitu:
    a. Merencanakan Kegiatan yang matang dalam meningkatkan sarana dan Prasarana Kantor;
    b. Mendata Aset Barang Milik Daerah Baik dalam keadaan baik maupun Rusak;
    c. Melakukan penghapusan Aset Barang milik daerah yang rusak

Penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Barat Tahun 2025-2029 disusun didasarkan Tata kelola satu Data Indonesia (SDI) yang bertujun untuk menghasilkan data yang akurat, Mutahir, Terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan

Daerah. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan upaya untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan penggunaan data dalam proses pengawasan yang berkualitas. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, serta penyebarluasan data secara transparan kepada publik. Dengan data yang akurat dan terorganisir dengan baik, pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efektif, serta memastikan akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien.

Melalui penerapan Satu Data Indonesia, diharapkan tahapan perencanaan menghasilkan data yang transparan, berbasis faktual, dan berdampak positif terhadap pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2025-2029.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i
Daftar Tabel..... ii
Daftar Gambar..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan..... 4
1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA..... 7
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Siberut Barat Daya..... 7
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Siberut Barat Daya..... 18

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 20
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029..... 20
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029..... 20
3.3 Strategi Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029..... 22
3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029..... 23

BAB IV PROGRAM. KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 25
4.1 Uraian Program, Kegitan, Sub Kegiatan..... 26
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 37

BAB V PENUTUP..... 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan..... 12
Tabel 2.2 Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025..... 12
Tabel 2.3 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025..... 13
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2020 – 2024..... 15
Tabel 2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Siberut Barat Daya..... 18
Tabel 2.6 Isu Strategis Kecamatan Siberut Barat Daya..... 19
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2030..... 21
Tabel 3.2 Perumusan Tujuan, Sasartan dan Strategi Kecamatan Siberut Barat Daya 22
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029..... 23
Tabel 3.4 Perumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029..... 23
Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029..... 27
Tabel 4.2 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029..... 29
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembanghunan Daerah 36
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamaatan Siberut Barat Daya... 37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kecamatan Siberut Barat Daya 11
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Kecamatan sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi Kecamatan Siberut Barat Daya dalam kerangka asas desentralisasi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 pasal 2 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dan sistem perencanaan pembangunan daerah. Kecamatan Siberut Barat Daya selaku Kecamatan Siberut Barat Daya mempunyai kewenangan pengelolaan sumber daya dan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka menengah 5 (lima) tahun.

Oleh karena itu Kecamatan Siberut Barat Daya menyusun Renstra dengan berpedoman pada RPJMD yang merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman arah pembangunan, penyelenggaraann Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat di tingkat Kecamatan serta menjadi dasar penyusunan Renja Tahunan Kecamatan Siberut Barat Daya. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu strategis untuk menghasilkan Arah Kebijakan, Instrumen Pengendalian dan evaluasi, Arah Alokasi Anggaran, Wujud Akuntabilitas Publik dan sebagai Sarana Sinkronisasi dalam pembangunan dan Pemerintahan

Perencanaan pembangunan Kecamatan Siberut Barat Daya didasarkan pada Kebutuhan, data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi wilayah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu. Perencanaan tersebut dimulai dari Musyawarah Rencana Desa sampai Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan hingga menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Rencana Strategis merupakan awal yang diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan (kontrol), dengan demikian rencana dipisahkan. Pengawasan hanya dapat dilakukan jika ada perencanaan yang jelas dan sebaliknya perencanaan memerlukan pengawasan agar rencana yang ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Siberut Barat Daya dalam kurun waktu Tahun 2025-2029, maka dipandang

sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Siberut Barat Daya untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025- 2029;
3. Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, selain itu RPJMD 2025-2029 menjadi jembatan Pembangunan Menuju Kepulauan Mentawai Maju berkelanjutan dan Bermartabat serta menuju Indonesia Emas 2045.
4. Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Siberut Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Siberut Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4).
18. Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2018 mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah dan Rencana Strategis Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategi Kecamatan Siberut Barat Daya 2025-2029 merupakan Dokumen perencanaan satuan kerja Kecamatan Siberut Barat Daya untuk 5 (lima) Tahun ke depan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian, tujuan dan sasaran strategis atau kebijakan Umum serta tahapan program kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Siberut Barat Daya, yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029, di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud :
a. Sebagai Dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Siberut Barat Daya.
b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Siberut Barat Daya.
c. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Siberut Barat Daya yang transparan dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra adalah memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada dalam rangka melaksanakan kewenangan tata pemerintahan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025 - 2029 adalah:
a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang sejalan dengan tujuan yang telah ditentukan;
b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama (5) lima tahun kedepan;
c. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

d. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus, dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merumuskan latar belakang Penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis serta dasar hukum yang relevan dan signifikan dan menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya. Bab ini terdiri atas:

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SIBERUT BARAT DAYA

Bab ini berisi penyajian data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Siberut Barat Daya disertai evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir, serta mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan yang berkaitan dengan pelayanan Kecamatan Siberut Barat Daya dan mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat memengaruhi Kecamatan Siberut Barat Daya baik secara langsung atau pun tidak langsung. Bab ini terdiri atas:

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Siberut Barat Daya
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Siberut Barat Daya
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Siberut Barat Daya
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Siberut Barat Daya
2.1.4 Kelompok sasaran layanan
2.2 Permasalah dan Isu Strategis Kecamatan Siberut Barat Daya
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Siberut Barat Daya
2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya dan mengacu pada Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang dijabarkan secara operasional dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan disertai dengan indikator kinerja dan targetnya yang didukung dengan program prioritas pembangunan daerah, Bab ini terdiri atas:

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029
3.3 Strategi Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Siberut Barat Daya 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub kegiatan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya, dan menjelaskan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci berserta Target dan Pagu Indikatif untuk pencapaian 5 (lima) tahun kedepan, Bab ini terdiri atas:

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesesuaian antara target kinerja Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Siberut Barat Daya

2.1.1. Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Siberut Barat Daya

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tugas pokok dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan diwilayah kecamatan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Bupati, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaran tugas pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, kesejahteraan social, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pembangunan diwilayah kecamatan;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaran tugas pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pembangunan diwilayah kecamatan;
3. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaran tugas pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pembangunan diwilayah kecamatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas pokok dan fungsi Camat, Sekretaris Camat dan Seksi-seksi serta Sub Bagian di Kecamatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Camat

Camat menyelenggarakan tugas:

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
f. Mengorganisasikan penyelenggraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi Kecamatan Siberut Barat Daya di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
h. Melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja organisai Kecamatan Siberut Barat Daya yang ada diwilayah kecamatan;

i. Melakukan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya kepala OPD Kecamatan Siberut Barat Daya, dibantu oleh Sekretaris Camat, Kasi Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Ekonomi dan Pembangunan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Program dan Keuangan. Yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

2. Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas merencakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kecamatan;
b. Pemberi dukungan administrasi yang meliputi kepegawian, ketatusahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi lingkup kecamatan;
c. Penataan organisasi dan tata laksana lingkup kecamatan;
d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup kecamatan;
e. Pengelola barang milik daerah lingkup kecamatan;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum, Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan tugas:

a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup kecamatan;
b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup kecamatan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup kecamatan;
d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup kecamatan;
e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana lingkup kecamatan;
f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- ungangan lingkup kecamatan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya;

4. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup kecamatan;
b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup kecamatan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup kecamatan;
d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan urusan

pengelolaan keuangan lingkup kecamatan;
e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah lingkup kecamatan;
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya;

5. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan urusan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
b. Melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian pemeliharaan, prasarana dan sarana pelayanan umum;
c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan;
d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi Kecamatan Siberut Barat Daya dalam tingkat Kecamatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dibidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dibidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
h. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dearah yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja OPD yang ada diwilayah Kecamatan dalam bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
i. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial di kecamatan;
b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang kesejahteraan sosial Pemberdayaan Masyarakat;
c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi Kecamatan Siberut Barat Daya ditingkat kecamatan dibidang kesejahteraan social dan pemberdayaan masyarakat;
d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dibidang kesejahteraan social dan pemberdayaan masyarakat;
e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Dearah yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja OPD yang ada diwilayah Kecamatan dalam bidang kesejahteraan social dan pemberdayaan masyarakat;

f. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang kesejahteraan social dan pemberdayaan masyarakat; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

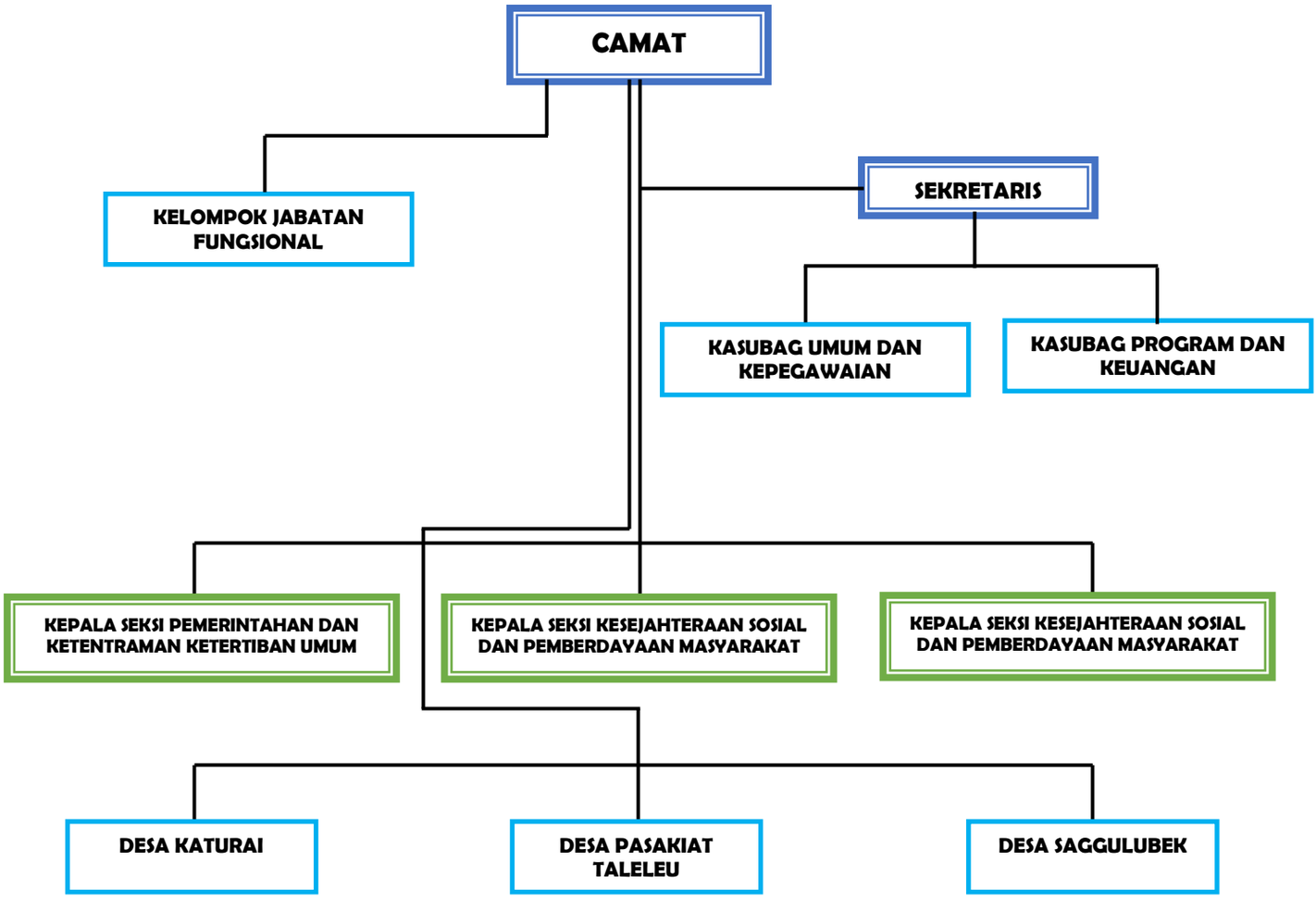
Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan di kecamatan;
b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi Kecamatan Siberut Barat Daya ditingkat kecamatan dibidang ekonomi dan pembangunan;
d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dibidang ekonomi dan pembangunan;
e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dearah yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja OPD yang ada diwilayah Kecamatan dalam bidang ekonomi dan pembangunan;
f. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2018 mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Maka Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Camat;
b. Sekretaris, membawahkan:
    1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
c. Kepala Seksi Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum
d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Kecamatan Siberut Barat Daya



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Siberut Barat Daya

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Berdasarkan data per April 2025, Sumber Daya aparatur Kecamatan Siberut Barat Daya berjumlah 25 orang, terdiri dari laki-laki 19 orang dan perempuan 7 orang. Berdasarkan status kepegawaiannya jumlah aparatur PNS berjumlah 11 orang dan Pegawai Kontrak/Honorer (PH) berjumlah 14 orang. Struktur pegawai berdasarkan Jabatan, pangkat/golongan ruang, Eselon, dan Pendidikan dapat dilihat pada table 2.1, dan 2.2, berikut.

Tabel 2.1
Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

NO	URAIAN	ESELON III.A	ESELON III.B	ESELON IV.A	ESELON IV.B	STAFF	JUMLAH
1	Camat		-				-
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	1
4	Kepala Seksi Pemerintahan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	1	-	1	2
5	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	-	-	1	-	1	2
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	-	0	1
7	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	-	-	-	1	2	3
8	Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-	-	1	1	2
	Jumlah PNS	-	1	3	2	5	11
	Pegawai Kontrak/Honorer	-	-	-	-	-	14
	Total	-	-	-	-	-	25

Sumber : Bezetting Kec.Siberut Barat Daya Tahun 2025.

Tabel 2.2
Keadaan Kepegawaian Berdasarkan Jenjang PendidikanTahun 2025

NO	URAIAN	S2	S1	D3	SLTA/ SLTP	Jumlah
1	CAMAT	-	-	-	-	-
2	SEKRETARIS	-	1	-	-	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	1	-	-	1
4	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	-	1
5	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	-	1	-	-	1
6	Kepala sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	-	-	1
7	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan		1	-	-	1
8	Staf		2	-	3	5
9	Pegawai Kontrak/Honorer		2	-	12	14
	Total		10	-	15	25

Sumber : Bezetting Kec.Siberut Barat Daya Tahun 2025.

Seluruh jumlah pegawai Kantor Camat Siberut Barat Daya, sebanyak 25 orang, memiliki pendidikan S-2 sebanyak 0 orang (0%), yang memiliki pendidikan S-1 sebanyak 10 orang (40%), yang memiliki pendidikan D-3 sebanyak 0 orang (0 %), dan yang memiliki pendidikan SMA sebanyak 15 orang (60%).

Dari uraian dan klasifikasi pegawai diatas, kondisi aparatur yang berada di Kecamatan Siberut Barat Daya dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan ASN yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dalam hal meningkatkan keterampilannya guna dapat melayani masyarakat.

3. Dalam era globalisasi, diperlukan tenaga perencana yang profesional khususnya di Kecamatan Siberut Barat Daya dalam rangka membaca isu-isu strategis.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang semakin berkualitas, khususnya di tingkat Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kecamatan Siberut Barat Daya dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobilear dan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025

No.	Nama Barang	Jumlah	Ket
1.	Alat Angkut di darat bermotor		
	- Motor roda 2 (dua)	2 unit	Baik
2.	Alat angkutan di air bermotor		
	- Motor Boat Tempel	2 unit	Baik
3.	Alat ankutan di air tidak bermotor		
	- Perahu Sampan	1 unit	Baik
4.	Perlengkapan Kantor		
	- Lemari Arsip	4 unit	Baik
	- Brankas	2 unit	Baik
	- Filling Kabinet	4 Unit	Baik
	- Gorden	65 Meter	Baik
	- Terali Besi	65 Meter	Baik
	- Papan Plang	1 Buah	Baik
	- Papan Struktur Organisasi	1 bh	Baik
	- Bendera Merah Putih	2 bh	Baik
5.	Komputer		
	- Komputer PC	1 unit	Baik
	- Note Book (Laptop)	4 unit	Baik
	- Printer	2 unit	Baik
6.	Mebelaur		
	- Meja Kerja	4 unit	Baik
	- Meja Rapat	4 unit	Baik
	- Kursi rapat	20 unit	Baik
	- Sofa/kursi tamu	1 set	Baik
	- Meja eselon III/a	1 bh	Baik
	- Meja eselon III/b	1 bh	Baik
	- Meja eselon IV/a	4 bh	Baik
	- Meja eselon IV/b	1 bh	Baik
	- Meja staf	4 bh	Baik
	- Kursi eselon III	2 bh	Baik
	- Kursi eselon IV	4 bh	Baik
	- Kursi staf	6 bh	Baik
7.	Peralatan Dapur		
	Piring/gelas/Mangkok/Cangkir/ sendok/garpu/pisau	1 paket	Baik
8.	Alat-alat Komunikasi		
	- Radio SSB	1 set	Tidak terpakai
9.	Gedung dan Bangunan		
	- Gedung rumah dinas Camat dan staf	2 unit	Rusak Berat

Bezetting Kec.Siberut Barat Daya Tahun 2025.

Akan tetapi untuk menciptakan pelayanan yang prima dengan kondisi ruangan yang lengkap dan nyaman bagi masyarakat serta fasilitas bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, maka peralatan, perlengkapan, mobiler, serta peralatan komputer masih dirasa

sangat kurang, dan untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kecamatan Siberut Barat Daya akan melakukan penganggaran secara bertahap untuk mencapai kondisi sarana prasarana yang diinginkan. Berikut disajikan keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Siberut Barat Daya sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Siberut Barat Daya

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Siberut Barat Daya berdasarkan pada Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah yang menekankan pada integrasi seluruh proses, mulai dari perencanaan kinerja, penetapan indikator, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi, dalam satu sistem yang komprehensif (SAKIP).

Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel. Pencapaian kinerja kecamatan Siberut Barat Daya dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siberut Barat Daya
Kecamatan Siberut Barat Daya
Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	90			100	100
2	Penetapan APBDesa Tepat waktu			100	90	90	95	100	100				90	90				90	90
3	Serapan APBDesa diatas 90 persen			100	86	89	95	100	100				96	95				96	95
4	Penanganan Kasus kriminal dikecamatan yang tertangani			100	84	85	85	100	100				90	90				90	90
5	Aduan yang ditindaklanjuti			100	85	89	92	100	100				90	90				90	90
6	Nilai SAKIP			B	B	B	B	B	B			BB	BB	BB				BB	BB
7	Jumlah Inovasi yang diterapkan			1				1	1				-	1				-	1
8	Persentase capaian kinerja Kecamatan Siberut Barat Daya			100	100	100	100	100	100			70,00	97,78	94,94				97,78	94,94

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas dapat dilihat selama periode tahun 2020 hingga 2024, Kecamatan Siberut Barat Daya menunjukkan capaian kinerja pelayanan yang cenderung stabil dan mengalami peningkatan pada beberapa indikator utama. Berdasarkan hasil evaluasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada pada kategori baik (B) sepanjang lima tahun terakhir, dengan capaian rasio yang meningkat hingga mencapai 100 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam menjaga kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Pada aspek tata kelola pemerintahan desa, indikator Penetapan APBDesa Tepat Waktu menunjukkan tren positif dengan capaian yang cukup konsisten. Walaupun pada awal periode (2020–2022) realisasi masih berada di kisaran 90 persen, pada tahun-tahun berikutnya kinerja meningkat hingga mencapai target penuh. Kondisi serupa juga terlihat pada indikator Serapan APBDesa di atas 90 persen, yang mengalami peningkatan dari 86 persen pada tahun 2020 menjadi 95 persen pada tahun 2024, mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan desa serta meningkatnya kemampuan pengelolaan anggaran di tingkat desa.

Untuk indikator Penanganan Kasus Kriminal di Kecamatan yang Tertangani serta Aduan yang Ditindaklanjuti, capaian menunjukkan konsistensi pada kisaran 90 persen hingga akhir periode renstra. Hal ini menggambarkan adanya keseriusan pemerintah kecamatan dalam merespons permasalahan sosial dan menjaga keamanan wilayah, meskipun masih terdapat ruang peningkatan untuk mencapai target ideal 100 persen. Selanjutnya, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Siberut Barat Daya juga mengalami perkembangan yang menggembirakan. Jika pada awal periode hanya berada pada kategori B, maka sejak tahun 2023 nilai tersebut meningkat menjadi BB, menandakan perbaikan signifikan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja instansi. Dari sisi inovasi pelayanan, Kecamatan Siberut Barat Daya mulai menerapkan satu bentuk inovasi baru pada tahun 2023 yang berhasil dipertahankan hingga tahun 2024. Langkah ini menunjukkan adanya dorongan untuk beradaptasi dan memperbaiki sistem pelayanan publik melalui pendekatan inovatif.

Secara keseluruhan, persentase capaian kinerja Kecamatan Siberut Barat Daya menunjukkan peningkatan yang berarti, dari 70 persen pada tahun 2020 menjadi lebih dari 94 persen pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan kesungguhan aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan, serta pemberdayaan masyarakat dengan semangat perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Siberut Barat Daya, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Siberut Barat Daya bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal–hal lain yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara ekplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan.
2. Jumlah personil khususnya PNS yang ada di Kecamatan Siberut Barat Daya sangat-sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan

berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodir secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Siberut Barat Daya

Kelompok sasaran layanan kecamatan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Berikut beberapa contoh kelompok sasaran layanan kecamatan antara lain:

1. Masyarakat umum: Layanan yang ditujukan untuk masyarakat luas, seperti:
   - Layanan kesehatan
   - Layanan pendidikan
   - Layanan informasi dan komunikasi
2. Kelompok rentan: Layanan yang ditujukan untuk kelompok rentan, seperti:
   - Lansia
   - Anak-anak dan remaja
   - Penyandang disabilitas
   - Masyarakat miskin atau rentan
3. Petani dan nelayan: Layanan yang ditujukan untuk petani dan nelayan, seperti:
   - Layanan penyuluhan pertanian
   - Layanan bantuan benih dan pupuk
   - Layanan pemasaran hasil pertanian
4. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah): Layanan yang ditujukan untuk UMKM, seperti:
   - Layanan pelatihan dan pendampingan
   - Layanan akses pembiayaan
   - Layanan pemasaran
5. Masyarakat adat: Layanan yang ditujukan untuk masyarakat adat, seperti:
   - Layanan pelestarian budaya
   - Layanan pendidikan dan kesadaran masyarakat
   - Layanan bantuan social
6. Instansi vertikal yakni: Kantor-kantor pemerintahan di tingkat kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi khusus, seperti Forkopimcam, kantor polisi, kantor pos, dan lain-lain;
7. Organisasi Masyarakat yakni LSM, kelompok swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, dan organisasi lainnya yang beroperasi di wilayah kecamatan;
8. Pihak lain yakni Universitas, lembaga penelitian, dan pihak lain yang memiliki hubungan dengan kegiatan kecamatan

Dalam menentukan kelompok sasaran layanan di kecamatan, perlu dipertimbangkan beberapa faktor, seperti:

1. Kebutuhan dan masalah: Apa kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kecamatan?
2. Prioritas: Apa prioritas layanan yang perlu diberikan kepada masyarakat kecamatan?
3. Sumber daya: Apa sumber daya yang tersedia untuk mendukung layanan yang akan diberikan kepada masyarakat kecamatan.

Dengan menentukan kelompok sasaran layanan kecamatan yang tepat, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2.2 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Siberut Barat Daya

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Siberut Barat Daya

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Siberut Barat Daya selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Siberut Barat Daya, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana yang terdapat pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Siberut Barat Daya

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik	Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di kecamatan kurang maksimal	Keterbasan Fasilitas dan kemampuan petugas pelayanan di kecamatan
		Lemahnya koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah daerah
	Lambatnya penyusunan dan penetapan APBDes	Keterbatasan SDM aparatur pemerintahan desa
		Masih lemahnya pembinaan/ koordinasi aparatur di kecamatan dan desa tentang kebijakan pemerintah kabupaten
		Terbatasnya anggaran Kecamatan dalam melakukan pengawasan

Dari tabel diatas dapat dilihat permasalahan pelayanan pada Kecamatan Siberut Barat Daya secara umum menggambarkan bahwa kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain adalah penyelesaian pelayanan masyarakat yang belum maksimal, yang disebabkan oleh keterbatasan fasilitas serta kemampuan petugas pelayanan di tingkat kecamatan. Selain itu, koordinasi antaraparatur desa dan kecamatan dalam memahami serta menjalankan kebijakan pemerintah daerah masih belum berjalan optimal, sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pelayanan publik.

Di sisi lain, proses penyusunan dan penetapan APBDes yang berjalan lambat turut menjadi tantangan dalam mendukung percepatan pembangunan desa. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa serta masih lemahnya pembinaan dan koordinasi antara pihak kecamatan dan desa dalam memahami arah kebijakan pemerintah kabupaten. Selain faktor SDM, keterbatasan anggaran kecamatan juga menjadi kendala dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di wilayah desa.

Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi koordinasi lintas tingkat pemerintahan, serta dukungan anggaran yang memadai agar pelayanan publik di Kecamatan Siberut Barat Daya dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berkualitas. Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut diatas maka isu strategis Kecamatan Siberut Barat Daya dalam periode 2025-2029 adalah peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat, dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*.

2.2.2 Isu Strategis

Untuk peningkatan pelayan Kecamatan Siberut Barat Daya Kecamatan Siberut Barat Daya, perlu pembenahan terhadap kelengkapan fasilitas dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang maksimal dan profesional. Hal ini tergambar pada Tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Isu Strategis Kecamatan Siberut Barat Daya

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KHLS yang relevan dengan PD	Isu Dinasmis Yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Sumber Daya Alam Pertanian dan Perikanan	Keterbatasan Sumber Daya manusia Kurangnya Koordinasi Keterlibatan Masyarakat yang Kurang	• Pembangunan Yang berkelanjutan • Perubahan Iklim • Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan Hidup • Indikator Tujuan Pembangunan Yang berkelanjutan	Transformasi Birokrasi Penyerapan anggaran Koordinasi dan Pelaksanaan	• Pemanfaatan Teknologi Digital • Partisipasi Masyarakat • Inovasi dan Kreativitas	• Pengelolaan Sumber daya Alam • Pengembangan Ekonomi Regional • Pengelolaan Lingkungan • Kwalitas Pelayanan Publik	• Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik • Masih rendahnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Siberut Barat Daya berfokus pada dua hal utama, yaitu belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan, dan akuntabel. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun daerah memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, khususnya di bidang pertanian dan perikanan, namun pengelolaannya belum sepenuhnya didukung oleh sistem pelayanan dan tata kelola yang efektif.

Kualitas pelayanan publik yang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antaraparatur, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan yang belum inklusif dan transparan menunjukkan masih perlunya peningkatan dalam hal akuntabilitas, efisiensi birokrasi, serta penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks yang lebih luas, isu ini juga berkaitan dengan tuntutan transformasi birokrasi nasional, penerapan pembangunan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat pelayanan publik dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, upaya strategis ke depan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi koordinasi antar lembaga pemerintahan, dan peningkatan transparansi serta partisipasi masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kecamatan Siberut Barat Daya mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas serta tata kelola pemerintahan yang profesional, terbuka, dan akuntabel.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani".

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Kecamatan Siberut Barat Daya diperlukan sejumlah sasaran yang meggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029.

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan yang mudah diakses sesuai standar pelayanan
2. Terlaksananaya Fasilitasi pelaksanaan APBDesa,
3. Terlaksananaya Forum Koordinasi Desa,
4. Terlaksananaya Fasilitasi Forum Pimpinan Kecamatan
5. Terlaksananaya Trantibmas Kecamatan,
6. Meningkatkan Pengendalian Masyarakat,
7. Terlaksananaya Layanan di Kecamatan
8. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Siberut Barat Daya

Pernyataan tujuan dan sasaran Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 berserta indikator disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	*Baseline* 2024	Target Tahun					Ket
						2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani		Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	81,25	81,24	81,47	82,06	82,35	82,64	
		Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan	Kecepatan waktu pelayanan	waktu	1 hari	1 hari	8 jam	8 jam	4 jam	2 jam	
			% serapan APBDes di atas 90%	persen	75,56	77,86	80,45	82,48	84,21	85,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	indeks	77,45	78,12	80,45	81,02	81,28	81,65	
		Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Siberut Barat Daya	Nilai SAKIP	nilai	76	79	79,5	79,6	79,7	79,8	
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah inovasi	1 inovasi	2 inovasi	3 inovasi	3 inovasi	4 inovasi	4 inovasi	
			Capaian kinerja Kecamatan Siberut Barat Daya	persen	75	80	82	83	85	86	

3.3 Strategi Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Strategi demi mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Siberut Barat Daya menetapkan strategi sebagai berikut Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Perumusan Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kecamatan Siberut Barat Daya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan	Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani
		Peningkatan Penyusunan RKPDesa yang cermat dan tepat waktu menjadi dasar penyusunan APBDesa, RKPDesa	Peningkatan kualitas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) agar lebih cermat dan tepat waktu, sehingga RKPDesa dapat menjadi dasar yang kuat dan valid dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dengan RKPDesa yang baik, pembangunan desa dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, dan efisien
		Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan APBDesa untuk memastikan ketepatan waktu dan efektivitas penggunaan anggaran.	Penyelenggaraan Evaluasi kinerja pelaksanaan APBDesa laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara rutin dan transparan.
		Penguatan Fungsi Forkopincam (linmas, Babinsa, Babinkamtibnas)	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
		peningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan	Proses pelayanan untuk memastikan efisiensi dan efektif
	Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan peningkatan efektivitas penggunaan dana desa
		Penguatan forum koordinasi desa	Peningkatan Forum koordinasi desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, seperti pelayanan administrasi kependudukan
	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Siberut Barat Daya	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Peningkatkan nilai LAKIP, menunjukkan akuntabilitas kinerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
		Peningkatan efektifitas penerapan inovasi di kecamatan	Peningkatan Pelayanan publik di kecamatan dapat menjadi lebih efisien, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat
		Peningkatkan transparansi	Peningkatan kapasitas Sumber

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
		dalam pelaporan kinerja.	Daya Manusia ASN Kecamatan
		Melakukan evaluasi kinerja secara teratur dan membuat laporan mengenai kinerja	Menyediakan kerangka acuan untuk pengambilan keputusan dan tindakan

3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Kecamatan Siberut Barat Daya bertujuan bagaimana sasaran akan dicapai dengan suatu pedoman, yang selanjutnya diperjelas dengan menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan yang bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program perencanaan pembangunan, pemberdayaan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sesuai Rencana Strategis Kecamatan Siberut Barat Daya.

Penahapan arah kebijakan dilaksanakan agar menjadi fokus pembangunan mengarah pada prioritas pembangunan setiap tahunnya. Prioritas Pembangunan merupakan tema atau agenda pembangunan kecamatan tahunan yang menjadi benang merah capaian antara menuju tujuan dan sasaran 5 (lima) tahunan dalam Renstra Kecamatan melalui arah kebijakan. Adapun penahapan dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Siberut barat daya Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2029)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Konsolidasi Dasar dan Penataan Awal Pelayanan Publik	Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi	Implementasi dan Evaluasi	Optimalisasi dan Inovasi	Integrasi dan Reformasi Birokrasi

Kecamatan Siberut Barat Daya memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Perumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Transformasi layanan publik berbasis digital	Tahap I (2026): Penguatan Infrastruktur Daerah untuk Peningkatan Produktivitas	Transformasi layanan publik melalui digitalisasi	Fokus pada efisiensi dan kemudahan layanan
2	Peningkatan Kapasitas aparatur	Tahap II (2027): Penguatan Sumber Daya Ekonomi untuk Peningkatan Produktivitas	Peningkatan kapasitas aparatur dan manajemen	Pengembangan SDM aparatur
3	Penguatan sistem keamanan dan ketertiban	Tahap III (2028): Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pembangunan	Penguatan sistem keamanan dan sinergi antar lembaga	Melibatkan Forkopimcam dan tokoh masyarakat
		Tahap IV (2029):		

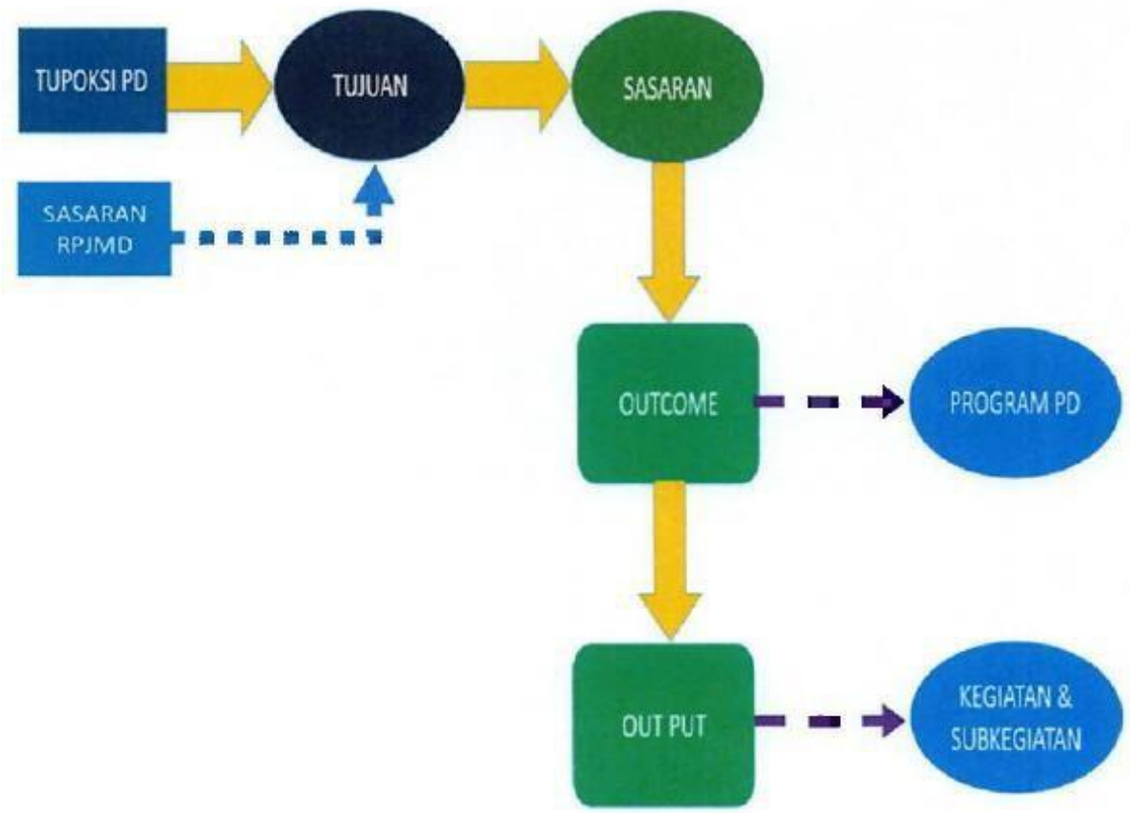
NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
4	Sinergi Forkopimcam dan tokoh masyarakat	Penguatan fondasi pembangunan berkelanjutan dan transformasi ekonomi daerah	Penguatan sinergi Forkopimcam dan masyarakat	Membangun keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan
5	Optimalisasi pengawasan layanan dan pelibatan masyarakat	Tahap V (2030): Transformasi pembangunan untuk pembangunan inklusif dan berdaya saing	Peningkatan pengawasan dan pelibatan masyarakat	Mendukung transparansi dan akuntabilitas
6	Reformasi birokrasi dan manajemen kinerja	Tahap V (2030): Transformasi pembangunan untuk pembangunan inklusif dan berdaya saing	Reformasi birokrasi dan manajemen kinerja	Peningkatan kinerja Kecamatan Siberut barat daya

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siberut Barat Daya yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Siberut Barat Daya. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra



Program dan Kegiatan Kecamatan Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Siberut barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai selama tahun 2025-2029 antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dari uraian diatas dapat dijelaskan pada Tabel Program di bawah ini :

Tabel 4.1
Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
Mewujudkan Masyarakat Aman, Harmonis, dan Berkeadilan.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Nilai Indek Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
					Persentase Penetapan APBDesa tepat waktu	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
					Persentase serapan APBDes diatas 90 persen	
					Jumlah desa yang difasilitasi	
		Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan			Jumlah forum/koordinasi yang dilakukan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Meningkatnya kualitas kantibmas	Jumlah kasus/kejadian yang ditindaklanjuti/ diselesaikan	Penanganan kasus kriminal di kecamatan yang tertangani	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
			Meningkatnya kualitas layanan masyarakat		Persentase aduan yang Ditindaklanjuti	
	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Siberut Barat Daya	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Siberut Barat Daya	Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Siberut Barat Daya		Nilai LAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
					Inovasi	
					Persentase capaian kinerja Kecamatan Siberut Barat Daya	
					Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan	

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan.

Kegiatan indikatif Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029 harus mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Siberut Barat Daya. Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang lebih besar, yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang telah ditetapkan dalam Kegiatan terkait untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029 dituangkan dalam format matriks rencana Strategis Kecamatan Siberut Barat Daya sebagaimana tertuang dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan
Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu
KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA													
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Siberut Barat Daya													
Evaluasi Kinerja Kecamatan Siberut Barat Daya	Jumlah Laporan Evaluasi Kecamatan Siberut Barat Daya	6 Kali	38.233.200	6 Kali	42.000.000	6 Kali	46.000.000	6 Kali	50.000.000	6 Kali	55.000.000	6 Kali	61.000.000
Administrasi Keuangan Kecamatan Siberut Barat Daya	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Siberut Barat Daya												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang	1.067.743.258	13 Orang	1.225.205.220	13 Orang	1.225.205.220	13 Orang	1.225.205.220	13 Orang	1.225.205.220	13 Orang	1.225.205.220
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 Orang	165.188.900	45 Orang	165.000.000	45 Orang	168.000.000	45 Orang	171.000.000	45 Orang	174.000.000	45 Orang	177.000.000
Administrasi Umum Kecamatan Siberut Barat Daya	Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Kecamatan Siberut Barat Daya												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Paket	4.241.400	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	44.659.200	4 Paket	50.000.000	4 Paket	50.000.000	4 Paket	50.000.000	4 Paket	50.000.000	4 Paket	50.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Laporan	8.605.700	4 Laporan	9.000.000	4 Laporan	9.000.000	4 Laporan	9.000.000	4 Laporan	9.000.000	4 Laporan	9.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	112.515.000	2 Laporan	115.000.000	2 Laporan	115.000.000	2 Laporan	115.000.000	2 Laporan	115.000.000	2 Laporan	115.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Kecamatan Siberut Barat Daya												
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			20 Unit	20.000.000	20 Unit	20.000.000	20 Unit	20.000.000	20 Unit	20.000.000	20 Unit	20.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	18.000.000	4 Unit	36.000.000	4 Unit	34.000.000	4 Unit	36.000.000	4 Unit	36.000.000	4 Unit	36.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Operasional Perkantoran												
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Rek	12.000.000	4 Rek	12.000.000	4 Rek	24.000.000	4 Rek	24,000,000	4 Rek	24,000,000	4 Rek	24,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa		226.272.000										

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu
	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan												
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Kecamatan Siberut Barat Daya												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan												
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan												
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	3 Desa	34.955.000	3 Desa	35.000.000	3 Desa	35.000.000	3 Desa	35.000.000	3 Desa	35.000.000	3 Desa	35.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu
	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan												
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Desa	42.480.000	3 Desa	45.000.000	3 Desa	45.000.000	3 Desa	45.000.000	3 Desa	45.000.000	3 Desa	45.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan												
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan												
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	120 Orang	34.991.000	120 Orang	45.000.000	120 Orang	45.000.000	120 Orang	45.000.000	120 Orang	45.000.000	120 Orang	45.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Desa	34.955.000	3 Desa	35.000.000	3 Desa	35.000.000	3 Desa	35.000.000	3 Desa	35.000.000	3 Desa	35.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan												

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
				2026		2027		2028		2029		2030	
		target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu
UMUM													
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan												
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3 Desa	100.000.000	3 Desa	100.000.000	3 Desa	100.000.000	3 Desa	100.000.000	3 Desa	100.000.000	3 Desa	100.000.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	25.000.000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu
	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan												
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu												
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu Persentase serapan APBDes diatas 90 persen												
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Desa	59.998.000	3 Desa	60.000.000	3 Desa	60.000.000	3 Desa	60.000.000	3 Desa	60.000.000	3 Desa	60.000.000

Berdasarkan Tabel 4.2 Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025–2030, arah pembangunan dan pendanaan kecamatan difokuskan pada peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa. Secara umum, program dan kegiatan yang direncanakan mencerminkan komitmen Kecamatan Siberut Barat Daya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berbagai kegiatan diarahkan untuk memperkuat fungsi manajerial dan administratif Kecamatan Siberut Barat Daya. Kegiatan seperti Evaluasi Kinerja Kecamatan Siberut Barat Daya, Administrasi Keuangan, dan Penyediaan Gaji serta Tunjangan ASN terus dilaksanakan secara rutin dengan peningkatan alokasi anggaran setiap tahun. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam mendukung kinerja aparatur dan keberlangsungan layanan pemerintahan. Selain itu, kegiatan seperti Penyediaan Barang Logistik, Pengadaan Peralatan dan Mesin, serta Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor juga menjadi prioritas guna menjamin kelancaran operasional serta kenyamanan lingkungan kerja pemerintahan di tingkat kecamatan.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, fokus diarahkan pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Melalui kegiatan seperti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan, serta Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, kecamatan berupaya memperkuat kapasitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat lokal dengan pendekatan partisipatif dan berorientasi hasil. Alokasi anggaran yang relatif stabil tiap tahun menunjukkan adanya kesinambungan program yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan kedekatan pemerintah dengan masyarakat.

Selanjutnya, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menjadi sarana penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui kegiatan seperti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, pemerintah berupaya memperkuat peran masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan. Target jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi tetap stabil, yaitu 120 orang setiap tahun, yang mencerminkan upaya menjaga kesinambungan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Sementara itu, pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, kegiatan diarahkan untuk memperkuat wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, serta koordinasi antar unsur pimpinan di kecamatan. Kegiatan seperti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dilaksanakan secara rutin dengan dukungan anggaran yang tetap setiap tahun, menunjukkan komitmen kecamatan dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat semangat kebangsaan di wilayahnya. Adapun Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa difokuskan pada peningkatan kapasitas tata kelola keuangan desa. Melalui kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, kecamatan berperan aktif dalam memastikan laporan keuangan desa dapat diselesaikan tepat waktu dan penyerapan APBDes mencapai di atas 90%. Dengan dukungan anggaran yang konsisten, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana desa.

Secara keseluruhan, rencana program dan pendanaan Kecamatan Siberut Barat Daya tahun 2025–2030 mencerminkan strategi pembangunan yang menyeluruh. Fokus diarahkan tidak hanya pada penguatan kelembagaan dan kapasitas aparatur, tetapi juga pada peningkatan kualitas

pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta pengawasan pemerintahan desa. Melalui pelaksanaan yang berkesinambungan dan berbasis kebutuhan lokal, kecamatan diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berdaya saing dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, penyusunan daftar subkegiatan prioritas menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan secara terarah, efektif, dan berkesinambungan. Subkegiatan prioritas disusun berdasarkan hasil identifikasi terhadap kebutuhan nyata di lapangan, potensi daerah, serta isu-isu strategis yang dihadapi pada periode perencanaan. Melalui pendekatan ini, setiap subkegiatan diharapkan mampu mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah secara optimal, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kapasitas kelembagaan, maupun dalam percepatan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan demikian, daftar subkegiatan prioritas ini menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan arah kebijakan daerah dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kecamatan Siberut Barat Daya secara terukur dan berkelanjutan.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Priotitas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Siberut barat daya	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Siberut barat daya	
		Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Siberut barat daya	Administrasi Keuangan Kecamatan Siberut barat daya	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan	Administrasi Umum Kecamatan Siberut barat daya	
		Terlaksananya layanan administrasi umum	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	
		Terlaksananya Administrasi Umum Kecamatan Siberut barat daya	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Administrasi Umum	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	Pasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasn Pemerintahan Desa	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Siberut Barat Daya yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029.

Indikator kinerja Kecamatan Siberut Barat Daya selama 5 tahun ke depan (2025-2029) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel berikut:Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Siberut Barat Daya adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Siberut Barat Daya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Siberut Barat Daya sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Siberut Barat Daya

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	81,25	81,24	81,47	82,06	82,35	82,64	
2	Kecepatan waktu pelayanan	waktu	1 hari	1 hari	8 jam	8 jam	4 jam	2 jam	
3	Persentase serapan APBDes di atas 90%	persen	75,56	77,86	80,45	82,48	84,21	85,00	
4	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	indeks	77,45	78,12	80,45	81,02	81,28	81,65	
5	Nilai SAKIP	nilai	76	79	79,5	79,6	79,7	79,8	
6	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah inovasi	1 inovasi	2 inovasi	3 inovasi	3 inovasi	4 inovasi	4 inovasi	
7	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	persen	75	80	82	83	85	86	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Siberut Barat Daya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Siberut Barat Daya

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	persen	68	68	68	68	68	68	
3	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu	persen	75	80	82	83	85	90	
5	Persentase serapan APBDes diatas 90 persen	persen	75	80	82	83	85	90	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Siberut Barat Daya menggambarkan target capaian utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan partisipasi masyarakat. Target pertama adalah persentase aduan yang ditindaklanjuti sebesar 100% setiap tahun, menunjukkan komitmen kecamatan dalam memberikan pelayanan yang cepat dan responsif. Target kedua, persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ditetapkan sebesar 68%, menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Selanjutnya, target penyelesaian konflik di wilayah kecamatan juga mencapai 100% setiap tahun, sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Target penetapan APBDes tepat waktu meningkat secara bertahap dari 75% pada tahun 2025 menjadi 90% pada tahun 2030, mencerminkan peningkatan disiplin dan koordinasi antar pemerintah desa. Terakhir, target serapan APBDes di atas 90% juga naik dari 75% menjadi 90% pada tahun 2030, yang menunjukkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Secara keseluruhan, target-target tersebut menjadi arah strategis Kecamatan Siberut Barat Daya untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Siberut Barat Daya selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Dalam hal ini dibutuhkan tahap Pengendalian dan Evaluasi untuk mengarahkan tujuan renstra tersebut sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam rangka menjaga kesinambungan Renstra yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2025-2029. Program ini mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Siberut Barat Daya, RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung dan serentak pada tanggal 27 November 2024 dan secara defenitif dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Siberut Barat Daya berkewajiban untuk melaksanakan program- program dalam Renstra Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja OPD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Kecamatan Siberut Barat Daya berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja tahunan, Renstra Kecamatan Siberut Barat Daya Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
6. RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
7. Renja-OPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD);
8. Pengelolaan risiko dalam perencanaan pembangunan yang dijalankan guna antisipatif terhadap perubahan/dinamika serta memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian guna mencapai sasaran pembangunan

Daerah, Manajemen risiko dilaksanakan sebagai bentuk kendali untuk mengawal proses perencanaan sesuai dengan tahapan dan memainkan peran penting untuk memastikan keberhasilan dan konsistensi rencana pembangunan.

Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat di Siberut Barat Daya, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2025-2029.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SIBERUT SELATAN
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i
Daftar Tabel..... ii
Daftar Gambar..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan..... 4
1.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 7
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah..... 7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 11
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 15
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan..... 18
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 19
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... 19
2.2.2 Isu Strategis..... 20

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 22
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 22
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 2
3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 24
3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 25

BAB IV PROGRAM. KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 28
4.1 Uraian Program, Kegitan, Sub Kegiatan..... 28
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 37

BAB V PENUTUP..... 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan Tahun 2025.... 12
Tabel 2.2 Jumlah dan Presentase Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselon12
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin (Orang).....12
Tabel 2.4 Jumlah dan Presentase Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan 13
Tabel 2.5 Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Siberut Selatan 15
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2020-2024 17
Tabel 2.7 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Siberut Selatan 19
Tabel 2.8 Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Siberut Selatan.....20
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2030.....23
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Selatan Tahun 2025-2029 24
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2029 25
Tabel 4.1 Program Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2030.....28
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2030.....29
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama 37
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci ... .38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kecamatan Siberut Selatan 11
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
..... 27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Atas dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan.Kecamatan sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 pasal 2 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dan system perencanaan pembangunan daerah. Kecamatan Siberut Selatan selaku Perangkat Daerah mempunyai kewenangan pengelolaan sumber daya dan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun.Perencanaan pembangunan Kecamatan Siberut Selatan didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi wilayah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Perencanaan merupakan proses memutuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk melakukan apa yang telah diputuskan tersebut. Rencana Strategis merupakan salah satu dari beberapa tipe perencanaan yang dikenal dalam manajemen organisasi. Dalam siklus kegiatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Rencana Strategis merupakan awal yang diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan (kontrol), dengan demikian rencana dipisahkan. Pengawasan hanya dapat dilakukan jika ada perencanaan yang jelas dan sebaliknya perencanaan memerlukan pengawasan agar rencana yang ditetapkan dapat terlaksana dengan effisien dan efektif.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Siberut Selatan dalam kurun waktu Tahun 2025-2029, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Siberut Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025- 2029;
3. Renstra Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045, selain itu RPJMD 2025-2029 menjadi jembatan Pembangunan Menuju Kepulauan Maentawai Maju berkelanjutan dan Bermartabat serta menuju Indonesia Emas 245.
4. Renstra Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4).

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategi Kecamatan Siberut Selatan 2025- 2029 merupakan Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) Tahun ke depan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian, tujuan dan sasaran strategis atau kebijakan Umum serta tahapan program kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Siberut Selatan, yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029, di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud :
1. Sebagai Dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Siberut Selatan.
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Siberut Selatan.
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Siberut Selatan yang transparan dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra adalah memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada dalam rangka melaksanakan kewenangan tata pemerintahan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025 - 2029 adalah:
1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang sejalan dengan tujuan yang telah ditentukan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama (5) lima tahun kedepan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

(RENJA) setiap tahunnya agar lebih terarah, focus, dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis seharusnya disusun secara sederhana dan sistematis sehingga mudah dipahami, disempurnakan, dan dilaksanakan dengan baik. Rencana Strategis Kecamatan Siberut Selatan disusun dengan sistematik sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal Renstra Kecamatan Siberut Selatan, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Kab/Kota.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Siberut Selatan serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4 Sistematik Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Kecamatan Siberut Selatan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN , SASARAN, SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini diuraikan tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan, penyelenggaraan bidang urusan yang akan dicapai Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Menjelaskan Rumusan Tujuan yang di Dasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perangkat Daerah yang telah di tetapkan. serta rumusan narasi yang menunjukkan tugas dan fungsi perangkat Daerah yang memenuhi Prinsip SMART-C (*specific, measurabble, attainable, realistic, time-bounded, dan continously-improved).*

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Menjelaskan Narasi Sasaran yang dapat di Rumuskan dari Tujuan Renstra OPD yang ingin di capai dalam jangka 5 tahun ke depan.

3.3. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Menjelaskan Langkah- Langkah yang konprehensif melalui optimalisasi sumber daya, fokus lokasi, pentahapan dan program prioritas yang direncanakan untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran.

3.4. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Menjelaskan Arah Kebijakan sebagai rangkaian Kerja Prioritas yang dilakukan sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dan Arah Kebijakan RPJMD serta Selaras dengan Strategi yang di susun untuk Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini di Uraikan Program Kegiatan Sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang akan dicapai Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

4.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Menjelaskan program kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil *cascading* dari tujuan sasaran *outcome* dan *output* perangkat Daerah.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjelaskan target kinerja pencapaian tujuan sasaran Renstra OPD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB V PENUTUP

Menguraikan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD, Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah dan Tata Kelola satu Data Indonesia di Tingkat Perangkat Daerah

5.1. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD

Menjelaskan Uraian Tahapan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD

5.2. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Menjelaskan Uraian Pengendalian Pengelolaan Risiko Risiko Prioritas atas tujuan dan sasaran Strategis OPD yang Tertuang dalam Dokumen Perencanaan Strategis OPD (RENSTRA OPD).

5.3. Tata Kelola Satu Data Indonesia Ditingkat Perangkat Daerah

Menjelaskan tata kelola Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat perangkat daerah bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan Daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Siberut Selatan

2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Siberut Selatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tugas pokok dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan diwilayah kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bagian Ketujuh menjelaskan bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Kecamatan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Bupati, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Menyiapakan bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaran tugas pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pembangunan di wilayah kecamatan;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pembangunan di wilayah kecamatan;
3. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaran tugas pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pembangunan di wilayah kecamatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas pokok dan fungsi Camat, Sekretaris Camat dan Seksi-seksi serta Sub Bagian di Kecamatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Camat

Camat menyelenggarakan tugas:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerahdan peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
f. Mengorganisasikan penyelenggraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
h. melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja organisai perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan;

i. melakukan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya kepala OPD Kecamatan Siberut Selatan, dibantu oleh Sekcam, Kasi Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Ekonomi dan Pembangunan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Program dan Keuangan. Yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

2. Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kecamatan;
b. pemberi dukungan administrasi yang meliputi kepegawian, ketatusahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi lingkup kecamatan;
c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup kecamatan;
d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup kecamatan;
e. pengelola barang milik daerah lingkup kecamatan;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum, Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup kecamatan;
b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup kecamatan;
c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup kecamatan;
d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup kecamatan;
e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana lingkup kecamatan;
f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- ungangan lingkup kecamatan;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya;

4. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

1. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup kecamatan;
2. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan angaran lingkup kecamatan;
3. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup kecamatan;

4. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan urusan pengeloaan keuangan lingkup kecamatan;
5. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah lingkup kecamatan;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya;

5. Seksi Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pemerintahan ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan urusan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
b. melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian pemeliharaan, prasarana dan sarana pelayanan umum;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan;
d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dalam tingkat Kecamatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja OPD yang ada di wilayah Kecamatan dalam bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum melaksanakan penyiapan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial di kecamatan;
b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang kesejahteraan sosial Pemberdayaan Masyarakat;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah di tingkat kecamatan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;

e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja OPD yang ada di wilayah Kecamatan dalam bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
f. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi Dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai tugas:

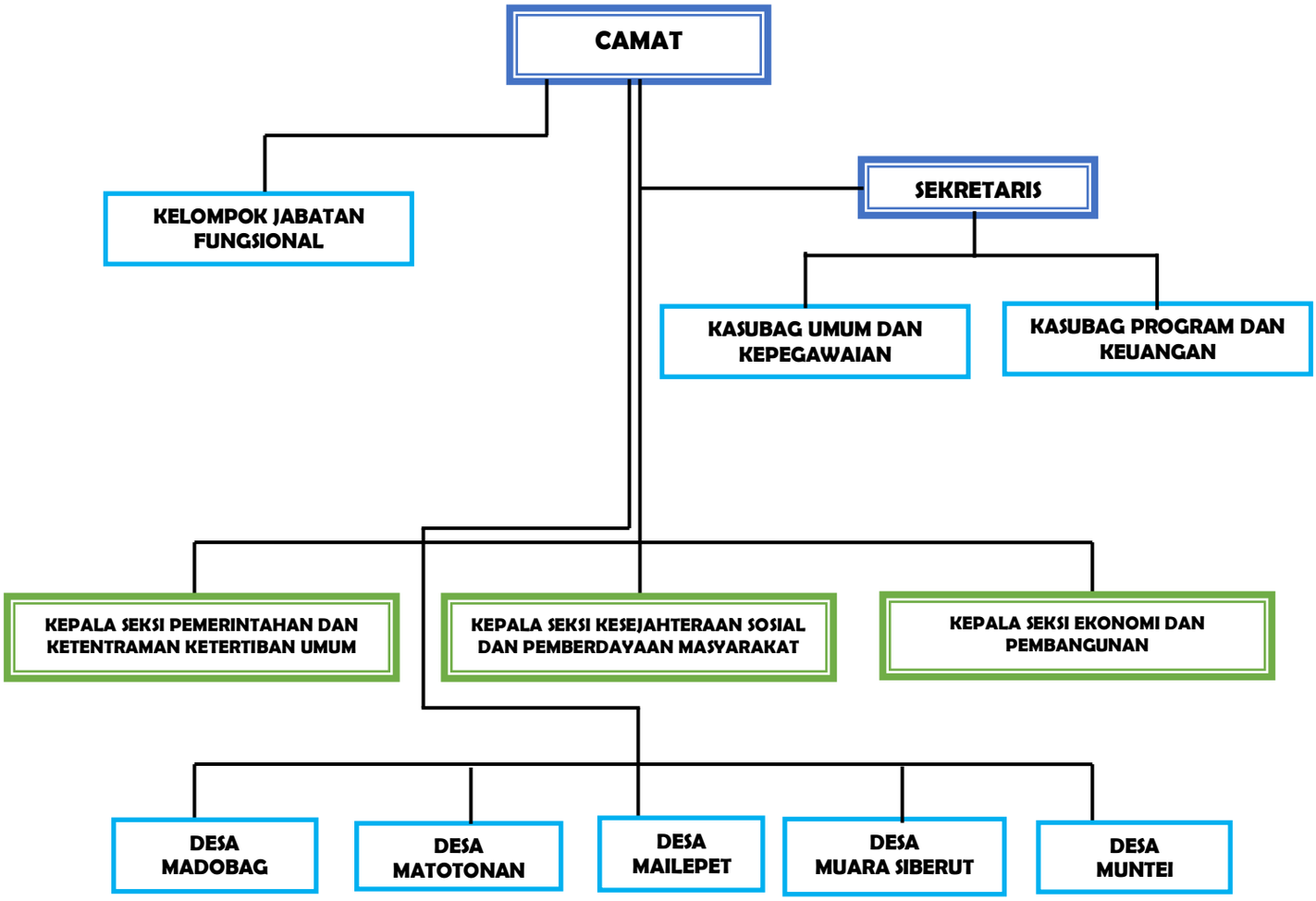
a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan di kecamatan;
b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah di tingkat kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan;
d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang ekonomi dan pembangunan;
e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja OPD yang ada di wilayah Kecamatan dalam bidang ekonomi dan pembangunan;
f. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), Maka Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Camat;
b. Sekretaris, membawahkan:
    1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentrman dan Ketertiban Umum
d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Susunan Organisasi Kecamatan Siberut Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Kecamatan Siberut Selatan



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Berdasarkan data per April 2025, jumlah pegawai Kecamatan Siberut Selatan adalah sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Struktur pegawai berdasarkan pangkat/golongan ruang, Eselon, dan Pendidikan dapat dilihat pada table 2.1, 2.2, dan 2.3 berikut:

Tabel 2.1
Jumlah dan Persentase Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	Golongan I :					
	Golongan I/a	0	0	0	0%	0%
	Golongan I/b	0	0	0	0%	0%
	Golongan I/c	0	0	0	0%	0%
	Golongan I/d	0	0	0	0%	0%

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
2.	Golongan II :					
	Golongan II/a	0	0	0	0%	0%
	Golongan II/b	0	0	0	0%	0%
	Golongan II/c	2	1	3	11%	5%
	Golongan II/d	1	0	1	5%	0%
3.	Golongan III :					
	Golongan III/a	0	1	1	0%	5%
	Golongan III/b	4	1	5	23%	5%
	Golongan III/c	0	1	1	0%	5%
	Golongan III/d	3	1	4	17%	5%
4.	Golongan IV :					
	Golongan IV/a	1	0	1	5%	2%
	Golongan IV/b	1	0	1	5%	0%
T O T A L		12	5	17	70%	29%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Siberut Selatan, 2025

Tabel 2.2
Jumlah dan Persentase Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon

NO	ESSELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	Esselon I/a	-	-	0	0%	0%
	Esselon I/b	-	-	0	0%	0%
2.	Esselon II/a	-	-	0	0%	0%
	Esselon II/b	-	-	0	0%	0%
3.	Esselon III/a	1	0	1	5%	0%
	Esselon III/b	1	0	1	5%	0%
4.	Esselon IV/a	3	0	3	17%	0%
	Esselon IV/b	1	1	2	5%	5%
5.	Pelaksanan	6	4	10	35%	23%
T O T A L		12	5	17	70%	29%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Siberut Selatan, 2025

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin (Orang)

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)
		LK	PR	
1.	Fungsional Umum/Staff	6	4	10
2.	Eselon III	2	0	2
3.	Eselon IV	4	1	5
T O T A L		12	5	17

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Siberut Selatan,2025

Tabel 2.4
Jumlah dan Persentase Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	STRATA PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (Orang)	PERSENTASE	
		LK	PR		LK	PR
1.	SD/Sederajat	0	0	0	0%	0%
2.	SMP/Sederajat	0	0	0	0%	0%
3.	SMA/Sederajat	5	2	7	29%	11%
4.	Diploma III (DIII)	1	0	1	5%	0%
5.	Strata I (S1)	6	3	9	30%	17%
6.	Strata II (S2)	0	0	0	0%	0%
T O T A L		12	5	17	70%	29%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Siberut Selatan, 2025

Dari uraian dan klasifikasi pegawai diatas, kondisi aparatur yang berada di Kecamatan Siberut Selatan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan staf pelaksanan.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dalam meningkatkan keterampilannya guna dapat melayani masyarakat
3. Dalam era globalisasi, diperlukan tenaga perencana yang profesional khususnya di Kecamatan dalam rangka membaca isu-isu strategis.

Berdasarkan Tabel 2.1 hingga Tabel 2.4 mengenai kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa struktur kepegawaian di kecamatan ini masih relatif terbatas baik dari sisi jumlah maupun jenjang kepangkatan dan kualifikasi pendidikan. Total jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 17 orang, terdiri dari 12 laki-laki (70%) dan 5 perempuan (29%), menunjukkan adanya ketimpangan proporsi gender, di mana pegawai laki-laki mendominasi hampir seluruh posisi struktural dan fungsional.

Dari sisi pangkat/golongan, sebagian besar pegawai berada pada Golongan III dan sebagian kecil pada Golongan IV, sementara Golongan I dan II relatif sangat sedikit bahkan tidak ada pada beberapa sub golongan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai telah berada pada jenjang menengah karier, namun masih terbatas dalam jenjang pimpinan tinggi yang mencerminkan keterbatasan peluang promosi jabatan di lingkungan kecamatan.

Jika ditinjau dari struktur jabatan (Tabel 2.4), sebagian besar pegawai menduduki jabatan sebagai fungsional umum atau staf sebanyak 10 orang, sedangkan jabatan struktural terdiri atas 2 orang eselon III dan 5 orang eselon IV. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur berperan sebagai pelaksana teknis, bukan pengambil keputusan strategis. Sementara itu, dari sisi struktur eselon (Tabel 2.2), terlihat bahwa hanya sebagian kecil pegawai menempati posisi eselon III dan IV, dengan komposisi laki-laki masih mendominasi jabatan pimpinan, sedangkan peran perempuan masih terbatas pada level pelaksana. Dari segi tingkat pendidikan (Tabel 2.3), sebagian besar pegawai telah memiliki pendidikan minimal Strata I (S1) sebanyak 9 orang (47%), sementara 7 orang (41%) berpendidikan SMA/sederajat, dan 1 orang (5%) berpendidikan Diploma III (DIII). Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan pascasarjana (S2). Komposisi ini menunjukkan bahwa secara umum kompetensi formal pegawai cukup memadai untuk tugas administratif dasar, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas dalam bidang manajerial, teknis, dan pelayanan publik agar selaras dengan tuntutan reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan pemerintahan.

Secara keseluruhan, analisis SDM Kecamatan Siberut Selatan menggambarkan struktur kepegawaian yang masih kecil, didominasi laki-laki, dengan jenjang pendidikan menengah hingga sarjana, dan peran perempuan yang masih terbatas. Tantangan utama yang dihadapi yaitu peningkatan kualitas aparatur, pemerataan gender, serta penguatan kapasitas manajerial dan teknis, agar kecamatan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, responsif, dan berkinerja tinggi di masa mendatang. rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang semakin berkualitas, khususnya di tingkat Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang semakin berkualitas, khususnya di tingkat Kecamatan Kabupaten Kepulauan

Mentawai, Kecamatan Siberut Selatan dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobilear dan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya. Akan tetapi untuk menciptakan pelayanan yang prima dengan kondisi ruangan yang lengkap dan nyaman bagi masyarakat serta fasilitas bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, maka peralatan, perlengkapan, mobiler, serta peralatan komputer masih dirasa kurang, dan untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kecamatan Siberut Selatan akan melakukan penganggaran secara bertahap untuk mencapai kondisi sarana prasarana yang diinginkan. Berikut disajikan keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Siberut Selatan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024.

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Siberut Selatan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1	P.C Unit	3	Unit	Baik
2	Laptop	5	Unit	Baik
3	Lemari Kayu	14	Unit	Baik
4	Speker Portable	1	Unit	Baik
5	Rak Kayu	9	Unit	Baik
6	Lemari Es	1	Unit	Baik
7	A.C. Split	1	Unit	Baik
8	Camera Video	2	Unit	Baik
9	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	Baik
10	Printer	5	Unit	Baik
11	Kursi Rapat	13	Buah	Baik
12	Meja ½ biro	12	Buah	Baik
13	Meja Biro	10	Buah	Baik
14	Meja Kerja joint table	2	Set	Baik
15	Meja Rapat	1	Unit	Baik
16	Lemari Arsip Gantung	7	Buah	Baik
17	Camera	3	Unit	Baik
18	Handy Cam	2	Unit	Baik
19	Filling Cabinet	4	Unit	Baik
20	Motor Boat	2	Unit	Baik
21	Kursi Besi/metal	1	Unit	Baik
22	Kursi plastik	50	Buah	Baik
23	Kursi putar	23	Buah	Baik
24	Lemari kaca	1	Buah	Baik
25	Meja rapat	2	Buah	Baik
26	Mikrophone	1	Buah	Baik
27	Sofa	7	Set	Baik
28	Kursi tunggu	4	Unit	Baik
29	Lemari besi	7	Unit	Baik

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Siberut Selatan

Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Tahun 2020-2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya, secara umum sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan rasio diatas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Siberut Selatan berhasil direalisasikan dengan efektif, yakni IKM Kecamatan terus meningkat dari B (2020-2022) menjadi A (2023-2024), predikat nilai SAKIP dari tahun 2020-2021 (tidak ada nilai) dari tahun 2022-2024 nilai SAKIP Kecamatan Siberut Selatan BB. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Siberut Selatan dapat digambarkan berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode 2020 – 2024.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			B	B	B	B	B	B	-	-	B	A	A	-	-	100	100	100
2	Penetapan APBDesa Tepat waktu			100	100	100	100	100	100	-	-	90	90	90	-	-	90	90	90
3	Serapan APBDesa diatas 90 persen			100	100	100	100	100	100	-	-	94	96	95	-	-	94	96	95
4	Penanganan Kasus kriminal dikecamatan yang tertangani			100	100	100	100	100	100	-	-	-	90	90	-	-	-	90	90
5	Aduan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	-	-	-	90	90	-	-	-	90	90
6	Nilai SAKIP			B	B	B	B	B	B		-	BB	BB	BB	-	-	BB	BB	BB
7	Jumlah Inovasi yang diterapkan			1				1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
8	Persentase capaian kinerja perangkat daerah			100	100	100	100	100	100		96,18	93,38	97,78	94,94		96,18	93,38	97,78	94,94

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Siberut Selatan, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Siberut Selatan bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal – hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolan pendanaan pelayanan. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara ekplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan
2. Jumlah personil khususnya PNS yang ada di Kecamatan Siberut Selatan sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan kecamatan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Berikut beberapa contoh kelompok sasaran layanan kecamatan antara lain:

1. Masyarakat umum: Layanan yang ditujukan untuk masyarakat luas, seperti:
   - Layanan kesehatan
   - Layanan pendidikan
   - Layanan informasi dan komunikasi
2. Kelompok rentan: Layanan yang ditujukan untuk kelompok rentan, seperti:
   - Lansia
   - Anak-anak dan remaja
   - Penyandang disabilitas
   - Masyarakat miskin atau rentan
3. Petani dan nelayan: Layanan yang ditujukan untuk petani dan nelayan, seperti:
   - Layanan penyuluhan pertanian
   - Layanan bantuan benih dan pupuk
   - Layanan pemasaran hasil pertanian
4. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah): Layanan yang ditujukan untuk UMKM, seperti:
   - Layanan pelatihan dan pendampingan
   - Layanan akses pembiayaan
   - Layanan pemasaran
5. Masyarakat adat: Layanan yang ditujukan untuk masyarakat adat, seperti:
   - Layanan pelestarian budaya
   - Layanan pendidikan dan kesadaran masyarakat
   - Layanan bantuan social
6. Instansi vertikal yakni: Kantor-kantor pemerintahan di tingkat kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi khusus, seperti Forkopimcam, kantor polisi, kantor pos, dan lain-lain;
7. Organisasi Masyarakat yakni LSM, kelompok swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, dan organisasi lainnya yang beroperasi di wilayah kecamatan;
8. Pihak lain yakni Universitas, lembaga penelitian, dan pihak lain yang memiliki hubungan dengan kegiatan kecamatan

Dalam menentukan kelompok sasaran layanan di kecamatan, perlu dipertimbangkan beberapa faktor, seperti:

1. Kebutuhan dan masalah: Apa kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kecamatan?
2. Prioritas: Apa prioritas layanan yang perlu diberikan kepada masyarakat kecamatan?
3. Sumber daya: Apa sumber daya yang tersedia untuk mendukung layanan yang akan diberikan kepada masyarakat kecamatan.

Dengan menentukan kelompok sasaran layanan kecamatan yang tepat, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamaatan Siberut Selatan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Siberut Selatan selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Siberut Selatan, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Siberut Selatan 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana yang terdapat pada Tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Siberut Selatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik	Penyelesaian Pelayanan Masyarakat di kecamatan kurang maksimal	Keterbasan SDM petugas pelayanan di kecamatan
		Lemahnya koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah daerah
	Lambatnya penyusunan dan penetapan APBDes	Keterbatasan SDM aparatur pemerintahan desa
		Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan desa tentang kebijakan pemerintah kabupaten
		Terbatasnya angaran Kecamatan dalam melakukan pengawasan
Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Masih rendahnya pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan pemerintahan	Rendahnya komitmen perangkat daerah dalam memanfaatkan digitalisasi
		Masih terbatasnya sumber daya manusia dan lembaga di Kepulauan Mentawai dalam menyediakan dan menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan pemerintahan
		Masih rendahnya penerapan sistem meritokrasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan ASN
		Masih rendahnya kinerja ASN

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kondisi pelayanan publik di Kecamatan Siberut Selatan, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan pemerintahan di wilayah ini masih menghadapi beberapa tantangan yang

bersifat realistis dan wajar dalam konteks geografis serta kapasitas wilayah kepulauan. Kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya optimal karena adanya keterbatasan jumlah dan kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan. Hal ini berpengaruh terhadap efisiensi penyelesaian berbagai urusan masyarakat di tingkat kecamatan. Koordinasi antara aparatur kecamatan dan pemerintah desa juga masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan daerah dapat berjalan lebih selaras dan tepat sasaran. Selain itu, penyusunan dan penetapan APBDes yang terkadang mengalami keterlambatan lebih disebabkan oleh proses administrasi yang kompleks serta kebutuhan akan pendampingan teknis yang lebih intensif. Dari sisi pendanaan, alokasi anggaran kecamatan yang relatif terbatas juga menjadi faktor yang mempengaruhi intensitas kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, bukan semata karena kelemahan tata kelola, melainkan karena keterbatasan fiskal yang umum terjadi di wilayah dengan karakter kepulauan.

Sementara itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan berbasis teknologi informasi masih dalam tahap pengembangan. Pemanfaatan digitalisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan optimal karena masih diperlukan peningkatan kapasitas teknis aparatur serta penyediaan infrastruktur pendukung di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan konektivitas. Upaya transformasi menuju birokrasi digital memerlukan proses bertahap melalui peningkatan kompetensi ASN dan penguatan sistem kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Dalam konteks ini, Kecamatan Siberut Selatan telah memiliki landasan yang baik untuk terus berbenah melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi antar lembaga, dan pemanfaatan teknologi informasi secara bertahap. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pelayanan publik dapat semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkelanjutan di wilayah kepulauan.

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut diatas maka isu strategis Kecamatan Siberut Selatan dalam periode 2025-2029 adalah peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat, dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat Tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8
Isu Strategis Perangkat daerah Kecamatan Siberut Selatan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KHLS yang relevan dengan PD	Isu Dinasmis Yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Sumber Daya Alam Pertanian dan Perikanan	• Keterbatasan Sumber Daya manusia • Kurangnya Koordinasi • Keterlibatan Masyarakat yang Kurang	• Pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi di kecamatan • Kesadaran Masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencacatan sipil • Koordinasi antar Lembaga vertical,horizo	• Transformasi Birokrasi • Penyerapan anggaran • Koordinasi dan Pelaksanaan	• Pemanfaatan Teknologi Digital • Partisipasi Masyarakat • Inovasi dan Kreativitas	• Pengelolaan Sumber daya Alam • Pengembangan Ekonomi Regional • Pengelolaan Lingkungan • Kwalitas Pelayanan Publik	• Pelayanan Publik yang belum prima

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KHLS yang relevan dengan PD	Isu Dinasmis Yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
		ntal dan pemerintahan desa • Partisipasi				

Kecamatan Siberut Selatan memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan yang dapat menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi lokal. Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih menghadapi beberapa kendala yang bersifat teknis dan struktural. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun keterampilan, yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program dan pelayanan di tingkat kecamatan. Selain itu, koordinasi antar lembaga, baik vertikal, horizontal, maupun dengan pemerintahan desa, masih perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan lebih selaras dan saling mendukung. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga masih perlu ditingkatkan, agar proses pembangunan lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Secara umum, tantangan ini menggambarkan kondisi yang wajar di wilayah dengan karakter geografis dan sosial seperti Siberut Selatan, yang memiliki ketersebaran penduduk dan aksesibilitas yang cukup terbatas.

Dalam konteks yang lebih luas, isu-isu yang dihadapi Kecamatan Siberut Selatan juga selaras dengan arah kebijakan nasional dan regional, seperti penguatan transformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Sejalan dengan tren global menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan berbasis teknologi digital, kecamatan ini memiliki peluang besar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, isu strategis “Pelayanan publik yang belum prima” lebih dimaknai sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan pendekatan bertahap dan kolaboratif, Kecamatan Siberut Selatan berpotensi memperkuat kinerja pemerintahannya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

BAB III
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan yang ingin capai Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani”

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Kecamatan Siberut Selatan diperlukan sejumlah sasaran yang meggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas layanan pemerintahan umum dikecamatan,
b. Fasilitasi pelaksanaan APBDesa,
c. Forum Koordinasi Desa,
d. Fasiltasi Forum Pimpinan Kecamatan
e. Meningkatkan Tramtibnas Kecamatan,
f. Meningkatkan Pengendalian Masyarakat,
g. Meningkatkan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2030 berserta indikator disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	*Baseline* 2024	Target Tahun					Ket
						2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani		Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	93,45	93,50	93,70	93,80	93,90	94,00	
		Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Kecepatan waktu pelayanan	waktu	3 hari	2 hari	1 hari	8 jam	6 jam	2 jam	
			Persentase serapan APBDes di atas 90%	persen	90,00	93,50	93,90	94,00	94,50	95,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	indeks	77,45	78,12	80,45	81,02	81,28	81,65	
		Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	nilai	74,41	74,50	74,60	74,70	74,80	75,00	
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	
			Capaian kinerja perangkat daerah	persen	94,94	100	100	100	100	100	

3.3 Strategi Renstra Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2029

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut, Oleh karena itu, strategi Pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Mentawai secara efektif dan berkelanjutan. Untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Siberut Selatan sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan
2. Mempermudah koordinasi antar perangkat daerah
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah

Strategi demi mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan tujuan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Siberut Selatan dalam penahapan strategi renstra dapat disajikan seperti tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Siberut Selatan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Infrastruktur Daerah untuk Peningkatan Produktivitas menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif)	Penguatan Sumber Daya Ekonomi untuk Peningkatan Produktivitas menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan transformasi ekonomi daerah	Penguatan fondasi Tranformasi untuk pembangunan berkelanjutan dan berdaya saing	Transformasi Pembangunan untuk pembangunan inklusif dan berkelanjutan

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan

merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan Pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Kecamatan Siberut Selatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani
		Peningkatan Penyusunan RKPDesa yang cermat dan tepat waktu menjadi dasar penyusunan APBDesa, RKPDesa	Peningkatan kualitas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) agar lebih cermat dan tepat waktu, sehingga RKPDesa dapat menjadi dasar yang kuat dan valid dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dengan RKPDesa yang baik, pembangunan desa dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, dan efisien
		Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan APBDesa untuk memastikan ketepatan waktu dan efektivitas penggunaan anggaran.	Penyelenggaraan Evaluasi kinerja pelaksanaan APBDesa laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara rutin dan transparan.
		Penguatan Fungsi Forkopincam (linmas, Babinsa, Babinkamtibnas)	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
		peningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan	Proses pelayanan untuk memastikan efisiensi dan efektif
	Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan peningkatan efektivitas penggunaan dana desa
		Penguatan forum koordinasi desa	Peningkatan Forum koordinasi desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, seperti pelayanan administrasi kependudukan
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Peningkatkan nilai LAKIP, menunjukkan akuntabilitas kinerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
		Peningkatan efektifitas penerapan inovasi di kecamatan	Peningkatan Pelayanan publik di kecamatan dapat menjadi lebih efisien, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan

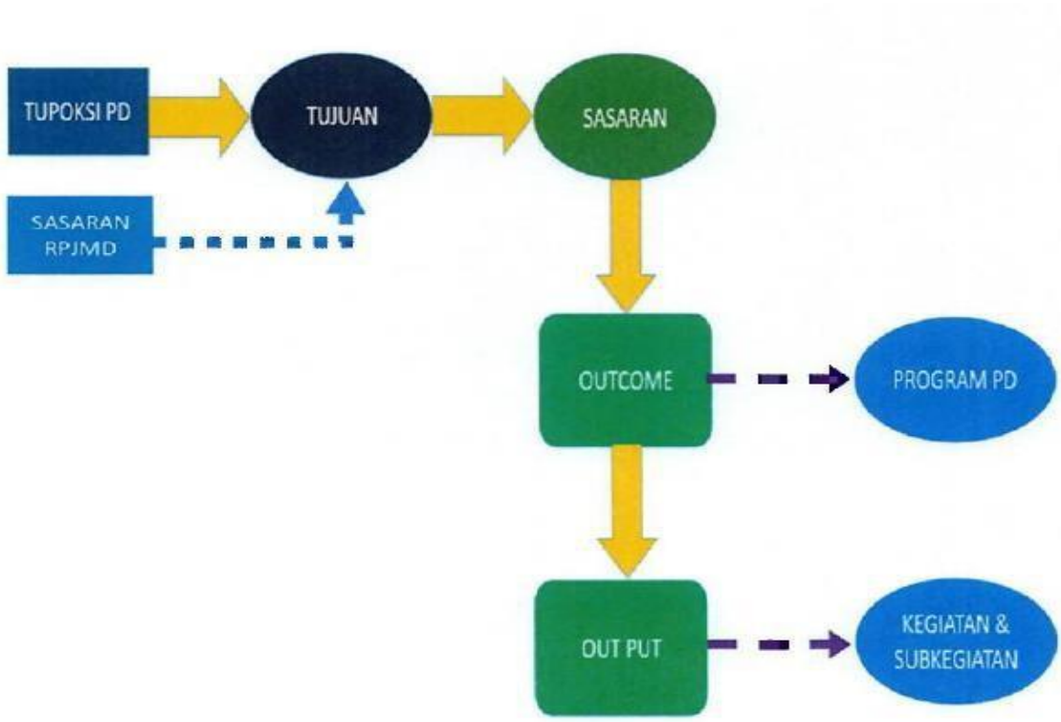
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
			masyarakat
		Peningkatkan transparansi dalam pelaporan kinerja.	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia ASN Kecamatan
		Melakukan evaluasi kinerja secara teratur dan membuat laporan mengenai kinerja	Menyediakan kerangka acuan untuk pengambilan keputusan dan tindakan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci Adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata. Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Siberut Selatan merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Siberut Selatan juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Siberut Selatan serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Siberut Selatan dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra



Program dan Kegiatan Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai selama tahun 2025-2029 antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak ditangani secara spesifik oleh lembaga lain, namun penting untuk menjaga stabilitas, persatuan, ketertiban umum, dan kesatuan bangsa, seperti koordinasi antar instansi, pembinaan wawasan kebangsaan, dan penanganan konflik sosial. Program ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pemerintahan, memastikan tidak ada urusan yang terabaikan, dan menjaga kelangsungan fungsi negara pada tingkat yang lebih luas.

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya. Program ini mencakup pengembangan ekonomi melalui UMKM, penguatan kelembagaan desa seperti BUMDes, peningkatan infrastruktur, dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memilih dan mengontrol lingkungannya demi kemajuan desa dan kelurahan.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan baik.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2029 harus mampu menghasilkan output dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Siberut Selatan.

Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang lebih besar, yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang telah ditetapkan dalam Kegiatan terkait untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur.
Dari uraian diatas dapat di jelaskan pada tabel program di bawah ini :

Tabel 4.1
Program Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Nilai Indek Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				Persentase penetapan APBDesa tepat waktu	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
				Persentase serapan APBDes diatas 90 persen	
	Fasilitasi Pelaksanaan APBDesa			Jumlah desa yang difasilitasi	
	Forum Koordinasi desa			Jumlah forum/koordinasi yang dilakukan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Meningkatnya trantibmas di kecamatan	Meningkatnya kualitas kamtibmas	Jumlah kasus/kejadian yang ditindaklanjuti/diselesaikan	Penanganan kasus kriminal dikecamatan yang tertangani	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Meningkatnya pengendalian layanan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat		Persentase aduan yang ditindaklanjuti	
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah		Nilai LAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Inovasi	
				Persentase capaian kinerja perangkat daerah	
				Persentase kepatuhan penyusunan	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program
1	2	3	4	5	6
				perencanaan, dan pelaporan tugas layanan	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan
Renstra Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2030

INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF							
			2026		2027		2028		2029	
			target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu
LATAN										
Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	2.374.815.966	100%	2.085.712.323	100%	2.037.726.837	100%	2.080.221.441	100%	2.110.083.52
Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	39.455.500	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000
Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4 Kali	38.233.200	4 Kali	30.000.000	4 Kali	35.000.000	4 Kali	40.000.000	4 Kali	45.000.000
Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	1.817.714.836	100%	2.198.303.321	100	2.262.903.321	100	2.262.903.321		2.262.903.32
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	1.719.174.836	23 Orang	2.164.903.321	28 Orang	2.164.903.321	28 Orang	2.164.903.321	28 Orang	2.164.903.3
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45 Orang	98.540.000	45 Orang	33.400.000	45 Orang	98.000.000	45 Orang	98.000.000	45 Orang	98.000.00
Persentase Peningkatan Kerja Aparatur Perangkat Daerah	100%	220.932.330	100%	97.550.500	100%	224.00 00	100%	225.000.000	100%	254.000.00
Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Paket	7.998.250	1 Paket	2.577.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.00
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	2 paket	6.096.080		-	3 paket	9.000.000			3	9.000.00
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	50.106.000	4 Paket	39.873.500	4 Paket	40.000.000	4 Paket	50.000.000	4 Paket	50.000.00
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Laporan	8.000.000	4 Laporan	9.000.000	4 Laporan	9.000.000	4 Laporan	9.000.000	4 Laporan	9.000.00
		23.640.000		-		-		-	2 paket	20.000.00
Jumlah Laporan	2 Laporan	125.092.000	2 Lapora	46.100.000	2 Lapora	161.000.000	2 Lapora	161.000.000	2 Lapora	161.000.00

INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF							
			2026		2027		2028		2029	
			target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			n		n		n		n	
Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	100%	41.652.700	-	-	100%	74.000.000	100%	56.000.000	100%	56.000.00
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	23.872.700	-	-	3 Unit	40.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.00
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	17.780.000	4 Unit	-	4 Unit	34.000.000	4 Unit	36.000.000	4 Unit	36.000.00
Meningkatnya Layanan Operasional Perkantoran	100%	202.344.000	100%	20.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.00
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Rek	12.000.000	2 Rek	20.000.000	2 Rek	24.000.000	2 Rek	24,000,000	2 Rek	24,000,00
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	190.344.000		-		-		-		
Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	100%	94.369.300	100%	34.230.000	100%	391.000.000	100%	91.000.000	100%	91.000.00
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	38.500.000	2 Unit	31.470.000	5 Unit	60.000.000	5 Unit	60.000.000	5 Unit	60.000.00
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	10.870.000	2 Unit	2.760.000	5 Unit	6.000.000	5 Unit	6.000.000	5 Unit	6.000.00
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	25.000.000	-	-	1	300.000.000				
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	19.999.300	1 Unit	-	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.00

INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF							
			2026		2027		2028		2029	
			target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu
Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi										
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	B Indeks	57.858.900	B	12.660.000	B	50.000.000	A	50.000.000	A	50.000.00
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	5 Desa	24.059.000	5 Desa	12.660.000	5 Desa	15.000.000	5 Desa	15.000.000	5 Desa	15.000.00
Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Desa	24.059.000	5 Desa	12.660.000	5 Desa	15.000.000	5 desa	15.000.000	5 desa	15.000.00
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan		33.799.900		12.660.000		35.000.000	3 Desa	35.000.000	3 Desa	35.000.000
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Desa	33.799.900	5 Desa	12.660.000	5 Desa	35.000.000	5 Desa	35.000.000	5 Desa	35.000.000
Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan	100%	43.497.650	100%	28.273.000	100%	90.000.000		90.000.000		90.000.00
Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di kecamatan	100%	43.497.650	100%	28.273.000	100%	90.000.000		90.000.000		90.000.00
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	120 Orang	23.499.900	80 Orang	13.933.000	120 Orang	45.000.000	120 Orang	45.000.000	120 Orang	45.000.00
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Desa	19.997.750	5 Desa	14.340.000	5 Desa	45.000.000	5 Desa	45.000.000	5 Desa	55.000.00
Persentase Konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/disel esaikan	100%	106.203.000	100%	19.833.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.00
Terselenggaran ya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	80%	106.203.000	90%	19.833.000	90%	125.000.000	90%	125.000.000	90%	125.000.00

INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF							
			2026		2027		2028		2029	
			target	pagu	target	pagu	target	pagu	target	pagu
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30 Org	81.264.000	30 Org	11.088.000	30 Org	100.000.000	30 Org	100.000.000	30 Org	100.000.00
Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Laporan	24.939.000	1 Laporan	8.745.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000
Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu Persentase laporan keuangan desa diselesaikan tepat waktu	90%	84.956.000	93%	60.000.000	94%	60.000.000	94%	60.000.000	95%	60.000.000
Persentase Laporan Keuangan Desa diselesaikan tepat waktu Persentase serapan APBDes diatas 90 persen	90%	84.956.000	93%	60.000.000	94%	60.000.000	94%	60.000.000	95%	60.000.000
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Lap	84.956.000	1 Lap	60.000.000	1 Lap	60.000.000	1 Lap	60.000.000	1 Lap	60.000.00

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Siberut Selatan tahun 2025–2030 diarahkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kecamatan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan Tabel 4.1, fokus utama pembangunan perangkat kecamatan tertuang dalam empat bidang besar, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, serta Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Desa.

Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah, kegiatan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi kerja aparatur dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan melalui evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor. Tercatat bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan seperti Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meningkat secara bertahap dari Rp38,23 juta pada tahun 2025 menjadi Rp61 juta pada tahun 2030, menunjukkan adanya komitmen untuk memperkuat sistem evaluasi dan pelaporan kinerja. Demikian pula, pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pagu indikatif stabil di atas Rp1,2 miliar per tahun untuk 17 orang ASN, mencerminkan kesinambungan pembiayaan sumber daya aparatur. Sementara itu, kegiatan penunjang lain seperti penyediaan logistik, cetakan, listrik, dan peralatan perkantoran juga mendapatkan perhatian dengan alokasi anggaran yang relatif konstan guna menjaga operasional perkantoran tetap optimal dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kecamatan Siberut Selatan menitikberatkan pada peningkatan efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari kabupaten. Kegiatan seperti peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain masing-masing memperoleh pagu sekitar Rp35 juta hingga Rp45 juta per tahun secara konsisten. Hal ini mencerminkan keseriusan kecamatan dalam memperkuat peran koordinatif dan pelayanan dasar pemerintahan.

Di sisi lain, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, melalui kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang desa dan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat, dengan anggaran rata-rata Rp35 juta hingga Rp45 juta setiap tahun. Program ini diharapkan mampu memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan di tingkat desa.

Pada aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, fokus diarahkan pada pembinaan wawasan kebangsaan dan koordinasi lintas sektor. Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional mendapat alokasi Rp100 juta per tahun, yang menunjukkan upaya menjaga stabilitas sosial dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di wilayah kecamatan. Sementara itu, kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dijalankan secara berkelanjutan dengan pagu Rp25 juta per tahun untuk memperkuat sinergi antar unsur pemerintahan dan keamanan. Adapun pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan memastikan laporan keuangan disusun tepat waktu. Kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa memperoleh pagu Rp60 juta per tahun untuk tiga desa binaan, mencerminkan pentingnya fungsi pembinaan kecamatan terhadap tata kelola keuangan desa.

Secara keseluruhan, arah kebijakan Kecamatan Siberut Selatan dalam

periode 2025–2030 menunjukkan kesinambungan pembangunan kelembagaan dan pelayanan publik. Kegiatan yang dirancang berorientasi pada peningkatan kinerja aparatur, efisiensi pelaksanaan tugas, partisipasi masyarakat, serta penguatan koordinasi pemerintahan lintas sektor. Dengan pola pendanaan yang konsisten dan peningkatan alokasi bertahap pada aspek strategis, Renstra ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka Indikator kinerja Kecamatan Siberut Selatan selama 5 tahun ke depan (2025-2029) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	93,45	93,50	93,70	93,80	93,90	94,00	
2	Kecepatan waktu pelayanan	waktu	3 hari	3 hari	8 jam	8 jam	4 jam	2 jam	
3	Persentase serapan APBDes di atas 90%	persen	90,00	93,50	93,90	94,00	94,50	95,00	
4	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	indeks	77,45	78,12	80,45	81,02	81,28	81,65	
5	Meningkatnya Kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	74,41	74,50	74,60	74,70	74,80	75,00	
6	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	2 ionvasi	2 inovasi	2 inovasi	
7	Capaian kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu organisasi, unit kerja, atau program dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. IKK berfungsi sebagai tolok ukur kinerja yang paling penting dan berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi, serta target pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan daerah, IKK digunakan untuk mengukur capaian kinerja perangkat daerah (PD) terhadap hasil yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan, seperti Renstra (Rencana Strategis) atau Renja (Rencana Kerja). Indikator ini bersifat terukur, relevan, dan dapat dibandingkan antar periode, sehingga dapat menunjukkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Dengan demikian, Indikator Kinerja Kunci (IKK) menjadi instrumen penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena memberikan gambaran yang obyektif mengenai seberapa jauh program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai hasil yang diharapkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Siberut Selatan pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	persen	68	68	68	68	68	68	
3	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu	persen	90	93	93	94	95	95	
5	Persentase serapan APBDes diatas 90 persen	persen	90	93	93	94	95	95	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Siberut Selatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan Renstra yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2025-2029. Program ini mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Siberut Selatan, RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung dan serentak pada pada tanggal 27 November 2024 dan secara defenitif dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Siberut Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja OPD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Kecamatan Siberut Selatan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja tahunan, Renstra Kecamatan Siberut Selatan Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
6. RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
7. Renja-OPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD);
8. Manajemen risiko strategis perangkat daerah (OPD) adalah proses proaktif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Ini melibatkan penentuan konteks strategis, identifikasi risiko, analisis risiko

(kemungkinan dan dampak), serta penetapan respons untuk mengelola risiko yang teridentifikasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai misi OPD dan tata kelola pemerintahan yang baik

9. Pengelolaan risiko dalam perencanaan pembangunan yang dijalankan guna antisipatif terhadap perubahan/ dinamika serta memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian guna mencapai sasaran pembangunan Daerah Manajemen risiko dilaksanakan sebagai bentuk kendali untuk mengawal proses perencanaan sesuai dengan tahapan dan memainkan peran penting untuk memastikan keberhasilan dan konsistensi rencana pembangunan
10. Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat Perangkat Daerah adalah implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia yang bertujuan menciptakan data pembangunan daerah yang akurat, terpadu, dan dapat dibagikan dengan standar data, metadata, serta interoperabilitas yang sama di seluruh perangkat daerah. Ini dilakukan melalui mekanisme Forum Satu Data Indonesia, penyusunan Daftar Data, dan penerapan prinsip-prinsip SDI oleh Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data. Tujuan utama Adalah Mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah melalui data yang berkualitas, terintegrasi, dan akuntabel.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SIPORA UTARA
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i
Daftar Tabel..... ii
Daftar Gambar..... iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 4
1.3 Maksud dan Tujuan..... 6
1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SIPORA UTARA
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sipora Utara..... 8
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sipora Utara..... 27

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029..... 39
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029..... 39
3.3 Strategi Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029..... 42
3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029..... 43

BAB IV PROGRAM. KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program, Kegitan dan Sub Kegiatan..... 45
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 56

BAB V PENUTUP..... 58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Populasi Desa di Wilayah Kecamatan Sipora Utara Berdasarkan Jenis Kelamin 10
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai di Kecamatan Sipora Utara 19
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai PNS menurut Pendidikan di Kecamatan Sipora Utara 20
Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan di Kecamatan Sipora Utara 21
Tabel 2.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon di Kecamatan Sipora Utara 21
Tabel 2.6 Data Aset Kecamatan Sipora Utara TA 2024 22
Tabel 2.7 Data Aset Kecamatan Sipora Utara Per 31 Desember 2024 ..22
Tabel 2.8 Matriks Hasil Evaluasi Renstra Kecamatan Sipora Utara 5 tahun terakhir Tahun 2020-2024 26
Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sipora Utara 30
Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis 36
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sipora Utara 40
Tabel 3.2 Perumusan Tujuan Sasaran dan Strategi Resntra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029 42
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2030 43
Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sipora Utara.....44
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan /Subkegiatan Rentra Kecamatan Sipora Utara 48
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan..49
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 56
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama 57
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci ... .57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 2
Gambar 1.2 Langkah Penyusunan Renstra..... 4
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan Sipora Utara 9
Gambar 2.2 Daftar Desa dan Dusun di Wilayah Kecamatan Sipora Utara 9
Gambar 2.3 Bagan Organisasi Kecamatan Sipora Utara 13
Gambar 2.4 Jumlah Pegawai Kecamatan Sipora Utara.....20
Gambar 2.5 Komposisi Pegawai Kecamatan Sipora Utara.....20
Gambar 2.6 Jumlah Pegawai Kecamatan Sipora Utara berdasarkan Pendidikan 20
Gambar 2.7 Jumlah Pegawai Kecamatan Sipora Utara berdasarkan Golongan 21
Gambar 3.1 *Logical Framework* Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai 40
Gambar 3.2 Cascading Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.....41
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra 45

BAB I
PENDAHLUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Renstra Kecamatan Sipora Utara 2025–2029 juga memperhatikan RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya mengacu pada RPJMD tetapi juga menjadi bagian dari pencapaian target pembangunan nasional dan global.

Dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025–2029, setiap Kecamatan Sipora Utara diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode lima tahun ke depan. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025. Instruksi ini menjadi pedoman bagi seluruh kepala daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sipora Utara untuk periode 2025–2029.

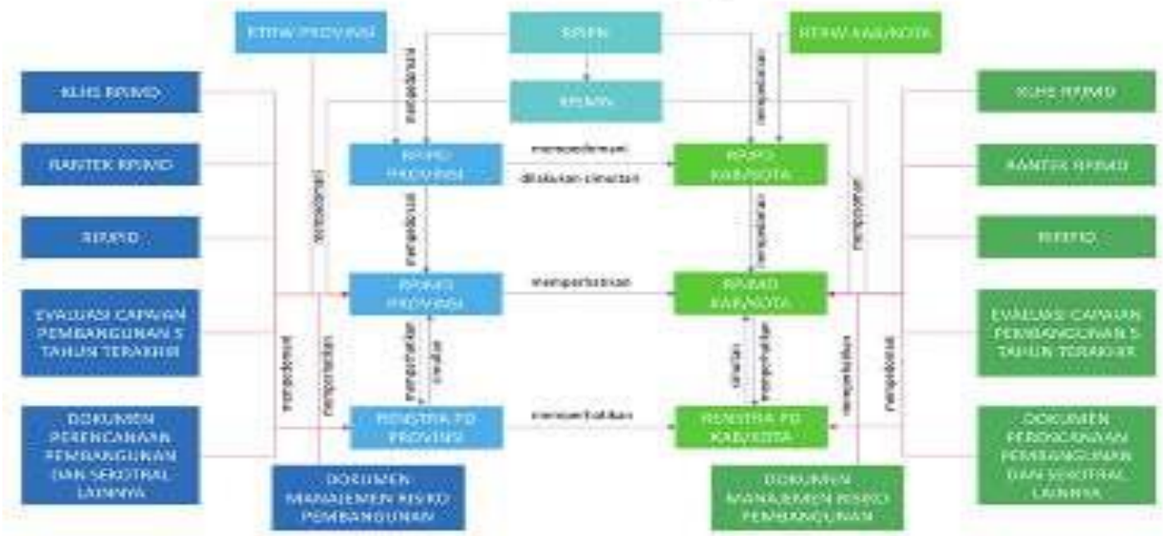
Penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035 dan RPJMN Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, di mana proses penyusunannya dilakukan secara simultan. RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan beberapa dokumen perencanaannya lainnya yang ada dilingkup Kabupaten Kepulauan Mentawai, antara lain KLHS RPJMD, Rancangan Teknokratik RPJMD, RIPJPID, hasil evaluasi Pembangunan lima tahun terakhir dan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang bersifat sektoral.

RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sipora Utara yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Kecamatan Sipora Utara yang diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan target kinerja dan pendanaan setiap tahunnya. RPJMD Selanjutnya akan

Sebagai bagian dari Kecamatan Sipora Utara di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kecamatan Sipora Utara memiliki tanggung jawab untuk menyusun Renstra yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025–2029. Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk mengoperasionalkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih, serta memastikan bahwa arah pembangunan kecamatan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Instruksi ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional, termasuk RPJMN 2025–2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan di daerah mendukung pencapaian target pembangunan nasional secara keseluruhan.

Gambar 1.1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rancangan Awal Renstra Kecamatan Sipora Utara adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sipora Utara untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipasif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan; dan (3) mempermenjadi dasar dalam penyusunan manajemen risiko level kota, sedangkan Renstra akan menjadi acuan dalam penyusunan manajemen risiko level Kecamatan Sipora Utara. Gambaran keterkaitan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

Program Kecamatan Sipora Utara disusun sesuai kertas kerja Renstra OPD, meliputi:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari

Setiap program memiliki indikator kinerja, target tahunan 2025–2029, dan pendanaan indikatif sesuai RPJMD. kuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Kecamatan Sipora Utara secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Program Kecamatan Sipora Utara disusun sesuai kertas kerja Renstra OPD, meliputi:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari

Setiap program memiliki indikator kinerja, target tahunan 2025–2029, dan pendanaan indikatif sesuai RPJMD.

Rancangan Awal Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Rancangan Awal Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Rancangan Awal Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Kecamatan Sipora Utara

Rancangan Awal Renstra Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sipora Utara yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-Kecamatan Sipora Utara lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

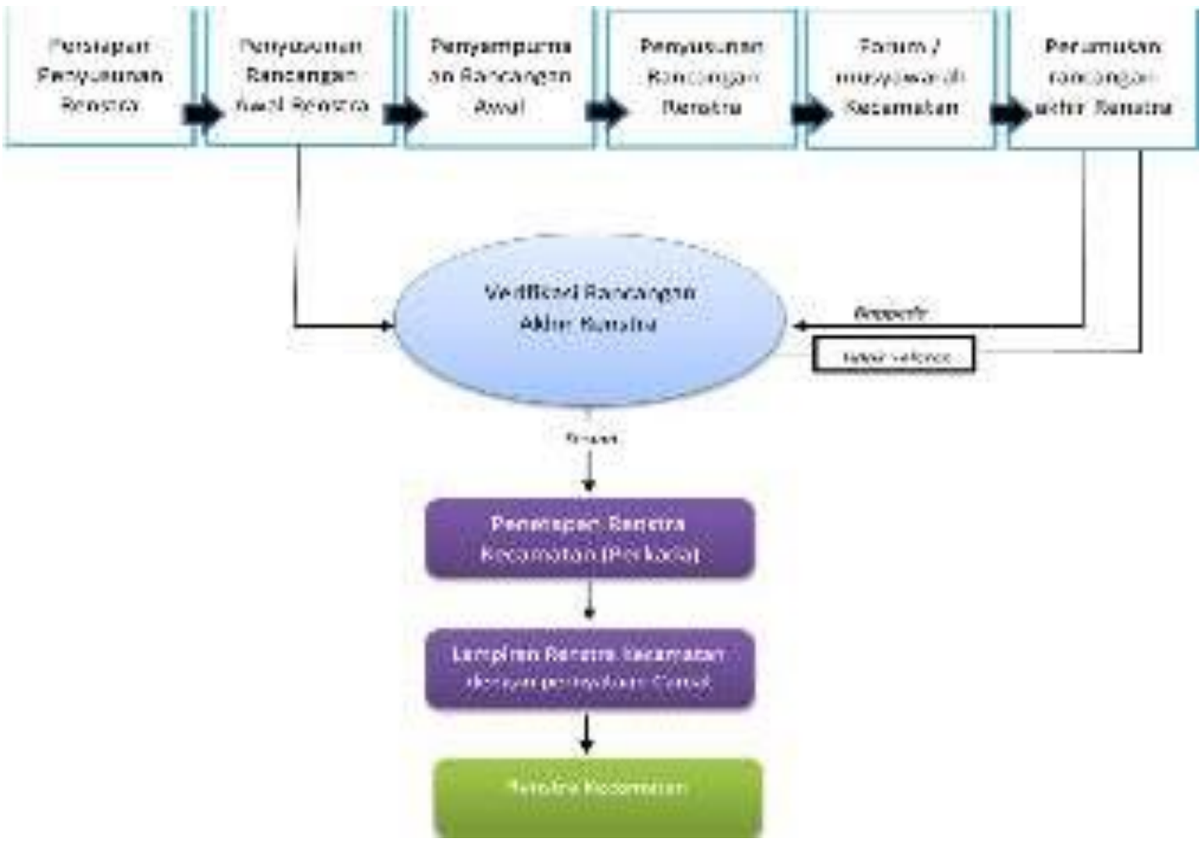
Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029;

2. Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepualauan mentawai Tahun 2025- 2029; dan
3. Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sipora Utara.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta.

Gambar 1.2
Langkah Penyusunan Renstra



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Sipora Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Sipora Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4).
20. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Tahun Anggaran 2019- 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor 63);
21. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 Nomor 12;

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, peraturan/regulasi yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Sipora Utara dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Renstra Kecamatan Sipora Utara mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di Kecamatan Sipora Utara sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sipora Utara. Sebagai upaya menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sipora Utara.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sipora Utara dalam pengelolaan pendapatan daerah dan potensi sumber daya daerah;
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati

Kepulauan Mentawai sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Sipora Utara;

3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Sipora Utara;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Sipora Utara di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra. Bab ini terdiri atas:

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMAATN SIPORA UTARA

Bab ini menggambarkan tentang gambaran umum tentang aspek dan pelayanan, permasalahan yang dihadapi dan isu strategis dalam menjalankan pelayanan dan pelaksanaan tugas urusan Kecamatan Sipora Utara. Bab ini terdiri atas:

1.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sipora Utara
2.1 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sipora Utara

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2025-2026). Bab ini terdiri atas:

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029
3.3 Strategi Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Pada Bab memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan kenerja penyelenggaraan urusan Kecamatan Sipora Utara. Bab ini terdiri atas:

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Pada Bab Penutup, disajikan upaya pengendalian dan evaluasi implementasi Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SIPORA UTARA

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Sipora Utara

Kecamatan Sipora Utara terletak pada 01º57'00'- 02º18'00" Lintang Selatan dan 98º30'00" – 99º42'00" Bujur Timur. Kecamatan Sipora Utara merupakan wilayah di mana ibukota Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Tuapejat, berada. Kecamatan Sipora Utara beribukota di Sido Makmur.

Kecamatan Sipora Utara menempati areal seluas 272,40 km² dan terbagi ke dalam 6 wilayah desa yakni Betumonga, Goisooinan, Bukit Pamewa, Sipora Jaya, Sido Makmur, dan Tuapejat. Desa yang paling luas wilayahnya adalah Betumonga (110,58 km²). Selain merupakan desa yang terluas, Betumonga juga merupakan desa yang terjauh lokasinya dari ibukota kecamatan Sipora Utara. Lokasi desa ini terletak di bagian barat daya kecamatan yang berbatasan dengan Samudera Hindia dan Kecamatan Sipora Selatan. Secara geografis, kecamatan Sipora Utara terletak di bagian utara Pulau Sipora.

Panjang garis pantai Kecamatan Sipora Utara adalah 135,44 km. Panjangnya garis pantai dikarenakan wilayah Kecamatan Sipora Utara memiliki sejumlah pulau yang berlokasi di perairan utara Desa Tuapejat. Oleh sebab itu, Desa Tuapejat menjadi desa dengan garis pantai terpanjang di Kecamatan Sipora Utara. Secara administrasi, batas-batas Kota salatiga diantaranya:

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Sipora Utara

Sebelah Utara	❖ berbatasan dengan Selat Bunga Laut yakni selat yang memisahkan antara Pulau Sipora dan Pulau Siberut
Sebelah Timur	❖ berbatasan dengan Selat Mentawai (selat antara Pulau Sumatera dengan Kepulauan Mentawai)
Sebelah Selatan	❖ berbatasan dengan Kecamatan Sipora Selatan
Sebelah Barat	❖ berbatasan dengan Samudera Hindia



Wilayah Administratif

Wilayah Administratif Kecamatan Sipora Utara terdiri dari 6 wilayah desa dan
29 wilayah dusun. Desa Betumonga terdiri dari 7 dusun, Desa Goisooinan terdiri dari 4 dusun, Desa Tuapejat terdiri dari 9 dusun, Desa Bukit Pamewa, Desa Sipora Jaya, dan Desa Sido Makmur masing-masing terdiri 3 dusun. Gambaran wilayah kecamatan, daftar dusun selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.2
Daftar Desa dan Dusun di Wilayah Kecamatan Sipora Utara

Desa *Village*	Daftar Dusun *List of Dusun*	
(1)	(2)	
Betumonga	1. Sipaarau	5. Mabukkou
	2. Sibujai	6. Majawak
	3. Maria	7. Mabolak
	4. Taraet Borsa	
Goisoolnan	1. Goisoolnan	3. Pogari
	2. Kaliou	4. Adduru
Bukit Pamewa	1. Bukit Subur	3. Pamewa Indah
	2. Subur Makmur	
Sipora Jaya	1. Tunas Baru	3. Karang Anyar
	2. Karya Bakti	
Sido Makmur	1. Sinabak	3. Makoddiai
	2. Boleleu	
Tuapejat	1. Tuapejat	6. Pukarayat
	2. Camp	7. Karoniet
	3. Kampung	8. Turonia
	4. Jati	9. Mepadegat
	5. Berkat	

Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Sipora Utara pada tahun 2023 adalah sebanyak 13.405 jiwa yang terdiri dari 6.868 laki-laki dan 6.537 perempuan. Di antara keenam desa di Kecamatan Sipora Utara, Desa Tuapejat merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi yakni sebesar 6.404 jiwa atau 47,77% dari total penduduk Kecamatan Sipora Utara.

Kepadatan Pendudukan

Kepadatan penduduk di Kecamatan Sipora Utara adalah sebesar 49,21 jiwa/ km². Jika dirinci menurut desa, kepadatan penduduk tertinggi tercatat pada Desa Sipora Jaya sebesar 478,13 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah tercatat pada Desa Betumonga sebesar 12,11 jiwa/km².

Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin di Kecamatan Sipora Utara terhitung sebesar 1,05. Ini berarti terdapat 105 orang penduduk laki-laki untuk setiap 100 orang penduduk perempuan di Kecamatan Sipora Utara pada tahun 2023. Angka rasio jenis kelamin di tiap desa berkisar 0,99 sampai 1,11.

Berdasarkan kelompok umur interval 5 tahunan. Kelompok umur paling banyak di Kecamatan Sipora Utara adalah kelompok umur 10–14 tahun dengan jumlah sebesar 1.412 jiwa. Sedangkan kelompok umur paling sedikit adalah kelompok umur 75 tahun ke atas dengan jumlah sebesar 109 jiwa. Berikut Tabel Jumlah Populasi di setiap desa :

Tabel 2.1
Populasi Desa di Wilayah Kecamatan Sipora Utara Berdasarkan Jenis kelamin

Desa *Village*	Penduduk/*Population*		
	Laki-Laki/*Male*	Perempuan/*Femal e*	Jumlah/*Tot al*
(1)	(2)	(3)	(4)
Betumonga	694	645	1.339
Goisooinan	644	582	1.226
Bukit Pamewa	423	427	850
Sipora Jaya	1.342	1.259	2.601
Sido Makmur	509	476	985
Tuapejat	3.256	3.148	6.404
Sipora Utara	6.868	6.537	13.405

Pendidikan

Pelaksanaan pendidikan formal di Kecamatan Sipora Utara telah didukung dengan ketersediaan sarana pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas. Pada tahun ajaran 2023/2024, jumlah sekolah di Kecamatan Sipora Utara tercatat sebanyak 11 Taman Kanak-Kanak (TK), 8 Raudatul Athfal (RA), 15 Sekolah Dasar (SD), 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 Madrasah Tsanawiyah, 2 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1 Madrasah Aliyah (MA).

Kesehatan

Pada tahun 2024, di Kecamatan Sipora Utara memiliki rumah sakit, poliklinik, puskesmas rawat inap, dan apotek. Kecamatan Sipora Utara memiliki tenaga kesehatan yang terdiri dari 16 dokter, 2 dokter gigi, 57 perawat, 41 bidan, 4 tenaga kefarmasian, 7 tenaga kesehatan masyarakat, 1 tenaga kesehatan lingkungan, 4 ahli gizi, dan 8 ahli teknologi laboratorium.

Banyaknya balita yang menderita kekurangan gizi di Kecamatan Sipora Utara tahun 2024 sebesar 132 balita. Sedangkan, jenis penyakit terbanyak yang diderita penduduk Kecamatan Sipora Utara adalah TB Paru sebanyak 420 kasus penyakit.

Perumahan dan Lingkungan

Hingga akhir tahun 2024, tercatat 5 desa yang menggunakan listrik pemerintah sebagai sumber penerangan jalan utama. Sedangkan, 1 desa lainnya adalah non listrik.

Agama dan Sosial Lainnya

Jumlah tempat peribadatan di Kecamatan Sipora Utara terdiri dari 16 masjid, 9 mushola, 33 gereja Protestan, dan 3 gereja Katholik.

Tanaman Pangan

Bahan pangan utama masyarakat Kecamatan Sipora Utara bersumber dari sagu, padi, keladi, dan pisang. Produksi padi di Kecamatan Sipora Utara pada tahun 2023 sebesar 375,40 ton dengan luas panen sebesar 121 hektar. Sedangkan, produksi palawija sebesar 11,20 ton dengan luas panen sebesar 5 hektar.

Hortikultura

Produksi tanaman sayuran semusim terbesar pada tahun 2023 adalah cabai keriting sebesar 118 kuintal. Sipora Utara memiliki tanaman buah- buahan semusim, yakni terung, dengan produksi sebesar 49 kuintal dan luas panen 3 hektar.

Pisang merupakan tanaman buah unggulan di Kecamatan Sipora Utara pada tahun 2023. Kapasitas produksi pisang di Kecamatan Sipora Utara pada tahun 2023 tercatat sebesar 1.058 ton.

Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan di Sipora Utara pada tahun 2023 adalah kelapa sebesar 1.024,00 ton dengan luas panen sebesar 854 hektar.

Perikanan

Produksi perikanan terbesar terbanyak di Kecamatan Sipora Utara pada tahun 2023 adalah perikanan tangkap sebesar 1.790 ton. Sedangkan, produksi perikanan budidaya sebesar 45,67 ton.

Kehutanan

Pada tahun 2023, terdapat produksi kayu bulat di Kecamatan Sipora Utara sebesar 21.146,63 m^3 dan kayu gergaji sebesar 1.504,64 m^3.

Pariwisata

Di Kecamatan Sipora Utara, terdapat 16 hotel dan 17 penginapan.

Transportasi

Jenis prasarana transportasi antardesa di Kecamatan Sipora Utara terbanyak adalah darat. Seluruh desa memiliki angkutan umum tanpa trayek, kecuali Desa Betumonga yang belum memiliki layanan angkutan umum. Jenis permukaan jalan darat terluas adalah aspal/beton dan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun kecuali saat kondisi tertentu.

Komunikasi

Kecamatan Sipora Utara memiliki kantor pos/pos pembantu/rumah pos, pos keliling yang terletak di Desa Bukit Pamewa dan Tuapejat, serta perusahaan/agen jasa ekspedisi swasta yang terletak di Desa Sido Makmur dan Tuapejat.

Pada tahun 2023, Kecamatan Sipora Utara memiliki 4 menara telepon seluler. Seluruh desa menggunakan jenis sinyal internet 4G/LTE, kecuali Desa Betumonga yang tidak memiliki sinyal.

Perbankan

Kecamatan Sipora Utara memilki 3 Bank Umum Pemerintahan dan 1 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Desa Tuapejat.

Koperasi

Kecamatan Sipora Utara memiliki 4 Koperasi Unit Desa

(KUD), 1 Koperasi Simpan Pinjam (Kospin), dan 17 koperasi lainnya.

Perdagangan

Pada tahun 2023, Kecamatan Sipora Utara memiliki 212 kelompok pertokoan, 1 pasar dengan bangunan permanen, 4 mini market/swalayan/ supermarket, dan 7 restoran/rumah makan. Selain itu, Kecamatan Sipora Utara memiliki industri mikro kecil, 27 berasal dari kayu dan 62 berasal dari kain/tenun.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Sipora Utara, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diurusan kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Program Kecamatan Sipora Utara disusun sesuai kertas kerja Renstra OPD, meliputi:

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari

Setiap program memiliki indikator kinerja, target tahunan 2025–2029, dan pendanaan indikatif sesuai RPJMD.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Sipora Utara

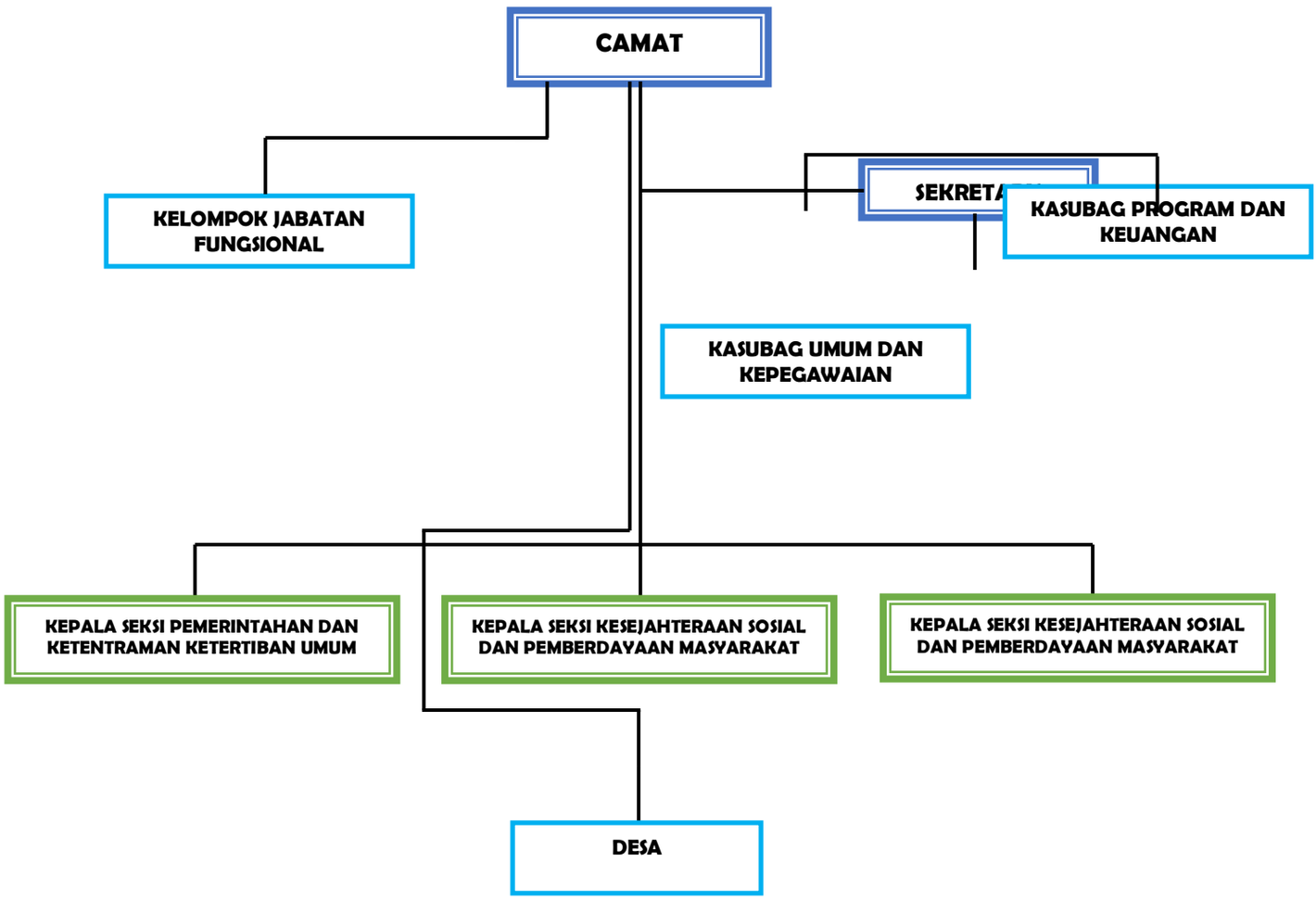
Kecamatan Sipora Utara adalah Kecamatan yang terbentuk berdasarkan peraturan Bupati Kepulauan mentawai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Sipora Utara. Kecamatan Sipora Utara, merupakan salah satu Kecamatan Sipora Utara di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kecamatan Sipora Utara. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kecamatan Sipora Utara akan Peraturan Bupati Kabupaten Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sipora Utara yang terdiri dari:

a. Camat;
b. Sekretaris, membawahkan:
    1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentrman dan Ketertiban Umum
d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kecamatan Sipora Utara adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3
Bagan Organisasi Kecamatan Sipora Utara



1. CAMAT

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, Pelayanan Masyarakat, pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan sebagai pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

1. Rincian Tugas:
   a. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
   b. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   c. Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum;
   d. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
   e. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
   h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kapubaten yang tidak di laksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
   i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan; dan
   j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
2. Untuk melaksanakan tugas, Camat menyelenggarakan fungsi:
   a) penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pembangunan di wilayah Kecamatan;
   b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pembangunan di wilayah Kecamatan;
   c) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, ekonomi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
   d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Selain tugas tersebut, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah yang meliputi aspek:

1. Perijinan;
2. Rekomendasi
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan
6. Fasilitas;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang di limpah

2. Sekretariat Kecamatan

A. Sekretaris Camat

Sekretaris mempunyai tugas mempunyai tugas dalam merencanakan operasional, mengelo1a, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

1. Uraian Tugas:
   a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
   b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan program dan Sub Bagian Keuangan;
   c. Mengoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya;
   d. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
   e. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, kehumasan, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan di lingkungan kecamatan;
   f. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan asset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   g. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa, dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap seksi.
   h. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Kecamatan;
   i. menganalisa kebutuhan pegawai pada Kecamatan;
   j. membagi jumlah seluruh pelaksana Kecamatan untuk ditempatkan pada setiap seksi sesuai kebutuhan dan keahlian;
   k. menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
   l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancer sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
   n. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
   o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
   a) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
   b) Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
   c) Pembinaan dan pemberiandukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, penanganan aduan,arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
   d) pengoordinasian, pembinaan dan penataanorganisasi dan tata laksana dilingkungan Kecamatan;
   e) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang undangan dilingkungan Kecamatan;
   f) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
   g) penyelenggaraan pengelolaan barang milik aerah di lingkungan Kecamatan;
   h) pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
   i) pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
   j) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
   k) koordinasi dengan organisasi Kecamatan Sipora Utara dan/atau instansivertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   l) koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasaranadan fasilitas pelayanan umum;
   m) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   n) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Program dan Keuangan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

1) SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretarls.

Uraian Tugas:

   a) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Lingkup Kecamatan;
   b) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup Kecamatan;
   c) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat lingkup Kecamatan;
   d) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup Kecamatan;

e) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan Organisasi dan tata laksana lingkup Kecamatan;
f) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Kecamatan; dan
g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

2) SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Uraian Tugas:

a) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup Kecamatan;
b) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Kecamatan;
c) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan lingkup Kecamatan;
e) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik Daerah lingkup Kecamatan; dan
f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Uraian Tugas:

a) Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
b) Melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
c) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
e) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Kecamatan Sipora Utara dalam tingkat kecamatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
f) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang pemerintahan

ketentraman dan ketertiban umum;

g) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum.

C. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Uraian Tugas :

a) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial di Kecamatan;
b) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dibidang kesejahteraan social dan pemberdayaan masyarakat;
c) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Kecamatan Sipora Utara di tingkat Kecamatan di bidang kesejahteraan social dan pemberdayaan masyarakat;
d) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang kesejahteraan social dan pemberdayaan masyarakat;
e) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Organisasi Kecamatan Sipora Utara yang ada di Kecamatan di bidang kesejahteraan social dan pemberdayaan masyarakat;
f) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang kesejahteraan social dan pemberdayaan masyarakat; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

D. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Uraian Tugas:

a) Melaksanakan penyiapan Bahan koordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan di Kecamatan;
b) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan;
c) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Kecamatan Sipora Utara di tingkat Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang ekonomi dan pembangunan;
e) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Organisasi Kecamatan Sipora Utara yang ada di Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan;

Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sipora Utara

1. Komposisi Pegawai

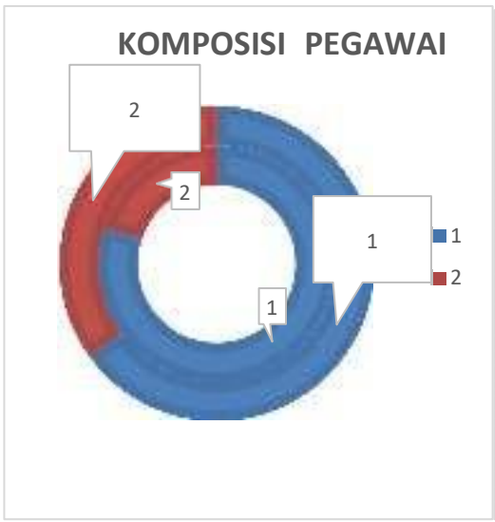
Berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, sekitar 43% dari jumlah pegawai merupakan PNS, 14% dari jumlah pegawai PPPK dan 43% merupakan honorer. Berdasarkan jenis kelamin jumlah pegawai PNS laki-laki sekitar 80% dari jumlah pegawai PNS dan presentase pegawai PNS perempuan sekitar 20% dari jumlah pegawai PNS. Presentasi pegawai honorer laki-laki sekitar 65% dari jumlah pegawai honorer keseluruhan, dan presentase honorer perempuan sekitar 35% dari jumlah pegawai honorer perempuan.(Tabel 2.2 dan Gambar 2.4, 2.5).

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai di Kecamatan Sipora Utara

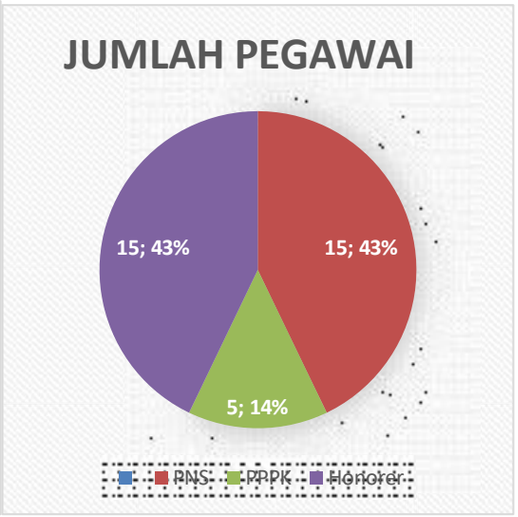
No	Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PNS	12	3	15
2	PPPK	2	3	5
2	Honorer	11	4	15
Jumlah		25	10	35

Sumber: Bagian Umum Kepegawaian Kecamatan Sipora Utara, kondisi Oktober 2025

Gambar 2.4 Komposisi Pegawai



Gambar 2.5 Jumlah Pegawai



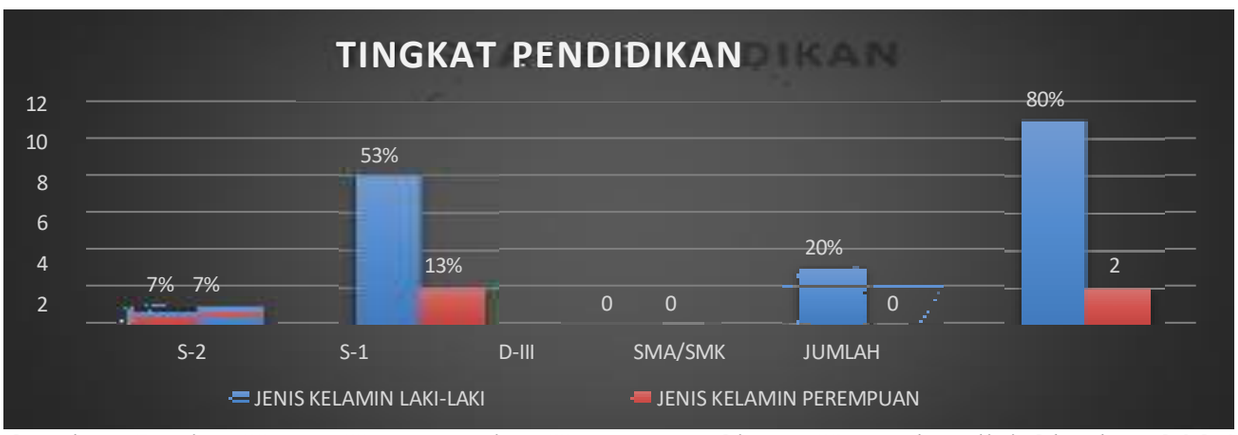
Sumber daya manusia (pegawai) di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai kondisi oktober 2025 ada sebanyak 15 (lima belas) orang . Presentase pegawai PNS dengan strata pendidikan S-2 sekitar 14%, S-1 sekitar 66%, D- III sekitar 0%, dan SMA/SMK sekitar 20%. Presentase pegawai PNS laki-laki dan Perempuan dari keseluruhan jumlah pegawai PNS Kecamtan Sipora Utara dengan strata pendidikan S-2 laki-laki 7%, S-2 perempuan 7%, S-1 laki-laki 53%, S-1 perempuan 13%, D-III laki-laki 0%, D-III perempuan 0%, SMA/SMK laki-laki 20%, dan SMA/SMK perempuan 0% (Tabel 2.3 dan Gambar 2.6).

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai PNS menurut Pendidikan di Kecamatan Sipora Utara

NO.	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	S-2	1	1	2
2	S-1	8	2	10
3	D-III	0	0	0
4	SMA/SMK	3	0	3
	JUMLAH	11	2	15

Sumber: Bagian Umum Kepegawaian Kecamatan Sipora Utara, kondisi Oktober 2025

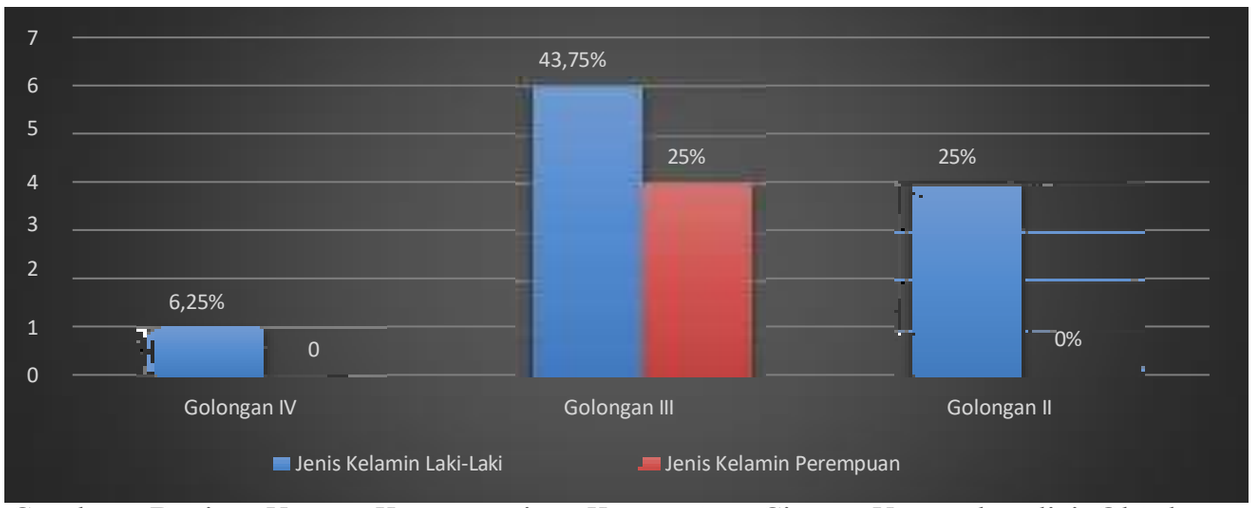
Gambar 2.6
Jumlah PNS menurut Pendidikan di Kecamatan Sipora Utara



Sumber: Bagian Umum Kepegawaian Kecamatan Sipora Utara, kondisi Oktober 2025

Presentase pegawai PNS golongan IV sekitar 6.25%, golongan III sekitar 68,75%, dan golongan II sekitar 25% dari jumlah pegawai PNS di Kecamatan Sipora Utara. Presentase pegawai PNS golongan IV laki-laki sekitar 6,25%, golongan IV perempuan sekitar 0,00%, golongan III laki- laki sekitar 43,75%, golongan III perempuan sekitar 25%, golongan II laki- laki sekitar 25%, dan golongan II perempuan sekitar 0% (tabel 2.4 dan gambar 2.7)

Gambar 2.7
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Sipora Utara



Sumber: Bagian Umum Kepegawaian Kecamatan Sipora Utara, kondisi Oktober 2025

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
di Kecamatan Sipora Utara

No	Pangkat	Gol. Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1 orang
2	Penata Tk.I	III/d	2 orang
3	Penata	III/c	1 orang
4	Penata Muda Tk.I	III/b	3 orang
5	Penata Muda	III/a	4 orang
5	Pengatur Tk.I	II/d	3 orang
6	Pengatur	II/c	1 orang
7	Pengatur Muda Tk. I	II/b	- orang
	Total		15 orang

Sumber: Bagian Umum Kepegawaian Kecamatan Sipora Utara, kondisi Okotober 2025

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon di Kecamatan Sipora Utara

No	Tingkat Eselon	Jumlah
1	Eselon III/a	1 orang
2	Eselon III/b	1 orang
2	Eselon IV/a	3 orang
3	Eselon IV/b	2 orang
	Total	7 orang

Sumber: Bagian Umum Kepegawaian Kecamatan Sipora Utara, kondisi Okotober 2025

1. Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program yang dibutuhkan sarana dan prasarana (aset) Kecamatan Sipora Utara per Oktober 2025 dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6
Data Asset Kecamatan Sipora Utara

NO	JENIS ASET	SALDO (Rp)
1	Tanah	1.148.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	883.431.900
3	Gedung dan Bangunan	1.649.529.465,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	425.686.200,00
5	Aset Tetap Lainnya	13.260.370,00
6	Nilai Aset	4.112.726.435,00
7	Perubahan status dari baik ke rusak berat	864.378.000,00
8	Akumulasi Penyusutan	(1.461.051.588.00)
9	Koreksi Akumulasi Penyusutan	
	Nilai Buku	2.658.856.347,00

Sumber: CaLK Kecamatan Sipora Utara Tahun , kondisi Oktober 2025

Disamping itu, untuk kelancaran tugas dan fungsi kantor Kecamatan didukung dengan sarana dan prasarana berupa barang inventaris/asset Kecamatan yang ada. Adapun daftar asset/aktiva tetap dimaksud pada kantor Camat Sipora Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Daftar Asset di Kecamatan Sipora Utara

No	Uraian	Jumlah Barang	Kondisi
1.	Tanah Bangunan Kantor pemerintah	3 lokasi	Dalam proses penerbitan sertifikat
2.	Kantor Kecamatan Sipora Utara	1 unit	Baik
3.	Aula Kantor	1 unit	Baik
4.	Rumah Dinas Camat	1 unit	Baik
5.	Rumah Dinas pegawai	5 pintu	Baik
6.	Mushola	1 unit	Baik
7.	Kenderaan Roda Empat	2 unit	Baik
8.	Kenderaan Roda tiga	1 unit	Baik
9.	Kenderaan Roda dua	8 unit	3 Baik.5 Rusak
10.	Komputer PC	6 unit	Baik
11.	Laptop	8 unit	5 Baik,3 Rusak
12.	Printer	10 unit	Baik
13.	Motor Boat	1 unit	Rusak
14.	Perahu Penyebarangan	1 unit	Rusak
15.	Lemari Kayu	1 unit	Baik
16.	Lemari Kaca	4 unit	Baik
17.	Brankas	1 unit	Baik
18.	Papan Visual	5 unit	Rusak
19.	Meja kursi Eselon	12 buah	5 Baik, 7 Rusak
20.	Meja Kerja Pegawai	25 buah	18 Baik, 7 Rusak
21.	Kursi Kerja Pejabat Eselon	10 buah	Baik
22.	Kursi Kerja Pegawai Non Eselon	20 buah	Baik
23.	Alat Penghancur Kertas	1 unit	Rusak
24.	Tempat Tidur Besi	20 unit	Baik
25.	Meja Podium	1 buah	Baik
26.	Kursi rapat	130 buah	Baik
27.	Kursi tunggu	2 buah	Baik

No	Uraian	Jumlah Barang	Kondisi
28.	Sofa	2 buah	Baik
29.	AC	6 unit	Baik
30.	Mesin Pemotong Rumput	4 buah	1 Baik 3 Rusak
31.	Tabung Gas 12 Kg	1 buah	Baik
32.	Telavisi	3 unit	1 Baik 2 Rusak
33.	Sound System	1 unit	Baik
34.	Camera	4 buah	2 Baik 2 Rusak
35.	Mesin Jahit	10 unit	5 Baik 5 Rusak
36.	Handy Cam	1 buah	rusak
37.	Dispenser	4 buah	Rusak

Sumber: Bagian Umum Kepegawaian Kecamatan Sipora Utara ,kondisi Oktober 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sipora Utara

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sipora Utara. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sipora Utara dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Sipora Utara dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran

i. Penyediaan Jasa Komunikasi.
   a. Sumberdaya air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik di Kecamatan Sipora Utara selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan Kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.

ii. Penyediaan Alat Tulis Kantor
   a. Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Sipora Utara setiap Tahun dalam menunjang Pelayanan ke Masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah, sehingga Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap Tahun tidak terpenuhi.

iii. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   a. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Sipora Utara setiap Tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya pergeseran anggaran dan perubahan anggaran sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang Cetakan dan penggandaan tersebut terbatas.

iv. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Sipora Utara setiap Tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

v. Penyediaan Makanan dan Minuman
   a. Penyediaan makanan dan minuman di Kantor

Kecamatan Sipora Utara setiap tahunnya mengalami kenaikan, sedangkan anggaran mengalami penurunan. Padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

vi. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah

a. Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus berkurang, baik untuk sewa alat apung maupun SPPD sehingga adanya keterbatasan untuk melaksanakan program di Kecamatan Sipora Utara. Dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

II. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Sipora Utara dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

III. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ketertiban Umum

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Sipora Utara di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan, Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari- hari.
b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, dan desa;
d. Meningkatnya pembinaan secara rutin kedesa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa;
f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

IV. Kinerja Pelayanan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan

a. Monitoring pelaksanaan Musrembang Desa, melaksanakan Musrembang Kecamatan;
b. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan kepada masyarakat.
c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
d. Mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan.
e. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan, seperti promosi pembangunan dan potensi desa, serta koordinasi kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).

V. Kinerja Pelayanan di Bidang Kessos dan Pemdes

a. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan, seperti kegiatan PKK Kecamatan;
b. Mengkoordinasikan masalah kependudukan, kesejahteraan sosial masyarakat

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Sipora Utara berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2025-2029 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya dapat dilihat pada tabel 2.8 dibawah ini:

Tabel 2.8
Matriks Hasil Evaluasi Renstra 5 Tahun Terakhir 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OP	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-		85%	86%	87%	87%	88%	84%	85%	86%	86%	88%	99%	99%	99%	99%	100%
2	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	-	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentasi Kegiatan Evaluasi Desa	-	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Kegiatan Koordinasi Forum Pimpinan Wilayah Kecamatan	-	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat Kecamatan Sipora Utara

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Tugas pokok Kecamatan Sipora Utara Kecamatan yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Sipora Utara, maka yang yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

a. Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) Pelaporan data dan kondisi kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan wilayah Kecamatan.
b. Forkopimca (Camat, Koramil, Kapolsek)
c. Internal Kecamatan yang terdiri dari seluruh PNS dan Tenaga Honorer;
d. Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam hal pelaporan dan pemberian informasi kepada instansi/unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Instansi lintas sector yang terdiri dari Koordinator Pendidikan, Puskesmas, UPT BP Pertanian, KUA, Perhutani, Polhut, dan
e. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.
f. Desa se-Kecamatan Sipora Utara yaitu Desa Tuapejat, Desa Goisooinan, Desa Sidomakmur, Desa Sipora Jaya, Desa Betumonga, Desa Bukit Pamewa;
g. Elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan MUSRENBANG Desa dan Kecamatan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sipora Utara

Permasalahan utama yang diidentifikasi melalui kertas kerja meliputi keterbatasan sarpras pelayanan, rendahnya indeks kepuasan masyarakat, masih tingginya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat, serta keterbatasan koordinasi lintas sektor. Isu strategis mencakup penguatan tata kelola, digitalisasi layanan, pemberdayaan tokoh adat/agama, serta mitigasi risiko bencana pesisir.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sipora Utara

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai

dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi. Isu- isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan ekternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Kecamatan Sipora Utara dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Kecamatan Sipora Utara dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sipora Utara Kecamatan Sipora Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kantor Camat Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

A. Tantangan
   1) Kemajuan globalisasi seperti saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat;
   2) Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah;
   3) Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi- fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat;
   4) Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada;
   5) Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat;
   6) Wilayah Kecamatan Sipora Utara merupakan daerah kepulauan yang berpotensi terjadi gempa dan tsunami pada saat terjadinya Gempa Megathrust;
   7) Sumber Daya Aparatur yang ada di kantor Camat untuk lebih di tingkatkan dalam hal pengetahuan dalam tugas dan teknologi.

B. Peluang
   1) Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus

dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik.

2) Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.
3) Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan;
4) Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat;
5) Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan pengunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat;
6) Wilayah Kecamatan Sipora Utara berada di sepanjang [inggir pantai pulau sipora utara dan berada di ibukota Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga banyak tempat wisata, dan pemandangan yang bagus untuk pengembangan kuliner dan usaha penginapan/homestay/resort berlatar belakang pemandangan alam dan memungkinkan untuk menjalin kerjasama dengan sektor perdagangan dan jasa dalam kegiatan pembangunan di masyarakat;
7) Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi/kelembagaan di wilayah;
8) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup baik;

2. Kekuatan dan Kelemahan
   A. Kekuatan
      1) Mempunyai SOTK yang sudah jelas;
      2) Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi;
      3) Koordinasi, komunikasi, sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan desa.
      4) Adanya data yang dapat digunakan untuk pengembangan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
   B. Kelemahan
      1) Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
      2) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

3) Kurangnya fasilitas kinerja yang tersedia di Kecamatan sehingga pemanfaatan sistem informasi yang ada dan pelayanan publik yang diselenggarakan Kecamatan belum optimal;
4) Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap kepala seksi dan Sub Bagian sebagai pelaksana teknis tugas camat, disebabkan kurangnya prioritas dari pemerintah untuk program yang diusulkan kecamatan;
5) Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di Kecamatan, dan Desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
6) Kemajuan teknologi terutama informasi pada saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat;

Dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa, Kecamatan Sipora Utara menghadapi beberapa permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan, baik faktor penghambat maupun faktor pendorong dapat meningkatkan kinerja pelayanan di Kecamatan Sipora Utara. Permasalahan pelayanan Kecamatan Sipora Utara didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sipora Utara dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sipora Utara

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Penyelenggaraan pelayanan pubik di Kecamatan Sipora Utara perlu dioptimalkan	Pemberian layanan pubik kepada masyarakat belum optimal	Penyelenggaraan kegiatan layanan publik kurang terkoordinasikan
			Urusan pemerintahan kepada camat perlu dioptimalkan
			Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang
2.	Peningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan kecamatan perlu dioptimalkan	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan pembinaan kecamatan
		Penyusunan administrasi pemerintahan desa tidak tepat waktu	Kurangnya fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa
3.	Kurangnya Kemampuan Aparatur Kecamatan dan Desa	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku	Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Desa dalam menjalankan administrasi pemerintahannya
			Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa
			Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa
4.	Penumbuhan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang
			Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidentil saja
			Minimnya koordinasi dengan Linmas antar desa di wilayah kecamatan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5.	Masih rendahnya angka tertib administrasi desa Kecamatan	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organnisasi masyarakat dengan kecamatan
			Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan mandiri
6.	Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan Informasi dan Teknologi	Belum optimalnya jaring pengaman sosial dan pemanfaatan IT	Kurang kuatnya filter data yang masuk
			Masih terdapat sistem nepotisme di level pemerintah Desa
			Kurangnya controlling terhadap PKH, TKSK maupun aparatur desa yang menanggani data
			Keterbatasan sarana dan prasarana di Kecamatan dan Pemerintahan Desa

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan keterampilan terhadap penguasaan tehnologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
2. Peningkatan sarana pelayanan khususnya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan.
3. Peningkatan kualitas jaringan internet di Keamatan Sipora Utara.
4. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat.
5. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
6. Pengembangan dalam meningkatkan pengetahuan dari aparatur yang ada di Kecamatan Sipora Utara guna dapat menyikapi perkembangan dunia saat ini dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

a) Adanya peningkatan kapasitas instansi
b) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat
c) Adanya kepercayaan kepada Birokrat
d) Adanya dukungan sarana dan prasarana
e) Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan
f) Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas
g) Optimalisasi fasilitasi Peran partisipasi Mayarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
h) Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antara pemerintah, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan dunia usaha.

Dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan. Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sipora Utara Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Kecamatan Sipora Utara yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Keprofesionalan;
f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu; dan
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan PATEN namun masih mengalami beberapa perubahan terkait kebijakan yang di terpakan dalam pelaksanaan hingga sekarang. Itulah perwujudan tekait Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar

Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunanannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan pembangunan serta seksi ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 yaitu persyaratan subtantif, administrative dan teknis. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai Kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka Kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh Kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung- gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat.

3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Kecamatan Sipora Utara Kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu

sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan Kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga Kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Sipora Utara Kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat Kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan Kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Kesejahteraan Sossial, Seksi Pemerintahan dan Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta para Kades di wilayah Kecamatan Sipora Utara yang terdiri dari 12 (dua belas) desa. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan desa antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi,

peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

4. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perbup pelimpahan kewenangan serta aspirasi dari masyarakat yang akan tertuang dalam musrembang desa yang di sampaikan kepada kecamatan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Kecamatan Sipora Utara. Output dari program yang dilakukan oleh Kecamatan Sipora Utara Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi

menghalangi bagi kelompok rentan, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Sipora Utara. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sipora Utara (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Kepulauan Mentawai kepada Camat.

6. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

7. Penumbuhan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan

Partisipasi adalah sebuah hubungan timbal balik yang diberikan oleh pemberi pelayanan dan penerima pelayanan, sehingga terjalin komunikasi yang efektif. Penumbuhan partisipasi dibangun dengan berbagai lini antara lain dengan terjalinnya komunikasi yang efektif, tersedianya media informasi yang memadai, adanya kegiatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh kecamatan kepada masyarakatnya. Dengan adanya pelimpahan kewenangan adalah sebuah media yang efektif guna membangun infrastruktur atau jaringan komuikasi kepada masyarakat.

8. Peningkatan Kemampuan Aparatur

Kemampuan aparatur adalah salah satu faktor yang cukup penting guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dengan melihatkomposisi dan regulasi perlu kiranya membuat sebuah terobosan. Terobosan itu adalah adanya peningkatan kemampuan aparatur yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan.Sebuah instansi berkewajiban untuk selalu mengadakan pembenahan diri khususnya yang berhubungan dengan kemampuan aparatnya.

Peningkatan kemampuan dilakukan secara non formal dan aplikatif, sehingga kemampuan akan tumbuh sendiri sesuai dengan kapasitas pribadi. Kegiatan yang aplikatif tersebut antara lain; kemampuan penguasaan tehnologi, kemampuan melayani pelanggan, kemampuan dalam memecahkan masalah, kemampuan berkoordinasi.

2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Sipora Utara

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sipora Utara, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis pada Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.10
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADIKAN KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGI PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pelayanan administrasi kependudukan dan pemerintahan	Penyelenggaraan pelayanan pubik di Kecamatan Sipora Utara perlu dioptimalkan	*Risiko tinggi bencana alam (gempa, tsunami), alih fungsi lahan, kerentanan perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan belum optimal*	Perubahan iklim global, krisis pangan, dan ketimpangan digital	Transformasi digital, peningkatan kualitas SDM, ketahanan bencana	Pembangunan berbasis potensi daerah, mitigasi bencana pesisir	Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat
Koordinasi pembangunan infrastruktur dasar antar desa	Peningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Risiko tinggi bencana alam (gempa, tsunami), alih fungsi lahan, kerentanan perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan belum optimal	Perubahan iklim global, krisis pangan, dan ketimpangan digital	Transformasi digital, peningkatan kualitas SDM, ketahanan bencana	Pembangunan berbasis potensi daerah, mitigasi bencana pesisir	Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan Pembangunan Kewilayahan
Koordinasi pembangunan infrastruktur dasar antar desa	Kurangnya Kemampuan Aparatur Kecamatan dan Desa	Risiko tinggi bencana alam (gempa, tsunami), alih fungsi lahan, kerentanan perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan belum	Perubahan iklim global, krisis pangan, dan ketimpangan digital	Transformasi digital, peningkatan kualitas SDM, ketahanan bencana	Pembangunan berbasis potensi daerah, mitigasi bencana pesisir	Peningkatan Kemampuan Aparatur

POTENSI DAERAH YANG MENJADIKAN KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGI PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		optimal				
Koordinasi pembangunan infrastruktur dasar antar desa	Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan	Risiko tinggi bencana alam (gempa, tsunami), alih fungsi lahan, kerentanan perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan belum optimal	Perubahan iklim global, krisis pangan, dan ketimpangan digital	Transformasi digital, peningkatan kualitas SDM, ketahanan bencana	Pembangunan berbasis potensi daerah, mitigasi bencana pesisir	Penumbuhan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan
Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rendahnya angka tertib administrasi desa Kecamatan	Risiko tinggi bencana alam (gempa, tsunami), alih fungsi lahan, kerentanan perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan belum optimal	Perubahan iklim global, krisis pangan, dan ketimpangan digital	Transformasi digital, peningkatan kualitas SDM, ketahanan bencana	Pembangunan berbasis potensi daerah, mitigasi bencana pesisir	Masih rendahnya angka tertib administrasi desa Kecamatan
Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya jaring pengaman sosial,	Risiko tinggi bencana alam (gempa, tsunami), alih fungsi lahan, kerentanan perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan belum optimal	Perubahan iklim global, krisis pangan, dan ketimpangan digital	Transformasi digital, peningkatan kualitas SDM, ketahanan bencana	Pembangunan berbasis potensi daerah, mitigasi bencana pesisir	Keterbukaan Informasi Publik

POTENSI DAERAH YANG MENJADIKAN KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGI PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pemberdayaan masyarakat desa di 6 desa	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Risiko tinggi bencana alam (gempa, tsunami), alih fungsi lahan, kerentanan perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan belum optimal	Perubahan iklim global, krisis pangan, dan ketimpangan digital	Transformasi digital, peningkatan kualitas SDM, ketahanan bencana	Pembangunan berbasis potensi daerah, mitigasi bencana pesisir	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029

Tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan yang ingin capai Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani"

3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Kecamatan Sipora Utara diperlukan sejumlah sasaran yang meggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

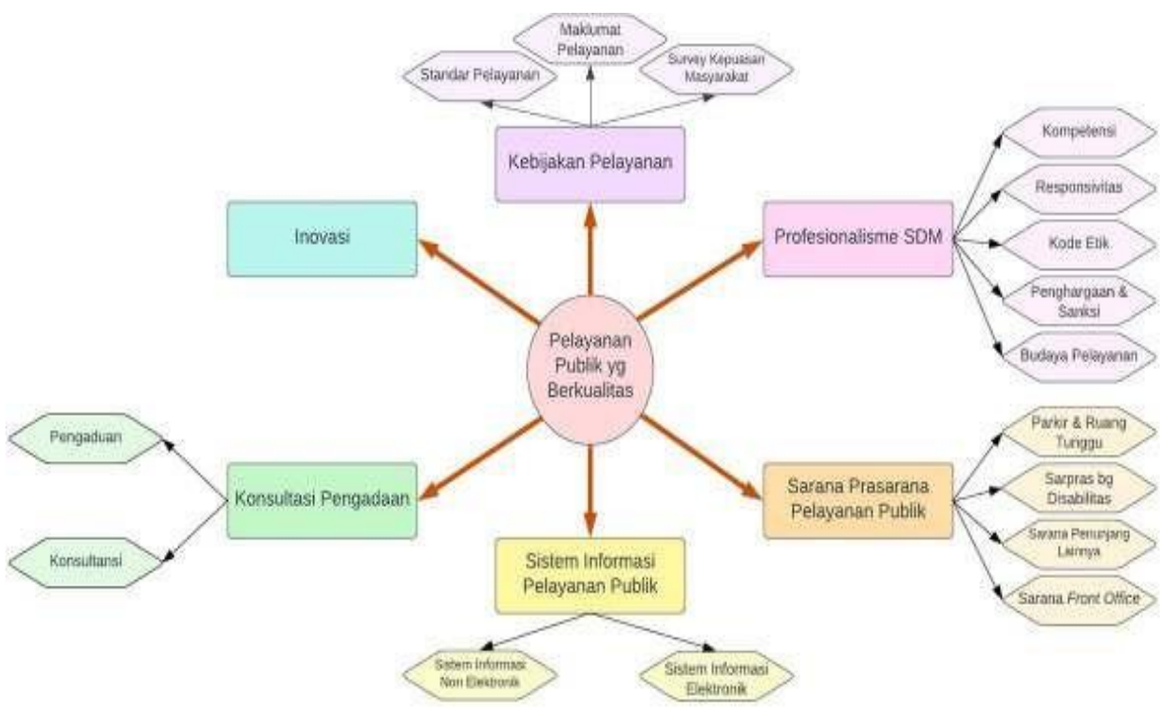
a. Meningkatkan kualitas layanan pemerintahan umum kecamatan,
b. Fasilitasi pelaksanaan APBDesa,
c. Forum Koordinasi Desa,
d. Fasiltasi Forum Pimpinan Kecamatan
e. Meningkatkan Tramtibnas Kecamatan,
f. Meningkatkan Pengendalian Masyarakat,
g. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kecamatan Sipora Utara

Pernyataan tujuan dan sasaran Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2030 berserta indikator disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

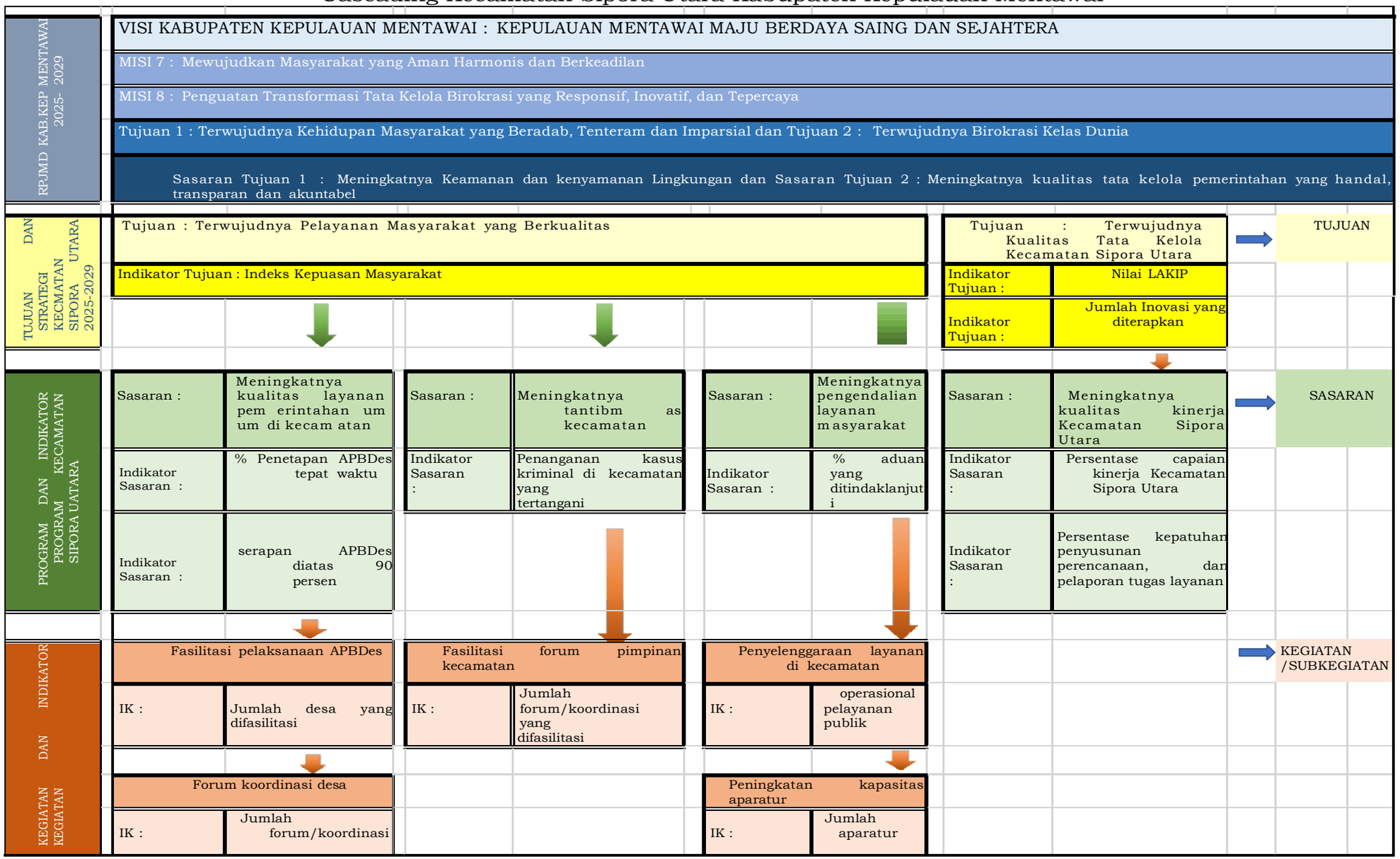
-Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Kecamatan Sipora Utara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Mewujudkan Masyarakat Aman, Harmonis, dan Berekeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial	Meningkatnya indeks kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	82	84	86	88	90	92	
		Menurunnya tingkat kriminalitas	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	82	84	86	88	90	92	
		Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	84	86	88	90	92	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	82	84	86	88	90	92	

Gambar 3.1
Logical Framework Kecamatan Sipora Utara
Kabupaten Kepulauan Mentawai



Gambar 3.2
Cascading Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai



		yang dilakukan				yang dilatih					

3.3. Strategi Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 2 Tahun 2025, strategi Renstra PD (Rencana Strategis Kecamatan Sipora Utara) mencakup berbagai aspek perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang diselaraskan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Strategi ini meliputi analisis kondisi daerah, permasalahan strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan prioritas untuk mencapai tujuan RPJMD.

Strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Kecamatan Sipora Utara dijelaskan pada tabel 3.4 Tujuan, Sasaran dan Strategi Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-202 sebagai berikut: Tambahan Revisi: Tujuan Renstra selaras dengan Misi 7 RPJMD, yaitu Mewujudkan Masyarakat Aman, Harmonis, dan Berkeadilan. Sasarannya mencakup: (1) meningkatnya indeks kerukunan umat beragama, (2) menurunnya tingkat kriminalitas, (3) meningkatnya kepuasan masyarakat, dan (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Strategi yang digunakan mencakup penguatan forum kerukunan umat beragama, pemberdayaan linmas, serta optimalisasi koordinasi Forkopimcam.

Tabel 3.2
Perumusan Tujuan Sasaran dan Strategi Renstra
Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029

VISI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI : KEPULAUAN MENTAWAI MAJU BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA				
MISI 7 : Mewujudkan Masyarakat yang Aman Harmonis dan Berkeadilan				
MISI 8 : Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Tepercaya				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Lokasi
Mewujudkan Masyarakat Aman, Harmonis, Dan Berkeadilan.	Meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama	Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama	Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama	Kecamatan Sipora Utara
	Menurunnya Tingkat Kriminalitas	Penguatan Sistem Keamanan Dan Ketertiban	Penguatan Lembaga Keamanan Desa Dan Kecamatan (Linmas, Satlinmas)	Kecamatan Sipora Utara
		Sinergi Forkopimcam Dan Tokoh Masyarakat	Program Edukasi Dan Sosialisasi Kesadaran Hukum Dan Budaya Damai Berbasis Kearifan Lokal	Kecamatan Sipora Utara
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Survei Kepuasan Masyarakat Secara Berkala	Kecamatan Sipora Utara
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Pelibatan Masyarakat Dalam Pembangunan	Peningkatan Kapasitas Kecamatan Dalam Pengawasan Di Desa	Kecamatan Sipora Utara

3.4. Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan Kecamatan Sipora Utara adalah : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Pentahapan arah kebijakan dilaksanakan agar menjadi fokus pembangunan mengarah pada prioritas pembangunan setiap tahunnya. Prioritas Pembangunan merupakan tema atau agenda pembangunan kecamatan tahunan yang menjadi benang merah capaian antara menuju tujuan dan sasaran 5 (lima) tahunan dalam Renstra Kecamatan melalui arah kebijakan. Adapun arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025- 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2029)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Konsolidasi Dasar dan Penataan Awal Pelayanan Publik	Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi	Implementasi dan Evaluasi	Optimalisasi dan Inovasi	Integrasi dan Reformasi Birokrasi

Kecamatan Sipora Utara memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sipora Utara

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Transformasi layanan publik berbasis digital	Tahap I (2026): Penguatan Infrastruktur Daerah untuk Peningkatan Produktivitas	Transformasi layanan publik melalui digitalisasi	Fokus pada efisiensi dan kemudahan layanan
2	Peningkatan kapasitas aparatur	Tahap II (2027): Penguatan Sumber Daya Ekonomi untuk Peningkatan Produktivitas	Peningkatan kapasitas aparatur dan manajemen	Pengembangan SDM aparatur
3	Penguatan sistem keamanan dan ketertiban	Tahap III (2028): Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pembangunan	Penguatan sistem keamanan dan sinergi antar lembaga	Melibatkan Forkopimcam dan tokoh masyarakat
4	Sinergi Forkopimcam dan tokoh masyarakat	Tahap IV (2029): Penguatan fondasi pembangunan berkelanjutan dan transformasi ekonomi daerah	Penguatan sinergi Forkopimcam dan masyarakat	Membangun keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan
5	Optimalisasi pengawasan layanan dan pelibatan masyarakat	Tahap V (2030): Transformasi pembangunan untuk pembangunan inklusif dan berdaya saing	Peningkatan pengawasan dan pelibatan masyarakat	Mendukung transparansi dan akuntabilitas
6	Reformasi birokrasi dan manajemen kinerja	Tahap V (2030): Transformasi pembangunan untuk pembangunan inklusif dan berdaya saing	Reformasi birokrasi dan manajemen kinerja	Peningkatan kinerja Kecamatan Sipora Utara

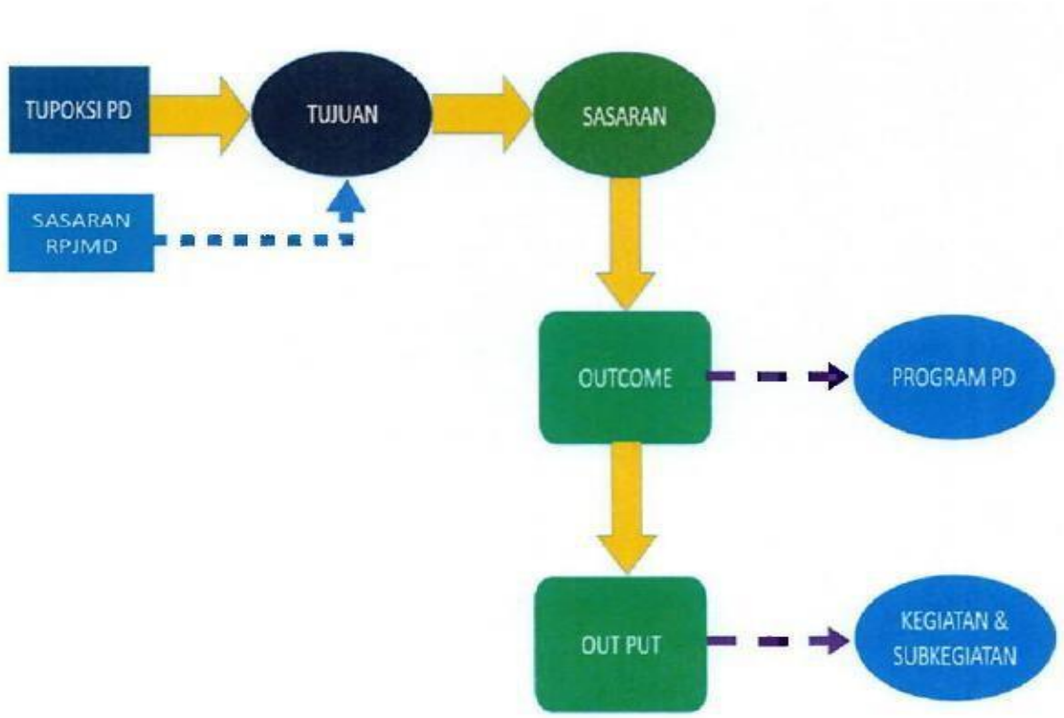
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sipora Utara, salah satu bagian kunci Adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata. Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sipora Utara merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sipora Utara yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan Sipora Utara. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Sipora Utara juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sipora Utara serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sipora Utara dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra



Program dan Kegiatan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai selama tahun 2025-2029 antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak ditangani secara spesifik oleh lembaga lain, namun penting untuk menjaga stabilitas, persatuan, ketertiban umum, dan kesatuan bangsa, seperti koordinasi antar instansi, pembinaan wawasan kebangsaan, dan penanganan konflik sosial. Program ini bertujuan untuk mengisi kekosongan pemerintahan, memastikan tidak ada urusan yang terabaikan, dan menjaga kelangsungan fungsi negara pada tingkat yang lebih luas.

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sipora Utara serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya. Program ini mencakup pengembangan ekonomi melalui UMKM, penguatan kelembagaan desa seperti BUMDes, peningkatan infrastruktur, dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memilih dan mengontrol lingkungannya demi kemajuan desa dan kelurahan.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan baik.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029 harus mampu menghasilkan output dan *outcome* yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Sipora Utara.

Sub Kegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang lebih besar, yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran yang telah ditetapkan dalam Kegiatan terkait untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sipora Utara yang yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis Kecamatan Sipora Utara yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Sipora Utara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mewujudkan Masyarakat Aman, Harmonis, dan Berkeadilan.	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Beradab, Tenteram dan Imparsial	Meningkatnya indeks kerukunan umat beragama			Indeks Kerukunan Umat Beragama	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		Menurunnya tingkat kriminalitas	Kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
		Meningkatnya kepuasan masyarakat	Kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ SubKegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sipora Utara	98,62 %	100,00 %	2.248.738.858	100,00 %	2.473.612.744	100,00 %	2.720.974.019	100,00 %	2.993.071.420	100,00 %	3.292.378.562	KSU
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Sipora Utara	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Sipora Utara	100,00%	100,00 %	55.000.000	100,00%	60.500.000	100,00 %	66.550.000	100,00 %	73.205.000	100,00 %	80.525.500	KSU
Evaluasi Kinerja Kecamatan Sipora Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan Sipora Utara	100,00%	100,00 %	55.000.000	100,00%	60.500.000	100,00 %	66.550.000	100,00 %	73.205.000	100,00 %	80.525.500	KSU
Administrasi Keuangan Kecamatan Sipora Utara	Terlaksananya Administrasi Keuangan	95,88%	100,00 %	1.689.357.959	100,00%	1.858.293.755	100,00 %	2.044.123.131	100,00 %	2.248.535.444	100,00 %	2.473.388.988	KSU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Kantor Camat Sipora Utara	91,76%	100,00 %	1.667.577.959	100,00%	1.834.335.755	100,00 %	2.017.769.331	100,00 %	2.219.546.264	100,00 %	2.441.500.890	KSU
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00%	100,00 %	21.780.000	100,00%	23.958.000	100,00 %	26.353.800	100,00 %	28.989.180	100,00 %	31.888.098	KSU
Administrasi	Terlaksananya											235.244.136	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Umum Kecamatan Sipora Utara	layanan administrasi umum	99,54%	100,00 %	160.674.910	100,00%	176.742.401	100,00 %	194.416.641	100,00 %	213.858.305	100,00 %		KSU
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang tersedia	100,00%	100,00 %	5.599.000	100,00%	6.158.900	100,00 %	6.774.790	100,00 %	7.452.269	100,00 %	8.197.496	KSU
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	100,00 %	100,00 %	5.555.000	100,00%	6.110.500	100,00 %	6.721.550	100,00 %	7.393.705	100,00 %	8.133.076	KSU
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00 %	100,00 %	71.383.510	100,00%	78.521.861	100,00 %	86.374.047	100,00 %	95.011.452	100,00 %	104.512.597	KSU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	98,96%	100,00 %	16.658.400	100,00%	18.324.240	100,00 %	20.156.664	100,00 %	22.172.330	100,00 %	24.389.563	KSU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Terlaksana	98,74%	100,00 %	61.479.000	100,00%	67.626.900	100,00 %	74.389.590	100,00 %	81.828.549	100,00 %	90.011.404	KSU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Kecamatan Sipora Utara	99,98%	100,00 %	45.793.000	100,00%	50.372.300	100,00 %	55.409.530	100,00 %	60.950.483	100,00 %	67.045.531	KSU
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	99,96%	100,00 %	45.793.000	100,00%	50.372.300	100,00 %	55.409.530	100,00 %	60.950.483	100,00 %	67.045.531	KSU

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengadaan Mebel	Tersedianya Meeja Kursi Kerja	100,00 %	100,00 %	36.584.900	100,00%	40.243.390	100,00 %	44.267.729	100,00 %	48.694.502	100,00 %	53.563.952	KSU
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Terlaksananya Administrasi Umum	99,95%	100,00 %	0,00%	100,00%	0,00%	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	KSU
Belanja Modal Bangunan Parkir	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lahan Parkir	99,95%	100,00 %	0	100,00%	0	100,00 %	0	100,00 %	0	100,00 %	0	KSU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersediannya jasa penunjang urusan penunjang pemerintahan daerah	95,43%	100,00 %	237.600.000	100,00%	261.360.000	100,00 %	287.496.000	100,00 %	316.245.600	100,00 %	347.870.160	KSU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,91%	100,00 %	28.600.000	100,00%	31.460.000	100,00 %	34.606.000	100,00 %	38.066.600	100,00 %	41.873.260	KSU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Honororium yang Tersedia	99,96%	100,00 %	209.000.000	100,00%	229.900.000	100,00 %	252.890.000	100,00 %	278.179.000	100,00 %	305.996.900	KSU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	99,53%	100,00 %	60.312.989	100,00%	66.344.288	100,00 %	72.978.717	100,00 %	80.276.588	100,00 %	88.304.247	KSU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	99,87%	100,00 %	5.687.000	100,00%	6.255.700	100,00 %	6.881.270	100,00 %	7.569.397	100,00 %	8.326.337	KSU

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00 %	100,00 %	44.000.000	100,00%	48.400.000	100,00 %	53.240.000	100,00 %	58.564.000	100,00 %	64.420.400	KSU
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	99,86%	100,00 %	3.751.000	100,00%	4.126.100	100,00 %	4.538.710	100,00 %	4.992.581	100,00 %	5.491.839	KSU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	98,39%	100,00 %	6.874.989	100,00%	7.562.488	100,00 %	8.318.737	100,00 %	9.150.610	100,00 %	10.065.671	KSU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat	100,00 %	100,00 %	22.202.400	100,00 %	24.422.640	100,00 %	26.864.904	100,00 %	29.551.394	100,00 %	32.506.534	KSU
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan	100,00 %	100,00 %	22.202.400	100,00 %	24.422.640	100,00 %	26.864.904	100,00 %	29.551.394	100,00 %	32.506.534	KSU
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Nonperizinan yang diurus	100,00 %	100,00 %	10.939.500	100,00%	12.033.450	100,00 %	13.236.795	100,00 %	14.560.475	100,00 %	16.016.522	KSU
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Perekaman e-KTP	100,00 %	100,00 %	11.262.900	100,00%	12.389.190	100,00 %	13.628.109	100,00 %	14.990.920	100,00 %	16.490.012	KSU
PROGRAM	Indeks Kepuasan												

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Masyarakat dan Pelayanan Masyarakat	100,00 %	100,00 %	34.213.080	100,00 %	37.634.388	100,00 %	41.397.827	100,00 %	45.537.609	100,00 %	50.091.370	KSU
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	100,00 %	100,00 %	34.213.080	100,00%	37.634.388	100,00 %	41.397.827	100,00 %	45.537.609	100,00 %	50.091.370	KSU
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan	100,00 %	100,00 %	16.517.600	100,00%	18.169.360	100,00 %	19.986.296	100,00 %	21.984.926	100,00 %	24.183.418	KSU
Peningkatan Epektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi PKK Yang dilaksanakan	100,00 %	100,00 %	17.695.480	100,00%	19.465.028	100,00 %	21.411.531	100,00 %	23.552.684	100,00 %	25.907.952	KSU
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,00 %	100,00 %	65.653.500	100,00 %	72.218.850	100,00 %	79.440.735	100,00 %	87.384.809	100,00 %	96.123.289	KSU
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan	100,00 %	100,00 %	65.653.500	100,00%	72.218.850	100,00 %	79.440.735	100,00 %	87.384.809	100,00 %	96.123.289	KSU
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	Terlaksanany a HUT-RI	100,00 %	100,00 %	48.719.000	100,00%	53.590.900	100,00 %	58.949.990	100,00 %	64.844.989	100,00 %	71.329.488	KSU

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100,00 %	100,00 %	16.934.500	100,00%	18.627.950	100,00 %	20.490.745	100,00 %	22.539.820	100,00 %	24.793.801	KSU
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,92 %	100,00 %	66.000.000	100,00 %	72.600.000	100,00 %	79.860.000	100,00 %	87.846.000	100,00 %	96.630.600	KSU
Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	99,92%	100,00 %	66.000.000	100,00%	72.600.000	100,00 %	79.860.000	100,00 %	87.846.000	100,00 %	96.630.600	KSU
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemberdayaan Aset Desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	99,92%	100,00 %	66.000.000	100,00%	72.600.000	100,00 %	79.860.000	100,00 %	87.846.000	100,00 %	96.630.600	KSU
JUMLAH		99,71%	100,00 %	2.436.807.838	100,00%	2.680.488.622	100,00 %	2.948.537.484	100,00 %	3.243.391.233	100,00 %	3.567.730.356	

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Priotitas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sipora Utara	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Sipora Utara	
		Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Sipora Utara	Administrasi Keuangan Kecamatan Sipora Utara	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan	Administrasi Umum Kecamatan Sipora Utara	
		Terlaksananya layanan administrasi umum	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	
		Terlaksananya Administrasi Umum Kecamatan Sipora Utara	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Terlaksananya Administrasi Umum	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Jiwa Kebangsaan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	Pasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasn Pemerintahan Desa	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Sipora Utara. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan digunakan dalam menyusun laporan pertangungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Sesuai dengan komponen Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan kepada Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Nilai SAKIP Kecamatan Sipora Utara
3. Inovasi Daerah Yang diterapkan

Secara rinci Indikator kinerja Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana terlihat pada penjabaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pejabaran

Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tabel di bawah ini dan tabel yang ada dilampiran.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sipora Utara

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen. Tahun	82	84	86	88	90	92
2	Nilai LAKIP	Skor (C–A)	BB	BB	BB	BB	A	A
3	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Inovasi (unit)	1	1	1	1	1	1

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai ukuran capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan karena menjadi indikator keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah, yang digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan rencana di masa depan. Penilaian tersebut sebagai akuntabilitas kinerja dan informasi tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Sipora Utara

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	80	82	84	86	89	
2	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	82	84	86	89	
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu	Persentase	90%	92%	95%	97%	99%	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Sipora Utara ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, serta instrumen evaluasi kinerja melalui SAKIP. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan pelayanan publik semakin responsif, masyarakat lebih harmonis, dan pembangunan kecamatan mendukung visi Kepulauan Mentawai Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2030, RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015 – 2035 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029 dan RPJMN Tahun 2025 – 2029. Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat ditentukan oleh peran dan sinergi dari pemangku-pemangku kepentingan baik eksekutif, legislatif, dunia usaha/swasta, masyarakat, LSM, maupun media.

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam konteks organisasi pemerintah, risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko tersebut meliputi, antara lain: korupsi, penurunan penerimaan daerah, kegagalan dalam pelaksanaan program prioritas, hingga penurunan kualitas pelayanan publik. Keberadaan risiko ini tidak hanya mengancam efektivitas organisasi, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi hal yang terutama dan penting dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang yang mungkin timbul selama proses pembangunan. Dalam melakukan manajemen risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setelah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi impact atau probability atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi.

Manajemen risiko dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 ini dilakukan hingga pada level sasaran kerja yang lebih detail menjelaskan target operasional kerja, tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah tersebut antara lain identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Melalui mitigasi risiko yang tepat dan terukur akan mampu mengendalikan dan mengelola risiko laten yang berpotensi ada mengagalkan tujuan dari perencanaan pembangunan. Mitigasi tersebut telah dimulai sejak pada proses perencanaan, sehingga perlu dipantau terus pada tahapan pelaksanaan,

pengendalian, dan dilakukan monitoring/evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Penyelenggaraan satu data Indonesia di Kecamatan Sipora Utara menjadi bagian penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Ketersediaan data sektoral daerah sangat membantu dalam merumuskan analisis dan kebijakan pembangunan berbasis bukti dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan indikator kinerja pembangunan dan merumuskan target pembangunan menjadi bagian penting dalam perencanaan agar tetap memenuhi prinsip- prinsip satu data. Dengan data yang akurat dan handal maka akan didapatkan keputusan yang tepat sasaran, alokasi sumber daya yang efisien, serta mengurangi dan menghindari potensi kegagalan. Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan satu data Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai berkomitmen dalam penerapan prinsip satu data dan langkah-langkah pelaksanaan satu data Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Ini juga harus diinternalisasi di setiap Kecamatan Sipora Utara agar memahami dan memiliki kepedulian terhadap penyediaan data yang akurat dan berkualitas. Kolaborasi lintas sektor menjadi elemen krusial dalam pengelolaan data di Indonesia. Satu Data Indonesia bertujuan untuk menciptakan tata kelola data yang lebih baik, efektif, dan terintegrasi di seluruh sektor pemerintahan, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Melalui Satu Data Indonesia, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola data guna memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kami berharap Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Sipora Utara khususnya dan Kabupaten Kepulauan Mentawai umumnya di masa yang akan datang.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



PINTO WARDANA

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SIPORA SELATAN
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SIPORA SELATAN

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sipora Selatan..... 6

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Sipora Selatan.... 6

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sipora Selatan..... 6

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sipora Selatan..... 10

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sipora Selatan.... 12

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sipora Selatan..... 15

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Strategis Kecamatan Sipora Selatan..... 16

2.2.2 Isu Strategis..... 16

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sipora Selatan Tahun 2025-2029 ... 23

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Sipora Selatan Tahun 2025-2029 . 24

3.3 Strategi Renstra Kecamatan Sipora Selatan Tahun 2025-2029 .. 28

3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sipora Selatan Tahun 2025-2029 29

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 30

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 30

BAB V PENUTUP 44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai OPD Kecamatan Sipora Selatan.....	11
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana Kecamatan Sipora Selatan	12
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2024	12
Tabel 2.4	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	16
Tabel 2.5	Isu Strategis Kecamatan Sipora Selatan	22
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	26
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Kecamatan Sipora Selatan Tahun 2025-2029.	28
Tabel 3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sipora Selatan	28
Tabel 4.1	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	30
Tabel 4.2	Program Kegiatan, Sub Kegiatan Pendanaan	33
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama.....	41
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Sipora Selatan 2

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kecamatan..... 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Sipora Selatan secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan sumber daya manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Renja Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

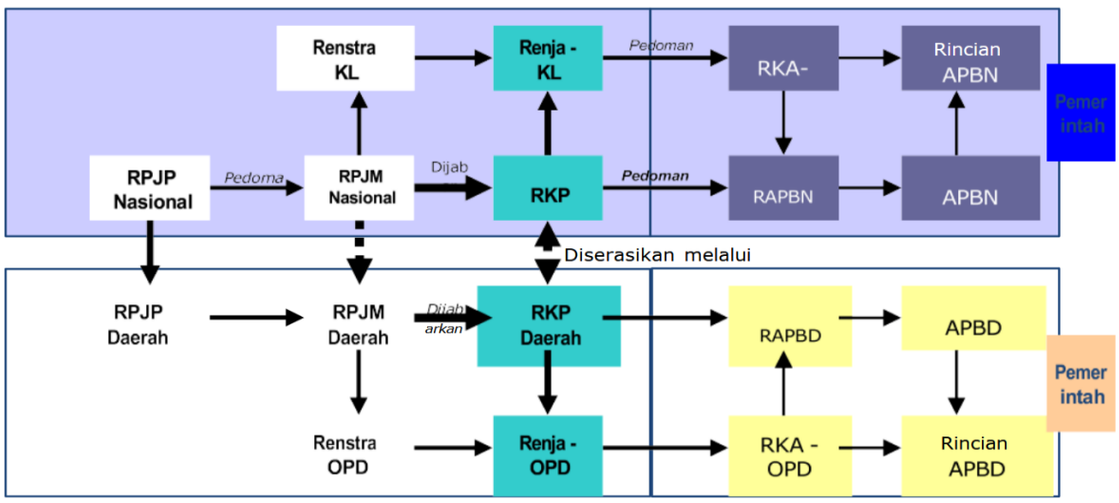
Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sipora Selatan yang disusun berfungsi sebagai acuan untuk mencapai tujuan Kecamatan Sipora Selatan yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Kepulauan Mentawai. Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan Gambar 1.1. Dimana Bagan di bawah menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Sipora Selatan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Renja Kecamatan Sipora Selatan. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sipora Selatan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan

merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Sipora Selatan



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sipora Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 225);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4);

25. Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sipora Selatan 2025-2029 adalah Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah :

a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Kecamatan Sipora Selatan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

b. Sebagai pedoman dilingkungan Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sipora Selatan yang memuat program dan kegiatan selama 5 (lima) Tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Sipora Selatan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar Belakang menyebutkan defenisi dan nilai strategis Renstra Kecamatan Sipora Selatan Tahun 2025-2029, menyebutkan beberapa regulasi penyusunan dan pendukung penyusunan Renstra Kecamatan Sipora Selatan, menyebutkan peran Kecamatan Sipora Selatan dalam RPJMD, menjelaskan Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sipora Selatan, dan menampilkan hubungan dokumen Renstra dengan RPJMD, RKPD dan Renja Kecamatan Sipora Selatan

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan menyebutkan beberapa regulasi yang menjadi Dasar Penyusunan Renstra Kecamatan Sipora Selatan Tahun 2025-2029

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Sipora Selatan Tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan menjelaskan sistematika penulisan, berisikan uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Kecamatan Sipora Selatan Tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SIPORA SELATAN

Berisi uraian tentang tugas,fungsi dan struktur Kecamatan Sipora Selatan,Kinerja Pelayanan Kecamatan Sipora Selatan,tentang dan Peluang Pengembangan Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sipora Selatan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sipora Selatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini diuraikan tujuan,sasaran strategis dan arah Kebijakan,penyelenggaraan bidang urusan yang akan dicapai Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam (5) lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sipora Selatan Tahun 2025-2029

Menjelaskan rumusan tujuan yang di dasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perangkat Daerah yang telah di tetapkan serta rumusan narasi yang menunjukkan tugas dan fungsi perangkat Daerah yang memenuhi Prinsip SMART-C (*specific, measurabble, attainable, realistic, time-bounded, dan continously-improved).*

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Sipora Selatan Tahun 2025-2029

Menjelaskan narasi sasaran yang dapat di rumuskan dari tujuan Renstra OPD yang ingin di capai dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

3.3 Strategi Kecamatan Sipora Selatan Tahun 2025-2029

Menjelaskan langkah-langkah yang komprehensif melalui optimalisasi sumber daya, fokus lokasi, pentahapan dan program prioritas yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Menjelaskan arah kebijakan sebagai rangkaian kerja prioritas yang dilakukan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Sipora Selatan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi yang di susun untuk pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sipora Selatan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini diuraikan Program Kegiatan Sub.Kegiatan dan kegiatan penyelenggaraanbidang urusan yang ada di Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Menjelaskan program kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil *cascading* dari tujuan sasaran *outcome* dan *output* Kecamatan Sipora Selatan.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjelaskan target kinerja pencapaian tujuan sasaran Renstra OPD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB V PENUTUP

Menguraikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD, Manajemen Risiko strategis Kecamatan Sipora Selatan dan Tata kelola satu data Indonesia di tingkat Kecamatan Sipora Selatan.

5.1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah menjelaskan urusan tahapan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Renstra OPD

5.2 Menejemen Risiko Strategis Perangkat Daerah menjelaskan Uraian Pengendalian Risiko Prioritas atau Tujuan dan sasaran Strategis OPD yang tertian dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD)

5,3 Tata Kelola Satu data Indonesia (SDI) di Tingkat Kecamatan Sipora Selatan bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat ,Mutakhir terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SIPORA SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Sipora Selatan

2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Sipora Selatan

Kecamatan dalam Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu Satuan Unit Kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Dalam Peraturan tersebut ditegaskan Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di sebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Sipora Selatan terdiri dari :

1. Kecamatan
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci tugas dan fungsi Kecamatan Sipora Selatan sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

A. Kecamatan

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

9. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pembangunan di wilayah Kecamatan;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pembangunan di wilayah Kecamatan;
3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinyan kepala OPD Kecamatan Sipora Selatan dibantu oleh Sekcam, Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Ekonomi dan Pembangunan, Kassubag Umum dan Kepegawaian, Kassubag Program dan Keuangan.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas dalam merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Kecamatan;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Kecamatan;
3. Penataan organisasi dan tata laksana lingkup Kecamatan;
4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Kecamatan;
5. Pengelolaan barang milik Daerah lingkup Kecamatan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup Kecamatan;
3. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup Kecamatan;
4. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup Kecamatan;
5. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penata organisasi dan tata laksana lingkup Kecamatan;
6. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Kecamatan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Kecamatan;
3. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
4. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan lingkup Kecamatan;
5. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik Daerah lingkup Kecamatan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
2. Melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
4. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
5. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam tingkat Kecamatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
6. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
7. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
8. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja OPD yang ada di Kecamatan dalam bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
9. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

F. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial di Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
4. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
5. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
6. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang

kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

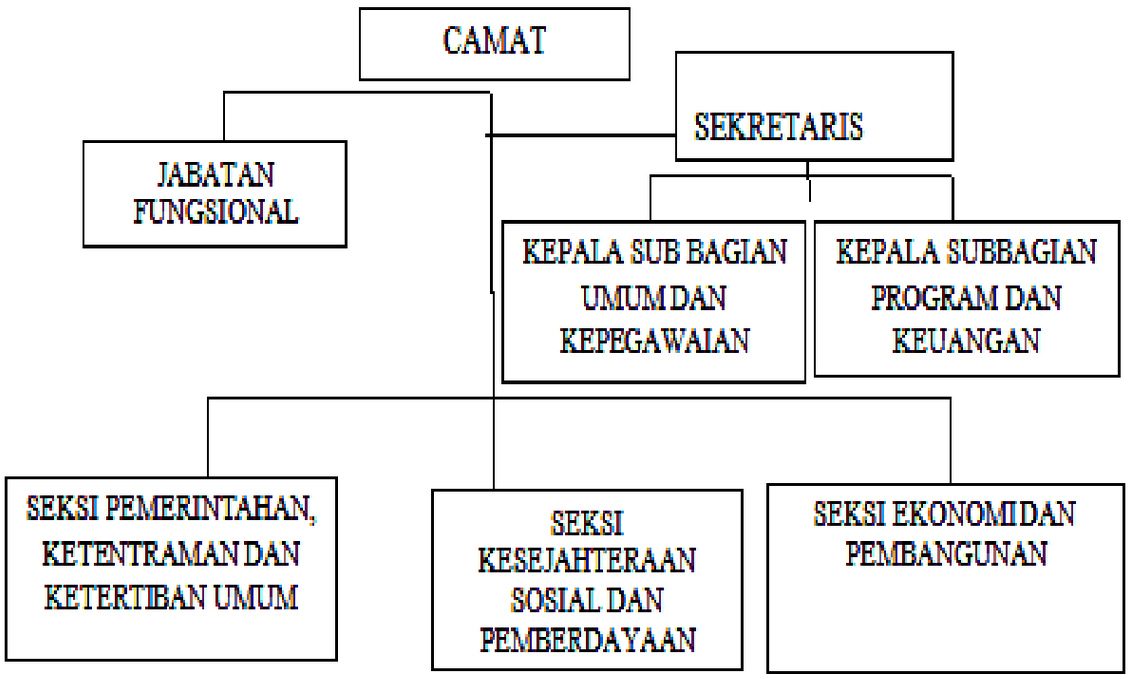
G. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan di Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan;
3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan;
4. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa di bidang ekonomi dan pembangunan;
5. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan;
6. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sedang rincian tugas Kecamatan didasarkan pada Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Sipora Selatan dibawah ini ;

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Kepegawaian

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level Kecamatan maupun Desa, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Sipora Selatan yang mempunyai 7 (tujuh) Desa, didukung oleh sebanyak 41 (empat satu) orang pegawai yang mana terdiri dari 26 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 15 orang pegawai tidak tetap (tenaga kontrak). Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai OPD Kecamatan Sipora Selatan

No	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat/Gol/Ruang	Pendidikan Formal	Ket
1	Camat	1	Penata Tk I, (III/d)	S.1	
2	Plt. Sekretaris Camat	1	Penata Tk I, (III/d)	S.2	
3	Kasi Pemerintahan, Ketentraman & Ketertiban Umum	1	Penata Tk I, (III/d)	S.1	
4	Kasi Kesejahteraan Sosial & Pemberdayaan Masyarakat	1	Penata Tk I, (III/d)	S.2	
5	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	1	Pembina (IV/a)	S.1	
6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	Penata Muda Tk.I (III/b)	S.1	
7	Kasubag Program dan Keuangan	1	Penata Tk I, (III/d)	S.I	
8	Staf	4	Penata (III/c)	SMA	
9	Staf	3	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA	
10	Staf	3	Penata Muda (III/a)	SMA	
11	Staf	2	Pengatur Tk.I (II/d)	SMA	
12	Staf	2	Pengatur (II/c)	SMA	
13	Staf	1	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	SMA	
14	Staf	5	V, IX	SMA, S1	
25	Staf	6	Tenaga Kontrak	S.1	
26	Staf	9	Tenaga Kontrak	SMA	
	Jumlah	41			

(Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sipora Selatan Januari 2026)

B. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan desa telah dilengkapi dengan gedung- gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun masih dirasakan kurang memadai yaitu Kondisi Kantor Kecamatan yang sudah lama sehingga kurang representative. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor Kecamatan dan perangkat komputer.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Sipora Selatan.

Tabel 2.2.
Sarana dan Prasarana Kecamatan Sipora Selatan

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor Kecamatan	1 buah	Kurang Baik
2.	Gedung Serbaguna	1 buah	Kurang Baik
3.	Rumah Dinas Camat	1 buah	Kurang Baik
4.	Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit	Baik
5.	Kendaraan Dinas Roda 2	3 unit	Baik
6.	Sound System	1 unit	Kurang Baik
7.	Laptop Kecamatan	5 unit	Kurang Baik
8	Komputer Kecamatan	2 unit	Baik
9.	AC	6 unit	4 Baik, 2 rusak
10.	Kipas Angin	4 unit	Kurang Baik
11.	Almari Besi	1 buah	Kurang Baik
12.	Almari Kayu	15 buah	Kurang Baik
13.	Meja kerja	25 buah	Kurang Baik
14.	Meja Pelayanan	1 buah	Rusak
15.	Kursi Tunggu Pelayanan	3 buah	Kurang Baik
16.	Mesin Pemotong Rumput	1 unit	Rusak
17.	Printer	4 unit	2 Baik, 2 Rusak
18.	Infocus	2 buah	Baik
19.	Layar Film/Projektor	2 buah	Rusak
20.	Meja Rapat	8 buah	Kurang Baik
21.	Kursu Rapat	99 buah	Baik
22.	Mesin Tempel	2 unit	Rusak
23.	Kursi Putar	8 unit	Kurang Baik
24.	Microphone	1 set	Baik
25.	Sofa	2 set	Kurang Baik
26.	Rumah Dinas Kecamatan	10 buah	Kurang Baik

(Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sipora Selatan Oktober 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2025-2029 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Sipora Selatan Kab. Kepulauan Mentawai	Target Renstra Kecamatan Sipora Selatan Tahun 2025-2029					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	85	88	85	90	85	80	85	85	85	90	94	97	80	94	85
2	Persentase tingkat Realisasi, Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %

3	Rasio pemenuhan Standar sarana kerja, dan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	92	95	98	85	82	95	95	98	90	85	96	95	90	90	95
4	Persentase Penyelesaian Masalah / Keluhan Masyarakat				100%	100%				100%	100%				100%	100%

Dengan adanya instruksi kerja yang terstandarisasi, maka semua kegiatan layanan akan dapat dilakukan secara konsisten oleh siapapun yang sedang bertugas melakukan layanan. yang berbelit dan tidak jelas prosedur operasinya akan semakin terminimalisir. Disamping konsistensi layanan hal lain yang akan dihasilkan adalah efisiensi dan efektifitas kerja. Dengan prosedur yang terstandar setiap orang baik pengguna layanan maupun staf yang memberi layanan akan dapat memanfaatkan ataupun melakukan layanan yang semakin hari semakin baik dan semakin cepat karena terjadinya proses pembelajaran yang secara terus menerus terjadi selama proses layanan.

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Sipora Selatan, maka yang yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

a. Unsur Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) Pelaporan data dan kondisi kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan wilayah Kecamatan.
b. Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam hal pelaporan dan pemberian informasi kepada instansi/unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
c. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.
d. Seluruh Masyarakat Kecamatan Sipora Selatan dalam hal pelayanan, perizinan dan non perizinan.
e. Aparat Desa dilingkungan Kecamatan Sipora Selatan.
f. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
g. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.
h. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi yang efektif.
i. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayanan publik, diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
j. Sumber Daya Aparatur yang ada di kantor Camat untuk lebih ditingkatkan dalam hal pengetahuan dalam tugas dan teknologi.

Sinergisitas antara visi, misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025 - 2029 dan Kecamatan Sipora Selatan akan mengakibatkan tercapainya tujuan, baik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun Perangkat Daerah Kecamatan Sipora Selatan. Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Sipora Selatan ke depan merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan keterampilan terhadap penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
b. Peningkatan sarana pelayanan khusunya tempat sehingga menjadi representatif dan sesuai standar pelayanan.
c. Penyusunan standar prosedur operasional dan standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat.
d. Pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
e. Pengembangan dalam meningkatkan pengetahuan dari aparatur yang ada di kantor Camat Sipora Selatan guna dapat menyikapi perkembangan dunia saat ini dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Analisia Internal dan Eksternal dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Sipora Selatan terdapat 3 (tiga) Faktor yaitu :

a. Faktor Internal

   Kekuatan:

   1. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai.
   2. Adanya SOP sesuai ketugasan.
   3. Adanya semangat kerja/etos kerja yang memadai.
   4. Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas.
   5. Lingkungan kerja yang kondusif.
   6. Adanya aset tanah dan gedung/kantor yang cukup representatif.
   7. Koordinasi, komunikasi, sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan desa.
   8. Adanya data yang dapat digunakan untuk pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

   Kelemahan:

   1. Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat Kecamatan dan Desa.
   2. Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana.
   3. Sarana dan prasarana instansi perlu ditambah, guna

pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

4. Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif.
5. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.

b. Faktor Ekternal

Peluang:

1. Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha.
2. Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi/kelembagaan di wilayah.
3. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan kecamatan/wilayah berkait dengan adanya pelimpahan sebagaian kewenangan daerah kepada camat.
4. Adanya pusat perdagangan skala primer, jasa, Pasar Ikan.
5. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan.
6. Adanya fasilitas wisata yaitu mangrove, dan pulau –pulau eksotis.
7. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup baik.

Ancaman:

1. Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi.
2. Budaya masyarakat peralihan dari agraris menjadi wilayah pengembangan perdagangan, jasa serta pelabuhan.
3. Luasnya wilayah sehingga tingkat permasalahan cukup tinggi.

c. Faktor Kunci Keberhasilan

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan kapasitas instansi
2. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat
3. Adanya kepercayaan kepada Birokrat
4. Adanya dukungan sarana dan prasarana
5. Peningkatan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas
7. Optimalisasi fasilitasi Peran partisipasi Mayarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
8. Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antara pemerintah, Masyarakat, Perguruan Tinggi dan dunia usaha.

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan kecamatan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Berikut beberapa contoh kelompok sasaran layanan kecamatan antara lain:

a. Masyarakat umum: Layanan yang ditujukan untuk masyarakat luas, seperti:
   1. Layanan kesehatan
   2. Layanan pendidikan
   3. Layanan informasi dan komunikasi
b. Kelompok rentan: Layanan yang ditujukan untuk kelompok rentan, seperti:
   1. Lansia
   2. Anak-anak dan remaja
   3. Penyandang disabilitas
   4. Masyarakat miskin atau rentan
c. Petani dan nelayan: Layanan yang ditujukan untuk petani dan nelayan, seperti:
   1. Layanan penyuluhan pertanian
   2. Layanan bantuan benih dan pupuk
   3. Layanan pemasaran hasil pertanian
d. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah): Layanan yang ditujukan untuk UMKM, seperti:
   1. Layanan pelatihan dan pendampingan
   2. Layanan akses pembiayaan
   3. Layanan pemasaran
e. Masyarakat adat: Layanan yang ditujukan untuk masyarakat adat, seperti:
   1. Layanan pelestarian budaya
   2. Layanan pendidikan dan kesadaran masyarakat
   3. Layanan bantuan sosial
f. Instansi vertikal yakni: Kantor-kantor pemerintahan di tingkat kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi khusus, seperti Forkopimcam, kantor polisi, kantor pos, dan lain-lain.
g. Organisasi Masyarakat yakni LSM, kelompok swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, dan organisasi lainnya yang beroperasi di wilayah kecamatan.
h. Pihak lain yakni Universitas, lembaga penelitian, dan pihak lain yang memiliki hubungan dengan kegiatan kecamatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sipora Selatan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sipora Selatan

Perangkat Daerah Kecamatan Sipora Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sedang rincian tugas Kecamatan didasarkan pada Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Sipora Selatan.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Berikut merupakan Identifikasi permasalahan- permasalahan Kecamatan Sipora Selatan berserta faktor yang mempengaruhinya:

a. Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati kepada camat belum sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi termasuk sarana, prasarana, dana dan personil (terlalu banyak pelimpahan kewenangan dari instansi teknis tidak diimbangi dengan SDM yang sesuai dengan kompetensinya).

b. Penempatan tenaga teknis berkait pelayanan Perizinan, dan pembangunan belum mencukupi sesuai kompetensi.

c. Masih terdapat rangkap jabatan khusus berkait dengan pengelola keuangan, barang dll.

d. Pentingnya pemahaman dan pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) bagi aparatur pelayanan pubik.

e. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa sehingga penilaian kinerja Aparatur Pemerintahan kurang.

f. Masih kurangnya jumlah sarana prasarana dengan teknologi tinggi yang ada dikantor kecamatan dan desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.

g. Koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan kewilayahan.

Tabel 2.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
			Internal	Eksternal	
Kesekretariatan	1. Rangkap jabatan 2. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Aparatur tidak sesuai Analisis Jabatan	UU ASN		1. Adanya moratorium pegawai.	Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah
Ketentraman dan ketertiban Umum dan Pemerintahan	1. Banyaknya pelanggaran perda Perijinan, masalah pekat kurang	Perda perijinan, perda Retribusi Peraturan Bupati	Kurang sosialisasi perda	1. Kurang kesadaran masyarakat Untuk mengurus perizinan	1. Kurang sosialisasi perda kepada masyarakat 2. Pelaksanaan tugas tidak

		tenaga	pelimpahan		2.	Masih		optimal
		Pengamanan	kewenangan			banyak		Karena
		wilayah dan				pelaku		rangkap
		Kesadaran				pekat dan		jabatan
	2.	Keamanan				kriminalitas		Kegiatan yang
		Lingkungan					3.	dilaksanakan
		Regulasi						belom ada
		Pelimpahan				Tuntutan		Juknis,
	3.	Kewenangan				masyarakat		Juklak
		Pelaksanaan		Kondisi		atas		standar
		Standar	peraturan	kantor		fasilitasi		pelayanan
		Prosedur	tentang	kurang		pelayanan		publik belum
	4.	Pelayanan belo	pelayanan	memadai		publik yang		memenuhi
		m maksimal	publik, SOP,			tinggi		standar
		Penempatan	SPP					pelayanan
		tenaga teknis						
		berkait						
		Pelayanan						
		perizinan						
		belum						
		mencukup						
		sesuai						
		kompetensi,						
		sehingga						
		pelaksanaan						
		kurang optimal						
	5.	Sarana dan						
		prasarana						
		ruang						
		pelayanan						
		Desa yang						
		kurang						
		representative						
Pembinaan Kemasyarakatan Kecamatan Sipora Selatan	1.	Masyarakat sangat menuntut	Peraturan Bupati pelimpahan kewenangan, pagu indikatif	SDM dan anggaran yang terbatas		Tingkat kemandirian dan swadaya masyarakat rendah		Keterbatasan kewenangan kecamatan keterlambatan laporan pertanggungjawaban dari Masyarakat
	2.	fasilitasi dari pemerintah						
		Partisipasi Masyarakat Terhadap pelaporan rendah						
Penyelenggaran Perekonomian dan Pembangunan wilayah Kecamatan	1.	Sarana prasarana wilayah rusak	Perbup pelimpahan kewenangan	SDM dan anggaran yang terbatas		Tuntutan masyarakat untuk memperbaiki yang rusak.		Keterbatasan kewenangan kecamatan, SDM dan anggaran.

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansional atau internal Perangkat Daerah Kecamatan Sipora Selatan. Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa 5 (lima) tahun kedepan. Permasalahan tersebut antara lain :

a. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan.

Partisipasi masyarakat terhadap pelayanan dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dengan adanya indikator antara lain,

masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis pelayanan dan alur pelayanan. Disamping itu masih terdapatnya masyarakat yang mewakilkan dirinya ketika berurusan dengan pelayanan di kecamatan.

b. Kualitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia/Perangkat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Sipora Selatan yang mempunyai 7 (tujuh) desa didukung oleh sebanyak 41 orang pegawai, terdiri dari 22 orang pegawai tetap (PNS), 19 orang pegawai tidak tetap/tenaga kontrak. Masih kurangnya pelayanan kepada masyarakat karena tupoksi pegawai yang tidak sesuai dengan jabatan yang dipangku.

c. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serta regulasi yang mengatur, Kecamatan Sipora Selatan telah mempunyai Standar Prosedur Pelayanan yang berupa SOP dan SPP. Pelaksanaan standar prosedur ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya keterbatasan pelaksana dan duplikasi pekerjaan, di samping itu dengan kualitas personil yang tidak merata terdapat hambatan dalam alur pelayanan.

d. Regulasi Pelimpahan Kewenangan

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah telah mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati Kepulauan Mentawai Kewenangan tersebut disamping bersifat aplikatif juga bersifat koordinatif dan fasilitatif. Kewenangan terlaksana harus diimbangi adanya pemenuhan sumberdaya baik sumber manusia maupun sumber dana. Pada saat ini sumberdaya belum semua dapat mengampu terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan, terkadang kewenangan yang bersifat bersama atau *concurrent*, kecamatan belum diberikan porsi yang sesuai dengan kewenangannya.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan. Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolak ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan

oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Kepentingan umum;
2. Kepastian hukum;
3. Kesamaan hak;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban;
5. Keprofesionalan;
6. Partisipatif;
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan;
9. Akuntabilitas;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu; dan
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar Kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan PATEN namun masih mengalami beberapa perubahan terkait kebijakan yang di terpakan dalam pelaksanaan hingga sekarang. Itulah perwujudan tekait Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunanannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan pembangunan serta seksi ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 yaitu persyaratan subtantif, administrative dan teknis. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan

adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kecamatan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai Kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka Kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh Kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengaru utama gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan, pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan terdiri dari:

menghalangi bagi kelompok rentan, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Sipora Selatan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Kepulauan Mentawai kepada Camat.

c. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik

sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

Dari paparan permasalahan di atas perlu adanya identifikasi dan klasifikasi untuk mengatasi permasalahan tersebut pada 2 (dua) tahun kedepan. Penanganan permasalahan untuk mencapai hasil yang optimal perlu langkah-langkah yang konkrit dan startegis. Isu-isu strategis yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Sipora Selatan antara lain :

1. Penumbuhan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan

   Partisipasi adalah sebuah hubungan timbal balik yang diberikan oleh pemberi pelayanan dan penerima pelayanan, sehingga terjalin komunikasi yang efektif. Penumbuhan partisipasi dibangun dengan berbagai lini antara lain dengan terjalinnya komunikasi yang efektif, tersedianya media informasi yang memadai, adanya kegiatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh kecamatan kepada masyarakatnya. Dengan adanya pelimpahan kewenangan adalah sebuah media yang efektif guna membangun infrastruktur atau jaringan komuikasi kepada masyarakat.

2. Peningkatan Kemampuan Aparatur

   Kemampuan aparatur adalah salah satu faktor yang cukup penting guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, dengan melihat komposisi dan regulasi perlu kiranya membuat sebuah terobosan. Terobosan itu adalah adanya peningkatan kemampuan aparatur yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan. Sebuah instansi berkewajiban untuk selalu mengadakan pembenahan diri khususnya yang berhubungan dengan kemampuan aparatnya.

   Peningkatan kemampuan dilakukan secara non formal dan aplikatif, sehingga kemampuan akan tumbuh sendiri sesuai dengan kapasitas pribadi. Kegiatan yang aplikatif tersebut antara lain; kemampuan penguasaan tehnologi, kemampuan melayani pelanggan, kemampuan dalam memecahkan masalah, kemampuan berkoordinasi.

3. Konsistensi Terhadap Standar Pelayanan

   Tuntutan masyarakat dan regulasi dalam pelayanan semakin hari semakin meningkat, hal ini harus diimbangi dengan pembuatan regulasi yang mampu menampung kemapuan aparatur dan kepentingan masyarakat. Standar pelayanan adalah hal yang harus bersifat mutlak ada, sehingga pelayanan akan terstruktur dan terbuka. Dalam pelaksanaan standar pelayanan diperlukan sebuah konsistensi dalam

penyusunan dan pelaksanaannya, sehingga diperlukan komunikasi yang efektif antara penyedia pelayanan dan stakeholdersnya. Pembenahan dan kajian terhadap sebuah standar pelayanan mutlak diperlukan guna pemenuhan pelayanan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan.

4. Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan

Pelimpahan kewenangan adalah sebuah dasar bagi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah, perlu adanya penguatan terhadap pelaksanaannya. Dalam melaksanakan kewenangan perlu diklasifikasi yang berupa perijinan, fasilitasi dan koordinasi.

Tabel 2.5
Isu Strategis Kecamatan Sipora Selatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Birokrasi Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Sipora Selatan (Pelayanan Publik)	1. Kurang sosialisasi perda kepada masyarakat 2. Pelaksanaan tugas tidak optimal Karena rangkap jabatan 3. Kegiatan yang dilaksanakan belom ada Juknis, Juklak 4. standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan	• Pembangunan Yang berkelanjutan • Perubahan Iklim • Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan Hidup • Indikator Tujuan Pembangunan Yang berkelanjutan	• Transformasi Birokrasi • Penyerapan anggaran • Koordinasi dan Pelaksanaan	• Pemanfaatan Teknologi Digital • Partisipasi Masyarakat Inovasi dan Kreativitas	• Pengelolaan Sumber daya Alam • Pengembangan Ekonomi Regional • Pengelolaan Lingkungan Kwalitas Pelayanan Publik	1. Penumbuhan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelayanan 2. Peningkatan Kemampuan Aparatur 3. Konsistensi Terhadap Standar Pelayanan 4. Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN SIPORA SELATAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sipora Selatan 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Kecamatan Sipora Selatan selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Tujuan dan sasaran jangka menegah perangkat daerah tentunya harus selaras dan mendukung visi misi kepala daerah selama 5 tahun rencana pembengunan Kecamatan Sipora Selatan. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 tahun sebagai penjabaran secara teknis pada misi 4 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, bersih, akuntabel dan melayani.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi Kantor Camat Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 adalah "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima. Adaptif, Inovatif dan Melayani.

Terdapat beberapa tujuan untuk meningkatkan kualitas publik antara lain:

a. Mewujudkan Masyarakat yang Aman Harmonis dan Berkeadilan;
b. Mewujudkan Pembangunan Insfrakstruktur Kewilayahan yang
c. berkualitas, Berkeadilan dan berwawasan Lingkungan;
d. Mewujudkan Transformasi Sosial Melalui Pembangunan Manusia yang inklusif, Responsif dan Berkualitas;
e. Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui peningkatan Produktivitas, Nilai;
f. Tambah, Daya Saing Ekonomi Daerah;
g. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, Dan Ekologi
h. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana
i. Mewujudkan Parawisata dan Ekonomi Kreatif Berkelas Dunia;
j. Penguatan Transformasi Tata Kelola Birokrasi yang Responsif, Inovatif, dan Terpecaya.

Untuk dapat merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029, maka kecamatan harus melakukan tugas, pokok dan fungsinya maka dituntut untuk:

a. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan

kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan dan Desa;

b. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting karena Inkosistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan

c. Kreatif yaitu : setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;

d. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Sipora Selatan 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu diperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Sipora Selatan atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerj

Sasaran yang akan dicapai oleh Kantor Camat Sipora Selatan untuk dapat menjalankan Visi dan Misinya adalah “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat akan Pelayanan Publik” dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun tujan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan

b. Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan

c. Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	*Baseline* 2024	Target Tahun				
						2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani		Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	82,62	92,25	92,26	92,27	92,28	92,28
		Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan	Kecepatan waktu pelayanan	waktu	1 Jam	1 Jam	1 jam	15 Menit	15 Menit	15 Menit
			Persentase serapan APBDes di atas 90%	persen	92,45	92,55	93,55	94,00	95,90	96,80
		Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	indeks	96,50	97,00	98,55	99,00	99,50	100%
		Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	nilai	82.30	84,40	86,50	87,60	88,70	89,80
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	2 inovasi
			Capaian kinerja perangkat daerah	persen	82.30	84,40	86,50	87,60	88,70	89,80

3.3 Strategi Renstra Kecamatan Sipora Selatan 2025-2029

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Sipora Selatan adalah strategi dan kebijakan Kecamatan Sipora Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Sipora Selatan menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Sipora Selatan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome)* program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sipora Selatan.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan yang ditempuh dalam memenuhi tujuan dan sasaran pelayanan Kecamatan Sipora Selatan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, yaitu dari Tabel 3.2

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Professional, Bersih, Akuntabel dan Melayani			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Pembinaan, Perlindungan dan Pengembangan Aparatur	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani 2. Peningkatan kualitas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) agar lebih cermat dan tepat waktu, sehingga RKPDesa dapat menjadi dasar yang kuat dan valid dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dengan RKPDesa yang baik, pembangunan desa dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, dan efisien 3. Penyelenggaraan Evaluasi kinerja pelaksanaan APBDesa laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara rutin dan transparan. 4. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial
		2. Pemberian Penghargaan berbasis kinerja	
		3. Penempatan aparatur sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki	
	2. Meningkatnya Kapabilitas Pemerintah	1. Pengembangan kerangka kelembagaan pemerintah daerah	
		2. Peningkatan dan pengembangan kualitas sarana dan prasarana aparatur	
		3. Meningkatkan fungsi koordinasi lintas sektor dan kerjasama pemerintah daerah	
		4. Membangun SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Professional, Bersih, Akuntabel dan Melayani			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			kemasyarakatan 5. Proses pelayanan untuk memastikan efisiensi dan efektif 6. Peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan peningkatan efektivitas penggunaan dana desa 7. Peningkatan Forum koordinasi desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, seperti pelayanan administrasi kependudukan 8. Peningkatkan nilai LAKIP, menunjukkan akuntabilitas kinerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik 9. Peningkatan Pelayanan publik di kecamatan dapat menjadi lebih efisien, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat 10. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia ASN Kecamatan 11. Menyediakan kerangka acuan untuk pengambilan keputusan dan tindakan

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Sipora Selatan tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (*input*) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun pentahapan Renstra Kecamatan Sipora Selatan Tahun 2025-2029 adalah seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Kecamatan Sipora Selatan Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan SDM dalam penguatan layanan dalam pemerintahan di kecamatan	Penguatan Infrastruktur digitalisasi pelayanan	Optimalisasi dalam penerapan digitalisasi	Meningkatkan kualitas pelayanan dengan penguatan jangkauan layanan digital	Penerapan transformasi digital dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik

3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sipora Selatan 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sipora Selatan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Sipora Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan:
    1. Penguatan kualitas sumber daya ekonomi melalui sinergi jejaring ekonomi yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
    2. Menguatkan kebijakan dan institusional yang mendorong kemudahan berusaha
    3. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian
    4. Mengembangkan sektor ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lokal
b. Mewujudkan SDM yang Unggul, Berakhlak, dan Masyarakat Berbudaya Maju
    1. Peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan perluasan perlindungan sosial
    2. Pemenuhan tenaga pendidik sesuai standar kompetensi
    3. Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran secara inklusif
    4. Penguatan talenta digital yang berakhlak dan berbudaya
c. Mewujudkan Tata Kelola Kolaboratif, Berintegritas, dan Adaptif
    1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
    2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan
    3. Mengembangkan sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi
d. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan dan Resiliensi terhadap Bencana
    1. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
    2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengurangi risiko bencana
    3. Mengembangkan sistem pengelolaan bencana yang efektif dan efisien

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sipora Selatan

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani	1. Digitalisasi Pelayanan dan PartisipasiPublik. 2. PeningkatanKapasitasdan BudayaKerjaAparatur. 3. Desain Pelayanan Berorientasi Pengguna (*Citizen-Centric*). 4. Inovasi Berkelanjutan dan Adaptabilitas. Penguatan Akuntabilitas danTransparansi	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani 2. Peningkatan kualitas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) agar lebih cermat dan tepat waktu, sehingga RKPDesa dapat menjadi dasar yang kuat dan valid dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dengan RKPDesa yang baik, pembangunan desa dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, dan efisien 3. Penyelenggaraan Evaluasi kinerja pelaksanaan APBDesa laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara rutin dan transparan. 4. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 5. Proses pelayanan untuk memastikan efisiensi dan efektif 6. Peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan peningkatan efektivitas penggunaan dana desa 7. Peningkatan Forum koordinasi desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, seperti pelayanan administrasi kependudukan 8. Peningkatkan nilai LAKIP, menunjukkan akuntabilitas kinerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik 9. Peningkatan Pelayanan publik di kecamatan dapat menjadi lebih efisien, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat 10. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia ASN Kecamatan 11. Menyediakan kerangka acuan untuk pengambilan keputusan dan tindakan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Program yang akan dilaksanakan Kecamatan Sipora Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan tahun 2025-2029 diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, yaitu terwujudnya birokrasi kelas dunia dan terwujudnya kehidupan Masyarakat yang beradab, tenteram dan Imparsial.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 2025-2029 dengan sumber dana APBD.

Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, secara terperinci disajikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sipora Selatan.

Dalam mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/ sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   a. Evalusi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Kegaitan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   a. Penyediaan Kompponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   a. Pengadaan Mebel
   b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
    b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sipora Selatan. Dalam mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/sub kegiatan yaitu:

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dengan Sub Kegiatan:
    a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisifasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Dalam mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/ sub kegiatan yaitu:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan:
    a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    b. Peningktatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

D. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya urusan pemerintahan secara umum yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Sipora Selatan. Dalam mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/sub kegiatan yaitu:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan:
    a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan, memfasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Sipora Selatan baik dari segi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan maupun perencanaan pembangunan. Dalam mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/ sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan:
    a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Kecamatan Sipora Selatan untuk periode tahun 2025-2029 disajikan pada tabel. 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Indek Kepuasan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan	Kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Kecepatan waktu pelayanan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
			Kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase serapan APBDes di atas 90%		
		Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan	Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
		Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	Nilai SAKIP	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Inovasi yang diterapkan	Program Urusan Penunjang	
					Capaian kinerja perangkat daerah		

Tabel 4.2
Program Kegiatan, Sub Kegiatan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	101.020.000	12 Kali	16.800.000	12 Kali	124.466.742	12 Kali	138.158.084	12 Kali	153.355.473	12 Kali	170.244.575	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	2.524.497.169	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1.369.801.001	27 Orang/ Bulan	2.495.697.169	27 Orang/Bulan	1.687.731.813	27 Orang/ Bulan	1.873.382.313	27 Orang/ Bulan	2.079.454.367	27 Orang/ Bulan	2.308.194.348	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan	116.012.200	40/Orang	28.800.000	40/Oran	142.938.632	40/Oran	158.661.881	40/Oran	176.114.688	40/Oran	195.487.304	Kecamatan Sipora Selatan

	fungsi perangkat daerah												
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	65.957.500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Banguna Kantor	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	985.000	4 Jenis	4.554.500	4 Jenis	1.213.619	4 Jenis	1.347.117	4 Jenis	1.495.299	4 Jenis	1.659.782	Kecamatan Sipora Selatan
PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	21.527.000	1 paket	10.000.000	1 paket	26.523.417	1 paket	29.440.993	1 paket	32.679.502	1 paket	36.274.247	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	29.954.000	4 paket	20.039.000	4 paket	36.906.323	4 paket	40.966.019	4 paket	45.472.281	4 paket	50.474.232	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.000.000	1 paket	-	1 paket	2.464.200	1 paket	2.736.262	1 paket	3.036.141	1 paket	3.370.116	Kecamatan Sipora Selatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan	121.870.000	1 laporan	41.364.000	1 laporan	150.156.027	2 laporan	166.673.190	2 laporan	185.007.241	2 laporan	205.358.037	Kecamatan Sipora Selatan

	fungsi perangkat daerah												
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Peningkatan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	-	-	-	4 unit	740.000.000	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Sipora Selatan
Pengadaan Mebel	Persentase Peningkatan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	-	-	-	5 Unit	100.000.000	-	-	-	-		-	Kecamatan Sipora Selatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	2 Unit	60.000.000	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Sipora Selatan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.090.000	-	-	2 unit	4.000.000.000	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	30.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Peningkatan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	12.000.000	3 Rekening	30.000.000	3 Rekenin	14.785.200	3 Rekening	16.411.572	3 Rekening	18.216.845	12 laporan	20.220.698	Kecamatan Sipora Selatan
Penyediaan	Persentase	173.000.0	19	-	19	-	19	-	19	-	19	-	Kecamata

Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	00	Orang		Orang	-	Orang		.Orang-		Orang		n Sipora Selatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				28.000.000									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.170.000	4 unit	28.000.000	4 unit	28.00.000	4 unit	30.000.000	4 unit	30.000.000	4 unit	31.000.000	Kecamatan Sipora Selatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peraltan dan Mesin Lainnya	9.950.000	7 Unit	-	7 Unit	12.259.395	7 Unit	13.607.928	7 Unit	15.104.801	7 Unit	16.766.329	Kecamatan Sipora Selatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	5.007.799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Sipora Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	100%	15.006.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		100%	100%	15.006.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Pelaksanaan	Jumlah Urusan	35.000.00	1 laporan	15.006.0	1	43.123.5	1	47.867.	1	53.132.4	1	58.977.0	Kecamata

Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pemerintahan yang Dilimpahkan Dilaksanakan (rekam e-KTP)	0		00	laporan	00	laporan	085	laporan	64	laporan	35	n Sipora Selatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		100%	100%	19.006.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Kecamatan Sipora Selatan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	11.588.000	20 lembaga kemasyarakatan	14.006.000	20 lembaga kemasyarakatan	14.277.575	20 lembaga kemasyarakatan	15.848.108	20 lembaga kemasyarakatan	17.591.400	20 lembaga kemasyarakatan	19.526.454	Kecamatan Sipora Selatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	5.050.000	1 laporan	15.000.000	4 laporan	6.222.105	4 laporan	6.906.537	4 laporan	7.666.256	4 laporan	8.509.544	Kecamatan Sipora Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Persentase Konflik di Wilayah	5.156.000	100 %	-	100 %	77.700.000	100 %	86.247.000	100 %	95.734.170	100 %	106.264.929	Kecamatan Sipora Selatan

dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan yang ditangani/diselesaikan												
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang ditangani/diselesaikan	7.500.000	12 dokumen	-	12 dokumen	11.100.000	12 dokumen	12.321.000	12 dokumen	13.676.310	12 dokumen	15.180.704	Kecamatan Sipora Selatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				15.000.000.									
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan				15.000.000									

Pengawasan Pemerintahan Desa													
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	92.080.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	111.000.000	1 dokumen	123.210.000	1 dokumen	136.763.100	1 dokumen	151.807.041	Kecamatan Sipora Selatan
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemeilihan Kepala Desa	-	-	-	7 desa	20.000.000	-	-	7 desa	60.000.000			Kecamatan Sipora Selatan
		2.125.761.000		2.729.264.069		7.389.238.504		2.740.854.740		3.102.348.761		3.377.007.125	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja Target kinerja pencapaian tujuan sasaran Renstra OPD melalui Indikator Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka Indikator kinerja Kecamatan Sipora Selatan selama 5 tahun ke depan (2025-20230) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	81,25	81,24	81,47	82,06	82,35	82,64	
2	Kecepatan waktu pelayanan	waktu	1 hari	1 hari	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	
3	Persentase serapan APBDes di atas 90%	persen	75,56	77,86	80,45	82,48	84,21	85,00	
4	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	indeks	77,45	78,12	80,45	81,02	81,28	81,65	
5	Nilai SAKIP	nilai	82,30	84,40	86,50	87,60	88,70	89,80	
6	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	
7	Capaian Kinerja Perangkat Daerah	persen	82,30	84,40	86,50	87,60	88,70	89,80	

Tabel 4.3. diatas menjelaskan Indikator Kinerja Utama adalah Alat Ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu Organisasi ,Tim,dalam mencapai sasaran Strategis yang telah ditetapkan , adapun tujuannya adalah Mengukur Kinerja,memantau kemajuan mengidentifikasi prbaikan serta mencapaian RKPD yang ditetapkan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Sipora Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Konflik Wilayah Kecamatan yang ditangani/diselesaikan	Persentase	68	68	68	68	68	68	
3	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu	persentase	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase keterlibatan Masyrakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase	75	80	82	83	85	90	
5	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Tugas Layanan Tugas daerah	Persentase	75	80	82	83	85	90	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci Menjelaskan Alat ukukr strategis yang menggambarkar penyelenggaraan ukuran Pemerintah khusus dalam LPPD KK adapun defenisinya adalah digunakan utuk mengevaluasi kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah atau memantau capaian sesacar Real-time yang menjadi acuan dalam perencanaan Pembangunan serta teritegasi dalam satu data Daerah

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kepulauan Mentawai Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2030 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan pedoman bagi seluruh Instansi termasuk Desa di Wilayah Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2030 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Manajemen Risiko dalam Renstra Kecamatan Sipora Selatan sangatlah penting untuk memastikan Keberhasilan Rencana Strategis Pemerintah dengan mengindenfikasi risiko, menilai Kemungkinan dampak risiko, mengembangkan Risiko, serta Integrasi manajemen Risiko dalam Renstra. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya.

Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat Kecamatan Sipora Selatan bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan daerah serta juga merupakan kebijakan pemerintah untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar-instansi pusat dan daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu dipahami seluruh jajaran Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PAGAI UTARA
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i
Daftar Tabel..... ii
Daftar Gambar..... iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 1
1.3 Maksud dan Tujuan..... 3
1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 6
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah 6
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 8
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 10
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan..... 11
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah..... 16
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... 16
2.2.2 Isu Strategis..... 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 20
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 20
3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 22
3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 22

BAB IV PROGRAM. KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 23
4.1 Uraian Program, Kegitan, Sub Kegiatan..... 23
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan..... 38

BAB V PENUTUP..... 43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah dan Presentase Pegawai Negeri Sipil Menurut Kepangkatan dan Golongan 8
Tabel 2.2 Jumlah dan Prtesentase Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 9
Tabel 2.3 Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Pagai Utara..... 9
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagai Utara Tahun 2020 - 2024 14
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pagai Uatara Tahun 2023-2024 15
Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Saranan Pembangunan Daerah..... 16
Tabel 2.7 Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Pagai Utara..... 18
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pagai Utara Tahun 2025-2030 20
Tabel 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Pagai Utara Tahun 23025-2029.....20
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 21
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Kecamatan Pagai Utara Tahun 2025-2029 22
Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Kecamatan Kecamatan Pagai Utara Tahun 2025-2030 25
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama 41
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kecamatan Pagai Utara..... 7
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis OPD (Renstra OPD). Penyusunan RPJMD dikoordinasikan oleh badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra OPD disusun oleh OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kebupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4); bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu lima tahun.

OPD Kecamatan Pagai Utara sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai tugas dan fungsinya dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, untuk mendukung pelaksanaan tupoksi OPD kecamatan Pagai Utara diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memerikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang, Dokumen Renstra OPD Kecamatan Pagai Utara tahun 2025-2029` tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Renstra-OPD merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-OPD ini, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonsesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2022 Nomor 180);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2025 Nomor 19;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor

225).

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kebupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4);

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagai Utara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Pagai Utara Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud:

a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025- 2029 dapat tercapai.
b. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran OPD Kecamatan Pagai Utara sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029.
c. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Pagai Utara.

d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
e. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders)* tentang rencana pembangunan lima tahunan.
f. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Pagai Utara dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan pagai Utara Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
b. Memerikan arahan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama kurun waktu 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagai Utara dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Kepulauan Mentawai
c. Memudahkan para pemangku kepentingan *(stakeholders*) untuk menetapkan kebijakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kecamatan Pagai Utara diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merumuskan latar belakang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis serta dasar hukum yang relevan dan signifikan dan menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Bab ini terdiri atas:

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi penyajian data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah disertai evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir, serta mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah dan mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat memengaruhi perangkat daerah baik secara langsung atau pun tidak langsung. Bab ini terdiri atas:

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4 Kelompok sasaran layanan
2.2 Permasalah dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya dan mengacu pada Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang dijabarkan secara operasional dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan disertai dengan indikator kinerja dan targetnya yang didukung dengan program prioritas pembangunan daerah, Bab ini terdiri

atas:
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN
Bab ini memuat Program, Kegiatan, Subkegiatan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya, dan menjelaskan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci berserta Target dan Pagu Indikatif untuk pencapaian 5 (lima) tahun kedepan, Bab ini terdiri atas:
4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V PENUTUP
Bab ini menjelaskan kesesuaian antara target kinerja Renstra Perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

- Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda Kabupaten/Kota dari PNS yang memenuhi syarat;
- Camat menerima Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota;
- Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

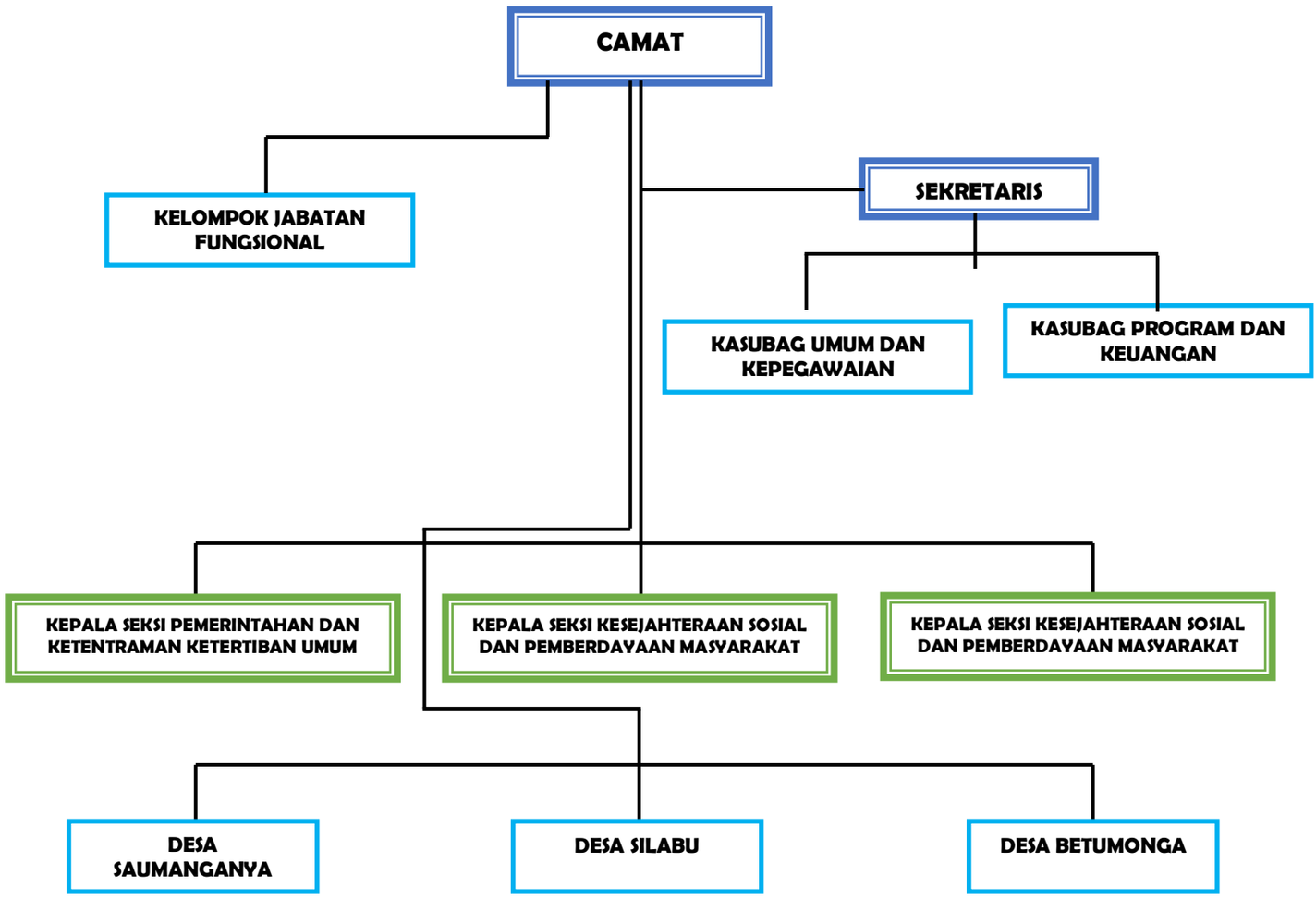
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja / penataan administrasi dan pengelolaan manajemen pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga. Kecamatan secara hirarchi merupakan bawahan Bupati sebagai Perangkat Daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tugas pokok dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan diwilayah kecamatan:

a. Camat;
b. Sekretaris, membawahkan:
    1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentrman dan Ketertiban Umum
d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kecamatan Pagai Utara adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pagai Utara



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat
   Memimpin tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
b. Sekretaris Camat
   Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian serta melaksanakan pelayanan masyarakat dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
c. Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang pemerintahan ditingkat kecamatan dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
d. Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
   Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

serta prasarana dan fasilitasi pelayanan umum.
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat dan sosial lainnya.

e. Kasi Ekonomi Pembangunan
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Ekonomi Pembangunan

f. Kasubag Keuangan dan Program
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan.

g. Kasubag Umum dan Kepegawaian
Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian serta pelayanan masyarakat dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana tersebut di atas, potensi yang diharapkan mendukung tugas pokok Kecamatan Pagai Utara, meliputi:

1. Aparatur sebagai manajer (pemikir, perencanaan, pelayanan dan penggerak) yang menjadi kekuatan pendorong yang utama.
2. Hubungan kerja/Koordinasi (pegawai) yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan Pagai Utara

Tabel 2.1
Daftar Pegawai Negeri Sipil
Menurut Kepangkatan dan Golongan Tahun 2025

S

No.	Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Orang
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pengatur Muda II/a	0	0	0
2	Pengatur Muda TK.I II/b	1	0	1
3	Pengatur II/c	2	0	2
4	Pengatur TK.I II/d	1	0	1
5	Penata Muda III/a	0	0	0
6	Penata Muda TK.I III/ b	3	1	3
7	Penata III/c	1	0	2
8	Penata TK.I III/d	3	0	2
9	Pembina IV/a	1	0	1
10	PPPK	4	0	4
11	Tenaga Kontrak	10	5	15
	Total	24	6	31

sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kec. Pagai Utara Tahun 2025

Tabel 2.2
Daftar Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	S2	4	0	4
2.	D IV/ SI	2	1	3
3.	DIII	1	0	1
4.	SLTA / Sederajat	4	0	3
5	SLTP/Sederajat	0	0	0
Jumlah		11	1	12

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kec. Pagai Utara Tahun 2025

Berdasarkan data Tabel 2.1 dan Tabel 2.2, sumber daya aparatur di Kecamatan Pagai Utara pada tahun 2025 menunjukkan komposisi yang cukup beragam dari segi kepangkatan dan tingkat pendidikan. Jumlah keseluruhan aparatur mencapai 31 orang, terdiri dari 24 laki-laki dan 6 perempuan, yang mencerminkan dominasi aparatur laki-laki dalam struktur pegawai kecamatan. Dari sisi kepangkatan, sebagian besar pegawai berada pada golongan III, seperti Penata Muda TK.I (III/b) dan Penata TK.I (III/d), yang menunjukkan bahwa aparatur kecamatan umumnya berada pada jenjang menengah karier birokrasi. Selain itu, terdapat 4 orang PPPK dan 15 tenaga kontrak, yang menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pelayanan dan administrasi pemerintahan di kecamatan.

Dari segi pendidikan, sumber daya aparatur Kecamatan Pagai Utara didominasi oleh pegawai dengan latar belakang pendidikan tinggi, di mana terdapat 4 orang berpendidikan S2, 3 orang berpendidikan S1/DIV, dan 1 orang lulusan DIII. Sementara itu, pegawai dengan pendidikan SLTA atau sederajat berjumlah 3 orang, yang umumnya mendukung fungsi teknis dan operasional di lapangan. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur memiliki kapasitas akademik yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dalam menunjang tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pagai Utara diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung seluruh pelayanan di Kecamatan Pagai Utara. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga sebagai input atau (*capital*) dalam proses pelayanan Kecamatan Pagai Utara untuk mencapai tujuan organisasi.

Tabel 2.3
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Pagai Utara Tahun 2025

No	Jenis Barang	Vol	Satuan/ Unit	Kondisi		
				B	RR	RB
1.	Tanah Lokasi Kantor	2.506	M^3	√		
2.	Tanah Lokasi Rumah Dinas	532	M^3	√		
3.	Bangunan Gedung Kantor	1	Unit	1		
4.	Rumah Dinas	1	Unit			1
5.	PC Unit	2	Unit			2
6.	Laptop	1	unit	1		

7.	Lemari Arsip	3	buah	3		
8.	AC Spilit	2	unit	2		
9	Speaker Aktif	1	unit	1		
10	Printer	3	unit	2		1
11	Kursi Kerja	8	buah	8		
12.	Kursi lipat	15	buah	15		
13.	Camera	1	Buah	1		
14.	Meja ½ biro	10	buah		1	
15	Lemari Filling Cabinet	1	buah	1		
16	Motor Boat	2	unit			2
17	Kuris Kerja Futura	5	buah	5		
18	Sofa	1	unit	1		
19	Kendaraan Roda Dua	4	Unit	3		1
20	CPU	1	Unit	1		
21	Lemari Piring	1	Buah	1		

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kec. Pagai Utara Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.3, kondisi sarana dan prasarana Kecamatan Pagai Utara tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum kecamatan telah memiliki fasilitas dasar yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik, meskipun masih terdapat beberapa aset yang perlu perbaikan dan pembaruan. Dari total berbagai jenis barang dan aset, sebagian besar berada dalam kondisi baik (B), seperti bangunan gedung kantor, laptop, lemari arsip, AC, kursi kerja, serta kendaraan roda dua. Hal ini mencerminkan adanya upaya pemeliharaan rutin untuk menjaga keberfungsian sarana kerja. Namun demikian, terdapat pula beberapa fasilitas yang telah mengalami penurunan fungsi dan berada dalam kondisi rusak ringan (RR) maupun rusak berat (RB). Beberapa di antaranya adalah rumah dinas, PC unit, motor boat, serta printer, yang membutuhkan perbaikan atau penggantian agar tidak menghambat aktivitas pelayanan administrasi dan mobilitas pegawai di wilayah kepulauan.

Selain itu, kecamatan juga memiliki tanah lokasi kantor seluas 2.506 m^3 dan tanah lokasi rumah dinas seluas 532 m^3, yang menjadi aset penting bagi pengembangan fasilitas pemerintahan di masa mendatang. Secara keseluruhan, ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Pagai Utara sudah cukup mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, namun diperlukan peningkatan kualitas dan peremajaan peralatan kerja agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efisien, nyaman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Pagai Utara adalah meliputi internal Kecamatan, dan elemen masyarakat yang terlihat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Pagai Utara, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2025-2029.

Kelompok sasaran layanan kecamatan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Berikut beberapa contoh kelompok sasaran layanan kecamatan antara lain:

1. Masyarakat umum: Layanan yang ditujukan untuk masyarakat luas, seperti:
   - Layanan kesehatan
   - Layanan pendidikan
   - Layanan informasi dan komunikasi
2. Kelompok rentan: Layanan yang ditujukan untuk kelompok rentan, seperti:
   - Lansia
   - Anak-anak dan remaja
   - Penyandang disabilitas
   - Masyarakat miskin atau rentan
3. Petani dan nelayan: Layanan yang ditujukan untuk petani dan nelayan, seperti:
   - Layanan penyuluhan pertanian
   - Layanan bantuan benih dan pupuk
   - Layanan pemasaran hasil pertanian
4. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah): Layanan yang ditujukan untuk UMKM, seperti:
   - Layanan pelatihan dan pendampingan
   - Layanan akses pembiayaan
   - Layanan pemasaran
5. Masyarakat adat: Layanan yang ditujukan untuk masyarakat adat, seperti:
   - Layanan pelestarian budaya
   - Layanan pendidikan dan kesadaran masyarakat
   - Layanan bantuan social
6. Instansi vertikal yakni: Kantor-kantor pemerintahan di tingkat kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi khusus, seperti Forkopimcam, kantor polisi, kantor pos, dan lain-lain;
7. Organisasi Masyarakat yakni LSM, kelompok swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, dan organisasi lainnya yang beroperasi di wilayah kecamatan;
8. Pihak lain yakni Universitas, lembaga penelitian, dan pihak lain yang memiliki hubungan dengan kegiatan kecamatan

Dalam menentukan kelompok sasaran layanan di kecamatan, perlu dipertimbangkan beberapa faktor, seperti:

1. Kebutuhan dan masalah: Apa kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kecamatan?
2. Prioritas: Apa prioritas layanan yang perlu diberikan kepada masyarakat kecamatan?
3. Sumber daya: Apa sumber daya yang tersedia untuk mendukung layanan yang akan diberikan kepada masyarakat kecamatan.

Dengan menentukan kelompok sasaran layanan kecamatan yang tepat, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Pagai Utara berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 09 Tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pagai Utara, menggunakan analisis dari *output* yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya.

Disamping Kinerja Kecamatan Pagai Utara sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Pagai Utara dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Pagai Utara setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat sangat tidak mencukupi, disebabkan adanya efisiensi anggaran oleh Bapak Presiden Prabowo.
   b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di Kecamatan Pagai Utara setiap tahunnya mengalami penurunan juga disebabkan efisiensi anggaran dan perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan.
2. Kinerja Pelayanan dibidang Pemerintahan.
   beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Pagai Utara di bidang pemerintahan tercermin dari:
   a. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparatur Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari –hari.
   b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
   c. Pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa.
   d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
   e. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di desa.
   f. Memberikan fasilitas yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.
3. Pelayanan di bidang Ekonomi dan Pembangunan
   a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
   b. Monitoring harga sembako;
   c. Monitoring pembangunan desa;
   d. Monitoring Penyaluran beras Raskin, dan program-program sosial lainnya;
   e. Monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Pagai Utara;
   f. Monitoring dan fasilitasi penerbitan izin-izin yang dibutuhkan masyarakat;

Berdasarkan Tabel 2.3 di bawah ini, pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pagai Utara pada periode tahun 2021–2024 menunjukkan tren yang positif dan konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di tingkat kecamatan. Secara umum, realisasi capaian indikator kinerja menunjukkan hasil yang mendekati atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), capaian menunjukkan hasil yang stabil dalam kategori baik (B) setiap tahunnya, menandakan bahwa pelayanan publik di kecamatan telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Indikator penetapan APBDes tepat waktu juga mengalami peningkatan signifikan, di mana realisasi tahun 2024 mencapai 96%, melampaui target sebesar 92%. Hal ini mencerminkan adanya

peningkatan koordinasi dan efektivitas kerja antara pihak kecamatan dan pemerintahan desa. Untuk indikator serapan APBDes di atas 90%, kinerja kecamatan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi 100% secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2024, menggambarkan kemampuan pengelolaan keuangan desa yang optimal dan efisien. Sementara itu, indikator penanganan kasus kriminal juga mengalami peningkatan bertahap dari 62% pada tahun 2021 menjadi 70% pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan efektivitas dalam penyelesaian permasalahan sosial di tingkat wilayah.

Selain itu, jumlah inovasi pelayanan yang diterapkan konsisten mencapai 1 inovasi per tahun, dan capaian kinerja perangkat daerah terus menunjukkan hasil tinggi dengan realisasi mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa Kecamatan Pagai Utara telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, transparan, dan berkinerja tinggi, meskipun masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian yang telah diraih di masa mendatang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Pagai Utara
Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD				90%	90%	90%	90%		85%	80%	90%	97%		-	-	-	-	-
1	Indek Kepuasan Masyarakat				B	B	B	B		B	B	B	B		-	-	-	-	-
2	Penetapan APDes tepat waktu				85%	88%	90%	92%		90%	90%	88%	96%		-	-	-	-	-
3	Serapan APDess di atas 90 %				100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %	100%	100 %		-	-	-	-	-
4	Penanganan kasus kriminal di kecamatan yang ditangani/diselesaikan				62%	65%	68%	70%		62%	65%	68%	70%		-	-	-	-	-
5	Nilai LAKIP														-	-	-	-	-
6	Jumlah Inovasi yang diterapkan				1	1	1	1		1	1	1	1		-	-	-	-	-
7	Persentase capaian kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	100 %	100 %		98%	99%	100%	100 %		-	-	-	-	-

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pagai Utara 2023-2024
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Pertumuhan	
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18
BELANJA DAERAH	2.361.428.976	2.406.977.607		-	2.265.704.837,	2.263.726.982		-	95,94	94,05			1.977.855	9,89
BELANJA OPERASI	2.316.728.956	2.376.943.357,		-	2.221.694.837	2.233.695.982		-	95,89	93,97	-	-	11.965.145	9,73
Belanja Pegawai	1.303.275.056	1.339.695.717		-	1.214.842.966	1.218.944.538		-	93,21	90,99	-	-	4.101.572	10,02
Belanja arang dan Jasa	1.013.453.900	1.037.247.640		-	901.606.500	1.014.751.444,		-	88,96	97,83	-	-	113.144.944	9,09
BELANJA MODAL	44.700.020	30.034.250		-	44.010.000	30.031.000,			98,45	99,99			6.345.700	41,07

Berdasarkan Tabel 2.4, analisis terhadap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Pagai Utara tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan cukup efektif dengan tingkat realisasi yang tinggi, meskipun terdapat sedikit penurunan rasio antara anggaran dan realisasi pada beberapa komponen belanja. Pada belanja daerah, realisasi tahun 2023 mencapai 95,94% dari total anggaran sebesar Rp2,36 miliar, dan sedikit menurun menjadi 94,05% pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian kegiatan operasional dan efisiensi penggunaan dana, meskipun secara keseluruhan menunjukkan bahwa anggaran masih dimanfaatkan secara optimal.

Komponen belanja operasi, yang merupakan porsi terbesar dalam struktur pendanaan, juga mengalami tren serupa dengan rasio realisasi 95,89% pada tahun 2023 dan 93,97% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya pengendalian belanja yang cukup baik, terutama dalam konteks efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Sementara itu, belanja pegawai masih mendominasi total belanja operasi dengan rasio realisasi 93,21% di tahun 2023 dan 90,99% di tahun 2024. Meskipun sedikit menurun, realisasi ini menunjukkan pengelolaan gaji dan tunjangan aparatur yang relatif stabil dan terukur. Sebaliknya, belanja barang dan jasa memperlihatkan peningkatan signifikan dari 88,96% pada 2023 menjadi 97,83% pada 2024, mencerminkan peningkatan kebutuhan operasional dan dukungan kegiatan pelayanan di kecamatan.

Pada sisi lain, belanja modal menunjukkan efektivitas pelaksanaan yang sangat tinggi dengan rasio realisasi mencapai 98,45% di tahun 2023 dan 99,99% di tahun 2024, menandakan bahwa investasi untuk sarana dan prasarana pemerintahan telah berjalan sesuai perencanaan. Secara keseluruhan, pertumbuhan anggaran tahun 2024 tercatat 9,89%, dengan pertumbuhan realisasi mencapai 9,73%, menggambarkan adanya peningkatan kapasitas fiskal kecamatan yang sejalan dengan peningkatan kebutuhan pelayanan. Hal ini mencerminkan bahwa Kecamatan Pagai Utara telah mengelola anggaran dengan efektif, efisien, dan akuntabel, meskipun perlu terus dioptimalkan agar realisasi anggaran dapat mencapai tingkat maksimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Pagai Utara selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pagai Utara 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

Tabel 2. 6
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik	Pelayanan Masyarakat di kecamatan kurang maksimal	1. Kurangnya SDM petugas pelayanan di kecamatan 2. Pelaksanaan tugas tidak optimal Karena rangkap jabatan 3. Kegiatan yang dilaksanakan belum ada Juknis, Juklak 4. standar pelayanan publik belum memenuhi standar pelayanan 5. Tidak memadainya Fasilitas penunjang

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			kantor
		Penyusundan dan Penetapan APBDesa tidak tepat waktu	1. Keterbatasan SDM aparatur pemerintahan desa 2. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan desa tentang kebijakan pemerintah kabupaten 3. Kurang sosialisasi perda/Perdes kepada masyarakat 4. Terbatasnya anggaran kecamatan dalam melakukan pengawasan

Berdasarkan tabel 2.6 diatas permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah belum optimalnya kualitas pelayanan publik. Kondisi ini terlihat dari masih kurang maksimalnya pelayanan masyarakat di kecamatan. Beberapa faktor mendasar yang menjadi akar permasalahan antara lain kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang bertugas dalam pelayanan, sehingga beban kerja tidak seimbang dengan jumlah personel yang tersedia. Selain itu, pelaksanaan tugas yang tidak optimal akibat rangkap jabatan menyebabkan efektivitas pelayanan menjadi rendah. Ketiadaan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) pada beberapa kegiatan juga berdampak pada kurang jelasnya arah pelaksanaan program. Di sisi lain, standar pelayanan publik yang diterapkan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku, serta fasilitas penunjang kantor yang tidak memadai turut memperburuk kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, permasalahan dalam penyusunan dan penetapan APBDesa yang tidak tepat waktu juga menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian. Akar permasalahan ini bersumber dari keterbatasan SDM aparatur pemerintahan desa, yang menyebabkan proses administrasi dan pengelolaan anggaran desa berjalan lambat. Lemahnya pembinaan dan koordinasi antara aparatur kecamatan dan desa mengenai kebijakan pemerintah kabupaten turut memperparah kondisi ini. Di samping itu, kurangnya sosialisasi peraturan daerah (Perda) dan peraturan desa (Perdes) kepada masyarakat menimbulkan rendahnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Sementara itu, terbatasnya anggaran kecamatan dalam melakukan fungsi pengawasan menjadikan pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan keuangan desa tidak berjalan secara optimal. Secara keseluruhan, permasalahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem pelayanan publik, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi prioritas penting dalam upaya mewujudkan pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan gambaran permasalahan-permasalahan yang dikedepankan untuk diatasi dan berdampak luas. Suatu kondisi atau situasi yang menjadi isu strategis apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau menghilangkan peluang besar untuk meningkatnya pelayanan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Sebuah isu strategis dapat dilihat dari:

1. Apakah isu tersebut sedang menjadi perhatian.
2. Apakah isu tersebut mendesak.
3. Apakah isu tersebut sesuai dengan kebutuhan publik.
4. Apakah isu tersebut membantu kebutuhan publik.
5. Apakah isu tersebut sesuai dengan visi dan misi.
6. Apakah isu tersebut melibatkan stakeholder luas.
7. Apakah isu strategis tersebut aman dari dampak dari luar.

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas maupun kualitas;
3. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenang Kecamatan;
4. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (*shortcutting*);
5. Masih lemahnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut diatas maka isu strategis Kecamatan Pagai Utara dalam periode 2025-2029 adalah peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat, dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat Tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Isu Strategis Perangkat daerah Kecamatan Pagai Utara

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KHLS yang relevan dengan PD	Isu Dinasmis Yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Sumber Daya Alam Pertanian dan Perikanan	• Keterbatasan Sumber Daya manusia • Kurangnya Koordinasi • Keterlibatan Masyarakat yang Kurang	• Pembangunan Yang berkelanjutan • Perubahan Iklim • Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan Hidup • Indikator Tujuan Pembangunan Yang berkelanjutan	• Transformasi Birokrasi • Penyerapan anggaran • Koordinasi dan Pelaksanaan	• Pemanfaatan Teknologi Digital • Partisipasi Masyarakat • Inovasi dan Kreativitas	• Pengelolaan Sumber daya Alam • Pengembangan Ekonomi Regional • Pengelolaan Lingkungan • Kwalitas Pelayanan Publik	• Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik • Masih rendahnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel

Pada Tabel 2.7 tentang Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Pagai Utara,bahwa potensi utama wilayah ini terletak pada sumber daya alam di sektor pertanian dan perikanan. Namun, pemanfaatan potensi tersebut belum berjalan optimal akibat sejumlah permasalahan internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan potensi daerah belum memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

pembangunan ekonomi lokal..

Dari sisi isu global, Kecamatan Pagai Utara dihadapkan pada tantangan pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, serta keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagai wilayah yang memiliki potensi alam melimpah, kecamatan ini perlu mengelola sumber daya alam secara bijak agar tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan sejalan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), sehingga mampu menjawab kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

Sementara pada level nasional, isu strategis yang relevan meliputi transformasi birokrasi, penyerapan anggaran, serta koordinasi dan pelaksanaan program pembangunan. Kecamatan Pagai Utara perlu memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penerapan sistem administrasi yang efisien, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program agar penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Upaya reformasi birokrasi juga harus diarahkan pada peningkatan integritas dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks regional, muncul tantangan baru berupa pemanfaatan teknologi digital, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan inovasi dan kreativitas lokal. Pemanfaatan teknologi digital dapat mendukung efisiensi pelayanan publik dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan agar mereka dapat menjadi subjek aktif dalam pembangunan daerah, bukan sekadar objek penerima manfaat. Secara keseluruhan, isu strategis Kecamatan Pagai Utara mencakup beberapa aspek penting, yaitu pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengembangan ekonomi regional, pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, hingga saat ini kualitas pelayanan publik masih belum optimal, dan tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya inklusif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penerapan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Pagai Utara telah menetapkan tujuan, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Adapun tujuannya adalah: "*Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani".*

Tabel 3.1
Tujuan Renstra Kecamatan Pagai Utara Tahun 2025-2029

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	81,25	81,24	81,47	82,06	82,35	82,64	

3.2. Sasaran

Sasaran Kecamatan Pagai Utara merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Antara lain :

1. Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di Kecamatan
2. Tantimas Tantibmas di Kecamatan
3. Meningkatnya Pengendalian layanan dimasyarakat
4. Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah

Tabel 3.2
Sasaran Renstra Kecamatan Pagai Utara Tahun 2025-2029

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
				2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan	Kecepatan waktu pelayanan	waktu	1 hari	1 hari	8 jam	8 jam	4 jam	2 jam	
	Persentase serapan APBDes di atas 90%	persen	75,56	77,86	80,45	82,48	84,21	85,00	
Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	indeks	77,45	78,12	80,45	81,02	81,28	81,65	
Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LAKIP	nilai	76	79	79,5	79,6	79,7	79,8	
	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah inovasi	1 inovasi	2 inovasi	3 inovasi	3 inovasi	4 inovasi	4 inovasi	
	Capaian kinerja perangkat daerah	persen	75	80	82	83	85	86	

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pagai Utara Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	*Baseline* 2025	Target Tahun					Ket
						2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani		Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	81,25	81,24	81,47	82,06	82,35	82,64	
		Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan	Kecepatan waktu pelayanan	waktu	1 hari	1 hari	8 jam	8 jam	4 jam	2 jam	
			% serapan APBDes di atas 90%	persen	75,56	77,86	80,45	82,48	84,21	85,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	indeks	77,45	78,12	80,45	81,02	81,28	81,65	
		Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	nilai	76	79	79,5	79,6	79,7	79,8	
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah inovasi	1 inovasi	2 inovasi	3 inovasi	3 inovasi	4 inovasi	4 inovasi	
			Capaian kinerja perangkat daerah	persen	75	80	82	83	85	86	

3.3. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komperehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi berisi langkah-langkah dan program untuk mewujudkan visi dan misi.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Professional, Bersih, Akuntabel dan Melayani			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Pembinaan, Perlindungan dan Pengembangan Aparatur	
		2. Pemberian Penghargaan berbasis kinerja	
		3. Penempatan aparatur sesuai kualifikasi dan kompetensi	
	2. Meningkatnya Kapabilitas Pemerintah	1. Pengembangan kerangka kelembagaan pemerintah daerah	
		2. Peningkatan dan pengembangan kualitas sarana dan prasarana aparatur	
		3. Meningkatkan fungsi koordinasi lintas sektor dan kerjasama pemerintah daerah	
		4. Membangun SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	

3.4. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan–ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan,serta visi dan misi instansi pemerintah.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, kebijakan adalah arah/tindakan yang diamil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan. berikut disajikan kebijakan Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2029 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berikut tabel berisikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan :

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Pagai Utara Tahun 2025-2029

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Transformasi Tata Kelola	1. *Reward dan Punishment* 2. Penguatan Fungsi ASN 3. Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	1. Pembinaan, Perlindungan dan Pengembangan Aparatur 2. Pemberian Penghargaan berbasis Kinerja 3. Penempatan aparatur sesuai kualifikasi dan kompetensi	

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBD.

Program dimaksud hanya program lokalitas kewenangan Kecamatan Pagai Utara. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
d. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

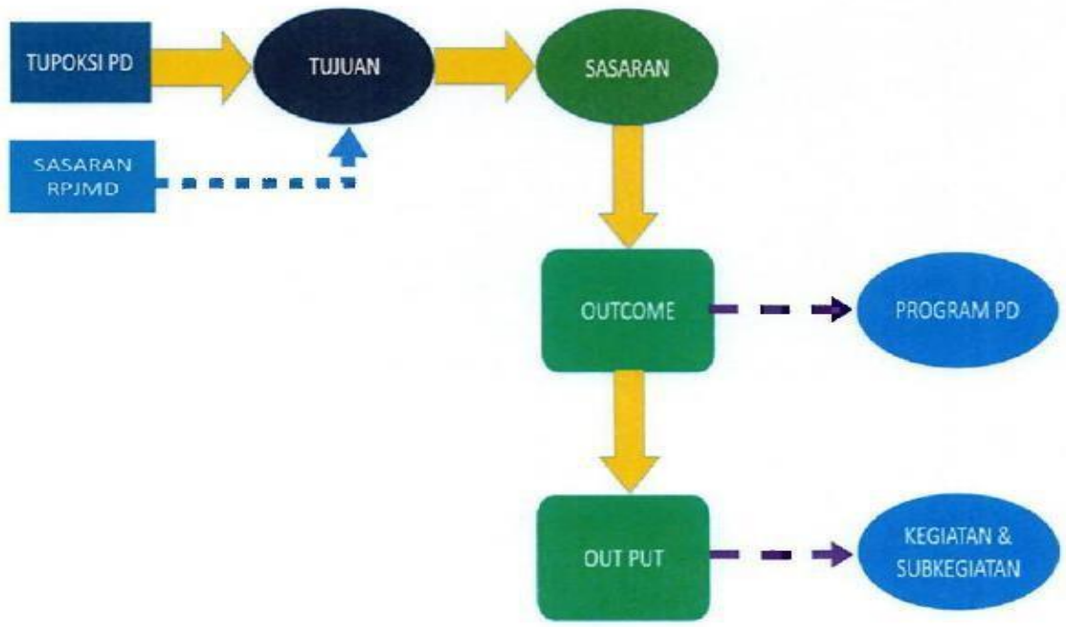
Adapun uraian kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Pagai Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Peunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
i. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
j. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
k. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
l. Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
m. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
n. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pagai Utara merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Pagai Utara juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pagai Utara serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan

Pagai Utara dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra



Kemudian penjabaran lebih lanjut terkait Rumusan Program kegiatan dan Sub Kegiatan di Kecamatan Pagai Utara akan dijelaskan pada Tabel 4.1 dibawah ini. Rencana Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur.

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan Renstra Kecamatan Pagai Utara Tahun 2025-2030. Rencana kinerja tahun 2026–2030 pada tabel 4.2 di bawah ini menunjukan arah pembangunan yang konsisten pada peningkatan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Seluruh program menitikberatkan pada pencapaian stabilitas kinerja (90–100%), peningkatan kualitas pelayanan, serta efisiensi pembiayaan melalui peningkatan pagu indikatif secara bertahap. Dari hasil analisis tabel, sebagian besar program mempertahankan target capaian kinerja stabil (90–100%), dengan peningkatan pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan operasional, inflasi, serta penguatan kelembagaan perangkat daerah.

Tabel 4.1
Rumusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Pagai Utara

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik				Persentase kepuasan masyarakat		
		Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan			Persentase peningkatan kepercayaan masyarakat		
			Dana yang dibutuhkan		Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Capaian Kinerja OPD		
					Persentase realisasi capaian indikator kinerja kunci OPD		
				Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				yang tersusun			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersusun	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Dana yang dibutuhkan		Persentase penyelesaian pelayanan perizinan dan non	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
					perizinan kewenangan kecamatan yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP		
				Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa			Persentase masyarakat desa yang diberdayakan		
			Dana yang dibutuhkan		Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
					Persentase pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana lingkup kelurahan yang diselesaikan tepat waktu		
					Persentase masyarakat/kelompok masyarakat lingkup kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan		
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan			Persentase peningkatan toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan		
			Dana yang dibutuhkan		Tingkat Kriminalitas di Kecamatan per 1.000 penduduk	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
				dikoordinasikan			
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
						Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Dana yang dibutuhkan		Jumlah Konflik Berlatar Belakang Sosial dan Keagamaan di Wilayah Kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelsetarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
						Indonesia	
						Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra Suku, Ummat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan desa			Persentase peningkatan kualitas pemerintahan desa		
			Dana yang dibutuhkan		Persentase anggaran desa yang mendukung program pemerintah	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

Tabel 4.2
Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Pagai Utara Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		100 per sen		100 per sen		100%		100%		100%		
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	0	100%	21.550.000	100%	21.550.000	100%	21.550.000	100%	21.550.000	100%	21.550.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	12 kali	21.550.000	12 kali	22.850.000	12 kali	24.550.000	12 kali	26.750.000	12 kali	28.350.000	
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas ASN Perangkat Daerah yang diterima	1.489.774.792	100%	1.638.752.271	100%	1.638.752.271	100%	1.638.752.271	100%	1.802.627.498	100%	1.802.627.498	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	1.360.174.792	16 orang	1.496.192.271	16 orang	1.496.192.271	16 orang	1.496.192.271	16 orang	1.645.811.498	16 orang	1.645.811.498	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129.600.000	31 orang	142.560.000	31 orang	142.560.000	31 orang	142.560.000	31 orang	156.816.000	31 orang	156.816.000	
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan	212.743.600	100%	221.403.600	100%	221.403.600	100%	221.403.600	100%	221.403.600	100%	221.403.600	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										
			2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tugas Perangkat Daerah												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang tersedia	0	7 paket	8.660.000	10 paket	8.800.000	10 paket	8.800.000	10 paket	8.800.000	10 paket	8.800.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	45.420.000	1 paket	45.420.000	1 paket	45.420.000	2 paket	45.420.000	2 paket	45.420.000	3 paket	45.420.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket dan bahan Logistik Kantor yang tersedia	53.133.600	7 paket	53.133.600	7 paket	53.133.600	7 paket	53.133.600	9 paket	53.133.600	8 paket	53.133.600	
Penyelenggaran Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi & Konsultasi SKPD	114.190.000	6 laporan	114.190.000	6 laporan	114.190.000	6 laporan	114.190.000	6 laporan	114.190.000	6 laporan	114.190.000	
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	185.000.000	100%	185.000.000	100%	185.000.000	100%	185.000.000	100%	185.000.000	100%	185.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik yang tersedia	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penerima Hoorarium Pelayanan Umum Kantor	173.000.000	10 orang	173.000.000	10 orang	173.000.000	10 orang	173.000.000	10 orang	173.000.000	10 orang	173.000.000	
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN	Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan	0	100%	11.000.000	100%	11.000.000		11.000.000	100%	11.000.000	100%	11.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										
			2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PEMERINTAHAN DAERAH	Tugas Perangkat Daerah												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah pemeliharaadan biaya pemeliharan dan perizinan kendaraan operasional yang disediakan	0	5 unit	11.000.000	5 unit	11.000.000	5 unit	11.000.000	5 unit	11.000.000	5 unit	11.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	0	100%	19.400.000		19.400.000		19.400.000		19.400.000		19.400.000	
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	0	3 desa	19.400.000	3 desa	19.400.000	3 desa	19.4000.000	3 desa	19.4000.000	3 desa	19.4000.000	
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	0	3 desa	19.400.000	3 desa	19.400.000	3 desa	19.400.000	3 desa	19.400.000	3 desa	19.400.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan ditingkat kecamatan dan desa	49.550.000	100%	63.180.000	100%	63.180.000	100%	63.180.000	100%	63.180.000	100%	63.180.000	
KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan	49.550.000	3 desa	63.180.000	3 desa	63.180.000	3 desa	63.180.000	3 desa	63.180.000	3 desa	63.180.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										
			2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	pembangunan di desa												
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	35.950.000	3 desa	42.000.000	3 desa	44.000.000	3 desa	46.000.000	3 desa	48.000.000	3 desa	50.000.000	
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	13.600.000	3 desa	24.000.000	3 desa	26.000.000	3 desa	28.500.000	3 desa	30.000.000	3 desa	32.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelesaian konflik diwilayah kecamatan yang ditangani/ diselasaikan	0	100%	109.365.000	100%	109.365.000	100%	109.365.000	100%	109.365.000	100%	109.365.000	
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	0	95%	109.365.000	95%	109.365.000	95%	109.365.000	95%	109.365.000	95%	109.365.000	
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang undangdasar	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang undangdasar negara Republik Indonesia	0	100 orang	95.749.000	100 orang	95.749.000	100 orang	95.749.000	100 orang	95.749.000	100 orang	95.749.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										
			2026		2027		2028		2029		2030		KET
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia												
Pelaksanaan tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	1 laporan	13.616.000	1 laporan	13.616.000	1 laporan	13.616.000	1 laporan	13.616.000	1 laporan	13.616.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan pembinaan dan pengawasan keuangan desa	77.520.000	100%	77.520.000	100%	77.520.000	100%	77.520.000	100%	77.520.000	100%	77.520.000	
FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan keuangan desa	77.520.000	3 desa	77.520.000	3 desa	77.520.000	3 desa	77.520.000	3 desa	77.520.000	3 desa	77.520.000	
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	32.400.000	3 desa	32.400.000	3 desa	32.400.000	3 desa	32.400.000	3 desa	32.400.000	3 desa	32.400.000	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan diWilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	45.120.000	3 desa	45.120.000	3 desa	45.120.000	3 desa	45.120.000	3 desa	45.120.000	3 desa	45.120.000	

Berdasarkan Tabel 4.2 tentang Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Pagai Utara Tahun 2025–2030, dapat disimpulkan bahwa arah pembangunan kecamatan diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Setiap program yang dirancang memiliki indikator kinerja dan target capaian yang jelas untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator utama yang digunakan adalah persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah, dengan target capaian 100% setiap tahun dari 2025 hingga 2030. Hal ini menunjukkan komitmen Kecamatan Pagai Utara untuk mencapai kesesuaian penuh antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan regulasi yang berlaku. Realisasi target tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas birokrasi, efisiensi penggunaan anggaran, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.

Selanjutnya, pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, target yang ingin dicapai adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 100% terhadap pelayanan kecamatan. Target ini selaras dengan visi peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan. Pelaksanaan kegiatan di tiga desa setiap tahunnya menjadi bentuk konkret dari upaya pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Dengan dukungan anggaran sebesar Rp19.400.000 per tahun, kecamatan berupaya meningkatkan fasilitas pelayanan dan memperbaiki mekanisme kerja aparatur agar pelayanan menjadi lebih optimal. Kemudian, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menargetkan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 100% dalam kegiatan pembangunan di setiap desa. Target ini diupayakan melalui kegiatan koordinasi pemberdayaan desa, fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan, serta pembinaan kelompok masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan warga dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, target capaian difokuskan pada penyelesaian konflik sosial sebesar 95–100% setiap tahun serta pelaksanaan tugas sesuai penugasan kepala daerah secara penuh (100%). Capaian ini memperlihatkan kesiapan kecamatan dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung pelaksanaan kebijakan strategis daerah. Sementara itu, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa memiliki target pembinaan dan pengawasan keuangan desa sebesar 100% setiap tahun. Hal ini bertujuan agar seluruh desa di wilayah Kecamatan Pagai Utara mampu mengelola keuangan dan asetnya dengan tertib, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara program, kegiatan, dan target dalam tabel tersebut menggambarkan bahwa Kecamatan Pagai Utara berkomitmen untuk membangun sistem pemerintahan yang efektif, transparan, dan partisipatif. Dengan konsistensi target capaian 95–100% pada seluruh indikator, kecamatan berupaya menciptakan pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan hingga tahun 2030.

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Pemerintah kecamatan Pagai Utara merupakan bagian dari tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, maka Bupati menjadikan Camat sebagai ujung tomak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagai urusan otonomi untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan.

A. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada kecamatan yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
   1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
   2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertian umum.
   3. Mengkoordinasikan penerapan dan penengakan ketentuan/peraturan dan perundang-undangan.
   4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
   5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan.
   6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

B. Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:
   1. Perizinan;
   2. Rekomendasi;
   3. Koordinasi;
   4. Pembinaan;
   5. Pengawasan;
   6. Fasilitasi;
   7. Penetapan;
   8. Penyelenggaraan.

C. Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, adalah sebagai berikut:
   1. Aspek perizinan, terdiri dari:
      a. Memfasilitasi persyaratan dan tata cara pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IM), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Industri;
      b. Membentuk Tim Komisi Kecamatan khusus untuk membuat rekomendasi perizinan ke instansi pengelola perizinan.
   2. Aspek rekomendasi, terdiri dari:
      a) Pemberian rekomendasi izin keramaian;
      b) Pemberian rekomendasi izin gangguan;
      c) Pemberian rekomendasi pendirian / perubahan bentuk / perubahan peruntukan / penamahan / merubuhkan bangunan;
      d) Pemberian rekomendasi surat keterangan pindah penduduk antar Kecamatan dalam Daerah
      e) Pemberian rekomendasi surat keterangan pindah penduduk keluar Daerah;
      f) Pemberian rekomendasi surat keterangan untuk pengurusan akta catatan sipil dan kependudukan;
      g) Memberikan rekomendasi layak lingkungan bagi usaha

atau kegiatan dalam daerah;
h) Memberikan rekomendasi untuk pengurusan pengelolaan seluruh jenis bahan galian pasir andesik, tanah urug, tanah liat dan batu kapur;
i) Memberikan rekomendasi untuk usaha jasa kepariwisataan;
j) Memberikan rekomendasi mutasi tenaga kependudukan;
k) Memberikan rekomendasi izin pendirian perusahaann, bengkel umum untuk kendaraan bermotor.

3. Aspek koordinasi, terdiri dari:
a) Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan di wilayah kerja dengan instansi terkait;
b) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan PHS di wilayah kerja;
c) Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan diidang pendidikan di wilayah kerja;
d) Mengkoordinasikan keamanan dan ketertian masyarakat dan sistem keamanan lingkungan di tingkat kecamatan;
e) Melibatkan pejabat dinas daerah/lembaga teknis daerah dan UMD dalam rapat koordinasi tingkat kecamatan;
f) Membantu penyelesaian permasalahan tanah ulayat;
g) Menyusun rencana bangunan dan fasilitas pelayanan umum.

4. Aspek pembinaan, terdiri dari:
1) Pembinaan non teknis usaha kesehatan di wilayah kerja;
2) Pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan;
3) Pembianaan non teknis organisasi perempuan di tingkat kecamatan;
4) Pembinaan lemaga sosial kemasyarakatan yang ada dikecamatan;
5) Peminaan terhadap kelompok organisasi kemasyarakatan;
6) Pembinaan terhadap organisasi keagamaan yang ada dikecamatan;
7) Pembinaan pemuda dan olahraga;
8) Pembinaan adat istiadat dan sosial budaya;
9) Penerbitan izin melakukan usaha dan kegiatan yang berdampak lingkungan;
10) Pembinaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan desa siaga.

5. Aspek pengawasan, terdiri dari:
a) Pengawasan pelaksanaan izin gangguan sesuai dengan aturan;
b) Pengawasan fasilitas pelayanan umum lapangan, taman, pemakaman umum dan lainnya;
c) Pengawasan terhadap pemanfaatan tanah milik daerah (fasilitas umum);
d) Pengawasan gangguan dan pemanfaatan ruang;
e) Pengaturan, pengawasan dan pelaksanaan mutasi penduduk (datang dan pergi);
f) Pengawasan lokasi penempatan tiang-tiang listrik, telepon dan lainnya;
g) Pengawasan usaha jasa pariwisata sesuai dengan aturan;
h) Pengawasandan pengendalian penyakit masyarakat sesuai dengan aturan;
i) Pengendalian pendirian organisasi sosial sesuai dengan

aturan;
j) Pengawasan dan pengendalian pengumpulan sumbangan sosial sesuai dengan dengan aturan;
k) Pengawasan rambu-rambu lalu lintas;
l) Pengawasan pendistribusian benih/bibit, penggunaan pupuk, pestisida, pakan ternak dan ikan serta alat sinkronisasi tanaman sesuai aturan;
m) Pengawasan peredaran kaset vcd/dvd porno;
n) Pengawasan penertiban usaha rental sesuai dengan aturan;
o) Pengawasan operasional usaha play station sesuai dengan aturan;
p) Pengawasan penertiban pemasangan iklan/reklame sesuai dengan aturan yang berlaku;
q) Pengawasan pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai dengan aturan yang berlaku.

6. Aspek fasilitasi, terdiri dari:
   a) Memfasilitasi pembebasan tanah untuk prasarana pemerintahan daerah dan /atau kepentingan umum;
   b) Memfasilitasi perluasan kerja melalui program padat karya teknologi tepat guna dan usaha mandiri;
   c) Memfasilitasi pelayanan, rehailitasi, bantuan sosial, perlindungan sosial, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
7. Aspek penetapan yaitu : menetapkan hasil pemilihan dan pengukuhan pengurus LPMDesa.
8. Aspek penyelenggaraan, terdiri dari:
   a) Pendataan bangunan;
   b) Pelaksanaan penomoran bangunan;
   c) Pelaksanaan pendispensasian pencatatan perkawinan yang kurang dari sepuluh hari dari pendaftaran;
   d) Pendaftaran Akta Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat pindah;
   e) Memverifikasi dokumen pendaftaran dari masyarakat;
   f) Perekapan data kependudukan masyarakat guna mendapatkan nomor induk kependudukan dan memperoleh KTP;
   g) Pengaturan dan pengawasan serta pelaksanaan mutasi penduduk;
   h) Penyebarluasan informasi pasar kerja;
   i) Pelaksanaan temu karya kecamatan;
   j) Pelaksanaan pendataan terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
   k) Pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, perjuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan dan memfasilitasi kegiatan terseut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Camat wajib memina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lemaga kemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan meliputi :

1. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
2. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.
3. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
4. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa.

5. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa.
7. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
8. Memfasilitasi pelaksanaan tugas fungsi, dan kewajiban lemaga kemasyarakatan.
9. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
10. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
11. Memfasilitasi pelaksanaan pemerdayaan masyarakat desa.
12. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga.
13. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan.
14. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Dalam upaya memberdayakan kecamatan dan dalam rangka percepatan otomi daerah, maka dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, maka dapat dijelaskan bahwa tugas Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa, meliputi;

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa ditingkat kecamatan.
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Kinerja Target kinerja pencapaian tujuan sasaran Renstra OPD melalui Indikator Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka Indikator kinerja Kecamatan Pagai Utara selama 5 tahun ke depan (2025-2029) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	81,25	81,24	81,47	82,06	82,35	82,64	
2	Kecepatan waktu pelayanan	waktu	1 hari	1 hari	8 jam	8 jam	4 jam	2 jam	
3	% serapan	persen	75,56	77,86	80,45	82,48	84,21	85,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	APBDes di atas 90%								
4	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	indeks	77,45	78,12	80,45	81,02	81,28	81,65	
5	Nilai LAKIP	Nilai	76	79	79,5	79,6	79,7	79,8	
6	Jmlh Inovsi yang diterapkan	Jumlh Inovasi	1	2	3	3	4	4	
7	Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	75	80	82	83	85	86	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Pagai Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	persen	68	68	68	68	68	68	
3	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu	persen	75	80	82	83	85	90	
5	Persentase serapan APBDes diatas 90 persen	persen	75	80	82	83	85	90	

BAB V
PENUTUP

Renstra ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Pagai Utara yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para Pemangku Kepentingan "*stakeholders*", baik secara langsung pada saat dialog atau tanya jawab maupun secara tak langsung melalui pemberitaan massa media. Melalui proses yang sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkannya. Di samping itu, Renstra Kecamatan Pagai Utara Tahun 2025-2029 ini juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana kerja (RENJA) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LAKIP nantinya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya.

Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat memawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2025-2029.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PAGAI SELATAN
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PAGAI SELATAN
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pagai Selatan 6
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pagai Selatan..... 16

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 22
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025–2029 22
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025–2029 22
3.3 Strategi Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025–2029 24
3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025–2029 25

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 28
4.1 Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan 28
4.2 Uraian Kegiatan 38
4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif 38
4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah..... 39
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pagai Selatan 40
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 41

BAB V PENUTUP 43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Desa di Kecamatan Pagai Selatan 6
Tabel 2.2 Jumlah Dusun Tiap-Tiap Desa 6
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai di Lingkungan Kecamatan Pagai Selatan Oktober 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian..... 10
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Eselon Oktober 2025 10
Tabel 2.5 Komposisi PNS berdasarkan kualifikasi Pendidikan Oktober 2025 11
Tabel 2.6 Komposisi PNS Berdasarkan Kualifikasi Pangkat/Golongan Oktober 2025 11
Tabel 2.7 Komposisi PNS berdasarkan Kualifikasi Diklat PIM Oktober 2025 12
Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Kecamatan Pagai Selatan Oktober 2025 12
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2020-2024 14
Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pagai Selatan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta factor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 19
Tabel 2.11 Isu Strategis Kecamatan Pagai Selatan 20
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2030 23
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029 25
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pagai Selatan 26
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 30
Tabel 4.2 Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra Kecamatan Pagai Selatan 31
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 39
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama 41
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pagai Selatan 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Renja serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Masa jabatan Bupati terpilih dimulai pada tahun 2025-2029, oleh karena itu penyusunan Renstra tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai periode 2025-2029 dan dilakukan secara bersamaan waktunya dengan proses penyusunan RPJMD dan RKPD.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, verifikasi dan penetapan Renstra Perangkat Daerah. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra, kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra kegiatan yang dilakukan: tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah;
c. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah

Sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Pagai Selatan 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2029 dan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, landasan hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Provinsi Sumatera Barat Nomor 225);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, terdapat peraturan lain yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029 yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Pagai Selatan dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam pelaksanaan tugas untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan di Kecamatan Pagai Selatan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025-2029 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun secara eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan di Kecamatan Pagai Selatan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Pagai Selatan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pada Kecamatan Pagai Selatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai landasan operasional dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten

Kepulauan Mentawai sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan Pagai Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
3. Sebagai bahan rujukan untuk menilai kinerja Kecamatan Pagai Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Pagai Selatan disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
   Latar Belakang memuat definisi dan nilai strategis Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029, memuat beberapa regulasi penyusunan dan pendukung penyusunan Renstra Kecamatan Pagai Selatan, memuat peran Kecamatan Pagai Selatan dalam RPJMD, menjelaskan Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Pagai Selatan, dan menampilkan hubungan dokumen Renstra dengan RPJMD, RKPD dan Renja Kecamatan Pagai Selatan
2. Dasar Hukum Penyusunan
   Dasar Hukum Penyusunan memuat beberapa regulasi yang menjadi dasar penyusunan Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029
3. Maksud dan Tujuan
   Maksud dan Tujuan menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029
4. Sistematika Penulisan
   Sistematika Penulisan menjelaskan sistematika penulisan, berisikan uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PAGAI SELATAN
1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Pagai Selatan
2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pagai Selatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1. Tujuan Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029
3. Strategi Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029
4. Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
1. Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pagai Selatan

6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PAGAI SELATAN

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Pagai Selatan

Kecamatan Pagai Selatan yang terletak di Desa Bulasat merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Pagai Utara-Selatan pada tahun 2008. Kecamatan Pagai Selatan memiliki daerah/wilayah seluas 851,28 KM^2 yang terbagi atas:

a. Luas Pemukiman 296 Ha
b. Luas Sawah 27 Ha
c. Kebun Campuran 6.436 Ha
d. Luas Perkebunan 2.300 Ha
e. Luas Hutan 62.623,91 Ha
f. Luas semak belukar 8.201 H

Kecamatan Pagai Selatan memiliki 4 (empat) Desa dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang tercantum dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Desa di Kecamatan Pagai Selatan

No	Nama Desa	Luas wilayah (KM^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Desa Bulasat	224	2.899
2	Desa Sinaka	265,87	2.781
3	Desa Makalo	233,78	2.600
4	Desa Malakopa	127,63	3.168
	Jumlah	851,28	11.438

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Pagai Selatan

Dilihat dari tabel 2.7 di atas maka Kecamatan Pagai Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.438 Jiwa. Keempat desa sebagaimana tercantum dalam tebel di atas terdiri dari beberapa dusun dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Jumlah Dusun Tiap-Tiap Desa

No	Nama Desa	Jumlah Dusun
1	Desa Bulasat	15
2	Desa Sinaka	14
3	Desa Makalo	6
4	Desa Malakopa	17

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Pagai Selatan

Kecamatan Pagai Selatan dapat ditempuh melalui jalan darat dan laut. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan perdesaan secara optimal guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Pagai Selatan

Kecamatan dalam struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu satuan unit kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pembangunan di wilayah Kecamatan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pembangunan di wilayah Kecamatan;
c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, ekonomi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Kecamatan Pagai Selatan terdiri:
1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas dalam merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Kecamatan;
b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Kecamatan;
c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup kecamatan;
d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Kecamatan;
e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Kecamatan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas sebagai berikut:

a) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Kecamatan;
b) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup Kecamatan;
c) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup Kecamatan;
d) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup Kecamatan;
e) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Kecamatan;
f) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Kecamatan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas sebagai berikut:

a) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup Kecamatan;
b) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Kecamatan;
c) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
d) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan lingkup Kecamatan;
e) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik Daerah lingkup Kecamatan; dan
f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi

Seksi pada Kecamatan terdiri dari:

a. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris dengan tugas sebagai berikut:

1) melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
2) melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
3) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan dan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
4) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
5) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam tingkat kecamatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
6) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;

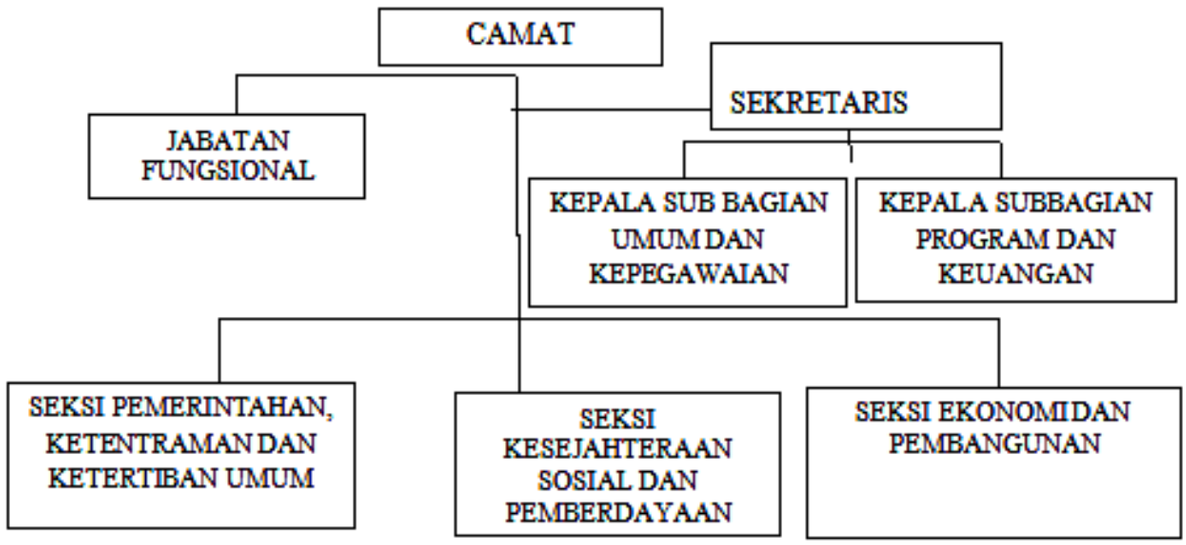
7) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
8) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dalam bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
9) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum; dan
10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

b. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris dengan tugas sebagai berikut:
1) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial di Kecamatan;
2) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
3) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
4) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
5) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
6) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan
7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris dengan tugas sebagai berikut:
1) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan di Kecamatan;
2) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan;
3) melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan;
4) melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa di bidang ekonomi dan pembangunan;
5) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan;
6) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan; dan

7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pagai Selatan



2.1.2. Sumber Daya

A. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Pagai Selatan didukung dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran. Jumlah Pegawai yang ada di lingkungan Kecamatan Pagai Selatan sampai dengan tahun 2025 sebanyak 33 orang dengan komposisi PNS 14 orang yang terdiri dari PNS laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan 7 orang dan Pegawai Kontrak 19 orang yang terdiri dari Pegawai Kontrak Laki-laki sebanyak 11 orang dan perempuan 8 orang. Kondisi kepegawaian berdasarkan status kepegawaian digambarkan pada tebel 2.3 di bawah ini:

Tabel. 2.3
Komposisi Pegawai di Lingkungan Kecamatan Pagai Selatan Oktober 2025
Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	PNS	7	7	14
2.	Non PNS	11	8	19
3.	Total	18	15	33

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Pagai Selatan

Jumlah pegawai di Kecamatan Pagai Selatan yang menduduki jabatan eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, sedangkan jumlah pegawai yang menduduki jabatan eselon IV sebanyak 5 orang yaitu Kepala Seksi 3 orang dan Kepala Sub Bagian 2 orang. Komposisi jumlah pegawai Kecamatan Pagai Selatan berdasarkan jabatan eselon digambarkan pada tebel 2.4 di bawah ini:

Tabel. 2.4
Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Eselon Oktober 2025

Nama	Eselon			
	II	III	IV	Jumlah
Camat		1	-	1
Sekretaris Kecamatan	-	1	-	1
Kepala Seksi	-	-	3	3
Kepala Sub Bagian	-	-	2	2

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Pagai Selatan

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, PNS di Kecamatan Pagai Selatan yang mempunyai kualifikasi pendidikan Magister (S2) hanya 1 orang laki-laki, sementara yang mempunyai kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 7 orang terdiri dari laki-laki 4 orang dan perempuan 3 orang. Kemudian pegawai yang mempunyai kualifikasi pendidikan Sarjana Muda (D3) sebanyak 1 orang perempuan dan pegawai yang mempunyai kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 5 orang terdiri dari laki-laki 2 orang dan perempuan 3 orang. Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kecamatan Pagai Selatan berdasarkan kualifikasi pendidikan tergambar pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel. 2.5
Komposisi PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Oktober 2025

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister (S2)	1	-	1
2.	Sarjana (S1)	4	3	7
3.	Sarjana Muda /D3	-	1	1
4.	SLTA	2	3	5
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	-	-	-
Total		7	7	14

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Pagai Selatan

Dilihat dari tabel di atas maka kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Pagai Selatan secara kuantitatif belum sesuai dengan yang diharapkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan.

Berdasarkan kualifikasi pangkat/golongan, jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Pagai Selatan yang memiliki pangkat Pengatur Muda Tk.I/II.b sebanyak 1 orang, pegawai yang memiliki pangkat Pengatur/II.d sebanyak 3 orang, pegawai yang memiliki pangkat Penata Muda/III.a sebanyak 1 orang, pegawai yang memiliki pangkat Penata Muda Tk.I/III.b sebanyak 4 orang, pegawai yang memiliki pangkat Penata/III.c sebanyak 2 orang, dan pegawai yang memiliki pangkat Penata Tk.I/III.d sebanyak 3 orang. Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Pagai Selatan berdasarkan kualifikasi pangkat/golongan ruang dapat dilihat dalam tabel 2.6 berikut ini:

Tabel. 2.6
Komposisi PNS Berdasarkan Kualifikasi Pangkat/Golongan Oktober 2025

No	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina/IV.a	-	-	-
2.	Penata Tk.I/III.d	2	1	3
3.	Penata/III.c	1	1	2
4.	Penata Muda Tk.I/III.b	2	2	4
5.	Penata Muda/III.a	-	1	1
6.	Pengatur Tk.I/II.d	1	2	3
7.	Pengatur/II.c	-	-	-
8.	Pengatur Muda Tk.I/II.b	1	-	1
9.	Pengatur Muda/II.a	-	-	-
10.	Juru Tk.I/I.d	-	-	-
11.	Juru/I.c	-	-	-
12.	Juru Muda Tk.I/I.b	-	-	-
13.	Juru Muda/I.a	-	-	-
	Total	7	7	14

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Pagai Selatan

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Pagai Selatan berdasarkan kualifikasi Pendidikan dan Pelatihan PIM tergambar dalam tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel. 2.7
Komposisi PNS berdasarkan Kualifikasi Diklat PIM Oktober 2025

No	Pendidikan Diklat	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	PIM II	-	-	-
2.	PIM III	-	-	-
3.	PIM IV	1	-	1
Total		1	-	1

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Pagai Selatan

Dilihat pada tabel diatas, hanya 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Pagai Selatan yang sudah mengikuti Diklat PIM IV, sedangkan sebanyak 6 (enam) orang pejabat di Kecamatan Pagai Selatan belum mengikuti Diklat PIM sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa masih sangat kurang pejabat yang mengikuti Diklat PIM di Kecamatan Pagai Selatan.

B. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana yang secara langsung yang ada saat ini di Kecamatan Pagai Selatan berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi. Kecamatan Pagai Selatan meliputi ruang dan peralatan kerja serta transpotasi darat dan laut. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai, namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja secara lengkap. Sarana dan prasaranan saat ini yang dimiliki oleh Kecamatan Pagai Selatan dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut ini:

Tabel. 2.8
Sarana dan Prasarana Kecamatan Pagai Selatan
Oktober 2025

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
A	Bangunan			
1	Gedung Kantor	1	Unit	Baik
2	Aula	1	Unit	Baik
3	Rumah Dinas Camat	1	Unit	Baik
4	Rumah Dinas Pegawai	1	kopel	Baik
B	Kendaraan			
1	Roda Empat	1	unit	Rusak
2	Roda tiga / Viar	2	unit	Rusak
3	Roda 2	11	unit	4 Baik, 7 Rusak
C	Peralatan/ Perlengkapan			
1	Komputer PC	9	Unit	2 Kurang Baik, 7 Rusak
2	Laptop	10	Unit	5 Rusak, 3 Baik, 2 Kurang Baik
3	Printer	11	Buah	16 Rusak, 4 Baik
4	Mesin Ketik	4	Buah	Rusak
5	Meja ½ biro	37	Buah	Baik
6	Meja Rapat	6	Buah	Baik
7	Meja 1 biro	7	Buah	Baik
8	Kursi Eselon III	4	Buah	Baik
9	Kursi Eselon IV	8	Buah	Baik
10	Kursi rapat	18	Buah	Baik
11	Kursi tamu	2	Set	Kurang Baik
12	Kursi kerja staf	18	Buah	Rusak
13	Lemari kayu	29	Buah	Baik

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
14	Filling kabinet	2	Buah	Baik
15	Papan pengumuman	3	Buah	2 Rusak, 1 Baik (Plang)
16	Sound system	1	Unit	Rusak
17	Kamera	3	Unit	Rusak
18	Multi Media Proyektor	1	Unit	Rusak
19	Mesin Boat	10	Unit	8 Rusak, 2 Baik
20	Perahu	6	Unit	5 Rusak, 1 Baik
21	Generating Set	5	Unit	4 Rusak, 1 Baik
22	Mesin potong rumput	26	Unit	Rusak
23	Brankas	1	Unit	Baik
24	Scanner	2	Unit	1 Rusak, 1 Baik

Sumber data : Sekretariat Kecamatan Pagai Selatan

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagai Selatan

Hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir Kecamatan Pagai Selatan dari tahun 2020-2024 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	100	100	100	100	100
2	Penetapan APBDesa Tepat waktu	100	100	100	100	100	100	80	90	90	90	95	80	90	90	90	95
3	Serapan APBDesa diatas 90 persen	100	100	100	100	100	100	80	90	90	95	101,32	90	90	90	95	95
4	Penanganan Kasus kriminal dikecamatan yang tertangani	100	100	100	100	100	100	80	80	90	90	90	90	90	90	90	90
5	Aduan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	80	80	80	90	90	80	80	90	90	90
6	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B	-	-	BB	BB	B	B	B	BB	BB	B
7	Jumlah Inovasi yang diterapkan	1				1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
8	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	90,93	100	100	99,45	98,77	90,93	100	100	99,45	98,77

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya, tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pagai Selatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Kinerja Kecamatan Pagai Selatan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Pagai Selatan setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat tidak mencukupi/ terpenuhi, disebabkan karena pelayanan kepada publik yang terus bertambah.
   b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Pagai Selatan setiap tahunnya mengalami penurunan karena banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat ditambah lagi dengan pelayanan listrik dari PLN belum maksimal.

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Kinerja pelayanan Kecamatan Pagai Selatan di Bidang Pemerintahan antara lain:

   a. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari.
   b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
   c. Pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa.
   d. Meningkatnya pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
   e. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa.
   f. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

3. Pelayanan di Bidang Pembangunan
   a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
   b. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
   c. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
   d. Monitoring dan fasilitasi penerbitan izin – izin yang dibutuhkan masyarakat;
   e. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN”. PATEN merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Pagai Selatan

Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Pagai Selatan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa di Kecamatan Pagai Selatan;
2. Masyarakat Kecamatan Pagai Selatan; dan
3. Lembaga-lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Pagai Selatan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pagai Selatan

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pagai Selatan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Pagai Selatan yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) hal yang menjadi permasalahan pelayanan Kecamatan Pagai Selatan, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Pagai Selatan antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik
2. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja
3. Belum optimalnya opini keuangan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di Kecamatan Pagai Selatan dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi;
3. Belum optimalnya realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil musrenbang kecamatan;
4. Belum optimalnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
5. Rendahnya swadaya murni masyarakat;
6. Belum optimalnya perencanaan strategis kecamatan;
7. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
8. Pelaksanaan program dan kegiatan belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dalam pelayanan kecamatan, sebagai berikut:

1. Belum adanya Gedung Kantor Kecamatan Pagai Selatan, Aula Kecamatan Kecamatan Pagai Selatan, Rumah Dinas Kecamatan Pagai Selatan di Bulasat, pusat Kecamatan Pagai Selatan saat ini, beserta kelengkapan mobiler, peralatan dan mesin lainnya, dan kendaraan roda empat yang memadai;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Kecamatan Pagai Selatan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan; dan
4. Belum optimalnya pelaporan program dan kegiatan Kecamatan Pagai Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Pagai Selatan sebagai Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang memiliki tugas pokok dan fungsi organisasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan

Mentawai adalah faktor internal dan eksternal. Mmasalah internal yang mempengaruhi Pemerintahan Kecamatan Pagai Selatan antara lain:

1. Jumlah dan kapasitas SDM aparatur belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap Tupoksi sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja/seksi belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;
4. Pola pembinaan aparatur belum terorientasikan pada peningkatan kerja.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Pagai Selatan adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat;
2. Bervasiasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat Kecamatan Pagai Selatan;
3. Masih adanya aparatur pemerintah dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
4. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintah.

2.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Pagai Selatan dalam kurun waktu 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Pagai Selatan (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang makin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Kecamatan Pagai Selatan.

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent)* perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complain.* Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance.* Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayanan masyarakat. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparasi, manajemen pemerintah yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan afektivitas dan efesiensi serta ada

upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Pagai Selatan dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kecamatan, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara pelayanan *(public service reform)* dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik *(good governance)* diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Desa, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan dan Desa, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan masyarakat umum sebagai *stakeholder,* LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder.* Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efesiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system,* perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Aset di lingkungan Kecamatan Pagai Selatan

Pengelolaan Keuangan dan barang di Kecamatan Pagai Selatan merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang menjadi sesuatu hal yang sangat strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset Kecamatan Pagai Selatan lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management y*ang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang/aset Kecamatan Pagai Selatan yang lebih berorientasi kinerja *(Performance Budget)*, bukan pada kebijakan *(Policy Budget)*.

Sistem manajemen keuangan *(financial management system)* merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik *(public accountability)*.

Manajemen barang/aset Kecamatan Pagai Selatan meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset Kecamatan Pagai Selatan harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah:

a. Terwujudnya tertib adminstrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
b. Terciptanya efesiensi dan efektifitas penggunaan barang daerah;
c. Pengamanan barang daerah;
d. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Pagai Selatan dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Pagai Selatan yang ingin dicapai kurun waktu 5 tahun ke depan. Adapun faktor-faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pagai Selatan yang mempengaruhi masalah pelayanan antara lain:

1) Masih kurangnya fasilitas kerja dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
2) Belum stabilnya pelayanan PLN di wilayah Kecamatan Pagai Selatan sehingga berpengaruh terhadap pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam bentuk surat menyurat.

Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2015-2035, Kecamatan Pagai Selatan masuk dalam rencana pengembangan meliputi industri, pergudangan, pariwisata, peternakan dan pertanian. Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan pelayanan pada Kecamatan Pagai Selatan yang terkait dengan rencana tata ruang wilayah yang tercantum dalam tabel 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pagai Selatan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pusat Pemerintahan, Industri, pariwisata, pelayanan terminal khusus wisata, pertenakan dan pertanian.	Dalam hal pemberian layanan selama ini belum maksimal masih kurang sesuai dengan prosedur yang ada, namun dalam mendukung tercapainya rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ ditetapkan	Masih kurangnya koordinasi Perangkat Daerah terkait dengan Kecamatan	Terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik antar Perangkat Daerah

Analisis isu strategis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kecamatan sangat penting untuk melihat permasalahan yang mendesak harus ditangani dan berdampak luas bagi proses pembangunan daerah. Isu-isu strategis yang prioritas dan potensial akan berdampak pada perbaikan pelayanan Kecamatan dalam tahun rencana pembangunan:

1. Kurangnya sumber daya aparatur Kecamatan Pagai Selatan dalam hal memberikan pelayanan publik;
2. Kurangnya jumlah pegawai yang profesional sehingga di Kecamatan Pagai Selatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
3. Lemahnya kompetisi sumber daya aparatur kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur kurang;
4. Lambatnya peran fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat, Pemerintah Desa dan Kecamatan;
5. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah daerah;
6. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah;
7. Penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;
8. Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menyelenggarakan pelayanan publik harus benar-benar mampu memberikan pelayan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

Tabel 2.11
Isu Strategis Kecamatan Pagai Selatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Birokrasi Pemerintah di Lingkungan kecamatan Pagai Selatan (Pelayanan Publik)	a. Belum optimalnya peningkatan pelayanan publik b. akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	a. Pembangunan yang berkelanjutan b. Perubahan Iklim c. Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan Hidup d. Indikator tujuan pembangunan yang berkelanjutan	a. Transformasi Birokrasi b. Penyerapan anggaran c. Koordinasi dan Pelaksanaan	a. Pemanfaatan Teknologi Digital b. Partisipasi Masyarakat c. Inovasi dan Kreativitas	a. Pengelolaan Sumber daya Alam b. Pengembangan Ekonomi Regional c. Pengelolaan Lingkungan Kwalitas Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Pagai Selatan (Pelayanan Publik)
Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Kecamatan Pagai Selatan	Belum optimalnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kecamatan Pagai Selatan					Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Kecamatan Pagai Selatan
Organisasi dan Manajemen di	Belum optimalnya pembenahan seluruh unsur					Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Lingkungan Kecamatan Pagai Selatan	pemerintahan kecamatan dan desa dan penataan sistem penyelenggaraan layanan publik					
Keuangan dan Aset di Lingkungan Kecamatan Pagai Selatan	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset di Lingkungan Kecamatan Pagai Selatan					Pengelolaan Keuangan dan Aset di Lingkungan Kecamatan Pagai Selatan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN PAGAI SELATAN

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Kecamatan Pagai Selatan yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2025-2029 Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan tujuan dan sasaran tertuang dalam Rencana Pembagunan Daerah (Rencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja Pelayanan pada Kecamatan Pagai Selatan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Pagai Selatan dalam Rencana Pembangunan Daerah ini berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani. Langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pagai Selatan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
b. Meningkatkan sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
c. Meningkatkan profesionalisme aparatur sesuai dengan tuntutan pelayanan.
d. Meningkatkan dukungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
e. Meningkatkan koordinasi antar Instansi dan apparat yang berada di wilayah Kecamatan Pagai Selatan.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan tujuan strategis penyelenggaraan pemerintahan dan Kecamatan Pagai Selatan kurun waktu 2025-2029 diperlukan beberapa sasaran strategis yang dilakukan antara lain:

a. Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan.
b. Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan.
c. Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Pagai Selatan.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	*Baseline* 2024	Target Tahun					Ket
						2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani		Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	82,71	82,75	82,80	82,85	82,90	82,95	
		Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan	Kecepatan waktu pelayanan	waktu	1 hari	1 hari	8 jam	8 jam	4 jam	2 jam	
			% serapan APBDes di atas 90%	persen	101,32	101,40	101,45	101,50	101,55	101,60	
		Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	indeks	77,45	78,12	80,45	81,02	81,28	81,65	
		Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai LAKIP	skor	70,90	72,00	72,50	73,00	73,50	74,00	
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	
			Capaian kinerja perangkat daerah	persen	98,77	98,80	98,83	98,87	98,90	98,95	

3.3. Strategi Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029

Strategi Kecamatan Pagai Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pagai Selatan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Sasaran I : Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan.
   1) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
      a) Pelatihan dan workshop tentang tata kelola pemerintahan desa
      b) Pengembangan kompetensi aparatus desa
   2) Penguatan Sistem Informasi Desa
      a) Implementasi sistem informasi desa yang terintegrasi
      b) Pelatihan penggunaan teknologi informasi untuk aparatur desa
   3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat:
      a) Kegiatan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat
      b) Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan
   4) Pengawasan dan Evaluasi
      a) Implementasi sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan desa
      b) Pelaporan dan tindak lanjut hasil evaluasi
   5) Kerjasama dan Koordinasi
      a) Kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat
      b) Koordinasi dengan dinas terkait untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa
   6) Implementasi Sistem Pengaduan Masyarakat
      a) Pembentukan sistem pengaduan yang mudah diakses dan responsif
      b) Penanganan pengaduan yang cepat dan efektif
   7) Pengawasan dan Evaluasi Layanan
      a) Implementasi sistem pengawasan internal dan eksternal
      b) Evaluasi kualitas layanan secara berkala
   8) Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
      a) Pelatihan tentang pelayanan publik dan penanganan pengaduan
      b) Pengembangan kompetensi aparatur kecamatan dalam komunikasi dan penangannan konflik
   9) Transparansi dan Keterbukaan Informasi
      a) Penyediaan informasi layanan masyarakat yang mudah diakses
      b) Transparansi proses pengambilan keputusan dan kebijakan
   10) Partisipasi Masyarakat
      a) Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi layanan
      b) Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan

b. Sasaran II : Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan.
   1) Penguatan Sistem Perencanaan:
      a) Penyusunan rencana kerja tahunan yang terstruktur
      b) Implementasi sistem monitoring dan evaluasi perencanaan
   2) Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan:
      a) Pelatihan tentang penyusunan perencanaan dan pelaporan
      b) Pengembangan kompetensi aparatur kecamatan dalam menggunakan teknologi informasi
   3) Standardisasi Proses dan Format:
      a) Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan
      b) Penggunaan format pelaporan yang seragam dan terstandar
   4) Pengawasan dan Evaluasi:
      a) Implementasi sistem pengawasan internal dan eksternal

b) Evaluasi kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan secara berkala

5) Penggunaan Teknologi Informasi:
   a) Implementasi sistem informasi manajemen kecamatan
   b) Penggunaan aplikasi pelaporan online untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi

f. Sosialisasi dan Komunikasi:
   a) Melakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan kecamatan
   b) Komunikasi yang efektif dengan masyarakat melalui berbagai saluran

g. Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan:
   a) Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
   b) Mengumpulkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat

h. Penguatan Kelompok Masyarakat:
   a) Mendukung dan memperkuat kelompok masyarakat sipil
   b) Memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

i. Penggunaan Media dan Teknologi:
   a) Menggunakan media sosial dan teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
   b) Membuat informasi pembangunan lebih mudah diakses
   c) Transparansi proses pengambilan keputusan dan kebijakan

j. Evaluasi dan Tindak Lanjut:
   a) Mengevaluasi efektivitas partisipasi masyarakat
   b) Menindaklanjuti hasil evaluasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

Adapun pentahapan Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029 adalah seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan SDM dalam penguatan layanan dalam pemerintahan di kecamatan	Penguatan Infrastruktur digitalisasi pelayanan	Optimalisasi dalam penerapan digitalisasi	Meningkatkan kualitas pelayanan dengan penguatan jangkauan layanan digital	Penerapan transformasi digital dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik

3.4. Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pagai Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Pagai Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
   1) Penguatan kualitas sumber daya ekonomi melalui sinergi jejaring ekonomi yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
   2) Menguatkan kebijakan dan institusional yang mendorong kemudahan berusaha
   3) Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung perekonomian
   4) Mengembangkan sektor ekonomi dengan pemanfaatan sumber daya alam dan potensi lokal
b. Mewujudkan SDM yang Unggul, Berakhlak, dan Masyarakat Berbudaya Maju

1) Peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan perluasan perlindungan sosial
2) Pemenuhan tenaga pendidik sesuai standar kompetensi
3) Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran secara inklusif
4) Penguatan talenta digital yang berakhlak dan berbudaya

c. Mewujudkan Tata Kelola Kolaboratif, Berintegritas, dan Adaptif
1) Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan
3) Mengembangkan sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi

d. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan dan Resiliensi terhadap Bencana
1) Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
2) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengurangi risiko bencana
3) Mengembangkan sistem pengelolaan bencana yang efektif dan efisien

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pagai Selatan

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani	1. Digitalisasi Pelayanan dan PartisipasiPublik. 2. PeningkatanKapasitasdan BudayaKerjaAparatur. 3. Desain Pelayanan Berorientasi Pengguna (Citizen-Centric). 4. λInovasi Berkelanjutan dan Adaptabilitas. Penguatan Akuntabilitas danTransparansi	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima, adaptif, inovatif dan melayani 2. Peningkatan kualitas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) agar lebih cermat dan tepat waktu, sehingga RKPDesa dapat menjadi dasar yang kuat dan valid dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dengan RKPDesa yang baik, pembangunan desa dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, dan efisien 3. Penyelenggaraan Evaluasi kinerja pelaksanaan APBDesa laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara rutin dan transparan. 4. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 5. Proses pelayanan untuk memastikan efisiensi dan efektif 6. Peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan peningkatan efektivitas penggunaan dana desa 7. Peningkatan Forum koordinasi desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, seperti pelayanan administrasi kependudukan 8. Peningkatkan nilai LAKIP, menunjukkan akuntabilitas kinerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik 9. Peningkatan Pelayanan publik di kecamatan	

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
			dapat menjadi lebih efisien, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat 10. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia ASN Kecamatan 11. Menyediakan kerangka acuan untuk pengambilan keputusan dan tindakan	

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program Kegiatan dan Subkegiatan

Rencana Program yang akan dilaksanakan Kecamatan Pagai Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan tahun diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, yaitu terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 2025-2029 dengan sumber dana APBD.

Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Pagai Selatan secara terperinci disajikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagai Selatan.

Dalam mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   a) Evalusi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   a) Pengadaan Mebel;
   b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;;
   d) Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan;
   b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagai Selatan.

Dalam mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, dengan Sub Kegiatan:
   a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Dalam mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/ sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan:
   a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
   b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

D. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya urusan pemerintahan secara umum yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pagai Selatan. Dalam mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan:
   a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan, memfasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Pagai Selatan baik dari segi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan maupun perencanaan pembangunan. Dalam mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/ sub kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan Sub Kegiatan:
   a) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
   b) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Adapun Teknik merumuskan Program/Kegiatn/Subkegiatan Renstra Kecamatan Pagai Selatan tampak pada tabel 4.1. Sementara program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Kecamatan Pagai Selatan untuk periode tahun 2025-2029 disajikan pada tabel. 4.2 berikut ini.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Pagai Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani	Menurunnya tingkat kriminalitas	Kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		Meningkatnya kepuasan masyarakat	Kualitas layanan pemerintahan publik di kecamatan	Meningkatnya pengendalian layanan masyarakat	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Kualitas kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	Meningkatnya kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan	Jumlah Pendampingan yang dilaksanakan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Persentase serapan APBDes di atas 90 persen		

Tabel 4.2
Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan
Renstra Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
Meningkatnya kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	Persentase kepatuhan penuyusunan perencanaan dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	100%	100%	1.928.315.602	100%	1.883.951.304	100%	1.923.239.085	100%	1.950.847.646	100%	1.970.916.377	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	70.302.779	100%	60.000.000	100%	66.600.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	70.302.779	100%	60.000.000	100%	66.600.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelaksasanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	1.620.479.111	100%	1.620.479.111	100%	1.652.598.192	100%	1.752.375.453	100%	1.772.444.184	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat	100%	100%	1.520.479.111	100%	1.520.479.111	14 Orang/ Bulan	1.552.598.192	14 Orang/ Bulan	1.672.375.453	14 Orang/Bulan	1.856.336.753	Kecamatan Pagai Selatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	daerah												
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	Kecamatan Pagai Selatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan pelaksasanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	144.634.970	100%	140.257.693	100%	140.826.393	100%	120.257.693	100%	120.257.693	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Banguna Kantor	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	685.000	100%	685.000	100%	685.000	100%	685.000	100%	685.000	Kecamatan Pagai Selatan
PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	23.894.970	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	19.115.000	100%	18.632.693	100%	19.201.393	100%	18.632.693	100%	18.632.693	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100%	940.000	100%	940.000	100%	940.000	100%	940.000	100%	940.000	Kecamatan Pagai Selatan
Penyelenggaraan	Persentase	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	Kecama

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	peningkatan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah												tan Pagai Selatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	63.364.242	100%	35.000.000							
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Peningkatan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	63.364.242	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pagai Selatan
Pengadaan Mebel	Persentase Peningkatan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	-	-	100%	20.000.000	-	-	-	-		-	Kecamatan Pagai Selatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	-	-	100%	15.000.000	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pagai Selatan
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	-	-	-	-	100%	35.000.000	-	-	-	-	Kecamatan Pagai Selatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	13.320.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	
Penyediaan jasa Komunikasi,	Persentase Peningkatan dan	100%	100%	13.320.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	100%	12.000.000	Kecamatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah												Pagai Selatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	16.214.500	100%	16.214.500	100%	16.214.500	100%	16.214.500	100%	16.214.500	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	5.170.000	100%	5.170.000	100%	5.170.000	100%	5.170.000	100%	5.170.000	Kecamatan Pagai Selatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peraltan dan Mesin Lainnya	100%	100%	11.044.500	100%	11.044.500	100%	11.044.500	100%	11.044.500	100%	11.044.500	Kecamatan Pagai Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
Meningkatnya pengendalian layanan masyarakat	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	70.287.647	100%	68.670.556	100%	70.102.607	100%	71.108.947	100%	71.840.458	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	100%	70.287.647	100%	68.670.556	100%	70.102.607	100%	71.108.947	100%	71.840.458	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Dilaksanakan (rekam e-KTP)	100%	100%	70.287.647	100%	68.670.556	100%	70.102.607	100%	71.108.947	100%	71.840.458	Kecamatan Pagai Selatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													
Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam pembangunan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	65%	68%	66.531.677	68%	65.000.998	68%	66.356.524	68%	67.309.088	68%	68.001.509	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	65%	68%	66.531.677	68%	65.000.998	68%	66.356.524	68%	67.309.088	68%	68.001.509	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	65%	68%	36.531.677	68%	35.000.998	68%	36.356.524	68%	37.309.088	68%	38.001.509	Kecamatan Pagai Selatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	65%	68%	30.000.000	68%	30.000.000	68%	30.000.000	68%	30.000.000	68%	30.000.000	Kecamatan Pagai Selatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/diselesaikan	100%	100%	109.829.233	100%	104.144.403	100%	106.316.223	100%	107.842.418	100%	108.951.813	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	100%	109.829.233	100%	104.144.403	100%	106.316.223	100%	107.842.418	100%	108.951.813	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Persentase Konflik di Wilayah	100%	100%	75.000.000	100%	70.000.000	100%	73.000.000	100%	74.000.000	100%	75.000.000	Kecamatan Pagai

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan yang ditangani/diselesaikan												Selatan
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang ditangani/diselesaikan	100%	100%	34.829.233	100%	34.144.403	100%	33.316.223	100%	33.842.418	100%	33.951.813	Kecamatan Pagai Selatan
PROGRAM PEMBINAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				183.048.721		183.294.150		187.116.552		189.802.656		191.755.191	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	% Penetapan APBDes tepat waktu	75%	80%	91.524.361	82%	91.647.075	83%	93.558.276	85%	94.901.328	90%	95.877.995	
	% serapan APBDes di atas 90 persen	75%	80%	91.524.361	82%	91.647.075	83%	93.558.276	85%	94.901.328	90%	95.877.995	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	75%	80%	183.048.721	82%	183.294.150	83%	187.116.552	85%	189.802.656	90%	191.755.191	Kecamatan Pagai Selatan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		75%	80%	183.048.721	82%	163.294.150	83%	187.116.552	85%	129.802.656	90%	191.755.191	
Fasilitasi Pelaksanaan	Terlaksananya Pemeilihan	-	-	-	82%	20.000.000	-	-	3 desa	60.000.000	-	-	Kecamatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemilihan Kepala Desa	Kepala Desa												Pagai Selatan
				2.358.012.880		2.305.061.411		2.353.130.991		2.386.910.756		2.411.465.348	

4.2. Uraian Kegiatan

Ada 10 (sepuluh) Kegiatan Kecamatan Pagai Selatan seperti tampak pada Tabel 4.2 di atas, yaitu:

A. Kegiatan Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
D. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah;
E. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
G. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
H. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
I. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
J. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4.3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Ada 21 (dua puluh satu) Subkegiatan di Kecamatan Pagai Selatan, yaitu:

A. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
B. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
C. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
D. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
E. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
F. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
G. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
H. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
I. Subkegiatan Pengadaan Mebel;
J. Subkegiatan Pegadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
K. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
L. Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
M. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
N. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan;
O. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
P. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
Q. Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
R. Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
S. Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
T. Subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

U. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

Adapun Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif masing-masing Subkegiatan terlihat pada Tabel 4.2

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Adapun Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah diuraikan pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan perangkat daerah	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 1) Subkegiatan Pengadaan Mebel 2) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4) Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya e. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan 2) Subkegiatan Pemeliharaan	

			Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pengendalian layanan masyarakat	a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 1) Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1) Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2) Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 1) Subkegiatan Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1) Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2) Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pagai Selatan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit Perangkat Daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk dilaksanakan dalam wilayah Kecamatan.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Kecamatan yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penengakan ketentuan/peraturan dan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada tingkat Kecamatan;
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Selain itu pemerintah Kecamatan juga mempunyai peranan penting dalam hal:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;
2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa;
5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan;
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa di tingkat kecamatan kepada Bupati.

IKU Kecamatan Pagai Selatan dapat terlihat pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	TARGET TAHUN					KET
				2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	82,71	82,75	82,80	82,85	82,90	82,95	
2	Kecepatan waktu pelayanan	waktu	1 hari	1 hari	8 jam	8 jam	4 jam	2 jam	
3	% serapan APBDes di atas 90%	persen	101,32	101,40	101,45	101,50	101,55	101,60	
4	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	indeks	77,45	78,12	80,45	81,02	81,28	81,65	
5	Nilai LAKIP	skor	70,90	72,00	72,50	73,00	73,50	74,00	
6	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	
6	Capaian kinerja perangkat daerah	persen	98,77	98,80	98,83	98,87	98,90	98,95	

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 dapat terlihat pada IKK di dalam Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase aduan yang	persen	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	ditindaklanjuti								
2	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	persen	68	68	68	68	68	68	
3	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu	persen	75	80	82	83	85	90	
5	Persentase serapan APBDes diatas 90 persen	persen	75	80	82	83	85	90	

BAB V
PENUTUP

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Kecamatan Pagai Selatan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra yang disusun ini merupakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Pagai Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Penyusunan Renstra sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pagai Selatan Tahun 2025-2029 yang telah disusun ini diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra tahun 2025-2029 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan

Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SIKAKAP
TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i
Daftar Tabel..... ii
Daftar Gambar..... iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 3
1.3 Maksud dan Tujuan..... 5
1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Sikakap 7
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sikakap..... 11
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sikakap..... 13
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan..... 15
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah... 16
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 16
2.2.2 Isu Strategis..... 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.. 20
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 20
3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 22
3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... 23

BAB IV PROGRAM. KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 25
4.2 Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan..... 36

BAB V PENUTUP..... 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah dan Presentase Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat /Golongan 11
Tabel 2.2 Jumlah dan Prtesentase Pegawai Berdasarkan Esselon 12
Tabel 2.3 Jumlah dan Presentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 12
Tabel 2.4 Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Sikakap 13
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sikakap Tahun 2020 - 2024 14
Tabel 2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sikakap 16
Tabel 2.7 Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sikakap..... 18
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2030..... 21
Tabel 3.2 Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029..... 22
Tabel 3.3 Penahapan Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029 23
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sikakap..... 24
Tabel 4.1 Program Kecamatan Sikakap..... 25
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra 27
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 31
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama 37
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kecamatan Sikakap 12
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 telah menghasilkan pimpinan daerah, kepala dan wakil kepala daerah terpilih dan secara definitif dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Pelantikan kepala dan wakil kepala daerah menjadi momentum dimulainya penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar perwujudan pencapaian visi misi kepala daerah.

RPJMD merupakan dokumen strategis yang disusun sebagai pedoman dan manifestasi visi misi kepala daerah dalam jangka 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 juga sebagai fondasi pembangunan jangka panjang daerah pada periodesasi pertama pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2029, selain itu RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi jembatan pembangunan menuju Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat serta menuju Indonesia Emas 2045.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementrian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan dan menyelaraskan secara substansi pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai kewenangannya disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa di samping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quik Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transpran, respontif, efisien, efektif, akunatabel, partisipasif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 jangka waktu 5 (lima) tahun dan menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan daerah, dengan pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial.

Tahapan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 telah dimulai sejak tahun 2024 yaitu dengan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dan berlanjut pada tahun 2025 hingga pada penetapan RPJMD. Tahapan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Persiapan, antara lain :
   a. Pembentukan SK Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029;
   b. Orientasi mengenai Renstra;
   c. Penyusunan Agenda Tim Penyusun Renstra Tahun 2025-2029;
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD;

e. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029.

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah juga memperhatikan daya dukung lingkungan sebagai bentuk pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lanskap perencanaan pembangunan daerah memerlukan analisis yang kuat dalam memperhitungkan kemampuan daya dukung dan daya tampung wilayah sehingga mampu membawa pembangunan yang berkelanjutan melalui sebuah kajian lingkungan hidup yang sistematis dan terukur. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sebagaimana amanat Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 7 tahun 2018 bahwa penyusunan KLHS dalam RPJMD ini tidak hanya mengkaji dampak sebuah kegiatan, melainkan mengupayakan agar Kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang akan disusun dapat menjamin keberlanjutan pembangunan sehingga memastikan prospek pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai bentuk pembagian peran untuk pencapaian visi misi kepala daerah 5 (lima) tahun kedepan. Begitu juga, RPJMD ini dijadikan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan daerah.

Dokumen Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029 ini merupakan rancangan awal tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025–2029. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025–2029 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Sikakap disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan rancangan yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan dalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Sikakap dalam kurun waktu Tahun 2025-2029, maka dipandang sangat perlu menjelaskan tentang gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sikakap 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029 harus mengacu kepada Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, RPJMD Tahun 2025-2029 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahun ke depan, Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029;
3. Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sikakap.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Penyusunan Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undangn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undangn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Diubah dengan PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 225).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2018 mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018 Nomor 142).

Selain dengan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, beberapa peraturan dan dokumen strategis yang menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sikakap 2025- 2029 merupakan Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian, tujuan dan sasaran strategis atau kebijakan Umum serta tahapan program kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Sikakap, yang mendasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029, di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud :
1. Sebagai Dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sikakap.
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Sikakap.
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Sikakap yang transparan dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra adalah memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada dalam rangka melaksanakan kewenangan tata pemerintahan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025 - 2029 adalah:
1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang sejalan dengan tujuan yang telah ditentukan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama (5) lima tahun kedepan;

3. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus, dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra. Bab ini terdiri atas:

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SIKAKAP

Bab ini menggambarkan tentang gambaran umum tentang aspek dan pelayanan, permasalahan yang dihadapi dan isu strategis dalam menjalankan pelayanan dan pelaksanaan tugas urusan Kecamatan Sikakap. Bab ini terdiri atas:

2.1.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sikakap
2.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sikakap

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (2025-2026). Bab ini terdiri atas:

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029
3.3 Strategi Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029
3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Pada Bab memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan kenerja penyelenggaraan urusan Kecamatan Sikakap. Bab ini terdiri atas:

4.1 Uraian Program
4.2 Uraian Kegiatan
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif
4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangkat mendukung program prioritas Pembangunan daerah
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sipora Utara Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Pada Bab Penutup, disajikan upaya pengendalian dan evaluasi implementasi Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sikakap

Kecamatan Sikakap merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan. Kecamatan Sikakap dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Sikakap mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sikakap

Kecamatan Sikakap merupakan salah Satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan. Kecamatan Sikakap dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Sikakap mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat
   Sekretariat terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
2. Seksi
   Seksi terdiri dari:
   a. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   b. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
   c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sikakap berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:

A. Kecamatan

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas:

a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pembangunan di wilayah Kecamatan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pembangunan di wilayah Kecamatan;
c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas dalam merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Kecamatan;
b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Kecamatan;
c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup Kecamatan;
d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Kecamatan;
e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Kecamatan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Kecamatan;
b. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup Kecamatan;
c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup Kecamatan;
d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup Kecamatan;
e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penata organisasi dan tata laksana lingkup Kecamatan;
f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Kecamatan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup Kecamatan;
b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Kecamatan;
c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Kecamatan;
d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan lingkup Kecamatan;
e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik Daerah lingkup Kecamatan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
b. melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi upaya penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam tingkat Kecamatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja OPD yang ada di Kecamatan dalam bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

F. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial di Kecamatan;
b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di

tingkat Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat;
f. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

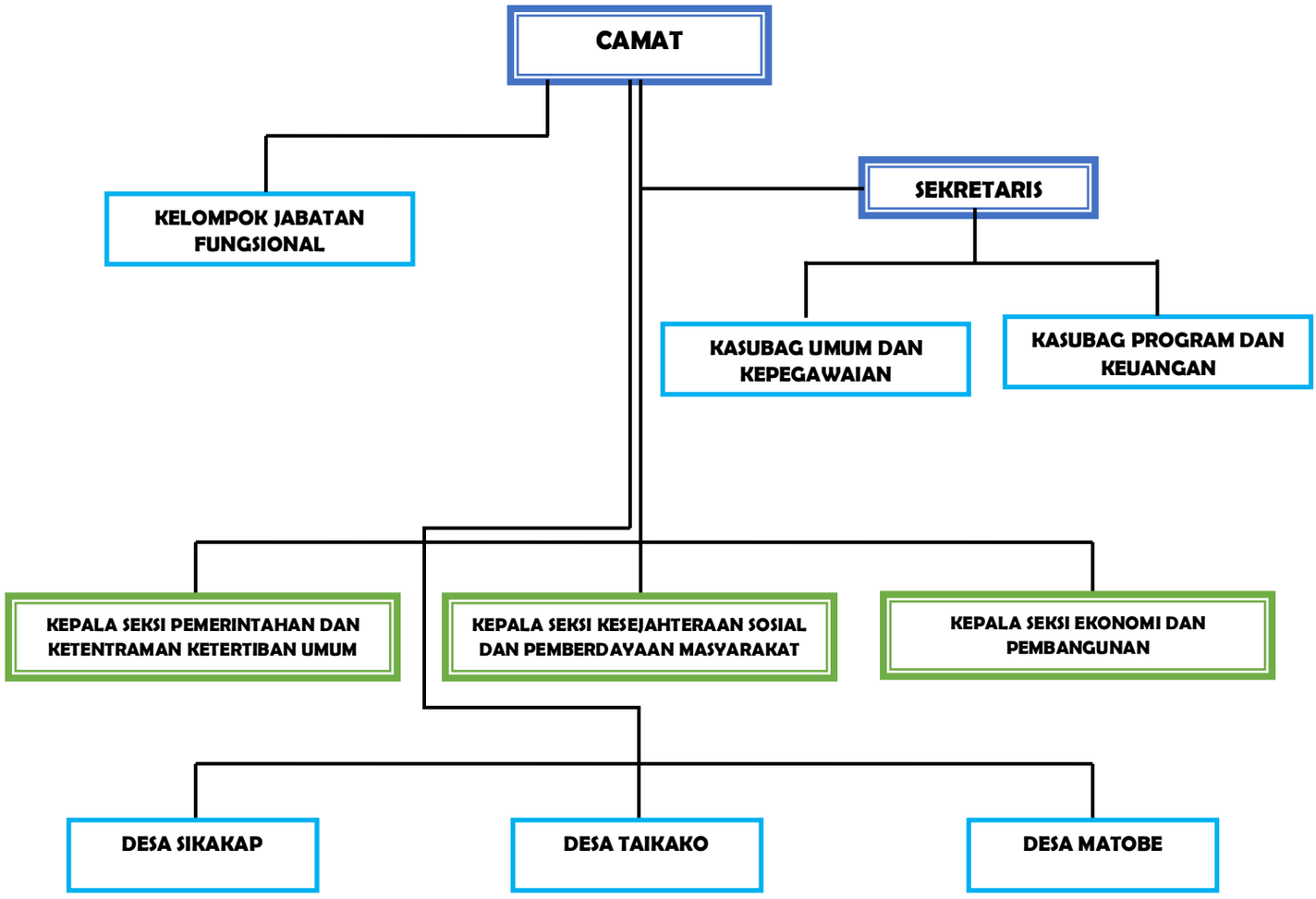
G. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas:
a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan ekonomi dan pembangunan di Kecamatan;
b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan;
c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan;
d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa di bidang ekonomi dan pembangunan;
e. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan;
f. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Struktur Organisasi Kecamatan Sikakap

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka susunan Organisasi Kecamatan dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini yang terdiri dari :
a. Camat
b. Sekretaris, membawahi :
    1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepagawaian
    2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentreman dan Ketertiban Umum
d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
e. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Sikakap



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sikakap

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/orgasisai. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, menusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Data SDM keadaan bulan Mei Tahun 2025, jumlah pegawai Kecamatan Sikakap adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Struktur pegawai berdasarkan pangkat/golongan ruang, eselon dan pendidikan dapat dijelaskan pada tabel 2.1, 2.2, dan tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah dan Persentase Pegawai Berdasarkan pangkat/golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Persentase	
		LK	PR		LK	PR
1.	Golongan II/a:					
	II/a	0	0	0	0%	0%
	II/b	1	0	1	5%	0%
	II/c	1	1	2	5%	5%
	II/d	1	1	2	5%	5%
2.	Golongan III:					
	III/a	0	3	3	0%	15%
	III/b	5	3	8	25%	15%
	III/c	4	1	5	20%	5%

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Persentase	
		LK	PR		LK	PR
	III/d	2	1	3	15%	5%
3.	Golongan IV:					
	IV/a	1	0	1	5%	0%
	IV/b	0	0	0	0%	0%
	IV/c	0	0	0	0%	0%
	IV/d	0	0	0	0%	0%
	IV/e	0	0	0	0%	0%
	TOTAL	15	10	25	60%	40%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec.Sikakap

Tabel 2.2
Jumlah dan Persentase Pegawai berdasarkan Esselon

No	ESSELONERING	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Persentase	
		LK	PR		LK	PR
1.	Esselon I/a					
	Esselon I/b	0	0	0	0%	0%
2.	Esselon II/a	0	0	0	0%	0%
	Esselon II/b	0	0	0	0%	0%
3.	Esselon III/a	0	1	1	0%	5%
	Esselon III/b	1	0	1	5%	0%
4.	Esselon IV/a	1	1	2	5%	5%
	Esselon IV/b	2	0	2	15%	0%
5.	Pelaksana	8	10	18	30%	40%
	Total	14	11	25	70%	29%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec.Sikakap

Tabel 2.3
Jumlah dan Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	STRATA PENDIDIKAN	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	Persentase	
		LK	PR		LK	PR
1.	SD/Sederajat	0	0	0	0	0
2.	SMP/Sederajat	0	0	0	0	0
3.	SMA/Sederajat	5	6	11	11%	29%
4.	Diploma III (D III)	0	0	0	0	0
5.	Strata I (S1)	5	5	10	25%	25%
6.	Strata II (S2)	1	0	1	10%	0
	Total	11	11	22	70%	29%

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec.Sikakap

Dari uraian dan klasifikasi pegawai di atas, kondisi aparatur yang berada di Kecamatan Sikakap diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. perlunya dilakukan Bimbingan Teknis (bimtek) pengayaan wawasan sumber daya manusia terkait penguasaan tugas pokok dan fungsi aparatur sipil negara di Kecamatan Sikakap;
2. meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dalam meningkatkan keterampilannya untuk dapat melayani masyarakat sesuai dengan bidang dan urusannya.
3. dalam era globalisasi dan tuntuan literasi dan perkembangan teknologi internet, diperlukan tenaga operator profesional yang menguasai internet, berdaya saing dan bisa menjawab tantangan beban kerja dan prestasi kerja.

Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang semakin kompleks, khususnya dikecamatan, perlu dilengkapi sarana penunjang beban kerja dan prestasi kerja ASN, sehingga target tujuan indek kepuasan masyarakat dapat dirasakan masyarakat umum maupun individual lingkup kecamatan sesuai

dengan motto ASN “ber AHKLAK” yang datang berkunjung maupun mengurus surat administrasi dan konsultasi.

Akan tetapi untuk menciptakan pelayanan prima dengan kondisi ruangan yang dilengkapi dengan Inventaris Barang dengan penuh suasana nyaman bagi masyarakat, sehingga masyarakat serta internal kantor akan tercipta suasana integral dan saling kerjasama dalam mewujudkan pelayanan prima. Adanya inventaris Komputer, Printer, Meja Kerja, Lemari Arsip, dan sarana mobileur lainnya sangat dibutuhan dan masih kurang, antara beban kerja dan prestasi tidak seimbang antara volume pekerjaan dengan dukungan sarana prasarana pekerjaan,sehingga taget capaian pelayanan prima tidak terpenuhi dengan baik. Oleh sebab itu, OPD Kecamatan harus menganggarkan belanja modal pemenuhan sarana pendukung kerja ASN di kantor.

Berikut disajikan keadaan barang inventaris kantor kecamatan Sikakap Kondisi Oktober Tahun 2025 :

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Sikakap

No	Jenis Barang	Volume	Satuan/Unit	Kondisi
1.	PC Unit	3	Unit	Baik
2.	Laptop	3	unit	Baik
3.	Lemari Kau	4	buah	KB
4.	AC Spilit	6	unit	RB
5.	Mesin Potong umput	2	unit	RB
6.	Printer	4	unit	Baik
7.	Kursi Kerja	8	buah	Baik
8.	Kursi Plastik	7	buah	KB
9	Meja ½ biro	12	buah	KB
10.	Lemari Filling Cabinet	4	buah	RB
11.	Motor Boat	2	unit	RB
12.	Kuris Kerja Futura	8	buah	Baik
13.	Sofa	2	unit	Baik
14.	Kendaraan Roda Dua	1	Unit	KB

Sumber Bagian Umum dan Kepegawaian Kec.Sikakap

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sikakap

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Sikakap digambarkan berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2020 – 2024 pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kecamatan Sikakap Tahun 2020 – 2024

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD***)	Target NSPK	Target IKK	Target indikator	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-				
				Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)			B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	100	100	100	100	100
2.	Penetapan APB Desa Tepat Waktu			100	100	100	100	100	100	90	90	90	90	90	90	90	96	90	90
3.	Serapan APB Desa diatas 90 persen			100	100	100	100	100	100	90	96	90	96	95	90	95	90	96	95
4.	Penangan Kasus kriminal dikecamatan yang ditangani			100	100	100	100	100	100	89	90	96	90	90	90	90	94	90	90
5.	Aduan yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	90	95	95	90	90	90	90	90	90	90
6.	Nilai LAKIP			B	B	B	B	B	B	B	B	B	BB	BB	B	B	B	BB	BB
7.	Jumlah Inovasi yang diterapkan			1				1	1				-	1				-	1
8.	Persentase capaian kinerja perangkat daerah			100	100	100	100	100	100	96,77	90,96	96	97,78	94,96	95,67	98,14	96,77	97,78	94,96

Sumber: Sekretariat Kecamatan Sikakap

Berdasarkan kinerja pelayanan Kecamatan Sikakap Tahun 2020–2024 secara umum menunjukkan hasil yang baik dan stabil, dengan sebagian besar indikator mendekati atau mencapai target yang ditetapkan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat dari kategori Baik (B) menjadi Amat Baik (A), dan nilai Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga naik dari B menjadi BB, menandakan peningkatan kualitas pelayanan serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Meskipun demikian, beberapa indikator masih belum mencapai target penuh, seperti penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tepat waktu dan penanganan aduan masyarakat, yang masing-masing hanya terealisasi sekitar 90% dari target 100%. Begitu juga dengan penyerapan APB Desa dan penanganan kasus kriminal, yang masih sedikit di bawah target walau menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antar desa serta perbaikan mekanisme tindak lanjut aduan publik.

Secara keseluruhan, capaian kinerja perangkat daerah mencapai lebih dari 94%, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan. Namun demikian, perlu terus didorong pengembangan inovasi pelayanan publik dan peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, agar Kecamatan Sikakap dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan di tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Sikakap, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Sikakap bisa berjalan dengan baik, meskipun ada hal-hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik tetapi secara ekplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan di antaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya,sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di kecamatan.
2. Jumlah personil khususnya ASN yang ada di Kecamatan Sikakap sudah lebih dari cukup, hanya kualitas SDM kurang mumpuni, sehingga jauh dari harapan terhadap hasil kinerja yang di hasilkan. Apalagi pelaksanaan beban kerja terhadap analisa jabatan, sungguh tidak bisa mengakomodir target yang sudah direncanakan, disebabkan SDM yang kurang kompetitif dan berdaia saing, dalam mencapai tujuan pelayanan di kecamatan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sikakap

Kelompok sasaran layanan kecamatan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Berikut beberapa contoh kelompok sasaran layanan kecamatan antara lain:

1. Masyarakat umum: Layanan yang ditujukan untuk masyarakat luas, seperti:
   - Layanan kesehatan;
   - Layanan pendidikan; dan
   - Layanan informasi dan komunikasi.
2. Kelompok rentan: Layanan yang ditujukan untuk kelompok rentan, seperti:
   - Lansia;
   - Anak-anak dan remaja;
   - Penyandang disabilitas; dan
   - Masyarakat miskin atau rentan.

3. Petani dan nelayan: Layanan yang ditujukan untuk petani dan nelayan, seperti:
   - Layanan penyuluhan pertanian;
   - Layanan bantuan benih dan pupuk; dan
   - Layanan pemasaran hasil pertanian.
4. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah): layanan yang ditujukan untuk UMKM, seperti:
   - Layanan pelatihan dan pendampingan;
   - Layanan akses pembiayaan; dan
   - Layanan pemasaran.
5. Masyarakat adat: Layanan yang ditujukan untuk masyarakat adat, seperti:
   - Layanan pelestarian budaya;
   - Layanan pendidikan dan kesadaran masyarakat; dan
   - Layanan bantuan social.
6. Instansi vertikal yakni: kantor-kantor pemerintahan di tingkat kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi khusus, seperti forkopimcam, kantor polisi, kantor pos, dan lain-lain;
7. Organisasi Masyarakat yakni LSM, kelompok swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, dan organisasi lainnya yang beroperasi di wilayah kecamatan;
8. Pihak lain yakni Universitas, lembaga penelitian, dan pihak lain yang memiliki hubungan dengan kegiatan kecamatan

Dalam menentukan kelompok sasaran layanan di kecamatan, perlu dipertimbangkan beberapa faktor, seperti:

1. Kebutuhan dan masalah: Apa kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kecamatan?
2. Prioritas: Apa prioritas layanan yang perlu diberikan kepada masyarakat kecamatan?
3. Sumber daya: Apa sumber daya yang tersedia untuk mendukung layanan yang akan diberikan kepada masyarakat kecamatan.

Dengan menentukan kelompok sasaran layanan kecamatan yang tepat, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sikakap

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan kecamatan Sikakap selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sikakap, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sikakap 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana yang terdapat pada tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sikakap

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik	Penyelesaian pelayanan Masyarakat di kecamatan kurang maksimal	Keterbatasan SDM petugas pelayanan di kecamatan
		Lemahnya koordinasi aparatur desa tentang kebijakan pemerintah daerah
	Lambatnya penyusunan dan Penetapan APBDes	Keterbatasan SDM aparatur pemerintahan desa
		Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan desa tentang kebijakan pemerintah kabupaten
		Terbatasnya anggaran kecamatan dalam melakukan pengawasan

Kecamatan Sikakap menghadapi sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menyebabkan kualitas pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Permasalahan utama yang muncul adalah masih kurang maksimalnya penyelesaian pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) petugas pelayanan yang ada. Jumlah aparatur yang terbatas serta kemampuan teknis yang belum merata mengakibatkan pelaksanaan tugas administrasi, pelayanan perizinan, dan layanan sosial tidak dapat berjalan secara cepat dan efektif. Akibatnya, masyarakat sering mengalami keterlambatan dalam memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.

Selain itu, lemahnya koordinasi antara aparatur desa dengan pihak kecamatan terkait kebijakan pemerintah daerah juga menjadi salah satu permasalahan penting. Aparatur desa belum sepenuhnya memahami dan menindaklanjuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah karena minimnya komunikasi dan pembinaan yang berkelanjutan dari pihak kecamatan. Hal ini menimbulkan ketidaksinkronan antara program pemerintah daerah dengan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa, sehingga tujuan pembangunan daerah menjadi kurang terarah.

Permasalahan lainnya terlihat dari lambatnya proses penyusunan dan penetapan APB Desa. Keterlambatan tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan kapasitas SDM aparatur desa dalam hal perencanaan, penyusunan anggaran, dan pengelolaan keuangan. Kondisi ini berdampak pada tertundanya pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa. Selain itu, pembinaan dan koordinasi aparatur di kecamatan maupun desa terhadap kebijakan pemerintah kabupaten juga masih tergolong lemah. Belum adanya sistem pembinaan rutin, bimbingan teknis, maupun forum komunikasi yang efektif membuat informasi terkait arah kebijakan daerah tidak tersampaikan dengan baik hingga ke tingkat desa.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh kecamatan turut menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap desa. Keterbatasan dana operasional menyebabkan kecamatan sulit melakukan monitoring secara rutin, terutama dengan kondisi geografis wilayah Kepulauan Mentawai yang tersebar dan memerlukan biaya transportasi cukup besar. Dampaknya, kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan program daerah tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Secara keseluruhan, permasalahan pelayanan di Kecamatan Sikakap saling berkaitan satu sama lain. Keterbatasan SDM menjadi akar permasalahan yang memicu lemahnya koordinasi, keterlambatan administrasi, dan rendahnya efektivitas pengawasan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran memperburuk situasi dengan membatasi kemampuan kecamatan dalam melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap desa. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kualitas pelayanan publik, rendahnya akuntabilitas, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintahan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan gambaran permasalahan-permasalahan yang dikedepankan untuk diatasi dan berdampak luas. Suatu kondisi atau situasi yang menjadi isu strategis apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau menghilangkan peluang besar untuk meningkatnya pelayanan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Sebuah isu strategis dapat dilihat dari:

1. Apakah isu tersebut sedang menjadi perhatian.
2. Apakah isu tersebut mendesak.

3. Apakah isu tersebut sesuai dengan kebutuhan publik.
4. Apakah isu tersebut membantu kebutuhan publik.
5. Apakah isu tersebut sesuai dengan visi dan misi.
6. Apakah isu tersebut melibatkan stakeholder luas.
7. Apakah isu strategis tersebut aman dari dampak dari luar.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas maka isu strategis Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029 adalah peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat, dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Isu strategis tersebut terlihat dalam tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Isu Strategis Kecamatan Sikakap

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KHLS yang relevan dengan PD	Isu Dinasmis Yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Sumber Daya Alam Pertanian dan Perikanan	1. Keterbatasan Sumber Daya manusia 2. Kurangnya Koordinasi 3. Keterlibatan Masyarakat yang Kurang	1. Pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi di kecamatan 2. Kesadaran Masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencacatan sipil 3. Koordinasi antar Lembaga vertical,horizontal dan pemerintahan desa 4. Partisipasi	1. Transformasi Birokrasi 2. Penyerapan anggaran 3. Koordinasi dan Pelaksanaan	1. Pemanfaatan Teknologi Digital 2. Partisipasi Masyarakat 3. Inovasi dan Kreativitas	1. Pengelolaan Sumber daya Alam 2. Pengembangan Ekonomi Regional 3. Pengelolaan Lingkungan 4. Kwalitas Pelayanan Publik	1. Pelayanan Publik yang belum prima

Kecamatan Sikakap memiliki potensi sumber daya alam di bidang pertanian dan perikanan yang cukup besar dan berpeluang untuk dikembangkan sebagai sektor unggulan daerah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat karena masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik di tingkat kecamatan dan desa. Permasalahan utama yang dihadapi perangkat daerah meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan. Keterbatasan kapasitas aparatur menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan belum berjalan optimal. Hal ini tercermin dari pelayanan kepada masyarakat yang belum sepenuhnya sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu, koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal, dan pemerintahan desa masih lemah, sehingga kebijakan dan program daerah sering kali tidak berjalan sinkron di tingkat lapangan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan kegiatan pembangunan juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan inklusif.

Secara global dan nasional, isu ini sejalan dengan tuntutan transformasi birokrasi yang menekankan pada peningkatan profesionalisme aparatur, efisiensi pengelolaan anggaran, serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan program. Sedangkan pada tingkat regional, isu ini berkaitan erat dengan pentingnya pemanfaatan teknologi digital, peningkatan inovasi dan kreativitas aparatur, serta dorongan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, maka isu strategis Kecamatan Sikakap ditetapkan sebagai "Pelayanan Publik yang Belum Prima." Isu ini menuntut adanya langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dan desa, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung program pembangunan. Selain itu, optimalisasi potensi daerah di sektor pertanian dan perikanan perlu diarahkan pada pengelolaan yang berkelanjutan dan berbasis pelayanan publik yang berkualitas. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap perubahan global serta kebutuhan masyarakat lokal di daerah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah berjalan sesuai dengan harapan. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani".

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran menggambarkan hal dan target yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya, sasaran yang ditetapkan diharapkan memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Kecamatan Sikakap sangat diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025 – 2029.

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Sikakap Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

a. meningkatkan kualitas layanan pemerintahan umum kecamatan;
b. fasilitasi pelaksanaan APB Desa;
c. forum koordinasi Desa;
d. fasilitasi forum pimpinan Kecamatan;
e. meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan;
f. meningkatkan pengendalian masyarakat;
g. menyelenggarakan layanan di Kecamatan; dan
h. meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran Kecamatan Sikakap Tahun 2025 – 2029 beserta indikator disajikan pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Sikakap

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	*Baseline* 2024	Target Tahun					Ket
						2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif, handal, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani		Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	B	B	B	B	A	A	
		Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan di kecamatan	Kecepatan waktu pelayanan	waktu	100	100	100	100	100	100	
			Persentase serapan APB Desa di atas 90%	persen	94	97	98	98	99	100	
		Meningkatnya kualitas perencanaaan pembangunan di kecamatan	Indeks Kualitas Perencanaan Kecamatan	indeks	B	B	B	B	B	B	
		Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	nilai	BB	B	B	B	B	B	
			Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah inovasi	1	1	1	1	1	1	
			Capaian kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	

3.3 Strategi Kecamatan Sikakap Dalam Mencapai Tujuan Tahun 2025-2029.

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, sehingga sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang mendukung dan menghambat proses pencapaiannya. Untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal agar diperoleh formasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Sikakap.

Strategi demi mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif, dalam menerapkan langkah-langkah strategi dalam menyusun program-program indikatif untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran di dalam Renstra diperlukan strategi Kecamatan Sikakap untuk menetapkan strategis sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perumusan Tujuan Sasaran dan Strategis Kecamatan Sikakap

Tujuan	Sasaran	Strategis	Lokasi
1	2	3	4
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Sikakap dalam melaksanakan tugas pelayanan	1. Penyediaan fasilitas pendukung kerja di kecamatan 2. Penataan SDM yang berkompeten pada bidang urusan, sehingga pencapaian target bisa terwujud dan tercapai	Kecamatan Sikakap
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1.Pengembangan sektor primer berbasis kawasan dan Komoditas Unggulan 2.Pengembangan Kapasitas Koperasi Merah Putih di Wilayah Pedesaan	Kecamatan Sikakap Desa Taikako,Matobe dan Desa Sikakap
	Meningkatnya Investasi,Stabiltasi Ekonomi dan Nilai Tambah/Hilirisasi	1.Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Merah Putih	Desa Sikakap,Desa Taikako dan Matobe
	Meningkatnya desa mandiri	1. Pembangunan pusat pertumbuhan baru desa mandiri. 2. Mendorong dan fasilitasi terbentuknya desa wisata yang profesional 3. Pengadaan tanah	Kecamatan Sikakap
	Memperkuat tatanan kehidupan Sosial, Budaya Mentawai	1.Pengakuan dan Pelestarian Sosial dan Budaya 2.penguatan kehidupan sosial budaya dalam UMA 3.Internalisasi nilai-nilai budaya pada generasi muda	Semua Sekolah di Kecamatan Sikakap
	Pembangunan Kehidupan Keluarga dan Masyarakat yang inklusif dan berwawasan lingkungan	1. Pendampingan dan Pemberdayaan UMA dalam pemanfaatan kawasan adat (perhutanan sosial) 2. Perlindungan Perempuan dan Anak 3. Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana	Kecamatan Sikakap
	Meningkatnya pemanfaatan ruang yang mengedepankan kualitas lingkungan	1. Revisi pemanfaatan ruang wilayah (RTRW,RDTR/RRTR) 2. Ijin lingkungan Terintegrasi 3. Regulasi ruang terbuka hijau bagi investor 4. Pengelolaan sanitasi berbasis lingkungan	Kecamatan Sikakap

Tujuan	Sasaran	Strategis	Lokasi
	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma dan hukum dan hukum adat	1. Penguatan forum umat beragama 2. Penguatan peran tokoh budaya dan tokoh masyarakat 3. Penguatan peran forkopimcam 4. Pemberantasan peredaran dan pemakaian Narkoba	Kecamatan Sikakap
	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Penguatan sistem keamanan lingkungan 2. Penguatan fungsional forkopimcam (linmas,babinsa dan babinkamtibmas)	Kecamatan Sikakap
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang handal, transparan dan akuntabel	1. Transpormasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Meritokrasi dalam pemerintahan 3. Pengendalian monitoring dan evaluasi pembangunan 4. Manajemen resiko 5. Peningkatan kualitas SDM 6. Penyederhanaan Prosedur dan Regulasi 7. Kolaborasi dan partisipasi 8. Revolusi mental 9. Super Apps dan Aplikasi berbasis Cloud 10. Pembentukan budaya dan sistem anti korupsi 11. Perencanaan penganggaran terintegrasi	Kecamatan sikakap
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima,adaftif,inovatif dan melayani	1. Pelayanan publik berbasis dgital 2. Penyediaan flatform online pelayanan masyarakat sebagai sarana evaluasi,koreksi,pengaduan dari masyarakat 3. Pengelolaan aset daerah 4. Inovasi pelayanan publik 5. Penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik 6. Standar pelayanan, transparansi,dan akuntabilitasi	Kecamatan Sikakap

3.4. Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029

Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan SDM dalam penguatan layanan dalam pemerintahan di kecamatan	Penguatan Infrastruktur digitalisasi pelayanan	Optimalisasi dalam penerapan digitalisasi	Meningkatkan kualitas pelayanan dengan penguatan jangkauan layanan digital	Penerapan transformasi digital dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sikakap

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan PermenPAN-RB tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik di seluruh wilayah kabupaten	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan standar pelayanan dan survei kepuasan secara berkala	
2	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil	Memperkuat pengelolaan kinerja kecamatan melalui peningkatan nilai LAKIP secara konsisten setiap tahun	
3	Pengelolaan keuangan desa	Meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa	Mendorong peningkatan serapan APBDes di atas 90 persen setiap tahun melalui pembinaan dan evaluasi rutin terhadap aparatur desa	
4	Penerapan prinsip perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah	Meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah	Menjamin kepatuhan 100% perangkat kecamatan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tahunan	
5	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan	Memperkuat peran kecamatan sebagai penyelenggara koordinasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat	Memastikan capaian kinerja perangkat kecamatan mencapai 100% setiap tahun melalui pengawasan, pembinaan, dan koordinasi lintas sektor	

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program kegiatan Kecamatan Sikakap yang direncanakan untuk periode tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Rencana program yang dilaksanakan Kecamatan Sikakap selama tahun 2025-2029 antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dari uraian diatas dapat di jelaskan pada tabel program di bawah ini :

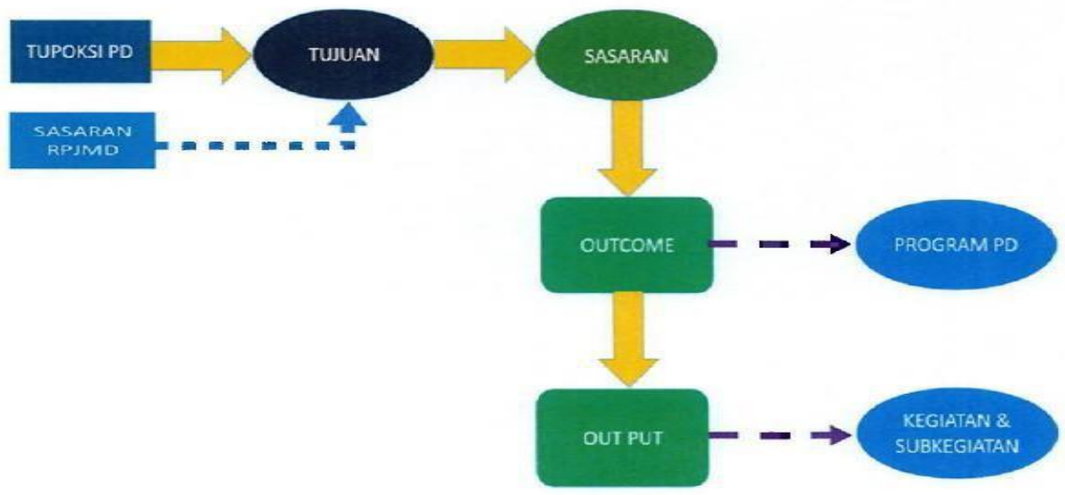
Tabel 4.1
Program Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima, Adaptif, Inovatif dan Melayani	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik	Nilai Indek Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				Persentase penetapan APBDesa tepat waktu	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
				Persentase serapan APBDes diatas 90 persen	
	Fasilitasi Pelaksanaan APBDesa			Jumlah desa yang difasilitasi	
	Forum Koordinasi desa			Jumlah forum/koordinasi yang dilakukan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Meningkatnya trantibmas di kecamatan	Meningkatnya kualitas kamtibmas	Jumlah kasus/kejadian yang ditindaklanjuti/diselesaikan	Penanganan kasus kriminal dikecamatan yang tertangani	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Meningkatnya pengendalian layanan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat		Persentase aduan yang ditindaklanjuti	
	Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah		Nilai LAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Ko
				Inovasi	
				Persentase capaian kinerja perangkat daerah	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program
1	2	3	4	5	6
				Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan, dan pelaporan tugas layanan	ta

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sikakap merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis Renstra Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Sikakap juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sikakap serta teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sikakap dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra



Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan.

Kegiatan indikatif Kecamatan Sikakap tahun 2025-2029 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sbagai syarat tercapainya tujuan kecamatan Sikakap ada dalam tabel 4.2:

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Sikakap

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100%	100 per sen	2.681.402.684	100 per sen	2.619.712.291	100%	2.674.343.577	100%	2.712.734.424	100%	2.740.640.826	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	100%	100%	2.681.402.684	100%	2.619.712.291	100%	2.674.343.577	100%	2.712.734.424	100%	2.740.640.826	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	12 kali	21.550.000	12 kali	22.850.000	12 kali	24.550.000	12 kali	26.750.000	12 kali	28.350.000	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas ASN Perangkat Daerah yang diterima	100%	100%	2.701.010.789	100%	2.710.045.976	100%	2.714.650.203	100%	2.717.034.512	100%	2.735.500.326	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	100%	25 orang	2.506.956.076	26 orang	2.510.956.078	27 orang	2.515.556.245	28 orang	2.520.204.124	28 orang	2.522.234.162	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	35 orang	190.000.450	36 orang	190.000.450	36 orang	190.750.000	36 orang	190.500.000	36	190.750.000	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	100%	100%	210.100.450	100%	215.200.750	100%	220.300.900	100%	225.400.750	100%	230.600.300	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang tersedia	100%	7 paket	8.660.000	10 paket	8.800.000	10 paket	8.800.000	10 paket	8.800.000	10 paket	8.800.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	100%	1 paket	18.004.500	1 paket	25.350.000	2 paket	30.500.000	2 paket	35.800.000	3 paket	40.850.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket dan bahan Logistik Kantor yang tersedia	100%	7 paket	45.750.000	7 paket	48.800.000	7 paket	49.750.000	9 paket	55.600.000	8 paket	60.750.000	
	Penyelenggaran Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi & Konsultasi SKPD	100%	6 laporan	99.800.000	6 laporan	100.000.000	6 laporan	103.700.000	6 laporan	105.850.000	6 laporan	110.000.000	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	210.350.000	100%	212.250.000	100%	215.500.000	100%	218.600.000	100%	220.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air &	100%	12 bulan	9.000.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	9.000.000	

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Listrik yang tersedia												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penerima Hoorarium Pelayanan Umum Kantor	100%	10 orang	172.272.000	10 orang	172.272.000	10 orang	172.272.000	10 orang	172.272.000	10 orang	172.272.000	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	100%	100%	11.000.000	100%	11.000.000		11.000.000	100%	11.000.000	100%	11.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah pemeliharaadan biaya pemeliharan dan perizinan kendaraan operasional yang disediakan	100%	5 unit	11.000.000	5 unit	11.000.000	5 unit	11.000.000	5 unit	11.000.000	5 unit	11.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Aduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	70.287.647	3 desa	68.670.556	3 desa	70.102.607	3 desa	71.108.947	3 desa	71.840.458	
	Meningkatnya Pengendalian Layanan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	3 desa	19.400.000	3 desa	19.400.000	3 desa	19.4000.000	3 desa	19.4000.000	3 desa	19.4000.000	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	100%	3 desa	19.400.000	3 desa	19.400.000	3 desa	19.400.000	3 desa	19.400.000	3 desa	19.400.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan ditingkat kecamatan dan desa	100%	100%	66.531.677	100%	68.318.729	100%	69.743.442	100%	70.744.626	100%	71.472.389	
	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	100%	3 desa	66.531.677	3 desa	68.318.729	3 desa	69.743.442	3 desa	70.744.626	3 desa	71.472.389	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	100%	3 desa	42.000.000	3 desa	44.000.000	3 desa	46.000.000	3 desa	48.000.000	3 desa	50.000.000	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	3 desa	24.000.000	3 desa	26.000.000	3 desa	28.500.000	3 desa	30.000.000	3 desa	32.000.000	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelesaian konflik diwilayah kecamatan yang ditangani/ diselasaikan	100%	100%	109.829.233	100%	104.144.403	100%	106.316.223	100%	107.842.418	100%	108.951.813	
	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan	100%	95%	109.829.233	95%	104.144.403	95%	106.316.223	95%	107.842.418	95%	108.951.813	

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	di kecamatan	urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah												
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang undangdasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang undangdasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	100%	100 orang	95.749.000	100 orang	95.749.000	100 orang	95.749.000	100 orang	95.749.000	100 orang	95.749.000	
	Pelaksanaan tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Tugas Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	1 laporan	13.616.000	1 laporan	13.616.000	1 laporan	13.616.000	1 laporan	13.616.000	1 laporan	13.616.000	
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase laporan pembinaan dan pengawasan keuangan desa	100%	100%	73.219.488	100%	99.978.627	100%	102.063.574	100%	103.528.721	100%	104.593.740	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Penetapan PBDes tepat waktu	100%	3 desa	73.219.488	3 desa	99.978.627	3 desa	102.063.574	3 desa	103.528.721	3 desa	104.593.740	
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Persentase serapan APBDes di atas 90 persen	100%	3 desa	73.219.488	3 desa	99.978.627	3 desa	102.063.574	3 desa	103.528.721	3 desa	104.593.740	
		Jumlah	100%		3.350.977.514		3.397.772.155		3.421.206.819		3.446.069.845		3.469.364.902	

Berdasarkan tabel 4.2 di atas rencana program, kegiatan, dan pendanaan Kecamatan Sikakap tahun 2026–2030 menunjukkan arah kebijakan yang konsisten dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Total pagu indikatif mengalami peningkatan bertahap dari Rp3,479 miliar pada tahun dasar 2024 menjadi Rp3,500 miliar pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah kecamatan untuk menjaga kesinambungan operasional, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat fungsi koordinatif dan pembinaan terhadap desa di wilayahnya.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah menjadi komponen dengan alokasi anggaran terbesar, mencapai lebih dari 90 persen dari total belanja kecamatan setiap tahun. Fokus utama program ini adalah pada peningkatan kepatuhan terhadap perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah, penyediaan gaji dan tunjangan ASN, serta pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran seperti instalasi listrik, logistik, dan peralatan kerja. Seluruh indikator kinerja pada program ini menunjukkan capaian 100 persen setiap tahun, menggambarkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan tugas administratif serta efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Selain itu, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diarahkan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan. Meskipun anggarannya relatif kecil, yaitu sekitar Rp18–19 juta per tahun, kegiatan ini memiliki nilai strategis karena berfokus pada optimalisasi pelayanan dasar serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat di tiga desa binaan. Sementara itu, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan mendapat dukungan anggaran sekitar Rp63 juta per tahun, dengan kegiatan utama berupa koordinasi pemberdayaan desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, dan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan di tingkat kecamatan.

Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum difokuskan pada peningkatan ketahanan wilayah melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), dan penanganan konflik di tingkat lokal. Dengan capaian indikator 100 persen setiap tahun dan pagu sekitar Rp109 juta, program ini memperkuat peran kecamatan sebagai ujung tombak stabilitas dan pembinaan nilai-nilai kebangsaan. Adapun program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, meski memiliki pagu yang lebih kecil (sekitar Rp25–36 juta per tahun), memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas keuangan desa dan pendayagunaan aset secara tertib dan transparan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan Kecamatan Sikakap mencerminkan pengelolaan yang stabil, efisien, dan berorientasi pada kinerja. Hampir seluruh indikator mempertahankan capaian 100 persen, yang menandakan kuatnya kepatuhan administratif dan efektivitas pelaksanaan kegiatan rutin pemerintahan. Namun demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana menggeser orientasi pembangunan dari sekadar kepatuhan prosedural menuju inovasi pelayanan publik yang berbasis digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, dan penguatan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan. Dengan demikian, Kecamatan Sikakap diharapkan dapat bertransformasi menjadi pemerintahan yang tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang lebih besar, yang terdiri dari dari satu atau beberapa jenis belanja untuk mencapai keluaran dan target yang telah ditetapkan dalam kegiatan. Terkait dengan rencana sub kegiatan yang direncanakan dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

No	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	target	Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2026	2027	2028	2029	2030
1	*Evaluasi kinerja Perangkat Daerah*	Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja	12 kali	21.550.000	22.850.000	24.550.000	26.750.000	28.350.000
2	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas ASN perangkat daerah yang diterima	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	27 orang	2.506.956.076	2.510.956.078	2.515.556.245	2.520.204.124	2.522.234.162
3	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas ASN perangkat daerah yang diterima	Jumlah Dokumen penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35 orang	190.000.450	190.000.450	190.750.000	190.500.000	190.750.000
4	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor*	Persentase Kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas ASN perangkat daerah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	7 paket	8.660.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
5	*Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor*	Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas ASN Perangkat Daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 paket	18.004.500	25.350.000	30.500.000	35.800.000	40.850.000
6	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas ASN Perangkat Daerah	Jumlah paket dan bahan logistik kantor yang tersedia	8 paket	45.750.000	48.800.000	49.750.000	55.600.000	60.750.000
7	*Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas ASN Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	99.800.000	100.000.000	103.700.000	105.850.000	110.000.000
8	*Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik*	Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya listrik	12 bulan	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
9	*Penyediaan*	Persentase kepatuhan penyusunan	Jumlah penerima	10	172.27	172.27	172.27	172.27	172.27

	Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	Honorarium Pelayanan Umum Kantor	orang	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan*	Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	Jumlah pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional yang disediakan	5 unit	11.000.000.	11.000.000.	11.000.000.	11.000.000.	11.000.000.
11	*Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan*	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	3 desa	19.400.000	19.400.000	19.400.000	19.400.000	19.400.000
12	*Peningkatan partisipasi masyarakat forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa*	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	3 desa	42.000.000	44.000.000	46.000.000	48.000.000	50.000.000
13	*Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan*	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	3 desa	24.000.000	26.000.000	28.500.000	30.000.000	32.000.000
14	*Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan pancasila,pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pelestarian bhineka tungga ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan NKRI*	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila dan UUD 1945, pelestarian bhineka tunggal ika	100 orang	95.749.000	95.749.000	95.749.000	95.749.000	95.749.000

15	*Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 laporan	13.615.000	13.615.000	13.615.000	13.615.000	13.615.000
16	*Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa*	Persentase penetapan APBDes tepat waktu	Persentase serapan APBDes di atas 90 persen	3 desa	73.219.488	99.978.627	102.063.574	103.528.721	104.593.740

Dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, seperti yang tertuang dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah		
		Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	
		Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas ASN Perangkat Daerah yang diterima	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	
		Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	
		Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang tersedia	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	
		Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	
		Jumlah Paket dan bahan Logistik Kantor yang tersedia	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi & Konsultasi SKPD	*Penyelenggaran Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	
		Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik yang tersedia	*Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & listrik*	
		Jumlah Penerima Hoorarium Pelayanan Umum Kantor	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	
		Persentase kepatuhan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
		Jumlah pemeliharaan dan biaya pemeliharaan dan perizinan	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya*	

		kendaraan operasional yang disediakan	*pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan*	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pengendalian Layanan Masyarakat		
		Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	
		Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	*Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan*	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan		
		Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	
		Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum di kecamatan	*Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa*	
		Jumlah Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	*Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan*	
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan umum dikecamatan		
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	
		Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang undangdasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia	*Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang undangdasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia*	
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa		
		Persentase penetapan APBdes tepat waktu	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengwasan Pemerintahan Desa	
		Persentase Serapan APBDes diatas 90 persen	*Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa*	

Pada tabel 4.3 daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan Daerah Kecamatan Sikakap menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan kecamatan difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai wujud dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah. Struktur program yang disusun menunjukkan kesinambungan antara fungsi administratif, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat, dengan pendekatan yang menekankan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Program pertama, yaitu program penunjang urusan pemerintahan Daerah , menjadi fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Subkegiatan yang termasuk di dalamnya—seperti perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan, dan penyediaan sarana-prasarana kantor—bertujuan memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Fokus outcome berupa peningkatan persentase kepatuhan dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah menggambarkan komitmen terhadap peningkatan disiplin administrasi dan kualitas tata kelola. Subkegiatan lain seperti penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan perlengkapan kantor, logistik, serta pemeliharaan kendaraan dinas turut mendukung keberlangsungan fungsi organisasi pemerintahan. Program ini dapat dikategorikan sebagai program backbone yang menopang efektivitas pelaksanaan program prioritas lainnya.

Selanjutnya, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik diarahkan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan kecamatan dan memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari kabupaten kepada camat berjalan optimal. Subkegiatan yang mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan dan kewenangan lain yang dilimpahkan menunjukkan peran strategis camat sebagai perpanjangan tangan bupati dalam memberikan pelayanan publik yang dekat dengan masyarakat. Program ini berperan langsung dalam memperkuat kualitas layanan dasar, efisiensi birokrasi di tingkat lokal, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Program ketiga, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Outcome berupa peningkatan persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan di tingkat kecamatan dan desa menjadi indikator utama keberhasilan tata kelola partisipatif. Subkegiatan seperti koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, dan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan di wilayah kecamatan menunjukkan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis komunitas. Dengan demikian, kecamatan berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat desa dalam memastikan aspirasi lokal terintegrasi dalam kebijakan pembangunan.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah dan memperkuat wawasan kebangsaan. Subkegiatan seperti pembinaan ketahanan nasional, pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), serta penyelesaian konflik di tingkat lokal berorientasi pada peningkatan keamanan, ketertiban, dan ketahanan sosial masyarakat. Outcome berupa persentase penyelesaian konflik dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah menunjukkan peran aktif kecamatan dalam menjaga harmonisasi sosial serta memperkuat nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika di wilayahnya.Program terakhir, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, menitikberatkan pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan aset desa. Melalui

sub kegiatan fasilitasi, rekomendasi, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan, kecamatan berperan memastikan setiap desa melaksanakan tata kelola keuangan secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan perundangan. Outcome berupa persentase laporan pembinaan dan pengawasan keuangan desa memperlihatkan fokus pada transparansi, integritas, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan sumber daya lokal.

Secara keseluruhan, struktur program dan subkegiatan prioritas Kecamatan Sikakap menggambarkan desain kebijakan yang komprehensif—menggabungkan dimensi administratif, pelayanan, partisipatif, dan pengawasan. Keterpaduan antarprogram menunjukkan bahwa pembangunan kecamatan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan prosedural, tetapi juga berusaha memperkuat efektivitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, agar hasilnya lebih berdampak, Kecamatan Sikakap perlu mengarahkan fokus pada inovasi pelayanan publik berbasis teknologi, penguatan kapasitas aparatur, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Dengan demikian, kecamatan dapat menjadi simpul tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berdaya saing di tingkat daerah.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Sikakap yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati, sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan wujud organisasi.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di kecamatan Sikakap, diperlukan penetapan Indikator Kinerja dalam bentuk penetapan Indikator Kinerja Program Pembangunan di Kecamatan Sikakap yang memberikan kontribusi terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Kecamatan Sikakap selama 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sikakap

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNNYA						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	B	B	B	B	A	A	
2	Kecepatan Waktu Pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase serapan APBDes diatas 90 persen	persen	95	97	98	98	99	100	
4	Indek Kualitas Perencanaan Kecamatan	indeks	B	B	B	B	B	B	
5	Nilai LAKIP	Nilai	B	B	B	B	B	B	
6	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Jumlah Inovasi	1	1	1	1	1	1	
7	Capaian kinerja perangkat daerah	persen	100	100	100	100	100	100	

Berdasarkan Tabel Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sikakap Tahun 2025–2030, terlihat bahwa kinerja pemerintahan kecamatan menunjukkan peningkatan yang konsisten dan terarah. Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat dari kategori “B” pada tahun 2025–2028 menjadi “A” pada tahun 2029–2030, mencerminkan perbaikan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Persentase serapan APBDes di atas 90 persen juga mengalami peningkatan dari 95 persen pada tahun 2025 hingga mencapai 100 persen pada tahun 2030, menandakan semakin optimalnya pengelolaan keuangan desa. Nilai LAKIP menunjukkan tren positif dari predikat “B” menjadi “A”, yang menandakan peningkatan akuntabilitas dan kinerja berbasis hasil. Sementara itu, capaian kinerja perangkat daerah dan kepatuhan terhadap penyusunan perencanaan serta pelaporan tugas layanan konsisten mencapai 100 persen setiap tahun. Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Sikakap berada pada jalur yang baik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu organisasi, unit kerja, atau program dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. IKK berfungsi sebagai tolok ukur kinerja yang paling penting dan berpengaruh terhadap pencapaian visi, misi, serta target pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan daerah, IKK digunakan untuk mengukur capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap hasil yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan, seperti Renstra atau Renja . Indikator ini bersifat terukur, relevan, dan dapat dibandingkan antarperiode, sehingga dapat menunjukkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Dengan demikian, IKK menjadi instrumen penting dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena memberikan gambaran yang obyektif mengenai seberapa jauh program dan kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai hasil yang diharapkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. IKK Kecamatan Sikakap pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Sikakap

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase aduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	Persen	65	68	68	68	68	68	
3	Persentase konflik di wilayah kecamatan yang ditangani/ diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penetapan APBDes tepat waktu	Persen	75	80	82	83	85	90	
5	Persentase serapan APBDes di atas 90 persen	Persen	75	80	82	83	85	90	

BAB V
PENUTUP

Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Sikakap selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah yang terpilih, direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian Program Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, pelaksanaan Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029 sangat penting guna mendukung pencapaian target dan tujuan perencanaan Pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan Renstra yang merupakan penjabaran dari visi, misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, untuk masa jabatan tahun 2025-2029. Dimana Program ini mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Renstra Kecamatan Sikakap dan RPJMD.

Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029, merupakan wujud langka pencapaian penjabaran dari tujuan dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tanggal 27 November 2024 dan sudah dilantik secara definitif pada tanggal 20 Februari 2025. Renstra Kecamatan Sikakap ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sikakap, dengan memperhatikan kaidah sebagai berikut:

1. Kecamatan Sikakap berkewajiban melaksanakan program dalam Renstra Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja OPD) yang selanjutnya dilaksnakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Kecamatan Sikakap berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Tahun 2025-2029;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja Tahunan, Renstra Kecamatan Sikakap Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan maupun lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2025-2029 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Sikakap;
5. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
6. RKPD menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang disusun dengan pendeketan berbasis kenerja;
7. Renja OPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD);
8. Pengelolaan risiko dalam perencanaan pembangunan yang dijalankan guna antisipasi terhadap perubahan/dinamika serta memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menghadapi ketidakpstian guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Manajemen Resiko dilaksanakan sebagai bentuk kendali untuk mengawal proses perencanaan sesuai dengan tahapan dan memainkan peran penting untuk memastikan keberhasilan dan konsistensi Rencana Pembangunan Daerah:

a. mendukung pencapaian tujuan guna membantu perangkat daerah mencapai tujuan yang telah ditetapkan
b. meningkatkan kualitas pelayanan dengan memastikan pelayanan kepada msyarakat dapat berjalan optimal
c. membangun budaya sadar resiko dalam menumbuhkan pemahaman pentingnya manajemen resiko bagi seluruh pegawai.
d. Meningkatkan akuntabilitas dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan resiko dilingkungan pemerintah daerah.

9. Dalam menyajikan data informasi terkait perangkat daerah di perlukan cara penyajian data informasi sebagai berikut :
   a. Memperkuat kualitas perencanaan Pembangunan dengan data yang akurat, terpadu, dapat diakses guna menghasilkan perencanaan yang baik sesuai kebutuhan riil di kecamatan sikakap;
   b. Meningkatkan akurasi dan kendala data guna memastikan data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penyusunan renstra Kecamatan yang bersifat akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai standar yang ditetapkan;
   c. Mendukung pengendalian dan evaluasi kinerja dengan mempedomani satu data terpadu berdasarkan monitoring, pengendalian dan evaluasi pencapaian program dan kegiatan Pembangunan secara sistematis;
   d. Tata Kelola data yang terstandarisasi akan mempermudah kolaborasi dan berbagai data antara unit kerja kecamatan dengan instansi vertical dan horizontal lainnya;
   e. Proses perencanaan Pembangunan akan lebih transparan, sehingga Masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif;
   f. Dengan fondasi data yang akurat, Pembangunan dapat dilakukan secara lebih terencana dan berkelanjutan, yang dapat mencapai prioritas Pembangunan nasional di Tingkat kecamatan.

Penyusunan Rencana Strategis ini belum sempurna, untuk itu diharapkan saran dan masukan, agar kedepannya Renstra Kecamatan Sikakap akan menjadi lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RINTO WARDANA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI